

Penguatan Strategi Bisnis dan Sinergi, Mendorong Peningkatan Kualitas Daya Saing UMKM

*Strengthening Business Strategies and Synergies,
Encouraging the Competitiveness
of MSMEs Quality*



2021

Laporan Tahunan / Annual Report
PT Permodalan Nasional Madani



2021

Penguatan Strategi Bisnis dan Sinergi, Mendorong Peningkatan Kualitas Daya Saing UMKM

*Strengthening Business Strategies and Synergies,
Encouraging The Competitiveness of MSMEs Quality*

Sebagai BUMN yang mengemban tugas khusus memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), PT Permodalan Nasional Madani senantiasa menerapkan strategi bisnis dan sinergi yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas daya saing UMKM. Untuk merealisasikan upaya Pemerintah dalam meningkatkan tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakat, PNM memfokuskan jangkauan nasabahnya kepada kalangan perempuan prasejahtera melalui program PNM Mekaar dan ULaMM. PNM bekerjasama dan bersinergi dengan BUMN lain dan lembaga donor untuk mengembangkan program-program kemitraan serta melakukan aktivitas pengembangan kapasitas usaha UMKM.

Terbentuknya Holding Ultra Mikro pada tahun 2021, yang terdiri dari 3 (tiga) entitas BUMN yakni, BRI selaku induk holding, Pegadaian dan PNM akan meningkatkan aksesibilitas pelayanan keuangan segmen ultra mikro. Dengan demikian, pemberdayaan usaha ultra mikro akan semakin masif dan kompetitif. Hal tersebut dikarenakan dengan integrasi, bunga pembiayaan akan menjadi lebih efisien dan selanjutnya pemberdayaan yang dilakukan perusahaan bisa lebih masif. Di samping itu, integrasi data pun akan membuat pemberdayaan UMKM menjadi lebih kuat, khususnya dalam mendorong segmen usaha ultra mikro naik kelas. Kesempatan pelaku usaha ultra mikro berintegrasi dengan pelaku usaha kecil, menengah hingga komersial akan lebih terbuka. Terbentuknya holding ultra mikro merupakan bentuk strategi bisnis dan sinergi yang akan dapat mendorong peningkatan kualitas daya saing UMKM.

As a State-owned Enterprise that has a special task of empowering Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives (UMKMK), PT Permodalan Nasional Madani always implements business strategies and synergies aimed at increasing the competitiveness of SMEs. To realize the Government's efforts to increase the level of equity in community welfare, PNM focuses its customer outreach to underprivileged women through the PNM Mekaar and ULaMM programs. PNM cooperates and synergizes with other SOEs and donor institutions to develop partnership programs and carry out MSME business capacity development activities.

The formation of the Ultra Micro Holding in 2021, which consisted of 3 (three) SOE entities namely, BRI as the holding parent, Pegadaian and PNM would increase the accessibility of financial services for the ultra micro segment. Thus, the empowerment of ultra micro businesses could be more massive and competitive. This was because with integration, the financing interest could become more efficient, and furthermore the empowerment carried out by the company could be more massive. In addition, data integration also made the empowerment of MSMEs stronger, especially in encouraging the ultra-micro business segment to advance to class. The opportunity for ultra micro business actors to integrate with small, medium to commercial business actors could be more open. The formation of an ultra micro holding became a form of business strategy and synergy that could be able to encourage the improvement of the competitiveness of MSMEs.

Kesinambungan Tema

Theme Sustainability



Memberi Manfaat Nyata Bagi UMKM dan Ultra Mikro sebagai Salah Satu Tulang Punggung Perekonomian Indonesia

2020

Providing Real Benefits to MSMEs and Ultra Micro as One of the Backbone of the Indonesian Economy

Komitmen PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM untuk tetap melakukan pemberdayaan UMK di tengah kondisi ekonomi saat ini mulai menunjukkan hasil yang baik sejak triwulan III-2020 dengan banyaknya usaha nasabah mulai pulih bangkit dari perlambatan ekonomi atas dampak wabah COVID-19. Relaksasi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah PNM Mekaar diharapkan dapat membantu daya usaha nasabah agar tetap berjalan dan bisa naik kelas dan kepada nasabah PNM ULaMM diharapkan dapat membantu agar usaha mereka dapat bertahan dan berkembang di masa mendatang.

Pada akhir semester II-2020 total penyaluran pembiayaan PNM Mekaar tercatat sebesar Rp24,35 triliun dengan jumlah nasabah aktif mencapai 7.802.806 nasabah sementara penyaluran pembiayaan PNM ULaMM mencapai Rp2,51 triliun. Komitmen pemerintah dalam pemberdayaan UMK telah direalisasikan melalui penambahan Penyertaan Modal Negara sebesar Rp1 triliun dengan sumber dana APBN Tahun 2020 yang telah diterima PNM pada akhir Juli 2020 dan Penyertaan Modal Negara sebesar Rp1,5 triliun dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang diterima pada Desember 2020. Komitmen pemerintah juga ditunjukkan melalui pemberian bantuan subsidi bunga yang telah diterima perusahaan sebesar Rp1,03 triliun. Selanjutnya masih dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional, melalui program Bantuan Produktif Usaha Mikro sebanyak 4.179.185 nasabah PNM Mekaar menerima bantuan dengan total nilai sebesar Rp10,03 triliun. Dalam meringankan beban nasabah, PNM juga masih memberikan relaksasi berupa restruktur pembiayaan kepada nasabah terdampak yang pada akhir Desember 2020 jumlahnya sebanyak 251 ribu nasabah dengan nilai baki debit sebesar Rp3,38 triliun.

Pada periode Januari hingga Desember 2020 perusahaan telah berhasil menyelenggarakan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas usaha dengan total mencapai 5.847 pelatihan kepada 157.951 pelaku UMK. Dengan dasar kinerja tahun 2020 ini dan dukungan para pemangku kepentingan maka PNM akan terus berupaya melaksanakan pemberdayaan UMK untuk memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional sebagai salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia.

The commitment of PT Permodalan Nasional Madani (Persero) or PNM to continue to empower MSEs in the midst of current economic conditions began to show good results since the third quarter of 2020 with many customer businesses starting to recover from the economic slowdown due to the impact of the COVID-19 outbreak. The financing relaxation given to PNM Mekaar customers is expected to help customers' business power to keep going and be able to move up in class, and to PNM ULaMM customers it is hoped that it can help their businesses to survive and develop in the future.

At the end of semester II-2020, total PNM Mekaar financing disbursement was recorded at IDR24.35 trillion with the number of active customers reaching 7,802,806 customers while PNM ULaMM financing disbursement reached IDR2.51 trillion. The government's commitment to empowering MSEs had been realized through the addition of State Capital Participation of IDR1 trillion with the source of funds for the 2020 State Budget that PNM received at the end of July 2020 and State Capital Participation of IDR1.5 trillion in the framework of the National Economic Recovery Program received in December 2020. The government's commitment was also shown through the provision of interest subsidies that had been received by the company in the amount of IDR1.03 trillion. Furthermore, still in the framework of the National Economic Recovery program, through the Micro Business Productive Assistance program as many as 4,179,185 PNM Mekaar customers received assistance with a total value of IDR10.03 trillion. In easing the burden on customers, PNM also provided relaxation in the form of financing restructuring for affected customers, which at the end of December 2020 totaled 251 thousand customers with a debit tray value of IDR3.38 trillion.

In the period from January to December 2020 the company successfully organized various activities to increase business capacity with a total of 5,847 training for 157,951 MSMEs. On the basis of this 2020 performance and the support of stakeholders, PNM continued to strive to empower MSMEs to provide real benefits to MSMEs and Ultra Micro as one of the backbones of the Indonesian economy.



2019

Senantiasa Hadir dalam Mewujudkan Ekonomi Masyarakat Sejahtera

Consistently Active in Manifesting a Prosperous Community Economy

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM menatap 2019 dengan semangat pembaruan untuk senantiasa meningkatkan kemampuan bisnis UMKM nasional. Modernisasi proses bisnis menjadi strategi yang disiapkan Perseroan menuju digitalisasi teknologi yang maksimal. Untuk mendukung inisiatif ini, PNM telah melakukan penguatan sistem TI yang andal untuk menunjang keseluruhan operasional bisnis.

Tahun ini, PNM berhasil mencatatkan peningkatan pembiayaan kredit UMKM mencapai Rp24,6 triliun yang disalurkan melalui PNM Mekaar sebesar Rp20,19 triliun dan ULaMM sebesar Rp3,88 triliun. Pertumbuhan ini didorong oleh bertambahnya kantor cabang PNM Mekaar dan ULaMM yang kini berjumlah 2.800 unit serta jumlah nasabah yang kini mencapai lebih dari 6 juta nasabah. Jumlah nasabah yang terus meningkat menandakan kontribusi PNM dalam mendorong perekonomian nasional. Kementerian BUMN pun memberikan kepercayaan kepada PNM untuk mengelola dana Program Kemitraan beberapa BUMN dalam bentuk hibah sebesar Rp921,82 miliar yang digunakan untuk memperkuat permodalan dan pemberdayaan perempuan prasejahtera melalui pembiayaan PNM Mekaar.

Melihat geliat usaha yang terus bergerak naik, Perseroan melalui program PNM Mekaar dan ULaMM juga telah berkontribusi dalam mendukung nasabah untuk menaikkan kelas usahanya dan mendukung ketahanan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, jalan menuju perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat semakin terbuka lebar.

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) or PNM was viewing 2019 with the spirit of renewal to consistently improve the capability of the national MSME business. The modernization of business processes has become a strategy prepared by the Company towards maximum technological digitalization. To support this initiative, PNM has established a reliable IT system to support overall business operations.

This year, PNM has recorded an increase in MSME credit financing reaching IDR24.6 trillion, channeled through Mekaar PNM by IDR20.19 trillion and ULaMM by IDR3.88 trillion. This growth was caused by the increasing number of PNM Mekaar and ULaMM branches, which now number 2,800 units and the number of customers now reaching more than 6 million. The increasing number of customers signifies the contribution of PNM in stimulating the national economy. The Ministry of BUMN in addition gave the trust to PNM to manage the Partnership Program funds of several SOEs in the form of grants amounting to IDR921.82 billion which was used to strengthen the capital and empowerment of poor women through PNM Mekaar funding.

Recognizing the stretching of the business that continues to move up, the Company through the PNM Mekaar and ULaMM programs have also contributed in educating customers to raise their business class and support the economic resilience of the community. Thus, the road to expanding employment and increasing the welfare of the community is wide open.



2018

PNM Aktif Meningkatkan Produktivitas Masyarakat Prasejahtera dan UMKM untuk Ekonomi Indonesia

PNM Continues to Improve the Productivity of Poor Productive and SME for Indonesia's Economy

2018 merupakan babak baru bagi PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM dalam menjalankan perannya sebagai lembaga keuangan non-bank yang berfokus pada pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Tahun ini, Perseroan berhasil melampaui target empat juta nasabah PNM Mekaar dengan realisasi pencapaian sebesar 4.057.129 juta nasabah. Prestasi ini membuktikan kesungguhan Perseroan untuk berkontribusi aktif dalam upaya peningkatan produktivitas masyarakat prasejahtera melalui berbagai strategi dan kebijakan.

2018 is a new chapter for PT Permodalan Nasional Madani (Persero) or PNM as a non-bank financial institution that focuses on financing Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) in Indonesia. This year, the Company successfully exceeded its target of four million customers of PNM Mekaar with the achievement of 4,057,129 million customers. This achievement proves the Company's commitment to actively contributing to the efforts to increase the productivity of underprivileged community through various strategies and policies.

Perseroan juga melakukan berbagai inisiatif strategis untuk meningkatkan perkembangan praktik usaha UMKM di Indonesia termasuk pengenalan pada pemanfaatan teknologi. Salah satunya melalui Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor untuk Keuangan Inklusif), yang diwujudkan dengan menggandeng sejumlah bank dalam mendukung pertumbuhan usaha nasabah PNM Mekaar dan PNM ULamm. Di sisi lain, dengan mengedepankan pengembangan teknologi, Perseroan terus meningkatkan efektivitas proses bisnis. Peningkatan sinergi usaha antar nasabah, PNM Mekaar dan PNM ULamm, serta Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU), juga semakin diperkuat untuk memperluas potensi kerja sama setiap nasabah dan menciptakan nilai tambah bagi unit bisnis Perseroan.

Lewat keberlanjutan bisnis UMKM, pemerataan kesejahteraan masyarakat prasejahtera pun akan terwujud. Berbekal prestasi gemilang tahun ini, Perseroan berupaya untuk terus memberikan yang terbaik bagi seluruh nasabah. Dengan demikian, pelaku UMKM diharapkan dapat terus menjaga keberlanjutan usaha, mendorong pertumbuhan yang lebih baik bagi perekonomian Indonesia.

The Company carries out various strategic initiatives to enhance the growth of MSME in Indonesia, including through Laku Pandai, which was organized in cooperation with a number of banks to support the business growth of PNM Mekaar and ULamm customers. In addition, the Company also prioritizes technology development to improve the effectiveness of its business process. The synergy among the business units, PNM Mekaar, ULamm, and the Business Capacity Development Unit (PKU) is also strengthened in order to optimize the potential for cooperation with each customer and to generate added value for each business unit. The sustainability of MSME businesses will eventually lead to community welfare among the underprivileged community.

The outstanding achievements this year will serve as the foundation for the Company in its efforts to provide the best to every customer. Thus, MSME entrepreneurs are expected to be able to maintain the sustainability of their businesses for better economic growth in Indonesia.



2017

PNM Hadir Sejahterakan UMK Indonesia

PNM Exists to Improve SME's Welfare in Indonesia

Di tahun 2017, PNM terus melanjutkan performanya dalam sektor pembiayaan kredit bagi UMK Indonesia. Hingga akhir tahun PNM telah berhasil menyalurkan manfaat kepada lebih dari 13 juta keluarga melalui Program Mekaar, ULamm dan LKMS. Penyaluran tersebut juga berbanding lurus dengan pengembangan jaringan layanan yang hampir menjangkau seluruh daerah di Indonesia terutama pada wilayah-wilayah yang didominasi oleh masyarakat prasejahtera. Upaya ini tidak lain adalah bagian dari komitmen PNM atas mandat yang diberikan oleh Pemerintah untuk dapat menjadi katalisator peningkatan perekonomian masyarakat terutama pada masyarakat kelas menengah ke bawah. Pencapaian PNM di tahun 2017 tidak hanya diukur dari kuantitas semata dari sisi kualitas, melalui layanan pendampingan dan jalinan komunikasi yang baik kepada nasabah PNM dapat menekan rasio Non-Performing Loan (NPL) 2017 pada tingkat lebih rendah dibanding 2016. Secara bisnis peran yang PNM lakukan sepanjang tahun buku sesuai pada fungsi serta memberikan dampak positif dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta baik dari sisi bisnis.

Tema ‘PNM Hadir Sejahterakan UMK Indonesia’ tentunya menjadi refleksi atas hasil kinerja yang berhasil dibukukan Perusahaan di tahun 2017. Tema ini secara strategis memberikan informasi kepada khalayak terkait dengan pemenuhan komitmen usaha berkelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya. Terlebih tema ini menjadi suatu kebanggaan bagi Perusahaan dan seluruh Insan PNM dalam melanjutkan pencapaian yang lebih tinggi di masa mendatang.

In 2017, PNM continued its performance in the credit financing sector for SMEs in Indonesia. As of the end of the year, PNM managed to disburse benefit to more than 13 million of families through Mekaar, ULamm and LKMS Program. This disbursement is also parallel with the development of service network that reaches almost all regions in Indonesia, particularly in regions dominated by pre-prosperous community. This effort is none other than the part of the commitment of PNM to fulfill its mandate from the Government to be the catalyst of the society's economic improvement, especially the middle to low class. The achievement of PNM in 2017 was not only measured by the quantity, but also the quality. Through the mentoring service and good communication with the customers, PNM was able to suppress Non-Performing Loan (NPL) ratio of 2017 at a low rate compared to 2016. Business-wise, PNM's role during fiscal year is in accordance with its function and has delivered positive impact in supporting public welfare which is good in terms of business.

The theme “PNM Exists to Improve SME's Welfare in Indonesia” certainly reflects performance results recorded by the Company in 2017. This theme has strategically provided information to the public related to the fulfillment of sustainable business commitment from the previous years. In fact, this theme is a pride of the Company and all individuals of PNM in continuing higher achievements going forward.

Daftar Isi

Tabel of Contents

i	TEMA DAN ARTI TEMA <i>Themes and Meaning of Themes</i>	4	DAFTAR ISI <i>Table of Contents</i>	9	JEJAK LANGKAH <i>Milestones</i>
1	KESINAMBUNGAN TEMA <i>Theme Sustainability</i>	8	SEKILAS TENTANG PERUSAHAAN <i>Overview of the Company</i>	10	KONTRIBUSI TERBAIK KAMI <i>Our Best Contribution</i>
14	KILAS KINERJA PERUSAHAAN <i>Performance Highlights</i>	18	Ikhtisar Data Keuangan Penting <i>Summary of Important Financial Data</i>	25	Aksi Korporasi <i>Corporate Action</i>
16	Pencapaian Kinerja Penting 2021 <i>Important Performance Achievements 2021</i>	18	Ikhtisar Keuangan dan Rasio Keuangan <i>Financial Summary and Financial Ratios</i>	26	Informasi Obligasi, Sukuk dan/atau Obligasi Konversi <i>Bond Information, Sukuk and/or Conversion Bonds</i>
		24	Ikhtisar Operasional <i>Operational Overview</i>	30	Informasi Sumber Pendanaan Lainnya <i>Other Funding Sources Information</i>
		24	Informasi Harga Saham <i>Share Price Information</i>	30	Peristiwa Penting di Tahun 2021 <i>Important Events in 2021</i>
36	LAPORAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS <i>Report of the Board of Directors and Board of Commissioners</i>	38	Laporan Direksi <i>Board of Directors' Report</i>	72	Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris <i>Statement Letter Members of Directors and Members of the Board of Commissioners</i>
		59	Laporan Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners' Report</i>		
74	PROFIL PERUSAHAAN <i>Company Profile</i>	82	Budaya Perusahaan <i>Corporate Values</i>	117	Profil dan Pengembangan Kompetensi Pegawai <i>Employee Profile and Competency Development</i>
76	Identitas Perusahaan <i>Company's Identity</i>	85	Kegiatan Usaha <i>Business Activities</i>	117	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin <i>Number of Employees by Gender</i>
78	Nama dan Alamat Kantor Cabang dan/atau Kantor Perwakilan <i>Names and Addresses of Branch Offices and/or Representative Offices</i>	85	Kegiatan Usaha Menurut Anggaran Dasar dan yang Dijalankan <i>Business Activities According to Basic Budget and that are Performed</i>	117	Jumlah Pegawai Berdasarkan Level Jabatan <i>Number of Employees by Organization Level</i>
80	Brand Perusahaan <i>Company Brand</i>	85	Produk dan Jasa <i>Products and Services</i>	117	Jumlah Pegawai Berdasarkan Rentang Usia <i>Number of Employees by Age Range</i>
80	Riwayat Singkat Perusahaan <i>Brief History of PNM</i>	87	Peta Wilayah Usaha <i>Business Area Map</i>	117	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan <i>Number of Employees by Education Level</i>
82	Visi, Misi dan Budaya Perusahaan <i>Vision, Mission, and Culture of the Company</i>	88	Struktur Organisasi <i>Organization Structure</i>	118	Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian <i>Number of Employees by Employment Status</i>
82	Visi <i>Vision</i>	90	Daftar Keanggotaan Asosiasi <i>List of Association Membership</i>	118	Pengembangan Kompetensi Pegawai <i>Employee Competency Development</i>
83	Misi <i>Mission</i>	90	Profil Direksi <i>Board of Directors' Profile</i>	118	Kebijakan <i>Policy</i>
82	Review Visi dan Misi oleh Dewan Komisaris dan Direksi <i>Vision and Mission Review by the Board of Commissioners and Board of Directors</i>	100	Profil Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners' Profile</i>	119	Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan <i>Competency Development Based on Position Levels</i>
		108	Profil Dewan Pengawas Syariah <i>Sharia Supervisory Board Profile</i>		
		111	Profil Executive Vice President <i>Vice President's Executive Profile</i>		
		114	Profil Pejabat di Bawah Direksi <i>Profile of Officers Under the Board of Directors</i>		

- 121** Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi
Evaluation of Competency Development Implementation
- 121** Biaya Pengembangan Kompetensi
Competency Development Costs
- 122** Komposisi Pemegang Saham
Composition of Shareholders
- 122** Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar
Composition of the 20 Biggest Shareholders
- 122** Komposisi Pemegang Saham 5% atau Lebih
Composition of Shareholders 5% or More
- 123** Komposisi Kelompok Pemegang Saham Masyarakat Kurang dari 5%
Community Shareholders Composition Less than 5%

- 123** Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi
Share Ownership by the Board of Commissioners and Board of Directors
- 123** Pemegang Saham Utama dan Pengendali
Main Shareholders and Controlling
- 126** Daftar Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi dan Perusahaan Ventura Bersama
List of Subsidiaries, Entities Companies and Joint Venture Companies
- 128** Struktur Grup Perusahaan
Company Group Structure
- 129** Kronologi Penerbitan Saham
Stock Issuance Chronology
- 130** Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Obligasi, Sukuk dan/atau Obligasi Konversi
Chronology of Issuance and/or Listing of Bonds, Sukuk and/or Conversion Bonds

- 140** Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya
Issuance Chronology and/or Other Securities Listing
- 144** Informasi Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP)
Information on using the Services of Public Accounting (AP) and Public Accounting Offices
- 145** Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Supporting Institutions and/or Professions
- 146** Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certifications
- 149** Informasi pada Website
Information on the Website

150

TINJAUAN BIDANG USAHA

Business Fields Review

- 152** Sekilas PNM Mekaar
PNM Mekaar at a Glance
- 160** Sekilas PNM ULamm
PNM ULamm at a Glance
- 164** Perbandingan PNM Mekaar dan PNM ULamm
Comparison of PNM Mekaar and ULamm

- 164** Pengembangan Kapasitas Usaha
Business Capacity Development
- 179** Profil Nasabah PNM Mekaar Unggulan
PNM Mekaar Customer Profile Features
- 185** Profil Nasabah ULamm Unggulan
ULamm Unggulan Customer Profile

194

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

Management Discussion and Analysis on Company Performance

- 196** Tinjauan Perekonomian
Economic Review
- 196** Analisis Perekonomian Global
Global Economic Analysis
- 197** Analisis Perekonomian Nasional
National Economic Analysis
- 198** Analisis Industri-Penguatan Ekosistem UMKM
Industrial Analysis-Strengthening of MSME Ecosystem
- 200** Analisis Posisi PNM dalam Industri
Analysis of PNM's Position in the Industry
- 203** Tinjauan Operasional
Operational Review
- 203** Strategi Perusahaan
Company Strategy

- 204** Aspek Pemasaran
Marketing Aspect
- 204** Strategi Pemasaran Tahun 2021
Marketing Strategy in 2021
- 204** Pangsa Pasar
Market Share
- 207** Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha
Operation Review Per Business Segment
- 214** Tinjauan Keuangan
Financial Overview
- 214** Kinerja Keuangan
Financial Performance
- 214** Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Consolidated Statements of Financial Position
- 234** Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Consolidated Statement of Income and Other Comprehensive Income
- 244** Laporan Arus Kas Konsolidasian
Consolidated Statement of Cash Flows
- 246** Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang
Ability to Pay Debt and Debt Collectibility

- 252** Struktur Modal
Capital Structure
- 253** Ikatan Material Investasi Barang Modal
Material Commitment for Capital Goods Investment
- 253** Investasi Barang Modal
Capital Goods Investment
- 254** Informasi Keuangan yang Telah Dilaporkan yang Mengandung Kejadian yang Sifatnya Luar Biasa dan Jarang Terjadi
Material Information Concerning Investment, Expansion, Divestment, Acquisition, or Restructuring of Debt and Capital
- 256** Dampak Perubahan Harga Terhadap Penjualan atau Pendapatan Bersih Perusahaan
Impact of Changes in Price on Company Sales or Net Income
- 256** Komponen-Komponen Substansi dari Pendapatan dan Beban Lainnya
Substance Components of Other Income and Expenses
- 256** Peningkatan/Penurunan Material dari Penjualan/Pendapatan Bersih
Material Increase/Decrease from Net Sales/Income
- 257** Provisi dan Kontinjensi
Provisions and Contingencies

- 257** Perjanjian-Perjanjian
Agreements
- 260** Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan
Material Information and Facts After the Accountant's Report Date
- 260** Prospek Usaha dan Strategi ke Depan Tahun 2022
Business Prospects and Future Strategies in 2022
- 264** Pencapaian Target dan Target Ke Depan
Achievement of Targets and Future Targets
- 264** Pencapaian Target 2021
Target Achievement 2021
- 266** Target Ke Depan (Proyeksi)
Future Target (Projection)
- 269** Kebijakan, Pengumuman dan Pembayaran Dividen
Policies, Announcements and Dividend Payment
- 270** Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Realization of the Use of Public Offering Funds
- 272** Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Penggabungan/ Peleburan Usaha, Divestasi, Akuisisi, atau Restrukturisasi Hutang dan Modal
Material Information Regarding Investment, Expansion, Business Merger/Consolidation, Divestment, Acquisition, or Debt and Capital Restructuring
- 272** Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi
Information of Significant Transaction Which Contains Conflict of Interest and/or Transaction With Affiliated Parties
- 276** Perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan Dampaknya Terhadap PNM
Amendments of the Legislation and the Impact on PNM
- 276** Perubahan Kebijakan Akuntansi
Changes in Accounting Policy
- 277** Informasi Kelangsungan Usaha
Business Continuity Information
- 279** Tingkat Kesehatan Perusahaan
Level of Corporate Health
- 280** Aspek Perpajakan
Taxation Aspect
- 281** Transaksi Spot dan Transaksi Derivatif
Spot Transactions and Derivative Transactions

282

SUMBER DAYA MANUSIA

Human Capital

- 284** Manajemen *Human Capital*
Human Capital Management
- 284** Kebijakan dan Pelaksanaan Rekrutmen
Recruitment Policies and Implementation
- 288** Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi
Competency Development Policy and Implementation
- 289** Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Karir
Policy and Implementation of Career Development
- 289** Penilaian Kinerja
Performance Assessment
- 290** Kebijakan Remunerasi
Remuneration Policy
- 290** Program Pensiun
Pension Program
- 291** System and Infrastructure *Human Capital*
System and Infrastructure Human Capital
- 291** Program Kerja *Human Capital* 2021
Human Capital Work Program 2021
- 293** Internalisasi Budaya
Internalization of Culture
- 294** Struktur Pengelola *Human Capital*
Capital Human Management Structure
- 296** Rencana Kerja *Human Capital* 2021
2021 Human Capital Work Plan

298

TEKNOLOGI INFORMASI

Information Technology

- 300** Master Plan dan Strategi Teknologi Informasi
Master Plan and Information Technology Strategy
- 301** Inovasi Teknologi Informasi
Information Technology Innovation
- 303** Availability dan Infrastruktur Teknologi Informasi
Availability and Infrastructure of Information Technology
- 304** Kebijakan dan Tata Kelola Teknologi Informasi
Information Technology Policy and Governance
- 306** Struktur Pengelola Teknologi Informasi
Structure of Information Technology Management
- 307** Strategi Pengembangan Teknologi Informasi Tahun 2022
Information Technology Development Strategy in 2022

308

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Good Corporate Governance

- 312** Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Objectives of Good Corporate Governance Implementation
- 312** Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan
The Basic of Corporate Governance Implementation
- 315** Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Structure and Mechanism
- 315** Struktur Organ Perusahaan
Organ Structure of the Company
- 315** *Governance Soft Structure*
Governance Soft Structure
- 315** Mekanisme Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Mechanism
- 315** Pemegang Saham
Shareholders
- 316** Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders
- 341** Direksi
Board of Directors
- 363** Dewan Komisaris
Board of Commissioners
- 388** Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board
- 395** Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Nomination and Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors

- 397** Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi
Policies on Diversity of Board of Commissioners and Board of Directors
- 400** Organ dan Komite di Bawah Dewan Komisaris
Organs and Committees Under the Board of Commissioners
- 417** Organ dan Komite di Bawah Direksi
Organs and Committees Under the Board of Directors
- 448** Akuntan Publik
Public Accountant
- 449** Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System
- 456** Manajemen Risiko
Risk Management
- 470** Fungsi Kepatuhan
Compliance Function
- 474** Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan/atau Politik
Funding of Social and/or Political Activities
- 474** Perkara Hukum
Important Case
- 484** Sanksi Administratif yang Dikenakan Kepada Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Oleh Otoritas Pasar Modal dan Otoritas Lainnya
Administrative Sanctions Imposed on Companies, Members of the Board of Commissioners and Board of Directors By Capital Market Authorities and Other Authorities
- 484** Akses Informasi dan Data Perusahaan
Access To Information and Company Data
- 500** Kode Etik
Code of Ethics

- 502** Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja
Performance-Based Long-Term Compensation Policy
- 502** Kebijakan Pengungkapan Informasi Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi Serta Pelaksanaannya
Policy of Disclosure of Share Ownership Information of Board of Commissioners and Board of Directors and the Implementation
- 502** *Whistleblowing System*
Whistleblowing System
- 504** Program Anti Korupsi
Anti-Corruption Program
- 510** Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
Management of Country Property Rights
- 511** *Buyback Saham dan Buyback Obligasi*
Share Buyback and Bond Buyback
- 511** Rencana Strategis Perusahaan
Company Strategic Plan
- 511** Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
Transaction That Contained Conflicts of Interest
- 512** Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
Application of Guidelines Open Corporate Governance
- 526** *Good Corporate Governance Assessment*
Good Corporate Governance Assessment
- 535** *Praktik Bad Corporate Governance*
Practice Bad Corporate Governance

536

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Corporate Social Responsibility

539

REFERENSI OJK, ARA DAN SK-16

OJK, ARA and SK-16 Reference

581

LAPORAN KEUANGAN

Financial Statements

Sekilas tentang Perusahaan

Overview of the Company



KEPEMILIKAN
OWNERSHIP

● **99,99%**

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

● **0,01%**

Pemerintah Republik Indonesia
Government Republic of Indonesia



TOTAL ASET
TOTAL ASSETS

Rp43,71 triliun / trillion



BIDANG USAHA
BUSINESS FIELDS

Kuangan
Finance



JASA
SERVICES

Pembiayaan
Financing



PEMBIAYAAN
FINANCING

PNM mekaar
Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera

ULaMM
Unit Layanan Modal Mikro



ENTITAS ANAK
SUBSIDIARY

PNM
Investment Management

PNM
Venture Capital

Jejak Langkah Milestones



1999

Perseroan didirikan.
Company Establishment.

1999-2000

Pengelolaan Kredit Program eks Kredit Likuiditas Bank Indonesia.
Management of the Loan Program formerly known as Bank Indonesia Liquidity Program.

2006

Perseroan dipercaya untuk mengelola *trustfund* sederet perusahaan terkemuka melalui Program Kemitraan.
The Company is trusted to manage trustfunds for a number of reputable companies through the Partnership Program.

2008

Peluncuran ULaMM.
The launching of ULaMM.

2019

Perseroan mencatat rekor pertumbuhan dengan Number of Account (NOA) sebesar 6.043.840 dan Non-Performing Loan (NPL) 1,34%.
The Company recorded a growth record with a Number of Accounts (NOA) of 6,043,840 and NonPerforming Loans (NPL) of 1,34%.

2018

Perseroan mencatat rekor pertumbuhan dengan Number of Account (NOA) sebesar 4,05 juta nasabah dan Non-Performing Loan (NPL) 1,48%.
The Company records an all-time highest growth with a Number of Account (NOA) of 4.05 million customers and Non-Performing Loan (NPL) of 1.48%

2015

Peluncuran PNM Mekaar.
The launching of PNM Mekaar.

2010

Peluncuran Pengembangan Kapasitas Usaha.
The launching of the Business Capacity Development Unit.

2020

PNM mendapatkan penambahan Penyertaan Modal Negara sebesar Rp 1 Triliun dan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional, PNM kembali menerima Penyertaan Modal Negara sebesar 1,5 Triliun. PNM menjadi salah satu pengusul penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan nasabah menerima subsidi bunga.
PNM received an additional State Capital Participation of IDR1 Trillion and in the framework of National Economic Recovery, PNM again received State Capital Participation of 1.5 Trillion. PNM is one of the proposers to receive Micro Business Productive Assistance (BPUM) and customers receive interest subsidies.

2021

Terbentuknya Holding Ultra Mikro pada tahun 2021, yang terdiri dari 3 (tiga) entitas BUMN yakni, BRI selaku induk holding, Pegadaian dan PNM.

The establishment of Ultra Micro Holding in 2021, which consisted of 3 (three) State-Owned Enterprises entities, namely, BRI as the holding parent, Pegadaian and PNM.

Kontribusi Terbaik Kami

Our Best Contribution



Sinergi Holding Ultra Mikro

Holding Ultra Mikro Sinergy

Sistem keuangan mikro atau ultra mikro adalah sarana yang diciptakan dengan tujuan untuk menjembatani kesenjangan dalam akses keuangan, dengan memberikan produk keuangan kepada komunitas individu yang terpinggirkan yang sebelumnya tidak dapat mereka akses karena lembaga tradisional menganggap komunitas ini tidak ekonomis untuk dilayani atau bahkan dijangkau. Selama setengah dekade terakhir, industri keuangan ultra mikro telah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Sebanyak kurang lebih 80% dari peminjam ini adalah wanita, dan 65% berada di pedesaan.

Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) mewakili bagian penting dari perekonomian Indonesia dan merupakan salah satu mesin terkuat dari pertumbuhan ekonomi, karena kontribusinya pada transaksi produktif, inovasi, dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah Indonesia saat ini mendefinisikan segmen ultra-mikro sebagai perusahaan yang membutuhkan pembiayaan di bawah Rp10 juta. Kredit untuk segmen ini disalurkan melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dalam bentuk pinjaman perorangan atau kelompok, disertai dengan program pendampingan dan pelatihan wajib.

Terdapat peluang untuk memperluas cakupan Ultra Mikro (UMi) ini untuk mencakup pembiayaan mencapai Rp50 juta. Dengan definisi yang baru, Indonesia dapat memastikan kenaikan kelas segmen Ultra Mikro ke Mikro yang lebih rapi. Proses pemberdayaan tidak berhenti untuk pinjaman di bawah Rp10 juta, namun juga membantu segmen ini untuk naik ke kelas mikro yang formal di atas Rp50 juta.

Melihat adanya peluang tersebut, Pemerintah Indonesia membentuk Holding Ultra Mikro dengan melibatkan 3 (tiga) Entitas yakni BRI, Pegadaian dan PNM resmi terbentuk pada tanggal 13 September 2021 sebagai wujud komitmen Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan segmen UMi di Indonesia. Milestone bersejarah ini menghadirkan BRI, Pegadaian dan PNM dalam integrasi ekosistem ultra mikro untuk memenuhi kebutuhan dan membuka peluang pelaku usaha ultra mikro agar lebih tumbuh dan berkembang.

The financial system or ultra micro was a tool created with the aim of bridging with access to finance, by providing financial products to marginalized communities that they previously could not access because traditional institutions considered these communities uneconomical to serve or even reach. Over the last half decade, the ultra microfinance industry has experienced quite significant growth. In total, approximately 80% of these borrowers were women, and 65% are in rural areas.

Micro, Small, Medium Enterprises (MSMEs) represent an important part of the Indonesian economy and are one of the strongest engines of economic growth, due to their contribution to productive transactions, innovation, and job creation. The Indonesian government currently defines the ultra-micro segment as companies that require financing below IDR 10 million. Credit for this segment is channeled through Non-Bank Financial Institutions (LKBB) in the form of individual or group loans, accompanied by mandatory mentoring and training programs.

There was an opportunity to expand the coverage of this Ultra Micro (UMi) to cover financing of up to IDR 50 million. With the new definition, Indonesia could ensure a neater upgrade to the Ultra Micro to Micro segment. The empowerment process did not stop for loans below IDR 10 million, but also helped this segment to move up to the formal micro class above IDR 50 million.

Seeing this opportunity, the Government of Indonesia formed Ultra Micro Holding involving 3 (three) Entities, namely BRI, Pegadaian, and PNM, which was officially formed on September 13, 2021, as a form of the Government of Indonesia's commitment to developing the UMi segment in Indonesia. This historic milestone presents BRI, Pegadaian, and PNM in integrating the ultra micro-ecosystem to meet the needs and open up opportunities for ultra micro-businesses to grow and develop more.

Holding Ultra Mikro memiliki potensi untuk dapat melayani 57 juta bisnis Ultra Mikro yang termasuk dalam segmentasi tersebut. Dari 57 juta bisnis tersebut, 45 juta atau 80% masih membutuhkan bantuan pendanaan. Dari 45 juta bisnis tersebut, hanya ada 15 juta bisnis yang sudah mendapatkan akses ke sumber dana yang formal, dan lainnya mendapatkan dana dari sumber dana informal atau bahkan tidak terlayani sama sekali.

Pembentukan Holding Ultra Mikro ini diharapkan dapat menciptakan nilai secara signifikan melalui inisiatif strategis yang terkoordinasi, sehingga memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Alasan utama pembentukan sebuah holding adalah untuk menciptakan sinergi yang berupa penambahan *market size* dan peningkatan efisiensi.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Induk Holding BUMN Ultra Mikro, sedangkan PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) menjadi bagian dari Anggota Holding. Sebagai Induk Holding, BRI memimpin penciptaan nilai grup secara keseluruhan.

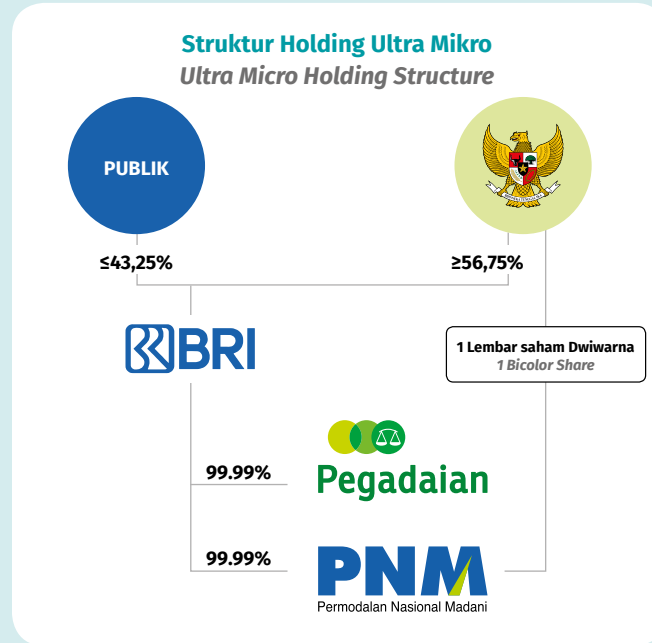
Holding Ultra Mikro dibentuk dengan mekanisme Privatisasi dimana akan dilakukan dengan penerbitan saham baru oleh BRI melalui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") dimana Pemerintah akan berpartisipasi dan mengambil seluruh HMETD bagiannya dengan cara pembayaran non-tunai berupa penyeteroran seluruh saham seri B yang dimiliki Pemerintah di masing-masing Pegadaian dan PNM sebagai tambahan penyertaan modal negara (PMN) Republik Indonesia di BRI. Dengan demikian, pembentukan Holding Ultra Mikro akan melibatkan penambahan PMN pada BRI.

Holding Ultra Mikro has the potential to be able to serve the 57 million Ultra Micro businesses included in this segmentation. Of the 57 million businesses, 45 million, or 80%, still need funding assistance. Of the 45 million businesses, only 15 million businesses have had access to formal funding sources, and others have received funding from informal sources of funding or have not been served at all.

The establishment of the Holding Ultra Mikro was expected to create significant value through coordinated strategic initiatives, thereby providing benefits to all stakeholders. The main reason for establishing a holding was to create synergies in the form of increasing market size and increasing efficiency.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk was recommended as the Holding Parent for Ultra Micro SOEs, while PT Pegadaian (Persero) and PT Permodalan Nasional Madani (Persero) would be part of the Holding Members. As the Holding Parent, BRI would eventually lead the creation of value for the group as a whole.

Holding Ultra Mikro was formed with a Privatization mechanism which would be carried out by issuing new shares by BRI through Capital Increase with Pre-emptive Rights in which the Government would participate and take all of its share of Preemptive Rights by means of non-cash payments in the form of depositing all B serial shares owned by the Government in each Pegadaian and PNM as additional state capital participation (PNM) of the Republic of Indonesia in BRI. Thus, the formation of the Holding Ultra Mikro would involve the addition of PNM to BRI.



Pemerintah mempertahankan posisinya sebagai pengawas BRI. Kepemilikan saham Pegadaian dan PNM yang saat ini dimiliki 100% oleh Republik Indonesia dialihkan ke BRI, sehingga Pegadaian dan PNM kehilangan statusnya sebagai BUMN dan menjadi anak usaha BUMN sesuai UU No. 19/2003 tentang BUMN, dalam hal ini anak perusahaan BRI. Namun demikian, Pemerintah tetap memiliki 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan hak-hak yang melekat di Pegadaian dan PNM, sehingga status Pegadaian dan PNM berbeda dengan anak perusahaan BRI lainnya dan masih tetap diperlakukan sama dengan BUMN lainnya (PP 72/2016).

Sinergi holding ultra mikro menciptakan *journey* yang terintegrasi bagi usaha segmen ultra mikro dan akan memcadi market leader pada pembiayaan ultra mikro melalui mekanisme yang jauh lebih besar, lebih lengkap dan lebih luas. BRI memiliki keunggulan sebagai Industri perbankan yang melayani segmen UMKM sedangkan PNM memiliki keunggulan sebagai lembaga yang memberikan pembiayaan dan pemberdayaan usaha kepada kelompok wanita prasejahtera. Hal ini akan memberikan manfaat dari sisi ekonomi, sosial dan keberlanjutan. Dari aspek ekonomi, akan diperoleh manfaat yaitu penyediaan produk dan layanan keuangan yang semakin lengkap. Dari aspek sosial, akan diperoleh manfaat yaitu meningkatkan kapabilitas usaha ultra mikro melalui pemberdayaan usaha. Sedangkan dari aspek keberlanjutan akan diperoleh manfaat yaitu berkontribusi terhadap peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia.

Pada sinergi holding ultra mikro ini, PNM berperan dalam tahap *empowerment* yaitu, pemberdayaan kepada kelompok masyarakat prasejahtera agar dapat menjadi wirausaha mandiri melalui literasi keuangan, penyediaan produk dan layanan keuangan yang semakin lengkap serta perluasan dan kemudahan akses layanan keuangan melalui *co-location*. Selanjutnya, Pegadaian dan BRI berperan untuk melaksanakan sinergi bersama dalam mempercepat proses akuisisi melalui produk dan layanan yang terintegrasi, menyediakan akses terhadap ekosistem *micro payment* dan layanan yang melebihi bank lainnya (*beyond banking*), serta pendalaman produk finansial 3 (tiga) entitas. Tahap berikutnya adalah tahap *upgrading* yaitu, peningkatan kapabilitas segmen ultra mikro untuk “naik kelas” ke segmen mikro.

The government would maintain its position as supervisor of BRI. The ownership of Pegadaian and PNM shared which were currently 100% owned by the Republic of Indonesia was transferred to BRI, so that Pegadaian and PNM lost their status as SOE and became subsidiaries of SOE according to Law no. 19/2003 concerning SOEs, in this case a subsidiary of BRI. However, the Government still owned 1 share of Series A Dwiwarna share and the rights attached to Pegadaian and PNM, so that the status of Pegadaian and PNM was different from other BRI subsidiaries and was still treated the same as other SOEs (PP 72/2016).

The synergy of the ultra micro holding creates an integrated journey for the ultra micro-segment business. It will become the market leader in ultra micro-financing through a much larger, more complete, and broader mechanism. BRI has the advantage of a banking industry that serves the MSME segment. In contrast, PNM has the advantage of an institution that provides financing and business empowerment to groups of underprivileged women. This will provide economic, social, and sustainability benefits. From the economic aspect, benefits will be obtained, namely providing more complete financial products and services. From the social part, benefits will be received, namely increasing the capability of ultra micro-businesses through business empowerment. Meanwhile, benefits will be obtained from the sustainability aspect, namely contributing to increasing financial literacy and inclusion in Indonesia.

In this ultra micro holding synergy, PNM plays a role in the empowerment stage, empowering underprivileged community groups to become independent entrepreneurs through financial literacy, providing more complete financial products and services, and expanding and facilitating access to financial services through co-location. Furthermore, Pegadaian and BRI play a role in implementing joint synergies in accelerating the acquisition process through integrated products and services, providing access to a micropayment ecosystem and services that exceed other banks (beyond banking) and deepening the financial products of 3 (three) entities. The next stage is the upgrading stage, namely, increasing the capability of the ultra micro-segment to “grade up” to the micro-segment.

Berperan Sebagai Lembaga Keuangan yang Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera Role as a Financial Institution Developing the Economy of Prosperous Families



Seiring perkembangan usaha, pada tahun 2015, Perseroan meluncurkan layanan pembiayaan modal untuk perempuan prasejahtera pelaku Usaha Ultra Mikro melalui Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). PNM Mekaar dilengkapi dengan penyertaan pendampingan usaha dan pelayanan secara berkelompok. Kini, Mekaar tersebar dalam 2.688 Kantor Layanan, dengan cakupan wilayah di 4.450 kecamatan di Indonesia.

Penyaluran pembiayaan PNM Mekaar juga didukung dengan adanya perluasan jangkauan layanan dan adanya peningkatan penyaluran pembiayaan PNM Mekaar Plus (PNM Mekaar Naik Kelas). Manajemen PNM tetap mengedepankan unsur kehati-hatian dan tetap prudent dalam penyaluran sehingga aset produktif dapat tumbuh optimal baik secara produktif tidak hanya dari kuantitas tapi juga dari sisi kualitas.

Meskipun kondisi usaha pelaku usaha ultra mikro belum sepenuhnya pulih, namun dengan adanya penambahan Kantor Cabang Mekaar baru berdampak positif pada ekspansi penyaluran pembiayaan PNM Mekaar. Sampai dengan akhir Desember 2021, penyaluran pembiayaan kepada perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro melalui PNM Mekaar sebesar Rp46.445,26 miliar, 128,31% dari yang ditetapkan dalam RKAP tahun 2021 sebesar Rp36.197,35 miliar.

Along with the development of the business, in 2015, the Company launched a capital financing service for underprivileged women who were entrepreneurs of Ultra Micro Businesses through Fostering a Prosperous Family Economy (Mekaar). PNM Mekaar was supported with business assistance and group services. Now, PNM Mekaar has spread across 2,688 Service Offices, with coverage in 4,450 sub-districts and 439 districts / cities.

The distribution of PNM Mekaar financing was also supported by the expansion of service coverage and an increase in the distribution of PNM Mekaar Plus (PNM Mekaar Naik Class) financing. PNM management continued to prioritize the element of prudence and remained prudent in distribution so that productive assets could grow optimally both productively not only in terms of quantity but also in terms of quality.

Although the business conditions of ultra-micro business actors had not fully recovered, the addition of a new Mekaar Branch Office had a positive impact on the expansion of PNM Mekaar's financing distribution. Until the end of December 2021, the distribution of financing to underprivileged women of ultra-micro businesses through PNM Mekaar reached IDR 46,445.26 billion, 128.31% of what was stipulated in the 2021 Company Work and Budget Plan of IDR 36,197.35 billion.

Pemberdayaan Usaha UKM yang Terintegrasi Integrated SMSES Empowerment

Dalam kegiatan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (UMK), PNM menerapkan pendekatan pemberdayaan usaha yang terintegrasi dan berkelanjutan, yakni melalui pemberian fasilitas pembiayaan berupa pendampingan/pelatihan usaha agar UMK menjadi lebih efektif dan efisien dalam memanfaatkan sarana produksi dan SDM, yang didukung dengan inovasi dan jaringan kemitraan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan akses pasar dan daya saing UMK dan memberikan nilai tambah bagi UMK.

Kegiatan fasilitas pembiayaan bertujuan untuk:

1. Menyediakan permodalan yang dibutuhkan oleh kelompok perempuan prasejahtera dan UMK untuk mengembangkan usahanya;
2. Menjadi role model pembiayaan UMK yang berbasis lokal; dan
3. Turut menciptakan industri pembiayaan yang efisien dan berdaya saing dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha bertujuan untuk:

1. Mewujudkan pelaku UMK yang profesional, tangguh, inovatif dan berdaya saing melalui pola pelatihan, pendampingan dan monitoring;
2. Menjadikan pengetahuan dan keterampilan sebagai salah satu modal keunggulan pelaku UMK dalam menjalankan kegiatan usaha mereka; dan
3. Mendorong kerja sama dan terwujudnya sinergi antar institusi dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas pelaku UMK.

Kegiatan bisnis yang saat ini dilakukan untuk memberdayakan UMKMK melalui tiga pendekatan, pendekatan komunitas untuk nasabah, modal kapital melalui jasa pembiayaan, pendekatan modal sosial dan pendekatan modal intelektual melalui pengembangan kegiatan usaha dan jasa manajemen.

In the activities of empowering Micro and Small Enterprises (UMK), PNM applied an integrated and sustainable business empowerment approach, namely through the provision of financing facilities in the form of business assistance / training so that MSEs could become more effective and efficient in utilizing production facilities and human resources supported by innovation and partnerships networks, so that it was expected to increase market access and competitiveness of SMSES and provide added value for SMSES.

The financing facility activities aimed to:

1. Provide capital needed by underprivileged women and SMSES to develop their businesses;
2. Become a role model for local-based SMSES financing; and
3. Participate in creating an efficient and competitive financing industry in order to support people's economic development.

Business Capacity Building Activities aim to:

1. Realize professional, resilient, innovative and competitive MSEs through training, mentoring and monitoring patterns;
2. Make knowledge and skills one of the superior assets of MSEs in carrying out their business activities; and
3. Encourage cooperation and the creation of synergies between institutions in order to improve the quality and capacity of MSEs players.

Current business activities were carried out to empower MSMEs through three approaches, namely the community approach for customers, capital capital through financing services, social capital approach and intellectual capital approach through the development of business activities and management services.

KILAS KINERJA PERUSAHAAN

Performance Highlights





Pencapaian Kinerja Penting 2021

Important Performance Achievements 2021



Total Pendapatan Bunga dan Syariah di Tahun 2021
Total Interest and Sharia Income in 2021

Meningkat Sebesar / Increased By

↑ **50,07%**



Laba Bersih Tahun 2021
Net Profit in 2021

Meningkat Sebesar / Increased By

↑ **134,74%**



Total Ekuitas di Tahun 2021
Total Equity in 2021

Meningkat Sebesar / Increased By

↑ **15,23%**



Pinjaman yang Diberikan Loans disbursed

Meningkat Sebesar / Increased By

↑ **44,51%**

Rasio Non Performing Loan (Gross) di Tahun 2021 Non-Performing Loan (Gross) Ratio in 2021

Mengalami Penurunan / Decreased By

↓ **44,05%**

dibandingkan tahun sebelumnya 1,23%
compared to 1.23% in the previous year



Penyaluran Pembiayaan Mekaar Nasional di Tahun 2021 National Mekaar Financing disbursement in 2021

Meningkat Sebesar / Increased By

↑ **90,77%**



Jumlah Nasabah Aktif Mekaar di Tahun 2021 Mekaar's number of active customers in 2021

Meningkat Sebesar / Increased By

↑ **41,51%**



Pembiayaan Mekaar Syariah di Tahun 2021 Mekaar Syariah financing in 2021

Meningkat Sebesar / Increased By

↑ **140,70%**



Pembiayaan PNM ULaMM Syariah di Tahun 2021 Sharia ULaMM financing in 2021

Meningkat Sebesar / Increased By

↑ **121,55%**

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Summary of Important Financial Data

Ikhtisar Keuangan dan Rasio Keuangan

Financial Summary and Financial Ratios

Tabel Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights Table

(dalam jutaan Rupiah/in million Rupiah)

Uraian	2021	2020	2019 ^{*)}	2018 ^{*)}	2017	Description
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN						
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION						
ASET			ASSETS			
Kas dan Setara Kas	4.020.609	4.462.197	3.100.741	1.800.383	994.504	Cash and Cash Equivalent
Portofolio efek diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	1.184.264	524.809	300.373	202.448	859.137	Portfolio of securities measured at fair value through profit and loss
Pinjaman yang diberikan - setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.259.105.270.346 dan Rp674.515.381.879	32.377.176	22.088.985	18.252.174	12.819.328	7.171.822	Loans - net of allowance for impairment losses as of December 31, 2021 and 2020 amounting to IDR1,259,105,270,346 and IDR674,515,381,879, respectively
Pembiayaan modal setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp116.667.690.278 dan Rp114.731.525.571	768.094	846.573	777.306	565.069	432.294	Capital financing - net of allowance for impairment losses as of December 31, 2021 and 2020 amounting to IDR116,667,690,278 and IDR114,731,525,571, respectively
Piutang jasa manajemen - setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp4.775.638.666 dan Rp1.131.889.737	5.635	7.194	11.417	9.701	5.428	Management services receivables - net of allowance for impairment losses as of December 31, 2021 and 2020 amounting to IDR4,775,638,666 and IDR1,131,889,737, respectively
Pendapatan masih akan diterima	130.097	117.946	149.159	94.869	327.312	Accrued Income
Piutang lembaga kliring dan penjaminan	-	-	-	124	481	Clearing and Guarantee Institution Receivables
Piutang kegiatan manajer investasi	7.287	8.043	9.127	16.734	3.977	Investment Manager Activities Receivables
Piutang lain-lain - setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp13.262.553.263 dan Rp13.235.563.278	87.561	57.711	78.230	60.546	24.086	Other receivables - net of allowance for impairment losses as of December 31, 2021 and 2020 amounting to IDR13,262,553,263 and IDR13,235,563,278, respectively
Pajak dibayar di muka	72.544	59.325	17.503	94.642	80.309	Pre-paid Taxes
Uang muka dan biaya dibayar di muka	414.757	252.347	432.739	422.533	394.453	Advance and Prepayment
Investasi pada entitas asosiasi	-	-	-	2.493	2.060	Investment in Associates
Aset pajak tangguhan	375.803	215.587	59.635	12.979	9.811	Deferred Tax Assets

Uraian	2021	2020	2019 ^{a)}	2018 ^{a)}	2017	Description
Aset tetap dan aset hak guna - setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp913.178.915.432 dan Rp792.021.410.183	2.364.979	1.475.607	1.307.107	1.260.639	924.298	Fixed assets and right of use assets - net of accumulated depreciation as of December 31, 2021 and 2020 amounting to IDR913,178,915,432 and IDR792,021,410,183, respectively
Portofolio efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	5.665	5.665	6.354	6.190	Portfolio of securities measured at fair value through other comprehensive income
Aset tak berwujud setelah dikurangi dengan akumulasi amortisasi per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp191.952.532.972 dan Rp114.437.061.200	117.955	168.074	202.055	171.889	125.544	Intangible assets - net of accumulated amortization as of December 31, 2021 and 2020 amounting to IDR191,952,532,972 and IDR114,437,061,200, respectively
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	11.036	1.137	7.566	3.894	26.448	Non-current Assets Classified as Held for Sale
Aset lain-lain - bersih	1.774.498	1.373.688	195.720	8.111	5.104	Other Assets - Net
TOTAL ASET	43.712.295	31.664.889	24.906.517	17.552.735	11.393.258	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS						LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS						LIABILITY
Utang bank dan lembaga keuangan	11.313.396	6.224.831	5.949.992	4.769.002	1.830.415	Bank and financial institution borrowings
Surat utang jangka menengah dan sukuk	6.090.000	3.890.500	4.635.000	3.158.500	1.829.189	Bank and financial institution borrowings
Utang obligasi	10.078.283	9.413.490	8.178.733	5.739.075	4.239.682	Bond payables
Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan lembaga kredit luar negeri	3.923.440	3.041.762	2.161.930	1.082.794	798.294	Borrowings from the Government of the Republic of Indonesia and foreign credit institution
Pendapatan ditangguhkan Java Reconstruction Fund		-	2.105	5.052	8.420	Deferred revenue of Java Reconstruction Fund
Utang pajak	338.435	122.293	120.503	24.468	31.914	Taxes payables
Dana cadangan angsuran	4.876.288	2.520.979	1.318.935	753.662	392.319	Installment reserve fund
Utang lembaga kliring dan penjaminan		-	-	-	190	Clearing and guarantee institution payables
Utang kegiatan manajer investasi	1	4	3	4	5	Investment manager activities payables
Utang lain-lain	323.369	384.108	336.729	387.276	252.574	Other payables

Uraian	2021	2020	2019 ¹⁾	2018 ¹⁾	2017	Description
Beban yang masih harus dibayar	296.451	415.692	324.878	236.164	161.036	Accrued expenses
Liabilitas pajak tangguhan	5.504	5.762	5.474	2.972	617	Deferred tax liabilities
Liabilitas imbalan kerja	29.175	58.558	28.744	43.186	33.653	Employees benefits liabilities
TOTAL LIABILITAS	37.274.341	26.077.979	22.042.024	15.659.156	9.578.307	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS						EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:						Equity attributable to owners of the parent:
Modal saham - Saham biasa dengan nilai nominal Rp1.000.000 per lembar saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020						Share capital - Common stock with par value of IDR1,000,000 per share as of December 31, 2021 and 2020
Modal dasar - 9.200.000 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020						Authorized capital - 9,200,000 shares as of December 31, 2021 and 2020 Issued and fully paid capital
Modal ditempatkan dan disetor penuh 3.800.000 lembar saham per 31 Desember 2021 dan 2.300.000 lembar saham per 31 Desember 2020	3.800.000	2.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	Issued and fully paid capital 3,800,000 shares as of December 31, 2021 and 2,300,000 shares as of December 31, 2020
Penyertaan modal negara	-	1.500.000	-	-	-	State equity participation
Saldo laba:						Retain earning:
Telah ditentukan penggunaannya:						Its use has been determined:
- Cadangan umum	537.241	537.241	537.241	474.579	455.739	- General backup
- Cadangan bertujuan	30.633	30.633	30.633	30.633	30.633	- Purposeful backup
Belum ditentukan penggunaannya	2.045.598	1.204.820	973.231	65.960	35.385	Use has not been determined
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek tersedia untuk dijual	(5.620)	45	45	48	48	Unrealized gain on available-for-sale securities
Keuntungan aktuarial atas program imbalan kerja	7.194	294	8.397	12.515	(16.093)	Actuarial gains on employee benefit plans
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:	6.415.046	5.573.033	2.849.547	1.883.734	1.805.711	Total equity attributable to owners of the parent:
Kepentingan non-pengendali	22.908	13.877	14.945	9.845	9.240	Non-controlling interests
TOTAL EKUITAS	6.437.954	5.586.910	2.864.493	1.893.579	1.814.951	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	43.712.295	31.664.889	24.906.517	17.552.735	11.393.258	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN						
CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME						
Pendapatan Bunga dan Syariah	8.425.156	5.605.264	4.924.088	3.140.049	2.040.639	Interest Income and Sharia
Beban Bunga dan Syariah	(2.306.081)	(1.689.808)	(1.595.095)	(989.839)	(672.470)	Interest and Sharia Expense
Pendapatan Bunga dan Syariah- Bersih	6.119.075	3.915.456	3.328.994	2.150.210	1.368.169	Interest Income and Sharia- Net
Pendapatan dari jasa giro, dividen dan bunga deposito berjangka	96.724	106.598	58.400	21.504	23.641	Income from demand deposits, dividends and interest on time deposits
Pendapatan dari kegiatan manajer investasi	54.675	51.421	61.929	53.669	58.293	Income from investment manager activities
Keuntungan terealisasi atas penjualan efek	13.906	10.678	97.634	29.415	116	Realized gain on sale of securities
Pendapatan dari Java Reconstruction Fund		2.105	2.947	4.158	3.919	Revenue from the Java Reconstruction Fund

Uraian	2021	2020	2019 ^{a)}	2018 ^{a)}	2017	Description
Pendapatan dari jasa konsultasi manajemen	5.959	190	9.203	6.952	10.517	Revenue from management consulting services
Laba penjualan aset tetap	(465)	-	95	29	41	Profit on sale of fixed assets
Beban usaha	(5.345.940)	(3.870.282)	(3.274.002)	(2.177.658)	(1.493.075)	Operating expenses
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	450	(145)	328	(344)	(65)	Profit (loss) on foreign exchange - net
Lain-lain - bersih	142.288	183.113	1.005.792	10.786	98.233	Miscellaneous - clean
LABA USAHA	1.086.672	399.135	1.291.319	98.723	69.790	OPERATING INCOME
Bagian atas laba (rugi) bersih entitas asosiasi		-	-	434	(81)	Share of net income (loss) of associates
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1.086.672	399.135	1.291.319	99.157	69.709	INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSES
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan:						Income Tax Benefits (Expenses):
Pajak kini	(401.478)	(153.962)	(356.461)	(34.175)	(22.380)	Current tax
Pajak tangguhan	159.935	113.422	42.453	2.816	(10.658)	Deferred tax
Total beban pajak penghasilan - bersih	(241.544)	(40.541)	(314.008)	(31.359)	(33.038)	Total income tax expense - net
LABA TAHUN BERJALAN	845.128	358.595	977.311	67.798	36.671	INCOME FOR THE YEAR
Penghasilan Komprehensif Lain:						Other Comprehensive Income:
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:						Items that will not be reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali atas program imbalan pasca kerja	7.216	(6.923)	(5.113)	4.998	(10.005)	Remeasurement of post-employment benefit plans
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:						Items to be reclassified to profit or loss:
Kerugian yang belum direalisasi dari portofolio efek tersedia untuk dijual	(5.665)	-	(3)	-	-	Unrealized losses from the available-for-sale securities portfolio
Pajak penghasilan atas pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		-	-	-	-	Income tax on items that will not be reclassified to profit or loss
Total Penghasilan Komprehensif Lain	1.551	(6.923)	(5.115)	(4.998)	(10.005)	Total Other Comprehensive Income
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN	846.679	351.672	972.195	72.796	26.666	OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
Laba Tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:						Profit for the year attributable to:
Pemilik entitas induk	840.778	358.180	973.231	65.960	35.385	Parent entity owner
Kepentingan non-pengendali	4.350	415	4.079	1.838	1.286	Non-controlling interests
Total	845.128	358.595	977.311	67.798	36.671	Total
Laba komprehensif Tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:						Comprehensive income for the year attributable to:
Pemilik entitas induk	842.329	351.419	968.257	70.958	25.380	Parent entity owner
Kepentingan non-pengendali	4.350	253	3.938	1.838	1.286	Non-controlling interests
Total	846.679	351.672	972.195	72.796	26.666	Total

Uraian	2021	2020	2019 ¹⁾	2018 ¹⁾	2017	Description
Laba per saham						Earnings per share
Dasar dan dilusian, laba Tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	221.257	244.214	748.639	50.739	27.219	Basic and diluted, profit for the year attributable to owners of the parent
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN						
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS						
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES
Pengembalian penyaluran pinjaman	31.773.404	20.662.776	19.969.177	9.609.713	4.678.484	Loan disbursement
Penerimaan dari pendapatan bunga	8.487.250	5.359.063	4.600.589	2.626.231	1.564.272	Revenue from interest income
Penerimaan usaha lainnya	517.905	123.240	86.944	1.457.673	693.829	Other business receipts
Pengembalian pembiayaan modal ventura	157.116	208.605	221.418	119.763	129.163	Return on venture capital financing
Penerimaan dari jasa giro dan bunga deposito	105.883	112.351	56.936	23.215	46.278	Receipts from current accounts and deposit interest
Penerimaan pendapatan pembiayaan modal ventura	82.932	73.279	75.317	71.841	65.938	Venture capital financing income receipts
Penerimaan dari jasa penasihat keuangan, konsultasi manajemen dan investasi	70.551	62.640	88.990	51.094	61.541	Acceptance of financial advisory services, management consulting and investment
Keuntungan penjualan portofolio efek - bersih	2.365	860	2.979	-	6.885	Profit on sale of securities portfolio - net
Kenaikan penyaluran pinjaman	(42.712.862)	(25.495.011)	(24.824.489)	(15.052.300)	(6.792.262)	Increase in lending
Pembayaran kepada pegawai	(3.793.533)	(2.634.795)	(2.036.195)	(2.236.874)	(1.457.256)	Payment to employees
Pembayaran bunga pinjaman dan pembayaran kepada pihak ketiga	(1.745.830)	(1.973.296)	(1.959.471)	(1.528.121)	(1.316.217)	Payment of interest on loans and payments to third parties
Pembayaran pajak	(544.311)	(204.791)	(380.317)	(240.749)	(163.858)	Payment of taxes
Kenaikan pembiayaan modal ventura	(155.725)	(126.982)	(409.714)	(256.147)	(212.553)	Increase in venture capital financing
Pembelian efek - bersih	(298)	(8.516)	(11.164)	2.043	(11.467)	Securities purchase - net
Penerimaan lain-lain	303.849	105.191	-	-	-	Miscellaneous Receipt
Arus kas bersih (digunakan untuk) aktivitas operasi	(7.451.305)	(3.735.386)	(4.558.573)	(5.020.183)	(2.605.087)	Net cash flows used in operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penjualan efek - bersih	200.000	139.126	1.937.000	768.069	435.570	Sales on marketable Securities - net
Penjualan aset tetap	76.786	7.822	27.380	16.442	28.260	Sale of fixed assets
Divestasi pada entitas asosiasi	-	18.799	347	-	-	Divestment in associates
Pembelian efek - bersih	(1.130.000)	(459.159)	(2.631.300)	(635.000)	(400.000)	Securities purchase - net
Pembelian aset tetap	(1.121.136)	(224.644)	(211.358)	(366.390)	(827.073)	Purchase of fixed assets
Penerimaan dividen		-	2.493	1.031	587	Dividend Receipt
Penambahan investasi pada entitas asosiasi		-	(3.878)	-	-	Additional investment in associates
Pembayaran dividen		-	(1.202)	-	-	Dividend payment
(Penambahan) aset lain-lain		-	-	-	(206)	(Addition of) other assets
Arus kas bersih (digunakan untuk) aktivitas investasi	(1.974.350)	(518.055)	(823.526)	(215.848)	(762.861)	Net cash flows used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan pinjaman bank	16.685.426	8.531.020	9.567.191	5.843.362	3.175.990	Acceptance of bank loans

Uraian	2021	2020	2019 ^{*)}	2018 ^{*)}	2017	Description
Penerimaan dana dari MTN	4.470.700	692.000	3.168.500	1.270.000	1.325.000	Receipt of funds from MTN
Penerimaan dana dari obligasi	3.666.200	1.983.800	3.350.000	2.500.000	1.500.000	Receipt of funds from bonds
Penerimaan dana dari Hibah	61.000	189.394	919.824	-	-	Receipt of Funds from Grants
Penerimaan dana dari pihak non-bank	2.375	-	-	-	-	Receipt of funds from non-bank parties
Penerimaan dari Penyertaan Modal Negara	-	2.500.000	-	-	-	Revenue from State Equity Participation
Pembayaran dividen	-	-	(3.298)	(1.048)	(1.084)	Dividend payment
Pembayaran pinjaman bank	(10.662.298)	(7.138.313)	(7.184.025)	(2.640.693)	(1.199.822)	Bank loan payments
Pembayaran pokok obligasi	(2.997.800)	(750.000)	(907.000)	(1.000.000)	(687.000)	Bond principal payment
Pembayaran untuk MTN	(2.229.500)	(390.000)	(2.175.000)	-	(650.000)	Payment for MTN
Pembayaran biaya emisi obligasi	(9.162)	(3.004)	(11.537)	(3.458)	(2.938)	Payment of bond issuance fees
Penerimaan dana dari pihak non-bank	-	-	-	55.000	236.000	Receipt of funds from non-bank parties
(Pembayaran) dana kepada pihak non-bank	(2.876)	-	-	(23.449)	(38.650)	(Payment of) funds to non-bank parties
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	8.984.066	5.614.897	6.724.654	5.999.713	3.657.496	Net cash flows provided by financing activities
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas	(441.589)	1.361.456	1.342.554	763.682	289.548	Net Increase in Cash and Cash Equivalents
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun	4.462.197	3.100.741	1.758.187	994.504	704.956	Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun	4.020.609	4.462.197	3.100.741	1.758.187	994.504	Cash and Cash Equivalents at the End of the Year
KAS DAN SETARA KAS TERDIRI DARI:						CASH AND CASH EQUIVALENTS COMPRISE OF:
- Kas	11.603	13.272	20.764	148.030	8.362	- Cash
- Bank	3.016.948	3.105.106	2.026.522	808.025	799.025	- Bank
- Deposito jangka pendek	992.058	1.343.820	1.053.455	802.132	187.117	- Short term deposits
Total	4.020.609	4.462.197	3.100.741	1.758.187	994.504	Total
RASIO KEUANGAN						
FINANCIAL RATIO						
Rentabilitas (%)	3,72	1,05	2,33	1,07	2,27	Profitability (%)
Likuiditas (Rasio Lancar) (%)	192,28	193,91	247,32	200,50	120,75	Liquidity (Current Ratio) (%)
Solvabilitas (Rasio Liabilitas Terhadap Jumlah Aset) (%)	139,19	140,29	123,89	123,72	130,99	Solvency (Ratio of Liabilities to Total Assets) (%)
Profit Margin (%)	12,44	3,64	7,09	3,03	3,24	Profit Margin (%)
Debt to Equity (Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas) (x)	4,88	4,04	6,95	8,55	5,28	Debt to Equity (Ratio of Liabilities to Equity) (x)
Gearing Ratio (x)	4,25	3,24	5,87	6,55	4,24	Gearing Ratio (x)
Rasio Laba (Rugi) terhadap Jumlah Aset (%)	2,49	1,26	5,18	0,37	0,32	Profit (Loss) Ratio to Total Assets (%)
Rasio Laba (Rugi) terhadap Ekuitas (%)	13,13	6,42	34,12	3,58	2,02	Ratio of Profit (Loss) to Equity (%)
Rasio Laba (Rugi) terhadap Pendapatan (%)	9,83	6,21	18,96	2,08	1,64	Profit (Loss) to Income Ratio (%)

*) Disajikan kembali / Reserved

Ikhtisar Operasional

Operational Overview

Tabel Produktivitas Segmen Pembiayaan
Table of Financing Segment Productivity

(dalam miliar Rupiah/in billion Rupiah)

Uraian	2021	2020	2019*)	2018	2017	Description
Produktivitas Segmen Pembiayaan						Productivity of the Financing Segment
Penyaluran PNM Mekaar	46.445,26	24.346,35	20.185,28	10.462,81	4.151,04	Mekaar PNM distribution
Penyaluran ULaMM	3.010,31	2.514,75	3.876,73	3.946,54	2.079,05	ULaMM distribution
Produktivitas Segmen Pembiayaan						Investment Manager Segment Productivity
Aset Under Management	14.523,94	14.720,78	13.566,88	8.559,76	7.621,21	Assets Under Management
Produktivitas Segmen Modal Ventura						Productivity of the Venture Capital Segment
Penyaluran Modal Ventura	704,12	533,40	559,08	271,19	320,42	Distribution of Venture Capital
Produktivitas Segmen Pembiayaan Syariah						Productivity of the Sharia Financing Segment
ULaMM Syariah	1.105,16	496,36	478,83	310,55	159,30	ULaMM Syariah
Mekaar Syariah	27.259,67	11.324,91	9.034,14	495,57	-	Mekaar Syariah

Informasi Harga Saham

Share Price Information

Sampai dengan 31 Desember 2021, PNM belum menjadi perusahaan yang mencatatkan sahamnya di bursa saham. Dengan demikian, tidak terdapat informasi harga saham, kapitalisasi pasar saham, dan volume perdagangan saham. Sedangkan informasi modal saham selama dua tahun terakhir disajikan sebagai berikut:

As of December 31, 2021, PNM had not become a company listing its shares on the stock exchange. Thus, there is no information on stock prices, stock market capitalization, and stock trading volume. Meanwhile, share capital information for the last two years is presented as follows:

Tabel Harga Saham
Stock Price Table

(dalam jutaan Rupiah/in million Rupiah)

Uraian	2021	2020	Description
- Modal saham - Saham biasa dengan nilai nominal Rp1.000.000 per lembar saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	3.800.000	2.300.000	- Share capital - Common shares with par value of IDR1,000,000 per share as of December 31, 2021 and 2020
- Modal dasar - 9.200.000 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020			- Authorized capital - 9,200,000 shares as of December 31, 2021 and 2020
- Modal ditempatkan dan disetor penuh 3.800.000 lembar saham per 31 Desember 2021 dan 2.300.000 lembar saham per 31 Desember 2020			- Issued and fully paid capital 3,800,000 shares as of December 31, 2021 and 2,300,000 shares as of December 31, 2020

Aksi Korporasi

Dalam rangka memperkuat kinerja perusahaan untuk menyalurkan pembiayaan kepada para pelaku usaha ultra mikro dan UMK, pada tanggal 21 September 2021 PNM resmi tergabung dalam Holding Ultra Mikro. Penggabungan ini didukung oleh Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham pengendali utama (sebelumnya). Pembentukan ini ditandai penandatanganan Akta Inbreng saham pemerintah di PNM dan Pegadaian sebagai penyertaan modal negara kepada BRI selaku induk holding. Pihak-pihak yang tergabung dalam Holding Ultra Mikro melibatkan tiga entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Dengan adanya hal tersebut PNM mengubah anggaran dasar yang telah di sahkan melalui Akta Penegasan dalam Akta Pertanyaan Keputusan Pemegang Saham:

- Menyetujui perubahan nama Perseroan dari Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani menjadi PT Permodalan Nasional Madani.
- Menyetujui perubahan struktur pemegang saham Perseroan sebagai akibat dari pengalihan seluruh saham seri B Negara Republik Indonesia kepada dan dalam rangka penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Corporate Action

In order to strengthen the company's performance in channeling financing to ultra micro business actors and MSEs, on September 21, 2021 PNM officially joined the Ultra Micro Holding. This merger was supported by the Government of the Republic of Indonesia as the main controlling shareholder (previously). This formation was marked by the signing of the Inbreng Deed of government shares in PNM and Pegadaian as state capital participation to BRI as the holding parent. The parties as members of Holding Ultra Micro involved three State-Owned Enterprises, namely PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero), and PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

With this, PNM amended the articles of association ratified through the Deed of Affirmation in the Deed of Questions of Shareholders' Decisions:

- *Approving the change of the Company's name from a Limited Liability Company (Persero) PT Permodalan Nasional Madani to PT Permodalan Nasional Madani.*
- *Approving the change in the Company's shareholder structure as a result of the transfer of all series B shares of the Republic of Indonesia to and in the context of increasing the participation of the Republic of Indonesia's state capital in PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.*

Informasi Obligasi, Sukuk dan/atau Obligasi Konversi

Bond Information, Sukuk and/or Conversion Bonds

Informasi Obligasi

Bond Information

Tabel Informasi Obligasi PNM

Table of PNM Bond Issuance Chronology

Uraian	Tanggal distribusi Obligasi secara Elektronik Electronic Bond distribution date	Tenor Tenor	Mata Uang Currency	Jumlah Obligasi Bond Amount (Jutaan/Million Rp)	Harga Penawaran Bid Price
Obligasi PUB II Tahap I.B	12 Juli 2017 July 12, 2017	5 Tahun 5 Years	Rp	750.000	100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi 100% (one hundred percent) of the principal amount of the bonds
Obligasi PUB II Tahap II.B	13 April 2018 April 13, 2018	5 Tahun 5 Years	Rp	1.246.000	100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi 100% (one hundred percent) of the principal amount of the bonds
Obligasi PUB III Tahap I.A	29 Mei 2019 May 29, 2019	3 Tahun 3 Years	Rp	1.401.000	100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi 100% (one hundred percent) of the principal amount of the bonds
Obligasi PUB III Tahap I.B	29 Mei 2019 May 29, 2019	5 Tahun 5 Years	Rp	599.000	100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi 100% (one hundred percent) of the principal amount of the bonds
Obligasi PUB III Tahap II.A	29 November 2019 November 29, 2019	3 Tahun 3 Years	Rp	586.500	100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi 100% (one hundred percent) of the principal amount of the bonds
Obligasi PUB III Tahap II.B	29 November 2019 November 29, 2019	5 Tahun 5 Years	Rp	763.500	100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi 100% (one hundred percent) of the principal amount of the bonds
Obligasi PUB III Tahap III.A	30 April 2020 April 30, 2020	3 Tahun 3 Years	Rp	55.100	100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi 100% (one hundred percent) of the principal amount of the bonds
Obligasi PUB III Tahap III.B	30 April 2020 April 30, 2020	5 Tahun 5 Years	Rp	194.900	100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi 100% (one hundred percent) of the principal amount of the bonds
Obligasi PUB III Tahap IV.B	4 Desember 2020 December 4, 2020	3 Tahun 3 Years	Rp	537.000	100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi 100% (one hundred percent) of the principal amount of the bonds
Obligasi PUB III Tahap IV.C	4 Desember 2020 December 4, 2020	5 Tahun 5 Years	Rp	292.000	100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi 100% (one hundred percent) of the principal amount of the bonds

	Tanggal Jatuh Tempo Due date	Tingkat Suku Bunga Interest Rate	Status Pembayaran Payment Status	Peringkat Rating		Wali Amanat Trustee	Description
				2021	2020		
	13 Juli 2022 July 13, 2022	9,00%	Belum Lunas Not yet paid off	idA+	idA	Bank Mega	PUB II Bonds Phase I.B
	28 Maret 2023 March 28, 2023	8,50%	Belum Lunas Not yet paid off	idA+	idA	Bank Mega	PUB II Bonds Phase II.B
	28 Mei 2022 May 28, 2022	9,50%	Belum Lunas Not yet paid off	idA+	idA	Bank Mega	PUB Bonds III Phase I.A
	28 Mei 2024 May 28, 2024	9,85%	Belum Lunas Not yet paid off	idA+	idA	Bank Mega	PUB Bonds III Phase I.B
	28 November 2022 November 28, 2022	8,40%	Belum Lunas Not yet paid off	idA+	idA+	Bank Mega	PUB III Phase II.A . Bonds
	28 November 2024 November 28, 2024	8,75%	Belum Lunas Not yet paid off	idA+	idA+	Bank Mega	PUB III Bonds Phase II.B
	30 April 2023 April 30, 2023	8,40%	Belum Lunas Not yet paid off	idA+	idA+	Bank Mega	PUB III Bonds Phase III.A
	30 April 2025 April 30, 2025	9,00%	Belum Lunas Not yet paid off	idA+	idA+	Bank Mega	PUB III Bonds Phase III.B
	4 Desember 2023 December 4, 2023	7,75%	Belum Lunas Not yet paid off	idA+	idA+	Bank Mega	PUB III Bonds Phase IV.B
	4 Desember 2025 December 4, 2025	8,75%	Belum Lunas Not yet paid off	idA+	idA+	Bank Mega	PUB III Bonds Phase IV.C

Informasi Sukuk

Sukuk Information

Tabel Informasi Sukuk PNM

Table of Information on PNM Sukuk

Uraian	Tanggal Penerbitan Issue Date	Tenor Tenor	Mata Uang Currency	Jumlah Obligasi Amount (Jutaan/Million Rp)	Harga Penawaran Bid Price
Sukuk Mudharabah II Tahun 2018 Seri A	26 Februari 2019 February 26, 2019	3 Tahun 3 Years	Rp	60.000	100% (seratus persen) dari jumlah pokok Sukuk 100% (one hundred percent) of the principal amount of the Sukuk
Sukuk Mudharabah II Tahun 2018 Seri B	26 Maret 2019 March 26, 2019	3 Tahun 3 Years	Rp	240.000	100% (seratus persen) dari jumlah pokok Sukuk 100% (one hundred percent) of the principal amount of the Sukuk
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Tahap I	17 Juni 2019 June 17, 2019	5 Tahun 5 Years	Rp	300.000	100% (seratus persen) dari jumlah pokok Sukuk 100% (one hundred percent) of the principal amount of the Sukuk
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri B	30 Oktober 2019 October 30, 2019	3 Tahun 3 Years	Rp	65.000	100% (seratus persen) dari jumlah pokok Sukuk 100% (one hundred percent) of the principal amount of the Sukuk
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri E	20 November 2019 November 20, 2019	3 Tahun 3 Years	Rp	100.000	100% (seratus persen) dari jumlah pokok Sukuk 100% (one hundred percent) of the principal amount of the Sukuk
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri E Tahap II	5 Desember 2019 December 5, 2019	3 Tahun 3 Years	Rp	50.000	100% (seratus persen) dari jumlah pokok Sukuk 100% (one hundred percent) of the principal amount of the Sukuk
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri C	20 Februari 2020 February 20, 2020	3 Tahun 3 Years	Rp	322.000	100% (seratus persen) dari jumlah pokok Sukuk 100% (one hundred percent) of the principal amount of the Sukuk
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri F	8 April 2020 April 8, 2020	3 Tahun 3 Years	Rp	120.000	100% (seratus persen) dari jumlah pokok Sukuk 100% (one hundred percent) of the principal amount of the Sukuk
Sukuk Mudharabah IV Tahun 2020 Tahap I Seri A	27 Oktober 2020 October 27, 2020	3 Tahun 3 Years	Rp	200.000	100% (seratus persen) dari jumlah pokok Sukuk 100% (one hundred percent) of the principal amount of the Sukuk
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri H	15 Desember 2020 December 15, 2020	3 Tahun 3 Years	Rp	50.000	100% (seratus persen) dari jumlah pokok Sukuk 100% (one hundred percent) of the principal amount of the Sukuk

Informasi Obligasi Konversi

Sampai dengan 31 Desember 2021, PNM tidak menerbitkan obligasi konversi, dengan demikian PNM tidak memiliki informasi mengenai obligasi konversi.

Conversion Bond Information

As of December 31, 2021, PNM has not issued convertible bonds, thus PNM does not have information on convertible bonds.

	Tanggal Jatuh Tempo Due date	Tingkat Suku Bunga Interest Rate	Status Pembayaran Payment status	Peringkat Rating		Wali Amanat Trustee	Description
				2021	2020		
	26 Februari 2022 February 26, 2022	10,50%	Belum Lunas Not yet paid off	idA+(sy)	idA+(sy)	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	Sukuk Mudharabah II 2018 Series A
	26 Februari 2022 February 26, 2022	10,50%	Belum Lunas Not yet paid off	idA+(sy)	idA+(sy)	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	Sukuk Mudharabah II 2018 Series B
	17 Juni 2024 June 17, 2024	11,00%	Belum Lunas Not yet paid off	idA+(sy)	idA+(sy)	PT Bank Syariah Mandiri	Sukuk Mudharabah III Year 2019 Phase I
	30 Oktober 2022 October 30, 2022	10,50%	Belum Lunas Not yet paid off	idA+(sy)	idA+(sy)	PT Bank Syariah Mandiri	Sukuk Mudharabah III Year 2019 Series B
	30 Oktober 2022 October 30, 2022	10,50%	Belum Lunas Not yet paid off	idA+(sy)	idA+(sy)	PT Bank Syariah Mandiri	Sukuk Mudharabah III Year 2019 Series E
	30 Oktober 2022 October 30, 2022	10,50%	Belum Lunas Not yet paid off	idA+(sy)	idA+(sy)	PT Bank Syariah Mandiri	Sukuk Mudharabah III Year 2019 Series E Phase II
	20 Februari 2023 February 20, 2023	9,75%	Belum Lunas Not yet paid off	idA+(sy)	idA+(sy)	PT Bank Syariah Mandiri	Sukuk Mudharabah III Year 2019 Series C
	20 Februari 2023 February 20, 2023	9,75%	Belum Lunas Not yet paid off	idA+(sy)	idA+(sy)	PT Bank Syariah Mandiri	Sukuk Mudharabah III Year 2019 Series F
	27 Oktober 2023 October 27, 2023	9,75%	Belum Lunas Not yet paid off	idA+(sy)	idA+(sy)	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan/and Banten Tbk	Sukuk Mudharabah IV Year 2020 Phase I Series A
	15 Desember 2023 December 15, 2023	10,50%	Belum Lunas Not yet paid off	idA+(sy)	idA+(sy)	PT Bank Syariah Mandiri	Sukuk Mudharabah III Year 2019 Series H

Informasi Sumber Pendanaan Lainnya

Other Funding Sources Information

Tabel Informasi Medium Term Notes (MTN) PNM
Table of Information on Medium Term Notes (MTN) PNM

Uraian	Tanggal Penerbitan Issue Date	Tenor Tenor	Mata Uang Currency	Jumlah Amount (Jutaan / Million Rp)	Harga Penawaran Bid Price
MTN XIII Seri A	10 Januari 2017 January 10, 2017	5 Tahun 5 Years	Rp	50.000	100% (seratus persen) dari jumlah pokok MTN 100% (one hundred percent) of the principal amount of MTN
MTN XIII Seri B	14 Maret 2017 March 14, 2017	5 Tahun 5 Years	Rp	110.000	100% (seratus persen) dari jumlah pokok MTN 100% (one hundred percent) of the principal amount of MTN
MTN XIII Seri C	28 April 2017 April 28, 2017	5 Tahun 5 Years	Rp	200.000	100% (seratus persen) dari jumlah pokok MTN 100% (one hundred percent) of the principal amount of MTN
MTN XIII Seri D	14 Juni 2017 June 14, 2017	5 Tahun 5 Years	Rp	15.000	100% (seratus persen) dari jumlah pokok MTN 100% (one hundred percent) of the principal amount of MTN

* Peringkat saat diterbitkan / Rating when published

Peristiwa Penting di Tahun 2021

Important Events in 2021



Penandatanganan Perjanjian Kerjasama PNM dengan Bank Mega Syariah.

The signing of the PNM Cooperation Agreement with Bank Mega Syariah.



Talkshow PNM Mendorong UMKM Go Digital Melalui Platform PaDi.

PNM Talkshow Encouraging MSMEs to Go Digital Through the PaDi Platform.



Rapat Pembahasan Fasilitas Kredit PNM dengan Bank DKI.

PNM Credit Facility Discussion Meeting with Bank DKI.



Penandatanganan Pendanaan Kerjasama Fasilitas KAB II (Kredit Asuransi Berjangka) PNM dengan Bank Jtrust Tbk.

The signing of the PNM KAB II (Term Insurance Credit) Facility Cooperation Funding with Bank Jtrust Tbk.

Tanggal Jatuh Tempo Due Date	Tingkat Suku Bunga Interest	Status Pembayaran Payment Status	Peringkat* Rating*	Wali Amanat Trustee	Description
10 Januari 2022 January 10, 2022	11,25%	Belum Lunas Not yet paid off	IdA+	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan/and Banten Tbk	MTN XIII Series A
10 Januari 2022 January 10, 2022	11,25%	Belum Lunas Not yet paid off	IdA+	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan/and Banten Tbk	MTN XIII Series B
10 Januari 2022 January 10, 2022	11,25%	Belum Lunas Not yet paid off	IdA+	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan/and Banten Tbk	MTN XIII Series C
10 Januari 2022 January 10, 2022	11,25%	Belum Lunas Not yet paid off	IdA+	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan/and Banten Tbk	MTN XIII Series D



Penandatanganan Kontrak Kinerja Antara PNM dengan Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan.

The signing of the Performance Contract between PNM and the Government Investment Center of the Ministry of Finance.



Anugerah BUMN 2021 Tahun ke-10. PNM Memenangkan Kategori Strategi Tumbuh dan Bertahan Terbaik I.

The 10th Year 2021 BUMN Award. PNM Won the Best Growth and Survival Strategy Category I.



Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Fasilitas Kredit PNM dengan Bank Kalteng.

The signing of the PNM Credit Facility Cooperation Agreement with Bank Kalteng.



Penandatanganan Akad Pembiayaan Ultra Mikro antara PNM dengan Pusat Investasi Pemerintah.

The signing of the Ultra Micro Financing Agreement between PNM and the Government Investment Center.

22

April
April

Iconomics Hybrid Awards 2nd Indonesia Corporate Branding PR Awards.
Iconomics Hybrid Awards 2nd Indonesia Corporate Branding PR Awards.

10

Mei
May

Penandatanganan Akad Kredit Modal Kerja Executing dan Pembiayaan Modal Kerja Mudharabah antara PNM dengan Bank DKI.
The signing of the Executing Working Capital Credit Agreement and Mudharabah Working Capital Financing between PNM and Bank DKI.

31

Mei
May

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara PNM dengan Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

The signing of the Cooperation Agreement between PNM and the Directorate General of Agrarian Planning, Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency.

2

Juni
June

Seremonial HUT PNM ke-22 dan penyerahan penghargaan 2 (dua) rekor MURI (Webinar dengan Peserta Karyawan Perempuan Terbanyak, dan Webinar oleh Peserta Mengenakan Selendang Motif Nusantara Terbanyak)
Ceremony of the 22nd PNM Anniversary and awarding of 2 (two) MURI records (Webinars with the Most Female Employees Participants, and Webinars by Participants Wearing the Most Nusantara Motif Scarves)

5

Agustus
August

GRC and Performance Excellence Award 2021
GRC and Performance Excellence Award 2021

30

Agustus
August

Kick Off Meeting Program "BU KARSA" Kerjasama antara PNM dengan PT Unilever Indonesia Tbk.
Kick Off Meeting Program "BU KARSA" Cooperation between PNM and PT Unilever Indonesia Tbk.

1

September
September

Penandatanganan Perjanjian Facility Line Pembiayaan Mikro Perumahan (Home) antara PNM dengan SMF.

The signing of the Home Micro Financing Facility Line Agreement between PNM and SMF.

8

September
September

CEO Talk PNM - Ketahanan Usaha Para Pelaku Usaha Subsisten di Tengah Pandemi.

CEO Talk PNM - Business Resilience of Subsistence Business Actors in the Midst of a Pandemic.



13
September
September

Penandatanganan Kerjasama Perjanjian Pengalihan Saham Dalam Rangka Pembentukan Holding Ultra Mikro antara BRI, Pegadaian, dan PNM.
Signing of Share Transfer Agreement for the Establishment of Ultra Micro Holding between BRI, Pegadaian, and PNM.



21
September
September

Peresmian Ruang Pintar, Sarana Air Bersih & Pengembangan Kapasitas Usaha Klusterisasi Sektoral Dusun Kuri Caddi, Desa Nisombalia, Kabupaten Maros, Makassar.
Inauguration of Smart Room, Clean Water Facilities & Business Capacity Development for Sectoral Clustering of Kuri Caddi Hamlet, Nisombalia Village, Maros Regency, Makassar.



22
September
September

Seremonial Perjanjian Kerjasama Payroll dan Layanan Perbankan antara PNM dan PT BSI, Tbk.
Ceremonial Payroll Cooperation Agreement and Banking Services between PNM and PT BSI, Tbk.



27
September
September

Penandatanganan Perjanjian Fasilitas Modal Kerja Senilai Rp1.000.000.000.000 antara PT PNM dengan PT Bank BJB.
The signing of the Working Capital Facility Agreement of Rp. 1,000,000,000,000 between PT PNM and PT Bank BJB.



29
September
September

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Penjaminan Mekaar Reguler dan Mekaar Plus.
The signing of the Mekaar Regular and Mekaar Plus Guarantee Cooperation Agreements.



4
Oktober
October

Peresmian Program Sarana Air Bersih dan Pengembangan Kapasitas Usaha Klusterisasi Kain Tenun.
Inauguration of the Clean Water Facility Program and Capacity Development of Woven Cloth Clustering Business.



14
Oktober
October

Penyerahan Penghargaan TJSL & CSR Award 2021.
TJSL Award & CSR Award 2021 Presentation.



28
Oktober
October

Peresmian Ruang Pintar "Damai Madani Pekanbaru".
Inauguration of the "Peaceful Madani Pekanbaru Smart Room".

28
Oktober
October



Penandatanganan Kerjasama antara PNM dengan Gubernur Riau.
Signing of Cooperation between PNM and the Governor of Riau.

11
November
November



Launching Buku Pembiayaan UMKM.
Launching of MSME Financing Book.

30
November
November



Awarding Bisnis Indonesia Top BUMN Award 2021 - Direktur Utama PNM, Bapak Arief Mulyadi dianugerahi Kategori Top CEO in Sustainable Business Growth.
Awarding Bisnis Indonesia Top BUMN Award 2021 - PNM President Director, Mr. Arief Mulyadi was awarded the Top CEO Category in Sustainable Business Growth.

30
November
November



Awarding Bisnis Indonesia Top BUMN Award 2021 - Direktur Utama PNM, Bapak Arief Mulyadi dianugerahi Kategori Top CEO in Sustainable Business Growth.
Inauguration of the PNM and Bank BTN Hydroponic Cultivation Empowerment Program.

3
Desember
December



Peresmian Program Pemberdayaan Budidaya Hidroponik Binaan PNM dan Bank BTN.
Inauguration of the PNM and Bank BTN Hydroponic Cultivation Empowerment Program.

6
Desember
December



Penjurian TOP Digital Awards 2021
TOP Digital Awards 2021 judging



15
Desember
December

Penandatanganan Akta Jual Beli Menara PNM.
Signing of the PNM Tower Sale and Purchase Deed



15
Desember
December

BUMN Branding & Marketing Award 2021, PNM mendapatkan penghargaan Gold Winner Kategori Branding: Brand Identity dan Bapak Arief Mulyadi dinobatkan sebagai The Best CEO BUMN Kategori Transformation.
BUMN Branding & Marketing Award 2021, PNM was awarded the Gold Winner in the Branding Category: Brand Identity and Mr. Arief Mulyadi was named The Best CEO of BUMN in the Transformation Category.



16
Desember
December

Penandatanganan Komitmen *Funding Facility* PNM dengan BRI Sebesar Rp4 Triliun.
Signing of PNM Funding Facility Commitment with BRI in the amount of IDR 4 trillion.



21
Desember
December

TOP Digital Award 2021.
TOP Digital Awards 2021



22
Desember
December

Penandatanganan Perjanjian Tripartit Pembiayaan Mikro Perumahan Bagi Karyawan PNM Melalui Koperasi Karyawan Madani.
Signing of the Tripartite Agreement for Housing Microfinance for PNM Employees through the Madani Employee Cooperative.



23
Desember
December

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Fasilitas Kredit BRI Total Plafond Rp4 Triliun.
The signing of the BRI Credit Facility Cooperation Agreement with a Total Ceiling of IDR 4 Trillion.

LAPORAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

*Report of the Board of
Directors and the Board of
Commissioners*



Laporan Direksi

Board of Directors' Report

Arief Mulyadi

Direktur Utama
President Director



Pada tahun 2021, PNM telah menyalurkan pembiayaan PNM Mekaar sebesar Rp46,44 triliun, meningkat 90,77% dari Rp24,35 triliun pada tahun 2020. PNM ULaMM selama tahun 2021 tercatat mampu menyalurkan dana sebesar Rp3,01 triliun meningkat 19,71% dari tahun 2020 yaitu sebesar Rp2,51 triliun.

In 2021, PNM has distributed PNM Mekaar financing of IDR46.44 trillion, an increase of 90.77% from IDR24.35 trillion in 2020. PNM ULaMM during 2021 was recorded to be able to disburse funds of IDR3.01 trillion, an increase of 19.71% from in 2020, which is IDR2.51 trillion.

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat, Dear Shareholders and Stakeholders,

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmatNya kepada kita semua, PT Permodalan Nasional Madani dapat memberikan kinerja yang baik meskipun kondisi perekonomian masih terhambat oleh pandemi COVID-19. Direksi beserta seluruh jajaran manajemen dan karyawan senantiasa berkomitmen untuk memberikan yang terbaik sehingga target-target Perusahaan yang ditetapkan secara umum tercapai.

Pada tahun 2021 merupakan tahun yang penting bagi Perusahaan dengan dibentuknya Holding Ultra Mikro yang terdiri dari 3 (tiga) entitas BUMN yakni, BRI selaku induk holding, Pegadaian dan PNM. Pembentukan holding ultra mikro merupakan sinergi yang sangat potensial untuk memperbesar peluang dalam menangkap pasar pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta semakin memperkuat pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Indonesia.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan laporan jalannya kepengurusan Perusahaan untuk Tahun buku 2021 yang meliputi kinerja Perusahaan, analisis prospek perusahaan, perkembangan penerapan tata kelola perusahaan, penilaian kinerja Komite di bawah Direksi serta perubahan komposisi Direksi.

Analisis atas Kinerja Perusahaan

Kinerja Perusahaan tidak dapat terlepas dari kondisi perekonomian baik perekonomian global maupun nasional serta kondisi industri khususnya. Perbaikan ekonomi global pada tahun 2021 terus berlanjut meski tidak merata dengan ketidakpastian pasar keuangan, namun berbagai negara mengalami tren pertumbuhan ekonomi yang melambat pada Triwulan III 2021. Pertumbuhan global pada 2021 yang

Praise and gratitude is addressed to the presence of God Almighty, for His abundance of grace to all of us, so PT Permodalan Nasional Madani was able to provide a good performance even though the economic condition was still hampered by the COVID-19 pandemic. The Board of Directors along with all levels of management and employees always committed to providing the best so that the general targets set for the Company could be achieved.

2021 was an important year for the Company with the establishment of Ultra Micro Holding consisting of 3 (three) SOEs entities namely, BRI as the holding parent, Pegadaian and PNM. The formation of an ultra-micro holding became a synergy with great potential to increase opportunities in capturing the financing market for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and further strengthen the development and empowerment of MSMEs in Indonesia.

On this occasion, please allow us to submit a report on the management of the Company for the 2021 financial year which includes the Company's performance, analysis of the company's prospects, developments in the implementation of corporate governance, performance appraisal of the Committees under the Board of Directors and changes in the composition of the Board of Directors.

Analysis of Company Performance

The Company's performance could not be separated from the economic conditions, both global and national economies, as well as industrial conditions in particular. The global economic improvement in 2021 continued, although unevenly with financial market uncertainty, but various countries experienced a slowing trend of economic growth in the third quarter of 2021. The declining global growth in 2021

menurun terjadi baik di negara maju maupun berkembang, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti level basis pertumbuhan yang tinggi (*high base*) pada akhir tahun 2021, dampak penyebaran varian Delta, serta efek dari disrupsi *supply chain* yang menghambat laju pemulihan. Beberapa negara ASEAN mengalami kontraksi ekonomi cukup dalam di Triwulan III 2021 akibat pemberlakuan restriksi ketat selama gelombang Delta, seperti yang terjadi di Vietnam (-6,2%), Malaysia (-4,5%), dan Thailand (-0,3%).

Meskipun perekonomian global masih mengalami ketidakpastian, namun perbaikan perekonomian nasional masih terus berlanjut. Kinerja ekonomi Indonesia pada Triwulan IV 2021 mampu tumbuh sebesar 5,02% (YoY), menunjukkan menguatnya pemulihan ekonomi. Keberhasilan pengendalian pandemi, partisipasi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi, efektivitas kebijakan stimulus fiskal oleh pemerintah serta sinergi yang baik antar otoritas dalam menjaga stabilitas dan percepatan pemulihan ekonomi menjadi faktor utama terjalannya keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional.

Secara *quarter-to-quarter* (QtQ), pertumbuhan ekonomi Triwulan IV 2021 tercatat 1,06%, melampaui pola normalnya yang secara historis mencatatkan pertumbuhan negatif (qtq Triwulan IV 2015 – 2019 rata-rata -1,7%). Laju pertumbuhan ekonomi Triwulan IV ditopang oleh pertumbuhan positif seluruh komponen pengeluaran dan sektor produksi utama. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 mencapai 3,69%. Capaian ini jauh lebih baik dibandingkan kondisi 2020 yang berkontraksi 2,07%.

Pada sisi ekosistem UMKM, Bank Indonesia secara konsisten terus turut memperluas dan memperkuat program pengembangan UMKM. Beberapa kebijakan pendukung juga ditempuh untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Sinergi erat dengan Pemerintah, perbankan, dan institusi lainnya ditingkatkan untuk mengembangkan UMKM serta ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bank Indonesia terus memperkuat program pengembangan UMKM untuk mendorong UMKM digital dan ekspor. Dalam kaitan ini, program pengembangan UMKM terus ditingkatkan melalui tiga pilar kebijakan, yaitu (i) korporatisasi, (ii) peningkatan kapasitas, dan (iii) pembiayaan, guna mewujudkan UMKM yang produktif, inovatif, dan adaptif.

Peningkatan kapasitas UMKM dilakukan secara *end-to-end* dan difokuskan pada digitalisasi untuk mendorong peningkatan produksi, pengelolaan keuangan, dan perluasan akses pasar. Pada aspek pembiayaan, Bank Indonesia melakukan (i) perluasan akses untuk kemudahan ekspansi usaha dengan pembiayaan UMKM yang lebih sehat, (ii) perluasan pemanfaatan SI-APIK, serta (iii) penyediaan informasi profil UMKM potensial untuk dibiayai oleh lembaga keuangan melalui *website* Bank Indonesia. Fasilitasi akses

occurred in both developed and developing countries, and this was influenced by several factors, such as the high base level of growth at the end of 2021, the impact of the spread of the Delta variant, as well as the effects of supply chain disruptions that hindered the pace of recovery. Several ASEAN countries experienced a deep economic contraction in Q3 2021 due to the imposition of strict restrictions during the Delta wave, such as what happened in Vietnam (-6.2%), Malaysia (-4.5%), and Thailand (-0.3%).

Although the global economy still experienced uncertainty, the improvement in the national economy still continued. Indonesia's economic performance in Quarter IV 2021 was able to grow by 5.02% (YoY), indicating a strengthening economic recovery. The success of controlling the pandemic, public participation in implementing health and vaccination protocols, the effectiveness of fiscal stimulus policies by the government and good synergy among authorities in maintaining stability and accelerating economic recovery became the main factors in maintaining the sustainability of the national economic recovery.

On a quarter-to-quarter (QtQ) basis, the economic growth in Quarter IV 2021 was recorded at 1.06%, exceeding the normal pattern which historically recorded negative growth (Q4Q IV 2015 – 2019 average -1.7%). The pace of economic growth in Quarter IV was supported by positive growth in all components of expenditure and the main production sectors. Cumulatively, Indonesia's economic growth in 2021 reached 3.69%. This achievement was much better than the 2020 condition which contracted 2.07%.

On the MSME ecosystem side, Bank Indonesia consistently continued to expand and strengthen MSME development programs. Several supporting policies were also adopted to encourage the recovery of the national economy. Close synergy with the Government, banks and other institutions was enhanced to develop MSMEs as well as sharia economy and finance as a new source of Indonesia's economic growth. Bank Indonesia continued to strengthen its MSME development program to encourage digital MSMEs and exports. In this regard, the MSME development program continued to improve through three policy pillars, namely (i) corporatization, (ii) capacity building, and (iii) financing, in order to realize productive, innovative, and adaptive MSMEs.

The capacity building of MSMEs was carried out end-to-end and was focused on digitalization to encourage increased production, financial management, and expansion of market access. In the financing aspect, Bank Indonesia carried out (i) expansion of access to facilitate business expansion with healthier MSME financing, (ii) expansion of the use of SI-APIK, and (iii) provision of profile information on potential MSMEs to be financed by financial institutions through the Bank Indonesia website. Facilitation of access to MSME

pembiayaan UMKM juga terus dilakukan untuk mendukung pemenuhan ketentuan pembiayaan inklusif, diantaranya dengan mendorong pola pembiayaan UMKM melalui *multiple channel* untuk meningkatkan peran UMKM dalam ekspor dan substitusi impor serta fasilitasi temu bisnis.

Dalam menghadapi kondisi perekonomian dan ekosistem UMKM tersebut, Direksi telah menetapkan strategi perusahaan dan kebijakan strategis untuk mencapai target Perusahaan tahun 2021 sebagai berikut:

1. Meningkatkan nilai sosial bagi Indonesia melalui pemberdayaan 9,6 juta nasabah PNM Mekaar aktif dengan cara pengembangan jaringan layanan dan peningkatan proses digitalisasi proses pembiayaan.
2. Meningkatkan pengelolaan manajemen risiko dengan pencapaian Indeks Kematangan Manajemen Risiko *level Defined*.
3. Mengusahakan sumber pendanaan internasional melalui kerjasama dengan lembaga/insitusi nasional maupun internasional.
4. Mengembangkan proses digitalisasi Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) PNM Mekaar.
5. Mengembangkan dan mengelola aplikasi PNM Digi untuk nasabah.
6. Meningkatkan talenta perempuan dan milenial melalui program Top Talenta Perempuan dan Top Talenta Milenial.

Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan pada tahun 2021, PNM menetapkan beberapa strategi bisnis yang dijabarkan sebagai berikut:

1. PNM tetap fokus pada pembiayaan perempuan prasejahtera melalui PNM Mekaar termasuk pendampingan dan pelatihan sehingga diharapkan para nasabah tersebut dapat meningkat usahanya untuk kemudian menjadi nasabah PNM Mekaar Naik Kelas.
2. Pemberdayaan nasabah PNM Mekaar berkelanjutan juga menjadi fokus PNM, diharapkan para nasabah PNM Mekaar dapat meningkatkan usaha dan memanfaatkan fasilitas produk PNM Mekaar Plus dan ULamm Pantas, dengan tetap mempertahankan kegiatan/pola pemberdayaan secara kelompok dan maksimal plafon Rp50 juta.
3. Bekerjasama dan bersinergi dengan BUMN lain dan lembaga donor, mengembangkan program-program kemitraan serta melakukan aktivitas pengembangan kapasitas usaha UKM dan pengembangan kelompok.
4. Mendirikan dan mengoperasikan kantor cabang PNM Mekaar baru untuk memperluas jangkauan jaringan serta mengoptimalkan produktivitas jaringan kantor tersebut.
5. Mengupayakan diversifikasi pendanaan dengan melakukan *mixed* pendanaan pasar modal dan perbankan yang bertujuan untuk menurunkan suku bunga pinjaman (*lending rate*) ke nasabah. Diversifikasi sumber pendanaan diperlukan untuk tidak menjadikan pendanaan dari perbankan menjadi satu-satunya sumber pendanaan bagi PNM.

financing was also continuously carried out to support the fulfillment of inclusive financing provisions, including by encouraging MSME financing patterns through multiple channels to increase the role of MSMEs in exports and import substitution as well as facilitating business gatherings.

In dealing with the economic conditions and the MSME ecosystem, the Board of Directors determined the company's strategy and strategic policies to achieve the Company's 2021 targets as follows:

1. *Increasing social value for Indonesia through empowering 9.6 million active PNM Mekaar customers by developing a service network and improving the digitization process of the financing process.*
2. *Improving risk management management by achieving the Defined level of Risk Management Maturity Index.*
3. *Seeking international funding sources through collaboration with national and international institutions/institutions.*
4. *Developing the process of digitizing the PNM Mekaar Weekly Group Meeting (PKM).*
5. *Developing and managing the PNM Digi application for customers.*
6. *Increasing the talents of women and millennials through the Top Talent Women and Millennial Top Talent programs.*

To achieve the targets set in 2021, PNM established several business strategies described as follows:

1. *PNM remained focusing on financing underprivileged women through PNM Mekaar including mentoring and training so that these customers could increase their business and then became PNM Mekaar Upgrading customers.*
2. *Continuous empowerment of PNM Mekaar customers was also the focus of PNM, it was expected that PNM Mekaar customers could increase their business and take advantage of PNM Mekaar Plus and ULamm Pantas product facilities, while maintaining group empowerment activities/patterns and a maximum limit of IDR50 million.*
3. *Cooperating and synergizing with other SOEs and donor agencies, developing partnership programs as well as carrying out SME business capacity building and group development activities.*
4. *Establishing and operating a new PNM Mekaar branch office to expand network coverage and optimize the productivity of the office network.*
5. *Striving to diversify funding by conducting mixed funding of the capital market and banking with the aim of lowering the lending rate to customers. Diversification of funding sources was needed, so the source of funding did not only from banks.*

6. Melakukan riset pasar untuk mengetahui kebutuhan pelanggan sehingga dapat direspon dalam bentuk produk baru yang kompetitif dan memberikan tingkat keuntungan yang optimum.
7. Melakukan sinergi bisnis antara induk dan anak PNM.

Dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Perusahaan, Direksi telah memimpin penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yang memuat kebijakan dan strategi Perusahaan untuk tahun yang bersangkutan. Direksi memastikan implementasi strategi dengan melakukan evaluasi untuk memastikan efektivitas penerapan strategi yang telah ditetapkan. Selain itu Direksi juga telah memimpin penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Dengan peranan Direksi tersebut, Perusahaan berhasil memenuhi target kinerja Perusahaan.

Dengan menerapkan strategi bisnis tersebut, pada tahun 2021 Perusahaan telah berhasil mencatatkan kinerja yang baik. Pada tahun 2021, PNM telah menyalurkan pembiayaan PNM Mekaar sebesar Rp46,44 triliun, meningkat 90,77% dari Rp24,35 triliun pada tahun 2020. Dari jumlah penyaluran Mekaar 2021, porsi penyaluran terbesar diberikan untuk segmen Perdagangan, Pertanian, dan Industri. Penyaluran PNM ULaMM selama tahun 2021 tercatat mampu menyalurkan dana sebesar Rp3,01 triliun dimana hal tersebut lebih baik dibandingkan dengan jumlah penyaluran tahun 2020 yaitu sebesar Rp2,51 triliun, peningkatan jumlah penyaluran PNM ULaMM mencapai 19,71% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Selain pembiayaan Mekaar dan ULaMM, peningkatan kinerja operasional terdapat pada pembiayaan modal ventura yang dilaksanakan melalui anak perusahaan PT PNM Venture Capital (PNM VC). Pada tahun 2021, PNM VC telah menyalurkan modal ventura sebesar Rp704,12 miliar, jumlah ini meningkat 32,01% dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar Rp533,40 miliar.

Dari sisi keuangan, Pendapatan bunga dan syariah-bersih tahun 2021 sebesar Rp6,12 triliun, meningkat 56,28% atau Rp2,20 triliun dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp3,92 triliun. Seiring dengan peningkatan pendapatan bunga tersebut, laba tahun berjalan juga mengalami peningkatan. PNM memperoleh laba tahun berjalan sebesar Rp845,13 miliar, meningkat sebesar Rp486,53 miliar atau 135,68% dari perolehan di tahun 2020 sebesar Rp358,60 miliar. Dengan meningkatnya laba tahun berjalan, maka ekuitas Perusahaan juga mengalami peningkatan. Sepanjang tahun 2021, jumlah ekuitas PNM tercatat sebesar Rp6,44 triliun. Jumlah tersebut mengalami peningkatan 15,23% atau Rp851,04 miliar dibandingkan jumlah ekuitas PNM pada tahun 2020 yang sebesar Rp5,59 triliun. Jumlah aset PNM juga mengalami peningkatan yang tercatat sebesar Rp43,71 triliun. Jumlah tersebut mengalami peningkatan 38,05% atau Rp12,05 triliun dibandingkan jumlah aset sebesar Rp31,67 triliun pada tahun 2020.

6. Conducting market research to determine customer needs so that they could respond to in the form of new competitive products and provide an optimum level of profit.
7. Conducting business synergies between the parent and subsidiary of PNM.

In formulating the Company's strategy and strategic policies, the Board of Directors led the preparation of the Company's Budget Work Plan (RKAP) which contained the Company's policies and strategies for the year concerned. The Board of Directors ensured the implementation of the strategy by conducting an evaluation to ensure the effectiveness of the implementation of the strategy determined. In addition, the Board of Directors also led the preparation of the Company's Long Term Plan (RJPP). With the role of the Board of Directors, the Company succeeded in meeting the Company's performance targets.

By implementing this business strategy, in 2021 the Company managed to record a good performance. In 2021, PNM distributed PNM Mekaar financing of IDR46.44 trillion, an increase of 90.77% from IDR24.35 trillion in 2020. Of the total distribution of Mekaar 2021, the largest portion of distribution was given to the Trade, Agriculture and Industry segments. PNM ULaMM during 2021 was recorded to disburse funds of IDR3.01 trillion, which was better than the total distribution in 2020 which reached IDR2.51 trillion, an increase in the number of PNM ULaMM distributions reaching 19.71% compared to the previous year.

In addition to financing from Mekaar and ULaMM, the increase in operational performance was found in venture capital financing carried out through its subsidiary PT PNM Venture Capital (PNM VC). In 2021, PNM VC disbursed venture capital of IDR 704.12 billion, this amount increased by 32.01% compared to 2020, which was IDR533.40 billion.

From the financial side, net interest and sharia income in 2021 reached IDR 6.12 trillion, an increase of 56.28% or IDR 2.20 trillion compared to 2020 which was IDR 3.92 trillion. Along with the increase in interest income, profit for the year also increased. PNM earned a profit for the year of IDR 845.13 billion, an increase of IDR 486.53 billion or 135.68% from revenue in 2020 of IDR 358.60 billion. With the increase in profit for the year, the Company's equity also increased. Throughout 2021, PNM's total equity was recorded at IDR 6.44 trillion. This amount increased by 15.23% or IDR 851.04 billion compared to the total equity of PNM in 2020 which was IDR 5.59 trillion. The total assets of PNM also experienced an increase which was recorded at IDR 43.71 trillion. This amount experienced an increase of 38.05% or IDR 12.05 trillion compared to total assets of IDR 31.67 trillion in 2020.

Secara umum, pencapaian target PNM telah melampaui target yang telah ditetapkan. Realisasi total pinjaman yang diberikan pada tahun 2021 mencapai Rp32.377,18 miliar atau 114,10% dari target RKAP 2021. Pencapaian total aset serta kas dan setara kas berhasil melampaui target masing-masing mencapai 114,66% dan 157,75%. Adapun, ekuitas mencapai 107,03% dibandingkan dengan target RKAP 2021. Meskipun masih dalam masa pemulihan ekonomi nasional PNM mampu membukukan laba bersih sebesar Rp845,13 miliar atau 198,8% di atas target RKAP 2021. Pencapaian target tersebut antara lain ditopang atas penerapan kebijakan dan strategi yang tepat dan kerjasama yang baik dari seluruh pemangku kepentingan sehingga berhasil melalui semester akhir tahun 2021 ini dengan baik.

Kendala-Kendala yang Dihadapi oleh Perusahaan

Berbagai capaian positif yang diperoleh di tahun 2021 tidak lepas dari kemampuan Perusahaan dalam menghadapi kendala-kendala. Kendala-kendala tersebut antara lain, kondisi pasar/sector usaha yang terdampak pandemi COVID-19 sehingga berimbas pada perekonomian nasional dan juga pada sektor UMKM, termasuk para nasabah PNM baik nasabah PNM Mekaar maupun PNM ULaMM. Banyak para pelaku UMKM yang usahanya mengalami penurunan bahkan banyak di antaranya yang tidak dapat melanjutkan usahanya. Di sisi lain, beragamnya fitur produk pembiayaan UMK yang ditawarkan oleh perbankan dan lembaga keuangan antara lain tingkat suku bunga yang lebih menarik dan penawaran plafon pembiayaan lebih tinggi membuat persaingan semakin ketat dan hadirnya perusahaan *fintech* dengan berbagai kemudahan persyaratan maupun proses menjadi tantangan tersendiri dalam dunia pembiayaan Mikro Kecil. Dalam menghadapi kendala tersebut, Perusahaan telah meningkatkan strategi pemasaran dengan meningkatkan produktivitas *account officer* mikro. Salah satunya adalah melalui pengembangan keterampilan dan kompetensi para *account officer* untuk mencapai target yang ditetapkan. Strategi ini juga didukung dengan mendorong nasabah untuk meningkatkan jumlah pinjaman yang diajukan berikutnya (*top up*). Selain itu, PNM juga mengutamakan nasabah lama dalam menyalurkan pinjaman (*nasabah rejoint*).

Kondisi Makro Ekonomi juga menjadi kendala yang dihadapi perusahaan. Penurunan pertumbuhan kondisi ekonomi nasional sebagai akibat pandemi COVID-19 menyebabkan tindakan pengetatan likuiditas baik oleh pelaku/kreditur/investor pasar uang ataupun pasar modal. Posisi “*wait and see*” yang diambil para kreditur perbankan dan investor pasar modal menyulitkan Perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pendanaan guna penyaluran pembiayaan kepada para nasabah. Dalam menghadapi kendala tersebut, pada tahun 2021 Perusahaan telah menerbitkan sumber pendanaan yang berasal dari obligasi dan sukuk. Pada tahun 2021, PNM juga mendapatkan sumber pendanaan dari Penyertaan Modal Negara sebesar Rp3,5 triliun.

In general, the achievement of PNM targets had exceeded the set targets. The realization of total loans disbursed in 2021 reached IDR 32,377.18 billion or 114.10% of the 2021 RKAP target. The achievement of total assets as well as cash and cash equivalents managed to exceed the targets of 114.66% and 157.75%, respectively. Meanwhile, equity reached 107.03% compared to the 2021 RKAP target. Although it was still in the period of national economic recovery, PNM was able to record a net profit of IDR 845.13 billion or 198.8% above the 2021 RKAP target. The achievement of the target was due to the implementation of the right policies and strategies and good cooperation from all stakeholders so that we could successfully pass the final semester of 2021.

Constraints Faced by the Company

*The various positive achievements obtained in 2021 could not be separated from the Company's ability to face obstacles. These constraints included market conditions/business sectors affected by the COVID-19 pandemic so that it had an impact on the national economy and also the MSME sector, including PNM customers, both PNM Mekaar and PNM ULaMM customers. Many MSMEs experienced a decline in their business, and many of them were unable to continue their business. On the other hand, the various features of MSE financing products offered by banks and financial institutions, including more attractive interest rates and higher financing ceiling offers, made competition harder, and the presence of fintech companies with various ease of requirements and processes became a challenge in the world of Small Micro financing. In facing of these obstacles, the Company improved its marketing strategy by increasing the productivity of micro account officers. One of them was through developing the skills and competencies of account officers to achieve the set targets. This strategy was also supported by encouraging customers to increase the amount of the next proposed loan (*top up*). In addition, PNM also prioritized old customers in distributing loans (*rejoint customers*).*

*Macroeconomic conditions also became an obstacle faced by the company. The decline in the growth of national economic conditions as a result of the COVID-19 pandemic led to tightening of liquidity by both actors/creditors/money market investors or capital markets. The “*wait and see*” position taken by bank creditors and capital market investors made it difficult for the Company to meet funding needs for financing distribution to customers. In dealing with these obstacles, in 2021 the Company issued sources of funding originating from bonds and sukuk. In 2021, PNM also received funding from the State Equity Participation of IDR 3.5 trillion.*

Selain itu, kendala yang dihadapi Perusahaan adalah kompetisi rekrutmen SDM. Persaingan bisnis di bidang pembiayaan ultra mikro dan UMK menyebabkan para pesaing menawarkan jam kerja yang lebih *flexible* menjadi daya tarik bagi kaum pekerja milenial serta penawaran dari sektor usaha lain yang memberikan pilihan pekerjaan secara daring juga menjadi salah satu faktor penyebab yang tingginya angka *turn over* karyawan saat ini. Hal ini tentunya menjadi tantangan sendiri bagi perusahaan untuk melakukan rekrutmen karyawan. Dalam menghadapi kendala tersebut, Perusahaan menetapkan strategi untuk merekrut SDM baru yang diprioritaskan berasal dari daerah lokal. Adapun secara keseluruhan, Perusahaan memproyeksikan jumlah SDM pada tahun 2021 menjadi sebanyak 57.801 orang.

Analisis Prospek Usaha

Perbaikan ekonomi global saat ini masih tertahan seiring dengan peningkatan penyebaran COVID-19. Perekonomian dunia diperkirakan tumbuh 4,4% pada tahun 2022. Sementara itu, ketidakpastian pasar keuangan global masih terus berlanjut sejalan dengan risiko yang masing mengemuka antara lain terkait dengan peningkatan penyebaran COVID-19. Langkah bersama untuk menghadapi gangguan dalam mata rantai pasokan global yaitu berjalannya agenda Presidensi G20 Indonesia pada tahun 2022 yang akan terus mendorong pemulihan ekonomi global yang lebih kuat dan berimbang dengan fokus pada upaya mendorong produktifitas, meningkatkan ketahanan dan stabilitas ekonomi, serta memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif.

Kendati demikian, perbaikan ekonomi domestik berlanjut dengan stabilitas yang terjaga, Ekonomi domestik terus membaik pada triwulan II 2021 tercatat tumbuh positif dan tinggi sebesar 7,07% (YoY), meningkat tajam dari kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 0,71% (YoY). Pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh kinerja positif seluruh lapangan usaha (LU) dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

Berbagai kebijakan dan strategis terus diperkuat untuk pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki peran strategis terhadap perekonomian melalui pilar korporatisasi, kapasitas, dan pembiayaan sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif. Upaya melakukan transformasi UMKM ditempuh melalui pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan daya tahan yang lebih tinggi dan kapasitas yang lebih produktif dan inovatif. Kebijakan pengembangan UMKM juga didukung sinergi yang terus diperkuat antara Bank Indonesia dengan Pemerintah, lembaga keuangan, dan para penggiat usaha. Perekonomian Indonesia diperkirakan meningkat lebih tinggi pada tahun 2022 sejalan dengan membaiknya permintaan domestik. Bank Indonesia memprakirakan

In addition, the obstacle faced by the Company was HR recruitment competition. Business competition in the field of ultra-micro financing and MSEs caused competitors to offer more flexible working hours to attract millennial workers, and offers from other business sectors that provided online job options were also one of the factors causing the high turnover rate of employees nowadays. This certainly became a challenge for the company to recruit employees. In dealing with these obstacles, the Company established a strategy to recruit new human resources, which prioritized employees coming from the local area. Overall, the Company projected the number of human resources in 2021 to be 57,801 people.

Business Prospect Analysis

Improvements in the global economy were currently still being held back in line with the increasing spread of COVID-19. The world economy was forecasted to grow 4.4% in 2022. Meanwhile, uncertainty in global financial markets continued in line with emerging risks related to the increasing spread of COVID-19. The joint step to deal with disruptions in the global supply chain was the implementation of the agenda of the G20 Indonesia Presidency in 2022 which would continue to encourage a stronger and more balanced global economic recovery with a focus on efforts to boost productivity, increase economic resilience and stability, and ensure sustainable and inclusive growth.

Nevertheless, the improvement in the domestic economy continued with maintained stability. The domestic economy continued to improve in the second quarter of 2021, which recorded a positive and high growth of 7.07% (YoY), a sharp increase from the contraction in the previous quarter of 0.71% (YoY). Economic growth was also supported by the positive performance of all business fields (LU) and increased economic growth throughout Indonesia.

Various policies and strategies continued to be strengthened for the development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) which owned a strategic role in the economy through the pillars of corporatization, capacity, and financing to support strong and inclusive economic growth. Efforts to transform MSMEs were pursued through the use of digital technology to increase resilience and capacity to be more productive and innovative. The MSME development policy was also supported by the synergy that continued to be strengthened among Bank Indonesia and the Government, financial institutions, and business activists. The Indonesian economy was forecasted to accelerate further in 2022 in line with improving domestic demand. Bank Indonesia predicted that Indonesia's economic growth in 2022 would reach 4.7%-

pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 akan mencapai 4,7%-5,5%, sejalan dengan akselerasi konsumsi swasta dan investasi, di tengah tetap terjaganya belanja fiskal Pemerintah dan ekspor, meski risiko kenaikan kasus COVID-19 perlu terus diwaspadai.

Akselerasi pengembangan UMKM perlu didukung transformasi berbasis *digital*. Perkembangan ekonomi dan keuangan *digital* yang pesat telah menumbuhkan berbagai *platform digital* yang menawarkan inovasi dalam kegiatan produksi, konsumsi, kolaborasi dan berbagi. Digitalisasi tersebut memberikan peluang kepada UMKM untuk beradaptasi dan bertransformasi untuk bisa bertahan dan bangkit serta tumbuh lebih tinggi, disertai dengan peningkatan korporatisasi, kapasitas, dan pembiayaan. Perluasan akses UMKM terhadap digitalisasi proses produksi dan layanan, inovasi produksi dan layanan pembiayaan akan mendorong UMKM lebih maju dengan fasilitasi dan kemudahan untuk ekspansi usaha, sekaligus mampu berdaya saing di era kenormalan baru pasca pandemi COVID-19. Ke depan, optimalisasi peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi perlu terus diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, melalui adaptasi perubahan *digital*.

Berbagai perkiraan terhadap membaiknya kondisi perekonomian, baik perekonomian global, perekonomian nasional, PNM memiliki peluang untuk tumbuh. Peluang yang dimiliki PNM antara lain sebagai berikut:

1. *Market* UMKM terus bertumbuh seiring dengan membaiknya perekonomian nasional.
2. Kebijakan Pemerintah yang sangat mendukung berkembangnya ekonomi kerakyatan, khususnya bagi UMKM.

Berdasarkan asumsi yang telah dijabarkan di atas disertai adanya berbagai peluang, PNM optimis untuk dapat senantiasa meningkatkan kinerjanya secara maksimal dalam mencapai sasaran yang ditargetkan. Dengan kata lain, PNM memiliki prospek usaha yang baik. Hal ini di dasarkan pada kekuatan yang dimiliki oleh PNM yaitu:

1. *Capacity building* dengan pengembangan kapasitas usaha menjadi *uniqueness* PNM dengan produk kompetitor.
2. Fleksibilitas untuk dapat masuk ke sektor riil melalui PNM *Venture Capital*.
3. Masih terbuka peluang untuk mengembangkan jaringan hingga seluruh Indonesia dengan mengaplikasikan sinergi ultra mikro melalui jaringan *co-location Holding Ultra Mikro*.
4. PNM adalah satu-satunya BUMN lembaga keuangan non bank yang mempunyai *core business* pembiayaan kepada pengusaha ultra mikro dan UMK.
5. Hasil kinerja PNM yang baik yang dicapai pada tahun 2021 serta tergabungnya PNM dalam Holding Ultra Mikro, meningkatkan kepercayaan kreditur untuk mempermudah akses pendanaan.

5.5%, in line with the acceleration of private consumption and investment, amid maintained government fiscal spending and exports, although the risk of rising COVID-19 cases needed to be monitored closely.

The acceleration of MSME development needed to be supported by digital-based transformation. The rapid development of the digital economy and finance spawned various digital platforms that offered innovation in production, consumption, collaboration and sharing activities. This digitalization provided opportunities for MSMEs to adapt and transform in order to survive and rise and grow higher, accompanied by increased corporatization, capacity, and financing. The expansion of MSME access to the digitization of production processes and services, production innovation and financing services encouraged MSMEs to be more advanced with facilitation and convenience for business expansion, as well as being able to be competitive in the new normal era after the COVID-19 pandemic. Going forward, optimizing the role of MSMEs as the backbone of the economy needed to continue to be directed at efforts to increase productivity and inclusive economic growth, through adapting to digital changes.

Based on various estimates of improving economic conditions, both the global economy and the national economy, PNM had the opportunity to grow. Opportunities owned by PNM included the following:

1. *The MSME market continued to grow in line with the improving national economy.*
2. *Government policies strongly supporting the development of the people's economy, especially for MSMEs.*

Based on the assumptions described above along with various opportunities, PNM was optimistic that it could continuously improve its performance to the maximum in achieving the targeted targets. In other words, PNM had good business prospects. This was based on the strengths possessed by PNM, namely:

1. *Capacity building by developing business capacity is the uniqueness of PNM with competitor products.*
2. *Flexibility to enter the real sector through PNM Venture Capital.*
3. *Opportunities to develop networks throughout Indonesia by applying ultra micro synergies through the Holding Ultra Micro co-location network.*
4. *PNM as the only state-owned non-bank financial institution having a core business of financing for ultra-micro entrepreneurs and MSEs.*
5. *The results of PNM's good performance achieved in 2021 and the incorporation of PNM in Ultra Micro Holding increased creditor confidence to facilitate access to funding.*

6. Pada tahun 2022 diharapkan kondisi ekonomi pasca COVID-19 kembali tumbuh termasuk untuk sektor UMKM, hal ini didasari oleh mulai membaiknya serapan pembiayaan oleh nasabah eksisting serta meningkatnya jumlah nasabah terutama nasabah perempuan prasejahtera. Untuk itu dengan tema Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2022 “Optimalisasi Pemberdayaan Usaha Mikro dan Ultra Mikro Berkesinambungan Bersama Holding Ultra Mikro” PNM berkomitmen untuk lebih meningkatkan peranannya dalam pemberdayaan UMKM khususnya kelompok perempuan prasejahtera yang aktif secara ekonomi, hal ini dimaksudkan juga untuk membantu mereka melewati masa sulit ini dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat prasejahtera sehingga diharapkan dapat memberikan *benefit* dan *multiplier effect* kepada lebih banyak orang.

Pada tahun anggaran 2022 melalui Holding Ultra Mikro, PNM tetap akan memfokuskan diri sebagai lembaga keuangan dan jasa manajemen dengan menitikberatkan pada pengembangan dan penataan bisnis utama menuju pertumbuhan yang berkualitas dengan meningkatkan pemberdayaan UMK utamanya usaha ultra mikro melalui strategi sebagai berikut:

1. Penambahan 101 kantor cabang Mekaar untuk menjangkau para pelaku ultra mikro dan UMK.
2. Perluasan jaringan layanan untuk penyaluran produk pembiayaan ultra mikro dan mikro dengan target jaringan kantor *co-location* Holding Ultra Mikro terealisasi 415 jaringan pada tahun 2022.
3. Melakukan optimalisasi akuisisi nasabah digital UMi Corner sebanyak 32 ribu Nasabah.
4. Mengembangkan program dan aktivitas Pengembangan Kapasitas Usaha terutama kompetensi dan digitalisasi bisnis nasabah.
5. Meningkatkan kualitas SDM melalui program pendidikan dan pelatihan serta program top talenta milenial dan perempuan ditargetkan > 12%.
6. Melanjutkan pengembangan infrastruktur teknologi dan informasi sebagai pondasi bisnis *big data*.

Strategi dan program kerja PNM tahun 2022 secara garis besar adalah untuk mendukung upaya pencapaian target pembiayaan 12 juta nasabah perempuan pra sejahtera. Selain kesiapan jaringan dan SDM, ketersediaan sumber dana memegang faktor penting, yang mana ketersediaan dan biaya peminjamannya dari pihak kreditur sangat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan dan kapasitas *leverage* PNM.

6. *In 2022, it is expected that post-COVID-19 economic conditions will grow again, including for the MSME sector, this is based on the improvement in financing absorption by existing customers and the increasing number of customers, especially underprivileged female customers. For this reason, with the theme of the 2022 Corporate Work Plan and Budget “Optimizing the Empowerment of Micro and Ultra Micro Enterprises on an ongoing basis with Ultra Micro Holding” PNM committed to further increasing its role in empowering MSMEs, especially groups of economically active underprivileged women, this is also intended to help them through this difficult time and help improve the welfare of the underprivileged so that it is expected to provide benefits and multiplier effects to more people.*

In the 2022 fiscal year through Holding Ultra Mikro, PNM will continue to focus on being a financial institution and management service with an emphasis on developing and structuring the main business towards quality growth by increasing the empowerment of MSEs, especially ultra micro businesses through the following strategies:

1. *The addition of 101 Mekaar branch offices to reach ultra micro and MSE players.*
2. *Expansion of the service network for the distribution of ultra micro and micro financing products with a target of the Ultra Micro Holding co-location office network to realize 415 networks by 2022.*
3. *Optimizing the acquisition of UMi Corner digital customers as many as 32 thousand customers.*
4. *Developing Business Capacity Development programs and activities, especially competence and digitalization of customers' businesses.*
5. *Improving the quality of human resources through education and training programs as well as top talent programs for millennials and women targeted at > 12%.*
6. *Continuing the development of technology and information infrastructure as the foundation of the big data business.*

In general, PNM's strategy and work program in 2022 is to support efforts to achieve the financing target of 12 million underprivileged female customers. In addition to the readiness of the network and human resources, the availability of sources of funds plays an important factor, in which the availability and costs of borrowing from creditors are strongly influenced by the health condition and leverage capacity of PNM.

Dengan tetap menitikberatkan pada pembiayaan usaha mikro kecil, maka pada tahun 2022 akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Fokus pada pengembangan bisnis utama PNM secara keseluruhan, dimana untuk PNM *holding* diutamakan pertumbuhan pembiayaan UMKM yang berkualitas, PNM Investment Management mengutamakan pengembangan dana kelolaan dengan produk reksadana unggulan, sedangkan PNM Venture Capital diutamakan mengembangkan produk *venture capital* yang mampu memberikan perbaikan dan peningkatan laba secara bertahap untuk meningkatkan struktur permodalan bagi PNM Venture Capital.
2. Pengembangan pembiayaan ultra mikro dan UMK dilakukan dengan pengembangan sekitar 101 kantor cabang PNM Mekaar baru dan ekspansi penyaluran pembiayaan ultra mikro dan UMK yang terjaga kualitasnya dan fokus kepada pembenahan internal, sistem dan prosedur serta kebijakan yang akan mempercepat proses *delivery* pembiayaan dan meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap keseluruhan proses dan hasil.
3. Meningkatkan pengembangan Kapasitas Usaha UMK sehingga dapat meningkatkan dan memberikan nilai tambah kepada UMK baik peningkatan dan perbaikan produk, proses produksi sampai ke pemasaran sehingga mampu menjadi UMK yang *bankable*.

Tata Kelola Perusahaan

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik/*Good Corporate Governance* (GCG) dapat berkontribusi dalam peningkatan kinerja perusahaan. Dalam menjalankan bisnisnya, PNM senantiasa menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap aktivitas usahanya. Prinsip-prinsip tersebut antara lain, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran terimplementasi di lingkungan bisnis Perusahaan. Kelima asas tersebut diimplementasikan melalui komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan, pemenuhan kepentingan pemegang saham, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta pengungkapan informasi dan transparansi.

Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan

PNM menyadari arti pentingnya implementasi prinsip-prinsip GCG sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Pengelolaan PNM selain harus mengikut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, juga harus menjunjung tinggi norma-norma perilaku dan nilai etik berbisnis untuk meningkatkan reputasi dan citra perusahaan. Untuk itu, Perusahaan telah memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan pedoman perilaku (*code of conduct*). Pedoman perilaku atau *Code of Conduct* merupakan pedoman etika berperilaku bagi insan PNM yang

By continuing to focus on financing micro and small businesses, in 2022 the following steps will be taken:

1. *Focusing on the development of PNM's main business as a whole, in which PNM holding prioritizes the growth of quality MSME financing; PNM Investment Management prioritizes the development of managed funds with superior mutual fund products, while PNM Venture Capital prioritizes developing venture capital products that are able to provide improvements and increase profits gradually to improve the capital structure for PNM Venture Capital.*
2. *The development of ultra micro and MSMEs financing is carried out by developing around 101 new Mekaar PNM branch offices and expanding the distribution of ultra micro and UMK financing that is maintained in quality and focuses on internal improvements, systems and procedures as well as policies that will accelerate the financing delivery process and improve control and supervision of overall process and results.*
3. *Increasing the development of MSEs' business capacity so that they can increase and provide added value to MSEs, both in terms of product improvement and improvement, production processes and marketing so that they are able to become bankable MSEs.*

Corporate Governance

The application of the principles of Good Corporate Governance (GCG) can contribute to improving the company's performance. In running its business, PNM always applies the principles of GCG in every business activity. These principles included transparency, accountability, responsibility, independence and fairness, which were implemented in the Company's business environment. These five principles were implemented through a commitment to the implementation of good corporate governance in a sustainable manner, fulfilling the interests of shareholders, duties and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors as well as information disclosure and transparency.

Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance

PNM realized the importance of implementing GCG principles as a way to increase the trust of shareholders and stakeholders. The management of PNM must not only comply with applicable laws and regulations, but also uphold the norms of behavior and business ethical values to improve the company's reputation and image. To that end, the Company already had a Good Corporate Governance Guidelines and a code of conduct. Code of conduct was an ethical code of conduct for PNM structured to influence, shape, regulate and conform to behavior in order to achieve consistent results and in accordance with the company's cultural values in

disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian perilaku, sehingga tercapai hasil yang konsisten dan sesuai dengan nilai budaya Perusahaan dalam mencapai visi dan misinya. Perusahaan telah menerapkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku di dalam kegiatan Perusahaan secara konsisten. Untuk itu, Direksi menunjuk seorang anggota Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Perusahaan telah melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Perusahaan melakukan *assessment* terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan *review* secara berkala.

Sebagai bentuk komitmen Perusahaan dalam penerapan GCG, Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). PNM merupakan entitas anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maka anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pejabat strukturalnya dikategorikan sebagai Penyelenggara Negara (PN) dan terikat kewajiban untuk Melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, pengangkatan kembali dan pensiun atau berakhirnya jabatan sebagai PN berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selama tahun 2021, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN sebesar 100%.

Perusahaan juga melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Pengelolaan pengendalian gratifikasi berada pada Unit Pengendali Gratifikasi PNM bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pelaporan Gratifikasi. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) berperan dalam mensosialisasikan aturan gratifikasi kepada seluruh pegawai serta mitra kerja secara berkesinambungan. Perusahaan telah melakukan sosialisasi kebijakan terkait Pengendalian Gratifikasi secara rutin dan menyeluruh kepada seluruh karyawan. Kebijakan-kebijakan tersebut terus diperbarui secara berkala melalui sistem DPM yang dapat diakses seluruh karyawan PNM.

Selain itu, Perusahaan telah memiliki kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan yang bersangkutan (*whistle blowing system*). Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat dan karyawan Perusahaan dibentuk oleh Direksi. Direksi bertanggung jawab atas terlaksananya kebijakan penanganan pengaduan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat dan karyawan perusahaan. Perusahaan telah mempublikasikan serta mensosialisasikan Kebijakan Penanganan Pengaduan Pelanggaran kepada seluruh pejabat dan karyawan Perusahaan maupun *stakeholders* melalui berbagai media Perusahaan, seperti mencetak dan mendistribusikan dokumen kebijakan, *Website* Perusahaan serta melalui email.

achieving its vision and mission. The Company consistently implemented the Good Corporate Governance Guidelines and Code of Conduct in the Company's activities. To that end, the Board of Directors appointed a member of the Board of Directors as the person in charge of implementing and monitoring Good Corporate Governance.

The company took measurements of the implementation of Good Corporate Governance. The Company conducted an assessment of the implementation of Good Corporate Governance and reviewed it regularly.

As a form of the Company's commitment to implementing GCG, the Company coordinated the management and administration of the State Organizing Assets Report (LHKPN). PNM was a subsidiary of a State-Owned Enterprise, so members of the Board of Directors, Board of Commissioners and structural officers could be categorized as State Administrators (PN) and were bound by the obligation to report and announce their assets at the time of first serving, reappointment and retirement or termination of office. as a PN based on Law Number 28 of 1999 concerning the Implementation of a Clean and Free State of Corruption, Collusion and Nepotism. During 2021, the LHKPN reporting compliance rate was 100%.

The company also implemented a gratuity control program in accordance with applicable regulations. The management of gratuity control was in the PNM gratuity Control Unit in collaboration with the Corruption Eradication Commission regarding gratuity reporting. The gratuity Control Unit (UPG) played a role in socializing the rules of gratuity to all employees and partners on an ongoing basis. The Company conducted routine and comprehensive socialization of policies related to gratuity Control to all employees. These policies were regularly updated through the DPM system which could be accessed by all PNM employees.

In addition, the Company had a policy on reporting system for alleged irregularities in the company concerned (whistle blowing system). The Team for Handling Complaints of Violations conducted by the officers and employees of the Company was formed by the Board of Directors. The Board of Directors was responsible for the implementation of policies for handling complaints of violations committed by officials and employees of the company. The Company published and disseminated the Policy for Handling Complaints of Violations to all officers and employees of the Company as well as stakeholders through various Company media, such as printing and distributing policy documents, the Company's Website and via email.

Pemegang Saham dan RUPS

Sesuai dengan pedoman Perusahaan, Pemegang saham memiliki hak melakukan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam pelaksanaan pengangkatan calon anggota Direksi, Pemegang Saham/RUPS dapat melaksanakan penilaian terhadap calon anggota Direksi. Pemegang Saham/RUPS juga dapat memberikan respon terhadap lowongan jabatan dan/atau pemberhentian sementara Direksi oleh Dewan Komisaris.

RUPS dapat memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar. Keputusan tersebut tertuang Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Pemegang Saham/RUPS dapat memberikan persetujuan/keputusan atas usulan aksi korporasi yang dilaksanakan perusahaan. RUPS/Pemegang Saham juga dapat memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.

RUPS Perseroan terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. RUPS Tahunan untuk mengesahkan RKAP selambat-lambatnya dilaksanakan akhir bulan Januari setelah tahun buku baru dimulai. Selain itu, RUPS Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan perhitungan tahunan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam bulan Juni setelah tahun buku berakhir. Sedangkan RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan setiap saat atas permintaan Pemegang Saham dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Direksi. Pada tahun 2021, RUPS Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) telah dilaksanakan tepat waktu yaitu pada tanggal 29 Januari 2021. RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2020 juga dilaksanakan tepat waktu yaitu pada tanggal 14 April 2021.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan serta memberikan arahan kepada Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan serta kebijakan pengelolaan anak perusahaan. Dewan Komisaris juga memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan

Shareholders and GMS

In accordance with the Company's guidelines, shareholders had the right to appoint and dismiss members of the Board of Directors and the Board of Commissioners. In the implementation of the appointment of candidates for members of the Board of Directors, Shareholders/GMS might carry out an assessment of the candidates for members of the Board of Directors. Shareholders/GMS also responded to vacancies and/or temporary dismissal of the Board of Directors by the Board of Commissioners.

The GMS could make decisions necessary to safeguard the long-term and short-term business interests of the company in accordance with the laws and regulations and/or the articles of association. The decision was contained in the Company's Long Term Plan (RJPP) and the Company's Work and Budget Plan (RKAP). Shareholders/GMS could give approval/decision on the proposed corporate action carried out by the company. The GMS/Shareholders might also approve the annual report including the ratification of the financial statements as well as the supervisory duties of the Board of Commissioners in accordance with the laws and regulations and/or the articles of association.

The Company's GMS consisted of the Annual GMS and Extraordinary GMS. The Annual GMS was held no later than 6 (six) months after the end of the financial year. The Annual GMS to ratify the RKAP was held no later than the end of January after the new financial year begins. In addition, the Annual GMS to approve the Annual Report and ratify the annual calculations was carried out no later than June after the financial year ends. Meanwhile, the Extraordinary GMS could be held at any time at the request of the Shareholders and/or the Board of Commissioners and/or the Board of Directors. In 2021, the GMS for Approval of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) was held on time, namely on January 29, 2021. The GMS for Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statements for Fiscal Year 2020 was also held on time, namely on April 14, 2021.

Board of Commissioners

The Board of Commissioners was tasked with conducting general and/or specific supervision in accordance with the Articles of Association and providing advice to the Board of Directors in carrying out the Company's management activities. The Board of Commissioners supervised and provided direction to the Board of Directors on the implementation of company plans and policies as well as policies for managing subsidiaries. The Board of Commissioners also provided supervision over the implementation of the Company's Long Term Plan (RJPP), Company Work Plan and Budget (RKAP) as well as the provisions of the Articles of Association and GMS decisions in accordance with the prevailing laws and regulations for

Perusahaan. Selain itu, Dewan Komisaris memantau dan memastikan bahwa prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. Selain bertugas melakukan pengawasan, Dewan Komisaris juga berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegal) dan mengusulkan tantiem/ insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi.

Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas dan menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Komisaris Utama melaksanakan pengawasan pengelolaan korporasi secara menyeluruh, kepatuhan kepada Peraturan Perundang-Undangan dan mengkoordinasikan tugas-tugas anggota Komisaris. Komisaris Independen melaksanakan pengawasan di bidang Keuangan, tata kelola (*Governance*), Manajemen Risiko, Pengendalian Internal (*Internal Control*), legal, kegiatan operasi yang mendukung proses bisnis perusahaan, realisasi unit usaha syariah, pengembangan/ pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Sedangkan Komisaris, melaksanakan pengawasan di bidang teknologi informasi, sumber daya manusia dan prosedur nominasi dan numerasi.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris senantiasa menghindari adanya benturan kepentingan, antara lain dengan:

1. Setiap anggota Dewan Komisaris mengidentifikasi dan meletakkan hal-hal yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, antara kepentingan perusahaan, pemerintah dalam peran sebagai regulator dan Pemegang Saham serta institusi lainnya.
2. Dalam hal terjadi konflik kepentingan maka penanganannya harus diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris dan dapat dilaporkan kepada Pemegang Saham.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak boleh menduduki jabatan Direktur di BUMN maupun perusahaan swasta atau memiliki jabatan lain dalam perusahaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
4. Selain gaji dan fasilitas yang diterima sebagaimana ditetapkan dalam RUPS setiap anggota Dewan Komisaris tidak boleh mengambil keuntungan pribadi dengan melakukan transaksi apapun atas nama Perusahaan.
5. Anggota Dewan Komisaris tidak boleh menerima hadiah sumbangan dari pihak manapun sehubungan dengan pelaksanaan tugas.

Dalam rangka meningkatkan peran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris telah membentuk 2 (dua) komite yaitu, Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap Perusahaan, terutama

the benefit of the Company in accordance with the purposes and objectives of the Company. In addition, the Board of Commissioners monitored and ensured that the principles of Good Corporate Governance were implemented effectively and sustainably. In addition to supervising, the Board of Commissioners also played a role in nominating members of the Board of Directors, assessing the performance of the Board of Directors (individual and collegial) and proposing tantiem/performance incentives in accordance with applicable regulations and considering the performance of the Board of Directors.

The Board of Commissioners performed the division of tasks and determined the factors needed to support the implementation of the duties of the Board of Commissioners. The President Commissioner carried out overall supervision of corporate management, compliance with laws and regulations and coordinates the duties of members of the Board of Commissioners. The Independent Commissioner carried out supervision in the areas of Finance, Governance, Risk Management, Internal Control, legal, operational activities supporting the company's business processes, realization of sharia business units, development/ empowerment of micro, small, medium and large businesses, and cooperatives. Meanwhile, the Commissioners carried out supervision in the fields of information technology, human resources and nomination and numeration procedures.

In carrying out its duties, the Board of Commissioners avoided conflicts of interest by:

1. *Each member of the Board of Commissioners identified and placed matters that might cause a conflict of interest, between the interests of the company, the government in its role as regulator and shareholders and other institutions.*
2. *In the event of a conflict of interest, the resolution had to be decided at the Board of Commissioners' Meeting and could be reported to the Shareholders.*
3. *Each member of the Board of Commissioners might not hold the position of Director in a SOEs or private company or had other positions in the company that might cause a conflict of interest.*
4. *In addition to the salary and facilities received as stipulated in the GMS, each member of the Board of Commissioners might not take personal advantage by conducting any transactions on behalf of the Company.*
5. *Members of the Board of Commissioners might not accept donations from any party in connection with the performance of their duties.*

In order to enhance the role of the Board of Commissioners in carrying out its supervisory function, the Board of Commissioners established 2 (two) committees, namely, the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee. The Audit Committee had the duties and responsibilities to assist the Board of Commissioners in

dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, penunjukan Akuntan, pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal, pelaksanaan manajemen, proses akuntansi dan pelaporan keuangan. Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan bidang yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi.

Dewan Komisaris memiliki Sekretaris Dewan Komisaris untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan kewajiban antara lain, menyiapkan rapat dan bahan rapat, menyiapkan risalah rapat Dewan Komisaris, menyelesaikan administrasi seluruh dokumen Dewan Komisaris seperti surat masuk, surat keluar dan risalah rapat, menyusun rancangan rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris, membuat laporan-laporan Dewan Komisaris serta mengerjakan tugas tambahan lain sesuai permintaan Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang efektif dan menghadiri rapat tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Setiap keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris. Keputusan dapat pula diambil di luar rapat Dewan Komisaris sepanjang seluruh anggota Dewan Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan. Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat Internal Dewan Komisaris sebanyak 47 (empat puluh tujuh) kali. Selain Rapat Internal, Dewan Komisaris juga menyelenggarakan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi. Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi sebanyak 17 (tujuh belas) kali.

Direksi

Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar. Direksi telah melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas. Adapun pembedaan tugas Direksi adalah sebagai berikut.

Direktur Utama Menjalankan Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan sebagai berikut:

1. Memimpin Anggota Direksi PNM dalam menjalankan tugas tanggung jawab dan kewenangan selaku Direksi PNM;
2. Memimpin Direktorat Utama;
3. Menetapkan Arah dan Kebijakan Perusahaan;
4. Memastikan kelangsungan usaha Perusahaan;

supervising the Company, especially in carrying out its duties and supervisory functions on matters related to financial information, compliance with laws and regulations, appointment of accountants, implementation of audits by internal auditors, implementation management, accounting processes and financial reporting. The Nomination and Remuneration Committee had duties and responsibilities to assist the Board of Commissioners in carrying out areas related to remuneration and nomination.

The Board of Commissioners owned a Secretary to the Board of Commissioners to support the secretarial duties of the Board of Commissioners. The Secretary of the Board of Commissioners has carried out his duties and obligations in preparing meetings and meeting materials, preparing the minutes of the Board of Commissioners meeting, completing the administration of all documents of the Board of Commissioners such as incoming letters, outgoing letters and minutes of meetings, drafting the work plan and budget of the Board of Commissioners, making reports from the Board of Commissioners and performing other additional tasks as requested by the Board of Commissioners.

The Board of Commissioners held effective Board of Commissioners meetings and attended the meetings in accordance with the provisions of the legislation. Every decision of the Board of Commissioners was taken at the meeting of the Board of Commissioners. Decisions could also be taken outside the meeting of the Board of Commissioners as long as all members of the Board of Commissioners agreed on the method and material to be decided. Throughout 2021, the Board of Commissioners held 47 (forty seven) Internal Meetings of the Board of Commissioners. In addition to the Internal Meeting, the Board of Commissioners also held a Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors. Throughout 2021, the Board of Commissioners held Joint Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors for 17 (seventeen) times.

Board of Directors

The Board of Directors was responsible for managing the Company for the interests and objectives of the Company and representing the Company both inside and outside the court in accordance with the provisions of the Articles of Association. The Board of Directors carried out a clear division of duties/functions, authorities and responsibilities. The duties of the Board of Directors were as follows.

The President Director carried out the following Duties, Responsibilities and Authorities:

1. *Leading PNM Directors in carrying out their responsibilities and authorities as PNM Directors;*
2. *Leading the Main Directorate;*
3. *Establishing the Company's Directions and Policies;*
4. *Ensuring the continuity of the Company's business;*

5. Mengatur penyerahan kekuasaan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi;
6. Mengatur penyerahan kekuasaan kepada seorang atau beberapa orang karyawan Perusahaan, baik sendirisendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan;
7. Merumuskan dan menetapkan implementasi kebijakan Perusahaan yang harus dijalankan oleh tiap-tiap Divisi yang ada di bawah Direktorat Utama;
8. Menjalankan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh anggota Direksi lain dalam hal terdapat Anggota Direksi yang berhalangan dalam menjalankan tugas tanggung jawab dan kewenangannya;
9. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan;
10. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Internal;
11. Berwenang mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan dengan memperhatikan ketentuan;
12. Menjalankan Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan lainnya selaku Direksi PT PNM (Persero) yang telah ditentukan berdasarkan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Direktur Keuangan Menjalankan Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan sebagai berikut:

1. Memimpin Direktorat Keuangan;
2. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian termasuk penetapan struktur remunerasi, gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi Karyawan Perusahaan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan penjatuhan sanksi kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Mengatur penyerahan wewenang pada lingkup Direktorat Keuangan kepada seorang atau beberapa orang karyawan Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
4. Merumuskan dan menetapkan implementasi kebijakan Perusahaan yang harus dijalankan oleh divisi-divisi yang ada di bawah Direktorat Keuangan;
5. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
6. Melakukan pengurusan atas aset-aset dan kekayaan Perusahaan;
7. Memastikan ketersediaan sumber-sumber pendanaan yang dibutuhkan guna pelaksanaan kegiatan usaha dan Operasional perusahaan;
8. Berwenang mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan terkait pelaksanaan tugas-tugas pada Direktorat Keuangan berdasarkan Surat Penunjukan dan Kuasa dari Direktur Utama atau berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Direktur Utama dengan memperhatikan ketentuan;

5. *Regulating the transfer of power to one or several members of the Board of Directors;*
6. *Regulating the transfer of power to one or several employees of the Company, either individually or jointly or to other people, to represent the Company inside and outside the Court;*
7. *Formulating and determining the implementation of Company policies that had to be carried out by each Division under the Main Directorate;*
8. *Carrying out the powers of other members of the Board of Directors in the event that a member of the Board of Directors is unable to carry out their duties, responsibilities and authorities;*
9. *Appointing and dismissing the Corporate Secretary;*
10. *Appointing and dismissing the Head of the Internal Control Unit;*
11. *Authorizing the bind the Company with other parties and/or other parties with the Company and represent the Company inside and outside the Court with due observance of the provisions;*
12. *Carrying out other duties, responsibilities and authorities as the Board of Directors of PT PNM (Persero) which have been determined based on the Articles of Association and the prevailing laws and regulations.*

The Director of Finance carried out the following Duties, Responsibilities and Authorities:

1. *Leading the Directorate of Finance;*
2. *Regulating the provisions regarding employment including the determination of the structure of remuneration, salary, pension or old-age security and other income for the Company's employees based on the provisions of the prevailing laws and regulations including but not limited to determining the imposition of employment sanctions in accordance with applicable regulations;*
3. *Regulating the delegation of authority within the scope of the Directorate of Finance to one or several employees of the Company, either individually or jointly;*
4. *Formulating and determining the implementation of Company policies that had to be carried out by the divisions under the Directorate of Finance;*
5. *Appointing and dismissing the Company's employees based on the applicable employment regulations and laws and regulations;*
6. *Performing Management of the assets of the Company;*
7. *Ensuring the availability of funding sources needed for the implementation of business activities and company operations;*
8. *Authorizing the bind the Company with other parties and/or other parties with the Company and represent the Company inside and outside the Court regarding the implementation of tasks at the Directorate of Finance based on a Letter of Appointment and Power of Attorney from the President Director or based on a Special Power of Attorney from the President Director with due observance of the provisions;*

9. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas, dan kewenangan yang dijalankan pada lingkup Direktorat Keuangan;
10. Bersama-sama dengan Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya menjalankan Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan lainnya selaku Direksi PT PNM (Persero) yang telah ditentukan berdasarkan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko menjalankan Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan sebagai berikut:

1. Memimpin Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko;
2. Melakukan diperlukan Perusahaan; pengembangan-pengembangan yang bagi usaha-usaha yang dijalankan;
3. Merumuskan dan menetapkan implementasi kebijakan Perusahaan yang harus dijalankan oleh Divisi-divisi yang ada di bawah Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko;
4. Mengatur penyerahan kekuasaan pada lingkup Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko kepada seorang atau beberapa orang karyawan Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
5. Berwenang mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan terkait pelaksanaan tugas-tugas pada Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko berdasarkan Surat Penunjukan dan Kuasa dari Direktur Utama atau berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Direktur Utama dengan memperhatikan ketentuan;
6. Bertanggungjawab atas penerapan Prinsip tata kelola Perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha dan operasional yang dilakukan Perusahaan;
7. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas, dan kewenangan yang dijalankan pada lingkup Kepatuhan dan Manajemen Risiko;
8. Bersama-sama dengan Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya menjalankan Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan lainnya selaku Direksi PT PNM (Persero) yang telah ditentukan berdasarkan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Direktur Bisnis menjalankan Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan sebagai berikut:

1. Memimpin Direktorat Bisnis;
2. Memastikan kelangsungan Bisnis Pembiayaan PNM ULaMM dan Pembiayaan PNM Mekaar;
3. Menjaga dan memastikan kualitas pembiayaan pada bisnis PNM ULaMM dan PNM Mekaar terjaga dan/atau memenuhi ketentuan yang berlaku;
4. Merumuskan dan menetapkan implementasi kebijakan Perusahaan yang harus dijalankan oleh divisi-divisi yang ada di bawah Direktorat Bisnis;
5. Mengatur Penyerahan kekuasaan pada lingkup Direktorat Bisnis kepada seorang atau beberapa orang karyawan Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

9. *Being responsible for the implementation of tasks, and authorities carried out within the scope of the Directorate of Finance;*
10. *Together with the President Director and other members of the Board of Directors, carrying out the Duties, Responsibilities and other Authorities as Directors of PT PNM (Persero) determined based on the Articles of Association and the prevailing laws and regulations.*

The Director of Compliance and Risk Management carried out the following Duties, Responsibilities and Authorities:

1. *Leading the Directorate of Compliance and Risk Management;*
2. *Acting as required by the Company; developments for the businesses being carried out;*
3. *Formulating and determining the implementation of Company policies carried out by the Divisions under the Directorate of Compliance and Risk Management;*
4. *Regulating the delegation of power within the Directorate of Compliance and Risk Management to one or several employees of the Company, either individually or jointly;*
5. *Authorizing the bind the Company with other parties and/or other parties with the Company and represent the Company inside and outside the Court regarding the implementation of tasks at the Compliance and Risk Management Directorate based on a Letter of Appointment and Power of Attorney from the President Director or based on a Special Power of Attorney from the President Director with pay attention to the provisions;*
6. *Being responsible for the implementation of the principles of good corporate governance in every business and operational activities carried out by the Company;*
7. *Being responsible for the implementation of duties, and authorities carried out in the scope of Compliance and Risk Management;*
8. *Together with the President Director and other members of the Board of Directors, carrying out the Duties, Responsibilities and other Authorities as Directors of PT PNM (Persero) which have been determined based on the Articles of Association and the prevailing laws and regulations.*

The Business Director carried out the following Duties, Responsibilities and Authorities:

1. *Leading the Business Directorate;*
2. *Ensuring the continuity of the PNM ULaMM Financing Business and the Mekaar PNM Financing;*
3. *Maintaining and ensuring the quality of financing in the PNM ULaMM and PNM Mekaar businesses to maintained and/or comply with applicable regulations;*
4. *Formulating and determining the implementation of Company policies carried out by the divisions under the Directorate of Business;*
5. *Regulating the delegation of power within the scope of the Business Directorate to one or several employees of the Company, either individually or jointly;*

6. Berwenang mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan terkait pelaksanaan tugas-tugas pada Direktorat Bisnis berdasarkan Surat Penunjukan dan Kuasa dari Direktur Utama atau berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Direktur Utama dengan memperhatikan ketentuan;
7. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas, dan kewenangan yang dijalankan pada lingkup Direktorat Bisnis;
8. Bersama-sama dengan Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya menjalankan Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan lainnya selaku Direksi PT PNM (Persero) yang telah ditentukan berdasarkan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Direktur Kelembagaan dan Perencanaan menjalankan Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan sebagai berikut:

1. Bertanggungjawab atas kegiatan pengembangan kapasitas usaha;
2. Bertanggungjawab atas pengelolaan jasa manajemen dan kemitraan baik untuk UMK maupun LKM/S;
3. Bertanggungjawab atas berjalannya fungsi sistem teknologi informasi baik IT operasi, IT strategis, maupun IT infrastruktur;
4. Berwenang mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan terkait pelaksanaan tugas-tugas pada Direktorat Kelembagaan berdasarkan Surat Penunjukan dan Kuasa dari Direktur Utama atau berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Direktur Utama dengan memperhatikan ketentuan;
5. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas, dan kewenangan yang dijalankan pada lingkup Direktorat Kelembagaan;
6. Bersama-sama dengan Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya menjalankan Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan lainnya selaku Direksi PT PNM (Persero) yang telah ditentukan berdasarkan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Direksi senantiasa menghindari adanya benturan kepentingan, antara lain dengan:

1. Harus terdapat ketentuan mengenai jumlah maksimum jabatan.
2. Anggota Direksi atau Komisaris di perusahaan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan perusahaan yang boleh dipegang oleh seorang Direksi.
3. Anggota Direksi dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan.
4. Anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan perusahaan yang dikelolanya selain gaji dan fasilitas lain sebagai Direksi yang ditentukan oleh RUPS.

6. Authorizing the bind the Company with other parties and/or other parties with the Company and represent the Company inside and outside the Court regarding the implementation of tasks at the Business Directorate based on a Letter of Appointment and Power of Attorney from the President Director or based on a Special Power of Attorney from the President Director with due observance of the provisions;
7. Being responsible for the implementation of duties, and authorities carried out within the scope of the Directorate of Business;
8. Together with the President Director and other members of the Board of Directors, carried out the Duties, Responsibilities and other Authorities as Directors of PT PNM (Persero) determined based on the Articles of Association and the prevailing laws and regulations.

The Director of Institutional and Planning carried out the following Duties, Responsibilities and Authorities:

1. Being responsible for business capacity development activities;
2. Being responsible for the management of management services and partnerships for both MSEs and LKM/S;
3. Being responsible for the functioning of the information technology system, both IT operations, strategic IT, and IT infrastructure;
4. Authorizing the bind the Company with other parties and/or other parties with the Company and represent the Company inside and outside the Court regarding the implementation of tasks at the Institutional Directorate based on a Letter of Appointment and Power of Attorney from the President Director or based on a Special Power of Attorney from the President Director with due observance of the provisions;
5. Being responsible for the implementation of duties and authorities carried out within the scope of the Institutional Directorate;
6. Together with the President Director and other members of the Board of Directors, carried out the Duties, Responsibilities and other Authorities as Directors of PT PNM (Persero) determined based on the Articles of Association and the prevailing laws and regulations.

In carrying out their duties, the Board of Directors always avoided conflicts of interest, namely:

1. There had to be provisions regarding the maximum number of positions.
2. Members of the Board of Directors or Commissioners in companies not related to the management of the company who might be held by a Board of Directors.
3. Members of the Board of Directors were prohibited from conducting transactions triggering a conflict of interest.
4. Members of the Board of Directors were prohibited from taking personal benefits from the activities of the company they managed other than salary and other facilities as Directors as determined by the GMS.

5. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perusahaan berbenturan dengan kepentingan salah seorang anggota Direksi maka dengan persetujuan Komisaris, Perusahaan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak memiliki berbenturan kepentingan.
6. Apabila benturan kepentingan tersebut menyangkut semua anggota Direksi, maka Perusahaan akan diwakili oleh Komisaris atau oleh seorang yang ditunjuk oleh Komisaris.

Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Rapat Direksi harus diadakan secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan, dan dalam rapat tersebut Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2021, Direksi telah menyelenggarakan Rapat Direksi sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali.

Direksi telah menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan yang berkualitas dan efektif. Selama tahun 2021, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugasnya antara lain: menyelenggarakan rapat Direksi, menyelenggarakan rapat bisnis ULaMM, Mekaar dan lain-lain, menyelenggarakan Forum Kepala Divisi, menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi, menyelenggarakan RUPS Holding dan Anak Perusahaan, menyampaikan laporan wajib dan *incidental* ke *stakeholder*, mengurus perizinan dan usulan ke *stakeholder*, melakukan pendampingan Dewan Komisaris dan Direksi, melaksanakan tata persuratan dan pengarsipan persuratan Perusahaan, menyelenggarakan rapat bersama DPR Republik Indonesia, menyelenggarakan rapat bersama regulator serta pembuatan digitalisasi kesekretariatan.

Pengungkapan Informasi dan Transparansi

Dengan berlandaskan prinsip transparansi, Perusahaan senantiasa menerapkan keterbukaan informasi yang dibutuhkan bagi para pemangku kepentingan. Informasi Perusahaan dapat diakses melalui situs resmi maupun laporan-laporan yang diterbitkan secara berkala, baik Laporan Auditor Independen, Laporan Tahunan, Siaran Pers, maupun laporan dari media komunikasi lainnya. Situs resmi PNM di www.pnm.co.id tersedia dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Perusahaan juga menyediakan akses informasi bagi pihak internal melalui Portal Internal PNM yang dapat diakses melalui jaringan komputer internal Perusahaan.

Perusahaan memberikan akses atas informasi perusahaan yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala. Perusahaan telah mempublikasikan kebijakan dan informasi penting perusahaan ke dalam Website perusahaan. *Stakeholder* dapat dengan mudah mengakses kebijakan dan informasi penting perusahaan yang disediakan dalam website perusahaan. Perusahaan

5. *If something happened related to the interests of the Company conflict with the interests of a member of the Board of Directors, then with the approval of the Commissioner, the Company should be represented by another member of the Board of Directors who did not have a conflict of interest.*
6. *If the conflict of interest concerned all members of the Board of Directors, the Company should be represented by the Commissioner or by a person appointed by the Commissioner.*

The Board of Directors held Board of Directors meetings and attended Board of Commissioners Meetings in accordance with statutory provisions. Meetings of the Board of Directors were held periodically, at least 1 (one) time in every month, and at the meeting the Board of Directors might invite the Board of Commissioners. Throughout 2021, the Board of Directors held 23 (twenty-three) Board of Directors Meetings.

The Board of Directors carried out a quality and effective corporate secretary function. During 2021, the Corporate Secretary carried out his duties including: holding Board of Directors meetings, holding ULaMM business meetings, Mekaar and others, holding Division Heads Forum, holding Board of Commissioners and Directors Meetings, holding GMS Holding and Subsidiaries, submitting mandatory reports and incidental to stakeholders, administering permits and proposals to stakeholders, providing assistance to the Board of Commissioners and Directors, carrying out corporate correspondence and filing, holding meetings with the DPR of the Republic of Indonesia, holding meetings with regulators and making secretarial digitization.

Information Disclosure and Transparency

Based on the principle of transparency, the Company implemented the disclosure of information needed for stakeholders. Company information could be accessed through the official website as well as reports published regularly, such as Independent Auditor Reports, Annual Reports, Press Releases, and reports from other communication media. PNM official website at www.pnm.co.id was available in Indonesian and English. The Company also provided access to information for internal parties through the PNM Internal Portal which could be accessed through the Company's internal computer network.

Company accessed to relevant, adequate and reliable company information on a timely and regular basis. The company published important company policies and information on the company website. Stakeholders could easily access important company policies and information provided on the company website. The company also provided other media to communicate important company

juga menyediakan media lain untuk mengkomunikasikan kebijakan informasi penting perusahaan seperti Buletin dan Liputan Media. Perusahaan senantiasa memutakhirkan Informasi yang disediakan dalam website Perusahaan secara berkala.

Perusahaan juga melaksanakan pengungkapan informasi penting melalui Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris secara berdampingan. Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas, yakni terdapat tahun Laporan Tahunan dan identitas perusahaan. Laporan Tahunan disajikan dalam *website* Perusahaan dan dapat diunduh. Perusahaan telah menyajikan informasi keuangan dalam bentuk perbandingan selama 5 (lima) tahun buku. Dalam Laporan Tahunan juga telah memuat antara lain, informasi saham; informasi obligasi; Laporan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi; profil perusahaan secara lengkap; Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan; pengungkapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta Laporan Keuangan.

Sepanjang tahun 2021, Perusahaan telah memperoleh berbagai penghargaan di berbagai bidang. Informasi penghargaan yang telah diperoleh Perusahaan disajikan dalam Bab Profil Perusahaan.

Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan di Tahun 2021

Dalam rangka evaluasi penerapan GCG, Perseroan melaksanakan GCG *Assessment* yang dilaksanakan secara periodik dan konsisten setiap tahun. Dalam melakukan *assessment*, Perusahaan merujuk kepada Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-16/MBU/2012. Pada tahun 2021, Perusahaan telah melaksanakan GCG *Assessment* untuk tahun buku 2020. Penilaian GCG *Assessment* dilakukan secara *self assessment*. Skor GCG *Assessment* untuk tahun buku 2020 adalah 91,180 dengan kategori “sangat baik”. Berdasarkan hasil *assessment* tersebut, pada tahun 2021 Perusahaan telah melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Penambahan pada pedoman perilaku perihal integritas laporan keuangan dan etika Perusahaan terhadap kreditur.
2. Memutakhirkan isi *Board Manual*.
3. Menyusun SOP All divisi dan teregister pada sekretariat Sistem Manajemen MRI.
4. Memutakhirkan SOP yang telah dibuat.
5. Melakukan persiapan sertifikasi ISO 9001.
6. Melakukan pembaharuan Manual Sistem Manajemen.
7. Menyusun kebijakan manajemen/pengelolaan penggunaan pinjaman jangka panjang sesuai dengan peruntukannya dan pelunasannya.
8. Menyusun kebijakan untuk menilai dan mengukur pelaksanaan survei kepuasan karyawan.

information policies such as bulletins and media coverage. The Company updated the information provided on the Company's website on a regular basis.

The Company also disclosed important information through the Annual Report and Financial Statements. The annual report was presented in Indonesian and English side by side. The annual report clearly stated the identity of the company, namely the year of the Annual Report and the identity of the company. The Annual Report was presented on the Company's website and could be downloaded. The company presented financial information in the form of comparisons for 5 (five) financial years. The Annual Report also contained share information; bond information; Report of the Board of Commissioners and Report of the Board of Directors; complete company profile; Management Discussion and Analysis on Company Performance; disclosure of Good Corporate Governance practices and Financial Statements.

Throughout 2021, the Company received various awards in various fields. Information on awards obtained by the Company was presented in the Company Profile Chapter.

Developments in the Implementation of Corporate Governance

In order to evaluate the implementation of GCG, the Company carries out a GCG Assessment which is carried out periodically and consistently every year. In conducting the assessment, the Company referred to the Decree of the Minister of SOE Number SK-16/MBU/2012. In 2021, the Company carried out a GCG Assessment for the 2020 financial year. The GCG Assessment was carried out by means of a self-assessment. The GCG Assessment score for the 2020 financial year was 91,180 in the “very good” category. Based on the results of the assessment, in 2021 the Company followed up these following aspects, namely:

1. *Adding the code of conduct regarding the integrity of financial statements and the Company's ethics towards creditors.*
2. *Updating the contents of the Board Manual.*
3. *Preparing SOPs for all divisions and were registered with the MRI Management System secretariat.*
4. *Updating SOPs created.*
5. *Preparing for ISO 9001 certification.*
6. *Updating the Management System Manual.*
7. *Developing management policies/management of the use of long-term loans in accordance with their designation and repayment.*
8. *Developing policies to assess and measure the implementation of employee satisfaction surveys.*

Penilaian Komite di Bawah Direksi

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya, Direksi dibantu oleh Komite di bawah Direksi, yaitu:

1. Tim Asset and Liability Committee (ALCO)
2. Write Off Executive Committee Meeting (WECOM)
3. Komite Pengendalian Risiko Operasional
4. Komite Investasi
5. Komite Produk
6. Komite Manajemen Risiko
7. Komite Talenta
8. Komite Penempatan Posisi dan Karir Karyawan
9. Komite Pengarah Teknologi Informasi

Untuk mengukur efektivitas kinerja komite di bawah Direksi dalam membantu Direksi menjalankan pengurusan perusahaan maka dilakukan penilaian terhadap di bawah Direksi. Prosedur penilaian kinerja komite di bawah Direksi dilakukan oleh Direksi secara periodik dengan kriteria penilaian atas kinerja Komite di bawah Direksi yaitu pelaksanaan rapat serta kehadiran dalam rapat selama tahun buku. Direksi menilai bahwa selama 2021, komite-komite di bawah Direksi telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

Perubahan Komposisi Anggota Direksi

Direksi PNM paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi dan 1 (satu) diantara anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama atau Presiden Direktur. Pada tahun 2021, Perusahaan telah melakukan beberapa kali perubahan komposisi Direksi yang dilaksanakan sesuai kebutuhan Perusahaan. Perubahan komposisi Direksi pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Periode 1 Januari – 28 Mei 2021

Arief Mulyadi	:	Direktur Utama / President Director
Tjatur H Priyono	:	Direktur Keuangan / Director of Finance
Anton Fahlevie	:	Direktur Bisnis / Director of Business
M.Q Gunadi	:	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko / Director of Compliance and Risk Management
Noer Fajriensyah	:	Direktur Kelembagaan / Director of Institutional

Periode 28 Mei 2021 – 31 Desember 2021

Arief Mulyadi	:	Direktur Utama / President Director
Tjatur H Priyono	:	Direktur Keuangan dan Operasional / Director of Finance and Operations
Anton Fahlevie	:	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko / Director of Compliance and Risk Management
Sunar Basuki	:	Direktur Kelembagaan dan Perencanaan / Director of Institutional and Planning
Kindaris	:	Direktur Bisnis / Director of Business

Committee Assessment Under the Board of Directors

In carrying out its management duties, the Board of Directors was assisted by committees under the Board of Directors, namely:

1. Asset and Liability (ALCO) Team Committee
2. Write Off Executive Meeting (WECOM) Committee
3. Operational Risk Control Committee
4. Investment Committee
5. Product Committee
6. Risk Management Committee
7. Talent Committee
8. Employee Position and Career Committee
9. Information Technology Steering Committee

To measure the effectiveness of the performance of the committees under the Board of Directors in assisting the Board of Directors in managing the company, an assessment was carried out on those under the Board of Directors. The procedure for evaluating the performance of committees under the Board of Directors was carried out by the Board of Directors periodically with the criteria for evaluating the performance of the Committees under the Board of Directors, namely the implementation of meetings and attendance at meetings during the financial year. The Board of Directors considered that during 2021, the committees under the Board of Directors carried out their duties and responsibilities well.

Changes in the Composition of the Members of the Board of Directors

The Board of Directors of PNM consisted of at least 2 (two) members of the Board of Directors and 1 (one) of the members of the Board of Directors was appointed as President Director or President Director. In 2021, the Company made several changes to the composition of the Board of Directors, and it was carried out according to the needs of the Company. Changes in the composition of the Board of Directors in 2021 are as follows:

Period January 1 – May 28, 2021

Period May 28, 2021 – December 31, 2021

Penutup

Direksi memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kepercayaan, komitmen dan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya kepada seluruh insan PNM yang telah bekerja keras di tengah tantangan kondisi perekonomian. Atas dedikasi dari seluruh insan PNM, Direksi mengucapkan terima kasih sehingga PNM mampu memperoleh kinerja yang baik di tahun 2021.

Atas arahan yang telah diberikan oleh Dewan Komisaris yang sangat memberikan kontribusi dalam pencapaian kinerja Perusahaan, Direksi memberikan mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Direksi juga mengucapkan terimakasih kepada pemegang saham, nasabah dan mitra kerja Perusahaan atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Perusahaan.

Kedepannya, melalui pembentukan ekosistem ultra mikro diharapkan dapat meningkatkan dan memperluas pemberdayaan yang diberikan PNM kepada pelaku usaha ultra mikro, sehingga dapat berkembang menjadi lebih besar.

Closing

The Board of Directors regarded the highest appreciation for the trust, commitment and cooperation of all stakeholders, especially to all PNM people who worked hard in the midst of challenging economic conditions. For the dedication of all PNM people, the Board of Directors would like to thank so that PNM was able to obtain a good performance in 2021.

For the direction given by the Board of Commissioners which has greatly contributed to the achievement of the Company's performance, the Board of Directors expressed its highest gratitude and appreciation. The Board of Directors also expressed gratitude to the shareholders, customers and business partners of the Company for the trust that had been given to the Company.

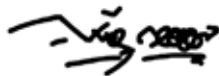
In the future, through the establishment of an ultra-micro ecosystem, it is expected that it can increase and expand the empowerment provided by PNM to ultra-micro business actors, so that they can develop into bigger ones.

Jakarta, 1 April 2022

Jakarta, April 1, 2022

Atas Nama Direksi

On behalf of the Board of Directors



Arief Mulyadi

Direktur Utama

President Director

Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners' Report

Arif Rahman Hakim

Komisaris Utama
President Commissioner



Pada tahun 2021, Perusahaan telah berhasil meningkatkan kinerja keuangannya. Pendapatan bunga dan syariah-bersih tahun 2021 sebesar Rp6,12 triliun, meningkat 56,28% dari tahun 2020. Laba tahun berjalan sebesar Rp845,13 miliar, meningkat sebesar 135,68% dari tahun 2020. Jumlah ekuitas sebesar Rp6,44 triliun meningkat sebesar 15,23% dari tahun 2020. Jumlah aset PNM juga mengalami peningkatan yang tercatat sebesar Rp43,71 triliun meningkat 38,05% dari tahun 2020.

In 2021, the Company has succeeded in improving its financial performance. Interest and sharia-net income in 2021 amounted to IDR6.12 trillion, an increase of 56.28% from 2020. Profit for the year amounted to IDR845.13 billion, an increase of 135.68% from 2020. Total equity of IDR6.44 trillion increased by 15.23% from 2020. The total assets of PNM also experienced an increase which was recorded at IDR43.71 trillion, an increase of 38.05% from 2020.

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat, Dear Shareholders and Stakeholders,

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karuniaNya, pada tahun 2021 PNM dapat mencatatkan kinerja yang baik di tengah kondisi perekonomian yang belum mengalami pemulihan akibat dampak pandemi COVID-19.

Berikut kami sampaikan laporan pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris terhadap jalannya kepengurusan Perusahaan untuk tahun buku 2021 yang terdiri dari penilaian atas kinerja Direksi selama tahun 2021, pandangan atas prospek usaha yang di susun oleh Direksi, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, penilaian atas Komite di bawah Dewan Komisaris dan perubahan komposisi Dewan Komisaris.

Penilaian Kinerja Direksi

Sebelum menyampaikan pandangan Dewan Komisaris atas pencapaian kinerja Direksi, Dewan Komisaris akan menyampaikan frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada Direksi serta pengawasan Dewan Komisaris terhadap perumusan dan implementasi strategi.

Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat Kepada Direksi

Untuk memberikan nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris mengadakan rapat rutin bersama Direksi yang dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali rapat dalam setahun atau minimal sebulan sekali. Namun demikian, rapat tambahan dapat dilakukan kapan pun untuk membahas berbagai isu yang lebih spesifik. Selama tahun 2021, Dewan Komisaris telah melaksanakan sebanyak 17 (tujuh belas) kali rapat bersama Direksi.

Praise the presence of God Almighty, for His mercy and grace, so in 2021 PNM could record a good performance in the midst of economic conditions that did not completely recover due to the impact of the COVID-19 pandemic.

Here, we presented a report on the supervision and advice provided by the Board of Commissioners on the management of the Company for the 2021 financial year, and it consisted of an assessment of the performance of the Board of Directors during 2021, views on business prospects prepared by the Board of Directors, implementation of good corporate governance, assessment of the Committees at the Board of Directors under the Board of Commissioners and changes in the composition of the Board of Commissioners.

Board of Directors Performance Assessment

Prior to conveying the views of the Board of Commissioners on the Board of Directors' performance achievements, the Board of Commissioners conveyed the frequency and method of providing advice to the Board of Directors as well as the Board of Commissioners' oversight of strategy formulation and implementation.

Frequency and How to Give Advice to the Board of Directors

To provide advice to the Board of Directors, the Board of Commissioners held regular meetings with the Board of Directors 12 (twelve) times a year or at least once a month. However, additional meetings could be held at any time to discuss more specific issues. During 2021, the Board of Commissioners held 17 (seventeen) meetings with the Board of Directors.

Dalam memberikan nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris menerbitkan rekomendasi kepada Direksi bila ada hal-hal yang perlu diingatkan agar Direksi berhati-hati mengambil keputusan yang mengandung risiko dan berupaya memitigasi risiko yang mungkin terjadi. Selain memberikan rekomendasi Dewan Komisaris juga telah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat pada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Pengawasan Terhadap Perumusan dan Implementasi Strategi

Selama tahun 2021, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya dalam rangka melakukan pengawasan terhadap perumusan strategi dan implementasi strategi Perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan. Pengawasan terhadap perumusan strategi Perusahaan dilaksanakan dengan melakukan pengawasan terhadap penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan. Sedangkan pengawasan terhadap implementasi strategi Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis sebagai bentuk tugas pengawasan Dewan Komisaris yang meliputi diantaranya:

1. Perumusan perubahan model bisnis PNM Mekaar dan ULAMM.
2. Penerapan Manajemen Risiko dalam empat bidang pokok, yaitu strategi, keuangan, operasi, dan kepatuhan Perusahaan.
3. Perubahan Struktur Organisasi.
4. Tata Kelola Perusahaan khususnya evaluasi atas hasil penilaian GCG dan tindak lanjut atas rekomendasi.
5. Efektivitas pengendalian internal dan kegiatan Satuan Pengawas Internal (SPI) PNM.
6. Efektivitas kegiatan operasi cabang PNM Mekaar dan ULAMM.
7. Progres penerapan sistem operasi berbasis TI.
8. Optimalisasi peran unit Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU).

In providing advice to the Board of Directors, the Board of Commissioners issued recommendations to the Board of Directors if there were things that needed to be reminded so that the Board of Directors could be careful in making decisions that contained risks and seeks to mitigate risks that might occur. In addition to providing recommendations, the Board of Commissioners also supervised management policies, the general course of management both regarding the Company and the Company's business carried out by the Board of Directors as well as providing advice to the Board of Directors including supervision of the implementation of the Company's Long Term Plan (RJPP), Company Work and Budget Plan (RKAP) as well as the provisions of the Articles of Association and the resolutions of the GMS as well as the prevailing laws and regulations for the benefit of the Company in accordance with the aims and objectives of the Company.

Supervision of Strategy Formulation and Implementation

During 2021, the Board of Commissioners carried out its duties, obligations and responsibilities in order to supervise the formulation of strategy and implementation of the Company's strategy in accordance with applicable laws and regulations and the Company's Articles of Association. Supervision of the formulation of the Company's strategy was carried out by supervising the preparation of the Company's Long-Term Plan (RJPP) and the Annual Company's Work and Budget Plan (RKAP). Meanwhile, the supervision of the implementation of the Board of Commissioners' strategy has directed, monitored and evaluated the implementation of strategic policies as a form of the Board of Commissioners' supervisory duties which include:

1. *Formulation of changes to the business model of PNM Mekaar and ULAMM.*
2. *Implementation of Risk Management in four main areas, namely strategy, finance, operations, and Company compliance.*
3. *Changes in Organizational Structure.*
4. *Good Corporate Governance in particular the evaluation of the results of the GCG assessment and follow-up on recommendations.*
5. *The effectiveness of internal control and activities of PNM's Internal Supervisory Unit (SPI).*
6. *Effectiveness of PNM Mekaar and ULAMM branch operations.*
7. *The progress of implementing IT-based operating systems.*
8. *Optimizing the role of the Business Capacity Development Unit (PKU).*

Pandangan atas Kinerja Direksi

Dewan Komisaris memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kinerja Direksi yang telah mampu menghadapi tantangan perekonomian yang masih terdampak oleh pandemi COVID-19. Dasar penilaian Dewan Komisaris atas kinerja Direksi adalah kondisi perekonomian, capaian kinerja yaitu kinerja operasional, kinerja keuangan dan tingkat kesehatan perusahaan. Penilaian atas kinerja Direksi dapat disampaikan sebagai berikut.

Outlook pertumbuhan ekonomi global untuk tahun 2021 mencerminkan *rebound* yang cukup kuat dibandingkan dengan capaian 2020. Pelemahan ini terjadi karena adanya isu gangguan *supply* di negara maju serta sempat memburuknya kasus COVID-19 di negara berkembang. Di sisi lain, proyeksi inflasi global meningkat menjadi 4,3% di 2021 dan 3,8% di 2022. Tekanan inflasi yang terus meningkat mendorong pemerintah AS untuk mempercepat kebijakan *tapering off*. Tingkat inflasi AS melonjak ke tingkat 6,8% di November 2021 (tertinggi sejak 1982), dari sebelumnya 6,2%. Hal ini terus memunculkan ekspektasi dilakukannya langkah pengetatan kebijakan moneter yang lebih cepat. Pada Desember 2021, The Fed mempercepat pengurangan pembelian surat berharga Pemerintah (*tapering off*) dari USD15 miliar menjadi USD30 miliar.

Meskipun perekonomian global masih mengalami ketidakpastian, namun perbaikan perekonomian nasional masih terus berlanjut. Aktivitas ekspor mampu melanjutkan pertumbuhan yang tinggi seiring permintaan dan harga komoditas global yang meningkat. Sementara itu, aktivitas impor juga meningkat yang mencerminkan menguatnya pemulihan permintaan domestik, khususnya sektor produksi. Dari sisi lapangan usaha, sektor-sektor unggulan nasional seperti manufaktur, perdagangan, konstruksi, dan transportasi melanjutkan tren pemulihan dengan mencatat pertumbuhan kuat. Dari aktivitas ekspor kembali mencatatkan pertumbuhan tinggi pada Triwulan IV sebesar 29,83% (YoY). Laju pemulihan ekonomi global menjadi faktor utama yang menjaga kinerja ekspor Indonesia. Dengan pertumbuhan ekonomi ini juga, tingkat PDB per kapita Indonesia berhasil naik dari Rp57,3 juta di tahun 2020 ke Rp62,2 juta di tahun 2021 (naik 8,6%), atau 4.349,5 dolar AS. Tetap terjaganya laju pemulihan ekonomi juga memberikan efek positif pada Pendapatan Negara yang tumbuh sebesar 21,6%.

Dari segi aktivitas investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) yang sempat tertahan, juga kembali dapat meningkat 4,49% pada Triwulan IV 2021. Secara keseluruhan 2021 Investasi kembali tumbuh positif 3,80% setelah tumbuh negatif 4,96% di 2020. Adapun Sektor Perdagangan juga tumbuh kuat pada Triwulan IV sebesar 5,56% (YoY) atau 4,65% secara keseluruhan tahun 2021. Peningkatan ini didorong oleh membaiknya mobilitas masyarakat sejalan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang relatif mereda.

View on the Performance of the Board of Directors

The Board of Commissioners gave the highest appreciation to the performance of the Board of Directors who had been able to face economic challenges still affected by the COVID-19 pandemic. The basis for the Board of Commissioners' assessment of the performance of the Board of Directors was the economic condition, performance achievements, namely operational performance, financial performance and company soundness level. Assessment of the performance of the Board of Directors was submitted as follows.

The global economic growth outlook for 2021 reflected a fairly strong rebound compared to 2020. This weakening occurred due to supply disruption issues in developed countries and the worsening of COVID-19 cases in developing countries. On the other hand, global inflation projections were projected to increase to 4.3% in 2021 and 3.8% in 2022. The rising inflationary pressure has prompted the US government to accelerate the tapering off policy. The US inflation rate soared to a level of 6.8% in November 2021 (the highest since 1982), from 6.2% previously. This continued to raise expectations for faster monetary policy tightening. In December 2021, the Fed accelerated the reduction of government securities purchases (*tapering off*) from USD15 billion to USD30 billion.

Although the global economy still experienced uncertainty, the improvement in the national economy still continued. Export activity was able to continue high growth in line with increasing global commodity demand and prices. Meanwhile, import activity also increased, reflecting the strengthening recovery in domestic demand, particularly in the production sector. In terms of business sector, national leading sectors such as manufacturing, trade, construction, and transportation continued the recovery trend with strong growth. Export activity again recorded high growth in the fourth quarter of 29.83% (YoY). The pace of global economic recovery became the main factor maintaining Indonesia's export performance. With this economic growth as well, Indonesia's GDP per capita level managed to rise from IDR57.3 million in 2020 to IDR62.2 million in 2021 (up 8.6%), or US\$ 4,349.5. The maintained pace of economic recovery also had a positive effect on State Revenue which grew by 21.6%.

In terms of investment activity (Gross Fixed Capital Formation/PMTB), which had been on hold, could also increase by 4.49% in the fourth quarter of 2021. Overall, in 2021, investment returned to positive growth of 3.80% after a negative growth of 4.96% in 2020. The Trade Sector also grew strongly in Quarter IV by 5.56% (YoY) or 4.65% overall in 2021. This increase was driven by improved community mobility in line with the relatively easing condition of the COVID-19 pandemic.

Pada sisi ekosistem UMKM, sejalan dengan pilar ketiga kebijakan makroprudensial yaitu inklusi keuangan, Bank Indonesia mendorong pengembangan UMKM melalui kebijakan Rasio Kredit UMKM yang diukur dari rasio kredit dan pembiayaan UMKM terhadap total kredit dan pembiayaan, yang pada tahun 2021 targetnya tetap minimal 20%. Pada akhir November 2021, rasio tersebut tercapai sebesar 20,48%. Bank Indonesia menyempurnakan kebijakan Rasio Kredit UMKM menjadi Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) melalui penerbitan PBI No. 23/13/PBI/2021 tanggal 31 Agustus 2021. Penyempurnaan kebijakan tersebut bertujuan untuk mendorong inklusivitas dengan memperluas target pembiayaan tidak hanya bagi UMKM namun juga bagi korporasi UMKM dan Perorangan Berpenghasilan Rendah (PBR).

Untuk terus mendorong UMKM Ekspor dilakukan strategis penerapan *push strategy* dan *pull strategy*. *Push strategy* ditempuh melalui kurasi serta fasilitasi peningkatan kapasitas dan pendampingan kepada UMKM untuk pemenuhan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produk, termasuk pemenuhan standardisasi dan sertifikasi yang diperlukan UMKM untuk ekspor. Sementara itu, strategi *market driven* atau *pull strategy* dilakukan dengan mendorong keikutsertaan UMKM pada berbagai *event* promosi perdagangan dan pameran di luar negeri, *market intelligence*, serta fasilitasi temu bisnis (*business matching*) dengan pembeli potensial.

UMKM berpotensi untuk berkembang lebih lanjut dengan mempertimbangkan karakteristik UMKM yang sebagian besar masih *unbanked* dengan akses yang terbatas pada produk dan jasa layanan keuangan. Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi di sektor keuangan menumbuhkan berbagai alternatif produk dan jasa keuangan yang ditawarkan oleh bank dan non bank, sehingga berpotensi meningkatkan akses keuangan UMKM. Penyediaan akses UMKM pada lembaga keuangan melalui digitalisasi tersebut merupakan pintu masuk UMKM untuk naik kelas, melalui pemanfaatan produk dan layanan dalam pembayaran, pengelolaan keuangan, dan pembiayaan.

Melalui optimalisasi peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi akan terus diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan adaptasi terhadap perubahan digital. Peran UMKM sebagai kekuatan baru ekonomi nasional semakin relevan saat ini, dengan banyak negara mulai mengandalkan sumber pertumbuhan ekonomi domestik, termasuk diantaranya melalui UMKM.

Di tengah kondisi perekonomian tersebut, Direksi mampu menghadapi tantangan dan peluang yang terjadi dengan mencatatkan kinerja yang baik di tahun 2021. Pada tahun 2021, PNM telah menyalurkan pembiayaan PNM Mekaar sebesar Rp46,44 triliun, meningkat 90,77% dari Rp24,35 triliun

On the MSME ecosystem side, in line with the third pillar of macroprudential policy, namely financial inclusion, Bank Indonesia encouraged the development of MSMEs through the MSME Credit Ratio policy measured by the ratio of MSME loans and financing to total loans and financing, which in 2021 the target remained at least 20%. At the end of November 2021, the ratio reached at 20.48%. Bank Indonesia refined the MSME Credit Ratio policy to the Macroprudential Inclusive Financing Ratio (RPIM) through the issuance of PBI No. 23/13/PBI/2021 dated August 31, 2021. This policy improvement aimed to encourage inclusiveness by expanding financing targets not only for MSMEs but also for MSME corporations and Low-Income Individuals (PBR).

To continue to encourage MSME exports, a strategic implementation of a push strategy and a pull strategy was carried out. The push strategy was pursued through curation and facilitation of capacity building and assistance to MSMEs to fulfill product quantity, quality and continuity, including the fulfillment of standardization and certification required by MSMEs for export. Meanwhile, the market driven strategy or pull strategy was carried out by encouraging the participation of MSMEs in various trade promotion events and exhibitions abroad, market intelligence, and facilitating business matching with potential buyers.

MSMEs had the potential to develop further by considering the characteristics of MSMEs, most of which were still unbanked with limited access to financial products and services. The development of information technology and digitalization in the financial sector fostered various alternative financial products and services offered by banks and non-banks, thereby potentially increasing MSME financial access. The provision of MSME access to financial institutions through digitalization was the entry point for MSMEs to advance to class, through the use of products and services in payments, financial management, and financing.

Through optimizing the role of MSMEs as the backbone of the economy, efforts continued to be directed at increasing productivity, inclusive economic growth, and adapting to digital changes. The role of MSMEs as the new power of the national economy was increasingly relevant today, with many countries starting to rely on sources of domestic economic growth, including through MSMEs.

In the midst of these economic conditions, the Board of Directors was able to face the challenges and opportunities that occurred by recording good performance in 2021. In 2021, PNM distributed PNM Mekaar financing of IDR46.44 trillion, an increase of 90.77% from IDR24.35 trillion

pada tahun 2020. PNM telah menyalurkan pembiayaan PNM ULaMM sebesar Rp3,01 triliun meningkat 19,71% dari tahun 2020 yang sebesar Rp2,51 triliun. Selain itu, melalui anak perusahaan PT PNM Venture Capital (PNM VC), pada tahun 2021 PNM VC telah menyalurkan modal ventura sebesar Rp704,12 miliar, jumlah ini meningkat 32,01% dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar Rp533,40 miliar.

Dari sisi keuangan, Pendapatan bunga dan syariah-bersih tahun 2021 sebesar Rp6,12 triliun, meningkat 56,28% atau Rp2,20 triliun dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp3,92 triliun. Seiring dengan peningkatan pendapatan bunga tersebut, laba tahun berjalan juga mengalami peningkatan. PNM memperoleh laba tahun berjalan sebesar Rp845,13 miliar, meningkat sebesar Rp486,53 miliar atau 135,68% dari perolehan di tahun 2020 sebesar Rp358,60 miliar. Dengan meningkatnya laba tahun berjalan, maka ekuitas Perusahaan juga mengalami peningkatan. Sepanjang tahun 2021, jumlah ekuitas PNM tercatat sebesar Rp6,44 triliun. Jumlah tersebut mengalami peningkatan 15,23% atau Rp851,04 miliar dibandingkan jumlah ekuitas PNM pada tahun 2020 yang sebesar Rp5,59 triliun. Jumlah aset PNM juga mengalami peningkatan yang tercatat sebesar Rp43,71 triliun. Jumlah tersebut mengalami peningkatan 38,05% atau Rp12,05 triliun dibandingkan jumlah aset sebesar Rp31,67 triliun pada tahun 2020.

Selain kinerja operasional dan keuangan, tingkat kesehatan perusahaan juga menjadi salah satu pertimbangan Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian atas kinerja Direksi. Penilaian tingkat kesehatan Perusahaan didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 826/KMK.013/1992 tanggal 24 Juli 1992. Dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 mengenai "Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara" Pasal 8, dinyatakan bahwa pengelompokan BUMN yang bergerak dalam bidang usaha jasa keuangan dan indikator penilaian aspek keuangan operasional dan administrasi ditetapkan dengan Keputusan Menteri BUMN tersendiri. Oleh karena sampai saat ini belum ada Keputusan dimaksud, maka PNM masih menggunakan Keputusan Nomor: 826/KMK.013/1992 tersebut dalam penilaian tingkat kesehatan Perusahaan tahun 2021.

Berdasarkan Lampiran IV Surat Keputusan No. 826/KMK.013/1992, PNM termasuk ke dalam kelompok BUMN Jasa Keuangan Lainnya (Lembaga Keuangan Bukan Bank). Kemudian berdasarkan Lampiran II SK Nomor: 826/KMK.013/1992, Tingkat Kesehatan BUMN ditetapkan menurut penilaian atas bobot dari jenis-jenis indikator kerja sebagai berikut:

Indikator Utama, dengan total 70,00%, terdiri dari:

- Rentabilitas 52,50%
- Likuiditas 8,75%
- Solvabilitas 8,75%

in 2020. PNM disbursed PNM ULaMM financing of IDR3.01 trillion, an increase of 19.71% from 2020 which was IDR2.51 trillion. In addition, through its subsidiary PT PNM Venture Capital (PNM VC), in 2021 PNM VC distributed venture capital of IDR704.12 billion, this amount was an increase of 32.01% compared to 2020 which was IDR533.40 billion.

From the financial side, net interest and sharia income in 2021 reached IDR6.12 trillion, an increase of 56.28% or IDR2.20 trillion compared to 2020 which was IDR3.92 trillion. Along with the increase in interest income, profit for the year also increased. PNM earned a profit for the year of IDR845.13 billion, an increase of IDR486.53 billion or 135.68% from revenue in 2020 of IDR358.60 billion. With the increase in profit for the year, the Company's equity also increased. Throughout 2021, PNM's total equity was recorded at IDR6.44 trillion. This amount increased by 15.23% or IDR851.04 billion compared to the total equity of PNM in 2020 which was IDR5.59 trillion. The total assets of PNM also experienced an increase which was recorded at IDR43.71 trillion. This amount experienced an increase of 38.05% or IDR12.05 trillion compared to total assets of IDR31.67 trillion in 2020.

In addition to operational and financial performance, the company's soundness level was also one of the considerations for the Board of Commissioners in assessing the performance of the Board of Directors. The assessment of the company's soundness level was based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number: 826/KMK.013/1992 dated July 24, 1992. In the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002 concerning "Assessment of the Level of Health of State-Owned Enterprises" Article 8, it was stated that the grouping of SOEs engaged in the financial services business and indicators for evaluating operational and administrative financial aspects were determined by a separate Decree of the Minister of SOEs. Because until now there was no such decision, PNM still used the Decision Number: 826/KMK.013/1992 in assessing the company's health level in 2021.

Based on Attachment IV of Decree No. 826/KMK.013/1992, PNM could be included in the group of SOEs of Other Financial Services (Non-Bank Financial Institutions). Then based on Attachment II to Decree Number: 826/KMK.013/1992, the Health Level of SOEs was determined according to the assessment of the weights of the types of work indicators as follows:

Main indicators, totaling 7000%, consist of:

- Profitability 52.50%
- 8.75% Liquidity
- Solvency 8.75%

Indikator Tambahan, dengan total 30,00%, terdiri dari:

- Profit Margin 10,00%
- Rasio Operasi 10,00%
- Produktivitas Tenaga Kerja 10,00%

Berdasarkan penilaian atas bobot dari jenis indikator kinerja tahun 2021 nilai PNM untuk indikator utama sebesar 104,63 sedangkan indikator tambahan 37,53 sehingga total nilai kinerja adalah 142,15 dan termasuk kategori "Sehat Sekali".

Pandangan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi

Secara umum, kondisi perekonomian global di tahun 2022 diperkirakan akan membaik yang didukung peningkatan mobilitas dan stimulus kebijakan di berbagai negara serta kemajuan penanganan COVID-19. Langkah bersama untuk menghadapi gangguan dalam mata rantai pasokan global yaitu berjalannya agenda Presidensi G20 Indonesia pada tahun 2022 yang akan terus mendorong pemulihan ekonomi global yang lebih kuat dan berimbang dengan fokus pada upaya mendorong produktivitas, meningkatkan ketahanan dan stabilitas ekonomi, serta memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif.

Perekonomian Indonesia diperkirakan meningkat lebih tinggi pada tahun 2022 sejalan dengan membaiknya permintaan domestik. Perbaikan ekonomi domestik berlanjut dengan stabilitas yang terjaga, Ekonomi domestik terus membaik pada triwulan II 2021 tercatat tumbuh positif dan tinggi sebesar 7,07% (YoY), meningkat tajam dari kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 0,71% (YoY). Pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh kinerja positif seluruh lapangan usaha (LU) dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

Berbagai kebijakan dan strategis terus diperkuat untuk pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki peran strategis terhadap perekonomian melalui pilar korporatisasi, kapasitas, dan pembiayaan sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif. Upaya melakukan transformasi UMKM ditempuh melalui pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan daya tahan yang lebih tinggi dan kapasitas yang lebih produktif dan inovatif. Kebijakan pengembangan UMKM juga didukung sinergi yang terus diperkuat antara Bank Indonesia dengan Pemerintah, lembaga keuangan, dan para penggiat usaha. Perekonomian Indonesia diperkirakan meningkat lebih tinggi pada tahun 2022 sejalan dengan membaiknya permintaan domestik. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 akan mencapai 4,7%-5,5%, sejalan dengan akselerasi konsumsi swasta dan investasi, di tengah tetap terjaganya belanja fiskal Pemerintah dan ekspor, meski risiko kenaikan kasus COVID-19 perlu terus diwaspadai.

Additional indicators, totaling 30.00%, consist of:

- Profit Margin 10.00%
- Operating Ratio 10.00%
- Labor Productivity 10.00%

Based on the assessment of the weights of the types of performance indicators in 2021, the PNM value for the main indicators was 104.63 while the additional indicators obtained 37.53 so that the total performance value was 142.15 and was included in the "Very Healthy" category.

View on Business Prospects Developed by the Board of Directors

In general, global economic conditions in 2022 are expected to improve, supported by increased mobility and policy stimulus in various countries as well as progress in handling COVID-19. The joint step to deal with disruptions in the global supply chain is the implementation of the agenda of the G20 Indonesia Presidency in 2022 which will continue to encourage a stronger and more balanced global economic recovery with a focus on efforts to boost productivity, increase economic resilience and stability, and ensure sustainable and inclusive growth.

The Indonesian economy is forecasted to accelerate further in 2022 in line with improving domestic demand. Improvements in the domestic economy continued with maintained stability. The domestic economy continued to improve in the second quarter of 2021, which recorded a positive and high growth of 7.07% (YoY), a sharp increase from the contraction in the previous quarter of 0.71% (YoY). Economic growth was also supported by the positive performance of all business fields (LU) and increased economic growth throughout Indonesia.

Various policies and strategies continued to strengthen the development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) which had a strategic role in the economy through the pillars of corporatization, capacity, and financing to support strong and inclusive economic growth. Efforts to transform MSMEs were pursued through the use of digital technology to increase resilience and capacity to be more productive and innovative. The MSME development policy was also supported by the synergy that continued to be strengthened among Bank Indonesia and the Government, financial institutions, and business activists. The Indonesian economy was forecasted to accelerate further in 2022 in line with improving domestic demand. Bank Indonesia predicted that Indonesia's economic growth in 2022 will reach 4.7%-5.5%, in line with the acceleration of private consumption and investment, amid maintained government fiscal spending and exports, although the risk of rising COVID-19 cases needs to be monitored closely.

Berdasarkan prediksi kondisi perekonomian dan industri serta kekuatan internal Perusahaan, Dewan Komisaris berpendapat bahwa prospek usaha yang telah disusun oleh Direksi sudah tepat. Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa Perusahaan akan dapat memanfaatkan peluang yang ada di antaranya adalah *market* UMKM yang terus bertumbuh seiring membaiknya kondisi perekonomian nasional. Selain itu, kebijakan Pemerintah juga sangat mendukung berkembangnya ekonomi kerakyatan, khususnya bagi UMKM. Hal ini dibuktikan dengan pemberian dana tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Pemerintah kepada PNM sebesar sebesar Rp3,5 triliun pada tahun 2021.

Pandangan atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan

PNM senantiasa menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada setiap aspek bisnisnya dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. PNM juga berkomitmen untuk terus menyempurnakan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) setiap tahun secara berkesinambungan. PNM meyakini bahwa unsur keterbukaan di lingkungan kerja dan proses kerja yang sesuai dengan tujuan dan mekanisme yang telah ditetapkan akan membantu Perusahaan bergerak maju. Oleh karena itu, implementasi GCG menjadi perhatian utama bagi Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi.

Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi telah menerapkan GCG dengan efektif dan konsisten di 2021. Dalam menilai penerapan GCG di Perusahaan, Dewan Komisaris memberikan penilaian terhadap sistem manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan *whistleblowing system*.

Sistem Manajemen Risiko

Perusahaan senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko dalam praktik bisnis, di mana *unsure* ketidakpastian baik berasal dari lingkungan internal maupun eksternal dapat memberi pengaruh terhadap pencapaian tujuan Perusahaan. Unsur ketidakpastian menjadi semakin besar akibat perubahan iklim bisnis yang semakin cepat dan kompleks serta merupakan risiko bisnis yang tidak mungkin dihindari, sehingga harus dikelola dalam suatu mekanisme yaitu penerapan Manajemen Risiko.

Perusahaan menetapkan kerangka kerja Manajemen Risiko yang menjadi dasar dalam pelaksanaan seluruh kegiatan Manajemen Risiko diseluruh tingkatan Perusahaan untuk membantu Perusahaan dalam mengelola risiko secara efektif. Kerangka kerja penerapan Manajemen Risiko PT Permodalan Nasional Madani (Persero) mengacu pada

Based on the predictions of economic and industrial conditions as well as the Company's internal strength, the Board of Commissioners was of the opinion that the business prospects prepared by the Board of Directors were correct. The Board of Commissioners believes that the Company will be able to take advantage of the opportunities that exist, including the MSME market continuing to grow in line with improving national economic conditions. In addition, Government policies were also very supportive of the development of the people's economy, especially for MSMEs. This was evidenced by the provision of additional State Capital Participation (PMN) funds from the Government to PNM of IDR3.5 trillion in 2021.

Views on the Implementation of Corporate Governance

PNM always applies the principles of Good Corporate Governance in every aspect of its business by referring to the applicable laws and regulations. PNM also commits to continuously improving the implementation of Good Corporate Governance (GCG) every year. PNM believes that the element of openness in the work environment and work processes that are in accordance with the goals and mechanisms that have been set will help the Company move forward. Therefore, the implementation of GCG is a major concern for the Board of Commissioners in carrying out its supervisory function and providing advice to the Board of Directors.

The Board of Commissioners believed that the Board of Directors implemented GCG effectively and consistently in 2021. In assessing the implementation of GCG in the Company, the Board of Commissioners provided an assessment of the risk management system, internal control system, and whistleblowing system.

Risk Management System

The Company is always faced with risks in its business practices, where elements of uncertainty both from the internal and external environment can have an influence on the achievement of the Company's goals. The element of uncertainty is getting bigger due to changes in the business climate that are getting faster and more complex and is a business risk that cannot be avoided, so it must be managed in a mechanism, namely the application of Risk Management.

The Company established a Risk Management framework forming the basis for the implementation of all Risk Management activities at all levels of the Company to assist the Company in managing risk effectively. The framework for implementing the Risk Management of PT Permodalan Nasional Madani (Persero) referred to the practice of SNI ISO

praktek SNI ISO 31000:2018 terdiri dari 6 (enam) elemen utama yaitu:

1. Kepemimpinan dan Komitmen (*Leadership and Commitment*);
2. Integrasi (*Integration*);
3. Perancangan (*Design*);
4. Implementasi (*Implementation*);
5. Evaluasi (*Evaluation*);
6. Perbaikan (*Improvement*).

Kerangka Kerja Manajemen Risiko menjadi dasar penataan penerapan Manajemen Risiko diseluruh jajaran Perusahaan. Kerangka kerja Manajemen Risiko digunakan untuk memastikan bahwa informasi risiko Perusahaan secara komprehensif dan memadai yang diperoleh dari proses Manajemen Risiko dilaporkan dan digunakan sebagai landasan untuk pengambilan keputusan di seluruh jajaran Perusahaan.

Perusahaan telah mengelompokkan manajemen risiko ke dalam 8 (delapan) risiko terbesar yang dimiliki Perusahaan. Kedelapan jenis risiko tersebut adalah risiko pembiayaan/risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis dan risiko kepatuhan. Berdasarkan hasil *Risk Assessment* atas pelaksanaan penerapan manajemen risiko periode Desember 2021, Peringkat Risiko Penerapan Manajemen Risiko pada seluruh jenis Risiko adalah *Acceptable* yang artinya tidak diperlukan tindakan/diterima.

Dewan Komisaris senantiasa melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan manajemen risiko. Dalam rangka pengendalian risiko secara efektif, kebijakan dan prosedur, Perusahaan perlu melakukan penetapan toleransi risiko dan limit risiko yang dilakukan dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*), toleransi risiko (*risk tolerance*) dan strategi Perusahaan secara keseluruhan. Dewan Komisaris berpandangan bahwa kecukupan sistem manajemen risiko telah berjalan memadai.

Sistem Pengendalian Internal

Pelaksanaan penerapan sistem pengendalian internal Perusahaan dilakukan dengan mengacu pada kerangka *Three Lines of Defense*. Pembagian peran pengelolaan risiko dan pengendalian internal dalam Perusahaan dibagi menjadi 3 (tiga) Lini Pertahanan sebagai berikut.

1. Lini Pertama

Fungsi pemilik risiko (*risk owner*) adalah semua pihak yang melaksanakan pekerjaannya setiap hari (bekerja sehari-hari). Pertahanan lini pertama dilaksanakan oleh divisi/unit kerja atau komponen atau fungsi bisnis yang melakukan aktivitas operasional Perseroan sehari-hari, terutama yang merupakan aktivitas operasional Perseroan sehari-hari, terutama yang merupakan garis depan atau ujung tombak organisasi.

31000:2018 consisting of 6 (six) main elements, namely:

1. *Leadership and Commitment*;
2. *Integration*;
3. *Design*;
4. *Implementation*;
5. *Evaluation*;
6. *Improvement*.

The Risk Management Framework was the basis for structuring the implementation of Risk Management at all levels of the Company. The Risk Management framework was used to ensure that comprehensive and adequate Company risk information obtained from the Risk Management process was reported and used as a basis for decision making at all levels of the Company.

The Company classified risk management into 8 (eight) largest risks owned by the Company. The eight types of risk included financing risk/credit risk, liquidity risk, market risk, operational risk, legal risk, reputation risk, strategic risk and compliance risk. Based on the results of the Risk Assessment on the implementation of risk management for the period of December 2021, the Risk Rating for the Implementation of Risk Management for all types of Risk was Acceptable, which meant that no action was required/accepted.

The Board of Commissioners continuously evaluated the effectiveness of risk management implementation. In order to effectively control risk, policies and procedures, the Company needed to determine risk tolerance and risk limits carried out by considering the level of risk to be taken (risk appetite), risk tolerance and the overall strategy of the Company. The Board of Commissioners was of the view that the adequacy of the risk management system had been running adequately.

Internal Control System

The implementation of the Company's internal control system was carried out by referring to the Three Lines of Defense framework. The division of risk management and internal control roles within the Company was divided into 3 (three) lines of defense as follows.

1. First Line

The function of the risk owner was all parties who carry out their work every day. The first line of defense was carried out by divisions/work units or components or business functions carrying out the Company's daily operational activities, especially those which were the Company's day-to-day operational activities, especially those who became the front line or the spearhead of the organization.

2. Lini Kedua

Pertahanan lini kedua dilaksanakan oleh fungsi-fungsi yang terkait tata kelola internal Perseroan seperti kepatuhan, manajemen risiko, teknologi informasi dan divisi/unit kerja yang memiliki fungsi kontrol lainnya.

3. Lini Ketiga

Dilaksanakan oleh fungsi yang memberikan *independent assurance* yaitu Auditor Internal maupun auditor eksternal. Lini pertahanan 3 ini merupakan komponen internal yang independen terhadap fungsi-fungsi lainnya dalam Perseroan, bertanggung jawab untuk melakukan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun dan implementasi manajemen risiko secara keseluruhan serta memastikan bahwa lini pertahanan 1 dan 2 telah berjalan secara efektif.

Kegiatan pengendalian harus melibatkan seluruh insan Perusahaan, termasuk jajaran Direksi. Oleh karena itu, kegiatan pengendalian akan berjalan efektif apabila direncanakan dan diterapkan guna mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi. Kegiatan pengendalian terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk meyakinkan bahwa pengarahan dari pimpinan dapat dijalankan dengan baik. Kegiatan pengendalian harus disesuaikan dengan risiko yang dihadapi sehingga risiko dapat dimitigasi pada tingkat yang dapat ditoleransikan.

Pemantauan terhadap internal kontrol perlu dilakukan melalui suatu proses penilaian berkelanjutan terhadap kualitas rancangan dan implementasi serta efektivitas kinerja kontrol yang berjalan. Prosedur pemantauan internal kontrol harus meliputi prosedur pelaporan kepada manajemen mengenai kelemahan kontrol yang diungkapkan dari hasil pemantauan, frekuensi dan cakupan audit untuk setiap unit audit (*auditee*) sangat ditentukan oleh hasil penilaian atas efektivitas prosedur dan pemantauan terhadap sistem internal kontrol.

Evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal secara berkala dilakukan Satuan Pengawasan Internal. Laporan hasil evaluasi sistem pengendalian internal memberikan informasi kepada manajemen terkait gambaran umum pengendalian internal yang telah dilakukan terkait operasional, pelaporan dan compliance. Selain itu hasil pemeriksaan SPI terkait *control activity* juga telah dilakukan pada unit kerja dan saran yang diberikan agar tidak terjadi permasalahan yang berulang dan perbaikan yang dilakukan.

Dewan Komisaris berpandangan bahwa penerapan sistem pengendalian intern sudah berjalan dengan baik. Dewan Komisaris bertekad menerapkan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjamin tersedianya laporan keuangan dan laporan manajemen yang benar, lengkap, dan tepat waktu, serta memenuhi efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha Perusahaan.

2. Second Line

The second line of defense was carried out by functions related to the Company's internal governance such as compliance, risk management, information technology and divisions/work units that had other control functions.

3. Third Line

It was carried out by a function providing independent assurance, namely the Internal Auditor and the External Auditor. This line of defense 3 was an internal component that was independent of other functions within the Company, responsible for reviewing and evaluating the overall design and implementation of risk management and ensuring that lines of defense 1 and 2 run effectively.

Control activities involved all Company personnel, including the Board of Directors. Therefore, control activities could run effectively if they were planned and implemented to control the identified risks. Control activities consisted of policies and procedures used to ensure that the direction of the leadership could be carried out properly. Control activities had to be adjusted to the risks faced so that risks could be mitigated to a tolerable level.

Monitoring of internal control needed to be carried out through a process of continuous assessment of the quality of design and implementation as well as the effectiveness of the current control performance. Internal control monitoring procedures had to include reporting procedures to management regarding control weaknesses disclosed from the results of monitoring. The frequency and scope of audits for each audit unit (auditee) was largely determined by the results of the assessment of the effectiveness of procedures and monitoring of the internal control system.

Evaluation of the implementation of the internal control system was periodically carried out by the Internal Control Unit. The report on the results of the evaluation of the internal control system provided information to management regarding an overview of internal controls carried out related to operations, reporting and compliance. In addition, the results of the SPI inspection related to control activity was also carried out on the work unit, and suggestions were given so that there were no recurring problems, and improvements were made.

The Board of Commissioners was of the view that the implementation of the internal control system had been running well. The Board of Commissioners determined to implement the Company's Internal Control System to improve the company's compliance with applicable laws and regulations, ensure the availability of correct, complete, and timely financial reports and management reports, and fulfill the efficiency and effectiveness of the Company's business activities.

Whistleblowing System

Whistleblowing System (WBS) berperan penting dalam meningkatkan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik serta serta merupakan sarana penyampaian pelanggaran secara rahasia baik oleh pejabat dan karyawan Perusahaan. Perusahaan telah membentuk saluran pengaduan dan menerima setiap pengaduan pelanggaran yang diajukan yaitu melalui email ke antifraud@ymail.com, SMS ke nomor 082112345555, serta menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Direksi up Divisi Satuan Pengawas Internal. Perseroan juga memberikan jaminan kerahasiaan identitas pelapor sampai terbukti adanya pelanggaran.

Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran Perusahaan dibentuk oleh Direksi. Direksi bertanggung jawab atas terlaksananya kebijakan penanganan pengaduan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat dan karyawan Perusahaan. Direksi membentuk Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran yang beranggotakan perwakilan dari Divisi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Direksi. Ketua Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran adalah Kepala Divisi Pengawas Internal (SPI). Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran bertugas untuk menindaklanjuti pengaduan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat dan karyawan Perusahaan. Dewan Komisaris melalui Komite Audit berperan dalam me-review pelaksanaan tanggung jawab Divisi Satuan Pengawas Internal terkait dengan penerapan WBS.

Dari 496 pengaduan yang masuk melalui WBS selama tahun 2021, sebanyak 20 pengaduan yang memenuhi kriteria dan ditindaklanjuti oleh perusahaan. Di mana atas 20 pengaduan tersebut, 18 diantaranya telah selesai ditindak lanjuti dan terdapat 2 pengaduan yang masih berjalan prosesnya. Sedangkan sisanya tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak memenuhi kriteria (informasi tidak lengkap) sebanyak 62 pengaduan dan bukan merupakan pengaduan pelanggaran (*fraud*) melainkan berupa pertanyaan/kritik/saran terkait perusahaan dan rekrutmen/kepegawaian sebanyak 414 item. Dewan Komisaris berpandangan bahwa penerapan WBS di Perusahaan telah berjalan dengan baik. Namun demikian, Dewan Komisaris memberikan arahan agar kedepannya penerapan WBS lebih ditingkatkan lagi efektivitasnya.

Penilaian Kinerja Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam rangka meningkatkan peran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris telah membentuk 2 (dua) komite yaitu:

1. Komite Audit
2. Komite Nominasi dan Remunerasi

Whistleblowing System

The Whistleblowing System (WBS) played an important role in improving the implementation of good corporate governance as well as being a means of confidential disclosure of violations by both the officers and employees of the Company. The Company established a complaint channel and receives any complaints of violations submitted, namely via email to antifraud@ymail.com, SMS to number 082112345555, as well as submitting official letters addressed to the Board of Directors and the Internal Supervisory Unit Division. The Company also guaranteed the confidentiality of the identity of the reporter until it was proven that there was a violation.

The Company Complaints Handling Team was formed by the Board of Directors. The Board of Directors was responsible for the implementation of the policy for handling complaints of violations committed by officials and employees of the Company. The Board of Directors formed a Violation Complaint Handling Team consisting of representatives from the Internal Supervisory Unit (SPI) Division and/or other officials appointed by the Board of Directors. The Head of the Violation Complaint Handling Team was the Head of the Internal Supervisory Division (SPI). The Violation Complaints Handling Team was tasked with following up on complaints of violations made by officials and employees of the Company. The Board of Commissioners through the Audit Committee played a role in reviewing the implementation of the responsibilities of the Internal Supervisory Unit related to the implementation of the WBS.

Of the 496 complaints came through WBS during 2021; 20 complaints met the criteria and were followed up by the company. Among the 20 complaints, 18 of them had been followed up, and there were 2 in progress complaints. While the rest could not be followed up because they did not meet the criteria (incomplete information) as many as 62 complaints and were not complaints of violations (fraud) but in the form of questions/criticisms/suggestions related to the company and recruitment/staffing of 414 items. The Board of Commissioners was of the view that the implementation of WBS in the Company had been going well. However, the Board of Commissioners provided direction so that in the future the effectiveness of WBS implementation could be further improved.

Performance Assessment of Committees Under the Board of Commissioners

In order to enhance the role of the Board of Commissioners in carrying out its supervisory function, the Board of Commissioners formed 2 (two) committees, namely:

1. Audit Committee
2. Nomination and Remuneration Committee

Prosedur penilaian kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris dilakukan oleh Dewan Komisaris secara periodik (tahunan) dengan kriteria penilaian yaitu pelaksanaan rapat Komite serta kunjungan kerja yang telah dilakukan.

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap Perusahaan, terutama dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, penunjukan Akuntan, pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal, pelaksanaan manajemen, proses akuntansi dan pelaporan keuangan. Sepanjang tahun 2021, Komite Audit telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Komite Audit menjalankan tugasnya yang antara lain:

1. Mengikuti Rapat Komite Audit dengan Dewan Komisaris.
2. Melaksanakan Rapat koordinasi KA dengan SPI.
3. Melaksanakan rapat Koordinasi dengan Divisi, Anak Perusahaan, Unit Bisnis Lainnya.
4. Melakukan koordinasi terkait dengan kegiatan audit oleh KAP.
5. Melakukan kunjungan wilayah.
6. Melakukan pembahasan draft RKAP Tahun 2021.

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan bidang yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi. Sepanjang tahun 2021, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Komite Remunerasi dan Nominasi telah menjalankan tugasnya yang antara lain:

1. Melakukan assessment Direksi dan BOD -1.
2. Membuat piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.
3. Penilaian calon Komisaris dan Direksi Perusahaan.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris yang diatur dalam *board manual* yaitu Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris yang 1 (satu) diantaranya adalah Komisaris Independen. 1 (satu) diantaranya anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama atau Presiden Komisaris. Dewan Komisaris yang terdiri dari atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Pada tahun 2021, terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris yang dilakukan atas dasar pertimbangan

The procedure for evaluating the performance of the Committees under the Board of Commissioners was carried out by the Board of Commissioners periodically (annually) with the assessment criteria, namely the implementation of Committee meetings and work visits that had been carried out.

The Audit Committee had the duties and responsibilities to assist the Board of Commissioners in supervising the Company, especially in carrying out its duties and supervisory functions on matters related to financial information, compliance with laws and regulations, appointment of accountants, implementation of audits by internal auditors, implementation management, accounting processes and financial reporting. Throughout 2021, the Audit Committee carried out its duties and responsibilities well. The Audit Committee carried out its duties, which include:

1. *Participating in the Audit Committee Meeting with the Board of Commissioners.*
2. *Conducting KAP coordination meeting with SPI.*
3. *Conducting Coordination meetings with Divisions, Subsidiaries, Other Business Units.*
4. *Coordinating related to audit activities by KAP.*
5. *Conducting area visits.*
6. *Discussing the 2021 RKAP draft.*

The Nomination and Remuneration Committee had duties and responsibilities to assist the Board of Commissioners in carrying out areas related to remuneration and nomination. Throughout 2021, the Nomination and Remuneration Committee carried out its duties and responsibilities well. The Remuneration and Nomination Committee carried out its duties in:

1. *Conducting an assessment of the Board of Directors and BOD -1.*
2. *Creating a charter for the Nomination and Remuneration Committee.*
3. *Assessing candidates for Commissioners and Directors of the Company.*

Changes in Board of Commissioners' Composition

The composition of the Board of Commissioners as regulated in the board manual was that the Board of Commissioners consisted of at least 2 (two) members of the Board of Commissioners, 1 (one) of whom was an Independent Commissioner. 1 (one) member of the Board of Commissioners was appointed as President Commissioner or President Commissioner. The Board of Commissioners which consisted of more than 1 (one) member was an assembly and each member of the Board of Commissioners could not act alone, but based on the decision of the Board of Commissioners. In 2021, there were some changes in the composition of the

kebutuhan Perusahaan. Perubahan komposisi Dewan Komisaris pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Board of Commissioners based on consideration of the needs of the Company. Changes in the composition of the Board of Commissioners in 2021 were as follows:

Periode 1 Januari – 16 April 2021

Period January 1 – April 16, 2021

Rully Indrawan	:	Komisaris Utama / <i>President Commissioner</i>
Meidyah Indreswari	:	Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>
M. Sholeh Amin	:	Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>
Veronica Colondam	:	Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>
Parman Nataatmadja	:	Komisaris / <i>Commissioner</i>

Periode 16 April – 31 Desember 2021

Period April 16 – December 31, 2021

Arif Rahman Hakim	:	Komisaris Utama / <i>President Commissioner</i>
Meidyah Indreswari	:	Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>
M. Sholeh Amin	:	Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>
Veronica Colondam	:	Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>
Parman Nataatmadja	:	Komisaris / <i>Commissioner</i>

Penutup

Demikian laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris atas kinerja dan pelaksanaan usaha Perusahaan di tahun 2021. Pada kesempatan ini, Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang tinggi terhadap komitmen dan kerja keras Direksi, manajemen, dan seluruh karyawan sehingga PNM telah mampu menghadapi tantangan dan telah menyajikan kinerja yang baik di tengah kondisi yang menantang di tahun 2021. Kepada para pemangku kepentingan lainnya, Dewan Komisaris juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan. Ke depannya, Dewan Komisaris sungguh berharap, seluruh jajaran Perusahaan dapat terus memberikan yang terbaik bagi Perusahaan di masa yang akan datang.

Closing

This became the report on the supervisory duties of the Board of Commissioners on the performance and implementation of the Company's business in 2021. On this occasion, the Board of Commissioners expressed the highest appreciation for the commitment and hard work of the Board of Directors, management, and all employees so that PNM was able to face challenges and presented good performance in the midst of challenging conditions in 2021. To other stakeholders, the Board of Commissioners also expressed gratitude for the given trust. In the future, the Board of Commissioners sincerely hopes that all levels of the Company can continue to provide the best for the Company in the future.

Jakarta, 1 April 2022

Jakarta, April 1, 2022

Atas Nama Dewan Komisaris

On behalf of the Board of Commissioners



Arif Rahman Hakim

Komisaris Utama
President Commissioner

Surat Pernyataan Anggota Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Tahun 2021 PT Permodalan Nasional Madani

*Statement of Members of the Board of Directors
about Responsibility for Annual Report 2021
PT Permodalan Nasional Madani*

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Permodalan Nasional Madani tahun 2021 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan perusahaan.

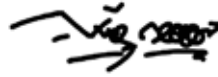
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, declare that all information in the Annual Report of PT Permodalan Nasional Madani 2021 has been published in its entirety and we are fully responsible for the correctness of the contents of the company's Annual Report.

This statement was made with actual.

Jakarta, 1 April 2022
Jakarta, April 1, 2022

DIREKSI *Board of Directors*



Arief Mulyadi

Direktur Utama
President Director



Tjatur H. Priyono

Direktur Bisnis
Director of Business



Sunar Basuki

Direktur Kelembagaan dan Perencanaan
Director of Institutional and Planning



Kindaris

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
Director of Compliance and Risk Management

Ninis Kesuma Adriani*

Direktur Keuangan dan Operasional
Director of Finance and Operations

*) Menunggu Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Otoritas Jasa Keuangan / Waiting for the results of the Fit and Proper Assessment of the Financial Services Authority

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Tahun 2021 PT Permodalan Nasional Madani

*Statement of Members of the Board of Commissioners
about Responsibility for Annual Report 2021
PT Permodalan Nasional Madani*

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Permodalan Nasional Madani tahun 2021 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan perusahaan.

We, the undersigned, declare that all information in the Annual Report of PT Permodalan Nasional Madani 2021 has been published in its entirety and we are fully responsible for the correctness of the contents of the company's Annual Report.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement was made with actual.

Jakarta, 1 April 2022
Jakarta, April 1, 2022

DEWAN KOMISARIS *Board of Commissioners*



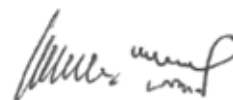
Arif Rahman Hakim

Komisaris Utama
President Commissioner



Meidyah Indreswari

Komisaris Independen
Independent Commissioner



M. Sholeh Amin

Komisaris Independen
Independent Commissioner



Veronica Colondam

Komisaris Independen
Independent Commissioner



Parman Nataatmadja

Komisaris
Commissioner

PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile





Holding Ultra Mikro Indonesia

 **BRI**  **Pegadaian**  **PNM**
Permodalan Nasional Madani

Identitas Perusahaan

Company's Identity



Nama Perusahaan
Company Name
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI

Nama Panggilan
Company Brand
PNM



Tanggal Pendirian
Date of Establishment
1 Juni 1999
1 June 1999



Modal Dasar
Authorized Capital
Rp9.200.000.000.000
IDR9,200,000,000,000



Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Issued and Fully Paid-in Capital
Rp3.800.000.000.000
IDR3,800,000,000,000



Bidang Usaha
Line of Business
Keuangan
Financial



Dasar Hukum Pendirian
Legal Basis of Establishment



- Peraturan Pemerintah RI No. 38 tanggal 25 Mei 1999;
- Peraturan Menteri Kehakiman No. C-11.609.HT.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999; dan
- SK Menteri Keuangan No. 487/KMK.017.1999 tanggal 13 Oktober 1999.
- Regulation of the Government of Republic of Indonesia No. 38 dated May 25, 1999;
- Regulation of the Minister of Justice No. C-11.609.HT.01.TH.99 dated June 23, 1999; and
- Decree of the Minister of Finance No. 487/KMK.017.1999 dated October 13, 1999.



Kepemilikan
Ownership

99,99%

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

0,01%

Pemerintah Republik Indonesia
The Government of the Republic of Indonesia



Data Jaringan Kantor
Office Network Data

1 Kantor Pusat
Head Office

62 Kantor Cabang PNM
PNM Branch Offices

626 Kantor Layanan ULamm
ULamm Branch Offices

2.985 Kantor Cabang Mekaar
Mekaar Branch Offices

Jumlah Pegawai
Total Employee



Orang Per Desember 2021
People As of December 2021

57.864

Situs Web
Website

www.pnm.co.id



Contact Address
Contact Address

(+62) 21 2511 - 404

1500 - 654

info@pnm.co.id



Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Lalu Dodot Patria Ary Suprianto



Alamat Kantor Pusat
Head Office Address



Menara PNM
JL Kuningan Mulia No. 9F RT 004 RW 010,
Kuningan Center Lot 1 (Kav 1), Kel. Karet,
Kec. Setia Budi - Jakarta Selatan 12920

Sebelumnya / Previously
Menara Taspen
Lantai 1, 2, 6, 7, 8, 10, 12, 12A, 15
Jl. Jendral Sudirman Kav. 2
Jakarta 10220, Indonesia

Entitas Anak
Subsidiaries



PNM
Investment Management

PNM
Venture Capital

Nama dan Alamat Kantor Cabang dan/atau Kantor Perwakilan

Name and Address of Branch Offices and/or Representative Offices

Kantor Cabang ULaMM / ULaMM Branch Office

No	Unit	Alamat Address	Telepon Telephone	Email dan Web Email and Web
1	Aceh	Jl. Sultan Iskandar Muda No. 65, Kel. Punge Blang Cut, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh 23234	(0651) 40288	Email: pnmbna@pnm.co.id Web: www.pnm.co.id
2	Ambon	Jl. Laksda Leo Wattimena, Passo, Baguala Ruko Mega Mas, Blok C-1 No. 13, Kota Ambon, Maluku 97233	(0911) 3615559	Email: pnmambon@gmail.com Web: www.pnm.co.id
3	Balikpapan	Jl. Syarifuddin Yoes, Gang Pelita I No. 26, RT.12, Kel. Sepinggian Raya, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan 76115	(0542) 7203830	Email: pnmbpn@pnm.co.id Web: www.pnm.co.id
4	Bandung	Jl. Ahmad Yani No. 258, Kel. Kacapiring, Kec. Batununggal, Kota Bandung 40271	(022) 7231061	Email: pnmbandung258@gmail.com Web: www.pnm.co.id
5	Bangka Belitung	Jl. Masjid Jamik No. 27 RT 01/RW 01, Kel. Masjid Jamik, Kec. Rangkui, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung 33132	(0717) 9102299	Email: bkb.pnm@gmail.com Web: www.pnm.co.id
6	Banjarmasin	Jl. A. Yani KM 4.5 Bumi Mas Raya No. 7, RT 006, Pemurus Baru, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70249	(0511) 3253001	Email: pnmbjm@gmail.com Web: www.pnm.co.id
7	Banjarnegara	Jl. Letjend Suprpto, RT.06/RW.01, Semampir, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara, Jawa Tengah 53418	(0286) 593291	Email: banjarnegara.pnm@gmail.com Web: www.pnm.co.id
8	Banyuwangi	Jl. Agus Salim No. 122 Lingkungan Cungking Kel. Mojopanggung, Kec. Giri, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur 68425	(0333) 3388884	Email: pnmcabangbanyuwangi@pnm.co.id Web: www.pnm.co.id
9	Baubau	Jl. Bulawambona No. 17, Kel. Wajo, Kec. Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara 93726	(0402) 2821688	Email: pnmbaubau@gmail.com Web: www.pnm.co.id
10	Bekasi	Jl. Fatahillah No. 54, Desa Kalijaya, Cikarang Barat, Bekasi 17530	(021) 89105110	Email: cabangbekasi1@gmail.com Web: www.pnm.co.id
11	Blitar	Jl. Kalimantan No. 37, Sananwetan, Kota Blitar 66137	(0342) 4559883	Email: Resepsionis_blitar@pnm.co.id Web: www.pnm.co.id
12	Bogor	Jl. Dadali No. 35, RT.05/RW.05, Kel. Tanah Sareal, Kota Bogor 16161	(0251) 8384663	Email: pnmbgr@pnm.co.id Web: www.pnm.co.id
13	Bojonegoro	Jl. Dr Suharso No. 34, Kel, Kadipaten, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro 62111	(0353) 2893228	Email: bojonegoro@pnm.co.id Web: www.pnm.co.id
14	Cimahi	Jl. Encep Kartawiria No. 17, RT.002/RW.018, Kel. Citeureup, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi 40512	(022) 20662022	Email: cabangcimahi@gmail.com Web: www.pnm.co.id
15	Cirebon	Jl. Sunyaragi Blok Siadem RT.003/RW.005 No.12-14, Kel. Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon 45132	(0231) 8803616	Email: oprcabrcrb@gmail.com Web: www.pnm.co.id
16	Denpasar	Jl. Dokter Muwardi No. 15, Kel. Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali 80226	(0361) 222322	Email: pnmdps@pnm.co.id Web: www.pnm.co.id
17	Depok	Jl. Tole Iskandar No.11, Kel. Sukamaju, Kec. Cilodong, Depok, Jawa Barat 16415	(021) 7715142	Email: depok@pnm.co.id Web: www.pnm.co.id
18	Garut	Jl. Patriot No. 22, Sukagalih, Tarogong Kidul, Garut 44151	(0262) 540314	Email: pnmgarut.10@gmail.com Web: www.pnm.co.id
19	Indramayu	Jl. DI. Panjaitan RT 04/RW 05 No.71, Kel. Karanganyar, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu 45213	(0234) 277766 (0234) 277767	Email: pnmcabangindramayu@gmail.com Web: www.pnm.co.id
20	Jakarta	Jl. Pejaten Barat Raya No.17B, RT.5/RW.8, Pejaten Barat, Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12510	(021) 27520051	Email: pnmpasarMinggu@gmail.com Web: www.pnm.co.id

No	Unit	Alamat Address	Telepon Telephone	Email dan Web Email and Web
21	Jambi	Jl. Inu Kertapati No. 5A RT.11, Komplek DPRD, Kel. Pematang Sulur, Kec. Telanaipura 36124	(0741) 43355	Email: Jambi@pnm.co.id Web: www.pnm.co.id
22	Jember	Jl. Letjen S. Parman No.100, RT.02/RW.03, Kel. Karang Rejo, Kec. Sumbersari, Jember, Jawa Timur 68124	(0331) 330412 (0331) 326145 (0331) 326698	Email: pnmjbr@pnm.co.id Web: www.pnm.co.id
23	Kabanjahe	Jl. Veteran Komplek Grand Melia Business No. 1&2, Kel. Kampung Dalam, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo 22113	(0628) 2334509	Email: pnmsdk@gmail.com Web: www.pnm.co.id
24	Kaltara	Jl. Yos Sudarso Jembatan Besi, RT 11, Kel. Lingkas Ujung, Kec.Tarakan Timur, Kalimantan Utara 77115	(0551) 3808323	Email: pnmkaltara@gmail.com pnmklr@pnm.co.id Web: www.pnm.co.id
25	Kediri	Jl. Kawi Mojoroto Indah E-1, Kec. Mojoroto, Kota Kediri 64112	(0354) 776436	Email: pnmkdr@pnm.co.id Web: www.pnm.co.id
26	Kendari	Jl. Martandu Ruko 8-9, Kel. Andounuhu, Kec. Poasia 93231	(0401) 3136487	Email: pnmcab.kdi@gmail.com Web: www.pnm.co.id
27	Lamongan	Jl. Lamongrejo No. 45, RT 001/RW 002, Kel. Sidokumpul, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan, Jawa Timur 62213	(0322) 322400	Email: lamongan@pnm.co.id Web: www.pnm.co.id
28	Lampung	Jl. Hi Said No. B1/12, Kel. Kota Baru, Kec. Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung 35121	(0721) 5605033	Email: lampung@pnm.co.id Web: www.pnm.co.id
29	Madiun	Jl. Pendowo No. 21-23, Kel. Klegen, Kec. Kartoharjo, Kab. Madiun 63117	(0351) 495473	Email: pnmcabangmadiun@gmail.com Web: www.pnm.co.id
30	Magelang	Jl. Mayjend Bambang Soegeng Ruko Metro Square Blok B 18-19, Mertoyudan, Magelang 56172	(0293) 3218077	Email: pnmmlg@gmail.com Web: www.pnm.co.id
31	Makassar	Jl. Pelita Raya Blok A.24 No. 1, Kel. Ballaparang, Kec Rappocini, Kota Makassar 90222	(0411) 4662802	Email: pnmcabmks026@gmail.com Web: www.pnm.co.id
32	Malang	Jl. Dewandaru No. 88, Kel. Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Malang 65141	(0341) 407327/28	Email: pnmmlg@pnm.co.id Web: www.pnm.co.id
33	Manado	Jl. Ora Et. Labora No. 53, Kel. Winangun, Kec. Malalayang Satu, Manado, Sulawesi Utara 95161	(0431) 823523 (0431) 823575	Email: pnmmdo@pnm.co.id Web: www.pnm.co.id
34	Mataram	Jl. Bung Hatta No. 24 A, Kel. Cakranegara Barat, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat 83121	(0370) 6170839	Email: cabangmataram@pnm.co.id Web: www.pnm.co.id
35	Medan	Jl. Suryo No. 16, Kel. Anggrung, Kec. Medan Polonia, Medan, Sumatera Utara 20152	(061) 4518012	Email: pnmms@pnm.co.id Web: www.pnm.co.id
36	Mojokerto	Jl. Jokotole No. 12, Kel. Magersari, Kec. Magersari, Kota Mojokerto 61318	(0321) 5281286	Email: pnmjojokerto@pnm.co.id Web: www.pnm.co.id
37	Pacitan	Jl. Lintas Selatan, Kel. Ploso, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan 63515	(357) 3234382	Email: pacitan@pnm.co.id Web: www.pnm.co.id
38	Padang	Jl. A Yani No. 39 A, Kel. Kampung Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25112	(0751) 35164	Email: pnmptdg@pnm.co.id Web: www.pnm.co.id
39	Palembang	Jl. Talang Kerangga No. 12, Kel. 30 Ilir, Kec. Ilir Barat II, Kota Palembang 30144	(62711) 5735576	Email: plb.pnm@gmail.com Web: www.pnm.co.id
40	Palopo	Jl. Mungkasa BTN Beringin Jaya, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, Sulawesi Selatan 91911	(0471) 351252	Email: pnmcabpalopo@gmail.com Web: www.pnm.co.id
41	Palu	Jl. Kakatua No. 40, Kel. Tanamodindi, Kec. Mantikulore, Kota Palu 94324	(0451) 458884	Email: pnmpaluofficial@yahoo.com Web: www.pnm.co.id
42	Pati	Jl. Kolonel Sugiyono No. 11 E, RT006/RW002, Desa Winong, Kec. Pati, Kab. Pati, Jawa Tengah 59119	(0295) 4106201	Email: oprcabangpati@gmail.com Web: www.pnm.co.id
43	Pekanbaru	Jl. Datuk Setia Maharaja, Tengkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28125	(0761) 853480	Email: cabangpekanbaru@gmail.com Web: www.pnm.co.id
44	Pematang Siantar	Jl. Rajamin Purba (Kartini Ujung) No. 113 A dan B, Kel. Bantan, Kec. Siantar Barat, Kota Pematangsiantar 21111	(0622) 5893888 (0622) 5893777	Email: pnmsiantar@gmail.com Web: www.pnm.co.id
45	Pontianak	Jl. Wak Dalek No. 30, Kel. Sungai Bangkong, Kec. Pontianak, Kota Kalbar 78116	(0561) 731661	Email: pnmptianak@pnm.co.id Web: www.pnm.co.id
46	Probolinggo	Jl. A.Yani No. 10 A, Kel. Sukabumi, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo 67219	(0335) 420655	Email: pnmplb@pnm.co.id Web: www.pnm.co.id

No	Unit	Alamat Address	Telepon Telephone	Email dan Web Email and Web
47	Purwokerto	Jl. Moh. Yamin No. 80 A-B, Karangklesem, Purwokerto Selatan 53144	(0281) 6577957	Email: purwokerto@pnm.co.id Web: www.pnm.co.id
48	Samarinda	Jl. Siradj Salman, Ruko Grand Mahakam No. D5, Kel. Teluk Lerong Ilir, Kec. Samarinda Ulu 75128	(0541) 4113767	Email: samarinda@pnm.co.id Web: www.pnm.co.id
49	Semarang	Jl. Menoreh Raya No. I RT 005/RW 007, Kel. Sampangan, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang 50236	(024) 8453977	Email: pnmsmg@gmail.com Web: www.pnm.co.id
50	Serang	Jl. KH Sochari No. 4 D Sumurpecung, Kec. Sorang, Kota Serang 42117	(0254) 7918114	Email: pnmcbserang@pnm.co.id Web: www.pnm.co.id
51	Singaraja	Jl. Ahmad Yani No. 129, Kel. Banyuasri, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Provinsi Bali 81116	(0362) 3301998	Email: pnm.singaraja@gmail.com Web: www.pnm.co.id
52	Sintang	Jl. Lintas Melawi RT.21/RW.22, Baning, Kab. Sintang 78612	(0565) 23434 (0565) 21168	Email: Sintang@pnm.co.id Web: www.pnm.co.id
53	Solo	Jl. Adi Sumarmo No. 171, Banyuanyar, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta 57137	(0271) 7464408	Email: pnmsolo@gmail.com Web: www.pnm.co.id
54	Subang	Jl. Darmodiharjo No. A1-A2, Kel. Sukamelang, Kec. Subang, Kab. Subang, Jawa Barat 41211	(0260) 420346	Email: sbgsubang4@gmail.com Web: www.pnm.co.id
55	Sukabumi	Jl. Kabandungan No. 187B, Kel. Selabatu, Kec. Cikole, Kota Sukabumi 43114	(0266) 6244430	Email: pnmcabangsukabumi@gmail.com Web: www.pnm.co.id
56	Surabaya	Jl. Margorejo Indah XX/D327, Sidosermo, Wonocolo, Surabaya 60239	(031) 99843335 (031) 99843576 (031) 99843676	Email: pnmsby2020@gmail.com Web: www.pnm.co.id
57	Tangerang	Komplek Ruko Mahkota Mas blok J No. 51, RT006/RW006, Cikokol, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15117	(021) 55741840	Email: pnmcabangtangerang@gmail.com Web: www.pnm.co.id
58	Tasikmalaya	Jl. RE Martadinata No. 191.A, Kel. Panyingkiran, Kec. Indihiang, Kota Tasikmalaya 46151	(0265) 328116	Email: pnm.tasikmalaya@yahoo.com Web: www.pnm.co.id
59	Tegal	Jl. Veteran No.7, RT:2/RW:6, Kel. Mintaragen, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal 52121	(028) 3341450 (028) 34534093	Email: pnm.cabtgl@gmail.com capem.tegal@gmail.com Web: www.pnm.co.id
60	Tulungagung	Jl. Pahlawan No. 157, Rejoagung, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, Jawa Timur 66225	(0355) 336737	Email: receptionis_tlg@pnm.co.id Web: www.pnm.co.id
61	Wonogiri	Jl. Jend. Sudirman No. 210, Donoharjo, Wuryorejo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, Jawa Tengah 57614	(0273) 3201493	Email: pnmwonogiri@gmail.com Web: www.pnm.co.id
62	Yogyakarta	Jl. Kenari No. 3, Kel. Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta 55166	(0274) 543714	Email: pnmygk@pnm.co.id Web: www.pnm.co.id

Brand Perusahaan Company Brand

PNM

Permodalan Nasional Madani

Warna biru sebagai pengimbang kekakuan tipografi serta agar PNM yang tampil dengan citra kokoh, solid, dan percaya diri tidak terasa jauh dan tidak sulit dijangkau masyarakat. Sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara, warna ini dianggap mewakili warna negeri kepulauan Indonesia. Dengan warna ini, PNM terasa ramah, akrab, serta siap membantu dan melayani karena memiliki produk-produk berorientasi retail dan mempunyai anak perusahaan serta afiliasi/network di seluruh Indonesia.

Aksen warna hijau mampu mencairkan suasana formal serta membawa nuansa kesegaran, pencerahan, dinamis, serta memiliki wawasan jauh ke depan.

Secara keseluruhan, warna logo PNM mewakili nuansa alam Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang memiliki potensi pasar sangat besar.

The blue color as a counterweight to the strength of typography and hence, PNM that appears with a strong image, solid, and confident feels close and is not difficult to reach by the community. As a State-Owned Enterprise company, this color is considered to represent the color of the Indonesian archipelago. With this color, PNM feels friendly, friendly, as well as ready to help and serve since has retail-oriented products and has subsidiaries and affiliates/networks throughout Indonesia.

Green accents can melt the formal atmosphere and bring nuances of freshness, enlightenment, dynamic, and have far-sighted insights.

Overall, the color of the PNM logo represents the natural feel of Indonesia, which is an archipelagic state that has huge market potential.

Riwayat Singkat Perusahaan Brief History of PNM

Perusahaan didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.38 tahun 1999 tanggal 25 Mei 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yang pendiriannya dituangkan dalam Akta Pendirian No.1 tanggal 1 Juni 1999 dibuat dihadapan Ida Sofia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-11.609.HT.01.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 4758/BH.09.05/VIII/99 tanggal 27 Agustus 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 1999, Tambahan No. 5681 ("Akta No. 1").

Akta No. 1 tersebut telah diubah beberapa kali, dengan perubahan terakhir yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 28 tanggal 20 November 2020 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham berdasarkan Surat No. AHU-0079386.AH.01.02.TAHUN 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terbatas PT Permodalan Nasional Madani (Persero) tanggal 20 November 2020.

The Company was established based on the Government Regulation of Republic Indonesia No.38 in 1999 dated on May 25, 1999 on the Investment of the Republic of Indonesia for Establishment of the Company (Persero) In Order to Development Cooperation, Small & Medium Enterprise, which it's establishment stated in Deed of Establishment No.1 dated June 1, 1999, made by Ida Sofia, S.H., Notary in Jakarta, where the deed has been approved by the Minister of Law and The Law of Indonesia No.C-11.609.HT.01.01.TH.99 on June 23, 1999, and was registered in the Companies Registration Office of Central Jakarta Municipality under No.4758/ BH.09.05/VIII/99 dated August 27, 1999 and was published in the state news dated September 10, 1999 No. 73, an additional state news Republic of Indonesia No.5681 ("Deed No.1").

Deed No. 1 has been amended several times, with the latest amendment contained in the Deed of Shareholders Decree No. 28 dated November 20, 2020 made before Hadijah, S.H., Notary in Jakarta, whose notification of changes has been received and recorded in the Ministry of Law and Human Rights Legal Entity Administration System database based on Letter No. AHU-0079386.AH.01.02.TAHUN 2020 concerning Approval of Amendment to the Articles of Association of a limited liability company PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dated November 20, 2020.



Maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan melaksanakan kegiatan usaha Jasa Pembiayaan, Penyertaan, serta Jasa Manajemen dan Kemitraan. Sejalan dengan 9 agenda prioritas Pemerintah Republik Indonesia (NAWACITA) yang bertujuan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Perusahaan menjalankan bisnis komersil sejak tahun 1999 berdasarkan PP No. 38 tahun 1999. Pada tahun 2008 Perusahaan melakukan *turn-around* bisnisnya dengan melakukan pembiayaan langsung kepada pengusaha Mikro, Kecil dan UKM melalui Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) sejak bulan Agustus tahun 2008. Dimulai dengan 12 unit ULaMM sebagai pilot project, saat ini jumlah unit ULaMM telah menjadi 689 unit ULaMM.

Pada akhir tahun 2015, Perusahaan melakukan ekspansi bisnis pada kelompok wanita prasejahtera dengan produk Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera). Pada 31 Desember 2021 dan 2020, total nasabah Mekaar masing-masing sudah mencapai 11.011.194 nasabah dan 7.802.806 nasabah (tidak diaudit).

Kontribusi pendapatan dari pembiayaan Mekaar dan ULaMM per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar 82,22% dan 16,84%. Pada 31 Desember 2021, Perusahaan berkedudukan di Menara PNM, Jl. Kuningan Mulia, Karet, Setiabudi, Jakarta dan memiliki 62 kantor cabang ULaMM dan 2.985 kantor cabang Mekaar yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

The purpose and objectives of the Company is doing business in the empowerment and development of micro, small, medium, and cooperatives with conducting business Financing Services, Investments, and Management Services and Partnerships. In line with the 9 priority agendas the Government of the Republic of Indonesia (NAWACITA) aimed towards Indonesia is politically sovereign, and independent economic and personality in culture.

The company began its commercial business since 1999 in according to the PP No. 38 year 1999. In 2008 the Company conducted turn-around its business with direct financing to micro, small, and SMEs through Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) since August of 2008. Starting with 12 units ULaMM as a pilot project, the current number of units has been a 689 ULaMM service offices.

At the end of 2015, the Company expanded its business to a group of underprivileged women with the Mekaar product (Fostering a Prosperous Family Economy). As of December 31, 2021 and 2020, Mekaar's total customers have reached 11,011,194 customers and 7,802,806 customers, respectively (unaudited).

The revenue contribution from Mekaar and ULaMM financing as of December 31, 2021, was 82.22% and 16.84%, respectively. As of December 31, 2021, the Company is domiciled at Menara PNM, Jl. Kuningan Mulia, Karet, Setiabudi, Jakarta, has 62 ULaMM branch offices and 2,985 Mekaar branch offices spread throughout Indonesia.

Visi, Misi dan Budaya Perusahaan

Vision, Mission, and Culture of the Company

VISI Vision



Menjadi lembaga pembiayaan terkemuka dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) yang berlandaskan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

"To be the leading financing institution in enhancing added value for MSMEs in a sustainable manner in accordance with the Good Corporate Governance (GCG) principles."



REVIU VISI DAN MISI OLEH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Perusahaan secara berkala melakukan peninjauan visi dan misi untuk melakukan penyesuaian terhadap perkembangan strategis terkait laju pertumbuhan sektor pembiayaan UMKM. Penyesuaian mengacu pada perubahan iklim industri maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha Perusahaan. Peninjauan terhadap visi dan misi dilaksanakan melalui RKAP dan telah disetujui oleh Direksi dan Komisaris.

BUDAYA PERUSAHAAN *Corporate Values*



Amanah *Trustworthy*

Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
We uphold the trust given.



Kompeten *Competent*

Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
We continue to learn and develop capabilities.



Harmonis *Harmonious*

Kami saling peduli dan menghargai perbedaan.
We care for each other and value differences.



MISI Mission



- Menjalankan berbagai upaya, yang terkait dengan operasional Perusahaan, untuk meningkatkan kelayakan usaha dan kemampuan wirausaha para pelaku bisnis UMKMK.
To perform any and all efforts related to the Company's operations to improve business MSME feasibility and entrepreneurship.
- Membantu pelaku UMKMK untuk mendapatkan dan kemudian meningkatkan akses pembiayaan UMKMK kepada lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang pada akhirnya akan meningkatkan kontribusi mereka dalam perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
To assist MSME gain and improve access to bank and non-bank financing institutions, which will in turn increase their contribution in expanding job opportunities and improving society welfare.
- Meningkatkan kreativitas dan produktivitas karyawan untuk mencapai kinerja terbaik dalam usaha pengembangan sektor UMKMK.
To improve employees creativity and productivity in giving their best performance for the development of the MSME sector.

Vision and Mission Review by the Board of Commissioners and Board of Directors

The Company periodically reviews its vision and mission to make adjustments to strategic developments related to the growth rate of the MSME financing sector. Adjustments refer to changes in the industrial climate and applicable laws and regulations, both of which directly or indirectly impact the Company's business activities. The review of the vision and mission is carried out through the RKAP and has been approved by the Board of Directors and Commissioners.

AKHLAK Core Values



Loyal
Loyal

Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.

We are dedicated and put the interests of the Nation and the State first.



Adaptif
Adaptive

Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.

We continue to innovate and are enthusiastic in driving or facing change.



Kolaboratif
Collaborative

Kami membangun kerjasama yang strategis.

We encourage synergistic cooperation.

AKHLAK

Penjelasan mengenai Budaya Perusahaan **AKHLAK** adalah sebagai berikut:

The explanation regarding AKHLAK's Corporate Culture is as follows:

 <p>Amanah Trustworthy</p>	<p>Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan <i>We uphold the trust given</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Berperilaku dan bertindak selaras dengan perkataan. b. Menjadi seseorang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab. c. Bertindak jujur dan berpegang teguh kepada nilai moral dan etika secara konsisten. <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Behaving and acting in accordance with words.</i> b. <i>Becoming someone who can be trusted and responsible.</i> c. <i>Acting honestly and upholding moral and ethical values consistently.</i>
 <p>Kompeten Competent</p>	<p>Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas <i>We continue to learn and develop capabilities</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Terus menerus meningkatkan kemampuan/kompetensi agar selalu mutakhir. b. Selalu dapat diandalkan dengan memberikan kinerja terbaik. c. Menghasilkan kinerja dan prestasi yang memuaskan. <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Continuously improving abilities / competencies to be always up to date.</i> b. <i>Always reliable by giving the best performance.</i> c. <i>Producing satisfactory performance and achievements.</i>
 <p>Harmonis Harmonious</p>	<p>Kami saling peduli dan menghargai perbedaan <i>We care about each other and respect differences</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Berperilaku saling membantu dan mendukung sesama insan organisasi maupun masyarakat. b. Selalu menghargai pendapat, ide atau gagasan orang lain. c. Menghargai kontribusi setiap orang dari berbagai latar belakang. <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Behaving to help and support each other in the organization and society.</i> b. <i>Always respecting the opinions, ideas or ideas of others.</i> c. <i>Appreciating the contribution of everyone from various backgrounds.</i>
 <p>Loyal Loyal</p>	<p>Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara <i>We are dedicated and prioritize the interests of the Nation and the State</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Menunjukkan komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan. b. Bersedia berkontribusi lebih, rela berkorban dalam mencapai tujuan. c. Menunjukkan kepatuhan kepada organisasi dan negara. <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Demonstrating a strong commitment to achieving goals.</i> b. <i>Willing to contribute, more willing to sacrifice in achieving goals.</i> c. <i>Demonstrating compliance with the organization and the country.</i>
 <p>Adaptif Adaptive</p>	<p>Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan <i>We continue to innovate and enthusiastic in moving or facing change</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan inovasi secara konsisten untuk menghasilkan yang lebih baik. b. Terbuka terhadap perubahan, bergerak lincah, cepat dan aktif dalam setiap perubahan untuk menjadi lebih baik. c. Bertindak proaktif dalam menggerakkan perubahan. <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Consistently innovating to produce better.</i> b. <i>Opening change, move agile, fast and active in every change for the better.</i> c. <i>Acting proactively in driving change.</i>
 <p>Kolaboratif Collaborative</p>	<p>Kami mendorong kerja sama yang sinergis <i>We encourage synergistic cooperation</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Terbuka bekerja sama dengan berbagai pihak. b. Mendorong terjadinya sinergi untuk mendapatkan manfaat dan nilai tambah. c. Bersinergi untuk mencapai tujuan bersama. <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Opening to cooperate with various parties.</i> b. <i>Encouraging synergy to get benefits and added value.</i> c. <i>Synergizing to achieve common goals.</i>

Kegiatan Usaha

Business Activities

Kegiatan Usaha Menurut Anggaran Dasar dan yang Dijalankan

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan Akta No. 42 Tahun 2016, maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi termasuk tetapi tidak terbatas pada usaha dengan prinsip syariah untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Jasa pembiayaan termasuk tapi tidak terbatas pada kredit program dan/atau pembiayaan sistem tanggung renteng;
- Penyertaan kepada Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S) dan Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S); dan
- Jasa manajemen dan kemitraan.

Sampai dengan 31 Desember 2021, seluruh kegiatan usaha menurut Anggaran Dasar telah dilaksanakan oleh Perusahaan.

Produk dan Jasa

Jasa Pembiayaan

PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera)

Seiring perkembangan usaha, pada tahun 2015, Perusahaan meluncurkan layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro melalui Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). Mekaar dilengkapi dengan penyertaan pendampingan usaha dan pelayanan secara berkelompok. Kini, Mekaar tersebar dalam 2.985 Kantor Layanan, dengan cakupan wilayah di 5.735 kecamatan di Indonesia.

PNM Mekaar Plus

PNM Mekaar Plus merupakan program pembiayaan lanjutan tanpa jaminan yang diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah PNM Mekaar yang telah bergabung selama minimal 2 (dua) tahun dan selama jangka waktu tersebut memiliki riwayat pembayaran yang baik/disiplin. PNM Mekaar Plus sebagai salah satu program Mekaar naik kelas diharapkan dapat membantu mengembangkan usaha nasabah serta menjadi salah satu upaya mengantarkan nasabah prasejahtera menjadi sejahtera.

PNM Mekaar Syariah

PNM Mekaar Syariah merupakan layanan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai ketentuan hukum Islam yang berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ditujukan bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro.

Business Activities According to Basic Budget and that are Performed

Based on the Company's Articles of Association Deed No. 42 of 2016, the purpose and objective of the Company was to carry out business in the field of empowerment and development of micro, small, medium enterprises and cooperatives including but not limited to businesses with sharia principles to produce high quality and highly competitive services to obtain/pursue profitability to increase the value of the Company by applying the principles of the Limited Liability Company. To achieve these aims and objectives, the Company carried out the following business activities:

- Financing services including but not limited to program credit and/or joint responsibility financing;*
- Participating in Micro/Sharia Financial Institutions (LKM/S) and Rural/Sharia Credit Banks (BPR/S); and*
- Management and partnership services.*

As of December 31, 2021, all business activities according to the Articles of Association have been carried out by the Company.

Products and Services

Financing Services

PNM Mekaar (Fostering a Prosperous Family Economy)

In line with the development of its business, in 2015 the Company launched the capital loan service for underprivileged women in ultra-micro business actors through Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). Mekaar offers collective business group mentoring and services. Today, Mekaar has 2,668 service offices, covering over 4,450 districts in Indonesia.

PNM Mekaar Plus

PNM Mekaar Plus is an unsecured advanced financing program provided as a token of appreciation to PNM Mekaar customers who have been joining for at least 2 (two) years and during that period have a history of good/disciplined payments. PNM Mekaar Plus as one of Mekaar's graduation programs is expected to help develop customers' businesses and become one of the efforts to deliver pre-prosperous customers to be prosperous.

PNM Mekaar Syariah

PNM Mekaar Syariah is a group-based empowerment service in accordance with the provisions of Islamic law based on fatwas and/or sharia compliance statements from the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council aimed at underprosperous women in ultra-micro business actors.

Produk Pendamping

Produk PNM Mekaar WASH terdiri dari 2 (dua) produk yaitu PNM Mekaar WASH dan PNM Mekaar WASH Syariah. Produk PNM Mekaar WASH adalah produk pembiayaan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas air konsumsi, memberikan akses kepemilikan sarana air bersih dan sarana sanitasi. Sedangkan, produk PNM Mekaar WASH Syariah adalah produk PNM Mekaar WASH yang dilakukan dengan pola syariah berupa transaksi Jual Beli (*Murabahah*) atau jual beli dengan dukungan *Wakalah*/perwakilan (*Murabahah bil Wakalah*).

Produk PNM Mekaar HOME terdiri dari 2 (dua) produk yaitu PNM Mekaar HOME dan PNM Mekaar HOME Syariah. Produk PNM Mekaar HOME adalah Produk pembiayaan ini ditujukan untuk renovasi rumah nasabah yang juga dijadikan sebagai tempat usaha dan/atau yang mendukung usaha. Sedangkan, produk PNM Mekaar HOME Syariah adalah produk PNM Mekaar HOME yang dilakukan dengan pola Syariah dengan akad *Murabahah bil Wakalah*.

PNM ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro)

Pada Agustus 2008, Perusahaan memperkenalkan inovasi layanan pinjaman modal untuk usaha mikro dan kecil dengan pembiayaan langsung baik untuk perorangan maupun Bidang Usaha melalui Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM). ULaMM dilengkapi dengan penyertaan pelatihan, jasa konsultasi, pendampingan, serta dukungan pengelolaan keuangan dan akses pasar bagi nasabah. Kini, ULaMM tersebar dalam 62 kantor cabang PNM ULaMM, 626 kantor unit ULaMM yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia.

PNM ULaMM Pantas

Produk Pembiayaan PANTAS (Produk Antara untuk Keluarga Sejahtera) adalah produk yang dikhususkan untuk menaik-kelaskan nasabah Mekaar dan Mekar Plus dengan persyaratan tertentu menjadi nasabah ULaMM Pantas. ULaMM Pantas terbagi menjadi beberapa kategori diantaranya Bijak, Handal, Mahir, dan Bersama. Sehubungan dengan perkembangan strategi bisnis perusahaan, maka Perusahaan menerbitkan produk pembiayaan tambahan yaitu Produk Pembiayaan ULaMM Pantas Syariah.

PNM ULaMM SYARIAH

ULaMM Syariah merupakan penyaluran pembiayaan yang dilakukan sesuai ketentuan prinsip syariah yang berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia bagi pelaku usaha UMKM.

Jasa Lainnya

Jasa Manajemen

Perseroan memiliki dua aktivitas Jasa Manajemen, yaitu Jasa Manajemen untuk penguatan lembaga keuangan dan sektor riil. Jasa Manajemen mencakup beberapa produk, seperti Madani Training Excellent, Madani Mikro, dan Madani Partnership Program.

Supporting Product

PNM Mekaar WASH products consist of 2 (two) products, namely PNM Mekaar WASH and PNM Mekaar WASH Syariah. The PNM Mekaar WASH product is a financing product that aims to improve the quality of drinking water and provide access to clean water and sanitation facilities. Meanwhile, PNM Mekaar WASH Syariah products are PNM Mekaar WASH products carried out with a sharia pattern in the form of buying and selling transactions (Murabahah) or buying and selling with the support of Wakalah/representatives (Murabahah bil Wakalah).

PNM Mekaar HOME products consist of 2 (two) products, namely PNM Mekaar HOME and PNM Mekaar HOME Syariah. PNM Mekaar HOME product is a financing product intended to renovate customers' homes which are also used as places of business and support businesses. Meanwhile, the product of PNM Mekaar HOME Syariah is a product of PNM Mekaar HOME, which is carried out with a Sharia pattern with a Murabahah bil Wakalah contract.

PNM ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro)

In August 2008, the Company introduced a capital loan service innovation for micro and small businesses with direct financing for individuals or Business Lines through Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM). ULaMM offers training, consulting, guidance, as well as financial management support and market access to the customers. Today, ULaMM has 62 PNM ULaMM branch offices, 626 ULaMM unit offices spread across 34 provinces throughout Indonesia.

PNM ULaMM Pantas

PANTAS Financing Products (Intermediate Products for Prosperous Families) are products that are devoted to advancing Mekaar and Mekar Plus customers with certain requirements to become ULaMM Pantas customers. ULaMM Pantas is divided into several categories including Wise, Reliable, Advanced, and Together. In connection with the development of the company's business strategy, the Company issued additional financing products, namely the ULaMM Pantas Syariah Financing Product.

PNM ULaMM Syariah

ULaMM Syariah is a distribution of financing carried out in accordance with the provisions of sharia principles based on fatwas and/or sharia conformity statements from the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council for MSME business actors.

Other Services

Management Service

There are two Management Service activities carried out by the Company, namely Management Service for empowerment of financial institution and real sector. The Management Service comprises several products, namely Madani Training Excellent, Madani Micro, and Madani Partnership Program.

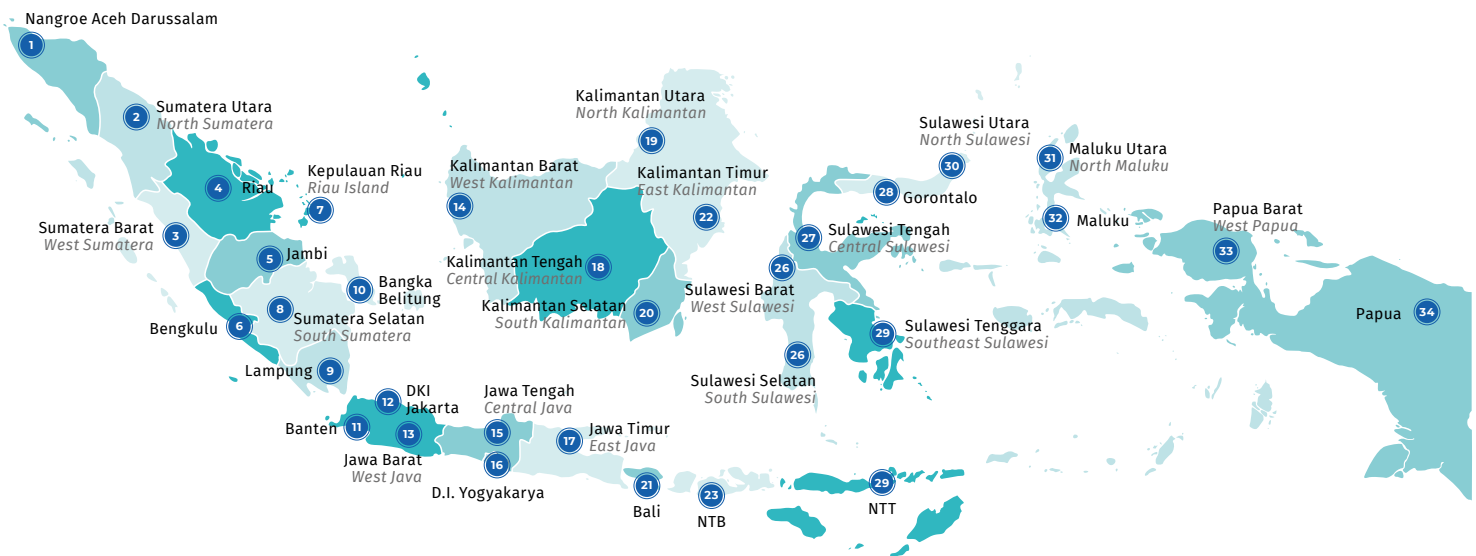
Peta Wilayah Usaha Business Area Map

Per 31 Desember 2021, PNM memiliki 1 Kantor Pusat, 62 Kantor Cabang PNM, 626 Unit ULamm dan 2.985 Kantor Cabang Mekaar yang melayani 34 provinsi, 439 Kabupaten/ Kotamadya, dan 5.735 Kecamatan.

As of December 31, 2021, PNM has 1 Head Office, 62 PNM Branch Offices, 626 ULamm Units and 2,985 Mekaar Branch Offices serving 34 provinces, 439 regencies/municipalities, and 5,735 sub-districts.

Tabel Jaringan Kantor Tahun selama 5 tahun terakhir
Table of Year Office Networks for the last 5 years

Jenis Kantor	2021	2020	2019	2018	2017	Office Type
Kantor Pusat	1	1	1	1	1	Headquarters
Kantor Cabang PNM	62	62	62	62	62	PNM Branch Office
Kantor Layanan ULamm	626	626	628	628	631	ULamm Service Office
Kantor Cabang Mekaar	2.985	2.688	2.172	1.770	1.252	Mekaar Branch Office

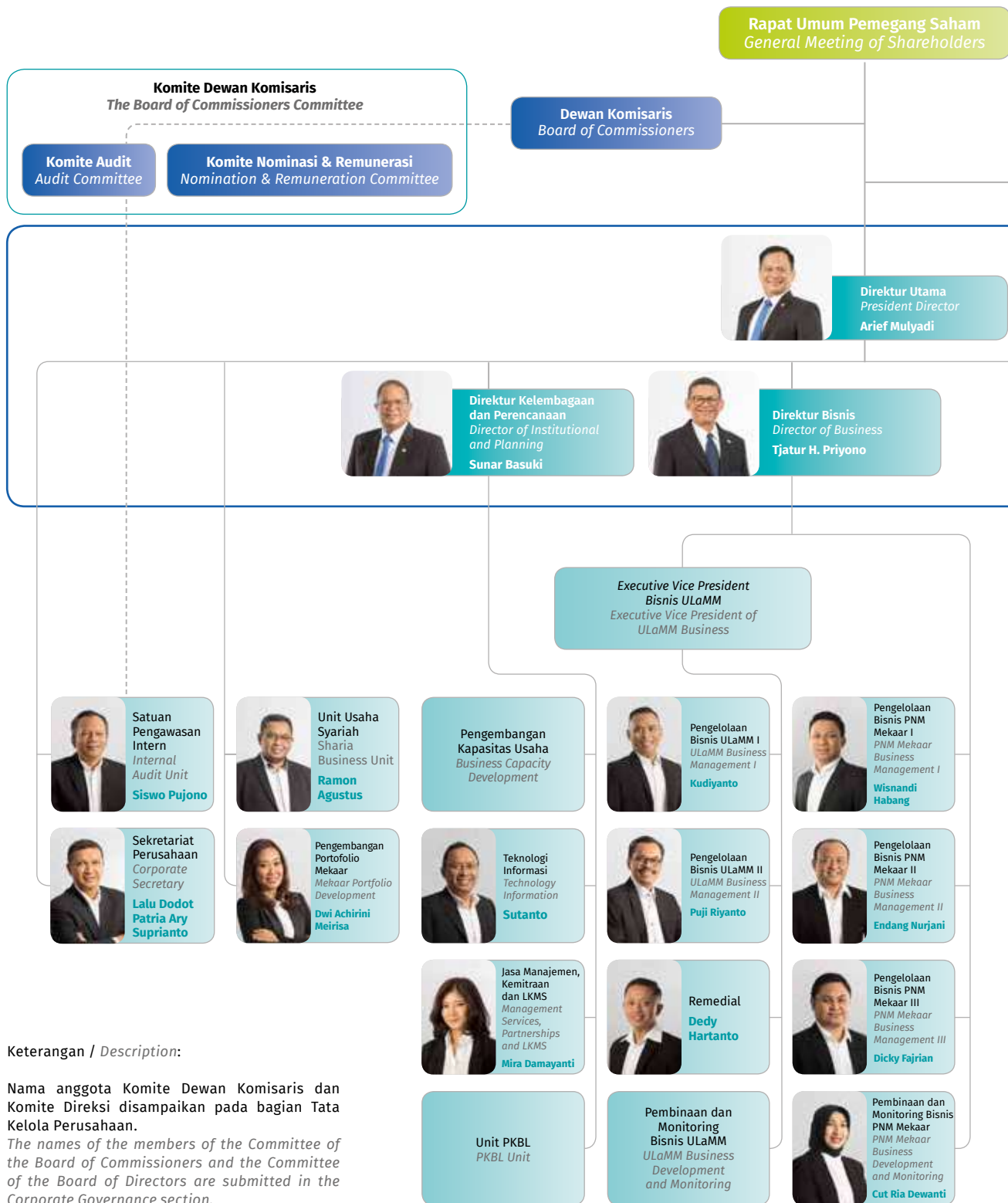


Tabel Jaringan Kantor per Wilayah Tahun 2021
Table of Office Networks by Region in 2021

Wilayah Area	Kantor Cabang PNM PNM Branch Office	Kantor ULamm ULamm Office	Kantor Mekaar Mekaar Office
Jawa	1.853	36	1.817
Sumatera	694	10	684
Kalimantan	63	6	57
Sulawesi	229	7	222
Papua	6	-	6
Nusa Tenggara	180	1	179
Bali	2	2	-

Struktur Organisasi

Organization Structure



Keterangan / Description:

Nama anggota Komite Dewan Komisaris dan Komite Direksi disampaikan pada bagian Tata Kelola Perusahaan.

The names of the members of the Committee of the Board of Commissioners and the Committee of the Board of Directors are submitted in the Corporate Governance section.

Berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Nomor: S-042/PNM-KOM/IX/20 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Struktur Organisasi PT Permodalan Nasional Madani (Persero), Struktur Organisasi Perusahaan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Based on the Board of Commissioners' Approval Letter Number: S-042/PNM-KOM/IX/20 dated October 14, 2020 regarding the Organizational Structure of PT Permodalan Nasional Madani (Persero), the Company's Organizational Structure as of December 31, 2021 is as follows:



Daftar Keanggotaan Asosiasi

List of Association Membership

Per 31 Desember 2021, PNM belum tergabung ke dalam keanggotaan asosiasi.

As of December 31, 2021, PNM has not yet joined the association membership.

Profil Direksi

Board of Directors' Profile



NINIS KESUMA ADRIANI

Direktur Keuangan
dan Operasional
*Director of Finance
and Operations*

SUNAR BASUKI

Direktur Kelembagaan
dan Perencanaan
*Director of Institutional
and Planning*

ARIEF MULYADI

Direktur Utama
President Director

TJATUR H. PRIYONO

Direktur Bisnis
Director of Business

KINDARIS

Direktur Kepatuhan
dan Manajemen Risiko
*Director of Compliance
and Risk Management*



ARIEF MULYADI

Direktur Utama
President Director

Kewarganegaraan / Citizenship

Warga Negara Indonesia / Indonesian Citizens

Domisili / Domicile

Bekasi

Usia / Age

53 tahun per Desember 2021. / 53 years as of December 2021.

Riwayat Pendidikan

Beliau merupakan lulusan S1 jurusan Ilmu Biologi, Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 1993, kemudian mendapatkan gelar S2 jurusan Kajian Strategi Ketahanan Nasional dari Universitas Indonesia pada tahun 2006.

Sertifikasi

- Sertifikasi Manajemen Risiko oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (2018).
- Certified Professional Management Accountant (CPMA) dari Institut Akuntan Manajemen Indonesia (2019).
- Sertifikasi Skema Manajemen Risiko Madya/Certified Risk Associated (CRA) dari LSP PM (2021).
- Sertifikasi Skema Manajemen Risiko Utama/Certified Risk Professional (CRP) dari LSP PM (2021).

Pengalaman Kerja

Sebelum bergabung dengan PNM, beliau pernah menduduki posisi di beberapa lembaga penelitian dan mengikuti Officer Development Programme hingga menjadi Relationship Manager - Retail Banking Group di Bank Nusa International sejak 1995 hingga 1999. Beliau telah berkarier di PNM sejak Perusahaan berdiri pada tahun 1999. Beliau pernah menduduki jabatan sebagai Account Officer (1999), Kasi I Bagian KP I (KKPA) (2000), Pjs. Kabag Pengembangan Produk Divisi LKM&S (2000), Kabag Pengembangan Produk Divisi LKM&S (2001), Pj. Kepala Divisi MMT (2003), Deputi urusan MMT & MR (2004), Kepala cabang Jakarta (2007), Deputi Grup JMK (2007), Deputi Urusan SPR (2008), Kepala Divisi SPR (2009), Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan (2010), Staf Khusus Direktur Utama (2011), Kepala Divisi Pengembangan Kapasitas Usaha (2011), Executive Vice President Pengembangan Kapasitas Usaha & Riset (2013), Executive Vice President (2015), Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha (2017) dan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (2017).

Dasar Hukum Pengangkatan

Beliau diangkat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Permodalan Nasional Madani untuk pertama kalinya berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-67/MBU/4/2017 dan SK-161/MBU/08/2017 dan efektif tanggal 4 April 2017. Kemudian diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-40/MBU/2/2018 tanggal 13 Februari 2018.

Periode Jabatan

April 2017 - Penutupan RUPS Tahun 2022 (Periode Pertama).

Jabatan Rangkap

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan di instansi mana pun.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham PNM

-

Educational Background

He graduated from a Bachelor's degree in Biology from Jenderal Soedirman University in 1993, then earned a master's degree in National Defense Strategy Studies from the Islamic University of Indonesia in 2006.

Double Function

- Risk Management Certification by the National Professional Certification Agency (2018).
- Certified Professional Management Accountant (CPMA) from the Indonesian Institute of Management Accountants (2019).
- Certified Risk Associated (CRA) Scheme Certification from LSP PM (2021).
- Certification of the Main Risk Management Scheme/Certified Risk Professional (CRP) from LSP PM (2021).

Work Experience

Prior to joining PNM, he held positions at several research institutions and participated in the Officer Development Program to become a Relationship Manager - Retail Banking Group at Bank Nusa International from 1994 to 1999. He has worked at PNM since the Company was founded in 1999. He has served position as Account Officer (1999), Kasi I Part KP I (KKPA) (2000), Acting Head of Product Development Division of LKM & S (2000), Head of Product Development Division of LKM & S (2001), Pj. Head of MMT Division (2003), Deputy for MMT & MR Affairs (2004), Head of Jakarta branch (2007), Deputy for JMK Group (2007), Deputy for SPR Affairs (2008), Head of SPR Division (2009), Head of Corporate Secretariat Division (2010), Special Staff of the President Director (2011), Head of Business Capacity Development Division (2011), Executive Vice President of Business Capacity Development & Research (2013), Executive Vice President (2015), Director of Business Planning and Development (2017) and Director of Compliance and Risk Management (2017).

Legal Basis of Appointment

He was appointed as Director of Compliance and Risk Management of PT Permodalan Nasional Madani for the first time based on the Decree of the Minister of SOEs No. SK-67/MBU/4/2017 and SK-161/MBU/08/2017 and effective April 4, 2017. Then he was appointed as President Director based on the Decree of the Minister of SOEs No. SK-40/MBU/2/2018 dated February 13, 2018.

Term of Office

April 2021 - Closing of the 2022 GMS (First Period).

Double Function

He does not have multiple positions in any agency.

Affiliation Relationship

Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or with controlling and major shareholders.

PNM Share Ownership

-



TJATUR H. PRIYONO

Direktur Bisnis
Director of Business

Kewarganegaraan / Citizenship

Warga Negara Indonesia / Indonesian Citizens

Domisili / Domicile

Jakarta

Usia / Age

57 tahun per Desember 2021. / 57 years as of December 2021.

Riwayat Pendidikan

Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi jurusan Ekonomi di Universitas Indonesia pada tahun 1993.

Sertifikasi

- Sertifikasi Skema Manajemen Risiko Madya/Certified Risk Associated (CRA) dari LSP PM (2021).
- Sertifikasi Skema Manajemen Risiko Utama/Certified Risk Professional (CRP) dari LSP PM (2021).

Pengalaman Kerja

Beliau mulai berkarir di perusahaan afiliasi PNM, yakni PT PNM Investment Management sejak tahun 1999, tempat beliau menjabat sebagai Senior Manager-Kepala Divisi Corporate Finance (1999–2004); Senior Manager-Kepala Divisi Program Pengembangan Usaha Kecil & Menengah (UKM) (2005–2007), dan Direktur PT PNM Investment Management (2008–2017).

Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Permodalan Nasional Madani untuk pertama kalinya berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK- 67/MBU/4/2017 dan SK-161/MBU/08/2017 dan efektif tanggal 4 April 2017. Diangkat sebagai Direktur Bisnis berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-18/MBU/01/2022 dan 51-DIR/CSC/01/2022.

Periode Jabatan

April 2017 - Penutupan RUPS Tahun 2022 (Periode Pertama).

Jabatan Rangkap

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan di instansi mana pun.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham PNM

-

Educational Background

He completed his undergraduate education at the Faculty of Economics majoring in Economics at the University of Indonesia in 1993.

Certification

- *Certified Risk Associated (CRA) Scheme Certification from LSP PM (2021).*
- *Certification of the Main Risk Management Scheme/Certified Risk Professional (CRP) from LSP PM (2021).*

Work Experience

He started his career in PNM affiliated company, namely PT PNM Investment Management since 1999, where he served as Senior Manager-Head of the Corporate Finance Division (1999–2004); Senior Manager – Head of the Small & Medium Enterprise (UKM) Development Program Division (2005–2007), and Director of PT PNM Investment Management (2008–2017).

Legal Basis of Appointment

Served as Finance Director of PT Permodalan Nasional Madani for the first time based on the Decree of the Minister of SOEs No. SK-67/MBU/4/2017 and SK-161/MBU/08/2017 and effective April 4, 2017. Appointed as Director of Business based on the Decree of the Minister of SOEs No. SK-18/MBU/01/2022 and 51-DIR/CSC/01/2022.

Term of Office

April 2017 - Closing of the 2022 GMS (First Period).

Double Function

He does not have concurrent positions in any agency.

Affiliation Relationship

Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or with controlling and major shareholders.

PNM Share Ownership

-



SUNAR BASUKI

Direktur Kelembagaan dan Perencanaan
Director of Institutional and Planning

Kewarganegaraan / Citizenship

Warga Negara Indonesia / Indonesian Citizens

Domisili / Domicile

Jakarta

Usia / Age

54 tahun per Desember 2021. / 54 years as of December 2021.

Riwayat Pendidikan

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta pada tahun 1991 dan Master of Business Administration dari University of Scranton, Pennsylvania, Amerika Serikat pada tahun 2007.

Sertifikasi

- Sertifikasi Skema Manajemen Risiko Madya/Certified Risk Associated (CRA) dari LSP PM (2021).
- Sertifikasi Skema Manajemen Risiko Utama/Certified Risk Professional (CRP) dari LSP PM (2021).

Pengalaman Kerja

Sebelum berkarier di PNM, beliau memiliki pengalaman kerja di antaranya sebagai Auditor di Arthur Andersen (1989–1992), Accounting Manager di Zeuscom Indonesia (1992–1994), Finance & Administration Manager di PT Pritho (1994–2001), Financial Controller di International Air Transportation Association (2001–2005); dan Group Financial Controller – Indonesia di Eye Corporation (2007–2012). Sebelum menjabat sebagai Direktur Kelembagaan dan Perencanaan, Beliau menjabat sebagai Executive Vice President Keuangan dan Operasional. Beliau juga pernah menduduki beberapa jabatan strategis antara lain sebagai Kepala Divisi Akuntansi dan Operasi (2012–2014); Kepala Divisi Perencanaan dan Riset (2014–2017), dan Kepala Divisi Keuangan dan Pendanaan (2017–2018).

Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Direktur Kelembagaan dan Perencanaan PT Permodalan Nasional Madani untuk pertama kalinya berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-179/MBU/05/2021 dan efektif tanggal 28 Mei 2021.

Periode Jabatan

Mei 2021 - Penutupan RUPS Tahun 2026 (Periode Pertama).

Jabatan Rangkap

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan di instansi mana pun.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pendangali dan utama.

Kepemilikan Saham PNM

-

Educational Background

Obtained a Bachelor's degree in Economics from the University of Indonesia, Salemba, Jakarta, in 1991 and a Master's of Business Administration from the University of Scranton, Pennsylvania, the United States of America, in 2007.

Certification

- *Certified Risk Associated (CRA) Scheme Certification from LSP PM (2021).*
- *Certification of the Main Risk Management Scheme/Certified Risk Professional (CRP) from LSP PM (2021).*

Work Experience

Before his career at PNM, he had work experiences including Auditor at Arthur Andersen (1989–1992), Accounting Manager at Zeuscom Indonesia (1992–1994), Finance & Administration Manager at PT Pritho (1994–2001), Financial Controller at International Air Transportation Association (2001–2005); and Group Financial Controller – Indonesia at Eye Corporation (2007–2012). Before serving as Director of Institutional and Planning, he served as Executive Vice President of Finance and Operations. He has also held several strategic positions, including as Head of the Accounting and Operations Division (2012–2014), Head of Planning and Research Division (2014–2017), and Head of Finance and Funding Division (2017–2018).

Legal Basis of Appointment

Served as the Director of Institutional and Planning of PT Permodalan Nasional Madani for the first time based on the Decree of the Minister of SOEs No. SK-179/MBU/05/2021 and effective May 28, 2021.

Term of Office

May 2021 – Closing of the 2026 GMS (First Period).

Double Function

He does not have concurrent positions in any agency.

Affiliation Relationship

Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or with controlling and major shareholders.

PNM Share Ownership

-



KINDARIS

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
Director of Compliance and Risk Management

Kewarganegaraan / Citizenship

Warga Negara Indonesia / Indonesian Citizens

Domisili / Domicile

Bandung

Usia / Age

54 tahun per Desember 2021. / 54 years as of December 2021.

Riwayat Pendidikan

Memperoleh gelar S1 Sarjana Hukum dari Universitas Katholik Parahyangan, Bandung pada tahun 1991 dan S2 Magister Manajemen dari Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 2004.

Sertifikasi

- Sertifikasi Manajer Manajemen SDM (CHRM) dari LSP MSDM (2021)
- Sertifikasi Skema Manajemen Risiko Madya (CRA) dari LSP PM (2021)
- Sertifikasi Skema Manajemen Risiko Utama (CRA) dari LSP PM (2021)
- Sertifikasi Lembaga Keuangan Mikro : Pemimpin Cabang dari BNSP (2021)
- Sertifikasi Manajemen Risiko Program Eksekutif Pembiayaan dari BMSR (2018)
- Sertifikasi Metodologi Pelatihan : Pelaksanaan Pelatihan Tatap Muka dari BNSP (2017)

Pengalaman Kerja

Sebelum menjabat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, beliau mengawali karir di PNM sebagai Account Officer (2000-2001), Kasie KP III (2001-2002), Kasie Pengembangan Usaha (2002-2004), Kasie Pengembangan Bisnis (2004), Ka Seksi (2004-2005), Kepala Cabang Pekanbaru (2005-2010), Pemimpin Cabang Bandung (2010-2013), Kepala Divisi Pusat Pelatihan (2013-2014), Kepala Divisi Pembiayaan Program Kemitraan (2014-2015) yang diperbantukan pada Divisi Sumber Daya Manusia (2015), Kepala Divisi Pembiayaan Program Kemitraan & Afiliasi (2015), Kepala Divisi Sumber Daya Manusia (2015-2017) yang diperbantukan pada Divisi Remedial (2015) serta merangkap tugas sebagai Kepala Divisi Pusat Pendidikan dan Pelatihan (2016), Kepala Divisi Sumber Daya Manusia (2017-2018), Kepala Divisi Manajemen Risiko, GCG, dan PPL (2018), Executive Vice President Bisnis ULaMM (2018), Executive Vice President Pengawasan dan Legal (2018-2019), Executive Vice President ULaMM dan Jasa Manajemen (2019) dan Executive Vice President Bisnis ULaMM (2019-2021). Sebelum bergabung dengan PNM, beliau pernah menduduki posisi sebagai Consumer Kredit Head di PT Bank Jaya Internasional (1991-1997), Senior Account Officer di PT Bank Arya Panduarta, Tbk (1998-1999), dan Loan Work Out Officer di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (1999-2000).

Dasar Hukum Pengangkatan

Beliau diangkat sebagai Direktur Bisnis PT Permodalan Nasional Madani untuk pertama kalinya berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-179/MBU/05/2021 dan efektif tanggal 28 Mei 2021. Kemudian diangkat menjadi Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Keputusan Menteri BUMN No. SK-18/MBU/01/2022 dan 51-DIR/CSC/01/2022 dan efektif tanggal 14 Januari 2022.

Periode Jabatan

Mei 2021 - Penutupan RUPS Tahun 2026 (Periode Pertama).

Jabatan Rangkap

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan di instansi mana pun.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham PNM

-

Educational Background

He obtained his Bachelor of Law degree from Parahyangan Catholic University, Bandung in 1991 and Master of Management from Trisakti University, Jakarta in 2004.

Certification

- HR Management Manager Certification (CHRM) from LSP MSDM (2021)
- Middle Risk Management Scheme (CRA) certification from LSP PM (2021)
- Main Risk Management Scheme (CRA) certification from LSP PM (2021)
- Microfinance Institution Certification : Branch Manager from BNSP (2021)
- Funding Executive Program Risk Management Certification from BMSR (2018)
- Certification of Training Methodology: Implementation of Face-to-face Training from BNSP (2017)

Work Experience

Prior to serving as Director of Compliance and Risk Management, he started his career at PNM as Account Officer (2000-2001), Head of KP III (2001-2002), Head of Business Development (2002-2004), Head of Business Development (2004), Head of Section (2004-2004), 2005), Head of Pekanbaru Branch (2005-2010), Head of Bandung Branch (2010-2013), Head of Training Center Division (2013-2014), Head of Partnership Program Financing Division (2014-2015) seconded to the Human Resources Division (2015)), Head of the Partnership & Affiliate Program Financing Division (2015), Head of the Human Resources Division (2015-2017) seconded to the Remedial Division (2015) and concurrently serving as Head of the Education and Training Center Division (2016), Head of the Human Resources Division (2017-2018), Head of Risk Management Division, GCG, and PPL (2018), Executive Vice President of ULaMM Business (2018), Executive Vice President of Supervision and Legal (2018-2019), Executive Vice President of ULaMM and Management Services (2019) and Executive Vice President of ULaM . Business M (2019-2021). Prior to joining PNM, he held positions as Consumer Credit Head at PT Bank Jaya Internasional (1991-1997), Senior Account Officer at PT Bank Arya Panduarta, Tbk (1998-1999), and Loan Work Out Officer at the Indonesian Bank Restructuring Agency. (1999-2000).

Legal Basis of Appointment

He was appointed as Business Director of PT Permodalan Nasional Madani for the first time based on the Decree of the Minister of SOEs No. SK-179/MBU/05/2021 and effective May 28, 2021. Then he was appointed Director of Compliance and Risk Management Decree of the Minister of SOEs No. SK-18/MBU/01/2022 and 51-DIR/CSC/01/2022 and effective January 14, 2022.

Term of Office

May 2021 - Closing of the 2026 GMS (First Period).

Double Function

He does not have concurrent positions in any agency.

Affiliation Relationship

Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or with controlling and major shareholders.

PNM Share Ownership

-



NINIS KESUMA ADRIANI

Direktur Keuangan dan Operasional
Director of Finance and Operations

Kewarganegaraan / Citizenship

Warga Negara Indonesia / Indonesian Citizens

Domisili / Domicile

Jakarta

Usia / Age

55 tahun per Desember 2021. / 55 years as of December 2021.

Riwayat Pendidikan

Beliau mengawali pendidikan S1 Agrikultur, Institut Pertanian Bogor di tahun 1989 dan Master Finance & Marketing, State University of New York pada tahun 2000.

Sertifikasi

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 (BSMR, 2021)
- Certified Professional Management Accountant (IAMI, 2019)

Pengalaman Kerja

Sebelumnya beliau merupakan Account Officer Bank Rakyat Indonesia periode 1990-1997. Beliau melanjutkan karirnya sebagai Microfinance Specialist in BRI Microbanking periode 2000-2006, Senior Manager in Investor Relations of BRI periode 2006-2011, Assistant Vice President Correspondent Banking Relations Bank Rakyat Indonesia periode 1 Januari 2011-6 Januari 2012, 6 Januari 2012-1 Juni 2014 beliau menjabat sebagai Vice President International Business Division BRI, 6 Januari 2014-1 Juni 2018 menjabat sebagai Head Of Investor Relations BRI, Director Of Finance and Strategic Planning PT Pegadaian (Persero) periode 30 Mei 2018-19 April 2021, serta Director Of Finance, Strategic Planning, & Risk Management PT Pegadaian periode 19 April 2021-13 Januari 2022.

Dasar Hukum Pengangkatan

Beliau diangkat sebagai Direktur Keuangan dan Operasional PT Permodalan Nasional Madani untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-18/MBU/01/2022 dan 51-DIR/CSC/01/2022 dan efektif tanggal 14 Januari 2022.

Periode Jabatan

Januari 2022 – Penutupan RUPS Tahun 2027 (Periode Pertama).

Jabatan Rangkap

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan di instansi mana pun.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham PNM

-

Educational Background

He started his education in Bachelor of Agriculture, Bogor Agricultural Institute in 1989 and Master of Finance & Marketing, State University of New York in 2000.

Certification

- Risk Management Certification Level 4 (BSMR, 2021)
- Certified Professional Management Accountant (IAMI, 2019)

Work Experience

Previously she was an Account Officer at Bank Rakyat Indonesia for the period 1990-1997. She continued her career as a Microfinance Specialist in BRI Microbanking for the period 2000-2006, Senior Manager in Investor Relations of BRI for the period 2006-2011, Assistant Vice President Correspondent Banking Relations at Bank Rakyat Indonesia for the period January 1, 2011-January 6, 2012, January 6, 2012-June 1, 2014 she served as Vice President of BRI International Business Division, 6 January 2014-1 June 2018 served as Head of Investor Relations of BRI, Director of Finance and Strategic Planning of PT Pegadaian (Persero) for the period of May 30, 2018-April 19, 2021, and Director of Finance, Strategic Planning, & Risk Management of PT Pegadaian for the period April 19, 2021-January 13, 2022.

Legal Basis of Appointment

He was appointed as Director of Finance and Operational Director of PT Permodalan Nasional Madani for the first time based on the Decree of the Minister of SOEs No. SK-18/MBU/01/2022 and 51-DIR/CSC/01/2022 and effective January 14, 2022.

Term of Office

January 2022 – Closing of the 2027 GMS (First Period).

Double Function

She does not have concurrent positions in any agency.

Affiliation Relationship

Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or with the controlling and major shareholders.

PNM Share Ownership

-



ANTON FAHLEVIE

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
(berhenti menjabat sejak 14 Januari 2022)
*Director of Compliance and Risk Management
(retired since January 14, 2022)*

Kewarganegaraan / Citizenship

Warga Negara Indonesia / Indonesian Citizens

Domisili / Domicile

Jakarta

Usia / Age

52 tahun per Desember 2021. / 52 years as of December 2021.

Riwayat Pendidikan

Beliau mengawali pendidikan S1 Teknik Mesin, Universitas Trisakti di tahun 1994 dan Master Ekonomi Islam dan Keuangan Syariah, Universitas Indonesia pada tahun 2004.

Sertifikasi

- Certified Professional Management Accountant (CPMA) dari BNSP (2021).
- Sertifikasi Skema Manajemen Risiko Madya/Certified Risk Associated (CRA) dari LSP PM (2021).
- Sertifikasi Skema Manajemen Risiko Utama/Certified Risk Professional (CRP) dari LSP PM (2021).

Pengalaman Kerja

Beliau mulai berkarir pada PT Fuji Polymertech Indonesia (1994-1995), PT Sucofindo (Persero), 1996-1997 sebagai Penilaian Kesehatan dan Keselamatan Kerja (OHS) Sistem Manajemen. PQS, 1995-1997 sebagai Asisten Proyek PT Surveyor Indonesia (Persero), 1997-2000 sebagai Konsultan Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 9000) dan (ISO 14000). PT PNM (Persero), 2000-2012 sebagai: Kepala Departemen Jaminan Mutu, Kepala Perencanaan & Komunikasi Perusahaan, Kepala Hubungan Administrasi Perusahaan, Kepala Divisi Umum & Pengadaan, Kepala Divisi Operasional, Manager Cabang Bandung, Kepala Divisi Investasi, Kepala Divisi Syariah (2008-2011) serta Kepala Regional untuk wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT Jaya Proteksi Takaful sebagai Direktur Keuangan (2012-2014) PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia sebagai Direktur Utama (2014-2020).

Dasar Hukum Pengangkatan

Beliau diangkat sebagai Direktur Bisnis PT Permodalan Nasional Madani untuk pertama kalinya berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-303/MBU/09/2020 dan efektif tanggal sejak tanggal 23 September 2020. Kemudian beliau diangkat menjadi Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-179/MBU/05/2021.

Periode Jabatan

September 2020 - Penutupan RUPS Tahun 2025 (Periode Pertama).

Jabatan Rangkap

Saat ini Beliau merangkap jabatan sebagai Komisaris Utama di PT Mitra Proteksi Madani (2020-sekarang) dan Komisaris Utama di PT PNM Ventura Syariah (2020-sekarang).

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham PNM

-

Educational Background

He started his undergraduate degree in Mechanical Engineering, Universitas Trisakti in 1994 and Master of Islamic Economics and Sharia Finance, University of Indonesia in 2004.

Certification

- *Certified Professional Management Accountant (CPMA) dari BNSP (2021).*
- *Certified Risk Associated (CRA) Scheme Certification from LSP PM (2021).*
- *Certification of the Main Risk Management Scheme/Certified Risk Professional (CRP) from LSP PM (2021).*

Work Experience

He started his career at PT Fuji Polymertech Indonesia (1994-1995), PT Sucofindo (Persero), 1996-1997 as an Occupational Health and Safety (OHS) Management System Assessment. PQS, 1995-1997 as Project Assistant for PT Surveyor Indonesia (Persero), 1997-2000 as Consultant for Environmental Management Systems (ISO 9000) and (ISO 14000). PT PNM (Persero), 2000-2012 as Head of Quality Assurance Department, Head of Corporate Planning & Communication, Head of Corporate Administration Relations, Head of General & Procurement Division, Head of Operations Division, Manager of Bandung Branch, Head of Investment Division, Head of Sharia Division (2008-2011) as well as the Regional Head for South Kalimantan and Central Kalimantan. PT Jaya Proteksi Takaful as Finance Director (2012-2014) PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia as President Director (2014-2020).

Legal Basis of Appointment

He was appointed as Business Director of PT Permodalan Nasional Madani for the first time based on the Decree of the Minister of SOEs No. SK-303/MBU/09/2020 and effective as of September 23, 2020. Then he was appointed Director of Compliance and Risk Management based on the Decree of the Minister of SOEs No. SK-179/MBU/05/2021.

Term of Office

September 2020 - Closing of the AGM 2025 (First Period).

Double Function

He currently holds concurrent positions as President Commissioner at PT Mitra Proteksi Madani (2020-present) and President Commissioner at PT PNM Ventura Syariah (2020-present).

Affiliation Relationship

Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, or with the controlling and significant shareholders.

PNM Share Ownership

-



M. Q. GUNADI

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
(berhenti menjabat sejak 28 Mei 2021)
*Director of Compliance and Risk Management
(retired since May 28, 2021)*

Kewarganegaraan / Citizenship

Warga Negara Indonesia / Indonesian Citizens

Domisili / Domicile

Jakarta

Usia / Age

58 tahun per Desember 2021. / 58 years as of December 2021.

Riwayat Pendidikan

Beliau merupakan alumnus S1 Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana pada tahun 1986, kemudian mendapatkan gelar S2 Magister Studi Pembangunan Institut Teknologi Bandung pada tahun 2002.

Sertifikasi

- Sertifikasi Skema Manajemen Risiko Madya/Certified Risk Associated (CRA) dari LSP PM (2021).
- Sertifikasi Skema Manajemen Risiko Utama/Certified Risk Professional (CRP) dari LSP PM (2021).

Pengalaman Kerja

Sebelumnya beliau memiliki pengalaman kerja sebagai Senior Komputer Programmer Midrange & Mainframe di AJB Bumiputera 1912 (1986-1990), Pro Manager di Bank Summa (1990-1991), System Analyst & System Engineer Komputer IBM AS/40 PT Multipolar Corporation (1991-1993), Kepala Divisi Operasi PT Warthaartha (Group Pentasena) (1993-1999), Assistant Vice President PT Pentasena Arthasentosa (1999-2003), setelah itu beliau bergabung dengan PNM Grup sebagai Kepala Divisi Operasi PT PNM Investment Management (2004-2007), Direktur PT PNM Investment Management (2007-2008), dan Direktur Utama PT PNM Investment Management (2008-2018). Beliau juga pernah menjabat sebagai Komisaris pada PT Mitra Proteksi Madani (2018-2020), Komisaris pada PT Micro Madani Institute (2018-2020), Komisaris Utama pada PT Mitra Utama Madani (2019-2020) dan Komisaris Utama pada PT Mitra Dagang Madani (2018-2019).

Dasar Hukum Pengangkatan

Beliau diangkat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Permodalan Nasional Madani untuk pertama kalinya berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK - 40/MBU/02/2018 dan efektif tanggal 09 Februari 2018.

Periode Jabatan

April 2017 - 2021 (Periode Pertama).

Jabatan Rangkap

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan di instansi mana pun.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham PNM

-

Educational Background

He was an alumnus of the S-1 Faculty of Economics, University of Krisnadwipayana in 1986, then obtained his Master's degree in Development Studies at the Bandung Institute of Technology in 2002.

Certification

- *Certified Risk Associated (CRA) Scheme Certification from LSP PM (2021).*
- *Certification of the Main Risk Management Scheme/Certified Risk Professional (CRP) from LSP PM (2021).*

Work Experience

Previously he had work experience as Senior Computer Programmer Midrange & Mainframe at AJB Bumiputera 1912 (1986-1990), Pro Manager at Summa Bank (1990-1991), System Analys & System Engineer Computer IBM AS/40 PT Multipolar Corporation (1991-1993), Head of Operations Division of PT Warthaartha (Group Pentasena) (1993-1999), Assistant Vice President of PT Pentasena Arthasentosa (1999-2003), after which he joined PNM Group as Head of Operations Division of PT PNM Investment Management (2004-2007), Director of PT PNM Investment Management (2007-2008), and President Director of PT PNM Investment Management (2008-2018). He has also served as Commissioner at PT Mitra Proteksi Madani (2018-2020), Commissioner at PT Micro Madani Institute (2018-2020), President Commissioner at PT Mitra Utama Madani (2019-2020) and President Commissioner at PT Mitra Dagang Madani (2018-2019).

Legal Basis of Appointment

He was appointed as Director of Compliance and Risk Management of PT Permodalan Nasional Madani for the first time based on the Decree of the Minister of SOEs No. SK - 40/MBU/02/2018 and effective on February 9, 2018.

Term of Office

April 2017 - 2021 (First Period).

Double Function

He does not have concurrent positions in any agency.

Affiliation Relationship

Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, or with the controlling and significant shareholders.

PNM Share Ownership

-



NOER FAJRIEANSYAH

Direktur Kelembagaan (berhenti menjabat sejak 28 Mei 2021)
Director of Institutional (retired since May 28, 2021)

Kewarganegaraan / Citizenship

Warga Negara Indonesia / Indonesian Citizens

Domisili / Domicile

Jakarta

Usia / Age

38 tahun per Desember 2021. / 38 years as of December 2021.

Riwayat Pendidikan

Beliau menyelesaikan pendidikannya di S1 Manajemen dari Trisakti School of Management pada tahun 2000, S1 Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2003, S2 Ilmu Administrasi Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) pada tahun 2017 dan sedang melanjutkan program Doktor Ilmu Administrasi di Universitas Brawijaya.

Sertifikasi

Belum memiliki sertifikasi.

Pengalaman Kerja

Sebelumnya beliau memiliki karir antara lain, External Relation for Government Institution, Non Government Organization House of Aspiration (2005), Corporate Social Responsibility (CSR) Group di PT Aneka Tambang (Antam) Tbk (2007), General Affairs and External Relation di PT Aneka Tambang (Antam) Tbk (2008), SKK Migas (d/h BP Migas) (2010), Audit Committee dan Commissioner di PT Hotel Indonesia Natour (Persero) (2014), Director of Corporate Resources di PT PPI (Persero) (2015), President Commissioner di PT Dharma Niaga Putra Steel (2016), Director of Strategic Relations and Institutional Cooperation di PT Pos Indonesia (Persero) (2017), President Commissioner di PT Pos Properti Indonesia (2020) dan Director of Strategic Portfolio and IT di PT Pos Indonesia (Persero) (2017).

Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Direktur Kelembagaan PT Permodalan Nasional Madani untuk pertama kalinya berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-303/MBU/09/2020 dan efektif tanggal 3 Desember 2020 berdasarkan Surat Keputusan OJK No. KEP-91/KDK.05/2020.

Periode Jabatan

September 2020 – 2021 (Periode Pertama).

Jabatan Rangkap

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan di instansi mana pun.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham PNM

-

Educational Background

He completed his education at the Bachelor of Management from Trisakti School of Management in 2000, S1 in Law from the University of Indonesia in 2003, and a Masters in Administration from Prof. DR. Moestopo (Beragama) in 2017 and is continuing the Doctor of Administrative Science program at Brawijaya University.

Certification

Not yet certified.

Work Experience

Previously, he had a career in, among others, External Relations for Government Institution, Non Government Organization House of Aspiration (2005), Corporate Social Responsibility (CSR) Group at PT Aneka Tambang (Antam) Tbk (2007), General Affairs and External Relations at PT Aneka. Tambang (Antam) Tbk (2008), SKK Migas (formerly BP Migas) (2010), Audit Committee and Commissioner at PT Hotel Indonesia Natour (Persero) (2014), Director of Corporate Resources at PT PPI (Persero) (2015), President Commissioner at PT Dharma Niaga Putra Steel (2016), Director of Strategic Relations and Institutional Cooperation at PT Pos Indonesia (Persero) (2017), President Commissioner at PT Pos Properti Indonesia (2020) and Director of Strategic Portfolio and IT at PT Pos Indonesia (Persero) (2017).

Legal Basis of Appointment

Served as Director of Institutional for the first time since September 23, 2020 based on SK - 303/MBU/09/2020 and effective December 3, 2020 based on OJK Decree No. KEP-91/KDK.05/2020.

Term of Office

September 2020 – 2021 (First Period).

Double Function

He does not have concurrent positions in any agency.

Affiliation Relationship

Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or with the controlling and major shareholders.

PNM Share Ownership

-

Perubahan Komposisi Anggota Direksi dan Alasan Perubahannya

Direksi Perusahaan paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi dan 1 (satu) di antara anggota Direksi di antara menjadi Direktur Utama atau Presiden Direktur. Pada tahun 2021, Perusahaan telah melakukan beberapa kali perubahan komposisi Direksi yang dilaksanakan sesuai kebutuhan Perusahaan. Perubahan komposisi Direksi pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Periode 1 Januari – 28 Mei 2021

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Periode 1 Januari – 28 Mei 2021

Table of Composition and Basis for Appointment of Directors for the Period January 1 – May 28, 2021

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Executor	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Efektif Effective Date
Arief Mulyadi	Direktur Utama President Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	- Keputusan Menteri BUMN No. SK-67/MBU/4/2017 - Keputusan Menteri BUMN No. SK-40/MBU/2/2018 - Decree of the Minister of SOEs No. SK-67/MBU/4/2017 - Decree of the Minister of SOEs No. SK-40/MBU/2/2018	4 April 2017 April 4, 2017
Tjatur H Priyono	Direktur Keuangan Director of Finance	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-67/MBU/4/2017 Decree of the Minister of SOEs No. SK-67/MBU/4/2017	4 April 2017 April 4, 2017
Anton Fahlevie	Direktur Bisnis Director of Business	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-303/MBU/09/2020 Decree of the Minister of SOEs No. SK-303/MBU/09/2020	23 September 2020 September 23, 2020
M.Q Gunadi	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Director of Compliance and Risk Management	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-303/MBU/09/2020 Decree of the Minister of SOEs No. SK-303/MBU/09/2020	21 Agustus 2017 August 21, 2017
Noer Fajriansyah	Direktur Kelembagaan Director of Institutional	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-303/MBU/09/2020 Decree of the Minister of SOEs No. SK-303/MBU/09/2020	23 September 2020 September 23, 2020

Periode 28 Mei 2021 – 31 Desember 2021

Period May 28, 2021 – December 31, 2021

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Periode 28 Mei 2021 – 31 Desember 2021

Table of Composition and Basis for Appointment of Directors for the Period May 28, 2021 – December 31, 2021

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Executor	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Efektif Effective Date
Arief Mulyadi	Direktur Utama President Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	- Keputusan Menteri BUMN No. SK-67/MBU/4/2017 - Keputusan Menteri BUMN No. SK-40/MBU/2/2018 - Decree of the Minister of SOEs No. SK-67/MBU/4/2017 - Decree of the Minister of SOEs No. SK-40/MBU/2/2018	4 April 2017 April 4, 2017
Tjatur H Priyono	Direktur Keuangan dan Operasional Director of Finance and Operations	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-67/MBU/4/2017 Decree of the Minister of SOEs No. SK-67/MBU/4/2017	4 April 2017 April 4, 2017
Anton Fahlevie	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Director of Compliance and Risk Management	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	- Keputusan Menteri BUMN No. SK-303/MBU/09/2020 - Keputusan Menteri BUMN No. SK-179/MBU/05/2021 - Decree of the Minister of SOEs No. SK-303/MBU/09/2020 - Decree of the Minister of SOEs No. SK-179/MBU/05/2021	23 September 2020 September 23, 2020
Sunar Basuki	Direktur Kelembagaan dan Perencanaan Director of Institutional and Planning	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-179/MBU/05/2021 Decree of the Minister of SOEs No. SK-179/MBU/05/2021	28 Mei 2021 May 28, 2021
Kindaris	Direktur Bisnis Director of Business	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-179/MBU/05/2021 Decree of the Minister of SOEs No. SK-179/MBU/05/2021	28 Mei 2021 May 28, 2021

Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners' Profile



**PARMAN
NATAATMADJA**

Komisaris
Commissioner

**M. SHOLEH
AMIN**

Komisaris Independen
*Independent
Commissioner*

**ARIF RAHMAN
HAKIM**

Komisaris Utama
President Commissioner

**MEIDYAH
INDRESWARI**

Komisaris Independen
*Independent
Commissioner*

**VERONICA
COLONDAM**

Komisaris Independen
*Independent
Commissioner*



ARIF RAHMAN HAKIM

Komisaris Utama
President Commissioner

Kewarganegaraan / Citizenship

Warga Negara Indonesia / Indonesian Citizens

Domisili / Domicile

Jakarta

Usia / Age

55 tahun per Desember 2021. / 55 years as of December 2021.

Riwayat Pendidikan

Beliau menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1990 dan S2 jurusan Policy Economics di University of Illinois at Urbana Champaign USA pada tahun 1999.

Sertifikasi

Sertifikasi sebagai Fasilitator Pengadaan Barang/Jasa Kehormatan, dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2018.

Pengalaman Kerja

Sebelum bergabung dengan PNM, beliau pernah menjadi Kasubbag Pengembangan Statistik pada Bagian Pengembangan Statistik dan Indikator Pembangunan pada Biro Analisa Ekonomi dan Statistik di BAPPENAS (1994-2000), Kepala Sub Direktorat Analis Harga dan Kelembagaan Ekonomi di BAPPENAS (2000-2001), Kepala Bagian Analisis Harga dan Kelembagaan Ekonomi di BAPPENAS (2001-2002), Kepala Sub Direktorat Analis Ekonomi di BAPPENAS (2002-2008), Kepala Sub Direktorat Kualitas Tenaga Kerja di BAPPENAS (2008), Direktur Bina Sertifikasi Profesi, Direktorat Bina Sertifikasi Profesi di LKPP (2008-2012), Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana di LKPP (2013), Sekretaris Jenderal KPU (2013-2020), Deputy Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kementerian Koperasi dan UKM (2020) dan Sekretaris Kementerian di Kementerian Koperasi dan UKM (2021).

Dasar Hukum Pengangkatan

Beliau diangkat sebagai Komisaris Utama PT Permodalan Nasional Madani untuk pertama kalinya sejak 16 April 2021 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-120/MBU/04/2021.

Periode Jabatan

April 2021 - Penutupan RUPS Tahun 2026 (Periode Pertama).

Jabatan Rangkap

Sekretaris Kementerian di Kementerian Koperasi dan UKM (2021-sekarang).

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham PNM

-

Educational Background

He completed his undergraduate education majoring in Industrial Engineering at the Bandung Institute of Technology in 1990 and a master's degree majoring in Policy Economics at the University of Illinois at Urbana Champaign USA in 1999.

Certification

Certification as an Honorary Goods/Services Procurement Facilitator, from the 2018 Government Goods/Services Procurement Policy Institute.

Work Experience

Prior to joining the Company, he was the Head of the Sub-Section for Statistical Development in the Development Statistics and Development Indicators Section at the Bureau of Economic and Statistical Analysis at BAPPENAS (1994-2000), Head of the Sub-Directorate for Price Analysts and Economic Institutions at BAPPENAS (2000-2001), Head of Section Price Analysis and Economic Institutions at BAPPENAS (2001-2002), Head of the Sub Directorate of Economic Analysts at BAPPENAS (2002- 2008), Head of the Sub Directorate of Manpower Quality at BAPPENAS (2008), Director of Professional Certification Development, Directorate of Professional Certification Development at LKPP (2008-2012), Head of Planning, Organization and Administration Bureau at LKPP (2013), Secretary General of the KPU (2013-2020), Deputy for Human Resources Development at the Ministry of Cooperatives and SMEs (2020) and Secretary of the Ministry at the Ministry of Cooperatives and SMEs (2021).

Legal Basis of Appointment

He was appointed as President Commissioner of PT Permodalan Nasional Madani for the first time since April 16, 2021 based on the Decree of the Minister of BUMN No. SK-120/MBU/04/2021.

Term of Office

April 2021 - Closing of the 2026 GMS (First Period).

Double Function

Secretary of the Ministry at the Ministry of Cooperatives and SMEs (2021-present).

Affiliation Relationship

Has no affiliation either with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or with the controlling and major shareholders.

PNM Share Ownership

-



RULLY INDRAWAN

Komisaris Utama (Berhenti menjabat sejak 16 April 2021)
President Commissioner (Quitted from April 16, 2021)

Kewarganegaraan / Citizenship

Warga Negara Indonesia / Indonesian Citizens

Domisili / Domicile

Jakarta

Usia / Age

60 tahun per Desember 2021. / 60 years as of December 2021.

Riwayat Pendidikan

Beliau menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Ekonomi Koperasi di IKIP Bandung pada tahun 1984, S2 jurusan Ilmu Ekonomi Koperasi di UNPAD Bandung pada tahun 1993, dan S3 jurusan Ilmu Ekonomi di UNPAD Bandung pada tahun 1998.

Sertifikasi

Beliau belum memiliki sertifikasi.

Pengalaman Kerja

Sebelum bergabung dengan Perusahaan, beliau pernah menjadi Sekprod Ekonomi Koperasi di FKIP Universitas Pasundan, Bandung (1985-1991), Sekretaris Lembaga Penelitian Universitas Pasundan, Bandung (1991-1994), Ketua Lembaga Penelitian Universitas Pasundan, Bandung (1994-2004), Pembantu Rektor I Universitas Pasundan, Bandung (2003-2004), Pembantu Rektor II Universitas Pasundan, Bandung (2004-2008), Rektor Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN) (2007-2011), Ketua KORPRI Kopertis Wilayah Jabar-Banten (2007-2010), Staf Ahli Ketua DPD RI (2007-2010), Wakil Ketua Forum PT Perumahan di Kementerian Perumahan Rakyat (2008-2010), Asisten Profesor di Waseda University Jepang (2008-2010), Anggota Komite Perencana Jawa Barat (2009-2012), Staf Ahli Dewan Pertimbangan Presiden (2010-2014), Wakil Ketua Umum Dekopin (2015-2018), dan bergabung di Kementerian Koperasi dan UKM sebagai Deputi Bidang Kelembagaan (2018-2019).

Dasar Hukum Pengangkatan

Beliau diangkat sebagai Komisaris Utama PT Permodalan Nasional Madani untuk pertama kalinya berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-05/MBU/01/2020 dan efektif tanggal 8 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-26/KDK.05/2020.

Periode Jabatan

3 Januari 2020 - 16 April 2021 (Periode Pertama).

Jabatan Rangkap

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan di instansi mana pun.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham PNM

-

Educational Background

He completed his undergraduate education majoring in Cooperative Economics at IKIP Bandung in 1984, Masters majoring in Cooperative Economics at UNPAD Bandung in 1993, and doctoral degree majoring in Economics at UNPAD Bandung in 1998.

Certification

Not Yet Certified.

Work Experience

Prior to joining the Company, he was Secretary of the Cooperative Economics Department at FKIP Pasundan University, Bandung (1985-1991), Secretary of the Pasundan University Research Institute, Bandung (1991-1994), Chair of the Pasundan University Research Institute, Bandung (1994-2004), Vice Rector I Pasundan University, Bandung (2003-2004), Pasundan University Vice Rector II, Bandung (2004-2008), Rector of the Indonesian Cooperative Management Institute (IKOPIN) (2007-2011), Chair of the Regional Kopertis KORPRI Jabar-Banten (2007-2010), Expert Staff to the Chair of the DPD RI (2007-2010), Deputy Chair of the Housing PT Forum at the Ministry of Public Housing (2008-2010), Assistant Professor at Waseda University Japan (2008-2010), Member of the Planning Committee West Java (2009-2012), Expert Staff of the Presidential Advisory Council (2010-2014), Deputy Chairperson of Dekopin (2015-2018), and joined the Ministry of Cooperatives and SMEs as Deputy for Institutional Affairs (2018-2019).

Legal Basis of Appointment

He was appointed as President Commissioner of PT Permodalan Nasional Madani (Persero) for the first time since January 3, 2020 based on the Decree of the Minister of BUMN No. SK-05/MBU/01/2020 and effective on July 8, 2020 based on the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No: KEP-26/KDK.05/2020.

Period of Office

January 3, 2020 - April 16, 2021 (First Period).

Double Function

He does not have concurrent positions in any agency.

Affiliation Relationship

Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or with the controlling and major shareholders.

PNM Share Ownership

-



MEIDYAH INDRESWARI

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Kewarganegaraan / Citizenship

Warga Negara Indonesia / *Indonesian Citizens*

Domisili / Domicile

Jakarta

Usia / Age

64 tahun per Desember 2021. / *64 years as of December 2021.*

Riwayat Pendidikan

Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di bidang akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) pada tahun 1983. Gelar Master of Science in Accounting diperoleh dari University of Saskatchewan, Canada pada tahun 1992 dan gelar Ph.D dibidang Corporate Governance in Indonesia SOEs diperoleh dari Massey University, New Zealand pada tahun 2006.

Educational Background

She completed her undergraduate education in accounting from the Faculty of Economics, University of Indonesia (FEUI) in 1983. She obtained her Master of Science in Accounting from the University of Saskatchewan, Canada in 1992 and his Ph.D in Corporate Governance in Indonesia SOEs was obtained from Massey University, New Zealand in 2006.

Sertifikasi

- Certified Control Self-Assessment (CCSA), dari the IIA.
- Certified Risk Management Assurance (CRMA), dari the IIA
- Certified Professional Management Accountant (CPMA), dari IAMI
- Certified Forensic Auditor (CFrA), dari LSAF
- Certified Knowledge Manager (CKM), dari KMI

Certification

- *Certified Control Self-Assessment (CCSA), from the IIA.*
- *Certified Risk Management Assurance (CRMA), from the IIA*
- *Certified Professional Management Accountant (CPMA), from IAMI*
- *Certified Forensic Auditor (CFrA), from LSAF*
- *Certified Knowledge Manager (CKM), from KMI.*

Pengalaman Kerja

Sebelum bergabung dengan Perusahaan, beliau pernah menduduki beberapa jabatan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) seperti Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan (2006-2008), Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jakarta II (2008 -2010), Kepala Pusdiklatwas BPKP (2010-2013), Sekretaris Utama BPKP (2013-2017), dan terakhir menjabat sebagai Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara (2017).

Work Experience

Prior to joining the Company, she held several positions in the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) such as Head of the Center for Research and Development Supervision (2006-2008), Head of BPKP Representative Office for Jakarta II Province (2008-2010), Head of BPKP Education and Training Center (2010-2008). 2013, Main Secretary of BPKP (2013-2017), and lastly served as Deputy Head of BPKP for State Accountants (2017).

Dasar Hukum Pengangkatan

Beliau diangkat sebagai Komisaris PT Permodalan Nasional Madani untuk pertama kalinya berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-207/ MBU/2013 dan efektif tanggal 9 April 2013. Kemudian pada 21 Mei 2018 beliau ditunjuk sebagai Komisaris Independen berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-133/MBU/05/2018.

Legal Basis of Appointment

He was appointed as Commissioner of PT Permodalan Nasional Madani for the first time based on the Decree of the Minister of SOEs No. SK-207/MBU/2013 and effective April 9, 2013. Then on May 21, 2018 he was appointed as an Independent Commissioner based on the Decree of the Minister of SOEs No. SK-133/MBU/05/2018.

Periode Jabatan

Mei 2018 - Penutupan RUPS Tahun 2023 (Periode Pertama).

Term of Office

May 2018 - Closing of the 2023 GMS (First Period).

Jabatan Rangkap

Saat ini, jabatan lain yang diduduki adalah sebagai Ketua Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani.

Double Function

Currently, another position occupied is as Chairman of the Audit Committee of PT Permodalan Nasional Madani.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Affiliation Relationship

Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or with the controlling and major shareholders.

Kepemilikan Saham PNM

-

PNM Share Ownership

-



M. SHOLEH AMIN

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Kewarganegaraan / Citizenship

Warga Negara Indonesia / *Indonesian Citizens*

Domisili / Domicile

Jakarta

Usia / Age

64 tahun per Desember 2021. / *64 years as of December 2021.*

Riwayat Pendidikan

Beliau menyelesaikan pendidikan S1 Hukum di Universitas Islam Indonesia pada tahun 1984 dan melanjutkan pendidikan S2 Hukum Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2010.

Sertifikasi

Beliau belum memiliki sertifikasi.

Pengalaman Kerja

Beliau mengawali kariernya di Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum UII (1985–1987) dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta di Bogor (1987–1990). Selain itu, beliau juga pernah berprofesi sebagai Komisioner Badan Wakaf Indonesia (BWI) periode 2011–2017, berdasarkan Keputusan Presiden No. III/M tertanggal 9 Juni 2011.

Dasar Hukum Pengangkatan

Beliau diangkat menjadi Komisaris Independen PT Permodalan Nasional Madani untuk pertama kalinya berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-85/MBU/05/2017 dan efektif pada tanggal 2 Mei 2017.

Periode Jabatan

Mei 2017 - Penutupan RUPS Tahun 2022 (Periode Pertama).

Jabatan Rangkap

Saat ini, beliau juga menjabat sebagai dosen di Fakultas Hukum UIKA (1987–sekarang), Advokat di Law Firm Sholeh, Adnan & Associates (SAA) (1991–sekarang), dan Anggota Lemkaji MPR-RI (SK Ketua MPR RI) periode tahun 2017–2020. Selain itu, Beliau menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi PT Permodalan Nasional Madani.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham PNM

-

Educational Background

He completed his Bachelor of Law education at the Islamic University of Indonesia in 1984 and continued his Master in Business Law at the Faculty of Law, Gadjah Mada University in 2010.

Certification

Not Yet Certified.

Work Experience

He started his career at the UII Legal Consultation & Aid Institute (1985–1987) and the Jakarta Legal Aid Institute in Bogor (1987–1990). In addition, he also worked as a Commissioner for the Indonesian Waqf Board (BWI) for the 2011–2017 period, based on Presidential Decree No. III/M dated June 9, 2011.

Legal Basis of Appointment

He was appointed as Independent Commissioner of PT Permodalan Nasional Madani for the first time based on the Decree of the Minister of SOEs No. SK-85/MBU/05/2017 and effective on May 2, 2017.

Term of Office

May 2017 - Closing of the 2022 GMS (First Period).

Double Function

Currently, he also serves as a lecturer at the Faculty of Law UIKA (1987–present), Advocate at Law Firm Sholeh, Adnan & Associates (SAA) (1991–present), and Member of Lemkaji MPR-RI (SK Chairman of the MPR RI) period 2017–2020. In addition, he serves as Chairman of the Nomination and Remuneration Committee of PT Permodalan Nasional Madani.

Affiliation Relationship

Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, or with the controlling and significant shareholders.

PNM Share Ownership

-



VERONICA COLONDAM

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Kewarganegaraan / Citizenship

Warga Negara Indonesia / *Indonesian Citizens*

Domisili / Domicile

Jakarta

Usia / Age

49 tahun per Desember 2021. / *49 years as of December 2021.*

Riwayat Pendidikan

Beliau menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Mass Communications and Public Relations di American University pada tahun 2000 dan S2 jurusan Social Science di Imperial College London and The London School of Hygiene and Tropical Medicines pada tahun 2005.

Sertifikasi

Beliau belum memiliki sertifikasi.

Pengalaman Kerja

Beliau mengawali kariernya dengan mendirikan Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB) di Jakarta dan menjabat sebagai Ketua YCAB dari tahun 1999-sekarang, selain itu beliau juga aktif sebagai dosen tamu dan pembicara di beberapa perguruan tinggi baik di dalam maupun luar negeri.

Dasar Hukum Pengangkatan

Beliau diangkat sebagai Komisaris Independen PT Permodalan Nasional Madani untuk pertama kalinya berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-133/MBU/05/2018 dan efektif tanggal 21 Mei 2018.

Periode Jabatan

Mei 2018 - Penutupan RUPS Tahun 2023 (Periode Pertama).

Jabatan Rangkap

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB) (1999-sekarang) dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Permodalan Nasional Madani.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham PNM

-

Educational Background

She completed her undergraduate education majoring in Mass Communications and Public Relations at American University in 2000 and a Masters in Social Science at Imperial College London and The London School of Hygiene and Tropical Medicines in 2005.

Certification

Not Yet Certified.

Work Experience

She started her career by establishing the Cinta Anak Bangsa Foundation (YCAB) in Jakarta and served as Chair of the YCAB from 1999-present, besides that she is also active as a guest lecturer and speaker at several universities both at home and abroad.

Legal Basis of Appointment

She was appointed as Independent Commissioner of PT Permodalan Nasional Madani for the first time based on the Decree of the Minister of SOEs No. SK-133/MBU/05/2018 and effective May 21, 2018.

Term of Office

May 2018 - Closing of the 2023 GMS (First Period).

Double Function

Currently, she also serves as Chairman of the Cinta Anak Bangsa Foundation (YCAB) (1999-present) and Member of the Nomination and Remuneration Committee of PT Permodalan Nasional Madani.

Affiliation Relationship

Has no affiliation either with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or with the controlling and major shareholders.

PNM Share Ownership

-



PARMAN NATAATMADJA

Komisaris
Commissioner

Kewarganegaraan / Citizenship

Warga Negara Indonesia / Indonesian Citizens

Domisili / Domicile

Tangerang

Usia / Age

64 tahun per Desember 2021. / 64 years as of December 2021.

Riwayat Pendidikan

Beliau menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia pada tahun 1985 dan melanjutkan pendidikan S2 Finance di State University Of New York at Buffalo, USA pada tahun 1988.

Sertifikasi

- Certified Risk Governance Professional (CRGP) Level IV, dari Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko Tahun 2021.
- Sertifikasi BSMR Komisaris Non Independen Level 1, dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko Tahun 2021.

Pengalaman Kerja

Beliau mengawali kariernya di New York as BCA (1988-1989), beliau juga pernah menjabat sebagai Assistant Manager di Chase Manhattan (1989-1991), sebagai Manager di PT Danareksa (Persero) (1991-1993), Komisaris di PT Pakuan Sawangan Golf (1992-2000), Direktur di PT Danareksa Finance (1993-1995), Managing Director di PT Niaga Leasing (1996-2000), President Director di PT Niaga International Factors (1996-2005), Direktur Utama PT Bahana Artha Ventura (2005-2008), Komisaris PT Mitra Tani 27 (2005-2008), Komisaris PT Sarana Maluku Ventura (2005-2007), Direktur Utama PT PNM (Persero) (2008-Februari 2018), Komisaris Utama PT PNM Investment Management (2008-Mei 2018), Komisaris Utama PT PNM Venture Capital (2008-September 2018), Komisaris Utama Mitra Dagang Madani (2017-September 2018), Staf Khusus V Menteri BUMN (Februari 2018-Mei 2019), Komisaris Bank BTN (Maret 2018-Mei 2019), Komisaris Utama Bank BRI Syariah (April 2019-September 2020), Tenaga Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Bidang Pembinaan UKM dan Ekonomi (Januari 2020-Saat ini) dan Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN Januari 2020 – Desember 2021.

Dasar Hukum Pengangkatan

Beliau diangkat menjadi Komisaris PT Permodalan Nasional Madani untuk pertama kalinya berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK- 304/MBU/09/2020 dan efektif tanggal 28 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No: KEP-96/KDK.05/2020.

Periode Jabatan

Desember 2020 - Penutupan RUPS Tahun 2025 (Periode Pertama).

Jabatan Rangkap

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Tenaga Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Bidang Pembinaan UKM dan Ekonomi (Januari 2020-Saat ini) dan Kepala Badan Bank Tanah Januari 2022 – sekarang. Selain itu beliau juga menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi PT Permodalan Nasional Madani.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham PNM

-

Educational Background

He completed his undergraduate education in the Faculty of Economics at the University of Indonesia in 1985 and continued his Masters in Finance at the State University Of New York at Buffalo, USA in 1988.

Certification

- Certified Risk Governance Professional (CRGP) Level IV, from the Risk Management Professional Certification Institute in 2021.
- BSMR Certification for Non-Independent Commissioners Level 1, from the Risk Management Certification Agency in 2021.

Work Experience

He started his career in New York as BCA (1988-1989), he also served as Assistant Manager at Chase Manhattan (1989-1991), as Manager at PT Danareksa (Persero) (1991-1993), Commissioner at PT Pakuan Sawangan Golf (1992-2000), Director at PT Danareksa Finance (1993-1995), Managing Director at PT Niaga Leasing (1996-2000), President Director at PT Niaga International Factors (1996-2005), President Director of PT Bahana Artha Ventura (2005-2008), Commissioner of PT Mitra Tani 27 (2005-2008), Commissioner of PT Sarana Maluku Ventura (2005-2007), President Director of PT PNM (Persero) (2008-February 2018), President Commissioner of PT PNM Investment Management (2008-May 2018), President Commissioner of PT PNM Venture Capital (2008-September 2018), President Commissioner of Mitra Dagang Madani (2017-September 2018), Special Staff V Minister of BUMN (February 2018-May 2019), Commissioner of Bank BTN (March 2018-May 2019), President Commissioner of Bank BRI Syariah (April 2019-September 2020), Expert Minister of Agraria and Spatial Planning or Head of the Land Agency for the Development of UKM and Economy (January 2020-Present) and Expert Staff for the Minister of ATR/BPN January 2020 – December 2021.

Legal Basis of Appointment

He was appointed as Commissioner of the Company for the first time since September 23, 2020 through SK-304/MBU/09/2020 and effective on December 28, 2020 based on the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No: KEP-96/KDK.05/2020.

Term of Office

December 2020 - Closing of the 2025 GMS (First Period).

Double Function

Currently, he also serves as Expert Staff to the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning or Head of the Land Agency for SME and Economic Development (January 2020-Present) and Head of Land Bank Agency January 2022 – present. In addition, he also serves as Chairman of the Nomination and Remuneration Committee of PT Permodalan Nasional Madani

Affiliation Relationship

Has no affiliation either with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or with the controlling and major shareholders.

PNM Share Ownership

-

Perubahan Komposisi Anggota Dewan Komisaris dan Alasan Perubahannya

Komposisi Dewan Komisaris yang diatur dalam board manual yaitu Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris yang 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen. 1 (satu) diantaranya anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama atau Presiden Komisaris. Dewan Komisaris yang terdiri dari atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Pada tahun 2021, terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris yang dilakukan atas dasar pertimbangan kebutuhan Perusahaan. Perubahan komposisi Dewan Komisaris pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Periode 1 Januari – 16 April 2021

Changes in the Composition of Members of the Board of Commissioners and the Reasons for the Changes

The composition of the Board of Commissioners, as regulated in the board manual, is that the Board Commissioners consists of at least 2 (two) members of the Board of Commissioners, 1 (one) of whom is an Independent Commissioner. 1 (one) member of the Board of Commissioners is appointed as President Commissioner or President Commissioner. The Board of Commissioners, which consists of more than 1 (one) member, is an assembly. Each member of the Board of Commissioners cannot act alone but based on the decision of the Board of Commissioners. In 2021, there will be a change in the composition of the Board of Commissioners based on consideration of the needs of the Company. Changes in the design of the Board of Commissioners in 2021 are as follows.:

Period January 1 – April 16, 2021

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Periode 1 Januari – 16 April 2021

Table of Composition and Basis of Appointment of the Board of Commissioners for the Period January 1 – April 16, 2021

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Executor	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Efektif Effective Date
Rully Indrawan	Komisaris Utama President Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-05/MBU/01/2020 Decree of the Minister of SOEs No. SK-05/MBU/01/2020	8 Juli 2020 April 8, 2020
Meidyah Indreswari	Komisaris Independen Independent Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	- Keputusan Menteri BUMN No. SK-207/MBU/2013 - Keputusan Menteri BUMN No. SK-133/MBU/05/2018 - Decree of the Minister of SOEs No. SK-207/MBU/2013 - Decree of the Minister of SOEs No. SK-133/MBU/05/2018	9 April 2013 April 9, 2013
M. Sholeh Amin	Komisaris Independen Independent Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-85/MBU/05/2017 Decree of the Minister of SOEs No. SK-85/MBU/05/2017	2 Mei 2017 May 2, 2017
Veronica Colondam	Komisaris Independen Independent Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-133/MBU/05/2018 Decree of the Minister of SOEs No. SK-133/MBU/05/2018.	21 Mei 2018 May 21, 2018
Parman Nataatmadja	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK- 304/MBU/09/2020 Decree of the Minister of SOEs No. SK- 304/MBU/09/2020	28 Desember 2020 December 28, 2020

Periode 16 April – 31 Desember 2021

Period April 16 – December 31, 2021

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Periode 16 April – 31 Desember 2021

Table of Composition and Basis of Appointment of the Board of Commissioners for the Period April 16 – December 31, 2021

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Executor	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Efektif Effective Date
Arif Rahman Hakim	Komisaris Utama President Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-120/MBU/04/2021 Decree of the Minister of SOEs No. SK-120/MBU/04/2021	16 April 2021 April 16, 2021
Meidyah Indreswari	Komisaris Independen Independent Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	- Keputusan Menteri BUMN No. SK-207/MBU/2013 - Keputusan Menteri BUMN No. SK-133/MBU/05/2018 - Decree of the Minister of SOEs No. SK-207/MBU/2013 - Decree of the Minister of SOEs No. SK-133/MBU/05/2018	9 April 2013 April 9, 2013
M. Sholeh Amin	Komisaris Independen Independent Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-85/MBU/05/2017 Decree of the Minister of SOEs No. SK-85/MBU/05/2017	2 Mei 2017 May 2, 2017
Veronica Colondam	Komisaris Independen Independent Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-133/MBU/05/2018 Decree of the Minister of SOEs No. SK-133/MBU/05/2018.	21 Mei 2018 May 21, 2018
Parman Nataatmadja	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK- 304/MBU/09/2020 Decree of the Minister of SOEs No. SK- 304/MBU/09/2020	28 Desember 2020 December 28, 2020

Profil Dewan Pengawas Syariah

Sharia Supervisory Board Profile



DIDIN HAFIDHUDDIN

Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of the Sharia Supervisory Board

Kewarganegaraan / Citizenship

Warga Negara Indonesia / *Indonesian Citizens*

Domisili / Domicile

Bogor

Usia / Age

70 tahun per Desember 2021. / *70 years as of December 2021.*

Riwayat Pendidikan

Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (1978), dan Program S2 pada Institut Pertanian Bogor (1987), serta pendidikan S3 pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (2001).

Pengalaman Kerja

Sebelumnya beliau pernah menjabat antara lain sebagai Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (2005–2015); Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank BRI Syariah; Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Direktur program Pascasarjana Universitas Ibnu Khaldun (UIKA) Bogor.

Dasar Hukum Pengangkatan

Beliau menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah sejak 2009 berdasarkan SK Direksi PT PNM (Persero) No. SK-268/PNM/SDM/XI/2009 dan telah diangkat oleh SK Menteri BUMN berdasarkan No. SK-146/MBU/07/2019 tanggal 3 Juli 2019.

Periode Jabatan

Juli 2019 - Penutupan RUPS Tahun 2023 (Periode Pertama).

Jabatan Rangkap

Ketua BKSPPi (Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia)
Ketua Dewan Penasehat Dewan Dakwah Islam Indonesia
Ketua Dewan Pengawas DSN – MUI
Direktur Pascasarjana (UIK)
Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Indonesia (BSI)

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham PNM

-

Educational Background

He completed his undergraduate education at the Syarif Hidayatullah State Islamic Institute (IAIN) Jakarta (1978), and a Masters program at the Bogor Agricultural Institute (1987), as well as doctoral education at the Syarif Hidayatullah State Islamic Institute (IAIN) Jakarta (2001).

Work Experience

Previously, he served as Chairman of the National Zakat Agency (BAZNAS) (2005–2015); Chairman of the Sharia Supervisory Board of PT Bank BRI Syariah; Professor of the Bogor Agricultural University (IPB), and Director of the Postgraduate Program at the University of Ibnu Khaldun (UIKA) Bogor.

Legal Basis of Appointment

He has served as a Member of the Sharia Supervisory Board since 2009 based on the Decree of the Board of Directors of PT PNM (Persero) No. SK-268/PNM/SDM/XI/2009 and has been appointed by the Decree of the Minister of BUMN based on No. SK-146/MBU/07/2019 dated July 3, 2019.

Term of Office

July 2019 - Closing of the 2023 GMS (First Period).

Double Function

*Chairman of the BKSPPi (Indonesian Islamic Boarding School Cooperation Agency) Chairman of the Advisory Council of the Indonesian Islamic Da'wah Council Chairman of the Supervisory Board of DSN – MUI Postgraduate Director (UIK)
Member of the Sharia Supervisory Board of Bank Syariah Indonesia (BSI)*

Affiliation Relationship

Has no affiliation either with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or with the controlling and major shareholders.

PNM Share Ownership

-



MUHAMMAD SYAFII ANTONIO

Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board

Kewarganegaraan / Citizenship

Warga Negara Indonesia / Indonesian Citizens

Domisili / Domicile

Jakarta

Usia / Age

53 tahun per Desember 2021. / 53 years as of December 2021.

Riwayat Pendidikan

Beliau meraih gelar Bachelor of Arts in Islamic Studies (major) and Economics and Statistics (minor) di Universitas Jordan, Yordania pada tahun 1990. Selain itu, beliau meraih gelar Master of Economics dari International Islamic University, Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 1992, serta menuntaskan program doktoral Micro Finance di Universitas Melbourne, Australia pada tahun 2004.

Pengalaman Kerja

Hingga saat ini, beliau menjabat sebagai Anggota Dewan Ekonomi Nasional (2010-sekarang), Deputy Chairman Syariah Advisory Council of Dar Takaful untuk Mawarid Finance and Insurance Dubai (2008-sekarang), Expert Committee for the Development of Islamic Banking untuk Bank Indonesia (2008-sekarang), Anggota Dewan Syariah untuk Bank Ekspor Indonesia (2007-sekarang), Syariah Advisory Council untuk Central Bank of Malaysia (2006-sekarang), serta Dewan Syariah Nasional untuk Majelis Ulama Indonesia (1997-sekarang). Beberapa jabatan lain yang sempat dipercayakan kepada beliau, ialah Advisor to Board of Executive (2002-2003) serta Syariah Supervisory Board (1996-2002) untuk Bank Muamalat (2002-2003).

Dasar Hukum Pengangkatan

Beliau menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah untuk Perusahaan sejak 2004, dan dikukuhkan kembali pada 2009 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PNM (Persero) No. SK-267/PNM/SDM/XI/2009. Beliau telah diangkat oleh SK Menteri BUMN berdasarkan No. SK-146/MBU/07/2019 tanggal 3 Juli 2019.

Periode Jabatan

Juli 2019 - Penutupan RUPS Tahun 2023 (Periode Pertama).

Jabatan Rangkap

Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) (Keppres /2016) (2016-saat ini) Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia. (1997-saat ini) Shariah Board Islamic Development Bank, Jeddah (2016-saat ini) Ketua Dewan Pembina YTC (Yayasan Tazkia Cendekia) (2017-saat ini) Komisaris Utama Tazkia Consulting (2004-saat ini).

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham PNM

-

Educational Background

He earned a Bachelor of Arts in Islamic Studies (major) and Economics and Statistics (minor) at the University of Jordan, Jordan in 1990. In addition, he earned a Master of Economics from International Islamic University, Kuala Lumpur, Malaysia in 1992, and completed a doctoral program in Micro Finance at the University of Melbourne, Australia in 2004.

Work Experience

To date, he has served as Member of the National Economic Council (2010-present), Deputy Chairman of the Sharia Advisory Council of Dar Takaful for Mawarid Finance and Insurance Dubai (2008-present), Expert Committee for the Development of Islamic Banking for Bank Indonesia (2008-now), Member of the Sharia Board for the Indonesian Export Bank (2007-present), the Shariah Advisory Council for the Central Bank of Malaysia (2006-present), and the National Sharia Council for the Indonesian Ulema Council (1997-present). Several other positions that were entrusted to him, are the Advisor to the Board of Executive (2002-2003) and the Shariah Supervisory Board (1996-2002) for Bank Muamalat (2002-2003).

Legal Basis of Appointment

He has served as a member of the Sharia Supervisory Board for the Company since 2004, and was reinstated in 2009 based on the Decree of the Directors of PT PNM (Persero) No. SK-267/PNM/SDM/XI/2009. He has been appointed by the Decree of the Minister of BUMN based on No. SK-146/MBU/07/2019 dated July 3, 2019.

Term of Office

July 2019 - Closing of the 2023 GMS (First Period).

Double Function

Member of the National Economic and Industry Committee (KEIN) (Keppres /2016) (2016-present) National Sharia Council, Indonesian Ulema Council (1997-present) Shariah Board Islamic Development Bank, Jeddah (2016-present) Chairman of the YTC Board of Trustees (Tazkia Cendekia Foundation) (2017-present) President Commissioner of Tazkia Consulting (2004-present).

Affiliation Relationship

Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or with controlling and major shareholders.

PNM Share Ownership

-

Perubahan Komposisi Dewan Pengawas Syariah dan Alasan Perubahannya

Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) minimal 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang. DPS dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk dari salah satu anggota DPS. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Pengawas Syariah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Changes in the Composition of the Sharia Supervisory Board and the Reasons for the Changes

The number of members of the Sharia Supervisory Board (DPS) is a minimum of 2 (two) people and a maximum of 3 (three) people. The DPS is led by a chairman who is appointed from one of the DPS members. The composition and basis for the appointment of the Sharia Supervisory Board can be seen in the table below.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah

Table of Composition and Basis of Appointment of the Sharia Supervisory Board

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Executor	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Efektif Effective Date
Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.S.	Ketua Chairman	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-46/MBU/07/2019 Decree of the Minister of SOEs No. SK-46/MBU/07/2019	3 Juli 2019 April 3, 2019
Dr. Muhammad Syafii Antonio	Anggota Member	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-46/MBU/07/2019 Decree of the Minister of SOEs No. SK-46/MBU/07/2019	3 Juli 2019 April 3, 2019

Profil Executive Vice President

Vice President's Executive Profile



RAHFIE SYAEFULSHAAF

Executive Vice President Pengembangan dan Legal (berhenti menjabat sejak 21 Oktober 2021)

Executive Vice President Development and Legal (departed since October 21, 2021)

Kewarganegaraan / Citizenship

Warga Negara Indonesia / Indonesian Citizens

Domisili / Domicile

Jakarta

Usia / Age

54 tahun per Desember 2021. / 54 years as of December 2021.

Riwayat Pendidikan

Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan Keperdataan dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta pada tahun 1991 dan memperoleh gelar Magister Hukum Jurusan Keperdataan, Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 1995.

Pengalaman Kerja

Beliau berpengalaman sebagai Legal Officer di PT Bank Dana Asia (1995-1997) dan di PT Bank Nusa Nasional, Tbk (1997-2000). Sebelum menjabat sebagai Executive Vice President Pengembangan dan Legal, beliau pernah menduduki beberapa jabatan strategis antara lain sebagai Kepala Divisi Legal merangkap PIC Divisi Remedial dan Penagihan. Kemudian beliau pernah menduduki beberapa jabatan strategis di Perusahaan antara lain sebagai Pemimpin Cabang Medan dan Koordinator Cabang Medan (2015-2016); Kepala Divisi Remedial (2016-2017); Kepala Divisi pengelolaan Pembiayaan ULamm II (Mei 2017-September 2017), serta Kepala Divisi Remedial (2017-2018), Executive Vice President ULamm dan Jasa Manajemen (2018-2019), dan Executive Vice President Pengembangan dan Legal (2019-sekarang).

Dasar Hukum Pengangkatan

Beliau diangkat sebagai Executive Vice President Pengembangan dan Legal sejak 24 Oktober 2018 berdasarkan SK-1194/PNM/DIR/X/2018.

Kepemilikan Saham PNM

-

Educational Background

He obtained his Bachelor of Laws degree in the Department of Civilization from the Indonesian Islamic University, Yogyakarta in 1991 and obtained his Masters in Law, the Department of Civilization, Padjajaran University, Bandung in 1995.

Work Experience

He has experience as a Legal Officer at PT Bank Dana Asia (1995-1997) and at PT Bank Nusa Nasional, Tbk (1997-2000). Prior to serving as Executive Vice President of Development and Legal, he held several strategic positions including as Head of the Legal Division concurrently as PIC of the Remedial and Billing Division. Subsequently, he held several strategic positions in the Company, including as Head of the Medan Branch and Coordinator of the Medan Branch (2015-2016); Head of Remedial Division (2016-2017); Head of the ULamm II Financing Management Division (May 2017-September 2017), as well as Head of the Remedial Division (2017-2018), Executive Vice President of ULamm and Management Services (2018-2019), and Executive Vice President of Development and Legal (2019-present).

Legal Basis of Appointment

He was appointed as Executive Vice President of Development and Legal since October 24, 2018 based on SK-1194/PNM/DIR/X/2018.

PNM Share Ownership

-



SUNAR BASUKI

Executive Vice President Keuangan dan Operasional
(berhenti menjabat sejak 28 Mei 2021)
*Executive Vice President of Finance and Operations
(retired from 28 May 2021)*

Kewarganegaraan / Citizenship

Warga Negara Indonesia / Indonesian Citizens

Domisili / Domicile

Jakarta

Usia / Age

54 tahun per Desember 2021. / 54 years as of December 2021.

Riwayat Pendidikan

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 1991 dan Master of Business Administration dari University of Scranton, Pennsylvania, Amerika Serikat pada tahun 2007.

Pengalaman Kerja

Sebelum berkarier di PNM, beliau memiliki pengalaman kerja di antaranya sebagai Auditor di Arthur Andersen (1989–1992), Accounting Manager di Zeuscom Indonesia (1992–1994), Finance & Administration Manager di PT Pritho (1994–2001), Financial Controller di International Air Transportation Association (2001–2005); dan Group Financial Controller – Indonesia di Eye Corporation (2007–2012). Sebelum menjabat sebagai Executive Vice President Keuangan dan Operasional, beliau pernah menduduki beberapa jabatan strategis antara lain sebagai Kepala Divisi Akuntansi dan Operasi (2012–2014); Kepala Divisi Perencanaan dan Riset (2014–2017), dan Kepala Divisi Keuangan dan Pendanaan (2017–2018).

Dasar Hukum Pengangkatan

Beliau diangkat sebagai Executive Vice President Keuangan dan Operasional sejak 24 Oktober 2018 berdasarkan SK-1194/PNM/DIR/X/2018.

Kepemilikan Saham PNM

-

Educational Background

Obtained a Bachelor's degree in Economics from the University of Indonesia, Jakarta in 1991 and a Master of Business Administration from the University of Scranton, Pennsylvania, United States of America in 2007.

Work Experience

Prior to his career at PNM, he had work experiences including Auditor at Arthur Andersen (1989–1992), Accounting Manager at Zeuscom Indonesia (1992–1994), Finance & Administration Manager at PT Pritho (1994–2001), Financial Controller at International Air Transportation Association (2001–2005); and Group Financial Controller – Indonesia at Eye Corporation (2007–2012). Prior to serving as Executive Vice President of Finance and Operations, he held several strategic positions including Head of Accounting and Operations Division (2012–2014); Head of Planning and Research Division (2014–2017), and Head of Finance and Funding Division (2017–2018).

Legal Basis of Appointment

He was appointed as Executive Vice President of Finance and Operations since October 24, 2018 based on SK-1194/PNM/DIR/X/2018.

PNM Share Ownership

-



KINDARIS

Executive Vice President Bisnis ULaMM
(berhenti menjabat sejak 28 Mei 2021)
*Executive Vice President of ULaMM Business
(retired from May 28, 2021)*

Kewarganegaraan / Citizenship

Warga Negara Indonesia / Indonesian Citizens

Domisili / Domicile

Bandung

Usia / Age

54 tahun per Desember 2021. / 54 years as of December 2021.

Riwayat Pendidikan

Memperoleh gelar S-1 Sarjana Hukum dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung pada tahun 1991 dan S-2 Magister Manajemen dari Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 2004.

Pengalaman Kerja

Sebelum bergabung dengan PNM, beliau pernah menduduki posisi sebagai Senior Account Officer di PT Bank Arya Panduarta, Tbk (1998–1999) dan sebagai Loan Work Out Officer di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Sebelum menjabat sebagai Executive Vice President Bisnis ULaMM, beliau pernah menduduki beberapa jabatan strategis antara lain sebagai Kepala Cabang Pekanbaru, Riau (2005–2008); Pemimpin Cabang Bandung, Jawa Barat (2008–2013); kepala Divisi Pusat Pendidikan dan Pelatihan (2013–2014); Kepala Divisi Pembiayaan Program Kemitraan dan Afiliasi (2014–2015); serta Executive Vice President Bisnis ULaMM (2018), Executive Vice President Pengawasan dan Legal (2018–2019), dan Executive Vice President Bisnis ULaMM (2019–sekarang).

Dasar Hukum Pengangkatan

Beliau diangkat sebagai Executive Vice President Bisnis ULaMM sejak 19 Februari 2018 berdasarkan SK-0145/DIR/SDM/II/2018.

Kepemilikan Saham PNM

-

Educational Background

He earned his Bachelor of Laws degree from Parahyangan Catholic University, Bandung in 1991 and Master of Management from Trisakti University, Jakarta in 2004.

Work Experience

Prior to joining PNM, he held positions as a Senior Account Officer at PT Bank Arya Panduarta, Tbk (1998–1999) and as a Loan Work Out Officer at the Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA). Prior to serving as Executive Vice President of ULaMM Business, he held several strategic positions including Head of Pekanbaru, Riau (2005–2008); Branch Manager Bandung, West Java (2008–2013); head of the Education and Training Center Division (2013–2014); Head of Partnership and Affiliate Program Financing Division (2014–2015); and Executive Vice President of ULaMM Business (2018), Executive Vice President of Supervision and Legal (2018–2019), and Executive Vice President of ULaMM Business (2019–present).

Legal Basis of Appointment

He was appointed as Executive Vice President of ULaMM Business since February 19, 2018 based on SK-0145/DIR/SDM/II/2018.

PNM Share Ownership

-

Profil Pejabat di Bawah Direksi

Profile of Officers Under the Board of Directors



SISWO PUJONO

Kepala Satuan Pengawasan Intern
Head of Internal Audit Unit

Kewarganegaraan / Citizenship

Warga Negara Indonesia / *Indonesian Citizens*

Domisili / Domicile

Jakarta

Usia / Age

55 tahun per Desember 2021. / *55 years as of December 2021.*

Riwayat Pendidikan

Lulus dengan gelar D4 dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (Lulus Tahun 1994)

Pengalaman Kerja

Sebelum menjadi Kepala Satuan Pengawas Intern, beliau pernah menjabat sebagai Audit Investigator Cabang Semarang (2013), Kepala Bagian Audit Operasional (2014-2015), Pj. Kepala Divisi Satuan Pengawas Internal (2015-2016), Kepala Divisi Manajemen Risiko dan GCG (2016-2018), Kepala Divisi Pembinaan dan Pengawasan ULaMM (2018), Kepala Divisi Pembinaan dan Pengawasan Mekaar (2018-2019) dan Kepala Divisi Pembinaan dan Monitoring Bisnis Mekaar (2019-2021).

Dasar Hukum Pengangkatan

Beliau diangkat sebagai Kepala Satuan Pengawas Intern sejak 18 Oktober 2021, berdasarkan Surat No. SK-0033/PNM/DIR/X/21.

Kepemilikan Saham PNM

-

Educational Background

Graduated with a D4 degree from the State College of Accountancy (Graduated in 1994)

Work Experience

Prior to becoming Head of the Internal Audit Unit, he served as Audit Investigator Semarang Branch (2013), Head of Operational Audit (2014-2015), Acting. Head of Internal Supervisory Unit Division (2015-2016), Head of Risk Management and GCG Division (2016-2018), Head of ULaMM Development and Supervision Division (2018), Head of Mekaar's Development and Supervision Division (2018-2019) and Head of Development and Monitoring Division Mekaar Business (2019-2021).

Legal Basis of Appointment

He was appointed as Head of the Internal Audit Unit since October 18, 2021, based on Letter No. SK-0033/PNM/DIR/X/21.

PNM Share Ownership

-



SRI INDRAJAYA

Kepala Satuan Pengawasan Intern (18 Oktober 2021)
Head of Internal Audit Unit (October 18, 2021)

Kewarganegaraan / Citizenship

Warga Negara Indonesia / Indonesian Citizens

Domisili / Domicile

Jakarta

Usia / Age

55 tahun per Desember 2021. / 55 years as of December 2021.

Riwayat Pendidikan

Lulus dengan gelar S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Airlangga.

Pengalaman Kerja

Sebelum menjadi Kepala Satuan Pengawas Intern, beliau pernah menjabat sebagai Auditor Ahli di BPKP (Januari 1998–Januari 2009), dan melanjutkan kariernya di PT PNM (Persero) sebagai Kepala Urusan Satuan Pengawas Internal (2009), Kepala Divisi Accounting, Controllor, dan Corporate Planning (2009–2010), Kepala Divisi Accounting dan Operasi (2010–2011), Pemimpin Cabang Yogyakarta (2011–2013), Pemimpin Cabang Tasikmalaya (2013), Pemimpin Cabang Pontianak (2013–2015), Pemimpin Cabang Pontianak dan Koordinator Cabang Pontianak dan Sintang (2015–2017), Pemimpin Cabang Banjarmasin (2017–2018), dan Kepala Divisi Pembinaan dan Pengawasan ULaMM (Oktober–Desember 2018).

Dasar Hukum Pengangkatan

Beliau diangkat sebagai Kepala Satuan Pengawas Intern sejak 4 Januari 2019, berdasarkan Surat No. SK-0137/PNM/DIR/I/19.

Kepemilikan Saham PNM

-

Educational Background

Graduated with a Bachelor of Accounting degree, Faculty of Economics, Airlangga University.

Work Experience

Prior to becoming Head of the Internal Supervisory Unit, he served as Expert Auditor at BPKP (January 1998-January 2009), and continued his career at PT PNM (Persero) as Head of Internal Supervision Unit (2009), Head of the Accounting, Controllor, and Corporate Division. Planning (2009–2010), Head of Accounting and Operations Division (2010–2011), Yogyakarta Branch Leader (2011–2013), Tasikmalaya Branch Manager (2013), Pontianak Branch Manager (2013–2015), Pontianak Branch Manager and Pontianak Branch Coordinator and Sintang (2015–2017), Banjarmasin Branch Manager (2017–2018), and Head of the Development and Supervision Division of ULaMM (October–December 2018).

Legal Basis of Appointment

He was appointed as Head of Internal Audit since January 4, 2019, based on Letter No. SK-0137/ PNM/DIR/I/19.

PNM Share Ownership

-



LALU DODOT PATRIA ARY SUPRIANTO

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Kewarganegaraan / Citizenship

Warga Negara Indonesia / Indonesian Citizens

Domisili / Domicile

Jakarta

Usia / Age

49 tahun per Desember 2021. / 49 years as of December 2021.

Riwayat Pendidikan

Beliau telah meraih gelar S1 Ekonomi Manajemen dari Universitas Mataram (1995), kemudian meraih gelar S2 Pemasaran dari Unika Atmajaya Jakarta (2003).

Pengalaman Kerja

Sebelum menjadi Sekretaris Perusahaan, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Cabang PNM Pekanbaru (2011-2012), PIC Kadiv Kredit Program/LKMS PNM Kantor Pusat (2012-2013), Komisaris BPR Rizky Barokah (2012-2013), Pemimpin Cabang PNM Padang (2013-2014), Komisaris BPRS Ampek Angkek Candung Bukit Tinggi, Pemimpin Cabang PNM Jember (2014-2015), Pemimpin Cabang PNM Madiun (2015-2016), Kadiv PPM II PNM Kantor Pusat 2016-2017 dan Direktur Utama PT. MMI (2017-2021).

Dasar Hukum Pengangkatan

Beliau diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak tanggal 16 Juli 2021 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK-0013/PNM/DIR/VII/2021.

Kepemilikan Saham PNM

-

Educational Background

He has earned a Bachelor's degree in Management Economics from the University of Mataram (1995), then earned a Master's degree in Marketing from Atmajaya University, Jakarta (2003).

Work Experience

Prior to becoming the Corporate Secretary, he served as Branch Manager of PNM Pekanbaru (2011-2012), PIC of Head of Credit Program Division/LKMS PNM Head Office (2012-2013), Commissioner of BPR Rizky Barokah (2012-2013), Branch Manager of PNM Padang (2013-2014), Commissioner of BPRS Ampek Angkek Candung Bukit Tinggi, Branch Manager of PNM Jember (2014-2015), Branch Manager of PNM Madiun (2015-2016), Head of PPM II PNM Head Office 2016-2017 and President Director of PT. MMI (2017-2021).

Legal Basis of Appointment

He was appointed as Corporate Secretary since July 16, 2021 based on the Decree of the Board of Directors Number SK-0013/PNM/DIR/VII/2021.

PNM Share Ownership

-



ERRINTO PARDELE

Sekretaris Perusahaan (berhenti menjabat sejak 15 Juli 2021).
Corporate Secretary (retired since July 15, 2021).

Kewarganegaraan / Citizenship

Warga Negara Indonesia / Indonesian Citizens

Domisili / Domicile

Jakarta

Usia / Age

48 tahun per Desember 2021. / 48 years as of December 2021.

Riwayat Pendidikan

Beliau telah meraih gelar Bachelor of Science in Business Administration dari Northeastern University, Boston, Amerika Serikat pada tahun 1995, kemudian meraih gelar Master of Business Administration dari Northeastern University, Boston, Amerika Serikat pada tahun 1996.

Pengalaman Kerja

Sebelum menjadi Sekretaris Perusahaan, beliau pernah menjabat sebagai Head of Investor Relations di PT Bank Mandiri (Persero) (2005-2011) dan Direktur Corporate Secretary di PT Delta Dunia Makmur Tbk (2013-2017).

Dasar Hukum Pengangkatan

Beliau diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak tanggal 27 April 2017 berdasarkan Surat Nomor No. S-520/PNM-DIRUT/SDM/IV/2017.

Kepemilikan Saham PNM

-

Educational Background

He has earned a Bachelor of Science in Business Administration from Northeastern University, Boston, United States in 1995, then earned a Master of Business Administration from Northeastern University, Boston, United States in 1996.

Work Experience

Prior to becoming Corporate Secretary, he served as Head of Investor Relations at PT Bank Mandiri (Persero) (2005-2011) and Director of Corporate Secretary at PT Delta Dunia Makmur Tbk (2013-2017).

Legal Basis of Appointment

He was appointed as the Corporate Secretary since April 27, 2017 based on Letter No. S-520/PNMDIRUT/SDM/IV/2017.

PNM Share Ownership

-

Profil dan Pengembangan Kompetensi Pegawai

Employee Profile and Competency Development

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Number of Employees by Gender

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Table of Number of Employees by Gender

(dalam satuan orang/in person units)

Jenis Kelamin	2021	2020	Gender
Pria	6.502	5.866	Male
Wanita	51.362	43.296	Female
Jumlah	57.864	49.162	Total

Jumlah Pegawai Berdasarkan Level Organisasi

Number of Employees by Organization Level

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Level Organisasi

Table of Number of Employees by Organization Level

(dalam satuan orang/in person units)

Level Organisasi	2021			2020			Organization Level
	Pria Male	Wanita Female	Total	Pria Male	Wanita Female	Total	
Komisaris	3	2	5	3	2	5	Commissioner
Direktur	5	0	5	5	0	5	Director
Manajemen Puncak	21	4	25	26	3	29	Top Management
Manajemen Menengah	247	139	386	234	137	371	Middle Management
Manajemen Pelaksana	1.871	3.893	5.764	1.790	3.454	5.244	Executive Management
Staf	2.606	801	3.407	2.684	724	3.408	Staff
Alih Daya	1.006	46.458	47.464	404	38.907	39.311	Outsourcing
Non-staf	743	65	808	720	69	789	Non-Staff
Jumlah	6.502	51.362	57.864	5.866	43.296	49.162	Total

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Number of Employees by Education Level

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Table of Number of Employees by Education Level

(dalam satuan orang/in person units)

Tingkat Pendidikan	2021			2020			Education Level
	Pria Male	Wanita Female	Total	Pria Male	Wanita Female	Total	
S3	1	1	2	3	1	4	S3
S2	80	33	113	70	26	96	S2
S1	3.277	2.750	6.027	3.188	2.024	5.212	S1
Diploma	626	752	1.378	618	672	1.290	Diploma
SMA dan Sederajat	2.518	47.826	50.344	1.987	40.573	42.560	High School and Equivalent
Jumlah	6.502	51.362	57.864	5.866	43.296	49.162	Total

Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Number of Employees by Employment Status

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Table of Number of Employees by Employment Status

(dalam satuan orang/in person units)

Status Kepegawaian	2021			2020			Employment Status
	Pria Male	Wanita Female	Total	Pria Male	Wanita Female	Total	
Karyawan Tetap	2.607	1.234	3.841	2.624	1.059	3.683	Permanent Employees
Karyawan Kontak	2.148	3.605	5.753	2.120	3.261	5.381	Contact Employees
Karyawan Alih Daya	1.747	46.523	48.270	1.122	38.976	40.098	Outsourced Employees
Jumlah	6.502	51.362	57.864	5.866	43.296	49.162	Total

Jumlah Pegawai Berdasarkan Rentang Usia

Number of Employees by Age Range

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Rentang Usia

Table of Number of Employees by Age Range

(dalam satuan orang/in person units)

Rentang Usia	2020			2019			Age Range
	Pria Male	Wanita Female	Total	Pria Male	Wanita Female	Total	
18-25 tahun	1.187	48.669	49.856	653	41.136	41.789	18-25 years
26-33 tahun	2.338	2.158	4.496	2.399	1.709	4.108	26-33 years
34-41 tahun	2.098	415	2.513	2.085	337	2.422	34-41 years
42-49 tahun	746	97	843	616	96	712	42-49 years
> 50 tahun	133	23	156	113	18	131	> 50 years
Jumlah	6.502	51.362	57.864	5.866	43.296	49.162	Total

Pengembangan Kompetensi Pegawai

Employee Competency Development

Kebijakan

PNM senantiasa mengedepankan pembelajaran berkesinambungan kepada semua karyawan karena Perusahaan percaya bahwa pengembangan kompetensi akan berdampak positif terhadap pertumbuhan bisnis. PNM memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan untuk mendapatkan kesempatan mengikuti program pengembangan kompetensi yang diadakan Perusahaan. Sejalan dengan prinsip tersebut, Perusahaan mengimplementasikan program pengembangan kompetensi karyawan secara intensif dan berkesinambungan.

Policy

PNM always prioritizes continuous learning for all employees because the Company believes that competency development will have a positive impact on business growth. PNM provides opportunities for all employees to have the opportunity to participate in competency development programs held by the Company. In line with these principles, the Company implements employee competency development programs intensively and continuously.

Pengembangan SDM di PNM dilakukan secara terstruktur dan terprogram dengan memetakan kondisi dan kebutuhan SDM. Melalui program pelatihan serta pengembangan karyawan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, Perusahaan mampu menjaga kualitas kinerja yang semakin bertumbuh. Hingga saat ini, Perseroan rutin mendorong peningkatan kompetensi teknis maupun non-teknis SDM.

HR development at PNM was carried out in a structured and programmed manner by mapping the conditions and needs of human resources. Through training programs and employee development, both internal and external, the Company was able to maintain a growing quality of performance. Until now, the Company routinely encouraged the improvement of technical and non-technical HR competencies.

Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan

Competency Development Based on Position Level

Tabel Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan Tahun 2021
Table of Competency Development by Position Level in 2021

No.	Level Jabatan Job Level	Jenis Pelatihan Type of Training	Tujuan Pelatihan Training Objectives	Jumlah Pegawai Number of Employees	Jumlah Pegawai yang telah mengikuti pelatihan Number of employees attended training	Persentase yang telah mengikuti pelatihan untuk setiap level jabatan Percentage who have attended training for each level of position	Persentase yang telah mengikuti pelatihan untuk setiap jenis pelatihan Percentage who have attended training for each type of training
1	DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i>	<i>Strategic Business Management Sustainable</i>	Menyusun strategi dengan lebih baik dan lebih sesuai dengan keadaan, dan dapat melakukan perbaikan di perusahaan, agar dapat menjadi perusahaan yang berumur panjang dengan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan <i>Develop a strategy that is better and more in line with the situation, and can make improvements in the company, so that it can become a long-lived company with sustainable economic activities.</i>	5	5	100%	100%
2	EXECUTIVE VICE PRESIDENT	-	-	-	-	-	-
3	KEPALA DIVISI <i>HEAD OF DIVISION</i>	<i>Business Impact Leadership</i>	Menginformasikan dan menjalankan keputusan manajemen untuk masing-masing fungsi bisnis <i>Inform and execute management decisions for each business function.</i>	19	19	100%	100%
4	WAKIL KEPALA DIVISI <i>VICE CHAIRMAN OF DIVISION</i>	<i>Business Impact Leadership</i>	Menginformasikan dan menjalankan keputusan manajemen untuk masing-masing fungsi bisnis. <i>Inform and execute management decisions for each business function.</i>	17	17	100%	100%
5	PEMIMPIN CABANG <i>BRANCH LEADERS</i>	<i>Transformational Leadership & Managerial Skill</i>	Membekali para peserta dengan sejumlah skill untuk membimbing diri sendiri agar mampu menjadi role model dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin. <i>Equipping participants with a number of skills to guide themselves to be able to become role models in carrying out their roles as leaders.</i>	62	62	100%	100%

No.	Level Jabatan Job Level	Jenis Pelatihan Type of Training	Tujuan Pelatihan Training Objectives	Jumlah Pegawai Number of Employees	Jumlah Pegawai yang telah mengikuti pelatihan Number of employees attended training	Persentase yang telah mengikuti pelatihan untuk setiap level jabatan Percentage who have attended training for each level of position	Persentase yang telah mengikuti pelatihan untuk setiap jenis pelatihan Percentage who have attended training for each type of training
6	WAKIL PEMIMPIN CABANG VICE BRANCH LEADERS	Transformational Leadership & Managerial Skill	Membekali para peserta dengan sejumlah skill untuk membimbing diri sendiri agar mampu menjadi role model dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin. <i>Equipping participants with a number of skills to guide themselves to be able to become role models in carrying out their roles as leaders.</i>	17	17	100%	100%
7	KEPALA BAGIAN HEAD OF DIVISION	Transformational Leadership & Managerial Skill	Membekali para peserta dengan sejumlah skill untuk membimbing diri sendiri agar mampu menjadi role model dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin. <i>Equipping participants with a number of skills to guide themselves to be able to become role models in carrying out their roles as leaders.</i>	74	74	100%	100%
8	SPECIALIST/SR SPECIALIST	Advanced Technical & Softskill	Mengembangkan keterampilan dalam manajemen manusia, pekerjaan dan mutu. Merumuskan rencana kerja yang bersifat strategis, sekaligus menjabarkannya untuk mencapai target perusahaan. <i>Develop skills in people, employment and quality management. Formulate a strategic work plan, as well as describe it to achieve company targets.</i>	16	16	100%	100%
9	OFFICER/SR OFFICER	Advanced Technical & Softskill	Berfokus pada pengembangan SDM atau kemampuan mengelola manusia, seperti managerial skill, communication skill, leadership, networking, atau personal development. <i>Focusing on human resource development or human management skills, such as managerial skills, communication skills, leadership, networking, or personal development.</i>	556	556	100%	100%
10	STAF STAFF	Fundamental Basic Technical Skill	Membekali peserta dengan kesiapan mengembangkan kemampuan dan keterampilan melalui pembedahan dalam dirinya. <i>Equipping participants with readiness to develop abilities and skills through internal improvements</i>	3.407	3.407	100%	100%
JUMLAH / TOTAL				4.173	4.173	100%	

Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Selama tahun 2021 PNM selalu melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengembangan kompetensi melalui pengikutsertaan karyawan PNM dalam program pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 sesuai dengan rencana kebutuhan pengembangan kompetensi SDM. Evaluasi pelaksanaan pelatihan dilakukan untuk mengukur materi, *trainer*, infrastruktur serta *learning growth*, juga dilakukan evaluasi dampak pasca pelatihan 3-6 bulan setelah karyawan mengikuti pelatihan.

Pencapaian *monitoring* dan evaluasi yang diperoleh memberikan manfaat berupa masukan dan rekomendasi untuk mendukung pengembangan karyawan berbasis kompetensi di pengembangan SDM selanjutnya. Implementasi kegiatan pelatihan dan pengembangan yang telah diselenggarakan oleh Perseroan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kegiatan pelatihan pengembangan SDM yang telah diselenggarakan sepanjang tahun 2021 sebanyak 1.726 dengan metode *blended learning* (*online* dan *offline*).
2. Persentase pencapaian jam pembelajaran karyawan selama tahun 2021 dimasa pandemi COVID-19 61% didapat dari *Online Learning* dan *in class* 39%, dengan rata-rata jam pembelajaran karyawan sejumlah 28 jam.

Biaya Pengembangan Kompetensi

Untuk tahun 2021 biaya pengembangan lebih besar dibandingkan dengan tahun 2020 karena metode pelatihan *in class* mulai kembali dilaksanakan. Pelaksanaan program pembelajaran berjalan secara optimal dan pencapaian rata-rata jam pembelajaran per karyawan sebesar ±28 jam atau 350% dari target 8 Jam pembelajaran per karyawan untuk tahun 2021.

Evaluation of Competency Development Implementation

During 2021 PNM always evaluated the implementation of human resource development. This was done to determine the extent of competency development through the participation of PNM employees in the education and training programs that had been implemented in 2021 in accordance with the planned HR competency development needs. Evaluation of training implementation was carried out to measure material, *trainers*, infrastructure and *learning growth*, and impact evaluation was also carried out after training 3-6 (six) months after employees participate in training.

The monitoring and evaluation achievements obtained provide benefits in the form of input and recommendations to support competency-based employee development in further HR development. The implementation of training and development activities that had been held by the Company could be concluded as follows:

1. There were 1,726 HR development training activities held throughout 2021 using the *blended learning* method (*online* and *offline*).
2. The percentage of employee learning hours achieved during 2021 during the COVID-19 pandemic was 61% was obtained from *Online Learning* and *Inclass* 39%, with average employee learning hours of 28 hours.

Competency Development Costs

For 2021 the development costs are higher than in 2020 because the *in-class* training method is starting to be implemented again. The implementation of the learning program runs optimally, and the average achievement of employee learning hours is ±28 hours or 350% of the target of 8 learning hours per employee for 2021.

Tabel Biaya Pengembangan Kompetensi Pegawai
Table of Employee Competency Development Costs

(dalam Jutaan Rupiah/in Million Rupiah)

2021	2020	2019
18.459	18.191	23.966

Komposisi Pemegang Saham

Composition of Shareholders

Tabel Komposisi Pemegang Saham PNM per 1 Januari 2021
Table of Composition of PNM Shareholders as of January 1, 2021

Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham (Lembar) Number of Shares (Sheets)	Kepemilikan Saham (%) Share Ownership (%)	Total (Rp)
Pemerintah Republik Indonesia Government of the Republic of Indonesia	2.300.000	100	2.300.000.000.000

Pada tanggal 21 September 2021, PNM resmi tergabung dalam Holding Ultra Mikro. Perusahaan mengubah anggaran dasarnya yang telah disahkan dalam Akta Notarial No. 26 tanggal 21 September 2021. Akta tersebut telah disahkan dalam Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 59 Tanggal 28 Oktober 2021. Adapun perubahan tersebut mengubah struktur pemegang saham dan struktur modal perusahaan, terdapat pengalihan seluruh saham seri B yang sebelumnya milik Negara Republik Indonesia, dalam rangka penyertaan modal kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Perubahan pemegang saham PNM sebagai berikut:

On September 21, 2021, PNM officially joined the Ultra Micro Holding. The company amended its articles of association ratified in Notarial Deed. 26 dated September 21, 2021. The deed had been ratified in the Deed of Affirmation of the Shareholders' Decision Statement No. 59 October 28, 2021. As for the changes that change the shareholder structure and capital structure of the company, there was transfer of all series B shares which were previously owned by the Republic of Indonesia, in the context of equity participation in PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Changes in PNM shareholders are as follows:

Tabel Komposisi Pemegang Saham PNM per 31 Desember 2021
Table of PNM Shareholder Composition as of December 31, 2021

Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham (Lembar) Number of Shares (Sheets)	Kepemilikan Saham (%) Share Ownership (%)	Total (Rp)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.799.999	99,99	3.799.999.000.000
Pemerintah Republik Indonesia Government of the Republic of Indonesia	1	0,01	1.000.000.000

Per 1 Januari 2021, tidak terdapat kepemilikan saham institusi asing, kepemilikan saham institusi lokal, kepemilikan saham individu asing dan kepemilikan saham individu lokal yang menjadi pemegang saham PNM. Per 31 Desember 2021, kepemilikan saham institusi lokal yang menjadi pemegang saham PNM yaitu BRI dan tidak terdapat kepemilikan saham institusi asing, kepemilikan saham individu lokal, serta kepemilikan saham individu asing.

As of January 1, 2021, there are no foreign institutional shareholdings, local institutional shareholdings, foreign individual shareholdings and local individual shareholdings that are PNM shareholders. As of December 31, 2021, the share ownership of local institutions that are PNM shareholders is BRI and there is no foreign institutional share ownership, local individual share ownership, and foreign individual share ownership.

Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar

Per 31 Desember 2021, PT Permodalan Nasional Madani mayoritas sahamnya 99,99% dimiliki oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai komposisi 20 pemegang saham terbesar.

Composition of the 20 Biggest Shareholders

As of January 1, 2021 and December 31, 2021, PT Permodalan Nasional Madani was 99.99% majority owned by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Thus, there is no information regarding the composition of the 20 largest shareholders.

Komposisi Pemegang Saham 5% atau Lebih

Per 1 Januari 2021 dan 31 Desember 2021, PT Permodalan Nasional Madani mayoritas sahamnya 99,99% dimiliki oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Informasi mengenai komposisi pemegang saham 5% atau lebih Perusahaan telah dijelaskan pada uraian komposisi pemegang saham.

Composition Of Shareholders 5% or More

As of January 1, 2021 and December 31, 2021, PT Permodalan Nasional Madani was 99.99% majority owned by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Information regarding the composition of shareholders of 5% or more of the Company has been explained in the description of the composition of shareholders.

Komposisi Pemegang Saham Masyarakat Kurang dari 5%

Per 1 Januari 2021 dan 31 Desember 2021, PT Permodalan Nasional Madani belum menjadi perusahaan yang mencatatkan sahamnya di bursa saham. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai komposisi pemegang saham masyarakat kurang dari 5% atau lebih.

Community Shareholders Composition Less than 5%

As of January 1, 2021 and December 31, 2021, PT Permodalan Nasional Madani has not yet become a company that has listed its shares on the stock exchange. Thus, there is no information regarding the composition of public shareholders of less than 5% or more.

Kepemilikan Saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Per 1 Januari 2021 dan 31 Desember 2021, tidak terdapat kepemilikan saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada PT Permodalan Nasional Madani baik secara langsung maupun tidak langsung.

Share Ownership by the Board of Commissioners and Board of Directors

As of January 1, 2021 and December 31, 2021, there is no direct or indirect share ownership by the Board of Commissioners and Directors in PT Permodalan Nasional Madani.

Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Main Shareholders and Controlling

Kepemilikan saham mayoritas PNM dimiliki oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan kepemilikan saham sebesar 99,99%. Dengan demikian, Pemegang Saham Utama dan Pengendali PNM adalah Pemerintah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tidak terdapat Pemegang Saham Utama dan Pengendali secara tidak langsung, sampai kepada pemilik individu serta tidak terdapat Pemegang Saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain.

The majority shareholding of PNM is owned by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk with share ownership of 99.99%. Thus, the Main and Controlling Shareholder of PNM is the Government of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. There are no Major and Controlling Shareholders indirectly to individual owners, and no Shareholders are acting on behalf of other shareholders.



Daftar Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi dan Perusahaan Ventura Bersama

List of Subsidiaries, Entities Companies and Joint Venture Companies

Entitas Anak

PT PNM Investment Management



Bidang Usaha

Line of Business

Manajer Investasi / *Investment Manager*



Tanggal Pendirian

Date of Establishment

7 Mei 1996 / *May 7, 1996*



Jumlah Aset

Total Assets

Rp3.100,50 miliar / *billion*



Status Beroperasi

Operating Status

Beroperasi / *Operate*

PT PNM Investment Management, berdiri dan beroperasi pada tanggal 7 Mei 1996 di Jakarta. Menjalankan bisnis utama berupa manajemen investasi, terutama reksadana dan dana kelolaan lainnya, dalam bentuk Kontrak Pengelolaan Dana (Discretionary Fund), penasihat bisnis dan keuangan korporasi, baik swasta maupun BUMN, yang didukung dengan sosialisasi mengenai manfaat reksadana bagi masyarakat dan jasa pengelolaan Kontrak Pengelolaan Dana.

Subsidiaries

PT PNM Investment Management



Kepemilikan

Ownership

99,99%



Alamat Kantor Pusat

Head Office Address

Menara PNM

JL Kuningan Mulia No. 9F RT 004 RW 010,

Kuningan Center Lot 1 (Kav 1), Kel. Karet, Kec. Setia Budi -

Jakarta Selatan 12920

Telp : (021) 2511395

Faks : (021) 2511385

Web : www.pnmim.com

PT PNM Investment Management was established and operated on May 7, 1996 in Jakarta. It run the main business in the form of investment management, especially mutual funds and other managed funds, in the form of a Discretionary Fund, business advisory and corporate finance, both private and state-owned enterprises, supported by socialization of the benefits of mutual funds for the community and Fund Management Contract management services.

PT PNM Venture Capital



Bidang Usaha

Line of Business

Modal Ventura / *Venture Capital*



Tanggal Pendirian

Date of Establishment

28 Oktober 1999 / *October 28, 1999*



Jumlah Aset

Total Assets

Rp277,50 miliar / *billion*



Status Beroperasi

Operating Status

Beroperasi / *Operate*

PT PNM Venture Capital



Kepemilikan

Ownership

99,99%



Alamat Kantor Pusat

Head Office Address

Menara PNM

JL Kuningan Mulia No. 9F RT 004 RW 010,

Kuningan Center Lot 1 (Kav 1), Kel. Karet, Kec. Setia Budi -

Jakarta Selatan 12920

Telp : (021) 2511545

Faks : (021) 2511546

Email : pnmventurecapital@pnmvc.co.id

Web : www.pnm.co.id

PT PNM Venture Capital, berdiri dan beroperasi pada tanggal 28 Oktober 1999. Menjalankan kegiatan usaha modal ventura melalui penyertaan modal dan pembiayaan kepada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU). Pembiayaan yang dilakukan PNM VC dalam memberikan dukungan permodalan langsung kepada pengusaha (baik perorangan maupun badan hukum) dalam skala UKMK adalah pembiayaan Modal Kerja dan Investasi. Instrumen pembiayaan yang akan dipakai adalah dalam bentuk:

1. Penyertaan Saham (*Equity Participation*).
2. Penyertaan melalui pembelian Obligasi Konversi (*Quasi Equity Participation*).
3. Pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal (*startup*) dan/atau pengembangan usaha.
4. Pembiayaan Usaha Produktif.

Perusahaan Asosiasi

Per 31 Desember 2021, PNM tidak memiliki perusahaan Asosiasi sehingga tidak tersedia informasi mengenai: nama Entitas Asosiasi; Persentase kepemilikan saham; Keterangan tentang bidang usaha entitas asosiasi; dan Keterangan status operasi entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).

PT PNM Venture Capital was established and operated on October 28, 1999. It carried out venture capital business activities through equity participation and financing to a Business Partner Company (PPU). The financing carried out by PNM VC in providing direct capital support to entrepreneurs (both individuals and legal entities) on the UKMK scale was working capital and investment financing. The financing instruments that will be used are in the form of:

1. *Equity Participation.*
2. *Participation through the purchase of Convertible Bonds (Quasi Equity Participation).*
3. *Financing through the purchase of debt securities issued by a business partner at the startup stage and/or business development.*
4. *Productive Business Financing.*

Subsidiaries Associatons

As of December 31, 2021, PNM did not have an associated entity, so there is no information available regarding: name of the associated entity; Share ownership percentage; Information regarding the line of business of the associated entity; and Description of the operating status of the associate (already operating or not yet operational).

Entitas Cucu

Grand Entity

Nama Name	Kegiatan Usaha Business Activities	Kepemilikan Saham Shareholding	Tahun Pendirian Year of Establishment
PT Mitra Utama Madani	Jasa Alih Daya <i>Outsourcing Services</i>	Dimiliki PNM VC sebesar 90,000% <i>Owned by PNM VC by 90,000%</i>	2008
PT Mitra Dagang Madani	Perdagangan dan Jasa <i>Trade and Services</i>	Dimiliki PNM VC sebesar 99,96% <i>Owned by PNM VC by 99.96%</i>	2016
PT Mitra Bisnis Madani	Persewaan dan Perdagangan <i>Rental and Trading</i>	Dimiliki PNM VC sebesar 99,897% <i>Owned by PNM VC by 99.897%</i>	2015
PT PNM Ventura Syariah	Modal Ventura Syariah dan Jasa Manajemen <i>Sharia Venture Capital and Management Services</i>	Dimiliki PNM VC sebesar 99,998% <i>Owned by PNM VC 99.998%</i>	2000
PT Mitra Tekno Madani	Jasa Manajemen IT <i>IT Management Services</i>	Dimiliki PNM VC sebesar 98,966% <i>Owned by PNM VC by 98.966%</i>	2012
PT Mitra Proteksi Madani	Jasa Pialang Asuransi <i>Insurance Broker Services</i>	Dimiliki PNM VC sebesar 90,000% <i>Owned by PNM VC by 90,000%</i>	2014
PT Micro Madani Institute	Jasa Konsultasi Manajemen <i>Management Consulting Services</i>	Dimiliki PNM VC sebesar 94,44% <i>Owned by PNM VC by 94.44%</i>	2015
PT Mitra Niaga Madani	Persewaan dan Perdagangan <i>Rental and Trading</i>	Dimiliki PNM VC sebesar 99,953% <i>Owned by PNM VC by 99.953%</i>	2010
PT Crom Madani Indonesia (CMI)	Perdagangan <i>Trading</i>	Dimiliki PNM VC sebesar 100% <i>100% owned by PNM VC</i>	2021
PT Karya Digital Madani (KDM)	Perdagangan dan Jasa <i>Trade and Services</i>	Dimiliki PNM VC sebesar 34,64% <i>Owned by PNM VC by 34.64%</i>	2021
KEPEMILIKAN TIDAK LANGSUNG MELALUI ENTITAS ANAK INDIRECT OWNERSHIP THROUGH SUBSIDIARIES			
PT BPR Rizky Barokah (RB)	Bank Perkreditan Rakyat <i>Rural Banks</i>	Dimiliki PNM VC sebesar 91,58% <i>Owned by PNM VC by 91.58%</i>	2008
PT BPRS Patuh Beramal (PB)	Bank Perkreditan Rakyat Syariah <i>Sharia Rural Bank</i>	Dimiliki PNM VC sebesar 76,37% <i>Owned by PNM VC by 76.37%</i>	2000
PT BPRS PNM Mentari (PM)	Bank Perkreditan Rakyat Syariah <i>Sharia Rural Bank</i>	Dimiliki PNM VC sebesar 64,66% <i>Owned by PNM VC by 64.66%</i>	2000
PT BPRS Haji Miskin (HM)	Bank Perkreditan Rakyat Syariah <i>Sharia Rural Bank</i>	Dimiliki PNM VC sebesar 51,59% <i>Owned by PNM VC by 51.59%</i>	2008

Perusahaan Asosiasi

Per 31 Desember 2021, PNM tidak memiliki perusahaan Asosiasi sehingga tidak tersedia informasi mengenai: nama Entitas Asosiasi; Persentase kepemilikan saham; Keterangan tentang bidang usaha entitas asosiasi; dan Keterangan status operasi entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).

Subsidiaries Associatons

As of December 31, 2021, PNM did not have an associated entity, so there is no information available regarding: name of the associated entity; Share ownership percentage; Information regarding the line of business of the associated entity; and Description of the operating status of the associate (already operating or not yet operational).

Status Operasi Operation Status	Jumlah Aset Total assets (Rp)	Alamat Address	Telp./Fax/ Situs Web Tel./Fax/ Website
Beroperasi Operate	31.983.394.214	Menara Taspen Lantai 1, Jl. Jendral Sudirman Kav. 2, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220	Telp : (021) 2511427, Fax : (021) 2511427 Email : info@mum.id
Beroperasi Operate	25.564.468.924	Menara Taspen Lantai 15, Jl. Jendral Sudirman Kav. 2, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220	Telp: (021) 2511383
Beroperasi Operate	466.190.345.571	Menara Taspen Lantai 15, Jl. Jendral Sudirman Kav. 2, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220	Telp : (021) 2511305, 2511378 Web : mbmrent.co.id Email : office@mbmrent.co.id
Beroperasi Operate	729.920.524.944	Menara Taspen Lantai 1, Jl. Jendral Sudirman Kav. 2, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220	Telp : (021) 57939142/43 Fax : (021) 2512435 Web : www.pnmventurasyariah.co.id
Beroperasi Operate	88.479.279.472	Menara Taspen Lantai 15, Jl. Jendral Sudirman Kav. 2, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220	Telp : (021) 57939147 Web : www.mtm.co.id
Beroperasi Operate	88.747.175.147	Menara Taspen Lantai 15-16, Jl. Jendral Sudirman Kav. 2, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220	Telp/Fax : (021) 57939162 Web : http://www.pnm-mpm.id/ sites/site/ eng
Beroperasi Operate	182.132.021.757	Menara Taspen Lantai 5, Jl. Jendral Sudirman Kav. 2, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220	Telp : (021) 2512485/86 Web : www.micromadaniinstitute.com
Beroperasi Operate	1.041.535.122.407	Menara Taspen Lantai 15, Jl. Jendral Sudirman Kav. 2, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220	Telp: (021) 57939144/45
Beroperasi Operate	19.144.155	Menara PNM, Kuningan Center, Jl. Kuningan Mulia, Karet Kuningan - Setiabudi , Jakarta Selatan12940, Indonesia	Telp: (021) 2511404
Beroperasi Operate	10.000.000.000	Menara PNM, Kuningan Center, Jl. Kuningan Mulia, Karet Kuningan - Setiabudi , Jakarta Selatan12940, Indonesia	Telp: (021) 2511404
Beroperasi Operate	57.062.339.071	Jl. Kasuari Blok HB I No. 3, Bintaro Utama Sektor IX-Tangerang Selatan	Telp: (021) 7457667
Beroperasi Operate	82.399.751.448	Jl. Sandubaya Blok U No. 35 Komplek Pertokoan Bertais Cakranegara, Mataram 83236	Telp: (0370) 673608
Beroperasi Operate	119.456.639.555	Jl. Merdeka No. 54, Garut, Jawa Barat	Telp: (0262) 232147
Beroperasi Operate	67.308.821.271	Jl. Raya Padang Panjang, Bukit Tinggi KM 10 Simpang Koto Tinggi, Nagari Pandai Sikek Kec. X Koto Kab. Tanah Datar, Bukit Tinggi Sumatera Barat	Telp: (0752) 498222

Perusahaan Ventura Bersama

Per 31 Desember 2021, PNM tidak memiliki perusahaan ventura bersama.

Joint Venture Company

As of December 31, 2021, PNM does not have a joint venture company.

Struktur Grup Perusahaan

Company Group Structure



Per 31 Desember 2021, PNM tidak memiliki Entitas Asosiasi, Joint Venture dan Special Purpose Vehicle (SPV).

As of December 31, 2021, PNM does not have Associated Entities, Joint Ventures and Special Purpose Vehicles (SPV).

Kronologi Penerbitan Saham

Stock Issuance Chronology

Per September 2021 saham mayoritas PT Permodalan Nasional Madani (Persero) 99,99% dimiliki oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang sebelumnya seluruh saham perusahaan dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp3.800.000.000.000 dengan total saham sebanyak 3.800.000 saham.

As of September 2021, the majority shares of PT Permodalan Nasional Madani (Persero) were 99.99% owned by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, previously all of the company's shares were owned by the Government of the Republic of Indonesia with the total issued and fully paid shares amounting to IDR3,800,000,000,000 with a total of 3,800,000 shares.

Kronologis penerbitan saham PNM dapat dijelaskan sebagai berikut:

The chronology of the issuance of the PNM shares can be explained as follows:

Tanggal Penerbitan Publication Date	Jumlah Saham / Lembar Number of Shares / Sheet	Nominal / Lembar Nominal / Sheet (Rp/IDR)	Total (Rp/IDR)	Akta Deed
1 Juni 1999 June 1, 1999	300.000	1.000.000	300.000.000.000	Akta Nomor 1 Tahun 1999 Deed Number 1 of 1999
29 Januari 2016 January 29, 2016	1.300.000	1.000.000	1.300.000.000.000	Akta Nomor 23 Tahun 2016 Deed Number 23 of 2016
20 November 2020 November 20, 2020	2.300.000	1.000.000	2.300.000.000.000	Akta Nomor 28 Tahun 2020 Deed Number 28 of 2020
12 Januari 2021 January 12, 2021	1.500.000	1.000.000	3.800.000.000.000	Akta Nomor 12 Tahun 2021 Deed Number 12 of 2021

Sampai dengan 31 Desember 2021, PNM belum melakukan pencatatan saham di Bursa Efek. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai tindakan korporasi (*corporate action*), harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi, jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi dan nama bursa tempat saham perusahaan dicatatkan.

As of December 31, 2021, PNM did not list its shares on the Stock Exchange. Thus, there was no information regarding corporate actions, the share offering price for each corporate action, the number of shares listed after each corporate action and the name of the stock exchange where the company's shares were listed.

Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Obligasi, Sukuk dan/atau Obligasi Konversi

Chronology of Issuance and/or Listing of Bonds, Sukuk and/or Conversion Bonds

Obligasi

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019

Pada 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I 2019 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 November 2019. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

Seri A Series A	Jumlah pokok sebesar Rp1.401.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per tahun, berjangka waktu 3 tahun. <i>The principal amount is IDR1,401,000,000,000, the interest rate is fixed at 9.50% per annum, with a term of 3 years.</i>
Seri B Series B	Jumlah pokok sebesar Rp599.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,85% per tahun, berjangka waktu 5 tahun. <i>The principal amount is IDR599,000,000,000, the interest rate is fixed at 9.85% per annum, with a term of 5 years.</i>

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan 28 November 2022 untuk Obligasi Seri A dan 28 November 2024 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. RC-1017/PEFDIR/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idA+ (Single A Plus) yang berlaku untuk periode 23 Oktober 2019 sampai dengan 1 Mei 2020.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019 No. 18 tanggal 12 November 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk. Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat adalah:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap Perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;

Bonds

Shelf Registration Bond III PNM Phase I Year 2019

On May 23, 2019, the Company issued PNM Sustainable Bonds III Year 2019 with a principal amount of IDR6,000,000,000,000. The bonds have been declared effective by the Financial Services Authority (OJK) pursuant to Decree Number: S-58/D.04/2019 dated May 23, 2019.

The Company issued and offered PNM Phase I Sustainable Bonds III Year 2019 which were listed on the Indonesia Stock Exchange on November 29, 2019. The Company's bonds consist of:

Interest payments are made every 3 (three) months from February 28, 2020 to November 28, 2022 for Series A Bonds and November 28, 2024 for Series B Bonds.

Pursuant to the rating of long-term debt securities in accordance with Letter Pefindo No.RC-1017/PEFDIR/X/2019 dated October 24, 2019, from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the bonds received idA+ (Single A Plus) rating that applies for the period of October 23, 2019, to May 1, 2020.

Bonds are guaranteed with all the Company's assets, both movable and immovable property, both existing and future ones. The bond issuance was carried out pursuant to PNM Phase II Sustainable Bonds Year 2019 Trustee Agreement No. 18 dated November 12, 2019, which was made before the Notary Public Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. in Jakarta, acting as Trustee is PT Bank Mega Tbk. The restrictions required by the trustee are:

1. Selling or transferring the company's fixed assets to any party exceeding 50% of the value of fixed assets in the current year;

2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian Perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

2. Putting on merger and/or consolidation with other companies, directly or indirectly, and liquidating the Company;
3. Acquiring shares or assets;
4. Changing the Company's business line except on government decision;
5. Terminating company agreements that have a material adverse effect;
6. Reducing authorized capital, issued capital and paidup capital.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019

Pada 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

PNM Phase II Sustainable Bonds III Year 2019

On May 23, 2019, the Company issued PNM Sustainable Bonds III Year 2019 with a principal amount of IDR6,000,000,000,000. The bonds have been declared effective by the Financial Services Authority (OJK) pursuant to Decree Number: S-58/D.04/2019 dated May 23, 2019.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II 2019 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 November 2019. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

The Company issued and offered PNM Phase I Sustainable Bonds III Year 2019 which were listed on the Indonesia Stock Exchange on November 29, 2019. The Company's bonds consist of:

Seri A <i>Series A</i>	Jumlah pokok sebesar Rp586.500.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,40% per tahun, berjangka waktu 3 tahun. <i>The principal amount is IDR586,500,000,000, fixed interest rate is 8.40% per annum, with a term of 3 years.</i>
Seri B <i>Series B</i>	Jumlah pokok sebesar Rp763.500.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, berjangka waktu 5 tahun. <i>The principal amount is IDR763,500,000,000, fixed interest rate of 8.75% per annum, term of 5 years.</i>

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan 28 November 2022 untuk Obligasi Seri A dan 28 November 2024 untuk Obligasi Seri B.

Bond interest payments are made every 3 (three) months from February 28, 2020 until November 28, 2022 for Series A Bonds and November 28, 2024 for Series B Bonds.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. RC-1017/PEFDIR/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idA+ (Single A Plus) yang berlaku untuk periode 23 Oktober 2019 sampai dengan 1 Mei 2020.

Pursuant to the rating of long-term debt securities in accordance with Letter Pefindo No.RC-1017/PEFDIR/X/2019 dated October 24, 2019, from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the bonds received idA+ (Single A Plus) rating that applies for the period of October 23, 2019, to May 1, 2020.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Bonds are guaranteed with all the Company's assets, both movable and immovable property, both existing and future ones.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019 No.18 tanggal 12 November 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

The bond issuance was carried out pursuant to PNM Phase II Sustainable Bonds Year 2019 Trustee Agreement No. 18 dated November 12, 2019, which was made before the Notary Public Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. in Jakarta, acting as Trustee is PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat adalah:

The restrictions required by the trustee are:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap Perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;

1. Selling or transferring the company's fixed assets to any party exceeding 50% of the value of fixed assets in the current year;

2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
 3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
 4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
 5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian Perusahaan yang berdampak negatif secara material;
 6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.
2. *Putting on merger and/or consolidation with other companies, directly or indirectly, and liquidating the Company;*
 3. *Acquiring shares or assets;*
 4. *Changing the Company's business line except on government decision;*
 5. *Terminating company agreements that have a material adverse effect;*
 6. *Reducing authorized capital, issued capital and paid up capital.*

Tabel Kronologi Penerbitan Obligasi PNM
PNM Bond Issuance Chronology Table

Uraian	Tanggal distribusi Obligasi secara Elektronik <i>Electronic Bond distribution date</i>	Tenor <i>Tenor</i>	Mata Uang <i>Currency</i>	Jumlah Obligasi <i>Number of Bonds (Jutaan/Million Rp)</i>	Harga Penawaran <i>Bid Price</i>
Obligasi I	12 Oktober 2012 <i>October 12, 2012</i>	5 Tahun <i>5 Years Old</i>	Rp	500.000	100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi <i>100% (one hundred percent) of the principal amount of the Sukuk</i>
Obligasi II	9 Juli 2013 <i>July 9, 2013</i>	5 Tahun <i>5 Years Old</i>	Rp	1.000.000	100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi <i>100% (one hundred percent) of the principal amount of the Sukuk</i>
Obligasi PUB I Tahap I.A	19 Desember 2014 <i>December 19, 2014</i>	1 Tahun <i>1 Years Old</i>	Rp	67.000	100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi <i>100% (one hundred percent) of the principal amount of the Sukuk</i>
Obligasi PUB I Tahap I.B	19 Desember 2014 <i>December 19, 2014</i>	3 Tahun <i>3 Years Old</i>	Rp	187.000	100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi <i>100% (one hundred percent) of the principal amount of the Sukuk</i>
Obligasi PUB I Tahap I.C	19 Desember 2014 <i>December 19, 2014</i>	5 Tahun <i>5 Years Old</i>	Rp	246.000	100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi <i>100% (one hundred percent) of the principal amount of the Sukuk</i>
Obligasi PUB I Tahap II.A	3 November 2016 <i>November 3, 2016</i>	3 Tahun <i>3 Years Old</i>	Rp	661.000	100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi <i>100% (one hundred percent) of the principal amount of the Sukuk</i>
Obligasi PUB I Tahap II.B	3 November 2016 <i>November 3, 2016</i>	5 Tahun <i>5 Years Old</i>	Rp	839.000	100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi <i>100% (one hundred percent) of the principal amount of the Sukuk</i>
Obligasi PUB II Tahap I.B	12 Juli 2017 <i>July 12, 2017</i>	5 Tahun <i>5 Years Old</i>	Rp	750.000	100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi <i>100% (one hundred percent) of the principal amount of the Sukuk</i>
Obligasi PUB II Tahap II.A	13 April 2018 <i>April 13, 2018</i>	3 Tahun <i>3 Years Old</i>	Rp	1.254.000	100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi <i>100% (one hundred percent) of the principal amount of the Sukuk</i>
Obligasi PUB II Tahap II.B	13 April 2018 <i>April 13, 2018</i>	5 Tahun <i>5 Years Old</i>	Rp	1.246.000	100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi <i>100% (one hundred percent) of the principal amount of the Sukuk</i>

	Tanggal Jatuh Tempo Due Date	Tingkat Suku Bunga Interest	Status Pembayaran Payment Status	Peringkat Ranking			Wali Amanat Trustee	Description
				2021	2020	2019		
	1 Oktober 2017 October 1, 2017	9,10%	Lunas Paid	-	-	idA	Bank Rakyat Indonesia	Bond I
	1 Juli 2018 July 1, 2018	9,20%	Lunas Paid	-	-	idA	Bank Mega	Bond II
	1 November 2015 November 1, 2015	9,80%	Lunas Paid	-	-	idA	Bank Mega	PUB Bonds I Phase I.A
	1 November 2017 November 1, 2017	10,50%	Lunas Paid	-	-	idA	Bank Mega	PUB I Phase I.B Bonds
	19 Desember 2019 December 19, 2019	10,75%	Lunas Paid	-	-	idA	Bank Mega	PUB I Phase I.B Bonds
	1 November 2019 November 1, 2019	9,00%	Lunas Paid	-	-	idA	Bank Mega	PUB Bonds I Phase II.A
	1 November 2021 November 1, 2021	9,50%	Belum Lunas Unpaid	idA+	idA+	idA	Bank Mega	PUB Bonds I Phase II.B
	13 Juli 2022 July 13, 2022	9,00%	Belum Lunas Unpaid	idA+	idA+	idA	Bank Mega	PUB Bonds II Phase I.B
	28 Maret 2021 March 28, 2021	8,00%	Belum Lunas Unpaid	idA+	idA+	idA	Bank Mega	PUB Bonds II Phase II.A
	28 Maret 2023 March 28, 2023	8,50%	Belum Lunas Unpaid	idA+	idA+	idA	Bank Mega	PUB Bonds II Phase II.B

Uraian	Tanggal distribusi Obligasi secara Elektronik Electronic Bond distribution date	Tenor Tenor	Mata Uang Currency	Jumlah Obligasi Number of Bonds (Jutaan/Million Rp)	Harga Penawaran Bid Price
Obligasi PUB III Tahap I.A	29 Mei 2019 May 29, 2019	3 Tahun 3 Years Old	Rp	1.401.000	100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi 100% (one hundred percent) of the principal amount of the Sukuk
Obligasi PUB III Tahap I.B	29 Mei 2019 May 29, 2019	5 Tahun 5 Years Old	Rp	599.000	100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi 100% (one hundred percent) of the principal amount of the Sukuk
Obligasi PUB III Tahap II.A	29 November 2019 November 29, 2019	3 Tahun 3 Years Old	Rp	586.500	100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi 100% (one hundred percent) of the principal amount of the Sukuk
Obligasi PUB III Tahap II.B	29 November 2019 November 29, 2019	5 Tahun 5 Years Old	Rp	763.500	100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi 100% (one hundred percent) of the principal amount of the Sukuk
Obligasi PUB III Tahap III.A	30 April 2020 April 30, 2020	3 Tahun 3 Years Old	Rp	55.100	100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi 100% (one hundred percent) of the principal amount of the Sukuk
Obligasi PUB III Tahap III.B	30 April 2020 April 30, 2020	5 Tahun 5 Years Old	Rp	194.900	100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi 100% (one hundred percent) of the principal amount of the Sukuk
Obligasi PUB III Tahap IV.A	4 Desember 2020 December 4, 2020	1 Tahun 1 Years Old	Rp	904.800	100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi 100% (one hundred percent) of the principal amount of the Sukuk
Obligasi PUB III Tahap IV.B	4 Desember 2020 December 4, 2020	3 Tahun 3 Years Old	Rp	537.000	100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi 100% (one hundred percent) of the principal amount of the Sukuk
Obligasi PUB III Tahap IV.C	4 Desember 2020 December 4, 2020	5 Tahun 5 Years Old	Rp	292.000	100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi 100% (one hundred percent) of the principal amount of the Sukuk

	Tanggal Jatuh Tempo Due Date	Tingkat Suku Bunga Interest	Status Pembayaran Payment Status	Peringkat Ranking			Wali Amanat Trustee	Description
				2021	2020	2019		
	28 Mei 2022 May 28, 2022	9,50%	Belum Lunas Unpaid	idA+	idA+	idA	Bank Mega	PUB Bonds III Phase I.A
	28 Mei 2024 May 28, 2024	9,85%	Belum Lunas Unpaid	idA+	idA+	idA	Bank Mega	PUB Bonds III Stage I.B
	28 November 2022 November 28, 2022	8,40%	Belum Lunas Unpaid	idA+	idA+	idA+	Bank Mega	PUB Bonds III Phase II.A
	28 November 2024 November 28, 2024	8,75%	Belum Lunas Unpaid	idA+	idA+	idA+	Bank Mega	PUB Bonds III Phase II.B
	30 April 2023 April 30, 2023	8,40%	Belum Lunas Unpaid	idA+	idA+	-	Bank Mega	PUB III Phase III.A Bonds
	30 April 2025 April 30, 2025	9,00%	Belum Lunas Unpaid	idA+	idA+	-	Bank Mega	PUB III Phase III.B Bonds
	14 Desember 2021 December 14, 2021	6,50%	Belum Lunas Unpaid	idA+	idA+	-	Bank Mega	PUB III Phase IV.A Bonds
	4 Desember 2023 December 4, 2023	7,75%	Belum Lunas Unpaid	idA+	idA+	-	Bank Mega	PUB III Phase IV.B Bonds
	4 Desember 2025 December 4, 2025	8,75%	Belum Lunas Unpaid	idA+	idA+	-	Bank Mega	PUB III Phase IV.C Bonds

Sukuk Mudharabah

Perusahaan telah menerbitkan beberapa Sukuk Mudharabah antara lain:

1. Sukuk *Mudharabah* III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2019 Seri H pada tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp50.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, nisbah sebesar 3% per tahun dari pendapatan yang dibagikan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2023.
2. Sukuk *Mudharabah* IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2020 Tahap 1 Seri A pada tanggal 27 Oktober 2020 sebesar Rp200.000.000.000 dengan jangka waktu 3 tahun, nisbah sebesar 9,75% per tahun dari pendapatan yang dibagikan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Oktober 2023.
3. Sukuk *Mudharabah* III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2019 Seri F pada tanggal 8 April 2020 sebesar Rp120.000.000.000 dengan jangka waktu 3 tahun, nisbah sebesar 6,69% per tahun dari pendapatan yang dibagikan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2023.
4. Sukuk *Mudharabah* III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2019 Seri C pada tanggal 20 Februari 2020 sebesar Rp322.000.000.000 dengan jangka waktu 3 Tahun, nisbah sebesar 17,94% per tahun dari pendapatan yang dibagikan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2023.
5. Sukuk *Mudharabah* III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2019 Seri E Tahap II pada tanggal 5 Desember 2019 sebesar Rp50.000.000.000 dengan jangka waktu 2 tahun 10 bulan 25 hari, nisbah sebesar 3,00% per tahun dari pendapatan yang dibagikan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2022.
6. Sukuk *Mudharabah* III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) tahun 2019 Seri E pada tanggal 20 November 2019 sebesar Rp100.000.000.000 dengan jangka waktu 2 tahun 11 bulan 10 hari, nisbah sebesar 6,00% per tahun dari pendapatan yang dibagikan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2022.
7. Sukuk *Mudharabah* III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) tahun 2019 Seri D pada tanggal 30 Oktober 2019 sebesar Rp350.000.000.000 dengan jangka waktu 1 tahun 10 bulan 24 hari, nisbah sebesar 20,50% per tahun dari pendapatan yang dibagikan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 September 2021.
8. Sukuk *Mudharabah* III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2019 Seri B pada tanggal 30 Oktober 2019 sebesar Rp65.000.000.000 dengan jangka waktu 3 tahun, nisbah sebesar 3,90% per tahun dari pendapatan yang dibagikan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2022.

Sukuk Mudharabah

The Company has issued several Sukuk Mudharabah, including:

1. Sukuk *Mudharabah* III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Year 2019 Series H on December 15, 2020 amounting to IDR50,000,000,000 with a period of 36 months, a ratio of 3% per year of the revenue shared, and will mature on the December 15, 2023.
2. Sukuk *Mudharabah* IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Year 2020 Phase 1 Series A on October 27, 2020 amounting to IDR200,000,000,000 with a period of 3 years, a ratio of 9.75% per year of shared revenue, and will fall due on October 27, 2023.
3. Sukuk *Mudharabah* III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Year 2019 Series F on April 8, 2020 amounting to IDR120,000,000,000 with a period of 3 years, a ratio of 6.69% per year of the revenue shared, and will mature on February 20, 2023.
4. Sukuk *Mudharabah* III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Year 2019 Series C on February 20, 2020 amounting to IDR322,000,000,000 with a period of 3 years, a ratio of 17.94% per year of shared revenue, and will mature on February 20, 2023.
5. Sukuk *Mudharabah* III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Year 2019 Series E Phase II on December 5, 2019 amounting to IDR50,000,000,000 with a period of 2 years 10 months 25 days, a ratio of 3.00% per annum from the revenue shared, and will mature on October 30, 2022.
6. Sukuk *Mudharabah* III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) 2019 Series E on November 20, 2019 amounting to IDR100,000,000,000 with a period of 2 years 11 months 10 days, a ratio of 6.00% per year of shared revenue, and will mature on October 30, 2022.
7. Sukuk *Mudharabah* III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) 2019 Series D on October 30, 2019 amounting to IDR350,000,000,000 with a period of 1 year 10 months 24 days, a ratio of 20.50% per year of shared revenue, and will mature on September 24, 2021.
8. Sukuk *Mudharabah* III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Year 2019 Series B on October 30, 2019 amounting to IDR65,000,000,000 with a period of 3 years, a ratio of 3.90% per year of shared revenue, and will mature on October 30, 2022.

9. Sukuk *Mudharabah* III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2019 Seri A pada tanggal 24 September 2019 sebesar Rp435.000.000.000 dengan jangka waktu 2 Tahun, nisbah sebesar 25,48% per tahun dari pendapatan yang dibagikan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 September 2021.
10. Sukuk *Mudharabah* III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2019 Tahap 1 pada tanggal 18 Juni 2019 sebesar Rp300.000.000.000 dengan jangka waktu 5 tahun, nisbah sebesar 19% per tahun dari pendapatan yang dibagikan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 Juni 2024.
11. Sukuk *Mudharabah* II PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2018 Seri B pada tanggal 26 Maret 2019 sebesar Rp240.000.000.000 dengan jangka waktu 2 tahun 11 bulan, nisbah sebesar 30,00% per tahun dari pendapatan yang dibagikan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 Februari 2022.
12. Sukuk *Mudharabah* II PT Permodalan Nasional Madani (Persero) tahun 2018 Seri A pada tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp60.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, nisbah sebesar 30,00% per tahun dari pendapatan yang dibagikan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 Februari 2022.
13. Sukuk *Mudharabah* I PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2017 Seri D pada tanggal 31 Januari 2018 sebesar Rp100.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, nisbah sebesar 45% per tahun dari pendapatan yang dibagikan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Januari 2021.

Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja *murabahah* melalui Mekaar Syariah dan ULaMM Syariah. Penerbitan seluruh Sukuk *Mudharabah* Perusahaan tercatat di bursa KSEI. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas Sukuk *Mudharabah* sesuai dengan Surat Pefindo No. RC-968/PEF-DIR/VIII/2020 dan No. RC-972/PEFDIR/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Sukuk tersebut mendapatkan peringkat idA+ (Single A Plus) yang berlaku untuk periode 19 Agustus 2020 sampai dengan 1 Agustus 2021.

9. Sukuk *Mudharabah* III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Year 2019 Series A on September 24, 2019 amounting to IDR435,000,000,000 with a period of 2 years, a ratio of 25.48% per year of the revenue shared, and will mature on September 24, 2021.
10. Sukuk *Mudharabah* III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Year 2019 Phase 1 on June 18, 2019 amounting to IDR300,000,000,000 with a period of 5 years, a ratio of 19% per annum of the revenue shared, and will mature on the 18th June 2024.
11. Sukuk *Mudharabah* II PT Permodalan Nasional Madani (Persero) 2018 Series B on March 26, 2019 amounting to IDR240,000,000,000 with a period of 2 years 11 months, a ratio of 30.00% per year of the revenue shared, and will fall due on February 26, 2022.
12. Sukuk *Mudharabah* II PT Permodalan Nasional Madani (Persero) 2018 Series A on February 26, 2019 amounting to IDR60,000,000,000 with a period of 36 months, a ratio of 30.00% per year of shared revenue, and will mature on February 26, 2022.
13. Sukuk *Mudharabah* I PT Permodalan Nasional Madani (Persero) 2017 Series D on January 31, 2018 amounting to IDR100,000,000,000 with a period of 36 months, a ratio of 45% per annum of the shared revenue, and will mature on January 31, 2021.

The purpose of this Sukuk issuance was for additional *murabahah* working capital through Mekaar Syariah and ULaMM Syariah. The issuance of all of the Company's Sukuk *Mudharabah* were listed on the KSEI stock exchange. Based on the results of the rating of Sukuk *Mudharabah* in accordance with Pefindo Letter No. RC-968/PEF-DIR/VIII/2020 and No. RC-972/PEFDIR/ VIII/2020 dated August 19, 2020 from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the Sukuk received an idA + (Single A Plus) rating which is valid for the period August 19, 2020 to August 1, 2021.

Tabel Kronologis Penerbitan Sukuk PNM
Table of PNM Sukuk Issuance Chronology

Uraian	Tanggal Penerbitan Publication Date	Tenor Tenor	Mata Uang Currency	Jumlah Obligasi Number of Bonds (Jutaan/Million Rp)	Harga Penawaran Bid Price
Sukuk Mudharabah I Tahun 2017 Seri D	28 Januari 2018 January 28, 2018	3 Tahun 3 Years Old	Rp	100.000	100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi 100% (one hundred percent) of the principal amount of the Sukuk
Sukuk Mudharabah II Tahun 2018 Seri A	26 Februari 2019 February 26, 2019	3 Tahun 3 Years Old	Rp	60.000	100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi 100% (one hundred percent) of the principal amount of the Sukuk
Sukuk Mudharabah II Tahun 2018 Seri B	26 Maret 2019 March 26, 2019	3 Tahun 3 Years Old	Rp	240.000	100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi 100% (one hundred percent) of the principal amount of the Sukuk
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Tahap I	17 Juni 2019 June 17, 2019	5 Tahun 5 Years Old	Rp	300.000	100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi 100% (one hundred percent) of the principal amount of the Sukuk
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri A	24 September 2019 September 24, 2019	2 Tahun 2 Years Old	Rp	435.000	100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi 100% (one hundred percent) of the principal amount of the Sukuk
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri B	30 Oktober 2019 October 30, 2019	3 Tahun 3 Years Old	Rp	65.000	100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi 100% (one hundred percent) of the principal amount of the Sukuk
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri D	30 Oktober 2019 October 30, 2019	2 Tahun 3 Years Old	Rp	350.000	100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi 100% (one hundred percent) of the principal amount of the Sukuk
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri E	20 November 2019 November 20, 2019	3 Tahun 3 Years Old	Rp	100.000	100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi 100% (one hundred percent) of the principal amount of the Sukuk
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri E Tahap II	5 Desember 2019 December 5, 2019	3 Tahun 3 Years Old	Rp	50.000	100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi 100% (one hundred percent) of the principal amount of the Sukuk
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri C	20 Februari 2020 February 20, 2020	3 Tahun 3 Years Old	Rp	322.000	100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi 100% (one hundred percent) of the principal amount of the Sukuk
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri F	8 April 2020 April 8, 2020	3 Tahun 3 Years Old	Rp	120.000	100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi 100% (one hundred percent) of the principal amount of the Sukuk
Sukuk Mudharabah IV Tahun 2020 Tahap I Seri A	27 Oktober 2020 October 27, 2020	3 Tahun 3 Years Old	Rp	200.000	100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi 100% (one hundred percent) of the principal amount of the Sukuk
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri H	15 Desember 2020 December 15, 2020	3 Tahun 3 Years Old	Rp	50.000	100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi 100% (one hundred percent) of the principal amount of the Sukuk

Sampai dengan 31 Desember 2020, PNM tidak menerbitkan obligasi konversi, dengan demikian PNM tidak memiliki informasi mengenai obligasi konversi.

As of December 31, 2021, PNM has not issued convertible bonds, thus PNM does not have information on convertible bonds.

	Tanggal Jatuh Tempo Due Date	Tingkat Suku Bunga Interest	Status Pembayaran Payment Status	Peringkat Ranking		Wali Amanat Trustee	Description
				2021	2020		
	28 Januari 2021 January 28, 2021	10,75%	Belum Lunas Unpaid	idA+(sy)	idA+(sy)	PT Bank Bukopin Tbk	Sukuk Mudharabah I Year 2017 Series D
	26 Februari 2022 February 26, 2022	10,50%	Belum Lunas Unpaid	idA+(sy)	idA+(sy)	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	Sukuk Mudharabah II Year 2018 Series A
	26 Februari 2022 February 26, 2022	10,50%	Belum Lunas Unpaid	idA+(sy)	idA+(sy)	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	Sukuk Mudharabah II Year 2018 Series B
	17 Juni 2024 June 17, 2024	11,00%	Belum Lunas Unpaid	idA+(sy)	idA+(sy)	PT Bank Syariah Mandiri	Sukuk Mudharabah III Year 2019 Phase I
	24 September 2021 September 24, 2021	10,25%	Belum Lunas Unpaid	idA+(sy)	idA+(sy)	PT Bank Syariah Mandiri	Sukuk Mudharabah III Year 2019 Series A.
	30 Oktober 2022 October 30, 2022	10,50%	Belum Lunas Unpaid	idA+(sy)	idA+(sy)	PT Bank Syariah Mandiri	Sukuk Mudharabah III Year 2019 Series B
	24 September 2021 September 24, 2021	10,25%	Belum Lunas Unpaid	idA+(sy)	idA+(sy)	PT Bank Syariah Mandiri	Sukuk Mudharabah III Year 2019 Series D
	30 Oktober 2022 October 30, 2022	10,50%	Belum Lunas Unpaid	idA+(sy)	idA+(sy)	PT Bank Syariah Mandiri	Sukuk Mudharabah III Year 2019 Series E
	30 Oktober 2022 October 30, 2022	10,50%	Belum Lunas Unpaid	idA+(sy)	idA+(sy)	PT Bank Syariah Mandiri	Sukuk Mudharabah III Year 2019 Series E Phase II
	20 Februari 2023 February 20, 2023	9,75%	Belum Lunas Unpaid	idA+(sy)	idA+(sy)	PT Bank Syariah Mandiri	Sukuk Mudharabah III Year 2019 Series C
	20 Februari 2023 February 20, 2023	9,75%	Belum Lunas Unpaid	idA+(sy)	idA+(sy)	PT Bank Syariah Mandiri	Sukuk Mudharabah III Year 2019 Series F
	27 Oktober 2023 October 27, 2023	9,75%	Belum Lunas Unpaid	idA+(sy)	idA+(sy)	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	Sukuk Mudharabah IV Year 2020 Phase I Series A
	15 Desember 2023 December 15, 2023	10,50%	Belum Lunas Unpaid	idA+(sy)	idA+(sy)	PT Bank Syariah Mandiri	Sukuk Mudharabah III Year 2019 Series H

Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya

Issuance Chronology and/or Other Securities Listing

Medium Term Notes (MTN)

Perusahaan menerbitkan MTN XIX Seri D pada tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp142.500.000.000 dengan jangka waktu 2 tahun 10 bulan 2 hari, tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2021. Perusahaan menerbitkan MTN XIX Seri E pada tanggal 16 April 2019 sebesar Rp201.000.000.000 dengan jangka waktu 2 tahun 8 bulan 12 hari, tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2021. Tidak ada keterkaitan antara wali amanat dengan usaha emiten.

Perusahaan menerbitkan MTN XIX Seri A pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp70.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2021. Perusahaan menerbitkan MTN XIX Seri B pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp105.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2021. Perusahaan menerbitkan MTN XIX Seri C pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp105.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2021.

Perusahaan menerbitkan MTN XVIII Seri A pada tanggal 27 September 2018 sebesar Rp390.000.000.000 dengan jangka waktu 24 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun dan tidak ada jaminan atas penerbitan MTN ini. Tujuan penerbitan MTN XVIII Seri A adalah Penambahan Modal Kerja dalam rangka Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil. Jadwal pembayaran bunga dilakukan secara 3 bulanan. Nama wali amanat untuk penerbitan MTN XVIII Seri A adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Penerbitan MTN XVIII seri A berada di peringkat A+ dengan pemeringkat Pefindo. Tidak ada keterkaitan antara wali amanat dengan usaha emiten. MTN ini sudah jatuh tempo pada tanggal 27 September 2020 dan dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 25 September 2020.

Perusahaan menerbitkan MTN XVII pada tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp500.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 8,25% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Maret 2021 dan tidak ada jaminan dalam penerbitan MTN ini. Tujuan penerbitan MTN XVII adalah *Refinancing*, pengembangan usaha dan modal kerja. Jadwal pembayaran bunga dilakukan secara

Medium Term Notes (MTN)

The Company issued MTN XIX Series D on February 26, 2019 amounting to IDR142,500,000,000 with a term of 2 years 10 months 2 days, with a fixed interest rate of 10.50% per annum and will mature on December 28, 2021. The company issued MTN XIX Series E on April 16, 2019 amounting to IDR201,000,000,000 with a term of 2 years 8 months 12 days, with a fixed interest rate of 10.50% per annum and will mature on December 28, 2021. There was no relationship between trustees with the issuer's business.

The Company issued MTN XIX Series A on December 28, 2018 amounting to IDR70,000,000,000 with a period of 36 months, with a fixed interest rate of 10.50% per annum and will mature on December 28, 2021. The Company issued MTN XIX Series B on December 28, 2018 amounting to IDR105,000,000,000 with a period of 36 months, with a fixed interest rate of 10.50% per annum and will mature on December 28, 2021. The Company issued MTN XIX Series C on December 28, 2018 amounting to IDR105,000,000,000 with a period of 36 months, with a fixed interest rate of 10.50% per annum and will mature on December 28, 2021.

The Company issued MTN XVIII Series A on September 27, 2018 amounting to IDR390,000,000,000 with a term of 24 months, the interest rate was fixed at 9.25% per annum and there was no guarantee for the issuance of this MTN. The purpose of issuing MTN XVIII Series A was to increase working capital in the context of Financing Micro and Small Businesses. The interest payment schedule was made on a 3-monthly basis. The name of the trustee for the issuance of MTN XVIII Series A was PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten Tbk. MTN XVIII series A issuance was ranked A+ with Pefindo rating. There was no relationship between the trustee and the business of the issuer. This MTN was due on September 27, 2020 and was paid by the Company on September 25, 2020.

The Company issued MTN XVII on March 15, 2018 amounting to IDR500,000,000,000 with a period of 36 months, with a fixed interest rate of 8.25% per annum and will mature on March 15, 2021 and there was no guarantee in the issuance of this MTN. The objectives of the issuance of MTN XVII were Refinancing, business development and working capital. The interest payment schedule was made on a 3-monthly basis.

3 bulanan. Nama wali amanat untuk penerbitan MTN XVII adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Penerbitan MTN XVII berada di peringkat A+ dengan pemeringkat Pefindo. Tidak ada keterkaitan antara wali amanat dengan usaha emiten.

Perusahaan menerbitkan MTN XIII Seri C pada tanggal 28 April 2017 sebesar Rp200.000.000.000 dengan jangka waktu 56 bulan 14 hari, tingkat bunga tetap sebesar 11,25% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Januari 2022. Perusahaan menerbitkan MTN XIII Seri D pada tanggal 14 Juni 2017 sebesar Rp15.000.000.000 dengan jangka waktu 54 bulan 26 hari, tingkat bunga tetap sebesar 11,25% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Januari 2022. Jadwal pembayaran bunga secara kuartal baik untuk MTN XIII seri C maupun D. Jaminan yang diberikan dalam penerbitan MTN Seri XIII C dan D adalah Cessie. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha Emiten dalam penerbitan MTN XIII Seri C dan D. Nama wali amanat dalam penerbitan MTN XII Seri C dan D adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Tidak ada peringkat dalam penerbitan MTN XIII Seri C dan D. Tujuan penerbitan MTN XIII Seri C dan D adalah untuk penambahan modal kerja dalam rangka pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil.

Perusahaan menerbitkan MTN XIII Seri A pada tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp50.000.000.000 dengan jangka waktu 60 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 11,25% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Januari 2022. Perusahaan menerbitkan MTN XIII Seri B pada tanggal 14 Maret 2017 sebesar Rp110.000.000.000 dengan jangka waktu 57 bulan 16 hari, tingkat bunga tetap sebesar 11,25% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Januari 2022. Jadwal pembayaran bunga secara 3 bulanan baik untuk MTN XIII seri A maupun B. Jaminan yang diberikan dalam penerbitan MTN Seri XIII A dan B adalah Cessie. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha Emiten dalam penerbitan MTN XIII Seri A dan B. Nama Wali amanat dalam penerbitan MTN XII Seri A dan B adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Tidak ada peringkat dalam penerbitan MTN XIII Seri A dan B. Tujuan penerbitan MTN XIII Seri A dan B adalah untuk penambahan modal kerja dalam rangka pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil.

MTN diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo MTN yang diterbitkan oleh Perusahaan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang MTN. Surat berharga ini ditawarkan dengan nilai 100% dari Total pokok MTN pada tanggal penerbitan. Bunga MTN dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal emisi dan pembayaran bunga MTN yang untuk pertama kalinya dan terakhir kalinya pada tanggal jatuh tempo MTN.

The name of the trustee for the issuance of MTN XVII was PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten Tbk. MTN XVII issuance was ranked A+ with Pefindo rating. There was no relationship between the trustee and the business of the issuer.

The Company issued MTN XIII Series C on April 28, 2017 amounting to IDR200,000,000,000 with a period of 56 months and 14 days, with a fixed interest rate of 11.25% per annum and will mature on January 10, 2022. The company issued MTN XIII Series D on June 14, 2017 amounting to IDR15,000,000,000 with a period of 54 months and 26 days, with a fixed interest rate of 11.25% per annum and will mature on January 10, 2022. Schedule of quarterly interest payments was good for MTN XIII series. C and D. The guarantee provided in the issuance of MTN Series XIII C and D was Cessie. There was no relationship between the trustee and the Issuer's business in the issuance of MTN XIII Series C and D. The name of the trustee in the issuance of MTN XII Series C and D was PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten Tbk. There was no rating in the issuance of MTN XIII Series C and D. The purpose of issuing MTN XIII Series C and D was to increase working capital in the framework of financing Micro and Small Businesses.

The Company issued MTN XIII Series A on January 10, 2017 amounting to IDR50,000,000,000 with a period of 60 months, with a fixed interest rate of 11.25% per annum and will mature on January 10, 2022. The company issued MTN XIII Series B on March 14, 2017 amounting to IDR110,000,000,000 with a period of 57 months and 16 days, with a fixed interest rate of 11.25% per annum and will mature on January 10, 2022. Schedule of interest payments on a 3-monthly basis for both MTN XIII series A and B. The guarantee provided in the issuance of MTN Series XIII A and B was Cessie. There was no relationship between the trustee and the Issuer's business in the issuance of MTN XIII Series A and B. The name of trustee in the issuance of MTN XII Series A and B was PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten Tbk. There was no rating in the issuance of MTN XIII Series A and B. The purpose of issuing MTN XIII Series A and B was to increase working capital in the framework of financing Micro and Small Businesses.

MTN was issued scripless, except for the Jumbo MTN Certificate issued by the Company on behalf of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia as evidence of debt for the benefit of the MTN Holder. These securities were offered at a value of 100% of the total principal of the MTN at the date of issue. MTN interest was paid every 3 (three) months, starting from the date of issuance and payment of MTN interest for the first and last time on the maturity date of MTN.

Tabel Kronologis Penerbitan Medium Term Notes (MTN) PNM
PNM Medium Term Notes (MTN) Publishing Chronological Table

Uraian	Tanggal Penerbitan Issue Date	Tenor Tenor	Mata Uang Currency	Jumlah Amount (Jutaan/Million Rp)	Harga Penawaran Bid price
MTN XIII Seri A	10 Januari 2017 January 10, 2017	5 Tahun 5 Years Old	Rp	50.000	100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi 100% (one hundred percent) of mtn principal amount
MTN XIII Seri B	14 Maret 2017 March 14, 2017	5 Tahun 5 Years Old	Rp	110.000	100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi 100% (one hundred percent) of mtn principal amount
MTN XIII Seri C	28 April 2017 April 28, 2017	5 Tahun 5 Years Old	Rp	200.000	100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi 100% (one hundred percent) of mtn principal amount
MTN XIII Seri D	14 Juni 2017 June 14, 2017	5 Tahun 5 Years Old	Rp	15.000	100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi 100% (one hundred percent) of mtn principal amount
MTN XVII (Danareksa)	15 Maret 2018 March 15, 2018	3 Tahun 3 Years Old	Rp	500.000	100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi 100% (one hundred percent) of mtn principal amount
MTN XIX Seri A	27 Desember 2018 December 27, 2018	3 Tahun 3 Years Old	Rp	70.000	100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi 100% (one hundred percent) of mtn principal amount
MTN XIX Seri B	27 Desember 2018 December 27, 2018	3 Tahun 3 Years Old	Rp	105.000	100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi 100% (one hundred percent) of mtn principal amount
MTN XIX Seri C	27 Desember 2018 December 27, 2018	3 Tahun 3 Years Old	Rp	105.000	100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi 100% (one hundred percent) of mtn principal amount
MTN XIX Seri D	26 Februari 2019 February 26, 2019	2 Tahun 2 Years Old	Rp	142.500	100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi 100% (one hundred percent) of mtn principal amount
MTN XIX Seri E	16 April 2019 April 16, 2019	2 Tahun 2 Years Old	Rp	201.000	100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi 100% (one hundred percent) of mtn principal amount

* Peringkat saat diterbitkan

* Rating at issue

	Tanggal Jatuh Tempo Due Date	Tingkat Suku Bunga Interest	Status Pembayaran Payment Status	Peringkat* Rating*	Wali Amanat Trustee	Description
	10 Januari 2022 January 10, 2022	11,25%	Belum Lunas Unpaid	IdA+	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	MTN XIII Series A
	10 Januari 2022 January 10, 2022	11,25%	Belum Lunas Unpaid	IdA+	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	MTN XIII Series B
	10 Januari 2022 January 10, 2022	11,25%	Belum Lunas Unpaid	IdA+	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	MTN XIII Series C
	10 Januari 2022 January 10, 2022	11,25%	Belum Lunas Unpaid	IdA+	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	MTN XIII Series D
	15 Maret 2021 March 15, 2021	8,25%	Belum Lunas Unpaid	IdA+	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	MTN XVII (Danareksa)
	28 Desember 2021 December 28, 2021	10,50%	Belum Lunas Unpaid	IdA+	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	MTN XIX Series A
	28 Desember 2021 December 28, 2021	10,50%	Belum Lunas Unpaid	IdA+	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	MTN XIX Series B
	28 Desember 2021 December 28, 2021	10,50%	Belum Lunas Unpaid	IdA+	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	MTN XIX Series C
	28 Desember 2021 December 28, 2021	10,50%	Belum Lunas Unpaid	IdA+	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	MTN XIX Series D
	28 Desember 2021 December 28, 2021	10,50%	Belum Lunas Unpaid	IdA+-	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	MTN XIX Series E

Informasi Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Information on Using the Services of Public Accounting (AP) and Public Accounting Offices

Nama KAP <i>KAP Name</i>	KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan <i>KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners</i>
Jaringan Asosiasi <i>Association Network</i>	Crowe Indonesia <i>Indonesian Crowe</i>
Alamat KAP <i>KAP Address</i>	Cyber 2 Tower 20 th Floor Unit D-E-F Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5, RT.7/RW.2, Kuningan, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 <i>Cyber 2 Tower 20th Floor Unit D-E-F Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5, RT.7/RW.2, Kuningan, Kuningan Tim., Setiabudi District, South Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta 12950</i>
Nama AP <i>KAP Name</i>	Tjahjo Dahono, SE, CPA
Periode Penugasan <i>Assignment Period</i>	Tahun Buku 2021 (Periode Ke 2) <i>Fiscal Year 2021 (2nd Period)</i>
Jasa yang Diberikan <i>Services Provided</i>	Audit atas laporan keuangan konsolidasi PT PNM dan Entitas Anak. <i>Audit of the consolidated financial statements of PT PNM and its Subsidiaries</i>
Fee Audit <i>Audit Fee</i>	Rp3.900.000.000
Seri B <i>Non-Audit Fee</i>	-

Lembaga dan/atau Profesi Penunjang

Supporting Institutions and/or Professions

Lembaga Penunjang Supporting Institutions	Nama Name	Alamat Address	Jasa yang Diberikan Services Provided	Biaya Cost	Periode Period
Konsultan Hukum Law Consultant	Law Firm Radjiman Billitea & Partners	The H Tower Kav. 20, Lt. 19, Jl. H. R. Rasuna Said, RT.1/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940	Penangan Perkara dan Jasa Konsultasi Penanganan Hukum <i>Case Handlers and Legal Handling Consulting Services</i>	1. Jasa Retainer per bulan Rp25.000.000 2. Penganan perkara perdata dan pidana sesuai dengan SPK 1. IDR25,000,000 per month Retainer service 2. Confession of civil and criminal cases in accordance with the SPK	22 Maret 2021 – 21 Maret 2021 <i>Maret 22, 2021 – Maret 21, 2021</i>
Wali Amanat Trustee	PT Bank Mega Tbk.	Menara Bank Mega Lt. 16 Jl. Kapten P. Tendean No. 12-14A Jakarta 12790	Melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan <i>Carry out duties as a Trustee based on the Trustee Agreement and other documents related to the Trustee Agreement</i>	Rp80.000.000 per penerbitan <i>IDR80,000,000 per issue</i>	2017 - Sekarang <i>2017 - Present</i>
Notaris Notary	Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH.	Jl. Panglima Polim V/11, Kebayoran Baru Jakarta 12160	Notaris Penerbitan Obligasi <i>Bond Issuance Notary</i>	Rp40.000.000 per penerbitan <i>IDR40,000,000 per issue</i>	29 November 2018 – akhir tahun buku 2021 <i>November 29, 2018 - the end of financial year 2021</i>
Perusahaan Pemeringkat Rating Company	PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)	Panin Tower Senayan City, 17 th Floor, Jl. Asia Afrika Lot.19, Gelora, RT.1/RW.3, Gelora, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12220	Pemeringkatan <i>Ranking</i>	0,038% dari total penerbitan <i>0.038% of total issuance</i>	2014 - Sekarang <i>2014 - Present</i>

Penghargaan dan Sertifikasi

Awards and Certification

Penghargaan / Awards



Silver Winner Sub Kategori Departemen PR

Acara / Event
Public Relations Indonesia Awards 2021

Penyelenggara / Organizer
PR Indonesia

Tanggal / Date
31 Maret 2021 /
March 31, 2021



Program Kepedulian Sosial dalam Membantu Dampak COVID-19

Acara / Event
Merdeka Award 2021

Penyelenggara / Organizer
Merdeka.com

Tanggal / Date
31 Maret 2021 /
March 31, 2021



Kategori Strategi Tumbuh dan Bertahan Terbaik I

Acara / Event
10th Anugerah BUMN 2021

Penyelenggara / Organizer
BUMN Track

Tanggal / Date
8 April 2021 /
April 8, 2021



Arief Mulyadi sebagai CEO Talent Development

Acara / Award
10th Anugerah BUMN 2021

Penyelenggara / Organizer
BUMN Track

Tanggal / Date
8 April 2021 /
April 8, 2021



**Special Funding
Excellence Public Relations Practice in Indonesia**

Acara / Award
2nd Indonesia Corporate Branding PR Awards 2021

Penyelenggara / Organizer
The Economics

Tanggal / Date
22 April 2021 /
April 22, 2021



**The Best GRC for Corporate Compliance 2021
(Microfinancing Industries)**

Acara / Award
GRC and Performance Excellence Award 2021

Penyelenggara / Organizer
BusinessNews Indonesia

Tanggal / Date
5 Agustus 2021 /
August 5, 2021



**Arief Mulyadi sebagai
Best CEO 2021**

Acara / Award
GRC and Performance Excellence
Award 2021

Penyelenggara / Organizer
BusinessNews Indonesia

Tanggal / Date
5 Agustus 2021 /
August 5, 2021



**Company Profile Video in
Finance Group Category**

Acara / Award
The Economics Indonesia BUMN
Awards 2021

Penyelenggara / Organizer
The Economics

Tanggal / Date
12 Oktober 2021 /
October 12, 2021



**Pilar Sosial 4 Stars
Pilar Ekonomi 4 Stars
Pilar Lingkungan 4 Stars**

Acara / Award
TJSL & CSR Award 2021

Penyelenggara / Organizer
BUMN Track

Tanggal / Date
14 Oktober 2021 /
October 14, 2021



BUMN Appreciation Day Accelerating Economic Recovery

Acara / Award
TOP BUMN Awards 2021

Penyelenggara / Organizer
Bisnis Indonesia

Tanggal / Date
1 Desember 2021 /
December 1, 2021

The Best CEO in Sustainable Business Growth

Acara / Award
TOP BUMN Awards 2021

Penyelenggara / Organizer
Bisnis Indonesia

Tanggal / Date
1 Desember 2021 /
December 1, 2021

State Owned Enterprise in Financial Sector

Acara / Award
TOP BUMN Awards 2021

Penyelenggara / Organizer
Bisnis Indonesia

Tanggal / Date
1 Desember 2021 /
December 1, 2021



Top Digital Implementations 2021 Level Stars 3

Acara / Award
Top Digital Awards
Penyelenggara / Organizer
It Works

Tanggal / Date
21 Desember 2021 /
December 21, 2021

Sertifikasi / Certification



SNI ISO 37001 : 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001 : 2016 Anti-Bribery Management System

Validasi / Validation:
29 September 2020 – 28 September 2023 /
September 29, 2020 – September 28, 2023

Penerima Sertifikasi / Certification Recipient
Fungsi Pengadaan pada Divisi Pengadaan dan Pengendalian Infrastruktur /
Procurement Function in the Infrastructure Procurement and Control Division

Dikeluarkan oleh / Issued by
SUCOFINDO

Informasi pada Website

Information on the Website

Untuk memberikan informasi terbaru dan relevan mengenai kinerja Perusahaan kepada para pemangku kepentingan, PNM memiliki situs resmi yang dapat diakses melalui alamat www.pnm.co.id. Hal ini merupakan komitmen PNM untuk senantiasa mengedepankan transparansi pada tata kelola Perusahaan.

Melalui situs tersebut, seluruh pemangku kepentingan dapat memperoleh berbagai informasi berikut:

1. RUPS dan Dewan Komite
Informasi mengenai hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan oleh Perseroan, baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa serta informasi mengenai dewan komite dapat diakses di situs Perusahaan pada kategori "Informasi Korporasi" dan sub kategori "RUPS dan Dewan Komite".
2. *Good Corporate Governance*
Sebagai wujud komitmen Perusahaan dalam mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik berlandaskan atas prinsip keterbukaan, kemandirian, akuntabilitas, keadilan, dan pertanggungjawaban setiap kegiatan, Perusahaan membuat pedoman termasuk pedoman sebagai upaya preventif gratifikasi, pedoman tata kelola, kode etik Perusahaan, pedoman pelaporan pelanggaran, dan penanganan pengaduan *whistleblowing* dapat diakses melalui situs Perusahaan pada kategori "Tentang PNM" dan sub kategori "GCG".
3. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
Sebagai bentuk tanggung jawab Perusahaan terhadap masyarakat, Perusahaan melaksanakan berbagai program kemitraan dan bina lingkungan yang laporan programnya dapat diakses melalui situs Perusahaan pada kategori "Bisnis" dan sub kategori "Jasa Manajemen".
4. Berita
Informasi mengenai berita terbaru Perusahaan sehingga para pemangku kepentingan dapat selalu mengikuti perkembangan terkini aktivitas Perusahaan melalui situs. Informasi ini dapat diakses langsung di situs pada kategori "Publikasi" dan sub kategori "Berita".
5. Laporan Perusahaan
Informasi mengenai Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dapat diakses di situs Perusahaan pada bagian Beranda dan kategori "Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan PT Permodalan Nasional Madani (Persero)".
6. Profil Dewan Komisaris dan Direksi
Informasi mengenai Profil Dewan Komisaris dan Direksi secara lengkap beserta legalitas pengangkatannya dapat diakses di situs Perusahaan pada kategori "Informasi Korporasi", sub kategori "Manajemen".

To provide stakeholders with the latest and relevant information regarding the Company's performance, PNM has an official website that can be accessed through the address www.pnm.co.id. This is PNM's commitment to always prioritize transparency in the governance of the Company.

Through this site, all stakeholders can obtain the following information:

1. *GMS and Board of Committees*
Information regarding the results of the General Meeting of Shareholders held by the Company, both the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders as well as information on the board of committees can be accessed on the Company's website under the category "Corporate Information" and the sub category "GMS and Committee Boards".
2. *Good Corporate Governance*
As a manifestation of the Company's commitment to implementing good corporate governance based on the principles of openness, independence, accountability, fairness and accountability for each activity, the Company has prepared guidelines including guidelines as a preventive measure for gratification, governance guidelines, the Company's code of ethics, guidelines for reporting violations, and The handling of whistleblowing complaints can be accessed through the company's website under the category "About PNM" and the "GCG" sub-category.
3. *Partnership and Community Development Program*
As a form of the Company's responsibility to society, the Company carries out various partnership and community development programs whose program reports can be accessed through the Company's website under the "Business" category and the "Management Services" sub-category.
4. *News*
Information regarding the latest news of the Company so that stakeholders can always follow the latest developments in the Company's activities through the website. This information can be accessed directly on the website under the "Publications" category and the "News" sub-category.
5. *Company reports*
Information regarding the Annual Reports and Financial Reports can be accessed on the Company's website in the Home section and the category "PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Annual Reports and Financial Reports".
6. *Profile of the Board of Commissioners and Directors*
Information regarding the complete profile of the Board of Commissioners and Directors along with the legality of their appointment can be accessed on the Company's website under the category "Corporate Information", sub category "Management".

TINJAUAN BIDANG USAHA

Business Fields Review



Sekilas PNM Mekaar

PNM Mekaar at a Glance

PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar) merupakan layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku UMKM yang diluncurkan pada 2015. Pada dasarnya, nasabah PNM Mekaar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menjalankan usaha, namun akses yang terbatas dalam pembiayaan modal kerja menyebabkan keterampilan mereka kurang tergarap.

Keterbatasan akses tersebut meliputi kendala formalitas, skala usaha, dan ketiadaan agunan. Oleh karena itu, Perseroan menerapkan sistem kelompok tanggung renteng yang diharapkan dapat menjembatani kesenjangan akses pembiayaan sehingga para nasabah mampu mengembangkan usaha dalam rangka menggapai cita-cita dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Secara garis besar, manfaat yang disalurkan oleh Perseroan melalui layanan PNM Mekaar, meliputi:

- Peningkatan pengelolaan keuangan;
- Pembiayaan modal tanpa agunan;
- Penanaman budaya menabung; dan
- Kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis.

Untuk merespons pasar, sejak akhir tahun 2018, mulai terbentuk pembiayaan PNM Mekaar Syariah melalui pengembangan di beberapa cabang dimulai dari wilayah Aceh, Padang, dan Nusa Tenggara Barat. Selama tahun 2021, pembiayaan PNM Mekaar Syariah terus berkembang mencapai 1.720 cabang yang tersebar di berbagai wilayah lainnya di Indonesia. Hingga akhir tahun 2021, PNM Mekaar Syariah telah memiliki 6.516.851 nasabah atau sebesar 58,97% dari total 11.051.924 *Number of Account (NoA)* nasabah PNM Mekaar.

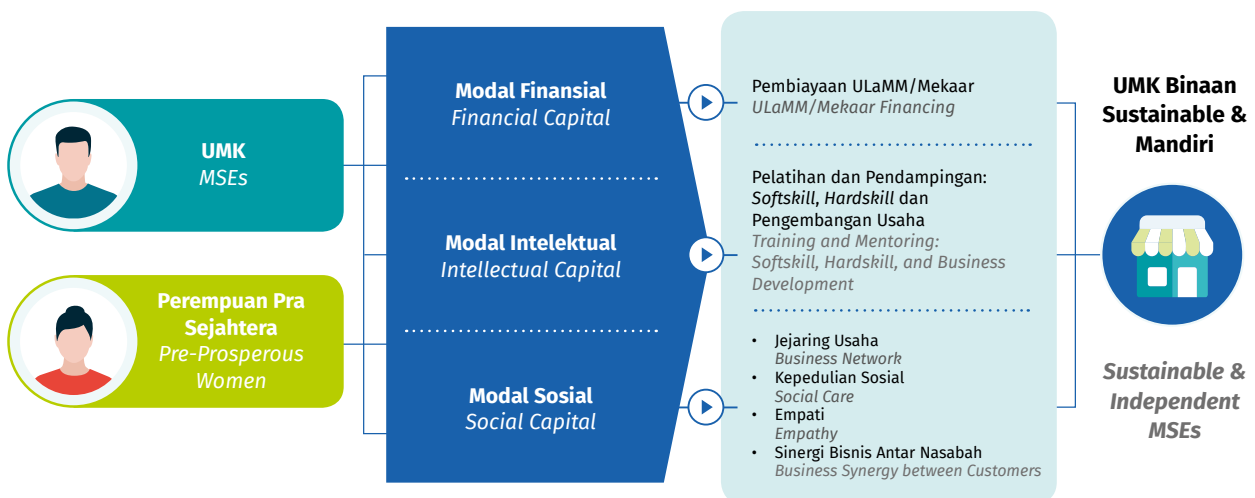
PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar) is a capital loan service for underprivileged women who are SME entrepreneurs that was launched in 2015. Basically, Mekaar PNM customers have the knowledge and skills in running a business, but their limited access to working capital fund has rendered their skills underutilized.

The limited access includes constraints of formality, business scale, and the absence of collateral. Therefore, the Company implements group system that is expected to bridge the gap in funding access, hence customers able to develop their businesses in order to achieve their goals and improve family welfare.

In general, the benefits distributed by the Company through PNM Mekaar services, include:

- *Financial management improvement;*
- *Non-collateral capital financing;*
- *Nurturing saving habits; and*
- *Entrepreneurship competency and business development.*

*Since the end of 2018, PNM Mekaar Syariah financing began to form through development in several branches starting from the Aceh, Padang, and West Nusa Tenggara regions to respond to the market. In 2021, PNM Mekaar Syariah financing will grow to reach 1,720 branches spread across various other areas of Indonesia. By the end of 2021, PNM Mekaar Syariah had 6,516,851 customers, or 58.97% of the total 11,051,924 *Number of Accounts (NoA)* of PNM Mekaar customers.*



Kriteria PNM Mekaar

Berikut kriteria yang wajib dipenuhi nasabah PNM Mekaar:

- Layanan PNM Mekaar difokuskan kepada perempuan pelaku usaha mikro dengan kondisi keluarga yang memiliki indeks pendapatan per kapita maksimal US\$1,99 per hari atau Rp800 ribu per bulan serta memenuhi indeks rumah (*Cashpoor Index House*);
- Pembiayaan PNM Mekaar tidak mensyaratkan agunan fisik, melainkan bersifat tanggung renteng kelompok, dengan syarat kedisiplinan untuk mengikuti proses persiapan dan Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM);
- Satu kelompok minimal terdiri dari 2 subkelompok dan maksimal 6 subkelompok, dengan masing-masing subkelompok beranggotakan 5–30 nasabah;
- Setiap kelompok/subkelompok dipimpin oleh seorang ketua;
- Pertemuan kelompok wajib dilaksanakan setiap minggu, sebagai salah satu cara untuk membayar angsuran mingguan.

PNM Mekaar Criteria

The following criteria shall be fulfilled by PNM Mekaar customers:

- PNM Mekaar service focuses on women who runs micro entrepreneurships with a family that earns a maximum per capita income index of US\$1.99 per day or IDR800 thousand per month and fulfill the Cashpoor House Index;
- PNM Mekaar financing does not require a physical collateral, but rather is a joint group responsibility, with disciplinary conditions to attend the preparation process and Weekly Group Meeting (PKM);
- One group should consists of a minimum of 2 subgroups and a maximum of 6 subgroups with 5–30 customers in each subgroup;
- Each group/subgroup should be led by a head;
- Group meetings must be held every week to pay weekly installments.



Detail Fitur Pembiayaan Mekaar

Syarat Utama:

- WNI, Usia Minimal 18 tahun dan Maksimal 63 tahun
- Nasabah memiliki tanda pengenal berupa NIK.
- Mempunyai usaha yang masih berjalan atau akan memiliki usaha.
- Pendapatan per kapita/orang < Rp800.000

Jumlah Pembiayaan:

- Siklus 1: Rp2.000.000 - Rp3.000.000.
- Siklus 2 dan selanjutnya: Maksimal Rp5.000.000.
- Top Up minimal 15 kali pembiayaan (25 angsuran) dan 30 kali pembiayaan (50 angsuran).
- Penambahan plafon minimal Rp500.000.

Skema Pembiayaan:

- Dilakukan Uji Kelayakan Nasabah untuk melihat kemampuan Nasabah.
- Verifikasi Usaha dengan Kunjungan ke tempat usaha Nasabah.
- Pencairan dilakukan secara tunai di hari PKM.

Pembayaran Angsuran dan Jangka Waktu:

- Melalui Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) setiap 1 minggu sekali.
- Jangka Waktu pembiayaan terdiri dari:
 - 25 angsuran (6 bulan)
 - 50 angsuran (1 tahun)

Jumlah Anggota Kelompok:

Jumlah Anggota Kelompok minimal 7 orang dan maksimal 30 orang.

Ketentuan Pembiayaan:

- Uang Pertanggung jawaban sebesar 1 kali angsuran.
- Diperbolehkan Lunas Dini (*Outstanding* pokok ditambah 1 kali angsuran).
- Nasabah dapat melakukan tarik setor titipan (tabungan).
- Nasabah dapat pendampingan dan Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU).

Detail of Mekaar Financing Features

Main requirements:

- Indonesian Citizen, Minimum Age 18 years and Maximum 63 years
- Customer owned identification in the form of NIK.
- Having a business that was still running or would own a business.
- Income per capita / person <IDR 800,000

Financing Amount:

- Cycle 1: IDR 2,000,000 - IDR3,000,000.
- Cycle 2 and so on: Maximum IDR5,000,000.
- Top Up at least 15 times financing (25 installments) and 30 times financing (50 installments).
- Additional ceiling of at least IDR500,000.

Financing Scheme:

- Customer feasibility test was conducted to see the ability of the customer.
- Business verification by visiting customer's place of business.
- Disbursements were made in cash on PKM (Weekly Group Meeting) days.

Installment Payment and Term:

- Through the Weekly Group Meeting (PKM) once a week.
- The financing period consists of:
 - 25 installments (6 months)
 - 50 installments (1 year)

Number of Group Member:

The minimum number of group members was 7 people and a maximum of 30 people.

Financing Terms:

- Accountability money was 1 installment.
- Early Paid Off (*Outstanding* principal plus 1 installment).
- Customers could withdraw deposits (savings).
- Customers got assistance and Business Capacity Development (PKU).

Mekaar Plus

Nasabah Mekaar Plus



Detail Fitur PNM Mekaar Plus

Syarat Utama:

- Usia Maksimal 65 tahun saat Jatuh Tempo pembiayaan.
- Nasabah Aktif PNM Mekaar dengan lama bergabung minimal 2 tahun.
- Plafon pembiayaan terakhir minimal 3 juta.
- Memiliki kehadiran dan pembayaran yang baik pada PKM.
- Nasabah memiliki tanda pengenal berupa NIK.
- Mempunyai usaha yang masih berjalan.

Jumlah Pembiayaan:

- Tahap 1: Rp7.000.000 - Rp9.000.000
- Tahap 2: Rp10.000.000 - Rp12.000.000
- Tahap 3: Rp13.000.000 - Rp15.000.000
- Tahap 4: Rp16.000.000 - Rp25.000.000
- Top Up dengan minimal 50% pembiayaan.
- Penambahan plafon minimal Rp2 juta.

PNM Mekaar Plus Features Details

Main requirements:

- Maximum age of 65 years at the maturity date of the financing.
- Active PNM Mekaar Customers with a minimum length of 2 years.
- The last financing ceiling was at least 3 million.
- Having a good presence and payment on PKM.
- Customer had identification in the form of NIK.
- Having a business that was still running.

Financing Amount:

- Stage 1: IDR 7,000,000 - IDR 9,000,000
- Stage 2: IDR 10,000,000 - IDR 12,000,000
- Stage 3: IDR 13,000,000 - IDR 15,000,000
- Stage 4: IDR 16,000,000 - IDR 25,000,000
- Top Up with a minimum of 50% financing.
- Additional ceiling of at least IDR 2 million.

Verifikasi Usaha:

- Verifikasi Usaha dengan Kunjungan ke tempat usaha Nasabah.
- Melampirkan foto usaha Nasabah pada sistem scoring.
- Verifikasi dilakukan oleh SAÓ.

Pembayaran Angsuran dan Jangka Waktu:

- Melalui Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) setiap 2 minggu sekali.
- Jangka Waktu pembiayaan terdiri dari:
 - 12 bulan
 - 24 bulan

Jumlah Anggota Kelompok:

- >5 Nasabah, maka dibentuk Kelompok Baru
- < 5 Nasabah, tetap pada kelompok lama

Ketentuan Pembiayaan:

- Uang Pertanggung jawaban sebesar 1 kali angsuran.
- Diperbolehkan Lunas Dini (*Outstanding* pokok ditambah 1 kali angsuran).
- Pencairan dapat dilakukan Tunai atau dengan aplikasi LinkAja.

Business Verification:

- *Business Verification by Visiting Customer's place of business.*
- *Attach a photo of the customer's business to the scoring system.*
- *Verification was carried out by SAÓ.*

Installment Payment and Term:

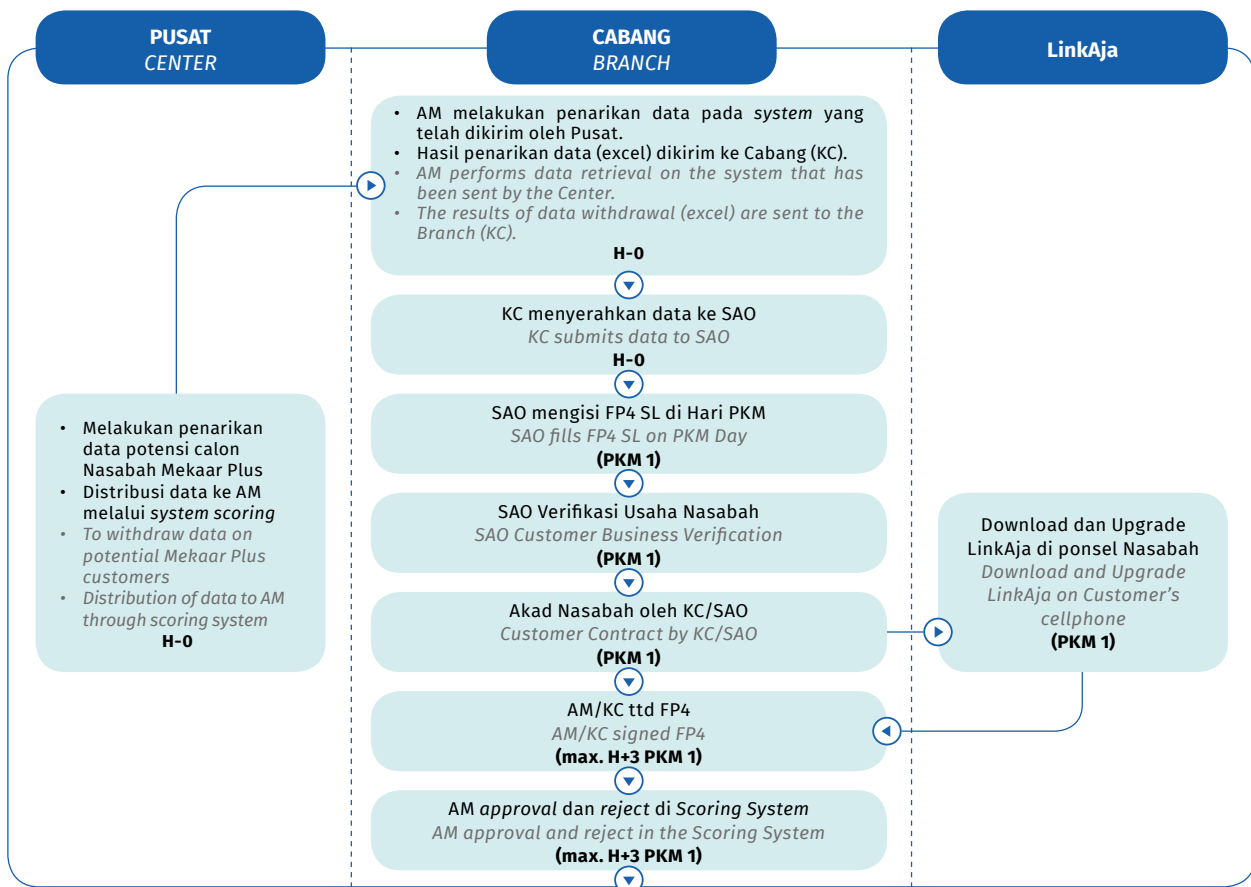
- *Through the Weekly Group Meeting (PKM) every 2 weeks.*
- *The financing period consists of:*
 - *12 month*
 - *24 month*

Number of Group Members:

- *> 5 Customers, then a New Group was formed*
- *<5 Customers, remained in the old group*

Financing Terms:

- *Accountability money was 1 installment.*
- *Early Paid Off (Outstanding principal plus 1 installment).*
- *Disbursements could be made in cash or with the LinkAja application.*

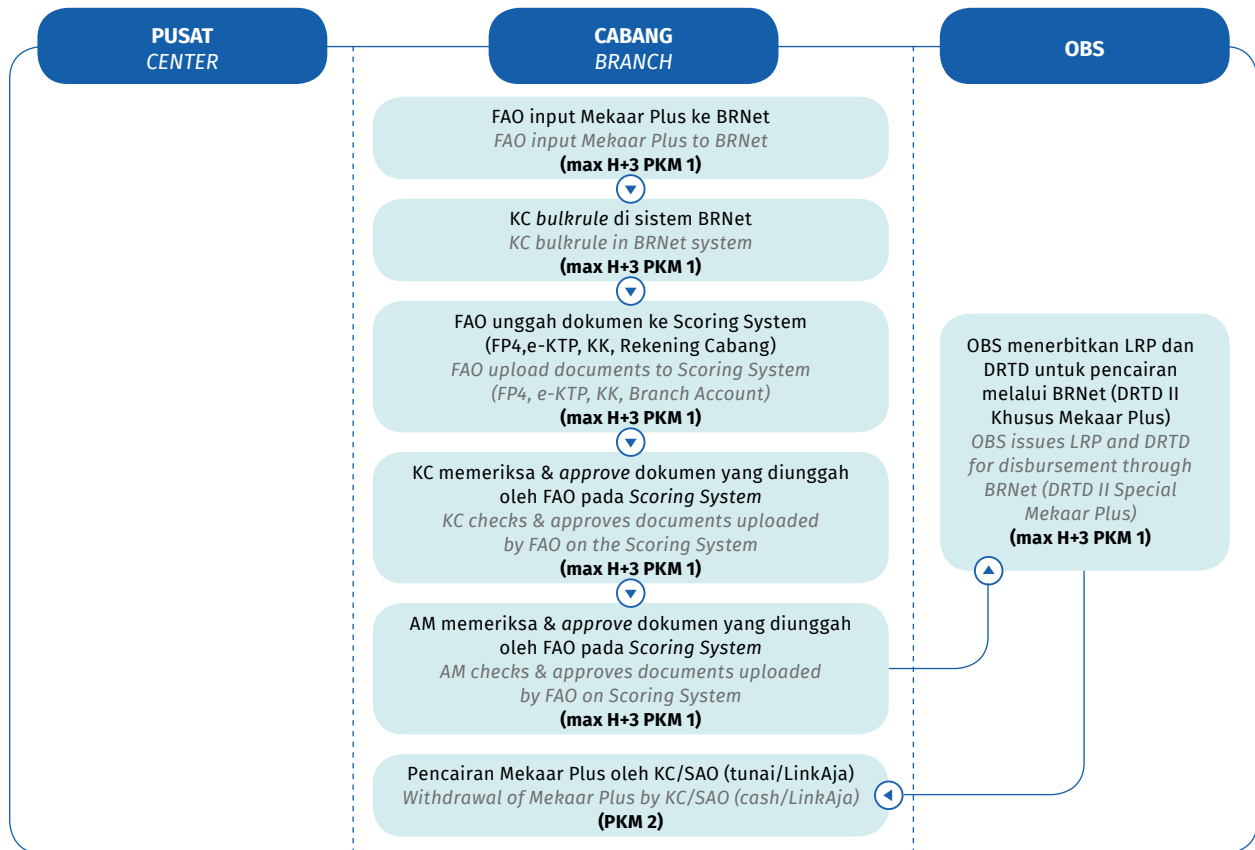
Proses Bisnis / Business Process**Keterangan:**

1. Scoring sudah mengeluarkan rekomendasi plafon yang diberikan;
2. Apabila Nasabah memiliki plafon lebih rendah maka dapat langsung diberikan;
3. Apabila Nasabah meminta plafon lebih tinggi maka perlu dilakukan verifikasi ke lokasi usaha.

Information:

1. Scoring has issued a ceiling recommendation given;
2. If the Customer has a lower ceiling, it can be given immediately;
3. If the Customer requests a higher ceiling, verification is required at the business location.

Proses Bisnis / Business Process



Monitoring:

1. Kantor Pusat Melakukan monitoring data yang telah diproses secara berkala (weekly).
2. RM Melakukan monitoring melalui scoring system dan me-follow up cabang yang belum menindaklanjuti proses bisnis Mekaar Plus

Monitoring:

1. Head Office Monitors data that has been processed on a weekly basis.
2. RM Monitoring through a scoring system and following up branches that have not followed up on Mekaar Plus' business processes

PNM Mekaar Syariah

PNM Mekaar Syariah adalah layanan pemberdayaan melalui pembiayaan berbasis kelompok sesuai ketentuan hukum Islam yang berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia bagi perempuan prasejahtera melalui:

1. Peningkatan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarga;
2. Pembiayaan modal usaha tanpa agunan;
3. Pembiasaan budaya menabung;
4. Peningkatan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis.

Akad Dalam Pembiayaan Mekaar Syariah:

1. Wakalah
Pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan.

PNM Mekaar Syariah

PNM Mekaar Syariah is an empowerment service through group-based financing in accordance with the provisions of Islamic law based on a fatwa and/or sharia conformity statement from the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council for underprivileged women through:

1. Improved financial management to realize family goals and welfare;
2. Business capital financing without collateral;
3. Saving culture habituation;
4. Enhancing entrepreneurial competence and business development.

Contract in PNM Mekaar Sharia Financing:

1. Wakalah
The transfer of power by one person as the first party to another as the second party in the things represented.

2. Murabahah
Jual-beli antara penjual (Lembaga keuangan) dengan pembeli (nasabah), dan harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli.
3. Wadiah
Titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggungjawab atas pengembalian titipan tersebut.

Proses Pembiayaan Mekaar Syariah

1. Sosialisasi
2. Uji Kelayakan
3. Verifikasi
4. Persiapan Pembiayaan
5. Pencairan
6. Pertemuan Kelompok Mingguan

Alur Proses Pencairan

1. Nasabah harus hadir;
2. Seluruh nasabah kelompok harus hadir;
3. Formulir Permohonan Persetujuan dan Pencairan Pembiayaan Syariah (FP4S) sudah lengkap ditandatangani;
 - a. Kartu nasabah lengkap;
 - b. Buku titipan lengkap;
4. Kepala Cabang (KC) atau Senior Account Officer (SAO) Mekaar dengan nasabah melakukan perjanjian (akad) yang didampingi Account Officer (AO) Mekaar, yaitu:
 - a. Akad *Wakalah*
 - b. Akad *Murabahah*
 - c. Akad *Wadiah*
5. KC atau SAO memanggil nasabah yang menerima pencairan pembiayaan;
6. KC atau SAO menanyakan jumlah pencairan pembiayaan dan angsuran;
7. KC atau SAO menjelaskan akad wakalah, akad murabahah dan akad wadiah.
8. KC atau SAO menjelaskan uang pertanggungjawaban;
9. Pembacaan akad wakalah dan murabahah;
10. KC atau SAO menghitung jumlah uang yang akan dicairkan kemudian diserahkan kepada nasabah;
11. Nasabah menerima dan menghitung kembali uang pencairan pembiayaan serta menyebutkan akad *Wakalah* dan *Murabahah*;
12. Nasabah menyisihkan Uang Pertanggungjawaban;
13. KC atau SAO mencatat Uang Pertanggungjawaban pada buku titipan nasabah;
14. Nasabah menandatangani akad *Wakalah*, akad *Murabahah*, akad *Wadiah*, FP4S, Kartu Nasabah, dan Lembar Realisasi Pencairan (LRP);
15. KC/SAO menandatangani akad wakalah, akad Murabahah, dan kartu nasabah setelah nasabah menandatangani;

2. *Murabahah*
Buying and selling between the seller (financial institution) and the buyer (customer), and the acquisition price was added with the agreed profit margin between the seller and the buyer.
3. *Wadiah*
Deposits from customers that had to be maintained and returned at any time the customer wanted them. The bank was responsible for returning the deposit.

PNM Mekaar Sharia Financing Process

1. *Socialization*
2. *Due Diligence*
3. *Verification*
4. *Financing Preparation*
5. *Disbursement*
6. *Weekly Group Meetings*

Disbursement Process Flow

1. *Customer had to be present;*
2. *All group customers had to attend;*
3. *The application form for Approval and Disbursement of Sharia Financing (FP4S) was completely signed;*
 - a. *Complete customer card;*
 - b. *Complete deposit book;*
4. *Mekaar's Branch Head (KC) or Senior Account Officer (SAO) and the customer entered into an agreement (contract) accompanied by Mekaar's Account Officer (AO), namely:*
 - a. *Wakalah contract*
 - b. *Murabahah contract*
 - c. *Wadiah contract*
5. *KC or SAO called the customer who received the disbursement of financing;*
6. *KC or SAO asked for the amount of financing disbursement and installments;*
7. *KC or SAO explained the wakalah contract, murabahah contract and wadiah contract.*
8. *KC or SAO described accountability money;*
9. *Reading of the wakalah and murabahah contracts;*
10. *KC or SAO calculated the amount of money to be disbursed and then handed over to the customer;*
11. *The customer received and recalculated the disbursement money and states the Wakalah and Murabahah contract;*
12. *Customer set aside Accountability Money;*
13. *KC or SAO recorded the Accountability Money in the customer's deposit book.*
14. *Customer signed Wakalah contract, Murabahah contract, Wadiah contract, FP4S, Customer Card, and Disbursement Realization Sheet (LRP);*
15. *KC/SAO signed the wakalah contract, Murabahah contract, and the customer card after the customer signs it;*

16. Ketua sub dan ketua kelompok sebagai saksi menandatangani akad *Wakalah*, akad *Murabahah*, Akad *wadiah*, FP4S;
17. Menyerahkan kartu angsuran dan buku titipan nasabah;
18. KC mengingatkan kembali mengenai uang jaga-jaga, uang solidaritas, UP, uang titipan dan kegunaannya;
19. Mengingatkan jadwal PKM termasuk mengenai tempat, hari, dan waktunya.

Kinerja PNM Mekaar Tahun 2021

- Pada tahun 2021, jumlah nasabah aktif PNM Mekaar mencapai 11.011.194 nasabah perempuan.
- PNM Mekaar memiliki jaringan layanan yang kini telah mencapai 2.985 Kantor Cabang, dengan cakupan wilayah di 5.735 kecamatan di Indonesia.
- Pembiayaan yang telah disalurkan PNM Mekaar selama tahun 2021 telah mencapai Rp46,44 triliun.
- Dengan mencatatkan aset produktif gross pada akhir tahun 2021 sebesar Rp26,25 triliun, dan aset produktif - bersih sebesar Rp25,65 triliun.
- Jumlah baki debit PNM Mekaar di tahun 2021 mencapai Rp25,94 triliun.
- Total pendapatan dari produk PNM Mekaar ditahun 2021 sebesar Rp6,93 triliun.

16. *The head of the sub and the head of the group as witnesses signed the Wakalah contract, Murabahah contract, the wadiah contract, FP4S;*
17. *Submitting installment cards and customer deposit books;*
18. *KC reminded again about guardianship money, solidarity money, UP, entrusted money and its uses;*
19. *Reminding PKM schedule including the place, day, and time.*

PNM Mekaar Performance in 2021

- *In 2021, the number of active PNM Mekaar customers will reach 11,011,194 female customers.*
- *PNM Mekaar has a service network that has now reached 2,985 Branch Offices, with an area coverage of 5,735 sub-districts in Indonesia.*
- *The financing that has been distributed by PNM Mekaar during 2021 has reached Rp46.44 trillion.*
- *By recording gross productive assets at the end of 2021 of IDR26.25 trillion, and net productive assets of IDR25.65 trillion.*
- *Mekaar's PNM debit balance in 2021 will reach IDR25.94 trillion.*
- *Total revenue from PNM Mekaar products in 2021 is IDR6.93 trillion.*

Sekilas ULaMM

ULaMM at a Glance

ULaMM merupakan layanan pinjaman modal untuk usaha mikro dan kecil melalui penyaluran pembiayaan yang dilakukan secara langsung bagi perorangan maupun Bidang Usaha. Diluncurkan pada Agustus 2008 silam, ULaMM tidak hanya memberikan pinjaman modal, tetapi juga berbagai program pelatihan, jasa konsultasi, pendampingan, serta dukungan pengelolaan keuangan dan akses pasar bagi nasabah. Berbeda dengan fasilitas pembiayaan usaha mikro dan kecil lainnya, ULaMM memiliki sederet manfaat berikut:

Gerai layanan di bawah satu atap atau “*One Stop Shopping*” bagi para pengusaha mikro dan kecil, yang dilengkapi dengan berbagai dukungan teknis bagi nasabah;

- Persyaratan peminjaman dengan prosedur yang jelas dan angsuran ringan;
- Penyertaan pendampingan usaha dan pelatihan;
- Jasa konsultasi usaha untuk para nasabah;
- Dukungan pengelolaan keuangan dan akses pasar yang luas bagi nasabah.

ULaMM Syariah telah beroperasi sejak ULaMM didirikan. Sampai dengan tahun 2021, pembiayaan syariah dilayani oleh 591 Unit ULaMM Syariah dari total 629 Kantor Unit ULaMM yang ada. Oleh karena itu, Perseroan pun terus melakukan inisiatif untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dalam pembiayaan syariah.

Untuk meningkatkan pertumbuhan dan jangkauan layanan pembiayaan syariah, diluncurkan Program Layanan Syariah yang memungkinkan pembiayaan syariah disalurkan melalui seluruh Kantor Unit ULaMM. Sampai dengan tahun 2021, pembiayaan syariah dapat dilayani oleh 626 Kantor Unit yang terdiri dari 57 Unit ULaMM Syariah dan 534 Unit Layanan Syariah. Jumlah Unit Layanan Syariah tersebut masih akan terus bertambah pada masa mendatang seiring dengan meningkatnya permintaan atas pembiayaan dengan pola syariah.

Kriteria ULaMM

ULaMM atau Unit Layanan Modal Mikro adalah layanan pinjaman modal bagi usaha mikro kecil dari PT Permodalan Nasional Madani. ULaMM lebih dari sekedar lembaga pembiayaan bagi nasabah usaha mikro kecil. Layanan pinjaman modal dari PNM ini juga disertai dengan jasa pembinaan, pelatihan dan pendampingan usaha bagi para nasabah usaha mikro kecil. Artinya, selain mendapatkan pinjaman modal usaha, nasabah ULaMM pun mendapatkan jasa pelatihan dan pendampingan dari PNM sehingga

ULaMM is a capital loan service for micro and small businesses through direct financing for individuals and business sectors. Launched in August 2008, ULaMM provides not only capital loans, but also various training programs, consulting services, mentoring, and financial management support and market access for customers. Unlike other micro and small business financing facilities, ULaMM has the following benefits:

Service outlets under one roof or “One Stop Shopping” for micro and small entrepreneurs, equipped with various technical support for customers;

- *Loan requirements with clear procedures and light installments;*
- *Participation in business assistance and training;*
- *Business consulting services for customers;*
- *Financial management support and broad market access for customers.*

ULaMM Syariah has been operating since ULaMM was founded. Until 2021, sharia financing is served by 591 Sharia ULaMM Units from 629 existing ULaMM Unit Offices. Therefore, the Company continues to take initiatives to provide better services in sharia financing.

To increase the growth and reach of sharia financing services, the Sharia Services Program was launched, which allows sharia financing to be channeled through all ULaMM Unit Offices. Until 2021, sharia financing can be served by 626 Unit Offices consisting of 57 Sharia ULaMM Units and 534 Sharia Service Units. The number of Sharia Service Units will continue to grow in the future in line with the increasing demand for financing with a sharia pattern.

ULaMM Criteria

ULaMM stands for Unit Layanan Modal Mikro, or Micro Capital Service Unit; it is a capital loan service provided by PT Permodalan Nasional Madani for micro and small businesses. ULaMM is more than just a micro and small business financial institution. PNM’s capital loan service is accompanied by coaching, training, and business assistance services for micro and small business customers. This means that, other than business capital loans, ULaMM customers received PNM training and assistance services, allowing



para pelaku usaha mikro kecil bias terus mengembangkan kapasitas usahanya, sekaligus mempercepat kemajuan usahanya.

Persyaratan:

1. WNI Perseorangan yang berusia antara 21 tahun sampai dengan 65 tahun.
2. Usaha telah berjalan minimal 1 (satu) tahun.
3. Mengisi formulir permohonan pembiayaan.
4. Melampirkan:
 - a) Fotokopi KTP pemohon suami & istri
 - b) Fotokopi Kartu Keluarga dan Surat Nikah
 - c) Surat Keterangan Usaha
 - d) Fotokopi Agunan Sertifikat
 - e) Fotokopi Buku Tabungan

ULaMM Pantas

Produk Pembiayaan PANTAS (Produk Antara untuk Keluarga Sejahtera) adalah produk yang dikhususkan untuk menaikkan kelas nasabah Mekaar dan Mekar Plus dengan persyaratan tertentu menjadi nasabah ULaMM yang terdiri dari 4 kategori produk. Sehubungan dengan perkembangan strategi bisnis perusahaan, maka Perseroan menerbitkan produk-produk pembiayaan tambahan yaitu Produk Pembiayaan ULaMM Pantas Syariah. Produk Pembiayaan ULaMM Pantas Syariah (Produk Antara untuk Keluarga Sejahtera) adalah produk yang dikhususkan untuk menaikkan kelas nasabah Mekaar/ Mekaar Syariah dan Mekaar Plus/ Mekaar Plus Syariah dengan persyaratan tertentu menjadi nasabah ULaMM Syariah, dimana Produk Pembiayaan ULaMM Pantas Syariah dibagi menjadi 4 (empat) yaitu Bijak Syariah, Handal Syariah, Mahir Syariah dan Bersama Syariah.

micro and small business actors to continue developing their business capacity while accelerating their business progress.

Requirements:

1. *Individual Indonesian Citizens aged between 21 years to 65 years.*
2. *The business has been running for at least 1 (one) year.*
3. *Fill out the financing application form.*
4. *Attach:*
 - a) *Photocopy of KTP of the applicant's husband & wife*
 - b) *Photocopy of Family Card and Marriage Certificate*
 - c) *Business Certificate*
 - d) *Copy of Collateral Certificate*
 - e) *Copy of Savings Book*

ULaMM Pantas

PANTAS Financing Products (Intermediate Products for Prosperous Families) became products that were devoted to advancing Mekaar and Mekar Plus customers with certain requirements to become PNM ULaMM customers, which consisted of 4 product categories, namely Bijak, Handal, Mahir, Bersama. In connection with the development of the company's business strategy, the Company issued additional financing products, namely the Pantas Syariah PNM ULaMM Financing Product. PNM ULaMM Pantas Syariah Financing Product (Intermediate Product for Prosperous Families) was a product devoted to improving Mekaar Plus/ Mekaar Plus Syariah with certain requirements to become PNM ULaMM Syariah customers, in which PNM ULaMM Pantas Syariah Financing Products were divided into 4 (four) namely Bijak Sharia, Handal Sharia, Mahir Sharia and Bersama with Sharia.

Tabel Perbedaan 4 Kategori ULamm Pantas
Table of Differences 4 Categories of ULamm Pantas

Bijak Syariah	Handal Syariah	Mahir Syariah	Bersama Syariah
Peruntukan <i>Allocation</i>			
<p>1. Modal Kerja, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian persediaan atau stok barang, serta menggantikan modal usaha yang tertanam pada piutang;</p> <p>2. Investasi, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk membeli aktiva tetap atau melakukan investasi produktif, namun tidak terbatas pada pembelian mesin produksi, investasi produksi, investasi menambah bangunan gudang, investasi gudang, investasi menambah bangunan toko, membeli peralatan dan lain-lain, yang gunanya untuk meningkatkan kapasitas produksi usaha.</p> <p>1. <i>Working Capital, namely financing aimed at purchasing inventory or stock of goods, as well as replacing working capital that was embedded in accounts receivable;</i></p> <p>2. <i>Investment, namely financing aimed at buying fixed assets or making productive investments, but not limited to purchasing production machines, investing in production, investing in adding warehouse buildings, investing in warehouses, investing in adding shop buildings, buying equipment and others, which were used for increase the production capacity of the business.</i></p>	<p>1. Modal Kerja, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian persediaan atau stok barang, serta menggantikan modal usaha yang tertanam pada piutang;</p> <p>2. Investasi, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk membeli aktiva tetap atau melakukan investasi produktif, namun tidak terbatas pada pembelian mesin produksi, investasi produksi, investasi menambah bangunan gudang, investasi gudang, investasi menambah bangunan toko, membeli peralatan dan lain-lain, yang gunanya untuk meningkatkan kapasitas produksi usaha.</p> <p>1. <i>Working Capital, namely financing aimed at purchasing inventory or stock of goods, as well as replacing working capital that was embedded in accounts receivable;</i></p> <p>2. <i>Investment, namely financing aimed at buying fixed assets or making productive investments, but not limited to purchasing production machines, investing in production, investing in adding warehouse buildings, investing in warehouses, investing in adding shop buildings, buying equipment and others, which were used for increase the production capacity of the business.</i></p>	<p>1. Modal Kerja, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian persediaan atau stok barang, serta menggantikan modal usaha yang tertanam pada piutang;</p> <p>2. Investasi, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk membeli aktiva tetap atau melakukan investasi produktif, namun tidak terbatas pada pembelian mesin produksi, investasi produksi, investasi menambah bangunan gudang, investasi gudang, investasi menambah bangunan toko, membeli peralatan dan lain-lain, yang gunanya untuk meningkatkan kapasitas produksi usaha.</p> <p>1. <i>Working Capital, namely financing aimed at purchasing inventory or stock of goods, as well as replacing working capital that is embedded in accounts receivable;</i></p> <p>2. <i>Investment, namely financing aimed at buying fixed assets or making productive investments, but not limited to purchasing production machines, investing in production, investing in adding warehouse buildings, investing in warehouses, investing in adding shop buildings, buying equipment and others, which were used for increase the production capacity of the business.</i></p>	<p>1. Modal Kerja, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian persediaan atau stok barang, serta menggantikan modal usaha yang tertanam pada piutang;</p> <p>2. Investasi, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk membeli aktiva tetap atau melakukan investasi produktif, namun tidak terbatas pada pembelian mesin produksi, investasi produksi, investasi menambah bangunan gudang, investasi gudang, investasi menambah bangunan toko, membeli peralatan dan lain-lain, yang gunanya untuk meningkatkan kapasitas produksi usaha.</p> <p>1. <i>Working Capital, namely financing aimed at purchasing inventory or stock of goods, as well as replacing working capital that is embedded in accounts receivable;</i></p> <p>2. <i>Investment, namely financing aimed at buying fixed assets or making productive investments, but not limited to purchasing production machines, investing in production, investing in adding warehouse buildings, investing in warehouses, investing in adding shop buildings, buying equipment and others, which were used for increase the production capacity of the business.</i></p>
Target Pasar <i>Target Market</i>			
Merupakan nasabah Mekaar Plus/ Mekaar Plus Syariah yang sudah mengikuti pembiayaan minimal selama 1 (satu) tahun.	Merupakan nasabah Mekaar Plus/ Mekaar Plus Syariah yang sudah mengikuti pembiayaan minimal selama 1 (satu) tahun.	Merupakan nasabah Mekaar/ Mekaar Syariah yang sudah mengikuti pembiayaan minimal selama 2 (dua) tahun.	Merupakan keluarga (Suami, Anak dan Orang Tua kandung) dari nasabah Mekaar/Mekaar Syariah yang sudah mengikuti pembiayaan minimal selama 2 (dua) tahun atau nasabah Mekaar Plus/Mekaar Plus Syariah.
<i>It was a Mekaar Plus/Mekaar Plus Syariah customer who participated in financing for a minimum of 1 (one) year.</i>	<i>It was a Mekaar Plus/Mekaar Plus Syariah customer who participated in financing for a minimum of 1 (one) year.</i>	<i>It was a Mekaar/Mekaar Syariah customer who participated in financing for a minimum of 2 (two) years.</i>	<i>It was a family (husband, children and biological parents) of Mekaar/ Mekaar Syariah customers who participated in financing for a minimum of 2 (two) years or Mekaar Plus/ Mekaar Plus Syariah customers.</i>

ULaMM Syariah

Salah satu produk pembiayaan dari ULaMM yaitu ULaMM Syariah sesuai Surat Keputusan M-033/PNM-PRA/II/2019 28 Februari 2019, perihal Persetujuan Penyempurnaan Produk ULaMM Syariah Fasilitas Murabahah. Berikut adalah ketentuan dalam pembiayaan ULaMM Syariah:

Ketentuan Allocation	Penjelasan Explanation
Produk Product	ULaMM Syariah-Fasilitas Murabahah Sharia ULaMM-Murabahah Facility
Peruntukan Allotment	Modal Kerja dan/atau investasi untuk keperluan produktif Working Capital and/or investment for productive purposes
Plafon Ceiling	Maksimal Rp500 juta untuk nasabah baru dan <i>take over</i> Maximum IDR500 million for new and take over customers
	Maksimal Rp2 milyar untuk <i>top up</i> Maximum IDR2 billion for top up
Jangka waktu Period of time	Plafon sampai dengan Rp100 juta, tenor maksimal 36 bulan Ceiling up to IDR100 million, maximum tenor 36 months
	Plafon > Rp100 juta sampai dengan Rp300 juta, tenor maksimal 48 bulan Ceiling > IDR100 million to IDR300 million, maximum tenor of 48 months
	Plafon > Rp300 juta, tenor maksimal 60 bulan Ceiling > IDR300 million, maximum tenor 60 months
Pola Angsuran Installment Pattern	Pokok + Marjin yang jumlah angsurannya tetap sama secara bulanan Principal + Margin whose installments remain the same monthly
Agunan Collateral	Wajib cover 100% plafon pembiayaan; Jenis dan persyaratan agunan mengacu pada ketentuan/kebijakan yang berlaku Mandatory to cover 100% of the financing ceiling; Collateral types and requirements refer to the applicable provisions/policies

ULaMM Syariah

One of the financing products from PNM ULaMM was PNM ULaMM Sharia according to Decree M-033/PNM-PRA/II/2019 February 28, 2019, regarding the Murabahah Facility ULaMM Sharia Product Refinement Approval. The following are the provisions in PNM ULaMM Sharia financing:

Kinerja ULaMM Tahun 2021

Outstanding ULaMM pada tahun 2021 sebesar Rp3.374 miliar atau meningkat Rp42,8 miliar dari tahun 2020 sebesar Rp3.331 miliar. Pada tahun 2021, akumulasi penyaluran pembiayaan sebesar Rp1,3 triliun atau meningkat Rp172,9 miliar dari tahun 2020 sebesar Rp1,1 triliun. Secara total akumulasi penyaluran selama ULaMM berdiri sebesar Rp31,6 triliun. Sementara dari sisi pendapatan, di tahun 2021 juga mengalami peningkatan sebesar Rp72 miliar dari tahun 2020 sebesar Rp658,8 miliar menjadi Rp730,9 miliar di tahun 2021. Sementara dari sisi kualitas mengalami perbaikan angka *non performing loan* (NPL) nya dari 2,04% dari tahun 2020 menjadi 1,58% di tahun 2021.

ULaMM Performance in 2021

Outstanding ULaMM in 2021 was IDR3,374 billion, an increase of IDR42.8 billion from 2020 of IDR3,331 billion. The total amount of financing disbursements in 2021 was IDR1.3 trillion, an increase of IDR172.9 billion from IDR1.1 trillion in 2020. The total accumulated disbursement during the ULaMM was IDR31.6 trillion. Meanwhile, revenue increased by IDR72 billion in 2021, from IDR658.8 billion in 2020 to IDR730.9 billion in 2021. However, the number of *non-performing loans* (NPLs) decreased from 2.04% in 2020 to 1.58% in 2021.

Perbandingan PNM Mekaar dan ULaMM

Comparison of PNM Mekaar and ULaMM

Berikut adalah perbandingan PNM Mekaar dan ULaMM:

Here is a comparison of PNM Mekaar and ULaMM:

Uraian Description	ULaMM	PNM Mekaar
Nasabah Customer	Umum General	Perempuan Woman
Plafon Keuangan Financial Ceiling	Maksimal 200 juta Maximum 200 million	Maksimal 10 juta Maximum 10 million
Jaminan Aset Asset Guarantee	Ada Exist	Tidak ada There is not any
Penerimaan Pembiayaan Funding Receipt	Individual Individual	Berkelompok Group
Kriteria Pembiayaan Financing Criteria	Layak Usaha Worth Effort	IPC<US\$1,99 IPC<US\$1.99
Jangka Waktu Period of time	48 bulan 48 months	50 minggu 50 weeks
Angsuran Installment	Bulanan Monthly	Mingguan Weekly
Pengikatan Perjanjian Kredit Credit Agreement Binding	Notariil>50 juta Notary>50 million	Un-Notariil Un-Notary

Pengembangan Kapasitas Usaha

Business Capacity Development

Untuk senantiasa menghadirkan layanan yang optimal bagi nasabah, Perseroan memiliki program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) yang bertujuan untuk memberikan pendampingan serta pembinaan kepada para pelaku UMKM di Indonesia.

Sejak 2010, Perseroan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada nasabah ULaMM. Menjawab kebutuhan pelatihan yang kian berkembang, Perseroan kemudian membentuk Divisi Pengembangan Kapasitas Usaha (Divisi PKU) pada 2011 dan pada 2018 guna memenuhi kebutuhan pengembangan usaha nasabah Mekaar. Divisi ini dikembangkan menjadi Divisi Pengembangan Kapasitas Usaha.

To always provide optimal service for customers, the Company owned a Business Capacity Development and Group Development (PKU) program which aimed to provide assistance and guidance to MSME players in Indonesia.

Since 2010, the Company had provided training and mentoring to ULaMM customers. Responding to the growing training needs, the Company then formed a Business Capacity Development Division (PKU Division) in 2011 and in 2018 to meet the business development needs of Mekaar customers. This division was developed into the Division of Business Capacity Development.

Jenis kegiatan usaha dalam cakupan PKU adalah sebagai berikut:

- **Pelatihan Nasabah ULaMM**
Program pelatihan yang dikhususkan bagi para nasabah ULaMM. Program pelatihan ini dilakukan di seluruh kantor cabang PNM di Indonesia.
- **Pembinaan Klaster**
Program pembinaan nasabah yang dilakukan melalui pola klasterisasi/pengelompokan. Klaster ditentukan berdasarkan jenis usaha dan lokasi nasabah. Program ini mencakup pelatihan dan pendampingan di berbagai aspek, di antaranya: keuangan, produksi, pemasaran, dan kelembagaan.
- **Pendampingan Nasabah Mekaar**
Program pendampingan yang dikhususkan bagi para nasabah Mekaar. Program pendampingan ini dilakukan di seluruh Kantor Cabang PNM di Indonesia.

Peran PKU dalam Masa Pandemi Covid-19

Dalam menghadapi kondisi pandemi COVID-19 ini, PNM telah melakukan sejumlah penyesuaian terkait pelaksanaan program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU). Tidak hanya segi materi yang disesuaikan, tapi pola penyampaian juga dirubah total. Kalau sebelum pandemi, hampir semua pelatihan dilakukan secara tatap muka langsung, maka sejak pandemi pelaksanaannya dilakukan secara online, yaitu melalui media sosial terutama *whatsapp group*, *instagram*, maupun media online *zoom meeting*.

Selama terjadinya pandemi, aktivitas PKU sedikit dikurangi dan pesertanya dibatasi. Pada awal terjadinya pandemi, PNM sempat membekukan kegiatan PKU selama dua minggu (16-31 Maret 2020), dimana selama masa tersebut dilakukan sejumlah persiapan untuk pelaksanaan pelatihan *online*.

Pelaksanaan pelatihan ini dilakukan dalam dua pola, yaitu *one way* dengan menggunakan *whatsapp group*, dan *two way* berupa *zoom meeting/google hangouts meet*. Jumlah peserta dibatasi sekitar 30 orang dengan durasi selama 60 menit, termasuk 30 menit untuk tanya jawab. Materi yang disampaikan disesuaikan dengan kondisi pandemi, antara lain mengenai: peluang usaha selama COVID-19, pengelolaan keuangan di era COVID-19, penjualan *online*, strategi bertahan di masa pandemi bagi nasabah, dan lainnya.

The types of business activities within the scope of PKU are as follows:

- **PNM ULaMM Customer Training**
Specialized training program for PNM ULaMM customers. This training program was conducted in all PNM branch offices in Indonesia.
- **Cluster Development**
Customer coaching program which was carried out through a clustering/grouping pattern. Clusters were determined based on the type of business and location of the customer. This program included training and mentoring in various aspects, including: finance, production, marketing, and institutions.
- **PNM Mekaar Customer Assistance**
Assistance program specifically for PNM Mekaar customers. This mentoring program was carried out in all PNM branch offices in Indonesia.

The Role of PKU in the Covid-19 Pandemic Time

In facing the COVID-19 pandemic, PNM made a number of adjustments related to the implementation of the Business Capacity Development (PKU) program. Not only was the material aspect adjusted, but the delivery pattern was also completely changed. Before the pandemic, almost all training was carried out face-to-face, and after the pandemic the trainings were implemented online, namely through social media, especially *whatsapp groups*, *Instagram*, and *online zoom meeting media*.

During the pandemic, PKU activities were slightly reduced and participants were limited. At the start of the pandemic, PNM froze PKU activities for two weeks (March 16-31, 2020), during which time a number of preparations were made for the implementation of online training. Since April 2020, online PKU training had been implemented for both PNM ULaMM and PNM Mekaar customers.

The training was carried out in two patterns, namely *one way* using the *WhatsApp group*, and *two ways* in the form of a *zoom meeting/google hangouts meet*. The number of participants was limited to around 30 people with a duration of 60 minutes, including 30 minutes for questions and answers. The material presented was adjusted to the conditions of the pandemic, including regarding: business opportunities during COVID-19, financial management in the COVID-19 era, online sales, strategies to survive during the pandemic for customers, and others.

Aktivitas pendampingan lainnya terkait program PKU selama pandemi COVID-19 di tahun 2021, yaitu:

- a. PKM Bermakna, yang kembali dilaksanakan sejak April 2020.
- b. Edukasi melalui media instagram (IG), dengan materi tentang community (cerita sukses nasabah, event), materi tentang edukasi (tips and trick usaha), dan materi tentang *soft selling* produk nasabah.
- b. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pelaksanaan PKU antara lain:
 - BRI dan Pegadaian
 - PRISMA
 - LPEI/KNEKS
 - KPPPA
 - Kemeninfo
 - BPPTIK
 - BPJS-TK
- c. Melakukan pendampingan nasabah untuk memiliki Perizinan Usaha, seperti NIB, PIRT, dan Sertifikat Halal

Berbagai pendampingan yang dilakukan PNM bertujuan agar usaha para nasabah tetap berjalan selama masa pandemi ini, sehingga ekonomi di lapisan bawah tetap stabil dan ikut menggerakkan perekonomian nasional. Salah satu solusi yang ditawarkan PNM yaitu *go digital*, dengan memanfaatkan jaringan *marketplace* dan media sosial. Nasabah terus didorong untuk melakukan inovasi dalam menyikapi kondisi sulit ini agar usahanya tetap berjalan, salah satunya dengan melakukan pemasaran secara *online*. Melalui *go digital* diharapkan bisa meningkatkan penjualan karena pangsa pasarnya lebih luas.

Untuk itu PNM, melalui Divisi PKU telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait pelatihan dan pemasaran secara *online* seperti dengan Shopee, Tokopedia, Grab, Gojek, dan lainnya. PNM juga telah melakukan sosialisasi Pasar Digital (PaDi) UMKM BUMN bagi seluruh PIC PKU di seluruh PNM Cabang serta sosialisasi kepada lebih dari 1.754 nasabah dan diantaranya sudah berhasil listing sebanyak 1.450 nasabah yang juga telah bertransaksi dengan total 348 kali transaksi senilai Rp687.632.550.

Indeks Pemberdayaan Usaha Ultra Mikro (Mekaar) & Mikro (ULaMM)

Indeks Pemberdayaan Usaha Ultra Mikro dan Mikro merupakan survei yang dirancang oleh Divisi PKU untuk mengukur tingkat keberhasilan Divisi PKU dalam rangka untuk memonitor perkembangan usaha nasabah Ultra Mikro (PNM Mekaar) dan Mikro (PNM ULaMM). Sebelum indeks ini dilakukan, Divisi PKU bekerja sama dengan Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan J-PAL dengan melakukan *Forum Group Discussion* (FGD) pada tanggal 14 April 2021 untuk menentukan parameter indeks, bobot, dan *scoring* indeks.

Other mentoring activities related to the PKU program during the COVID-19 pandemic in 2021, namely:

- a. *Meaningful PKM, which has been held again since April 2020.*
- b. *Education through Instagram (IG) media, with material about community (customer success stories, events), education material (business tips and tricks), and material about soft selling of customer products.*
- c. *Collaborating with various parties for the implementation of PKU, including:*
 - *BRI and Pegadaian*
 - *PRISMA*
 - *LPEI/KNEKS*
 - *KPPPA*
 - *Kemeninfo*
 - *BPPTIK*
 - *BPJS-TK*
- d. *Assisting customers to have business licenses, such as NIB, PIRT, and Halal Certificates.*

The various mentoring provided by PNM aimed to keep customers' businesses running during this pandemic, so that the lowertier economy remained stable and helped to drive the national economy. One of the solutions PNM offers was to go digital, by utilizing marketplace networks and social media. Customers continued to be encouraged to innovate in responding to these difficult conditions so that their business could continue to run, one of which was by doing online marketing. Going digital was expected to increase sales because of its wider market share.

For this reason, PNM, through the PKU Division, has collaborated with various parties related to online training and marketing such as Shopee, Tokopedia, Grab, Gojek, and others. PNM has also socialized the Digital Market (PaDi) of BUMN MSMEs for all PKU PICs in all PNM Branches as well as outreach to more than 1,754 customers and among them have succeeded in listing as many as 1,450 customers who have also transacted with a total of 348 transactions valued at IDR687,632,550.

Ultra Micro (Mekaar) & Micro (ULaMM) Business Empowerment Index

The Ultra Micro and Micro Business Empowerment Index was a survey designed by the PKU Division to assess the PKU Division's success rate in monitoring the business development of Ultra Micro (PNM Mekaar) and Micro (PNM ULaMM) customers. Prior to the implementation of this index, the PKU Division worked with Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, and J-PAL to hold a Forum Group Discussion (FGD) on April 14, 2021 to determine index parameters, weights, and index scoring.

Indeks Usaha Ultra Mikro (Mekaar)

Survei Indeks Pemberdayaan Usaha Ultra Mikro dilakukan pertama kali pada bulan Juni 2021 dengan total responden sebesar 1.212 nasabah Mekaar dari beberapa daerah sebagai *pilot project*. Indeks kemudian dilakukan terhadap nasabah Mekaar di Cabang PNM Seluruh Indonesia pada minggu ketiga dan keempat di Bulan Desember 2021, tepatnya pada tanggal 22-30 Desember 2021. Tools pengumpulan data adalah dengan menggunakan di aplikasi PKM Mobile, oleh *Account Officer* sebagai enumerator pengumpulan data. Dalam aplikasi PKM Mobile tersebut, terdapat 9 indikator pertanyaan yang wajib dijawab oleh masing-masing nasabah diantaranya pertanyaan terkait:

1. Keikutsertaan nasabah dalam pelatihan dan pendampingan PKU
2. Menabung
3. Pengelolaan keuangan
4. Pendapatan (omset)
5. Strategi penjualan
6. Kepemilikan aset
7. Perizinan usaha
8. Diversifikasi produk
9. Serapan tenaga kerja

Data diolah dan dianalisis secara deskriptif pada masing-masing indikator Indeks Pemberdayaan Usaha Ultra Mikro dengan jumlah responden yang berhasil disurvei pada Desember 2021 sebesar 1.806.887 nasabah Mekaar. Dari beberapa indikator tersebut, indikator yang nilainya paling tinggi adalah aspek menabung dimana 77% nasabah dari total nasabah yang disurvei sudah menabung. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan nasabah PNM di aspek menabung sudah cukup baik.

Dari hasil survei indeks yang dilakukan pada bulan Juni 2021 dan bulan Desember 2021 ditemukan adanya 3 indikator yang mengalami peningkatan nilai indeks, seperti jangka waktu pelatihan yang diikuti oleh nasabah, jumlah nasabah yang sudah menabung, dan jumlah nasabah yang sudah memiliki perizinan usaha. Kesimpulan untuk hasil survei Indeks Pemberdayaan Usaha Ultra Mikro adalah diperoleh hasil nilai keseluruhan indeks sebesar **4,50 dari nilai maksimal 10,00** yang artinya adalah "*pemberdayaan usaha ultra mikro masih perlu ditingkatkan*".

Indeks Usaha Mikro (ULaMM)

Survei Indeks Pemberdayaan Usaha Mikro dilakukan pertama kali pada bulan Juli 2021 dengan total responden sebesar 1.754 nasabah ULaMM sebagai *pilot project*. Indeks kemudian dilakukan terhadap nasabah ULaMM di Cabang PNM Seluruh Indonesia pada minggu ketiga dan keempat di Bulan Desember 2021, tepatnya pada tanggal 20-31 Desember 2021. Tools pengumpulan data adalah dengan menggunakan google form, oleh PIC PKU Cabang sebagai enumerator

Ultra Micro Enterprise Index (Mekaar)

As a pilot project, the Ultra Micro Business Empowerment Index survey was conducted for the first time in June 2021 with a total of 1,212 Mekaar customers from various regions. The index was then run on Mekaar customers at PNM branches across Indonesia in the third and fourth weeks of December 2021, specifically on December 22-30, 2021. The Account Officer serves as a data collection enumerator and used the PKM Mobile application to collect data. Each customer had to answer 9 question indicators in the PKM Mobile application, including questions about:

1. *Customer participation in PKU training and assistance*
2. *Save*
3. *Financial management*
4. *Revenue (turnover)*
5. *Sales strategy*
6. *Asset ownership*
7. *Business License*
8. *Product diversification*
9. *Labor absorption*

The data was processed and analyzed descriptively on each indicator of the Ultra Micro Business Empowerment Index, with a total of 1,806,887 Mekaar customers successfully surveyed in December 2021. The indicator with the highest value was the saving aspect, in which 77% of all surveyed customers had saving accounts. This demonstrated that PNM customers were quite empowered in terms of saving.

*According to the results of the index survey conducted in June and December 2021, 3 indicators experienced an increase in index value: the training period attended by customers, the number of customers who had saved, and the number of customers who already had business licenses. The overall index value for the survey results of the Ultra Micro Business Empowerment Index obtained **4.50 out of a maximum value of 10.00**, indicating that "Ultra micro business empowerment still needs to be improved."*

Micro Enterprise Index (ULaMM)

As a pilot project, the Micro Business Empowerment Index Survey was conducted for the first time in July 2021 with a total of 1,754 ULaMM customers. The index was then applied to ULaMM customers at PNM branches across Indonesia during the third and fourth weeks of December 2021, specifically December 20-31, 2021. PIC PKU Branch as data collection enumerators used Google Forms as data collection tools. Each customer had to answer 9 (nine) indicator questions on

pengumpulan data. Dalam google form tersebut, terdapat 9 (Sembilan) indikator pertanyaan yang wajib dijawab oleh masing-masing nasabah diantaranya pertanyaan terkait:

1. Keikutsertaan nasabah dalam pelatihan dan pendampingan PKU
2. Disiplin membayar angsuran
3. Serapan tenaga kerja
4. Perizinan usaha untuk peningkatan omset
5. Diversifikasi (penambahan) produk/jasa
6. Strategi penjualan
7. Memanfaatkan jaringan/kelompok usaha
8. Pengelolaan keuangan
9. Memanfaatkan hasil usaha dengan membeli aset

Data diolah dan dianalisis secara deskriptif pada masing-masing indikator Indeks Pemberdayaan Usaha Mikro dengan jumlah responden yang berhasil disurvei pada Desember 2021 sebesar 6.463 nasabah ULaMM. Peningkatan hasil nilai indeks ini juga terjadi pada setiap indikator penilaian Survei Indeks Pemberdayaan Usaha Mikro seperti contoh: pada indikator pengelolaan keuangan terjadi peningkatan nilai indeks yang semula 0,40 di bulan Juni 2021 menjadi 0,43 di bulan Desember 2021. Kesimpulan untuk hasil survei Indeks Pemberdayaan Usaha Mikro adalah diperoleh hasil nilai keseluruhan indeks sebesar **4,80 dari nilai maksimal 10,00** yang artinya adalah “pemberdayaan usaha mikro masih perlu ditingkatkan”.

Jenis dan Realisasi Program PKU Tahun 2021

Jenis Pelatihan PKU

Sebagai wujud kepedulian terhadap setiap nasabah dan guna mengembangkan potensi nasabah, Perseroan memiliki program pelatihan dan pendampingan sebagai berikut:

- a. Temu Usaha Nasabah Unit
Temu Usaha Nasabah Unit merupakan kegiatan yang diadakan khusus untuk para nasabah ULaMM yang dilakukan oleh Unit ULaMM minimal 6 (enam) kali dalam satu tahun dan dikemas dalam bentuk kegiatan pelatihan (*knowledge sharing*) dengan jumlah peserta minimal 25 nasabah ULaMM per pelatihan. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk mengundang calon nasabah.
- b. Temu Usaha Nasabah Cabang
Temu Usaha Nasabah Cabang merupakan kegiatan yang diadakan khusus untuk para nasabah ULaMM yang dilakukan oleh Kantor Cabang ULaMM minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun dan dikemas dalam bentuk kegiatan pelatihan (*knowledge sharing*) dengan jumlah peserta minimal 75 nasabah ULaMM per pelatihan sambil tetap membuka ruang untuk mengundang calon nasabah.

the Google form, including related questions:

1. Customer participation in PKU training and assistance
2. Discipline to pay installments
3. Labor absorption
4. Business licensing for increased turnover
5. Diversification (addition) of products/services
6. Sales strategy
7. Utilize business networks/groups
8. Financial management
9. Take advantage of business results by buying assets

The data was processed and analyzed descriptively on each indicator of the Micro Business Empowerment Index, with a total of 6,463 ULaMM customers successfully surveyed in December 2021. The results of this index value increased in every assessment indicator of the Micro Business Empowerment Index Survey, for example, the index value in the financial management indicator increased from 0.40 in June 2021 to 0.43 in December 2021. Conclusions for the Index survey results Empowerment of Micro Enterprises obtained as a result of an overall index value of **4.80 out of a possible maximum value of 10.00**, indicating that “micro-enterprise empowerment still needs to be improved.”

Types and Realization of the PKU Program in 2021

Types of PKU Training

As a form of concern for each customer and in order to develop customer potential, the Company has some trainings and mentoring program as follows:

- a. Customer Unit Business Meeting
Unit Customer Business Meeting is an activity held specifically for ULaMM customers which is conducted by the ULaMM Unit at least 6 times a year and is packaged in the form of training activities (*knowledge sharing*) with minimum number of participants of 25 ULaMM customers per training. However, it is possible to invite prospective customers.
- b. Branch Customer Business Meeting
Branch Customer Gathering is an activity held specifically for ULaMM customers which is conducted by the ULaMM Branch Office at least 2 times a year and is packaged in the form of training activities (*knowledge sharing*) with a minimum number of participants of 75 ULaMM customers per training while still opening up space to invite prospective customer.

c. Pelatihan Klasterisasi

Perseroan juga menggelar program Pelatihan Klasterisasi yang merupakan program pelatihan dengan metode berkelanjutan (berseri). Program ini diselenggarakan dengan pola berkelompok untuk nasabah dan calon nasabah berdasarkan pendekatan tertentu, seperti kesamaan wilayah, jenis usaha, dan/ atau jenis usaha yang berbeda-beda, namun dapat saling berhubungan atau bersinergi.

Pelatihan Klasterisasi dibagi ke dalam 3 jenis berikut:

- Klasterisasi Sektoral adalah pelatihan dan pendampingan yang diselenggarakan untuk nasabah dan calon nasabah ULaMM atau PNM Mekaar yang mempunyai jenis usaha sejenis dalam satu lokasi/ wilayah dan dilaksanakan oleh Kantor Cabang ULaMM. Jumlah peserta pelatihan Klasterisasi Sektoral (ULaMM dan PNM Mekaar) minimal 30 orang yang terdiri dari nasabah dan calon nasabah.
- Klasterisasi Teritorial adalah pelatihan dan pendampingan yang diselenggarakan untuk nasabah dan calon nasabah ULaMM dan/atau PNM Mekaar yang mempunyai jenis usaha yang berbeda-beda dalam satu lokasi/wilayah yang dilaksanakan oleh Kantor Cabang ULaMM. Jumlah peserta pelatihan Klasterisasi Teritorial (ULaMM) minimal 20 peserta, sedangkan untuk klasterisasi teritorial PNM Mekaar minimal 50 orang yang terdiri dari nasabah dan calon nasabah.
- Klasterisasi Sinergi adalah pelatihan dan pendampingan yang diselenggarakan untuk nasabah PNM Mekaar dengan jenis usaha yang dapat disinergikan dengan nasabah ULaMM dan berada dalam satu lokasi/wilayah. Jumlah peserta pelatihan Klasterisasi Sinergi minimal 50 peserta yang terdiri dari nasabah dan calon nasabah PNM Mekaar serta minimal 1 (satu) nasabah ULaMM dan/atau mitra binaan PNM (nasabah Program Kemitraan) yang jenis usahanya dapat disinergikan.

d. Pelatihan Persiapan Nasabah PNM Mekaar

Perseroan memiliki program pelatihan berkelanjutan (3 seri) untuk calon nasabah PNM Mekaar yang dilakukan sebelum pencairan, yaitu pada hari yang sama dengan pelaksanaan Persiapan Pembiayaan (PP) 1, 2, dan 3. Program dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali kegiatan per bulan per regional agar calon nasabah mempunyai pandangan usaha yang akan dijalankan.

e. PKM Bermakna

PKM Bermakna dilakukan oleh AO Mekaar melalui kegiatan PKM. Materi disiapkan oleh Divisi PKU dan disesuaikan dengan *grading system*. Materi dasar dari PKM Bermakna adalah pentingnya doa, jujur, disiplin dan

c. Clusterization Training

The Company also organize a Clusterization Training program which is a training program with continuous methods (serial). This program is held in a grouping pattern for customers and prospective customers based on certain approaches, such as regional similarities, types of businesses, and/or types of businesses that are different but can be interconnected or synergized.

Clusterization Training is divided into the following 3 types:

- *Sectoral Clusterization is training and mentoring conducted for customers and prospective customers of ULaMM or PNM Mekaar who have similar types of businesses in one location/ region and are conducted by ULaMM Branch Offices. The number of participants in the Sectoral Clusterization training (ULaMM and PNM Mekaar) is a minimum of 30 people consisting of customers and prospective customers.*
- *Territorial Clusterization is training and mentoring conducted for customers and prospective customers of ULaMM and/or PNM Mekaar who have different types of businesses in one location/region conducted by ULaMM Branch Offices. The number of participants in the Territorial Clusterization (ULaMM) training is a minimum of 20 participants, while PNM Mekaar are 50 people, consisting of customers and prospective customers.*
- *Synergy Clusterization is training and mentoring organized for PNM Mekaar customers with a type of business that can be synergized with ULaMM customers and is in one location/region. The number of participants in the Synergy Clusterization training must be a minimum of 50 participants, consisting of PNM Mekaar customers and prospective customers and at least 1 ULaMM customer and/or PNM foster partners (Partnership Program customers) whose their types of business can be synergized.*

d. Training for PNM Mekaar Customer Preparation

The Company has a continuous training program (3 series) for prospective customers of PNM Mekaar which is conducted before disbursement, on the same day as the Preparation of Financing (PP) 1, 2, and 3. The program is conducted 4 times per month per regional, hence candidates customers have a view of the business to be run.

e. PKM Bermakna

PKM Bermakna is carried out by AO Mekaar through PKM activities. The materials were prepared by the PKU Division and adjusted to the grading system. The basic materials of Meaningful PKM are the importance of prayer, honesty,

kerja keras, motivasi usaha, gotong royong, membaca peluang usaha, mencari pemasok, menentukan cara berjualan, senyum, sapa, salam, higienis dan sanitasi, mencari pemasok tambahan serta pelatihan produksi dasar.

f. PKU Akbar

PKU Akbar merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Pusat dalam rangka memperkenalkan PNM (*branding*) dengan mengumpulkan nasabah (ULaMM dan PNM Mekaar). Jumlah peserta program ini minimal 500 orang, menghadirkan pejabat daerah setempat atau dibuka oleh wali kota/bupati.

g. Temu Usaha Nasabah PNM Mekaar

Temu Usaha Nasabah PNM Mekaar merupakan kegiatan yang diadakan khusus untuk para nasabah PNM Mekaar yang dilakukan oleh RM minimal 1 (satu) kali dalam satu bulan dan dikemas dalam bentuk kegiatan pelatihan (*knowledge sharing*). Jumlah peserta program ini minimal 75 nasabah, namun tidak menutup kemungkinan untuk mengundang calon nasabah atau nasabah yang sudah lunas dan mau bergabung kembali.

Realisasi Pelatihan PKU

Akumulasi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) berupa pelatihan bagi nasabah PNM ULaMM dan PNM Mekaar hingga Desember 2021 telah dilaksanakan 10.182 kali pelatihan yang diikuti oleh 255.189 nasabah ULaMM dan Mekaar dengan rincian sebagai berikut:

- 3.329 kali pelatihan program Temu Usaha Nasabah Unit dengan jumlah peserta 76.554 nasabah ULaMM;
- 5.817 kali pelatihan program Temu Usaha Nasabah Mekaar (TUNM) dengan peserta 158.928 nasabah Mekaar.
- 361 kali pelatihan Klasterisasi ULaMM dan Mekaar yang diikuti oleh 10.057 nasabah ULaMM dan Mekaar;
- 134 kali pelatihan program Temu Usaha Nasabah Cabang dengan peserta 1.938 nasabah ULaMM;
- 9 kali pelatihan Akbar (meliputi 438 proposal pengajuan cabang) yang diikuti oleh 6.344 nasabah ULaMM;
- 29 kali pelatihan program Pameran yang diikuti 217 nasabah ULaMM;
- 65 kali pelatihan program Pelatihan Persiapan Nasabah Mekaar (PPNM) dengan peserta 361 nasabah Mekaar;

Pada 2021, Divisi Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) telah membentuk klaster-klaster baru, baik dalam bidang sektoral (usaha) maupun teritorial (bisnis). Dengan demikian, total klaster yang ada saat ini adalah sebagai berikut.

discipline and hard work, business motivation, mutual cooperation, reading business opportunities, looking for suppliers, determining how to sell, smiling, greeting, greeting, hygiene and sanitation, finding additional suppliers and basic production training.

f. PKU Akbar

PKU Akbar is an activity organized by the Head Office to introduce PNM (branding) by gathering customers (ULaMM and PNM Mekaar). The number of participants in the program is at least 500, bringing together local officials or being opened by the mayor/regent.

g. PNM Mekaar Customer Gathering

PNM Mekaar Customer Gathering is an activity held specifically for PNM Mekaar customers that is conducted by Mekaar Branch at least once time in a month and is packaged in the form of training activities (knowledge sharing). The minimum number of participants for this program is 75 customers, but it is possible to invite prospective customers or customers who have paid off and want to rejoin.

PKU Training Realization

The accumulated implementation of Business Capacity Development (PKU) activities in the form of training for PNM ULaMM and PNM Mekaar customers until December 2021 has carried out 10,182 training sessions attended by 255,189 ULaMM and Mekaar customers with the following details:

- *3,329 training sessions for the Unit Customer Business Meeting program with a total of 76,554 ULaMM customers;*
- *5,817 training sessions for the Mekaar Customer Business Meeting (TUNM) program with 158,928 Mekaar customers as participants.*
- *361 ULaMM and Mekaar Clustering trainings attended by 10,057 ULaMM and Mekaar customers;*
- *134 training sessions for the Branch Customer Business Meeting program with 1,938 ULaMM customers participating;*
- *9 times Akbar training (covering 438 proposals for branch submissions) which was attended by 6,344 ULaMM customers;*
- *29 times of Exhibition program training attended by 217 ULaMM customers;*
- *65 times Mekaar Customer Preparation Training (PPNM) training program with 361 Mekaar customers as participants;*

In 2021, the Business Capacity Development Division (PKU) has formed new clusters, both in the sectoral (business) and territorial (business) fields. Thus, the current total of existing clusters is as follows.

Pembentukan Klasterisasi ULaMM dan Mekaar Tahun 2021

Formation of ULaMM Clusterization and Breaking in 2021

No	Judul Klasterisasi Clustering Title	Sektor Usaha Business Sector	Cabang ULaMM ULaMM Branch	Jenis Klasterisasi Clustering Type
1	Klasterisasi makanan dan minuman <i>Clustering of food and beverages</i>	Makanan <i>Food</i>	Aceh	Sektoral ULaMM <i>Sectoral ULaMM</i>
2	Klasterisasi usaha sembako <i>Clustering of basic necessities</i>	Perdagangan <i>Trading</i>	Banjarmasin	Sektoral ULaMM <i>Sectoral ULaMM</i>
3	Klasterisasi berbahan cumi <i>Clustering made from squid</i>	Makanan <i>Food</i>	Banyuwangi	Sektoral ULaMM <i>Sectoral ULaMM</i>
4	Tenun Khas Buton <i>Buton's Traditional Weaving</i>	Kerajinan <i>Craft</i>	Bau-Bau	Sektoral ULaMM <i>Sectoral ULaMM</i>
5	Klasterisasi Sembako <i>Basic Food Cluster</i>	Perdagangan <i>Trading</i>	Bekasi	Sektoral ULaMM <i>Sectoral ULaMM</i>
6	Tanaman Padi & Holtikultura <i>Rice Crops & Horticulture</i>	Pertanian <i>Agriculture</i>	Blitar	Sektoral ULaMM <i>Sectoral ULaMM</i>
7	Klasterisasi Sembako <i>Basic Food Cluster</i>	Perdagangan <i>Trading</i>	Bogor	Sektoral ULaMM <i>Sectoral ULaMM</i>
8	Klasterisasi Sektoral Anyaman Rotan <i>Rattan Weaving Sectoral Cluster</i>	Kerajinan <i>Craft</i>	Cirebon	Sektoral ULaMM <i>Sectoral ULaMM</i>
9	Klasterisasi makanan dan minuman <i>Clustering of food and beverages</i>	Makanan <i>Food</i>	Cirebon	Sektoral ULaMM <i>Sectoral ULaMM</i>
10	Klasterisasi Sembako <i>Basic Food Cluster</i>	Perdagangan <i>Trading</i>	Depok	Sektoral ULaMM <i>Sectoral ULaMM</i>
11	Klasterisasi Sembako <i>Basic Food Cluster</i>	Perdagangan <i>Trading</i>	Jakarta	Sektoral ULaMM <i>Sectoral ULaMM</i>
12	Klasterisasi makanan dan minuman <i>Clustering of food and beverages</i>	Makanan <i>Food</i>	Jambi	Sektoral ULaMM <i>Sectoral ULaMM</i>
13	Klasterisasi Petani Palawija & Holtikultura (PRISMA) <i>Clustering of Palawija & Horticulture Farmers (PRISMA)</i>	Pertanian <i>Agriculture</i>	Jember	Sektoral ULaMM <i>Sectoral ULaMM</i>
14	Klasterisasi usaha sembako <i>Clustering of basic necessities</i>	Perdagangan <i>Trading</i>	Kaltara	Sektoral ULaMM <i>Sectoral ULaMM</i>
15	Klasterisasi Olahan Pisang Menjadi Sale Pisang <i>Clustering Processed Bananas Into Banana Sale</i>	Makanan <i>Food</i>	Kendari	Sektoral ULaMM <i>Sectoral ULaMM</i>
16	Klasterisasi Tanaman Padi & Jagung (PRISMA) <i>Rice & Corn Clustering (PRISMA)</i>	Pertanian <i>Agriculture</i>	Lamongan	Sektoral ULaMM <i>Sectoral ULaMM</i>
17	Klasterisasi Petani Palawija & Holtikultura (PRISMA) <i>Clustering of Palawija & Horticulture Farmers (PRISMA)</i>	Pertanian <i>Agriculture</i>	Madiun	Sektoral ULaMM <i>Sectoral ULaMM</i>
18	Pengolahan Hasil Laut Kepiting Menjadi Produk Olahan Makanan <i>Processing Crab Sea Products into Processed Food Products</i>	Perikanan <i>Fishery</i>	Makassar	Sektoral ULaMM <i>Sectoral ULaMM</i>
19	Klasterisasi sektoral usaha kuliner <i>Culinary business sectoral clustering</i>	Makanan <i>Food</i>	Manado	Sektoral ULaMM <i>Sectoral ULaMM</i>
20	Klasterisasi usaha sembako <i>Clustering of basic necessities</i>	Perdagangan <i>Trading</i>	Mojokerto	Sektoral ULaMM <i>Sectoral ULaMM</i>
21	Lebah Madu Sawit (1) <i>Palm Honey Bee (1)</i>	Peternakan <i>Farm</i>	Padang	Sektoral ULaMM <i>Sectoral ULaMM</i>
22	Lebah Madu Sawit (2) <i>Palm Honey Bee (2)</i>	Peternakan <i>Farm</i>	Padang	Sektoral ULaMM <i>Sectoral ULaMM</i>
23	Klasterisasi kain jumputan <i>Clustering of jumputan fabrics</i>	Kerajinan <i>Craft</i>	Palembang	Sektoral ULaMM <i>Sectoral ULaMM</i>
24	Klasterisasi sektoral usaha kuliner <i>Culinary business sectoral clustering</i>	Makanan <i>Food</i>	Palopo	Sektoral ULaMM <i>Sectoral ULaMM</i>
25	Klasterisasi Sektoral Warung Kelontong <i>Sectoral Clustering of Grocery Stalls</i>	Perdagangan <i>Trading</i>	Palu	Sektoral ULaMM <i>Sectoral ULaMM</i>

No	Judul Klasterisasi Clustering Title	Sektor Usaha Business Sector	Cabang ULaMM ULaMM Branch	Jenis Klasterisasi Clustering Type
26	Klasterisasi Usaha Konveksi <i>Convection Business Clustering</i>	Industri <i>Industry</i>	Pati	Sektoral ULaMM <i>Sectoral ULaMM</i>
27	Klasterisasi Olahan Kelapa Sawit <i>Clustering Processed Palm Oil</i>	Pertanian <i>Agriculture</i>	Pekanbaru	Sektoral ULaMM <i>Sectoral ULaMM</i>
28	Klasterisasi Budidaya Magot <i>Clustering Magot Cultivation</i>	Peternakan <i>Farm</i>	Pematang Siantar	Sektoral ULaMM <i>Sectoral ULaMM</i>
29	Pengolahan Hasil Ikan <i>Fish Product Processing</i>	Perikanan <i>Fishery</i>	Pontianak	Sektoral ULaMM <i>Sectoral ULaMM</i>
30	Klasterisasi Budidaya Tanaman Kentang (PRISMA) <i>Potato Cultivation Clustering (PRISMA)</i>	Pertanian <i>Agriculture</i>	Probolinggo	Sektoral ULaMM <i>Sectoral ULaMM</i>
31	Klasterisasi Usaha Sembako <i>Clustering of Basic Necessities</i>	Perdagangan <i>Trading</i>	Samarinda	Sektoral ULaMM <i>Sectoral ULaMM</i>
32	Pedagang Retail <i>Retail Traders</i>	Perdagangan <i>Trading</i>	Semarang	Sektoral ULaMM <i>Sectoral ULaMM</i>
33	Klasterisasi Sembako <i>Basic Food Cluster</i>	Perdagangan <i>Trading</i>	Serang	Sektoral ULaMM <i>Sectoral ULaMM</i>
34	Klasterisasi Perdagangan Kelontong <i>Grocery Trade Clustering</i>	Perdagangan <i>Trading</i>	Singaraja	Sektoral ULaMM <i>Sectoral ULaMM</i>
35	Klasterisasi Budidaya Sereh Wangi <i>Clustering of Fragrant Lemongrass Cultivation</i>	Pertanian <i>Agriculture</i>	Subang	Sektoral ULaMM <i>Sectoral ULaMM</i>
36	Klasterisasi Sembako <i>Basic Food Cluster</i>	Perdagangan <i>Trading</i>	Tangerang	Sektoral ULaMM <i>Sectoral ULaMM</i>
37	Klasterisasi Sektoral Kuliner <i>Culinary Sectoral Clustering</i>	Makanan <i>Food</i>	Tangerang	Sektoral ULaMM <i>Sectoral ULaMM</i>
38	Klasterisasi Bawang Merah <i>Onion Clustering</i>	Pertanian <i>Agriculture</i>	Tegal	Sektoral ULaMM <i>Sectoral ULaMM</i>
39	Petani Janggolan <i>Crap Farmer</i>	Pertanian <i>Agriculture</i>	Tulungagung	Sektoral ULaMM <i>Sectoral ULaMM</i>
40	Klasterisasi Teritorial Perdagangan <i>Trade Territory Clustering</i>	Perdagangan <i>Trading</i>	Bandar Lampung	Teritorial ULaMM <i>ULaMM Territory</i>
41	Klasterisasi Teritorial <i>Territorial Cluster</i>	Pertanian <i>Agriculture</i>	Garut	Teritorial ULaMM <i>ULaMM Territory</i>
42	Klasterisasi Legalitas Usaha <i>Business Legality Clustering</i>	Aneka Usaha <i>Various Business</i>	Ambon	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
43	Olahan Makanan dari Kedelai <i>Processed Foods from Soy</i>	Makanan <i>Food</i>	Bandar Lampung	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
44	Klasterisasi Kerajinan Kain Sasirangan <i>Clustering of Sasirangan Fabric Crafts</i>	Kerajinan <i>Craft</i>	Banjarmasin	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
45	Klasterisasi Makanan dan Minuman <i>Food and Beverage Cluster</i>	Makanan <i>Food</i>	Banjarnegara	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
46	Pedagang Retail <i>Retail Traders</i>	Perdagangan <i>Trading</i>	Banjarnegara	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
47	Olahan Kuliner Kekinian <i>Contemporary Culinary Process</i>	Makanan <i>Food</i>	Banyuwangi	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
48	Pengolahan Ikan Tuna <i>Tuna Fish Processing</i>	Perikanan <i>Fishery</i>	Bau-Bau	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
49	Klasterisasi Pengolahan Ikan Asap <i>Smoked Fish Processing Cluster</i>	Perikanan <i>Fishery</i>	Bau-Bau	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
50	Aneka Olahan Berbahan Dasar Pisang <i>Various Processed Banana Based</i>	Makanan <i>Food</i>	Bekasi	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
51	Klasterisasi Otak-Otak <i>Brain Clustering</i>	Makanan <i>Food</i>	Bekasi	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
52	Klasterisasi Aneka Makanan dan Jajanan <i>Clustering of Various Foods and Snacks</i>	Makanan <i>Food</i>	Blitar	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>

No	Judul Klusterisasi Clustering Title	Sektor Usaha Business Sector	Cabang ULaMM ULaMM Branch	Jenis Klusterisasi Clustering Type
53	Klusterisasi Makanan dan Minuman (Kuliner) <i>Food and Beverage Clustering (Culinary)</i>	Makanan <i>Food</i>	Bogor	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
54	Kerajinan dari pelepah pisang <i>Crafts from banana fronds</i>	Kerajinan <i>Craft</i>	Bojonegoro	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
55	Pertanian (Pondok Pesantren Al-Ittifaq) <i>Agriculture (Al-Ittifaq Islamic Boarding School)</i>	Pertanian <i>Agriculture</i>	Cimahi	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
56	Perizinan Usaha untuk Usaha Kerupuk Mlarat <i>Business License for Mlarat Cracker Business</i>	Aneka Usaha <i>Various Business</i>	Cirebon	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
57	Pengrajin emping <i>emping craftsman</i>	Makanan <i>Food</i>	Cirebon	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
58	Klusterisasi Pembuatan Kue Kekinian <i>Clustering of Contemporary Cake Making</i>	Makanan <i>Food</i>	Denpasar	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
59	Klusterisasi Makanan dan Minuman (Kuliner) <i>Food and Beverage Clustering (Culinary)</i>	Makanan <i>Food</i>	Depok	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
60	Kerajinan Batik Tulis <i>Handicraft Batik</i>	Kerajinan <i>Craft</i>	Garut	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
61	Pedagang Online <i>Online Merchant</i>	Perdagangan <i>Trading</i>	Indramayu	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
62	Aneka makanan khas Betawi <i>Various Betawi food</i>	Makanan <i>Food</i>	Jakarta	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
63	Klusterisasi Kuliner Kue Kering <i>Culinary Pastries Clustering</i>	Makanan <i>Food</i>	Jakarta	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
64	Kerajinan Anyaman Piring Lidi dari Daun Sawit <i>Crafts Weaving Plate Sticks from Palm Leaves</i>	Kerajinan <i>Craft</i>	Jambi	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
65	Klusterisasi Anyaman Bambu <i>Bamboo Woven Clustering</i>	Kerajinan <i>Craft</i>	Jember	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
66	Klusterisasi Pengolahan Mangga Podang <i>Podang Mango Processing Cluster</i>	Pertanian <i>Agriculture</i>	Kediri	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
67	Nanas dan Olahannya <i>Pineapple and Processed</i>	Pertanian <i>Agriculture</i>	Kendari	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
68	Klusterisasi Olahan Ubi <i>Clustering of Processed Sweet Potato</i>	Pertanian <i>Agriculture</i>	Kendari	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
69	Petani Kopi <i>Coffee Farmer</i>	Pertanian <i>Agriculture</i>	Kendari	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
70	Pengolahan Tikar Pandan <i>Pandan Mat Processing</i>	Kerajinan <i>Craft</i>	Lamongan	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
71	Klusterisasi Tas Anyaman Plastik <i>Clustering of Plastic Woven Bags</i>	Kerajinan <i>Craft</i>	Madiun	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
72	Perizinan Usaha untuk Usaha Melalui OSS <i>Business Licensing for Business Through OSS</i>	Aneka Usaha <i>Various Business</i>	Magelang	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
73	Olahan Kuliner Oleh-Oleh Khas Magelang <i>Culinary Preparations Typical of Magelang</i>	Makanan <i>Food</i>	Magelang	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
74	Klusterisasi Bunga Potong <i>Clustering of Cut Flowers</i>	Pertanian <i>Agriculture</i>	Malang	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
75	Klusterisasi Pembuatan Abon Ikan <i>Clustering of Shredded Fish Production</i>	Perikanan <i>Fishery</i>	Manado	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
76	Klusterisasi Olahan Hasil Laut <i>Clustering of Processed Marine Products</i>	Perikanan <i>Fishery</i>	Manado	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
77	Tenun Desa Sade <i>Sade Village Weaving</i>	Kerajinan <i>Craft</i>	Mataram	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
78	Perikanan (Ikan Asin) <i>Fishery (Salted Fish)</i>	Perikanan <i>Fishery</i>	Medan	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
79	Klusterisasi Olahan Terasi <i>Clustering Processed Terasi</i>	Makanan <i>Food</i>	Medan	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>

No	Judul Klasterisasi Clustering Title	Sektor Usaha Business Sector	Cabang ULaMM ULaMM Branch	Jenis Klasterisasi Clustering Type
80	Budidaya Tanaman Porang <i>Porang Cultivation</i>	Pertanian <i>Agriculture</i>	Mojokerto	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
81	Pengolahan Hasil Bumi Empon-Empon <i>Processing of Empon-Empon Agricultural Products</i>	Pertanian <i>Agriculture</i>	Pacitan	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
82	Diversifikasi Produk Olahan Kopi <i>Diversification of Processed Coffee</i>	Pertanian <i>Agriculture</i>	Padang	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
83	Diversifikasi Produk Olahan Tebu <i>Diversification of Processed Sugarcane Products</i>	Pertanian <i>Agriculture</i>	Padang	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
84	Aneka Olahan Berbahan Dasar Udang <i>Various Processed Based Shrimp</i>	Makanan <i>Food</i>	Palembang	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
85	Klasterisasi Kerajinan dari Batok Kelapa <i>Clustering Crafts from Coconut Shells</i>	Kerajinan <i>Craft</i>	Palopo	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
86	Klasterisasi Pembuatan Kue Kekinian <i>Clustering of Contemporary Cake Making</i>	Makanan <i>Food</i>	Palopo	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
87	Klasterisasi Legalitas Usaha <i>Business Legality Clustering</i>	Aneka Usaha <i>Various Business</i>	Palopo	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
88	Klasterisasi Kripik Tortila <i>Tortilla Chips Clustering</i>	Makanan <i>Food</i>	Palu	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
89	Klasterisasi Produksi Gula Aren <i>Palm Sugar Production Cluster</i>	Pertanian <i>Agriculture</i>	Pekanbaru	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
90	Pedagang Makanan Ringan <i>Snack Merchant</i>	Makanan <i>Food</i>	Pematang Siantar	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
91	Pengolahan Hasil Pertanian <i>Agricultural Product Processing</i>	Pertanian <i>Agriculture</i>	Pontianak	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
92	Klasterisasi Perijinan Usaha (Online) <i>Business Licensing Clustering (Online)</i>	Aneka Usaha <i>Various Business</i>	Probolinggo	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
93	Diversifikasi Produk Berbahan Tikar Pandan <i>Product Diversification Made from Pandan Mat</i>	Kerajinan <i>Craft</i>	Purwokerto	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
94	Klasterisasi makanan berbahan durian <i>Clustering of food made from durian</i>	Makanan <i>Food</i>	Purwokerto	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
95	Klasterisasi Olahan Makanan <i>Food Processed Clustering</i>	Makanan <i>Food</i>	Samarinda	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
96	Aneka Olahan Makanan Kecil <i>Various Processed Snacks</i>	Makanan <i>Food</i>	Semarang	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
97	Anyaman Bambu Saketi <i>Saketi Bamboo Weaving</i>	Kerajinan <i>Craft</i>	Serang	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
98	Petani Kopi <i>Coffee Farmer</i>	Pertanian <i>Agriculture</i>	Sidikalang	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
99	Petani Tanaman Cabai <i>Chili Plant Farmers</i>	Pertanian <i>Agriculture</i>	Sidikalang	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
100	Klasterisasi Pengolahan Ikan Mujair <i>Clustering of Mujair Fish Processing</i>	Perikanan <i>Fishery</i>	Singaraja	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
101	Produksi Dan Perdagangan Tahu <i>Tofu Production and Trade</i>	Makanan <i>Food</i>	Solo	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
102	Klasterisasi Makanan Khas Daerah <i>Clustering of Regional Specialties</i>	Makanan <i>Food</i>	Subang	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
103	Pembuatan Produk Berbahan Baku Pisang dan Singkong <i>Manufacture of Products Made from Bananas and Cassava</i>	Makanan <i>Food</i>	Sukabumi	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
104	Kerajinan Bambu <i>Bamboo Crafts</i>	Kerajinan <i>Craft</i>	Tasikmalaya	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
105	Aneka Olahan Berbahan Dasar Tahu <i>Various Processed Tofu Based</i>	Makanan <i>Food</i>	Tegal	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>

No	Judul Klasterisasi Clustering Title	Sektor Usaha Business Sector	Cabang ULaMM ULaMM Branch	Jenis Klasterisasi Clustering Type
106	Sapi Perah <i>Dairy cows</i>	Peternakan <i>Farm</i>	Tulungagung	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
107	Pengolahan Gula Jawa Dari Deres Kelapa <i>Processing Java Sugar From Coconut Deres</i>	Makanan <i>Food</i>	Wonogiri	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
108	Klasterisasi Jadah Tempe <i>Clustering Jadah Tempe</i>	Pertanian <i>Agriculture</i>	Yogyakarta	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
109	Klasterisasi Kerajinan Tangan Serat Alam <i>Clustering of Natural Fiber Crafts</i>	Kerajinan <i>Craft</i>	Yogyakarta	Teritorial Mekaar <i>Mekaar Territory</i>
110	Klasterisasi Anyaman Daun Pandan Wangi <i>Clustering of Weaving Pandan Fragrant Leaves</i>	Kerajinan <i>Craft</i>	Denpasar	Sinergi <i>Synergy</i>
111	Budidaya Magot <i>Cultivation of Magot</i>	Peternakan <i>Farm</i>	Malang	Sinergi <i>Synergy</i>
112	Klasterisasi Gula Kristal <i>Crystallized Sugar Cluster</i>	Pertanian <i>Agriculture</i>	Purwokerto	Sinergi <i>Synergy</i>
113	Olahan Ikan <i>Processed fish</i>	Perikanan <i>Fishery</i>	Semarang	Sinergi <i>Synergy</i>
114	Olahan Keripik Singkong <i>Processed Cassava Chips</i>	Makanan <i>Food</i>	Serang	Sinergi <i>Synergy</i>
115	Klasterisasi Pengolahan Tempe <i>Tempe Processing Clustering</i>	Makanan <i>Food</i>	Surabaya	Sinergi <i>Synergy</i>
116	Klasterisasi Sate Bandeng <i>Milkfish Satay Clustering</i>	Makanan <i>Food</i>	Tangerang	Sinergi <i>Synergy</i>

Jasa Manajemen

Pelaksanaan aktivitas jasa manajemen merupakan salah satu dari dua tugas utama PNM sejak Perusahaan Pelaksanaan aktivitas jasa manajemen merupakan salah satu dari dua tugas utama PNM sejak Perusahaan didirikan, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 1999. Perusahaan memiliki dua aktivitas Jasa Manajemen, yaitu Jasa Manajemen untuk penguatan lembaga keuangan dan sektor riil dalam bentuk layanan kerjasama Madani Partnership. Layanan Madani Partnership merupakan sinergi PNM dengan lembaga lain seperti BUMN, perusahaan swasta, perusahaan multinasional, pemerintah daerah, departemen, lembaga nirlaba, dan lembaga lainnya dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan UMKM.

Untuk optimalisasi dukungan terhadap program pemberdayaan bagi masyarakat pra sejahtera, sepanjang tahun 2021 PNM telah bekerjasama dengan 11 (sebelas) mitra kerja untuk Madani Partnership yang berasal dari BUMN, perusahaan swasta dan lembaga nirlaba. Kerjasama yang terbangun guna meningkatkan kapasitas masyarakat pra sejahtera melalui pelatihan dan pendampingan agar taraf hidup meningkat. Pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap implementasi kegiatan Jasa Manajemen terhadap penerima manfaat. Penyesuaian aktifitas kegiatan sebagian beralih dengan aktifitas berbasis digital dengan tetap menjaga kualitas dampak program untuk penerima manfaat.

Management Services

Implementation of management service activities is one of the two main tasks of PNM since the Company. The performance of management service activities has been one of the two main tasks of PNM since the Company was founded, as stipulated in Government Regulation No. 38/1999. The Company has two Management Services activities, namely Management for strengthening financial institutions and the real sector in Madani Partnership cooperation services. The Civil Service Partnership is a PNM synergy with other institutions such as BUMN, private companies, multinational companies, local governments, departments, non-profit institutions, and other institutions in empowering and developing MSMEs.

Throughout 2021, PNM collaborated with 11 (eleven) work partners for the Madani Partnership from SOEs, private companies, and non-profit institutions to optimize support for empowerment programs for underprivileged communities. Cooperation aimed at increasing the capacity of underprivileged communities through training and assistance, thereby raising their standard of living. The COVID-19 pandemic had an impact on the delivery of Management Services to beneficiaries. Activities were shifted partially to digital-based activities while maintaining the quality of program impact for beneficiaries.

Tabel Project Program Madani Partnership
Table of Madani Partnership Program Projects

No.	Program Pemberdayaan Empowerment Program	Jangka Waktu Period of Time	Lokasi Location	Mitra Partner
1	Hibah Dana Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Guna Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Melalui Penyaluran Modal Mikro Serta Pelatihan dan Pendampingan Pengembangan Usaha <i>Grants from the Community Development and Empowerment Fund, Micro and small business development through micro capital distribution and business development training and assistance.</i>	12 Bulan <i>12 months</i>	Banyuwangi – Jawa Timur <i>Banyuwangi – East Java</i>	PT Bumi Suksesindo
2	Program Pendampingan Kewirausahaan Bagi Kelompok Masyarakat Binaan PT Aneka Tambang Tbk <i>Entrepreneurship Assistance Program for Assisted Community Groups of PT Aneka Tambang Tbk</i>	7 Bulan <i>7 months</i>	Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, DKI Jakarta dan Jawa Barat <i>Southeast Sulawesi, West Kalimantan, DKI Jakarta and West Java</i>	PT Aneka Tambang Tbk
3	Pelaksanaan Program Ibu Sehat Keluarga Sejahtera Bagi Nasabah PNM Mekaar <i>Implementation of the Healthy Family Welfare Program for PNM Mekaar Customers</i>	12 Bulan <i>12 months</i>	Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Riau <i>West Java, Central Java, East Java, Riau</i>	PT Unilever Indonesia Tbk
4	Program Bantuan Peningkatan Pendidikan Pendamping Masyarakat Pra Sejahtera <i>Assistance Program to Improve Pre-Prosperous Community Assistance Education</i>	1 Bulan <i>1 months</i>	Jawa Barat dan Jawa Tengah <i>West Java and Central Java</i>	PT Jamkrindo
5	Program Bantuan Peningkatan Pendidikan Pendamping Masyarakat Pra Sejahtera <i>Assistance Program to Improve Pre-Prosperous Community Assistance Education</i>	1 Bulan <i>1 months</i>	Sumatera Utara dan DKI Jakarta <i>North Sumatra and DKI Jakarta</i>	PT Inalum
6	Program Bantuan Peningkatan Pendidikan Pendamping Masyarakat Pra Sejahtera <i>Assistance Program to Improve Pre-Prosperous Community Assistance Education</i>	1 Bulan <i>1 months</i>	Jawa Barat dan Jawa Tengah <i>West Java and Central Java</i>	PT PLN
7	Program Pengembangan Usaha Melalui Penyediaan Akses Sarana Air Bersih Dan Sanitasi Kepada Nasabah PNM Mekaar <i>Business Development Program Through Provision of Access to Clean Water and Sanitation Facilities for PNM Mekaar Customers</i>	12 Bulan <i>12 months</i>	Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan NTB <i>Provinces of Aceh, North Sumatra, Lampung, West Java, Central Java, East Java and NTB</i>	Water.org
8	Pelaksanaan Program Pemberdayaan UMKM Bagi Kelompok Masyarakat Pra Sejahtera <i>Implementation of the MSME Empowerment Program for Pre-Prosperous Community Groups</i>	12 Bulan <i>12 months</i>	Banten dan NTB <i>Banten and NTB</i>	Bank BTN
9	Dukungan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Tanah Masyarakat <i>Support for the Implementation of Community Land Empowerment Program</i>	1 Bulan <i>1 months</i>	Jawa Barat <i>West Java</i>	ATR/BPN
10	Penyaluran Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil dan Pengembangan Kapasitas Usaha (Capacity Building) Bagi Mitra Binaan PT ANTAM Tbk <i>Distribution of Micro Small Business Funding Programs and Business Capacity Building (Capacity Building) for PT ANTAM Tbk Fostered Partners</i>	6 Bulan <i>6 months</i>	Jawa Barat, Banten, Kalimantan Barat dan Sulawesi Tenggara <i>West Java, Banten, West Kalimantan and Southeast Sulawesi</i>	PT Aneka Tambang Tbk
11	Pengembangan Kapasitas Usaha Program Kemitraan Bagi Mitra Binaan Kelompok Peternak Sapi Perah Campaka Sari Di Cianjur <i>Business Capacity Development Partnership Program for Fostered Partners of the Campaka Sari Dairy Cattle Farmer Group in Cianjur</i>	1 Bulan <i>1 months</i>	Jawa Barat <i>West Java</i>	PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
12	Pengembangan Kapasitas Usaha Program Kemitraan Bagi Mitra Binaan Kelompok Usaha Industri Aneka Logam Di Sidoarjo <i>Business Capacity Development Partnership Program for Fostered Partners of Various Metal Industry Business Groups in Sidoarjo</i>	2 Bulan <i>2 months</i>	Jawa Timur <i>East Java</i>	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut

Aktivitas Jasa Manajemen merupakan salah satu *core business* PNM dalam bidang non finansial berupa bantuan teknis, pelatihan, konsultasi manajemen, pendampingan bagi manajemen UMKM, serta aktivitas lainnya. Pada tahun 2021, kegiatan implementasi program pemberdayaan secara digital mendominasi jumlah pelatihan yang diselenggarakan. Hal ini merupakan salah satu komitmen PNM dalam membantu para mitra untuk lebih cepat melakukan adaptasi menuju era *digital* meski masih dalam tahap yang sederhana.

Sepanjang tahun 2021, pencapaian realisasi pendapatan Jasa Manajemen telah melampaui target RKAP 2021 menjadi 103,12% dari total target sebesar Rp11,02 miliar dengan pencapaian sebesar Rp11,36 miliar. Sebagian besar pendapatan Jasa Manajemen pada tahun 2021 didominasi kontribusi dari aktifitas kerjasama dalam layanan Madani Partnership sebesar Rp6,78 miliar atau 60% dari pendapatan Jasa Manajemen. Sedangkan pendapatan lainnya berasal dari pendapatan Deposito produk trust fund yang mencapai 40% dari total pendapatan. Kondisi perekonomian Nasional tahun 2021 menjadi sebuah pemicu untuk memacu aktivitas Jasa Manajemen berekspansi lebih lanjut terutama dalam pengelolaan produk Madani Partnership. Hal ini dikarenakan tahun 2021 akan menjadi tantangan bagi seluruh bisnis untuk dapat berakselerasi kembali setelah diterjang pandemi COVID-19.

Management Services Activities are one of PNM's core businesses in the non-financial sector in the form of technical assistance, training, management consulting, assistance for MSME management, and other activities. In 2021, digital empowerment program implementation activities dominated the number of trainings held. This is one of PNM's commitments to helping partners to adapt more quickly to the digital era, even though it is still in a simple stage.

Throughout 2021, the realization of Management Services revenue has exceeded the 2021 RKAP target to be 103.12% of the total target of IDR11.02 billion with the achievement of IDR11.36 billion. Most of the Management Services revenue in 2021 was dominated by contributions from cooperative activities in Madani Partnership services, amounting to IDR6.78 billion or 60% of Management Services revenue. Meanwhile, other income comes from income from deposits from trust fund products, which account for 40% of total revenue. The condition of the National economy in 2021 is a trigger to spur Management Services activities to expand further, especially in the management of Madani Partnership products. This is because 2021 will be a challenge for all businesses to be able to accelerate again after being hit by the COVID-19 pandemic.

Tabel Pencapaian Realisasi Kinerja JML Tahun 2021
Table of Achievements of JML Performance in 2021

No.	Portofolio Portfolio	Total Target RKAP 2021	Realisasi 2021 Realization	Total Target RKAP 2020	Realisasi 2020 Realization
1	Pelatihan dan Pendampingan <i>Training and Mentoring</i>	-	-	305	330
2	Peningkatan Kapasitas Usaha Mitra Binaan BUMN dan Pengelolaan Program TJSL <i>Increasing the Business Capacity of BUMN Fostered Partners and Management of the TJSL Program</i>	3.000	2.786	2.200	2.242
3	Program Pemberdayaan dan Pengelolaan Program CSR dari MNC dan Perusahaan Swasta <i>Empowerment and Management of CSR Programs from MNCs and Private Companies</i>	2.120	2.675		
4	Pemberdayaan Masyarakat dengan Lembaga Nirlaba <i>Community Empowerment with Non-Profit Institutions</i>	1.400	1.327	-	1.517
5	Trustfund Pengelolaan Dana Deposito <i>Deposit Fund Management Trustfund</i>	4.500	4.590	7.070	6.991
Jumlah / Total		11.020	11.379	9.575	11.080

Madani Partnership

Perseroan berkomitmen untuk senantiasa hadir sebagai penopang pemberdayaan UMKM di Indonesia salah satu cara melalui Kolaborasi dengan BUMN lain pada kerjasama Peningkatan Kapasitas Usaha Mitra Binaan dari Pendanaan Usaha Mikro Kecil atau PUMK. Di tahun 2021, Perseroan telah dipercaya menyelenggarakan Peningkatan Kapasitas Usaha Mitra Binaan PUMK dengan BUMN lain, seperti PT Aneka Tambang Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., dan PT Surabaya Industrial Estate Rungkut. Output dari program Peningkatan Kapasitas Usaha ini adalah agar mitra binaan yang telah diberdayakan dan dibekali dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman diharapkan dapat naik kelas atau menjadi *bankable*.

Perseroan juga telah bekerja sama dalam hal program pemberdayaan masyarakat prasejahtera melalui program peningkatan akses air bersih dan sanitasi bersama NGO International water.org di 7 Provinsi. Dampak yang diharapkan dari program pemberdayaan ini adalah adanya pemahaman dan kesadaran dari masyarakat prasejahtera tentang pentingnya air bersih dan sanitasi yang layak bagi keluarga, sehingga masyarakat prasejahtera dapat hidup lebih sehat.

Madani Partnership

The Company committed to always being present as a support for the empowerment of MSMEs in Indonesia; one of the ways was to collaborate with other SOEs in the collaboration to Increase Business Capacity of Foster Partners from Micro Small Business Funding or PUMK. In 2021, the Company was entrusted with organizing the Business Capacity Building for PUMK Partners in collaboration with other SOEs such as PT Aneka Tambang Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., and PT Surabaya Industrial Estate Rungkut. This Business Capacity Building program was expected to produce fostered partners empowered and equipped with various knowledge and understanding to be able to advance to class or become bankable.

In addition, the company also collaborated on empowerment programs for underprivileged communities in 7 provinces with the NGO International water.org to increase access to clean water and sanitation. The expected impact of this empowerment program was for underprivileged communities to understand and be aware of the importance of clean water and proper sanitation for families, allowing underprivileged communities to live healthier lives.

Profil Nasabah PNM Mekaar Unggulan

PNM Mekaar Customer Profile Features

Pelangganpun Berdatangan

Customers are Coming

Farika Linda Tanjung

Produsen Kue
Cake Production



Banyak wanita yang ingin mempunyai usaha, namun faktor permodalan kadang menjadi kendala. Lebih lagi bagi wanita dari kalangan prasejahtera yang serba kekurangan. Untuk makan saja mereka kesulitan apa lagi untuk modal usaha. Namun sebesar apapun kendalanya, selama mau berusaha, tentu jalannya akan terbuka.

Kisah sukses Farika Linda Tanjung patut menjadi pelajaran. Wanita kelahiran Sragen (1979) yang tinggal di Jakarta Barat ini telah membuktikannya. Usaha pembuatan kue yang dia rintis beberapa tahun lalu kini berkembang pesat. Padahal, modal yang dia miliki sangat minim. Dia pun sempat mengalami jatuh bangun dalam menjalankan usahanya. Namun dia tak pernah patah semangat, terus belajar dan melakukan berbagai inovasi. Setiap hari Farika sibuk dengan usahanya mulai dari belanja bahan baku, melakukan proses produksi hingga pemasaran. Semua dia kerjakan sendiri. Untuk pemasaran misalnya, dia menitipkan kue buatannya di warung-warung kecil di sekitar tempat tinggalnya.

Tidak semua kue itu laku, kadang berhari-hari tidak laku sehingga terpaksa diganti dengan yang baru. Namun ketekunanlah yang menjadi modal utama hingga usahanya tetap bertahan. Hingga tiba suatu hari Farika mendapat tawaran untuk bergabung dengan kelompok ibu-ibu yang dibina oleh PNM Mekaar Cabang Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Tidak hanya segi permodalan yang ditawarkan PNM Mekaar, tetapi juga berbagai pembinaan dan motivasi untuk mewujudkan mimpi para wanita prasejahtera ini.

Many women want to start their own businesses, but lack of capital can be an obstacle, even more women from disadvantaged backgrounds who were completely deprived. It was difficult for them to just eat moreover to think for business capital. however, no matter how big the obstacle, if we want to try, the way will open.

Farika Linda Tanjung's success story should serve as a lesson to others. This woman, who was born in Sragen in 1979 and now lives in West Jakarta, demonstrated it. Her cake-making business, which she started a few years ago, was now thriving. In fact, she owned very little capital. In running her business, she also had ups and downs, but she was never discouraged, and she continued to learn and innovate. Farika worked on her business every day, from purchasing raw materials to carrying out the manufacturing process to marketing. She did everything on his own. For marketing, she placed her homemade cakes in small stalls around her house.

Not all cakes could be sold well; sometimes they did not sell for days and had to be replaced with new ones. However, perseverance became the most important capital for the business to survive. Until one day, Farika was approached by PNM Mekaar, Kebon Jeruk Branch, West Jakarta, and asked to join a group of women mentored by PNM Mekaar. PNM Mekaar provided not only capital, but also coaching and motivation to help the underprivileged women realize their dreams.

PNM Mekaar memberikan pembinaan terkait manajemen keuangan, seperti cara memutar modal, membayar angsuran, dan berbagai peluang dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. PNM Mekaar juga menekankan pentingnya kebersamaan, kedisiplinan, kejujuran, serta kerja keras dalam mengembangkan usaha. Berkat kerja keras dan berbagai bimbingan dari PNM Mekaar akhirnya berbuah keberhasilan.

Memang, akibat pandemi COVID-19 usahanya sedikit mengalami penurunan, karena banyak perusahaan travel yang menghentikan kerjasama. Namun menjelang akhir tahun 2020 kembali mengalami peningkatan, karena didukung oleh jaringan *reseller* yang melayani perkantoran, termasuk pesanan rutin dari Bandara Sukarno Hatta. Kini Farika mampu memproduksi kue dengan merek "Rika Cakes" ini rata-rata 1000 pcs per hari. Ke depan, ibu dari enam anak ini berencana untuk membuka toko yang khusus menjual kue buatannya.

PNM Mekaar offered financial management advice, such as how to rotate capital, pay installments, and various ways to improve family welfare. PNM Mekaar also emphasized the importance of teamwork, discipline, honesty, and hard work in business development. It was finally successful as a result of PNM Mekaar's hard work and various guidances.

Indeed, as a result of the COVID-19 pandemic, their business decreased slightly, as many travel companies stopped cooperating. However, there was an increase again near the end of 2020, thanks to a network of resellers serving offices, including routine orders from Sukarno Hatta Airport. Farika could now produce 1000 pcs of cakes per day under the brand "Rika Cakes." This mother of six children hopes to open a bakery specializing in homemade cakes in the future.

Lepas dari Jerat Kemiskinan

Get out of the Strap of Poverty

Meri Magdalena

Piscok dan Sembako
Piscok and Sembako



Sudah cukup lama Meri Magdalena (45 tahun) menekuni usaha berjualan pisang coklat alias piscok. Meski pendapatannya tidak terlalu besar, Meri tetap tekun menjalaninya. Jarak tempuh yang cukup jauh dari tempat tinggal ke tempat usaha, tidak menjadi hambatan bagi ibu empat anak ini. Setiap hari dia membuat dan menjual piscok tanpa kenal lelah.

Meri Magdalena (45 years old) has been selling chocolate bananas or piscok for quite some time. Meri continues to live her life despite the fact that her income is modest. The distance between her home and her place of business was not an issue for this mother of four children. She tirelessly made and sold piscok every day.

Hingga suatu hari Meri mengalami kecelakaan. Dia sempat opname beberapa hari di rumah sakit. Pihak dokter menyarankan agar dia operasi. Namun karena tidak mempunyai biaya, saran itu tidak dilaksanakan. Akibatnya, Meri tak bisa sembuh total. Karena itu dia pun tak bisa meneruskan usahanya. Dia tak mampu menempuh perjalanan yang begitu jauh. Suaminya juga tak bisa menggantikan, karena terikat pekerjaan sebagai guru honorer.

Until Meri had an accident one day. She was hospitalized and stayed for several days. The doctor advised her to have surgery. The suggestion, however, was not implemented due to a lack of funds. As a result, Meri was unable to fully recover. As a result, she was not influenced to continue her business. She could not possibly have traveled that far. Her husband was also unable to replace her because of his obligations as an honorary teacher.

Akhirnya Meri memutuskan untuk mencari orang lain yang bisa menjalankan usaha tersebut. Dia sendiri tetap menyiapkan adonan piscok, sedangkan untuk proses penggorengan dan penjualan dilakukan oleh mitranya. Dengan cara ini usahanya kembali berjalan lancar.

Setelah usaha piscok berjalan normal, timbul keinginan Meri untuk mengembangkan usaha lain, yaitu warung sembako. Dia melihat usaha ini mempunyai peluang cukup bagus, dan belum banyak saingan. Karena itu, Meri mulai melakukan persiapan dan mulai membuka warung sembako di rumahnya.

Dari usaha ini Meri mampu meraih pendapat yang cukup besar sehingga bisa memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangganya. Meski demikian, Meri tetap berkeinginan untuk lebih maju lagi. Karena itu, ketika mendapatkan tawaran pembiayaan dari PNM Mekaar, Cabang Pancuran Batu, Medan, Meri sangat tertarik dan langsung bergabung dalam kelompok.

Dalam perkembangan terakhir Meri lebih focus pada usaha sembakonya, karena tidak terlalu rumit, bisa dikerjakan di rumah dan konsumennya selalu ada. Dari hasil usaha ini Meri bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari serta untuk membiayai sekolah keempat anaknya.

Meri eventually decided to hire someone else to run the company. She still prepared the piscok dough himself, while her partners handle the frying and sales. As a result, the company was back on track.

Meri's desire to develop another business, namely a food stall, arose after the piscok business was running smoothly. She saw that this business had a lot of potential, and that there weren't many competitors. As a result, Meri began to make preparations and set up a food stall at her home.

Meri was able to obtain a large enough income as a result of her efforts to meet the various needs of her household. Meri, on the other hand, wanted to go even further. Meri was immediately interested and joined the group after receiving a financing offer from PNM Mekaar, Pancuran Batu Branch, Medan.

Meri recently focused more on her basic food business because it was not too complicated, and it could be done at home, and the customers were always coming. Meri was able to meet the daily needs as well as pay for their four children's schooling, thanks to the profits from this business.

Menularkan Semangat Berusaha

Transmitting the Spirit of Business

Pantini

Warung Mini
Mini Stall



Pantini (24 tahun), biasa dipanggil lin, warga Kel. Ngembat Padas, Kec. Gemolong, Kab. Sragen. Ibu muda ini tinggal bersama ibunya, beberapa keponakan dan bayinya yang baru berumur dua minggu. Rumah mereka sangat sederhana, sempit, beralaskan tanah dan ber dinding kayu. Terlihat cahaya matahari menembus beberapa celah atap yang menganga. Keseharian lin sibuk mengurus ibunya yang sudah uzur dan buah hatinya yang baru lahir.

Pantini (24 years old), also known as lin, is a resident of Kel. Ngembat Padas, Kec. Gemolong, Kab. Sragen. This young mother shares a home with her mother, several nephews, and her two-week-old baby. Their home is very simple, with a narrow ground floor and wooden walls. The sun shines through the gaping holes in the roof. Every day, lin is preoccupied with caring for her ailing mother and her newborn baby.

Keadaan tempat tinggalnya mencerminkan kondisi ekonomi keluarga ini yang hanya bertumpu pada pendapatan suaminya yang bekerja serabutan di ibukota, Jakarta. Karena itu lin sangat senang ketika suatu hari datang petugas PNM Mekaar Cabang Gemolong yang mengenalkan program peningkatan kesejahteraan keluarga. Sebab, sudah lama lin ingin membuat usaha, tapi dia bingung mau usaha apa.

Setelah berdiskusi dengan PNM Mekaar, akhirnya muncul idenya untuk membuka usaha kecil-kecilan berupa warung jajanan anak-anak. Kebetulan di depan rumahnya ada lahan pekarangan, dan di sekitarnya banyak anak yang suka bermain. Kemudian lin bergabung dengan kelompok PNM Mekaar untuk mendapatkan pembinaan dan pinjaman modal.

Bersama anggota lainnya, lin menjalani semua tahapan pembinaan hingga pinjaman cair. Sejalan dengan proses itu, dia pun mulai melakukan persiapan. Dengan dibantu tetangganya, lin mendirikan bangunan kecil di depan rumahnya dengan memanfaatkan kayu dan bambu yang ada di sekitarnya.

Hanya berselang beberapa hari, bangunan mungil itu sudah dipenuhi beraneka makanan ringan. Anak-anak di sekitarnya terlihat antusias membeli makanan sambil bermain. lin sangat bahagia bisa mewujudkan keinginannya memiliki usaha. Meski masih kecil, setidaknya dia sudah memiliki kesibukan baru, mengelola usaha tanpa harus meninggalkan kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Usahanya terus berkembang dengan jenis dagangan yang makin beragam. Dari usaha ini dia mampu memenuhi keperluan sehari-hari, sehingga uang kiriman suaminya bias dia simpan untuk masa depan anaknya.

Semangat lin telah menginspirasi warga sekitarnya. Mereka ingin mengikuti jejak lin dengan bergabung dalam kelompok PNM Mekaar. Kalau sebelumnya sangat sulit untuk membentuk kelompok nasabah di Kelurahan Ngembat Padas, kini sudah ada empat kelompok dan akan terus bertambah. Kerja keras dan kerja ikhlas memang tak pernah sia-sia. Lebih lagi karena tujuannya sangat mulia: membantu masyarakat pra-sejahtera.

Her living situation reflected the family's economic situation, which was solely dependent on her husband's income from odd jobs in Jakarta. As a result, lin was overjoyed when a PNM Mekaar Gemolong officer came to introduce a program to improve family welfare. Because lin had been wanting to start a business for a long time but was unsure of what to do.

After consulting with PNM Mekaar, the decision was made to start a small business in the form of a children's snack stall. In addition, there is a yard in front of her house, and many children enjoy playing in it. lin then joined the PNM Mekaar group to receive coaching and a capital loan.

lin, along with other members, went through all stages of coaching, culminating in liquid loans. She began to make preparations in accordance with the procedure. lin, with the assistance of her neighbors, constructed a small structure in front of her house out of the wood and bamboo that surrounded her.

Only a few days later, the tiny structure was brimming with various snacks. The children in the vicinity appeared to be enthusiastic about purchasing food while playing. lin was overjoyed to be able to pursue her dream of owning a business. Even though she is still young, she has a new job managing a business without having to abandon her responsibilities as a housewife. Her company is expanding its product line to include a wider range of products. She is able to meet her daily needs through this business, allowing her to save the money sent by her husband for her child's future.

lin's spirit has inspired the people who live nearby. They want to follow in her footsteps and join the Mekaar PNM group. Previously, it was difficult to form customer groups in Ngembat Padas Village; now, there are four groups, with more on the way. Hard work and sincerity are never in vain. Furthermore, because the goal is so noble: to assist underprivileged communities.

Tak Henti Berinovasi

Do Not Stop Innovate

Tati Suharyati

Lauk dan Makanan Ringan
Side dishes and Snacks



Giat berusaha, rajin, ramah, dan selalu aktif di kelompok. Itulah sosok salah seorang nasabah PNM Mekaar Cabang Karangnunggal, Tati Suharyati. Dia tinggal di rumah sederhana bersama suaminya, Wawan, dan dua dari empat anaknya di Desa Karangmekar, Kec. Karangnunggal, Tasikmalaya. Pendapatan suaminya yang hanya tukang ojek tak mampu mencukupi kebutuhan keluarganya. Itu pula yang mendorong Tati untuk mencari tambahan pendapatan dengan berjualan lauk-pauk dan makanan ringan.

Kegemaran Tati memasak menjadi modal utama saat dia memulai usaha ini beberapa tahun lalu. Setiap hari dia berjalan kaki mengelilingi setiap sudut perkampungan untuk menawarkan hasil olahannya. Terik matahari dan guyuran hujan tak menghalanginya untuk terus berjalan menjemput rezeki. Namun yang namanya usaha, kadang mengalami naik-turun. Kondisi persaingan juga cukup ketat dengan banyaknya warung yang menjual produk serupa. Namun hal itu tidak menyurutkan tekadnya untuk terus berusaha.

Ada keinginannya untuk mengembangkan usaha ini agar lebih banyak produk yang ditawarkan. Namun keterbatasan modal menjadi kendala. Karena itu, ketika Tati mendapat informasi mengenai pinjaman ringan dari PNM Mekaar, dia langsung tertarik. Setelah mendapat izin dari suaminya, Tati pun bergabung dalam kelompok hingga akhirnya mendapat pinjaman sebesar Rp2 juta.

Dana tersebut dia gunakan untuk modal pengembangan usaha dengan membuka warung kecil-kecilan di rumahnya. Dari warung tersebut terbukti pendapatannya jauh lebih meningkat. Malahan dia bisa menyisihkan sebagian keuntungan untuk tambahan modal.

Setelah pinjaman pertama lunas, Tati kembali mengajukan pinjaman kedua, sebesar Rp3 juta. Dia juga terlibat dalam kegiatan “Pelatihan Jahit Menjahit Sinergy Usaha Nasabah Mekaar-ULaMM” yang berlangsung 10 hari. Meskipun latar belakangnya bukan penjahit, namun Tati sangat bersemangat untuk mendapatkan ilmu dan keterampilan baru ini.

In the group, she is enterprising, diligent, friendly, and always active. Tati Suharyati, a customer of the PNM Mekaar Karangnunggal Branch, represents this figure. She lives in Karangmekar Village, Kec. Karangnunggal, Tasikmalaya, with her husband, Wawan, and two of her four children in a simple house. Her husband's income as a motorcycle taxi driver was insufficient to meet his family's needs. Tati was also inspired to earn extra money by selling side dishes and light snacks.

When Tati started this business a few years ago, her passion for cooking became the main capital. Every day, she walks around the village, offering her processed goods. The scorching sun and pouring rain didn't stop her from walking to offer her goods. However, in running a new business, there was always ups and downs. The competition was also fierce, with many stalls selling similar products. However, this did not deter her from continuing to try.

There was a desire to grow this business so that more products could be offered. However, a lack of capital was an impediment. As a result, when Tati learned about a light loan from PNM Mekaar, she was immediately interested. Tati joined the group after obtaining permission from her husband and eventually received a loan of IDR2 million.

She put the money toward business development by opening a small shop in his home. It demonstrated that their income increased significantly as a result of these stalls. In fact, she could save some of the profits for future investments.

Tati applied for a second loan of IDR3 million after the first loan was paid off. She was also involved in the 10-day activity “Sewing Training on Business Synergy for Mekaar-ULaMM Customers.” Tati was very excited to learn this new skill and knowledge, despite the fact that she had no sewing experience.

Kini Tati sudah bias merenovasi rumah serta membeli sepeda motor. “PNM Mekaar sangat membantu, karena pinjamannya ringan. Tidak hanya membantu permodalan, tetapi juga memberikan pengetahuan dan ketrampilan,” tuturnya.

Saling Memotivasi dan Menguatkan

Tati is now able to renovate her home and purchase a motorcycle. “Because the loan is small, PNM Mekaar is extremely helpful.” “It’s not just about providing capital; it’s also about providing knowledge and skills,” she explained.

Motivate and Strengthen Each Other

Yeni Puspa Laura

Salon Kecantikan
Beauty Salon



Yeni Puspa Laura merupakan contoh seorang ibu tangguh dalam berusaha. Hal itu dia lakukan karena didorong oleh keinginan untuk meringankan beban suaminya yang hanya bekerja sebagai tukang harian. Dia juga menginginkan kedua putrinya bisa melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.

Yeni Puspa Laura is an example of a tough business mother. She did this to relieve the burden on her husband, who only worked as a handyman on a daily basis. She also wished for his two daughters to continue their education and attend college.

Melalui seorang temannya Yeni diajak untuk bergabung dengan kelompok PNM Mekaar. Waktu itu Yeni belum tahu usaha apa yang akan dia lakukan. Namun setelah aktif di kelompok, timbul keinginannya untuk membuka salon kecantikan. Yeni jadi teringat bahwa sebelumnya dia pernah belajar menata rambut dari kakaknya yang memiliki usaha salon. Dia juga melihat bahwa jenis usaha itu belum ada di sekitar tempat tinggalnya.

Yeni was invited to join the PNM Mekaar group by a friend. Yeni had no idea what kind of business she wanted to start at the time. However, after becoming involved in the group, she developed a desire to open a beauty salon. Yeni recalled having previously learned how to style hair from her sister, who owns a salon. She also noticed that this type of business did not exist nearby where she lived.

Berbekal pinjaman pertama dari PNM Mekaar sebesar Rp2 juta, Yeni memberanikan diri untuk menyulap ruangan tamu rumahnya menjadi salon kecantikan. Berbekal dana tersebut dia membeli beberapa peralatan, seperti cermin, sisir, gunting, penjepit rambut, pengering rambut, pembuatan rak, dan lainnya. Sedangkan untuk kursi dan meja dia menggunakan kursi dan meja yang ada di rumahnya.

Yeni ventured into the beauty salon business after receiving IDR2 million loans from PNM Mekaar. She used these funds to purchase mirrors, combs, scissors, hair clips, hair dryers, shelves, and other items. In terms of chairs and tables, she used what she had in her home.

Saat mengawali usaha ini di tahun 2017, Yeni baru melayani potong rambut dan mewarnai. Namun dalam waktu yang tidak terlalu lama dia mulai melayani kebutuhan lain seperti keriting, cat, rebonding, make up, dan beberapa jasa kecantikan lainnya.

When she started this business in 2017, Yeni only served hair cutting and hair-coloring. However, she recently expanded her services to include curling, hair-coloring, rebonding, make-up, and a variety of other beauty services.

Profil Nasabah ULaMM Unggulan

ULaMM Unggulan Customer Profile

Kerupuk Kulit Untungnya Selangit

Kerupuk Kulit Untungnya Selangit

Bustami Abubakar

Produsen Kerupuk Kulit
manufacturer of "Kerupuk Kulit"



Banyak orang yang memulai usaha sebagai kegiatan sampingan, sekadar memanfaatkan waktu luang. Tapi siapa menyangka kegiatan "iseng" itu justru membuahkan hasil yang tak terduga, sehingga menjadi sumber pendapatan utama. Hal itu pula yang dialami Bustami Abubakar, warga Desa Teupok Baroh, Kec. Jeumpa, Kab. Bireuen, Aceh, yang sukses mengembangkan usaha pembuatan kerupuk kulit.

Bustami mulai merintis usaha ini di tahun 2013. Awalnya dia tergerak untuk memanfaatkan kulit sapi yang banyak di sekitar tempat tinggalnya, yang selama ini belum banyak diolah. Sementara di daerah lain, kulit hewan tersebut telah dijadikan berbagai produk olahan antara lain berupa kerupuk, yang banyak digemari masyarakat. Dengan modal seadanya, Bustami bersama isterinya Hariati, mulai membeli bahan baku dari masyarakat di desanya. Mereka mulai melakukan uji coba membuat makanan ringan tersebut.

Tanpa diduga, kerupuk kulit buatan Bustami banyak digemari konsumen. Sebab, jenis makanan ini bisa dijadikan makanan ringan, dan juga sebagai pelengkap untuk lauk atau makan bakso. Secara bertahap usaha itu terus berkembang. Melihat peluang tersebut Bustami pun semakin serius menggelutinya.

Dia pun terus meningkatkan volume produksinya. Setiap keuntungan yang diperoleh dia putar kembali untuk penambahan modal. Malahan untuk mendukung proses produksi, dia mulai merekrut tenaga kerja.

Many people start a business as a hobby or as a way to fill their spare time. However, who would have guessed that this "fad" activity would produce unexpected results and become a significant source of income? Bustami Abubakar, of Teupok Baroh Village, Kec. Jeumpa, Kab. Bireuen, Aceh, has successfully developed a leather cracker-making business.

Bustami founded this company in 2013. Initially, he was moved to take advantage of the many cow hides around his home, which had not been processed much. Meanwhile, in other areas, animal skins had been processed into a variety of processed products, including crackers, extremely popular with the general public. With little money, Bustami and his wife Hariati began purchasing raw materials from the people in their village. They began experimenting with these snacks.

Surprisingly, Bustami's skin crackers became a big hit with customers. Because this type of food can be eaten as a snack as well as a side dish to complete meatballs. The company grew slowly at first. Bustami took this opportunity seriously now that he has felt it.

He also continued to increase production volume. He returned every profit he made in order to obtain more capital. In fact, he began to hire workers to help with the production process.

Proses produksi dimulai dengan merendam kulit tersebut dalam air kapur selama dua hari. Setelah bulu-bulunya dibersihkan, dijemur hingga kering, kemudian dipotong-potong sesuai keinginan, selanjutnya direbus bersama bumbu berupa garam, gula, bawang putih, dan penyedap, yang sudah dihaluskan. Setelah matang, kulit kembali dijemur hingga kering, dan akhirnya siap digoreng. Agar hasilnya maksimal, maka proses penggorengan dilakukan dalam dua tahap. Pertama, kerupuk yang sudah kering itu digoreng dalam minyak dengan suhu sedang dan api yang kecil. Setelah agak mekar, kemudian ditiriskan hingga dingin, dilanjutkan penggorengan tahap kedua dengan minyak yang panas dan api yang besar. Setelah kerupuk mekar secara maksimal, langsung ditiriskan hingga dingin, untuk kemudian siap dikemas.

Kini kerupuk kulit buatan Bustami sudah dipasarkan secara luas di Nanggroe Aceh Darussalam dan beberapa daerah lain di luar Aceh. Permintaan pun terus meningkat. Dia pun sudah memiliki jaringan distribusi di berbagai daerah. Begitu pula untuk bahan baku, dia sudah memiliki pemasok tetap. Untuk menjaga loyalitas pelanggan, Bustami selalu menjaga kualitas dan rasa produknya. Dia berupaya mempertahankan tingkat harga yang terjangkau, meski harga bahan baku kadang melonjak.

Terkait permodalan, Bustami telah mempunyai hubungan baik dengan lembaga keuangan profesional antara lain PNM ULaMM Bireuen. Pinjaman pertama diperolehnya dari BUMN tersebut pada Oktober 2013 sebesar Rp60 juta. Sampai pada pinjaman kelima pada Oktober 2019 senilai Rp700 juta. Selain itu, Bustami juga tetap memupuk modal sendiri dengan menyisihkan sebagian dari keuntungannya. Hingga kini Bustami merupakan salah satu nasabah prima dari PNM ULaMM Bireuen, karena pembayaran angsurannya selalu tepat waktu. Dia menyadari betul bahwa kemajuan usahanya tak lepas dari dukungan PNM ULaMM, baik segi permodalan maupun pembinaan dan motivasi usaha.

Bustami tetap konsisten dengan satu jenis produk, yaitu kerupuk kulit dengan berbagai variasi kemasan. Satu hal yang menjadi keunggulan produk ini, yaitu rasanya yang renyah dan gurih, mudah dikunyah dan tidak keras. Namun ada kendala yang kadang dirasakan Bustami yaitu terkait cuaca yang sering kurang menguntungkan, mengingat dalam proses pengeringan masih mengandalkan sinar matahari. Kondisi persaingan juga mulai terasa ketat meski belum terlalu mengganggu. Berkat usaha ini, Bustami sudah mampu membiayai pendidikan anak-anaknya, selain juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitarnya. Bustami yakin selagi orang masih menggemari produk kerupuk kulit, maka usaha ini akan terus berkembang. Malahan Bustami ingin mewariskan usaha ini kepada anak-cucunya kelak. Semoga.

The skin is first soaked in lime water for two days before being processed. After the fur have been cleaned and dried in the sun, they are cut into desired pieces and boiled with spices such as salt, sugar, garlic, and seasonings that have been mashed. Once cooked, the skin is dried in the sun until it is ready to be fried. The frying process is done in two stages for the best results. First, the dry crackers are fried in oil at a medium to low temperature. After slightly blooming, drain until cool before proceeding to the second stage of frying in hot oil over high heat. After the crackers bloom to their full potential, they are immediately drained until it is cool, and then ready to be packaged.

Skin crackers made by Bustami are now widely available in Nanggroe, Aceh Darussalam, and several other areas outside Aceh. Demand is continuing to rise. He also has a distribution network in place in several regions. Similarly, he already has a consistent supplier for raw materials. Bustami always maintains the quality and taste of its products to maintain customer loyalty. Even when the price of raw materials soars, he tries to keep his prices as low as possible.

In terms of capital, Bustami has strong relationships with professional financial institutions such as PNM ULaMM Bireuen. In October 2013, he received IDR60 million loans from the SOE. Until the fifth loan, worth IDR700 million, in October 2019. Furthermore, Bustami continues to cultivate its own capital by reinvesting a portion of its profits. Bustami is one of PNM ULaMM Bireuen's most loyal customers because the installment payments are always made on time. He is well aware that the success of his company is inextricably linked to the support of PNM ULaMM, both in terms of capital and business development and motivation.

Bustami sticks to one type of product, namely skin crackers in a variety of packaging variations. One benefit of this product is that it is crunchy and tasty, easy to chew, and not hard. However, there are some challenges that Bustami believes are related to the weather, which is frequently unfavorable, given that the drying process still relies on sunlight. Competition conditions began to tighten as well, though not to the extent that it was distressing. Bustami has been able to fund his children's education as well as create jobs in the surrounding community as a result of this effort. Bustami believes that this business will continue to thrive as long as people enjoy skin crackers. Bustami intends to pass on his business to his children and grandchildren in the future. Hopefully.

Meraup Untung dari Pengunjung

Earning Profit from Visitors

Rinawati

Produk Oleh-Oleh Souvenir Products



Semula Rinawati bekerja sebagai karyawan di sebuah pabrik, kemudian beralih membantu usaha saudaranya yang menjual produk oleh-oleh. Setelah berlangsung beberapa tahun, saudaranya itu mendorong Rina untuk membuka usaha sendiri. Berbekal pengalaman dan dorongan saudaranya itu, Rina memberanikan diri membuka kios sendiri yang juga menjual produk oleh-oleh khas Bandung.

Saat itu modal awalnya sekitar Rp100 juta, pinjaman dari orang tuanya. Dari modal tersebut sekitar Rp60 juta untuk sewa tempat, dan Rp40 juta untuk pembelian barang dagangan. Berbagai produk seperti dodol, tempe, sale, wajit, kerupuk, batagor kering dan lain-lain, dibeli langsung dari para produsen. Produk itu kemudian dikemas menggunakan merk sendiri. Namun ada juga produk yang dibuat langsung oleh Rina antara lain berupa tempe goreng dengan cita rasa yang khas.

Pada awalnya Rina hanya mengandalkan pemasaran kepada wisatawan yang mampir ke kiosnya. Namun seiring berjalannya waktu, Rina mulai aktif melakukan promosi antara lain melalui kerjasama dengan para pemilik bus dan agen perjalanan di kota Bandung. Langkah tersebut cukup efektif dimana semakin banyak wisatawan yang mampir ke kiosnya. Mereka membutuhkan buah tangan khas Bandung untuk dibawa pulang. Langkah tersebut mampu meningkatkan omsetnya.

Kini usahanya terus berkembang. Dalam seminggu Rina mampu menjual 1 ton dodol, 50 kg tempe, 70 bal (700 kg) sale, 50 bal (500 kg) wajit, dan 100 bal (500 kg) kerupuk, dengan harga jual berkisar antara Rp25.000 - Rp50.000. Omsetnya juga terus meningkat yang sekarang sudah mencapai sekitar Rp250 juta per bulan. Kini Rina sudah mampu menyewa empat unit kios yang dijadikan satu, sehingga lebih luas dan lebih nyaman. Dia juga sudah bisa mengembalikan pinjaman modal dari orang tuanya. Malahan dalam waktu dekat dia akan membeli tempat sendiri sehingga tidak menyewa lagi.

Rinawati began her career as an employee in a factory before transitioning to assisting her brother's souvenir business. Rina's brother encouraged her to start her own business after a few years. Rina ventured to open her own kiosk that also sells Bandung souvenirs, armed with her brother's experience and encouragement.

The initial capital was around IDR100 million at the time, a loan from his parents. Around IDR60 million of this capital was used for renting a place and IDR40 million for purchasing merchandise. Several products, including lunthead, tempeh, sale, wajit, crackers, dried batagor, and others, were purchased directly from producers. After that, the product was packaged under its own brand. There were, however, some products made directly by Rina, such as fried tempeh with a distinct flavor.

Rina initially relied solely on marketing to tourists who stopped by her kiosk. However, Rina gradually began to actively promote, for example, through collaboration with bus owners and travel agents in Bandung. This became a very effective step, as more and more tourists stop by the kiosk. They required typical Bandung souvenirs to take home with them. This step has the potential to increase its turnover.

Her company is now expanding. Rina can sell 1 ton of lunthead, 50 kg of tempeh, 70 bales (700 kg) banana sale, 50 bales (500 kg) wajit, and 100 bales (500 kg) crackers in a week for IDR25,000 to IDR50,000. Its monthly revenue is also increasing, and it now exceeds IDR250 million. Rina can now rent four kiosk units and combine them into one, making it wider and more comfortable. She has also been able to repay her parents' capital loan. In fact, she plans to buy her own building in the near future and stop renting.

Dari keuntungan usaha ini Rina sudah mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Malahan dia sudah bisa membeli tiga unit rumah dan kendaraan. Tidak hanya itu, usaha ini juga telah memberi manfaat kepada tujuh orang karyawannya, serta membantu memasarkan produk mitra usahanya. Dan yang tak kalah pentingnya, usaha ini telah menjadi bagian penting dari upaya pengembangan industri pariwisata di kota Bandung dan sekitarnya.

Untuk menjaga kualitas, Rina selalu mengecek langsung barang dagangannya, termasuk mengawasi saat pengiriman dari pemasok, guna memastikan tanggal kedaluwarsa. "Jaminan kualitas menjadi sangat penting di tengah persaingan yang kian ketat, selain terus menjaga dan meningkatkan pelayanan," kata Rina yang sudah dua kali mendapat pinjaman modal dari PNM ULaMM ini.

Karena itu, Rina yakin prospek usaha ini masih sangat bagus. Salah satu daya tariknya karena produk yang dijual berupa kuliner khas daerah yang banyak dicari oleh wisatawan. Selain itu, lokasi usahanya juga terbilang strategis karena berada di salah satu destinasi wisata Cibaduyut. Ke depan Rina akan terus mengembangkan usaha ini antara lain dengan membuka cabang baru.

Sebagai produk oleh-oleh, tingkat penjualan sangat dipengaruhi oleh kondisi bisnis pariwisata. "Permintaan akan melonjak di saat musim liburan dimana banyak wisatawan yang berkunjung, termasuk juga rombongan pelajar yang datang dari berbagai daerah," katanya. Namun sebaliknya, ketika dunia pariwisata mengalami sedikit kelesuan, maka akibatnya penjualan pun akan berkurang.

Meski demikian, Rina tak pernah merasa khawatir atas kondisi usahanya karena secara umum tetap memberi peluang. Satu hal yang menjadi pegangannya dalam berusaha: yakin atas apa yang dikerjakan. "Selain itu, juga harus jujur dengan memberikan pelayanan yang terbaik," tegasnya.

Rina has been able to meet her family's needs from the profits from her business. In fact, she was able to purchase three houses as well as a vehicle. Not only that, this company has benefited seven of its employees and assisted in marketing the products of its business partners. Last but not least, this effort has become an important component of efforts to develop the tourism industry in Bandung and its surroundings.

Rina always checks her merchandise directly, including supervising the time of delivery from suppliers, to ensure expiration dates, in order to maintain quality. "Quality assurance is critical in the face of increasingly fierce competition, as well as continuing to maintain and improve services," said Rina, who has twice received capital loans from PNM ULaMM.

As a result, Rina believes that the future of this business is still bright. One of the draws is that the products sold are regional specialties that are sought after by tourists. Furthermore, the business's location is quite strategic because it is located in one of Cibaduyut's tourist destinations. Rina plans to expand her business in the future by opening new branches.

The level of sales of a souvenir product is heavily influenced by the state of the tourism industry. "Demand will skyrocket during the holiday season, when many tourists, including groups of students from various regions, will visit," she predicted. When the tourism industry, on the other hand, experiences a slight slowdown, sales will suffer as a result.

Rina, on the other hand, is unconcerned about the state of her business because, in general, it continues to provide opportunities. One thing that became her grip in trying was being certain of what was done. "You must also be honest by providing the best service," she added.

Bisnis Batik tetap Menarik

Batik Business is Still Interesting

Halim Yahya

Batik Pantai
Batik Beach



Keinginan untuk memiliki penghasilan yang lebih baik, menjadi motivasi bagi Halim Yahya untuk terjun sebagai pengusaha. Terlebih pekerjaannya semula hanya seorang petani dengan penghasilan tak seberapa dari tanaman padi dan sayur-sayuran. Suatu hari Halim yang tinggal di Desa Wringin-rejo, Kecamatan Gambiran, Kab. Banyuwangi ini bertemu dengan seorang pengusaha batik dari Solo. Sang pengusaha ini menyarankan Halim untuk membuka usaha pembuatan batik, yaitu khusus batik sarung pantai yang banyak digemari oleh turis mancanegara. Halim sangat tertarik dengan informasi tersebut sehingga dia bersedia tinggal beberapa minggu di Bali untuk menimba ilmu perbatikan tersebut.

Setelah cukup menguasai baik teknis pembuatan maupun pemasarannya, akhirnya Halim bersama adiknya mulai melakukan persiapan untuk mewujudkan keinginan mereka menjadi pengusaha. Halim sendiri terpaksa menyewakan sawahnya senilai Rp25 juta, untuk modal awal tersebut. Hal tersebut dia lakukan karena merasa yakin bahwa usaha ini memiliki peluang yang sangat besar.

Dengan modal patungan, kakak-beradik ini mulai mempersiapkan bahan baku yang dibeli langsung dari Bali, sedangkan untuk pewarna mereka beli dari Solo. Mereka juga mempersiapkan beberapa peralatan yang cukup sederhana, seperti spon, tungku, dan waterglass untuk pewarnaan. Proses produksi dimulai dengan pembuatan pola berdasarkan pesanan dari konsumen yang disesuaikan dengan tren pasar. Dilanjutkan proses pewarnaan dan penjemuran, kemudian di *waterglass*, direbus, dicuci dan kembali dijemur. Tepian kain diserut atau dijahit sesuai keinginan.

Hasil produksi ini dipasarkan ke Bali terutama ke Pasar Sukawati, Gianyar. Untuk itu Halim bekerjasama dengan para pemilik kios di pasar tersebut. Dia juga melibatkan beberapa temannya yang merantau ke Bali untuk ikut memasarkan. Ternyata batik pantai buatan Halim tidak kalah dibandingkan produk sejenis yang sudah ada. Terbukti hasil produksinya cukup diminati sehingga pesanan terus meningkat. Dalam waktu yang relatif singkat Halim sudah mampu menjual hingga 5.000 lembar per bulan dengan harga berkisar antara Rp29.000 hingga Rp35.000. Dari penjualan tersebut Halim mampu meraup omset sekitar Rp150 juta, dengan keuntungan bersih mencapai Rp35 juta per bulan. Itu baru untuk Pasar Sukawati, belum termasuk pesanan dari Kalimantan, Lombok, dan beberapa daerah lain termasuk dari luar negeri.

Salah satu keunggulan dari produk yang dihasilkan Halim karenaseluruh motifnyahasilkaryasendiri, bukan mencontek produk yang sudah ada. Keaslian motif ini merupakan daya tarik tersendiri yang mengundang banyak peminat. Halim juga terus melakukan inovasi dengan membuat motif-motif baru disesuaikan permintaan konsumen. Malahan Halim

Halim Yahya's desire for a higher income motivated him to become an entrepreneur. Furthermore, his job was merely that of a farmer, with a meager income from rice and vegetables. Halim, who lives in Wringin-rejo Village, Gambiran District, Kab. Banyuwangi, once met a Solo batik entrepreneur. The businessman advised Halim to start a batik business, specifically for beach sarong batik, which is very popular among foreign tourists. Halim was so taken with this information that he agreed to spend a few weeks in Bali learning about batik.

After mastering both manufacturing and marketing techniques, Halim and his younger brother began to make plans to realize their dream of becoming entrepreneurs. For the initial capital, Halim was forced to rent out his rice field for IDR25 million. He did this because he was confident that this business would be a huge success.

These brothers formed a joint venture to prepare raw materials purchased directly from Bali, while dyes were purchased from Solo. They also prepared some basic staining equipment, such as sponges, furnaces, and waterglass. The manufacturing process began with the creation of patterns based on consumer orders adjusted to market trends. The coloring and drying process was repeated, then in waterglass, boiled, washed, and dried again. The fabric's edges were shaved or sewn as desired.

These products were sold in Bali, specifically at Sukawati Market in Gianyar. As a result, Halim collaborated with the market stall owners. He also enlisted the help of several of his friends who had relocated to Bali to help with marketing. It turned out that Halim's beach batik was not inferior to other similar products on the market. Evidently, the product is in high demand, as orders continue to increase. Halim has been able to sell up to 5,000 pieces per month at prices ranging from IDR29,000 to IDR35,000 in a relatively short period of time. Halim was able to generate a monthly net profit of IDR35 million from these sales, resulting in a turnover of around IDR150 million. This is only for the Sukawati Market; orders from Kalimantan, Lombok, and several other regions, including from abroad, are not included.

One of the benefits of Halim's products is that all of the motifs are his own creations, rather than imitations of existing products. The authenticity of this motif is the main attraction that draws in a large number of fans. Halim also continues to innovate by developing new motifs in response to customer demand. Halim has also created a traditional

juga sudah membuat daster khas Banyuwangi dengan motif penari gandrung. Terkait pemasaran, Halim sangat menjaga kepercayaan dari pelanggannya dengan menjaga kualitas dan harga yang bersaing. Malahan dia memberikan garansi atas kerusakan barang. “Kalau ada yang rusak, akan saya ganti,” kata Halim yang sekarang sudah mempekerjakan sekitar 25 orang karyawan.

Menyinggung tentang keberhasilan usahanya, menurut Halim, sangat terbantu oleh dukungan pembiayaan dari PNM ULaMM dimana dia sudah empat kali mendapatkan pinjaman. Pinjaman pertama sebesar Rp200 juta, dilanjutkan top-up Rp200 juta, dan top-up lagi Rp200 juta, hingga pada pinjaman keempat sebesar Rp500 juta. Halim bersyukur bahwa usaha ini telah memberi manfaat besar, baik untuk keluarganya, untuk karyawan dan masyarakat sekitarnya. Dia juga sudah mampu membeli lahan yang cukup luas untuk tempat usaha. Tidak sedikit kaum Ibu di sekitar rumahnya yang dilibatkan dalam usaha ini.

Menurut Halim, produk ini akan terus diminati karena selain bisa digunakan langsung oleh wisatawan asing yang berkunjung ke Bali, juga bisa dijadikan oleh-oleh. Hingga kini permintaan masih cukup tinggi malahan sering tak bisa dipenuhi. Pernah Halim mendapat order cukup banyak dari Jepang. Namun karena tak mampu memenuhi orderan itu, maka ia serahkan pada temannya.

Karena itu, Halim akan terus meningkatkan volume produksi hingga 6.000 - 7.000 lembar per bulan. Begitu pula untuk produk baju daster khas Banyuwangi, peminatnya terus meningkat dan akan terus ditingkatkan. Menyinggung tentang kunci keberhasilannya, menurut Halim cukup sederhana, yaitu kerja keras dan pantang menyerah. “Kita harus tetap bersemangat meskipun ada masalah karena semua masalah pasti ada jalan keluarnya.

Banyuwangi negligee with a motif of passionate dancers. In terms of marketing, Halim earns his customers' trust by providing high-quality products at reasonable prices. In fact, he offers a guarantee against damage to goods. "If something is broken, I will replace it," said Halim, who now employs about 25 people.

Concerning the success of his business, Halim claims that he was greatly aided by financial assistance from PNM ULaMM, from which he has already received four loans. The initial loan was IDR200 million, followed by a top-up IDR200 million, with an additional top-up of IDR200 million until the fourth loan IDR500,000,000. Halim is grateful that this business has provided numerous advantages to his family, employees, and the surrounding community. He was also able to purchase a large enough plot of land for his business. This is also a business that many of the women around his house are involved in.

According to Halim, this product will remain popular because, in addition to being able to be used directly by foreign tourists visiting Bali, it can also be used as a souvenir. Until now, demand has remained high and frequently unsatisfied. Once upon a time, Halim received a large number of orders from Japan. However, because he was unable to complete the order, he gave it to his friend.

As a result, Halim will increase production volume to 6,000 - 7,000 pieces per month. Similarly, the demand for the typical Banyuwangi negligee is increasing and will continue to increase. When it comes to the key to his success, Halim believes it is quite simple: hard work and never giving up. "Even though there are problems, we must remain optimistic because all problems must have a solution."

Keripik Singkong tetap Berpeluang

Cassava Chips Keep a Chance

Agus Suyitno

Keripik Singkong
Cassava Chips



Agus memulai usaha keripik singkong sejak tahun 2008. Dia tertarik mengembangkan usaha ini karena melihat banyaknya tanaman singkong di daerah asalnya, Sukabumi. Dia sendiri tinggal di Bekasi dan bekerja sebagai buruh. Awalnya Agus memulai usaha dari kecil, karena ingin memanfaatkan bahan baku yang banyak tersedia. Selain itu, dia sendiri penggemar keripik, dan dia melihat banyak orang menyukai makanan ringan ini. Karena prospeknya cukup menjanjikan, akhirnya timbul keinginan Agus untuk serius menekuninya.

Dengan modal awal Rp50 juta dari tabungannya, Agus bertekad untuk menjadikan usaha ini sebagai tumpuan hidup keluarganya. Dia mulai menyiapkan peralatan yang dibutuhkan, sedangkan untuk bahan baku dia beli langsung dari Sukabumi. Proses produksi dimulai dengan membersihkan singkong dari kulitnya, kemudian diiris menggunakan pisau. Dilanjutkan proses penggorengan dalam dua tahap. Tahap pertama menggunakan wajan kecil. Setelah agak matang baru dipindahkan ke penggorengan besar. Setelah warnanya agak coklat baru ditiriskan dan ditaburi bumbu.

Pada awalnya, Agus menjual keripik tersebut kepada tetangganya. Dia juga menawarkan ke kelompok arisan atau penggajian. Langkah selanjutnya, dia mulai memasarkan secara online melalui Gojek, Grab, dan Shopee. Secara bertahap produknya makin dikenal hingga berkembang seperti sekarang.

Agus menawarkan beberapa variasi kemasan dengan harga antara Rp5 ribu hingga Rp15 ribu. Total omsetnya sudah mencapai Rp150 juta dengan keuntungan sekitar Rp60 juta per bulan. Dalam sebulan dia membutuhkan minimal 2 ton singkong segar untuk bahan baku, dengan mempekerjakan 10 karyawan. Keberhasilan ini tak lepas dari sifat Agus yang ramah dan terus menjaga hubungan baik dengan seluruh mitra usaha termasuk dengan karyawan. Ia juga selalu memperhatikan kualitas agar tetap renyah dan gurih.

Perkembangan itu juga tak lepas dari dukungan permodalan dari PNM ULamm Cakung dimana sejak Juli 2011 Agus menjadi nasabah. Agus mengenal PNM ULamm melalui petugas atau account officer (AO) dari lembaga keuangan tersebut saat melakukan kunjungan. Dari penjelasan AO tersebut, Agus tertarik untuk menjadi nasabah. Saat itu dia mengajukan pinjaman Rp200 juta untuk jangka empat tahun. Setelah melalui proses yang tidak terlalu lama, permohonan itu disetujui.

Sejak mendapat pinjaman modal dari PNM ULamm, Agus semakin bersemangat mengembangkan usahanya. Kesungguhan itu tidak sia-sia dimana keuntungan yang dia peroleh lebih dari cukup untuk membayar pinjaman, bahkan sebagian dia tabungkan untuk tambahan modal. Setelah berjalan 2,5 tahun, pada Desember 2013, Agus kembali mengajukan pinjaman dengan plafon yang sama,

Agus began selling cassava chips in 2008. He was motivated to start this business because of the abundance of cassava plants in his hometown of Sukabumi. He lived and worked in Bekasi as a laborer. Agus initially started a small business in order to take advantage of readily available raw materials. Furthermore, he was a fan of chips and noticed that many people enjoyed this snack. Agus finally wanted to take the prospect seriously because it seemed so promising.

Agus was determined to make this business the foundation of his family's life with an initial capital of IDR 50 million from his savings. He began preparing the necessary equipment, while purchasing raw materials directly from Sukabumi. The cassava was cleaned of its skin before being sliced with a knife in the production process. The frying procedure was repeated in two stages. The first stage involved the use of a small frying pan. It was transferred to a large frying pan when it was slightly cooked. After the color turned slightly brown, it was drained and spiced.

Agus initially sold the chips to his neighbors. He also offered it to arisan and payroll groups. He then began marketing online through Gojek, Grab, and Shopee. The product gradually gained popularity until it reached its current state.

Agus provides a variety of packaging options with prices ranging from IDR5.000 to IDR15.000. The total revenue has surpassed IDR150 million, with a monthly profit of approximately IDR60 million. He requires at least 2 tons of fresh cassava per month for raw materials, and he employs 10 people. This success is inextricably linked to Agus' friendly demeanor, which he maintains with all business partners, including employees. He also pays close attention to quality in order to keep it crispy and tasty.

This development is also inextricably linked to capital assistance from PNM ULamm Cakung, where Agus has been a customer since July 2011. During his visit, Agus got to know PNM ULamm through an account officer (AO) from the financial institution. Agus was interested in becoming a customer, based on AO's explanation. He applied for a loan of IDR200 million for four years at the time. The application was approved after a relatively short process.

Agus has become more enthusiastic about expanding his business since receiving a capital loan from PNM ULamm. The sincerity paid off because the profits he earned were more than enough to pay off the loan, and he even saved some of it for additional capital. After 2.5 years, Agus applied for a loan with the same ceiling, IDR. 200 million, in December 2013. He used the second loan to purchase a plot of land as

Rp200 juta. Pinjaman kedua ini dia gunakan untuk membeli sebidang tanah dan bangunan untuk tempat usaha. Pada Mei 2015, Agus kembali mengajukan pinjaman atas nama istrinya dengan plafon Rp150 juta. Pinjaman ketiga ini dia gunakan untuk membeli mesin pengiris singkong dan alat penggorengan. Terakhir pada Juni 2018, pinjaman keempat sebesar Rp55 juta, untuk tambahan modal kerja. Selama menjadi nasabah PNM ULamm, Agus selalu membayar angsuran tepat waktu, bahkan beberapa kali melakukan pelunasan dini.

Dari usaha ini Agus telah mampu menyekolahkan anaknya hingga menjadi sarjana. Dia juga sudah memiliki mobil dan rumah sendiri. Bahkan dia sudah mengembangkan usaha lain berupa pencucian motor dan mobil yang lokasinya tidak jauh dari tempat usaha sekarang. Agus yakin prospek usaha ini masih sangat bagus karena produk ini banyak digemari dan bahan bakunya mudah didapat. Karena itu Agus berencana untuk membuka cabang di beberapa tempat.

Meraup Untung dari Ayam Kampung

Reza Nugroho

Peternakan Ayam Kampung
Cornish Fowl Farm

well as a building for his business. Agus applied for a loan of IDR150 million on behalf of his wife again in May 2015. He used the third loan to purchase a cassava slicing machine as well as a frying pan. Finally, the fourth loan was IDR55 million in June 2018, for additional working capital. Agus was a PNM ULamm customer who always paid his installments on time, even making early repayments several times.

Agus has been able to send his children to graduate school as a result of his business. He also already owns a car and a house. In fact, he has started other businesses, such as washing motorcycles and cars, that are not far from his current location. Agus believes that the future of this business is bright because this product is in high demand and raw materials are readily available. As a result, Agus intends to open branches throughout the country.

Earning Profit from Cornish Fowl

Menjadi pengusaha tak cukup hanya coba-coba atau ikut-ikutan. Menjadi pengusaha harus disertai niat dan kesungguhan, karena memang panggilan jiwa. Hal tersebut diungkapkan oleh Reza Nugroho, seorang peternak ayam kampung dari Talang Bakung, Jambi.

Meskipun Reza pernah meniti karier cukup bergengsi sebagai konsultan ekologi di Singapura, toh dia pulang kampung dan mulai beternak ayam. Hal tersebut sejalan dengan kecintaannya pada peternakan unggas ini yang memang memiliki prospek sangat bagus. "Usaha peternakan ayam kampung memiliki banyak keunggulan, banyak dibutuhkan, dan *cashflow*-nya tidak terlalu lama," katanya.

Sebelum memulai usaha ini Reza sempat mempelajari secara umum mengenai seluk-beluk bisnis perunggasan. Dia juga melibatkan tenaga profesional dalam pengelolaannya. Untuk permodalan, tak kurang dari Rp 40 juta dana pribadi

It is not enough to simply try or participate as an entrepreneur. Because it is the calling of the soul, becoming an entrepreneur must be accompanied by intention and sincerity. Reza Nugroho, a native chicken farmer from Talang Bakung, Jambi, stated this.

Despite having a prestigious career as an ecological consultant in Singapore, Reza returned home and began raising chickens. This is consistent with his passion for poultry farming, which has promising future prospects. "The free-range chicken farm business has many advantages; it is in high demand, and the cash flow is not too long," he explained.

Reza studied the intricacies of the poultry industry in general prior to starting this business. He also enlisted the help of professionals in its administration. For capital, he set aside IDR. 40 million in personal funds for the production of cages,

yang dia siapkan untuk pembuatan kandang, pengadaan bibit dan pakan. Khusus bibit, Reza membeli langsung dari penyedia bibit di Bogor.

Proses pembesaran ayam kampung dimulai dari fase brooding (umur 1 hari) hingga panen di usia 60 hari. Reza menjual hasil ternaknya kepada para pengepul. Namun secara bertahap dia mulai membangun jaringan pemasaran ke pedagang pengecer di pasar-pasar. Bahkan Reza memasok ke restoran dan beberapa rumah makan di Jambi dan sekitarnya. Seekor ayam hidup dia jual antara Rp38 ribu-Rp40 ribu dengan kapasitas produksi mencapai 4.500 ekor per bulan. Total omsetnya berkisar antara Rp150 juta - Rp200 juta, dengan keuntungan bersih Rp10 juta - Rp15 juta per bulan.

Terkait manajemen usaha, Reza sangat memperhatikan tiga hal utama yaitu: kualitas bibit, pakan, dan kebersihan kandang. Selain faktor bibit dan pakan, masalah kandang juga sangat menentukan terutama menyangkut kebersihan. "Kondisi kandang yang kotor akan mudah menimbulkan penyakit yang bisa menyebabkan kematian," lanjut Reza yang sudah memberikan pekerjaan kepada tiga orang karyawannya. Untuk mencegah penyakit sekaligus menjaga agar ayam tetap prima, secara rutin Reza memberikan vaksin, obat-obatan dan vitamin. Sedangkan untuk pelayanan, Reza siap mengantar langsung kepada pelanggannya.

Kini perkembangan usahanya sudah cukup bagus meski di saat terjadi wabah covid 19 yang lalu sempat mengalami penurunan karena banyak hotel, restoran, dan rumah makan yang tutup. Namun ke depan Reza yakin usaha ini akan terus maju. Malahan Reza telah merencanakan untuk memproduksi bibit dan pakan, baik untuk kebutuhan sendiri maupun dijual kepada peternak lain. Reza juga akan menjual produk dalam bentuk daging ayam beku, agar lebih tahan lama.

Melalui inovasi ini diharapkan omsetnya akan lebih meningkat sehingga keuntungan lebih besar. Menurut Reza, daging ayam kampung masih menjadi salah satu pilihan menu utama dimana peminatnya cukup tinggi. Dari segi harga juga cukup stabil dan tidak terlalu fluktuatif seperti ayam broiler. "Hanya pada bulan-bulan tertentu terjadi kelebihan pasok sehingga persaingan menjadi ketat," kata Reza yang sudah dua kali mendapat pinjaman modal dari PNM ULaMM.

Dari keuntungan yang diperoleh Reza sudah bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya termasuk membiayai pendidikan kedua anaknya. Keberhasilan itu merupakan buah dari kegigihannya dalam membangun usaha. Dia masih ingat di saat awal memulai usaha ini ada saja kendala yang dihadapi. Dia pernah dicurangi oleh mitra dagangnya dengan timbangan yang tidak standar, sehingga 100 ekor ayamnya terpaksa dibawa kembali pulang. "Lebih baik tidak dijual daripada ditipu di depan mata," katanya. Salah satu prinsipnya dalam berusaha: bangun lebih pagi dari ayam, agar ayam tak sadar telah dipindahkan dari kandang ke pasar.

as well as the purchase of seeds and feed. Reza bought directly from seed providers in Bogor, especially for seeds.

The process of raising native chickens begins with brooding (at the age of one day) and ends with harvest at the age of 60 days. Reza sells his animals to collectors. However, he gradually began to establish a marketing network with retailers in the markets. Reza, in fact, supplies restaurants and a number of restaurants in Jambi and the surrounding areas. With a monthly production capacity of 4,500 heads, he sells live chickens for IDR38 thousand to IDR40 thousand. Its total revenue ranges from IDR150 million to IDR200 million, with a monthly net profit of IDR10 million to IDR15 million.

Reza is very concerned about three things when it comes to business management: the quality of the seeds, the feed, and the cleanliness of the cage. Aside from the factors of seeds and feed, the problem of the cage is also very important, especially in terms of cleanliness. "Dirty cage conditions will easily cause diseases that can lead to death," Reza, who has given work to three of his employees, continued. Reza provides vaccines, medicines, and vitamins on a regular basis to prevent disease and keep the chickens in good health. In terms of services, Reza is prepared to provide them directly to his customers.

His business is doing well now, despite the fact that it suffered during the last COVID-19 outbreak because many hotels and restaurants were closed. However, Reza is confident that this effort will continue to progress in the future. In fact, Reza intends to produce seeds and feed for his own use as well as for sale to other farmers. Reza plans to sell the product in the form of frozen chicken to increase its durability.

It is hoped that by implementing this innovation, the turnover will increase, resulting in a higher profit. According to Reza, free-range chicken is still one of the most popular menu items, with a high demand. Price-wise, it is also quite stable and not as volatile as broiler chickens. "Only in certain months is there an excess supply, so competition becomes tight," Reza, who has twice received capital loans from PNM ULaMM, explained.

Reza has been able to meet his family's needs, including paying for his two children's education from the profits he has earned. This success is the result of his perseverance in establishing a business. He recalls the difficulties he encountered when he first started this business. He was once cheated by his trading partners who used non-standard scales, resulting in the return of 100 of his chickens. "It's better not to be sold than to be cheated in public," he says. One of the business principles is to get up earlier than the chickens so they don't realize they've been moved from the coop to the market.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERSEROAN

Management Discussion and Analysis on Company Performance





Tinjauan Perekonomian

Economic Review

Analisis Perekonomian Global

Perbaikan ekonomi global pada tahun 2021 terus berlanjut meski tidak merata dengan ketidakpastian pasar keuangan, namun berbagai negara mengalami tren pertumbuhan ekonomi yang melambat pada Triwulan III 2021. Pertumbuhan global pada 2021 yang menurun terjadi baik di negara maju maupun berkembang, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti level basis pertumbuhan yang tinggi (*high base*) pada akhir tahun 2021, dampak penyebaran varian Delta, serta efek dari disrupsi *supply chain* yang menghambat laju pemulihan. Beberapa negara ASEAN mengalami kontraksi ekonomi cukup dalam di Triwulan III 2021 akibat pemberlakuan restriksi ketat selama gelombang Delta, seperti yang terjadi di Vietnam (-6,2%), Malaysia (-4,5%), dan Thailand (-0,3%).

Pemulihan ekonomi di *Advanced Economies* (AEs), khususnya Amerika Serikat (AS) berjalan lebih cepat, didukung oleh akselerasi vaksinasi dan stimulus. Secara keseluruhan, ekonomi dunia tumbuh 5,9% pada tahun 2021 dan 4,4% pada tahun 2022, setelah kontraksi 3,1% pada tahun 2020. Sementara itu, ketidakpastian pasar keuangan global masih terus berlanjut sejalan dengan risiko yang masih mengemuka, antara lain terkait peningkatan penyebaran COVID-19 varian Delta, antisipasi pasar terhadap kebijakan tapering The Fed, serta kekhawatiran tekanan inflasi yang berlangsung lebih lama akibat gangguan rantai pasokan dan keterbatasan energi.

Outlook pertumbuhan ekonomi global untuk tahun 2021 mencerminkan *rebound* yang cukup kuat dibandingkan dengan capaian 2020. Pelemahan ini terjadi karena adanya isu gangguan *supply* di negara maju serta sempat memburuknya kasus COVID-19 di negara berkembang. Di sisi lain, proyeksi inflasi global meningkat menjadi 4,3% di 2021 dan 3,8% di 2022. Tekanan inflasi yang terus meningkat mendorong pemerintah AS untuk mempercepat kebijakan *tapering off*. Tingkat inflasi AS melonjak ke tingkat 6,8% di November 2021 (tertinggi sejak 1982), dari sebelumnya 6,2%. Hal ini terus memunculkan ekspektasi dilakukannya langkah pengetatan kebijakan moneter yang lebih cepat. Pada Desember 2021, The Fed mempercepat pengurangan pembelian surat berharga Pemerintah (*tapering off*) dari USD15 miliar menjadi USD30 miliar.

Sumber / Source:

- Siaran Pers SP-10/KLI/2021 Kementerian Keuangan Republik Indonesia. / Press Release SP-10/KLI/2021 Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.
- Tinjauan Ekonomi, Keuangan dan Fiskal Edisi IV Tahun 2021 ISSN 2527-3140 – Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. / Economic, Financial and Fiscal Review Edition IV 2021 ISSN 2527-3140 – Fiscal Policy Agency of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

Global Economic Analysis

The global economic improvement in 2021 continued although unevenly with financial market uncertainty, but various countries experienced a slowing trend of economic growth in the third quarter of 2021. The declining global growth in 2021 occurred in both developed and developing countries. This was influenced by several factors, such as the high base level of growth at the end of 2021, the impact of the spread of the Delta variant, as well as the effects of supply chain disruptions that hindered the pace of recovery. Several ASEAN countries experienced a deep economic contraction in Q3 2021 due to the imposition of strict restrictions during the Delta wave, such as what happened in Vietnam (-6.2%), Malaysia (-4.5%), and Thailand (-0.3%).

Economic recovery in Advanced Economies (AEs), particularly the United States (US), run faster supported by accelerated vaccinations and stimulus. Overall, the world economy grew 5.9% in 2021 and 4.4% in 2022, after a 3.1% contraction in 2020. Meanwhile, uncertainty in global financial markets continued in line with emerging risks related to the increasing spread of the Delta variant of COVID-19, market anticipation of the Fed's tapering policy, as well as concerns over inflationary pressures that lasted longer due to supply chain disruptions and energy constraints.

The global economic growth outlook for 2021 reflected a fairly strong rebound compared to 2020. This weakening occurred due to supply disruption issues in developed countries and the worsening of COVID-19 cases in developing countries. On the other hand, global inflation projections were projected to increase to 4.3% in 2021 and 3.8% in 2022. The rising inflationary pressure prompted the US government to accelerate the tapering off policy. The US inflation rate soared to a level of 6.8% in November 2021 (the highest since 1982), from 6.2% previously. This continued to raise expectations for faster monetary policy tightening. In December 2021, the Fed accelerated the reduction of government securities purchases (tapering off) from USD15 billion to USD30 billion.

Analisis Perekonomian Nasional

Di tengah perkembangan pandemi COVID-19 global maupun nasional pada Triwulan IV 2021 ditandai dengan meningkatnya kembali kasus harian global pasca *reopening* di berbagai negara serta munculnya Omicron sebagai *Variant Of Concern* (VOC) baru. Namun demikian, perkembangan ekonomi nasional berada dalam tren yang membaik.

Kinerja ekonomi Indonesia pada Triwulan IV 2021 mampu tumbuh sebesar 5,02% (YoY), menunjukkan menguatnya pemulihan ekonomi. Keberhasilan pengendalian pandemi, partisipasi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi, efektivitas kebijakan stimulus fiskal oleh pemerintah serta sinergi yang baik antar otoritas dalam menjaga stabilitas dan percepatan pemulihan ekonomi menjadi faktor utama terjaganya keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional.

Secara *Quarter to Quarter* (QtQ), pertumbuhan ekonomi Triwulan IV 2021 tercatat 1,06%, melampaui pola normalnya yang secara historis mencatatkan pertumbuhan negatif (QtQ Triwulan IV 2015 – 2019 rata-rata -1,7%). Laju pertumbuhan ekonomi Triwulan IV ditopang oleh pertumbuhan positif seluruh komponen pengeluaran dan sektor produksi utama. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 mencapai 3,69%. Capaian ini jauh lebih baik dibandingkan kondisi 2020 yang berkontraksi 2,07%.

Aktivitas ekspor mampu melanjutkan pertumbuhan yang tinggi seiring permintaan dan harga komoditas global yang meningkat. Sementara impor juga meningkat. Mencerminkan menguatnya pemulihan permintaan domestik, khususnya sektor produksi. Dari sisi lapangan usaha, sektor-sektor unggulan nasional seperti manufaktur, perdagangan, konstruksi, dan transportasi melanjutkan tren pemulihan dengan mencatat pertumbuhan kuat. Dari aktivitas ekspor kembali mencatatkan pertumbuhan tinggi pada Triwulan IV sebesar 29,83% (YoY). Laju pemulihan ekonomi global menjadi faktor utama yang menjaga kinerja ekspor Indonesia.

Dengan pertumbuhan ekonomi ini juga, tingkat PDB per kapita Indonesia berhasil naik dari Rp57,3 juta di tahun 2020 ke Rp62,2 juta di tahun 2021 (naik 8,6%), atau 4.349,5 dolar AS. Tetap terjaganya laju pemulihan ekonomi juga memberikan efek positif pada pendapatan negara yang tumbuh sebesar 21,6%.

National Economic Analysis

In the midst of the development of the global and national COVID-19 pandemic in the fourth quarter of 2021, it was marked by the increase in global daily cases after reopening in various countries and the emergence of Omicron as a new Variant Of Concern (VOC). However, the development of the national economy was in an improving trend.

Indonesia's economic performance in Quarter IV 2021 was able to grow by 5.02% (YoY), indicating a strengthening economic recovery. The success of controlling the pandemic, public participation in implementing health protocols and vaccinations, the effectiveness of fiscal stimulus policies by the government and good synergy among authorities in maintaining stability and accelerating economic recovery became the main factors in maintaining the sustainability of the national economic recovery.

On a Quarter to Quarter (QtQ) basis, the economic growth in Quarter IV 2021 was recorded at 1.06%, exceeding the normal pattern which historically recorded negative growth (QtQ IV 2015 – 2019 average -1.7%). The pace of economic growth in Quarter IV was supported by positive growth in all components of expenditure and the main production sectors. Cumulatively, Indonesia's economic growth in 2021 reached 3.69%. This achievement was much better than the 2020 condition which contracted 2.07%.

Export activity was able to continue high growth in line with increasing global commodity demand and prices. Meanwhile imports also increased reflecting the strengthening recovery in domestic demand, particularly in the production sector. In terms of business sector, national leading sectors such as manufacturing, trade, construction, and transportation continued the recovery trend with strong growth. Export activity again recorded high growth in the fourth quarter of 29.83% (YoY). The pace of global economic recovery was the main factor that maintained Indonesia's export performance.

With this economic growth as well, Indonesia's GDP per capita level managed to increase from IDR57.3 million in 2020 to IDR62.2 million in 2021 (up 8.6%), or US\$ 4,349.5. The maintained pace of economic recovery also had a positive effect on state revenue which grew by 21.6%.

Dari segi aktivitas investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) yang sempat tertahan, juga kembali dapat meningkat 4,49% pada Triwulan IV 2021. Secara keseluruhan 2021 investasi kembali tumbuh positif 3,80% setelah tumbuh negatif 4,96% di 2020. Adapun sektor perdagangan juga tumbuh kuat pada Triwulan IV sebesar 5,56% (YoY) atau 4,65% secara keseluruhan tahun 2021. Peningkatan ini didorong oleh membaiknya mobilitas masyarakat sejalan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang relatif mereda.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 2021 tercatat sebesar 1,87% (YoY) dan berada di bawah kisaran sasaran 3,0%±1%, meski meningkat dibandingkan dengan inflasi IHK 2020 sebesar 1,68% (YoY). Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat sebagai dampak pandemi COVID-19, nilai tukar yang stabil dan ekspektasi inflasi yang terjaga, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pangan.

Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS turut terdampak tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global. Tekanan di pasar keuangan global sendiri telah mengalami peningkatan sejak akhir bulan September 2021. Tingginya volatilitas di pasar keuangan ini pun mendorong investor untuk lebih memilih instrumen *safe haven* sehingga indeks dolar AS mengalami peningkatan dan menekan pergerakan nilai tukar di negara *emerging market*, termasuk Rupiah. Hingga tanggal 15 Desember 2021 nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS ditutup pada level Rp14.348 per dolar AS, atau terdepresiasi 1,7% (YtD). Secara kumulatif tahunan, rata-rata nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS relatif terkendali yakni sebesar Rp14.313,99 per dolar AS.

Sumber / Source:

- Siaran Pers SP-10/KLI/2021 Kementerian Keuangan Republik Indonesia. / Press Release SP-10/KLI/2021 Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.
- Tinjauan Ekonomi, Keuangan dan Fiskal Edisi IV Tahun 2021 ISSN 2527-3140 – Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. / Economic, Financial and Fiscal Review Edition IV 2021 ISSN 2527-3140 – Fiscal Policy Agency of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

Analisis Industri-Penguatan Ekosistem UMKM

Bank Indonesia secara konsisten terus turut memperluas dan memperkuat program pengembangan UMKM. Beberapa kebijakan pendukung juga ditempuh untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Sinergi erat dengan Pemerintah, perbankan, dan institusi lainnya ditingkatkan untuk mengembangkan UMKM serta ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bank Indonesia terus memperkuat program pengembangan UMKM untuk mendorong UMKM *digital* dan ekspor. Dalam kaitan ini, program pengembangan UMKM terus ditingkatkan melalui tiga pilar kebijakan, yaitu (i) korporatisasi, (ii) peningkatan kapasitas, dan (iii) pembiayaan, guna mewujudkan UMKM yang produktif, inovatif, dan adaptif.

In terms of investment activity (PMTB), which had been on hold, it could also increase by 4.49% in the fourth quarter of 2021. Overall in 2021, investment returned to positive growth of 3.80% after a negative growth of 4.96% in 2020. The trade sector also grew strongly in Quarter IV at 5.56% (YoY) or 4.65% overall in 2021. This increase was driven by improved community mobility in line with the relatively easing condition of the COVID-19 pandemic.

The 2021 Consumer Price Index (CPI) inflation was recorded at 1.87% (YoY) and was below the target range of 3.0%±1%, although it increased compared to the 2020 CPI inflation of 1.68% (YoY). These developments were influenced by weak domestic demand as a result of the COVID-19 pandemic, stable exchange rates and maintained inflation expectations, availability of supplies and smooth distribution of food ingredients.

The Rupiah exchange rate against the US dollar was also affected by the high uncertainty in global financial markets. Pressure on the global financial market itself increased since the end of September 2021. The high volatility in the financial market also encouraged investors to prefer safe haven instruments so that the US dollar index increased and suppressed exchange rate movements in emerging market countries, including the Rupiah. As of December 15, 2021, the Rupiah exchange rate against the US dollar closed at IDR14,348 per US dollar, or depreciated 1.7% (YtD). On an annual basis, the average exchange rate of the Rupiah against the US dollar was relatively controlled at IDR14,313.99 per US dollar.

Industrial Analysis-Strengthening of MSME Ecosystem

Bank Indonesia consistently continued to expand and strengthen the MSME development program. Several supporting policies were also adopted to encourage the recovery of the national economy. Close synergy with the Government, banks and other institutions was enhanced to develop MSMEs as well as the Islamic economy and finance as a new source of Indonesia's economic growth. Bank Indonesia continued to strengthen its MSME development program to encourage digital MSMEs and exports. In this regard, the MSME development program continued to be improved through three policy pillars, namely (i) corporatization, (ii) capacity building, and (iii) financing, in order to realize productive, innovative, and adaptive MSMEs.

Peningkatan kapasitas UMKM dilakukan secara *end-to-end* dan difokuskan pada digitalisasi untuk mendorong peningkatan produksi, pengelolaan keuangan, dan perluasan akses pasar. Pada aspek pembiayaan, Bank Indonesia melakukan (i) perluasan akses untuk kemudahan ekspansi usaha dengan pembiayaan UMKM yang lebih sehat, (ii) perluasan pemanfaatan SI-APIK, serta (iii) penyediaan informasi profil UMKM potensial untuk dibiayai oleh lembaga keuangan melalui *website* Bank Indonesia. Fasilitasi akses pembiayaan UMKM juga terus dilakukan untuk mendukung pemenuhan ketentuan pembiayaan inklusif, diantaranya dengan mendorong pola pembiayaan UMKM melalui *multiple channel* untuk meningkatkan peran UMKM dalam ekspor dan substitusi impor serta fasilitas temu bisnis.

Sejalan dengan pilar ketiga kebijakan makroprudensial yaitu inklusi keuangan, Bank Indonesia mendorong pengembangan UMKM melalui kebijakan Rasio Kredit UMKM yang diukur dari rasio kredit dan pembiayaan UMKM terhadap total kredit dan pembiayaan, yang pada tahun 2021 targetnya tetap minimal 20%. Pada akhir November 2021, rasio tersebut tercapai sebesar 20,48%. Bank Indonesia menyempurnakan kebijakan Rasio Kredit UMKM menjadi Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) melalui penerbitan PBI No. 23/13/PBI/2021 tanggal 31 Agustus 2021. Penyempurnaan kebijakan tersebut bertujuan untuk mendorong inklusivitas dengan memperluas target pembiayaan tidak hanya bagi UMKM namun juga bagi korporasi UMKM dan Perorangan Berpenghasilan Rendah (PBR).

Untuk terus mendorong UMKM Ekspor dilakukan strategis penerapan *push strategy* dan *pull strategy*. *Push strategy* ditempuh melalui kurasi serta fasilitas peningkatan kapasitas dan pendampingan kepada UMKM untuk pemenuhan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produk, termasuk pemenuhan standardisasi dan sertifikasi yang diperlukan UMKM untuk ekspor. Sementara itu, strategi *market driven* atau *pull strategy* dilakukan dengan mendorong keikutsertaan UMKM pada berbagai event promosi perdagangan dan pameran di luar negeri, *market intelligence*, serta fasilitas temu bisnis (*business matching*) dengan pembeli potensial.

UMKM berpotensi untuk berkembang lebih lanjut dengan mempertimbangkan karakteristik UMKM yang sebagian besar masih *unbanked* dengan akses yang terbatas pada produk dan jasa layanan keuangan. Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi di sektor keuangan menumbuhkan berbagai alternatif produk dan jasa keuangan yang ditawarkan oleh bank dan non bank, sehingga berpotensi meningkatkan akses keuangan UMKM. Penyediaan akses UMKM pada lembaga keuangan melalui digitalisasi tersebut merupakan pintu masuk UMKM untuk naik kelas, melalui pemanfaatan produk dan layanan dalam pembayaran, pengelolaan keuangan, dan pembiayaan.

The capacity building of MSMEs was carried out end-to-end and was focused on digitalization to encourage increased production, financial management, and expansion of market access. In the financing aspect, Bank Indonesia carried out (i) expansion of access to facilitate business expansion with healthier MSME financing, (ii) expansion of the use of SI-APIK, and (iii) provision of profile information on potential MSMEs to be financed by financial institutions through the Bank Indonesia website. Facilitation of access to MSME financing was also continuously carried out to support the fulfillment of inclusive financing provisions, including by encouraging MSME financing patterns through multiple channels to increase the role of MSMEs in exports and import substitution as well as facilitating business gatherings.

In line with the third pillar of macroprudential policy, namely financial inclusion, Bank Indonesia encouraged the development of MSMEs through the MSME Credit Ratio policy measured by the ratio of MSME loans and financing to total loans and financing, which in 2021 the target remained at least 20%. At the end of November 2021, the ratio reached at 20.48%. Bank Indonesia refined the MSME Credit Ratio policy to the Macroprudential Inclusive Financing Ratio (RPIM) through the issuance of PBI No. 23/13/PBI/2021 dated August 31, 2021. This policy improvement aimed to encourage inclusiveness by expanding financing targets not only for MSMEs but also for MSME corporations and Low-Income Individuals (PBR).

To continue to encourage MSME exports, a strategic implementation of a push strategy and a pull strategy was carried out. The push strategy could be pursued through curation and facilitation of capacity building and assistance to MSMEs to fulfill product quantity, quality and continuity, including the fulfillment of standardization and certification required by MSMEs for export. Meanwhile, the market driven strategy or pull strategy was carried out by encouraging the participation of MSMEs in various trade promotion events and exhibitions abroad, market intelligence, and facilitating business matching with potential buyers.

MSMEs had the potential to develop further by considering the characteristics of MSMEs, most of which were still unbanked with limited access to financial products and services. The development of information technology and digitalization in the financial sector fostered various alternative financial products and services offered by banks and non-banks, thereby potentially increasing MSME financial access. The provision of MSME access to financial institutions through digitalization was the entry point for MSMEs to advance to class, through the use of products and services in payments, financial management, and financing.

Melalui optimalisasi peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi akan terus diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan adaptasi terhadap perubahan *digital*. Peran UMKM sebagai kekuatan baru ekonomi nasional semakin relevan saat ini, dengan banyak negara mulai mengandalkan sumber pertumbuhan ekonomi domestik, termasuk diantaranya melalui UMKM.

Through optimizing the role of MSMEs as the backbone of the economy, efforts continued to be directed at increasing productivity, inclusive economic growth, and adapting to digital changes. The role of MSMEs as the new power of the national economy was increasingly relevant today, with many countries starting to rely on sources of domestic economic growth, including through MSMEs.

Sumber / Source: Laporan Tahunan 2021 Pengembangan UMKM, Bank Indonesia. / 2021 Annual Report on MSME Development, Bank Indonesia.

Analisis Posisi PNM dalam Industri

Analysis of PNM's Position in the Industry

Gambar Posisi Produk PNM

PNM Product Position Image

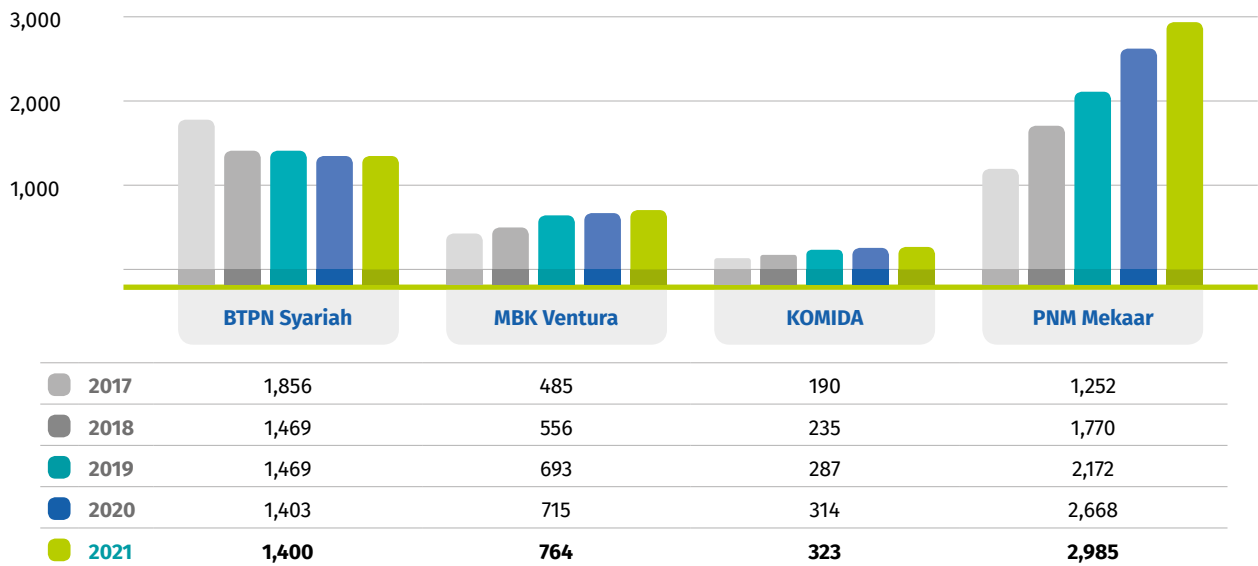


Gambar di atas menjelaskan bahwa pesaing utama PNM adalah lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang bergerak di bidang pembiayaan ultra mikro dan mikro. Selain memberikan pembiayaan terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) melalui PNM ULaMM, saat ini melalui PNM Mekaar, PNM juga fokus kepada pembiayaan ultra mikro dengan *plafon* mulai Rp2 juta sampai dengan Rp5 juta untuk PNM Mekaar Reguler dan *plafon* di atas Rp7 juta sampai dengan Rp25 juta untuk PNM Mekaar Plus yang umumnya berhadapan langsung dengan lembaga keuangan yang menawarkan produk sejenis.

The picture above shows that PNM's main competitors are financial institutions, both banks and non-banks, which are engaged in ultra-micro and micro financing. In addition to providing financing for Micro and Small Enterprises (MSMEs) through PNM ULaMM, currently through PNM Mekaar, PNM is also focusing on ultra-micro financing with a ceiling starting from IDR2 million to IDR5 million for PNM Mekaar Regular and a ceiling above IDR7 million to IDR25 million for PNM Mekaar Plus, which generally deals directly with financial institutions offering similar products.

Grafik Jumlah Jaringan Layanan PNM dan Kompetitor
Graph of Number of PNM Service Networks and Competitors

Jumlah Jaringan Layanan Kompetitor / Number of Competitor Service Networks



Sumber Data / Data Source: Laman Perusahaan, Survei PNM, diolah. / Company website, PNM survey, compiled.

Berdasarkan data, untuk awal tahun 2021 ini kompetitor yang memiliki jumlah jaringan layanan yang paling banyak adalah BTPN Syariah, diikuti oleh MBK Ventura dan KOMIDA. Sementara PNM, pada tahun 2021 memiliki jaringan kantor cabang dan unit sebanyak 3.673 (Cabang Mekaar, Cabang dan Unit ULaMM) yang tersebar di 34 provinsi.

Based on December 2020 data, the competitors with the most number of service networks were the Sharia National Pension Savings Bank (BTPN Sharia), followed by Family Business Partners (MBK) Ventura and Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA). Meanwhile, PNM, in 2021, owned a network of 3,673 branch offices and units (Mekaar Branches, Branches and ULaMM Units) spreading across 34 provinces.

Perubahan-perubahan penting yang sedang terjadi dan dapat mempengaruhi posisi persaingan:

Important changes that are taking place that could affect the competitive position:

1. Pada sektor UMKM termasuk usaha ultra mikro kondisi ini masih dirasa berat. Sehingga hal ini berimbas pada belum normalnya permintaan kebutuhan modal dari sektor UKM, namun demikian jika dibandingkan dengan akhir tahun 2020 telah menunjukkan peningkatan. Sementara dari sisi lembaga pembiayaan, baik perbankan maupun non perbankan mulai kembali melakukan ekspansi sehingga PNM terus berusaha untuk memberikan layanan yang optimal diantaranya melalui pemberian *plafon* yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan proses yang cepat serta pemberian pendampinga dan pelatihan usaha.
2. Dari sisi pendanaan, sampai saat ini sumber dana PNM masih tetap mengandalkan pendanaan dari penerbitan obligasi, sukuk dan *Medium Term Notes* (MTN) serta pinjaman komersial perbankan. Struktur pendanaan ini disesuaikan dengan kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan dengan tetap menjaga tingkat *cost of fund* yang *favorable* bagi perusahaan sehingga diharapkan perusahaan dapat menurunkan *lending rate* kepada nasabah ke depannya.

1. In the MSME sector, including ultra micro businesses, this condition was still difficult. Hence, this had an impact on the not yet normal demand for capital needs from the SME sector, however, when compared to the end of 2020, it showed an increase. Meanwhile, in terms of financing institutions, both banking and non-banking began to expand again so that PNM continued to strive to provide optimal services, including by providing a ceiling in accordance with customer needs and a fast process as well as providing business assistance and training.
2. In terms of funding, until now PNM's source of funding still relied on funding from the issuance of bonds, sukuk and *Medium Term Notes* (MTN) as well as commercial bank loans. This funding structure was adjusted to the funding needs needed while maintaining a favorable level of cost of funds for the company so that it was expected that the company could reduce the lending rate to customers in the future.

Untuk terus berkembang di tengah persaingan saat ini, PNM terus melakukan inovasi, diantaranya:

1. PNM terus mengembangkan pola pendampingan kepada nasabah terpilih dengan tujuan peningkatan kapasitas usaha dan memberi nilai lebih pada produk nasabah agar dapat masuk ke pasar yang lebih luas.
2. Pengembangan produk dengan memperhatikan mitigasi risiko, sehingga perusahaan dapat melayani segmen pasar ultra mikro dan UMK yang belum dijangkau oleh perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Termasuk pengembangan produk PNM Mekaar, yakni program bagi para nasabah PNM Mekaar yang sudah lama bergabung dan ingin mengembangkan usahanya, memiliki rekam jejak pembiayaan yang baik, serta kemampuan bayar yang baik. Untuk program ini PNM menyediakan dua produk pembiayaan yakni PNM Mekaar Plus dan ULaMM. Selain itu, PNM dalam mendukung program *Sustainable Development Goals* juga menyediakan produk WASH yang ditujukan kepada para nasabah PNM Mekaar yang ingin meningkatkan kualitas sanitasi lokasi tempat tinggal mereka.
3. Pemanfaatan teknologi dan informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah, diantaranya digitalisasi kegiatan Pertemuan Kelompok Mingguan nasabah PNM Mekaar dan pemanfaatan aplikasi PNM Digi untuk nasabah.

Selain melakukan inovasi, untuk menghadapi situasi persaingan saat ini dan kondisi ekonomi yang belum seluruhnya pulih dampak dari pandemi COVID-19 PNM juga menerapkan beberapa strategi diantaranya adalah:

1. Program retensi untuk nasabah yang loyal, yaitu memberikan penambahan pembiayaan (*top up*) dan juga memberikan tingkat suku bunga yang lebih kompetitif bagi nasabah-nasabah loyal dan memiliki riwayat pembayaran lancar.
2. Penyaluran pembiayaan yang selektif dan berhati-hati dan peningkatan kegiatan pendampingan dan pelatihan usaha yang mana kegiatan ini disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Daerah setempat untuk mendukung pencegahan penyebaran COVID-19.
3. Untuk mendukung upaya penetrasi dan pertumbuhan jumlah nasabah PNM Mekaar dan ULaMM sesuai amanah pemegang saham, pada tahun 2021 ini PNM membuka beberapa kantor cabang PNM Mekaar baru untuk memperluas jangkauan layanan, yang pada tahun 2021 jumlahnya mencapai 2.985 kantor sehingga total jumlah kantor layanan PNM sebanyak 3.673 yang tersebar di 34 provinsi, 422 kotamadya/kabupaten dan 5.640 kecamatan.

To continue to develop in the midst of current competition, PNM continued to innovate, including:

1. *PNM continued to develop mentoring patterns for selected customers with the aim of increasing business capacity and providing added value to customer products so that they could enter a wider market.*
2. *Development of risk management products and techniques that could serve the MSME and Ultra Micro market segments that were not yet accessible to banks and other financial institutions. This included the development of PNM Mekaar products as programs for PNM Mekaar customers who had been with them for a long time and wanted to expand their business, had a good track record of financing, and were good at paying. For this program, PNM provided two financing products, namely PNM Mekaar Plus and ULaMM. In addition, PNM in supporting the Sustainable Development Goals program also provided WASH products aimed at PNM Mekaar customers who wanted to improve the sanitation quality of their residential location.*
3. *Utilization of technology and information to improve service quality to customers, including digitizing PNM Mekaar Customer Weekly Group Meeting activities and utilizing the PNM Digi application for customers.*

In addition to innovating, to deal with the current competitive situation and economic conditions that had not fully recovered from the impact of the COVID-19 pandemic. PNM also implemented several strategies including:

1. *A retention program for loyal customers, which provided additional financing (top up) and also provided more competitive interest rates for loyal customer with a history of smooth payments.*
2. *Selective and prudent financing distribution and increased business mentoring and training activities in which these activities were adjusted to Local Government Regulations to support the prevention of the spread of COVID-19.*
3. *To support efforts to penetrate and grow the number of PNM Mekaar customers according to the mandate of shareholders, in 2021 PNM opened several new PNM Mekaar branch offices to expand service coverage. In 2021 the number reached 2,985 offices bringing the total number of PNM service offices to 3,673 spread across 34 provinces, 422 municipalities/districts and 5,640 sub-districts.*

Tinjauan Operasional

Operational Review

Strategi Perusahaan

Program Strategis Perusahaan

Program strategis PNM dalam menjalankan bisnis pada tahun 2021 antara lain dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan nilai sosial bagi Indonesia melalui pemberdayaan 9,6 juta nasabah PNM Mekaar aktif dengan cara pengembangan jaringan layanan dan peningkatan proses digitalisasi proses pembiayaan.
2. Meningkatkan pengelolaan manajemen risiko dengan pencapaian Indeks Kematangan Manajemen Risiko *level Defined*.
3. Mengusahakan sumber pendanaan internasional melalui kerjasama dengan lembaga/insitusi nasional maupun internasional.
4. Mengembangkan proses digitalisasi Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) PNM Mekaar.
5. Mengembangkan dan mengelola aplikasi PNM Digi untuk nasabah.
6. Meningkatkan talenta perempuan dan milenial melalui program *Top Talenta Perempuan* dan *Top Talenta Milenial*.

Program-program tersebut selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk sasaran strategis yang disertai dengan indikator kinerja (*performance indicators*). Ada lima aspek utama yang menjadi titik sasaran PNM yaitu peningkatan nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia melalui inovasi model bisnis, kepemimpinan, teknologi, peningkatan investasi dan pengembangan talenta insan PNM.

Strategi Bisnis

Uraian strategi bisnis PNM yang dilakukan tahun 2021 dijabarkan sebagai berikut:

1. PNM tetap fokus pada pembiayaan perempuan prasejahtera melalui PNM Mekaar termasuk pendampingan dan pelatihan sehingga diharapkan para nasabah tersebut dapat meningkat usahanya untuk kemudian menjadi nasabah PNM Mekaar Naik Kelas.
2. Pemberdayaan nasabah PNM Mekaar berkelanjutan juga menjadi fokus PNM, diharapkan para nasabah PNM Mekaar dapat meningkatkan usaha dan memanfaatkan fasilitas produk PNM Mekaar Plus dan ULaMM Pantas, dengan tetap mempertahankan kegiatan/pola pemberdayaan secara kelompok dan maksimal *plafon* Rp50 juta.
3. Bekerjasama dan bersinergi dengan BUMN lain dan lembaga donor, mengembangkan program-program kemitraan serta melakukan aktivitas pengembangan kapasitas usaha UKM dan pengembangan kelompok.

Company Strategy

Corporate Strategic Program

PNM's strategic program in running a business in 2021 can be described as follows:

1. Increasing social value for Indonesia through empowering 9.6 million active PNM Mekaar customers by developing a service network and improving the digitization process of the financing process.
2. Improving risk management management by achieving the Defined level of Risk Management Maturity Index.
3. Seeking international funding sources through collaboration with national and international institutions/institutions.
4. Developing the process of digitizing the PNM Mekaar Weekly Group Meeting (PKM).
5. Developing and managing the PNM Digi application for customers.
6. Increasing the talents of women and millennials through the Top Talent Women and Millennial Top Talent programs.

These programs are further elaborated in the form of strategic targets accompanied by performance indicators. There are five main aspects that become PNM's target points, namely increasing economic and social value for Indonesia through business model innovation, leadership, technology, increasing investment and developing the talents of PNM people.

Business Strategy

The description of PNM's business strategy carried out in 2021 is described as follows:

1. PNM remained focused on financing underprivileged women through PNM Mekaar including mentoring and training so that it was expected that these customers could increase their business and then became PNM Mekaar Upgrading customers.
2. Continuous empowerment of PNM Mekaar customers also became the focus of PNM, it was hoped that PNM Mekaar customers could increase their business and take advantage of PNM Mekaar Plus and ULaMM Pantas product facilities, while maintaining group empowerment activities/patterns and a maximum limit of IDR50 million.
3. Cooperating and synergizing with other SOEs and donor agencies, developing partnership programs as well as carrying out SME business capacity building and group development activities.

4. Mendirikan dan mengoperasikan kantor cabang PNM Mekaar baru untuk memperluas jangkauan jaringan serta mengoptimalkan produktivitas jaringan kantor tersebut.
5. Mengupayakan diversifikasi pendanaan dengan melakukan *mixed* pendanaan pasar modal dan perbankan yang bertujuan untuk menurunkan suku bunga pinjaman (*lending rate*) ke nasabah. Diversifikasi sumber pendanaan diperlukan untuk tidak menjadikan pendanaan dari perbankan menjadi satu-satunya sumber pendanaan bagi PNM.
6. Melakukan riset pasar untuk mengetahui kebutuhan pelanggan sehingga dapat direspon dalam bentuk produk baru yang kompetitif dan memberikan tingkat keuntungan yang optimum.
7. Melakukan sinergi bisnis antara induk dan anak PNM.

Strategis Operasional

Dalam mendukung jalannya operasional Perusahaan, PNM berupaya untuk menguatkan dan membangun infrastruktur teknologi agar semakin mendukung kegiatan operasional dan perkembangan Perusahaan.

Aspek Pemasaran

Strategi Pemasaran Tahun 2021

Sebagai lembaga keuangan, PNM memiliki segmentasi pasar yang berbeda dengan institusi pembiayaan bank maupun non bank lainnya. Untuk merealisasikan upaya Pemerintah dalam meningkatkan tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakat, PNM memfokuskan jangkauan nasabahnya kepada kalangan perempuan prasejahtera melalui program PNM Mekaar dan ULaMM.

Untuk meningkatkan nasabah PNM Mekaar dan ULaMM, strategi pemasaran yang dilakukan oleh PNM adalah dengan meningkatkan produktivitas *Account Officer* mikro. Salah satunya adalah melalui pengembangan keterampilan dan kompetensi para *Account Officer* untuk mencapai target yang ditetapkan. Strategi ini juga didukung dengan mendorong nasabah untuk meningkatkan jumlah pinjaman yang diajukan berikutnya (*top up*). Selain itu, PNM juga mengutamakan nasabah lama dalam menyalurkan pinjaman (*nasabah rejoin*).

Pangsa Pasar

Di pasar pembiayaan mikro dan kecil, eksposur pembiayaan PNM ULaMM sebesar 1,12% dibandingkan total eksposur perbankan untuk pembiayaan UMK. Sedangkan jika dibandingkan dengan pesaing utama yakni Bank Perkreditan Rakyat, maka eksposur PNM ULaMM sebesar 10,74% untuk pasar pembiayaan UMK. Sedangkan proporsi pembiayaan Mekaar di pasar ultra mikro secara keseluruhan yaitu 62,64% dari total pembiayaan ultra mikro.

4. *Establishing and operating a new PNM Mekaar branch office to expand network coverage and optimize the productivity of the office network.*
5. *Striving to diversify funding by conducting mixed funding of the capital market and banking with the aim of lowering the lending rate to customers. Diversification of funding sources was needed not to make funding from banks as the only source of funding for PNM.*
6. *Conducting market research to determine customer needs so that they could be responded to in the form of new competitive products and provide an optimum level of profit.*
7. *Conducting business synergies between the parent and subsidiary of PNM.*

Operational Strategy

In supporting the Company's operations, PNM strives to strengthen and build technology infrastructure to further support the Company's operational activities and development.

Marketing Aspect

Marketing Strategy in 2021

As a financial institution, the Company has a different market segmentation with other bank and non-bank financing institutions. To realize the government's efforts to improve the level of equitable distribution of community welfare, PNM focuses its client outreach to underprivileged women through the PNM Mekaar and ULaMM ULaMM programs.

*To increase PNM Mekaar and ULaMM customers, the marketing strategy undertaken by PNM is to increase the productivity of micro Account Officers. One of them is through the skills development and competencies of the Account Officers to achieve the targets set. This strategy is also supported by encouraging customers to increase the number of loans submitted next (*top up*). In addition, PNM also prioritizes old customers in lending (*rejoin customers*).*

Market Share

In the micro and small financing market, the PNM ULaMM financing exposure was 1.12% compared to the total banking exposure for MSME financing. Meanwhile, when compared with the main competitors, namely Rural Banks, the PNM ULaMM exposure was 10.74% for the MSME financing market. Meanwhile, the proportion of ULaMM financing in the micro market as a whole (Commercial Bank Micro Units) was 62.64% of the total micro-small financing. Meanwhile, the proportion of Mekaar financing in the ultra-micro market

Tabel Pangsa Pasar PNM ULaMM terhadap Pesaing Utama dan Pesaing Umum Berdasarkan Baki Debet
Table of PNM ULaMM Market Share to Main Competitors and General Competitors Based on Debit Tray

Oktober 2021	BPD	Bank Asing dan Campuran Foreign and Joint Venture Banks	Bank Swasta Nasional Private Commercial Bank	BPR	PNM	Bank Persero Persero Bank	Total	October 2021
Outstanding (%)	7,67%	0,13%	12,92%	9,31%	1,12%	68,86%	100,00%	Outstanding (%)
Outstanding (Miliar Rupiah)	50.220	819	84.600	60.994	7.338	450.991	654.963	Outstanding (IDR Billion)

Sumber / Source: Laman tiap-tiap Perusahaan. / Individual Company pages.

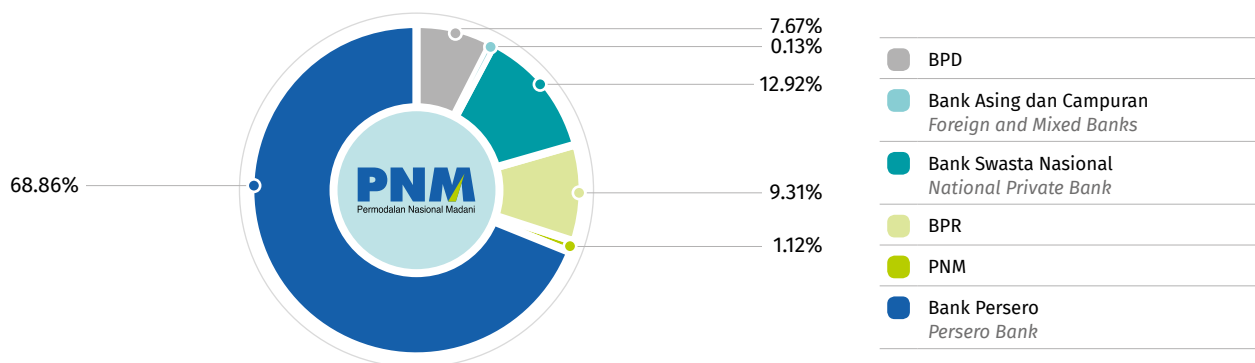
Tabel Pangsa Pasar PNM ULaMM terhadap BPR Berdasarkan Baki Debet
Table of ULaMM PNM Market Share to BPR Based on Debit Tray

Oktober 2021	BPR	PNM	Total	October 2021
Outstanding (%)	89,26%	10,74%	100,00%	Outstanding (%)
Outstanding (Miliar Rupiah)	60.994	7.338	68.333	Outstanding (IDR Billion)

Sumber / Source: Laman tiap-tiap Perusahaan. / Individual Company pages.

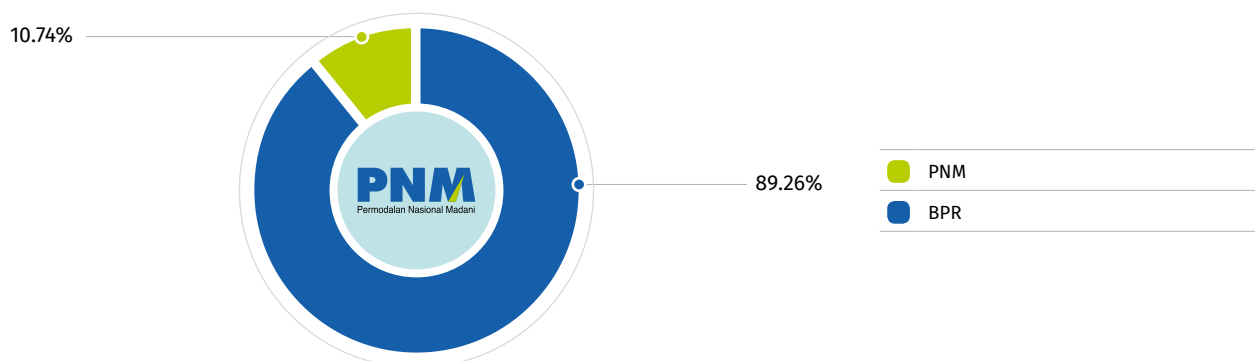
Grafik Pangsa Pasar PNM ULaMM terhadap Pesaing Utama dan Pesaing Umum Berdasarkan Baki Debet
Graph of ULaMM PNM Market Share to Main Competitors and General Competitors Based on Debit Tray

Market Share PNM ULaMM vs Pembiayaan Mikro Kecil Perbankan BPR / PNM ULaMM Market Share vs Micro Small Banking Financing & BPR



Grafik Pangsa Pasar PNM ULaMM terhadap BPR Berdasarkan Baki Debet
Graph of ULaMM PNM Market Share to BPR Based on Debit Tray

Market Share PNM ULaMM vs BPR



Tabel Pangsa Pasar Nasabah PNM Mekaar Dibandingkan Kompetitor

Table of PNM Mekaar Customers' Market Share Compared to Competitors

(dalam nasabah / in customer)

Mei ^{*)} May ^{*)}	September September	September September	Desember December	Desember December	Agustus ^{*)} August ^{*)}
MBK	KOMIDA	BTPN SYARIAH	PNM	AMARTHA	BINA ARTHA
1.231.601	785.675	3.200.000	11.011.194	942.482	408.919
7,01%	4,47%	18,20%	62,64%	5,36%	2,33%

Sumber / Source : Laman tiap-tiap Perusahaan. / Individual Company pages

*) Data yang tersedia ke Publik / Data available to the Public

Grafik Pangsa Pasar Outstanding PNM Mekaar Dibandingkan Kompetitor

Graph of PNM Mekaar Outstanding Market Share Compared to Competitors

(dalam miliar Rupiah / in IDR billion)

Mei ^{*)} May ^{*)}	Desember December	September September	Desember December	Desember December	Agustus ^{*)} August ^{*)}
MBK	KOMIDA	BTPN SYARIAH	PNM	AMARTHA	BINA ARTHA
3.286.39	1.953.05	10.400.00	25.939.16	5.390.20	1.260.00
6,81%	4,05%	21,56%	53,78%	11,18%	2,61%

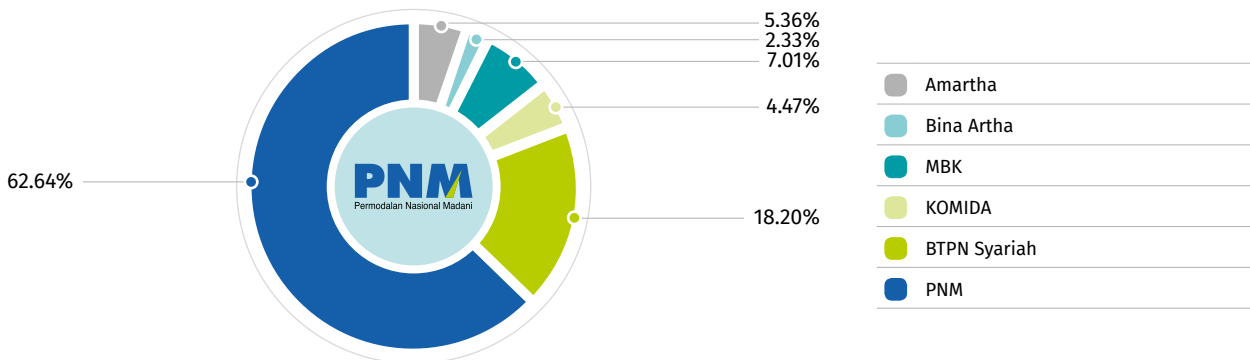
Sumber / Source : Laman tiap-tiap Perusahaan. / Individual Company pages

*) Data yang tersedia ke Publik / Data available to the Public

Grafik Pangsa Pasar Nasabah PNM Mekaar Dibandingkan Kompetitor Desember 2021

Graph of PNM Mekaar's Customer Market Share Compared to Competitors December 2021

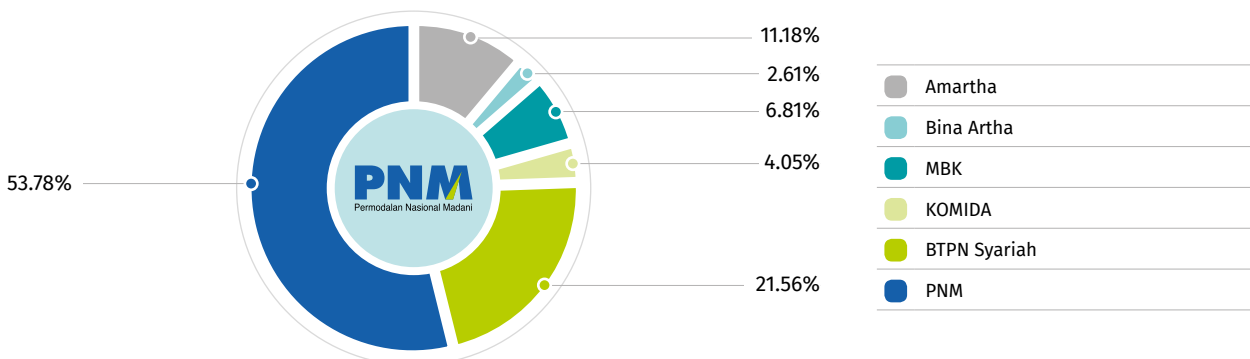
Market Share Nasabah / Customer PNM Mekaar Desember / December 2021



Grafik Pangsa Pasar Outstanding PNM Mekaar Dibandingkan Kompetitor Desember 2021

Graph of PNM Mekaar Outstanding Market Share Compared to Competitors December 2021

Market Share OS PNM Mekaar Desember / December 2021



Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha

PNM mengelola kegiatan usahanya dan mengidentifikasi segmen yang dilaporkan berdasarkan jenis pembiayaan yang dihasilkan. Jenis pembiayaan yang memiliki karakteristik serupa diagregasikan dan dievaluasi secara berkala oleh manajemen PNM. Laba/rugi dari masing-masing segmen digunakan untuk menilai kinerja masing-masing segmen. Segmen usaha PNM yaitu Pembiayaan, Manajer Investasi, Modal Ventura, dan Pembiayaan Syariah.

Penjelasan dan Produktivitas Segmen Operasi

Pembiayaan

Segmen pembiayaan terdiri atas:

1. PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar)
PNM Mekaar adalah layanan pembiayaan yang berfokus pada nasabah wanita pra sejahtera yang tidak memiliki modal untuk membuka maupun mengembangkan usaha.
2. Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM)
ULaMM adalah layanan pinjaman modal untuk usaha mikro dan kecil yang disertai dengan bimbingan dan pendampingan untuk mengembangkan usaha.

Produktivitas segmen pembiayaan diuraikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel Produktivitas Segmen Pembiayaan
Table of Productivity of the Financing Segment

(dalam miliar Rupiah / in IDR billion)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			(Rp / IDR)	(%)	
Penyaluran PNM Mekaar	46.445,26	24.346,35	22.098,91	90,77%	Mekaar PNM distribution
Penyaluran ULaMM	3.010,31	2.514,75	495,56	19,71%	ULaMM distribution

PNM Mekaar saat ini telah berkembang menjadi 2.985 unit dan melayani di 5.735 kecamatan. Pada tahun 2021, PNM telah menyalurkan pembiayaan PNM Mekaar sebesar Rp46,44 triliun, meningkat 90,77% dari Rp24,35 triliun pada tahun 2020. Angka ini melebihi target RKAP 2021 yang sebesar Rp36,20 triliun dengan pencapaian sebesar 128,31%. Dari jumlah penyaluran Mekaar 2021, porsi penyaluran terbesar diberikan untuk segmen Perdagangan, Pertanian, dan Industri.

Saat ini, ULaMM telah berkembang menjadi 626 unit dan melayani di 5.735 kecamatan. Pemulihan perekonomian akibat dampak pandemik di sektor usaha mikro dan kecil kian membaik hal ini berpengaruh terhadap kinerja penyaluran PNM ULaMM selama tahun 2021 yang tercatat mampu menyalurkan dana sebesar Rp3,01 triliun, hal tersebut lebih baik dibandingkan dengan jumlah penyaluran tahun 2020 yaitu sebesar Rp2,51 triliun, peningkatan jumlah penyaluran PNM ULaMM mencapai 19,71% dibandingkan dengan tahun

Operation Review Per Business Segment

The Company managed its business activities and identified reported segments based on the types of financing generated. Types of financing that had similar characteristics were aggregated and evaluated periodically by PNM's management. Profit/loss from each segment was used to assess the performance of each segment. PNM's business segments are Financing, Investment Manager, Venture Capital, Sharia Financing.

Description and Productivity of Operating Segments

Financing

The financing segment consists of:

1. PNM Fostering a Prosperous Family Economy (PNM Mekaar)
PNM Mekaar is a financing service that focuses on underprivileged female customers who do not have the capital to open or develop a business.
2. Micro Capital Service Unit (ULaMM)
ULaMM is a capital loan service for micro and small businesses accompanied by guidance and assistance to develop the business.

The productivity of the financing segment can be described in the following table.

PNM Mekaar grew to 2,985 units and serves 5,735 sub-districts. In 2021, PNM disbursed PNM Mekaar financing of IDR46.44 trillion, an increase of 90.77% from IDR24.35 trillion in 2020. This figure exceeds the 2021 RKAP target of IDR36.20 trillion with an achievement of 128.31%. Of the total distribution of Mekaar 2021, the largest portion of distribution was given to the Trade, Agriculture and Industry segments.

Currently, ULaMM has grown to 626 units and serves 5,735 sub-districts. The economic recovery due to the impact of the pandemic in the micro and small business sector was getting better, this affected the performance of the distribution of PNM ULaMM during 2021 which was recorded to be able to disburse funds of IDR3.01 trillion, which was better than the total distribution in 2020 which reached IDR2.51 trillion, the increase in the number of PNM ULaMM distributions reached 19.71% compared to the previous year, and exceeded the 2021

sebelumnya, dan melebihi target RKAP 2021 dengan pencapaian 119,71%. Dari seluruh penyaluran tersebut, porsi terbesar diberikan untuk segmen perdagangan, hotel dan restoran, keuangan, *real estate* dan jasa perusahaan, pertanian, serta peternakan dan kehutanan.

Manajer Investasi

Manajemen Investasi dilaksanakan melalui PT PNM Investment Management (PNM IM). PNM IM adalah Perusahaan Manajer Investasi yang menjalankan usaha pengelolaan produk investasi pasar modal antara lain berupa Reksadana dan kontrak pengelolaan dana (*discretionary fund*). Selain memiliki ijin sebagai manajer investasi, PNM IM juga memiliki ijin sebagai penasihat investasi. Produktivitas segmen manajer investasi pada tabel sebagai berikut.

Tabel Produktivitas Segmen Manajer Investasi
Table of Investment Manager Segment Productivity

(dalam miliar Rupiah / in IDR billion)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			(Rp / IDR)	(%)	
Aset Under Management (AUM)	14.523,94	14.720,78	(196,83)	(1,34%)	Aset Under Management (AUM)

Kondisi ekonomi pada akhir tahun 2021 belum sepenuhnya pulih terlebih di sektor investasi pasar modal, dampak pandemi mempersempit ruang gerak PNM IM untuk meningkatkan kinerja dana kelolaan sehingga hal ini berdampak pada belum meningkatnya jumlah *asset under management* tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. *Asset under management* tahun 2021 tercatat sebesar Rp14,52 triliun mengalami penurunan sebesar 1,34% dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu Rp14,72 triliun. Namun jika dilihat dari target RKAP 2021, AUM akhir tahun ini mampu melampaui target dengan pencapaian sebesar 105,21%.

Modal Ventura

Pembiayaan modal ventura dilaksanakan melalui anak perusahaan PT PNM Venture Capital (PNM VC). PNM VC memberikan dukungan permodalan langsung kepada usaha kecil dan menengah dalam bentuk pembiayaan bagi hasil kepada Perusahaan Patungan Usaha (PPU). Produktivitas segmen modal ventura diuraikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel Produktivitas Segmen Modal Ventura
Table of Productivity of the Venture Capital Segment

(dalam miliar Rupiah / in IDR billion)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			(Rp / IDR)	(%)	
Penyaluran Modal Ventura	704,12	533,40	170,72	32,01%	Venture Capital Distribution

RKAP target with the achievement of 119.71%. Of all these distributions, the largest portion was given to the segments of trade, hotels and restaurants, finance, real estate and corporate services, agriculture, as well as livestock and forestry.

Investment Manager

Investment management was implemented through PT PNM Investment Management (PNM IM). PNM IM is an investment manager company that manages investment products in the capital market, namely mutual funds and fund management contracts. Apart from having a license as an investment manager, PNM IM also has a license as an investment advisor. The productivity of the investment manager segment in the Table of is as follows.

Economic conditions at the end of 2021 had not fully recovered, especially in the capital market investment sector, the impact of the pandemic narrowed PNM AUM's space to improve the performance of managed funds so that this had an impact on the number of assets under management in 2021 not increasing compared to 2020. Asset under management in 2020 was recorded at IDR14.52 trillion, a decrease of 1.34% compared to 2020, which was IDR14.72 trillion. However, when viewed from the 2021 RKAP target, AUM by the end of this year was able to exceed the target with an achievement of 105.21%.

Ventural Capital

Venture capital financing was carried out through a subsidiary, PT PNM Venture Capital (PNM VC). PNM VC provided direct capital support to small and medium enterprises in the form of production sharing financing to Joint Venture Companies (PPU). The productivity of the venture capital segment is described in the Table of as follows.

Pada tahun 2021, PNM VC telah menyalurkan modal ventura sebesar Rp704,12 miliar, jumlah ini meningkat 32,01% dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar Rp533,40 miliar. Penyaluran pembiayaan pada modal ventura mampu melebihi target RKAP 2021 dengan pencapaian sebesar 127,43%.

Pembiayaan Syariah

Segmen pembiayaan syariah terdiri atas PNM Mekaar Syariah dan ULaMM Syariah

1. PNM Mekaar Syariah

Merupakan layanan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai ketentuan hukum Islam yang berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ditujukan bagi perempuan pra-sejahtera pelaku usaha ultra mikro, melalui:

- Peningkatan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarga.
- Pembiayaan modal usaha tanpa agunan.
- Pembiasaan budaya menabung.
- Peningkatan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis.

2. ULaMM Syariah

Merupakan penyaluran pembiayaan yang dilakukan sesuai ketentuan prinsip syariah yang berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia bagi pelaku usaha UMKM.

Produktivitas segmen pembiayaan syariah diuraikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel Produktivitas Segmen Pembiayaan Syariah
Table of Productivity of the Sharia Financing Segment

(dalam miliar Rupiah / in IDR billion)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			(Rp / IDR)	(%)	
PNM Mekaar Syariah	25.159,60	11.324,91	13.834,69	222,16%	PNM Mekaar Sharia
ULaMM Syariah	1.105,17	496,36	608,81	222,65%	ULaMM Sharia

Pembiayaan PNM Mekaar Syariah tahun 2021 mencapai Rp25,15 triliun, meningkat 222,16% atau Rp13,83 triliun dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai Rp11,32 triliun. Demikian pula dengan pembiayaan ULaMM Syariah tahun 2021 yang meningkat 222,65% dari Rp496,36 miliar di tahun 2020 menjadi Rp1,11 triliun di tahun 2021.

In 2021, PNM VC disbursed venture capital of IDR704.12 billion, this amount increased by 32.01% compared to 2020, which was IDR533.40 billion. The distribution of financing to venture capital was able to exceed the 2021 RKAP target with an achievement of 127.43%.

Sharia Financing

The sharia financing segment consists of PNM Mekaar Syariah and ULaMM Syariah.

1. PNM Mekaar Syariah

It is a group-based empowerment service in accordance with the provisions of Islamic law based on fatwas and/ or sharia compliance statements from the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council aimed at underprivileged women in ultra-micro business actors, through:

- Improved financial management to realize the ideals and welfare of the family.
- Unsecured venture capital financing.
- The cultural habit of saving.
- Increased entrepreneurial competence and business development.

2. ULaMM Syariah

It is a distribution of financing carried out in accordance with the provisions of sharia principles based on fatwas and/ or sharia conformity statements from the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council for MSME business actors.

The productivity of the sharia financing segment is described in the table of as follows.

Mekaar Syariah PNM financing in 2021 reached IDR25.15 trillion, an increase of 222.16% or IDR13.83 trillion compared to 2020 which reached IDR11.32 trillion. Likewise, ULaMM Syariah financing in 2021 increased by 222.65% from IDR496.36 billion in 2020 to IDR1.11 trillion in 2021.

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Operasi

Segmen operasi PNM dibagi atas pembiayaan konvensional, manajer investasi, modal ventura, dan pembiayaan syariah. Uraian pendapatan dan profitabilitas segmen operasi tahun 2021 disajikan sebagai berikut.

Operating Segment Revenue and Profitability

PNM's operating segment was divided into conventional financing, investment manager, venture capital, and sharia financing. The description of the operating segment's revenue and profitability in 2021 is presented as follows.

Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Operasi Tahun 2021

Table of Operating Segment Revenue and Profitability Year 2021

(dalam jutaan Rupiah / in IDR million)

2021						
Uraian Description	Pembiayaan Financing	Manajer Investasi Investment Manager	Modal Ventura Venture Capital	Pembiayaan Syariah Sharia Financing	Eliminasi Elimination	Jumlah Total
Pendapatan dari pembiayaan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah serta lembaga keuangan mikro <i>Income from micro, small and medium, and micro finance institution credit financing</i>	3.974	-	-	-	-	3.974
Pendapatan dari ULaMM <i>Income from ULaMM</i>	1.150.797	-	-	267.684	-	1.418.481
Pendapatan dari pembiayaan kecil, menengah dan koperasi <i>Income from small, medium and cooperative financing</i>	997	-	-	-	-	997
Pendapatan dari Mekaar <i>Income from Mekaar</i>	3.156.035	-	-	3.770.820	-	6.926.855
Pendapatan dari modal ventura <i>Income from venture capital</i>	-	-	57.966	79.212	(62.329)	74.848
Pendapatan dari pembiayaan BPR/S <i>Income from BPR/S financing</i>	-	-	-	-	-	-
Pendapatan jasa pengelolaan dana <i>Revenue from fund management services</i>	175.619	11.568	10.547	9.943	(97.047)	110.630
Pendapatan jasa konsultan manajemen <i>Management consultant fees</i>	5.378	-	12.590	284	(12.293)	5.959
Pendapatan kegiatan manajer investasi <i>Investment manager activity income</i>	-	54.675	-	-	-	54.675
Lainnya <i>Others</i>	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total	4.492.800	66.242	81.104	4.127.943	(171.669)	8.596.419
Beban bunga dan keuangan <i>Interest and finance expenses</i>	(1.175.789)	-	(70.821)	(1.171.306)	111.836	(2.306.081)
Beban penyusutan <i>Depreciation expense</i>	(154.571)	(1.876)	(566)	(102.932)	95.066	(164.879)
Laba bersih Net profit	379.563	13.746	44.823	464.937	(57.941)	845.128
Aset <i>Asset</i>	24.540.764	227.042	1.221.801	19.707.879	(1.985.192)	43.712.295
Liabilitas <i>Liabilities</i>	19.472.494	11.968	756.540	18.213.668	(1.180.329)	37.274.341

Uraian pendapatan dan profitabilitas segmen operasi tahun 2020 disajikan sebagai berikut.

The description of the operating segment's revenue and profitability in 2020 is presented as follows.

Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Operasi Tahun 2020
Table of Operating Segment Revenue and Profitability Year 2020

(dalam jutaan Rupiah / in IDR million)

Uraian Description	2020					Jumlah Total
	Pembiayaan Financing	Manajer Investasi Investment Manager	Modal Ventura Venture Capital	Pembiayaan Syariah Sharia Financing	Eliminasi Elimination	
Pendapatan dari pembiayaan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah serta lembaga keuangan mikro <i>Income from micro, small and medium, and micro finance institution credit financing</i>	11.639	-	-	-	(7.487)	4.152
Pendapatan dari ULaMM <i>Income from ULaMM</i>	1.160.053			148.087	-	1.308.140
Pendapatan dari pembiayaan kecil, menengah dan koperasi <i>Income from small, medium and cooperative financing</i>	1.846	-	-	-	-	1.846
Pendapatan dari Mekaar <i>Income from Mekaar</i>	2.583.604	-	-	1.592.485	-	4.176.089
Pendapatan dari modal ventura <i>Income from venture capital</i>	-	-	76.889	38.149	-	115.038
Pendapatan dari pembiayaan BPR/S <i>Income from BPR/S financing</i>	-	-	-	-	-	-
Pendapatan jasa pengelolaan dana <i>Revenue from fund management services</i>	196.456	9.835	6.722	14.405	(110.142)	117.276
Pendapatan jasa konsultan manajemen <i>Management consultant fees</i>	4.090	-	6.954	-	(10.853)	190
Pendapatan kegiatan manajer investasi <i>Investment manager activity income</i>	-	51.421	-	-	-	51.421
Lainnya <i>Others</i>	2.105	-	-	-	-	2.105
Jumlah Total	3.959.791	61.256	90.565	1.793.126	(128.481)	5.776.257
Beban bunga dan keuangan <i>Interest and finance expenses</i>	(1.290.740)	-	(112.364)	(449.755)	163.052	(1.689.808)
Beban penyusutan <i>Depreciation expense</i>	(91.183)	(1.745)	(147.876)	(41.081)	-	(281.884)
Laba bersih Net profit	284.470	12.276	23.372	81.137	(42.660)	358.595
Aset <i>Asset</i>	21.236.276	212.557	2.264.797	10.415.164	(2.463.905)	31.664.889
Liabilitas <i>Liabilities</i>	18.058.371	11.230	1.915.625	7.939.948	(1.847.195)	26.077.979

Uraian pertumbuhan pendapatan dan profitabilitas segmen operasi tahun 2020-2021 disajikan sebagai berikut.

The description of revenue growth and profitability of operating segments for 2020-2021 is presented as follows.

Tabel Pertumbuhan Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Operasi Tahun 2020-2021
Table of Revenue Growth and Profitability of the Operating Segments in 2020-2021

(dalam % / in %)

Uraian Description	Pertumbuhan 2020-2021 Growth 2020-2021					Jumlah Total
	Pembiayaan Financing	Manajer Investasi Investment Manager	Modal Ventura Venture Capital	Pembiayaan Syariah Sharia Financing	Eliminasi Elimination	
Pendapatan dari pembiayaan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah serta lembaga keuangan mikro <i>Income from micro, small and medium, and micro finance institution credit financing</i>	(65,86%)	-	-	-	-	(4,29%)
Pendapatan dari ULaMM <i>Income from ULaMM</i>	(0,80%)	-	-	80,76%	-	8,43%
Pendapatan dari pembiayaan mikro, kecil, dan menengah <i>Income from small, medium and cooperative financing</i>	(45,99%)	-	-	-	-	(45,99%)
Pendapatan dari Mekaar <i>Income from Mekaar</i>	22,16%	-	-	136,79%	-	65,87%
Pendapatan dari modal ventura <i>Income from venture capital</i>	-	-	(24,61%)	107,64%	-	(34,94%)
Pendapatan dari pembiayaan BPR/S <i>Income from BPR/S financing</i>	-	-	-	-	-	-
Pendapatan jasa pengelolaan dana <i>Revenue from fund management services</i>	(10,61%)	17,62%	56,90%	(30,98%)	(11,89%)	(5,67%)
Pendapatan jasa konsultan manajemen <i>Management consultant fees</i>	31,49%	-	81,05%	-	13,27%	3.036,32%
Pendapatan kegiatan manajer investasi <i>Investment manager activity income</i>	-	6,33%	-	-	-	6,33%
Lainnya <i>Others</i>	-	-	-	-	-	-
Total Total	13,46%	8,14%	(10,45%)	130,21%	33,61%	48,82%
Beban bunga dan keuangan <i>Interest and finance expenses</i>	(8,91%)	-	(36,97%)	160,43%	(31,41%)	36,47%
Beban penyusutan <i>Depreciation expense</i>	69,52%	7,51%	(99,62%)	150,56%	-	(41,51%)
Laba bersih Net profit	33,43%	11,97%	91,78%	473,03%	35,82%	135,68%
Aset <i>Asset</i>	15,56%	6,81%	(46,05%)	89,22%	(19,43%)	38,05%
Liabilitas <i>Liabilities</i>	7,83%	6,57%	(60,51%)	129,39%	(36,10%)	42,93%

Segmen operasi PNM dibagi atas pembiayaan konvensional, manajer investasi, modal ventura, dan pembiayaan syariah. Secara konsolidasian, pada tahun 2021 PNM membukukan pendapatan operasional sebesar Rp8,59 triliun, meningkat sebesar Rp2,82 triliun atau 48,82% dari perolehan di tahun 2020 yang sebesar Rp5,78 triliun. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan PNM Mekaar sebesar Rp2,75 triliun atau 65,87% dan pendapatan PNM ULaMM sebesar Rp110,34 miliar atau 8,4% dibanding tahun 2020.

Selama tahun 2021, PNM membukukan laba bersih sebesar Rp845,13 miliar, meningkat sebesar Rp486,53 miliar atau 135,68% dari perolehan laba bersih di tahun 2020 yang sebesar Rp358,59 miliar. Kontribusi laba bersih tahun 2021 terutama diperoleh dari pembiayaan konvensional sebesar Rp379,56 miliar dan pembiayaan syariah sebesar Rp464,94 miliar yang disumbang dari pendapatan PNM Mekaar dan PNM ULaMM.

PNM's operating segment was divided into conventional financing, investment manager, venture capital, and sharia financing. On a consolidated basis, in 2021 PNM posted operating income of IDR8.59 trillion, an increase of IDR2.82 trillion or 48.82% from the revenue in 2020 which was IDR5.78 trillion. This was due to an increase in PNM Mekaar's revenue of IDR2.75 trillion or 65.87% and PNM ULaMM's revenue of IDR110.34 billion or 8.4% compared to 2020.

During 2021, PNM posted a net profit of IDR845.13 billion, an increase of IDR486.53 billion or 135.68% of the net profit in 2020 which was IDR358.59 billion. The net profit contribution in 2021 was mainly derived from conventional financing of IDR379.56 billion and Sharia financing of IDR464.94 billion, which was contributed by PNM Mekaar and PNM ULaMM revenues.



Tinjauan Keuangan

Financial Overview

Tinjauan keuangan yang diuraikan berikut mengacu kepada Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini. Laporan Keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dan mendapat opini wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Permodalan Nasional Madani dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan PNM terdiri atas kinerja Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta Laporan Arus Kas Konsolidasian disajikan sebagai berikut.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Tabel Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Table of Consolidated Statement of Financial Position

(dalam jutaan Rupiah / in IDR million)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp / IDR	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	(1)
ASET					ASSET
Kas dan setara kas	4.020.609	4.462.197	(441.588)	(9,90)	Cash and cash equivalents
Portofolio efek dengan nilai wajar melalui laba rugi (untuk diperdagangkan)	1.184.264	524.809	659.455	125,66	Portfolio of securities fair value through profit or loss (trading)
Pinjaman yang diberikan - setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.259.105.270.346 dan Rp674.515.381.879	32.377.176	22.088.985	10.288.191	46,58	Loans granted - net of allowance for impairment losses as of December 31, 2021 and 2020 reaching IDR1,259,105,270,346 and IDR674,515,381,879, respectively
Pembiayaan modal - setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp116.667.690.278 dan Rp114.731.525.571	768.094	846.573	(78.479)	(9,27)	Capital financing - net of allowance for impairment losses as of December 31, 2021 and 2020 reaching IDR116,667,690,278 and IDR114,731,525,571, respectively
Piutang jasa manajemen- setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp4.775.638.666 dan Rp1.131.889.737	5.635	7.194	(1.559)	(21,67)	Receivables from management services - net of allowance for impairment losses as of December 31, 2021 and 2020 reaching IDR4,775,638,666 and IDR1,131,889,737, respectively.

The financial review described below referred to the Financial Statements for the years ended December 31, 2021 and 2020 which were presented in this Annual Report. The Financial Statements had been audited by the Public Accounting Firm Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners and received a fair opinion, in all material respects, the financial position of PT Permodalan Nasional Madani and its subsidiaries as at 31 December 2021 as well as financial performance and cash flow for the year ended on that date, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Financial Performance

PNM's financial performance consisted of the performance of the Consolidated Statement of Financial Position, the Consolidated Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income and the Consolidated Statement of Cash Flow.

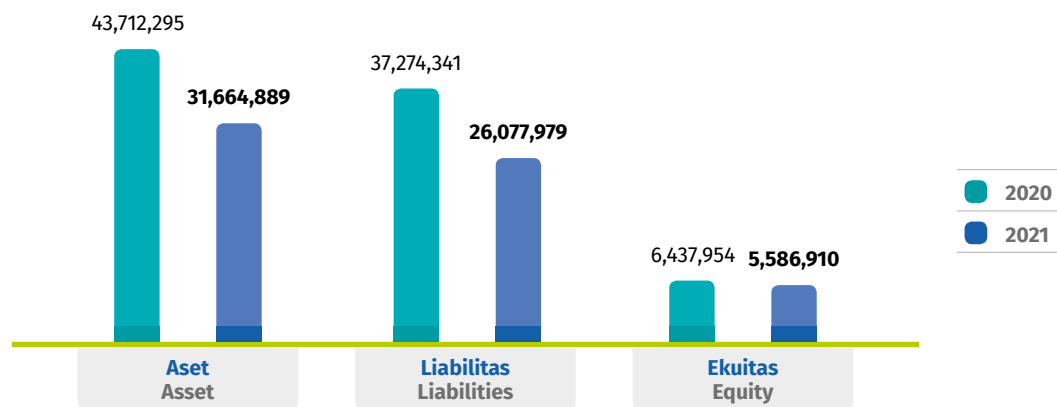
Consolidated Statements of Financial Position

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp / IDR	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	(1)
Pendapatan masih akan diterima	130.097	117.946	12.151	10,30	Accrued Income
Piutang kegiatan manajer investasi	7.287	8.043	(756)	(9,40)	Investment manager activities receivables
Piutang lain-lain	87.561	57.711	29.850	51,72	Other receivables
Pajak dibayar di muka	72.544	59.325	13.219	22,28	Prepaid taxes
Uang muka dan biaya dibayar di muka	414.757	252.347	162.410	64,36	Advances and prepayments
Aset pajak tangguhan	375.803	215.587	160.216	74,32	Deferred tax assets
Aset tetap dan aset hak guna - setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp913.178.915.432 dan Rp792.021.410.183	2.364.979	1.475.607	889.372	60,27	Fixed assets and right-of-use assets - after deducting accumulated depreciation as of 31 December 2021 and 2020 reaching IDR913,178,915,432 and IDR792,021,410,183, respectively
Portofolio efek dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (tersedia untuk dijual)	-	5.665	(5.665)	(100,00)	Portfolio of securities fair value through comprehensive income other (available for sale)
Aset tak berwujud - setelah dikurangi dengan akumulasi amortisasi per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp191.952.532.972 dan Rp114.437.061.200	117.955	168.074	(50.119)	(29,82)	Intangible assets - net of accumulated amortization as of December 31, 2021 and 2020 reaching IDR191,952,532,972 and IDR114,437,061,200, respectively
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	11.036	1.137	9.899	870,64	Non-current assets classified as held for sale
Aset lain-lain - bersih	1.774.498	1.373.688	400.810	29,18	Other assets - net
TOTAL ASET	43.712.295	31.664.889	12.047.406	38,05	TOTAL ASSET
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITY AND EQUITY
LIABILITAS					LIABILITIES
Utang bank dan lembaga keuangan	11.313.396	6.224.831	5.088.565	81,75	Banks and financial institutions borrowings
Surat utang jangka menengah dan sukuk	6.090.000	3.890.500	2.199.500	56,54	Medium term notes and sukuk
Utang obligasi	10.078.283	9.413.490	664.793	7,06	Bond payable
Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan lembaga kredit luar negeri	3.923.440	3.041.762	881.678	28,99	Borrowings from the Government of the Republic of Indonesia and foreign credit institutions
Utang pajak	338.435	122.293	216.142	176,74	Taxes payable
Dana cadangan angsuran	4.876.288	2.520.979	2.355.309	93,43	Installment reserve fund
Utang kegiatan manajer investasi	1	4	(3)	(64,34)	Investment manager activities payables
Utang lain-lain	323.369	384.108	(60.739)	(15,81)	Other payables
Beban yang masih harus dibayar	296.451	415.692	(119.241)	(28,68)	Accrued expenses
Liabilitas pajak tangguhan	5.504	5.762	(258)	(4,48)	Deferred tax liability

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp / IDR	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	(1)
Liabilitas imbalan kerja	29.175	58.558	(29.383)	(50,18)	Employee benefit liabilities
TOTAL LIABILITAS	37.274.341	26.077.979	11.196.362	42,93	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS					
EQUITY					
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:	Equity attributable to owners of the parent:				
Modal Saham - Saham biasa dengan nilai nominal Rp1.000.000 per lembar saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	Share Capital - Common stock at per value of IDR1,000,000 per share as of December 31, 2021 and 2020				
Modal dasar - 9.200.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	Authorized - 9,200,000 shares as of December 31, 2021 and 2020				
Modal ditempatkan dan disetor penuh 3.800.000 lembar saham per 31 Desember 2021 dan 2.300.000 lembar saham per 31 Desember 2020	3.800.000	2.300.000	1.500.000	65,22	Issued and fully paid 3,800,000 shares on December 31, 2021 and 2,300,000 shares on December 31, 2020
Penyertaan modal negara	0	1.500.000	(1.500.000)	(100,00)	State capital investment
Saldo laba:	Retained earning:				
Telah ditentukan penggunaannya:	Appropriated retained earnings:				
- Cadangan umum	537.241	537.241	0	0,00	- General reserve
- Cadangan bertujuan	30.633	30.633	0	0,00	- Appropriated Reserve
Belum ditentukan penggunaannya	2.045.598	1.204.820	840.778	69,78	Unappropriated
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek tersedia untuk dijual	(5.620)	45	(5.665)	(12.588,69)	Unrealized gain (loss) on available-for-sale marketable securities
Keuntungan (kerugian) aktuarial atas program imbalan kerja	7.194	294	6.900	2.346,99	Actuarial gain (loss) on employee benefit program
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:	6.415.046	5.573.033	842.013	15,11	Total equity attributable to owners of the parent:
Kepentingan non-pengendali	22.908	13.877	9.031	65,08	Non-controlling interests
TOTAL EKUITAS	6.437.954	5.586.910	851.044	15,23	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	43.712.295	31.664.889	12.047.406	38,05	TOTAL LIABILITY AND EQUITY

Grafik Laporan Posisi Keuangan Graph of Financial Position Report

(dalam jutaan Rupiah / in IDR million)



Aset

Sepanjang tahun 2021, jumlah aset PNM tercatat sebesar Rp43,71 triliun. Jumlah tersebut mengalami peningkatan 38,05% atau Rp12,05 triliun dibandingkan jumlah aset sebesar Rp31,67 triliun pada tahun 2020. Adapun peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan pinjaman yang diberikan - bersih sebesar Rp10,29 triliun atau 46,58%, kenaikan aset tetap dan aset hak guna - bersih sebesar Rp889,37 miliar atau 60,27%, kenaikan aset lain-lain - bersih sebesar Rp401,81 miliar atau 29,18%, dan kenaikan portofolio efek untuk diperdagangkan sebesar Rp659,45 miliar atau 125,66% jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2020. Kenaikan pinjaman yang diberikan - bersih dan kenaikan aset tetap dan aset hak guna - bersih berdampak langsung terhadap keberhasilan PNM dalam mencapai target program PNM Mekaar sesuai yang dicanangkan Kementerian BUMN.

Asset

Throughout 2021, PNM's total assets were recorded at IDR43.71 trillion. This amount experienced an increase of 38.05% or IDR12.05 trillion compared to total assets of IDR31.67 trillion in 2020. This increase was due to an increase in loans - net of IDR10.29 trillion or 46.58%, an increase in fixed assets and right-of-use assets - net by IDR889.37 billion or 60.27%, increase in other assets - net by IDR401.81 billion or 29.18%, and increase in trading securities portfolio by IDR659.45 billion or 125.66% when compared to the realization in 2020. The increase in loans disbursed - net and the increase in fixed assets and right of use assets - net had a direct impact on PNM's success in achieving the PNM Mekaar program target as proclaimed by the Ministry of SOEs.

Tabel Aset

Table of Asset

(dalam jutaan Rupiah / in IDR million)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp / IDR	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	(1)
Kas dan setara kas	4.020.609	4.462.197	(441.588)	(9,90)	Cash and cash equivalents
Portofolio efek dengan nilai wajar melalui laba rugi (untuk diperdagangkan)	1.184.264	524.809	659.455	125,66	Portfolio of securities fair value through profit and loss (trading)
Pinjaman yang diberikan - setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.259.105.270.346 dan Rp674.515.381.879	32.377.176	22.088.985	10.288.191	46,58	Loans granted - net of allowance for impairment losses as of December 31, 2021 and 2020 reaching IDR1,259,105,270,346 and IDR674,515,381,879, respectively
Pembiayaan modal - setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp116.667.690.278 dan Rp114.731.525.571	768.094	846.573	(78.479)	(9,27)	Capital financing - net of allowance for impairment losses as of December 31, 2021 and 2020 reaching IDR116,667,690,278 and IDR114,731,525,571, respectively
Piutang jasa manajemen- setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp4.775.638.666 dan Rp1.131.889.737	5.635	7.194	(1.559)	(21,67)	Receivables from management services - net of allowance for impairment losses as of December 31, 2021 and 2020 reaching IDR4,775,638,666 and IDR1,131,889,737, respectively.
Pendapatan masih akan diterima	130.097	117.946	12.151	10,30	Accrued Income
Piutang kegiatan manajer investasi	7.287	8.043	(756)	(9,40)	Investment manager activities receivables
Piutang lain-lain	87.561	57.711	29.850	51,72	Other receivables
Pajak dibayar di muka	72.544	59.325	13.219	22,28	Prepaid taxes
Uang muka dan biaya dibayar di muka	414.757	252.347	162.410	64,36	Advances and prepayments
Aset pajak tangguhan	375.803	215.587	160.216	74,32	Deferred tax assets

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp / IDR	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	(1)
Aset tetap dan aset hak guna - setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp913.178.915.432 dan p792.021.410.183	2.364.979	1.475.607	889.372	60,27	Fixed assets and right-of-use assets - net of accumulated depreciation as of 31 December 2021 and 2020 reaching IDR913,178,915,432 and IDR792,021,410,183, respectively
Portofolio efek dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (tersedia untuk dijual)	-	5.665	(5.665)	(100,00)	Portfolio of securities at fair value through other comprehensive income (available for sale)
Aset tak berwujud - setelah dikurangi dengan akumulasi amortisasi per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp191.952.532.972 dan Rp114.437.061.200	117.955	168.074	(50.119)	(29,82)	Intangible assets - net of accumulated amortization as of 31 Dec 2021 and 2020 amounting to IDR191,952,532,972 and IDR114,437,061,200, respectively
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	11.036	1.137	9.899	870,64	Non-current assets classified as held for sale
Aset lain-lain - bersih	1.774.498	1.373.688	400.810	29,18	Other assets - Net
TOTAL ASET	43.712.295	31.664.889	12.047.406	38,05	TOTAL ASSET

Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas tahun 2021 sebesar Rp4,02 triliun, turun sebesar Rp441,59 miliar atau 9,90% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp4,46 triliun. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pinjaman yang diberikan - bersih, pembelian efek bersih, dan pembelian aset tetap.

Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents in 2021 reached IDR4.02 trillion, decreased by IDR441.59 billion or 9.90% compared to 2020 which was IDR4.46 trillion. This was mainly due to an increase in loans - net, purchases of net securities, and purchases of fixed assets.

Tabel Kas dan Setara Kas

Table of Cash and Cash Equivalents

(dalam jutaan Rupiah / in IDR million)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp / IDR	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	(1)
Kas	11.603	13.272	(1.669)	(12,58)	Cash
Kas di Bank	3.016.948	3.087.306	(70.358)	(2,28)	Cash in Bank
Deposito Berjangka	992.058	1.361.620	(369.562)	(27,14)	Time deposit
Kas dan Setara Kas	4.020.609	4.462.197	(441.589)	(9,90)	Cash and Cash Equivalents

Portofolio Efek untuk Diperdagangkan

Portofolio efek diukur pada nilai wajar melalui laba rugi tahun 2021 sebesar Rp1,18 triliun, naik sebesar Rp659,46 miliar atau 125,66% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp524,81 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan portofolio efek diukur pada nilai wajar melalui laba rugi - pihak berelasi sebesar Rp659,17 miliar atau 125,66% dibandingkan portofolio efek diukur pada nilai wajar melalui laba rugi - pihak berelasi tahun 2020.

Securities Portfolio for Trading

The portfolio of securities measured at fair value through profit or loss in 2021 was IDR1.18 trillion, an increase of IDR659.46 billion or 125.66% compared to 2020 which was IDR524.81 billion. This was mainly due to an increase in the securities portfolio measured at fair value through profit or loss - related parties of IDR659.17 billion or 125.66% compared to the securities portfolio measured at fair value through profit or loss - related parties in 2020.

Tabel Portofolio Efek Untuk Diperdagangkan
Table of Securities Portfolio for Trading

(dalam jutaan Rupiah / in IDR million)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp / IDR	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	(1)
Pihak Berelasi	1.182.940	523.773	659.167	125,85	Related Parties
Pihak Ketiga	1.324	1.036	288	27,81	Third Party
Total	1.184.264	524.809	659.455	125,66	Total

Pinjaman yang Diberikan - Bersih

Pinjaman yang diberikan - bersih tahun 2021 sebesar Rp32,38 triliun, naik sebesar Rp10,29 triliun atau 46,58% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp22,09 triliun. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman PNM Mekaar dan ULamm yang naik signifikan. Pinjaman PNM Mekaar telah berhasil disalurkan ke 11 juta nasabah.

Loans - Nett

Loans disbursed - net in 2021 reached IDR32.38 trillion, an increase of IDR10.29 trillion or 46.58% compared to 2020 which was IDR22.09 trillion. This was mainly due to a significant increase in PNM Mekaar and ULamm loans. PNM Mekaar loans were successfully distributed to 11 million customers.

Tabel Pinjaman yang Diberikan
Table of Loans Awarded

(dalam jutaan Rupiah / in IDR million)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp / IDR	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	(1)
Pihak Berelasi					
Related Parties					
Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil kepada LKM/S	277	277	-	-	Micro and Small Business Financing to MFIs/S
Dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(277)	(277)	-	-	Less Allowance for Impairment Losses
Subtotal	-	-	-	-	Subtotal
Pihak Ketiga					
Third Party					
Pembiayaan Mekaar	26.255.405	15.692.304	10.563.101	67,31	Mekaar Financing
Pembiayaan ULamm	7.280.577	6.982.930	297.647	4,26	ULamm Financing
Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil kepada LKM/S	84.000	67.534	16.466	24,38	Micro and Small Business Financing to MFIs/S
Pembiayaan Modal Kecil dan Menengah	16.022	20.455	(4.433)	(21,67)	Small and Medium Capital Financing
Dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.258.828)	(674.238)	(584.590)	86,70	Less Allowance for Impairment Losses
Subtotal	32.377.176	22.088.985	10.288.191	46,58	Subtotal
Total	32.377.176	22.088.985	10.288.191	46,58	Total

Pembiayaan Modal - Bersih

Pembiayaan modal - bersih tahun 2021 sebesar Rp768,09 miliar, turun sebesar Rp78,48 miliar atau 9,27% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp846,57 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pembiayaan modal akibat pandemi COVID-19.

Capital Financing - Net

Capital financing - net in 2021 reached IDR768.09 billion, decreased by IDR78.48 billion or 9.27% compared to 2020 which was IDR846.57 billion. This was mainly due to a decrease in capital financing due to the COVID-19 pandemic.

Tabel Pembiayaan Modal
Table of Capital Financing

(dalam jutaan Rupiah / in IDR million)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp / IDR	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	(1)
Pihak Berelasi	-	-	-	-	Related Parties
Pihak Ketiga					Third Party
Entitas Induk					Parent Entity
Induk Koperasi Simpan Pinjam	2.000	2.000	-	-	Savings and Loans Cooperative Parent
Dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(2.000)	(2.000)	-	-	Less Allowance for Impairment Losses
Subtotal	-	-	-	-	Subtotal
Entitas Anak					Subsidiaries
Pembiayaan bagi hasil					Profit sharing financing
Konvensional	455.596	490.042	(34.446)	(7,03)	Conventional
Syariah	425.238	465.090	(39.852)	(8,57)	Sharia
Pembiayaan penyertaan saham	1.928	4.173	(2.245)	(53,80)	Share investment financing
	882.762	959.304	(76.543)	(7,98)	
Dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(114.668)	(112.732)	(1.936)	1,72	Less Allowance for Impairment Losses
Subtotal	768.094	846.573	(78.479)	(9,27)	Subtotal
Nilai bersih	768.094	846.573	(78.479)	(9,27)	Total Net

Piutang Jasa Manajemen - Bersih

Piutang jasa manajemen - bersih tahun 2021 sebesar Rp5,64 miliar, turun sebesar Rp1,56 miliar atau 21,67% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp7,19 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan piutang jasa manajemen dari entitas induk sebesar Rp1,97 miliar.

Management Services Receivables – Net

Management services receivables - net in 2021 reached IDR5.64 billion, decreased by IDR1.56 billion or 21.67% compared to 2020 which was IDR7.19 billion. This was mainly due to a decrease in receivables from management services from the parent company by IDR1.97 billion.

Tabel Piutang Jasa Manajemen
Table of Management Services Receivables

(dalam jutaan Rupiah / in IDR million)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp / IDR	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	(1)
Pihak Berelasi	-	-	-	-	Related Parties
Pihak Ketiga					Third Party
Entitas Induk	10.293	8.326	1.967	23,62	Parent Entity
Entitas Anak	118	-	118	100,00	Subsidiaries
Subtotal	10.411	8.326	2.085	25,04	Subtotal
Dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(4.776)	(1.133)	(3.643)	321,50	Less Allowance for Impairment Losses
Total	5.635	7.194	(1.559)	(21,67)	Total

Pendapatan Masih akan Diterima

Pendapatan masih akan diterima tahun 2021 sebesar Rp130,10 miliar, naik sebesar Rp12,15 miliar atau 10,30% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp117,95 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman yang diberikan baik pembiayaan PNM Mekaar maupun pembiayaan PNM ULaMM.

Accrued Income

Accrued income in 2021 reached IDR130.10 billion, an increase of IDR12.15 billion or 10.30% compared to 2020 which was IDR117.95 billion. This was mainly due to an increase in loans provided by both PNM Mekaar financing and PNM ULaMM financing.

Tabel Pendapatan Masih akan Diterima

Table of Accrued Income

(dalam jutaan Rupiah / in IDR million)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp / IDR	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	(1)
Entitas Induk					
<i>Parent Entity</i>					
Bunga pembiayaan ULaMM	60.461	54.424	6.037	11,09	ULaMM financing interest
Bunga pembiayaan Mekaar	34.629	16.502	18.127	109,85	Mekaar financing interest
Bunga Deposito	1.076	7.122	(6.046)	(84,89)	Deposit Interest
Bunga pembiayaan LKMS	92	114	(22)	(19,20)	LKMS financing interest
Subtotal	96.259	78.162	18.097	23,15	Subtotal
Entitas Anak					
<i>Subsidiaries</i>					
Pembiayaan modal ventura	33.838	39.784	(5.946)	(14,95)	Venture capital financing
Total	130.097	117.946	12.150	10,30	Total

Piutang Kegiatan Manajer Investasi

Piutang kegiatan manajer investasi tahun 2021 sebesar Rp7,29 miliar, turun sebesar Rp0,76 miliar atau 9,41% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp8,04 miliar. Hal ini terutama disebabkan penurunan piutang *management fee* dari pihak berelasi.

Investment Manager Activities Receivables

Receivables from investment manager activities in 2021 reached IDR7.29 billion, a decreased by IDR0.76 billion or 9.41% compared to 2020 which was IDR8.04 billion. This was mainly due to a decrease in management fee receivables from related parties.

Tabel Piutang Kegiatan Manajer Investasi

Table of Investment Manager Activities Receivables

(dalam jutaan Rupiah / in IDR million)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp / IDR	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	(1)
Pihak Berelasi					
<i>Related Parties</i>					
Piutang Management Fee	7.287	8.024	(738)	(9,19)	Receivable Management Fee
Pihak Ketiga					
<i>Third Party</i>					
KPD - Jely Sunjoto	-	19	(19)	(100,00)	KPD - Jely Sunjoto
Total	7.287	8.043	(757)	(9,41)	Total

Piutang Lain-Lain

Piutang lain-lain tahun 2021 sebesar Rp87,56 miliar, naik sebesar Rp29,85 miliar atau 51,72% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp57,71 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan piutang lain-lain entitas anak.

Other Receivables

Other receivables in 2021 reached IDR87.56 billion, an increase of IDR29.85 billion or 51.72% compared to 2020 which was IDR57.71 billion. This was mainly due to an increase in other receivables from subsidiaries.

Tabel Piutang Lain-Lain
Table of Other Receivables

(dalam jutaan Rupiah / in IDR million)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp / IDR	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	(1)
Entitas Induk			Parent Entity		
Piutang Karyawan	5.860	4.808	1.052	21,87	Employee receivables
Piutang Lain-lain	39.654	58.058	(18.404)	(31,70)	Other receivables
Dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(13.263)	(13.236)	(27)	0,20	Less Allowance for Impairment Losses
Subtotal	32.251	49.631	(17.380)	(35,02)	Subtotal
Entitas Anak			Subsidiaries		
Piutang Karyawan	5.625	1.160	4.465	384,92	Employee receivables
Piutang Lain-lain	49.686	6.921	42.765	617,90	Other receivables
Dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai					Less Allowance for Impairment Losses
Subtotal	55.311	8.080	47.231	584,54	Subtotal
Total	87.561	57.711	29.850	51,72	Total

Pajak Dibayar di Muka

Pajak dibayar di muka tahun 2021 sebesar Rp72,54 miliar, naik sebesar Rp13,22 miliar atau 22,28% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp59,33 miliar. Kenaikan ini diperoleh dari pajak dibayar di muka Entitas Anak.

Prepaid Taxes

Prepaid taxes in 2021 reached IDR72.54 billion, an increase of IDR13.22 billion or 22.28% compared to 2020 which was IDR59.33 billion. This increase was obtained from prepaid taxes of Subsidiaries.

Tabel Pajak Dibayar Dimuka
Table of Prepaid Taxes

(dalam jutaan Rupiah / in IDR million)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp / IDR	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	(1)
Entitas Induk	-	-	-	-	Parent Entity
Entitas Anak	72.544	59.325	13.219	22,28	Subsidiaries
Total	72.544	59.325	13.219	22,28	Total

Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka

Uang muka dan biaya dibayar di muka tahun 2021 sebesar Rp414,76 miliar, naik sebesar Rp162,41 miliar atau 64,36% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp252,34 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan uang muka kerja dan biaya dibayar di muka asuransi seiring dengan kenaikan pembiayaan PNM Mekaar dan pembiayaan PNM ULAMM.

Advances and Prepayments

Advances and prepayments in 2021 reached IDR414.76 billion, an increase of IDR162.41 billion or 64.36% compared to 2020 which was IDR252.34 billion. This was mainly due to an increase in work advances and prepaid insurance costs in line with the increase in PNM Mekaar financing and PNM ULAMM financing.

Tabel Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka
Table of Advances and Prepayments

(dalam jutaan Rupiah / in IDR million)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp / IDR	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	(1)
Uang muka kerja	124.373	66.872	57.501	85,99	Advances for work
Biaya dibayar di muka:					Prepaid expenses:
Asuransi	199.673	103.965	95.708	92,06	Insurance
Sewa kantor/rumah dinas/ kendaraan	53.319	49.744	3.575	7,19	Office/house on duty/ vehicle rent
Provisi dan administrasi pinjaman	37.392	31.765	5.627	17,72	Provision and loan administration
Total	414.757	252.347	162.410	64,36	Total

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan tahun 2021 sebesar Rp375,80 miliar, naik sebesar Rp160,22 miliar atau 74,32% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp215,59 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan biaya dibayar di muka asuransi seiring dengan kenaikan pembiayaan PNM Mekaar.

Deferred Tax Assets

Deferred tax assets in 2021 reached IDR375.80 billion, an increase of IDR160.22 billion or 74.32% compared to 2020 which was IDR215.59 billion. This was mainly due to an increase in prepaid insurance costs in line with the increase in Mekaar's PNM financing.

Tabel Aset Pajak Tangguhan
Table of Deferred Tax Assets

(dalam jutaan Rupiah / in IDR million)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp / IDR	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	(1)
Aset pajak tangguhan	375.803	215.587	160.216	74,32	Deferred Tax Assets

Aset Tetap dan Aset Hak Guna

Aset tetap dan aset hak guna - bersih tahun 2021 sebesar Rp2,37 triliun, naik sebesar Rp889,37 miliar atau 60,27% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp1,48 triliun. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan aset tetap dan aset hak guna - bersih PNM dengan pembukaan kantor cabang baru seiring dengan kenaikan pembiayaan PNM Mekaar dan PNM ULAMM.

Fixed Assets and Right of Use Assets

Fixed assets and right-of-use assets - net in 2021 reached IDR2.37 trillion, an increase of IDR889.37 billion or 60.27% compared to 2020 which was IDR1.48 trillion. This was mainly due to the increase in fixed assets and net usufructuary assets with the opening of new branch offices in line with the increase in financing from PNM Mekaar and PNM ULAMM.

Tabel Aset Tetap dan Aset Hak Guna
Table of Fixed Assets and Right of Use Assets

(dalam jutaan Rupiah / in IDR million)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp / IDR	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	(1)
Aset Tetap dan Aset Hak Guna	2.364.979	1.475.607	889.372	60,27	Fixed Assets and Right of Use Assets

Portofolio Efek Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain

Portofolio efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tahun 2021 sebesar nihil, turun sebesar Rp5,67 miliar atau 100,00% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp5,67 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan kerugian yang belum direalisasi atas portofolio efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif sebesar Rp5,67 miliar dibandingkan kerugian yang belum direalisasi tahun 2020.

Securities Portfolio Measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income

The securities portfolio measured at fair value through other comprehensive income in 2021 was nil, a decrease of IDR5.67 billion or 100.00% compared to 2020 which was IDR5.67 billion. This was mainly due to an increase in unrealized losses on the securities portfolio measured at fair value through comprehensive income of IDR5.67 billion compared to unrealized losses in 2020.

Tabel Portofolio Efek Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain

Table of Securities Portfolio Measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income

(dalam jutaan Rupiah / in IDR million)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp / IDR	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	(1)
Pihak berelasi	5.785	5.785	-	-	Related Parties
Pihak ketiga	-	-	-	-	Third Party
Kerugian yang belum direalisasi	(5.785)	(120)	(5.665)	4.725,72	Unrealized loss
Total	-	5.665	5.665	100,00	Total

Aset Tak Berwujud - Bersih

Aset takberwujud - bersih tahun 2021 sebesar Rp117,96 miliar, turun sebesar Rp50,12 miliar atau 29,82% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp168,07 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan akumulasi amortisasi software selama tahun 2021.

Intangible Assets - Net

Intangible assets - net in 2021 reached IDR117.96 billion, decreased by IDR50.12 billion or 29.82% compared to 2020 which was IDR168.07 billion. This was mainly due to the increase in accumulated software amortization during 2021.

Tabel Aset Takberwujud - Bersih

Table of Intangible Assets - Net

(dalam jutaan Rupiah / in IDR million)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp / IDR	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	(1)
Harga Perolehan					
Acquisition Cost					
Software	291.693	264.296	27.397	10,37	Software
Biaya pra-operasional	2.128	2.128	(0)	(0,01)	Pre-operation costs
Pengembangan Software	16.087	16.087	(0)	(0,00)	Software Development
Subtotal	309.908	282.511	27.397	9,70	Subtotal
Akumulasi Amortisasi					
Accumulated Amortization					
Software	189.825	(112.309)	302.134	(269,02)	Software
Biaya pra-operasional	2.128	(2.128)	4.256	(199,99)	Pre-operation costs
Subtotal	191.953	(114.437)	306.390	(267,74)	Subtotal
Nilai buku bersih	117.955	168.074	(50.119)	(29,82)	Total Net Book

Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual

Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual tahun 2021 sebesar Rp11,04 miliar, naik sebesar Rp9,90 miliar atau 870,44% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp1,14 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan agunan diambil alih entitas anak.

Non-Current Assets Classified as Held for Sale

Non-current assets held for sale in 2021 reached IDR11.04 billion, an increase of IDR9.90 billion or 870.44% compared to 2020 which was IDR1.14 billion. This was mainly due to the increase in collateral taken over by subsidiaries.

Tabel Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual

Table of Non-Current Assets Classified as Held for Sale

(dalam jutaan Rupiah / in IDR million)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp / IDR	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	(1)
Agunan diambil alih	10.911	1.137	9.774	859,64	Foreclosed assets
Aset tetap siap untuk dijual	125	-	125	100,00	Fixed assets for sale
Total aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	11.036	1.137	9.899	870,64	Total Non-Current Assets Held for Sale

Aset Lain-Lain - Bersih

Aset lain-lain - bersih tahun 2021 sebesar Rp1,77 triliun, naik sebesar Rp400,81 miliar atau 29,18% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp1,37 triliun. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan bank dibatasi penggunaannya sebesar Rp280,09 miliar dan lain-lain yang naik sebesar Rp113,14 miliar.

Other Assets - Net

Other assets - net in 2021 reached IDR1.77 trillion, an increase of IDR400.81 billion or 29.18% compared to 2020 which was IDR1.37 trillion. This was mainly due to an increase in restricted use of banks by IDR280.09 billion and others which increased by IDR113.14 billion.

Tabel Aset Lain-Lain Bersih

Table of Other Assets - Net

(dalam jutaan Rupiah / in IDR million)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp / IDR	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	(1)
Bank dibatasi penggunaannya	1.623.897	1.343.808	280.089	20,84	Restricted bank
Penyertaan pada entitas asosiasi	6.451	3.905	2.546	65,21	Investments in associates
Sewa kantor	6.443	1.415	5.028	355,31	Office rent
Telepon	215	207	8	3,71	Telephone
Lain-lain	137.492	24.353	113.139	464,58	Others
Total	1.774.498	1.373.688	400.810	29,18	Total

Liabilitas

Pada tahun 2021, liabilitas PNM per 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp11,20 triliun (atau 42,93%) apabila dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp26,08 triliun. Peningkatan liabilitas ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan saldo utang bank dan lembaga keuangan sebesar Rp5,09 triliun (atau 81,75%), surat utang jangka menengah dan sukuk sebesar Rp2,20 triliun (atau 56,54%), utang obligasi sebesar Rp664,79 miliar (atau 7,06%), utang pemerintah sebesar Rp881,68

Liabilities

In 2021, PNM liabilities as of December 31, 2021 increased by IDR11.20 trillion (or 42.93%) when compared to 2020 which amounted to IDR26.08 trillion. This increase in liabilities was largely due to an increase in the balance of bank and financial institution loans by IDR5.09 trillion (or 81.75%), medium-term debt securities and sukuk by IDR2.20 trillion (or 56.54%), bonds payable by IDR664.79 billion (or 7.06%), government debt of IDR881.68 billion (or 28.99%), and installment reserve funds of IDR2.36 trillion (or 93.43%) compared to

miliar (atau 28,99%), dan dana cadangan angsuran sebesar Rp2,36 triliun (atau 93,43%) jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan utang bank dan utang obligasi terutama digunakan untuk sumber dana pembiayaan program PNM Mekaar dan PNM ULamm serta pengadaan infrastruktur pendirian cabang PNM Mekaar dan keperluan *refinancing*. Dana cadangan angsuran ini merupakan uang pertanggungjawaban dari nasabah pembiayaan Mekaar dan uang titipan nasabah Mekaar sebagai pemberian subsidi bunga/*margin* oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 150/PMK.05/2021 tanggal 25 Oktober 2021 perihal Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

the previous year. The increase in bank loans and bonds payable was mainly used for funding sources for the PNM Mekaar and PNM ULamm programs as well as infrastructure procurement for the establishment of PNM Mekaar branches and refinancing purposes. This installment reserve fund represents liability money from Mekaar financing customers and money deposited by Mekaar customers as interest/margin subsidies by the Government based on Minister of Finance Regulation no. 150/PMK.05/2021 dated October 25, 2021 regarding Procedures for Providing Interest Subsidy/Margin Subsidy in order to Support the Implementation of the National Economic Recovery Program

Tabel Liabilitas
Table of Liabilities

(dalam jutaan Rupiah / in IDR million)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp / IDR	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	(1)
Utang bank dan lembaga keuangan	11.313.396	6.224.831	5.088.565	81,75	Banks and financial institutions loans
Surat utang jangka menengah dan sukuk	6.090.000	3.890.500	2.199.500	56,54	Medium term notes and sukuk
Utang obligasi	10.078.283	9.413.490	664.793	7,06	Bond payable
Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan lembaga kredit luar negeri	3.923.440	3.041.762	881.678	28,99	Borrowings from the Government of the Republic of Indonesia and foreign credit institutions
Utang pajak	338.435	122.293	216.142	176,74	Taxes payable
Dana cadangan angsuran	4.876.288	2.520.979	2.355.309	93,43	Installment reserve fund
Utang kegiatan manajer investasi	1	4	(3)	(63,05)	Investment manager activities payable
Utang lain-lain	323.369	384.108	(60.739)	(15,81)	Other payables
Beban yang masih harus dibayar	296.451	415.692	(119.241)	(28,68)	Accrued expenses
Liabilitas pajak tangguhan	5.504	5.762	(258)	(4,48)	Deferred tax liability
Liabilitas imbalan kerja	29.175	58.558	(29.383)	(50,18)	Employees benefit liabilities
TOTAL LIABILITAS	37.274.341	26.077.979	11.196.362	42,93	TOTAL LIABILITIES

Utang Bank dan Lembaga Keuangan

Utang bank dan lembaga keuangan tahun 2021 sebesar Rp11,31 triliun, naik sebesar Rp5,09 triliun atau 81,75% dibandingkan dengan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp6,22 triliun. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank - pihak ketiga yang naik sebesar Rp3,03 triliun atau 85,19%. Utang bank dan lembaga keuangan sebagai sumber pembiayaan PNM Mekaar, pembiayaan PNM ULamm, dan untuk keperluan *refinancing*.

Banks and Financial Institutions Borrowings

Banks and Financial Institutions Borrowings in 2021 reached IDR11.31 trillion, an increase of IDR5.09 trillion or 81.75% compared to 2020 which was IDR6.22 trillion. This was mainly due to an increase in bank loans - third parties which increased by IDR3.03 trillion or 85.19%. Debt was originally from banks and financial institutions as a source of financing for PNM Mekaar, PNM ULamm financing, and for refinancing purposes.

Tabel Utang Bank dan Lembaga Keuangan
Table of Banks and Financial Institutions Borrowings

(dalam jutaan Rupiah / in IDR million)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp / IDR	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	(1)
Pihak Berelasi	4.732.716	2.671.350	2.061.366	77,17	Related Parties
Pihak Ketiga	6.580.680	3.553.482	3.027.198	85,19	Third Party
Total	11.313.396	6.224.831	5.088.565	81,75	Total

Surat Utang Jangka Menengah dan Sukuk

Surat utang jangka menengah tahun 2021 sebesar Rp6,09 triliun, naik sebesar Rp2,20 triliun atau 56,54% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp3,89 triliun. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan surat utang jangka menengah dan sukuk yang jatuh tempo lebih dari 2 tahun yang naik sebesar Rp1,95 triliun atau 196,57%. PNM berhasil menerbitkan Sukuk Sukuk Mudharabah IV Tahun 2021 sebesar Rp1,80 triliun dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I sebesar Rp2 triliun.

Medium Term Notes and Sukuk

Medium Term Notes and Sukuk in 2021 reached IDR6.09 trillion, an increase of IDR2.20 trillion or 56.54% compared to 2020 which amounted to IDR3.89 trillion. This was mainly due to an increase in medium-term debt securities and sukuk with maturities of more than 2 years, which increased by IDR1.95 trillion or 196.57%. PNM succeeded in issuing the 2021 Sukuk Mudharabah IV in the amount of IDR1.80 trillion and the Sustainable Sukuk Mudharabah I Phase I Phase I Sustainable Sukuk Mudharabah amounting to IDR2 trillion.

Tabel Surat Utang Jangka Menengah dan Sukuk
Table of Medium Term Notes and Sukuk

(dalam jutaan Rupiah / in IDR million)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp / IDR	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	(1)
Berdasarkan Jatuh Tempo					Based On Maturity
Kurang dari 1 tahun	2.048.000	2.008.500	39.500	1,97	Less than 1 year
1 - 2 tahun	1.100.000	890.000	210.000	23,60	1 - 2 years
Lebih dari 2 tahun	2.942.000	992.000	1.950.000	196,57	More than 2 years
Total	6.090.000	3.890.500	2.199.500	56,54	Total

Utang Obligasi

Utang obligasi tahun 2021 sebesar Rp10,08 triliun, naik Rp664,79 miliar atau 7,06% dibandingkan dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp9,41 triliun. Hal ini terutama disebabkan karena PNM berhasil menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap 1 Tahun 2021 dari pasar modal sebesar Rp2 triliun sebagai sumber dana untuk pembiayaan PNM Mekaar dan PNM ULamm dan untuk keperluan *refinancing*.

Bonds Payable

Bonds payable in 2021 reached IDR10.08 trillion, an increase of IDR664.79 billion or 7.06% compared to 2020 which was IDR9.41 trillion. This was mainly due to the fact that PNM succeeded in issuing Shelf-Registered Bonds IV PNM Phase 1 2021 from the capital market amounting to IDR2 trillion as a source of funds for financing PNM Mekaar and PNM ULamm and for refinancing purposes.

Tabel Utang Obligasi
Table of Bonds Payable

(dalam jutaan Rupiah / in IDR million)

Uraian (1)	2021 (2)	2020 (3)	Pertumbuhan Growth		Description (1)
			Rp / IDR (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)	
Berdasarkan Jatuh Tempo			Based on Maturity		
Kurang dari 1 tahun	3.901.707	2.996.136	905.571	30,22	Less than 1 year
1 - 2 tahun	2.834.303	2.734.470	99.833	3,65	1 - 2 years
Lebih dari 2 tahun	3.342.272	3.682.883	(340.611)	(9,25)	More than 2 years
Total	10.078.283	9.413.490	664.793	7,06	Total

Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan Lembaga Kredit Luar Negeri

Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp3,92 triliun, naik sebesar Rp881,68 triliun atau 28,99% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp3,04 triliun. Hal ini terutama disebabkan karena PNM berhasil menerima fasilitas pinjaman dari Pemerintah Indonesia sebesar Rp1,5 triliun untuk pembiayaan khusus PNM Mekaar dan sebesar Rp1 triliun untuk pembiayaan PNM Mekaar Syariah.

Borrowings from the Government of the Republic of Indonesia and Foreign Credit Institutions

Loans from the Government of the Republic of Indonesia reached IDR3.92 trillion, an increase of IDR881.68 trillion or 28.99% compared to 2020 which was IDR3.04 trillion. This was mainly due to the fact that PNM managed to receive a loan facility from the Government of Indonesia amounting to IDR1.5 trillion for PNM Mekaar's special financing and IDR1 trillion for PNM Mekaar Syariah's financing.

Tabel Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan Lembaga Kredit Luar Negeri
ble of Borrowings from The Government of The Republic of Indonesia and Foreign Credit Institutions

(dalam jutaan Rupiah / in IDR million)

Uraian (1)	2021 (2)	2020 (3)	Pertumbuhan Growth		Description (1)
			Rp / IDR (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)	
Berdasarkan Jenis:			By Type:		
Pihak Berelasi	3.917.715	3.035.065	882.650	29,08	Related Parties
Pihak Berelasi	5.725	6.697	(972)	(14,51)	Third Party
Total	3.923.440	3.041.762	881.678	28,99	Total

Utang Pajak

Utang pajak tahun 2021 sebesar Rp338,44 miliar, naik sebesar Rp216,14 miliar atau 176,74% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp122,29 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang pajak pasal 29 baik entitas induk maupun entitas anak.

Tax Payable

Taxes payable in 2021 reached IDR338.44 billion, an increase of IDR216.14 billion or 176.74% compared to 2020 which was IDR122.29 billion. This was mainly due to the increase in tax payable article 29 for both the parent and subsidiary entities.

Tabel Utang Pajak
Table of Tax Payable

(dalam jutaan Rupiah / in IDR million)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp / IDR	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	(1)
Entitas Induk	280.022	112.895	167.127	148,04	Parent Entity
Entitas Anak	58.413	9.398	49.015	521,55	Subsidiaries
Total	338.435	122.293	216.142	176,74	Total

Dana Cadangan Angsuran

Dana cadangan angsuran tahun 2021 sebesar Rp4,88 triliun, naik sebesar Rp2,36 triliun atau 93,43% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp2,52 triliun. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pembiayaan PNM Mekaar dan pembiayaan PNM ULAMM.

Installment Reserve Fund

The reserve fund for 2021 installments was IDR4.88 trillion, an increase of IDR2.36 trillion or 93.43% compared to 2020 which was IDR2.52 trillion. This was mainly due to an increase in PNM Mekaar financing and PNM ULAMM financing.

Tabel Dana Cadangan Angsuran
Table of Installment Reserve Fund

(dalam jutaan Rupiah / in IDR million)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp / IDR	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	(1)
Uang Pertanggungjawaban Nasabah	2.994.512	1.953.439	1.041.073	53,29	Customer's Responsibility
Uang Titipan Nasabah	1.606.423	352.724	1.253.699	355,43	Customer's Deposit
Dana Cadangan Nasabah	275.353	214.815	60.538	28,18	Customer's Reserve Fund
Total	4.876.288	2.520.979	2.355.309	93,43	Total

Utang Kegiatan Manajer Investasi

Utang kegiatan manajer investasi berasal pada utang *management fee* tahun 2021 sebesar Rp1,48 juta, turun sebesar Rp2,67 juta dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp4,14 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh turunnya utang *management fee* dari PT Indo Premier.

Investment Manager Activities Receivables

The investment manager's activities receivables came from the management fee debt in 2021 amounting to IDR1.48 million, a decrease of IDR2.67 million compared to 2020 which was IDR4.14 million. This was mainly due to a decrease in the management fee debt from PT Indo Premier.

Tabel Utang Kegiatan Manajer Investasi
Table of Investment Manager Activities Receivables

(dalam jutaan Rupiah / in IDR million)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp / IDR	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	(1)
Pihak-pihak Ketiga:			Third Parties:		
PT BNI Life Insurance	0,90	0,90	-	-	PT BNI Life Insurance
PT Indo Premier	0,29	1,75	(1,46)	(83,26)	PT Indo Premier
PT Bank Commonwealth	0,25	0,26	(0,01)	(4,67)	PT Bank Commonwealth

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp / IDR	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	(1)
PT Bank CIMB Niaga Tbk	0,04	0,75	(0,71)	(95,29)	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Philip Securities Indonesia	-	0,33	(0,33)	(100,00)	PT Philip Securities Indonesia
PT Bank Permata Tbk	-	0,09	(0,09)	(100,00)	PT Bank Permata Tbk
PT Bank DBS Indonesia	-	0,07	(0,07)	(100,00)	PT Bank DBS Indonesia
Total utang management fee	1,48	4,14	(2,67)	(64,34)	Total Debt Management Fee

Utang Lain-Lain

Utang lain-lain tahun 2021 sebesar Rp323,37 miliar, turun sebesar Rp60,74 miliar atau 15,81% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp384,11 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan utang lain-lain - pihak ketiga.

Other Payables

Other payables in 2021 amounted to IDR323.37 billion, decreased by IDR60.74 billion or 15.81% compared to 2020 which was IDR384.11 billion. This was mainly due to a decrease in other payables - third parties.

Tabel Utang Lain-Lain
Table of Other Payables

(dalam jutaan Rupiah / in IDR million)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp / IDR	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	(1)
Pihak berelasi	406	406	0	0,07	Related Parties
Pihak ketiga	322.962	383.702	(60.740)	(15,83)	Third Party
Total	323.369	384.108	(60.739)	(15,81)	Total

Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang masih harus dibayar tahun 2021 sebesar Rp296,45 miliar, turun sebesar Rp119,24 miliar atau 28,68% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp415,69 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan beban yang masih harus dibayar personalia sebesar Rp37,89 miliar, bunga obligasi sebesar Rp36,90 miliar, beban operasional sebesar Rp24,72 miliar.

Accrued Expenses

Accrued expenses in 2021 amounted to IDR296.45 billion, decreased by IDR119.24 billion or 28.68% compared to 2020 which was IDR415.69 billion. This was mainly due to a decrease in expenses accrued by personnels by IDR37.89 billion, bond interest by IDR36.90 billion, and operating expenses by IDR24.72 billion.

Tabel Beban yang Masih Harus Dibayar
Table of Accrued Expenses

(dalam jutaan Rupiah / in IDR million)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp / IDR	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	(1)
Beban operasional	106.095	130.818	(24.723)	(18,90)	Operating expenses
Personalia	79.126	117.015	(37.889)	(32,38)	Personnel
Bunga obligasi	78.092	114.995	(36.903)	(32,09)	Interest - bond
Bunga pinjaman bank dan MTN	33.124	52.857	(19.733)	(37,33)	Interest - bank borrowings and MTN
Bunga Neighbourhood Upgrading Shelter Sector Project (NUSSP)	13	8	5	60,36	Interest - Neighbourhood Upgrading Shelter Sector Project (NUSSP)
Total	296.451	415.692	(119.241)	(28,68)	Total

Liabilitas Pajak Tangguhan

Liabilitas pajak tangguhan tahun 2021 sebesar Rp5,50 miliar, turun sebesar Rp258 juta atau 4,48% dibandingkan dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp5,76 miliar.

Deferred Tax Liabilities

Deferred tax liability in 2021 was IDR5.50 billion, decreased by IDR258 million or 4.48% compared to 2020 which was IDR5.76 billion.

Tabel Liabilitas Pajak Tangguhan

Table of Deferred Tax Liabilities

(dalam jutaan Rupiah / in IDR million)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp / IDR	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	(1)
Liabilitas pajak tangguhan	5.504	5.762	(258)	(4,48)	Deferred Tax Liabilities

Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas imbalan kerja tahun 2021 sebesar Rp29,17 miliar, turun sebesar Rp29,38 miliar atau 50,18% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp58,56 miliar pada tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan liabilitas imbalan pasca kerja Entitas Induk akibat pemberlakuan UU Cipta Kerja.

Employees Benefits Liabilities

Employee benefit liabilities in 2021 reached IDR29.17 billion, decreased by IDR29.38 billion or 50.18% compared to 2020 which was IDR58.56 billion in 2020. This was mainly due to a decrease in the Entity's post-employment benefit liabilities due to the enactment of the Job Creation Act.

Tabel Liabilitas Imbalan Kerja

Table of Employees Benefits Liabilities

(dalam jutaan Rupiah / in IDR million)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp / IDR	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	(1)
Entitas Induk					Parent Entity
Program imbalan pasca kerja	5.225	37.811	(32.586)	(86,18)	Post employment benefits program
Program manfaat jangka panjang lain	19.150	16.401	2.749	16,76	Other long-term benefits program
Subtotal	24.375	54.211	(29.836)	(55,04)	Subtotal
Entitas Anak	4.799	4.347	452	10,41	Subsidiary
Total	29.175	58.558	(29.383)	(50,18)	Total

Ekuitas

Ekuitas PNM terdiri dari setoran dari pemilik perusahaan dan sisa laba yang ditahan. Sepanjang tahun 2021, jumlah ekuitas PNM tercatat sebesar Rp6,44 triliun. Jumlah tersebut mengalami peningkatan 15,23% atau Rp851,04 miliar dibandingkan jumlah ekuitas PNM pada tahun 2020 yang sebesar Rp5,59 triliun. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya yang naik sebesar Rp840,78 miliar atau 69,78%.

Equity

PNM equity consisted of deposits from company owners and retained earnings. Throughout 2021, PNM's total equity was recorded at IDR6.44 trillion. This amount increased by 15.23% or IDR851.04 billion compared to the total equity of PNM in 2020 which was IDR5.59 trillion. This was mainly due to an increase in retained earnings that had not yet been determined, which increased by IDR840.78 billion or 69.78%.

Tabel Ekuitas
Table of Equity

(dalam jutaan Rupiah / in IDR million)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp / IDR	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	(1)
Modal Saham - Saham biasa dengan nilai nominal Rp1.000.000 per lembar saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020					Share Capital - Ordinary shares with a nominal value of IDR1,000,000 per share as of December 31, 2021 and 2020
Modal dasar - 9.200.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020					Authorized - 9,200,000 shares as of December 31, 2021 and 2020
Modal ditempatkan dan disetor penuh 3.800.000 lembar saham per 31 Desember 2021 dan 2.300.000 lembar saham per 31 Desember 2020	3.800.000	2.300.000	1.500.000	65,22	Issued and fully paid capital 3,800,000 shares as of December 31, 2021 and 2,300,000 shares as of December 31, 2020
Penyertaan modal negara	0	1.500.000	(1.500.000)	(100,00)	State capital investment
Saldo laba:					Retain earning:
Telah ditentukan penggunaannya:					Appropriated:
- Cadangan umum	537.241	537.241	0	0,00	- General reserve
- Cadangan bertujuan	30.633	30.633	0	0,00	- Appropriated reserve
Belum ditentukan penggunaannya	2.045.598	1.204.820	840.778	69,78	Unappropriated retained earnings
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek tersedia untuk dijual	(5.620)	45	(5.665)	(12.588,69)	Unrealized gain on available for-sale marketable securities
Keuntungan (kerugian) aktuarial atas program imbalan kerja	7.194	294	6.900	2.346,99	Actuarial gain (loss) on employee benefit program
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:	6.415.046	5.573.033	842.013	15,11	Total equity attributable to owners of the parent:
Kepentingan non-pengendali	22.908	13.877	9.031	65,08	Non-controlling interests
TOTAL EKUITAS	6.437.954	5.586.910	851.044	15,23	TOTAL EQUITY

*) Disajikan kembali / Restated

Penyertaan Modal Negara

Penyertaan modal negara tahun 2021 sebesar nihil, turun sebesar Rp1,50 triliun atau 100,00% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp1,50 triliun. Hal ini terutama disebabkan karena PNM telah melakukan konversi ke modal saham pada tanggal 20 Januari 2021.

State Capital Investment

State equity participation in 2021 was nil, a decrease of IDR1.50 trillion or 100.00% compared to 2020 which was IDR1.50 trillion. This was mainly due to PNM having converted to share capital on January 20, 2021.

Tabel Penyertaan Modal Negara
Table of State Capital Investment

(dalam jutaan Rupiah / in IDR million)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp / IDR	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	(1)
Penyertaan Modal Negara - Tahap I	-	1.000.000	(1.000.000)	(100,00)	State Capital Investment - Phase I
Penyertaan Modal Negara - Tahap II	1.500.000	1.500.000	-	-	State Capital Investment - Phase II
Konversi ke modal saham	(1.500.000)	(1.000.000)	(500.000)	50,00	Convert to share capital
Total	-	1.500.000	(1.500.000)	(100,00)	Total

Saldo Laba

Saldo laba tahun 2021 sebesar Rp2,61 triliun, naik sebesar Rp840,78 miliar atau 47,43% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp1,77 triliun pada tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan kinerja PNM selama tahun 2021.

Retained Earning

The balance of profit in 2021 was IDR2.61 trillion, an increase of IDR840.78 billion or 47.43% compared to 2020 which was IDR1.77 trillion in 2020. This was mainly due to the increase in PNM's performance during 2021.

Tabel Saldo Laba
Table of Retained Earning

(dalam jutaan Rupiah / in IDR million)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp / IDR	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	(1)
Telah ditentukan penggunaannya:					Appropriated retained earnings:
Cadangan umum	537.241	537.241	0	0,00	General reserves
Cadangan bertujuan	30.633	30.633	0	0,00	Appropriated reserves
Belum ditentukan penggunaannya	2.045.598	1.204.820	840.778	69,78	Unappropriated retained earnings
Total	2.613.472	1.772.694	840.778	47,43	Total

Keuntungan (Kerugian) yang Belum Direalisasi atas Efek Tersedia untuk Dijual

Kerugian yang belum direalisasi atas efek tersedia untuk dijual tahun 2021 sebesar Rp5,62 miliar, turun Rp5,66 miliar atau 12,588,69% dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencatatkan keuntungan yang belum direalisasi atas efek tersedia untuk dijual sebesar Rp45 juta.

Unrealized Gain (Loss) on Available-For-Sale Marketable Securities

Unrealized loss on available-for-sale securities in 2021 reached IDR5.62 billion, decreased by IDR5.66 billion or 12,588.69% compared to 2020 which recorded an unrealized gain on available-for-sale securities of IDR45 million.

Tabel Keuntungan (Kerugian) yang Belum Direalisasi atas Efek Tersedia untuk Dijual
Table of Unrealized Gain (Loss) on Available-for-Sale Marketable Securities

(dalam jutaan Rupiah / in IDR million)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp / IDR	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	(1)
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek tersedia untuk dijual	(5.620)	45	(5.665)	(12.588,69)	Unrealized Gain (Loss) on Available-for-Sale Marketable Securities

Keuntungan (Kerugian) Aktuarial atas Program Imbalan Kerja

Keuntungan aktuarial atas program Imbalan kerja tahun 2021 sebesar Rp7,19 miliar, naik sebesar Rp6,90 miliar atau 2.346,69% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp294 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh pemberlakuan UU Cipta Kerja.

Actuarial Gain (Loss) on Employment Benefits Programs

The actuarial gain on the 2021 Employee Benefits program was IDR7.19 billion, an increase of IDR6.90 billion or 2,346.69% compared to 2020 which was IDR294 million. This was mainly due to the enactment of the Job Creation Law.

Tabel Keuntungan (Kerugian) Aktuarial atas Program Imbalan Kerja
Table of Actuarial Gain (Loss) on Employment Benefits Programs

(dalam jutaan Rupiah / in IDR million)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp / IDR	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	(1)
Keuntungan (kerugian) aktuarial atas program imbalan kerja	7.194	294	6.900	2.346,99	Actuarial Gain (Loss) on Employment Benefits Programs

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Consolidated Statement of Income and Other Comprehensive Income

Tabel Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Table of Consolidated Statement of Income and Other Comprehensive Income

(dalam jutaan Rupiah / in IDR million)

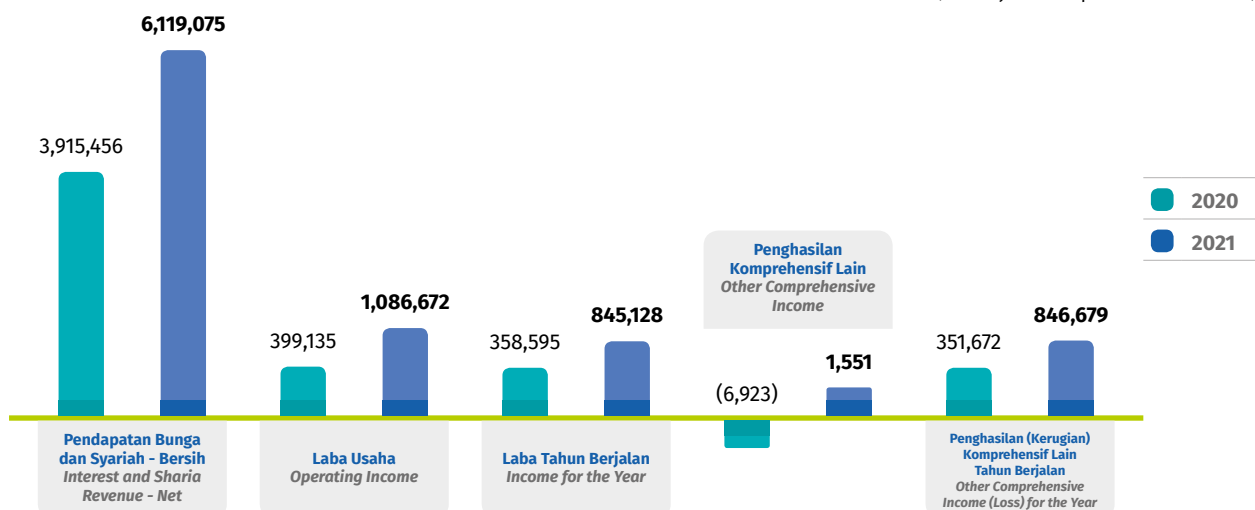
Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp / IDR	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	(1)
Pendapatan bunga dan syariah	8.425.156	5.605.264	2.819.892	50,31	Interest and Sharia Revenue
Beban bunga dan syariah	(2.306.081)	(1.689.808)	(616.273)	36,47	Interest and Sharia Expenses
Pendapatan bunga dan syariah - bersih	6.119.075	3.915.456	2.203.619	56,28	Interest and Sharia Revenue - Net
Pendapatan dari jasa giro, dividen dan bunga deposito berjangka	96.724	106.598	(9.874)	(9,26)	Interest revenue on current account, dividend and time deposits
Pendapatan dari kegiatan manajer investasi	54.675	51.421	3.254	6,33	Revenue from investment manager activities
Keuntungan terealisasi atas penjualan efek	13.906	10.678	3.228	30,23	Realized gain on sale of securities
Pendapatan dari jasa konsultasi manajemen	5.959	190	5.769	3.036,14	Revenue from management consulting services
Pendapatan dari <i>java reconstruction fund</i>	-	2.105	(2.105)	(100,00)	Revenue from the Java Reconstruction Fund
Beban usaha	(5.345.940)	(3.870.282)	(1.475.658)	38,13	Operating expenses
Rugi penjualan aset tetap	(465)	-	(465)	(100,00)	Loss on sale of fixed assets
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	450	(145)	595	(410,28)	Gain (loss) on foreign exchange - net
Lain-lain - bersih	142.288	183.113	(40.825)	(22,29)	Miscellaneous - Net
LABA USAHA	1.086.672	399.135	687.537	172,26	OPERATING INCOME
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan:					Income Tax Benefits (Expenses):
Pajak kini	(401.478)	(153.962)	(247.516)	160,76	Current tax
Pajak tangguhan	159.935	113.422	46.513	41,01	Deferred tax

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp / IDR	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	(1)
Total beban pajak penghasilan	(241.544)	(40.541)	(201.003)	495,80	Total income tax expense - net
LABA TAHUN BERJALAN	845.128	358.595	486.533	135,68	INCOME FOR THE YEAR
Penghasilan komprehensif lain:					Other Comprehensive Income:
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					Items that will not be reclassified to profit or loss:
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:					Items that will be reclassified to profit or loss:
Kerugian atas perubahan nilai wajar aset keuangan melalui penghasilan komprehensif lain	(5.665)	-	(5.665)	(100,00)	Loss on changes in fair value of financial assets through other comprehensive income
Pengukuran kembali atas program imbalan pasca kerja	7.216	(6.923)	14.139	(204,23)	Unrealized gain (loss) on change of post employee benefit program
Total Penghasilan Komprehensif Lain	1.551	(6.923)	8.474	(122,40)	Total Other Comprehensive Income
PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN	846.679	351.672	495.007	140,76	OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR
Laba Tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					Profit for the Year Attributable to:
Pemilik entitas induk	840.778	358.180	482.598	134,74	Owners of the Entity
Kepentingan non-pengendali	4.350	415	3.935	948,16	Non-controlling interests
Total	845.128	358.595	486.533	135,68	Total
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada:					Income for the year attributable to:
Pemilik entitas induk	842.329	351.419	490.910	139,69	Owners of the parent
Kepentingan non-pengendali	4.350	253	4.097	1.619,31	Non-controlling interests
Total	846.679	351.672	495.007	140,76	Total
Laba per saham					Earnings per share
Dasar dan dilusian, laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	0,22	0,24	(0,02)	(9,40)	Basic and diluted, profit for the year attributable to owners of the parent

Grafik Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Graph of Consolidated Statement of Income and Other Comprehensive Income

(dalam jutaan Rupiah / in IDR million)



Pendapatan Bunga dan Syariah - Bersih

Pendapatan bunga dan syariah-bersih tahun 2021 sebesar Rp6,12 triliun, meningkat 56,28% atau Rp2,20 triliun dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp3,92 triliun. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga dari pembiayaan PNM Mekaar yang dipengaruhi oleh peningkatan jumlah nasabah PNM Mekaar secara signifikan dan kenaikan pendapatan bunga ULamm.

Interest and Sharia Revenue - Net

Net interest and sharia income in 2021 reached IDR6.12 trillion, an increase of 56.28% or IDR2.20 trillion compared to 2020 which was IDR3.92 trillion. This was due to an increase in interest income from PNM Mekaar financing which was influenced by a significant increase in the number of PNM Mekaar customers and an increase in ULamm interest income.

Tabel Pendapatan Bunga dan Syariah - Bersih

Interest Revenue On Current Account, Dividend and Time Deposits

(dalam jutaan Rupiah / in IDR million)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp / IDR	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	(1)
Pendapatan bunga dan syariah	8.425.156	5.605.264	2.819.892	50,31	Interest and Sharia Income
Beban bunga dan syariah	(2.306.081)	(1.689.808)	(616.273)	36,47	Interest and Sharia Expenses
Pendapatan bunga dan syariah - bersih	6.119.075	3.915.456	2.203.619	56,28	Interest and Sharia Income - Net

Pendapatan dari Jasa Giro, Dividen dan Bunga Deposito Berjangka

Pendapatan dari jasa giro, dividen dan bunga deposito berjangka tahun 2021 sebesar Rp96,72 miliar, turun 9,26% atau Rp9,87 miliar dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp106,60 miliar. Hal tersebut terutama disebabkan turunnya pendapatan bunga deposito sebesar 65,65%.

Interest Revenue on Current Account, Dividend and Time Deposits

Interest Revenue on Current Account, Dividend and Time Deposits in 2021 reached IDR96.72 billion, down 9.26% or IDR9.87 billion compared to 2020 which was IDR106.60 billion. This was mainly due to a decrease in deposit interest income by 65.65%.

Tabel Pendapatan dari Jasa Giro, Dividen dan Bunga Deposito Berjangka

Table of Interest Revenue on Current Account, Dividend and Time Deposits

(dalam jutaan Rupiah / in IDR million)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp / IDR	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	(1)
Pendapatan jasa giro	77.061	48.533	28.528	58,78	Current account revenue
Pendapatan bunga deposito	19.664	57.247	(37.583)	(65,65)	Deposit interest revenue
Pendapatan dividen	0	818	(818)	(100,00)	Dividend revenue
Total	96.724	106.598	(9.874)	(9,26)	Total

Pendapatan Dari Kegiatan Manajer Investasi

Pendapatan dari kegiatan manajer investasi tahun 2021 sebesar Rp54,68 miliar, meningkat 6,33% atau Rp3,25 miliar dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp51,42 miliar.

Revenue from Investment Manager Activities

Revenue from investment manager activities in 2021 reached IDR54.68 billion, an increase of 6.33% or IDR3.25 billion compared to 2020 which was IDR51.42 billion.

Tabel Pendapatan dari Kegiatan Manajer Investasi
Table of Revenue from Investment Manager Activities

(dalam jutaan Rupiah / in IDR million)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp / IDR	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	(1)
Pendapatan dari kegiatan manajer investasi	54.675	51.421	3.254	6,33	Revenue from investment manager activities

Keuntungan Terealisasi atas Penjualan Efek

Keuntungan terealisasi atas penjualan efek dari tahun 2021 sebesar Rp13,91 miliar, meningkat 30,22% atau Rp3,23 miliar dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp10,68 miliar. Peningkatan tersebut terutama karena pertumbuhan kontrak dari efek berupa kontrak pengelolaan dana sebesar 1.241,18%.

Realized Gains on Sales of Securities

The realized gain on the sale of securities from 2021 was IDR13.91 billion, an increase of 30.22% or IDR3.23 billion compared to 2020 which was IDR10.68 billion. The increase was mainly due to the growth of contracts from securities in the form of fund management contracts by 1,241.18%.

Tabel Keuntungan Terealisasi atas Penjualan Efek
Table of Realized Gains on Sales of Securities

(dalam jutaan Rupiah / in IDR million)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp / IDR	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	(1)
Kontrak Pengelolaan Dana	11.541	860	10.680	1.241,18	Fund Management Contract
Reksadana	2.365	9.818	(7.453)	(75,91)	Mutual funds
Total	13.906	10.678	3.227	30,22	Total

Pendapatan dari Jasa Konsultasi Manajemen

Pendapatan dari jasa konsultasi manajemen tahun 2021 sebesar Rp5,96 miliar, meningkat 3.036,14% atau Rp5,77 miliar dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp190,45 juta.

Revenue from Management Consulting Services

Revenue from management consulting services in 2021 was IDR5.96 billion, an increase of 3,036.14% or IDR5.77 billion compared to 2020 which was IDR190.45 million.

Tabel Pendapatan dari Jasa Konsultasi Manajemen
Table of Revenue from Management Consulting Services

(dalam jutaan Rupiah / in IDR million)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp / IDR	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	(1)
Pendapatan dari jasa konsultasi manajemen	5.959	190	5.769	3.036,14	Revenue from management consulting services

Pendapatan dari Java Reconstruction Fund

Pendapatan dari Java reconstruction fund tahun 2021 sebesar nihil, menurun 100,00% atau Rp2,11 miliar dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp2,11 miliar. Java Reconstruction Fund (JRF) dibentuk dengan tujuan untuk menyediakan platform yang memobilisasi sumber daya negara-negara donor dan menyalurkan bantuan keuangan dalam rangka mendukung tindakan Pemerintah Indonesia bagi rekonstruksi dan rehabilitasi Provinsi Yogyakarta - Jawa Tengah akibat gempa bumi.

Revenue from Java Reconstruction Fund

Revenue from the Java reconstruction fund in 2021 was nil, a decrease of 100.00% or IDR2.11 billion compared to 2020 of IDR2.11 billion. The Java Reconstruction Fund (JRF) was established with the aim of providing a platform to mobilize donor country resources and channel financial assistance in support of the Government of Indonesia's actions for the reconstruction and rehabilitation of Yogyakarta - Central Java Province due to the earthquake.

Tabel Pendapatan dari Java Reconstruction Fund

Table of Revenue from Java Reconstruction Fund

(dalam jutaan Rupiah / in IDR million)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp / IDR	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	(1)
Pendapatan dari Java Reconstruction Fund	-	2.105	(2.105)	(100,00)	Revenue from Java Reconstruction Fund

Beban Usaha

Beban usaha tahun 2021 sebesar Rp5,35 triliun, meningkat sebesar 38,13% atau Rp1,48 triliun dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp3,87 triliun. Peningkatan tersebut khususnya berasal dari pertumbuhan beban gaji dan tunjangan sebesar Rp645,30 miliar serta kerugian penurunan nilai piutang sebesar Rp302,04 miliar

Operating Expenses

Operating expenses in 2021 reached IDR5.35 trillion, an increase of 38.13% or IDR1.48 trillion compared to 2020 of IDR3.87 trillion. The increase in particular came from the growth in salaries and allowances expenses of IDR645.30 billion as well as impairment losses on receivables of IDR302.04 billion.

Tabel Beban Usaha

Table of Operating Expenses

(dalam jutaan Rupiah / in IDR million)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp / IDR	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	(1)
Gaji dan tunjangan	2.950.630	2.305.330	645.300	27,99	Salaries and allowances
Kerugian penurunan nilai piutang	606.795	304.760	302.035	99,11	Loss on impairment
Tantiem, jasa produksi, dan insentif	493.673	273.860	219.813	80,26	Tantiem, bonus, and incentives
Beban kantor	308.775	191.067	117.708	61,61	Office expenses
Asuransi kredit	273.082	146.490	126.592	86,42	Insurance credit
Sewa kantor, kendaraan, dan rumah dinas	189.078	93.090	95.988	103,11	Rent for offices, vehicles, and home house
Penyusutan	164.879	281.884	(117.005)	(41,51)	Depreciation
Jasa profesional	77.826	31.260	46.566	148,96	Professional fee
Sistem informasi	77.521	58.004	19.517	33,65	Information Systems
Amortisasi	77.515	72.654	4.861	6,69	Amortization
Pemeliharaan dan perbaikan	59.914	29.235	30.679	104,94	Maintenance and repairs
Pendidikan dan latihan	21.490	15.667	5.823	37,17	Education and training
Jamuan	11.138	6.698	4.440	66,29	Entertainment

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp / IDR	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	(1)
Beban pemasaran	10.224	9.620	604	6,28	Marketing expenses
Pengembangan kapasitas usaha	8.947	9.307	(360)	(3,87)	Capacity building
Perjalanan dan transportasi	6.888	5.795	1.093	18,86	Travel and transportation
Biaya agen penjual reksadana	6.712	6.380	332	5,20	Agency fee of mutual fund
Proyek operasional	1.121	668	453	67,77	Operational project
Pengendalian Risiko	179	115	64	55,51	Risk controlling
Imbalan kerja	(6.525)	28.397	(34.922)	(122,98)	Employee benefits
Lain-lain	6.077	0	6.077	100,00	Miscellaneous
Total	5.345.940	3.870.282	1.475.658	38,13	Total

Rugi Penjualan Aset Tetap

Rugi penjualan aset tetap tahun 2021 sebesar Rp465 juta, sedangkan tahun 2020 mencatatkan nihil.

Loss on Sale of Fixed Assets

Loss on sale of fixed assets in 2021 reached IDR465 million, while in 2020 it was nil.

Tabel Rugi Penjualan Aset Tetap

Table of Loss on Sale of Fixed Assets

(dalam jutaan Rupiah / in IDR million)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp / IDR	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	(1)
Rugi penjualan aset tetap	(465)	-	(465)	(100,00)	Loss on Sale of Fixed Assets

Laba (Rugi) Selisih Kurs – Bersih

Laba selisih kurs bersih tahun 2021 sebesar Rp450 juta, meningkat 410,28% dibandingkan tahun 2020 yang mencatatkan rugi selisih kurs bersih sebesar Rp145 juta.

Profit (Loss) Foreign Exchange – Net

Net foreign exchange gain in 2021 reached IDR450 million, an increase of 410.28% compared to 2020 which recorded a net foreign exchange loss of IDR145 million.

Tabel Laba (Rugi) Selisih Kurs – Bersih

Table of Profit (Loss) Foreign Exchange – Net

(dalam jutaan Rupiah / in IDR million)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp / IDR	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	(1)
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	450	(145)	595	(410,28)	Profit (Loss) Foreign Exchange – Net

Lain-Lain - Bersih

Perolehan pendapatan lainnya tahun 2021 sebesar Rp142,29 triliun, menurun 22,29% atau Rp40,83 miliar dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp183,11 triliun. Penurunan tersebut terutama berasal dari turunnya pendapatan lain-lain sebesar Rp42,77 miliar.

Miscellaneous – Net

Other revenues in 2021 reached IDR142.29 trillion, a decrease of 22.29% or IDR40.83 billion compared to 2020 which was IDR183.11 trillion. The decrease was mainly due to the decrease in other income by IDR4.27 billion.

Tabel Lain-Lain – Bersih
Table of Miscellaneous – Net

(dalam jutaan Rupiah / in IDR million)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp / IDR	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	(1)
Pendapatan lain-lain	151.801	194.568	(42.767)	(21,98)	Other revenues
Beban lain-lain	(9.513)	(11.455)	1.942	(16,95)	Other expenses
Total	142.288	183.113	(40.825)	(22,29)	Total

Laba Usaha

Pada tahun 2021, laba usaha PNM sebesar Rp1,09 triliun, meningkat sebesar Rp687,54 miliar atau 172,26% dibandingkan dengan perolehan tahun 2020 sebesar Rp399,14 miliar. Peningkatan laba usaha ini terutama disebabkan kenaikan pendapatan bunga dan syariah – bersih sebesar Rp2,20 triliun dari PNM Mekaar dan PNM ULAMM.

Operating Income

In 2021, PNM's operating profit reached IDR1.09 trillion, an increase of IDR687.54 billion or 172.26% compared to the gain in 2020 of IDR399.14 billion. The increase in operating profit was mainly due to an increase in interest and sharia income – net of IDR2.20 trillion from PNM Mekaar and PNM ULAMM.

Tabel Laba Usaha
Table of Operating Income

(dalam jutaan Rupiah / in IDR million)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp / IDR	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	(1)
Pendapatan bunga dan syariah - bersih	6.119.075	3.915.456	2.203.619	56,28	Interest and sharia Revenue - net
Pendapatan dari jasa giro, dividen dan bunga deposito berjangka	96.724	106.598	(9.874)	(9,26)	Interest revenue on current accounts, dividend and time deposits
Pendapatan dari kegiatan manajer investasi	54.675	51.421	3.254	6,33	Revenue from investment manager activities
Keuntungan terealisasi atas penjualan efek	13.906	10.678	3.228	30,23	Realized gain on sale of securities
Pendapatan dari jasa konsultasi manajemen	5.959	190	5.769	3.036,14	Revenue from management consulting services
Pendapatan dari <i>java reconstruction fund</i>	-	2.105	(2.105)	(100,00)	Revenue from the Java Reconstruction Fund
Beban usaha	(5.345.940)	(3.870.282)	(1.475.658)	38,13	Operating expenses
Rugi penjualan aset tetap	(465)	-	(465)	(100,00)	Loss on sale of fixed assets
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	450	(145)	595	(410,28)	Gain (loss) on foreign exchange - net
Lain-lain - bersih	142.288	183.113	(40.825)	(22,29)	Miscellaneous – Net
Laba usaha	1.086.672	399.135	687.537	172,26	Operating profit

Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan bersih tahun 2021 sebesar Rp241,54 miliar, meningkat 495,80% atau Rp201,00 miliar dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp40,54 miliar. Hal tersebut berasal dari pertumbuhan laba usaha pada tahun 2021 yang sebesar Rp687,54 miliar.

Income Tax Benefit (Expense)

Net income tax expense in 2021 was IDR241.54 billion, an increase of 495.80% or IDR201.00 billion compared to 2020 of IDR40.54 billion. This came from the growth in operating profit in 2021 which amounted to IDR687.54 billion.

Tabel Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan
Table of Income Tax Benefit (Expense)

(dalam jutaan Rupiah / in IDR million)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp / IDR	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	(1)
Pajak kini	(401.478)	(153.962)	(247.516)	160,76	Current Tax
Pajak tangguhan	159.935	113.422	46.513	41,01	Deferred Tax
Total beban pajak penghasilan	(241.544)	(40.541)	(201.003)	495,80	Total income tax benefit (expense)

Laba Tahun Berjalan

Selama tahun 2021, PNM memperoleh laba tahun berjalan sebesar Rp845,13 miliar, meningkat sebesar Rp486,53 miliar atau 135,68% dari perolehan di tahun 2020 sebesar Rp358,60 miliar. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga dan syariah – bersih sebesar Rp2,20 triliun dari PNM Mekaar dan PNM ULAMM.

Income of the Year

During 2021, PNM earned a profit for the year of IDR845.13 billion, an increase of IDR486.53 billion or 135.68% from revenue in 2020 of IDR358.60 billion. This was due to an increase in interest and sharia income – net of IDR2.20 trillion from PNM Mekaar and PNM ULAMM.

Tabel Laba Tahun Berjalan
Table of Income of the Year

(dalam jutaan Rupiah / in IDR million)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp / IDR	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	(1)
Laba usaha	1.086.672	399.135	687.537	172,26	Operating profit
Total beban pajak penghasilan	(241.544)	(40.541)	(201.003)	495,80	Total income tax expense
Laba tahun berjalan	845.128	358.595	486.533	135,68	Income of the year

Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lain

Penghasilan komprehensif lainnya tahun 2021 sebesar Rp1,55 miliar, naik sebesar 122,40% atau Rp8,47 miliar dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencatatkan kerugian komprehensif lain sebesar Rp6,92 miliar. Hal tersebut terutama karena adanya pertumbuhan pengukuran kembali atas program imbalan pasca kerja sebesar Rp14,14 miliar.

Other Comprehensive Income (Loss)

Other comprehensive income in 2021 was IDR1.55 billion, an increase of 122.40% or IDR8.47 billion compared to 2020 which recorded another comprehensive loss of IDR6.92 billion. This was mainly due to the growth in the remeasurement of the post-employment benefit plan of IDR14.14 billion.

Tabel Penghasilan Komprehensif Lain
Table of Other Comprehensive Income (Loss)

(dalam jutaan Rupiah / in IDR million)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp / IDR	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	(1)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:					Items that will be reclassified to profit or loss:
Kerugian atas perubahan nilai wajar aset keuangan melalui penghasilan komprehensif lain	(5.665)	-	(5.665)	(100,00)	Loss on changes in fair value of financial assets through other comprehensive income

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp / IDR	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	(1)
Pengukuran kembali atas program imbalan pasca kerja	7.216	(6.923)	14.139	(204,23)	Unrealized gain (loss) on change of post employee benefit program
Total penghasilan (kerugian) komprehensif lain	1.551	(6.923)	8.474	122,40	Total Other Comprehensive Income (Loss)

Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lain Tahun Berjalan

Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp846,68 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp495,01 miliar atau 140,76% jika dibandingkan dengan perolehan tahun 2020 sebesar Rp351,67 miliar. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan pendapatan usaha dan penghasilan komprehensif lainnya yang berasal dari keuntungan aktuarial atas imbalan pasca kerja dan kerugian atas perubahan nilai wajar aset keuangan melalui penghasilan komprehensif lain.

Other Comprehensive Income (Loss) for the Year

Other comprehensive income for the current year in 2021 was recorded at IDR846.68 billion, an increase of IDR495.01 billion or 140.76% compared to the gain in 2020 of IDR351.67 billion. This was due to an increase in operating income and other comprehensive income derived from actuarial gains on post-employment benefits and losses on changes in the fair value of financial assets through other comprehensive income.

Tabel Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lain Tahun Berjalan

Table of Other Comprehensive Income (Loss) For The Year

(dalam jutaan Rupiah / in IDR million)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp / IDR	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	(1)
Laba tahun berjalan	845.128	358.595	486.533	135,68	Income of the year
Total penghasilan komprehensif lain	1.551	(6.923)	8.474	(122,40)	Total other comprehensive income
Penghasilan (kerugian) komprehensif lain tahun berjalan	846.679	351.672	495.007	140,76	Other Comprehensive Income (Loss) For The Year

Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan

Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan tahun 2021 sebesar Rp845,13 miliar, meningkat 135,68% atau Rp485,53 miliar dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp358,60 miliar. Peningkatan tersebut berdampak pula pada kenaikan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk maupun kepentingan non pengendali masing-masing mengalami kenaikan sebesar 134,74% dan 948,16%.

Income for the Year Attributable

Profit for the year attributable in 2021 was IDR845.13 billion, an increase of 135.68% or IDR485.53 billion compared to 2020 which was IDR358.60 billion. The increase also had an impact on the increase in profit for the year attributable to owners of the parent entity and non-controlling interests, which increased by 134.74% and 948.16%, respectively.

Tabel Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan
Table of Income for the Year Attributable

(dalam jutaan Rupiah / in IDR million)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp / IDR	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	(1)
Pemilik entitas induk	840.778	358.180	482.598	134,74	Owners of the entity
Kepentingan non-pengendali	4.350	415	3.935	948,16	Non-controlling interest
Total	845.128	358.595	486.533	135,68	Total

Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan

Penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan tahun 2021 sebesar sebesar Rp846,68 miliar, meningkat 140,76% atau Rp495,01 miliar dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp351,67 miliar. Peningkatan tersebut berdampak pula pada kenaikan penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk maupun kepentingan non pengendali masing-masing mengalami kenaikan sebesar 139,69% dan 1.619,31%.

Other Comprehensive Income for the Year Attributable

Comprehensive income for the year attributable in 2021 reached IDR846.68 billion, an increase of 140.76% or IDR495.01 billion compared to 2020 which was IDR351.67 billion. The increase also had an impact on the increase in comprehensive income for the year attributable to owners of the parent entity and non-controlling interests, which increased by 139.69% and 1,619.31%, respectively.

Tabel Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan
Table of Other Comprehensive Income for the Year Attributable

(dalam jutaan Rupiah / in IDR million)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp / IDR	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	(1)
Pemilik entitas induk	842.329	351.419	490.910	139,69	Owners of the entity
Kepentingan non-pengendali	4.350	253	4.097	1.619,31	Non-controlling interest
Total	846.679	351.672	495.007	140,76	Total

Laba Per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan. Laba per saham dasar tahun 2021 sebesar Rp221.257 menurun 9,40% atau Rp22.957 dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp244.214.

Earnings Per Share

Basic earnings per share was calculated by dividing profit for the year attributable to owners of the parent by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year. Basic earnings per share in 2021 of IDR221,257 decreased by 9.40% or IDR22,957 compared to 2020 of IDR244,214.

Tabel Laba Per Saham
Table of Earnings Per Share

(dalam nilai penuh / in full amount)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp / IDR	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	(1)
Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	840.778.080.226	358.180.083.833	482.597.996.393	134,74	Profit attributable to owners of the parent
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar - dasar	3.800.000	1.466.667	2.333.333	159,09	Weighted average number of outstanding common stock - basic
Laba per saham - dasar (Rupiah penuh)	221.257	244.214	(22.957)	(9,40)	Earning per share - basic (full amount)

Laporan Arus Kas Konsolidasian

Consolidated Statement of Cash Flows

Tabel Laporan Arus Kas Konsolidasian
Table of Consolidated Statement of Cash Flows

(dalam jutaan Rupiah / in IDR million)

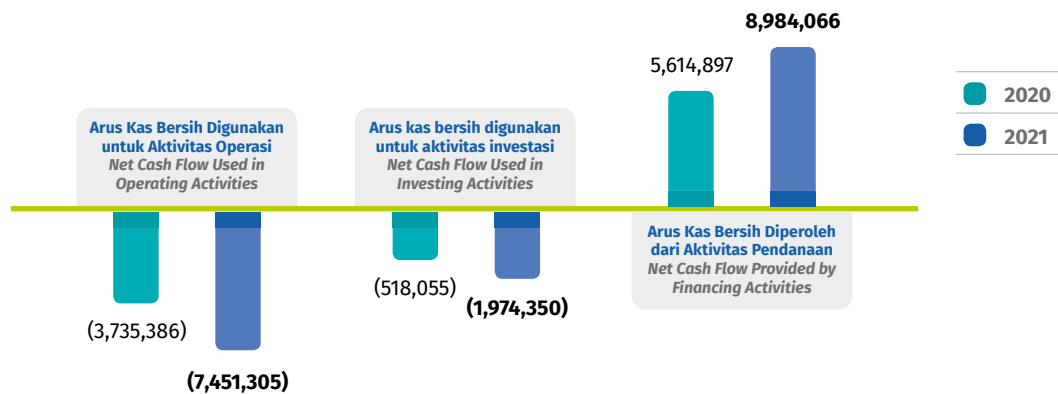
Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp / IDR	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	(1)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES					
Pengembalian penyaluran pinjaman	31.773.404	20.662.776	11.110.628	53,77	Decrease in loan disbursement
Penerimaan dari pendapatan bunga	8.487.250	5.359.063	3.128.187	58,37	Proceeds from interest income
Penerimaan usaha lainnya	517.905	123.240	394.665	320,24	Other operating income
Pengembalian pembiayaan modal ventura	157.116	208.605	(51.489)	(24,68)	Payment of capital financing
Penerimaan dari jasa giro dan bunga deposito	105.883	112.351	(6.468)	(5,76)	Interest income on currents account and deposits
Penerimaan pendapatan pembiayaan modal ventura	82.932	73.279	9.653	13,17	Proceeds from capital financing revenue
Penerimaan dari jasa penasihat keuangan, konsultasi manajemen dan investasi	70.551	62.640	7.911	12,63	Proceeds from financial and management consulting services and investment
Keuntungan penjualan portofolio efek	2.365	860	1.505	175,02	Gains on sales of securities portfolio
Kenaikan penyaluran pinjaman	(42.712.862)	(25.495.011)	(17.217.851)	67,53	Increase in lending
(Pembayaran) kepada pegawai	(3.793.533)	(2.634.795)	(1.158.738)	43,98	Payment for employees
Pembayaran bunga pinjaman dan pembayaran kepada pihak ketiga	(1.745.830)	(1.973.296)	227.466	(11,53)	Payment on loan interest and payments to the third parties
Pembayaran pajak	(544.311)	(204.791)	(339.520)	165,79	Payment for taxes
Kenaikan pembiayaan modal ventura	(155.725)	(126.982)	(28.743)	22,64	Increase from capital financing
Pembelian efek - bersih	(298)	(8.516)	8.218	(96,50)	Purchases on securities - nett
Penerimaan lain-lain	303.849	105.191	198.658	188,85	Miscellaneous Receipt
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	(7.451.305)	(3.735.386)	(3.715.919)	99,48	Net Cash Flow Used in Operating Activities

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
			Rp / IDR	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	(1)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES					
Penjualan efek - bersih	200.000	139.126	60.874	43,75	Sales on Marketable Securities - net
Penjualan aset tetap	76.786	7.822	68.964	881,66	Sales of fixed assets
Divestasi pada entitas asosiasi	-	18.799	(18.799)	(100,00)	Divestment in associates
Pembelian efek - bersih	(1.130.000)	(459.159)	(670.841)	146,10	Securities purchases - net
Pembelian aset tetap	(1.121.136)	(224.644)	(896.492)	399,07	Purchase of fixed assets
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(1.974.350)	(518.055)	(1.456.295)	281,11	Net Cash Flow Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES					
Penerimaan pinjaman bank	16.685.426	8.531.020	8.154.406	95,59	Proceeds from bank borrowings
Penerimaan dana dari MTN	4.470.700	692.000	3.778.700	546,05	Proceeds from MTN
penerimaan dana dari obligasi	3.666.200	1.983.800	1.682.400	84,81	Proceeds from bonds
penerimaan hibah	61.000	(750.000)	811.000	(108,13)	Grant Receipt
penerimaan dana dari pihak non-bank	2.375	-	2.375	100,00	Proceeds of funds from non-bank parties
penerimaan dari penyertaan modal negara	-	2.500.000	(2.500.000)	(100,00)	Receipt from State Capital Investment
pembayaran pinjaman bank	(10.662.298)	(7.138.313)	(3.523.985)	49,37	Payments for bank borrowing
pembayaran pokok obligasi	(2.997.800)	(750.000)	(2.247.800)	299,71	Payment for bond settlement
Pembayaran untuk MTN	(2.229.500)	(390.000)	(1.839.500)	471,67	Payment for MTN
(Pembayaran) biaya emisi obligasi	(9.162)	(3.004)	(6.158)	204,99	Payment of bond issuance cost
Pembayaran dana kepada pihak non-bank	(2.876)	-	(2.876)	(100,00)	Payment of funds from non-bank parties
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	8.984.066	5.614.897	3.369.169	60,00	Net Cash Flow Provided by Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(441.589)	1.361.456	(1.803.045)	(132,44)	INCREASE (DECREASE) IN NET CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	4.462.197	3.100.741	1.361.456	43,91	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	4.020.609	4.462.197	(441.588)	(9,90)	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS TERDIRI DARI:					CASH AND CASH EQUIVALENTS COMPRISE OF:
Kas	11.603	13.272	(1.669)	(12,58)	Cash on hand
Bank	3.016.948	3.105.106	(88.158)	(2,84)	Cash in bank
Deposito jangka pendek	992.058	1.343.820	(351.762)	(26,18)	Short term deposits
Total	4.020.609	4.462.197	(441.588)	(9,90)	Total

Grafik Laporan Arus Kas

Graph of Cash Flow Statement

(dalam jutaan Rupiah / in IDR million)



Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi tahun 2021 sebesar Rp7,45 triliun, meningkat sebesar Rp3,72 triliun atau 99,48% apabila dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp3,74 triliun. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada penyaluran pembiayaan, pembayaran bunga pinjaman, dan pembayaran kepada pihak ketiga.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi tahun 2021 sebesar Rp1,97 triliun, meningkat sebesar Rp1,46 triliun atau 281,11% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp518,06 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya pembelian efek bersih, pembelian aset tetap, dan properti investasi.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan tahun 2021 sebesar Rp8,98 triliun, meningkat sebesar Rp3,37 triliun atau 60,00% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp5,61 triliun. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya penerimaan dana dari pihak non bank, pembayaran pinjaman bank, dan penerimaan dana dari obligasi.

Cash Flows from Operating Activities

The net cash flow used for operating activities in 2021 was IDR7.45 trillion, an increase of IDR3.72 trillion or 99.48% compared to 2020 which was IDR3.74 trillion. This was mainly due to an increase in financing distribution, loan interest payments, and payments to third parties.

Cash Flows from Investing Activities

The net cash flow used for investment activities in 2021 was IDR1.97 trillion, an increase of IDR1.46 trillion or 281.11% compared to 2020 of IDR518.06 billion. This was mainly due to the purchase of net securities, purchase of fixed assets, and investment properties.

Cash Flows from Financing Activities

Net cash flow obtained from financing activities in 2021 reached IDR8.98 trillion, an increase of IDR3.37 trillion or 60.00% compared to 2020 of IDR5.61 trillion. This was mainly due to the receipt of funds from non-bank parties, payment of bank loans, and receipts of funds from bonds.

Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang

Kemampuan Membayar Utang

PNM senantiasa berkomitmen untuk memenuhi hak-hak kreditor dengan melakukan pembayaran pokok pinjaman dan bunganya secara tepat waktu. Kemampuan membayar hutang jangka pendek tercermin dari rasio likuiditas sedangkan kemampuan membayar hutang jangka panjang tercermin dari rasio solvabilitas.

Ability to Pay Debt and Debt Collectibility

Ability to Pay Debt

PNM is always committed to fulfilling creditors' rights by making timely repayments of loan principal and interest. The ability to pay short-term debt was reflected in the liquidity ratio, while the ability to pay long-term debt was reflected in the solvency ratio.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek (Likuiditas)

Rasio likuiditas, menggambarkan kemampuan PNM dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya, mengalami penurunan sebesar 1,63% dari 193,91% pada tahun 2020 menjadi sebesar 192,28% pada tahun 2021. Hal ini terutama disebabkan karena peningkatan aset lancar sebesar 51,29% atau sebesar Rp11,14 triliun lebih rendah apabila dibandingkan dengan peningkatan liabilitas lancar sebesar 54,21% atau sebesar Rp6,01 triliun. Peningkatan aset lancar terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman yang diberikan, khususnya pembiayaan Mekaar selama tahun 2021. Sementara itu, peningkatan liabilitas lancar terutama disebabkan oleh kenaikan porsi lancar utang obligasi, utang bank dan lembaga keuangan, *medium-term notes* dan sukuk, serta pinjaman Pemerintah RI dan lembaga kredit luar negeri. Meskipun rasio likuiditas menurun dari tahun sebelumnya, rasio masih menunjukkan bahwa tingkat kemampuan membayar utang jangka pendek PNM masih relatif baik.

Tabel Rasio Likuiditas
Table of Liquidity Ratio

(dalam % / in %)

Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan Increase (Decrease)	Description
Rasio Likuiditas	192,28	193,91	(1,63)	Liquidity Ratio

Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang (Solvabilitas)

Rasio solvabilitas, yang menggambarkan kemampuan melunasi semua utangnya dengan menggunakan semua aset yang dimilikinya, mengalami peningkatan dari 4,04 kali pada akhir tahun 2020 menjadi 4,88 kali pada akhir tahun 2021 untuk *Debt to Equity Ratio* (DER) dan mengalami peningkatan dari 3,24 kali pada akhir tahun 2020 menjadi 4,25 kali pada akhir tahun 2021 untuk *gearing ratio*. Hal ini terutama disebabkan adanya peningkatan hutang bank dan lembaga keuangan, *medium-term notes* dan sukuk, utang obligasi dan pinjaman dari pemerintah. Meskipun meningkat dari tahun sebelumnya, rasio masih menunjukkan bahwa tingkat kemampuan membayar utang jangka panjang PNM masih relatif baik.

Kenaikan persentase total aset sebesar Rp12,05 triliun (setara 38,05%) terutama disebabkan meningkatnya nilai pinjaman yang diberikan sebesar Rp10,29 triliun, aset tetap bersih sebesar Rp889,37 miliar (setara 60,27%), dan aset lain-lain sebesar Rp400,81 miliar (setara 29,18%). Sementara itu kenaikan persentase total utang PNM sebesar Rp11,20 triliun (setara 42,93%) terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank dan lembaga keuangan sebesar Rp5,09 triliun (setara 81,75%), dana cadangan angsuran sebesar Rp2,36 triliun (setara 93,43%), surat utang jangka menengah dan sukuk

Ability to Pay Short-Term Debt (Liquidity)

The liquidity ratio, which describes PNM's ability to pay off its short-term debt using its current assets, decreased by 1.63% from 193.91% in 2020 to 192.28% in 2021. This was mainly due to the 51.29% increase in current assets or Rp11.14 trillion, which was lower than the 54.21% increase in current liabilities or Rp6.01 trillion. Current assets were mainly due to an increase in loans disbursed, particularly Mekaar financing during 2021. Meanwhile, the increase in current liabilities was mainly due to an increase in the portion of loans from bonds, debt banks and financial institutions, medium-term notes and sukuk, as well as loans from the Government of Indonesia and institutions. foreign credit. Although the liquidity ratio decreased from previous years, the ratio still shows that the level of PNM's ability to pay short-term debt is still relatively good.

Ability to Pay Long-Term Debt (Solvability)

The solvency ratio, which describes the ability to pay off all of its debts using all of its assets, has increased from 4.04 times at the end of 2020 to 4.88 times at the end of 2021 for the *Debt to Equity Ratio* (DER) and has increased from 3.24 times in the end of 2020 to 4.25 times at the end of 2021 for the *gearing ratio*. This was mainly due to an increase in bank and financial institution loans, medium term notes and sukuk, bonds payable and loans from the government. Even though it increased from the previous year, the ratio still shows that the level of PNM's ability to pay long-term debt is still relatively good.

The increase in the percentage of total assets by Rp12.05 trillion (equivalent to 38.05%) was mainly due to an increase in the value of loans disbursed by Rp10.29 trillion, fixed assets-net of Rp889.37 billion (equivalent to 60.27%), and other assets- others amounting to Rp400.81 billion (equivalent to 29.18%). Meanwhile, the increase in the percentage of total PNM debt by Rp11.20 trillion (equivalent to 42.93%) was mainly due to an increase in loans from banks and financial institutions by Rp5.09 trillion (equivalent to 81.75%), installment reserve funds of Rp.2.36 trillion (equivalent to

sebesar Rp2,20 triliun (setara 56,54%), pinjaman pemerintah sebesar Rp881,68 miliar (setara 28,99%), dan utang obligasi sebesar Rp664,79 miliar (setara 7,06%). Meskipun rasio solvabilitas meningkat dari tahun sebelumnya, rasio masih menunjukkan bahwa tingkat kemampuan membayar utang jangka panjang PNM masih relatif baik.

Rp. equivalent to 93.43%), medium-term debt securities and sukuk amounting to Rp2.20 trillion (equivalent to 56.54%), government loans amounting to Rp881.68 billion (equivalent to 28.99%), and bonds payable amounting to Rp664.79 billion (equivalent to 7.06%). Although the solvency ratio increased from the previous year, the ratio still shows that the level of PNM's ability to pay long-term debt is still relatively good.

Tabel Solvabilitas
Table of Solvability Ratio

(dalam kali / in times)

Uraian	2021	2020	Kenaikan/Penurunan Increase (Decrease)	Description
Debt to Equity Ratio	4,88	4,04	0,84	Debt to Equity Ratio
Gearing Ratio	4,25	3,24	1,01	Gearing Ratio

Kemampuan Membayar Utang dari Efek-Efek yang Diterbitkan

Kemampuan membayar utang juga dapat tercermin berdasarkan peringkat dari efek-efek yang diterbitkan yaitu obligasi, sukuk mudharabah dan *Medium Term Notes* (MTN). Efek-efek yang diterbitkan secara rutin dinilai oleh lembaga pemeringkatan guna mendukung kelayakan efek, Kualitas efek sangat ditentukan oleh kemampuan perusahaan penerbit efek dalam membayar efek nya pada saat jatuh tempo dan kemampuannya membayar bunga atau kupon selama jangka waktu penerbitan efek tersebut.

Ability to Pay Debt from Securities Issued

The ability to pay debt could also be reflected based on the rating of the securities issued, namely bonds, sukuk mudharabah and Medium Term Notes (MTN). Securities issued were routinely assessed by a rating agency to support the eligibility of securities. Securities quality was largely determined by the ability of the securities issuing company to pay its securities at maturity and its ability to pay interest or coupons during the term of the securities issuance.

Tabel Kemampuan Membayar Hutang dari Efek-Efek yang Diterbitkan
Table of Ability to Pay Debt from Securities Issued

Uraian	Peringkat Rating		Description
	2021	2020	
Obligasi			Bond
PUB III Tahap I.A	id ^{AA}	id ^{A+}	PUB III Phase I.A
PUB III Tahap I.B	id ^{AA}	id ^{A+}	PUB III Phase I.B
PUB III Tahap II.A	id ^{AA}	id ^{A+}	PUB III Phase II.A
PUB III Tahap II.B	id ^{AA}	id ^{A+}	PUB III Phase II.B
PUB III Tahap III.A	id ^{AA}	id ^{A+}	PUB III Phase III.A
PUB III Tahap III.B	id ^{AA}	id ^{A+}	PUB III Phase III.B
PUB III Tahap IV.A	id ^{AA}	id ^{A+}	PUB III Phase IV.A
PUB III Tahap IV.B	id ^{AA}	id ^{A+}	PUB III Phase IV.B
PUB III Tahap IV.C	id ^{AA}	id ^{A+}	PUB III Phase IV.C
PUB IV Tahap I	id ^{AA}	-	PUB IV Phase I
Sukuk Mudharabah			Sukuk Mudharabah
Sukuk Mudharabah IV Tahun 2020 Tahap I Seri A	id ^{AA} (sy)	id ^{A+} (sy)	Sukuk Mudharabah IV Year 2020 Phase I Series A
Sukuk Mudharabah I Tahap I Tahun 2021	id ^{AA} (sy)	-	Sukuk Mudharabah I Phase I Year 2021

Uraian	Peringkat Rating		Description
	2021	2020	
Medium Term Notes (MTN)			Medium Term Notes (MTN)
MTN XIX Seri D	_{id} AA	_{id} A+	MTN XIX Series D
MTN XIX Seri E	_{id} AA	_{id} A+	MTN XIX Series E

Tabel Arti Peringkat
Table of Meaning of Ranking

Lembaga Pemeringkat Table of Meaning of Ranking	Peringkat Rating	Arti Peringkat Rating Meaning
PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)	_{id} AA	Obligor dengan peringkat _{id} AA memiliki sedikit perbedaan dengan peringkat tertinggi yang diberikan, dan memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya dibandingkan terhadap obligor Indonesia lainnya. <i>Obligors rated _{id}AA differ slightly from the highest ratings assigned, and have a very strong ability to meet their long-term financial commitments compared to other Indonesian obligors.</i>
	_{id} A	Obligor dengan peringkat _{id} A memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya dibandingkan dengan obligor Indonesia lainnya. Namun, obligor agak lebih rentan terhadap efek buruk dari perubahan keadaan dan kondisi ekonomi daripada obligor berperingkat lebih tinggi. <i>An obligor rated _{id}A has a stronger capacity to meet its long-term financial commitments compared to other Indonesian obligors. However, the obligor is somewhat more susceptible to the adverse effects of changing economic conditions and conditions than the higher rated obligor.</i>
Tanda tambah (+) Plus sign (+)		Pada peringkat tertentu menunjukkan bahwa peringkat tersebut relatif kuat dalam masing-masing kategori peringkat. <i>A certain rating indicates that the rating is relatively strong within the respective rating category.</i>
Tanda minus (-) Minus sign (-)		Pada peringkat tertentu menunjukkan bahwa peringkat tersebut relatif lemah dalam masing-masing kategori peringkat. <i>A certain rating indicates that the rating is relatively weak within the respective rating categories.</i>
(sy)		Berarti peringkat mengamankan prinsip-prinsip Islam. <i>Mean rank mandates Islamic principles.</i>

Kolektibilitas Piutang

Tingkat kolektibilitas PNM pada 2021 yang dihitung berdasarkan *Non Performing Loan* (NPL) konsolidasi PNM yang mengalami perbaikan NPL yaitu tercatat sebesar 0,69%, jauh lebih baik dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,23% pada tahun 2020, NPL pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,54% dibandingkan dengan tahun 2020.

Receivable Collectibility

The collectibility rate of PNM in 2021 calculated based on the Consolidated *Non Performing Loan* (NPL) of PNM which experienced an improvement in NPL was recorded at 0.69%, much better than the previous year which was 1.23% in 2020, NPL in 2021 experienced a decline by 0.54% compared to 2020.

Tabel Rasio Non Performing Loan (NPL)
Table of Non Performing Loan (NPL) Ratio

(dalam % / in %)

Uraian	2021	2020	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	Description
<i>Non Performing Loan</i> (NPL)	0,69%	1,23%	0,54%	<i>Non Performing Loan</i> (NPL)

Persentase NPL yang rendah menunjukkan sehatnya tingkat kolektabilitas kredit yang disalurkan PNM. Perbaikan NPL ini tercapai berkat berbagai fokus inisiatif strategis yang dilakukan PNM pada 2021. Untuk menekan rasio pembiayaan bermasalah (NPL), PNM melakukan inisiatif berikut:

1. Penundaan pembayaran angsuran terhadap nasabah PNM Mekaar secara bertahap akan dihentikan dan terhadap nasabah PNM Mekaar yang masih memiliki penghasilan namun kondisi usaha belum pulih selanjutnya ditawarkan fasilitas restruktur yang disesuaikan dengan kemampuan bayar.
2. Meningkatkan baki debit/portofolio pembiayaan dengan selektif dan tetap mengutamakan kehati-hatian.
3. Melakukan klaim penjaminan/asuransi pembiayaan dan menyiapkan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) minimal 100% dari baki debit pembiayaan bermasalah.
4. Melakukan penagihan atas pembiayaan yang bermasalah secara selektif.
5. Melakukan lelang dan jual atas barang yang diagunkan ke Perusahaan.

Selain strategi penanganan pembiayaan bermasalah di atas, PNM sebagai lembaga pembiayaan non bank memiliki kebijakan *write-off* (hapus-buku) untuk menekan rasio NPL. Selain hal tersebut, sebagai upaya untuk meminimalkan jumlah kredit macet, PNM juga memiliki kebijakan penanganan tunggakan dan pembiayaan bermasalah. Penanganan tunggakan dan pembiayaan bermasalah merupakan proses penagihan dan penyelesaian terhadap nasabah menunggak yang bertujuan untuk:

1. Menjaga kualitas portofolio pembiayaan agar tetap lancar.
2. Memperbaiki kolektibilitas pembiayaan.
3. Mengurangi biaya cadangan kerugian penurunan nilai.

Ketentuan penanganan tunggakan dan pembiayaan bermasalah meliputi tahapan berikut:

1. Penagihan.
2. Restrukturisasi pembiayaan ULaMM melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).
3. Penanganan pembiayaan bermasalah dengan strategi *phase out* melalui pendekatan di luar jalur hukum (*soft approach*), pendekatan melalui jalur hukum (*hard approach*), dan penghapusbukuan pembiayaan (*write off*).
4. Pemutusan pembiayaan bermasalah dengan kewenangan yang wajib digunakan dengan penuh tanggung jawab, kehati-hatian, dan kepatuhan terhadap hukum/ketentuan yang berlaku.

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, PNM memiliki empat segmen usaha, yaitu pembiayaan, manajer investasi, modal ventura, pembiayaan syariah. Tingkat kolektabilitas pada keempat segmen usaha tersebut hanya meliputi pembiayaan yang disalurkan melalui PNM Mekaar dan ULaMM, sebagaimana diungkapkan sebagai berikut:

A low NPL percentage indicates a healthy collectability level of credit disbursed by PNM. This NPL improvement was achieved thanks to the various strategic initiatives that PNM would focus on in 2021. The Company has made the following efforts to prevent the increase of NPL:

1. *The postponement of installment payments for PNM Mekaar customers was gradually stopped and PNM Mekaar customers who still had income but business conditions had not recovered would then be offered restructuring facilities adjusted to their ability to pay.*
2. *Increasing debit balance/financing portfolio by maintaining the quality of financing.*
3. *Making a guarantee/finance insurance claim and preparing a Allowance for Impairment Losses (CKPN) of at least 100% of the non-performing financing debit balance.*
4. *Selectively collect the financing problems.*
5. *Melakukan lelang dan jual atas barang yang diagunkan ke Perusahaan.*

In addition to the aforementioned strategy to manage NPL, the Company also conducts write-off to reduce the NPL ratio. Apart from that, To minimize the amount of non-performing loans, PNM has prepared the handling of arrears and non-performing loans. This process, which consists of collection and settlement with customers in arrears, is intended to:

1. *Maintain an expedite financing portfolio;*
2. *Improve financing collectability; and*
3. *Reduce reserve funds for impairment loss.*

The process of handling arrears and non-performing loans is as follows:

1. *Billing.*
2. *ULaMM financing restructuring through rescheduling, reconditioning, and restructuring.*
3. *Non-performing loan handling with phase out strategy through soft approach, hard approach and write-off; and*
4. *Resolution of non-performing loan utilizing an authority that must be fully responsible, prudent, and in compliance with the prevailing laws/regulations.*

In carrying out its operational activities, PNM has four business segments, namely Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar), Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM), Management Services, and the Partnership Program. The level of collectability in the four business segments only includes financing channeled through PNM Mekaar and ULaMM, as disclosed as follows:

Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM)

Tingkat kolektibilitas ULaMM tahun 2021 sebesar 1,96% atau menurun 0,61% dibandingkan tahun 2020 sebesar 2,57%.

Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM)

The ULaMM collectability rate in 2021 was 1.96% or a decrease of 0.61% compared to 2020 of 2.57%.

Tabel Kolektibilitas ULaMM*Table of ULaMM Collectability*

(dalam miliar / in billion)

Uraian	2021		2020		% Kenaikan/Penurunan % Increase/Decrease		Description
	Outstanding (OS)	Non Performing Loan (NPL)	Outstanding (OS)	Non Performing Loan (NPL)	Outstanding (OS)	Non Performing Loan (NPL)	
Industri Pengolahan	218,21	2,17%	484,46	3,14%	(266,24)	(0,97%)	Processing Industry
Jasa-jasa	151,33	3,28%	261,36	2,23%	(110,03)	1,06%	Services
Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan	892,31	1,21%	770,75	1,57 %	121,56	(0,36%)	Finance, Real Estate, and Company Services
Konstruksi	17,76	1,38%	20,12	1,83%	(2,36)	(0,45%)	Construction
Listrik, Gas, dan Air Bersih	10,32	1,03%	9,53	1,13%	0,79	(0,10%)	Electricity, Gas, and Clean Water
Pengangkutan dan Komunikasi	103,63	1,30%	84,74	3,37%	18,89	(2,06%)	Transportation and Communication
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	5.069,92	2,08%	4.850,31	2,64 %	219,61	(0,56%)	Trade, Hotel, and Restaurant
Pertambangan dan Penggalian	23,56	0,52%	9,65	0,34 %	13,91	0,18%	Mining and Excavation
Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	842,97	1,89%	592,57	2,96 %	250,40	(1,07%)	Agriculture, Farming, Forestry, and Fishery
Lain-lain	1,17	0,00%	1,84	0%	(0,67)	0,00%	Others
Jumlah	7.331,18	1,96%	7.085,34	2,57%	245,84	(0,61%)	Total

Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar)

Tingkat kolektibilitas PNM Mekaar tahun 2021 sebesar 0,09%, menurun 0,04% dibandingkan tahun 2020 sebesar 0,04%.

Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar)

The collectability rate of PNM Mekaar in 2021 is 0.09%, a decrease of 0.04% compared to 0.04% in 2020.

Tabel Kolektibilitas PNM Mekaar*Table of PNM Mekaar Collectability*

(dalam miliar / in billion)

Uraian	2021		2020		% Kenaikan/Penurunan % Increase/Decrease		Description
	Outstanding (OS)	Non Performing Loan (NPL)	Outstanding (OS)	Non Performing Loan (NPL)	Outstanding (OS)	Non Performing Loan (NPL)	
PNM Mekaar	25.939,16	0,09%	15.389,59	0,13%	10.549,58	(0,04%)	PNM Mekaar

Struktur Modal

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal dan Dasar Pemilihan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Kebijakan PNM ketika mengelola modal adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha PNM dan entitas anak serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. PNM mengelola struktur permodalan dan memastikan struktur modal dan pengembalian pemegang saham yang optimal, dengan mempertimbangkan kebutuhan modal masa depan dan efisiensi modal PNM dan entitas anak, profitabilitas, proyeksi arus kas operasional, proyeksi belanja modal dan proyeksi peluang usaha yang strategis. Dalam rangka mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, PNM dan entitas anak dapat melakukan pemupukan laba ditahan dan mengupayakan penambahan modal disetor dari pemegang saham.

PNM memonitor permodalan berdasarkan *gearing ratio*. Rasio ini dihitung dengan membagi jumlah utang bersih dengan jumlah modal. Utang bersih dihitung dari total pinjaman dikurangi dengan kas dan setara kas. Jumlah modal dihitung dari "ekuitas" seperti yang ada pada laporan posisi keuangan.

Rincian Struktur Modal

Kebijakan keuangan PNM selama tahun 2021 dan 2020 adalah mempertahankan *gearing ratio* sesuai dengan persyaratan yang berlaku sesuai dengan POJK No.16/POJK.05/2019 pasal 13 ayat 1, PNM wajib memenuhi rasio permodalan melalui perhitungan *gearing ratio* paling tinggi 10 (sepuluh) kali.

Gearing ratio pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel Gearing Ratio
Table of Gearing Ratio

(dalam jutaan rupiah / in IDR million)

Uraian	2021	2020	Description
Total pinjaman	31.405.119	22.570.583	Total borrowings
Dikurangi: kas dan setara kas	(4.020.609)	(4.462.197)	Less: cash and equivalents
Utang bersih	27.384.510	18.108.386	Net debt
Total ekuitas	6.437.954	5.646.662	Total Equity
<i>Gearing Ratio</i> (dalam kali)	4,25	3,24	<i>Gearing Ratio</i> (in times)
<i>Debt to Equity Ratio</i> (dalam kali)	4,88	4,04	<i>Debt to Equity Ratio</i> (in times)

Capital Structure

Management Policy on Capital Structure and Basis of Selection of Management Policy on Capital Structure

PNM's policy when managing capital is to maintain the continuity of the business of the Company and its subsidiaries and maximize benefits for shareholders and other stakeholders. PNM manages the capital structure and ensures optimal capital structure and shareholder returns, taking into account future capital requirements and capital efficiency of the Company and its subsidiaries, profitability, operating cash flow projections, projected capital expenditures and projections of strategic business opportunities. In order to maintain or adjust the capital structure, the Company and its subsidiaries can accumulate retained earnings and seek additional paid-in capital from shareholders.

PNM monitored capital based on *gearing ratio*. This ratio was calculated by dividing the amount of net debt by the amount of capital. Net debt was calculated from the total loan minus cash and cash equivalents. The amount of capital was calculated from "equity" as shown in the statement of financial position.

Details of Capital Structure

PNM's financial policy during 2021 and 2020 is to maintain the *gearing ratio* in accordance with applicable requirements in accordance with POJK No.16/POJK.05/2019 article 13 paragraph 1, PNM is required to meet the capital ratio through the calculation of the *gearing ratio* of a maximum of 10 (ten) times.

The *gearing ratio* as of December 31, 2021 and 2020 is as follows:

Komposisi struktur modal yang dimiliki PNM tahun 2021 sebesar 85,27% berasal dari liabilitas dan 14,73% berasal dari ekuitas. Persentase struktur modal tahun 2021 yang didanai dengan utang bank dan lembaga keuangan sebesar 25,88%, surat utang jangka menengah dan sukuk sebesar 13,93%, utang obligasi sebesar 23,06% dan pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan lembaga kredit luar negeri sebesar 8,98%.

The composition of the capital structure owned by PNM in 2021 of 85.27% came from liabilities and 14.73% was from equity. The percentage of capital structure in 2021 funded by bank and financial institution loans was 25.88%; medium-term debt securities and sukuk were 13.93%; bonds payable was 23.06%; and loans from the Government of the Republic of Indonesia and foreign credit institutions were 8.98%.

Tabel Rincian Struktur Modal
Table of Details of Capital Structure

(dalam jutaan rupiah / in IDR million)

Uraian	2021		2020		Pertumbuhan Growth		Description
	(Rp)	Komposisi (%) Composition	(Rp)	Komposisi (%) Composition	(Rp)	(%)	
Liabilitas	37.274.341	85,27	26.077.979	82,36	11.196.362	42,93	Liabilities
Utang Berbunga	31.405.119	71,85	22.570.583	71,28	8.834.536	39,14	Interest bearing debt
Utang bank dan lembaga keuangan	11.313.396	25,88	6.224.831	19,66	5.088.565	81,75	Borrowings from banks and financial institutions
Surat utang jangka menengah dan sukuk	6.090.000	13,93	3.890.500	12,29	2.199.500	56,54	Medium term notes and sukuk
Utang obligasi	10.078.283	23,06	9.413.490	29,73	664.793	7,06	Bond debt
Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan lembaga kredit luar negeri	3.923.440	8,98	3.041.762	9,61	881.678	28,99	Borrowings from the Government of the Republic of Indonesia and foreign credit institutions
Ekuitas	6.437.954	14,73	5.586.910	17,64	851.044	15,23	Equity
Total Liabilitas dan Ekuitas	43.712.295	100,00	31.664.889	100,00	12.047.406	38,05	Total Liabilities and Equity

Ikatan Material Terkait Investasi Barang Modal

Pada tahun 2021, PNM tidak memiliki ikatan material untuk investasi barang modal. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi mengenai: nama pihak yang melakukan ikatan, tujuan dari ikatan tersebut, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut, mata uang yang menjadi denominasi dan langkah-langkah yang direncanakan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.

Investasi Barang Modal

Investasi berupa barang modal (*capital expenditure*) merupakan aktivitas pengeluaran dana yang digunakan untuk membeli sejumlah aset tetap atau menambah nilai aset tetap yang diharapkan dapat memberikan nilai manfaat di masa depan.

Material Commitment for Capital Goods Investment

In 2021, PNM has no material commitments for investment in capital goods. Therefore, there was no information regarding: the name of the party engaging in the contract, the purpose of the bond, the source of funds expected to fulfill these ties, the currency to be denominated and the measures planned to protect the risk from foreign currency positions which is related.

Capital Goods Investment

Investment in the form of capital goods (*capital expenditure*) became an activity of spending funds that was used to buy a number of fixed assets or add value to fixed assets that were expected to provide future benefits.

Jenis dan Nilai Investasi Barang Modal

Jenis dan investasi barang modal disajikan dalam tabel berikut.

Tabel Jenis dan Nilai Investasi Barang Modal
Table of Types and Investment Value of Capital Goods

(dalam miliar Rupiah / in IDR billion)

Jenis	2021				2020				Type
	Realisasi 2021 Realization 2021	RKAP 2021	Sisa Capex Remaining Capex	Persentase Percentage	Realisasi 2021 Realization 2020	RKAP 2021	Sisa Capex Remaining Capex	Persentase Percentage	
	a	b	c(b-a)	d(a/b)	a	b	c(b-a)	d(a/b)	
Tanah dan Bangunan	658,05	659,50	1,45	99,78%	-	-	-	-	Land and Building
Peralatan Kantor	17,07	27,53	10,46	62,02%	13,50	14,30	0,80	94,41%	Office equipment
Leasehold	33,89	41,62	7,73	81,43%	15,62	21,87	6,25	71,42%	Leasehold
Furniture Fixture	34,25	68,43	34,18	50,05%	19,35	30,18	11,46	62,80%	Furniture Fixture
Hardware dan Software	102,37	132,28	29,91	77,39%	84,29	164,54	80,25	51,23%	Hardware dan Software
Total	845,64	929,36	83,72	91,00%	132,76	231,52	98,76	57,34%	Total

Tujuan Investasi Barang Modal

Investasi barang modal ini bertujuan mendukung kelancaran kegiatan operasional PNM untuk meningkatkan aset produktif PNM.

Informasi Keuangan yang Telah Dilaporkan yang Mengandung Kejadian yang Sifatnya Luar Biasa dan Jarang Terjadi

PNM ditunjuk sebagai BUMN Khusus, karena PNM adalah BUMN yang bergerak di bidang pemberdayaan perekonomian rakyat melalui pemberian pinjaman permodalan dan/atau pembinaan kepada usaha mikro dan kecil. Tujuan dari penyaluran dana Program Kemitraan melalui BUMN Khusus adalah karena masih terdapat dana Program Kemitraan yang tidak tersalurkan sehingga penyaluran dana tersebut belum optimal serta kurangnya kompetensi BUMN Non Jasa Keuangan dalam penyaluran dana Program Kemitraan pada usaha mikro dan kecil.

Types and Investment Value of Capital Goods

Types and investments of capital goods are presented in the following table.

Investment Objectives of Capital Goods

This investment in capital goods aims to support the smooth operation of PNM.

Material Information Concerning Investment, Expansion, Divestment, Acquisition, or Restructuring of Debt and Capital

PNM was appointed as a Special BUMN, because PNM is a BUMN that is engaged in empowering the people's economy through providing capital loans and/or coaching to micro and small businesses. The purpose of distributing Partnership Program funds through Special SOEs is because there are still Partnership Program funds that are not channeled so that the distribution of these funds is not optimal and the lack of competence of Non-Financial Services SOEs in distributing Partnership Program funds to micro and small businesses.

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PNM dan PT Bumi Suksesindo Nomor 120/PKS/PNM/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Hibah Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Guna Pengembangan Usaha Mikro, Kecil melalui Penyaluran Modal Mikro serta Pelatihan dan Pendampingan Pengembangan Usaha; maka PNM berhak untuk menerima hibah atas Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dari PT Bumi Suksesindo sebesar Rp1.000.000.000 yang akan disampaikan dalam 2 (dua) tahap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian.

Based on the Cooperation Agreement between PNM and PT Bumi Suksesindo Number 120/PKS/PNM/VIII/2021 dated August 2, 2021 concerning Grants for Community Development and Empowerment Funds for the Development of Micro, Small Enterprises through Micro Capital Distribution and Business Development Training and Assistance; then PNM is entitled to receive a grant for the Community Development and Empowerment Fund from PT Bumi Suksesindo in the amount of Rp1,000,000,000 which will be delivered in 2 (two) stages in accordance with the terms and conditions stipulated in the agreement.

Tabel Hibah Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
Tabel of Grant for the Community Development and Empowerment Fund

(dalam miliar Rupiah / in IDR billion)

Uraian Description	31 Desember 2021 December 31, 2021	31 Desember 2020 December 31, 2020
Pihak Berelasi <i>Related Party</i>		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	60.000	-
PT Bank Mandiri (Persero)Tbk	-	127.518
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	-
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	10.000
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tbk	-	1.776
Perum LPPNPI	-	100
Subjumlah <i>Subtotal</i>	60.000	189.394
Pihak Ketiga <i>Third Party</i>		
PT Bumi Suksesindo	1.000	-
Subjumlah <i>Subtotal</i>	1.000	-
Jumlah <i>Total</i>	61.000	189.394

Subsidi Bunga/Margin

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 138/PMK.05/2020 tanggal 28 September 2020 perihal Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah akan memberikan subsidi bunga/margin untuk nasabah PNM Mekaar dan ULaMM yang terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) No. 138/PMK.05/2020 tanggal 28 September 2020.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 150/PMK.05/2021 tanggal 25 Oktober 2021 perihal Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah akan memberikan subsidi bunga/margin untuk nasabah Mekaar dan ULaMM yang terdampak Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19).

Interest Subsidy/Margin

Based on the Regulation of the Minister of Finance No. 138/PMK.05/2020 dated 28 September 2020 regarding Procedures for Providing Interest Subsidy/Margin Subsidy in order to Support the Implementation of the National Economic Recovery Program, the Government will provide interest/margin subsidies for PNM Mekaar and ULaMM customers affected by the Corona Virus Disease 2019 Pandemic (COVID-19) No. 138/PMK.05/2020 dated 28 September 2020.

Based on the Regulation of the Minister of Finance No. 150/PMK.05/2021 dated October 25, 2021 regarding Procedures for Providing Interest Subsidy/Margin Subsidy in order to Support the Implementation of the National Economic Recovery Program, the Government will provide interest/margin subsidies for Mekaar and ULaMM customers affected by the Corona Virus Disease (COVID-19) pandemic. 19).

Pada tanggal 19 November 2021 Pemerintah telah menyalurkan subsidi bunga/subsidi margin kepada PNM sebesar Rp930.226.274.768. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 2021 PNM telah menyalurkan seluruh subsidi bunga/subsidi margin tersebut melalui dana cadangan angsuran untuk nasabah ULamm dan sebagai Uang Titipan Nasabah atau Uang Subsidi Bunga untuk nasabah Mekaar.

PNM telah menerima subsidi bunga/subsidi margin dari Pemerintah berdasarkan tanggal penerimaan yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel Subsidi Bunga/Margin

Tabel of Interest Subsidy/Margin

(dalam miliar Rupiah / in IDR billion)

Tanggal	Nominal	Date
26 Oktober 2020	119.613	October 26, 2020
4 Desember 2020	914.968	December 4, 2020
Total Penerimaan Subsidi Bunga/Margin 2020	1.034.581	Total Interest Subsidy Receipt/Margin in 2020
19 Desember 2021	930.226	December 19, 2021
Total Penerimaan Subsidi Bunga/Margin 2021	930.226	Total Interest Subsidy Receipt/Margin in 2021
24 Januari 2022	900.096	January 24, 2022
Total Penerimaan Subsidi Bunga/Margin 2022	900.096	Total Interest Subsidy Receipt/Margin in 2022

Dampak Perubahan Harga Terhadap Penjualan atau Pendapatan Bersih Perusahaan

Selama tahun 2021, PNM tidak terkena dampak yang signifikan terhadap perubahan harga penjualan atau pendapatan bersih PNM.

Komponen-Komponen Substansi dari Pendapatan dan Beban Lainnya

Selama tahun 2021, tidak terdapat komponen-komponen dari pendapatan dan beban lainnya yang nilainya sama atau lebih 20% dari total nilai pendapatan dan beban lainnya.

Peningkatan/Penurunan Material dari Penjualan/Pendapatan Bersih

Terdapat peningkatan material dari pendapatan bersih pada tahun 2021. Pendapatan bunga dan syariah bersih tahun 2021 sebesar Rp8,43 triliun, meningkat 50,31% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp5,61 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari pertumbuhan pendapatan pembiayaan Mekaar sebesar Rp2,75 triliun atau 65,87%.

On November 19, 2021, the Government has distributed interest subsidies/margin subsidies to PNM in the amount of IDR930,226,274,768. Furthermore, on December 31, 2021, PNM has distributed the entire interest subsidy/margin subsidy through an installment reserve fund for ULamm customers and as Customer Deposit or Interest Subsidy for Mekaar customers.

PNM has received interest subsidy/margin subsidy from the Government based on the date of receipt which is described as follows:

Impact of Changes in Price on Company Sales or Net Income

During 2021, PNM will not have a significant impact on changes in sales prices or PNM's net income.

Substance Components of Other Income and Expenses

During 2021, there are no other components of income and expenses whose value is equal to or more than 20% of the total value of other income and expenses.

Material Increase/Decrease from Net Sales/Income

There is a material increase in net income in 2021. Net interest and sharia income in 2021 is IDR8.43 trillion, an increase of 50.31% compared to 2020 which was IDR5.61 trillion. This increase was mainly due to Mekaar's financing income growth of IDR2.75 trillion or 65.87%.

Tabel Pendapatan Bunga dan Syariah Bersih
Tabel of Interest and Sharia Revenue - Net

(dalam jutaan rupiah / in IDR million)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan Growth		Description
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	
Pendapatan pembiayaan Mekaar	6.926.855	4.176.089	2.750.766	65,87	Income from Mekaar financing
Pendapatan dari Unit ULaMM	1.418.481	1.308.140	110.342	8,43	Income from ULaMM
Pendapatan dari modal ventura	74.848	115.038	(40.190)	(34,94)	Income from ventura
Pendapatan dari pembiayaan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah serta Lembaga Keuangan Mikro	3.974	4.152	(178)	(4,29)	Income from micro, small and medium, and microfinance institution credit financing
Pendapatan pembiayaan Mikro Kecil Menengah	997	1.846	(848)	(45,96)	Income from Micro, Small, Medium financing
Pendapatan bunga dan syariah - bersih	8.425.156	5.605.264	2.819.891	50,31	Interest and sharia revenue - net

Provisi dan Kontinjensi

Pada tanggal 31 Desember 2021, PNM memiliki kontinjensi sebagai berikut:

1. Terdapat 89 kasus perkara pidana dengan debitur terdiri dari:
 - a. 67 kasus dalam tahap penyelidikan kepolisian.
 - b. 22 kasus dalam tahap penyidikan oleh pihak kepolisian.
2. Terdapat 105 kasus perkara perdata dengan debitur:
 - a. 2 kasus dalam proses Peninjauan Kembali.
 - b. 26 kasus dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.
 - c. 14 kasus dalam proses banding di Pengadilan Tinggi.
 - d. 63 kasus dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri.

PNM mengakui dampak atas kontinjensi terkait kasus-kasus yang dihadapi PNM dengan membentuk cadangan kerugian operasional dan mengakui beban pengendalian risiko sebagai bagian dari beban usaha pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp36.728.188.149 dan Rp28.943.680.000.

Perjanjian-Perjanjian

Uraian perjanjian-perjanjian pada tahun 2021 disajikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor 30 tanggal 20 April 2021, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman/Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp1.500.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana dan akan berakhir di bulan April 2024. Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor 32 tanggal 20 April 2021, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman/Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp1.000.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4%.

Provisions and Contingencies

As of December 31, 2021, PNM has the following contingencies:

1. There were 89 criminal cases with debtors consisting of:
 - a. 67 cases were under first step of police investigation.
 - b. 22 cases were under second step police investigation.
2. There were 105 civil cases with debtors:
 - a. 2 cases under review.
 - b. 26 cases were in the cassation process at the Supreme Court.
 - c. 14 cases were on appeal at the High Court.
 - d. 63 cases were in the process of being examined at the District Court.

PNM recognized the impact of contingencies related to the cases faced by PNM by establishing an operating loss reserve and recognizing risk control expenses as part of operating expenses for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounting to IDR36,728,188,149 and IDR28,943,680,000, respectively.

Agreements

The descriptions of the agreements in 2021 are presented as follows:

1. Based on the Deed of Loan/Financing Agreement Number 30 dated April 20, 2021, the Government Investment Center provided a Loan/Financing facility to the Company in the amount of IDR1,500,000,000,000 with an interest rate of 4% effective per year with a loan term of 36 months without grace period from the date of disbursement of funds and would expire in April 2024. Based on the Deed of Loan/Financing Agreement Number 32 dated April 20, 2021, the Government Investment Center provided a Loan/Financing facility to the Company in the amount of IDR1,000,000,000,000 with an interest rate of 4%.

2. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 42 tanggal 30 September 2021, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp750.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 8,00% per tahun. Jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 30 September 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
 3. Berdasarkan Akta Perjanjian Mudharabah Muqayaddah No. 87 tanggal 30 Juni 2021, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - melalui Unit Syariah nya memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp500.000.000.000. Nisbah bagi hasil untuk PT Bank BTN 18,50% dan Perusahaan 81,50% setara IRR 9,00% per tahun. Jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani akad dan akan berakhir pada 30 Juni 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan untuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya Mekaar syariah.
 4. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 9 tanggal 12 Maret 2021, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp500.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 8,75% per tahun. Jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 12 Maret 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
 5. Berdasarkan Akta Perjanjian No. 458 tanggal 16 November 2021 Bank BNI memberikan tambahan fasilitas sebesar Rp250.000.000.000 dengan bunga 8,5% sehingga total plafond menjadi Rp1.000.000.000.000, dengan jangka waktu fasilitas 36 bulan. Dana tersebut untuk pembiayaan ULaMM dan Mekaar.
 6. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 37 tanggal 23 Februari 2021, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp1.000.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 8,50% fixed per tahun dengan jangka waktu pinjaman 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 22 Februari 2023. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
 7. Berdasarkan Perjanjian Modal Kerja No. 71 tanggal 23 Desember 2021, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) W/A 4 dan W/A 5 dengan plafon kredit masing-masing sebesar Rp2.000.000.000.000. Jangka waktu maksimal 24 bulan dan 36 bulan yang masing-masing ditujukan untuk tambahan modal kerja penyaluran kredit Bisnis Mekaar dan replacement pinjaman existing dari bank lain dengan suku bunga sebesar 5%.
2. *Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 42 dated September 30, 2021, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk provided a Working Capital Credit facility to the Company amounting to IDR750,000,000,000 with an interest rate of 8.00% per annum. The term of the loan was 36 months from the signing of the credit agreement and would expire on September 30, 2024. The loan was intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).*
 3. *Based on the Deed of Mudharabah Muqayaddah Agreement No. 87 dated June 30, 2021, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - through its Sharia Unit provided a Working Capital facility to the Company in the amount of IDR500,000,000,000,000. The profit sharing ratio for PT Bank BTN was 18.50%, and the Company was 81.50%, which was equivalent to an IRR of 9.00% per year. The term of the loan was 36 months from the signing of the contract and would expire on June 30, 2024. The loan was intended for financing based on sharia principles to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), especially Mekaar sharia.*
 4. *Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 9 dated March 12, 2021, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk provided a Working Capital Credit facility to the Company amounting to IDR500,000,000,000 with an interest rate of 8.75% per annum. The loan period was 12 months from the signing of the credit agreement and would expire on March 12, 2022. The loan was intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).*
 5. *Based on the Deed of Agreement No. 458 dated November 16, 2021, Bank BNI provided an additional facility of IDR250,000,000,000 with an interest rate of 8.5%, bringing the total ceiling to IDR1,000,000,000,000, with a term of 36 months. The funds were used to finance ULaMM and Mekaar.*
 6. *Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 37 dated February 23, 2021, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk provided a Working Capital Credit facility to the Company amounting to IDR1,000,000,000,000 with an interest rate of 8.50% fixed per year with a loan term of 24 months from the signing of the credit agreement and would expires on February 22, 2023. The loan was intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).*
 7. *Based on the Working Capital Agreement No. 71 dated December 23, 2021, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk provided Working Capital Credit (KMK) W/A 4 and W/A 5 facilities with a credit ceiling of IDR2,000,000,000,000,000 each. The maximum tenor was 24 months and 36 months, each of which was intended for additional working capital for Mekaar Business lending and replacement of existing loans from other banks with an interest rate of 5%.*

8. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 30 tanggal 9 Juni 2021, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) memberikan fasilitas kredit modal kerja dengan plafon maksimal sebesar Rp200.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 8,50% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 48 bulan dan akan berakhir pada tanggal 9 Juni 2025. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil.
 9. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 10 Mei 2021 antara PT Bank DKI dengan perusahaan, perusahaan dengan *plafon* Rp500.000.000.000, jangka waktu 36 bulan serta tingkat suku bunga fixed sebesar 9,25% per tahun dan akan berakhir pada 10 Mei 2024. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM dan Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x dan *non performing loan gross* maksimal 5%.
 10. Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 9 tanggal 10 Mei 2021, PT Bank DKI - melalui Unit Usaha Syariah memberikan pinjaman dengan *plafon* sebesar Rp500.000.000.000. Jangka waktu fasilitas pinjaman maksimal 42 bulan dengan jangka waktu pelunasan maksimal 36 bulan dengan nisbah bagi hasil sebesar 9,25% dan akan berakhir pada 10 Mei 2024. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar Syariah.
 11. Berdasarkan akta perjanjian kredit No.12 tanggal 22 September 2021, PT Bank Permata Tbk memberikan fasilitas kredit modal kerja dengan plafond maksimal sebesar Rp300.000.000.000 dengan bagi hasil sebesar 8,35% per tahun dan akan berakhir pada bulan September 2022. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar.
 12. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.5 tanggal 15 April 2021, PT Bank Permata Tbk memberikan fasilitas kredit modal kerja dengan plafond maksimal sebesar Rp500.000.000.000 dengan bagi hasil sebesar 8,75% per tahun dan akan berakhir pada bulan April 2022. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM Syariah.
 13. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 31 tanggal 15 November 2021, PT Bank Mega Tbk memberikan fasilitas kepada Perusahaan sebesar Rp1.000.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 8% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan untuk Mekaar.
 14. Berdasarkan Akta Perjanjian Penyediaan Fasilitas (Wa'd) No. 33 tanggal 28 November 2019, PT Bank Mega Syariah memberikan fasilitas Mudharabah kepada Perusahaan sebesar Rp235.000.000.000 dengan bagi hasil sebesar 11% fixed per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan untuk Mekaar dan 36 bulan untuk ULaMM.
 15. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 59 tanggal 23 Maret 2021, PT Bank Victoria International Tbk memberikan fasilitas Kredit *Money Market Line* kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan suku bunga 9% dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 12 bulan sejak penandatanganan kredit dan akan berakhir pada bulan Maret 2022.
8. *Based on the Deed of Credit Agreement No. 30 dated June 9, 2021, the Indonesian Export Financing Agency (LPEI) provided a working capital credit facility with a maximum limit of IDR200,000,000,000 with an interest rate of 8.50% per annum with a loan term of 48 months and would expire on June 9, 2025 The funds are for financing micro and small businesses.*
 9. *Based on the Deed of Credit Agreement No. 11 dated May 10, 2021 between PT Bank DKI and companies with a ceiling of IDR500,000,000,000, a period of 36 months and a fixed interest rate of 9.25% per year and would expire on May 10, 2024. The funds were for micro business financing and small businesses through ULaMM, and the Company was required to maintain a maximum gearing ratio of 10x and a maximum gross Non-Performing Loan of 5%.*
 10. *Based on the Letter of Credit Agreement No. 9 dated May 10, 2021, PT Bank DKI - through the Sharia Business Unit provided a loan with a ceiling of IDR500,000,000,000,000. The loan facility had a maximum term of 42 months with a maximum repayment period of 36 months with a profit-sharing ratio of 9.25% and would expire on May 10, 2024. The funds were for financing micro and small businesses through Mekaar Syariah.*
 11. *Based on the credit agreement deed No.12 dated September 22, 2021, PT Bank Permata Tbk provides a working capital credit facility with a maximum limit of IDR300,000,000,000 with a profit sharing of 8.35% per annum and would expire in September 2022. The funds were for micro and small business financing through Mekaar.*
 12. *Based on the Deed of Credit Agreement No. 5 dated April 15, 2021, PT Bank Permata Tbk provided a working capital credit facility with a maximum limit of IDR500,000,000,000 with a profit sharing of 8.75% per annum and would expire in April 2022. The funds are for micro and small business financing through Mekaar and ULaMM Syariah.*
 13. *Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement Number 31 dated November 15, 2021, PT Bank Mega Tbk provided the Company with a facility of IDR1,000,000,000,000 with an interest rate of 8% per year with a loan term of 12 months for Mekaar.*
 14. *Based on the Deed of Facility Provision Agreement (Wa'd) No. 33 dated November 28, 2019, PT Bank Mega Syariah provided Mudharabah facility to the Company in the amount of IDR235,000,000,000 with a profit sharing of 11% fixed per year with a loan term of 12 months for Mekaar and 36 months for ULaMM.*
 15. *Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 59 dated March 23, 2021, PT Bank Victoria International Tbk provided a Money Market Line Credit facility to the Company amounting to IDR100,000,000,000,000 with an interest rate of 9% with a term of 12 months from the signing of the loan and would expire in March 2022.*

16. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 82 tanggal 30 Juni 2021, PT Bank JTrust Indonesia Tbk memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas 18 bulan dan tenor angsuran 12 bulan dan akan berakhir pada 30 Juni 2022.

16. Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 82 dated June 30, 2021, PT Bank JTrust Indonesia Tbk provided a Working Capital facility to the Company amounting to IDR100,000,000,000,000 with a term of 18 months and an installment tenor of 12 months and would expire on 30 June 2022.

Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Sampai dengan akhir Laporan Tahunan ini disusun tidak terdapat uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.

Material Information and Facts After the Accountant's Report Date

Until the end of this Annual Report, there is no description of important events after the date of the accountant's report including their impact on future business performance and risks.

Prospek Usaha dan Strategi ke Depan Tahun 2022

Perbaikan ekonomi global saat ini tertahan seiring dengan peningkatan penyebaran COVID-19 berdampak pada tertahannya aktivitas ekonomi global. Perekenomian global diperkirakan tumbuh 4,4% pada tahun 2022. Sementara itu, ketidakpastian pasar keuangan global masih terus berlanjut sejalan dengan risiko yang masih mengemuka antara lain terkait dengan peningkatan penyebaran COVID-19. Langkah bersama untuk menghadapi gangguan dalam mata rantai pasokan global yaitu berjalannya agenda Presidensi G20 Indonesia pada tahun 2022 yang akan terus mendorong pemulihan ekonomi global yang lebih kuat dan berimbang dengan fokus pada upaya mendorong produktivitas, meningkatkan ketahanan dan stabilitas ekonomi, serta memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif.

Business Prospects and Future Strategies in 2022

Improvements in the global economy are currently being held back in line with the increasing spread of COVID-19, which had an impact on the restraint of global economic activity. The global economy was forecasted to grow 4.4% in 2022. Meanwhile, uncertainty in global financial markets continued in line with emerging risks related to the increasing spread of COVID-19. The joint step to deal with disruptions in the global supply chain was the implementation of the agenda of the Indonesian G20 Presidency in 2022 which would continue to promote a stronger and more balanced global economic recovery with a focus on efforts to boost productivity, increase economic resilience and stability, and ensure sustainable and inclusive growth.

Kendati demikian perbaikan ekonomi domestik berlanjut dengan stabilitas yang terjaga, ekonomi domestik terus membaik pada Triwulan II 2021 tercatat tumbuh positif dan tinggi sebesar 7,07% (YoY), meningkat tajam dari kontraksi pada Triwulan sebelumnya sebesar 0,71% (YoY). Ekonomi Indonesia berhasil melanjutkan pertumbuhan positif di Triwulan IV 2021 sebesar 5,02% (YoY). Pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh kinerja positif seluruh Lapangan Usaha (LU) dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 berada di kisaran 4,7%-5,5%.

Nevertheless, domestic economic improvement continued with maintained stability, the domestic economy continued to improve in the second quarter of 2021, which recorded positive and high growth of 7.07% (YoY), a sharp increase from the contraction in the previous quarter of 0.71% (YoY). The Indonesian economy managed to continue its positive growth in Q4 2021 of 5.02% (YoY). Economic growth was also supported by the positive performance of all Business Fields (LU) and increased economic growth in all regions of Indonesia. Bank Indonesia predicts that Indonesia's economic growth in 2022 would be in the range of 4.7%-5.5%.

Berbagai kebijakan strategis terus diperkuat untuk pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki peran strategis terhadap perekonomian melalui pilar korporatisasi, kapasitas, dan pembiayaan sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif. Upaya melakukan transformasi UMKM ditempuh melalui pemanfaatan teknologi *digital* untuk meningkatkan daya tahan yang lebih tinggi dan kapasitas yang lebih produktif dan inovatif. Kebijakan pengembangan UMKM juga didukung sinergi yang terus diperkuat antara Bank Indonesia dengan Pemerintah, lembaga keuangan, dan para penggiat usaha. Perekonomian Indonesia diperkirakan meningkat lebih tinggi pada tahun 2022 sejalan dengan membaiknya permintaan domestik. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 akan mencapai 4,7%-5,5%, sejalan dengan akselerasi konsumsi swasta dan investasi, di tengah tetap terjaganya belanja fiskal Pemerintah dan ekspor, meski risiko kenaikan kasus COVID-19 perlu terus diwaspadai.

Akselerasi pengembangan UMKM perlu didukung transformasi berbasis *digital*. Perkembangan ekonomi dan keuangan *digital* yang pesat telah menumbuhkan berbagai *platform digital* yang menawarkan inovasi dalam kegiatan produksi, konsumsi, kolaborasi dan berbagi. Digitalisasi tersebut memberikan peluang kepada UMKM untuk beradaptasi dan bertransformasi untuk bisa bertahan dan bangkit serta tumbuh lebih tinggi, disertai dengan peningkatan korporatisasi, kapasitas, dan pembiayaan. Perluasan akses UMKM terhadap digitalisasi proses produksi dan layanan, inovasi produksi dan layanan pembiayaan akan mendorong UMKM lebih maju dengan fasilitasi dan kemudahan untuk ekspansi usaha, sekaligus mampu berdaya saing di era kenormalan baru pasca pandemi COVID-19. Ke depan, optimalisasi peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi perlu terus diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, melalui adaptasi perubahan *digital*.

Various policies continue to be strengthened for the development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) which have a strategic role in the economy through the pillars of corporatization, capacity and financing so as to support strong and inclusive economic growth. Efforts to transform MSMEs are pursued through the use of digitalization to increase higher resilience and a more productive and innovative capacity. The MSME development policy is also supported by a synergy that continues to be strengthened between Bank Indonesia and the Government, financial institutions and business activists. The Indonesian economy is forecasted to accelerate further in 2022 in line with improving domestic demand. Bank Indonesia predicts that Indonesia's economic growth in 2022 will reach 4.7%-5.5%, in line with the acceleration of private consumption and investment, amid maintained government fiscal spending and exports, although the risk of rising COVID-19 cases needs to be monitored closely.

Accelerating the development of MSMEs needs to be supported by digital-based transformation. The rapid development of the digital economy and finance has spawned various digital platforms that offer innovation in production, consumption, collaboration and sharing. This digitalization provides opportunities for MSMEs to adapt and transform so that they can survive and rise and grow higher, accompanied by increased corporatization, capacity, and financing. One of the important lessons in the COVID-19 pandemic is the acceleration of digital use in meeting consumption needs, production activities, and investment transactions. Thus, the use of digital platforms can encourage stronger MSMEs through more productive and innovative capacity building, facilitating the expansion of MSME access to marketplaces, industries and financial institutions. Expanding MSME access to digitizing production processes and services, production innovation and financing services will push MSMEs forward with facilitation and convenience for business expansion, as well as being able to compete in the new era of normality after the COVID-19 pandemic. Going forward, optimizing the role of MSMEs as the backbone of the economy needs to be directed towards efforts to increase productivity and inclusive economic growth, through adaptation to digital change.

Sumber / Source: Laporan Perekonomian Indonesia 2021, Bank Indonesia / Indonesia Economic Report 2021, Bank Indonesia

Berbagai perkiraan terhadap membaiknya kondisi perekonomian, baik perekonomian global, perekonomian nasional, PNM memiliki peluang untuk tumbuh. Peluang yang dimiliki PNM antara lain sebagai berikut:

1. *Market* UMKM terus bertumbuh seiring dengan membaiknya perekonomian nasional.
2. Kebijakan Pemerintah yang sangat mendukung berkembangnya ekonomi kerakyatan, khususnya bagi UMKM.

Various estimates of the improvement in economic conditions, both global economy, national economy, PNM have opportunities to grow. PNM has the following opportunities:

1. *The MSME market continues to grow even though economic conditions tend to decline*
2. *Government policies that are very supportive of the development of a populist economy, especially for MSMEs.*

Berdasarkan asumsi yang telah dijabarkan di atas disertai adanya berbagai peluang, PNM optimis untuk dapat senantiasa meningkatkan kinerjanya secara maksimal dalam mencapai sasaran yang ditargetkan. Dengan kata lain, PNM memiliki prospek usaha yang baik. Hal ini di dasarkan pada kekuatan yang dimiliki oleh PNM yaitu:

1. *Capacity building* dengan pengembangan kapasitas usaha menjadi *uniqueness* PNM dengan produk kompetitor.
2. Fleksibilitas untuk dapat masuk ke sektor riil melalui PNM *Venture Capital*.
3. Masih terbuka peluang untuk mengembangkan jaringan hingga seluruh Indonesia dengan mengaplikasikan sinergi ultra mikro melalui jaringan *co-location Holding Ultra Mikro*.
4. PNM adalah satu-satunya BUMN lembaga keuangan non bank yang mempunyai *core business* pembiayaan kepada pengusaha ultra mikro dan UMK.
5. Hasil kinerja PNM yang baik yang dicapai pada tahun 2021 serta tergabungnya PNM dalam *Holding Ultra Mikro*, meningkatkan kepercayaan kreditur untuk mempermudah akses pendanaan.
6. Pada tahun 2022 diharapkan kondisi ekonomi pasca COVID-19 kembali tumbuh termasuk untuk sektor UMKM, hal ini didasari oleh mulai membaiknya serapan pembiayaan oleh nasabah eksisting serta meningkatnya jumlah nasabah terutama nasabah perempuan prasejahtera. Untuk itu dengan tema Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2022 "Optimalisasi Pemberdayaan Usaha Mikro dan Ultra Mikro Berkesinambungan Bersama *Holding Ultra Mikro*" PNM berkomitmen untuk lebih meningkatkan peranannya dalam pemberdayaan UMKM khususnya kelompok perempuan prasejahtera yang aktif secara ekonomi, hal ini dimaksudkan juga untuk membantu mereka melewati masa sulit ini dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat prasejahtera sehingga diharapkan dapat memberikan *benefit* dan *multiplier effect* kepada lebih banyak orang.

Pada tahun anggaran 2022 melalui *Holding Ultra Mikro*, PNM tetap akan memfokuskan diri sebagai lembaga keuangan dan jasa manajemen dengan menitikberatkan pada pengembangan dan penataan bisnis utama menuju pertumbuhan yang berkualitas dengan meningkatkan pemberdayaan UMK utamanya usaha ultra mikro melalui strategi sebagai berikut:

1. Penambahan 101 kantor cabang Mekaar untuk menjangkau para pelaku ultra mikro dan UMK.
2. Perluasan jaringan layanan untuk penyaluran produk pembiayaan ultra mikro dan mikro dengan target jaringan kantor *co-location Holding Ultra Mikro* terealisasi 415 jaringan pada tahun 2022.
3. Melakukan optimalisasi akuisisi nasabah *digital UMi Corner* sebanyak 32 ribu Nasabah.

Based on the assumptions outlined above along with various opportunities, PNM is optimistic that it can continuously improve its performance optimally in achieving the targeted targets. In other words, PNM has very good business prospects. This is based on the strengths possessed by PNM, namely:

1. *Capacity building by developing business capacity into PNM uniqueness with competitors' products.*
2. *Flexibility to enter the real sector through PNM Venture Capital.*
3. *There are still opportunities to develop networks throughout Indonesia by applying ultra micro synergies through the Holding Ultra Micro co-location network.*
4. *PNM is the only state-owned non-bank financial institution that has a core business of financing for ultra-micro entrepreneurs and MSEs.*
5. *The results of PNM's good performance achieved in 2021 and the incorporation of PNM in Ultra Micro Holding, increased creditor confidence to facilitate access to funding.*
6. *In 2022, it was hoped that post-COVID-19 economic conditions would grow again, including for the MSME sector, this was based on the improvement in financing absorption by existing customers and the increasing number of customers, especially underprivileged female customers. For this reason, with the theme of the 2022 Corporate Work Plan and Budget "Optimizing the Empowerment of Micro and Ultra Micro Enterprises on an ongoing basis with Ultra Micro Holding" PNM was committed to further increasing its role in empowering MSMEs, especially groups of economically active underprivileged women, this was also intended to help them through this difficult time and help improve the welfare of the underprivileged so that it was expected to provide benefits and multiplier effects to more people.*

In the 2022 fiscal year through Ultra Micro Holding, PNM will continue to focus itself as a financial institution and management services with an emphasis on developing and structuring key businesses towards quality growth and supporting national economic recovery by increasing the empowerment of MSEs, especially ultra-micro businesses through the following strategies:

1. *The addition of 101 Mekaar branch offices to reach ultra micro and MSE players.*
2. *Expansion of the service network for the distribution of ultra micro and micro financing products with a target of 415 networks for Holding Ultra Micro co-location offices to be realized by 2022.*
3. *Optimizing the acquisition of digital customers of UMi Corner as many as 32 thousand customers.*

4. Mengembangkan program dan aktivitas pengembangan kapasitas usaha terutama kompetensi dan digitalisasi bisnis nasabah.
5. Meningkatkan kualitas SDM melalui program pendidikan dan pelatihan serta program top talenta milenial dan perempuan ditargetkan > 12%.
6. Melanjutkan pengembangan infrastruktur teknologi dan informasi sebagai fondasi bisnis *big data*.

Strategi dan program kerja PNM tahun 2022 secara garis besar adalah untuk mendukung upaya pencapaian target pembiayaan 12 juta nasabah perempuan pra sejahtera. Selain kesiapan jaringan dan SDM, ketersediaan sumber dana memegang faktor penting, yang mana ketersediaan dan biaya peminjamannya dari pihak kreditur sangat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan dan kapasitas *leverage* PNM.

Dengan tetap menitikberatkan pada pembiayaan usaha mikro kecil, maka pada tahun 2022 akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Fokus pada pengembangan bisnis utama PNM secara keseluruhan, untuk PNM *holding* diutamakan pertumbuhan pembiayaan UMKM yang berkualitas, PNM Investment Management mengutamakan pengembangan dana kelolaan dengan produk reksadana unggulan, sedangkan PNM Venture Capital diutamakan mengembangkan produk *venture capital* yang mampu memberikan perbaikan dan peningkatan laba secara bertahap untuk meningkatkan struktur permodalan bagi PNM Venture Capital.
2. Pengembangan pembiayaan ultra mikro dan UMK dilakukan dengan pengembangan sekitar 101 kantor cabang PNM Mekaar baru dan ekspansi penyaluran pembiayaan ultra mikro dan UMK yang terjaga kualitasnya dan fokus kepada pembenahan internal, sistem dan prosedur serta kebijakan yang akan mempercepat proses *delivery* pembiayaan dan meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap keseluruhan proses dan hasil.
3. Meningkatkan pengembangan kapasitas usaha UMK sehingga dapat meningkatkan dan memberikan nilai tambah kepada UMK baik peningkatan dan perbaikan produk, proses produksi sampai ke pemasaran sehingga mampu menjadi UMK yang *bankable*.

4. *Develop Business Capacity Development programs and activities, especially competence and digitalization of customers' businesses*
5. *Improving the quality of human resources through education and training programs as well as top talent programs for millennials and women was targeted at > 12%.*
6. *Melanjutkan pengembangan infrastruktur teknologi dan informasi sebagai fondasi bisnis big data.*

In general, the PNM strategy and work program in 2022 is to support efforts to achieve the financing target of 12 million preprosperous female customers. Apart from network and human resource readiness, the availability of sources of funds holds an important factor, where the availability and cost of borrowing from creditors is strongly influenced by the health condition and the PNM's leverage capacity.

By continuing to focus on financing micro and small businesses, in 2022 the following steps will be carried out:

1. *Focus on developing the main business of PNM as a whole, where for PNM holding quality growth of MSME financing is prioritized, PNM Investment Management prioritizes the development of managed funds with superior mutual fund products, while PNM Venture Capital focuses on developing venture capital products that are able to provide improvements and increase in profits gradually to improve the capital structure for PNM Venture Capital.*
2. *The development of MSME financing is carried out by developing around 901 new PNM Mekaar branch offices and expansion of MSME financing distribution that is maintained in quality and focuses on internal improvements, systems and procedures and policies that will accelerate the financing delivery process and improve control and supervision of the entire process and results*
3. *Increase the development of UMK Business Capacity so that it can increase and provide added value to MSMEs both in product improvement and improvement, production processes to marketing so that they can become bankable MSMEs*

Pencapaian Target dan Target ke Depan

Pencapaian Target 2021

Perbandingan target dan realisasi produksi/operasional, keuangan, pemasaran dan pengembangan SDM disajikan sebagai berikut

Perbandingan Target dan Realisasi Produksi/Operasional

Realisasi total pinjaman yang diberikan pada tahun 2021 mencapai Rp32.377,18 miliar atau 114,10% dari target RKAP 2021. Adapun untuk pembiayaan modal yang tersalurkan selama tahun 2021 mencapai 67,56% dari yang ditargetkan pada RKAP 2021. Pencapaian realisasi pembiayaan modal terhadap RKAP dipengaruhi pertumbuhan kondisi ekonomi nasional yang belum pulih seluruhnya sebagai akibat pandemi COVID-19 yang melonjak kembali pada akhir tahun 2021. Hal ini menyebabkan tindakan pengetatan likuiditas baik oleh pelaku/kreditur/investor pasar uang ataupun pasar modal. Posisi "wait and see" yang diambil para kreditur perbankan dan investor pasar modal menyulitkan PNM dalam memenuhi kebutuhan pendanaan guna penyaluran pembiayaan kepada para nasabah.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Produksi/Operasional
Table of Comparison of Production/Operational Target and Realization

(dalam miliar Rupiah / in IDR billion)

Uraian	Realisasi 2021 Realization 2021	RKAP 2021	Pencapaian Achievement	Description
1	2	3	4=2/3	(1)
Pinjaman yang diberikan	32.377,18	28.375,14	114,10%	Loans
Pembiayaan modal	768,09	1.136,91	67,56%	Capital financing

Perbandingan Target dan Realisasi Keuangan

Pada tahun 2021 pencapaian total aset serta kas dan setara kas berhasil melampaui target masing-masing mencapai 114,66% dan 157,75%. Adapun, ekuitas mencapai 107,03% dibandingkan dengan target RKAP 2021. Meskipun masih dalam masa pemulihan ekonomi nasional PNM mampu membukukan laba bersih sebesar Rp845,13 miliar atau 198,8% di atas target RKAP 2021. Pencapaian target tersebut antara lain ditopang atas penerapan kebijakan dan strategi yang tepat dan kerjasama yang baik dari seluruh pemangku kepentingan sehingga berhasil melalui semester akhir tahun 2021 ini dengan baik.

Achievement of Targets and Future Targets

Target Achievement 2021

Comparison of targets and realization of production/operations, finance, marketing and human resource development is presented as follows

Target Comparison and Production/Operational Realization

The realization of total loans disbursed in 2021 reached IDR32,377.18 billion or 114.10% of the 2021 Company Work and Budget Plan (RKAP) target. As for the capital financing disbursed during 2021 it reached 67.56% of the target in the 2021 Company Work and Budget Plan. Achievement of capital financing realization The impact of the Company Work and Budget Plan on the growth of national economic conditions that had not fully recovered as a result of the COVID-19 pandemic which spiked again at the end of 2021. This led to tightening of liquidity by both actors/creditors/money market investors or capital markets. The "wait and see" position taken by bank creditors and capital market investors has made it difficult for PNM to meet funding needs for channeling financing to customers

Target Comparison and Financial Realization

In 2021 the achievement of total assets as well as cash and cash equivalents managed to exceed the target of reaching 114.66% and 157.75%, respectively. Meanwhile, equity reached 107.03% compared to the 2021 RKAP target. Even though it was still in the period of national economic recovery, PNM was able to record a net profit of IDR845.13 billion or 198.8% above the 2021 Company Work and Budget Plan target. The right policies and strategies and good cooperation from all stakeholders made it through the final semester of 2021 well.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Keuangan
Table of Target Comparison and Financial Realization

(dalam miliar Rupiah / in IDR billion)

Uraian	Realisasi 2021 Realization 2021	RKAP 2021	Pencapaian Achievement	Description
1	2	3	4=2/3	(1)
Laporan Posisi Keuangan				Statement Of Financial Position
Aset	43.712,29	38.123,62	114,66%	Asset
Kas dan setara kas	4.020,61	2.548,65	157,75%	Cash & Cash Equivalent
Ekuitas	6.437,95	6.015,16	107,03%	Equity
Laporan Laba (Rugi)				Income Statement (Loss)
Pendapatan usaha	8.668,56	7.496,86	115,63%	Operating revenues
Laba (rugi) usaha	1.016,54	600,89	169,17%	Operating Profit (Loss)
Laba bersih	845,13	425,12	198,80%	Net Profit
Struktur Modal				Capital Structure
Utang Berbunga	31.405,12	28.209,36	111,33%	Interest Debt
Ekuitas	6.437,95	6.015,16	107,03%	Equity
Gearing Ratio	4,34 X	4,27 X	101,79%	Gearing Ratio

Perbandingan Target dan Realisasi Pemasaran

Indikator utama keberhasilan pemasaran PNM antara lain adalah melalui penyaluran pembiayaan PNM Mekaar dan ULaMM. Penyaluran pembiayaan kepada perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro melalui PNM Mekaar pada akhir tahun 2021 sebesar Rp46.445,26 miliar, mencapai 128,31% dari yang ditetapkan dalam RKAP tahun 2021 sebesar Rp36.197,35 miliar. Demikian pula dengan penyaluran pembiayaan ULaMM terealisasi sebesar Rp3.010,31 miliar pada 2021, mencapai 120,76% dari yang ditargetkan Rp2.265,02 miliar.

Target Comparison and Marketing Realization

The main indicators for the success of PNM marketing include the distribution of PNM Mekaar and ULaMM financing. The distribution of financing to underprivileged women ultra micro business actors through PNM Mekaar at the end of 2021 reached IDR46,445.26 billion, reaching 128.31% of what was stipulated in the 2021 RKAP of IDR36,197.35 billion. Likewise, the disbursement of ULaMM financing was realized at IDR3,010.31 billion in 2021, reaching 120.76% of the targeted IDR2,265.02 billion.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Pemasaran
Table of Target Comparison and Marketing Realization

(dalam miliar Rupiah / in IDR billion)

Uraian	Realisasi 2021 Realization 2021	RKAP 2021	Pencapaian Achievement	Description
1	2	3	4=2/3	(1)
Penyaluran PNM Mekaar	46.445,26	36.197,35	128,31%	PNM Mekaar distribution
Penyaluran ULaMM	3.010,31	2.492,81	120,76%	ULaMM distribution

Perbandingan Target dan Realisasi Pengembangan SDM

Pengembangan pegawai dilakukan dengan cara memberikan pelatihan, *knowledge sharing* dan *on the job training* bagi karyawan. PNM telah membuat program pelatihan secara sistematis dan sesuai dengan kebutuhan PNM baik materi maupun peserta pelatihan.

Comparison of Targets and Realization of HR Development

Employee development is carried out by providing training, *knowledge sharing* and *on the job training* for employees. PNM has made training programs systematically and in accordance with PNM needs, both in terms of materials and training participants.

Pencapaian pelatihan level Jabatan Direksi, Kepala Divisi dan Wakil Kepala Divisi, Pemimpin Cabang dan Wakil Pemimpin Cabang, Kepala Bagian, Kepala regional Mekaar dan Regional Pengawas Mekaar, Spesialis, *Officer* dan *Staff* berhasil mencapai target sebesar 100,00%. Prioritas kegiatan pelatihan berfokus kepada pencapaian target kinerja di masa pandemi COVID-19.

Achievement of training at the level of Directors, Division Heads and Deputy Division Heads, Branch Managers and Deputy Branch Managers, Section Heads, Mekaar Regional Heads and Mekaar Regional Supervisors, Specialists, Officers and Staff managed to achieve the target of 100.00%. The priority of training activities focuses on achieving performance targets during the COVID-19 pandemic.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Pengembangan SDM

Table of Perbandingan Target dan Realisasi Pengembangan SDM

(dalam peserta / in participant)

Uraian	Realisasi 2021 Realization 2021	Rencana 2021 2021 Plan	Pencapaian Achievement	Description
1	2	3	4=2/3	(1)
Level Jabatan Direksi dengan jenis pelatihan <i>Strategic Business Management Sustainable</i> .	5	5	100,00%	Level of position of the Board of Directors with the type of Sustainable Business Management training
Level Jabatan Kepala Divisi dan Wakil Kepala Divisi dengan jenis pelatihan <i>Business Impact Leadership</i> .	36	36	100,00%	Level of Position Head of Division and Deputy Head of Division with the type of Business Impact Leadership training
Level Jabatan Pemimpin Cabang dan Wakil Pemimpin Cabang dengan jenis pelatihan <i>Collaborative Leadership</i> .	80	80	100,00%	Level of Position of Branch Manager and Deputy Branch Manager with the type of Collaborative Leadership training
Level Jabatan Kepala Bagian, Kepala regional Mekaar dan Regional Pengawas Mekaar dengan jenis pelatihan <i>Collaborative Leadership</i> .	227	227	100,00%	Level Position Head of Division, Regional Head of Mekaar and Regional Supervisor of Mekaar with the type of Collaborative Leadership training
Level Jabatan <i>Spesialis, Officer</i> dan <i>Staff</i> dengan jenis pelatihan <i>Fundamental Basic Technical Skill</i>	56.953	56.953	100,00%	Level of Specialist, Officer and Staff positions with the type of Fundamental Basic Technical Skill training

Target ke Depan (Proyeksi)

Manajemen telah menyusun Rencana untuk tahun 2022 dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini dan proyeksi perekonomian di tahun 2022. Asumsi makro disusun diambil dari Surat *Holding* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk nomor R.676-DIR/SBM/10/2021 perihal Penyampaian Aspirasi Pemegang Saham Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2021 dan Rencana Bisnis Tahun 2022-2024 sebagai berikut.

Future Target (Projection)

Management has prepared a Plan for 2022 taking into account the current economic conditions and economic projections for 2022. The macro assumptions were drawn from the Holding Letter of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk number R.676-DIR/SBM/10/2021 regarding Submission of Shareholders' Aspirations for the preparation of the Company's 2021 Work Plan and Budget and the 2022-2024 Business Plan as follows.

Tabel Asumsi Makro Tahun 2022

Table of Macro Assumptions for 2022

Asumsi	2022	Assumption
Pertumbuhan Domestik Bruto	5,3%	Gross Domestic Growth
Nilai Tukar	14.955	Exchange Rate
Tingkat Inflasi (%)	3,31%	Inflation Rate (%)
Tingkat Suku Bunga Acuan	3,75%	Benchmark Interest Rate

Sumber / Source: Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PNM Tahun 2022. / PNM's Company Budget Work Plan (RKAP) for 2022.

Proyeksi Produksi/Operasional

Seiring dengan optimisme pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 pada tahun 2021 maka PNM optimis memproyeksikan pinjaman yang diberikan kepada sektor ultra mikro dan mikro serta pembiayaan modal tahun 2022 masing-masing sebesar Rp36.661,94 miliar dan Rp1.134,28 miliar.

Production/Operational Projection

Along with optimism for economic recovery after the COVID-19 pandemic in 2021, PNM was optimistic that it projected loans to the ultra micro and micro sectors as well as capital financing in 2022 to be IDR36,661.94 billion and IDR1,134.28 billion, respectively.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Produksi/Operasional

Table of Comparison of Production/Operational Target and Realization

(dalam miliar Rupiah / in IDR billion)

Uraian	Proyeksi RKAP 2022 Projected RKAP 2022	Description
1	2	(1)
Pinjaman yang Diberikan	36.661,94	Loans
Pembiayaan Modal	1.134,28	Capital financing

Proyeksi Keuangan Tahun 2022

Dalam rangka mendukung Pemerintah untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19 melalui pemberdayaan sektor UMK termasuk sektor ultra mikro maka pada tahun 2022 PNM tetap berkomitmen melanjutkan pemberdayaan UMK dengan menitikberatkan pada pembiayaan usaha ultra mikro, mikro, kecil dan menengah melalui optimalisasi kinerja unit layanan dan intensitas pembinaan UMK sebagai strategi umum menuju peningkatan profitabilitas berkelanjutan, manajemen PNM memproyeksikan perolehan Laba Bersih Entitas Induk akhir tahun 2022 Rp881,31 miliar.

Financial Projection in 2022

In order to support the Government to accelerate national economic recovery after the COVID-19 pandemic through empowering the MSE sector including the ultra-micro sector, in 2022 PNM remains committed to continuing to empower MSEs by focusing on financing ultra-micro, micro, small and medium enterprises through optimizing the performance of service units and the intensity of developing MSEs as a general strategy towards increasing sustainable profitability, PNM management is projecting the net profit of the parent entity by the end of 2022 to IDR881.31 billion.

Tabel Proyeksi Keuangan

Table of Financial Projection

(dalam miliar Rupiah / in IDR billion)

Uraian	Proyeksi RKAP 2022 Projected RKAP 2022	Description
1	2	(1)
Laporan Posisi Keuangan		Statement of Financial Position
Aset	47.084,39	Asset
Kas dan Setara Kas	4.223,88	Cash and Cash Equivalent
Aset Lancar	43.399,46	Current assets
Ekuitas	7.111,86	Equity
Laporan Laba (Rugi)		Income Statement (Loss)
Pendapatan Usaha	10.223,97	Pendapatan Usaha
Laba (Rugi) Usaha	1.252,95	Operating Profit (Loss)
Laba Bersih	885,59	Net Profit
Struktur Modal		Capital Structure
Utang berbunga	35.018,94	Interest debt
Ekuitas	7.111,86	Equity
Gearing Ratio	4,33 X	Gearing Ratio

Proyeksi Kebijakan Dividen Tahun 2022

Dalam rangka meningkatkan kapasitas pembiayaan utamanya kepada sektor usaha ultra mikro, PNM akan memaksimalkan ekuitas PNM guna memenuhi kebutuhan pendanaan maka manajemen mengajukan permohonan tidak membagikan dividen atas kinerja tahun 2021 kepada Pemegang Saham.

Proyeksi Pemasaran Tahun 2022

PNM memproyeksikan pemasaran berdasarkan proyeksi penyaluran pembiayaan PNM Mekaar dan ULaMM sebagai berikut.

Tabel Proyeksi Pemasaran

Table of Marketing Projections

(dalam miliar / in billion)

Uraian	Proyeksi 2022 Projection 2022	Description
Penyaluran PNM Mekaar	48,795.74	PNM Mekaar distribution
Penyaluran ULaMM	3,314.55	ULaMM distribution

Proyeksi Pengembangan SDM Tahun 2022

Proyeksi pengembangan SDM yang akan dilakukan pada tahun 2022 di uraikan sebagai berikut.

Tabel Proyeksi Pengembangan SDM

Table of HR Development Projection

(dalam miliar / in billion)

Uraian	Proyeksi 2022 Projection 2022	Description
E-learning dengan 3 (tiga) program kegiatan.	Dilaksanakan di tiap bulan di tahun 2022 Held every month in 2022	E-learning with 3 (three) activity programs
Orientasi karyawan baru dengan 1 (satu) program kegiatan.	Dilaksanakan di tiap bulan di tahun 2022 Held every month in 2022	New employee orientation with 1 (one) activity program
Pelatihan <i>reguler</i> dengan 5 (lima) program kegiatan	Dilaksanakan di bulan-bulan tertentu di tahun 2022 Held in certain months in 2022	Regular training with 5 (five) activity programs
<i>Leadership</i> dan <i>managerial skill</i> dengan 15 (lima belas) program kegiatan.	Dilaksanakan di bulan-bulan tertentu di tahun 2022 Held in certain months in 2022	Leadership and managerial skills with 15 (fifteen) activity programs
Pelatihan <i>non reguler</i> dengan 27 (dua puluh tujuh) program kegiatan.	Dilaksanakan di bulan-bulan tertentu di tahun 2022 Held in certain months in 2022	Non-regular training with 27 (twenty-seven) activity programs
Pengembangan khusus dengan 4 (empat) program kegiatan.	Dilaksanakan di bulan-bulan tertentu di tahun 2022 Held in certain months in 2022	Special development with 4 (four) activity programs
Spesifik <i>development</i> dengan 11 (sebelas) program kegiatan.	Dilaksanakan di bulan-bulan tertentu di tahun 2022 Held in certain months in 2022	Specific development with 11 (eleven) activity programs

Dividend Policy Projections for 2022

In order to increase its main financing capacity to the ultra-micro business sector, PNM maximized PNM's equity to meet funding needs, so management submitted a request not to distribute dividends on 2021 performance to shareholders.

Marketing Projections in 2022

PNM projects marketing based on the projected distribution of PNM Mekaar and ULaMM financing can be described as follows:

HR Development Projection in 2021

Proyeksi pengembangan SDM yang akan dilakukan pada tahun 2022 di uraikan sebagai berikut.

Kebijakan, Pengumuman dan Pembayaran Dividen

Dalam pembayaran dividen, PNM menerapkan kebijakan keputusan untuk membayar dividen tergantung pada laba, kondisi keuangan dan likuiditas, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Penggunaan laba bersih PNM tahun buku 2020 dan 2019 sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bahwa PNM tidak mendistribusikan dividen kepada para pemegang saham, hal tersebut dalam rangka meningkatkan cadangan umum PNM.

Sesuai dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor: RIS-002/PNMRUPS/ LAPKEU-2020/IV/21 tanggal 14 April 2021, ditetapkan bahwa dari total laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Tahun Buku 2020 sebesar Rp358.180.083.833 seluruhnya ditetapkan sebagai laba ditahan dan PNM tidak diwajibkan untuk membayar dividen kepada Pemegang Saham.

Sesuai dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor: RIS-002/PNM-RUPS/ LAPKEU-2019/VI/20 tanggal 29 Juni 2020, ditetapkan bahwa dari total laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Tahun Buku 2019 sebesar Rp973.231.336.153 seluruhnya ditetapkan sebagai laba ditahan dan PNM tidak diwajibkan untuk membayar dividen kepada Pemegang Saham.

PNM tidak memiliki saldo utang dividen pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, sehingga PNM tidak menyajikan informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih, tanggal pembayaran dividen kas dan/ atau tanggal distribusi dividen non kas, jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas) dan jumlah dividen per tahun yang dibayar.

Dividend Policy, Announcement and Dividend Payment

In dividend payments, PNM implements a decision to pay dividends depending on profits, financial condition and liquidity, compliance with laws and regulations and other factors that are considered relevant. The use of PNM's net profit for the 2020 and 2019 fiscal years is in accordance with the General Meeting of Shareholders Decision that PNM does not distribute dividends to shareholders, this is in order to increase PNM's general reserve.

In accordance with the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders Number: RIS-002/PNMRUPS/LAPKEU-2020/IV/21 dated April 14, 2021, it was determined that the total consolidated net income attributable to the Owners of the Parent Entity for Fiscal Year 2020 was IDR358,180,083,833 and all of which were designated as retained earnings, and PNM was not required to pay dividends to shareholders.

In accordance with the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders Number: RIS-002/PNM-RUPS/ LAPKEU-2019/VI/20 dated June 29, 2020, it was determined that the total consolidated net income attributable to the Owners of the Parent Entity for the 2019 Financial Year was IDR973,231,336,153 and were all designated as retained earnings and PNM is not required to pay dividends to Shareholders.

PNM did not have a dividend payable balance as of December 31, 2021 and 2020, so that PNM did not provide information on the percentage of dividends distributed to net income, date of payment of cash dividends and/or date of distribution of non-cash dividends, amount of dividends per share (cash and/or non-cash) and the amount of dividends paid annually.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Sesuai dengan POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, PNM telah melaporkan realisasi penggunaan dana penawaran umum obligasi PUB IV PNM Tahap I Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 sebagai berikut.

Tabel Realisasi Penggunaan Dana Obligasi PUB IV PNM Tahap I Tahun 2021

Table of Realization of Use of PUB IV PNM Phase I Bond Funds in 2021

No.	Jenis Penawaran Umum <i>Type of Public Offering</i>	Tanggal Efektif <i>Effective Date</i>	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum <i>Realization Value of Public Offering Proceeds</i>		
			Jumlah Hasil Penawaran Umum <i>Number of Public Offering Proceeds</i>	Biaya Penawaran Umum <i>Public Offering Fee</i>	Hasil Bersih <i>Net Result</i>
1	2	3	4	5	6
1	Penawaran Umum (IPO) <i>Initial Public Offering (IPO)</i>	12 Oktober 2021 <i>October 12, 2021</i>	3.000.000.000.000	8.342.755.211	2.991.657.244.769
2	Penawaran Umum lanjutan <i>Advanced Public Offering</i>	-	-	-	-
3	Penawaran Umum Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu <i>Public Offering with Pre-emptive Rights</i>	-	-	-	-
Jumlah Total			3.000.000.000.000	8.342.755.211	2.991.657.244.769

Tabel Realisasi Penggunaan Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021

Table Realisasi Penggunaan Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021

No.	Jenis Penawaran Umum <i>Type of Public Offering</i>	Tanggal Efektif <i>Effective Date</i>	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum <i>Realization Value of Public Offering Proceeds</i>		
			Jumlah Hasil Penawaran Umum <i>Number of Public Offering Proceeds</i>	Biaya Penawaran Umum <i>Public Offering Fee</i>	Hasil Bersih <i>Net Result</i>
1	2	3	4	5	6
1	Penawaran Umum (IPO) <i>Initial Public Offering (IPO)</i>	09 Juli 2021 <i>July 09, 2021</i>	2.000.000.000.000	4.200.633.174	1.995.799.366.826
2	Penawaran Umum lanjutan <i>Advanced Public Offering</i>	-	-	-	-
3	Penawaran Umum Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu <i>Public Offering with Pre-emptive Rights</i>	-	-	-	-
Jumlah Total			3.000.000.000.000	8.342.755.211	2.991.657.244.769

Dana hasil penawaran umum obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya dipergunakan PNM untuk modal kerja pembiayaan UMKM sesuai rencana penggunaan dana yang diungkapkan dalam prospektus. Dana Obligasi PUB IV PNM Tahap I Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 seluruhnya telah habis digunakan.

Realization of the Use of Public Offering Funds

In accordance with POJK Number 30/POJK.04/2015 concerning Report on the Realization of Use of Proceeds from the Public Offering, PNM has reported the realization of the use of proceeds from the public offering of PUB IV PNM Phase I 2021 Bonds and PNM Phase I 2021 Sustainable Mudharabah Sukuk as follows.

(dalam Rupiah penuh / in full Rupiah)

Rencana Penggunaan Dana Menurut Prospektus Planned Use of Funds According to the Prospectus			Realisasi Penggunaan Dana Menurut Prospektus Realization of Use of Funds according to the Prospectus			Sisa Dana Hasil Penawaran Umum Remaining Proceeds from Public Offering
Refinancing	Modal Kerja Pembiayaan UMKM MSEM Financing Working Capital	Total	Refinancing	Modal Kerja Pembiayaan UMKM MSEM Financing Working Capital	Total	
7	8	9	10	11	12	13
0	2.991.657.244.769	2.991.657.244.769	0	2.991.657.244.769	2.991.657.244.789	0
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
0	2.991.657.244.769	2.991.657.244.769	0	2.991.657.244.769	2.991.657.244.789	0

(dalam Rupiah penuh / in full Rupiah)

Rencana Penggunaan Dana Menurut Prospektus Planned Use of Funds According to the Prospectus			Realisasi Penggunaan Dana Menurut Prospektus Realization of Use of Funds according to the Prospectus			Sisa Dana Hasil Penawaran Umum Remaining Proceeds from Public Offering
Refinancing	Modal Kerja Pembiayaan UMKM MSEM Financing Working Capital	Total	Refinancing	Modal Kerja Pembiayaan UMKM MSEM Financing Working Capital	Total	
7	8	9	10	11	12	13
2.000.000.000.000	4.200.633.174	1.995.799.366.826	0	2.991.657.244.769	2.991.657.244.789	0
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
0	2.991.657.244.769	2.991.657.244.769	0	2.991.657.244.769	2.991.657.244.789	0

The proceeds from the public offering of these bonds, after deducting issuance costs, are entirely used by PNM for working capital for MSME financing in accordance with the planned use of funds disclosed in the prospectus. The PUB IV PNM Phase I Year 2021 Bonds Fund and the PNM Phase I Sustainable Sukuk Mudharabah I 2021 have all been used up.

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Divestasi, Akuisisi, atau Restrukturisasi Hutang dan Modal

Investasi

Selama tahun 2021, PNM tidak melakukan kegiatan investasi.

Ekspansi

PNM melakukan ekspansi dengan menambah kantor cabang Mekaar yang tersebar di seluruh Indonesia

Tabel Ekspansi

Table of Expansion

Uraian	2021	2020	Ekspansi Expansion	Description
Kantor Cabang Mekaar	2.985	2.668	317	Mekaar Branch Office

Penggabungan/Peleburan Usaha

Selama tahun 2021, PNM tidak melakukan penggabungan/peleburan usaha.

Divestasi

Selama tahun 2021, PNM tidak melakukan divestasi.

Akuisisi

Selama tahun 2021, PNM tidak melakukan akuisisi.

Restrukturisasi Hutang Dan Modal

Selama tahun 2021, PNM tidak melakukan restrukturisasi hutang dan modal.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/ atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Transaksi Material adalah setiap penyertaan dalam badan usaha, proyek, dan/atau kegiatan usaha tertentu; pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar aset atau segmen usaha; sewa menyewa aset; pinjam meminjam dana; menjaminkan aset; dan/atau memberikan jaminan perusahaan; dengan nilai 20% (dua puluh perseratus) atau lebih dari ekuitas Perusahaan yang dilakukan dalam satu kali atau dalam suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu (Baepem LK Nomor: Kep-412/BL/2009).

Transaksi Benturan Kepentingan

Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perusahaan dimaksud (Baepem LK Nomor: Kep-412/BL/2009).

Sampai dengan akhir tahun 2021, tidak terdapat transaksi yang memenuhi kategori transaksi benturan kepentingan.

Material Information Regarding Investment, Expansion, Business Merger/Consolidation, Divestment, Acquisition, or Debt and Capital Restructuring

Investment

During 2021, PNM did not carry out investment activities.

Expansion

PNM expanded by adding Mekaar branch offices spread throughout Indonesia.

Business Merger/Consolidation

During 2021, PNM did not conduct business mergers/consolidations.

Divestment

During 2021, PNM did not conduct divestment.

Acquisition

During 2021, PNM did not conduct acquisition.

Debt and Capital Restructuring

During 2021, PNM did not conduct debt and capital restructuring

Information of Significant Transaction Which Contains Conflict of Interest and/or Transaction With Affiliated Parties

Material Transaction is any participation in a certain business entity, project and/or business activity; purchase, sale, transfer, exchange of assets or business segments; leasing assets; borrow and borrow funds; guarantee assets; and/or provide corporate guarantees; with a value of 20% (twenty percent) or more of the Company's equity conducted once or in a series of transactions for a specific purpose or activity (Baepem LK Number: Kep412/BL/2009).

Conflict of Interest Transaction

Conflict of Interest is the difference between the economic interests of the Company and the personal economic interests of members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or major shareholders that can harm the Company concerned (Baepem LK Number: Kep-412/BL/2009).

Until the end of 2021, there were no transactions that met the category of conflict of interest transactions.

Transaksi Afiliasi

Afiliasi, adalah:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
2. Hubungan antara Pihak dengan Pegawai, Direktur, atau Komisaris dari Pihak tersebut;
3. Hubungan antara 2 (dua) Perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
4. Hubungan antara Perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perusahaan tersebut;
5. Hubungan antara 2 (dua) Perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
6. Hubungan antara Perusahaan dan Pemegang Saham Utama.

Transaksi Afiliasi adalah Transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali dengan Afiliasi dari Perusahaan atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perusahaan (Baepem LK Nomor: Kep-412/BL/2009).

Sampai dengan akhir tahun 2021, tidak terdapat transaksi yang memenuhi kategori transaksi dengan pihak terafiliasi.

Transaksi Pihak Berelasi

PNM melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Istilah pihak berelasi sesuai dengan PSAK No. 7 (Revisi 2010) tentang "Pengungkapan Pihak Berelasi". Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya.

1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Grup jika orang tersebut:
 - a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Grup;
 - b. Memiliki pengaruh signifikan atas Grup; atau
 - c. Personil manajemen kunci Grup atau entitas induk Grup.
2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
 - b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;

Affiliated Transaction

Affiliates, are:

1. Family relations by marriage and descent to the second degree, both horizontally and vertically;
2. Relationship between a party and its employees, directors or commissioners;
3. A relationship between 2 (two) companies where there is one or more members of the same Board of Directors or Board of Commissioners;
4. The relationship between the company and parties, either directly or indirectly, controlling or being controlled by the company;
5. A relationship between 2 (two) Companies that are controlled, directly or indirectly, by the same Party; or
6. Relationship between the Company and Major Shareholders.

Affiliated Transaction is a Transaction conducted by a Company or Controlled Company with an Affiliate of the Company or an Affiliate of a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners, or a major shareholder of the Company (Baepem LK Number: Kep-412/BL/2009).

Until the end of 2021, there were no transactions that met the category of transactions with affiliated parties.

Related Party Transaction

The Company conducts transactions with related parties. The term related party is in accordance with PSAK No. 7 (Revised 2010) regarding "Related Party Disclosures". A related party is a person or entity that is related to the entity that prepares its financial statements.

1. A person or immediate family member is related to a Group if that person:
 - a. Has control or joint control over the Group;
 - b. Has significant influence over the Group; or
 - c. Key management personnel of the Group or of Group parent entities
2. An entity is related to a reporting entity if it satisfies any of the following:
 - a. The entity and the reporting entity are members of the same business group (meaning that the parent, subsidiary, and subsequent subsidiaries are related to the other entity);
 - b. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
 - c. The two entities are joint ventures of the same third party;

- d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
- e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Grup atau entitas yang terkait dengan Grup.
- f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- g. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- h. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada Grup atau kepada entitas induk dari Grup.

- d. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
- e. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of the Group or an entity related to the Group.
- f. An entity that is controlled or jointly controlled by the person identified in (a).
- g. The person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).
- h. An entity, or a member of a group of which the entity is part of the group, provides key management personnel services to the Group or to a parent of the Group.

Nama Pihak Yang Bertransaksi dan Sifat Hubungan

Adapun nama dan sifat dari hubungan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut.

The Name of the Transactioning Parties and the Nature of Relationships

The names and characteristics of the relationship with related parties are as follows.

Tabel Pihak Berelasi

Table of Related Parties

Pihak Berelasi <i>Related Parties</i>	Sifat dari Hubungan <i>The Nature of Relationships</i>	Sifat dari Transaksi <i>Nature of the Transaction</i>
Pemerintah Republik Indonesia <i>Government of the Republic of Indonesia</i>	Pemegang saham pengendali <i>Controlling shareholders</i>	Surat utang Pemerintah <i>Government debt securities</i>
PT BPRS PNM Patuh Beramal	PT PNM memiliki lebih dari 50% saham Perusahaan <i>PT PNM owns more than 50% of the Company's shares</i>	Penyertaan Modal <i>Equity capital</i>
PT BPRS PNM Mentari	PT PNM memiliki lebih dari 50% saham Perusahaan <i>PT PNM owns more than 50% of the Company's shares</i>	Penyertaan Modal <i>Equity capital</i>
PT BPRS Haji Miskin	PT PNM memiliki lebih dari 50% saham Perusahaan <i>PT PNM owns more than 50% of the Company's shares</i>	Penyertaan Modal <i>Equity capital</i>
PT Syarikat Takaful Indonesia	PT PNM memiliki kurang dari 20% saham Perusahaan <i>PT PNM owns less than 20%</i>	Investasi pada entitas asosiasi <i>Investments in associates</i>
PT BPR Rizky Barokah	PT PNM VS memiliki lebih dari 50% saham Perusahaan <i>PT PNM VS owns more than 50% of the Company's shares</i>	Deposito Berjangka, Penyertaan Modal <i>Time Deposits, Equity Participation</i>
PT BPRS Ampek Angkek Candung	PT PNM VS memiliki kurang dari 20% saham Perusahaan <i>PT PNM VS owns less than 20% of the company's shares</i>	Investasi pada entitas asosiasi <i>Investments in associates</i>
PT BPRS Daya Artha Mentari	PT PNM VS memiliki kurang dari 20% saham Perusahaan <i>PT PNM VS owns less than 20% of the company's shares</i>	Investasi pada entitas asosiasi <i>Investments in associates</i>
PT BPRS Bandar Lampung (d.h.) Sakai Sembayan	PT PNM VS memiliki kurang dari 20% saham Perusahaan <i>PT PNM VS owns less than 20% of the company's shares</i>	Investasi pada entitas asosiasi <i>Investments in associates</i>

Pihak Berelasi Related Parties	Sifat dari Hubungan The Nature of Relationships	Sifat dari Transaksi Nature of the Transaction
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali Owned by the controlling shareholder	Kas dan setara kas, utang bank Cash and cash equivalents, bank loans
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali Owned by the controlling shareholder	Kas dan setara kas, utang bank Cash and cash equivalents, bank loans
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali Owned by the controlling shareholder	Kas dan setara kas, utang bank Cash and cash equivalents, bank loans
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali Owned by the controlling shareholder	Kas dan setara kas, utang bank Cash and cash equivalents, bank loans
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali Owned by the controlling shareholder	Utang lembaga keuangan Financial institution debt
Lembaga Pengelola Dana Bergulir – KUMKM	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali Owned by the controlling shareholder	Utang lembaga keuangan Financial institution debt
Pusat Investasi Pemerintah	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali Owned by the controlling shareholder	Utang Pemerintah Republik Indonesia Government Debt of the Republic of Indonesia
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali Owned by the controlling shareholder	Kas dan setara kas, utang bank Cash and cash equivalents, bank loans
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali Owned by the controlling shareholder	Utang lembaga keuangan Financial institution debt

Kewajaran dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Transaksi pihak berelasi terjadi karena adanya kebutuhan usaha PNM. Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Beberapa persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan persyaratan yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi. Semua transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi dilakukan dengan syarat normal dan wajar sesuai dengan *arms length principle* dan telah diungkapkan dalam catatan yang relevan pada Laporan Keuangan.

Realisasi (Nilai) Transaksi Pihak Berelasi

Berikut rincian saldo transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel Realisasi (Nilai) Transaksi Pihak Berelasi
Table of Realization (Value) of Related Party Transactions

(dalam jutaan Rupiah / in IDR million)

Uraian	2021	2020	Description
Kas dan setara kas	4.020.609	4.462.197	Cash and cash equivalents
Persentase terhadap total aset	9,20%	14,09%	Percentage of total assets
Portofolio efek untuk diperdagangkan	1.182.940	523.773	Securities Portfolio for Trading
Persentase terhadap total aset	2,70%	1,65%	Percentage of total assets
Pinjaman yang diberikan	-	-	Loans
Persentase terhadap total aset	0,00%	0,00%	Percentage of total assets
Piutang kegiatan manajer investasi	7.287	8.024	Accounts receivable from investment manager activities
Persentase terhadap total aset	0,02%	0,03%	Percentage of total assets
Portofolio efek dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (tersedia untuk dijual)	-	5.665	Securities Portfolio at Fair Value through Other Comprehensive Income (Available for Sale)
Persentase terhadap total aset	0,00%	0,02%	Percentage of total assets
Utang bank dan lembaga keuangan	4.732.716	2.671.350	Debt from Banks and Financial Institutions

Fairness and Reason for Conducting the Transaction

Related party transactions occur because of PNM's business needs. This transaction was carried out based on terms agreed by both parties. Some of these requirements may not be the same as the requirements made with unrelated parties. All significant transactions and balances with related parties were carried out on normal and fair terms in accordance with the *arms length principle* and were disclosed in the relevant notes in the Financial Statements.

Realization (Value) of Related Party Transactions

The details of the balance of transactions with related parties are described in the Table of as follows.

Uraian	2021	2020	Description
Persentase terhadap total liabilitas	12,67%	10,24%	Percentage of total liabilities
Pinjaman dari pemerintah republik indonesia dan lembaga kredit luar negeri	3.917.715	3.035.065	Loans from the Government of the Republic of Indonesia and Foreign Credit Institutions
Persentase terhadap total liabilitas	10,49%	11,64%	Percentage of total liabilities
Utang lain-lain	406.280	406	Miscellaneous Debt
Persentase terhadap total liabilitas	0,00%	0,00%	Percentage of total liabilities

Rincian nama pihak terkait realisasi (nilai) transaksi pihak berelasi disajikan pada catatan atas Laporan Keuangan No. 40 yang terlampir pada Laporan Tahunan ini. Transaksi berelasi tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan.

Kebijakan Mekanisme Reviu atas Transaksi dan Pemenuhan Peraturan Dan Ketentuan Terkait

Seluruh transaksi telah melalui mekanisme reviu sesuai dengan jenis transaksi. Setiap transaksi dilakukan analisis kelayakan transaksi antara lain analisis kelayakan investasi untuk investasi pada entitas asosiasi. Demikian pula dengan transaksi pihak berelasi lainnya seperti kas setara kas, utang bank maupun utang lembaga keuangan. PNM senantiasa berkomitmen untuk menjalankan bisnis yang *prudent*, seluruh transaksi telah memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan Dampaknya Terhadap PNM

Sepanjang tahun 2021, tidak terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap PNM dan dampaknya terhadap laporan keuangan.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Grup (PNM dan entitas anak) menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) baru dan revisi yang efektif sejak tanggal Grup. Perubahan kebijakan akuntansi Grup telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi. Perubahan kebijakan akuntansi dilakukan dalam rangka mematuhi PSAK yang berlaku yang relevan dengan operasi Grup.

Details of the names of the parties related to the realization (value) of related party transactions are presented in the notes to the Financial Statements No. 40 which is attached to this Annual Report. These related transactions are business activities carried out in order to generate business income and are carried out routinely, repeatedly, and/or continuously.

Review Mechanism Policy on Transactions and Compliance with Related Rules and Provisions

All transactions went through a review mechanism according to the type of transaction. Each transaction was subjected to a feasibility analysis of the transaction, including, among other things, an investment feasibility analysis for investments in associates. Likewise with other related party transactions such as cash equivalents, bank loans and financial institution loans. PNM was always committed to running a prudent business, all transactions had complied with the prevailing rules and regulations.

Amendments of the Legislation and the Impact on PNM

Throughout 2021, there were no changes to the provisions of the laws and regulations that had a significant effect on PNM and its impact on financial statements.

Changes in Accounting Policy

The Group (PNM and its subsidiaries) adopted the new and revised Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK), which were effective from the date of the Group. Changes to the Group's accounting policies were made as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards and interpretations. Changes in accounting policies were made in order to comply with the applicable PSAK relevant to the Group's operations.

Berikut ini adalah standar akuntansi keuangan, perubahan, dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2021.

- Penyesuaian tahunan PSAK No. 1: "Penyajian laporan keuangan"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 13: "Properti Investasi"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 48: "Penurunan nilai aset"
- PSAK No. 112 "Akuntansi wakaf"
- Amendemen PSAK No. 22 "Kombinasi bisnis"
- Amendemen PSAK No. 71: "Instrumen keuangan"
- Amendemen PSAK No. 55: "Instrumen keuangan: Pengakuan dan pengukuran"
- PSAK No. 62: "Kontrak asuransi";
- Amendemen PSAK No. 60: "Instrumen keuangan: Pengungkapan"
- Amendemen PSAK No. 73: "Sewa"
- PSAK No. 110: "Akuntansi Sukuk"
- PSAK No. 111: "Akuntansi Wa'd"

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan konsolidasian di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

Informasi Kelangsungan Usaha

Hal-Hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha

Kondisi yang tidak menentu atas perekonomian Indonesia yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 berpotensi mempengaruhi penurunan portofolio produk perusahaan, namun hal tersebut mampu diantisipasi PNM dengan baik melalui inisiatif strategi dan penetapan kebijakan untuk memitigasi buruknya portofolio pembiayaan. Mitigasi tersebut dapat berupa memastikan kembali profil nasabah dan bagaimana rencana pola pendapatan yang telah dirancang untuk mendapatkan strategi yang tepat, memastikan bagaimana kapasitas dari anggota tersebut apabila telah memenuhi kriteria, memonitoring dan mengevaluasi proses pembiayaan, mengelompokkan kualitas pembiayaan berdasarkan pola pembayaran angsuran anggota, dan memberikan bimbingan secara efektif dalam kelangsungan usaha. Hal ini terbukti dengan kinerja keuangan tahun 2021 yang membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa PNM tidak memiliki hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha.

The following are financial accounting standards, changes, and interpretations of financial accounting standards that were effective since January 1, 2021.

- *Annual adjustment of PSAK No. 1: "Presentation of financial statements"*
- *Annual adjustment of PSAK No. 13: "Investment Property"*
- *Annual adjustment of PSAK No. 48: "Impairment of assets"*
- *PSAK No. 112 "Accounting for waqf"*
- *Amendment to PSAK No. 22 "Business combination"*
- *Amendment to PSAK No. 71: "Financial instruments"*
- *Amendment to PSAK No. 55: "Financial instruments: Recognition and measurement"*
- *PSAK No. 62: "Insurance contract";*
- *Amendment to PSAK No. 60: "Financial Instruments: Disclosures"*
- *Amendment to PSAK No. 73: "Rent"*
- *PSAK No. 110: "Sukuk Accounting"*
- *PSAK No. 111: "Wa'd Accounting"*

The implementation of these standards did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and did not have a material impact on the consolidated financial statements for the current or prior year.

Business Continuity Information

Things that have a Significant Effect on Business Sustainability

The uncertain condition of the Indonesian economy caused by the COVID-19 pandemic had the potential to affect the decline in the company's product portfolio, but PNM was able to anticipate this well through strategic initiatives and policy determination to mitigate the poor financing portfolio. The mitigation was in the form of redefining the customer profile and how the planned income pattern was designed to get the right strategy, ascertaining how the capacity of the member if it met the criteria, monitoring and evaluating the financing process, classifying the quality of financing based on the member's installment payment pattern, and providing guidance effectively in business continuity. This was evidenced by the improved financial performance in 2021 compared to the previous year. Thus, it could be said that PNM did not have matters that had the potential to significantly affect business continuity.

Assessment Manajemen atas Hal-Hal yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha

PNM telah melakukan penilaian terhadap kemampuan PNM untuk mempertahankan kelangsungan usaha dan menilai keyakinan bahwa PNM memiliki sumber daya untuk melanjutkan bisnis di masa mendatang. Selain itu, manajemen PNM menilai tidak adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan PNM untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. *Assessment* manajemen dilakukan dengan berdasarkan berbagai faktor seperti analisis kekuatan kondisi keuangan maupun non keuangan. Berdasarkan hasil *assessment*, tidak terdapat hal-hal yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha.

Asumsi yang Digunakan Manajemen Dalam Melakukan *Assessment*

Beberapa asumsi yang menjadi pertimbangan PNM dalam melakukan *assessment* terhadap kelangsungan usaha antara lain:

1. Target nasabah aktif PNM Mekaar sebanyak 12 juta nasabah termasuk PNM Mekaar Naik Kelas sebanyak 988,1 ribu nasabah pada akhir 2022.
2. Pengembangan jaringan layanan melalui pemanfaatan jaringan *Co-Location* sebanyak 415 lokasi pada tahun 2022 di berbagai wilayah yang memiliki potensi termasuk wilayah pelosok di luar pulau Jawa.
3. Meningkatkan *cross selling Holding Ultra Mikro* dengan memanfaatkan platform aplikasi *UMi Corner* melalui akuisisi nasabah *Digital UMi Corner* sebanyak 32 ribu nasabah.
4. Meningkatkan kualitas SDM insan PNM dan membuka peluang lebih luas bagi milenial dan talenta perempuan melalui program *Top Talenta Perempuan* dan *Top Talenta Milenial > 12%*.
5. Untuk menjangkau para pelaku UMK dan ultra mikro direncanakan adanya penambahan 101 kantor cabang Mekaar pada akhir tahun 2022, 50 diantaranya merupakan kantor cabang syariah yang tersebar diberbagai wilayah kabupaten/kotamadya baik di pulau Jawa maupun luar pulau Jawa.
6. Meningkatkan implementasi digitalisasi pada proses bisnis dengan menargetkan jumlah nasabah Mekaar yang diproses secara *digital* per AO-nya mencapai 85% nasabah pada tahun 2022.

Management Assessment Things that Affect Significant Affect to Business Sustainability

PNM conducted an assessment of PNM's ability to maintain business continuity and assessed the confidence that PNM had the resources to continue in business in the future. In addition, PNM management considered the absence of material uncertainty that could raise significant doubts about PNM's ability to sustain its business. Management assessment was carried out based on various factors, such as analysis of the strength of financial and non-financial conditions. Based on the results of the assessment, there are no things that have a significant effect on business continuity.

Assumptions Used by Management in Assessment

Several assumptions that become PNM's considerations in conducting an assessment of business continuity include:

1. *The target of PNM Mekaar's active customers was 12 million customers, including PNM Mekaar Upgrading as many as 988.1 thousand customers by the end of 2022.*
2. *Development of a service network through the utilization of the Co-Location network as many as 415 locations by 2022 in various areas that had potential, including remote areas outside Java.*
3. *Increasing cross selling of Ultra Micro Holding by utilizing the UMi Corner application platform through the acquisition of 32 thousand UMi Corner digital customers.*
4. *Improving the quality of PNM human resources and opening wider opportunities for millennials and female talents through the Top Talent Women and Top Telenta Millennial programs > 12%.*
5. *Reaching MSEs and ultra-micro players, it was planned to add 101 Mekaar branch offices by the end of 2022, 50 of which were sharia branch offices spread across various districts/municipalities both on Java and outside Java.*
6. *Improving the implementation of digitization in business processes by targeting the number of digitally processed Mekaar customers per AO to reach 85% of customers by 2022.*

Tingkat Kesehatan Perusahaan

Penilaian tingkat kesehatan Perusahaan didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 826/KMK.013/1992 tanggal 24 Juli 1992. Dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 mengenai "Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara" Pasal 8, dinyatakan bahwa pengelompokan BUMN yang bergerak dalam bidang usaha jasa keuangan dan indikator penilaian aspek keuangan operasional dan administrasi ditetapkan dengan Keputusan Menteri BUMN tersendiri. Oleh karena sampai saat ini belum ada Keputusan dimaksud, maka PNM masih menggunakan Keputusan Nomor: 826/KMK.013/1992 tersebut dalam penilaian tingkat kesehatan Perusahaan tahun 2021.

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 826/KMK.013/1992, tingkat kesehatan BUMN dapat digolongkan menjadi:

- a. "Sehat Sekali", yaitu BUMN yang nilai bobot kinerja tahun terakhir menunjukkan angka di atas 110;
- b. "Sehat", yaitu BUMN yang nilai bobot kinerja tahun terakhir menunjukkan angka di atas 100 sampai dengan 110;
- c. "Kurang Sehat", yaitu BUMN yang nilai bobot kinerja tahun terakhir menunjukkan angka di atas 90 sampai dengan 100;
- d. "Tidak Sehat", yaitu BUMN yang nilai bobot kinerja tahun terakhir menunjukkan angka kurang dari atau sama dengan 90.

Berdasarkan Lampiran IV Surat Keputusan No. 826/KMK.013/1992, PNM termasuk ke dalam kelompok BUMN Jasa Keuangan Lainnya (Lembaga Keuangan Bukan Bank). Kemudian berdasarkan Lampiran II SK Nomor: 826/KMK.013/1992, Tingkat Kesehatan BUMN ditetapkan menurut penilaian atas bobot dari jenis-jenis indikator kerja sebagai berikut:

Indikator Utama, dengan total 70,00%, terdiri dari:

- Rentabilitas 52,50%
- Likuiditas 8,75%
- Solvabilitas 8,75%

Indikator tambahan, dengan total 30,00%, terdiri dari:

- Profit Margin 10,00%
- Rasio Operasi 10,00%
- Produktivitas Tenaga Kerja 10,00%

Level of Corporate Health

The assessment of the company's health level is based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number: 826/KMK.013/1992 dated July 24, 1992. In the Decree of the Minister for State-Owned Enterprises Number: KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002 regarding "Level Assessment Health of State Owned Enterprises" Article 8 states that the grouping of BUMNs engaged in financial services businesses and indicators of assessment of operational and administrative financial aspects are stipulated by a separate SOE Ministerial Decree. Because until now there has been no such Decree, PNM is still using the Decree Number: 826/KMK.013/1992 in the assessment of the Company's health level in 2021.

According to the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number: 826/KMK.013/1992, the health level of SOEs can be classified into:

- a. "Very Healthy", namely SOEs in which performance weighted value in the last year shows a number above 110;
- b. "Healthy", namely SOEs in which performance weighted scores for the last year were above 100 to 110;
- c. "Unhealthy", namely SOEs in which performance value in the last year shows a number above 90 to 100;
- d. "Unhealthy", namely SOEs in which performance weighted scores for the last year were less than or equal to 90.

Based on Appendix IV of Decree No. 826/KMK.013/1992, PNM is included in the group of SOEs of Other Financial Services (Non-Bank Financial Institutions). Then based on Appendix II of Decree Number: 826/KMK.013/1992, the Health Level of SOEs was determined according to the assessment of the weight of the types of work indicators as follows:

Main Indicators, totaling 70.00%, consist of:

- Rentability 52,50%
- Liquidity 8,75%
- Solvency 8,75%

Additional Indicators, with a total of 30.00%, consist of

- Profit Margin 10,00%
- Operating Ratio 10,00%
- Labor Productivity 10,00%

Berdasarkan penilaian atas bobot dari jenis indikator kinerja tahun 2021 nilai PNM untuk indikator utama sebesar 104,63 sedangkan indikator tambahan 37,53 sehingga total nilai kinerja adalah 142,15 dan termasuk kategori "Sehat Sekali". Berikut rincian indikator kinerja tersebut:

Based on the assessment of the weights of the types of performance indicators in 2021, the PNM value for the main indicators is 104.63 while the additional indicators are 37.53 so that the total performance value is 142.15 and is included in the "Old Healthy" category. The following are the details of the performance indicators:

Tabel Tingkat Kesehatan Perusahaan

Table of Level of Corporate Health

Kriteria Penilaian Assessment Criteria	Bobot Weight	Satuan Unit Unit	2021		Nilai Score	Total Nilai Total Score
			RKAP	Realisasi Realization		
			(b)	(c)		
	(a)				(d)=(c)/(b)	(e)=(a)x(d)
Indikator Utama Main Indicators						
Rentabilitas Rentability	52,50	%	2,26	3,72	1,65	86,37
Likuiditas Liquidity	8,75	%	182,34	192,38	1,05	9,23
Solvabilitas Solvency	8,75	%	134,90	139,19	1,03	9,03
Subtotal Subtotal	70,00					104,63
Indikator Tambahan Additional Indicators						
Profit Margin Profit Margin	10,00	%	7,95	12,44	1,56	15,64
Rasio Operasi Operating Ratio	10,00	%	108,83	114,20	1,05	10,49
Produktivitas Tenaga Kerja Labor Productivity	10,00	Rp juta Tenaga kerja	132,56	151,02	1,14	11,39
Subtotal Subtotal	30,00					37,53
Total Nilai Total Value	100,00					142,15

Aspek Perpajakan

PNM dalam kegiatan operasionalnya telah menjalankan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) yang dilakukan secara transparan dan akuntabel khususnya dalam mengelola hak dan kewajiban perpajakannya, hak dan kewajiban perpajakannya dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Taxation Aspect

PNM in its operational activities implemented Good Corporate Governance which was carried out in a transparent and accountable manner, especially in managing its taxation rights and obligations, tax rights and obligations were carried out in accordance with applicable regulations.

Tabel Pembayaran Pajak Table of Payment of Taxes

(dalam jutaan Rupiah / in IDR million)

No	Jenis Pajak	2021	2020	Type of Tax
1	PPH Pasal 21	34.454	38.157	Income Tax Article 21
2	PPH Pasal 22	909	1.385	Income Tax Article 22
3	PPH Pasal 23	12.771	8.542	Income Tax Article 23
4	PPH Pasal 26	1.872	2.824	Income Tax Article 26
5	PPH Pasal 25	104.668	36.187	Income Tax Article 25
6	PPH Pasal 4 ayat (2)	93.795	55.041	Income Tax Article 4 paragraph (2)
7	PPN	2.311	89	PPN
8	PPN Wajib Pungut (Wapu)	72.794	54.331	Compulsory VAT Collection (Wapu)
9	Pajak lainnya	-	-	Other taxes
10	PPH 28A/29	95.699	95.753	Income Tax Article 28A/29
	Total	419.274	292.308	Total

Transaksi Spot dan Transaksi Derivatif

Sampai dengan akhir tahun 2021, PNM tidak memiliki transaksi spot dan transaksi derivatif.

Spot Transactions and Derivative Transactions

Until the end of 2021, PNM has no spot transactions and derivative transactions.

SUMBER DAYA MANUSIA

Human Capital

PNM
Permodalan Nasional





Manajemen *Human Capital*

Human Capital Management

Kebijakan dan Pelaksanaan Rekrutmen

Visi PT Permodalan Nasional Madani (Persero) adalah menjadi lembaga pembiayaan terkemuka dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang berlandaskan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik sehingga diperlukan sumber daya manusia yang terampil dan profesional untuk mewujudkannya. Di samping itu, menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat dengan kemajuan teknologi yang berkembang pesat, perseroan membutuhkan sumber daya manusia yang semakin andal pula.

Kondisi pandemi COVID-19 tidak menyurutkan semangat PNM untuk mencari putra-putri terbaik bangsa, terbukti dengan salah satu terobosan yang dilakukan oleh perusahaan adalah pengembangan PNM Assessment System atau PASS pada tahun 2020. Pada tahun 2021, penggunaan PASS tetap terus dilakukan secara berkesinambungan mengingat kondisi pandemic yang belum benar-benar usai. Sistem ini memungkinkan perusahaan tetap menjalankan proses rekrutmen dan seleksi terhadap setiap kandidat yang melamar ke perusahaan melalui metode daring (*online*) tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu.

Secara garis besar, pelaksanaan rekrutmen di perusahaan yang dioperasikan oleh Divisi SDM melalui Bagian Rekrutmen dan Asesmen, diperoleh dari 2 (dua) jalur yakni Rekrutmen Eksternal dan Rekrutmen Internal. Kedua jalur tersebut dilaksanakan sebagai upaya dan strategi guna memenuhi kebutuhan kandidat-kandidat unggul dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan.

Rekrutmen Eksternal

Rekrutmen Eksternal dilakukan sepanjang 2021 untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia meliputi berbagai Divisi di PNM. Adapun proses pelaksanaan Rekrutmen Eksternal dilaksanakan melalui beberapa program, di antaranya:

1. Program Rekrutmen Reguler
Program Rekrutmen Reguler dilakukan secara berkelanjutan, baik terhadap kandidat yang sifatnya fresh graduates maupun *experienced hire*.

Recruitment Policies and Implementation

The vision of PT Permodalan Nasional Madani (Persero) is to become a leading financial institution in increasing added value in a sustainable manner for Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives (UMKMK) based on the principles of Good Corporate Governance (GCG) so that it is needed skilled and professional human resources to make it happen. In addition, facing increasingly fierce business competition with rapidly developing technological advances, the company needs increasingly reliable human resources.

The condition of the COVID-19 pandemic did not diminish PNM's enthusiasm to look for the nation's best youths, as evidenced by one of the breakthroughs made by the company was the development of the PNM Assessment System or PASS optimally in 2020. In 2021, the use of PASS will continue to be carried out on an ongoing basis considering the pandemic conditions that have not really ended. This system allows the company to continue to carry out the recruitment and selection process for every candidate who applies to the company through the online method without being limited by distance and time.

Generally, the implementation of recruitment in companies operated by the HR Division through the Recruitment and Assessment Section can be obtained from 2 (two) channels, namely External Recruitment and Internal Recruitment. Both paths were implemented as an effort and strategy to meet the needs of superior candidates in order to support the company's business growth.

External Recruitment

External Recruitment is carried out throughout 2021 to meet human resource needs covering various Divisions at PNM. The External Recruitment implementation process is carried out through several programs, including:

1. Regular Recruitment Program
The Regular Recruitment Program is carried out on an ongoing basis, both for candidates who are fresh graduates and experienced hires.

2. Program Rekrutmen Disabilitas

Program ini dilakukan untuk menjunjung tinggi kesetaraan dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Pada program Rekrutmen Disabilitas, perusahaan melakukan rekrutmen kepada para kandidat yang termasuk pada kriteria difabel dan diseleksi sesuai dengan kebijakan dan arahan Kementerian yang berlaku.

Rekrutmen Internal

Rekrutmen internal juga dilakukan untuk mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan sesuai dengan kebijakan yang berlaku di PNM, baik pada jabatan-jabatan manajerial maupun operasional.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka perusahaan tetap mampu melakukan rekrutmen secara efektif. Sepanjang Tahun 2021, perusahaan pun tercatat telah berhasil merekrut karyawan baru sebanyak 23.682 orang karyawan. Pencapaian tersebut diperoleh dari perekrutan sebanyak 237 orang karyawan di Kantor Pusat, 797 orang karyawan di seluruh jaringan layanan PNM ULamm, sebanyak 22.448 karyawan di seluruh jaringan layanan PNM Mekaar, dan sebanyak 170 orang karyawan di Afiliasi. Adapun data hasil perekrutan karyawan di Tahun 2021 kami sajikan pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel Perekrutan Karyawan PNM Tahun 2021 Berdasarkan Status Kepegawaian
Table of PNM Group Employee Recruitment in 2021 Based on Employment Status

Unit Kerja	Tetap Permanent	PKWT	Outsource	Magang Apprenticeship	Jumlah Total	Work Unit
Kantor Pusat	-	73	137	27	237	Headquarters
ULamm	-	538	258	1	797	ULamm
Mekaar	-	31	22447	-	22.478	Mekaar
Afiliasi	3	64	88	15	170	Affiliate
Jumlah Keseluruhan	3	706	22.930	43	23.682	Total Number

Keterangan / Information: PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) / PKWT (Fixed Term Work Agreement)

Tabel Perekrutan Karyawan PNM Tahun 2021 Berdasarkan Level Jabatan
Table of PNM Employee Recruitment 2021 Based on Position Level

Level Jabatan	PKWT	Outsource	Magang Apprenticeship	Jumlah Total	Position Level
Kepala Bagian	2	-	-	2	Head of Division
Senior Specialist	1	-	-	1	Senior Specialist
Senior Officer	9	-	-	9	Senior Officer
Officer	58	-	-	58	Officer
Staf	572	22.734	28	23.442	Staff
Non-Staf	-	108	-	108	Non-Staff
Jumlah Keseluruhan	642	22.842	28	23.512	Total Number

2. Disability Recruitment Program

This program was carried out to uphold equality in employment in Indonesia. In the Disability Recruitment program, the company recruited candidates under the disability criteria, and they were selected according to the policies and directions of the applicable Ministry.

Internal Recruitment

Internal recruitment is also carried out to optimize the existing human resources within the company in accordance with the applicable policies at PNM, both in managerial and operational positions.

Based on the explanation above, the company was still able to carry out recruitment effectively. Throughout 2021, the company was recorded as having successfully recruited 23,682 new employees. This achievement was obtained from the recruitment of 237 employees at the Head Office, 797 employees throughout the ULamm PNM service network, 22,448 employees in the Mekaar PNM service network, and 170 employees in Affiliates. The data on the results of employee recruitment in 2021 are presented in the tables below.

Tabel Perekrutan Karyawan Afiliasi PNM Tahun 2021 Berdasarkan Level Jabatan
Table of Recruitment of PNM Affiliated Employees in 2021 by Position Level

Level Jabatan	Tetap Permanent	PKWT	Outsource	Magang Apprenticeship	Jumlah Total	Position Level
Kepala Divisi	-	1	-	-	1	Head of Division
Kepala Bagian	-	3	-	-	3	Head of Division
Assistant Manager	1	3	-	-	4	Assistant Manager
Senior Specialist	-	5	-	-	5	Senior Specialist
Senior Officer	-	2	-	-	2	Senior Officer
Officer	-	2	-	-	2	Officer
Staf	2	48	77	15	142	Staff
Non-Staf	-	-	11	-	11	Non-Staff
Jumlah Keseluruhan	3	64	88	15	170	Total Number

Pemenuhan kebutuhan karyawan di PNM pun dilakukan di Kantor-Kantor Cabang, yakni pada seluruh jaringan layanan PNM ULaMM maupun PNM Mekaar. Mayoritas posisi yang direkrut di PNM ULaMM dan PNM Mekaar adalah Account Officer Mikro untuk ULaMM yaitu 477 orang karyawan dan Account Officer untuk Mekaar sebanyak 20.681 karyawan.

Meeting the needs of employees at PNM is also carried out at Branch Offices, namely the entire PNM ULaMM and PNM Mekaar service network. The majority of positions recruited at PNM ULaMM and PNM Mekaar were Micro Account Officer for ULaMM with 477 employees and Account Officer for Mekaar with 20,681 employees.

Tabel Perekrutan Karyawan PNM ULaMM Tahun 2021 Berdasarkan Posisi
Table of Recruitment of PNM ULaMM Employees in 2021 by Position

Posisi	PKWT	Outsource	Magang Apprenticeship	Jumlah Total	Position
Kepala Kantor ULaMM	6	-	-	6	Head of ULaMM Office
Account Officer Mikro	477	-	-	477	Micro Account Officer
Keuangan & Administrasi Mikro	-	182	-	-	Micro Finance & Administration
Staf Admin Remedial Cabang	3	-	-	3	Branch Remedial Admin Staff
Staf Bagian Umum	1	-	-	1	General Staff
Staf Collection	32	-	-	32	Collection staff
Staf Magang	-	-	1	1	Intern Staff
Staf Operasional	-	11	-	11	Operational Staff
Staf Operasional Cabang	6	-	-	6	Branch Operations Staff
Staf Remedial Cabang	13	-	-	13	Branch Remedial Staff
Staff Bagian Umum	-	1	-	1	General Staff
Admin Bisnis	-	2	-	2	Business Admin
Admin Remedial	-	2	-	2	Admin Remedial
Driver	-	21	-	21	Driver
Office Boy	-	10	-	10	Office Boy
Receptionist	-	20	-	20	Receptionist
Security	-	9	-	1	Security
Jumlah Keseluruhan	538	258	1	797	Total Number

Tabel Perekrutan Karyawan PNM Mekaar Tahun 2021 Berdasarkan Posisi
Table of Recruitment of PNM Mekaar Employees in 2021 by Position

Posisi	Jumlah (Outsource) Total (Outsource)	Position
Account Officer	20.681	Account Officer
Finance Administration Officer	1.755	Finance Administration Officer
Jumlah Keseluruhan	22.478	Total Number

Pada tahun 2021, perusahaanpun turut melaksanakan Program Rekrutmen Disabilitas. Berdasarkan program yang telah dilaksanakan tersebut, perusahaan berhasil memperoleh 48 orang karyawan yang bergabung dengan PNM. Berikut hasil dari Program Rekrutmen Disabilitas di PNM Tahun 2021.

In 2021, the company will also carry out the Disability Recruitment Program. Based on the program that has been implemented, the company has succeeded in acquiring 48 employees who have joined PNM. The following are the results of the Disability Recruitment Program at PNM in 2021.

Tabel Perekrutan Karyawan Program Disabilitas Tahun 2021 Berdasarkan Posisi
Table of Employee Disability Program Recruitment in 2021 by Position

Posisi	Jumlah Total	Position
Account Officer (Mekaar)	3	Account Officer (Mekaar)
Account Officer Mikro (ULaMM)	2	Account Officer Mikro (ULaMM)
Finance Administration Officer (Mekaar)	1	Finance Administration Officer (Mekaar)
Keuangan dan Administrasi Mikro (ULaMM)	3	Micro Finance and Administration (ULaMM)
Office Boy	1	Office Boy
Officer SDM Wilayah	1	Regional HR Officer
Receptionist	1	Receptionist
Staf Admin	7	Admin Staff
Staf Kantor Pusat	6	Head Office Staff
Staf Bagian Umum	1	General Staff
Staf IT Wilayah	1	Regional IT Staff
Staf Legal Wilayah	2	Regional Legal Staff
Staf Operasional Cabang	17	Branch Operations Staff
Staf SDM Wilayah	2	Regional HR Staff
Jumlah Keseluruhan	48	Total Number

Tabel Perekrutan Karyawan Program Disabilitas Tahun 2021 Berdasarkan Unit Kerja
Table of Employee Disability Program Recruitment in 2021 by Work Unit

Unit Kerja	Jumlah Total	Work Unit
Kantor Pusat	6	Headquarters
Kantor Cabang PNM	33	PNM Branch Office
Unit ULaMM	5	ULaMM Unit unit
Cabang Mekaar	4	Mekaar Branch
Jumlah Keseluruhan	48	Total Number

Tabel Perekrutan Karyawan Program Disabilitas Tahun 2021 Berdasarkan Jenis Disabilitas
Table of Employee Recruitment for the Disability Program in 2021 by Type of Disability

Jenis Disabilitas	Jumlah Total	Type of Disability
Tuna Daksa	29	Physically disabled
Tuna Netra	9	Blind
Tuna Netra dan Tuna Daksa	1	Blind and Physically Impaired
Tuna Rungu	6	Deaf
Tuna Wicara	3	Speech impaired
Jumlah Keseluruhan	48	Total Number

Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

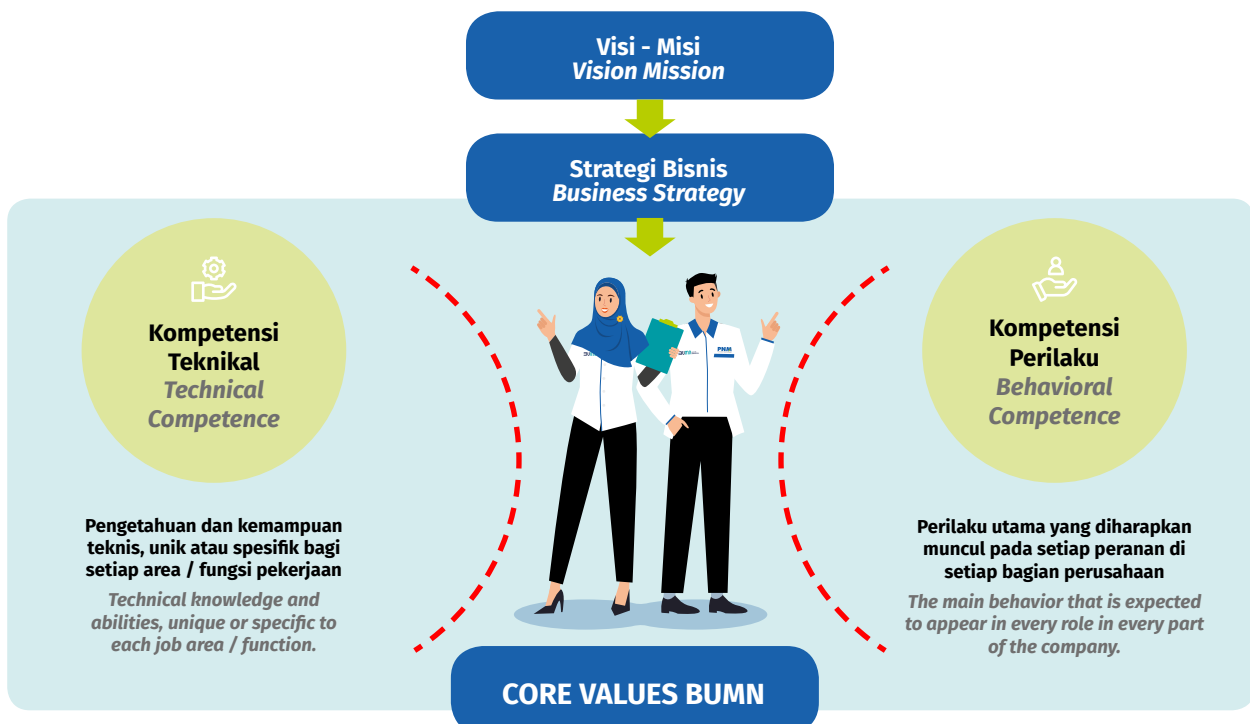
Pengembangan Kompetensi SDM di PNM membantu meningkatkan potensi karyawan sedini mungkin, dan juga mampu membantu meretensi karyawan yang memiliki talenta yang baik di dalam perusahaan. Pengembangan kompetensi memberikan kesempatan kepada para karyawan untuk mengikuti Program Pengembangan Kompetensi untuk mengembangkan kemampuan dan potensi kepemimpinan serta manajerial agar lebih siap untuk menempati posisi yang lebih tinggi.

Pengembangan kompetensi di PNM selaras dengan Visi dan Misi Perusahaan serta Strategi dan Standar Kompetensi Ultra Mikro PNM serta kompetensi BUMN. Program Pengembangan Kompetensi di PNM difokuskan pada peningkatan kompetensi teknis dan kompetensi perilaku, sejalan dengan Core Values BUMN.

Competency Development Policy and Implementation

HR Competency Development at PNM helped to increase the potential of employees as early as possible, and was also able to help retain employees who had good talents within the company. Competency development provided opportunities for employees to take part in the Competency Development Program to develop leadership and managerial abilities and potential to be better prepared for higher positions.

Competency development at PNM was in line with the Company's Vision and Mission as well as PNM's Ultra Micro Strategy and Competency Standards and SOEs competencies. The Competency Development Program at PNM focused on improving technical competences and behavioral competencies, in line with SOEs Core Values.



Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Karir

Dalam rangka mendukung strategi perusahaan, saat ini Divisi SDM mengembangkan sistem pengembangan karir karyawan, salah satunya adalah dengan cara meningkatkan kompetensi karyawan melalui pelatihan baik *soft skill*, *technical skill* maupun program pelatihan *leadership* yang berjenjang. Program *Leadership* ini di antaranya adalah *Leadership Series Program* untuk *first line management* maupun *middle management*, serta *Senior Leadership Program* bagi *senior management*. Diharapkan dengan meningkatnya potensi karyawan maka karyawan memiliki kesempatan untuk menjalankan pekerjaan dan penugasan yang lebih menantang, untuk itu disusun program pengembangan talenta secara komprehensif dan berkesinambungan, dengan tujuan untuk memastikan ketersediaan dan kesiapan penerus kepemimpinan serta posisi kunci lainnya dalam perusahaan.

Program tersebut dimulai dengan proses identifikasi talenta dengan melakukan pemetaan yang menggunakan dua kriteria, yaitu kinerja dan potensi. *Assessment* dan *talent review* untuk mengenali dan mengelola talenta terbaik dalam perusahaan agar dapat dikembangkan sesuai kebutuhan individu tersebut, Dalam upaya membangun talenta internal dalam Perusahaan, Program Pelatihan dan Pengembangan dibentuk. Program ini bertujuan untuk memupuk pemimpin PNM masa depan dengan memperkuat pengetahuan kompetensi di Lembaga Keuangan Non Bank yang komprehensif dan secara sistematis melakukan rotasi kerja untuk mempercepat kemajuan keterampilan karyawan.

Penilaian Kinerja

Dalam rangka penjelasan fokus kerja, Perusahaan menetapkan arahan umum yang harus dirincikan lebih lanjut sampai ke tingkat perorangan berupa perencanaan kinerja yang dibuat dan disepakati oleh Karyawan dan Atasan yang berwenang, sesuai dengan periode penilaian. Secara umum, Atasan terkait wajib membina dan menilai kinerja karyawan secara obyektif dan bertanggung jawab dan mengikuti aturan atau ketentuan yang berlaku. Tata cara Penilaian Kinerja Karyawan/ti diatur lebih lanjut dalam ketentuan yang berlaku di Perusahaan. Penilaian Kinerja disamping sebagai dasar pengembangan karir karyawan, juga merupakan salah satu dasar pertimbangan untuk kenaikan upah, golongan, atau jabatan.

Policy and Implementation of Career Development

In order to support the company's strategy, currently the HR Division developed a career development system for employees, one of which was by increasing employee competence through training in soft skills, technical skills and tiered leadership training programs. These Leadership Programs included the Leadership series programs for first line management and middle management, as well as senior leadership programs for senior management. It was expected that with the increase in employee potential, employees would have the opportunity to carry out more challenging jobs and assignments, therefore a comprehensive and continuous talent development program was prepared, with the aim of ensuring the availability and readiness of future leadership and other key positions in the company.

The program began with the process of identifying talents by mapping using two criteria, namely performance and potential. Assessment and talent review to identify and manage the best talents in the company so that they could be developed according to the needs of these individuals. In an effort to build internal talent within the company, a Training and Development Program was formed. This program aimed to nurture future PNM leaders by strengthening comprehensive knowledge of competencies in Non-Bank Financial Institutions and systematically carrying out job rotations to accelerate the advancement of employee skills.

Performance Assessment

In order to explain the work focus, the Company established general directions that had to be detailed further down to the individual level in the form of a performance plan that was made and agreed upon by the authorized Employees and Supervisors, in accordance with the assessment period. In general, supervisors were required to develop and assess employee performance objectively and responsibly and comply with applicable rules or regulations. The procedures for Employee Performance Appraisal were further regulated in the applicable regulations in the Company. In addition to being a basis for employee career development, performance appraisal became one of the basic considerations for increasing wages, class, or position.

Kebijakan Remunerasi

Kebijakan remunerasi merupakan strategi dalam memberikan imbalan kepada pegawai, yang disesuaikan dengan kemampuan perusahaan agar dapat mengakomodir perubahan demografi pegawai, pengelolaan biaya tenaga kerja dan dalam rangka mendorong pencapaian tujuan bisnis PNM. Remunerasi PNM disusun dengan tujuan untuk dapat menarik, mempertahankan, memotivasi dan meningkatkan keterikatan pegawai agar dapat terus menerus memberikan kinerja yang optimal mendukung visi, misi dan strategi PNM.

Secara umum, strategi remunerasi PNM berpedoman pada Undang-undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penerapan strategi remunerasi juga dilaksanakan dengan memperhatikan kinerja dari tiap-tiap individu pegawai (*based on performance*), kinerja unit kerja dan kinerja Perusahaan secara keseluruhan, namun tetap dalam anggaran yang ditetapkan. Secara umum, dalam mengimplementasikan *total rewards* PNM memberikan gaji, penyesuaian gaji setiap tahun, tunjangan hari raya (THR), tunjangan cuti, dan tunjangan cuti besar yang diberikan secara priode masa kerja 5 (lima) tahunan.

PNM juga menyediakan fasilitas kesehatan rawat jalan, melahirkan, rawat gigi, kacamata serta rawat inap. Selain itu PNM memberikan kompensasi yang bersifat variabel diantaranya tunjangan jabatan tertentu, kompensasi lembur, bonus pencapaian kinerja, insentif penjualan.

Program Pensiun

PNM memiliki program pensiun sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam rangka menghargai karyawan yang akan segera memasuki masa pensiun, PNM memberikan pembekalan berupa *Workshop* Persiapan Masa Pensiun. Pelatihan ini dilakukan agar karyawan yang akan memasuki masa pensiun lebih siap menghadapi masa pensiun mereka. Pelatihan ini meliputi kegiatan masa pensiun yang terdiri dari persiapan mental dan finansial.

Remuneration Policy

The remuneration policy became a strategy in providing rewards to employees, which were adjusted to the company's ability to accommodate changes in employee demographics, managing labor costs and in order to encourage the achievement of PNM's business goals. PNM remuneration was formulated with the aim of being able to attract, retain, motivate and increase employee engagement so that they could continuously provide optimal performance supporting PNM's vision, mission and strategy.

In general, the PNM remuneration strategy was guided by the Manpower Act and the Financial Services Authority Regulation. The application of the remuneration strategy was also carried out by taking into account the performance of each individual employee (based on performance), the performance of the work unit and the overall performance of the Company, but still within the stipulated budget. In general, in implementing total rewards, PNM provided salaries, annual salary adjustments, holiday allowances (THR), leave allowances, and leave allowances which were given for a period of 5 (five) years of service.

PNM also provided outpatient health facilities, childbirth, dental care, glasses and inpatient care. In addition, PNM provided variable compensation, including certain occupational allowances, overtime compensation, performance achievement bonuses, sales incentives.

Pension Program

PNM had a pension program according to applicable regulations. In order to reward employees who were about to enter retirement, PNM provided training in the form of a Retirement Preparation Workshop. This training was conducted so that employees who were about to retire would be better prepared for their retirement. This training included retirement activities consisting of mental and financial preparation.

System and Infrastructure Human Capital

System and Infrastructure Human Capital

Pengembangan sistem informasi SDM berbasis web dengan teknologi yang andal untuk mendukung efektivitas organisasi dan meningkatkan pelayanan fungsi SDM, serta mendukung program-program di Divisi SDM dari sisi teknologi untuk mempercepat administrasi dari program-program ini. Dan juga melakukan integrasi sistem bersama Divisi TIF dan PT. MTM untuk menunjang bisnis PNM.

1. Integrasi Digi Cash PNM Group, validasi untuk pengajuan pinjaman lunak karyawan.
2. Sinkronisasi data karyawan berdasarkan data dari Dukcapil.
3. Penyediaan data untuk integrasi PNM Digi dengan Pegadaian Tabungan Emas.
4. *Approval memo by system.*
5. *Approval SK by system.*
6. *Split* pembayaran payroll ke PNM Digi.
7. Integrasi dengan aplikasi *Assessment Online*.
8. Psikogram, hasil penilaian *assessment* karyawan.
9. Pembaharuan Memo *Distribution* agar dapat digunakan Struktur Divisi PNM.
10. Pembaharuan Sistem *Import Data* dari system *Create SK*, *PPKWT* dan *Buffer* ke Sistem *Payroll* SDM.
11. Pembuatan beberapa API HRIS untuk integrasi data karyawan, validasi dan otomatisasi proses HR di Afiliasi (Sapa MMI).
12. Pembuatan beberapa API baru untuk memperkuat sistem EDS PNM Digi.
13. Penyesuaian dan pembuatan beberapa *report* baru di HRIS sesuai permintaan Manajemen.

Development of a web-based HR information system with reliable technology to support organizational effectiveness and improve HR function services, as well as support programs in the HR Division in terms of technology to accelerate the administration of these programs. And also carry out system integration with the TIF and PT. MTM Divisions to support PNM's business.

1. *PNM Group Digi Cash integration, validation for employee soft loan applications.*
2. *Synchronizing employee data based on data from Dukcapil.*
3. *Provision of data for the integration of PNM Digi with the Gold Savings Pawnshop.*
4. *Approval memo by system.*
5. *Approval SK by system.*
6. *Splitting payroll payments to PNM Digi.*
7. *Integration with the Online Assessment application.*
8. *Psychogram, employee assessment results.*
9. *Updating Memo Distribution so that the PNM Division Structure can be used.*
10. *Updating on Import Data System from Create SK, PPKWT and Buffer system to HR Payroll System.*
11. *Creating several HRIS APIs for employee data integration, validation and automation of HR processes in Affiliation (Sapa MMI).*
12. *Creating several new APIs to strengthen Digi's PNM EDS system.*
13. *Adjusting and creating several new reports in HRIS according to Management's request.*

Program Kerja Human Capital 2021

Human Capital Work Program 2021

Pada tahun 2021, PNM telah melaksanakan program kerja terkait pengembangan *human capital* antara lain:

- Melakukan pengembangan teknologi dan pembaharuan sistem aplikasi Digital Manajemen SDM (DPM) tahap 1.
- Melaksanakan program Penilaian Kinerja Karyawan dan Sasaran Kinerja Karyawan melalui Sistem Manajemen Kinerja.

In 2021, PNM has implemented work programs related to human capital development, including:

- *Develop technology and update the Digital HR Management (DPM) application system stage 1.*
- *Implementing Employee Performance Assessment and Employee Performance Targets through the Performance Management System.*

- Pembaharuan keseluruhan aspek Pengembangan Organisasi melalui pembaharuan atas Struktur Organisasi, *Job Specification*, dan *Job Description* dalam mendukung kegiatan proses bisnis.
- Program kerja pelaksanaan *Employee Satisfaction* dan *Employee Engagement*.
- Pengembangan penyusunan *forecast* untuk *Man Power Planning* dan perhitungan Biaya Tenaga Kerja.
- Mengembangkan peran sebagai *Strategic Business Partner* dalam pengelolaan SDM pada seluruh Unit Kerja dan Anak Usaha serta Perusahaan Pasangan Usaha.
- Penyajian informasi data karyawan secara realtime dan update.
- Audit basis data karyawan secara berkelanjutan untuk memastikan data yang terinput di HRIS sudah valid.
- Mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan SDM melalui rotasi-mutasi dengan memperhatikan kompetensi, talenta dan pengembangan karyawan.
- Pembuatan Struktur Skala Upah sesuai dengan peraturan Kementerian Ketenagakerjaan RI No. 1 tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah.
- Membuat dan memperbaharui SK Kebijakan.
- Evaluasi dan penyempurnaan fasilitas program Asuransi karyawan.
- Penyesuaian gaji karyawan berdasarkan Upah Minimum Kabupaten/Kota/Provinsi yang terbaru (sesuai wilayah atau cabang masing-masing).
- Perubahan pola *request* dan *approval* absensi (cuti, ijin, sakit, perjalanan dinas, lembur) menggunakan PNM Digi.
- *Integrasi Application Programming Interface (API)* HRIS dengan aplikasi lain yang ada di PNM Grup.
- Mengubah surat-surat yang berhubungan dengan karyawan (SK, PKWT, PKWT, Surat Keterangan, dan lain-lain) menggunakan surat digital.
- Membangun dan menjaga hubungan industrial yang harmonis antara karyawan dan perseroan.
- Terpenuhinya pengisian Wajib Laport Tenaga Kerja (WLTK) secara on-line.
- Menjadikan PNM Klub sebagai sarana komunikasi, penyaluran hobi dan bakat karyawan.
- Rekrutmen, Seleksi dan Asesmen untuk pemenuhan SDM serta fungsi organisasi yang masih harus dipenuhi sesuai dengan kebijakan RKAP 2021.
- Memperharui dan merancang platform psikotest online yang efektif dan menunjang sesuai kebutuhan Divisi SDM dan PNM.
- Optimalisasi penggunaan aplikasi asesmen online PNM (PASS-PNM Assessment System).
- Penyempurnaan dan pembaruan *Employee Assessment Tools*.
- Pelaksanaan dan optimalisasi Assesment Center untuk karyawan.
- Program Kepala Cabang Mekaar Development.
- Program Account Officer Mikro Development.
- Perekrutan karyawan penyandang disabilitas.
- *Renewal of all aspects of Organizational Development through renewal of the Organizational Structure, Job Specification, and Job Description in support of business process activities.*
- *Work program for the implementation of Employee Satisfaction and Employee Engagement.*
- *Development of forecast preparation for Man Power Planning and calculation of Labor Costs.*
- *Develop a role as a Strategic Business Partner in HR management in all Work Units and Subsidiaries as well as Business Partner Companies.*
- *Presentation of employee data information in real time and updates.*
- *Audit employee database on an ongoing basis to ensure that the data entered in the HRIS is valid.*
- *Optimizing the fulfillment of HR needs through rotations by paying attention to competencies, talents and employee development.*
- *Making the Wage Scale Structure in accordance with the regulation of the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia No. 1 of 2017 concerning Wage Structure and Scale.*
- *Creating and updating policy decrees.*
- *Evaluation and improvement of employee insurance program facilities.*
- *Employee salary adjustments based on the latest Regency/City/Provincial Minimum Wage (according to each region or branch).*
- *Changes in attendance request and approval patterns (leave, permission, illness, official travel, overtime) using PNM Digi.*
- *Integration of the HRIS Application Programming Interface (API) with other applications in the PNM Group.*
- *Changing letters related to employees (SK, PKWT, PKWT, Certificates, etc.) using digital mail.*
- *Build and maintain harmonious industrial relations between employees and the company.*
- *The fulfillment of the on-line Manpower Report Compulsory (WLTK) filling.*
- *Making PNM Club a means of communication, channeling hobbies and talents of employees.*
- *Recruitment, Selection and Assessment for the fulfillment of HR and organizational functions that still have to be fulfilled in accordance with the 2021 RKAP policy.*
- *Updating and designing an effective and supportive online psychotest platform according to the needs of the HR Division and PNM.*
- *Optimizing the use of the PNM online assessment application (PASS-PNM Assessment System).*
- *Improvements and updates to Employee Assessment Tools.*
- *Implementation and optimization of the Assessment Center for employees.*
- *Mekaar Development Branch Head Program.*
- *Micro Development Account Officer Program.*
- *Recruitment of employees with disabilities.*

- Mengelola penyusunan kebijakan dan prosedur pendidikan, pelatihan, pengembangan dan manajemen talenta.
- Melaksanakan analisa kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan.
- Menyusun rencana dan anggaran tahunan bidang pendidikan, pelatihan dan pengembangan dalam organisasi.
- Menyusun program dan katalog pelatihan tahunan.
- Melakukan evaluasi kegiatan pelatihan dan pengembangan.
- Menyelenggarakan program-program Pengembangan dan Pelatihan SDM untuk meningkatkan kompetensi SDM baik *technical* maupun *soft skill* sesuai dengan kebutuhan pencapaian RKAP.
- Menyelenggarakan dan mengembangkan Kompetensi Program Pendidikan MT/*Development Program*.
- Melaksanakan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat.
- Memfasilitasi peningkatan jenjang pendidikan karyawan.
- Melakukan pengembangan kompetensi Internal Trainer.
- Melakukan penyusunan kurikulum dan materi pelatihan.
- Bagian Operasional Pendidikan dan Pelatihan
- Pengembangan digitalisasi dan database pengembangan SDM dan Pelatihan.
- Mempersiapkan proses penyelenggaraan pelatihan.
- Pembuatan Laporan Kegiatan Pelatihan.
- *Asset Management* dan infrastruktur pendukung Pendidikan dan Pelatihan.
- Pengelolaan *Knowledge Management* Pendidikan dan Pelatihan.
- *Managing the formulation of policies and procedures for education, training, development and talent management.*
- *Carry out an analysis of training needs and employee development.*
- *Prepare annual plans and budgets for education, training and development within the organization.*
- *Develop annual training programs and catalogs.*
- *Evaluating training and development activities.*
- *Organizing HR Development and Training programs to improve HR competencies, both technical and soft skills in accordance with the needs for achieving RKAP.*
- *Organizing and developing the Competency of the MT/ Development Program Education Program.*
- *Implementing a Certified Student Internship Program.*
- *Facilitating the improvement of employee education levels.*
- *Conducting competency development for Internal Trainers.*
- *Prepare curriculum and training materials.*
- *Education and Training Operational Section*
- *Development of digitization and database of HR development and training.*
- *Prepare the training implementation process.*
- *Preparation of Training Activity Reports.*
- *Asset Management and supporting infrastructure for Education and Training.*
- *Knowledge Management Education and Training.*

Internalisasi Budaya

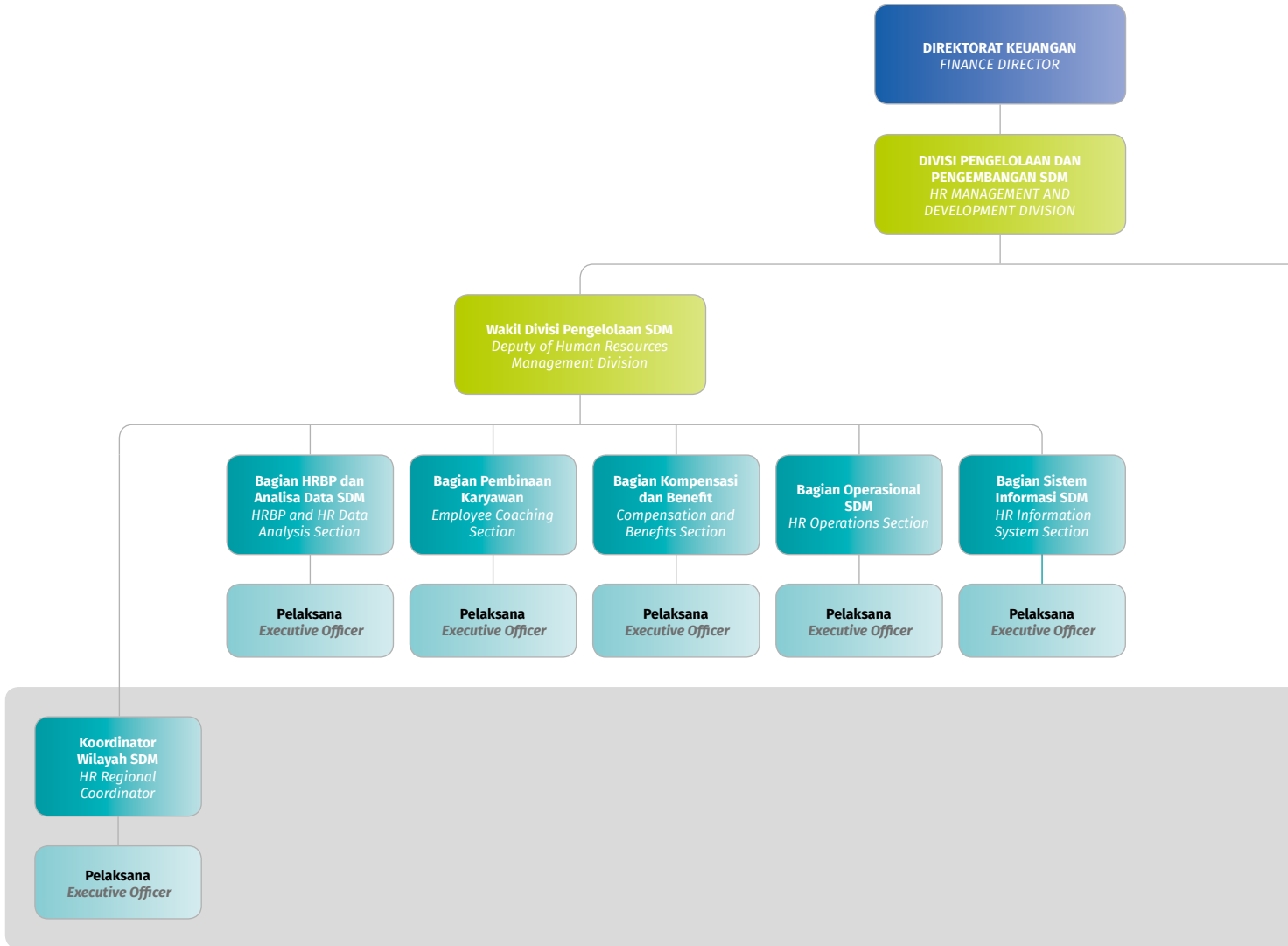
Internalization of Culture

PNM berkomitmen menerapkan nilai AKHLAK BUMN yang telah ditetapkan sebagai pedoman budaya kerja seluruh BUMN dibawah naungan Kementerian BUMN. Internalisasi Insan PPNM ber-AKHLAK yang menjunjung tinggi nilai Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif, sebagai standar nilai perilaku yang menjadi pedoman dalam berbudaya kerja dalam mewujudkan spirit BUMN Untuk Indonesia. Perseroan terus melakukan internalisasi dan menjadikan nilai AKHLAK sebagai spirit yang tertanam mendasar dan menjadi budaya kerja Perusahaan sehingga dapat mencerminkan tindakan seluruh Insan PNM yang sejalan dengan proses bisnis Perusahaan.

PNM was committed to implementing the SOEs AKHLAK value which had been established as a guideline for the work culture of all SOEs under the auspices of the Ministry of SOEs. guidelines in work culture in realizing the spirit of SOEs for Indonesia. The Company continued to internalize and make the AKHLAK value a spirit that was deeply embedded and became the Company's work culture so that it could reflect the actions of all PNM personnel that were in line with the Company's business processes.

Struktur Pengelola *Human Capital*

Capital Human Management Structure





Wilayah
Area

Rencana Kerja *Human Capital* 2022

2022 *Human Capital Work Plan*

Perusahaan telah menyusun rencana kerja *human capital* untuk tahun 2022 antara lain:

1. Melakukan Pengembangan teknologi dan pembaharuan sistem aplikasi Digital Manajemen SDM (DPM) tahap 1.
2. Melaksanakan program Penilaian Kinerja Karyawan dan Sasaran Kinerja Karyawan melalui Sistem Manajemen Kinerja.
3. Melakukan pembaharuan keseluruhan aspek Pengembangan Organisasi melalui pembaharuan atas Struktur organisasi, *Job Specification*, dan *Job Description* dalam mendukung kegiatan proses bisnis.
4. Melakukan program kerja pelaksanaan *Employee Satisfaction* dan *Employee Engagement*.
5. Mengembangkan penyusunan *forecast* untuk *Man Power Planning* dan perhitungan Biaya Tenaga Kerja.
6. Mengembangkan peran sebagai *Strategic Business Partner* dalam pengelolaan SDM pada seluruh Unit Kerja dan Anak Usaha serta Perusahaan Pasangan Usaha.
7. Menyajikan informasi data karyawan secara *realtime* dan *update*.
8. Melakukan Audit basis data karyawan secara berkelanjutan untuk memastikan data yang terinput di HRIS sudah valid.
9. Mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan SDM melalui rotasi-mutasi dengan memperhatikan kompetensi, talenta dan pengembangan karyawan.
10. Melakukan Digitalisasi untuk semua pembuatan memo, SK, dan PKWT.
11. Membuat dan memperbaharui SK Kebijakan.
12. Melakukan Evaluasi dan penyempurnaan fasilitas program Asuransi karyawan.
13. Melakukan Penyesuaian gaji karyawan berdasarkan Upah Minimum Kabupaten/Kota/Provinsi yang terbaru (sesuai wilayah atau cabang masing-masing).
14. Melakukan Standarisasi dan kesetaraan remunerasi untuk BOD minus holding dengan BOD anak dan BOD Afiliasi.
15. Perubahan pola request dan approval absensi (cuti, ijin, sakit, perjalanan dinas, lembur) menggunakan PNM Digi.
16. Melakukan Integrasi Application Programming Interface (API) HRIS dengan aplikasi lain yang ada di PNM Grup.
17. Mengubah surat-surat yang berhubungan dengan karyawan (SK, PKWT, PKWT, Surat Keterangan, dan lain-lain) menggunakan surat *digital*.
18. Melakukan Digitalisasi PKWT sehingga karyawan tidak diberikan *hardcopy* melainkan dalam bentuk *softcopy* data melalui *e-mail* maupun aplikasi komunikasi.

The company has prepared a human capital work plan for 2022, including:

1. Conduct technology development and update the Digital HR Management (DPM) application system phase 1.
2. Implementing Employee Performance Assessment and Employee Performance Targets through the Performance Management System.
3. Updating all aspects of Organizational Development through updating the Organizational Structure, Job Specification, and Job Description in support of business process activities.
4. Carrying out work programs for the implementation of Employee Satisfaction and Employee Engagement.
5. Developing forecast preparation for Man Power Planning and calculation of Labor Costs.
6. Developing the role as a Strategic Business Partner in HR management in all Work Units and Subsidiaries as well as Business Partner Companies.
7. Presenting employee data information in real time and updates.
8. Conducting employee database audits on an ongoing basis to ensure that the data entered in the HRIS is valid.
9. Optimizing the fulfillment of human resource needs through rotation by paying attention to competence, talents and employee development.
10. Digitizing for all memos, decrees, and PKWTs.
11. Create and update policy decrees.
12. Evaluating and improving employee insurance program facilities.
13. Adjusting employee salaries based on the latest Regency/ City/Provincial Minimum Wage (according to each region or branch).
14. Standardizing and equalizing remuneration for BOD minus holding with subsidiary BOD and Affiliated BOD.
15. Changes in attendance request and approval patterns (leave, permission, illness, official travel, overtime) using PNM Digi.
16. Integration of the HRIS Application Programming Interface (API) with other applications in the PNM Group.
17. Changing letters related to employees (SK, PKWT, PKWT, Certificates, etc.) using digital mail.
18. Digitizing PKWT so that employees were not given *hardcopy* but in the form of *softcopy* of data via *e-mail* or communication applications.

19. Membangun dan menjaga hubungan industrial yang harmonis antara karyawan dan perusahaan.
 20. Menjadikan PNM Klub sebagai sarana komunikasi, penyaluran hobi dan bakat karyawan.
 21. Melakukan Digitalisasi KPP dan integrasi dengan HR system untuk memotong gaji ataupun tunjangan kalau keputusan ada yang harus dikembalikan oleh pelanggar Peraturan Perusahaan.
 22. Memperbarui dan merancang platform psikotest yang efektif dan menunjang sesuai kebutuhan Divisi SDM dan PNM.
 23. Optimalisasi penggunaan aplikasi asesmen online PNM (PASS-PNM Assessment System).
 24. Menyempurnakan dan pembaharuan *Employee Assessment Tools*.
 25. Melakukan Pelaksanaan dan optimalisasi *Assessment Center* untuk karyawan.
 26. Melaksanakan Program Kepala Cabang Mekaar *Development* dan Program Account Officer Mikro *Development*.
 27. Mengelola penyusunan kebijakan dan prosedur pendidikan, pelatihan, pengembangan dan manajemen talenta.
 28. Melaksanakan analisa kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan.
 29. Menyusun rencana dan anggaran tahunan bidang pendidikan, pelatihan dan pengembangan dalam organisasi.
 30. Menyusun program dan katalog pelatihan tahunan.
 31. Menyelenggarakan program-program Pengembangan dan Pelatihan SDM untuk meningkatkan kompetensi SDM baik technical maupun soft skill sesuai dengan kebutuhan pencapaian RKAP.
 32. Menyelenggarakan dan mengembangkan Kompetensi Program Pendidikan MT/*Development Program*.
 33. Melaksanakan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat.
 34. Memfasilitasi peningkatan jenjang pendidikan karyawan.
 35. Melakukan pengembangan kompetensi Internal Trainer.
 36. Melakukan penyusunan kurikulum dan materi pelatihan.
 37. Pengembangan digitalisasi dan database pengembangan SDM dan Pelatihan.
 38. Mempersiapkan proses penyelenggaraan pelatihan.
 39. *Asset Management* dan infrastruktur pendukung Pendidikan dan Pelatihan.
 40. Pengelolaan *Knowledge Management* Pendidikan dan Pelatihan.
19. *Build and maintain harmonious industrial relations between employees and the company.*
 20. *Making PNM Club a means of communication, channeling hobbies and talents of employees.*
 21. *Digitizing KPP and integrating with the HR system to cut salaries or allowances if there was a decision that must be returned by violators of Company Regulations.*
 22. *Updating and designing an effective and supportive psychotest platform according to the needs of the HR Division and PNM.*
 23. *Optimizing the use of the PNM online assessment application (PASS-PNM Assessment System).*
 24. *Improving and updating Employee Assessment Tools.*
 25. *Implementing and optimizing the Assessment Center for employees.*
 26. *Implementing the Mekaar Development Branch Head Program and the Micro Development Account Officer Program.*
 27. *Managing the formulation of policies and procedures for education, training, talent development and management.*
 28. *Carrying out an analysis of training needs and employee development.*
 29. *Preparing annual plans and budgets for education, training and development within the organization.*
 30. *Developing annual training programs and catalogs.*
 31. *Organizing HR Development and Training programs to improve HR competencies, both technical and soft skills in accordance with the needs for achieving RKAP.*
 32. *Organizing and developing MT/Development Program Competencies.*
 33. *Implementing a Certified Student Internship Program.*
 34. *Facilitating the improvement of employee education levels.*
 35. *Conducting competency development for Internal Trainers.*
 36. *Carry out the preparation of curriculum and training materials.*
 37. *Development of digitization and database of HR development and training.*
 38. *Prepare the training implementation process.*
 39. *Asset Management and supporting infrastructure for Education and Training.*
 40. *Knowledge Management Education and Training.*

TEKNOLOGI INFORMASI

Information Technology





Master Plan dan Strategi Teknologi Informasi

Master Plan and Information Technology Strategy

PT Permodalan Nasional Madani adalah perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang pembiayaan dengan tugas utamanya adalah memberdayakan UMKMK (Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi). Ke depan, PNM akan memfokuskan bisnisnya pada dua produk utama yaitu, ULaMM dan Mekaar. Produk Mekaar ditargetkan akan tumbuh dengan nasabah sebanyak 9,6 juta nasabah pada tahun 2021.

Dengan adanya target bisnis tersebut, *Information Technology* (IT) merupakan salah satu *tool* utama penunjang bisnis, dan menjadi hal yang penting untuk menunjang pencapaian target bisnis. Untuk mendapat manfaat yang optimal dari penggunaan IT, *alignment* (keselarasan) antara *Business Strategy* dengan *IT Strategy* adalah hal yang sangat penting untuk dijaga. Penerapan IT diharapkan dapat memberikan dampak *better, faster, effective and efficient* baik pada pengelolaan sumber daya internal, maupun pelayanan kepada pengguna jasa.

IT Strategy kemudian dijabarkan menjadi *IT Master Plan* agar arah pengembangan IT selalu selaras dengan bisnis. Analisis dalam penyusunan *IT Master Plan* ini meliputi analisis strategi bisnis perusahaan, organisasi IT, serta analisis terhadap aplikasi dan infrastruktur IT yang saat ini ada di lingkungan PNM. Analisis tersebut dilakukan untuk mendapatkan gambaran ke depan mengenai arah pengembangan bisnis perusahaan serta mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan teknologi informasi ke depan.

Dengan tersedianya *IT Master Plan* yang dibuat berdasarkan hasil analisis rencana strategis bisnis dan selalu dijaga agar selalu *up-to-date*, maka akan diperoleh beberapa manfaat sebagai berikut:

- Arah pengembangan aplikasi dan infrastruktur IT lebih jelas dan lebih terintegrasi.
- Pengembangan IT secara sinergi memperhatikan aspek-aspek pendukungnya selain aspek teknologi, yaitu aspek *people* dan *process*.
- Investasi IT lebih optimal.
- Risiko lebih terkendali.

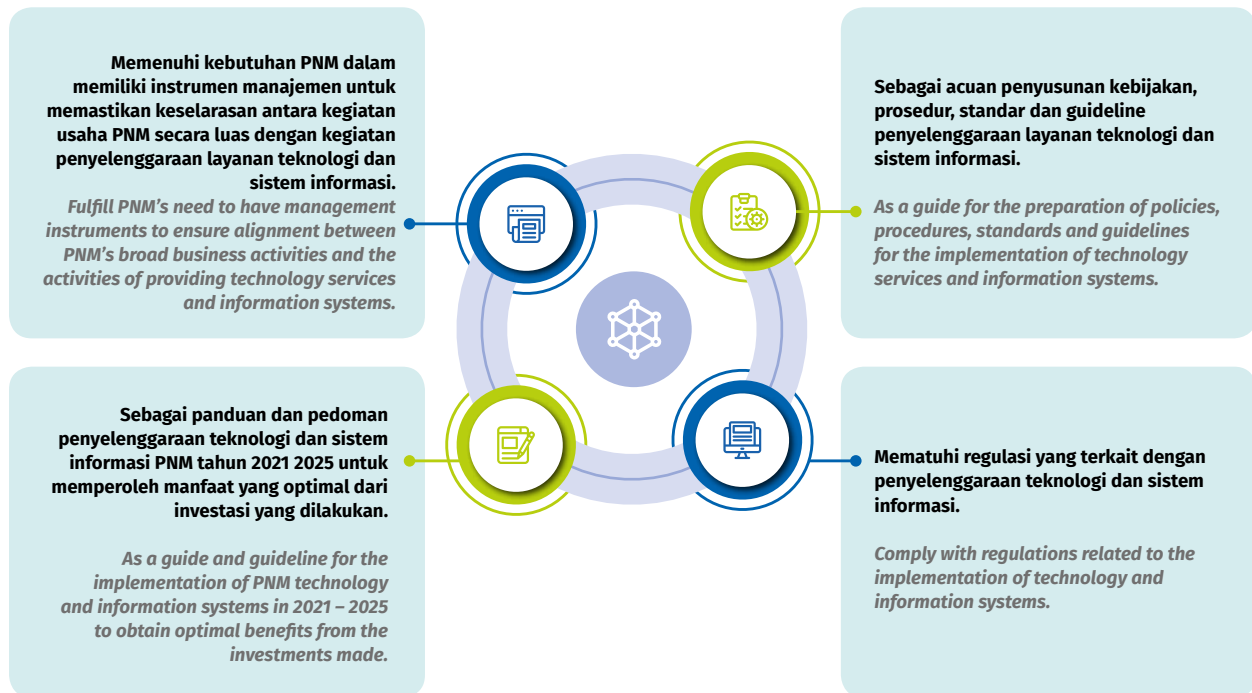
PT Permodalan Nasional Madani is a state-owned company engaged in financing with the main task of empowering MSMEs (Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives). In the future, PNM will focus its business on two main products, namely, PNM Mekaar dan ULaMM. PNM Mekaar products are targeted to grow with as many as 9.6 million customers by 2021.

With these business targets, Information Technology (IT) becomes one of the main business support tools, and is important to support the achievement of business targets. To get optimal benefits from the use of IT, the alignment between Business Strategy and IT Strategy is very important to be maintained. IT application is expected to have a better, faster, effective and efficient impact both in the management of internal resources and services to serve the users.

The IT Strategy is then translated into an IT Master Plan so that the direction of IT development is always in line with the business. The analysis in the preparation of the IT Master Plan includes analysis of the company's business strategy, IT organizations, as well as analysis of IT applications and infrastructure currently in the PNM environment. The analysis was conducted to obtain a future picture of the direction of the company's business development and to identify future business and information technology needs.

With the availability of an IT Master Plan based on the analysis of a business strategic plan and was always kept up-to-date, the following benefits could be obtained:

- *The direction of application development and IT infrastructure became clearer and more integrated.*
- *IT development in synergy considered to its supporting aspects apart from technological aspects, namely people and process aspects.*
- *Optimal IT investment.*
- *More manageable risks.*



Inovasi Teknologi Informasi

Information Technology Innovation

PNMDigi

PNMDigi merupakan sebuah aplikasi *Employee Digital Service* (EDS) untuk lebih memudahkan proses administrasi karyawan dan dilengkapi transaksi berbasis PPOB serta fitur lainnya seperti reksadana, *Fintech* dan lainnya. Saat ini, aplikasi PNMDigi ini hanya bisa digunakan oleh karyawan PNM di seluruh Indonesia, baik yang berada di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang.

PNMDigi

PNMDigi was an *Employee Digital Service* (EDS) application to simplify the employee administration process and was equipped with PPOB-based transactions and other features such as mutual funds, *Fintech* and others. Currently, the PNMDigi application could only be used by PNM employees throughout Indonesia at the Head Office and Branch Offices.

Fitur-fitur dari aplikasi PNMDigi adalah sebagai berikut:

The features of the PNMDigi application were as follows:



EDS (Employee Digital Services)

Presensi, Pengajuan ijin, Cuti dan Perjalanan Dinas.
Attendance, application for Permits, Leave and Official Travel.



Billing & Payment

Pembelian Pulsa, Listrik, pembayaran indihome, BPJS, Top-up emoney dan LinkAja.
Purchase credit, electricity, indihome payments, BPJS, top-up e-money and LinkAja.



Pinjaman Online Online Loans

Kemudahan pengajuan pinjaman melalui PNMDigi.
Ease of applying for a loan through PNMDigi.



Koperasi Cooperative

Kemudahan dalam melakukan simpanan karyawan dan akan ada bagi hasil setiap tahun.
Ease of making employee savings and there will be profit sharing every year.



E-Commerce

Pembelian barang-barang kebutuhan menjadi lebih mudah dengan PNMShop, PNM Juara dan DIGI Merchandise.
Purchasing necessities is made easier with PNMShop, PNM Champion and DIGI Merchandise.



Investasi Investment

Kemudahan investasi reksadana, tabungan emas, deposito dan lainnya melalui PNMDigi.
Ease of investing in mutual funds, gold savings, deposits and others through PNMDigi.



Hiburan Entertainment

Kemudahan dalam membeli tiket nonton dan voucher games.
Ease of buying movie tickets and game vouchers.

PNM Mekaar Digi

Aplikasi mobile yang digunakan untuk membantu memudahkan dan mempercepat bisnis Mekaar di lapangan dalam pengelolaan data awal calon nasabah Mekaar. Aplikasi PNM Mekaar Digi dapat diakses melalui *gadget* yang digunakan oleh *Account Officer* (AO) atau *Senior Account Officer* (SAO) Mekaar.

PNM Mekaar Digi merupakan inovasi Teknologi Informasi yang merupakan dukungan terhadap program Digitalisasi Mekaar, dimana semua proses bisnis dijalankan secara otomatis dan latar belakang dari pengembangan PNM Digitalisasi Mekaar ini di dasarkan kepada:

1. Mengurangi kesalahan proses input data nasabah yang diakibatkan oleh kondisi lapangan yang seringkali menyulitkan *team* Mekaar untuk mengikuti prosedur yang seharusnya karena dijalankan secara manual.
2. Mempercepat keseluruhan proses dimulai dari proses input data nasabah, monitoring, persetujuan, sosialisasi hingga ke pencairan.
3. Data dan dokumen nasabah yang diperoleh lebih *valid*.
4. Mengurangi penggunaan kertas, karena proses sudah dijalankan secara *digital*.

PNM Mekaar Digi

The mobile application was used to help facilitate and accelerate PNM Mekaar's business in the field in managing PNM Mekaar's prospective customer initial data. Mekaar Digi's PNM application could be accessed via the gadget used by PNM Mekaar's Account Officer (AO) or Senior Account Officer (SAO).

PNM Mekaar Digi became an Information Technology innovation which was a support for the PNM Mekaar Digitalization program, in which all business processes run automatically, and the background of the development of Mekaar Digitalization PNM was based on:

1. *Reducing errors in the customer data input process caused by field conditions which often made it difficult for the PNM Mekaar team to follow the proper procedures because they were carried out manually.*
2. *Speed up the whole process starting from the customer data input process, monitoring, approval, socialization to disbursement.*
3. *Customer data and documents obtained were more valid.*
4. *Reducing paper usage, because the process had been executed digitally.*

Availability dan Infrastruktur Teknologi Informasi

Availability and Infrastructure of Information Technology

PNM memiliki elemen-elemen infrastruktur yang meng-*enable* data dan aplikasi. Kajian terkait teknologi infrastruktur PNM saat ini adalah sebagai berikut.

- *End User Infrastructure*
Terdiri dari pengguna infrastruktur yang terdiri dari Pegawai, Nasabah, Kantor Pusat, Kantor Cabang, Anak Perusahaan, dan Afiliasi.
- *Network Infrastructure*
Terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu, *network edge* dilihat dari jangkauan suatu jaringan dan *network area* yang merupakan lokasi yang dijangkau oleh jaringan tersebut.
- *Host Infrastructure*
Memberikan gambaran mengenai *hardware infrastructure* yang dimiliki PNM.
- *Data Center dan Disaster Recovery Center*
PNM memiliki *Data Center* dan *Disaster Recovery Center* (DRC) untuk mendukung berjalannya proses bisnis. Saat ini, lokasi *Data Center* berada di Lintasarta Jakarta sedangkan untuk DRC berada di *Data Center* Jatiluhur Purwakarta dan *Data Center* yang berada di Menara PNM saat ini berisi *Server Development*.
- *Infrastructure Management*
Memberikan gambaran mengenai pengelolaan infrastruktur agar berjalan baik dengan adanya kebijakan, prosedur dan *monitoring tools* yang mengatur pengelolaan *Data Center* dan *network*. Selain itu, saat ini PNM sudah memiliki dokumen *DRP* (*Disaster Recovery Plan*) dan *BCP* (*Business Continuity Plan*).

PNM owned infrastructure elements that enabled data and applications. Current studies related to PNM infrastructure technology were as follows.

- *End User Infrastructure*
Consisting of infrastructure users consisting of employees, customers, head offices, branch offices, subsidiaries and affiliates.
- *Network Infrastructure*
Consisting of 2 (two) parts, namely, the network edge seen from the reach of a network and the network area which was the location that could be reached by the network.
- *Host Infrastructure*
Providing an overview of the hardware infrastructure that PNM has.
- *Data Center dan Disaster Recovery Center*
PNM owned a Data Center and Disaster Recovery Center (DRC) to support business processes. Currently, the location of the Data Center was in Lintasarta Jakarta, while the DRC was in the Jatiluhur Purwakarta Data Center and the Data Center located in the Taspem Tower currently contained server Development.
- *Infrastructure Management*
*It provided an overview of infrastructure management so that it run well with the existence of policies, procedures and monitoring tools that governed Data Center and network management. In addition, PNM currently owned *DRP* (*Disaster Recovery Plan*) and *BCP* (*Business Continuity Plan*) documents.*

Kebijakan dan Tata Kelola Teknologi Informasi

Information Technology Policy and Governance

IT Governance atau tata kelola IT merupakan bagian yang sangat penting, karena menyangkut komitmen, kesadaran dan proses pengendalian manajemen organisasi terhadap sumber daya IT. Untuk mewujudkan tata kelola IT dalam suatu organisasi, maka perlu dibangun sebuah struktur tata kelola berdasarkan IT Governance Framework seperti COBIT dan ITIL sebagai acuan utama sesuai arahan Kementerian BUMN melalui Peraturan Menteri BUMN yaitu PER-2/MBU/2013 dan PER-03/MBU/02/2018 tentang Panduan penyusunan pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara.

Untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan layanan IT PNM ke depan agar berjalan dengan baik maka diperlukan Tata Kelola IT berdasarkan *best practice* yang masing-masing akan diuraikan pada bagian berikut.

Pengelolaan Governance Enforcement

PNM harus membangun Tata Kelola IT untuk meningkatkan kinerja layanan IT. Tata Kelola IT ditujukan agar pihak manajemen PNM dapat mengatur dan mengontrol IT selalu selaras dengan strategi dan tujuan perusahaan. Sistem tata kelola tersebut terdiri dari *leadership* IT, aktivitas pengelolaan IT, kebijakan, prosedur dan teknik pengukuran layanan IT yang dijalankan oleh unit yang ditunjuk sebagai pengelola IT yaitu Divisi Teknologi Informasi (TIF) dalam rangka untuk menyediakan informasi dan layanan IT agar selalu memberikan manfaat yang optimal, dengan menggunakan infrastruktur teknologi dan proses IT yang efektif, efisien, dan aman.

Dengan demikian, jika Tata Kelola IT ini dijalankan dengan baik, maka sistem tata kelola ini akan menghasilkan proses pengaturan, perencanaan, implementasi, pengelolaan operasional, dan pengawasan serta evaluasi performansi IT yang selalu sinergi dengan strategi institusi, memberikan *value delivery* yang tinggi, memperhatikan manajemen risiko, mampu memanfaatkan *resource* secara optimum dan selalu menjamin kualitas layanan melalui pengukuran performansi yang dilakukan secara kontinyu.

IT Governance became a very important part, because it involved the commitment, awareness and process of controlling the organization's management of IT resources. To realize IT governance in an organization, it was necessary to build a governance structure based on the IT Governance Framework such as COBIT and ITIL as the main reference according to the direction of the Ministry of SOEs through the Minister of SOEs Regulation, namely PER-2/MBU/2013 and PER-03/MBU/02/2018 concerning Guidelines for the preparation of the management of Information Technology for State-Owned Enterprises.

To support the implementation and management of PNM IT services in the future to run well, IT Governance was needed based on best practices, each of which would be described in the following sections.

Governance Enforcement Management

PNM had to build IT Governance to improve the performance of IT services. IT Governance was intended so that PNM management could manage and control IT always in line with the company's strategy and goals. The governance system consisted of IT leadership, IT management activities, policies, procedures and measurement techniques for IT services carried out by the unit appointed as IT manager, namely the Information Technology Division (TIF) in order to provide information and IT services so that it always provided benefits. optimal, by using technology infrastructure and IT processes that were effective, efficient, and secure.

Thus, if IT Governance was implemented properly, this governance system would result in a process of regulation, planning, implementation, operational management, and monitoring and evaluation of IT performance which always synergized with institutional strategies, provided high value delivery, paid attention to risk management, were able to utilize resources optimally and always guaranteed service quality through continuous performance measurement.

Dalam pengelolaan IT *Governance*, PNM telah memiliki Pedoman pengelolaan Tata Kelola Teknologi Informasi sesuai dengan Surat Keputusan Direksi nomor SK-018/PNM-DIR/VI/20 tentang Pedoman Tata Kelola Teknologi Informasi PNM yang merupakan pedoman yang saling berhubungan dalam pengelolaan teknologi informasi sehingga tercapainya keselarasan strategis, taktis dan operasional dalam pengelolaannya.

Pedoman Tata Kelola Teknologi Informasi terdiri dari:

1. Pengelolaan Manajemen Teknologi Informasi
2. Pengelolaan Pengembangan Perangkat Lunak
3. Pengelolaan Proyek Teknologi Informasi
4. Pengelolaan Risiko Teknologi Informasi
5. Pengelolaan *End user computing*
6. Pengelolaan Operasional Teknologi Informasi
7. Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi
8. Pengelolaan Keamanan Teknologi Informasi dan Data Elektronik
9. Pengelolaan Layanan Pihak Ketiga
10. Audit Internal Teknologi Informasi
11. Pengelolaan *Business Continuity Plan*

IT Maturity Level

IT Maturity Level adalah pengukuran tingkat kematangan tata kelola Teknologi Informasi menggunakan *framework* Cobit 4.1. Sesuai S-949/MBU/10/2020 perihal Aspirasi pemegang saham/pemilik modal untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2021 dan terkait dengan program pengembangan Teknologi Informasi dimana BUMN wajib melaksanakan *assessment* "IT Maturity Level" oleh Pihak Independen minimal setiap 2 tahun sekali terhitung tahun 2021 (diantaranya dapat melakukan *self-assessment*), dengan target minimal level 3 pada tahun 2021.

Terkait pemenuhan atas aspirasi pemegang saham/pemilik modal tersebut di tahun 2021 PNM telah melaksanakan *assessment* *IT Maturity Level* untuk periode pengukuran tahun 2020. Pengukuran *IT Maturity Level* PNM dilakukan terhadap 16 IT proses Cobit 4.1 sesuai *business goals* yang telah ditentukan. Untuk tingkat kematangan tata kelola Teknologi Informasi (*IT Maturity Level*) tahun 2020 berada pada **level 3.148**.

In managing IT Governance, PNM owned Guidelines for the management of Information Technology Governance in accordance with the Decree of the Board of Directors number SK-018/PNM-DIR/VI/20 regarding PNM Information Technology Governance Guidelines, which were interconnected guidelines in managing information technology so that it could achieve strategic, tactical and operational alignment in its management.

Information Technology Governance Guidelines consisted of:

1. *Management of Information Technology Management*
2. *Software Development Management*
3. *Information Technology Project Management*
4. *Information Technology Risk Management*
5. *End user computing management*
6. *Information Technology Operational Management*
7. *Management of Information Technology Services*
8. *Management of Information Technology Security and Electronic Data*
9. *Third Party Service Management*
10. *Information Technology Internal Audit*
11. *Management of the Business Continuity Plan*

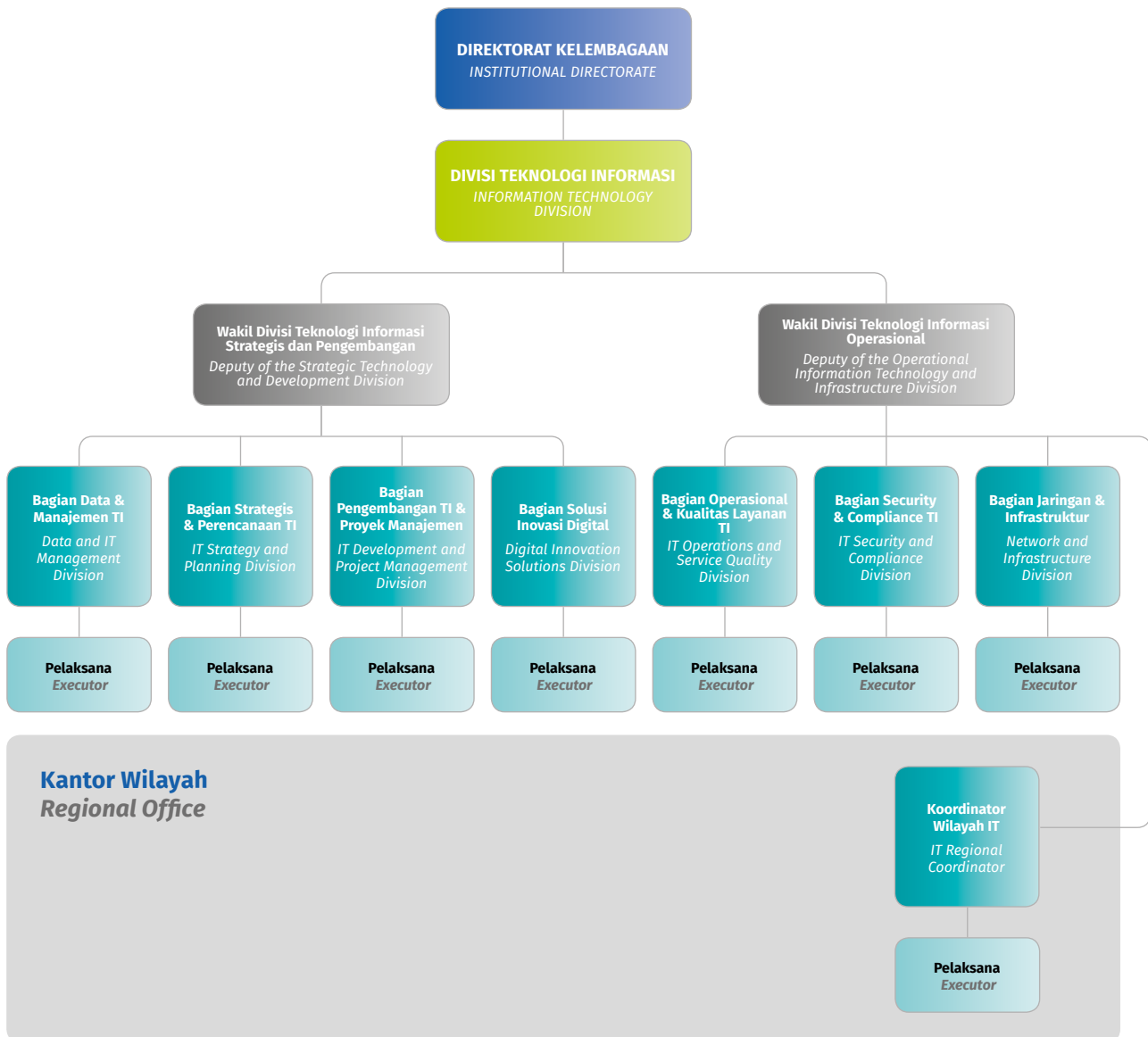
IT Maturity Level

IT Maturity Level became a measurement of the maturity level of Information Technology governance using the Cobit 4.1 framework. It was in accordance with S-949/MBU/10/2020 regarding the aspirations of shareholders/owners of capital for the preparation of work plans and company budgets for 2021 and related to the Information Technology development program where SOEs were required to carry out "IT Maturity Level" assessments by independent parties at least every 2 years once starting from 2021 (among them could conduct *selfassessment*), with a minimum target of level 3 in 2021.

*Regarding the fulfillment of the aspirations of shareholders/capital owners in 2021, PNM carried out an IT Maturity Level assessment for the 2020 measurement period. PNM IT Maturity Level measurement was carried out on 16 IT Cobit 4.1 processes according to predetermined business goals. The level of information technology governance maturity (IT Maturity Level) in 2020 was at **level 3.148**.*

Struktur Pengelola Teknologi Informasi

Structure of Information Technology Management



Divisi Teknologi Informasi berada di bawah Direktorat Kelembagaan dan dipimpin oleh Kepala Divisi Teknologi Informasi. Dimana terdapat dua Wakil Kepala Divisi, yaitu Wakil Kepala Divisi Teknologi Strategis Dan Pengembangan dan Wakil Kepala Divisi Teknologi Informasi Operasional dan Infrastruktur.

Unit kerja yang berada di divisi Teknologi Informasi yaitu bagian: Data dan Manajemen TI, Strategi dan Perencanaan TI, Pengembangan TI dan Proyek Manajemen, Solusi Inovasi Digital, Operasional dan Kualitas Layanan TI, Security dan Compliance TI, Jaringan dan Infrastruktur.

The Information Technology Division is under the Directorate of Institutions and is led by the Head of the Information Technology Division. Where there are two Deputy Division Heads, namely the Deputy Head of the Strategic Technology and Development Division and the Deputy Head of the Operational Information Technology and Infrastructure Division.

The work units in the Information Technology division are: Data and IT Management, IT Strategy and Planning, IT Development and Project Management, Digital Innovation Solutions, IT Operations and Service Quality, IT Security and Compliance, Network and Infrastructure.

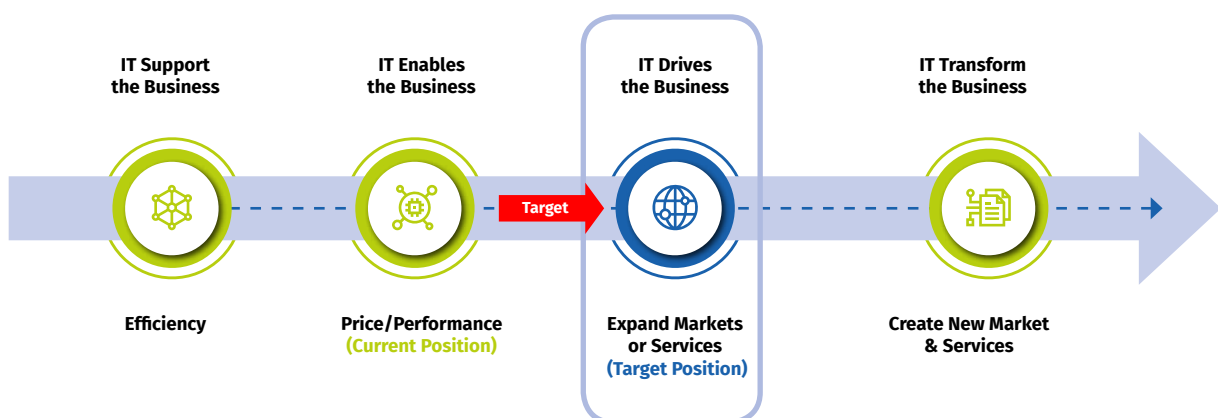
Unit Kerja Work Unit	Peran dan Tanggung Jawab Roles and Responsibilities
Data dan Manajemen TI <i>Data and IT Management</i>	Pengembangan dalam mengelola Data Informasi Operasional dan Bisnis Perusahaan <i>Development in managing the Company's Operational and Business Information Data</i>
Strategi dan Perencanaan TI <i>IT Strategy and Planning</i>	Perencanaan Strategi Pengembangan Teknologi Informasi Perusahaan <i>Corporate Information Technology Development Strategy Planning</i>
Pengembangan TI dan Proyek Manajemen <i>IT Development and Project Management</i>	Pengembangan dalam pengelolaan Operasional Sistem Informasi Perusahaan <i>Development in the Operational management of the Company's Information System</i>
Solusi Inovasi Digital <i>Digital Innovation Solutions</i>	Pengembangan dalam pengelolaan Solusi Digital <i>Development in the management of Digital Solutions</i>
Operasional dan Kualitas Layanan TI <i>IT Operations and Service Quality</i>	Pelayanan/Support dan pengelolaan Sistem Operasional Layanan Teknologi Informasi (TI) <i>Services/Support and management of Information Technology (IT) Service Operational Systems</i>
Security dan Compliance TI <i>IT Security and Compliance</i>	Pengendalian dan pengawasan Keamanan Sistem Informasi dan Kepatuhan Teknologi Informasi <i>Information system security Control and supervision and Information Technology Compliance</i>
Jaringan dan Infrastruktur <i>Network and Infrastructure</i>	Pengelolaan dan pengendalian Layanan Operasional dan Infrastruktur Teknologi Informasi <i>Management and control of Information Technology Operational Services and Infrastructure</i>

Strategi Pengembangan Teknologi Informasi Tahun 2022

Information Technology Development Strategy in 2022

Dalam rangka pemenuhan terhadap kebutuhan bisnis dan sasaran strategis yang tertuang di dalam dokumen Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT Permodalan Nasional Madani 2020-2024, maka diperlukan peningkatan kapabilitas TI dalam mendukung strategi tersebut. Pemanfaatan teknologi menjadi *Driver* bagi bisnis PT Permodalan Nasional Madani dan sudah menjadi kebutuhan utama, terutama dalam menciptakan pelayanan yang unggul serta inovasi produk yang dapat meningkatkan persaingan perusahaan. Selain itu, implementasi terhadap kebutuhan *Big Data* juga menjadi salah satu alasan peran TI sebagai *Driver* dengan pemanfaatan pengambilan keputusan berbasis data (*Data Driven Decision Making*).

In order to fulfill the business needs and strategic goals as stated in the PT Permodalan Nasional Madani Long Term Plan (RJPP) document for 2020-2024, it is necessary to increase IT capabilities to support this strategy. Utilization of technology is a driver for PT Permodalan Nasional Madani's business and has become a major need, especially in creating superior services and product innovations that can increase company competition. In addition, the implementation of Big Data needs is also one of the reasons for the role of IT as a Driver by utilizing data-driven decision making (Data Driven Decision Making).



Penetapan Peran TI Ke Depan Sesuai RJPP 2020-2024
Determination of the role of IT in the future according to the 2020-2024 RJPP

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Good Corporate Governance





Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

Sejalan dengan arahan Kementerian BUMN untuk pembentukan Holding Ultra Mikro maka keluar Keputusan Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Nomor SK-308/MBU/09/2021 dan Nomor B.1439-DIR/CSC/09/2021, tertanggal 13 September 2021 tentang perubahan Anggaran Dasar, terutama perubahan struktur pemegang saham menjadi Pemegang Saham Mayoritas (Saham Seri B) adalah PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), Tbk dan Pemerintah sebagai Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Dampak perubahan tersebut PNM sudah tidak lagi menjadi BUMN, namun menjadi perusahaan anak dari BRI. Perubahan status PNM ini menstimulus perubahan tata kelola perusahaan, di mana BRI sebagai Perbankan yang memiliki Peraturan/Kebijakan yang ketat sehingga PNM sebagai perusahaan anak juga diwajibkan untuk bisa melakukan harmonisasi kebijakan-kebijakan yang ada terutama perubahan *Board Manual* yang dipecah menjadi pedoman terpisah untuk masing-masing organ di perusahaan, di antaranya yang sudah terbit adalah BOC Charter sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris No 006/PNM-KOM/XI/21 tentang Pedoman dan Tata Tertib (BOC Charter) Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani, dan secara paralel juga sedang dalam proses finalisasi untuk BOD Charter dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Charter.

Sebagai perusahaan anak BRI di bidang jasa keuangan, PNM dituntut juga untuk melakukan penyesuaian terutama untuk mendukung tata kelola terintegrasi, BRI sebagai holding saat ini juga sudah memulai proses harmonisasi kebijakan dan tata kelola perusahaan anak dengan holding, Perseroan berkomitmen untuk terus menyempurnakan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) setiap tahun secara berkesinambungan. Dalam menjaga kredibilitas dengan mematuhi peraturan yang berlaku dan penyesuaian dengan kondisi terkini. Pencapaian dalam penerapan tata kelola perusahaan yang telah dicapai tercermin dalam perbaikan score penilaian penerapan GCG di perusahaan. Selain itu untuk mendukung keterbukaan informasi, perusahaan juga memiliki portal Sistem Manajemen Kebijakan yang dapat diakses oleh seluruh karyawan sesuai ketentuan.

In line with the direction of the Ministry of SOEs for the establishment of Ultra Micro Holding, the Decision of the Shareholders of PT Permodalan Nasional Madani (PNM) issued Number SK-308/MBU/09/2021 and Number B.1439-DIR/CSC/09/2021, dated September 13, 2021, regarding amendments to the Articles of Association, especially changes in the structure of shareholders to become Majority Shareholders (Series B Shares) are PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), Tbk and the Government as Series A Dwiwarna Shareholder.

The impact of these changes was that PNM was no longer a part of SOEs, but was a subsidiary of BRI. This change in PNM status stimulated changes in corporate governance, in which BRI as a bank had strict regulations/policies so that PNM as a subsidiary was also required to harmonize existing policies, especially changes to the Board Manual which was broken down into separate guidelines for each organ in the company, among which the BOC Charter had been issued in accordance with the Decree of the Board of Commissioners No. 006/PNM-KOM/XI/21 concerning the Guidelines and Orders (BOC Charter) of the Board of Commissioners of PT Permodalan Nasional Madani, and in parallel it was also in the process of finalization for the BOD Charter and the Sharia Supervisory Board (DPS) Charter.

As a subsidiary of BRI in the financial services sector, PNM was also required to make adjustments, especially to support integrated governance, BRI as a holding company now also started the process of harmonization of policies and governance of subsidiaries with holding companies; the Company committed to continuously improving the implementation of Good Corporate Governance (GCG) every year on an ongoing basis in maintaining credibility by complying with applicable regulations and adjusting to current conditions. The achievements in the implementation of corporate governance could be reflected in the improvement in the assessment score for the implementation of GCG in the company. In addition to supporting information disclosure, the company also had a Policy Management System portal that could be accessed by all employees according to regulations.

Sebagai bagian dari pelaksanaan *Good Corporate Governance* (tata kelola perusahaan yang baik), Perseroan juga secara konsisten menerapkan lima prinsip GCG berikut:

As a part of the implementation of corporate governance, the Company consistently implements the following five GCG principles:



Transparansi *Transparency*

Perseroan menyajikan informasi terkait kinerja operasional dan finansial secara transparan kepada seluruh pemangku kepentingan dengan cara yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan pihak tersebut. Informasi tersebut disediakan secara rutin, akurat, dan mudah diakses melalui berbagai media resmi Perseroan.

The Company presents information related to operational and financial performance in a transparent manner to all stakeholders in a manner that has been stipulated in the applicable laws and regulations and in accordance with the needs of these parties. The information is provided regularly, accurately, and easily accessible through various official media of the Company.



Akuntabilitas *Accountability*

Perseroan memastikan kejelasan fungsi dan keberadaan masing-masing organ perusahaan melalui pembagian tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan Perseroan agar pengelolaan usaha dapat berjalan secara lebih efektif.

The Company ensures clarity of function and existence of each company organ through the division of duties and responsibilities in accordance with the needs and objectives of the Company so that business management can run more effectively.



Pertanggungjawaban *Responsibility*

Perseroan senantiasa patuh terhadap peraturan yang berlaku, terutama yang berhubungan dengan perpajakan, hubungan industri, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, dan tanggung jawab sosial. Perseroan juga memastikan ketersediaan mekanisme, peran, dan tanggung jawab jajaran manajemen yang profesional serta memberikan jaminan atas seluruh keputusan dan kebijakan yang diambil sehubungan dengan aktivitas operasional Perseroan.

The Company always complies with applicable regulations, especially those related to taxation, industrial relations, occupational health and safety, environmental protection, and social responsibility. The Company also ensures the availability of professional management mechanisms, roles and responsibilities and provides guarantees for all decisions and policies taken in connection with the Company's operational activities.



Independensi *Independence*

Perseroan berkomitmen untuk mengelola perusahaan secara mandiri dan profesional tanpa benturan kepentingan dan tekanan atau intervensi dari pihak mana pun yang berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Company is committed to managing the company independently and professionally without conflict of interest and pressure or intervention from any party that has the potential to violate the applicable laws and regulations.



Kewajaran *Fairness*

Perseroan mengedepankan keadilan dan kesetaraan, terutama dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan, sesuai dengan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Company prioritizes justice and equality, especially in fulfilling the rights of stakeholders, in accordance with agreements and applicable laws and regulations.

Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Objectives of Corporate Governance Implementation

Tujuan utama penerapan GCG PNM adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan nilai Perseroan agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dengan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Mendorong pengelolaan Perseroan secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perseroan.
3. Mendorong agar organ Perseroan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemangku kepentingan (*stakeholders*) maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perseroan.
4. Meningkatkan kontribusi Perseroan dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Untuk memastikan bahwa penerapan tata kelola diimplementasikan secara konsisten di seluruh lini usaha dan unit organisasi, Perseroan berpegang kepada dasar-dasar hukum eksternal maupun internal yang terkait dengan penerapan GCG.

The main objectives of GCG implementation of PNM are as follows:

1. *Optimizing the Company's value so that it has strong competitiveness, both nationally and internationally, so that it can maintain its existence by living sustainably to achieve the goals and objectives of the Company.*
2. *Encouraging Company management in a professional, efficient, and effective manner, as well as empowering functions and increasing the independence of Company organs.*
3. *Encouraging the Company's organs in making decisions and carrying out actions based on high moral values and compliance with laws and regulations, as well as awareness of the existence of corporate social responsibility towards stakeholders and environmental sustainability around the Company.*
4. *Increasing the Company's contribution to the national economy.*
5. *Improving a climate conducive to the development of national investment.*

To ensure that the implementation of governance is conducted consistently across all business lines and organizational units, the Company adheres to external and internal legal foundations related to the GCG implementation.

Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Basic of Corporate Governance Implementation

Dalam rangka menyempurnakan penerapan dan pelaksanaan GCG di lingkungan Perseroan, PNM senantiasa berpedoman pada beberapa aturan tentang pelaksanaan penerapan tata kelola perusahaan yang berlaku di lingkup nasional yang mengatur, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia
 - a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 - b. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - c. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

In order to improve the implementation and implementation of GCG within the Company, PT PNM (Persero) is always guided by several rules regarding the implementation of corporate governance in force in the national scope that regulates, among others, as follows:

1. *Law of the Republic of Indonesia*
 - a. *Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market;*
 - b. *Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;*
 - c. *Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;*

- d. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
 - e. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan
 - f. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN.
3. Peraturan/Keputusan Menteri
 - a. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/02/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara;
 - c. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/05/2019 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN;
 - e. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
 - f. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN;
 - g. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
 - h. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-102/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang;
 - i. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN RI/Kepala Badan Pembina BUMN Nomor Kep-211/M-PBUMN/1999 tentang Laporan Manajemen Perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
 - j. Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN; dan
- d. *Law Number 8 of 1997 concerning Company Documents;*
 - e. *Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions; and*
 - f. *Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure.*
2. *Government Regulations*
Government Regulation Number 45 of 2005 Concerning Establishment, Management, Supervision and Disbanding of SOEs.
3. *Ministerial Regulation/Decree*
 - a. *Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-12/MBU/02/2012 concerning Supporting Organs for the Board of Commissioners/Supervisory Board of State Owned Enterprises;*
 - b. *Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-03/MBU/2012 concerning Guidelines for Appointing Members of the Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries of State-Owned Enterprises;*
 - c. *Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises Number PER-02/MBU/02/2015 concerning Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises;*
 - d. *Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises Number PER-01/MBU/05/2019 concerning Guidelines for Determining the Income of Directors, Board of Commissioners and Supervisory Board of BUMN;*
 - e. *Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises Number PER-03/MBU/2012 concerning Guidelines for Appointing Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of Subsidiaries of State-Owned Enterprises;*
 - f. *Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises Number PER-09/MBU/2012 concerning Amendments to PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in BUMN;*
 - g. *Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number Kep-101/MBU/2002 concerning Preparation of Company Work Plans and Budgets;*
 - h. *Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number Kep-102/MBU/2002 concerning the Preparation of Long-Term Plans;*
 - i. *Decree of the Minister of State for the Utilization of SOEs of the Republic of Indonesia/Head of the State-Owned Enterprises Development Agency Number Kep-211/M-PBUMN/1999 concerning Management Reports of State-Owned Enterprises;*
 - j. *A copy of the Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises Number SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in BUMN; and*

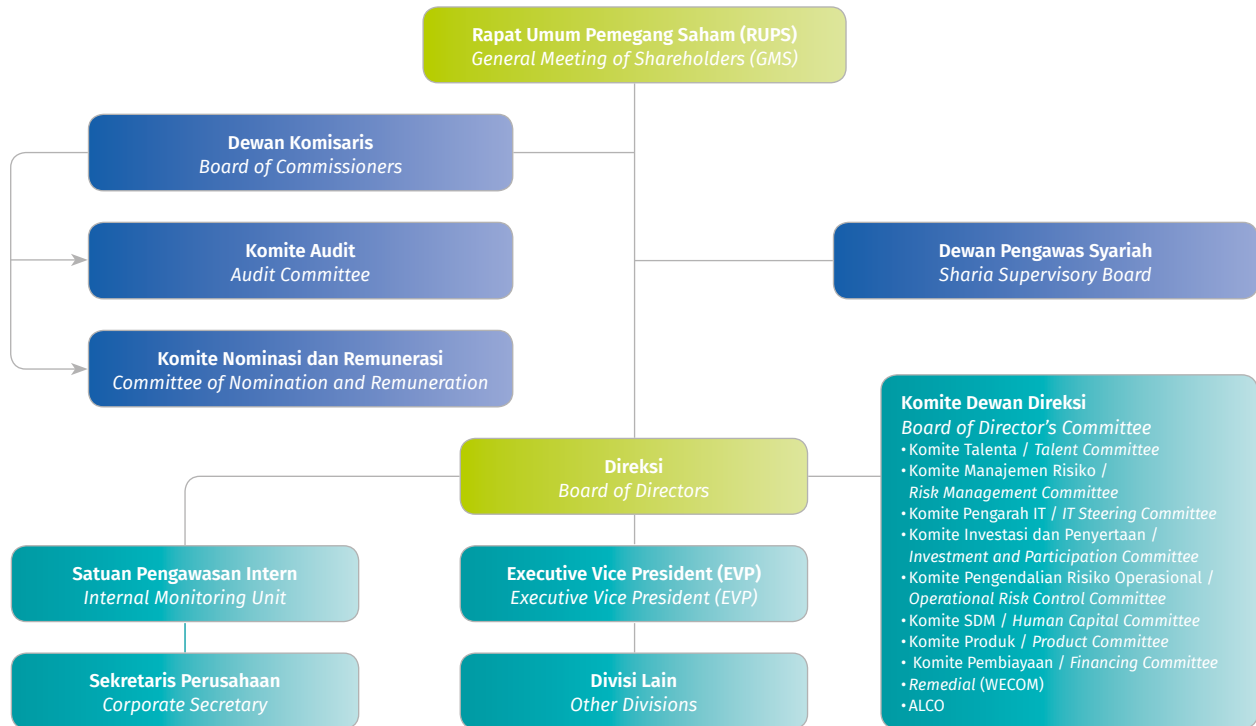
- k. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
 - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.05/2019 tentang Pengawasan PT PNM (Persero);
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
 - d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
 - e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;
 - f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
 - g. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
 5. Peraturan PER.KPKRI.07/2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
- k. *Regulation of the Minister of SOEs Number PER-15/MBU/2012 concerning Amendments to Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises Number 05/MBU/2008 concerning General Guidelines for the Implementation of Procurement of Goods and Services for State-Owned Enterprises.*
4. *Financial Services Authority Regulations*
 - a. *Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Work Implementation of the Audit Committee;*
 - b. *Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.05/2019 concerning Supervision of PT PNM (Persero);*
 - c. *Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;*
 - d. *Financial Services Authority Regulation Number 35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretary of Issuers or Public Companies;*
 - e. *Financial Services Authority Regulation Number 56/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for Drafting the Internal Audit Unit Charter;*
 - f. *Financial Services Authority Regulation Number 21/POJK.04/2015 concerning Implementation of Public Company Governance Guidelines;*
 - g. *Financial Services Authority Circular Letter Number 32/POJK.04/2015 concerning Guidelines for Public Company Governance.*
 5. *Regulation of PER.KPKRI.07/2016 concerning Procedures for Registration, Announcement and Examination of Reports of State Organizers' Assets.*

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Structure and Mechanism

Struktur Organ Perusahaan

Company Organ Structure



Governance Soft Structure

Adapun *soft structure* yang dimiliki oleh PNM antara lain:

1. Anggaran Dasar
2. *Board Manual*
3. Pedoman Tata Kelola Perusahaan
4. Pedoman Perilaku
5. Pedoman *Whistleblowing System*
6. Pedoman Sistem Pengendalian Internal
7. Pedoman Manajemen Risiko
8. Pedoman Anti Fraud
9. Pedoman Sistem Manajemen
10. Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001: 2016
11. Pedoman Pengelolaan IT Governance

Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Pemegang Saham

Kepemilikan saham mayoritas PNM dimiliki oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan kepemilikan saham sebesar 99,99%.

Governance Soft Structure

The *soft structures* owned by PNM include:

1. *Articles of Association*
2. *Board Manual*
3. *Corporate Governance Guidelines*
4. *Code of Conduct*
5. *Whistleblowing System Guidelines*
6. *Internal Control System Guidelines*
7. *Risk Management Guidelines*
8. *Anti-Fraud Guidelines*
9. *Management System Guidelines*
10. ISO 37001: 2016 *Anti-Bribery Management System Guidelines*
11. *Guidelines for IT Governance Management*

Mechanism of Corporate Governance

Shareholders

The majority shareholding of PNM is owned by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk with a share ownership of 99.99%.

Hak Pemegang Saham

Pemegang saham memiliki hak untuk:

1. Perubahan Anggaran Dasar.
2. Perubahan permodalan.
3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran.
5. Permintaan dan pengaksesan data dan dokumen Perusahaan.
6. Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
7. Persetujuan pemindahtanganan aset yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
8. Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan persentase penyertaan modal pada perusahaan lain yang berdasarkan Anggaran Dasar persetujuan RUPS.
9. Persetujuan rencana penggunaan laba.
10. Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
11. Pengusulan agenda RUPS.

Pemegang saham berhak memperoleh penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS di antaranya:

1. Informasi mengenai mata acara dalam agenda RUPS, termasuk usul yang direncanakan oleh Direksi untuk diajukan dalam RUPS.
2. Informasi mengenai rincian rencana kerja dan anggaran dan hal-hal lain yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Perseroan.
3. Informasi keuangan maupun hal-hal lainnya yang menyangkut Perseroan yang dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
4. Informasi lengkap dan informasi yang akurat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan agenda RUPS yang diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS berlangsung.

Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan adalah organ perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.

RUPS Perseroan wajib diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam mengambil keputusan RUPS harus menjaga kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan debitor, kreditor dan kepentingan Pemegang Saham minoritas.

RUPS Perseroan terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. RUPS Tahunan untuk mengesahkan RKAP

Shareholders Rights

Shareholders owned the right to:

1. Amendments to the Articles of Association.
2. Change in capital.
3. Appointment and dismissal of members of the Board of Directors and Board of Commissioners.
4. Agreements related to merger, consolidation, acquisition, separation and dissolution.
5. Request and access company data and documents.
6. Approval of the remuneration of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
7. Approval of asset transfer based on the Articles of Association requires GMS approval.
8. Approval of participation and reduction in percentage of equity participation in other companies based on the Articles of Association approved by the GMS.
9. Approval of plans for use of profits.
10. Approval of long-term investment and financing based on the Articles of Association requires GMS approval.
11. Proposing the GMS agenda.

Shareholders had rights to obtain a complete explanation and accurate information regarding the holding of the GMS, including:

1. Information regarding the agenda items of the GMS, including proposals planned by the Board of Directors to be submitted to the GMS.
2. Information regarding the details of the work plan and budget and other matters that were planned to be implemented by the Company.
3. Financial information and other matters relating to the Company which were included in the Annual Report and Financial Statements.
4. Complete information and accurate information regarding matters relating to the GMS agenda provided before and/or at the time of the GMS.

General Meeting of Shareholders

The General Meeting of Shareholders (GMS) of the Company became the organ of the company that held the highest power in the company and held all powers that were not delegated to the Board of Directors or the Board of Commissioners.

The GMS of the Company had to be held in accordance with the provisions of laws and regulations and the Company's Articles of Association which are transparent and accountable. In making decisions, the GMS had to safeguard the interests of all parties, especially the interests of debtors, creditors and the interests of minority shareholders.

The GMS of the Company consisted of the Annual GMS and Extraordinary GMS. The Annual GMS had to be held at the latest 6 (six) months after the end of the financial year. The Annual General Meeting of Shareholders to ratify the RKAP

selambat-lambatnya dilaksanakan akhir bulan Januari setelah tahun buku baru dimulai. Selain itu, RUPS Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan perhitungan tahunan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam bulan Juni setelah tahun buku berakhir. Sedangkan RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan setiap saat atas permintaan Pemegang Saham dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

Proses Penyelenggaraan RUPS dan Pemungutan Suara

RUPS dimulai dengan pemanggilan yang dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diselenggarakan. RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang ditunjuk oleh Pemegang Saham. Keputusan RUPS diambil melalui kuorum atau musyawarah untuk mufakat dengan mempertimbangkan kepentingan *stakeholders* lainnya serta proses pengambilan keputusan tersebut dituangkan dalam risalah RUPS. Hasil keputusan RUPS dituangkan dalam risalah RUPS yang harus memuat pendapat baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung usulan yang diajukan dan untuk pengesahannya ditandatangani oleh Pemegang Saham, Komisaris Utama dan Direktur Utama.

Pelaksanaan RUPS Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021

RUPS Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021, telah diselenggarakan RUPS pada:

Hari/tanggal : Jumat/29 Januari 2021
Waktu : 14.00 – 15.00 WIB
Tempat : Zoom Meeting

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Presence
Rully Indrawan	Komisaris Utama / <i>President Commissioner</i>	Hadir / <i>Present</i>
Meidyah Indreswari	Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>	Hadir / <i>Present</i>
M. Sholeh Amin	Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>	Hadir / <i>Present</i>
Veronica Colondam	Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>	Hadir / <i>Present</i>
Parman Nataatmadja	Komisaris / <i>Commissioner</i>	Hadir / <i>Present</i>
Arief Mulyadi	Direktur Utama / <i>President Director</i>	Hadir / <i>Present</i>
Tjatur H Priyono	Direktur Keuangan / <i>Director of Finance</i>	Hadir / <i>Present</i>
Anton Fahlevie	Direktur Bisnis / <i>Business Director</i>	Hadir / <i>Present</i>
M.Q Gunadi	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko / <i>Director of Compliance and Risk Management</i>	Hadir / <i>Present</i>
Noer Fajriensyah	Direktur Kelembagaan / <i>Institutional Director</i>	Hadir / <i>Present</i>

was held at the latest at the end of January after the start of the new financial year. In addition, the Annual General Meeting of Shareholders to approve the Annual Report and validate the annual calculation should be carried out no later than June after the end of the financial year. Meanwhile, an Extraordinary GMS could be held at any time at the request of the Shareholders and/or the Board of Commissioners and/or Directors.

The Process of Implementing A GMS and Voting

The GMS began with an invitation made by the Board of Directors and/or the Board of Commissioners no later than 14 (fourteen) days before the GMS was held. The GMS was attended by Shareholders, the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.

The GMS was chaired by Shareholders or Shareholders' Proxies who were appointed by Shareholders. The resolutions of the GMS were taken through a quorum or deliberation to reach a consensus by considering the interests of other stakeholders and the decision-making process was outlined in the minutes of the GMS. The resolutions of the GMS were set forth in the minutes of the GMS which had to contain opinions both supporting and unsupportive of the proposed proposal and signed by the Shareholders, the President Commissioner and the President Director for ratification.

GMS Implementation of the 2021 Work Plan and Budget Ratification (RKAP)

GMS Ratification of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) 2021, the GMS was held on:

Day/date : Friday/29 January 2021
Time : 14.00 – 15.00 WIB
Place : Zoom Meeting

Attendance of the Board of Commissioners and Board of Directors in GMS

Keputusan RUPS

GMS Decision

Agenda Pertama	First Agenda
Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021 Termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2021 PT Permodalan Nasional Madani (Persero).	Ratification of the 2021 Company Work Plan and Budget (RKAP) including the 2021 Work Plan and Budget of the Board of Commissioners of PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
Keputusan: Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2021 termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2021 PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dengan pokok-pokok sebagai berikut:	Decision: Approved the Company's 2021 Work Plan and Budget including the 2021 Board of Commissioners' Work Plan and Budget of PT Permodalan Nasional Madani (Persero) with the following points:
a. Laporan Laba Rugi	a. Income Statement
Pendapatan Usaha	Rp 7.497 miliar / billion Operating revenues
Biaya Usaha	Rp 6.896 miliar / billion Business costs
Laba (Rugi) Usaha	Rp 601 miliar / billion Profit (Loss) Business
Pendapatan (Beban) Lain-Lain	Rp (4) miliar / billion Other Income (Expenses)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	Rp 597 miliar / billion Profit (Loss) Before Tax
Pajak	Rp (175) miliar / billion Tax
Laba (Rugi) Setelah Pajak	Rp 422 miliar / billion Profit (Loss) After Tax
b. Laporan Posisi Keuangan dan Konsolidasi	b. Financial Position and Consolidated Statements
Aset	Asset
Kas dan Setara Kas	Rp 2.549 miliar / billion Cash and cash equivalents
Aset Lancar Lain	Rp 2.972 miliar / billion Other Current Assets
Pinjaman yang Diberikan	Rp 28.375 miliar / billion Loans Granted
Pembiayaan Modal	Rp 1.137 miliar / billion Capital Financing
Aset Tetap	Rp 2.366 miliar / billion Fixed assets
Aset Lain-Lain	Rp 725 miliar / billion Other Assets
Jumlah Aset	Rp 38.124 miliar / billion Total assets
Liabilitas dan Ekuitas	Liability and equity
Liabilitas Lancar	Rp 2.260 miliar / billion Current Liabilities
Liabilitas Jangka Menengah	Rp 29.323 miliar / billion Medium Term Liabilities
Liabilitas Lain-Lain	Rp 526 miliar / billion Other Liabilities
Ekuitas	Rp 6.015 miliar / billion Equity
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	Rp 38124 miliar / billion Total Liabilities and Equity
c. Belanja Modal (Capital Expenditure)	c. Capital Expenditure
Tanah dan Gedung	Rp 600 miliar / billion Land and Building
Leasehold Improvement	Rp 36 miliar / billion Leasehold Improvement
Furniture & Fixture	Rp 93 miliar / billion Furniture & Fixtures
Peralatan Kantor	Rp 37 miliar / billion Office equipment
IT Hardware & Software	Rp 163 miliar / billion IT Hardware & Software
Total Belanja Modal	Rp 929 miliar / billion Total Capital Expenditure
d. Rencana dan Anggaran Dewan Komisaris Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris sebagaimana yang tercantum di dalam buku RKAP Tahun 2021. Status: Terealisasi	d. Plan and Budget of the Board of Commissioners Work Plan and Budget of the Board of Commissioners as stated in the 2021 RKAP book. Status: Realized

Agenda Kedua	Second Agenda																																																												
<p>Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) Tahun 2021.</p> <p>Keputusan: Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2021, sebagai berikut:</p> <p>Program TJSL: a. Program TJSL yang Dibiayakan Rp 6.000 juta b. Program Pendanaan UMK Dana Tersedia</p>	<p><i>Ratification of the Work Plan and Budget for the Social and Environmental Responsibility Program (RKA-TJSL) 2021.</i></p> <p>Decision: <i>Approved the Work Plan and Budget for the Social and Environmental Responsibility Program (RKA-TJSL) of PT Permodalan Nasional Madani (Persero) 2021, as follows:</i></p> <p>CSR Program: a. Funded CSR Program Rp 6.000 juta b. MSE Funding Program Funds Available</p>																																																												
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Saldo Awal</td> <td>Rp</td> <td>26.048</td> <td>Juta/ Million</td> <td>Beginning balance</td> </tr> <tr> <td>Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan</td> <td>Rp</td> <td>40.621</td> <td>Juta/ Million</td> <td>Foster Partner Loan Repayment</td> </tr> <tr> <td>Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman</td> <td>Rp</td> <td>2.095</td> <td>Juta/ Million</td> <td>Loan Administration Service Income</td> </tr> <tr> <td>Pendapatan Lain</td> <td>Rp</td> <td>151</td> <td>Juta/ Million</td> <td>Other Income</td> </tr> <tr> <td>Penerimaan Lain</td> <td>Rp</td> <td>7</td> <td>Juta/ Million</td> <td>Other Receipts</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Dana Tersedia</td> <td>Rp</td> <td>68.922</td> <td>Juta/ Million</td> <td>Amount of Funds Available</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Penyaluran Dana dan Biaya Operasional</td> </tr> <tr> <td>Penyaluran Mandiri</td> <td>Rp</td> <td>42.000</td> <td>Juta/ Million</td> <td>Self Channeling</td> </tr> <tr> <td>Penyaluran Pembinaan (Hibah)</td> <td>Rp</td> <td>-</td> <td>Juta/ Million</td> <td>Distribution of Coaching (Grants)</td> </tr> <tr> <td>Penyaluran Kepada BUMN Khusus</td> <td>Rp</td> <td>-</td> <td>Juta/ Million</td> <td>Distribution to Special SOEs</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Penyaluran Dana</td> <td>Rp</td> <td>42.000</td> <td>Juta/ Million</td> <td>Amount of Disbursement</td> </tr> <tr> <td>Saldo Akhir</td> <td>Rp</td> <td>26.922</td> <td>Juta/ Million</td> <td>Ending balance</td> </tr> </tbody> </table>	Saldo Awal	Rp	26.048	Juta/ Million	Beginning balance	Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan	Rp	40.621	Juta/ Million	Foster Partner Loan Repayment	Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	Rp	2.095	Juta/ Million	Loan Administration Service Income	Pendapatan Lain	Rp	151	Juta/ Million	Other Income	Penerimaan Lain	Rp	7	Juta/ Million	Other Receipts	Jumlah Dana Tersedia	Rp	68.922	Juta/ Million	Amount of Funds Available	Penyaluran Dana dan Biaya Operasional					Penyaluran Mandiri	Rp	42.000	Juta/ Million	Self Channeling	Penyaluran Pembinaan (Hibah)	Rp	-	Juta/ Million	Distribution of Coaching (Grants)	Penyaluran Kepada BUMN Khusus	Rp	-	Juta/ Million	Distribution to Special SOEs	Jumlah Penyaluran Dana	Rp	42.000	Juta/ Million	Amount of Disbursement	Saldo Akhir	Rp	26.922	Juta/ Million	Ending balance	<p><i>Distribution of Funds and Operational Costs</i></p>
Saldo Awal	Rp	26.048	Juta/ Million	Beginning balance																																																									
Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan	Rp	40.621	Juta/ Million	Foster Partner Loan Repayment																																																									
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	Rp	2.095	Juta/ Million	Loan Administration Service Income																																																									
Pendapatan Lain	Rp	151	Juta/ Million	Other Income																																																									
Penerimaan Lain	Rp	7	Juta/ Million	Other Receipts																																																									
Jumlah Dana Tersedia	Rp	68.922	Juta/ Million	Amount of Funds Available																																																									
Penyaluran Dana dan Biaya Operasional																																																													
Penyaluran Mandiri	Rp	42.000	Juta/ Million	Self Channeling																																																									
Penyaluran Pembinaan (Hibah)	Rp	-	Juta/ Million	Distribution of Coaching (Grants)																																																									
Penyaluran Kepada BUMN Khusus	Rp	-	Juta/ Million	Distribution to Special SOEs																																																									
Jumlah Penyaluran Dana	Rp	42.000	Juta/ Million	Amount of Disbursement																																																									
Saldo Akhir	Rp	26.922	Juta/ Million	Ending balance																																																									
<p>Status: Terealisasi</p>	<p>Status: Realized</p>																																																												
Agenda Ketiga	Third Agenda																																																												
<p>Persetujuan dan Pengesahan <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2021 antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham.</p> <p>Keputusan: Menetapkan <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) yang tertuang dalam Kontak Manajemen Tahun 2021 antara Direksi dan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dengan Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero).</p> <p>Status: Terealisasi</p>	<p><i>Approval and Ratification of Key Performance Indicators (KPI) contained in the 2021 Management Contract between the Board of Directors and the Board of Commissioners and the Shareholders.</i></p> <p>Decision: <i>Establish Key Performance Indicators (KPI) contained in the 2021 Management Contract between the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT Permodalan Nasional Madani (Persero) and the Shareholders of PT Permodalan Nasional Madani (Persero).</i></p> <p>Status: Realized</p>																																																												
Agenda Keempat	Fourth Agenda																																																												
<p>Persetujuan dan Pengesahan <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2021 antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham.</p> <p>Keputusan: Menetapkan <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2021 antara Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dengan Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero).</p> <p>Status: Terealisasi</p>	<p><i>Approval and Ratification of Key Performance Indicators (KPI) contained in the 2021 Management Contract between the Board of Commissioners and Shareholders.</i></p> <p>Decision: <i>Establish Key Performance Indicators (KPI) contained in the 2021 Management Contract between the Board of Commissioners of PT Permodalan Nasional Madani (Persero) and the Shareholders of PT Permodalan Nasional Madani (Persero).</i></p> <p>Status: Realized</p>																																																												

Arahan RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021

Directions of GMS Work Plan and Corporate Budget (RKAP) 2021

No	Arahan RUPS GMS Directives	Realisasi Realization
1	<p>Buku RKAP, RKA-TJSL, RKA Dewan Komisaris dan KPI (<i>Key Performance Indicators</i>) Dewan Komisaris tahun 2021 yang telah disetujui dan disahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta surat tanggapan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani (Persero) nomor S-060/PNM-Kom/XII/20 tanggal 10 Desember 2020 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah Keputusan RUPS ini dan menjadi pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan program kerja dan pencapaian target kinerja pada tahun 2021 serta sebagai sarana pemantauan dan pengawasan bagi Dewan Komisaris. <i>Book of RKAP, RKA-TJSL, RKA Board of Commissioners, and KPI (Key Performance Indicators) of the Board of Commissioners for 2021, which has been approved and ratified by the General Meeting of Shareholders (GMS), as well as a response letter from the Board of Commissioners of PT Permodalan Nasional Madani (Persero) number S-060 /PNM-Kom/XII/20 dated December 10, 2020, is an integral part of the Minutes of Resolution of this GMS and serves as a guide for the Board of Directors in implementing work programs and achieving performance targets in 2021 as well as a means of monitoring and supervision for the Board of Commissioners.</i></p>	<p>Buku RKAP, RKA-TJSL, RKA Dewan Komisaris dan KPI (<i>Key Performance Indicators</i>) Dewan Komisaris tahun 2021 sebagai pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan program kerja dan pencapaian target kinerja pada tahun 2021 serta sebagai sarana pemantauan dan pengawasan bagi Dewan Komisaris. <i>Book of RKAP, RKA-TJSL, RKA Board of Commissioners, and KPI (Key Performance Indicators) of the Board of Commissioners for 2021 as a guide for the Board of Directors in implementing work programs and achieving performance targets in 2021 as well as a means of monitoring and supervision for the Board of Commissioners.</i></p> <p>Telah terealisasi. <i>Has been realized.</i></p>
2	<p>Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris diminta untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Target-target seluruh program kerja yang tertuang dalam RKAP 2021 agar dilaksanakan sesuai dengan target output dan melakukan <i>cascading</i> target-target RKAP dan KPI Korporat yang diturunkan ke target kinerja pejabat/karyawan hingga level individu, seluruh wilayah/cabang/unit kerja dan anak perusahaan, serta melakukan monitoring dan evaluasi kinerja bulanan secara komprehensif; Melaksanakan RKAP secara efektif dengan biaya efisien, bekerja dengan sungguh-sungguh dan mengupayakan yang terbaik (<i>best effort</i>) dalam mencapai target-target. RKAP demi memajukan perusahaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memperhatikan prinsip-prinsip GCG dan profesionalisme. Dalam hal terjadi perubahan asumsi dan kondisi bisnis, Direksi diminta memiliki rencana antisipasi (<i>contingency plan</i>), sehingga target RKAP tetap dapat tercapai; Mendorong peningkatan peran perusahaan dalam mendukung Program Pemerintah untuk pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan peningkatan inklusi keuangan melalui penyediaan akses layanan keuangan yang efisien dan terjangkau, serta lebih mengoptimalkan pelaksanaan Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) melalui sinergi dan kolaborasi dengan BUMN/instansi terkait; <p><i>The Board of Directors under the supervision of the Board of Commissioners is asked to:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>The targets of all work programs contained in the 2021 RKAP are to be carried out in accordance with the output targets and to cascading the RKAP and Corporate KPI targets which are lowered to the performance targets of officials/employees to the individual level, all regions/branches/work units and subsidiaries, and carry out comprehensive monthly performance monitoring and evaluation;</i> <i>Implementing RKAP effectively with efficient cost, working earnestly, and trying the best (best effort) in achieving targets. RKAP for the sake of advancing the company by following the provisions of laws and regulations and paying attention to the principles of GCG and professionalism. In the event of a change in assumptions and business conditions, the Board of Directors is requested to have a contingency plan so that the RKAP target can still be achieved;</i> <i>Encouraging the increasing role of companies in supporting the Government Program for the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) and increasing financial inclusion through the provision of access to efficient and affordable financial services, as well as further optimizing the implementation of the Business Capacity Development Program (PKU) through synergy and collaboration with BUMN/related agencies;</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Target-target seluruh program kerja yang tertuang dalam RKAP 2021 sudah terlaksana sesuai dengan target output serta telah dilakukan <i>cascading</i> target-target RKAP dan KPI Korporat yang diturunkan ke target kinerja pejabat/karyawan hingga level individu, seluruh wilayah/cabang/unit kerja dan anak perusahaan, serta sudah melakukan monitoring dan evaluasi kinerja bulanan secara komprehensif; Sudah melaksanakan RKAP secara efektif dengan biaya efisien, bekerja dengan sungguh-sungguh dan mengupayakan yang terbaik (<i>best effort</i>) dalam mencapai target-target. RKAP untuk memajukan perusahaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memperhatikan prinsip-prinsip GCG dan profesionalisme. Berdasarkan surat target RKAP telah tercapai; Perusahaan telah mendorong peningkatan peran perusahaan dalam mendukung Program Pemerintah untuk pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan peningkatan inklusi keuangan melalui penyediaan akses layanan keuangan yang efisien dan terjangkau dengan mengoptimalkan program Pengembangan Kapasitas Usaha dengan sinergi bersama BUMN/Instansi terkait. <ol style="list-style-type: none"> <i>The targets of all work programs contained in the 2021 Company Work and Budget Plan were carried out in accordance with the output targets, and cascading of Company Work and Budget Plan and Corporate KPI targets had been lowered to the performance targets of officials/employees to the individual level, all regions/branches/work units and subsidiaries, and had carried out comprehensive monthly performance monitoring and evaluation;</i> <i>Implementing Company Work and Budget Plan effectively and efficiently, worked earnestly and tried the best (best effort) in achieving targets of Company Work and Budget Plan to advance the company, in accordance with the provisions of laws and regulations, and paying attention to the principles of GCG and professionalism. Based on the letter the Company Work and Budget Plan, the target had been achieved;</i> <i>The company encouraged the increasing role of companies in supporting the Government Program for the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) and increasing financial inclusion through the provision of access to efficient and affordable financial services by optimizing the Business Capacity Development program in synergy with related SOEs/Agencies.</i>

No	Arahan RUPS GMS Directives	Realisasi Realization
	<p>d. Dalam penyaluran pinjaman kepada nasabah agar senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian (<i>prudent</i>) dan menerapkan manajemen risiko secara konsisten, serta memperkuat pengawasan dalam rangka menjaga rasio NPL (<i>Non-Performing Loan</i>) pada tingkat yang aman serta meminimalisir potensi kerugian;</p> <p>e. Memperhatikan dampak dari pandemi Covid-19, Perseroan diminta agar terus melakukan mitigasi risiko dengan <i>prudent</i> dan menjaga nilai CKPN to <i>Loan at Risk</i> (LaR)/LaR Coverage dan nilai CKPN to NPL/NPL Coverage untuk memitigasi potensi risiko penurunan kualitas kredit di masa mendatang.</p> <p>f. Pelaksanaan Belanja Modal (Capex) agar dilakukan monitoring dan evaluasi secara intensif sesuai dengan kebutuhan serta lebih diprioritaskan untuk program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Untuk itu Direksi diminta memberikan perhatian secara penuh serta mengantisipasi risiko-risiko yang berpotensi timbul dalam proses pelaksanaan program belanja modal dengan didukung kajian dan aspek risiko secara mendalam;</p> <p>g. Memperhatikan target penurunan BOPO, agar upaya realisasi target dapat dilakukan tanpa menurunkan kualitas pelayanan kepada nasabah dan tetap berupaya secara maksimal untuk dapat meningkatkan kelas nasabah;</p> <p>h. Sehubungan dengan rencana pembelian gedung pusat Perusahaan, agar mengoptimalkan anggaran yang ada dan mempertimbangkan aspek lokasi, kapasitas, dan hal lainnya untuk memastikan bahwa pembelian gedung dapat menjadi investasi jangka panjang yang berdampak secara signifikan terhadap peningkatan produktivitas bisnis Perseroan;</p> <p>i. Penarikan pinjaman eksternal agar tetap mempertimbangkan aspek <i>timing</i>, <i>sizing</i>, dan <i>pricing</i> serta skema dan proses yang terbaik, sehingga dapat dilakukan efisiensi terhadap beban bunga (<i>cost of fund</i>), sekaligus sebagai upaya menurunkan beban bunga pinjaman kepada nasabah;</p> <p>d. <i>In distributing loans to customers, always prioritize the conservative principle and apply risk management consistently, as well as strengthen supervision to maintain the NPL (Non-Performing Loan) ratio at a safe level and minimize potential losses;</i></p> <p>e. <i>Considering the impact of the Covid-19 pandemic, the Company was asked to continue to mitigate risk prudently and maintain the value of CKPN to Loan at Risk (LaR)/LaR Coverage and CKPN to NPL/NPL Coverage to mitigate the potential risk of declining credit quality in the future.</i></p> <p>f. <i>Implementation of Capital Expenditures (Capex) so that monitoring and evaluation are carried out intensively according to needs and prioritized programs that have a direct impact on improving company performance. For this reason, the Board of Directors is asked to give full attention and anticipate risks that could potentially arise in the process of implementing the capital expenditure program, supported by in-depth studies and risk aspects;</i></p> <p>g. <i>Paying attention to the target of BOPO reduction, so that efforts to realize the target could be carried out without reducing the quality of service to customers and continue to strive optimally to be able to increase the class of customers;</i></p> <p>h. <i>In connection with the plan to purchase the Company's central building, in order to optimize the existing budget and consider aspects of location, capacity, and other matters to ensure that the purchase of the building could be a long-term investment that had a significant impact on increasing the Company's business productivity;</i></p> <p>i. <i>Withdraw external loans in order to take into account the aspects of timing, sizing, and pricing as well as the best schemes and processes, so that the cost of funds can be made efficient, as well as an effort to reduce the interest burden on loans to customers;</i></p>	<p>d. Direksi dan seluruh Insan Perusahaan sudah mengedepankan prinsip kehati-hatian (<i>prudent</i>) dan menerapkan manajemen risiko secara konsisten, serta meningkatkan pengawasan pembiayaan sehingga rasio NPL Perusahaan tetap terjaga sebesar 1,23% dibawah target RKAP sebesar 2%.</p> <p>e. Perusahaan telah melakukan mitigasi risiko untuk menjaga nilai CKPN sehingga LAR Coverage dan NPL Coverage perusahaan telah melebihi target RKAP 2021.</p> <p>f. Perusahaan telah melakukan monitoring dan evaluasi secara intensif atas pelaksanaan belanja modal Capex sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. serta lebih diprioritaskan untuk program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Untuk itu Direksi telah memberikan perhatian secara penuh serta mengantisipasi risiko-risiko yang berpotensi timbul dalam proses pelaksanaan program belanja modal dengan didukung kajian dan aspek risiko secara mendalam, sehingga realisasi Belanja Modal Capex tidak melebihi target RKAP 2021.</p> <p>g. Perusahaan telah berhasil menekan BOPO sehingga realisasi target BOPO lebih rendah daripada target RKAP 2021 tanpa menurunkan kualitas pelayanan kepada nasabah dengan menunjukkan peningkatan jumlah nasabah dan pembiayaan.</p> <p>h. Perusahaan telah melakukan pembelian gedung pusat dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia dan gedung tersebut telah menjadi aset jangka panjang guna mendukung kinerja Perusahaan.</p> <p>i. Perusahaan telah mengoptimalkan aspek tersebut sehingga realisasi <i>cost of fund</i> di tahun 2021 lebih rendah dibandingkan target RKAP 2021.</p> <p>d. <i>The Board of Directors and all employees of the Company put forward the prudent principle and implemented risk management consistently, as well as improved financing supervision so that the Company's NPL ratio could be maintained at 1.23% below the Company Work and Budget Plan target of 2%.</i></p> <p>e. <i>The company carried out risk mitigation to maintain the CKPN value so that the company's LAR Coverage and NPL Coverage have exceeded the 2021 RKAP target.</i></p> <p>f. <i>The Company carried out intensive monitoring and evaluation of the implementation of Capex capital expenditures in accordance with the needs of the Company and prioritized programs that had a direct impact on improving company performance. For this reason, the Board of Directors gave full attention to and anticipated the risks that could potentially arise in the process of implementing the capital expenditure program supported by in-depth studies and risk aspects, so that the realization of Capex Capital Expenditure did not exceed the 2021 RKAP target.</i></p> <p>g. <i>The company succeeded in suppressing BOPO so that the realization of the BOPO target was lower than the 2021 Company Work and Budget Plan target without reducing the quality of service to customers by showing an increase in the number of customers and financing.</i></p> <p>h. <i>The Company purchased the central building by optimizing the available budget, and the building became a long-term asset to support the Company's performance.</i></p> <p>i. <i>The company optimized this aspect so that the realization of the cost of funds in 2021 was lower than the 2021 Company Work and Budget Plan target.</i></p>

No	Arahan RUPS GMS Directives	Realisasi Realization
	<p>j. Direksi agar lebih mengoptimalkan pengelolaan dan penyaluran dana hibah Program Kemitraan yang diterima dari BUMN, tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan program penyaluran subsidi bunga/subsidi margin dalam rangka pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional, serta memastikan efektivitas penggunaan dan pengelolannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>k. Untuk menjaga keunggulan kompetitif perusahaan, Direksi diminta agar senantiasa mendorong langkah inovasi dalam rangka memperkuat daya saing dan penyediaan produk/layanan yang terbaik bagi nasabah dan mitra perusahaan, khususnya dalam memanfaatkan adaptasi penggunaan teknologi dan perubahan budaya masyarakat yang terjadi selama masa pandemi Covid-19;</p> <p>l. Direksi agar melakukan review periodik dan penyempurnaan yang berkelanjutan terhadap proses bisnis dan prosedur kerja dalam rangka penyediaan produk dan layanan dengan mutu terbaik (<i>Service Excellence</i>) bagi seluruh customer dan mitra perusahaan, termasuk menjamin pemenuhan <i>Service Level Agreement</i> sesuai standar yang telah ditetapkan;</p> <p>m. Rencana pelaksanaan divestasi anak perusahaan, sebagai bagian dari skema pembentukan Holding BUMN Ultra Mikro, agar dilakukan secara hati-hati dan didukung dengan prosedur yang memadai serta sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>n. Direksi diminta menyelenggarakan <i>talent management system</i> dan menyiapkan <i>talent pool</i> yang memadai termasuk peningkatan kesempatan bagi pegawai wanita dan generasi <i>millennials</i> sebagai upaya mempertahankan dan/atau mengembangkan <i>talent</i> terbaik yang ada serta dalam rangka menjaga <i>sustainable growth</i> perusahaan;</p> <p>j. <i>The Board of Directors to optimize the management and distribution of Partnership Program grants received from SOEs, additional State Equity Participation (PMN) and the distribution of interest subsidies/margin subsidies in the context of implementing the National Economic Recovery program, as well as ensuring the effectiveness of their use and management in accordance with the provisions of laws and regulations. -invitation.</i></p> <p>k. <i>To maintain the company's competitive advantage, the Board of Directors was requested to continuously encourage innovation steps in order to strengthen competitiveness and provide the best products/services for customers and company partners, especially in utilizing adaptation to the use of technology and changes in community culture that occurred during the Covid-19 pandemic;</i></p> <p>l. <i>The Board of Directors to conduct periodic reviews and continuous improvement of business processes and work procedures in order to provide products and services with the best quality (Service Excellence) for all customers and company partners, including ensuring the fulfillment of Service Level Agreements according to established standards;</i></p> <p>m. <i>The plan for implementing the divestment of subsidiaries, as part of the scheme for the establishment of the Ultra Micro SOE Holding, should be carried out carefully and supported by adequate procedures and in accordance with the prevailing laws and regulations;</i></p> <p>n. <i>The Board of Directors was asked to implement a talent management system and prepare an adequate talent pool, including increasing opportunities for female employees and the millennial generation as an effort to maintain and/or develop the best existing talent and in order to maintain the company's sustainable growth;</i></p>	<p>j. Direksi telah mengoptimalkan pengelolaan dan penyaluran dana program subsidi bunga/subsidi margin dalam rangka pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional, serta telah memastikan efektivitas penggunaan dan pengelolannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>k. Perusahaan telah melakukan langkah inovasi dalam rangka memperkuat daya saing dengan menyediakan produk/layanan yang terbaik bagi nasabah dan mitra perusahaan, Perusahaan juga telah memanfaatkan adaptasi penggunaan teknologi dan perubahan budaya masyarakat yang terjadi selama masa pandemi Covid-19 dengan melaksanakan Digitalisasi Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) nasabah PNM Mekaar.</p> <p>l. Perusahaan telah melakukan review periodik terhadap proses bisnis dan prosedur kerja dalam rangka penyediaan produk dan layanan dengan mutu terbaik (<i>Service Excellence</i>) bagi seluruh customer dan mitra perusahaan, termasuk memastikan pemenuhan <i>Service Level Agreement</i> sesuai standar yang telah ditetapkan;</p> <p>m. Sesuai Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani Nomor SK-308/MBU/09/2021 Nomor B.1439-DIR/CSC/09/2021 tanggal 13 September 2021 perihal Perubahan Anggaran Dasar maka Perusahaan telah ditetapkan menjadi bagian Holding BUMN Ultra Mikro sesuai dengan prosedur dan undang-undang yang berlaku.</p> <p>n. Telah dilakukan <i>talent management system</i> dan <i>talent pool BOD-1</i> yang memadai dengan memastikan adanya kesempatan bagi pegawai wanita dan generasi <i>millennials</i> sebagai upaya mempertahankan dan/atau mengembangkan <i>talent</i> terbaik yang ada serta dalam rangka menjaga <i>sustainable growth</i> perusahaan.</p> <p>j. <i>The Board of Directors optimized the management and distribution of funds for the interest subsidy/margin subsidy program in the context of implementing the National Economic Recovery program, and ensured the effectiveness of its use and management in accordance with the provisions of laws and regulations.</i></p> <p>k. <i>The company created innovation steps in order to strengthen competitiveness by providing the best products/services for customers and company partners, the company also took advantage of adaptation to the use of technology and changes in community culture that occurred during the Covid-19 pandemic by carrying out the Digitization of Weekly Group Meetings (PKM) PNM Mekaar customers.</i></p> <p>l. <i>The company conducted periodic reviews of business processes and work procedures in order to provide products and services with the best quality (Service Excellence) for all customers and company partners, including ensuring the fulfillment of Service Level Agreements according to established standards;</i></p> <p>m. <i>In accordance with the Decision of the Shareholders of PT Permodalan Nasional Madani Number SK-308/MBU/09/2021 Number B.1439-DIR/CSC/09/2021 dated September 13, 2021 regarding the Amendment to the Articles of Association, the Company was designated as part of the Ultra Micro SOEs Holding in accordance with with applicable laws and procedures.</i></p> <p>n. <i>In accordance with the Decision of the Shareholders of PT Permodalan Nasional Madani Number SK-308/MBU/09/2021 Number B.1439-DIR/CSC/09/2021 dated September 13, 2021 regarding the Amendment to the Articles of Association, the Company was designated as part of the Ultra Micro BUMN Holding in accordance with with applicable laws and procedures.</i></p>

No	Arahan RUPS GMS Directives	Realisasi Realization
	<p>o. Seiring dengan jumlah karyawan yang terus meningkat, Direksi agar terus mengembangkan kualitas SDM melalui pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan yang terstruktur, serta implementasi sistem <i>reward & punishment</i> dan <i>career path</i> yang dapat mendorong peningkatan produktivitas karyawan. Terkait dengan hal tersebut, agar dilakukan evaluasi terhadap struktur organisasi yang ada saat ini, khususnya untuk mengoptimalkan fungsi dan peran pembinaan SDM (Sumber Daya Manusia);</p> <p>p. Direksi agar terus mendorong digitalisasi dan melakukan pengembangan sistem Teknologi Informasi (TI) yang terintegrasi, memperkuat kapasitas dan keamanan infrastruktur TI yang ada saat ini, sehingga dapat optimal mendukung pertumbuhan dan selaras dengan arah pengembangan bisnis perusahaan baik untuk proses bisnis internal perusahaan maupun untuk nasabah guna mendukung Holding BUMN Ultra Mikro.</p> <p>o. <i>As the number of employees continues to increase, the Board of Directors must continue to develop the quality of human resources through the implementation of structured education and training programs, as well as the implementation of a reward & punishment system and a career path that can encourage increased employee productivity. Related to this, it is necessary to evaluate the current organizational structure, in particular to optimize the function and role of HR development (Human Resources);</i></p> <p>p. <i>The Board of Directors to continue to encourage digitalization and develop an integrated Information Technology (IT) system, strengthen the capacity and security of the existing IT infrastructure, so that it can optimally support growth and be in line with the company's business development direction, both for the company's internal business processes and for customers.</i></p>	<p>o. Perusahaan telah mengembangkan kualitas SDM melalui pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan yang terstruktur, serta implementasi sistem <i>reward & punishment</i> dan <i>career path</i> yang telah mendorong peningkatan produktivitas karyawan. Dengan hal tersebut, telah dilakukan evaluasi terhadap struktur organisasi yang ada saat ini, khususnya untuk mengoptimalkan fungsi dan peran pembinaan SDM (Sumber Daya Manusia);</p> <p>p. Perusahaan telah mendorong digitalisasi dan melakukan pengembangan sistem Teknologi Informasi (TI) yang terintegrasi, memperkuat kapasitas dan keamanan infrastruktur TI yang ada saat ini, sehingga dapat optimal mendukung pertumbuhan dan selaras dengan arah pengembangan bisnis perusahaan baik untuk proses bisnis internal perusahaan maupun untuk nasabah guna mendukung Holding BUMN Ultra Mikro.</p> <p>o. <i>The company developed the quality of human resources through the implementation of structured education and training programs, as well as the implementation of a reward & punishment system and a career path that boosted employee productivity. With this in mind, an evaluation of the current organizational structure was carried out, in particular to optimize the function and role of HR development (Human Resources);</i></p> <p>p. <i>The company encouraged digitalization and developed an integrated Information Technology (IT) system, strengthening the capacity and security of the existing IT infrastructure, so that it could optimally support growth and be in line with the company's business development direction, both for the company's internal business processes and for customers to support Ultra Micro SOEs Holding.</i></p> <p>Telah terealisasi. <i>Has been realized.</i></p>
3	<p>Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PER-12/MBU/11/2020, ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi yang dalam hal ini akan ditetapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku RUPS dengan memperhatikan kepentingan Perseroan, kewajaran, kemampuan keuangan perusahaan dan faktor-faktor variabel kinerja (<i>meritrating</i>).</p> <p><i>In accordance with the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Income of Directors, Board of Commissioners and Supervisory Board of SOEs which had been amended several times, most recently with PER-12/MBU/11/2020, provisions regarding the amount of salaries and allowances for members of the Board of Directors which in this case was determined by the Minister of State-Owned Enterprises as the GMS by taking into account the interests of the Company, fairness, company's financial capability and the factors of performance variables (meritrating).</i></p>	<p>Tantiem/insentif kinerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris diberikan berdasarkan pencapaian target kinerja tahun 2021 yang diputuskan dalam RUPS Tahunan.</p> <p><i>Performance bonuses/incentives for the Board of Directors and the Board of Commissioners were given based on the achievement of the 2021 performance targets decided at the Annual GMS.</i></p> <p>Telah terealisasi. <i>Has been realized.</i></p>
4	<p>Dalam pelaksanaan RKA-TJSL, Direksi agar mengupayakan pencapaian target penyaluran dana dan tingkat pengembalian (kolektibilitas) pinjaman dengan senantiasa berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang PKBL BUMN sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN nomor PER-02/MBU/04/2020 dan Risalah Rapat Pembahasan RKA-PKBL nomor RIS-26/DSI.MBU.B/01/2020 tanggal 15 Januari 2021, serta memperhatikan arahan dan kebijakan Kementerian BUMN;</p> <p><i>In implementing the RKA-TJSL, the Board of Directors should strive to achieve the target of distributing funds and the rate of return (collectibility) of loans by always being guided by the Regulation of the Minister of SOEs number PER-09/MBU/07/2015 concerning SOE PKBL as last amended by Regulation of the Minister of SOEs number PER-02/MBU/04/2020 and the Minutes of the RKA-PKBL Discussion Meeting number RIS-26/DSI.MBU.B/01/2020 dated January 15, 2021, and pay attention to the directions and policies of the Ministry of SOEs;</i></p>	<p>Pelaksanaan RKA-PKBL telah dilakukan sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang PKBL BUMN sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017 dan Risalah Rapat Pembahasan RIS-26/DSI.MBU.B/01/2020 tanggal 15 Januari 2021, serta memperhatikan arahan dan kebijakan Kementerian BUMN.</p> <p><i>The implementation of the RKA-PKBL was carried out in accordance with the guidelines for the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-09/MBU/07/2015 concerning Partnership Program and Community Development Program of SOEs as last amended by the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-02/MBU/7/2017 and the Minutes of the RIS-26 Discussion Meeting /DSI.MBU.B/01/2020 dated January 15, 2021, and paid attention to the directions and policies of the Ministry of SOEs.</i></p> <p>Telah terealisasi. <i>Has been realized.</i></p>

No	Arahan RUPS GMS Directives	Realisasi Realization
5	<p>Dalam menjalankan setiap kegiatan operasional Perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi beserta seluruh jajaran perusahaan agar senantiasa berpedoman pada ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan, mengedepankan aspek kehati-hatian (<i>prudent</i>) serta menerapkan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dan manajemen risiko secara konsisten.</p> <p><i>In carrying out each of the Company's operational activities, the Board of Commissioners and the Board of Directors, and all levels of the company must always be guided by the provisions of the Articles of Association, laws, and regulations, prioritize prudential aspects, and apply the principles of Good Corporate Governance and risk management consistently.</i></p>	<p>Dewan Komisaris, Direksi beserta seluruh jajaran perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan, ketentuan Anggaran Dasar, dan mengedepankan aspek kehati-hatian serta secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dan manajemen risiko secara konsisten.</p> <p><i>The Board of Commissioners, the Board of Directors, and all levels of the company in carrying out the company's operational activities are always guided by the laws and regulations, the provisions of the Articles of Association, and prioritize aspects of prudence and apply the principles of Good Corporate Governance and risk management consistently.</i></p> <p>Telah terealisasi. <i>Has been realized.</i></p>
6	<p>Terhadap hasil temuan pemeriksaan auditor (BPK, OJK, BPKP, KAP dan SPI) yang belum tuntas, Direksi agar memprioritaskan dan mendorong penyelesaiannya dengan target waktu dan penanggung jawab (<i>Person In Charge</i>) yang jelas. Fungsi dan peran SPI agar lebih dioptimalkan untuk membantu penyelesaian temuan, serta mendeteksi dan mencegah pelanggaran secara lebih dini.</p> <p><i>Regarding the auditor's examination (BPK, OJK, BPKP, KAP, and SPI) that have not been completed, the Board of Directors should prioritize and encourage its completion with a precise target time and Person In Charge (Person In Charge). The function and role of the SPI are to be optimized to help resolve findings and detect and prevent violations early.</i></p>	<p>Satuan Pengawas Internal terus berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja serta memprioritaskan dan memonitor penyelesaian temuan auditor (BPK, OJK, BPKP, KAP dan SPI), serta melaporkan tindak lanjutnya secara berkala kepada Direksi.</p> <p><i>The Internal Supervisory Unit continues to strive to improve quality and performance and prioritize and monitor the completion of auditor findings (BPK, OJK, BPKP, KAP, and SPI), and report follow-up actions periodically to the Board of Directors.</i></p> <p>Telah terealisasi. <i>Has been realized.</i></p>

Pelaksanaan RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2020

RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2020, telah diselenggarakan RUPS pada:

Hari/tanggal : Rabu/14 April 2021
Waktu : 11.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Zoom Meeting

Implementation of GMS Approval of Annual Report and Ratification of 2020 Financial Statements

GMS Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statements for Fiscal Year 2020, the GMS was held on:

Day/date : Wednesday/14 April 2021
Time : 11.00 s.d. 12.00 WIB
Place : Zoom Meeting

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Dalam RUPS

Attendance of the Board of Commissioners and Board of Directors In GMS

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Presence
Rully Indrawan	Komisaris Utama / <i>President Commissioner</i>	Hadir / <i>Present</i>
Meidyah Indreswari	Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>	Hadir / <i>Present</i>
M. Sholeh Amin	Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>	Hadir / <i>Present</i>
Veronica Colondam	Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>	Hadir / <i>Present</i>
Parman Nataatmadja	Komisaris / <i>Commissioner</i>	Hadir / <i>Present</i>
Arief Mulyadi	Direktur Utama / <i>President Director</i>	Hadir / <i>Present</i>
Tjatur H Priyono	Direktur Keuangan / <i>Director of Finance</i>	Hadir / <i>Present</i>
Anton Fahlevie	Direktur Bisnis / <i>Business Director</i>	Hadir / <i>Present</i>
M.Q Gunadi	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko / <i>Director of Compliance and Risk Management</i>	Hadir / <i>Present</i>
Noer Fajrieansyah	Direktur Kelembagaan / <i>Institutional Director</i>	Hadir / <i>Present</i>

Keputusan RUPS

GMS Decision

Agenda Pertama		First Agenda	
Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020.		Ratification of the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2020 and Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners for Fiscal Year 2020.	
<p>Keputusan: Mengesahkan Laporan Tahunan Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia) sesuai Laporan No. 00039/2.1051/AU.1/11/0518-1/1/1/2021 tanggal 29 Januari 2021 dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan dengan pokok-pokok sebagai berikut:</p>		<p>Decision: Ratifying the 2020 Financial Year Annual Report including the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the 2020 Financial Year, as well as ratifying the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year ending December 31, 2020 audited by the Public Accounting Firm of Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia) according to Report No. 00039/2.1051/AU.1/11/0518-1/1/1/2021 dated January 29, 2021 with an opinion "fair, in all material respects", and to provide settlement and release of liability (<i>volledig acquit et de charge</i>) to The Board of Directors for management actions and the Board of Commissioners for supervisory actions carried out in the Financial Year ending on December 31, 2020 as long as these actions did not constitute criminal acts and were reflected in the Company's report books with the following points:</p>	
1) Laba Rugi Konsolidasi		1) Consolidated Profit and Loss	
Pendapatan Usaha	Rp 5.776,3 miliar	Operating Revenue	
Beban Usaha	Rp (5.560,1) miliar	Financial Changes	
Laba (Rugi) Usaha	Rp 216,2 miliar	Profit (Loss) Operating	
Pendapatan (Beban) Lainnya	Rp 183,0 miliar	Other Income (Expense)	
Laba Sebelum Pajak	Rp 399,1 miliar	Profit Before Income Tax Expense	
Pajak Penghasilan	Rp (40,5) miliar	Income tax	
Laba Tahun Berjalan	Rp 358,6 miliar	Current year profit	
2) Posisi Keuangan Konsolidasi		2) Consolidated Financial Position	
Aset Lancar	Rp 5.431,9 miliar	Current Assets	
Pinjaman yang Diberikan	Rp 22.089,0 miliar	Loans	
Pembiayaan Modal	Rp 846,6 miliar	Capital Financing	
Aset Tetap	Rp 1.476,7 miliar	Fixed assets	
Aset Lain-Lain	Rp 1.820,7 miliar	Other Assets	
Total Aset	Rp 31.664,9 miliar	Total Assets	
Hutang Lancar	Rp 2.643,3 miliar	Current Liabilities	
Hutang Jk. Menengah	Rp 23.434,7 miliar	Medium-term Debt	
Total Liabilitas	Rp 26.078,0 miliar	Total Liabilities	
Paid-up Capital	Rp 3.800,0 miliar	Paid-up Capital	
Retained Earnings	Rp 1.786,9 miliar	Retained Earnings	
Total Ekuitas	Rp 5.586,9 miliar	Total Equity	
Total Liabilitas dan Ekuitas	Rp 31.664,9 miliar	Total of Liabilities dan Equities	
3) Arus Kas		3) Cash Flow	
Arus Kas Operasional	Rp 1.015,2 miliar	Operating Cash Flow	
Arus Kas Operasional Pembiayaan	Rp (4.750,6) miliar	Financing Operational Cash Flow	
Arus Kas Investasi	Rp (518,1) miliar	Investment Cash Flow	
Arus Kas Pendanaan	Rp 5.614,9 miliar	Funding Cash Flow	
Total Arus Kas	Rp 1.361,4 miliar	Total Cash Flow	
Saldo Awal Kas & Setara Kas	Rp 3.100,7 miliar	Beginning Cash Balance & Cash Equivalent	
Saldo Akhir Kas & Setara Kas	Rp 4.462,1 miliar	Beginning Cash Balance & Cash Equivalent	

4) Tingkat Kesehatan dan Key Performance Indicators

- Tingkat Kesehatan : Sehat Sekali: 143,47
- KPI : 104,34

4) Health Level and Key Performance Indicators

- Health Level: Very Healthy: 143.47
- KPI: 104.34

5) Belanja Modal (Capital Expenditure)

	Rp		miliar / billion	
Tanah dan Gedung	Rp	-	miliar / billion	Land and Building
Leasehold Improvement	Rp	15,6	miliar / billion	Leasehold Improvement
Furniture & Fixtures	Rp	19,4	miliar / billion	Furniture & Fixtures
Peralatan Kantor	Rp	13,5	miliar / billion	Office Equipment
IT Hardware & Software	Rp	84,3	miliar / billion	IT Hardware & Software
Total Belanja Modal	Rp	132,8	miliar / billion	Total Capital Expenditure

5) Capital Expenditure**Status: Terealisasi****Status: Realized**

Agenda Kedua	Second Agenda
Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2020, dan mengesahkan Laporan Keuangan PKBL untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.	Ratification of the Annual Report on the Implementation of the Partnership and Community Development Program (PKBL) for the 2020 Financial Year and ratification of the PKBL Financial Report for the financial year ending 31 December 2020.
Keputusan: Mengesahkan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2020, dan mengesahkan Laporan Keuangan PKBL untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia) sesuai dengan Laporan No. 00056/2.1051/AU.2/11/1671-1/1/11/2021 tanggal 15 Februari 2021 dengan pendapat " wajar, dalam semua hal yang material " serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi atas tindakan pengurusan PKBL dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan PKBL yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin di dalam laporan tersebut, dengan pokok-pokok sebagai berikut:	Decision: Ratifying the Annual Report on the Implementation of the Partnership and Community Development Program (PKBL) for the 2020 Financial Year, and ratify the PKBL Financial Report for the financial year ending December 31, 2020 which had been audited by the Public Accounting Firm of Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners (Crowe Indonesia) in accordance with Report No. 00056/2.1051/AU.2/11/1671-1/1/11/2021 dated February 15, 2021 with a "reasonable opinion, in all material respects" and granting settlement and release of liability (<i>volledig acquit et de charge</i>) to The Board of Directors for Partnership Program and Community Development Program (PKBL) management actions and the Board of Commissioners for PKBL supervision actions carried out in the Financial Year ending on December 31, 2020, as long as these actions were not criminal acts and were reflected in the report, with the following points:
1) Program Kemitraan	1) Partnership Program
Dana Tersedia	Funds available
Saldo Awal	Beginning balance
Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan	Foster Partner Loan Repayment
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	Loan Administration Service Income
Pendapatan Administrasi Bank (Nett)	Bank Administration Income (Net)
Jumlah Dana Tersedia	Amount of Funds Available
Penyaluran Dana dan Biaya Operasional	Distribution of Funds and Operational Costs
Penyaluran Mandiri	Self-Distribution
Penyaluran pembinaan (Hibah)	Distribution of coaching (Grants)
Penyaluran kepada BUMN Khusus	Distribution to Special SOEs
Jumlah Penyaluran Dana	Amount of Disbursement
Saldo Akhir	Final Balance
2) Program Bina Lingkungan	2) Community Development Program
Dana Tersedia	Funds Available
Dana Diterima dari BUMN Pembina	Funds Received from SOEs
Jumlah Dana Tersedia	Amount of Funds Available
Penyaluran Bina Lingkungan	Distribution of Community Development
Jumlah Penggunaan	Amount of usage
Saldo Akhir	Final Balance

Status: Terealisasi**Status: Realized**

Agenda Ketiga	Third Agenda
<p>Penetapan penggunaan laba bersih konsolidasian.</p> <p>Keputusan: Menetapkan penggunaan laba bersih konsolidasian yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Tahun Buku 2020 sebesar Rp358,18 miliar seluruhnya sebagai Laba Ditahan.</p> <p>Status: Terealisasi</p>	<p><i>Determination of the use of consolidated net income.</i></p> <p>Decision: <i>Determined the use of consolidated net income attributable to owners of the parent entity for Fiscal Year 2020 of Rp358.18 billion in total as Retained Earnings.</i></p> <p>Status: Realized</p>
Agenda Keempat	Fourth Agenda
<p>Penetapan Gaji/Honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021 serta tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerja Tahun Buku 2020.</p> <p>Keputusan: Penetapan Gaji/Honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021 serta tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerja Tahun Buku 2020, akan ditetapkan secara tersendiri.</p> <p>Status: Terealisasi</p>	<p><i>Determination of Salary/Honorarium along with other facilities and allowances for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the 2021 Financial Year, as well as bonuses for the Board of Directors and Board of Commissioners for the performance of the 2020 Financial Year.</i></p> <p>Decision: <i>Determination of Salary/Honorarium along with other facilities and allowances for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the 2021 Financial Year as well as bonuses for the Board of Directors and Board of Commissioners for the performance of the 2020 Financial Year, would be determined separately.</i></p> <p>Status: Realized</p>
Agenda Kelima	Fifth Agenda
<p>Penunjukan Kantor Akuntan Publik.</p> <p>Keputusan</p> <ol style="list-style-type: none"> Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2021. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2021 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia), karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2021, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut. <p>Status: Terealisasi</p>	<p>Appointment of Public Accounting Firm.</p> <p>Decision:</p> <ol style="list-style-type: none"> Reappointing the Public Accounting Firm of Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia) as the Public Accounting Firm that will audit the Company's Consolidated Financial Statements and the Financial Statements of the Partnership and Community Development Program Implementation for the 2021 Financial Year. Granting authority and power to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for other periods in the 2021 Fiscal Year for the purposes and interests of the Company. Granting power of attorney to the Company's Board of Commissioners to determine the audit fee and other requirements for the said Public Accounting Firm, as well as to determine a replacement Public Accounting Firm in the case of the Public Accounting Firm of Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners (Crowe Indonesia), for whatever reason, was not able to complete the audit of the Company's Consolidated Financial Statements and the Financial Statements of the Implementation of the Partnership Program and Community Development Program for the 2021 Fiscal Year, including determining the audit fee and other requirements for the replacement Public Accounting Firm. <p>Status: Realized</p>

Arahan RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2020

Directions of GMS Approval Annual Report and Approval of Financial Statements for Financial Year 2020

No	Arahan RUPS GMS Directions	Realisasi Realization
1	<p>Hal-hal yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh jajaran Perusahaan untuk dapat meningkatkan kinerja di masa mendatang adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengantisipasi penurunan kualitas kredit pada akhir masa relaksasi kredit dari OJK (POJK 11) pada Triwulan I tahun 2022 dengan memonitor kualitas kredit dan <i>Non-Performing Loan</i> (NPL) serta memastikan kecukupan pencadangan penyisihan piutang (NPL Coverage dan LaR Coverage). <p><i>Matters that need the attention of the Board of Commissioners, Board of Directors, and all levels of the Company in order to improve performance in the future are as follows:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Anticipating a decline in credit quality at the end of the credit relaxation period from FSA (POJK 11) in the first Quarter of 2022 by monitoring credit quality and Non-Performing Loans (NPL) and ensuring adequate allowance for receivables (NPL Coverage and LaR Coverage).</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Perusahaan telah melakukan antisipasi penurunan kualitas kredit serta telah memastikan kecukupan pencadangan penyisihan piutang (NPL Coverage dan LaR Coverage). <ol style="list-style-type: none"> <i>The Company anticipated the decline in credit quality and ensured adequate allowance for receivables (NPL Coverage and LaR Coverage).</i>

No	Arahan RUPS GMS Directions	Realisasi Realization
	<p>b. Terus mengupayakan penurunan level BOPO dan efisiensi <i>cost of fund</i> pada level optimal agar dapat menurunkan beban bunga pinjaman ke nasabah dan menjaga sustainabilitas perusahaan.</p> <p>c. Optimalisasi pelaksanaan belanja modal yang disesuaikan dengan skala prioritas terutama yang berhubungan dengan kinerja Perusahaan. Pelaksanaan belanja modal agar selalu memperhatikan aspek-aspek risiko dan disertai kajian yang komprehensif.</p> <p>d. Direksi agar terus menggali potensi efisiensi biaya serta <i>operational excellence</i> melalui digitalisasi baik untuk proses bisnis perusahaan secara internal maupun untuk digitalisasi nasabah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan bisnis serta melakukan pengembangan sistem Teknologi Informasi (TI) yang terintegrasi, memperkuat kapasitas dan keamanan infrastruktur TI yang ada saat ini, termasuk kualitas SDM pengelolanya.</p> <p>e. Dalam penyaluran pinjaman kepada nasabah serta eksplorasi potensi perluasan jaringan kantor, agar senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian (<i>prudent</i>) dan menerapkan manajemen risiko secara konsisten, serta memperkuat pengawasan dalam rangka menjaga rasio NPL pada tingkat yang aman serta meminimalisir potensi kerugian.</p> <p>f. Melaksanakan training dan <i>development</i> secara terstruktur dalam rangka mengembangkan kualitas SDM Perusahaan yang jumlahnya terus meningkat dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan produktivitas karyawan, serta menyiapkan <i>talent pool</i> terutama dari kelompok milenial dan wanita dalam rangka menjaga pertumbuhan Perusahaan yang berkelanjutan.</p> <p>g. Melakukan inovasi, mengembangkan <i>revenue stream</i>, serta mendorong pertumbuhan bisnis anak perusahaan dalam rangka mendukung kinerja Perusahaan secara keseluruhan.</p> <p>b. <i>Continuing to strive for lowering the BOPO level and cost of fund efficiency at an optimal level in order to reduce the interest expense on loans to customers and maintain the company's sustainability.</i></p> <p>c. <i>Optimizing the implementation of capital expenditures adjusted to the priority scale, especially those related to the Company's performance. The implementation of capital expenditures had to always pay attention to risk aspects and be accompanied by a comprehensive study.</i></p> <p>d. <i>The Board of Directors to continue to explore the potential for cost efficiency and operational excellence through digitalization both for the company's business processes internally and for digitizing customers in order to increase the effectiveness and efficiency of business activities as well as develop an integrated Information Technology (IT) system, strengthen the capacity and security of IT infrastructure that currently existed, including the quality of its human resources.</i></p> <p>e. <i>In disbursing loans to customers as well as exploring the potential for office network expansion, to always prioritize prudent principles and apply risk management consistently, as well as strengthen supervision in order to maintain the NPL ratio at a safe level and minimize potential losses.</i></p> <p>f. <i>Carrying out training and development in a structured manner in order to develop the quality of the Company's human resources whose numbers continue to increase in order to increase employee capabilities and productivity, as well as prepare a talent pool, especially from the millennial and women groups in order to maintain the Company's sustainable growth.</i></p> <p>g. <i>Innovating, developing revenue streams, and encouraging business growth of subsidiaries in order to support the Company's overall performance.</i></p>	<p>b. Perusahaan telah melakukan penurunan level BOPO dan efisiensi <i>cost of fund</i> pada level optimal.</p> <p>c. Perusahaan telah melakukan optimalisasi belanja modal yang sudah disesuaikan dengan skala prioritas terutama yang berhubungan dengan kinerja Perusahaan. Pelaksanaan belanja modal juga sudah memperhatikan aspek-aspek risiko dan disertai kajian yang komprehensif.</p> <p>d. Perusahaan terus melakukan upaya untuk menggali potensi efisiensi biaya serta <i>operational excellence</i> melalui digitalisasi baik untuk proses bisnis perusahaan secara internal maupun untuk digitalisasi nasabah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan bisnis serta melakukan pengembangan sistem Teknologi Informasi (TI) yang terintegrasi, memperkuat kapasitas dan keamanan infrastruktur TI yang ada saat ini, termasuk kualitas SDM pengelolanya.</p> <p>e. Perusahaan telah melakukan penyaluran pinjaman kepada nasabah serta eksplorasi potensi perluasan jaringan kantor, sehingga senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian (<i>prudent</i>) dan menerapkan manajemen risiko secara konsisten, serta telah memperkuat pengawasan dalam rangka menjaga rasio NPL pada tingkat yang aman serta meminimalisir potensi kerugian.</p> <p>f. Perusahaan telah melakukan training dan <i>development</i> secara terstruktur dalam rangka mengembangkan kualitas SDM Perusahaan yang jumlahnya terus meningkat dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan produktivitas karyawan, serta menyiapkan <i>talent pool</i> terutama dari kelompok milenial dan wanita dalam rangka menjaga pertumbuhan Perusahaan yang berkelanjutan.</p> <p>g. Perusahaan telah melakukan inovasi, mengembangkan <i>revenue stream</i>, serta mendorong pertumbuhan bisnis anak perusahaan dalam rangka mendukung kinerja Perusahaan secara keseluruhan.</p> <p>b. <i>The company reduced the BOPO level and cost of fund efficiency to an optimal level.</i></p> <p>c. <i>The Company optimized capital expenditures adjusted to the priority scale, especially those related to the Company's performance. The implementation of capital expenditures also considered risk aspects and was accompanied by a comprehensive study.</i></p> <p>d. <i>The company continued to make efforts to explore the potential for cost efficiency and operational excellence through digitalization both for the company's business processes internally and for customer digitization in order to increase the effectiveness and efficiency of business activities as well as develop an integrated Information Technology (IT) system, strengthen infrastructure capacity and security of IT that existed today, including the quality of human resources who manage it.</i></p> <p>e. <i>The company disbursed loans to customers as well as explored the potential for office network expansion, thus always prioritizing prudent principles and implementing risk management consistently, and strengthened supervision in order to maintain the NPL ratio at a safe level and minimize potential losses.</i></p> <p>f. <i>The company carried out training and development in a structured manner in order to develop the quality of the Company's human resources, whose number continued to increase in order to increase employee capabilities and productivity, as well as prepare a talent pool, especially from the millennial and women groups in order to maintain the Company's sustainable growth.</i></p> <p>g. <i>The Company innovated, developed revenue streams, and encouraged the growth of its subsidiary businesses in order to support the Company's overall performance.</i></p>

No	Arahan RUPS GMS Directions	Realisasi Realization
	<p>h. Terhadap hasil temuan pemeriksaan maupun rekomendasi auditor internal maupun eksternal yang belum tuntas, Direksi agar memprioritaskan dan mendorong penyelesaiannya dengan target waktu dan penanggung jawab (<i>Person In Charge</i>) yang jelas. Fungsi dan peran SPI agar lebih dioptimalkan untuk membantu penyelesaian temuan, serta mendeteksi dan mencegah pelanggaran secara lebih dini.</p> <p>i. Mengutamakan <i>good corporate governance</i> (GCG) dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>h. <i>Regarding the results of the audit findings and recommendations of internal and external auditors that had not been completed, the Board of Directors should prioritize and encourage its completion with a clear target time and Person In Charge. The function and role of SPI should be optimized to help resolve findings, as well as detect and prevent violations early.</i></p> <p>i. <i>Prioritizing good corporate governance (GCG) in the implementation of the company's operational activities and compliance with applicable laws and regulations.</i></p>	<p>h. Perusahaan telah memprioritaskan dan mendukung penyelesaiannya dengan target waktu dan penanggung jawab (<i>Person In Charge</i>) terhadap hasil temuan pemeriksaan maupun rekomendasi auditor internal maupun eksternal. Perusahaan juga mendukung peran SPI untuk membantu penyelesaian temuan, serta mendeteksi dan mencegah pelanggaran secara lebih dini.</p> <p>i. Perusahaan juga telah mengutamakan <i>good corporate governance</i> (GCG) dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>d. <i>The company continued to make efforts to explore the potential for cost efficiency and operational excellence through digitalization both for the company's business processes internally and for customer digitization in order to increase the effectiveness and efficiency of business activities as well as develop an integrated Information Technology (IT) system, strengthen infrastructure capacity and security of IT that existed today, including the quality of human resources who manage it.</i></p> <p>e. <i>The company disbursed loans to customers as well as explored the potential for office network expansion, thus always prioritizing prudent principles and implementing risk management consistently, and strengthened supervision in order to maintain the NPL ratio at a safe level and minimize potential losses.</i></p> <p>f. <i>The company carried out training and development in a structured manner in order to develop the quality of the Company's human resources, whose number continued to increase in order to increase employee capabilities and productivity, as well as prepare a talent pool, especially from the millennial and women groups in order to maintain the Company's sustainable growth.</i></p> <p>g. <i>The Company innovated, developed revenue streams, and encouraged the growth of its subsidiary businesses in order to support the Company's overall performance.</i></p> <p>h. <i>The company prioritized and supported its completion with a target time and Person In Charge (Person In Charge) for the audit findings and recommendations of internal and external auditors. The company also supported the role of SPI to help resolve findings, as well as detect and prevent violations early.</i></p> <p>i. <i>The company also prioritized good corporate governance (GCG) in the implementation of the company's operational activities and compliance with applicable laws and regulations.</i></p> <p>Telah terealisasi. <i>Has been realized.</i></p>

Pelaksanaan RUPS Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020

Sesuai dengan undangan Direksi PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Nomor S-018/PNM-DIRUT/SPR/I/20 tanggal 14 Januari 2020, telah diselenggarakan RUPS pada:

Hari/tanggal : Kamis/16 Januari 2020

Waktu : 14.00 sampai dengan 15.30 WIB

Tempat : Ruang Rapat Lantai 6, Kementerian BUMN
Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13,
Jakarta Pusat

Implementation of the GMS for Ratification of the Work Plan and the Company Budget (RKAP) Year 2020

In accordance with the invitation of the Board of Directors of PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Number S-018/PNM-DIRUT/SPR/I/20 dated January 14, 2020, a GMS was held on:

Day/date : Thursday/16 January 2020

Time : 14.00 to 15.30 WIB

Place : Meeting Room 6th Floor, Ministry of SOEs
Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13,
Central Jakarta

Keputusan RUPS

GMS Decision

Agenda Pertama					First Agenda
Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2020.					Ratification of the 2020 PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Work and Budget Plan (RKAP)
Keputusan:					Decision:
1. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2020 dengan pokok-pokok sebagai berikut:					1. Approving the 2020 Company Work and Budget Plan (RKAP) of PT Permodalan Nasional Madani (Persero) with the following points:
a. Laporan Laba Rugi					a. Income Statement
Pendapatan Usaha	Rp	6.743.790	Juta/ Million	Operating revenues	
Biaya Usaha	Rp	6.288.418	Juta/ Million	Business costs	
Laba (Rugi) Usaha	Rp	455.372	Juta/ Million	Profit (Loss) Business	
Pendapatan (Beban) Lain-Lain	Rp	(228)	Juta/ Million	Other Income (Expenses)	
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	Rp	455.144	Juta/ Million	Profit (Loss) Before Tax	
Pajak	Rp	159.300	Juta/ Million	Tax	
Laba (Rugi) Setelah Pajak	Rp	295.844	Juta/ Million	Profit (Loss) After Tax	
b. Laporan Posisi Keuangan dan Konsolidasi					b. Statement of Financial Position and Consolidated
Aset	Asset				
Kas dan Setara Kas	Rp	1.549.848	Juta/ Million	Cash and cash equivalents	
Aset Lancar Lain	Rp	2.534.448	Juta/ Million	Other Current Assets	
Pinjaman yang Diberikan	Rp	21.136.280	Juta/ Million	Loans Granted	
Pembiayaan Modal	Rp	1.004.407	Juta/ Million	Capital Financing	
Aset Tetap	Rp	2.221.856	Juta/ Million	Fixed assets	
Aset Lain-Lain	Rp	483.525	Juta/ Million	Other Assets	
Jumlah Aset	Rp	28.930.364	Juta/ Million	Total assets	
Liabilitas dan Ekuitas	Liability and equity				
Liabilitas Lancar	Rp	1.431.571	Juta/ Million	Current Liabilities	
Liabilitas Jangka Menengah	Rp	23.386.085	Juta/ Million	Medium Term Liabilities	
Liabilitas Lain-Lain	Rp	521.950	Juta/ Million	Other Liabilities	
Ekuitas	Rp	3.590.758	Juta/ Million	Equity	
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	Rp	28.930.364	Juta/ Million	Total Liabilities and Equity	
c. Belanja Modal (Capital Expenditure)					g. Capital Expenditure
Tanah dan Gedung	Rp	600.000	Juta/ Million	Land and Building	
Leasehold Improvement	Rp	70.373	Juta/ Million	Leasehold Improvement	
Furniture & Fixture	Rp	44.311	Juta/ Million	Furniture & Fixtures	
Peralatan Kantor	Rp	15.003	Juta/ Million	Office equipment	
IT Hardware & Software	Rp	197.380	Juta/ Million	IT Hardware & Software	
Total Belanja Modal	Rp	927.067	Juta/ Million	Total Capital Expenditure	
d. Rencana dan Anggaran Dewan Komisaris					h. Board of Commissioners' Work and Budget Plan
Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris sebagaimana yang tercantum di dalam buku RKAP Tahun 2020.					The Board of Commissioners' Work Plan and Budget as stated in the 2020 RKAP book.
Status: Terealisasi					Status: Realized

Agenda Kedua	Second Agenda	
Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA-PKBL) PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2020.	<i>Ratification of the Work and Budget Plan for the 2020 Partnership and Community Development Program (RKA-PKBL) of PT Permodalan Nasional Madani (Persero).</i>	
Keputusan: Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA-PKBL) PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2020, sebagai berikut:	Decision: <i>Approving the Work and Budget Plan for the Partnership and Community Development Program (RKA-PKBL) of PT Permodalan Nasional Madani (Persero) in 2020, as follows:</i>	
a. Program Kemitraan	c. Partnership Program	
Dana Tersedia	Funds Available	
Saldo Awal	Rp 12.330 Juta/ Million	Beginning balance
Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan	Rp 50.069 Juta/ Million	Foster Partner Loan Repayment
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	Rp 2.531 Juta/ Million	Loan Administration Service Income
Pendapatan Administrasi Bank (Nett)	Rp 278 Juta/ Million	Bank Administration Income (Net)
Jumlah Dana Tersedia	Rp 65.208 Juta/ Million	Amount of Funds Available
Penyaluran Dana dan Biaya Operasional		Distribution of Funds and Operational Costs
Penyaluran Mandiri	Rp 38.208 Juta/ Million	Self Channeling
Penyaluran Pembinaan (Hibah)	Rp 2.000 Juta/ Million	Distribution of Coaching (Grants)
Penyaluran Kepada BUMN Khusus	Rp 25.000 Juta/ Million	Distribution to Special SOEs
Jumlah Penyaluran Dana	Rp 65.208 Juta/ Million	Amount of Disbursement
Saldo Akhir	Rp 0 Juta/ Million	Ending balance
b. Program Bina Lingkungan	d. Community Development Program	
Dana Tersedia		Funds Available
Dana Diterima dari BUMN Pembina	Rp 3.500 Juta/ Million	Funds Received from State Owned Enterprises
Jumlah Dana Tersedia	Rp 3.500 Juta/ Million	Amount of Funds Available
Penyaluran Bina Lingkungan	Rp 3.500 Juta/ Million	Distribution of Community Development
Jumlah Penggunaan	Rp 3.500 Juta/ Million	Usage Amount
Saldo Akhir	Rp 0 Juta/ Million	Ending balance
Status: Terealisasi	Status: Realized	
Agenda Ketiga	Third Agenda	
Persetujuan dan Pengesahan <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2020 antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero).	<i>Approval and Ratification of Key Performance Indicators (KPI) contained in the 2020 Management Contract between the Board of Directors and the Board of Commissioners and the Shareholders of PT Permodalan Nasional Madani (Persero).</i>	
Keputusan: Menyetujui dan mengesahkan <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2020 antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero).	Decision: <i>Approving and ratifying the Key Performance Indicators (KPI) contained in the 2020 Management Contract between the Board of Directors and the Board of Commissioners and the Shareholders of PT Permodalan Nasional Madani (Persero).</i>	
Status: Terealisasi	Status: Realized	
Agenda Keempat	Fourth Agenda	
Persetujuan dan Pengesahan <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) Tahun 2020 antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero).	<i>Approval and Ratification of Key Performance Indicators (KPI) 2020 between the Board of Commissioners and the Shareholders of PT Permodalan Nasional Madani (Persero).</i>	
Keputusan: Menyetujui dan Mengesahkan <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) Tahun 2020 antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero).	Decision: <i>Approving Key Performance Indicators (KPI) 2020 between the Board of Commissioners and the Shareholders of PT Permodalan Nasional Madani (Persero).</i>	
Status: Terealisasi	Status: Realized	

RKAP telah dilakukan revisi dan memperoleh persetujuan RUPS pada tanggal 10 September 2020 melalui Surat Menteri BUMN No. S-690/MBU/09/2020 Perihal Persetujuan Revisi RKAP Tahun 2020 PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Arahan RUPS

Dalam melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020 serta RKA-PKBL Tahun 2020, Direksi dan Dewan Komisaris diminta memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

The RKAP has been revised and obtained the approval of the GMS on September 10, 2020, through the Letter of the Minister of SOEs No. S-690/MBU/09/2020 Regarding the Approval of the 2020 RKAP Revision of PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

GMS Direction

In implementing the 2020 Company Work Plan and Budget (RKAP) and 2020 RKA-PKBL, the Board of Directors and the Board of Commissioners are asked to pay attention to the following matters:

No	Arahan RUPS GMS Directions	Realisasi Realisasi
1	<p>Buku RKAP, RKA-PKBL, RKA Dewan Komisaris dan KPI (<i>Key Performance Indicators</i>) Dewan Komisaris tahun 2020 yang telah disetujui dan disahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta surat tanggapan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Nomor: S-058/PNM-Kom/XI/19 tanggal 19 November 2019 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah Keputusan RUPS ini dan menjadi pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan program kerja dan pencapaian target kinerja pada tahun 2020 serta sebagai sarana pemantauan dan pengawasan bagi Dewan Komisaris.</p> <p><i>Book of RKAP, RKA-PKBL, RKA Board of Commissioners and KPI (Key Performance Indicators) of the Board of Commissioners for 2020 that had been approved and ratified by the General Meeting of Shareholders (GMS), as well as a response letter from the Board of Commissioners of PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Number: S-058/PNM-Kom/XI/19 dated November 19, 2019 became an integral part of the Minutes of Resolution of this GMS and serves as a guide for the Board of Directors in implementing work programs and achieving performance targets in 2020 as well as a means of monitoring and supervision for the Board of Commissioners.</i></p>	<p>Pada tahun 2020, Perusahaan mengajukan revisi RKAP Tahun 2020, dan telah disetujui oleh KBUMN selaku Pemegang Saham melalui Surat Menteri BUMN Nomor: S-690/MBU/09/2020 tanggal 10 September 2020 perihal Persetujuan Revisi RKAP Tahun 2020 PT Permodalan Nasional Madani (Persero).</p> <p><i>In 2020, the Company submitted a revision of the 2020 RKAP, and it was approved by KBUMN as the Shareholder through the SOE Minister's Letter Number: S-690/MBU/09/2020 dated 10 September 2020 regarding the Approval of the 2020 RKAP Revision of PT Permodalan Nasional Madani (Persero)</i></p> <p>Telah terealisasi. <i>Has been realized.</i></p>
2	<p>Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris diminta untuk:</p> <p>a. Target-target RKAP dan KPI Korporat agar dilakukan <i>cascading & deployment</i> ke pejabat/karyawan hingga level individu, seluruh wilayah/cabang/unit kerja dan anak perusahaan, serta dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja bulanan secara komprehensif.</p> <p>b. Melaksanakan RKAP secara efektif dengan biaya efisien, bekerja dengan sungguh-sungguh dan mengupayakan yang terbaik (<i>best effort</i>) dalam mencapai target-target RKAP demi memajukan perusahaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memperhatikan prinsip-prinsip GCG dan profesionalisme. Dalam hal terjadi perubahan asumsi dan kondisi bisnis, Direksi diminta memiliki rencana antisipasi (<i>Contingency plan</i>), sehingga target RKAP tetap dapat tercapai.</p> <p><i>The Board of Directors under the supervision of the Board of Commissioners was requested to:</i></p> <p>a. <i>The RKAP and Corporate KPI targets were to be cascading & deploying to officials/employees up to the individual level, all regions/branches/work units and subsidiaries, as well as comprehensive monthly performance monitoring and evaluation.</i></p> <p>b. <i>Implementing RKAP effectively with efficient cost, working earnestly and seeking the best (best effort) in achieving RKAP targets in order to advance the company, in accordance with the provisions of laws and regulations, and paying attention to GCG principles and professionalism. In the event of a change in business assumptions and conditions, the Board of Directors is asked to have a contingency plan, so that the RKAP target can still be achieved.</i></p>	<p>a. Telah dilakukan <i>cascading & deployment</i> atas target-target RKAP dan KPI Korporat ke pejabat/karyawan hingga level individu, seluruh wilayah/cabang/unit kerja dan anak perusahaan, serta dilakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi kinerja bulanan secara komprehensif.</p> <p>b. Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris telah mengupayakan yang terbaik dalam pencapaian target RKAP, namun dikarenakan dampak pandemi COVID-19 maka Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris mengajukan revisi RKAP kepada Pemegang Saham melalui surat Direksi Nomor S-242/PNM-DIRUT/PRA/11/20 tanggal 30 Juli 2020 perihal Penyampaian Revisi RKAP 2020 PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan surat Dewan Komisaris nomor S-037/PNM-Kom/VIII/20 tanggal 19 Agustus 2020 yang disetujui Pemegang Saham melalui surat nomor Nomor: S-690/MBU/09/2020 tanggal 10 September 2020 perihal Persetujuan Revisi RKAP Tahun 2020 PT Permodalan Nasional Madani (Persero).</p> <p>a. <i>There has been cascading & deployment of RKAP and Corporate KPI targets to officials/employees to the individual level, all regions/branches/work units and subsidiaries, and comprehensive monthly performance monitoring and evaluation.</i></p> <p>b. <i>The Board of Directors, under the supervision of the Board of Commissioners, has tried their best to achieve the RKAP target. Still, due to the impact of the COVID-19 pandemic, the Board of Directors, with the approval of the Board of Commissioners, submitted a revised RKAP to Shareholders through the Board of Directors' letter Number S-242/PNM-DIRUT/PRA/11/20 dated July 30, 2020, regarding Submission of Revised RKAP 2020 PT Permodalan Nasional Madani (Persero) and the letter of the Board of Commissioners number S-037/PNM-Kom/VIII/20 dated August 19, 2020, which the Shareholders approved through letter number: S-690/MBU/09/2020 dated September 10, 2020, regarding the Approval of the 2020 RKAP Revision of PT Permodalan Nasional Madani (Persero).</i></p>

No	Arahan RUPS GMS Directions	Realisasi Realisasi
	<p>c. Terus mendorong peningkatan peran perusahaan dalam mendukung Program Pemerintah untuk pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan peningkatan inklusi keuangan melalui penyediaan akses layanan keuangan yang efisien dan terjangkau, serta lebih mengoptimalkan pelaksanaan Program Pengembangan Kapasitas (PKU) melalui sinergi dan kolaborasi dengan BUMN/instansi terkait.</p> <p>d. Dalam penyaluran pinjaman kepada nasabah agar senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian (<i>prudent</i>) dan menerapkan manajemen risiko secara konsisten, serta memperkuat pengawasan dalam rangka menjaga rasio NPL (<i>Non-Performing Loan</i>) pada tingkat yang aman serta meminimalisir potensi kerugian.</p> <p>e. Pelaksanaan Belanja Modal (<i>Capex</i>) agar dilakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi secara intensif sesuai dengan kebutuhan serta lebih diprioritaskan untuk program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Pelaksanaan program belanja modal tersebut agar didukung dengan kajian, perencanaan, dan persiapan yang matang sehingga risiko kegagalan dapat dihindari.</p> <p>f. Penarikan pinjaman eksternal agar tetap mempertimbangkan aspek <i>timing</i>, <i>sizing</i>, dan <i>pricing</i> serta skema dan proses yang terbaik, sehingga dapat dilakukan efisiensi terhadap beban bunga (<i>cost of fund</i>), sekaligus sebagai upaya menurunkan beban bunga pinjaman kepada nasabah.</p> <p>g. Direksi agar lebih mengoptimalkan pengelolaan dan penyaluran dana hibah Program Kemitraan yang diterima dari BUMN, tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan APBN, serta memastikan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>h. Direksi agar melakukan review periodik dan penyempurnaan yang berkelanjutan terhadap proses bisnis dan prosedur kerja, serta terus berinovasi dalam rangka penyediaan produk dan layanan dengan mutu terbaik (<i>Service Excellence</i>) bagi seluruh customer dan mitra perusahaan, termasuk menjamin pemenuhan <i>Service Level Agreement</i> sesuai standar yang telah ditetapkan.</p> <p>d. <i>In disbursing loans to customers, always prioritize the prudent principle and apply risk management consistently, as well as strengthen supervision in order to maintain the NPL (Non-Performing Loan) ratio at a safe level and minimize potential losses.</i></p> <p>e. <i>Implementation of Capital Expenditures (Capex) so that monitoring and evaluation are carried out intensively according to needs and prioritized programs that have a direct impact on improving company performance. The implementation of the capital expenditure program must be supported by careful study, planning and preparation so that the risk of failure can be avoided.</i></p> <p>c. <i>Continue to encourage the increasing role of companies in supporting the Government Program for the development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and increasing financial inclusion through the provision of access to efficient and affordable financial services, as well as further optimizing the implementation of the Capacity Development Program (PKU) through synergy and collaboration with SOEs/relevant agencies.</i></p> <p>f. <i>Withdrawal of external loans in order to take into account the aspects of timing, sizing, and pricing as well as the best schemes and processes, so that the cost of funds can be made efficient, as well as an effort to reduce the interest burden on loans to customers.</i></p> <p>g. <i>The Board of Directors should optimize the management and distribution of Partnership Program grants received from SOEs, additional State Equity Participation (PMN) and the State Budget, and ensure the effectiveness of their use in accordance with the provisions of laws and regulations.</i></p> <p>h. <i>The Board of Directors was required to conduct periodic reviews and continuous improvements to business processes and work procedures, as well as to continue to innovate in the context of providing the best quality products and services (Service Excellence) for all customers and company partners, including ensuring the fulfillment of Service Level Agreements according to established standards.</i></p>	<p>c. Direksi berkomitmen untuk terus mengoptimalkan pelaksanaan program Pengembangan Kapasitas Usaha melalui sinergi dan kolaborasi dengan instansi terkait.</p> <p>d. Direksi dan seluruh insan Perseroan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan menerapkan kebijakan manajemen risiko serta meningkatkan pengawasan pembiayaan sehingga dapat menjaga rasio NPL (<i>Non Performing Loan</i>) - Gross sebesar 1,23%.</p> <p>e. Telah dilakukan <i>monitoring</i> atas pelaksanaan Belanja Modal (<i>Capex</i>), namun dikarenakan kondisi dampak pandemi COVID-19 maka realisasi Belanja Modal hanya terealisasi 57% dibandingkan RKAP.</p> <p>f. Direksi telah memperhitungkan dan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan realisasi pinjaman dari eksternal, dimana realisasi pinjaman external sebesar Rp13,71 triliun, dengan total beban bunga/syariah Rp1,69 triliun.</p> <p>g. Perusahaan telah menerima dana hibah sebesar Rp189,39 triliun, dan penerimaan dana PMN (APBN Tahun 2020) Rp1 triliun dan penerimaan dana PMN dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Rp1,5 triliun. Dana tersebut telah tersalurkan seluruhnya ke nasabah.</p> <p>h. Review atas pencapaian kinerja Perusahaan dilakukan secara rutin oleh Direksi dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris melalui Rapat Bulanan Dewan Komisaris sesuai kebijakan Perusahaan.</p> <p>c. <i>The Board of Directors is committed to optimizing the implementation of the Business Capacity Development program through synergy and collaboration with relevant agencies.</i></p> <p>d. <i>The Board of Directors and all employees of the Company continue to prioritize the precautionary principle, implement risk management policies, and improve financing supervision to maintain the NPL (Non-Performing Loan) - Gross ratio of 1.23%.</i></p> <p>e. <i>Monitoring has been carried out on implementing Capital Expenditures (Capex). Still, due to the impact of the COVID-19 pandemic, the realization of Capital Expenditures has only been realized by 57% compared to the RKAP.</i></p> <p>f. <i>The Board of Directors has taken into account and considered matters relating to the realization of external loans, in which the realization of external loans amounted to Rp. 13.71 trillion, with a total interest expense of Rp. 1.69 trillion.</i></p> <p>g. <i>The company has received grants of Rp. 189.39 trillion, and receipts of PMN funds (2020 State Budget) of Rp. 1 trillion and receipts of PMN funds in the context of National Economic Recovery of Rp. 1.5 trillion. The funds have been disbursed entirely to customers.</i></p> <p>h. <i>Reviews of the Company's performance achievements are carried out regularly by the Board of Directors and reported to the Board of Commissioners through the Monthly Meetings of the Board of Commissioners following Company policy.</i></p>

No	Arahan RUPS GMS Directions	Realisasi Realisasi
	<p>i. Seiring dengan jumlah karyawan yang terus meningkat, Direksi agar terus mengembangkan kualitas SDM melalui pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan yang terstruktur, serta implementasi sistem <i>reward & punishment</i> dan <i>career path</i> yang dapat mendorong peningkatan produktivitas karyawan. Terkait dengan hal tersebut, agar dilakukan evaluasi terhadap struktur organisasi yang ada saat ini, khususnya untuk mengoptimalkan fungsi dan peran pembinaan SDM (Sumber Daya Manusia).</p> <p>j. Direksi agar terus mendorong digitalisasi dan melakukan pengembangan sistem Teknologi Informasi (TI) yang terintegrasi, memperkuat kapasitas dan keamanan infrastruktur TI yang ada saat ini, termasuk kualitas SDM pengelolanya, sehingga dapat optimal mendukung pertumbuhan dan selaras dengan arah pengembangan bisnis Perusahaan.</p> <p>k. Terus melakukan pengawasan dan pembinaan anak Perusahaan serta menjalankan mekanisme <i>subsidiary governance</i> yang baik, sehingga potensi anak perusahaan dapat disinergikan secara optimal, dan memberikan kontribusi penciptaan nilai (<i>value creation</i>) yang lebih tinggi serta menunjang kinerja perusahaan induk.</p> <p>l. Penerapan PSAK 71, 72 dan 73 yang berlaku efektif pada 1 Januari 2020 agar dilakukan kajian dan upaya-upaya penyesuaian yang diperlukan, termasuk mengantisipasi hal-hal yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja Perusahaan.</p> <p>i. <i>As the number of employees continued to increase, the Board of Directors had to continue to develop the quality of human resources through the implementation of structured education and training programs, as well as the implementation of a reward & punishment system and a career path that could encourage increased employee productivity. Related to this, it is necessary to evaluate the current organizational structure, in particular to optimize the function and role of HR development (Human Resources).</i></p> <p>j. <i>The Board of Directors should continue to encourage digitalization and develop an integrated Information Technology (IT) system, strengthen the capacity and security of the existing IT infrastructure, including the quality of HR management, so that it could optimally support growth and be in line with the direction of the Company's business development.</i></p> <p>k. <i>Continue to supervise and develop subsidiaries as well as implement a good subsidiary governance mechanism, so that the potential of subsidiaries can be optimally synergized, and contribute to higher value creation and support the performance of the parent company.</i></p> <p>l. <i>The implementation of PSAK 71, 72 and 73 which came into effect on January 1, 2020, so that studies and adjustments are needed, including anticipating things that can affect the achievement of the Company's performance.</i></p>	<p>i. Melalui Divisi SDM, Perusahaan telah menjalankan program pengembangan kompetensi karyawan melalui pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan sistem <i>reward & punishment</i> tetap dilakukan sesuai kebijakan internal Perusahaan.</p> <p>j. Direksi berkomitmen akan meningkatkan pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan mendorong digitalisasi proses bisnis untuk meningkatkan produktivitas karyawan.</p> <p>k. Direksi telah melakukan pengawasan atas jalannya anak perusahaan dan evaluasi kinerja keuangan, dan terus mendorong penciptaan <i>value creation</i>.</p> <p>l. Perusahaan telah menerapkan PSAK 71, 72 dan 73.</p> <p>i. <i>Through the HR Division, the Company has implemented employee competency development programs through education and training. Implementing the reward & punishment system is still carried out following internal company policies.</i></p> <p>j. <i>The Board of Directors is committed to improving the development of Information Technology infrastructure and encouraging the digitization of business processes to increase employee productivity.</i></p> <p>k. <i>The Board of Directors has supervised the operations of subsidiaries and evaluated financial performance and continues to encourage value creation.</i></p> <p>l. <i>The company has implemented PSAK 71, 72 and 73.</i></p> <p>Telah terealisasi. <i>Has been realized.</i></p>
3	<p>Direksi diminta menyelenggarakan <i>talent management system</i> dan menyiapkan <i>talent pool</i> yang memadai sebagai upaya mempertahankan dan/atau mengembangkan <i>talent</i> terbaik yang ada, serta dalam rangka menjaga <i>sustainable growth</i> perusahaan.</p> <p><i>The Board of Directors was asked to implement a talent management system and prepare an adequate talent pool as an effort to maintain and/or develop the best existing talent, as well as in order to maintain the company's sustainable growth.</i></p>	<p>Direksi telah menyampaikan kajian program <i>Talent Management System</i> dan <i>Talent Pool</i> kepada Pemegang Saham.</p> <p><i>The Board of Directors has submitted a review of the Talent Management System and Talent Pool program to Shareholders.</i></p> <p>Telah terealisasi. <i>Has been realized.</i></p>

No	Arahan RUPS GMS Directions	Realisasi Realisasi
4	<p>Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PER-01/MBU/05/2019, Tantiem/Insentif Kinerja merupakan beban biaya yang harus dianggarkan secara spesifik dalam RKAP tahun 2020 dan realisasinya berdasarkan pencapaian target kinerja tahun 2020 yang diputuskan dalam RUPS Tahunan.</p> <p><i>In accordance with the SOE Ministerial Regulation No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Income of Directors, Board of Commissioners and Supervisory Boards of SOEs which had been amended several times, most recently with PER-01/MBU/05/2019, and Tantiem/Performance Incentives were costs that had to be specifically budgeted in The 2020 RKAP and its realization were based on the achievement of the 2020 performance targets decided at the Annual GMS.</i></p>	<p>Tantiem/insentif kinerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris diberikan berdasarkan pencapaian target kinerja tahun 2020 yang diputuskan dalam RUPS Tahunan.</p> <p><i>Performance bonuses/incentives for the Board of Directors and the Board of Commissioners are given based on the achievement of the 2020 performance targets decided at the Annual GMS.</i></p> <p>Telah terealisasi. <i>Has been realized.</i></p>
5	<p>Dalam pelaksanaan RKA-PKBL, Direksi agar mengupayakan pencapaian target penyaluran dana dan tingkat pengembalian (kolektibilitas) pinjaman dengan senantiasa berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang PKBL BUMN sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017 dan Risalah Rapat Pembahasan RKA-PKBL Nomor RIS-06/D7.MBU.3/11/2019 tanggal 7 November 2019, serta memperhatikan arahan dan kebijakan Kementerian BUMN.</p> <p><i>In implementing the RKA-PKBL, the Board of Directors should strive to achieve the target of disbursing funds and the rate of return (collectibility) of loans by always being guided by the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-09/MBU/07/2015 concerning PKBL BUMN as last amended by Regulation of the Minister of SOEs Number PER-02/MBU/7/2017 and the Minutes of the RKA-PKBL Discussion Meeting Number RIS-06/D7.MBU.3/11/2019 dated November 7, 2019, and pay attention to the directions and policies of the Ministry of SOEs.</i></p>	<p>Pelaksanaan RKA-PKBL telah dilakukan sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang PKBL BUMN sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017 dan Risalah Rapat Pembahasan RKA-PKBL Nomor RIS-06/D7.MBU.3/11/2019 tanggal 7 November 2019, serta memperhatikan arahan dan kebijakan Kementerian BUMN.</p> <p><i>The implementation of the RKA-PKBL has been carried out following the guidelines of the Minister of SOE Regulation Number PER-09/MBU/07/2015 concerning SOE PKBL as last amended by the Minister of BUMN Regulation Number PER-02/MBU/7/2017 and the Minutes of the RKA-PKBL Discussion Meeting Number RIS-06/D7.MBU.3/11/2019 dated 7 November 2019 and paying attention to the directions and policies of the Ministry of SOEs.</i></p> <p>Telah terealisasi. <i>Has been realized.</i></p>
6	<p>Dalam menjalankan setiap kegiatan operasional Perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi beserta seluruh jajaran perusahaan agar senantiasa berpedoman pada ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan, mengedepankan aspek kehati-hatian (<i>prudent</i>) serta menerapkan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dan manajemen risiko secara konsisten.</p> <p><i>In carrying out each of the Company's operational activities, the Board of Commissioners and the Board of Directors and all levels of the company must always be guided by the provisions of the Articles of Association, laws and regulations, prioritize prudential aspects and apply the principles of Good Corporate Governance and risk management consistently.</i></p>	<p>Dewan Komisaris, Direksi beserta seluruh jajaran perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan, ketentuan Anggaran Dasar, dan mengedepankan aspek kehati-hatian serta secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dan manajemen risiko secara konsisten.</p> <p><i>The Board of Commissioners, the Board of Directors, and all levels of the company in carrying out the company's operational activities are always guided by the laws and regulations, the provisions of the Articles of Association, and prioritize aspects of prudence and apply the principles of Good Corporate Governance and risk management consistently.</i></p> <p>Telah terealisasi. <i>Has been realized.</i></p>
7	<p>Terhadap hasil temuan pemeriksaan auditor (BPK, OJK, BPKP, KAP, dan SPI) yang belum tuntas, Direksi agar memprioritaskan dan mendorong penyelesaiannya dengan target waktu dan penanggung jawab (<i>Person In Charge</i>) yang jelas. Fungsi dan peran SPI agar lebih dioptimalkan untuk membantu penyelesaian temuan, serta mendeteksi dan mencegah pelanggaran secara lebih dini.</p> <p><i>Regarding the findings of the auditor's examination (BPK, OJK, BPKP, KAP, and SPI) that had not been completed, the Board of Directors should prioritize and encourage its completion with a clear target time and Person In Charge. The function and role of SPI should be optimized to help resolve findings, as well as detect and prevent violations early.</i></p>	<p>Satuan Pengawas Internal terus berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja serta memprioritaskan dan memonitor penyelesaian temuan auditor (BPK, OJK, BPKP, KAP dan SPI), serta melaporkan tindak lanjutnya secara berkala kepada Direksi.</p> <p><i>The Internal Supervisory Unit strives to improve quality and performance, prioritize and monitor the completion of auditor findings (BPK, OJK, BPKP, KAP, and SPI), and report follow-up actions periodically to the Board of Directors.</i></p> <p>Telah terealisasi. <i>Has been realized.</i></p>

Pelaksanaan RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2019

RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2019, telah diselenggarakan RUPS pada:

Hari/tanggal : Senin/29 Juni 2020
Waktu : 09.00 WIB sampai dengan selesai
Tempat : Rapat *Video Conference* melalui Zoom

Keputusan RUPS

Agenda Pertama
Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2019 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2019.

Keputusan:

Menyetujui Laporan Tahunan tahun buku 2019 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2019, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh KAP Husni, Mucharam & Rasidi sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor 00025/2.0082/AU.1/09/0069-3/1/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

Pokok-pokok Laporan Keuangan Konsolidasian PT PNM (Persero) tahun buku 2019 sebagai berikut:

a. Laporan Laba/Rugi Konsolidasian.

Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada Entitas Induk tahun buku 2019 sebesar Rp973.231.336,15 ribu, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Jumlah (Rp ribu) Amount (IDR thousand)	Description
Pendapatan Usaha	4.924.088.400,41	Operating revenues
Beban Keuangan	(1.595.094.617,38)	Financial Burden
Beban Usaha	(2.037.675.089,83)	Operating expenses
Laba Usaha	1.291.318.693,20	Operating profit
Bagian atas laba (rugi) bersih entitas asosiasi	-	Share of net profit (loss) of associates
Laba Sebelum Pajak	1.291.318.693,20	Profit before tax
Pajak Tangguhan	42.452.607,31	Deferred Tax
Pajak Kini	(356.460.606,02)	Current Tax
Laba Bersih	977.310.694,48	Net profit
Laba bersih Atribusi kepada Entitas Induk	973.231.336,15	Net Profit Attribution to Parent
Laba Bersih kepada Entitas Non Pengendali	4.079.358,33	Net Profit to Non-Controlling Entities

b. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Total Aset atau Liabilitas dan Ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp25.924.004.958,40 ribu dengan rincian sebagai berikut:

Implementation of GMS Approval of Annual Report and Ratification of 2019 Financial Statements

GMS for Approval of the Annual Report and Ratification of Financial Statements for the 2019 Fiscal Year, GMS was held at:

Day/date : Monday/29 June 2020
Time : 09.00 WIB until finished
Place : Video Conference Meeting via Zoom

GMS Decision

First Agenda
Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for fiscal year 2019 as well as Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners for fiscal year 2019.

Decision:

Approving the 2019 fiscal year Annual Report including the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the 2019 fiscal year, and ratified the Company's Consolidated Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2019 which had been audited by KAP Husni, Mucharam & Rasidi as stated in its report Number 00025/2.0082 / AU.1/09/0069-3/1/II/2020 dated 12 February 2020 with the opinion "Fair, in all material respects", as well as providing settlement and release of responsibility (*volledig acquit et de charge*) to the Board of Directors and the Board Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that had been carried out in the Financial Year ending on December 31, 2019 as long as these actions were not criminal acts and were reflected in the Company's report books.

The main points of the Consolidated Financial Statements of PT PNM (Persero) for the 2019 fiscal year were as follows:

a. Consolidated Profit/Loss Statement

Net Profit attributable to the Parent Entity for fiscal year 2019 is IDR 973,231,336.15 thousand, with details as follows.

b. Consolidated Statement of Financial Position

Total Assets or Liabilities and Equity as of December 31, 2019 was IDR 25,924,004,958.40 thousand with the following details:

Uraian	Jumlah (Rp ribu) Amount (IDR thousand)	Description
Aset		Asset
Kas dan Setara Kas	3.043.749.724,99	Cash and Cash Equivalents
Portofolio Efek	1.408.622.115,16	Securities Portfolio
Pinjaman yang Diberikan - Bersih	18.252.174.441,27	Loans Granted - Net
Pembiayaan Modal - Bersih	777.305.602,31	Capital Financing - Net
Piutang Jasa Manajemen	11.416.718,98	Accounts Receivable Management
Pendapatan Masih akan Diterima	132.096.276,31	Income Still to be Received
Piutang Kegiatan Manajer Investasi	9.126.568,61	Investment Manager Activities Receivable
Piutang Lain-Lain	61.522.365,59	Other Receivables
Pajak Dibayar Dimuka	17.503.184,45	Prepaid Taxes
Beban Dibayar Dimuka	432.739.130,77	Prepaid Expenses
Aset Pajak Tangguhan	59.634.948,66	Deferred Tax Assets
Aset Tetap	1.307.106.758,59	Fixed Assets
Portofolio Efek - Tersedia untuk Dijual	5.665.228,12	Portofolio Efek - Tersedia Untuk Dijual
Aset Tidak Berwujud	202.055.293,69	Intangible Assets
Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual	7.566.384,55	Non-Current Assets Held for Sale
Aset Lain-Lain - Bersih	195.720.216,36	Other Assets - Net
Total Aset	25.924.004.958,40	Total Assets

Uraian	Jumlah (Rp ribu) Amount (IDR thousand)	Description
Liabilitas dan Ekuitas		Liability and Equity
Utang Bank dan Lembaga Keuangan	5.949.992.246,90	Debt of Banks and Financial Institutions
Surat Utang Jangka Menengah dan Sukuk	4.635.000.000,00	Medium Term Debt Securities and Sukuk
Utang Obligasi	8.178.732.831,99	Bond Debt
Pinjaman Dari Pemerintah Republik Indonesia dan Lembaga Kredit Luar Negeri	2.161.929.558,17	Loans from the Government of the Republic of Indonesia and Overseas Loans Institutions
Pendapatan Ditangguhkan Java Reconstruction Fund	2.104.999,99	Java Reconstruction Fund Deferred Income
Utang Pajak	120.502.799,49	Tax Debt
Dana Cadangan Angsuran	1.318.935.450,03	Installment Reserve Fund
Biaya Masih Harus Dibayar	324.877.566,47	Fees Still to be Paid
Utang Kegiatan Manajer Investasi	2.615,59	Investment Manager Activity Payable
Liabilitas Imbalan Kerja	28.743.648,51	Employee Benefit Liability
Liabilitas Pajak Tangguhan	5.474.028,44	Deferred Tax Liability
Utang Lain-Lain	333.216.475,12	Other Debt
Ekuitas	2.864.492.737,70	Equity
Liabilitas dan Ekuitas	25.924.004.958,40	Liability and Equity

Status: Terealisasi

Status: Realized

Agenda Kedua	Second Agenda																																																						
<p>Persetujuan dan Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019.</p> <p>Keputusan: Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Keuangan PKBL yang telah diaudit oleh KAP Husni, Mucharam & Rasidi sesuai dengan Laporan Nomor 00025/2.0082/PKBL/09/0069-3/1/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL Tahun Buku 2019 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan tersebut.</p> <p>Rincian Laporan Tahunan PKBL Tahun Buku 2019 sebagai berikut:</p> <p>a. Laporan Aktivitas</p>	<p><i>Approval and Ratification of the Company's Partnership and Community Development Program Report for the 2019 Financial Year.</i></p> <p><i>Decision:</i> <i>Approving and Ratifying the Annual Report of the Partnership and Community Development Program (PKBL) for the 2019 Financial Year including the PKBL Financial Report audited by KAP Husni, Mucharam & Rasidi in accordance with Report Number 00025/2.0082/PKBL/09/0069-3/1/II/2020 dated February 12, 2020 with the opinion "Fair, in all material respects", as well as providing discharge and release of responsibility (<i>volledig acquit et de charge</i>) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision of PKBL for the 2019 Financial Year as long as the action was not constitutes a criminal act and was reflected in the books of the report.</i></p> <p><i>The details of the PKBL Annual Report for the 2019 Financial Year are as follows:</i></p> <p>a. Activity Report</p>																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Uraian</th> <th style="text-align: center;">Jumlah (Rp ribu) Amount (IDR thousand)</th> <th style="text-align: center;">Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Pendapatan</td> </tr> <tr> <td>Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman</td> <td style="text-align: right;">3.056.223,17</td> <td>Loan Administration Service Income</td> </tr> <tr> <td>Pendapatan Jasa Giro</td> <td style="text-align: right;">272.426,10</td> <td>Current Account Service Income</td> </tr> <tr> <td>Pendapatan Lain-Lain</td> <td style="text-align: right;">12.810,27</td> <td>Other income</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Pendapatan</td> <td style="text-align: right;">3.341.459,54</td> <td>Total Income</td> </tr> </tbody> </table>	Uraian	Jumlah (Rp ribu) Amount (IDR thousand)	Description	Pendapatan			Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	3.056.223,17	Loan Administration Service Income	Pendapatan Jasa Giro	272.426,10	Current Account Service Income	Pendapatan Lain-Lain	12.810,27	Other income	Jumlah Pendapatan	3.341.459,54	Total Income	<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Uraian</th> <th style="text-align: center;">Jumlah (Rp ribu) Amount (IDR thousand)</th> <th style="text-align: center;">Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Beban</td> </tr> <tr> <td>Penyaluran Dana Bina Lingkungan</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Distribution of Community Development Funds</td> </tr> <tr> <td>Pelimpahan Dana ke BUMN Khusus</td> <td style="text-align: right;">132.000.000,00</td> <td>Transfer of Funds to Special SOEs</td> </tr> <tr> <td>Beban Pembinaan</td> <td style="text-align: right;">904.269,24</td> <td>Construction Burden</td> </tr> <tr> <td>Beban Administrasi dan Umum</td> <td style="text-align: right;">107.887,01</td> <td>Administration and General Expenses</td> </tr> <tr> <td>Beban Penyusutan Aset Tetap</td> <td style="text-align: right;">115,60</td> <td>Fixed Assets Depreciation Expense</td> </tr> <tr> <td>Beban Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman</td> <td style="text-align: right;">(1.287.766,12)</td> <td>Allowance for Impairment of Loans Receivables</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Beban</td> <td style="text-align: right;">131.724.505,72</td> <td>Total Load</td> </tr> <tr> <td>Kenaikan (Penurunan) Aset Neto</td> <td style="text-align: right;">(128.383.046,18)</td> <td>Increase (Decrease) in Net Assets</td> </tr> <tr> <td>Aset Neto Awal Tahun</td> <td style="text-align: right;">220.904.247,35</td> <td>Net Assets at Beginning of the Year</td> </tr> <tr> <td>Aset Neto Akhir Tahun</td> <td style="text-align: right;">92.521.201,17</td> <td>Year-end Net Assets</td> </tr> </tbody> </table>	Uraian	Jumlah (Rp ribu) Amount (IDR thousand)	Description	Beban			Penyaluran Dana Bina Lingkungan	-	Distribution of Community Development Funds	Pelimpahan Dana ke BUMN Khusus	132.000.000,00	Transfer of Funds to Special SOEs	Beban Pembinaan	904.269,24	Construction Burden	Beban Administrasi dan Umum	107.887,01	Administration and General Expenses	Beban Penyusutan Aset Tetap	115,60	Fixed Assets Depreciation Expense	Beban Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman	(1.287.766,12)	Allowance for Impairment of Loans Receivables	Jumlah Beban	131.724.505,72	Total Load	Kenaikan (Penurunan) Aset Neto	(128.383.046,18)	Increase (Decrease) in Net Assets	Aset Neto Awal Tahun	220.904.247,35	Net Assets at Beginning of the Year	Aset Neto Akhir Tahun	92.521.201,17	Year-end Net Assets
Uraian	Jumlah (Rp ribu) Amount (IDR thousand)	Description																																																					
Pendapatan																																																							
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	3.056.223,17	Loan Administration Service Income																																																					
Pendapatan Jasa Giro	272.426,10	Current Account Service Income																																																					
Pendapatan Lain-Lain	12.810,27	Other income																																																					
Jumlah Pendapatan	3.341.459,54	Total Income																																																					
Uraian	Jumlah (Rp ribu) Amount (IDR thousand)	Description																																																					
Beban																																																							
Penyaluran Dana Bina Lingkungan	-	Distribution of Community Development Funds																																																					
Pelimpahan Dana ke BUMN Khusus	132.000.000,00	Transfer of Funds to Special SOEs																																																					
Beban Pembinaan	904.269,24	Construction Burden																																																					
Beban Administrasi dan Umum	107.887,01	Administration and General Expenses																																																					
Beban Penyusutan Aset Tetap	115,60	Fixed Assets Depreciation Expense																																																					
Beban Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman	(1.287.766,12)	Allowance for Impairment of Loans Receivables																																																					
Jumlah Beban	131.724.505,72	Total Load																																																					
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto	(128.383.046,18)	Increase (Decrease) in Net Assets																																																					
Aset Neto Awal Tahun	220.904.247,35	Net Assets at Beginning of the Year																																																					
Aset Neto Akhir Tahun	92.521.201,17	Year-end Net Assets																																																					

b. Laporan Posisi Keuangan

b. Statement of Financial Position

Uraian	Jumlah (Rp ribu) Amount (IDR thousand)	Description
Aset		Asset
Kas dan Bank	15.503.211,31	Cash and bank
Piutang Pinjaman Mitra Binaan	80.521.682,22	Foster Partner Loans Receivable
Aset Tetap	-	Fixed assets
Jumlah Aset	96.024.893,53	Total assets
Liabilitas dan Aset Neto		Liabilities and Net Assets
Liabilitas		Liability
Utang Jangka Pendek	1.230.330,75	Short Term Debt
Kelebihan Pembayaran Angsuran	609.762,97	Overpayment of Installment
Angsuran Belum Teridentifikasi	1.663.598,64	Installment Unidentified
Jumlah Liabilitas	3.503.692,36	Total Liabilities
Aset Neto	92.521.201,17	Net Assets
Jumlah Liabilitas Aset Neto	96.024.893,53	Total Liabilities Net Assets

Status: Terealisasi

Status: Realized

Agenda Ketiga	Third Agenda
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2019.	Determination of the use of the Company's Consolidated Net Income for the 2019 Fiscal Year.
Keputusan: Menetapkan penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019 sebesar Rp973,23 miliar, seluruhnya sebagai Laba Ditahan.	Decision: Determining the use of the Company's Consolidated Net Profit for the 2019 Fiscal Year amounting to IDR 973.23 billion, entirely as Retained Earnings.
Status: Terealisasi	Status: Realized
Agenda Keempat	Fourth Agenda
Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020. Serta tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2019.	Determination of Salary/Honorarium along with Other Facilities and Benefits for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for Fiscal Year 2020. As well as bonuses for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for Fiscal Year 2019.
Keputusan: Penetapan Gaji/Honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020 serta tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerja Tahun Buku 2019, akan ditetapkan secara tersendiri.	Decision: Determination of Salary/Honorarium along with other facilities and allowances for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for Fiscal Year 2020 as well as bonuses for Directors and Board of Commissioners for the performance of Fiscal Year 2019, will be determined separately.
Status: Terealisasi	Status: Realized
Agenda Kelima	Fifth Agenda
Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2020.	Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Financial Statements and Financial Statements for the Implementation of the Partnership Program and Community Development Program for the 2020 Financial Year.
Keputusan: a. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2020, dilakukan secara tersendiri oleh Menteri BUMN selaku RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. b. Sedangkan untuk audit atas Laporan Keuangan Perseroan interim pada Tahun Buku 2020 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan, RUPS menetapkan KAP Husni, Mucharam & Rasidi sebagai pelaksana audit serta memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya di KAP tersebut.	Decision: a. The appointment of a Public Accounting Firm (KAP) that would audit the Company's Financial Statements and the Financial Statements of the Partnership and Community Development Program for the 2020 Financial Year, is carried out separately by the Minister of SOEs as the GMS based on the recommendation of the Board of Commissioners. b. As for the audit of the interim Company's Financial Statements in the Financial Year 2020 for the purposes and interests of the Company, the GMS appointed KAP Husni, Mucharam & Rasidi as the audit executor and authorized the Company's Board of Commissioners to determine the fee for audit services and other requirements at the KAP.
Status: Terealisasi	Status: Realized

Arahan RUPS

GMS Direction

No	Arahan RUPS GMS Directions	Realisasi Realization
1	<p>Dalam menjalankan setiap kegiatan operasional Perusahaan, Direksi beserta jajaran diminta berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> secara konsisten.</p> <p><i>In carrying out each of the Company's operational activities, the Board of Directors and staff were required to adhere to the laws and regulations and apply the principles of Good Corporate Governance consistently.</i></p>	<p>Direksi dan seluruh jajaran operasional secara konsisten berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dalam seluruh kegiatan operasional perusahaan.</p> <p><i>The Board of Directors and all operational levels are consistently guided by the laws and regulations and apply the principles of Good Corporate Governance in all operational activities of the company.</i></p> <p>Telah terealisasi. <i>Has been realized.</i></p>
2	<p>Semua temuan, catatan dan saran/rekomendasi dari Auditor Internal maupun Auditor Eksternal (KAP dan BPK-RI) pada tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya yang belum selesai ditindaklanjuti, agar menjadi prioritas penyelesaian oleh Direksi dan Dewan Komisaris pada tahun 2020.</p> <p><i>All findings, notes and suggestions/recommendations from the Internal Auditors and External Auditors (KAP and BPK-RI) in 2019 and previous years that had not been followed up, so that they were prioritized for completion by the Board of Directors and the Board of Commissioners in 2020.</i></p>	<p>Penyelesaian temuan, catatan dan saran/rekomendasi auditor baik internal maupun eksternal menjadi prioritas Direksi dan Dewan Komisaris dan telah ditindaklanjuti.</p> <p><i>Completion of the findings, notes and suggestions/recommendations of both internal and external auditors is a priority for the Board of Directors and the Board of Commissioners and has been followed up.</i></p> <p>Telah terealisasi. <i>Has been realized.</i></p>
3	<p>Sehubungan dengan kondisi pandemik Covid-19, Direksi dan Dewan Komisaris diminta menyusun dan mengimplementasikan <i>business continuity plan</i> untuk memastikan keberlangsungan operasional dan bisnis Perusahaan.</p> <p><i>In connection with the Covid-19 pandemic, the Board of Directors and the Board of Commissioners were requested to prepare and implement a business continuity plan to ensure the continuity of the Company's operations and business.</i></p>	<p>Dalam mengantisipasi kondisi pandemik COVID-19, berbagai kebijakan telah diambil oleh Direksi dan Dewan Komisaris untuk memastikan keberlangsungan bisnis dan operasional perusahaan.</p> <p><i>In anticipating the COVID-19 pandemic, various policies have been taken by the Board of Directors and the Board of Commissioners to ensure the continuity of the company's business and operations.</i></p> <p>Telah terealisasi. <i>Has been realized.</i></p>
4	<p>Direksi agar melakukan perpajakan sumber pendapatan usaha baru yang dapat meningkatkan profitabilitas, memperbaiki <i>cash flow</i> dan melakukan pemangkasan biaya yang tidak berkontribusi langsung terhadap peningkatan produktivitas Perusahaan.</p> <p><i>The Board of Directors should tax new sources of business income that could increase profitability, improve cash flow and cut costs that did not directly contribute to increasing the Company's productivity.</i></p>	<p>Direksi telah mengambil berbagai kebijakan guna meningkatkan profitabilitas, produktivitas dan menjaga arus kas tetap sehat.</p> <p><i>The Board of Directors has taken various policies to increase profitability, productivity and maintain healthy cash flow.</i></p> <p>Telah terealisasi. <i>Has been realized.</i></p>
5	<p>Dalam upaya penyelesaian permasalahan piutang usaha agar Direksi menyusun langkah strategis untuk mengoptimalkan <i>collection</i> dan keuntungan yang dapat diterima oleh Perusahaan.</p> <p><i>In an effort to resolve trade receivable problems, the Board of Directors had to develop strategic steps to optimize collection and profits that can be received by the Company.</i></p>	<p>Manajemen PNM telah memiliki kebijakan penanganan nasabah bermasalah dan telah melakukan <i>collection staging</i> untuk peningkatan penagihan. Selain itu, untuk menekan piutang bermasalah di masa Covid-19 Perseroan juga memberikan relaksasi dan restrukturisasi kepada nasabah-nasabah yang berdampak terhadap Covid-19 yang disesuaikan dengan kemampuan bayar nasabah.</p> <p><i>PNM management has a policy for handling problem customers and has carried out collection staging to increase billing. In addition, to reduce non-performing receivables during the COVID-19 period, the Company also provides relaxation and restructuring for customers that have an impact on Covid-19, which is adjusted to the customer's ability to pay.</i></p> <p>Telah terealisasi. <i>Has been realized.</i></p>
6	<p>Melakukan evaluasi dan memastikan program sinergi BUMN dapat berjalan sesuai target dengan menjaga peran masing-masing BUMN sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab, serta memastikan manfaat sinergi tersebut dapat dirasakan bagi para <i>stakeholder</i>.</p> <p><i>Evaluating and ensuring the SOEs synergy program to run according to the target by maintaining the role of each SOEs in accordance with their functions and responsibilities, as well as ensuring the benefits of the synergy to be felt for the stakeholders.</i></p>	<p>Manajemen telah merealisasikan sinergi BUMN dalam berbagai kesempatan, salah satunya adalah program <i>Co-Location</i> – sinergi antara PNM dengan BRI dan Pegadaian.</p> <p><i>Management has realized SOE synergies on various occasions, one of which is the Co-Location program – a synergy between PNM with BRI and Pegadaian.</i></p> <p>Telah terealisasi. <i>Has been realized.</i></p>

No	Arahan RUPS GMS Directions	Realisasi Realization
7	<p>Dalam rangka memitigasi terjadinya <i>fraud</i>, Direksi agar meningkatkan peran digitalisasi/IT bagi perusahaan maupun <i>Account Officer</i> di lapangan untuk mendukung sistem pembayaran secara <i>cashless</i>, serta meningkatkan akurasi data nasabah.</p> <p><i>In order to mitigate the occurrence of fraud, the Board of Directors was to increase the role of digitalization/IT for companies and Account Officers in the field to support cashless payment systems, as well as improve the accuracy of customer data.</i></p>	<p>Pemanfaatan digitalisasi telah dilakukan melalui penggunaan gawai oleh <i>Account Officer</i> dalam proses pembiayaan PNM Mekaar dan peningkatan sistem teknologi informasi monitoring pembiayaan.</p> <p><i>The use of digitization has been carried out through the use of devices by Account Officers in the Mekaar PNM financing process and improvement of the financing monitoring information technology system.</i></p> <p>Telah terealisasi. <i>Has been realized.</i></p>
8	<p>Anak perusahaan harus didorong agar mampu berkinerja semakin meningkat dan mencapai target RKAP serta berkontribusi optimal bagi perusahaan induk. Untuk itu kepada Direksi diminta agar memberikan dukungan asistensi dan melakukan pengawasan secara intensif kepada manajemen anak perusahaan.</p> <p><i>Subsidiaries had to be encouraged to increase their performance and achieve the RKAP targets and contribute optimally to the parent company. For this reason, the Board of Directors was requested to provide assistance and support intensive supervision to the management of subsidiaries.</i></p>	<p>Direksi dalam berbagai kesempatan terus memberikan dukungan, asistensi dan melakukan pengawasan melalui mekanisme yang ada untuk terus mendorong Anak Perusahaan mencapai target yang telah ditetapkan.</p> <p><i>The Board of Directors on various occasions continues to provide support, assistance and supervision through existing mechanisms to continue to encourage Subsidiaries to achieve the targets that have been set.</i></p> <p>Telah terealisasi. <i>Has been realized.</i></p>
9	<p>Untuk menunjang peningkatan kualitas pengawasan dan pembinaan BUMN, Direksi agar melakukan pengisian dan pemutakhiran data portal Silaba, portal Aset, portal SDM, portal PKBL dan portal publik secara akurat dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p><i>To support the improvement of the quality of supervision and development of SOEs, the Board of Directors was required to fill out and update data on the Silaba portal, Asset portal, HR portal, PKBL portal and public portal in an accurate and timely manner in accordance with applicable regulations.</i></p>	<p>Melalui divisi terkait, Direksi telah melakukan pengisian dan pemutakhiran data portal Silaba, portal Aset, portal SDM, portal PKBL dan portal publik sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p><i>Through related divisions, the Board of Directors has filled out and updated data on the Silaba portal, Asset portal, HR portal, PKBL portal and public portal in accordance with applicable regulations.</i></p> <p>Telah terealisasi. <i>Has been realized.</i></p>
10	<p>Laporan Keuangan, Laporan Pelaksanaan PKBL, Laporan Evaluasi Kinerja, Laporan Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan dan Pengendalian Internal, dan Laporan Penilaian <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) yang telah diaudit oleh KAP, Risalah Rapat Pembahasan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019, dan arahan Dewan Komisaris dalam surat Tanggapan atas Laporan Keuangan Audited Tahun Buku 2019 Nomor: S-014/PNM-Kom/III/20 tanggal 23 Maret 2020 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari risalah ini.</p> <p><i>Financial Reports, PKBL Implementation Reports, Performance Evaluation Reports, Compliance Reports on Legislation and Internal Controls, and Key Performance Indicators (KPI) Assessment Reports that had been audited by KAP, Minutes of Discussion Meetings on the Annual Report of the Partnership and Community Development Program for Fiscal Year 2019, and the direction of the Board of Commissioners in the Response letter to the 2019 Fiscal Year Audited Financial Report Number: S-014/PNM-Kom/III/20 dated March 23, 2020, became an integral part of this minutes.</i></p>	<p>Perseroan telah melaporkan Laporan Keuangan, Laporan Pelaksanaan PKBL, Laporan Evaluasi Kinerja, Laporan Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan dan Pengendalian Internal, dan Laporan Penilaian <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) yang telah diaudit oleh KAP.</p> <p><i>The Company has reported Financial Statements, PKBL Implementation Reports, Performance Evaluation Reports, Compliance Reports with Laws and Internal Controls, and Key Performance Indicators (KPI) Assessment Reports that have been audited by KAP.</i></p> <p>Telah terealisasi. <i>Has been realized.</i></p>

Direksi

Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi telah diatur mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi. Adapun tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Board of Directors

The Board of Directors was an organ of the Company that is responsible for managing the Company for the interests and objectives of the Company and representing the Company both inside and outside the court in accordance with the provisions of the Articles of Association.

Duties and Responsibilities of the Board of Directors

The duties and responsibilities of the Board of Directors were regulated regarding the duties and responsibilities of the Board of Directors. The duties and responsibilities of the Board of Directors are as follows:

1. The Board of Directors was in charge of running and being responsible for the management of the Company for the benefit of the Company in accordance with the aims and objectives of the Company as stipulated in the Articles of Association.

2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
 3. Setiap anggota Direksi wajib melakukan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
 4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Direksi dapat membentuk komite.
 5. Dalam hal dibentuk komite, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
 6. Setiap anggota bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
 7. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perusahaan apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 - b. Telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian.
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
 8. Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta memastikan agar BUMN melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memerhatikan kepentingan dari berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 9. Salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di Perseroan yang bersangkutan.
 10. Direksi harus menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di anak perusahaan/perusahaan patungan dan/atau perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas), serta gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari perusahaan yang bersangkutan dan anak perusahaan/perusahaan patungan yang bersangkutan, untuk dimuat dalam Laporan Tahunan Perusahaan.
 11. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris.
 12. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham.
2. *In carrying out its duties and responsibilities for management, the Board of Directors was obliged to hold an Annual GMS and other GMS as stipulated in laws and regulations and the Articles of Association.*
 3. *Each member of the Board of Directors was required to perform their duties and responsibilities in good faith, with full responsibility and prudence.*
 4. *In order to support the effectiveness of the implementation of duties and responsibilities, the Board of Directors might form a committee.*
 5. *In the event that a committee was formed, the Board of Directors was required to evaluate the committee's performance at the end of each financial year.*
 6. *Each member was jointly and severally responsible for the Company's losses caused by the fault or negligence of the members of the Board of Directors in carrying out their duties.*
 7. *Members of the Board of Directors could not be held responsible for the company's losses if they could prove:*
 - a. *The loss was not due to his/her fault or negligence.*
 - b. *Has carried out management in good faith, full of responsibility and prudence for the interests and in accordance with the aims and objectives of the Company.*
 - c. *Has no conflict of interest, either directly or indirectly, over management actions that resulted in losses.*
 - d. *Have taken steps to prevent the loss from arising or continuing.*
 8. *The Board of Directors had to carry out its duties in good faith for the benefit of the Company and in accordance with the Company's goals and objectives, as well as ensure that SOEs carry out their social responsibilities and pay attention to the interests of various stakeholders in accordance with the provisions of laws and regulations.*
 9. *A member of the Board of Directors was appointed by a meeting of the Board of Directors as the Person In Charge of implementing and monitoring GCG in the Company concerned.*
 10. *The Board of Directors had to submit information regarding the identity, main occupations, the position of the Board of Commissioners in subsidiaries/joint ventures and/or other companies, including meetings held within a financial year (internal meetings or joint meetings with the Board of Commissioners/Board of Trustees), as well as salaries, facilities, and/or other allowances received from the company concerned and its subsidiaries/joint ventures concerned, to be included in the Company's Annual Report.*
 11. *Providing periodic reports according to the manner and time according to applicable regulations as well as other reports whenever requested by the Board of Commissioners.*
 12. *Providing an explanation of everything that is asked or requested by the members of the Board of Commissioners and the Shareholders.*

13. Memastikan agar informasi tentang Perseroan diberikan kepada Komisaris secara tepat waktu, akurat, relevan dan lengkap, yang disajikan dalam bentuk:
 - a. Laporan triwulanan 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterbitkan.
 - b. Laporan semester 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterbitkan.
 - c. Laporan tahunan 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterbitkan.

Wewenang Direksi

Direksi berwenang untuk:

1. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan.
2. Menyiapkan visi, misi, strategi dan budaya Perusahaan.
3. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan.
4. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan.
5. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS.
6. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Meminta persetujuan Dewan Komisaris terkait dengan pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Internal dan Sekretaris Perusahaan.
8. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala keadilan, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.
9. Mencalonkan dan mengangkat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan/afiliasi di Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S) dan Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S), badan usaha dan/atau badan hukum yang mendukung aktivitas Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).
10. Menempatkan dan menetapkan karyawan Perseroan pada badan usaha dan/atau badan hukum yang mendukung aktivitas Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).

Authorities of the Board Of Directors

The Board of Directors was authorized to:

1. Determining the management policy of the Company.
2. Preparing a vision, mission, strategy and corporate culture.
3. Arranging the transfer of power of the Board of Directors to one or several members of the Board of Directors to make decisions on behalf of the Board of Directors or represent the Company in and outside the court.
4. Arranging the transfer of power of the Board of Directors to one or more employees of the Company, either individually or collectively or to other people, to represent the Company inside and outside the court.
5. Regulating the provisions concerning the Company's employment including the determination of the salary, pension or old age security and other income for the Company's employees based on the prevailing laws and regulations, provided that the stipulation of salary, pension or old-age security and other income for workers that exceeds the obligations that are stipulated by laws and regulations, must obtain prior approval from the GMS.
6. Appointing and terminating Company employees based on company employment regulations and applicable laws and regulations.
7. Requesting approval from the Board of Commissioners regarding the appointment of the Head of Internal Supervision Unit and the Corporate Secretary.
8. Carrying out all other actions and actions regarding the management and ownership of the Company's assets, binding the Company with other parties and/or other parties with the Company, and representing the Company inside and outside the court regarding all matters and all events, with the restrictions as stipulated in laws and regulations, Articles of Association and/or GMS decisions.
9. Nominating and appointing members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners in subsidiaries/affiliates in Micro/Sharia Financial Institutions (LKM/S) and Rural/Sharia Banks (BPR/S), business entities and/or legal entities that support activities Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives (UMKMK).
10. Placing and assigning employees of the Company to business entities and/or legal entities that supported the activities of Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives (UMKMK).

11. Membuka kantor cabang Mekaar yang menyalurkan pembiayaan sistem tanggung renteng dengan ketentuan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
12. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan RJPP dan RKAP.
13. Memastikan tercapainya target-target jangka pendek yang tercantum dalam RKAP melalui penetapan target kinerja yang diturunkan di tingkat satuan kerja dan jabatan dalam struktur organisasi Perseroan.
14. Memastikan terpenuhinya hak dan kewajiban serta terjalinnya hubungan yang baik dengan *stakeholders* yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau karena perjanjian.

Masa Jabatan Direksi

Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal masa jabatan anggota Direksi berakhir dan RUPS belum dapat menetapkan penggantinya, maka tugas-tugas anggota Direksi yang lowong tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengisian jabatan Direksi yang lowong.

Persyaratan Direksi

Persyaratan bagi anggota Direksi yang diatur dalam *board manual* adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
 - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan.
 - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
 - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

11. *Opening a Mekaar branch office that distributes joint responsibility financing provided that it is reported to the Board of Commissioners.*
12. *Monitoring and evaluating the implementation of RJPP and RKAP.*
13. *Ensuring the achievement of short-term targets stated in the RKAP by setting performance targets that are lowered at the work unit level and in positions in the Company's organizational structure.*
14. *Ensuring the fulfillment of rights and obligations and the establishment of a good relationship with stakeholders that arised based on the prevailing laws and regulations and/or because of an agreement.*

Tenure of the Board Of Directors

The term of office for members of the Board of Directors was set for 5 (five) years and could be reappointed for 1 (one) term of office. In the event that the term of office of a member of the Board of Directors ends and the GMS could not determine a replacement, then the duties of the vacant member of the Board of Directors shall be carried out in accordance with the provisions for filling the vacant position of the Board of Directors.

Requirements of the Board Of Directors

Requirements for members of the Board of Directors as stipulated in the board manual are as follows:

1. *Having good character, morals and integrity.*
2. *Capable of taking legal actions.*
3. *Within 5 (five) years prior to the appointment and during the term of office:*
 - a. *Never been declared bankrupt.*
 - b. *Never been a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to go bankrupt.*
 - c. *Never been convicted of committing a crime that caused losses to state finances and/or was related to the financial sector.*
 - d. *Ever been a member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners during his tenure:*
 - *Never held an Annual GMS.*
 - *The responsibilities as a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners have never been accepted by the GMS or have never given accountability as a member of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to the GMS.*
 - *Have caused a company that obtained a license, approval or registration from FSA to fail to fulfill its obligation to submit an annual report and/or financial report to FSA.*
4. *Having a commitment to comply with laws and regulations.*
5. *Having knowledge and/or expertise in the fields required by the Company.*

Persyaratan lain anggota Direksi adalah sebagai berikut:

1. Bukan pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. Calon anggota legislatif terdiri dari calon anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II.
2. Bukan Calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/atau Kepala/Wakil Kepala Daerah.
3. Tidak menjabat sebagai Direksi pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut.
4. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya.
5. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Direksi BUMN), yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Direksi telah memiliki *board manual* yang bertujuan menjelaskan pola hubungan yang baku antara Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi dalam melaksanakan tugas, agar tercipta pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan, efektif dan efisien dengan menjunjung tinggi integritas dan kejujuran dalam menjalankan kegiatan bisnis Perseroan. Pemutakhiran terakhir atas *board manual* dilakukan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor SK-026.A/PNM-DIR/IX/19 tentang Board Manual PT Permodalan Nasional Madani (Persero) yang disahkan tanggal 6 September 2019.

Board manual tersebut mengatur berbagai aspek mengenai Direksi antara lain mencakup ketentuan mengenai:

- A. Fungsi Direksi
- B. Persyaratan, Komposisi, Keanggotaan dan Masa jabatan Direksi
- C. Tata Cara Pengangkatan
- D. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- E. Etika Jabatan Direksi
- F. Wewenang, Hak dan Kewajiban Direksi
- G. Program Pengenalan dan Peningkatan Kompetensi
- H. Rapat Direksi
- I. Evaluasi Kinerja Direksi
- J. Fungsi Pendukung
- K. Hubungan Perseroan Dengan Anak Perusahaan dan Afiliasi

Other requirements for members of the Board of Directors are as follows:

1. *Not administrators of political parties and/or candidates for legislative members and/or legislative members. Candidates for legislative members consist of candidates for DPR, DPD, DPRD Level I and DPRD Level II.*
2. *Not a Candidate for Head/Deputy Regional Head and/or Head/Deputy Regional Head.*
3. *Has not served as the Board of Directors of the BUMN concerned for 2 (two) consecutive terms.*
4. *Having dedication and make full time to do their job.*
5. *Physically and mentally healthy (not currently suffering from a disease that could hinder the implementation of duties as a SOEs Board of Directors), as evidenced by a health certificate from a doctor.*

Board of Directors' Guidelines and Work Procedures

The Board of Directors owned a board manual which aimed to explain the standard pattern of relationships between the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board and the Board of Directors in carrying out their duties, in order to create professional, transparent, effective and efficient management of the Company by upholding integrity and honesty in carrying out the Company's business activities. The latest updating of the board manual was carried out through the Decree of the Board of Directors Number SK-026.A/PNM-DIR/IX/19 concerning the Board Manual of PT Permodalan Nasional Madani (Persero) which was passed on September 6, 2019.

The board manual regulates various aspects regarding the Board of Directors including, among others, provisions regarding:

- A. *Functions of the Board of Directors*
- B. *Requirements, composition, membership and term of office of the Board of Directors*
- C. *Appointment Procedures*
- D. *Duties and Responsibilities of the Board of Directors*
- E. *Position Ethics for the Board of Directors*
- F. *Powers, Rights and Obligations of the Board of Directors*
- G. *Recognition and Competency Improvement Program*
- H. *Board of Directors Meeting*
- I. *Performance Evaluation of the Board of Directors*
- J. *Supporting Functions*
- K. *Company Relationship with Subsidiaries and Affiliates*

Pembidangan Tugas Direksi

Pembidangan tugas Direksi telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. SK-058/PNM-DIR/XII/20 tentang Pembagian Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Direksi PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Adapun pembidangan tugas Direksi adalah sebagai berikut.

Direktur Utama

Direktur Utama menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangan sebagai berikut:

1. Memimpin Anggota Direksi PT PNM (Persero) dalam menjalankan tugas tanggung jawab dan kewenangan selaku Direksi PT PNM (Persero);
2. Memimpin Direktorat Utama;
3. Menetapkan arah dan kebijakan perusahaan;
4. Memastikan kelangsungan usaha Perusahaan;
5. Mengatur penyerahan kekuasaan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi;
6. Mengatur penyerahan kekuasaan kepada seorang atau beberapa orang karyawan Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan;
7. Merumuskan dan menetapkan implementasi kebijakan Perusahaan yang harus dijalankan oleh tiap-tiap Divisi yang ada di bawah Direktorat Utama;
8. Menjalankan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh anggota Direksi lain dalam hal terdapat anggota Direksi yang berhalangan dalam menjalankan tugas tanggung jawab dan kewenangannya;
9. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan;
10. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Internal;
11. Berwenang mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan dengan memperhatikan ketentuan;
12. Menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangan lainnya selaku Direksi PT PNM (Persero) yang telah ditentukan berdasarkan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Direktur Keuangan dan Operasional

Direktur Keuangan Menjalankan Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan sebagai berikut:

1. Memimpin Direktorat Keuangan;
2. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian termasuk penetapan struktur remunerasi, gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi Karyawan Perusahaan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan penjatuhan sanksi kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku;

Division of Duties of the Board of Director

The division of duties of the Board of Directors has been regulated in the Decree of the Board of Directors No. SK-058/PNM-DIR/ XII/20 concerning the Division of Duties, Responsibilities and Authorities of the Directors of PT Permodalan Nasional Madani (Persero). The duties of the Board of Directors are as follows.

President Director

President Director carrying out duties, responsibilities and authorities as follows:

1. To lead the members of the Board of Directors of PT PNM (Persero) in carrying out their duties and responsibilities as the Board of Directors of PT PNM (Persero);
2. Leading the Main Directorate;
3. Establish company direction and policies;
4. Ensuring the continuity of the Company's business;
5. Arrange for the transfer of power to one or more members of the Board of Directors;
6. Arranging the transfer of power to one or more employees of the Company, either individually or jointly or to other people, to represent the Company inside and outside the court;
7. Formulate and determine the implementation of Company policies that must be carried out by each Division under the Main Directorate;
8. Carry out the authorities owned by other members of the Board of Directors in the event that a member of the Board of Directors is unable to carry out his / her duties and responsibilities;
9. Appoint and dismiss the Corporate Secretary;
10. Appoint and dismiss the Head of the Internal Audit Unit;
11. Authorized to bind the Company with other parties and/ or other parties with the Company and to represent the Company inside and outside the court with due observance of the provisions;
12. Carry out other duties, responsibilities and authorities as the Board of Directors of PT PNM (Persero) which has been determined based on the Articles of Association and the prevailing laws and regulations.

Director of Finance and Operations

Finance Director Carrying Out Duties, Responsibilities and Authorities as follows:

1. Leading the Directorate of Finance;
2. Regulate the provisions concerning employment including the determination of the structure of remuneration, salary, pension or old age security and other income for Company employees based on the provisions of the applicable Prevailing Laws including but not limited to stipulating the imposition of employment sanctions in accordance with applicable regulations;

3. Mengatur penyerahan wewenang pada lingkup Direktorat Keuangan kepada seorang atau beberapa orang karyawan Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
4. Merumuskan dan menetapkan implementasi kebijakan Perseroan yang harus dijalankan oleh divisi-divisi yang ada di bawah Direktorat Keuangan;
5. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
6. Melakukan pengurusan atas aset-aset dan kekayaan Perseroan;
7. Memastikan ketersediaan sumber-sumber pendanaan yang dibutuhkan guna pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional perusahaan;
8. Berwenang mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan terkait pelaksanaan tugas-tugas pada Direktorat Keuangan berdasarkan surat penunjukan dan kuasa dari direktur Utama atau berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Direktur Utama dengan memperhatikan ketentuan;
9. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas, dan kewenangan yang dijalankan pada lingkup Direktorat Keuangan;
10. Bersama-sama dengan Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangan lainnya selaku Direksi PT PNM (Persero) yang telah ditentukan berdasarkan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangan sebagai berikut:

1. Memimpin Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko;
2. Melakukan diperlukan Perusahaan; pengembangan-pengembangan yang bagi usaha-usaha yang dijalankan;
3. Merumuskan dan menetapkan implementasi kebijakan Perseroan yang harus dijalankan oleh divisi-divisi yang ada di bawah Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko;
4. Mengatur penyerahan kekuasaan pada lingkup Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko kepada seorang atau beberapa orang karyawan Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
5. Berwenang mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan terkait pelaksanaan tugas-tugas pada Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko berdasarkan Surat Penunjukan dan Kuasa dari Direktur Utama atau berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Direktur Utama dengan memperhatikan ketentuan;
6. Bertanggungjawab atas penerapan prinsip tata kelola Perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha dan operasional yang dilakukan Perusahaan;

Director of Compliance and Risk Management

Director of Compliance and Risk Management carries out the following duties, responsibilities and authorities:

1. Leading the Compliance and Risk Management Directorate;
2. Doing what the company requires; developments for the businesses being carried out;
3. Formulate and determine the implementation of Company policies that must be carried out by the divisions under the Directorate of Compliance and Risk Management;
4. Regulate the transfer of power to the scope of the Compliance and Risk Management Directorate to one or several Company employees, either individually or collectively;
5. Authorized to bind the Company with other parties and/or other parties with the Company and represent the Company inside and outside the court regarding the implementation of duties at the Directorate of Compliance and Risk Management based on a Letter of Appointment and Power of Attorney from the President Director or based on a Special Power of Attorney from the President Director with pay attention to the provisions
6. Responsible for the implementation of the principles of good corporate governance in every business and operational activity carried out by the Company;

7. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas, dan kewenangan yang dijalankan pada lingkup Kepatuhan dan Manajemen Risiko;
8. Bersama-sama dengan Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangan lainnya selaku Direksi PT PNM (Persero) yang telah ditentukan berdasarkan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Direktur Bisnis

Direktur Bisnis menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangan sebagai berikut:

1. Memimpin Direktorat Bisnis;
2. Memastikan kelangsungan Bisnis Pembiayaan PNM ULaMM dan Pembiayaan PNM Mekaar;
3. Menjaga dan memastikan kualitas pembiayaan pada bisnis PNM ULaMM dan PNM Mekaar terjaga dan/atau memenuhi ketentuan yang berlaku;
4. Merumuskan dan menetapkan implementasi kebijakan Perseroan yang harus dijalankan oleh divisi-divisi yang ada di bawah Direktorat Bisnis;
5. Mengatur penyerahan kekuasaan pada lingkup Direktorat Bisnis kepada seorang atau beberapa orang karyawan Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
6. Berwenang mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan terkait pelaksanaan tugas-tugas pada Direktorat Bisnis berdasarkan Surat Penunjukan dan Kuasa dari Direktur Utama atau berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Direktur Utama dengan memperhatikan ketentuan;
7. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas, dan kewenangan yang dijalankan pada lingkup Direktorat Bisnis;
8. Bersama-sama dengan Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya menjalankan Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan lainnya selaku Direksi PT PNM (Persero) yang telah ditentukan berdasarkan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Direktur Kelembagaan dan Perencanaan

Direktur Kelembagaan dan Perencanaan menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangan sebagai berikut:

1. Bertanggungjawab atas kegiatan pengembangan kapasitas usaha;
2. Bertanggungjawab atas pengelolaan jasa manajemen dan kemitraan baik untuk UMK maupun LKM/S;
3. Bertanggungjawab atas berjalannya fungsi sistem teknologi informasi baik IT operasi, IT strategis, maupun IT infrastruktur;

7. Responsible for the implementation of duties and authorities carried out in the scope of Compliance and Risk Management;
8. Together with the President Director and other members of the Board of Directors carry out other duties, responsibilities and authorities as the Directors of PT PNM (Persero) which have been determined based on the Articles of Association and the prevailing laws and regulations.

Business Director

The Business Director carries out the following duties, responsibilities and authorities:

1. Leading the Directorate of Business;;
2. Ensuring the continuity of PNM ULaMM Financing Business and PNM Mekaar Financing;
3. Maintain and ensure the quality of financing in the PNM ULaMM and PNM Mekaar businesses is maintained and/or meets applicable regulations;
4. To formulate and determine the implementation of Company policies that must be carried out by the divisions under the Directorate of Business;
5. Regulate the handover of power within the scope of the Business Directorate to one or several Company employees, either individually or collectively;
6. Authorized to bind the Company with other parties and/or other parties with the Company and to represent the Company inside and outside the court regarding the implementation of duties at the Business Directorate based on a Letter of Appointment and Power of Attorney from the President Director or based on a Special Power of Attorney from the President Director with due regard to the provisions;
7. Responsible for the implementation of duties and authorities within the Directorate of Business;
8. Together with the President Director and other members of the Board of Directors carry out other duties, responsibilities and authorities as the Directors of PT PNM (Persero) which have been determined based on the Articles of Association and the prevailing laws and regulations.

Director of Institutional and Planning

The Director of Institutional and Planning carries out the following duties, responsibilities and authorities:

1. Responsible for business capacity development activities;
2. Responsible for the management of management services and partnerships for both MSEs and LKM/S;
3. Responsible for the functioning of the information technology system, both IT operations, strategic IT, and IT infrastructure;

4. Berwenang mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan terkait pelaksanaan tugas-tugas pada Direktorat Kelembagaan berdasarkan Surat Penunjukan dan Kuasa dari Direktur Utama atau berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Direktur Utama dengan memperhatikan ketentuan;
5. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas, dan kewenangan yang dijalankan pada lingkup Direktorat Kelembagaan;
6. Bersama-sama dengan Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangan lainnya selaku Direksi PT PNM (Persero) yang telah ditentukan berdasarkan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

4. Authorized to bind the Company with other parties and/or other parties with the Company and represent the Company inside and outside the Court regarding the implementation of tasks at the Institutional Directorate based on a Letter of Appointment and Power of Attorney from the President Director or based on a Special Power of Attorney from the President Director with due regard to provision;
5. Responsible for the implementation of the duties and authorities carried out within the scope of the Institutional Directorate;
6. Together with the President Director and other members of the Board of Directors carry out the duties, responsibilities and other authorities as Directors of PT PNM (Persero) which have been determined based on the Articles of Association and the prevailing laws and regulations.

Kebijakan Rangkap Jabatan Direksi

Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan lain yaitu:

1. Direktur Utama atau Direktur pada BUMN/D dan swasta, atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perseroan.
2. Jabatan struktural dan fungsional pada instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah.
3. Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan.

Concurrent Position of the Board Of Directors

Members of the Board of Directors were prohibited from holding other concurrent positions, namely:

1. President Director or Director at SOEs/BUMD and private sector, or other positions related to the management of the Company.
2. Structural and functional positions in central and regional government agencies.
3. Other positions that may cause direct or indirect conflict of interest with the Company.

Tabel Rangkap Jabatan Direksi

Table of Concurrent Position of Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain Table of Concurrent Position of Board of Directors	Nama Perusahaan/ Instansi Lain Name of Company/ Other Institution
Arief Mulyadi	Direktur Utama President Director	Komisaris Utama President Commissioner	PT PNM Venture Capital, PT PNM IM
Tjatur H Priyono	Direktur Keuangan Director of Finance	Komisaris Commissioner	PT PNM IM, PT Mitra Bisnis Madani, PT Mitra Dagang Madani
Anton Fahlevie***	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Director of Compliance and Risk Management	Komisaris Utama President Commissioner	PT PNM VS, PT Mitra Proteksi Madani
M.Q Gunadi*	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Director of Compliance and Risk Management	-	-
Noer Fajriensyah*	Direktur Kelembagaan Institutional Director	-	-
Kindaris**	Direktur Bisnis Business Director	Komisaris Utama President Commissioner	PT Mitra Teknologi Madani
Sunar Basuki**	Direktur Kelembagaan dan Perencanaan Director of Institutional and Planning	Komisaris Utama President Commissioner	PT Mitra Niaga Madani

* Berhenti menjabat sejak tanggal 28 Mei 2021. / Stopped serving since May 28, 2021.

** Mulai menjabat sejak tanggal 28 Mei 2021. / Started in office since May 28, 2021.

***Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Bisnis dan mulai menjabat Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko sejak tanggal 28 Mei 2021. / Previously served as Director of Business and began serving as Director of Compliance and Risk Management since May 28, 2021.

Pengelolaan Benturan Kepentingan Direksi

Pengelolaan benturan kepentingan Direksi adalah sebagai berikut:

1. Harus terdapat ketentuan mengenai jumlah maksimum jabatan.
2. Anggota Direksi atau Komisaris di perusahaan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan perusahaan yang boleh dipegang oleh seorang Direksi.
3. Anggota Direksi dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan.
4. Anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan perusahaan yang dikelolanya selain gaji dan fasilitas lain sebagai Direksi yang ditentukan oleh RUPS.
5. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan berbenturan dengan kepentingan salah seorang anggota Direksi maka dengan persetujuan Komisaris, Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak memiliki benturan kepentingan.
6. Apabila benturan kepentingan tersebut menyangkut semua anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Komisaris atau oleh seorang yang ditunjuk oleh Komisaris.

Kepemilikan Saham Direksi

Tabel Kepemilikan Saham Direksi

Table of Stock Ownership of the Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Kepemilikan Saham Stock Ownership	
		PNM	Perusahaan Lain Other Companies
Arief Mulyadi	Direktur Utama President Director	Nihil None	Nihil None
Tjatur H Priyono	Direktur Keuangan Director of Finance	Nihil None	Nihil None
Anton Fahlevie***	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Director of Compliance and Risk Management	Nihil None	Nihil None
M.Q Gunadi*	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Director of Compliance and Risk Management	Nihil None	Nihil None
Noer Fajrieansyah*	Direktur Kelembagaan Institutional Director	Nihil None	Nihil None
Kindaris**	Direktur Bisnis Business Director	Nihil None	Nihil None
Sunar Basuki**	Direktur Kelembagaan dan Perencanaan Director of Institutional and Planning	Nihil None	Nihil None

* Berhenti menjabat sejak tanggal 28 Mei 2021. / Stopped serving since May 28, 2021.

** Mulai menjabat sejak tanggal 28 Mei 2021. / Started in office since May 28, 2021.

***Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Bisnis dan mulai menjabat Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko sejak tanggal 28 Mei 2021. / Previously served as Director of Business and began serving as Director of Compliance and Risk Management since May 28, 2021.

Management of the Board of Director's Conflicts of Interest

Management of conflicts of interest for the Board of Directors is as follows:

1. There had to be provisions regarding the maximum number of positions.
2. Members of the Board of Directors or Commissioners in companies that were not related to the management of the company, which might be held by a Board of Directors.
3. Members of the Board of Directors were prohibited from engaging in transactions that had a conflict of interest.
4. Members of the Board of Directors were prohibited from taking personal benefits from the activities of the company they manage, apart from the salary and other facilities as Directors as determined by the GMS.
5. If something happened where the interests of the Company conflict with the interests of a member of the Board of Directors, with the approval of the Board of Commissioners, the Company would be represented by another member of the Board of Directors who did not have a conflict of interest.
6. If the conflict of interest concerns all members of the Board of Directors, the Company would be represented by the Commissioner or by a person appointed by the Commissioner.

Stock Ownership of the Board of Directors

Rapat Direksi

Kebijakan Rapat

Rapat Direksi harus diadakan secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan, dan dalam rapat tersebut Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi. Direksi wajib mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Penyelenggaraan rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:

1. Dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi.
2. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.
3. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang sama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun bahan rapat disiapkan oleh Sekretaris Perusahaan serta disampaikan paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

Panggilan rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perusahaan dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya yang sah. Dalam mata acara lain-lain, rapat Direksi tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Direksi atau wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan mata acara tersebut.

Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dalam musyawarah mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa. Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan satu suara untuk anggota Direksi yang mewakilinya.

Meeting of the Board of Directors

Meeting Policy

The Board of Directors' meeting had to be held regularly, at least 1 (one) time every month, and in that meeting the Board of Directors might invite the Board of Commissioners. A meeting of the Board of Directors could be held if attended by a majority of all members of the Board of Directors. The Board of Directors was obliged to hold a meeting with the Board of Commissioners on a regular basis at least 1 (one) time in 4 (four) months.

The Board of Directors meeting could be held at any time if:

1. *Deemed necessary by one or more members of the Board of Directors.*
2. *Upon a written request from one or more members of the Board of Commissioners.*
3. *Upon a written request from 1 (one) person or more shareholders who equally represent 1/10 (one tenth) or more of the total number of shares with voting rights.*

At the scheduled meeting, meeting materials were submitted to participants no later than 5 (five) days before the meeting was held. In the event that a meeting was held outside the schedule, the meeting materials were prepared by the Corporate Secretary and submitted no later than before the meeting was held.

Invitation to a meeting of the Board of Directors shall be made in writing by a member of the Board of Directors who had the right to represent the Company and submitted at the latest 3 (three) days before the meeting was held or in a shorter time if in an urgent situation, excluding the date of the invitation and the date of the meeting.

The meeting of the Board of Directors was valid and had the right to make binding decisions if it was attended by more than ½ (one half) of the members of the Board of Directors or their authorized representatives. In the other agenda, the meeting of the Board of Directors was not entitled to make decisions unless all members of the Board of Directors or their authorized representatives attend and approve the addition of the agenda.

All decisions in the Board of Directors meeting were taken by deliberation to reach consensus. In the event that a decision could not be made in deliberation to reach a consensus, the decision shall be made by an ordinary majority vote. Each member of the Board of Directors had the right to cast 1 (one) vote and one additional vote for the member of the Board of Directors who represents him.

Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2021, agenda, tanggal dan peserta Rapat Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Direksi

Table of Board of Directors Meeting

No	Tanggal Date	Agenda Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Presence	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
1	13 Januari 2021 January 13, 2021	ALCO TW VI, Rencana Bisnis Mekaar ULaMM, dll ALCO TW VI, Mekaar ULaMM Business Plan, etc	Arief Mulyadi	Hadir / Present	
			Tjatur H Priyono	Hadir / Present	
			Anton Fahlevie	Hadir / Present	
			M.Q Gunadi	Hadir / Present	
			Noer Fajrieansyah	Hadir / Present	
2	28 Januari 2021 January 28, 2021	Rehearsal RUPS PNM PNM GMS Rehearsal	Arief Mulyadi	Hadir / Present	
			Tjatur H Priyono	Hadir / Present	
			Anton Fahlevie	Hadir / Present	
			M.Q Gunadi	Hadir / Present	
			Noer Fajrieansyah	Hadir / Present	
3	15 Februari 2021 February 15, 2021	SLIK Mekaar, dll SLIK Mekaar, etc	Arief Mulyadi	Hadir / Present	
			Tjatur H Priyono	Hadir / Present	
			Anton Fahlevie	Hadir / Present	
			M.Q Gunadi	Hadir / Present	
			Noer Fajrieansyah	Hadir / Present	
4	23 Februari 2021 February 23, 2021	Struktur Organisasi Organizational structure	Arief Mulyadi	Hadir / Present	
			Tjatur H Priyono	Hadir / Present	
			Anton Fahlevie	Hadir / Present	
			M.Q Gunadi	Hadir / Present	
			Noer Fajrieansyah	Hadir / Present	
5	5 Maret 2021 March 5, 2021	Pengadaan gedung baru PNM Procurement of new PNM building	Arief Mulyadi	Hadir / Present	
			Tjatur H Priyono	Hadir / Present	
			Anton Fahlevie	Hadir / Present	
			M.Q Gunadi	Hadir / Present	
			Noer Fajrieansyah	Tidak Hadir / Not Present	Dinas Keluar kota / Out of Town Service
6	19 April 2021 April 19, 2021	ALCO ALMA TW I 2021, Update audit eksternal ALCO ALMA Q1 2021, External audit update	Arief Mulyadi	Hadir / Present	
			Tjatur H Priyono	Hadir / Present	
			Anton Fahlevie	Hadir / Present	
			M.Q Gunadi	Hadir / Present	
			Noer Fajrieansyah	Hadir / Present	
7	6 Mei 2021 May 6, 2021	Performance dan Kinerja TW I, Co location Performance TW I, Co location	Arief Mulyadi	Hadir / Present	
			Tjatur H Priyono	Hadir / Present	
			Anton Fahlevie	Hadir / Present	
			M.Q Gunadi	Hadir / Present	
			Noer Fajrieansyah	Hadir / Present	

Agenda, Date and Participants of the Board of Directors Meeting

Throughout 2021, the agenda, dates and participants of the Board of Directors Meeting are as follows.

No	Tanggal Date	Agenda Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Presence	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
8	20 Mei 2021 May 20, 2021	Kinerja dan Performance April 2021 Performance April 2021	Arief Mulyadi	Hadir / Present	
			Tjatur H Priyono	Hadir / Present	
			Anton Fahlevie	Hadir / Present	
			M.Q Gunadi	Hadir / Present	
			Noer Fajrieansyah	Hadir / Present	
9	7 Juni 2021 June 7, 2021	Pengadaan Gedung baru PT PNM Procurement of new PT PNM building	Arief Mulyadi	Hadir / Present	
			Tjatur H Priyono	Hadir / Present	
			Anton Fahlevie	Tidak Hadir / Not Present	Izin Melayat / Permission to Mourn the Dead
			Kindaris	Hadir / Present	
			Sunar Basuki	Hadir / Present	
10	22 Juni 2021 June 22, 2021	Kinerja dan Performance bulan Mei 2021 Performance for the month of May 2021	Arief Mulyadi	Hadir / Present	
			Tjatur H Priyono	Hadir / Present	
			Anton Fahlevie	Hadir / Present	
			Kindaris	Hadir / Present	
			Sunar Basuki	Hadir / Present	
11	19 Juli 2021 July 19, 2021	ALCO ALMA TW II 2021, Kinerja dan Performance Juni dan Triwulan II 2021 ALCO ALMA TW II 2021, Performance June and Quarter II 2021	Arief Mulyadi	Hadir / Present	
			Tjatur H Priyono	Hadir / Present	
			Anton Fahlevie	Hadir / Present	
			Kindaris	Hadir / Present	
			Sunar Basuki	Hadir / Present	
12	28 Juli 2021 July 28, 2021	Proses dan Progress Klaim Asuransi Jiwa dan Penjaminan Process and Progress of Life Insurance Claims and Guarantees	Arief Mulyadi	Hadir / Present	
			Tjatur H Priyono	Hadir / Present	
			Anton Fahlevie	Hadir / Present	
			Kindaris	Hadir / Present	
			Sunar Basuki	Hadir / Present	
13	29 Juli 2021 July 29, 2021	RTM ISO 370001 terkait dengan penerapan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) RTM ISO 370001 related to the implementation of SMAP (Anti-Bribery Management System)	Arief Mulyadi	Hadir / Present	
			Tjatur H Priyono	Hadir / Present	
			Anton Fahlevie	Hadir / Present	
			Kindaris	Hadir / Present	
			Sunar Basuki	Hadir / Present	
14	19 Agustus 2021 August 19, 2021	Kinerja Performace Juli, Progres Ekosistem UMI, Coloc, dan Umi Corner, Status progress risk manajemen dalam holding UMI Digitalisasi Risk Manajement July Performance, Ecosystem Progress of UMI, Coloc, and Umi Corner, Status of progress of risk management in holding UMI Digitalization of Risk Management	Arief Mulyadi	Hadir / Present	
			Tjatur H Priyono	Hadir / Present	
			Anton Fahlevie	Hadir / Present	
			Kindaris	Hadir / Present	
			Sunar Basuki	Hadir / Present	
15	24 September 2021 September 24, 2021	Kinerja dan Performance PNM bulan Agustus 2021 PNM Performance and Performance in August 2021	Arief Mulyadi	Hadir / Present	
			Tjatur H Priyono	Hadir / Present	
			Anton Fahlevie	Hadir / Present	
			Kindaris	Hadir / Present	
			Sunar Basuki	Hadir / Present	

No	Tanggal Date	Agenda Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Presence	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
16	18 Oktober 2021 October 18, 2021	Laporan Kinerja dan Performance PNM bulan September 2021 PNM Performance and Performance Report September 2021	Arief Mulyadi	Hadir / Present	
			Tjatur H Priyono	Tidak Hadir / Not Present	Izin Melayat / Permission to Mourn the Dead
			Anton Fahlevie	Hadir / Present	
			Kindaris	Hadir / Present	
			Sunar Basuki	Hadir / Present	
17	19 Oktober 2021 October 19, 2021	RKAP 2022	Arief Mulyadi	Hadir / Present	
			Tjatur H Priyono	Hadir / Present	
			Anton Fahlevie	Hadir / Present	
			Kindaris	Hadir / Present	
			Sunar Basuki	Hadir / Present	
18	21 Oktober 2021 October 21, 2021	Pembahasan lanjutan RKAP 2022 Further discussion of the 2022 RKAP	Arief Mulyadi	Hadir / Present	
			Tjatur H Priyono	Hadir / Present	
			Anton Fahlevie	Hadir / Present	
			Kindaris	Hadir / Present	
			Sunar Basuki	Hadir / Present	
19	22 November 2021 November 22, 2021	Laporan Kinerja dan Performance PNM bulan Oktober 2021, ALCO ALMA October 2021 PNM Performance and Performance Report, ALCO ALMA	Arief Mulyadi	Hadir / Present	
			Tjatur H Priyono	Hadir / Present	
			Anton Fahlevie	Hadir / Present	
			Kindaris	Hadir / Present	
			Sunar Basuki	Hadir / Present	
20	01 Desember 2021 December 01, 2021	Integrasi Bisnis Pembiayaan Financing Business Integration	Arief Mulyadi	Hadir / Present	
			Tjatur H Priyono	Hadir / Present	
			Anton Fahlevie	Hadir / Present	
			Kindaris	Hadir / Present	
			Sunar Basuki	Hadir / Present	
21	20 Desember 2021 December 20, 2021	Laporan Kinerja dan Performance PNM bulan November 2021, update integrasi bisnis ULaMM November 2021 PNM Performance and Performance Report, ULaMM business integration update	Arief Mulyadi	Hadir / Present	
			Tjatur H Priyono	Hadir / Present	
			Anton Fahlevie	Hadir / Present	
			Kindaris	Hadir / Present	
			Sunar Basuki	Hadir / Present	
22	23 Desember 2021 December 23, 2021	Subsidi Bunga Interest Subsidy	Arief Mulyadi	Hadir / Present	
			Tjatur H Priyono	Hadir / Present	
			Anton Fahlevie	Hadir / Present	
			Kindaris	Hadir / Present	
			Sunar Basuki	Hadir / Present	
23	24 Desember 2021 December 24, 2021	IT Committee	Arief Mulyadi	Hadir / Present	
			Tjatur H Priyono	Hadir / Present	
			Anton Fahlevie	Hadir / Present	
			Kindaris	Hadir / Present	
			Sunar Basuki	Hadir / Present	

Agenda dan peserta rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi tersaji pada bagian Rapat Dewan Komisaris Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

The agenda and participants of the joint meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors had been presented in the section of the Board of Commissioners Meeting in the Chapter of Corporate Governance in this Annual Report.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Frequency and Attendance of Board of Directors Meetings

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi

Table of Frequency and Attendance of Board of Directors Meetings

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Direksi Meeting of Board Director			Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris Joint Meeting of Board of Director with Board of Commissioner			RUPS GMS		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran Total and Attendance Percentage			Jumlah dan Persentase Kehadiran Total and Attendance Percentage			Jumlah dan Persentase Kehadiran Total and Attendance Percentage		
		Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Number of Presence	Persentase Percentage	Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Number of Presence	Persentase Percentage	Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Number of Presence	Persentase Percentage
Arief Mulyadi	Direktur Utama President Director	23	23	100%	17	17	100%	2	2	100%
Tjatur H Priyono	Direktur Keuangan Director of Finance	23	22	95,65%	17	17	100%	2	2	100%
Anton Fahlevie***	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Director of Compliance and Risk Management	23	22	95,65%	17	17	100%	2	2	100%
M.Q Gunadi*	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Director of Compliance and Risk Management	8	8	100%	7	7	100%	2	2	100%
Noer Fajrieansyah*	Direktur Kelembagaan Institutional Director	8	7	87,5%	7	7	100%	2	2	100%
Kindaris**	Direktur Bisnis Business Director	15	15	100%	10	10	100%	-	-	-
Sunar Basuki**	Direktur Kelembagaan dan Perencanaan Director of Institutional and Planning	15	15	100%	10	10	100%	-	-	-

* Berhenti menjabat sejak tanggal 28 Mei 2021. / Stopped serving since May 28, 2021.

** Mulai menjabat sejak tanggal 28 Mei 2021. / Started in office since May 28, 2021.

***Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Bisnis dan mulai menjabat Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko sejak tanggal 28 Mei 2021. / Previously served as Director of Business and began serving as Director of Compliance and Risk Management since May 28, 2021.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi

Peningkatan kompetensi dinilai penting agar Direksi dapat selalu memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari *core business* Perusahaan, mengantisipasi masalah yang timbul di kemudian hari bagi keberlangsungan dan kemajuan Perusahaan.

Ketentuan program peningkatan kapabilitas bagi Direksi adalah sebagai berikut:

1. Program peningkatan kapabilitas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja Direksi.
2. Rencana untuk melakukan program peningkatan kapabilitas harus tercantum dalam rencana kerja dan anggaran Perusahaan.
3. Anggota Direksi bersangkutan harus membuat laporan tentang pelaksanaan program peningkatan kapabilitas dan disampaikan kepada Direksi.

Training and/or Competency Development of Members of the Board of Directors

Increasing competence was considered important so that the Board of Directors could always update information about the latest developments of the Company's core business, anticipating problems that arise in the future for the sustainability and progress of the Company.

The provisions of the capability improvement program for the Board of Directors were as follows:

1. The capability improvement program was implemented in order to improve the effectiveness of the performance of the Board of Directors.
2. The plan to carry out a capability improvement program had to be stated in the work plan and budget of the Company.
3. The relevant member of the Board of Directors had to make a report on the implementation of the capability improvement program and submit it to the Board of Directors.

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan Types of Training and Competency Development/Training Materials	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Implementation Time and Place	Penyelenggara Organizer
Arief Mulyadi	Direktur Utama President Director	<i>Creating Harmonization Between Academician and Business : Management Accountant Roles (New Direction)</i>	20 Februari 2021 February 20, 2021 (virtual zoom)	Institute Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI)
		<i>Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Madya dan Utama (CRA dan CRP) Intermediate and Primary Risk Management Training and Certification (CRA and CRP)</i>	27 – 28 Februari 2021 dan 7 Maret 2022 February 27 – 28, 2021 and March 7, 2022 (virtual zoom)	PT Utama Hanrizz Indonesia
		<i>Corporate Reporting Issues in Stock/Equity Investment</i>	13 Maret 2021 March 13, 2021 (virtual zoom)	Institute Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI)
		<i>Asean CPA in Business Community</i>	27 Maret 2021 March 27, 2021 (virtual zoom)	Institute Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI)
		<i>Advanced Pricing Agreement (APA) : Alternatif Manajemen Pajak Terhadap Isu Transfer Pricing Perpajakan Advanced Pricing Agreement (APA): Alternative Tax Management on Transfer Pricing Tax Issues</i>	24 April 2021 April 24, 2021 (virtual zoom)	Institute Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI)
		<i>Business Intelligence and Analytics for Management Accounting</i>	10 April 2021 April 10, 2021 (virtual zoom)	Institute Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI)
		<i>Empowering Future Global Women Leaders</i>	1 Mei 2021 May 1, 2021 (virtual zoom)	Institute Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI)
		<i>Fiscal Policy and Benefit for Plastic Waste Industry</i>	29 Mei 2021 May 29, 2021 (virtual zoom)	Institute Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI)
		<i>Understanding Data Science For Managements Accountants</i>	27 Juli 2021 July 27, 2021 (virtual zoom)	Institute Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI)

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan Types of Training and Competency Development/Training Materials	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Implementation Time and Place	Penyelenggara Organizer
		<i>Modern Advanced Excel for Management Accountants</i>	13 – 14 Agustus 2021 <i>August 13 – 14, 2021</i> (virtual zoom)	Institute Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI)
		<i>Program Konversi Gelar Internasional CRMP CRMP Internasional International Degree Conversion Program</i>	15 Agustus 2021 <i>August 15, 2021</i> (virtual zoom)	Institute Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI)
		<i>Management Accountants Againts Pandemic Covid-19 : The Role in Catalysing Economic Recovery</i>	27 – 28 Agustus 2021 <i>August 27 – 28, 2021</i> (virtual zoom)	Institute Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI)
		<i>Adaptive Financial Strategies Towards Pandemic Recovery : A Pathway To Future Agility</i>	25 September 2021 <i>September 25, 2021</i> (virtual zoom)	Institute Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI)
		<i>Energy Management Series Stress And Time Management</i>	9 Oktober 2021 <i>October 9, 2021</i> (virtual zoom)	Institute Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI)
		<i>Economic Outlook 2022: Investment Oppurtunities In The Post Pandemic</i>	27 November 2021 <i>November 27, 2021</i> (virtual zoom)	Institute Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI)
Tjatur H Priyono	Direktur Keuangan <i>Director of Finance</i>	Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Madya dan Utama (CRA dan CRP) <i>Intermediate and Primary Risk Management Training and Certification (CRA and CRP)</i>	27 – 28 Februari 2021 dan 7 Maret 2021 <i>February 27 – 28, 2021 and March 7, 2021</i> (virtual zoom)	PT Utama Hanrizz Indonesia
		<i>Corporate Reporting Issues in Stock/Equity Investment</i>	13 Maret 2021 <i>March 13, 2021</i> (virtual zoom)	Institute Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI)
		<i>Asean CPA in Business Coummunity</i>	27 Maret 2021 <i>March 27, 2021</i> (virtual zoom)	Institute Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI)
		<i>Advanced Pricing Agreement (APA) : Alternatif Manajemen Pajak Terhadap Isu Transfer Pricing Perpajakan</i>	24 April 2021 <i>April 24, 2021</i> (virtual zoom)	Institute Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI)
		<i>Business Intelligence and Analytics for Management Accounting</i>	10 April 2021 <i>April 10, 2021</i> (virtual zoom)	Institute Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI)
		<i>Empowering Future Global Women Leaders</i>	1 Mei 2021 <i>May 1, 2021</i> (virtual zoom)	Institute Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI)
		<i>Fiscal Policy and Benefit for Plastic Waste Industry</i>	29 Mei 2021 <i>May 29, 2021</i> (virtual zoom)	Institute Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI)
		<i>Understanding Data Science For Managements Accountants</i>	27 Juli 2021 <i>July 27, 2021</i> (virtual zoom)	Institute Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI)
		<i>Modern Advanced Excel for Management Accountants</i>	13 – 14 Agustus 2021 <i>August 13 – 14, 2021</i> (virtual zoom)	Institute Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI)
		<i>Management Accountants Againts Pandemic Covid-19 : The Role in Catalysing Economic Recovery</i>	27 – 28 Agustus 2021 <i>August 27 – 28, 2021</i> (virtual zoom)	Institute Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI)
		<i>Adaptive Financial Strategies Towards Pandemic Recovery : A Pathway To Future Agility</i>	25 September 2021 <i>September 25, 2021</i> (virtual zoom)	Institute Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI)
		<i>Energy Management Series Stress And Time Management</i>	9 Oktober 2021 <i>October 9, 2021</i> (virtual zoom)	Institute Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI)

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan Types of Training and Competency Development/Training Materials	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Implementation Time and Place	Penyelenggara Organizer
		<i>Economic Outlook 2022: Investment Opportunities In The Post Pandemic</i>	27 November 2021 <i>November 27, 2021</i> (virtual zoom)	Institute Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI)
Anton Fahlevie***	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko <i>Director of Compliance and Risk Management</i>	Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Madya dan Utama (CRA dan CRP) <i>Intermediate and Primary Risk Management Training and Certification (CRA and CRP)</i>	27 – 28 Februari 2021 dan 7 Maret 2021 <i>February 27 – 28, 2021 and March 7, 2021</i> (virtual zoom)	PT Utama Hanrizz Indonesia
		Pelaksanaan Onboarding Directorship Angkatan 2 <i>Implementation of Onboarding Directorship Batch 2</i>	9 Juni – 28 Juli 2021 <i>June 9 – July 28, 2021</i> (virtual zoom)	Forum <i>Human Capital</i> Indonesia
		PRP (<i>Professional Recognition Program</i>)	27 – 28 Agustus 2021 <i>August 27 – 28, 2021</i> (virtual zoom)	Institute Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI)
		Spesial Directorship Program	26 – 28 Oktober 2021 <i>October 26 – 28, 2021</i> (virtual zoom)	Indonesian Institute for Corporate Directorship
		Exclusive Course on Anticorruption Compliance for Corporate Practice	22 – 24 November 2021 <i>November 22 – 24, 2021</i> (virtual zoom)	Visi Integritas Law Office
M.Q Gunadi*	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko <i>Director of Compliance and Risk Management</i>	Forum Akuntan Manajemen <i>Management Accountant Forum</i>	Jakarta, 23 Januari 2021 <i>Jakarta, January 23, 2021</i>	Institut Akuntan Manajemen Indonesia
		Creating Harmonization Between Acedemician and business : Management Accounting Roles (New Direction)	Jakarta, 20 Februari 2021 <i>Jakarta, February 20, 2021</i>	Institut Akuntan Manajemen Indonesia
		Sertifikasi CRP dan CRA <i>CRP and CRA Sertifikasi Certification</i>	Jakarta, 28 Februari – 11 Maret 2021 <i>Jakarta, February 28 – March 11, 2021</i>	PT Utama Hanriz Indonesia
		Corporate Reporting Issue in Stock/Equip Investment	Jakarta, 13 Maret 2021 <i>Jakarta, March 13, 2021</i>	Institut Akuntan Manajemen Indonesia
		ASEAN CPA in Business Community	Jakarta, 10 April 2021 <i>Jakarta, April 10, 2021</i>	Institut Akuntan Manajemen Indonesia
		Advance Pricing Agreement (APA): Alternatif Manajemen pajak terhadap Isu Transfer Pricing Perpajakan	Jakarta, 24 April 2021 <i>Jakarta, 24 April 2021</i>	Institut Akuntan Manajemen Indonesia
		Kartini IAMI: Empowering Future Global Women Leaders	Jakarta, 1 Mei 2021 <i>Jakarta, May 1, 2021</i>	Institut Akuntan Manajemen Indonesia
		Forum Akuntan Manajemen: Sustainability: Fiscal Policy and Benefit for Plastic Waste Industry <i>Management Accountant Forum: Sustainability: Fiscal Policy and Benefit for Plastic Waste Industry</i>	Jakarta. 29 Mei 2021 <i>Jakarta, May 29, 2021</i>	Institut Akuntan Manajemen Indonesia
Noer Fajrieansyah*	Direktur Kelembagaan <i>Institutional Director</i>	-	-	-
Kindaris**	Direktur Bisnis <i>Business Director</i>	Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Madya dan Utama (CRA dan CRP) <i>Intermediate and Primary Risk Management Training and Certification (CRA and CRP)</i>	27 – 28 Februari 2021 dan 7 Maret 2021 <i>February 27 – 28, 2021 and March 7, 2021</i> (virtual zoom)	PT Utama Hanrizz Indonesia
		Pelatihan Peningkatan Pengetahuan Berbasis Kompetensi (PPBK) dan Asesmen Kompetensi MSDM Skema Manager <i>Competency-Based Knowledge Improvement Training (PPBK) and HR Competency Assessment Scheme Manager</i>	2 – 3 & 5 – 6 April 2022 <i>April 2 – 3 & 5 – 6, 2022</i> (virtual zoom)	Asosiasi Human Capital Indonesia (AHCI)

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan Types of Training and Competency Development/Training Materials	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Implementation Time and Place	Penyelenggara Organizer
		Pelatihan <i>Onboarding Directorship Program</i> Angkatan III tahun 2021 <i>Onboarding Directorship Program Batch III in 2021</i>	1 Oktober – 25 November 2021 <i>October 1 – November 25, 2021</i> (virtual zoom)	Forum Human Capital Indonesia (FHCI)
Sunar Basuki**	Direktur Kelembagaan dan Perencanaan <i>Director of Institutional and Planning</i>	Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Madya dan Utama (CRA dan CRP) <i>Intermediate and Primary Risk Management Training and Certification (CRA and CRP)</i>	27 – 28 Februari 2021 dan 7 Maret 2021 <i>February 27 – 28, 2021 and March 7, 2021</i> (virtual zoom)	PT Utama Hanrizz Indonesia
		<i>Modern Advanced Excel for Management Accountants</i>	03 – 04 September 2021 <i>September 03 – 04 2021</i> (virtual zoom)	Institute Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI)

* Berhenti menjabat sejak tanggal 28 Mei 2021. / *Stopped serving since May 28, 2021.*

** Mulai menjabat sejak tanggal 28 Mei 2021. / *Started in office since May 28, 2021.*

***Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Bisnis dan mulai menjabat Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko sejak tanggal 28 Mei 2021. / *Previously served as Director of Business and began serving as Director of Compliance and Risk Management since May 28, 2021*

Program Orientasi Bagi Direksi Baru

Program pengenalan Direksi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi anggota Direksi yang baru diangkat, wajib diberikan program pengenalan mengenai kondisi Perseroan secara umum.
2. Penanggung jawab program pengenalan adalah Sekretaris Perusahaan atau pejabat yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.
3. Program pengenalan meliputi:
 - a. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* oleh Perseroan.
 - b. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, risiko, pengendalian internal dan masalah-masalah strategisnya lainnya.
 - c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta Komite Audit.
 - d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi serta hal lain yang tidak diperbolehkan.
4. Program pengenalan Perseroan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke fasilitas Perseroan, kunjungan ke kantor cabang, pengkajian dokumen Perseroan atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan BUMN atas program tersebut dilaksanakan.

Direksi baru yang telah diangkat pada tahun 2021 yaitu Bapak Kindaris dan Bapak Sunar Basuki sebelumnya merupakan Executive Vice President PNM yang telah mengetahui gambaran kondisi Perseroan secara umum sehingga program pengenalan mengenai kondisi Perseroan secara umum tidak dilaksanakan.

Orientation Program for the New Board of Directors

The Directors' introduction program includes the following:

1. Newly appointed members of the Board of Directors had to be given an introduction program regarding the condition of the Company in general.
2. Person In Charge of the induction program is the Corporate Secretary or an officer who functions as the Corporate Secretary.
3. The introduction program includes:
 - a. Implementation of the principles of *Good Corporate Governance* by the Company.
 - b. An overview of the Company in relation to the objectives, nature and scope of activities, financial and operational performance, strategy, short and long term business plans, risks, internal control and other strategic issues.
 - c. Information relating to delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies as well as the Audit Committee.
 - d. Description of the duties and responsibilities of the Board of Directors as well as other things that are not allowed.
4. The introduction to the Company can be in the form of presentations, meetings, visits to Company facilities, visits to branch offices, review of Company documents or other programs deemed appropriate to SOEs for the program being implemented.

The new Directors who have been appointed in 2021, namely Mr. Kindaris and Mr. Sunar Basuki, were previously the Executive Vice President of PNM. They already knew the description of the condition of the Company in general, so that the introduction program regarding the condition of the Company in general, was not implemented.

Keputusan dan Pelaksanaan Tugas Direksi

Selama tahun 2021, Direksi telah menerbitkan Surat Keputusan dan Surat Edaran antara lain:

1. Kebijakan pembiayaan dan operasional Mekaar
2. Kebijakan pembiayaan dan operasional Mekaar Syariah
3. Ketentuan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara (LHKPN)
4. Kebijakan pemberian fasilitas penunjang kegiatan bisnis Direksi PT PNM
5. Pedoman perilaku (COD) PT PNM
6. Kebijakan kegiatan program dan proyek
7. Kebijakan *product* reguler jasa manajemen.
8. Kebijakan program Beasiswa S1.
9. PEMBERLAKUAN Pedoman K3.
10. Kontributor Pengisian konten portal, publik, website bumn.go.id
11. Kebijakan index PKU.
12. Pembentukan tim privatisasi dalam rangka integrasi ekosistem ultramikro.
13. Kebijakan penyertaan modal pada anak Perusahaan.
14. Kebijakan piutang jasa Manajemen.
15. Pembentukan tim sistem manajemen PT PNM .
16. Pedoman Pengelolaan arsip PT PNM.
17. Kebijakan alternate jabatan Direksi PT PNM.
18. Kebijakan masa transisi terkait perubahan atau penggantian Direksi PT PNM.
19. Pedoman Penerapan Manajemen Risiko PT PNM.
20. Ketentuan pelaksanaan pengukuran index pemberdayaan usaha ultra mikro dan mikro PT PNM.
21. Hirarki aturan kebijakan PT PNM.
22. Kebijakan tanda tangan digital pada dokumen perusahaan.
23. Kebijakan penanganan pembiayaan bermasalah pada nasabah Mekaar.
24. Kebijakan penanganan pembiayaan bermasalah pada nasabah Mekaar Syariah.
25. Pembentukan tim sistem manajemen PT PNM
26. Pembentukan tim *counter part assessment* indonesia industri 4.0
27. Addendum Surat Keputusan Direksi No. SK-0027/DIR/SDM /I/2020 tentang kebijakan insentif tenaga pengajar PT PNM
28. Pembentukan tim RKAP PT PNM tahun 2022
29. Addendum Surat Keputusan Direksi Bab 6 dan Bab 7 syariah
30. Addendum Surat Keputusan Direksi Bab 6 dan Bab 7
31. Pembentukan tim pendamping dalam rangka mendukung PT MPM terkait proses asuransi atas pembiayaan ULAMM dan Pembiayaan PNM
32. Pembentukan Tim Teknis Subsidi bunga/subsidi margin PT PNM
33. Addendum kesatu mekanisme pemberian bunga
34. Kebijakan piutang jasa manajemen
35. Addendum ke 2 kebijakan pengembalian gratifikasi

Decisions and Implementation of Duties of the Board of Directors

During 2021, the Board of Directors has issued Decrees and Circulars including:

1. Mekaar's operational and financing policies
2. Mekaar Syariah financing and operational policies
3. Provisions for the state administrator's wealth report (LHKPN)
4. Policy for providing supporting facilities for the business activities of the Board of Directors of PT PNM
5. PT PNM Code of Conduct (COD)
6. Policy on program and project activities
7. Policy on regular product management services.
8. Policy for the Undergraduate Scholarship program.
9. Enforcement of OSH Guidelines.
10. Contributor Filling in the content of the portal, public, website bumn.go.id
11. PKU index policy.
12. Formation of a privatization team in the context of integrating the ultramicro ecosystem.
13. Policy on equity participation in subsidiaries.
14. Management service receivable policy.
15. Establishment of the PT PNM management system team.
16. Guidelines for managing archives of PT PNM.
17. Policy on alternate positions of the Board of Directors of PT PNM.
18. Transitional policy regarding the change or replacement of the Board of Directors of PT PNM.
19. PT PNM Risk Management Implementation Guidelines.
20. Provisions on the implementation of the measurement of PT PNM's ultra micro and micro business empowerment index.
21. Hierarchy of PT PNM policy rules.
22. Digital signature policy on company documents.
23. Policy for handling non-performing financing for Mekaar customers.
24. Policy for handling non-performing financing for Mekaar Syariah customers.
25. Establishment of PT PNM . management system team
26. Formation of the counter part assessment team for Indonesia Industry 4.0
27. Addendum to the Decree of the Board of Directors No. SK-0027/DIR/SDM /I/2020 regarding the incentive policy for PT PNM's teaching staff
28. Establishment of PT PNM RKAP team in 2022
29. Addendum to the Decree of the Board of Directors Chapter 6 and Chapter 7 sharia
30. Addendum to the Decree of the Board of Directors Chapter 6 and Chapter 7
31. Formation of a companion team in order to support PT MPM related to the insurance process for ULAMM financing and PNM financing
32. Formation of the Technical Team for PT PNM Interest Subsidy/Margin Subsidy
33. The first addendum to the mechanism of giving interest
34. Policy on accounts receivable management
35. Addendum to the 2nd gratuity return policy

- | | |
|--|---|
| <p>36. Kebijakan Restrukturisasi pembiayaan Mekaar Syariah dan Mekaar Plus</p> <p>37. Kebijakan Restrukturisasi pembiayaan Mekaar Syariah dan Mekaar Plus Syariah</p> <p>38. Pedoman <i>bussiness continuity</i> manajemen PT PNM</p> <p>39. Pedoman pengadaan barang dan jasa PT PNM</p> <p>40. Kebijakan pengadaan tanah dan bangunan PT PNM</p> <p>41. Kebijakan pelaksanaan dan pengelolaan program tanggungjawab sosial dan lingkungan</p> <p>42. Tim pelaksanaan kegiatan pemusnahan arsip</p> <p>43. Kebijakan requirement dan seleksi karyawan</p> <p>44. Tim pembentukan penyelesaian audit eksternal</p> <p>45. Tim Corporate individual Direktorat surat pernyataan keputusan Direksi</p> <p>46. Subsidi Bunga</p> <p>47. Kebijakan honorarium tenaga pengajar dan assesor internal</p> <p>48. Pembentukan tim <i>self assessment/review good corporate governance</i> (GCG) tahun 2021</p> <p>49. Penetapan tim kerja perumusan integrasi bisnis ULamm</p> <p>50. Kebijakan pengelolaan, Penghapusbukuan dan pemindahtanganan aset perusahaan</p> <p>51. Pembentukan Komite TJSL</p> | <p>36. <i>Mekaar Syariah and Mekaar Plus financing Restructuring Policy</i></p> <p>37. <i>Mekaar Syariah and Mekaar Plus Syariah financing restructuring policies</i></p> <p>38. <i>Guidelines for business continuity management of PT PNM</i></p> <p>39. <i>Guidelines for the procurement of goods and services for PT PNM</i></p> <p>40. <i>PT PNM land and building procurement policy</i></p> <p>41. <i>Policy on implementation and management of social and environmental responsibility programs</i></p> <p>42. <i>The team for the implementation of archive destruction activities</i></p> <p>43. <i>Employee Requirement and Selection Policy</i></p> <p>44. <i>Establishment team for external audit completion</i></p> <p>45. <i>Individual Corporate Team of the Directorate a statement letter of the Board of Directors' decision</i></p> <p>46. <i>Interest Subsidy</i></p> <p>47. <i>Policy on honorarium for teaching staff and internal assessors</i></p> <p>48. <i>Establishment of a self-assessment/review team for good corporate governance (GCG) in 2021</i></p> <p>49. <i>Determination of the work team for the formulation of ULamm business integration</i></p> <p>50. <i>Management policy, write-off and transfer of company assets</i></p> <p>51. <i>Establishment of the CSR Committee</i></p> |
|--|---|

Selama tahun 2021 Direksi telah melaksanakan tugasnya yang antara lain:

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalankan kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan seperti yang tercantum dalam Anggaran Dasar. 2. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lain sebagaimana yang telah diatur dalam Perundang-undangan dan Anggaran Dasar. 3. Membentuk komite di bawah Direksi dengan tugas membantu efektivitas pelaksanaan tugas Direksi. 4. Untuk setiap komite yang dibentuk, Direksi wajib melakukan evaluasi pada setiap akhir tahun buku. 5. Menyampaikan informasi terkait identitas, pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di Anak Perusahaan, gaji, fasilitas dan tunjangan lain yang diterima dari perusahaan bersangkutan untuk dimuat Laporan Tahunan Perusahaan. 6. Menyampaikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai ketentuan yang berlaku setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris. 7. Memberikan penjelasan atas setiap pertanyaan dari Dewan Komisaris dan Pemegang Saham. 8. Menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu, akurat, relevan dan lengkap yaitu Laporan Triwulan, Laporan Semester dan Laporan Tahunan. | <p><i>During 2021 the Board of Directors has carried out its duties which include:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Running the company's interests in accordance with the aims and objectives of the company as stated in the Articles of Association.</i> 2. <i>Organizing the annual GMS and other GMS as stipulated in the Laws and Articles of Association.</i> 3. <i>Establish a committee under the Board of Directors with the task of assisting the effectiveness of the implementation of the duties of the Board of Directors.</i> 4. <i>For each committee formed, the Board of Directors is required to conduct an evaluation at the end of each financial year.</i> 5. <i>Submitting information related to identity, main occupation, position of the Board of Commissioners in Subsidiaries, salary, facilities and other benefits received from the company concerned to be published in the Company's Annual Report.</i> 6. <i>Submit periodic reports according to the method and time in accordance with applicable regulations whenever requested by the Board of Commissioners.</i> 7. <i>Provide explanations for any questions from the Board of Commissioners and Shareholders.</i> 8. <i>Submit reports to the Board of Commissioners in a timely, accurate, relevant and complete manner, namely Quarterly Reports, Semester Reports and Annual Reports.</i> |
|--|---|

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi dan Dasar Penilaiannya

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya, Direksi juga dibantu oleh Komite di bawah Direksi, yaitu:

1. *Tim Asset and Liability Committee (ALCO)*
2. *Write Off Executive Committee Meeting (WECOM)*
3. Komite Pengendalian Risiko Operasional
4. Komite Investasi
5. Komite Produk
6. Komite Manajemen Risiko
7. Komite Talenta
8. Komite Penempatan Posisi dan Karir Karyawan
9. Komite Pengarah Teknologi Informasi

Untuk mengukur efektivitas kinerja komite di bawah Direksi dalam membantu Direksi menjalankan pengurusan perusahaan maka dilakukan penilaian terhadap di bawah Direksi. Prosedur penilaian kinerja komite di bawah Direksi dilakukan oleh Direksi secara periodik dengan kriteria penilaian atas kinerja Komite di bawah Direksi yaitu pelaksanaan rapat serta kehadiran dalam rapat selama tahun buku. Direksi menilai bahwa selama 2021, komite-komite di bawah Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Direksi

RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. Alasan pemberhentian anggota Direksi dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan antara lain:

1. Tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak manajemen.
2. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
3. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar.
4. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara.
5. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi Perseroan.
6. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
7. Mengundurkan diri.
8. Alasan yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan, antara lain karena terjadinya ketidakharmonisan antar anggota Direksi.

Performance Appraisal of Committees Under the Board of Directors and the Basis for Its Assessment

In carrying out its management duties, the Board of Directors is also assisted by Committees under the Board of Directors, namely:

1. *Asset and Liability Committee (ALCO) Team*
2. *Write Off Executive Committee Meeting (WECOM)*
3. *Operational Risk Control Committee*
4. *Investment Committee*
5. *Product Committee*
6. *Risk Management Committee*
7. *Talent Committee*
8. *Employee Position and Career Placement Committee*
9. *Information Technology Steering Committee*

To measure the effectiveness of the performance of the committees under the Board of Directors in assisting the Board of Directors in managing the company, an assessment is carried out on those under the Board of Directors. The procedure for evaluating the performance of committees under the Board of Directors is carried out by the Board of Directors periodically with the criteria for evaluating the performance of the Committees under the Board of Directors, namely the implementation of meetings and attendance at meetings during the financial year. The Board of Directors considers that during 2021, the committees under the Board of Directors have carried out their duties and responsibilities well.

Mechanism of Dismissal of the Board of Directors

The GMS might dismiss the members of the Board of Directors at any time by stating the reasons. The reasons for dismissing a member of the Board of Directors were made if based on facts, the member of the Board of Directors concerned includes:

1. *Failure to fulfill the obligations agreed in the management contract.*
2. *Cannot carry out their duties properly.*
3. *Failure to implement the statutory provisions and/or provisions of the Articles of Association.*
4. *Being involved in actions that are detrimental to the Company and/or the State.*
5. *Performing actions that violate ethics and/or appropriateness that should be respected as a member of the Company's Board of Directors.*
6. *Found guilty by a court decision that has permanent legal force.*
7. *Resign.*
8. *Reasons deemed appropriate by the GMS for the interests and objectives of the Company, among others, are due to disharmony among the members of the Board of Directors.*

Disamping alasan pemberhentian anggota Direksi tersebut, Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

1. Meninggal dunia.
2. Masa jabatan berakhir.
3. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS sewaktu-waktu menyebutkan alasannya.
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan salah satu organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris secara umum yang diatur dalam *board manual* adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat pada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.
3. Bertindak baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
4. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
5. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota atau lebih, tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
6. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila:
 - a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dengan tujuan Perseroan.

In addition to the reasons for dismissing a member of the Board of Directors, the Board of Directors might be dismissed by the GMS based on other reasons deemed appropriate by the GMS for the interests and objectives of the Company. The position of a member of the Board of Directors shall end if:

1. *Passed away.*
2. *The term of office was over.*
3. *Dismissed based on the resolution of the GMS at any time stating the reasons.*
4. *No longer meets the requirements as a member of the Board of Directors based on the provisions of the Articles of Association and laws and regulations.*

Board of Commissioners

The Board of Commissioners was one of the Company's organs in charge of conducting general and / or specific supervision in accordance with the Articles of Association and providing advice to the Board of Directors in carrying out management activities of the Company.

Duties and Responsibilities of The Board of Commissioners

The duties and responsibilities of the Board of Commissioners in general were regulated in the board manual as follows:

1. *Supervising management policies, general management of the Company and the Company's business carried out by the Board of Directors as well as providing advice to the Board of Directors including supervision of the implementation of the Company's Long-Term Plan (RJPP), the Company's Work Plan and Budget (RKAP) and the provisions of the Articles of Association. and resolutions of the GMS as well as the prevailing laws and regulations in the interests of the Company in accordance with the aims and objectives of the Company.*
2. *Complying with the Articles of Association and laws and regulations as well as the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility and fairness.*
3. *Having good faith, prudence and responsibility in carrying out supervisory duties and providing advice to the Board of Directors for the benefit of the Company and in accordance with the aims and objectives of the Company.*
4. *Each member of the Board of Commissioners was personally responsible for the loss of the Company if the person concerned was guilty or negligent in carrying out his duties.*
5. *In the occasion that the Board of Commissioners consisted of 2 (two) members or more, the responsibility applied jointly and severally to each member of the Board of Commissioners.*
6. *Members of the Board of Commissioners could not be held accountable for the Company's losses if:*
 - a. *Have conducted supervision in good faith and prudence for the benefit of the Company and in accordance with the objectives of the Company.*

- b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian.
- c. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris juga memiliki wewenang untuk:

1. Memperoleh akses yang cukup atas informasi Perseroan dalam hal ini melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga serta memeriksa kekayaan Perseroan.
2. Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan.
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan.
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris dengan sepengetahuan Direksi.
6. Mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu dan memberhentikannya.
7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
8. Membentuk komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan.
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu.
10. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan atas hal-hal yang didiskusikan.
12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS.

Keputusan yang Perlu Mendapat Persetujuan Dewan Komisaris

Keputusan yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek.
2. Mengadakan kerjasama dengan Badan Usaha atau pihak berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan asset, Kerjasama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer/BOT*), Bangun Nilai Serah (*Build Own Transfer/BOWT*), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operater/BTO*) dan kerjasama lainnya dengan nilai dan jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh RUPS.

- b. *Has no personal interest, either directly or indirectly, in the management of the Board of Directors which resulted in losses.*
- c. *Has provided advice to the Board of Directors to prevent the loss from occurring or continuing.*

Authorities of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners also has the following authorities:

1. *Obtaining sufficient access to Company information in this case viewing books, letters and other documents, checking cash for verification purposes and other securities as well as examining the Company's assets.*
2. *Entering the work premises of the Company.*
3. *Requesting explanation from the Board of Directors and/or other officials regarding any issues relating to the Company's management.*
4. *Recognizing all policies and actions that have been and will be carried out by the Board of Directors.*
5. *Requesting the Board of Directors and/or other officials under the Board of Directors to attend the Board of Commissioners' meeting with the consent of the Board of Directors.*
6. *Appoint the Secretary of the Board of Commissioners, if deemed necessary and dismiss him.*
7. *Temporarily dismissing members of the Board of Directors in accordance with Articles of Association.*
8. *Establishing other committees other than the Audit Committee if it suits the capabilities and the requirements of the Company.*
9. *Hiring experts for certain matters and within a certain period at the expense of the Company, if deemed necessary.*
10. *Performing actions in managing the Company in certain circumstances for a certain period of time in accordance with the provisions of the Articles of Association.*
11. *Attending the meeting of the Board of Directors and providing views on the matters discussed.*
12. *Conducting other supervisory authorities if it does not violate the laws and regulations, Articles of Association, and/or GMS Resolutions.*

Decision that Needs to Agree to the Board of Commissioners

Decisions that need to be approved by the Board of Commissioners are as follows:

1. *Pledging fixed assets for short-term credit withdrawals.*
2. *Cooperating with business entities or parties in the form of licensing cooperation, management contracts, asset leasing, Joint Operation (KSO), Build Operate Transfer (BOT), Build Own Transfer (BOWT), Build Handover (Build Transfer Operater/BTO) and other collaborations with a certain value and period set by the GMS.*

3. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/ panjang, kecuali pinjaman (utang/piutang) yang timbul karena kegiatan usaha Perseroan dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
4. Menghapus dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati.
5. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku pada industri pada umumnya sampai dengan lima tahun.
6. Menetapkan struktur organisasi satu tingkat di bawah Direksi.
7. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan atau dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan keputusan.

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris diangkat dengan masa jabatan 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Persyaratan Anggota Dewan Komisaris

Persyaratan untuk menjadi Anggota Dewan Komisaris mencakup persyaratan formal yang merupakan persyaratan dasar yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, persyaratan material serta persyaratan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis Perseroan sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan UMKM, sebagai berikut:

Persyaratan Formal

Yang dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

1. Dinyatakan pailit.
2. Menjadi Anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit.
3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Persyaratan Material

Persyaratan material anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Integritas.
2. Dedikasi.
3. Memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen.
4. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan tempat yang bersangkutan dicalonkan.
5. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

3. *Receiving or providing medium/long term loans, except loans (debt/receivables) arising from the Company's business activities and loans granted to subsidiaries provided that loans to subsidiaries were reported to the Board of Commissioners.*
4. *Removing from the books of bad debts and inanimate goods inventory.*
5. *Writing-off movable fixed assets with the normal economic life in industry up to five years.*
6. *Establishing an organizational structure one level below the Board of Directors.*
7. *Within 30 (thirty) days of receipt of the request or explanation or complete documents from the Board of Directors, the Board of Commissioners had to make a decision.*

Tenure of Board of Commissioners

The Board of Commissioners was appointed for a term of 5 (five) years or until the closing of the Annual GMS and may be reappointed for 1 (one) term of office.

Requirements of the Board of Commissioners

The requirements to become a member of the Board of Commissioners included formal requirements which became the basic requirements stipulated by the Articles of Association, applicable laws and regulations, material requirements and other requirements that were adjusted to the needs and business characteristics of the Company as a SOEs engaged in MSME financing, as follows:

Formal Requirements

Those who can be appointed as Members of the Board of Commissioners are individuals who can carry out legal actions, except within 5 (five) years before their appointment:

1. *Declared bankrupt.*
2. *Becoming a Member of the Board of Directors or a Board of Commissioners found guilty of causing a Company to go bankrupt.*
3. *Convicted of a criminal offense that is detrimental to the State's finances relating to the financial sector.*

Material Requirements

Material requirements for members of the Board of Commissioners are as follows:

1. *Integrity.*
2. *Dedication.*
3. *Understanding company management issues related to one of management functions.*
4. *Possess adequate knowledge in the field of business of the company where the candidate is nominated.*
5. *Can provide enough time to carry out their duties.*

Persyaratan lainnya

1. Bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/ atau anggota legislatif.
2. Bukan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/atau Kepala/Wakil Kepala Daerah.
3. Tidak menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Dewan Pengawas pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut.
4. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Anggota Dewan Komisaris), yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter.
5. Bagi bakal calon dari kementerian teknis atau instansi pemerintah lain, harus berdasarkan surat usulan dari instansi yang bersangkutan.
6. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan perusahaan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perusahaan pada periode berikutnya.
7. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan tersebut.
8. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham utama perusahaan.
9. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan.

Board Manual Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah memiliki *board manual* yang bertujuan menjelaskan pola hubungan yang baku antara Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi dalam melaksanakan tugas, agar tercipta pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan, efektif dan efisien dengan menjunjung tinggi integritas dan kejujuran dalam menjalankan kegiatan bisnis Perseroan. Pemutakhiran terakhir atas *board manual* dilakukan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor SK-026.A/PNM-DIR/IX/19 tentang *Board Manual* PT Permodalan Nasional Madani (Persero) yang disahkan tanggal 6 September 2019.

Board manual tersebut mengatur berbagai aspek mengenai Dewan Komisaris antara lain mencakup ketentuan mengenai:

- a. Fungsi Dewan Komisaris
- b. Persyaratan, Komposisi dan Masa jabatan Dewan Komisaris
- c. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas
- d. Etika Jabatan Dewan Komisaris
- e. Tugas dan Tanggung Jawab, Kewajiban serta Wewenang Dewan Komisaris

Other Requirements

1. *Not a member of the management of political parties and/or candidates for legislative members and/or legislative members.*
2. *Not a candidate for Head/Deputy Regional Head and/or a Head/Deputy Regional Head.*
3. *Does not serve as a Member of the Board of Commissioners and/or the Supervisory Board of the relevant SOE for 2 (two) consecutive periods.*
4. *Physically and mentally healthy (not suffering from an illness that can hamper the implementation of duties as a Member of the Board of Commissioners), as evidenced by a health certificate from a doctor.*
5. *Prospective candidates from technical ministries or other government agencies must have a letter of proposal from the relevant agency.*
6. *Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the activities of the company within the last 6 (six) months, except for reappointment as an Independent Commissioner of the Company in the following period.*
7. *Does not have shares either directly or indirectly in the company.*
8. *Has no affiliation with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors or the main Shareholders of the Company.*
9. *Does not have a business relationship, directly or indirectly, related to the company's business activities.*

Board of Commissioners' Board Manual

The Board of Commissioners owned a board manual that aimed to explain the standard pattern of relationships between the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and the Board of Directors in carrying out their duties, in order to create professional, transparent, effective and efficient management of the Company by upholding integrity and honesty in carrying out the Company's business activities. The latest updating of the board manual was carried out through the Decree of the Board of Directors Number SK-026.A/PNM-DIR/IX/19 concerning the Board Manual of PT Permodalan Nasional Madani (Persero) which was passed on September 6, 2019.

The board manual regulated various aspects regarding the Board of Commissioners, including among others, provisions regarding:

- a. *Functions of the Board of Commissioners*
- b. *Requirements, composition and tenure of the Board of Commissioners*
- c. *Capability Recognition and Enhancement Program*
- d. *Position Ethics of the Board of Commissioners*
- e. *Duties and Responsibilities, Obligations and Authorities of the Board of Commissioners*

- f. Hak Dewan Komisaris
- g. Rapat Dewan Komisaris
- h. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
- i. Organ Pendukung Dewan Komisaris

- f. The rights of the Board of Commissioners
- g. Board of Commissioners Meeting
- h. Performance Evaluation of the Board of Commissioners
- i. Supporting Organs of the Board of Commissioners

Pembidangan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Adapun pembidangan tugas pengawasan Dewan Komisaris sebagai berikut.

Board of Commissioners' Supervision Duties

The supervisory duties of the Board of Commissioners are as follows.

Tabel Pembidangan Tugas Dewan Komisaris

Table of Duties of the Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas Duties
Rully Indrawan*	Komisaris Utama President Commissioner	Pengawasan Pengelolaan Korporasi secara menyeluruh, kepatuhan kepada Peraturan Perundang-Undangan dan mengkoordinasikan tugas-tugas anggota Komisaris Overall supervision of Corporate Management, compliance with laws and regulations and coordinating the duties of members of the Board of Commissioners
Arif Rahman Hakim**	Komisaris Utama President Commissioner	Pengawasan Pengelolaan Korporasi secara menyeluruh, kepatuhan kepada Peraturan Perundang-Undangan dan mengkoordinasikan tugas-tugas anggota Komisaris Overall supervision of Corporate Management, compliance with laws and regulations and coordinating the duties of members of the Board of Commissioners
Meidyah Indreswari	Komisaris Independen Independent Commissioner	Pengawasan di bidang Keuangan, Tata Kelola (Governance), Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal (Internal Control) Supervision in the field of Finance, Governance (Governance), Risk Management, and Internal Control (Internal Control)
M. Sholeh Amin	Komisaris Independen Independent Commissioner	Pengawasan di bidang legal, kegiatan operasi yang mendukung proses bisnis perusahaan & realisasi unit usaha syariah Supervision in the legal field, operational activities that support the company's business processes & realization of sharia business units
Veronica Colondam	Komisaris Independen Independent Commissioner	Pengawasan di bidang pengembangan/pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi Supervision in the field of development/empowerment of micro, small, medium and cooperative enterprises
Parman Nataatmadja	Komisaris Commissioner	Pengawasan di bidang teknologi informasi, sumber daya manusia dan prosedur nominasi dan numerasi Supervision in the field of information technology, human resources and nomination and numeration procedures

* Berhenti menjabat sejak tanggal 26 Februari 2021. / Stopped serving since February 26, 2021.

**Mulai menjabat sejak tanggal 26 Februari 2021. / Started in office since February 26, 2021.

Kebijakan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Kebijakan rangkap jabatan bagi Dewan Komisaris yang telah diatur dalam *board manual* adalah sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas Perusahaan, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri atau diberhentikan pada salah satu jabatan jika terpilih. Ketentuan ini tidak berlaku apabila pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dalam rangka pengawasan Perusahaan dalam program penyehatan berdasarkan penugasan khusus dari Pemegang Saham.
2. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada BUMN/BUMD/BUMS atau menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris atau jabatan yang menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN

Concurrent Position of the Board of Commissioners

The concurrent position policy for the Board of Commissioners which had been regulated in the board manual is as follows:

1. Members of the Board of Commissioners were prohibited from holding concurrent positions as members of the Board of Commissioners and/or the Board of Supervisors of the Company, unless they signed a statement letter that they are willing to resign or be dismissed in one of their positions if elected. This provision did not apply if the appointment of a member of the Board of Commissioners was carried out in the context of Company supervision in the restructuring program based on a special assignment from the Shareholders.
2. Members of the Board of Commissioners were prohibited from holding concurrent positions as members of the Board of Directors of BUMN/BUMD/BUMS or holding positions based on laws and regulations prohibited from concurrently serving as members of the Board of Commissioners or positions that caused conflict

yang bersangkutan, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris.

3. Anggota Dewan Komisaris yang memangku jabatan rangkap, masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi atau RUPS/ Pemegang Saham mengetahui perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud.

Adapun rangkap jabatan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

of interest with the SOEs concerned, unless signing a statement letter. willing to resign from the position if elected as a member of the Board of Commissioners.

3. A member of the Board of Commissioners who held multiple positions, the term of office as a member of the Board of Commissioners ended because of the law since the time the member of the Board of Commissioners or members of the Board of Directors or the GMS/ Shareholders became aware of the concurrent positions as referred to.

The concurrent positions of the Board of Commissioners are as follows.

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Table of Concurrent Positions for the Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain Position in Company/ Other Institution	Nama Perusahaan/ Instansi Lain Name of Company/ Other Institution
Rully Indrawan*	Komisaris Utama President Commissioner	Sekretaris Secretary	Kementerian Koperasi dan UKM
Arif Rahman Hakim**	Komisaris Utama President Commissioner	Sekretaris Secretary	Kementerian Koperasi dan UKM
Meidyah Indreswari	Komisaris Independen President Commissioner	-	-
M. Sholeh Amin	Komisaris Independen Independent Commissioner	Dosen Lecturer	Fakultas Hukum UIKA
		Advokat Advocate	Law Firm Sholeh, Adnan & Associates (SAA)
Veronica Colondam	Komisaris Independen Independent Commissioner	Anggota Lemkaji Lemkaji Member	MPR-RI (SK Ketua MPR RI)
		Ketua Chairman	Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB)
Parman Nataatmadja	Komisaris Commissioner	Tenaga Ahli Experts	Menteri Agraria dan Tata Ruang

* Berhenti menjabat sejak tanggal 26 Februari 2021. / Stopped serving since February 26, 2021.

**Mulai menjabat sejak tanggal 26 Februari 2021. / Started in office since February 26, 2021.

Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris hendaknya senantiasa menghindari adanya benturan kepentingan, antara lain dengan:

1. Setiap anggota Dewan Komisaris mengidentifikasi dan meletakkan hal-hal yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, antara kepentingan perusahaan, pemerintah dalam peran sebagai regulator, dan Pemegang Saham serta institusi lainnya.
2. Dalam hal terjadi konflik kepentingan maka penanganannya harus diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris dan dapat dilaporkan kepada Pemegang Saham.

Management of the Board of Commissioner's Conflicts of Interest

The Board of Commissioners should always avoid conflicts of interest, including by:

1. Each member of the Board of Commissioners identified and placed matters that could create conflicts of interest, between the interests of the company, the government in the role of regulator, and shareholders and other institutions.
2. In the event of a conflict of interest, the resolution had to be decided at the Board of Commissioners Meeting and it could be reported to the Shareholders.

3. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak boleh menduduki jabatan Direktur di BUMN maupun perusahaan swasta atau memiliki jabatan lain dalam perusahaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
 4. Selain gaji dan fasilitas yang diterima sebagaimana ditetapkan dalam RUPS setiap anggota Dewan Komisaris tidak boleh mengambil keuntungan pribadi dengan melakukan transaksi apapun atas nama Perseroan.
 5. Anggota Dewan Komisaris tidak boleh menerima hadiah sumbangan dari pihak manapun sehubungan dengan pelaksanaan tugas.
3. Each member of the Board of Commissioners might not hold a Director position in a SOEs or private company or have any other position in the company that could create a conflict of interest.
 4. Apart from the salary and facilities received as stipulated in the GMS, each member of the Board of Commissioners might not take personal advantage by conducting any transactions on behalf of the Company.
 5. Members of the Board of Commissioners might not accept gifts of donations from any party in connection with the performance of their duties.

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Stock Ownership of the Board of Commissioners

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Table of Stock Ownership of the Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Kepemilikan Saham Stock Ownership	
		PNM	Perusahaan Lain Other Companies
Rully Indrawan*	Komisaris Utama President Commissioner	-	-
Arif Rahman Hakim**	Komisaris Utama President Commissioner	-	-
Meidyah Indreswari	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-
M. Sholeh Amin	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-
Veronica Colondam	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-
Parman Nataatmadja	Komisaris Commissioner	-	-

* Berhenti menjabat sejak tanggal 26 Februari 2021. / Stopped serving since February 26, 2021.

**Mulai menjabat sejak tanggal 26 Februari 2021. / Started in office since February 26, 2021.

Komisaris Independen

Komposisi Dewan Komisaris PNM Per 31 Desember 2021 berjumlah 5 (empat) orang, dengan 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris sebagai Komisaris Independen yang berarti bahwa 60% (enam puluh persen) dari Komisaris yang ada. Komposisi anggota Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang mengatur bahwa paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

Independent Commissioner

The composition of the Board of Commissioners of PNM As of December 31, 2021, is 5 (four) people, with 3 (three) members of the Board of Commissioners as Independent Commissioners, which means that 60% (sixty percent) of the existing Commissioners. The composition of the members of the Board of Commissioners has complied with the provisions of OJK Regulation Number 33/POJK.04/2014 dated December 8, 2014, concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies which stipulates that at least 30% (thirty percent) of the total members of the Board of Commissioners are Independent Commissioners.

Kriteria dan Pernyataan Komisaris Independen

Kriteria Komisaris Independen mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Kriteria Komisaris Independen adalah sebagai berikut:

Kriteria Komisaris Independen <i>Independent Commissioner Criteria</i>	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>		
	Meidyah Indreswari	M. Sholeh Amin	Veronica Colondam
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya. <i>Not a person working or having the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Company within the last 6 (six) months, except for reappointment as an Independent Commissioner of the Company in the following period.</i>	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan. <i>Had no affiliation with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or major shareholders of the Company.</i>	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. <i>Had no business relationship either directly or indirectly related to the Company's business activities.</i>	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. <i>Had no business relationship either directly or indirectly related to the Company's business activities.</i>	√	√	√

Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan Rapat

Rapat Dewan Komisaris adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utamanya di wilayah negara Republik Indonesia. Apabila diselenggarakan di tempat lain, dianggap sah dan dapat mengambil keputusan apabila dilaksanakan di wilayah Negara Republik Indonesia dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

Setiap keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris. Keputusan dapat pula diambil di luar rapat Dewan Komisaris sepanjang seluruh anggota Dewan Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Panggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum

Criteria of Independent Commissioner

The criteria for Independent Commissioners refer to the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. The criteria for an Independent Commissioner are as follows:

Meeting of the Board of Commissioner

Meeting Policy

Meetings of the Board of Commissioners were meetings held by the Board of Commissioners. Meetings of the Board of Commissioners were considered valid if they were held at the domicile of the Company or the place of its main business activities in the territory of the Republic of Indonesia. If it was held in another place, it was considered valid and could make decisions if it was carried out in the territory of the Republic of Indonesia and was attended by all members of the Board of Commissioners.

Every decision of the Board of Commissioners was taken in the meeting of the Board of Commissioners. Decisions could also be taken outside the Board of Commissioners meeting as long as all members of the Board of Commissioners agree on the method and material to be decided. The Board of Commissioners had to hold a meeting at least 1 (one) time in 2 (two) months.

Invitation to a meeting of the Board of Commissioners shall be submitted in writing by the President Commissioner or by a member of the Board of Commissioners appointed by the President Commissioner and submitted no later than 3

rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.

Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dengan cara konferensi antara para anggota Dewan Komisaris yang berada di tempat yang berbeda, melalui telepon konferensi, video konferensi atau peralatan komunikasi lainnya yang memungkinkan setiap anggota Dewan Komisaris dapat saling mendengar dan berkomunikasi serta berpartisipasi dalam rapat.

Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Seorang anggota Dewan Komisaris yang berhalangan hadir pada rapat Dewan Komisaris hanya dapat diwakili oleh anggota Dewan Komisaris lainnya, dengan diberikan surat kuasa bermaterai yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut. Satu orang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili satu orang anggota Dewan Komisaris yang berhalangan hadir.

Seluruh rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, maka rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat bertindak sebagai ketua rapat. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat lebih dari 1 (satu) orang, maka anggota Dewan Komisaris yang tertua dalam usia bertindak sebagai pimpinan rapat.

Rapat Internal Dewan Komisaris

Rencana Rapat Internal Dewan Komisaris

Bulan Month	Agenda Agendas
Januari January	- Realisasi Kinerja Bulan Desember 2020. - Lain-lain.
Februari February	- Realisasi Kinerja Januari 2021. - Hasil Laporan Manajemen Tahun Buku 2020. - Lain-lain.
Maret March	- Realisasi Kinerja Februari 2021. - Pembahasan Laporan Audit PNM Tahun Buku 2020. - Lain-lain.

(three) days before the meeting was held or in a shorter time if in an urgent situation excluding the invitation date and meeting date. At the scheduled meeting, meeting materials were submitted to participants no later than 5 (five) days before the meeting was held.

Meetings of the Board of Commissioners could be held by means of conferences between members of the Board of Commissioners who were in different places, via conference calls, video conferences or other communication equipment that allowed each member of the Board of Commissioners to hear each other and communicate and participate in meetings.

Meetings of the Board of Commissioners were valid and had the right to make binding decisions if they were attended or represented by more than ½ (one half) of the total members of the Board of Commissioners. A member of the Board of Commissioners who was unable to attend the meeting of the Board of Commissioners could only be represented by another member of the Board of Commissioners, by being given a power of attorney with a stamp duty specially made for this purpose. One member of the Board of Commissioners could only represent one member of the Board of Commissioners who was unable to attend.

All Board of Commissioners meetings were chaired by the President Commissioner. In the occasion that the President Commissioner was unable to attend or was unable to attend, the meeting would be chaired by another member of the Board of Commissioners appointed by the President Commissioner. In the occasion that the Main Commissioner did not make the appointment, the member of the Board of Commissioners who served for the longest time would act as chairman of the meeting. In the occasion that the longest serving member of the Board of Commissioners was more than 1 (one) person, the oldest member of the Board of Commissioners shall act as chairman of the meeting.

Internal Meeting of the Board of Commissioners

Board of Commissioners' Internal Meetings

Bulan Month	Agenda Agendas
April April	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Kinerja Maret 2021. - Pembahasan Kebijakan Pembinaan SDM. - Lain-lain.
Mei May	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Kinerja April 2021. - Pembahasan Kebijakan Pengelolaan Anak Perusahaan. - Lain-lain.
Juni June	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Kinerja Mei 2021. - Pembahasan Kepatuhan Perusahaan Terhadap Peraturan Perundang-undangan. - Lain-lain.
Juli July	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Kinerja Juni 2021. - Pembahasan Kebijakan Sistem Teknologi Informasi - Lain-lain.
Agustus August	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Kinerja Juli 2021. - Pembahasan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa. - Lain-lain.
September September	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Kinerja Agustus 2021. - Pembahasan Kebijakan Akuntansi dan Penyusunan. - Lain-lain.
Oktober October	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Kinerja September 2021. - Pembahasan RKAP PNM Tahun 2022. - Lain-lain.
November November	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Kinerja Oktober 2021. - Lain-lain.
Desember Decemeber	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Kinerja November 2021. - Persiapan RUPS Pengesahan RKAP PNM Tahun 2022. - Lain-lain.

Realisasi Rapat Internal Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2021, agenda, tanggal dan peserta Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

Realization of the Board of Commissioners Internal Meeting

Throughout 2021, the agenda, dates and participants of the Board of Commissioners Meetings are as follows.

Tabel Rapat Dewan Komisaris

Table of Board of Commissioners Meeting

No	Tanggal Date	Agenda Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Presence
1	19 Januari 2021 January 19, 2021	Rapat Dewan Komisaris dengan Direktorat Bisnis Meeting of the Board of Commissioners with the Directorate of Business	Rully Indrawan Meidyah Indreswari M. Sholeh Amin Veronica Colondam Parman Nataatmadja	Hadir / Present Hadir / Present Hadir / Present Hadir / Present Hadir / Present
2	22 Januari 2021 January 22, 2021	Rapat Dewan Komisaris dengan Direktorat KMR Meeting of the Board of Commissioners with the Directorate of KMR	Rully Indrawan Meidyah Indreswari M. Sholeh Amin Veronica Colondam Parman Nataatmadja	Hadir / Present Hadir / Present Hadir / Present Hadir / Present Hadir / Present

No	Tanggal Date	Agenda Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Presence
3	25 Januari 2021 January 25, 2021	Rapat Dewan Komisaris bulanan 1 Monthly Board of Commissioners Meeting 1	Rully Indrawan	Hadir / Present
			Meidyah Indreswari	Hadir / Present
			M. Sholeh Amin	Hadir / Present
			Veronica Colondam	Hadir / Present
			Parman Nataatmadja	Hadir / Present
4	29 Januari 2021 January 29, 2021	Rapat dengan Tim Teknis KBUMN - Asdep Bidang Perbankan dan Pembiayaan ttg RUPS RKAP Tahun 2021 Meeting with the KBUMN Technical Team - Assistant Deputy for Banking and Financing regarding the 2021 RKAP GMS	Rully Indrawan	Hadir / Present
			Meidyah Indreswari	Hadir / Present
			M. Sholeh Amin	Hadir / Present
			Veronica Colondam	Hadir / Present
			Parman Nataatmadja	Hadir / Present
5	04 Februari 2021 February 04, 2021	Rapat dengan Tim Audit BPKP - Entry Meeting Assessment GCG Tahun 2020 Meeting with BPKP Audit Team - 2020 GCG Entry Meeting Assessment Assessment	Rully Indrawan	Hadir / Present
			Meidyah Indreswari	Hadir / Present
			M. Sholeh Amin	Hadir / Present
			Veronica Colondam	Hadir / Present
			Parman Nataatmadja	Hadir / Present
6	19 Februari 2021 February 19, 2021	Rapat dengan Direktur Keuangan: Proyeksi Pendanaan PNM Tahun 2021 Meeting with the Director of Finance: Projected Financing of PNM in 2021	Rully Indrawan	Hadir / Present
			Meidyah Indreswari	Hadir / Present
			M. Sholeh Amin	Hadir / Present
			Veronica Colondam	Hadir / Present
			Parman Nataatmadja	Hadir / Present
7	23 Februari 2021 February 23, 2021	Rapat dengan Div MRI: Pemaparan SMAP: 370001 Meeting with Div MRI: SMAP Exposure: 370001	Arif Rahman Hakim	Hadir / Present
			Meidyah Indreswari	Hadir / Present
			M. Sholeh Amin	Hadir / Present
			Veronica Colondam	Hadir / Present
			Parman Nataatmadja	Hadir / Present
8	25 Februari 2021 February 25, 2021	Rapat Dewan Komisaris bulanan 2 Monthly Board of Commissioners Meeting 2	Arif Rahman Hakim	Hadir / Present
			Meidyah Indreswari	Hadir / Present
			M. Sholeh Amin	Hadir / Present
			Veronica Colondam	Hadir / Present
			Parman Nataatmadja	Hadir / Present
9	06 Maret 2021 March 06, 2021	Rapat Internal Dewan Komisaris: Penawaran PUB III Tahap V Internal Meeting of the Board of Commissioners: PUB Offer III Phase V	Arif Rahman Hakim	Hadir / Present
			Meidyah Indreswari	Hadir / Present
			M. Sholeh Amin	Hadir / Present
			Veronica Colondam	Hadir / Present
			Parman Nataatmadja	Hadir / Present
10	08 Maret 2021 March 08, 2021	Rapat Internal Dewan Komisaris: Struktur Organisasi Internal Meeting of the Board of Commissioners: Organizational Structure	Arif Rahman Hakim	Hadir / Present
			Meidyah Indreswari	Hadir / Present
			M. Sholeh Amin	Hadir / Present
			Veronica Colondam	Hadir / Present
			Parman Nataatmadja	Hadir / Present

No	Tanggal Date	Agenda Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Presence
11	12 Maret 2021 March 12, 2021	Rapat dengan Tim Asdep Perbankan & Pembiayaan : Capaian Kinerja Tahun 2021 Meeting with the Assistant Deputy for Banking & Financing Team: Performance Achievements in 2021	Arif Rahman Hakim	Hadir / Present
			Meidyah Indreswari	Hadir / Present
			M. Sholeh Amin	Hadir / Present
			Veronica Colondam	Hadir / Present
			Parman Nataatmadja	Hadir / Present
12	16 Maret 2021 March 16, 2021	Wawancara BPKP tentang Implementasi GCG di PNM BPKP Interview about GCG Implementation at PNM	Arif Rahman Hakim	Hadir / Present
			Meidyah Indreswari	Hadir / Present
			M. Sholeh Amin	Hadir / Present
			Veronica Colondam	Hadir / Present
			Parman Nataatmadja	Hadir / Present
13	29 Maret 2021 March 29, 2021	Rapat Dewan Komisaris bulanan 3 Monthly Board of Commissioners Meetings 3	Arif Rahman Hakim	Hadir / Present
			Meidyah Indreswari	Hadir / Present
			M. Sholeh Amin	Hadir / Present
			Veronica Colondam	Hadir / Present
			Parman Nataatmadja	Hadir / Present
14	07 April 2021 April 07, 2021	Rapat dengan Tim audit BPKP - Exit Meeting Assessment GCG Tahun 2020 Meeting with the BPKP audit team - Exit Meeting GCG Assessment 2020	Arif Rahman Hakim	Hadir / Present
			Meidyah Indreswari	Hadir / Present
			M. Sholeh Amin	Hadir / Present
			Veronica Colondam	Hadir / Present
			Parman Nataatmadja	Hadir / Present
15	12 April 2021 April 12, 2021	Doa Bersama Sambut Ramadhan 2021 Prayer Together Welcoming Ramadan 2021	Arif Rahman Hakim	Hadir / Present
			Meidyah Indreswari	Hadir / Present
			M. Sholeh Amin	Hadir / Present
			Veronica Colondam	Hadir / Present
			Parman Nataatmadja	Hadir / Present
16	14 April 2021 April 14, 2021	Rapat dengan Tim Teknis KBUMN - Asdep Bidang Perbankan dan Pembiayaan tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2020 Meeting with the KBUMN Technical Team - Deputy Assistant for Banking and Financing on Approval of Annual Reports and Ratification of Financial Statements for Fiscal Year 2020	Arif Rahman Hakim	Hadir / Present
			Meidyah Indreswari	Hadir / Present
			M. Sholeh Amin	Hadir / Present
			Veronica Colondam	Hadir / Present
			Parman Nataatmadja	Hadir / Present
17	19 April 2021 April 19, 2021	Makan malam bersama BOC dan Bpk Rully Indrawan Dinner with BOC and Mr. Rully Indrawan	Arif Rahman Hakim	Hadir / Present
			Meidyah Indreswari	Hadir / Present
			M. Sholeh Amin	Hadir / Present
			Veronica Colondam	Hadir / Present
			Parman Nataatmadja	Hadir / Present
18	24 April 2021 April 24, 2021	Ibu Veronica Colondam Narasumber Webinar Peringatan Hari Kartini Tahun 2021 Mrs. Veronica Colondam Resource Person for Kartini Day Commemoration of 2021	Arif Rahman Hakim	Hadir / Present
			Meidyah Indreswari	Hadir / Present
			M. Sholeh Amin	Hadir / Present
			Veronica Colondam	Hadir / Present
			Parman Nataatmadja	Hadir / Present

No	Tanggal Date	Agenda Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Presence
19	26 April 2021 April 26, 2021	Rapat Dewan Komisaris bulanan 4 Monthly Board of Commissioners Meeting 4	Arif Rahman Hakim	Hadir / Present
			Meidyah Indreswari	Hadir / Present
			M. Sholeh Amin	Hadir / Present
			Veronica Colondam	Hadir / Present
			Parman Nataatmadja	Hadir / Present
20	29 April 2021 April 29, 2021	Program Pengenalan Perusahaan kepada Komisaris Utama (offline) Company Introduction Program to the President Commissioner (offline)	Arif Rahman Hakim	Hadir / Present
			Meidyah Indreswari	Hadir / Present
			M. Sholeh Amin	Hadir / Present
			Veronica Colondam	Hadir / Present
			Parman Nataatmadja	Hadir / Present
21	4 Mei 2021 May 4, 2021	Pisah sambut Komisaris Utama periode 2020-2021 (offline) Farewell to the President Commissioner for the 2020-2021 period (offline)	Arif Rahman Hakim	Hadir / Present
			Meidyah Indreswari	Hadir / Present
			M. Sholeh Amin	Hadir / Present
			Veronica Colondam	Hadir / Present
			Parman Nataatmadja	Hadir / Present
22	5 Mei 2021 May 5, 2021	Orientasi Komisaris Utama baru (offline) New President Commissioner orientation (offline)	Arif Rahman Hakim	Hadir / Present
			Meidyah Indreswari	Hadir / Present
			M. Sholeh Amin	Hadir / Present
			Veronica Colondam	Hadir / Present
			Parman Nataatmadja	Hadir / Present
23	17 Mei 2021 May 17, 2021	Halal Bihalal Virtual Jasa Keuangan Halal Bihalal Virtual Financial Services	Arif Rahman Hakim	Hadir / Present
			Meidyah Indreswari	Hadir / Present
			M. Sholeh Amin	Hadir / Present
			Veronica Colondam	Hadir / Present
			Parman Nataatmadja	Hadir / Present
24	27 Mei 2021 May 27, 2021	Rapat Dewan Komisaris bulanan 5 Monthly Board of Commissioners Meeting 5	Arif Rahman Hakim	Hadir / Present
			Meidyah Indreswari	Hadir / Present
			M. Sholeh Amin	Hadir / Present
			Veronica Colondam	Hadir / Present
			Parman Nataatmadja	Hadir / Present
25	2 Juni 2021 June 2, 2021	Seremonial HUT PNM PNM Anniversary Ceremony	Arif Rahman Hakim	Hadir / Present
			Meidyah Indreswari	Hadir / Present
			M. Sholeh Amin	Hadir / Present
			Veronica Colondam	Hadir / Present
			Parman Nataatmadja	Hadir / Present
26	25 Juni 2021 June 25, 2021	Rapat Dewan Komisaris bulanan 6 Monthly Board of Commissioners Meeting 6	Arif Rahman Hakim	Hadir / Present
			Meidyah Indreswari	Hadir / Present
			M. Sholeh Amin	Hadir / Present
			Veronica Colondam	Hadir / Present
			Parman Nataatmadja	Hadir / Present

No	Tanggal Date	Agenda Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Presence
27	25 Juni 2021 June 25, 2021	Rapat dengan Direktur Utama dan DirKLB tentang Pengelolaan Sosial Media <i>Meeting with the President Director and DirKLB regarding Social Media Management</i>	Arif Rahman Hakim	Hadir / Present
			Meidyah Indreswari	Hadir / Present
			M. Sholeh Amin	Hadir / Present
			Veronica Colondam	Hadir / Present
			Parman Nataatmadja	Hadir / Present
28	6 Juli 2021 July 6, 2021	Rapat dengan Direktur KMR dan Divisi MRI <i>Meeting with the Director of KMR and MRI Division</i>	Arif Rahman Hakim	Hadir / Present
			Meidyah Indreswari	Hadir / Present
			M. Sholeh Amin	Hadir / Present
			Veronica Colondam	Hadir / Present
			Parman Nataatmadja	Hadir / Present
29	7 Juli 2021 July 7, 2021	Rapat Pengembangan Usaha Masyarakat Warung Kiarah Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) melalui Koperasi Agro Tora Wajasakti <i>Community Business Development Meeting of Kiarah Warung Tanah Agrarian Reform Object (TORA) through the Agro Tora Wajasakti Cooperative</i>	Arif Rahman Hakim	Hadir / Present
			Meidyah Indreswari	Hadir / Present
			M. Sholeh Amin	Hadir / Present
			Veronica Colondam	Hadir / Present
			Parman Nataatmadja	Hadir / Present
30	8 Juli 2021 July 8, 2021	Rapat Pembahasan PNM sbg Lembaga Alternatif Penyalur KUR <i>PNM Discussion Meeting as an Alternative KUR Distribution Institution</i>	Arif Rahman Hakim	Hadir / Present
			Meidyah Indreswari	Hadir / Present
			M. Sholeh Amin	Hadir / Present
			Veronica Colondam	Hadir / Present
			Parman Nataatmadja	Hadir / Present
31	9 Juli 2021 July 9, 2021	Rapat dengan Direktur KMR dan EVP PDL <i>Meeting with the Director of KMR and EVP of PDL</i>	Arif Rahman Hakim	Hadir / Present
			Meidyah Indreswari	Hadir / Present
			M. Sholeh Amin	Hadir / Present
			Veronica Colondam	Hadir / Present
			Parman Nataatmadja	Hadir / Present
32	21 Juli 2021 July 21, 2021	Rapat Dewan Komisaris bulanan 7 <i>Monthly Board of Commissioners Meeting 7</i>	Arif Rahman Hakim	Hadir / Present
			Meidyah Indreswari	Hadir / Present
			M. Sholeh Amin	Hadir / Present
			Veronica Colondam	Hadir / Present
			Parman Nataatmadja	Hadir / Present
33	21 Juli 2021 July 21, 2021	Rapat Dewan Komisaris dengan Direktur KLP, EVP PDL dan Divisi TIF <i>Board of Commissioners meeting with KLP Director, EVP PDL and TIF Division</i>	Arif Rahman Hakim	Hadir / Present
			Meidyah Indreswari	Hadir / Present
			M. Sholeh Amin	Hadir / Present
			Veronica Colondam	Hadir / Present
			Parman Nataatmadja	Hadir / Present
34	22 Juli 2021 July 22, 2021	Rapat Dewan Komisaris dengan Direktur KMR dan EVP PDL <i>Meeting of the Board of Commissioners with the Director of KMR and EVP of PDL</i>	Arif Rahman Hakim	Hadir / Present
			Meidyah Indreswari	Hadir / Present
			M. Sholeh Amin	Hadir / Present
			Veronica Colondam	Hadir / Present
			Parman Nataatmadja	Hadir / Present

No	Tanggal Date	Agenda Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Presence
35	23 Juli 2021 July 23, 2021	Rapat Dewan Komisaris dengan Direktur Utama, Direktur KMR dan EVP PDL <i>Board of Commissioners meeting with the President Director, KMR Director and EVP PDL</i>	Arif Rahman Hakim	Hadir / Present
			Meidyah Indreswari	Hadir / Present
			M. Sholeh Amin	Hadir / Present
			Veronica Colondam	Hadir / Present
			Parman Nataatmadja	Hadir / Present
36	29 Juli 2021 July 29, 2021	Rapat Pembahasan Legalisasi Aset PNM dan kerjasama dengan Ditjen PHPT dan PNM <i>PNM Asset Legalization Discussion Meeting and collaboration with the Directorate General of PHPT and PNM</i>	Arif Rahman Hakim	Hadir / Present
			Meidyah Indreswari	Hadir / Present
			M. Sholeh Amin	Hadir / Present
			Veronica Colondam	Hadir / Present
			Parman Nataatmadja	Hadir / Present
37	30 Juli 2021 July 30, 2021	Rapat Program Pemanfaatan Lahan Terbatas <i>Limited Land Use Program Meeting</i>	Arif Rahman Hakim	Hadir / Present
			Meidyah Indreswari	Hadir / Present
			M. Sholeh Amin	Hadir / Present
			Veronica Colondam	Hadir / Present
			Parman Nataatmadja	Hadir / Present
38	3 Agustus 2021 August 3, 2021	Rapat Komisaris Independen dengan Divisi TIF <i>Independent Commissioner Meeting with TIF Divisi Division</i>	Arif Rahman Hakim	Hadir / Present
			Meidyah Indreswari	Hadir / Present
			M. Sholeh Amin	Hadir / Present
			Veronica Colondam	Hadir / Present
			Parman Nataatmadja	Hadir / Present
39	25 Agustus 2021 August 25, 2021	Rapat Dewan Komisaris bulanan 8 <i>Monthly Board of Commissioners meeting 8</i>	Arif Rahman Hakim	Hadir / Present
			Meidyah Indreswari	Hadir / Present
			M. Sholeh Amin	Hadir / Present
			Veronica Colondam	Hadir / Present
			Parman Nataatmadja	Hadir / Present
40	22 September 2021 September 22, 2021	Rapat Dewan Komisaris dengan Direktur Keuangan <i>Meeting of the Board of Commissioners with the Director of Finance</i>	Arif Rahman Hakim	Hadir / Present
			Meidyah Indreswari	Hadir / Present
			M. Sholeh Amin	Hadir / Present
			Veronica Colondam	Hadir / Present
			Parman Nataatmadja	Hadir / Present
41	28 September 2021 September 28, 2021	Rapat Dewan Komisaris bulanan 9 <i>Monthly Board of Commissioners Meeting 9</i>	Arif Rahman Hakim	Hadir / Present
			Meidyah Indreswari	Hadir / Present
			M. Sholeh Amin	Hadir / Present
			Veronica Colondam	Hadir / Present
			Parman Nataatmadja	Hadir / Present
42	25 Oktober 2021 October 25, 2021	Rapat Dewan Komisaris bulanan 10 <i>Monthly Board of Commissioners Meeting 10</i>	Arif Rahman Hakim	Hadir / Present
			Meidyah Indreswari	Hadir / Present
			M. Sholeh Amin	Hadir / Present
			Veronica Colondam	Hadir / Present
			Parman Nataatmadja	Hadir / Present

No	Tanggal Date	Agenda Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Presence
43	9 November 2021 November 9, 2021	Rapat RKAP dengan Dir KLB RKAP meeting with KLB Director	Arif Rahman Hakim	Hadir / Present
			Meidyah Indreswari	Hadir / Present
			M. Sholeh Amin	Hadir / Present
			Veronica Colondam	Hadir / Present
			Parman Nataatmadja	Hadir / Present
44	1 November 2021 November 1, 2021	BRI Group Conference 3 rd quarter	Arif Rahman Hakim	Hadir / Present
			Meidyah Indreswari	Hadir / Present
			M. Sholeh Amin	Hadir / Present
			Veronica Colondam	Hadir / Present
			Parman Nataatmadja	Hadir / Present
45	25 November 2021 November 25, 2021	Video Conference Rapat Dewan Komisaris dan Direksi 11 Video Conference Board of Commissioners and Board of Directors Meeting 11	Arif Rahman Hakim	Hadir / Present
			Meidyah Indreswari	Hadir / Present
			M. Sholeh Amin	Hadir / Present
			Veronica Colondam	Hadir / Present
			Parman Nataatmadja	Hadir / Present
46	25 November 2021 November 25, 2021	Video Conference Rapat Kick-off Audit Crowe Indonesia dan PT PNM Video Conference of Crowe Indonesia and PT PNM . Audit Kick-off Meeting	Arif Rahman Hakim	Hadir / Present
			Meidyah Indreswari	Hadir / Present
			M. Sholeh Amin	Hadir / Present
			Veronica Colondam	Hadir / Present
			Parman Nataatmadja	Hadir / Present
47	29 Desember 2021 December 29, 2021	Video Conference Rapat Dewan Komisaris dan Direksi 12 Video Conference Board of Commissioners and Board of Directors Meeting 12	Arif Rahman Hakim	Hadir / Present
			Meidyah Indreswari	Hadir / Present
			M. Sholeh Amin	Hadir / Present
			Veronica Colondam	Hadir / Present
			Parman Nataatmadja	Hadir / Present

Rapat Gabungan Dewan Komisaris Dengan Direksi

Sepanjang tahun 2021, agenda, tanggal dan peserta Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi adalah sebagai berikut.

The Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Throughout 2021, the agenda, dates and participants of the Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors are as follows.

Tabel Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Table of Joint Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Agendas	Peserta Rapat - Dewan Komisaris Participants the Board of Commissioner	Kehadiran Presence	Peserta Rapat - Direksi Participants the Board of Director	Kehadiran Presence
1	14 Januari 2021 January 14, 2021	Pembahasan Laporan Kinerja Bulan Desember 2020 Discussion on December 2020 Performance Report	Rully Indrawan	Hadir / Present	Arief Mulyadi	Hadir / Present
			Meidyah Indreswari	Hadir / Present	Tjatur H Priyono	Hadir / Present
			M. Sholeh Amin	Hadir / Present	Anton Fahlevie	Hadir / Present
			Veronica Colondam	Hadir / Present	M.Q Gunadi	Hadir / Present
			Parman Nataatmadja	Hadir / Present	Noer Fajrieansyah	Hadir / Present

No	Tanggal Rapat Meeting Dat	Agenda Agendas	Peserta Rapat – Dewan Komisaris Participants the Board of Commissioner	Kehadiran Presence	Peserta Rapat - Direksi Participants the Board of Director	Kehadiran Presence
2	26 Februari 2021 February 26, 2021	Pembahasan Laporan Kinerja Bulan Januari 2021 Discussion on January 2021 Performance Report	Rully Indrawan	Hadir / Present	Arief Mulyadi	Hadir / Present
			Meidyah Indreswari	Hadir / Present	Tjatur H Priyono	Hadir / Present
			M. Sholeh Amin	Hadir / Present	Anton Fahlevie	Hadir / Present
			Veronica Colondam	Hadir / Present	M.Q Gunadi	Hadir / Present
			Parman Nataatmadja	Hadir / Present	Noer Fajrieansyah	Hadir / Present
3	31 Maret 2021 March 31, 2021	Pembahasan Laporan Kinerja Bulan Februari 2021 Discussion on Performance Report for February 2021	Arif Rahman Hakim	Hadir / Present	Arief Mulyadi	Hadir / Present
			Meidyah Indreswari	Hadir / Present	Tjatur H Priyono	Hadir / Present
			M. Sholeh Amin	Hadir / Present	Anton Fahlevie	Hadir / Present
			Veronica Colondam	Hadir / Present	M.Q Gunadi	Hadir / Present
			Parman Nataatmadja	Hadir / Present	Noer Fajrieansyah	Hadir / Present
4	20 April 2021 April 20, 2021	Pembahasan Laporan Kinerja Bulan Maret 2021 Discussion on March 2021 Performance Report	Arif Rahman Hakim	Hadir / Present	Arief Mulyadi	Hadir / Present
			Meidyah Indreswari	Hadir / Present	Tjatur H Priyono	Hadir / Present
			M. Sholeh Amin	Hadir / Present	Anton Fahlevie	Hadir / Present
			Veronica Colondam	Hadir / Present	M.Q Gunadi	Hadir / Present
			Parman Nataatmadja	Hadir / Present	Noer Fajrieansyah	Hadir / Present
5	21 April 2021 April 21, 2021	Pembahasan Laporan Kinerja Bulan Maret 2021 Discussion on March 2021 Performance Report	Arif Rahman Hakim	Hadir / Present	Arief Mulyadi	Hadir / Present
			Meidyah Indreswari	Hadir / Present	Tjatur H Priyono	Hadir / Present
			M. Sholeh Amin	Hadir / Present	Anton Fahlevie	Hadir / Present
			Veronica Colondam	Hadir / Present	M.Q Gunadi	Hadir / Present
			Parman Nataatmadja	Hadir / Present	Noer Fajrieansyah	Hadir / Present
6	27 April 2021 April 27, 2021	Pembahasan Laporan Kinerja Bulan Maret 2021 Discussion on March 2021 Performance Report	Arif Rahman Hakim	Hadir / Present	Arief Mulyadi	Hadir / Present
			Meidyah Indreswari	Hadir / Present	Tjatur H Priyono	Hadir / Present
			M. Sholeh Amin	Hadir / Present	Anton Fahlevie	Hadir / Present
			Veronica Colondam	Hadir / Present	M.Q Gunadi	Hadir / Present
			Parman Nataatmadja	Hadir / Present	Noer Fajrieansyah	Hadir / Present
7	27 Mei 2021 May 27, 2021	Pembahasan Laporan Kinerja Bulan April 2021 Discussion on April 2021 Performance Report	Arif Rahman Hakim	Hadir / Present	Arief Mulyadi	Hadir / Present
			Meidyah Indreswari	Hadir / Present	Tjatur H Priyono	Hadir / Present
			M. Sholeh Amin	Hadir / Present	Anton Fahlevie	Hadir / Present
			Veronica Colondam	Hadir / Present	M.Q Gunadi	Hadir / Present
			Parman Nataatmadja	Hadir / Present	Noer Fajrieansyah	Hadir / Present
8	3 Juni 2021 June 3, 2021	Pembahasan Laporan Kinerja Bulan Mei 2021 Discussion of the Performance Report for the Month of May 2021	Arif Rahman Hakim	Hadir / Present	Arief Mulyadi	Hadir / Present
			Meidyah Indreswari	Hadir / Present	Tjatur H Priyono	Hadir / Present
			M. Sholeh Amin	Hadir / Present	Anton Fahlevie	Hadir / Present
			Veronica Colondam	Hadir / Present	Kindaris	Hadir / Present
			Parman Nataatmadja	Hadir / Present	Sunar Basuki	Hadir / Present
9	25 Juni 2021 June 25, 2021	Pembahasan Laporan Kinerja Bulan Mei 2021 Discussion on May 2021 Performance Report	Arif Rahman Hakim	Hadir / Present	Arief Mulyadi	Hadir / Present
			Meidyah Indreswari	Hadir / Present	Tjatur H Priyono	Hadir / Present
			M. Sholeh Amin	Hadir / Present	Anton Fahlevie	Hadir / Present
			Veronica Colondam	Hadir / Present	Kindaris	Hadir / Present
			Parman Nataatmadja	Hadir / Present	Sunar Basuki	Hadir / Present

No	Tanggal Rapat Meeting Dat	Agenda Agendas	Peserta Rapat – Dewan Komisaris Participants the Board of Commissioner	Kehadiran Presence	Peserta Rapat - Direksi Participants the Board of Director	Kehadiran Presence
10	28 Juli 2021 July 28, 2021	Pembahasan Laporan Kinerja Bulan Juni 2021 Discussion on Performance Report for June 2021	Arif Rahman Hakim	Hadir / Present	Arief Mulyadi	Hadir / Present
			Meidyah Indreswari	Hadir / Present	Tjatur H Priyono	Hadir / Present
			M. Sholeh Amin	Hadir / Present	Anton Fahlevie	Hadir / Present
			Veronica Colondam	Hadir / Present	Kindaris	Hadir / Present
			Parman Nataatmadja	Hadir / Present	Sunar Basuki	Hadir / Present
11	29 Juli 2021 July 29, 2021	Pembahasan Laporan Kinerja Bulan Juni 2021 Discussion on Performance Report for June 2021	Arif Rahman Hakim	Hadir / Present	Arief Mulyadi	Hadir / Present
			Meidyah Indreswari	Hadir / Present	Tjatur H Priyono	Hadir / Present
			M. Sholeh Amin	Hadir / Present	Anton Fahlevie	Hadir / Present
			Veronica Colondam	Hadir / Present	Kindaris	Hadir / Present
			Parman Nataatmadja	Hadir / Present	Sunar Basuki	Hadir / Present
12	19 Agustus 2021 August 19, 2021	Pembahasan Laporan Kinerja Bulan Juli 2021 Discussion on July 2021 Performance Report	Arif Rahman Hakim	Hadir / Present	Arief Mulyadi	Hadir / Present
			Meidyah Indreswari	Hadir / Present	Tjatur H Priyono	Hadir / Present
			M. Sholeh Amin	Hadir / Present	Anton Fahlevie	Hadir / Present
			Veronica Colondam	Hadir / Present	Kindaris	Hadir / Present
			Parman Nataatmadja	Hadir / Present	Sunar Basuki	Hadir / Present
13	24 September 2021 September 24, 2021	Pembahasan Laporan Kinerja Bulan Agustus 2021 Discussion of the August 2021 Performance Report	Arif Rahman Hakim	Hadir / Present	Arief Mulyadi	Hadir / Present
			Meidyah Indreswari	Hadir / Present	Tjatur H Priyono	Hadir / Present
			M. Sholeh Amin	Hadir / Present	Anton Fahlevie	Hadir / Present
			Veronica Colondam	Hadir / Present	Kindaris	Hadir / Present
			Parman Nataatmadja	Hadir / Present	Sunar Basuki	Hadir / Present
14	18 Oktober 2021 October 18, 2021	Pembahasan Laporan Kinerja Bulan September 2021 Discussion of the September 2021 Performance Report	Arif Rahman Hakim	Hadir / Present	Arief Mulyadi	Hadir / Present
			Meidyah Indreswari	Hadir / Present	Tjatur H Priyono	Hadir / Present
			M. Sholeh Amin	Hadir / Present	Anton Fahlevie	Hadir / Present
			Veronica Colondam	Hadir / Present	Kindaris	Hadir / Present
			Parman Nataatmadja	Hadir / Present	Sunar Basuki	Hadir / Present
15	19 Oktober 2021 October 19, 2021	Pembahasan Laporan Kinerja Bulan September 2021 Discussion of the September 2021 Performance Report	Arif Rahman Hakim	Hadir / Present	Arief Mulyadi	Hadir / Present
			Meidyah Indreswari	Hadir / Present	Tjatur H Priyono	Hadir / Present
			M. Sholeh Amin	Hadir / Present	Anton Fahlevie	Hadir / Present
			Veronica Colondam	Hadir / Present	Kindaris	Hadir / Present
			Parman Nataatmadja	Hadir / Present	Sunar Basuki	Hadir / Present
16	25 November 2021 November 25, 2021	Pembahasan Laporan Kinerja Bulan Oktober 2021 Discussion of the October 2021 Performance Report	Arif Rahman Hakim	Hadir / Present	Arief Mulyadi	Hadir / Present
			Meidyah Indreswari	Hadir / Present	Tjatur H Priyono	Hadir / Present
			M. Sholeh Amin	Hadir / Present	Anton Fahlevie	Hadir / Present
			Veronica Colondam	Hadir / Present	Kindaris	Hadir / Present
			Parman Nataatmadja	Hadir / Present	Sunar Basuki	Hadir / Present
17	25 Desember 2021 25 December 2021	Pembahasan Laporan Kinerja Bulan November 2021 Discussion on November 2021 Performance Report	Arif Rahman Hakim	Hadir / Present	Arief Mulyadi	Hadir / Present
			Meidyah Indreswari	Hadir / Present	Tjatur H Priyono	Hadir / Present
			M. Sholeh Amin	Hadir / Present	Anton Fahlevie	Hadir / Present
			Veronica Colondam	Hadir / Present	Kindaris	Hadir / Present
			Parman Nataatmadja	Hadir / Present	Sunar Basuki	Hadir / Present

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

The Frequency and Attendance of the Board of Commissioners

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Table of Frequency and Attendance of Board of Commissioners' Meetings

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Dewan Komisaris Meeting of Board Commissioner			Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Joint Meeting of Board of Commissioner with Board of Director			RUPS GMS		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran Total and Attendance Percentage			Jumlah dan Persentase Kehadiran Total and Attendance Percentage			Jumlah dan Persentase Kehadiran Total and Attendance Percentage		
		Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Number of Presence	Persentase Percentage	Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Number of Presence	Persentase Percentage	Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Number of Presence	Persentase Percentage
Rully Indrawan*	Komisaris Utama President Commissioner	8	8	100%	2	2	100%	1	1	100%
Arif Rahman Hakim**	Komisaris Utama President Commissioner	39	39	100%	15	15	100%	1	1	100%
Meidyah Indreswari	Komisaris Independen Independent Commissioner	47	47	100%	15	15	100%	2	2	100%
M. Sholeh Amin	Komisaris Independen Independent Commissioner	47	47	100%	15	15	100%	2	2	100%
Veronica Colondam	Komisaris Independen Independent Commissioner	47	47	100%	15	15	100%	2	2	100%
Parman Nataatmadja	Komisaris Commissioner	47	47	100%	15	15	100%	2	2	100%

* Berhenti menjabat sejak tanggal 26 Februari 2021. / Stopped serving since February 26, 2021.

**Mulai menjabat sejak tanggal 26 Februari 2021. / Started in office since February 26, 2021.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris

Peningkatan kompetensi dinilai penting agar Dewan Komisaris dapat selalu memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari *core business* Perusahaan, mengantisipasi masalah yang timbul di kemudian hari bagi keberlangsungan dan kemajuan Perusahaan. Program peningkatan kapabilitas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja Dewan Komisaris.

Training and/or Competency Development of Members of the Board of Commissioners

Increasing competence was considered important so that the Board of Commissioners could always update information about the latest developments of the Company's *core business*, anticipating problems that arise in the future for the sustainability and progress of the Company. The capability improvement program was implemented in order to improve the effectiveness of the performance of the Board of Commissioners.

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pengembangan Kompetensi/ Pelatihan Types of Training and Competency Development/ Training Materials	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Implementation Time and Place	Penyelenggara Organizer
Rully Indrawan*	Komisaris Utama President Commissioner	-	-	-
Arif Rahman Hakim**	Komisaris Utama President Commissioner	Intensive Program In Small and Medium Enterprise Policy and Practice	20 November 2021 November 20, 2021	Northern Illinois University
		Finance For Non Finance	24 Juli 2021 July 24, 2021	Ganesha Learning Center
Meidyah Indreswari	Komisaris Independen Independent Commissioner	Special Directorship Program	26 – 28 Oktober 2021 (virtual zoom) October 26 – 28, 2021 (virtual zoom)	Indonesian Institute for Corporate Directorship
		Anticorruption Leaders Training	3 November 2021 (Hotel JS Luwansa, Jakarta) November 3, 2021 (Hotel JS Luwansa, Jakarta)	Visi Integritas Law Office Firma
M. Sholeh Amin	Komisaris Independen Independent Commissioner	Special Directorship Program	26 – 28 Oktober 2021 (virtual zoom) October 26 – 28, 2021 (virtual zoom)	Indonesian Institute for Corporate Directorship
Veronica Colondam	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-	-
Parman Nataatmadja	Komisaris Commissioner	Certified Risk Governance Professional (CRGP) Level IV	28 – 30 Juni 2021 (virtual zoom) June 28 – 30, 2021 (virtual zoom)	RAP Sertifikasi
		Certified Risk Profesional (CRP)	27 – 28 November 2021 dan 5 Desember 2021 (virtual zoom) November 27 – 28, 2021 and December 5, 2021 (virtual zoom)	PT Utama Hanrizz Indonesia

* Berhenti menjabat sejak tanggal 26 Februari 2021. / Stopped serving since February 26, 2021.

**Mulai menjabat sejak tanggal 26 Februari 2021. / Started in office since February 26, 2021

Program Orientasi bagi Komisaris Baru

Program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diberikan oleh Perseroan karena latar belakang anggota Dewan Komisaris yang merupakan representasi dari beberapa Pemegang Saham. Tujuan program pengenalan adalah agar para anggota Dewan Komisaris dapat saling mengenal dan menjalin kerjasama sebagai satu tim yang solid, komprehensif dan efektif. Program pengenalan Perseroan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat, wajib diberikan program pengenalan mengenai kondisi Perseroan secara umum.
2. Penanggung jawab program pengenalan adalah Sekretaris Perusahaan atau pejabat yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.
3. Program pengenalan meliputi:
 - a. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* oleh Perseroan.
 - b. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan

Orientation Program For New Commissioners

The introduction program for new members of the Board of Commissioners was provided by the Company because of the background of members of the Board of Commissioners who represented several shareholders. The aim of the familiarization program was that the members of the Board of Commissioners could get to know each other and forge cooperation as a solid, comprehensive and effective team. The Company introduction program includes the following:

1. For newly appointed members of the Board of Commissioners, they had to be given an introduction program regarding the condition of the Company in general.
2. Person In Charge of the induction program was the Corporate Secretary or an officer who functioned as the Corporate Secretary.
3. The introduction program includes:
 - a. Implementation of the principles of *Good Corporate Governance* by the Company.
 - b. An overview of the Company in relation to the objectives, nature and scope of activities, financial

dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, risiko, pengendalian internal dan masalah-masalah strategisnya lainnya.

- c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta Komite Audit.
 - d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal lain yang tidak diperbolehkan.
4. Program pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke fasilitas Perseroan, kunjungan ke kantor cabang, pengkajian dokumen Perseroan atau program lainnya yang dianggap sesuai Perseroan atas program tersebut dilaksanakan.

Pelaksanaan program orientasi bagi Dewan Komisaris Baru dilaksanakan melalui rapat Dewan Komisaris pada tanggal 5 Mei 2021.

Tata Cara dan Frekuensi Pemberian Nasihat

Untuk memberikan nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris mengadakan rapat rutin bersama Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali dalam setahun atau minimal sebulan sekali. Namun demikian, rapat tambahan dapat dilakukan kapan pun untuk membahas berbagai isu yang lebih spesifik.

Rekomendasi dan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Rekomendasi yang diberikan Dewan Komisaris antara lain mencakup topik-topik berikut:

1. Perumusan perubahan model bisnis PNM Mekaar dan UlaMM.
2. Penerapan Manajemen Risiko dalam empat bidang pokok, yaitu strategi, keuangan, operasi, dan kepatuhan Perusahaan.
3. Perubahan Struktur Organisasi.
4. Tata Kelola Perusahaan khususnya evaluasi atas hasil penilaian GCG dan tindak lanjut atas rekomendasi.
5. Efektivitas pengendalian internal dan kegiatan Satuan Pengawas Internal (SPI) PNM.
6. Efektivitas kegiatan operasi cabang PNM Mekaar dan UlaMM.
7. Progres penerapan sistem operasi berbasis TI.
8. Optimalisasi peran unit Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU).

Selain memberikan rekomendasi Dewan Komisaris juga telah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat pada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan

and operational performance, strategy, short and long term business plans, risks, internal control and other strategic issues.

- c. Information relating to delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies as well as the Audit Committee.
 - d. Information regarding the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors as well as other things that are not allowed.
4. The familiarization program might take in the form of presentations, meetings, visits to Company facilities, visits to branch offices, review of Company documents or other programs deemed appropriate by the Company for the program being implemented.

The orientation program for the New Board of Commissioners was carried out through the Board of Commissioners meeting on May 5, 2021.

Procedures and Frequency of Providing Advice

To provide advice to the Board of Directors, the Board of Commissioners hold regular meetings with the Board of Directors as much as 12 (twelve) times a year or at a minimum once a month. However, additional meetings can be done anytime to address more specific issues.

Recommendations and Implementation of Duties of the Board of Commissioners

The recommendations given include the following topics:

1. Formulation of changes to the Mekaar and PNM business model UlaMM.
2. Implementation of risk management in four areas principal, namely strategy, finance, operations, and compliance Company.
3. Changes in Organizational Structure.
4. Corporate Governance, particularly evaluation of results GCG assessment and follow-up on recommendations.
5. Effectiveness of internal controls and unit activities PNM Internal Supervisor (SPI).
6. The effectiveness of PNM Mekaar and branch operations UlaMM.
7. Progress of implementing an IT-based operating system.
8. Optimizing the role of the Business Capacity Development unit (PKU).

In addition to providing recommendations, the Board of Commissioners has also supervised management policies, general management of both the company and the company's business carried out by the Board of Directors as well as providing advice to the Board of Directors including monitoring the implementation of the Company's Long Term Plan (RJPP), Work Plan and Company Budget (RKAP) as well as the provisions of the Articles of Association and the resolutions of the GMS as well as the applicable laws and regulations for the interests of the company in accordance

tujuan perseroan. Pernyataan tersebut diselaraskan dengan data sebagai berikut:

1. Rapat RUPS RKAP Dewan Komisaris bersama Direksi yang dilakukan sebanyak 5 (lima) kali pada Tahun 2020.
2. Rapat Internal Dewan Komisaris yang dilakukan sebanyak 16 (enam belas) kali pada Tahun 2020.
3. Kunjungan Dewan Komisaris ke Cabang UlaMM Mekaar pada tahun 2020 sebanyak 50 (lima puluh) kali total kunjungan setiap anggota Dewan Komisaris sesuai dengan M-060/PNM-SPR/III/21.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui evaluasi yang dilakukan Pemegang Saham dalam RUPS berdasarkan kinerjanya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan rencana kerja tahunan Dewan Komisaris yang telah disampaikan kepada Dewan Komisaris sebelumnya.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dinilai berdasarkan pemenuhan tugas dan tanggung jawab umum serta tanggung jawab khusus sesuai dengan posisi jabatannya. Proses penilaian ini dilaksanakan dalam RUPS.

Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

Key Performance Indicator (KPI) Dewan Komisaris terdiri atas:

1. Aspek Perencanaan
2. Aspek Pengawasan dan Nasihat
3. Aspek Pelaporan
4. Aspek Dinamis

Pihak yang Melakukan Assessment

Dewan Komisaris diangkat dan bertanggung jawab kepada RUPS. Oleh sebab itu, penilaian atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

No	Aspek dan Parameter Aspects and Parameters	Periode Period	Satuan Output Output Units	Bobot Weight (%)	Rencana Output Output Plan	Realisasi Realization	Nilai Score
Aspek Perencanaan Planning Aspects							
1	Menyusun RKA serta KPI Dewan Komisaris 2021 Prepare RKA and KPI for the Board of Commissioners 2021	Tahunan Annual	Dokumen Document	10	1	1	10
Sub Total I				10			10

with the aims and objectives of the company. The statement is harmonized with the following data:

1. The RKAP Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors was held 5 (five) times in 2020.
2. Internal Meetings of the Board of Commissioners which were held 16 (sixteen) times in 2020.
3. The visit of the Board of Commissioners to the UlaMM Mekaar Branch in 2020 was 50 (fifty) times the total visits of each member of the Board of Commissioners in accordance with M-060/PNM-SPR/III/21.

Assessment of the Board of Commissioners and Board of Directors Performance

Assessment of the Board of Commissioners Performance

The Board of Commissioners' Performance Assessment was carried out through an evaluation conducted by the Shareholders at the GMS based on their performance in carrying out their duties and responsibilities in accordance with the Board of Commissioners' annual work plan which was submitted to the previous Board of Commissioners.

Board of Commissioners Performance Appraisal Implementation Procedure

The Board of Commissioners is assessed based on the fulfillment of duties and general responsibilities as well as specific responsibilities accordingly with the position of office. This assessment process is carried out in the GMS.

Board of Commissioners Performance Evaluation Criteria

Key Performance Indicator (KPI) for the Board of Commissioners consists of:

1. Planning aspects
2. Aspects of Supervision and Advice
3. Reporting Aspects
4. Dynamic Aspects

Parties Conducting the Assessment

The Board of Commissioners was appointed and responsible to the GMS. Therefore, an assessment of the performance of the Board of Commissioners was conducted by the GMS.

Results of the Board of Commissioners Performance Assessment

No	Aspek dan Parameter Aspects and Parameters	Periode Period	Satuan Output Output Units	Bobot Weight (%)	Rencana Output Output Plan	Realisasi Realization	Nilai Score
Aspek Pengawasan dan Nasihat <i>Supervision and Advice Aspects</i>							
1	Memberikan tanggapan/rekomendasi kepada pemegang saham terhadap: <i>Provide feedback/recommendations to shareholders on:</i>						
	a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan <i>Company Work Plan and Budget</i>	Tahunan <i>Annual</i>	Surat <i>Letter</i>	5	1	1	5
	b. Laporan Tahunan <i>Annual report</i>	Tahunan <i>Annual</i>	Surat <i>Letter</i>	5	1	1	5
	c. Analisis kinerja triwulanan <i>Quarterly performance analysis</i>	Triwulanan <i>Quarterly</i>	Surat <i>Letter</i>	5	3	3	5
2	Memberi nasihat kepada Direksi sesuai bidang tugas Dewan Komisaris <i>Provide advice to the Board of Directors in accordance with the duties of the Board of Commissioners</i>	Setahun <i>A year</i>	Surat <i>Letter</i>	12	12	19	19
3	Rapat Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners Meeting</i>	Bulanan <i>Monthly</i>	Kali <i>Times</i>	10	12	55	45.83
	a. Jumlah rapat <i>a. Number of meetings</i>						
	b. Kehadiran rapat <i>Meeting attendance</i>	Bulanan <i>Monthly</i>	%	5	100	100	5
	c. Penyelesaian risalah rapat <i>Completion of minutes of meeting</i>	Bulanan <i>Monthly</i>	Risalah <i>Minutes</i>	5	12	55	22.92
4	Rapat Komite Dewan Komisaris dengan Unit Terkait <i>Board of Commissioners Committee Meetings with Related Units</i>	Setahun <i>A year</i>	Risalah <i>Minutes</i>	5	12	15	6.25
5	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris <i>Working Visit of the Board of Commissioners</i>	Setahun <i>A year</i>	Kunjungan <i>Visit</i>	8	8	39	39
6	Realisasi rencana kerja Komite Dewan Komisaris <i>Realization of the work plan of the Committee of the Board of Commissioners</i>	Setahun <i>A year</i>	%	3	100	100	3
Sub Total II				63			156
Aspek Pelaporan <i>Reporting Aspects</i>							
1	Laporan realisasi pelaksanaan KPI Dewan Komisaris <i>Report on the realization of the implementation of the Board of Commissioners' KPIs</i>	Triwulanan <i>Quarterly</i>	Laporan <i>Report</i>	5	3	4	6.67
2	Laporan pengawasan Dewan Komisaris Tahunan <i>Annual Board of Commissioners supervisory report</i>	Tahunan <i>Annual</i>	Laporan <i>Report</i>	10	1	0	0
Sub Total III				15			6.67
Aspek Dinamis <i>Dynamic Aspects</i>							
1	Pengusulan Eksternal Auditor kepada Pemegang Saham <i>External Auditor's Proposal to Shareholders</i>	Tahunan <i>Annual</i>	Surat <i>Letter</i>	5	1	1	5
2	Peningkatan Kompetensi melalui seminar, <i>workshop</i> , dll <i>Competency improvement through seminars, workshops, etc</i>	Tahunan <i>Annual</i>	Kali <i>Times</i>	4	4	4	8
3	Hasil <i>assessment</i> GCG Dewan Komisaris (self <i>assessment</i> /Konsultan Independen) <i>Results of the Board of Commissioners' GCG assessment (self-assessment/Independent Consultant)</i>	Tahunan <i>Annual</i>	Skor <i>Score</i>	3	30	0	0
Sub Total IV				12			13
Total I, II, III, IV				100			185.67

Penilaian Kinerja Direksi

Secara umum, kinerja Direksi ditentukan berdasarkan tugas dan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan maupun amanat Pemegang Saham. Kriteria evaluasi formal disampaikan secara terbuka kepada anggota Direksi yang bersangkutan sejak tanggal pengangkatannya.

Prosedur Pelaksanaan Assessment Kinerja Direksi

Kinerja Direksi dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS secara kolegial berdasarkan kinerja perusahaan yang dituangkan dalam persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan oleh RUPS. Pada setiap awal tahun, Direksi wajib menyusun *Key Performance Indicator* (KPI) yang merupakan penjabaran dari RKAP yang disahkan RUPS dan dituangkan dalam kontrak manajemen. Hasil kinerja Direksi secara kolegial dilaporkan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS di dalam Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris. Kinerja Direksi dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS secara kolegial berdasarkan kinerja perusahaan yang dituangkan dalam persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan oleh RUPS.

Kriteria Evaluasi Kinerja Direksi

Kriteria evaluasi kinerja Direksi yang dituangkan dalam KPI yaitu:

1. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia.
2. Inovasi Model Bisnis.
3. Kepemimpinan Teknologi.
4. Pengembangan Investasi.
5. Pengembangan Talenta.

Pihak yang Melakukan Assessment

Kinerja Direksi dan masing-masing anggota Direksi akan dievaluasi oleh Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Pemegang Saham dalam RUPS.

Hasil Penilaian Kinerja Direksi

Pencapaian KPI Direksi pada tahun 2021 yaitu 104,64 dengan rincian sebagai berikut.

No	KPI	Bobot Weight	Nilai Score	KPIs
1	Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia.	50	50.64	<i>Economic and Social Value for Indonesia.</i>
2	Inovasi Model Bisnis	18	18.69	<i>Business Model Innovation</i>
3	Kepemimpinan Teknologi	10	10	<i>Technology Leadership</i>
4	Pengembangan Investasi	12	10.80	<i>Investment Development</i>
5	Pengembangan Talenta	10	10.50	<i>Talent Development</i>
Total		100	104.64	Total

Performance Assessment of the Board of Directors

In general, the performance of the Board of Directors was determined based on the duties and obligations stated in the applicable laws and regulations and the Articles of Association of the Company as well as the mandate of the Shareholders. The formal evaluation criteria were submitted openly to the respective members of the Board of Directors from the date of their appointment.

Board of Directors Performance Assessment Procedure

The performance of the Board of Directors is evaluated by the Shareholders in the GMS collegially based on the company's performance as outlined in the approval and ratification of the Company's Annual Report by the GMS. At the beginning of each year, the Board of Directors is required to prepare a Key Performance Indicator (KPI), which is a translation of the RKAP that is approved by the GMS and set forth in a management contract. The Board of Commissioners' performance results are reported collegially by the Board of Commissioners to the GMS in the Board of Commissioners' Supervisory Report. The performance of the Board of Directors is evaluated by the Shareholders in the GMS collegially based on the company's performance as outlined in the approval and ratification of the Company's Annual Report by the GMS.

Directors Performance Evaluation Criteria

The criteria for evaluating the performance of the Board of Directors as outlined in the KPI are::

1. *Economic and Social Value for Indonesia.*
2. *Usiness Model Innovation.*
3. *Technology Leadership.*
4. *Investment Development.*
5. *Talent Development.*

Parties Performing Assessment

The performance of the Board of Directors and each member of the Board of Directors would be evaluated by the Board of Commissioners and submitted to the Shareholders at the GMS.

Results of the Performance Appraisal of the Board of Directors

The Board of Directors' KPI achievement in 2021 is 104.64 with the following details.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris dan Dasar Penilaiannya

Dalam rangka meningkatkan peran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris telah membentuk 2 (dua) komite yaitu:

1. Komite Audit
2. Komite Nominasi dan Remunerasi

Prosedur penilaian kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris dilakukan oleh Dewan Komisaris secara periodik (tahunan) dengan kriteria penilaian yaitu pelaksanaan rapat Komite serta kunjungan kerja yang telah dilakukan.

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap Perseroan, terutama dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, penunjukan Akuntan, pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal, pelaksanaan manajemen, proses akuntansi dan pelaporan keuangan. Sepanjang tahun 2021, Komite Audit telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Komite Audit menjalankan tugasnya yang antara lain:

1. Mengikuti Rapat Komite Audit dengan Dewan Komisaris.
2. Melaksanakan Rapat koordinasi KA dengan SPI.
3. Melaksanakan rapat Koordinasi dengan Divisi, Anak Perusahaan, Unit Bisnis Lainnya.
4. Melakukan koordinasi terkait dengan kegiatan audit oleh KAP.
5. Melakukan kunjungan wilayah.
6. Melakukan pembahasan draft RKAP Tahun 2021.

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan bidang yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi. Sepanjang tahun 2021, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Komite Remunerasi dan Nominasi telah menjalankan tugasnya yang antara lain:

1. Melakukan *assessment* Direksi dan BOD -1.
2. Membuat piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.
3. Penilaian calon Komisaris dan Direksi Perseroan.

Mekanisme Pemberhentian dan Pengunduran Diri Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan RUPS dengan menyebutkan alasannya, apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan:

1. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Performance Appraisal of Committees Under the Board of Directors and the Basis for Its Assessment

In order to increase the role of the Board of Commissioners in carrying out its supervisory function, the Board of Commissioners has formed 2 (two) committees, namely:

1. *Audit Committee*
2. *Nomination and Remuneration Committee*

The procedure for evaluating the performance of the Committees under the Board of Commissioners is carried out by the Board of Commissioners periodically (annually) with the assessment criteria, namely the implementation of Committee meetings and work visits that have been carried out.

The Audit Committee has duties and responsibilities to assist the Board of Commissioners in supervising the Company, especially in carrying out its duties and supervisory functions on matters related to financial information, compliance with laws and regulations, the appointment of accountants, implementation of audits by internal auditors, implementation management, accounting processes, and financial reporting. Throughout 2021, the Audit Committee has carried out its duties and responsibilities well. The Audit Committee carries out its duties which include:

1. *Participated in the Audit Committee Meeting with the Board of Commissioners.*
2. *Conducting a coordination meeting between KA and SPI.*
3. *Conducting Coordination meetings with Divisions, Subsidiaries, Other Business Units.*
4. *Coordinate related to audit activities by KAP.*
5. *Conduct regional visits.*
6. *Discussing the 2021 RKAP draft.*

The Nomination and Remuneration Committee has duties and responsibilities to assist the Board of Commissioners in carrying out areas related to remuneration and nomination. Throughout 2021, the Nomination and Remuneration Committee has carried out its duties and responsibilities well. The Remuneration and Nomination Committee has carried out its duties which include:

1. *Conduct an assessment of the Board of Directors and BOD -1.*
2. *Prepare a charter for the Nomination and Remuneration Committee.*
3. *Assessment of candidates for Commissioners and Directors of the Company.*

Mechanism of Termination And Dismissal of the Board of Commissioners

Members of the Board of Commissioners may be dismissed at any time based on the GMS by stating the reasons, if the member of the Board of Commissioners is concerned:

1. *Cannot carry out their duties properly.*

2. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan.
3. Terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan.
4. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
5. Mengundurkan diri.

Selain itu, Dewan Komisaris dapat diberhentikan berdasarkan alasan lainnya, misalnya tetapi tidak terbatas pada:

1. Dalam rangka restrukturisasi perusahaan.
2. Memasuki masa usia pensiun dari Aparatur Sipil Negara, bagi Dewan Komisaris yang merupakan penugasan dari Kementerian BUMN.

Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah merupakan salah satu organ Perseroan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta melakukan pengawasan atas kegiatan unit usaha syariah berdasarkan prinsip syariah.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan tanggung jawab DPS yang telah diatur dalam *board manual* adalah sebagai berikut:

1. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta melakukan pengawasan atas kegiatan Unit Usaha Syariah berdasarkan prinsip syariah.
2. Membina akhlak karyawan pada Unit Usaha Syariah berdasarkan pembinaan keislaman.
3. Bersama dengan Direksi dan Dewan Komisaris secara terus menerus mengawal dan menjaga penerapan nilai-nilai islam dalam setiap aktivitas Unit Usaha Syariah.
4. Dalam hal DPS menilai terdapat kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang terkait dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, DPS wajib meminta penjelasan kepada anggota Direksi atas kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.
5. Jika Direksi menolak hasil penilaian DPS, maka DPS wajib melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Dewan Komisaris dan ditembuskan kepada Direksi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penjelasan anggota Direksi diterima oleh DPS.
6. Jika Direksi menerima hasil penilaian DPS, maka DPS meminta Direksi untuk melakukan perbaikan terhadap kebijakan atau tindakan anggota Direksi tersebut agar sesuai dengan prinsip syariah.
7. Dalam hal anggota Direksi tidak melakukan perbaikan terhadap kebijakan atau tindakan, DPS wajib segera melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Dewan Komisaris dan ditembuskan kepada Direksi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui anggota Direksi tidak melakukan upaya perbaikan.

2. Violating the provisions of the Articles of Association and/or laws and regulations.
3. Engage in actions that are detrimental to the company.
4. Is declared guilty by a court decision that has permanent legal force.
5. Resign.

In addition, the Board of Commissioners may be dismissed for other reasons, for example but not limited to:

1. *In the context of corporate restructuring.*
2. *Entering the retirement age of the State Civil Apparatus, for the Board of Commissioners which is an assignment from the Ministry of SOEs.*

Sharia Supervisory Board

The Sharia Supervisory Board is one of the Company's organs in charge of providing advice and suggestions to the Board of Directors as well as supervising the activities of sharia business units based on sharia principles.

Duties and Responsibilities of the Sharia Supervisory Board

The duties and responsibilities of Sharia Supervisory Board which have been set out in the board manual are as follows:

1. *Providing advice to the Directors and supervise the activities of Sharia Business Units based on Sharia Principles.*
2. *Fostering employee morals in the Sharia Business Unit based on Islamic guidance.*
3. *Together with the Directors and Board of Commissioners continuously overseeing and maintaining the application of Islamic values in every Sharia Business Unit activity.*
4. *In the event that SSB considered that there were policies or actions of members of the Board of Directors related to matters that were not in accordance with sharia principles, SSB was required to request an explanation from the members of the Board of Directors regarding policies or actions of members of the Board of Directors that were not in accordance with sharia principles.*
5. *If the Board of Directors rejected the results of the SSB assessment, SSB had to report completely and comprehensively to the Board of Commissioners and a copy to the Board of Directors no later than 7 (seven) working days after the explanation of the members of the Board of Directors was received by SSB.*
6. *If the Board of Directors accepted the results of the SSB assessment, SSB asked the Board of Directors to make corrections to the policies or actions of the members of the Board of Directors so that they were in accordance with sharia principles.*
7. *In the event that a member of the Board of Directors did not make improvements to policies or actions, SSB had to immediately report completely and comprehensively to the Board of Commissioners and a copy to the Board of Directors within 7 (seven) working days after it was found that the members of the Board of Directors had not made any corrective efforts.*

8. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.
9. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Keuangan Lembaga Syariah melalui media majelis taklim, khutbah, pengajian, maupun dialog dengan tokoh agama dan masyarakat.
10. Mengikuti fatwa-fatwa DSN MUI sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan memberikan tembusan kepada Perseroan.
11. Mengajukan usul-usul pengembangan produk usaha syariah demi tercapainya kemajuan unit reasuransi syariah.

Wewenang Dewan Pengawas Syariah

DPS memiliki wewenang untuk:

1. Melakukan pengawasan, baik yang terkait dengan produk, operasional, maupun kebijakan agar senantiasa sesuai dengan prinsip syariah.
2. Memberikan nasihat, saran, atau opini syariah kepada manajemen.
3. Memberikan teguran, peringatan, ataupun rekomendasi sanksi kepada perusahaan melalui Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan memberikan tembusan kepada DSN MUI, bilamana terjadi penyimpangan dari prinsip syariah.
4. Berhak menggunakan bantuan dari anggota Komite, karyawan dan tenaga ahli profesional Perseroan dengan terlebih dahulu mengajukan secara tertulis kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
5. Berhak mendapatkan akses informasi dan data yang terkait dengan operasional perusahaan di bidang syariah secara lengkap dan tepat waktu.
6. Menerima laporan tertulis secara berkala yang terkait dengan operasional Perseroan dibidang syariah.

Masa Jabatan Dewan Pengawas Syariah

DPS diangkat dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Persyaratan Anggota Dewan Pengawas Syariah

Persyaratan diangkatnya seseorang menjadi anggota DPS harus memenuhi kriteria antara lain sebagai berikut:

1. Integritas, paling kurang mencakup:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
 - c. Memiliki komitmen untuk mematuhi dan melaksanakan dengan penuh profesionalisme piagam DPS, ketentuan industri keuangan syariah serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
 - d. Memiliki komitmen terhadap pengembangan industri keuangan syariah yang sehat dan tangguh.
 - e. Tidak termasuk dalam daftar kepatutan dan kelayakan (daftar tidak lulus) sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh OJK.

8. *Formulating problems that required discussion of DSN.*
9. *Conducting socialization to the public about Sharia Financial Institutions through the media majelis taklim, sermons, recitation, as well as dialogue with religious and community leaders.*
10. *Following the DSN MUI fatwas at least 1 (one) time in 1 (one) year and provided a copy to the Company.*
11. *Proposing proposals for the development of sharia business products in order to achieve the progress of the Sharia Reinsurance Unit.*

Authority of the Sharia Supervisory Board

DPS has the authority to:

1. *Performing supervision, whether related to products, operations, or policies so that it was always in accordance with sharia principles.*
2. *Providing sharia advice, suggestions, or opinions to management.*
3. *Providing a warning, warning, or recommendation for sanctions to the company through the Board of Directors and/or the Board of Commissioners and providing a copy to DSN MUI, if there is a deviation from sharia principles.*
4. *Having the right to use the assistance of Committee members, employees and professional experts of the Company by submitting in writing to the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.*
5. *Having the right to complete and timely access to information and data related to company operations in the field of sharia.*
6. *Receiving regular written reports related to the Company's operations in the field of sharia.*

Tenure of the Sharia Supervisory Board

SSB was appointed with a term of office of 4 (four) years without prejudice to the right of the GMS to dismiss at any time.

Requirements for Sharia Supervisory Board Members

The requirements for the appointment of a person to become a member of SSB had to meet the following criteria:

1. *Integrity, at least includes:*
 - a. *Having good character and morals.*
 - b. *Capable of taking legal actions.*
 - c. *Having a commitment to comply with and implement with full professionalism the DPS charter, the provisions of the Islamic financial industry as well as other applicable laws and regulations.*
 - d. *Committed to the development of a healthy and resilient Islamic finance industry.*
 - e. *Not included in the fit and proper test list (failing list) as stipulated in the provisions concerning the fit and proper test stipulated by the OJK.*

- f. Tidak pernah melakukan *fraud* (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) dibidang perbankan, keuangan dan bidang usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan (yang dibuktikan dengan surat pernyataan pribadi).
2. Kompetensi, paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidang pembiayaan dan/atau keuangan secara umum. Dalam rangka meningkatkan kompetensinya, anggota DPS harus bersedia secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan termasuk mengikuti program orientasi (*induction program*) yang bertujuan untuk memberikan masukan kepada yang bersangkutan agar memperoleh pemahaman tentang transaksi keuangan syariah pada instansi keuangan non bank dalam waktu relatif singkat sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.
 3. Reputasi, paling kurang dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan dan selama menjabat:
 - a. Tidak termasuk dalam daftar hitam (*black list*) dan daftar kredit macet OJK.
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - c. Tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota pengurus suatu badan usaha yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan usaha dinyatakan pailit.
 - d. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
 - e. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan.
 - Pertanggungjawabannya pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada RUPS.
 - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan Tahunan dan/atau Laporan Keuangan kepada OJK.
- f. *Never committed fraud (fraud, embezzlement and/or cheating) in banking, finance and other business fields, never been convicted of having committed a criminal act (as evidenced by a personal statement).*
2. *Competence, at least have knowledge and experience in the field of sharia mu'amalah and knowledge in the field of financing and/or finance in general. In order to improve their competence, SSB members had to be willing to continuously go through education and training including taking part in an induction program that aimed to provide input to those concerned in order to gain an understanding of sharia financial transactions in non-bank financial institutions in a relatively short time so that they could carry out its duties effectively and efficiently.*
 3. *Reputation, at least within the last 5 (five) years before being nominated and during the tenure:*
 - a. *Not included in the black list and the list of bad debts of the FSA.*
 - b. *Never been declared bankrupt.*
 - c. *Never been a shareholder, member of the Board of Commissioners, or member of the Board of Directors of a company and/or member of the management of a business entity found guilty of causing a company and/ or business entity to be declared bankrupt.*
 - d. *Never been convicted of committing a crime that caused losses to the State's finances and/or was related to the financial sector.*
 - e. *Never been a member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners who during their tenure:*
 - *Never held an Annual GMS.*
 - *The accountability was never accepted by the GMS or never gave accountability as a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners to the GMS.*
 - *Has caused a company that obtained a license, approval or registration from OJK to fail to fulfill its obligation to submit an Annual Report and/or Financial Report to OJK.*

Proses Nominasi dan Pemilihan Dewan Pengawas Syariah

Proses nominasi dan pemilihan DPS adalah sebagai berikut:

1. Direksi mengusulkan calon anggota DPS kepada DSN MUI.
2. DSN MUI memberikan rekomendasi atau tidak memberikan rekomendasi atas usulan penetapan calon anggota DPS yang disampaikan oleh Direksi.
3. Direksi meminta rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas usulan calon anggota DPS yang akan disampaikan ke RUPS.

The Process of Nomination and Election of the Sharia Supervisory Board

The nomination and selection process for DPS is as follows:

1. The Board of Directors proposes candidates for DPS members to DSN MUI.
2. DSN MUI provides recommendations or does not provide recommendations for the proposed determination of candidates for members of DPS submitted by the Board of Directors.
3. The Board of Directors requested recommendations from the Board of Commissioners on proposals for SSB candidates to be submitted to the GMS.

4. Dewan Komisaris memberikan rekomendasi atas usulan penetapan calon anggota DPS yang disampaikan oleh Direksi.
5. Direksi menyampaikan usulan pengangkatan calon anggota DPS kepada RUPS.
6. RUPS mengangkat dan memberhentikan calon anggota DPS berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Direksi.
7. DPS wajib memenuhi ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan oleh OJK.
8. Calon anggota DPS, yang belum memenuhi ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan oleh OJK, dilarang melakukan tindakan, tugas, dan fungsi sebagai DPS walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS.

Board Manual Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah telah memiliki *board manual* yang bertujuan menjelaskan pola hubungan yang baku antara Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi dalam melaksanakan tugas, agar tercipta pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan, efektif dan efisien dengan menjunjung tinggi integritas dan kejujuran dalam menjalankan kegiatan bisnis Perseroan. Pemutakhiran terakhir atas *board manual* dilakukan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor SK-026.A/PNM-DIR/IX/19 tentang *Board Manual* PT Permodalan Nasional Madani (Persero) yang disahkan tanggal 6 September 2019.

Board manual tersebut mengatur berbagai aspek mengenai Dewan Pengawas Syariah antara lain mencakup ketentuan mengenai:

- A. Fungsi Dewan Pengawas Syariah
- B. Persyaratan, Komposisi dan Masa Jabatan Dewan Pengawas Syariah
- C. Tugas dan Kewajiban
- D. Wewenang
- E. Rapat Dewan Pengawas Syariah
- F. Remunerasi
- G. Etika Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah

Jumlah anggota DPS minimal 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang. DPS dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk dari salah satu anggota DPS.

4. The Board of Commissioners provided recommendations on the recommendation to determine SSB candidate members submitted by the Board of Directors.
5. The Board of Directors submitted a proposal for the appointment of SSB candidates to the GMS.
6. The GMS appointed and dismissed prospective members of SSB based on the proposals submitted by the Board of Directors.
7. SSB had to comply with the fit and proper test requirements by OJK.
8. Candidates for SSB members, who had not met the requirements of the fit and proper test by the FSA, were prohibited from taking action, duties, and functions as SSB even though they received approval and been appointed by the GMS.

Sharia Supervisory Board Manual

The Sharia Supervisory Board had a board manual which aimed to explain the standard pattern of relationships between the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board and the Board of Directors in carrying out their duties, in order to create professional, transparent, effective and efficient management of the Company by upholding integrity and honesty in carrying out business activities of the Company. The latest updating of the board manual was carried out through the Decree of the Board of Directors Number SK-026.A/PNM-DIR/IX/19 concerning the Board Manual of PT Permodalan Nasional Madani (Persero) which was passed on September 6, 2019.

The board manual regulated various aspects regarding the Sharia Supervisory Board, among others, includes provisions regarding:

- A. Sharia Supervisory Board functions
- B. Requirements, Composition and Term of Office of the Sharia Supervisory Board
- C. Duties and Obligations
- D. Authority
- E. Sharia Supervisory Board Meeting
- F. Remuneration
- G. Position Ethics of the Sharia Supervisory Board

Composition and Basis of Appointment of the Sharia Supervisory Board

The minimum number of DPS members is 2 (two) people and a maximum of 3 (three) people. SSB is led by a chairman appointed from one of the SSB members.

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Executor	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Efektif Effective Date
Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.S.	Ketua Chairman	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK Menteri BUMN Nomor.SK-146/MBU/07/2019 Decree of the Minister of SOEs Number SK-146/ MBU/07/2019	3 Juli 2019 July 3, 2019
Dr. Muhammad Syafii Antonio	Anggota Member	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	SK Menteri BUMN Nomor.SK-146/MBU/07/2019 Decree of the Minister of SOEs Number SK-146/ MBU/07/2019	3 Juli 2019 July 3, 2019

Kebijakan Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Sharia Supervisory Council of Sharia Supervisory Board

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Table of concurrent positions of the Sharia Supervisory Board

Nama Name	Jabatan Position	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain Position at Other Companies / Agencies	Nama Perusahaan/ Instansi Lain Company Name/ Other Agencies
Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.S.	Ketua Chairman	DPS	BRI Syariah
Dr. Muhammad Syafii Antonio	Anggota Member	Syariah Board	Islamic Development Bank, Jeddah

Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Pengawas Syariah

DPS hendaknya senantiasa menghindari adanya benturan kepentingan antara lain:

1. Menghindari terjadinya benturan kepentingan.
2. Tidak menanggapi permintaan dari pihak manapun dan dengan alasan apapun, baik permintaan secara langsung dari pihak-pihak tertentu termasuk dan tidak terbatas pada pejabat/pegawai di lingkungan instansi pemerintah dan partai politik yang berkaitan dengan permintaan sumbangan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Perusahaan sepanjang hal tersebut dapat mempengaruhi pengembalian suatu keputusan.

Conflict of Interest Management of Sharia Supervisory Board

SSB should always avoid conflicts of interest, including:

1. Avoiding conflicts of interest.
2. Not responding to requests from any party and for any reason, both direct requests from certain parties including and not limited to officials/employees within government agencies and political parties related to requests for donations related to the procurement of goods and services in the Company as long as it can affect the return of a decision.

Kepemilikan Saham Dewan Pengawas Syariah

Share Ownership of the Sharia Supervisory Board

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Pengawas Syariah

Table of Sharia Supervisory Board Share Ownership

Nama Name	Jabatan Position	Kepemilikan Saham Stock Ownership	
		PNM	Perusahaan Lain Other Companies
Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.S.	Ketua Chairman	Nihil None	Nihil None
Dr. Muhammad Syafii Antonio	Anggota Member	Nihil None	Nihil None

Rapat Dewan Pengawas Syariah

Sharia Supervisory Board Meeting

Kebijakan Rapat

Dalam hal anggota DPS lebih dari 1 (satu) orang, DPS menyelenggarakan rapat DPS secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun. Hasil rapat DPS wajib dituangkan dalam risalah rapat DPS dan didokumentasikan dengan baik.

Perbedaan pendapat yang terjadi dalam keputusan rapat DPS wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat DPS disertai alasan perbedaan pendapat tersebut. Anggota DPS yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat DPS berhak menerima Salinan risalah rapat DPS.

Meeting Policy

In the event that there were more than 1 (one) SSB members, SSB should hold regular SSB meetings at least 4 (four) times in 1 (one) year. The results of the SSB meeting had to be recorded in the minutes of the SSB meeting and be properly documented.

Differences of opinion that occurred in the decision of the SSB meeting had to be clearly stated in the minutes of the SSB meeting along with the reasons for the difference of opinion. Members of SSB who were present or who were not present at the SSB meeting were entitled to receive a copy of the minutes of the SSB meeting.

Realisasi Rapat Dewan Pengawas Syariah

Sepanjang tahun 2021, agenda, tanggal dan peserta Rapat Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut.

Realization of Sharia Supervisory Board Meetings

Throughout 2021, the agenda, dates and participants of the Sharia Supervisory Board Meeting were as follows.

Tabel Rapat Dewan Pengawas Syariah**Table of Sharia Supervisory Board Meeting**

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Presence
1	10 Maret 2021 March 10, 2021	Perkembangan Pembiayaan Syariah Sharia Financing Development	Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.S.	Hadir / Present
			Dr. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec.	Hadir / Present
2	15 Juni 2021 June 15, 2021	Perkembangan Pembiayaan Syariah Sharia Financing Development	Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.S.	Hadir / Present
			Dr. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec.	Hadir / Present
3	23 November 2021 November 23, 2021	Perkembangan Pembiayaan Syariah Sharia Financing Development	Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.S.	Hadir / Present
			Dr. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec.	Hadir / Present
4	15 Desember 2021 December 15, 2021	Perkembangan Pembiayaan Syariah Sharia Financing Development	Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.S.	Hadir / Present
			Dr. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec.	Hadir / Present

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Selama tahun 2021, DPS telah melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali. Adapun frekuensi dan kehadiran rapat masing-masing anggota DPS adalah sebagai berikut.

Frequency and Attendance Meetings

During 2021, DPS has held 4 (four) meetings. The frequency and attendance of each member of the SSB are as follows.

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Pengawas Syariah**Table of Frequency and Attendance of Sharia Supervisory Board Meetings**

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Dewan Pengawas Syariah Total and Attendance Percentage		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran Total and Attendance Percentage		
		Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Number of Presence	Persentase Percentage
Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.S.	Ketua Chairman	4	4	100%
Dr. Muhammad Syafii Antonio	Anggota Member	4	4	100%

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Dewan Pengawas Syariah**Training and/or Competency Development of Members of the Sharia Supervisory Board**

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi / Pelatihan Types of Training and Competency Development / Training Materials	Waktu Pelaksanaan Implementation Time	Penyelenggara Organizer
Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.S.	Ketua Chairman	Pra-ijtima Sanawi	4-11 Oktober 2021 October 4-11, 2021	DSN MUI
		Ijtima Sanawi	2-3 Desember 2021 December 2-3, 2021	DSN MUI
Dr. Muhammad Syafii Antonio	Anggota Member	Pra-ijtima Sanawi	4-11 Oktober 2021 October 4-11, 2021	DSN MUI
		Ijtima Sanawi	2-3 Desember 2021 December 2-3, 2021	DSN MUI

Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat dan Saran serta Pengawasan Pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal Terhadap Emiten Atau Perusahaan Publik

Dewan Pengawas Syariah memberikan nasihat serta saran kepada manajemen melalui rapat bulanan serta berdasarkan opini yang dikeluarkan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah tahun 2021, Dewan Pengawas Syariah menyampaikan opini terkait:

1. Produk Hunian Mikro Mekaar Syariah (HOME SYARIAH), Revisi
2. Kebijakan Penambahan Fasilitas Pembiayaan ULaMM Syariah (revisi),
3. Produk ULaMM Angsuran Tetap Syariah dan Produk ULaMM Talangan Syariah,
4. Rekening Nasabah Mekaar Syariah.
5. Pemberian materi Tausiah secara *online* kepada insan PNM melalui program SALAM (*Sharing Literasi Ekonomi Islam*) mingguan setiap hari Rabu/Jumat.

Selain itu, pelaksanaan tugas yang telah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2021, antara lain:

1. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta melakukan pengawasan atas kegiatan Unit Usaha Syariah berdasarkan prinsip syariah.
2. Melaksanakan rapat koordinasi DPS bersama Dewan Komisaris, Direksi dan Unit Usaha Syariah.
3. Memberikan Literasi Ekonomi Islam kepada Karyawan/ti PNM seluruh Indonesia.
4. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.
5. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Keuangan Lembaga Syariah.

Mekanisme Pemberhentian dan Pengunduran Diri Dewan Pengawas Syariah

Jabatan anggota DPS berakhir apabila:

1. Periode masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan Anggaran Dasar.
2. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.
4. Meninggal dunia.
5. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Frequency and Methods of Giving Advice and Suggestions and Supervision of The Fulfillment of Sharia Principles at Capital Market Against Issuers or Public Companies

The Sharia Supervisory Board provided advice and suggestions to management through monthly meetings and based on opinions issued. In carrying out the duties and functions of the Sharia Supervisory Board in 2021, the Sharia Supervisory Board conveyed opinions regarding:

1. Mekaar Syariah (HOME SYARIAH) Micro Residential Products, Revised
2. Policy on Adding Sharia ULaMM Financing Facilities (revised),
3. Sharia Fixed Installment ULaMM Product and Sharia Talangan ULaMM Product,
4. Mekaar Syariah Customer Account.
5. Giving Tausiah material online to PNM people through the weekly SALAM (*Sharing Islamic Economic Literacy*) program every Wednesday/Friday

In addition, the implementation of tasks that have been carried out by the Sharia Supervisory Board during 2021, includes:

1. Provide advice and suggestions to the Board of Directors as well as supervise the activities of the Sharia Business Unit based on sharia principles.
2. Holding Sharia Supervisory Board coordination meetings with the Board of Commissioners, Directors, and Sharia Business Units.
3. Islamic economic education literacy, Ministry of the Economy.
4. Formulate problems that require discussion of DSN.
5. Conducting outreach to the public about Islamic Financial Institutions.

Mechanism for Sharing and Respection of the Sharia Supervisory Board

The position of a SSB member ended if:

1. The term of office ends in accordance with the provisions of the Articles of Association.
2. Resign in accordance with the applicable provisions.
3. No longer meets statutory requirements.
4. Passed away.
5. Dismissed based on the resolution of the GMS.

Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Prosedur Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi

Kebijakan suksesi Direksi Perseroan mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi Perseroan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme dan *Good Corporate Governance*.

Persyaratan Anggota Direksi

Persyaratan Formal

Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan pernah:

1. Dinyatakan pailit.
2. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN dan/atau Perusahaan dinyatakan pailit.
3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, Perusahaan dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Persyaratan Materiil

Persyaratan materiil Direksi yaitu keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perseroan.

Persyaratan Lain

Persyaratan lain Direksi adalah sebagai berikut:

1. Bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif.
2. Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah.
3. Tidak menjabat sebagai Direksi pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut.
4. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya.
5. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Direksi BUMN), yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter.

Nomination and Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors

Board of Commissioners and Board of Directors Nomination Procedures

The succession policy for the Company's Board of Directors refers to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-03/MBU/02/2015 concerning Requirements, Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors of State-Owned Enterprises. The appointment and dismissal of the Company's Directors are carried out based on professionalism and Good Corporate Governance.

Requirements for Members of the Board of Directors

Formal Requirements

The Board of Directors is an individual who is capable of taking legal actions, except that within 5 (five) years prior to the appointment, he has:

1. *Declared bankruptcy.*
2. *Being a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing a BUMN and/or company to be declared bankrupt.*
3. *Convicted of committing a crime that caused losses to the finances of the state, BUMN, company and/or related to the financial sector.*

Material Requirements

The material requirements of the Board of Directors are expertise, integrity, leadership, experience, honesty, good behavior and high dedication to advance and develop the Company.

Other Requirements

Other requirements for the Board of Directors are as follows:

1. *Not administrators of political parties and/or candidates for legislative members and/or legislative members.*
2. *Not a candidate for head/deputy regional head and/or head/ deputy regional head.*
3. *Do not serve as Directors of the BUMN concerned for 2 (two) consecutive terms.*
4. *Have dedication and provide the utmost time to do their job.*
5. *Physically and mentally healthy (not currently suffering from a disease that may hinder the implementation of duties as the Board of Directors of BUMN), as evidenced by a health certificate from a doctor.*

Tata Cara Pengangkatan

Bakal calon Direksi diusulkan melalui Dewan Komisaris yang dibantu oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Bakal calon yang akan ditetapkan menjadi calon anggota Direksi adalah seorang yang telah dinyatakan memenuhi Persyaratan dan lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK). UKK terhadap bakal calon dilakukan oleh lembaga profesional dalam hal ini yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Penetapan Direksi dilakukan melalui Keputusan RUPS.

Daftar riwayat hidup calon anggota Direksi yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS, wajib tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi. Sebelum ditetapkan menjadi anggota Direksi, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan lain yang dilarang untuk ditangkap dengan jabatan Direksi terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Direksi (jika ada).

Landasan Hukum

Dasar Penetapan Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi merupakan kewenangan Pemegang Saham dan ditetapkan dalam RUPS yang formulasinya mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 Tanggal 10 Maret 2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/05//2019 Tanggal 31 Mei 2019 tentang Perubahan keempat.

Prosedur Penetapan Remunerasi

Dalam menetapkan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, Dewan Komisaris melakukan kajian dan evaluasi tentang besaran dana remunerasi yang akan diberikan, sebelum disampaikan pada RUPS untuk dikaji kembali dan disahkan jika telah mendapat kesepakatan. Penentuan besaran dan bentuk remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi juga mempertimbangkan kinerja keuangan Perseroan selama tahun buku.

Indikator Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Penetapan Penghasilan yang berupa Gaji atau Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan, dan faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Appointment Procedures

Candidates for the Board of Directors are proposed through the Board of Commissioners who is assisted by the Remuneration and Nomination Committee. A candidate who will be appointed as a candidate for the Board of Directors is someone who has met the requirements and passed the Fit and Proper Test (UKK). UKK for prospective candidates is carried out by a professional institution, in this case the Financial Services Authority. The Board of Directors is determined by a resolution of the GMS.

A curriculum vitae of a candidate for a member of the Board of Directors who will be proposed to be appointed in the GMS must be available and announced at the time of the GMS before making a decision regarding the appointment of a member of the Board of Directors. Before being appointed as a member of the Board of Directors, the person concerned must sign a statement letter of resigning from another position which is prohibited from being arrested from the position of the Board of Directors as of the time he is appointed as a member of the Board of Directors (if any).

Legal Foundation

The basis for Determining Remuneration for members of the Board of Commissioners and Directors is the authority of the Shareholders and was stipulated in the GMS, the formulation of which referred to the Regulation of the Minister of BUMN Number PER-04/MBU/2014 dated March 10, 2014 concerning Guidelines for Determining Income of Directors, Board of Commissioners and Supervisory Board of SOEs had been amended several times, most recently by the Regulation of the Minister of BUMN Number PER-01/MBU/05/2019 dated May 31, 2019 concerning the fourth amendment.

Remuneration Determination Procedure

In determining the amount of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors, the Board of Commissioners reviewed and evaluated the amount of remuneration funds to be given, before it was submitted to the GMS for review and approval if an agreement had been reached. The determination of the amount and form of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors also considered the Company's financial performance during the financial year.

Indicators of Remuneration Determination of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Determination of income in the form of salary or honorarium, allowances and facilities that were permanent in nature was carried out by taking into account factors of business scale, business complexity, inflation rates, company financial condition and capacity, and other relevant factors, and might not conflict with laws and regulations invitation.

Struktur dan Jumlah Nominal/Komponen Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Skema yang ditetapkan dalam penyusunan besaran remunerasi Perseroan pada 2021 adalah sebagai berikut:

1. Gaji Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri.
2. Para Direktur masing-masing menerima gaji sebesar 90% dibandingkan gaji yang diterima Direktur Utama.
3. Komisaris Utama menerima gaji sebesar 45% dibandingkan gaji yang diterima Direktur Utama.
4. Anggota Dewan Komisaris menerima 90% dari gaji yang diterima Komisaris Utama.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi yang dibayarkan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Imbalan Kerja Jangka Pendek	Nominal Nominal	Short term work benefits
Dewan Komisaris	Rp 10.313.585.187	Board of Commissioners
Direksi	Rp 27.001.042.556	Directors
Total	Rp 37.314.627.743	Total

Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi

PNM senantiasa menjaga keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi untuk mendorong pengambilan keputusan yang lebih objektif, komprehensif, optimal, serta berdampak positif terhadap pengawasan dan pengelolaan Perseroan. Dengan adanya keberagaman dalam komposisi Dewan Komisaris dan Direksi, diharapkan Perseroan dapat memperkaya sudut pandang dalam pengambilan keputusan, baik dalam jajaran Dewan Komisaris maupun Direksi, sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam kegiatan operasional dan manajemen Perseroan, termasuk dalam hal penerapan tata kelola perusahaan.

Board Manual telah mengatur bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib memenuhi persyaratan pengetahuan dan keahlian. Hal ini menunjukkan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki keberagaman pengetahuan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan operasional Perseroan. Perseroan belum mengembangkan kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi secara khusus, namun telah memiliki kebijakan yang mengatur keberagaman pengetahuan dan keahlian Dewan Komisaris dan Direksi dalam *Board Manual*. Keberagaman usia dan gender belum diatur karena Perusahaan masih menekankan pada keberagaman keahlian tanpa memandang usia dan gender.

Structure and Number of Nominals/Remuneration Components Board of Commissioners and Board of Directors

The scheme stipulated in the preparation of the Company's remuneration amount in 2020 is as follows:

1. The President Director's salary was determined using internal guidelines set by the Minister.
2. The Directors each received a salary of 90% compared to the salary received by the President Director.
3. The President Commissioner received a salary of 45% compared to the salary received by the President Director.
4. Members of the Board of Commissioners received 90% of the salary received by the President Commissioner.

Remuneration for the Board of Commissioners and Directors paid in 2021 is as follows.

Policies on Diversity of Board of Commissioners and Board of Directors

PNM is always maintaining the diversity of the composition of the Board of Commissioners and Directors to encourage decision making that is more objective, comprehensive, optimal, and has a positive impact on the supervision and management of the Company. With the diversity in the composition of the Board of Commissioners and Directors, the Company is expected to be able to enrich the perspective of decision making, both in the Board of Commissioners and Directors, so as to provide added value in the operations and management of the Company, including in the case of the implementation of corporate governance.

The *Board Manual* has stipulated that members of the Board of Commissioners and Board of Directors must meet the requirements for knowledge and expertise. This shows that the Board of Commissioners and Directors must have a diversity of knowledge and expertise in accordance with the operational needs of the Company. The Company has not yet developed a policy on the diversity of the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors in particular, but has a policy that regulates the diversity of knowledge and expertise of the Board of Commissioners and Directors in the *Board Manual*. Age and gender diversity has not been regulated because the Company still emphasizes diversity of expertise regardless of age and gender.

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman kerja serta keahlian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Diversity in the Composition of the Board of Commissioners

The diversity of the composition of the Board of Commissioners based on age, gender, education, work experience and expertise can be seen in the table below.

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Table of Diversity in the Composition of the Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Educational Background	Pengalaman Kerja Work Experience	Keahlian Expertise
Rully Indrawan*	Komisaris Utama President Commissioner	60 tahun 60 years old	Pria Male	S1 Ekonomi S2 Ilmi Ekonomi Koperasi S3 Ilmu Ekonomi S1 Economics S2 Cooperative Economics S3 Economics	Memiliki pengalaman kerja di bidang pendidikan Have work experience in the field of education	Ilmu Ekonomi Economics
Arif Rahman Hakim**	Komisaris Utama President Commissioner	55 tahun 55 years old	Pria Male	S1 Teknik Industri S2 Policy Economics S1 Industrial Engineering S2 Policy Economics	Memiliki pengalaman kerja di bidang social dan pemerintahan Have work experience in the social and government fields	Ilmu ekonomi Economics
Meidyah Indreswari	Komisaris Independen Independent Commissioner	64 tahun 64 years old	Wanita Female	D3 Akuntansi S1 Akuntansi Master of Science in Accounting Ph.D Development Studies D3 Accounting S1 Accounting Master of Science in Accounting Ph.D Development Studies	Memiliki pengalaman kerja di bidang pengawasan dan pemerintahan Have work experience in the field of supervision and government	Akuntansi Accountancy
M. Sholeh Amin	Komisaris Independen Independent Commissioner	64 tahun 64 years old	Pria Male	S1 Hukum S2 Hukum S1 Law S2 Law	Memiliki pengalaman kerja di bidang hukum Have work experience in the field of law	Hukum Law
Veronica Colondam	Komisaris Independen Independent Commissioner	49 Tahun 49 years old	Wanita Female	S1 jurusan Mass Communications and Public Relations S2 jurusan Social Science S1 majoring in Mass Communications and Public Relations S2 majoring in Social Science	Memiliki pengalaman kerja di bidang sosial dan pendidikan Have work experience in the social and educational fields	Public Relation
Parman Nataatmadja	Komisaris Commissioner	64 tahun 64 years old	Pria Male	S1 Ekonomi S2 Finance S1 Economics S2 Finance	Memiliki pengalaman kerja di bidang keuangan Have work experience in finance	Finance

* Berhenti menjabat sejak tanggal 26 Februari 2021. / Stopped serving since February 26, 2021.

**Mulai menjabat sejak tanggal 26 Februari 2021. / Started in office since February 26, 2021.

Keberagaman Komposisi Direksi

Keberagaman komposisi Direksi berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman kerja serta keahlian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Diversity in the Composition of the Board of Directors

The diversity of the composition of the Board of Directors based on age, gender, education, work experience and expertise can be seen in the table below.

Tabel Keberagaman Komposisi Direksi

Table of Diversity in the Composition of the Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Educational Background	Pengalaman Kerja Work Experience	Keahlian Expertise
Arief Mulyadi	Direktur Utama President Director	53 tahun 53 years old	Pria Male	S1 Biologi S2 Kajian Strategi Ketahanan Nasional S1 Biology S2 National Resilience Strategy Studies	Memiliki pengalaman kerja di bidang keuangan Have work experience in finance	Keuangan Finance
Tjatur H Priyono	Direktur Keuangan Finance Director	57 tahun 57 years old	Pria Male	S1 Ekonomi S1 Economics	Memiliki pengalaman kerja di bidang keuangan Have work experience in finance	Ekonomi Economics
Anton Fahlevie***	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Director of Compliance and Risk Management	52 tahun 52 years old	Pria Male	S1 Teknik Mesin S2 Ekonomi Islam dan Keuangan Syariah S1 Mechanical Engineering S2 Islamic Economics and Sharia Finance	Memiliki pengalaman kerja di bidang keuangan dan Asuransi Have work experience in finance and insurance	Keuangan dan Asuransi Finance and Insurance
M.Q Gunadi*	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Director of Compliance and Risk Management	53 tahun 53 years old	Pria Male	S1 Ekonomi S2 Ekonomi Islam dan Keuangan Syariah S1 Economics S2 Economics	Memiliki pengalaman kerja di bidang keuangan dan pembiayaan Have work experience in finance and financing	Ekonomi Economics
Noer Fajrieansyah*	Direktur Kelembagaan Institutional Director	38 tahun 38 years old	Pria Male	S1 Manajemen S1 Hukum S2 Ilmu Administrasi S3 Ilmu Administrasi S1 Management S1 Law S2 Administration Science S3 Administrative Sciences	Memiliki pengalaman kerja di bidang pengawasan Have work experience in supervisory field	Manajemen dan Ilmu Administrasi Management and Administrations
Kindaris**	Direktur Bisnis Business Director	54 tahun 54 years old	Pria Male	S1 Hukum S2 Ekonomi S1 Law S2 Economics	Memiliki pengalaman kerja di bidang keuangan Have work experience in finance	Hukum dan Ekonomi Law and Economics
Sunar Basuki**	Direktur Kelembagaan dan Perencanaan Director of Institutional and Planning	53 tahun 53 years old	Pria Male	S1 Ekonomi S2 Business Administration S1 Economics S2 Business Administration	Memiliki pengalaman kerja di bidang keuangan dan pembiayaan Have work experience in finance and financing	Ekonomi Economics

* Berhenti menjabat sejak tanggal 28 Mei 2021. / Stopped serving since May 28, 2021.

** Mulai menjabat sejak tanggal 28 Mei 2021. / Started in office since May 28, 2021.

***Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Bisnis dan mulai menjabat Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko sejak tanggal 28 Mei 2021. / Previously served as Director of Business and began serving as Director of Compliance and Risk Management since May 28, 2021.

Organ dan Komite di Bawah Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

a. Tugas Utama

- 1) Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris.
- 2) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan anggaran dasar perusahaan
- 3) Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya.
- 4) Menyusun rancangan rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris
- 5) Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris.
- 6) Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

b. Tugas Lainnya

Selain melaksanakan tugas diatas, Sekretaris Dewan Komisaris selaku pimpinan Sekretariat, melaksanakan tugas lain berupa:

- 1) Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG.
- 2) Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.
- 3) Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Nani Sukamto Sekretaris Dewan Komisaris / Board of Commissioners' Secretary	
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta
Tempat, Tanggal Lahir <i>Date of Birth</i>	Sleman, 06 Agustus 1985 <i>Sleman, August 6, 1985</i>
Usia <i>Age</i>	36 Tahun <i>36 years old</i>
Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i>	S1 Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada (2003-2007) <i>Bachelor of Law from Gadjah Mada University (2003-2007)</i>

Organ and Committee Under the Board of Commissioners

Secretary to the Board of Commissioners

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

a. Main task

- 1) Prepare meetings, including meeting materials (*briefing sheets*) of the Board of Commissioners.
- 2) Prepare the minutes of the Board of Commissioners meeting in accordance with the provisions of the company's articles of association
- 3) Administering the documents of the Board of Commissioners, both incoming letters, outgoing letters, minutes of meetings and other documents.
- 4) Prepare a draft work plan and budget for the Board of Commissioners
- 5) Prepare draft reports for the Board of Commissioners.
- 6) Carry out other duties of the Board of Commissioners.

b. Other Tasks

Apart from carrying out the above tasks, the Secretary of the Board of Commissioners as the head of the Secretariat carries out other tasks in the form of:

- 1) Ensuring that the Board of Commissioners complies with laws and regulations and applies GCG principles.
- 2) Providing information needed by the Board of Commissioners periodically and/or at any time if requested.
- 3) As a liaison officer for the Board of Commissioners with other parties.

Profile of Board of Commissioners' Secretary

Riwayat Jabatan <i>Position History</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Penata Kelola Perusahaan Negara (PKPN) Muda (29 Desember 2020 – sekarang) - Pengendali Subfungsi (09 Juni 2020 – 28 Desember 2020) - Kepala Subbidang Layanan Hukum BUMN IIa (09 Januari 2019 – 08 Juni 2020) - Plt. Kepala Subbidang Layanan Hukum BUMN IIb (09 Januari 2019 – 08 Juni 2020) - Kepala Subbidang Layanan Hukum BUMN Ib (22 Oktober 2015 – 8 Januari 2019) - Analis Hukum (20 Mei 2014 – 08 Januari 2019) - <i>Young State Corporate Governance (PKPN) (29 December 2020 – present)</i> - <i>Sub-function Controller (09 June 2020 – 28 December 2020)</i> - <i>Head of Legal Services Sub-Sector BUMN IIa (09 January 2019 – 08 June 2020)</i> - <i>Plt. Head of Legal Services Sub-Sector BUMN IIb (09 January 2019 – 08 June 2020)</i> - <i>Head of Legal Services Sub-Sector BUMN Ib (22 October 2015 – 8 January 2019)</i> - <i>Legal Analyst (20 May 2014 – 08 January 2019)</i>
Dasar Pengangkatan <i>Basis of Appointment</i>	Keputusan Dewan Komisaris No. SK-001/PNM-KOM/I/2021 tentang Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani (Persero) <i>Decision of the Board of Commissioners No. SK-001/PNM-KOM/I/2021 against the Appointment of Secretary to the Board of Commissioners of PT Permodalan Nasional Madani (Persero)</i>
Jabatan Rangkap <i>Concurrent Position</i>	Penata Kelola Perusahaan Negara Muda <i>Young Country Corporate Governance</i>

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. Menyiapkan rapat dan bahan rapat.
2. Menyiapkan risalah rapat Dewan Komisaris.
3. Menyelesaikan administrasi seluruh dokumen Dewan Komisaris seperti surat masuk, surat keluar, dan risalah rapat.
4. Menyusun rancangan rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris.
5. Membuat laporan-laporan Dewan Komisaris.
6. Mengerjakan tugas tambahan lain sesuai permintaan Dewan Komisaris.

Komite Audit

Dalam implementasi GCG, peran dan fungsi Komite Audit menjadi sangat strategis untuk membantu dan meningkatkan peran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Dasar Pembentukan Komite Audit

Dasar pembentukan Komite Audit yaitu:

1. Undang-Undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-undang Nomor: 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 45 tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
4. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit bagi BUMN.
5. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-117/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance.

Implementation of the Duties of the Secretary of the Board of Commissioners

The Secretary of the Board of Commissioners has carried out the following duties and obligations:

1. Prepare meetings and meeting materials.
2. Prepare the minutes of the meeting of the Board of Commissioners.
3. Complete the administration of all documents of the Board of Commissioners such as incoming letters, outgoing letters and minutes of meetings.
4. Prepare a draft work plan and budget for the Board of Commissioners.
5. Prepare reports from the Board of Commissioners.
6. Carry out other additional tasks as requested by the Board of Commissioners.

Audit Committee

In the implementation of GCG, the role and function of the Audit Committee was very strategic to assist and enhance the role of the Board of Commissioners in carrying out its supervisory function.

Basis For Establishing the Audit Committee

The basis for the formation of the Audit Committee, namely:

1. Law Number: 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. Law Number: 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises.
3. Government Regulation Number 45 of 2005 concerning the Establishment, Management, Supervision and Dissolution of State-Owned Enterprises.
4. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-05/MBU/2006 regarding the Audit Committee for SOEs.
5. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: Kep-117/MBU/2002 dated June 4, 2002 concerning the Implementation of Good Corporate Governance Practices.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada Publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perusahaan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

Piagam Komite Audit

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit mengacu pada Piagam Komite Audit yang disahkan pada tanggal 1 September 2020. Adapun isi Piagam Komite Audit yaitu:

Bagian Pertama	: Pendahuluan
Bagian Kedua	: Pembentukan dan Keanggotaan Komite Audit
Bagian Ketiga	: Fungsi, Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab
Bagian Keempat	: Lingkup Pekerjaan
Bagian Kelima	: Kode Etik dan Mekanisme Rapat
Bagian Keenam	: Penutup

Duties and Responsibilities of the Audit Committee

In carrying out its functions, the Audit Committee had the duties and responsibilities at least to include:

1. *Reviewing the financial information that will be issued by the Company to the public and/or authorities, including financial reports, projections and other reports related to the Company's financial information;*
2. *Reviewing compliance with laws and regulations relating to the Company's activities;*
3. *Provide an independent opinion in the event of a difference of opinion between the Management and the Accountant on the services provided;*
4. *Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of an Accountant based on independence, scope of assignment and remuneration for services;*
5. *Reviewing the implementation of the audit by the internal auditors and supervising the implementation of follow-up actions by the Board of Directors on the findings of the internal auditors;*
6. *Reviewing the risk management implementation activities carried out by the Board of Directors, if the Company does not have a risk monitoring function under the Board of Commissioners;*
7. *Reviewing complaints related to the Company's accounting and financial reporting processes;*
8. *Reviewing and providing advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest in the Company; and*
9. *Maintain the confidentiality of the Company's documents, data, and information.*

Audit Committee Charter

In carrying out its duties and responsibilities, the Audit Committee refers to the Audit Committee Charter which was ratified on September 1, 2020. The contents of the Audit Committee Charter are:

<i>Part One</i>	<i>: Introduction</i>
<i>Part Two</i>	<i>: Establishment and Membership of the Audit Committee</i>
<i>Part Three</i>	<i>: Functions, Duties, Authorities and Responsibilities</i>
<i>Part Four</i>	<i>: Scope of Work</i>
<i>Part Five</i>	<i>: Code of Ethics and Meeting Mechanism</i>
<i>Part Six</i>	<i>: Closing</i>

Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, asset dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Masa Jabatan

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih Kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya. Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Anggota Dewan Komisaris dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota ahli yang bukan merupakan pegawai PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Anggota Komite Audit yang merupakan Anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

Struktur, keanggotaan dan keahlian Komite Audit dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Table of Audit Committee Structure, Membership and Expertise

Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Information	Keahlian Expertise
Meidyah Indreswari	Ketua Chairman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Akuntansi Accounting
Edy Karim	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	Akuntansi, Hukum Accounting, Law
R. Yudha Praja Kusumah	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	Akuntansi Accounting

Audit Committee Authority

In carrying out its duties, the Audit Committee had the following powers:

1. Access Company documents, data and information regarding employees, funds, assets and company resources required;
2. Communicating directly with employees, including the Board of Directors and those who carry out the functions of internal audit, risk management, and accountants regarding the duties and responsibilities of the Audit Committee;
3. Involve independent parties outside the Audit Committee as needed to assist in carrying out their duties (if needed); and
4. Carry out other authorities given by the Board of Commissioners.

Length of Service

The term of office of members of the Audit Committee may not be longer than the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association and may be re-elected only for the next 1 (one) period. The term of office for members of the Audit Committee who are not members of the Company's Board of Commissioners is a maximum of 3 (three) years and can be extended once for another 2 (two) years, without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss them at any time.

Structure, Membership, and Expertise of the Audit Committee

The Audit Committee consisted of at least 1 (one) member of the Board of Commissioners and at least 2 (two) expert members who were not employees of PT Permodalan Nasional Madani (Persero). A member of the Audit Committee who was a member of the Board of Commissioners acted as the Chairman of the Audit Committee.

The structure, membership and expertise of the Audit Committee can be seen in the table below.

Profil Komite Audit

Profil Komite Audit per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.

Audit Committee Profile

The profile of the Audit Committee as of December 31, 2021 is as follows.

Meidyah Indreswari Ketua Komite Audit / Chairman of Audit Committee	
Profil beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini <i>Her profile can be seen in the Profile of the Board of Commissioners in this Annual Report.</i>	
Periode Jabatan <i>Period of Office</i>	Sesuai dengan periode jabatan sebagai Dewan Komisaris <i>In accordance with the term of office as the Board of Commissioners</i>
Riwayat Penunjukan <i>Appointment History</i>	Keputusan Dewan Komisaris No. SK-002/PNM-KOM/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 <i>Decision of the Board of Commissioners No. SK-002/PNM-KOM/V/2018 dated 31 May 2018</i>
Edy Karim Anggota Komite Audit / Member of Audit Committee	
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia <i>Place and Date of Birth/Age</i>	Jakarta, 12 April 1956/64 tahun <i>Jakarta, April 12, 1956/64 years</i>
Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i>	<ul style="list-style-type: none"> • S1/DIV Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1984) • S2 Magister Ilmu Hukum dari Universitas Jayabaya (2016) • S1/DIV Accounting from State College of Accountancy (1984) • Master's Degree in Law from Jayabaya University (2016)
Sertifikasi <i>Certification</i>	Certification in Audit Committee Practices
Pengalaman Kerja <i>Work Experience</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu (2018 - 2011). • Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah II BPKP (2011 - 2012). • Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan (2012 - 2015). • Kepala Pusat Penilaian dan Pengembangan Pengawasan BPKP (2015 - 2016). • Head of Bengkulu Province BPKP Representative (2018 - 2011). • Director for Supervision of Regional Financial Administration Region II BPKP (2011 - 2012). • Head of BPKP Representative for South Kalimantan Province (2012 - 2015). • Head of Center for Assessment and Development of BPKP Supervision (2015 - 2016).
Riwayat Penunjukan <i>Appointment History</i>	Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK-004/PNM-KOM/IX/2020 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani (Persero) tanggal 1 September 2020. <i>Decision of the Board of Commissioners Number SK-004/PNM-KOM/IX/2020 concerning the Appointment of Members of the Audit Committee of PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dated September 1, 2020.</i>
Periode Jabatan <i>Period of Office</i>	Periode I : 1 September 2020 - 1 September 2022 <i>Period I : September 1, 2020 - September 1, 2022</i>
Jabatan Rangkap <i>Concurrent Position</i>	Tenaga Ahli pada Badan Akuntabilitas Publik (BAP), DPD RI tahun 2007-sekarang <i>Experts at the Public Accountability Board (BAP), DPD RI in 2007-present</i>

R. Yudha Praja Kusumah Anggota Komite Audit / Member of Audit Committee	
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia
Domisili <i>Domicile</i>	Tangerang
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia <i>Place and Date of Birth/Age</i>	Bandung, 4 Mei 1989/31 Tahun <i>Bandung, May 4, 1989/31 Years</i>
Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i>	S1 Akuntansi dari Universitas Padjajaran (2012) <i>S1 Accounting from Padjajaran University (2012)</i>
Pengalaman Kerja <i>Work Experience</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Subbagian Protokol Kementerian BUMN (2020). • Analis Keuangan Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi Kementerian BUMN (2019 – 2020). • Analis data Subbidang Usaha Jasa Konstruksi dan Sarana BUMN (2015 – 2019). • Analis data Subbidang Usaha Jasa Konstruksi (2015) • <i>Head of Protocol Subdivision of the Ministry of SOEs (2020).</i> • <i>Financial Analyst of the Verification and Accounting Sub-Section of the Ministry of SOEs (2019 – 2020).</i> • <i>Data Analyst for BUMN Construction and Facilities Sub-Sector (2015 – 2019).</i> • <i>Construction Services Business Sub-Sector Data Analyst (2015)</i>
Sertifikasi <i>Certification</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Certified Risk Management Officer • Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • Certification in Audit Committee Practices • <i>Certified Risk Management Officer</i> • <i>Government Goods/Services Procurement Expert Certificate</i> • <i>Certification in Audit Committee Practices</i>
Riwayat Penunjukan <i>Work Experience</i>	Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK-005/PNM-KOM/XI/2020 <i>Decision of the Board of Commissioners Number SK-005/PNM-KOM/XI/2020</i>
Periode Jabatan <i>Period of Office</i>	Periode I : 25 November 2020 – 25 November 2022 <i>Period I : November 25, 2020 – November 25, 2022</i>
Jabatan Rangkap <i>Concurrent Position</i>	Kepala Subbagian Protokol, Biro Humas dan Fasilitas Dukungan Strategis <i>Head of Protocol Subdivision, Public Relations Bureau and Strategic Support Facility</i>

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Qualification of Education and Experience of Audit Committee

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Table of Audit Committee Education Qualification and Work Experience

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Pendidikan <i>Educational Background</i>	Pengalaman Kerja <i>Work Experience</i>
Meidyah Indreswari	Ketua <i>Chairman</i>	<ul style="list-style-type: none"> • D3 Akuntansi • S1 Akuntansi • Master of Science in Accounting • Ph.D Development Studies • <i>D3 Accounting</i> • <i>S1 Accounting</i> • <i>Master of Science in Accounting</i> • <i>Ph.D Development Studies</i> 	Memiliki pengalaman kerja di bidang pengawasan dan pemerintahan <i>Have work experience in the field of supervision and government.</i>
Edy Karim	Anggota <i>Member</i>	<ul style="list-style-type: none"> • S1/DIV Akuntansi • S2 Magister Ilmu Hukum • <i>S1/DIV Accounting</i> • <i>Master's Degree in Legal Studies</i> 	Memiliki pengalaman kerja di bidang pengawasan dan pemerintahan <i>Have work experience in the field of supervision and government.</i>
R. Yudha Praja Kusumah	Anggota <i>Member</i>	S1 Akuntansi <i>S1 Accounting</i>	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan <i>Have work experience in the government sector</i>

Independensi Komite Audit

Komite Audit menjalankan peran secara obyektif berdasarkan pertimbangan keahliannya secara profesional. Dalam rangka menjaga obyektivitas tersebut, Komite Audit berasal dari pihak yang independen, yaitu pihak yang tidak memiliki hubungan/keterkaitan yang dapat menimbulkan dampak negatif atau benturan kepentingan (*conflict of interest*) baik dengan Pemegang Saham dan Pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi) maupun dengan Perusahaan.

Audit Committee Independence

The Audit Committee played its role objectively based on the consideration of its professional expertise. In order to maintain this objectivity, the Audit Committee came from independent parties, namely parties who had no relationship that could cause negative impacts or conflict of interest with both the Shareholders and Management (Board of Commissioners and Directors) as well as with the Company.

Tabel Independensi Komite Audit

Table of Audit Committee Independence

Aspek Independensi Independence Aspects	Meidyah Indreswari	Edy Karim	R. Yudha Praja Kusumah
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi <i>Has no financial relationship with the Board of Commissioners and the Board of Directors</i>	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi <i>Does not have a management relationship in the company, subsidiary, or affiliated company</i>	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan <i>Does not have a share ownership relationship in the company</i>	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit <i>Does not have a family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of the Audit Committee</i>	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah <i>Do not serve as administrators of political parties, officials and government</i>	√	√	√

Rapat Komite Audit

Kebijakan Rapat Komite Audit

- Rapat Komite Audit sekurang-kurangnya dilaksanakan 4 (empat) kali dalam satu tahun.
- Di luar rapat berkala tersebut, Komite Audit dapat melakukan rapat sesuai kebutuhan dengan agenda yang disepakati bersama oleh anggota Komite Audit.
- Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang paling senior, jika Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
- Rapat Komite Audit sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota. Pengambilan keputusan harus disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Komite Audit yang hadir.
- Rapat Komite Audit dapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris.
- Komite Audit mengadakan rapat periodik bersama SPI sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- Komite Audit dapat mengadakan rapat dengan Auditor Eksternal, sesuai kebutuhan.
- Komite Audit melalui Dewan Komisaris dapat meminta Direksi atau karyawan Perusahaan untuk menghadiri rapat dan memberikan informasi yang diperlukan.

Audit Committees Meeting

Audit Committee Meeting Policy

- Audit Committee meetings were held at least 4 (four) times a year.
- Apart from these regular meetings, the Audit Committee might hold meetings as needed with an agenda mutually agreed upon by the members of the Audit Committee.
- The meeting was chaired by the Chairman of the Audit Committee or the most senior member of the Audit Committee, if the Chairman of the Audit Committee was unable to attend.
- Audit Committee meetings were attended by at least 2/3 (two thirds) of the total members. Decision making had to be approved by more than (one half) of the number of members of the Audit Committee present.
- Audit Committee meetings might be attended by members of the Board of Commissioners.
- The Audit Committee held periodic meetings with SPI at least 1 (one) time in 3 (three) months.
- The Audit Committee held meetings with the External Auditor, as needed.
- The Audit Committee through the Board of Commissioners might ask the Board of Directors or employees of the Company to attend the meeting and provide the necessary information.

9. Rapat Komite Audit harus didokumentasikan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh Ketua Komite Audit dan salah satu anggota Komite Audit.
10. Komite Audit menyampaikan risalah rapat yang telah ditandatangani kepada Dewan Komisaris dan peserta rapat.

Agenda Rapat Komite Audit

Sepanjang tahun 2021, tanggal pelaksanaan, Agenda rapat dan Peserta rapat Komite Audit, sebagai berikut.

9. *The Audit Committee meeting had to be documented in a minutes of meeting signed by the Chairman of the Audit Committee and one of the members of the Audit Committee.*
10. *The Audit Committee submitted the signed minutes of the meeting to the Board of Commissioners and meeting participants.*

Agenda of Committee Audit Meeting

Throughout 2021, the implementation of meeting agenda and Audit Committee meeting participants, are as follows.

Tabel Agenda Rapat Komite Audit

Table of Agenda of Committee Audit Meeting

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
1	14 Januari 2021 January 14, 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Pengenalan jajaran Dewan Komisaris Tahun 2020 - Pembahasan kinerja bulan desember 2020 - Lain-lain. - <i>Introduction of the 2020 Board of Commissioners</i> - <i>December 2020 performance discussion</i> - <i>Etc.</i> 	Meidyah Indreswari Edy Karim R. Yudha Praja Kusumah
2	26 Februari 2021 February 26, 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut rapat sebelumnya - Pembahasan kinerja bulan Januari 2021 - Hasil Laporan Manajemen Tahun Buku 2020 - Agenda lain-lain - <i>Follow up on previous meeting</i> - <i>Discussion on January 2021 performance</i> - <i>Management Report Results for Fiscal Year 2020</i> - <i>Miscellaneous agenda</i> 	Meidyah Indreswari Edy Karim R. Yudha Praja Kusumah
3	31 Maret 2021 March 31, 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut rapat sebelumnya - Pembahasan kinerja bulan februari 2021 - Agenda lain-lain - <i>Follow up on previous meeting</i> - <i>Discussion of performance for February 2021</i> - <i>Miscellaneous agenda</i> 	Meidyah Indreswari Edy Karim R. Yudha Praja Kusumah
4	20 April 2021 April 20, 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut rapat sebelumnya - Pembahasan kinerja bulan Maret 2021 - Agenda lain-lain - <i>Follow up on previous meeting</i> - <i>Discussion of performance for March 2021</i> - <i>Miscellaneous agenda</i> 	Meidyah Indreswari Edy Karim R. Yudha Praja Kusumah
5	21 April 2021 April 21, 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut rapat sebelumnya - Pembahasan kebijakan pembinaan SDM - Agenda lain-lain - <i>Follow up on previous meeting</i> - <i>Discussion of HR development policies</i> - <i>Miscellaneous agenda</i> 	Meidyah Indreswari Edy Karim R. Yudha Praja Kusumah
6	27 April 2021 April 27, 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut rapat sebelumnya - Agenda lain-lain - <i>Follow up on previous meeting</i> - <i>Miscellaneous agenda</i> 	Meidyah Indreswari Edy Karim R. Yudha Praja Kusumah
7	27 Mei 2021 May 27, 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut rapat sebelumnya - Pembahasan kinerja bulan april 2021 - Agenda lain-lain - <i>Follow up on previous meeting</i> - <i>Discussion of performance in April 2021</i> - <i>Miscellaneous agenda</i> 	Meidyah Indreswari Edy Karim R. Yudha Praja Kusumah

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
8	3 Juni 2021 June 3, 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut rapat sebelumnya - Pembahasan kinerja bulan Mei 2021 - Agenda lain-lain - <i>Follow up on previous meeting</i> - <i>Discussion of performance for the month of May 2021</i> - <i>Miscellaneous agenda</i> 	Meidyah Indreswari Edy Karim R. Yudha Praja Kusumah
9	25 Juni 2021 June 25, 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut rapat sebelumnya - Pembahasan kepatuhan perusahaan terhadap perundang-undangan - Agenda lain-lain - <i>Follow up on previous meeting</i> - <i>Discussion of company compliance with laws and regulations</i> - <i>Miscellaneous agenda</i> 	Meidyah Indreswari Edy Karim R. Yudha Praja Kusumah
10	28 Juli 2021 July 28, 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut rapat sebelumnya - Pembahasan kinerja bulan Juni 2021 - Agenda lain-lain - <i>Follow up on previous meeting</i> - <i>Discussion of performance for the month of June 2021</i> - <i>Miscellaneous agenda</i> 	Meidyah Indreswari Edy Karim R. Yudha Praja Kusumah
11	29 Juli 2021 July 29, 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut rapat sebelumnya - Pembahasan kebijakan sistem teknologi informasi - Agenda lain-lain - <i>Follow up on previous meeting</i> - <i>Discussion of information technology system policies</i> - <i>Miscellaneous agenda</i> 	Meidyah Indreswari Edy Karim R. Yudha Praja Kusumah
12	19 Agustus 2021 August 19, 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut rapat sebelumnya - Pembahasan kinerja bulan Juli 2021 - Pembahasan kebijakan pengadaan barang dan jasa - Agenda lain-lain - <i>Follow up on previous meeting</i> - <i>Discussion on July 2021 performance</i> - <i>Discussion of policies on procurement of goods and services</i> - <i>Miscellaneous agenda</i> 	Meidyah Indreswari Edy Karim R. Yudha Praja Kusumah
13	24 September 2021 September 24, 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut rapat sebelumnya - Pembahasan kinerja bulan Agustus 2021 - Pembahasan Kebijakan Akuntansi dan Penyusunan - Agenda lain-lain - <i>Follow up on previous meeting</i> - <i>Discussion of performance for the month of August 2021</i> - <i>Discussion of Accounting Policies and Preparation</i> - <i>Miscellaneous agenda</i> 	Meidyah Indreswari Edy Karim R. Yudha Praja Kusumah
14	18 Oktober 2021 October 18, 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut rapat sebelumnya - Pembahasan kinerja bulan September 2021 - Agenda lain-lain - <i>Follow up on previous meeting</i> - <i>Performance discussion for September 2021</i> - <i>Miscellaneous agenda</i> 	Meidyah Indreswari Edy Karim R. Yudha Praja Kusumah
15	19 Oktober 2021 October 19, 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut rapat sebelumnya - Pembahasan RKAP PNM tahun 2022 - Agenda lain-lain - <i>Follow up on previous meeting</i> - <i>Discussion of the PNM RKAP in 2022</i> - <i>Miscellaneous agenda</i> 	Meidyah Indreswari Edy Karim R. Yudha Praja Kusumah
16	25 November 2021 November 25, 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut rapat sebelumnya - Pembahasan kinerja bulan Oktober 2021 - Agenda lain-lain - <i>Follow up on previous meeting</i> - <i>Discussion on performance for October 2021</i> - <i>Miscellaneous agenda</i> 	Meidyah Indreswari Edy Karim R. Yudha Praja Kusumah
17	25 Desember 2021 December 25, 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut rapat sebelumnya - Pembahasan kinerja bulan November 2021 - Pembahasan persiapan RUPS Pengesahan RKAP PNM Tahun 2022 - Agenda lain-lain - <i>Follow up on previous meeting</i> - <i>Discussion on November 2021 performance</i> 	Meidyah Indreswari Edy Karim R. Yudha Praja Kusumah

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit**Frequency and Attendance of Audit Committee Meetings****Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit****Table of Attendance Level on Audit Committee Meeting**

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Komite Audit Audit Committee Meeting		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran The Number and Attendance Percentage		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Presence	Persentase Percentage
Meidyah Indreswari	Ketua Chairman	17	17	100%
Edy Karim	Anggota Member	17	17	100%
R. Yudha Praja Kusumah	Anggota Member	17	17	100%

Program Peningkatan Kompetensi Komite Audit**Program to Enhance Audit Committee Competency**

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan Types of Training and Competency Development/Training Materials	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Implementation Time and Place	Penyelenggara Organizer
Meidyah Indreswari	Ketua Chairman	Program Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Peningkatan Kompetensi/Pelatihan Dewan Komisaris The Competency Improvement Program can be seen in the Competency Improvement/Training section of the Board of Commissioners		
Edy Karim	Anggota Member	Certification in Audit Committee Practices	Jakarta, 13 Agustus 2021 Jakarta, August 13, 2021	Indonesian Institute of Audit Committee
R. Yudha Praja Kusumah	Anggota Member	Certification in Audit Committee Practices	Jakarta, 13 Agustus 2021 Jakarta, August 13, 2021	Indonesian Institute of Audit Committee

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Tahun 2021

Selama tahun 2021, Komite Audit telah melaksanakan tugasnya antara lain:

1. Menyusun Rencana Kerja Komite Audit (KA) Tahun 2021.
2. Melaksanakan rapat/pembahasan internal Komite Audit.
3. Mengikuti Rapat Komite Audit dengan Dewan Komisaris.
4. Melaksanakan Rapat koordinasi Komite Audit dengan SPI.
5. Melaksanakan rapat Koordinasi dengan Divisi, Anak Perusahaan, Unit Bisnis Lainnya.
6. Melakukan koordinasi terkait dengan kegiatan audit oleh KAP.
7. Melakukan kunjungan wilayah.
8. Mengikuti peningkatan Kompetensi Komite Audit
9. Melakukan Evaluasi Kinerja Keuangan Semester I dan II tahun 2021.
10. Membuat Laporan Pelaksanaan Kinerja Komite Audit.
11. Menyusun tanggapan Komisaris tentang kinerja Perseroan.

Brief Report on the Implementation of the Audit Committee's Activities in 2021

During 2021, the Audit Committee has carried out its duties, among others:

1. Prepare the 2021 Audit Committee (KA) Work Plan.
2. Carry out internal meetings/discussions of the Audit Committee.
3. Participated in the Audit Committee Meeting with the Board of Commissioners.
4. Conducting a coordination meeting between Komite Audit and SPI.
5. Conducting Coordination meetings with Divisions, Subsidiaries, Other Business Units.
6. Coordinate related to audit activities by KAP.
7. Conduct regional visits.
8. Following the improvement of the Audit Committee Competence
9. Evaluate the financial performance of semesters I and II in 2021.
10. Prepare the Audit Committee Performance Implementation Report.
11. Prepare the response of the Board of Commissioners

12. Melakukan pembahasan draft RKAP Tahun 2021 dan Revisi RKAP 2021.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris atas penyelenggaraan Perseroan yang sehat serta meningkatkan kinerja Perseroan secara efektif, efisien dan independen sesuai dengan prinsip-prinsip GCG sehingga diperlukan adanya Komite Nominasi dan Remunerasi.

Dasar Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.
5. Anggaran Dasar.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Komite Nominasi dan Remunerasi mengacu pada Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK-001/PNM-KOM/IV/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi PT Permodalan Nasional Madani (Persero) yang mengatur tentang:

1. Tugas dan tanggung jawab
2. Rapat
3. Kewajiban
4. Masa Jabatan

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi yaitu:

1. Terkait dengan fungsi nominasi
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

regarding the Company's performance.

12. *Discussing the 2021 RKAP draft and 2021 RKAP revision.*

Committee of Nomination and Remuneration

n order to support the effectiveness of the implementation of duties and responsibilities as well as the supervisory function by the Board of Commissioners for the healthy administration of the Company and to improve the Company's performance effectively, efficiently and independently in accordance with the principles of GCG, it was necessary to have a Nomination and Remuneration Committee.

Legal Basis of the Nomination and Remuneration Committee

1. *Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.*
2. *FSA Regulation Number 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee for Issuers or Public Companies.*
3. *Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises Number PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs for the Board of Commissioners/ Supervisory Board for State-Owned Enterprises.*
4. *Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises Number PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises as last amended by Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-09/MBU/2012 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.*
5. *Articles of Association.*

Nomination and Remuneration Committee Charter

In carrying out its duties and responsibilities the Nomination and Remuneration Committee referred to the Decree of the Board of Commissioners Number SK-001/PNM-KOM/IV/2020 dated April 21, 2020 concerning the Nomination and Remuneration Committee of PT Permodalan Nasional Madani (Persero) which regulates:

1. *Duties and responsibilities*
2. *Meetings*
3. *Obligations*
4. *Term of Office*

Duties and Responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee

The duties and responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee are:

1. *Related to the nomination function*
 - a. *Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding:*
 - *Composition of positions of members of the Board of Directors and/or members of the Board*

- Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi.
 - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
2. Terkait dengan fungsi remunerasi
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Struktur remunerasi
 - Kebijakan atas remunerasi
 - Besaran atas remunerasi
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 3. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

of Commissioners.

- Policies and criteria required in the nomination process.

- Performance evaluation policies for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.

b. Assisting the Board of Commissioners in assessing the performance of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners based on benchmarks that have been prepared as evaluation materials.

c. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding capacity building programs for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.

d. Providing proposals for candidates who meet the requirements as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to be submitted to the GMS.

2. Related to the remuneration function

a. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:

- Remuneration structure

- Remuneration policy

- Amount of remuneration

b. Assisting the Board of Commissioners in assessing performance according to the remuneration received by each member of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.

3. Carrying out other duties and responsibilities assigned by the Board of Commissioners.

Masa Jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi

Masa tugas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi paling lama 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waku. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah berakhir masa jabatannya, hanya dapat diangkat Kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Nominasi dan Remunerasi

Term of Service of the Nomination and Remuneration Committee

The term of office for members of the Nomination and Remuneration Committee was a maximum of 2 (two) years without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss them at any time. Members of the Nomination and Remuneration Committee whose term of office had ended could only be reappointed for one subsequent term.

Structure, Membership, and Expertise of the Nomination and Remuneration Committee

Tabel Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Nominasi dan Remunerasi

Table of Audit Committee Structure, Membership and Expertise

Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Information	Keahlian Expertise
Parman Nataatmadja	Ketua Chairman	Komisaris Commissioner	Hukum Law
Veronica Colondam	Anggota Member	Komisaris Independen Independent Commissioner	Public Relation
M. Sholeh Amin	Anggota Member	Komisaris Independen Independent Commissioner	Hukum Law
Henry Yunus Kamang Pangemanan	Sekretaris Secretary	Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Head of Human Resources Management and Development Division	Human Capital

Profil Komite Nominasi dan Remunerasi

Profile of the Nomination and Remuneration Committee

Parman Nataatmadja

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi / Chairman of Nomination and Remuneration Committee

Profil beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini

His profile can be seen in the Profile of the Board of Commissioners in this Annual Report

Periode Jabatan <i>Period of Office</i>	Sesuai dengan periode jabatan sebagai Dewan Komisaris <i>In accordance with the term of office as the Board of Commissioners</i>
Riwayat Penunjukan <i>Appointment History</i>	Keputusan Dewan Komisaris No. SK-002/PNM-KOM/1/2021 tanggal 29 Januari 2021 <i>Decision of the Board of Commissioners No. SK-002/PNM-KOM/1/2021 dated January 29, 2021</i>

Veronica Colondam

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Member of Nomination and Remuneration Committee

Profil beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini

Her profile can be seen in the Profile of the Board of Commissioners in this Annual Report

Periode Jabatan <i>Period of Office</i>	Sesuai dengan periode jabatan sebagai Dewan Komisaris <i>In accordance with the term of office as the Board of Commissioners</i>
Riwayat Penunjukan <i>Appointment History</i>	Keputusan Dewan Komisaris No. SK-002/PNM-KOM/1/2021 tanggal 29 Januari 2021 <i>Decision of the Board of Commissioners No. SK-002/PNM-KOM/1/2021 dated January 29, 2021</i>

M. Sholeh Amin

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Member of Nomination and Remuneration Committee

Profil beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini

His profile can be seen in the Profile of the Board of Commissioners in this Annual Report

Periode Jabatan <i>Period of Office</i>	Sesuai dengan periode jabatan sebagai Dewan Komisaris <i>In accordance with the term of office as the Board of Commissioners</i>
Riwayat Penunjukan <i>Appointment History</i>	Keputusan Dewan Komisaris No. SK-002/PNM-KOM/1/2021 tanggal 29 Januari 2021 <i>Decision of the Board of Commissioners No. SK-002/PNM-KOM/1/2021 dated January 29, 2021</i>

Henry Yunus Kamang Pangemanan

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Member of Nomination and Remuneration Committee

Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta
Usia <i>Age</i>	53 tahun <i>53 years</i>
Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Sarjana Hukum dari Universitas Trisakti, Jakarta (1992) - Magister Manajemen dari Universitas Bhayangkara, Jakarta (2006) - Bachelor of Law from Trisakti University, Jakarta (1992) - Master of Management from Bhayangkara University, Jakarta (2006)

Pengalaman Kerja <i>Work Experience</i>	<ul style="list-style-type: none"> - GM Industrial And Employee Relation (HRD Directorate) PT Bakrie Telecom Tbk (2006-2011) - Direktur PT Micro Madani Institue (2017) - Pj. Wakil Kepala Divisi Divisi Sumber Daya Manusia PNM (2017 – 2018) - Pj. Kepala Divisi Divisi Sumber Daya Manusia PNM (2018) - Kepala Divisi Divisi Sumber Daya Manusia (2018) - Kepala Divisi Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (2018 – sekarang) - GM Industrial And Employee Relations (HRD Directorate) PT Bakrie Telecom Tbk (2006-2011) - Director of PT Micro Madani Institute (2017) - Pj. Deputy Head of PNM Human Resources Division (2017 – 2018) - Pj. PNM Human Resources Division Head (2018) - Head of Human Resources Division (2018) - Head of Human Resources Management and Development Division (2018 – present)
Periode Menjabat <i>Period of Office</i>	Sesuai dengan periode jabatan sebagai Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia <i>In accordance with the term of office as Head of Human Resources Management and Development Division</i>
Jabatan Rangkap <i>Concurrent Position</i>	Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PNM <i>Head of PNM . Human Resources Management and Development Division</i>

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Qualification of Education and Experience of Nomination and Remuneration Committee

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Table of Qualifications and Work Experience of The Nomination and Remuneration Committee

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Pendidikan <i>Educational Background</i>	Pengalaman Kerja <i>Wok Experience</i>
Parman Nataatmadja	Ketua <i>Chairman</i>	S1 Ekonomi S2 Finance <i>S1 Economics</i> <i>S2 Finance</i>	Memiliki pengalaman kerja di bidang keuangan dan teknologi informasi <i>Have work experience in finance and information technology</i>
Veronica Colondam	Anggota <i>Member</i>	S1 Mass Communications and Public Relations S2 Social Science <i>S1 Mass Communications and Public Relations</i> <i>S2 Social Science</i>	Memiliki pengalaman kerja di bidang sosial dan pendidikan <i>Have work experience in the social and educational fields</i>
M. Sholeh Amin	Ketua <i>Chairman</i>	S1 Hukum S2 Hukum <i>S1 Law</i> <i>S2 Law</i>	Memiliki pengalaman kerja di bidang hukum <i>Have work experience in the field of law</i>
Henry Yunus Kamang Pangemanan	Sekretaris <i>Secretary</i>	S1 Hukum S2 Manajemen <i>S1 Law</i> <i>S2 Management</i>	Memiliki pengalaman kerja di bidang sumber daya manusia <i>Have work experience in the field of human resources</i>

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Independence of the Nomination and Remuneration Committee

Tabel Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Table of Nomination and Remuneration Committee Independence

Aspek Independensi <i>Independence Aspects</i>	Parman Nataatmadja	Veronica Colondam	M. Sholeh Amin	Henry Yunus Kamang Pangemanan
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi <i>Has no financial relationship with the Board of Commissioners and the Board of Directors</i>	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi <i>Does not have a management relationship in the company, subsidiary, or affiliated company</i>	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan <i>Does not have a share ownership relationship in the company</i>	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Nominasi dan Remunerasi <i>Does not have a family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of the Nomination and Remuneration Committee</i>	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah <i>Do not serve as administrators of political parties, officials and government</i>	√	√	√	√

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee Meeting

Kebijakan Rapat

- Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan rapat sekurang-kurangnya sebanyak 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila:
 - Dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
 - Salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
- Keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, maka ketua Komite Nominasi dan Remunerasi menskors rapat untuk melakukan lobby dan pembicaraan-pembicaraan yang diperlukan antara para anggota Komite Nominasi dan Remunerasi untuk mencapai keputusan akhir.
- Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dapat mengulang proses pengambilan keputusan dengan berdasarkan suara terbanyak dalam hal berdasarkan lobby dan pembicaraan yang dilakukan tetap tidak dapat menghasilkan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat.

Meeting Policy

- The Nomination and Remuneration Committee held meetings at least 1 (one) time in 4 (four) months.
- The Nomination and Remuneration Committee meeting could only be held if:
 - Attended by the majority of the members of the Nomination and Remuneration Committee.
 - One of the majority of the members of the Nomination and Remuneration Committee was the chairman of the Nomination and Remuneration Committee.
- Nomination and Remuneration Committee meeting decisions were made based on deliberation and consensus.
- In the event that a consensus deliberation decision was not reached, the decision was made based on a majority vote.
- If in the decision-making process by voting, there were an equal number of votes, then the chairman of the Nomination and Remuneration Committee could suspend the meeting to conduct lobbying and necessary discussions between the members of the Nomination and Remuneration Committee to reach a final decision.
- The Chairperson of the Nomination and Remuneration Committee might repeat the decision-making process based on a majority vote in the event that based on lobbying and the discussions carried out still could not produce a decision based on deliberation and consensus.

7. Hasil rapat wajib didokumentasikan dituangkan dalam risalah rapat.

7. The results of the meeting had to be documented in the minutes of the meeting.

Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Meeting Agenda of the Nomination and Remuneration Committee

Tabel Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi
Table of Nomination and Remuneration Committee Meeting Agenda

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants
1	3 Maret 2021 March 3, 2021	<ol style="list-style-type: none"> Usulan perubahan struktur Usulan penetapan/pembuatan ketentuan baru untuk KNR wajib menyetujui pengangkatan pejabat dibawah BOD sampai batas tertentu. Pembahasan calon kandidat kandidat untuk diajukan sebagai Talent BOD minus 1 dari PNM kepada Kementerian BUMN Pembahasan Struktur Gaji Karyawan <ol style="list-style-type: none"> Proposing changes to the structure. Proposing stipulation/making of new provisions for KNR had to approve the appointment of officials under BOD to a certain extent. Discussion of potential candidates to be submitted as Talent BOD minus 1 from PNM to the Ministry of SOEs. Discussion of Employee Salary Structure <ol style="list-style-type: none"> Discussion of the Talent Committee proposal in accordance with letter number 001/KT/03/2021 regarding updating the Talent Pool 	Parman Nataatmadja Veronica Colondam M. Sholeh Amin Henry Yunus Kamang Pangemanan
2	12 Maret 2021 March 12, 2021	<p>Pembahasan usulan Komite Talenta sesuai dengan surat nomor 001/KT/03/2021 tentang <i>updating Talent Pool</i></p> <p>Discussion of the Talent Committee proposal in accordance with letter number 001/KT/03/2021 regarding updating the Talent Pool</p>	Parman Nataatmadja Veronica Colondam M. Sholeh Amin Henry Yunus Kamang Pangemanan
3	18 Maret 2021 March 18, 2021	<ol style="list-style-type: none"> <i>Updating Talent Pool.</i> Usulan penyempurnaan Struktur Organisasi PNM <ol style="list-style-type: none"> <i>Updating Talent Pool.</i> <i>Proposing improvements to the PNM Organizational Structure</i> 	Parman Nataatmadja Veronica Colondam M. Sholeh Amin Henry Yunus Kamang Pangemanan
4	14 Juni 2021 June 14, 2021	<p>Pembahasan usulan BOD untuk Struktur Organisasi</p> <p>Discussion of the proposed BOD for Organizational Structure</p>	Parman Nataatmadja Veronica Colondam M. Sholeh Amin Henry Yunus Kamang Pangemanan
5	30 Juli 2021 July 30, 2021	<p>Pembahasan usulan kandidat Direktur Utama dan Direktur Bisnis PT PNM VC</p> <p>Discussion of the proposed candidates for President Director and Business Director of PT PNM VC</p>	Parman Nataatmadja Veronica Colondam M. Sholeh Amin Henry Yunus Kamang Pangemanan
6	4 Oktober 2021 October 4, 2021	<p>Pembahasan usulan kandidat untuk mengisi jabatan Kepala SPI PT PNM</p> <p>Discussion of candidate proposals to fill the position of Head of SPI PT PNM</p>	Parman Nataatmadja Veronica Colondam M. Sholeh Amin Henry Yunus Kamang Pangemanan
7	17 Desember 2021 December 17, 2021	<p>Pembahasan usulan BOD PNM untuk perpanjangan jabatan Komisaris PT PNM VC</p> <p>Discussion of the PNM BOD proposal for the extension of the position of Commissioner of PT PNM VC</p>	Parman Nataatmadja M. Sholeh Amin Henry Yunus Kamang Pangemanan

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Frequency and Attendance Rate of the Nomination and Remuneration Committee Meetings

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Table of Attendance at Nomination and Remuneration Committee Meetings

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi <i>Nomination and Remuneration Committee Meeting</i>		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran <i>Attendance Number and Percentage</i>		
		Jumlah Rapat <i>Number of Meetings</i>	Jumlah Kehadiran <i>Number of Attendance</i>	Persentase <i>Percentage</i>
Parman Nataatmadja	Ketua <i>Chairman</i>	7	7	100,00%
Veronica Colondam	Anggota <i>Member</i>	7	6	85,71%
M. Sholeh Amin	Anggota <i>Member</i>	7	7	100,00%
Henry Yunus Kamang Pangemanan	Sekretaris <i>Secretary</i>	7	7	100,00%

Program Peningkatan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Competency Improvement Program for Nomination and Remuneration Committee

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan <i>Types of Training and Competency Development/Training Materials</i>	Waktu dan Tempat Pelaksanaan <i>Implementation</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>
M. Sholeh Amin	Ketua <i>Chairman</i>	Program Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Peningkatan Kompetensi/ Pelatihan Dewan Komisaris <i>The Competency Improvement Program can be seen in the Competency Improvement/ Training section of the Board of Commissioners</i>		
Veronica Colondam	Anggota <i>Member</i>	Program Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Peningkatan Kompetensi/ Pelatihan Dewan Komisaris <i>The Competency Improvement Program can be seen in the Competency Improvement/ Training section of the Board of Commissioners</i>		
Meidyah Indreswari	Anggota <i>Member</i>	Program Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Peningkatan Kompetensi/ Pelatihan Dewan Komisaris <i>The Competency Improvement Program can be seen in the Competency Improvement/ Training section of the Board of Commissioners</i>		
Henry Yunus Kamang Pangemanan	Sekretaris <i>Secretary</i>	-	-	-

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2021

Selama tahun 2021, pelaksanaan kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi antara lain:

1. Melakukan *assessment* Direksi dan BOD -1.
2. Membuat piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.
3. Penilaian calon Komisaris dan Direksi Perseroan.

Brief Report on the Implementation of the Nomination and Remuneration Committee Activities in 2021

During 2021, the activities of the Nomination and Remuneration Committee include:

1. *Conduct Board of Directors assessment and BOD -1.*
2. *Preparing the Nomination and Remuneration Committee charter.*
3. *Assessment of the candidates for Commissioners and Directors of the Company.*

Kebijakan Suksesi Direksi

Kebijakan suksesi Direksi disajikan pada bagian Prosedur Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Directors Succession Policy

The succession policy for the Board of Directors is presented in the Nomination Procedures for the Board of Commissioners and the Board of Directors in the Corporate Governance Chapter of this Annual Report.

Organ dan Komite di Bawah Direksi

Organs and Committees Under the Board of Directors

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Dasar Pengangkatan Sekretaris Perusahaan

Dasar pengangkatan Sekretaris Perusahaan berdasarkan:

Policy of Appointment of Corporate Secretary

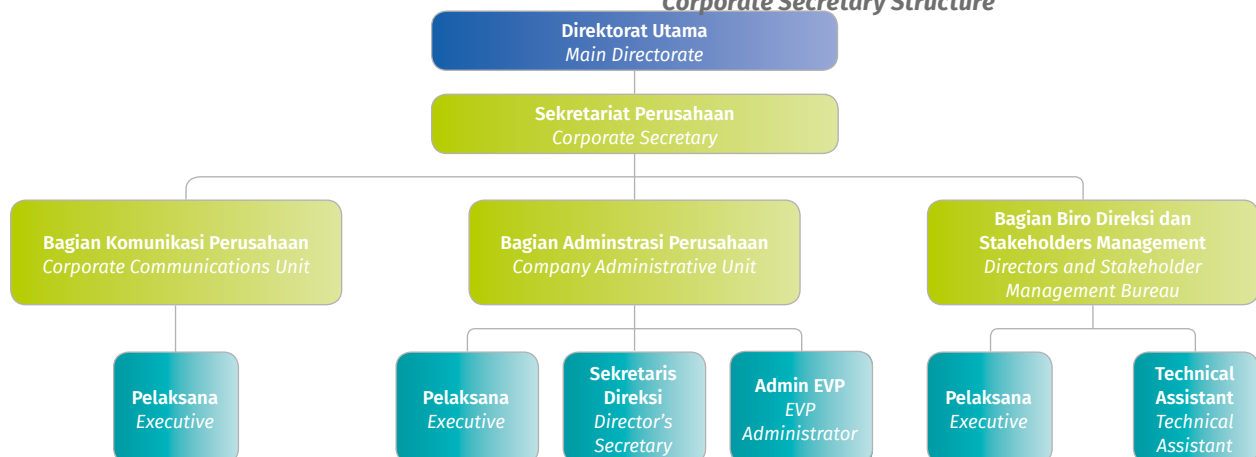
The basis for the appointment of the Corporate Secretary is based on:

1. Anggaran Dasar dan Peraturan Perusahaan PT PNM (Persero)
2. Surat Keputusan Direksi Nomor SK-599/DIR/IX/2016 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap dan Perpanjangan Karyawan Tidak Tetap.
3. Surat Keputusan Direksi Nomor SK-388/DIR/SDM/IX/2010 tentang Kebijakan Penanganan Pelanggaran oleh Karyawan.

1. PT PNM (Persero)'s Articles of Association and Company Regulations
2. Decree Number SK-599/DIR/IX/2016 concerning Appointment of Permanent Employees and Extension of Non-Permanent Employees.
3. Decree of the Board of Directors Number SK-388/DIR/SDM/IX/2010 concerning Policy for Handling Violations by Employees.

Struktur Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary Structure



Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*;
- b. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
- c. Sebagai penghubung (*liaison officer*) antara Pemegang Saham, Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya; dan
- d. Menatausahakan serta menyimpan dokumen Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan Risalah Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris dan RUPS.

Functions, Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary

The Corporate Secretary carries out the following functions:

- a. Ensuring that the Company complies with the regulations regarding disclosure requirements in line with the implementation of the principles of *Good Corporate Governance*;
- b. Providing information needed by the Board of Directors and the Board of Commissioners periodically and/or at any time if requested;
- c. As a *liaison officer* between Shareholders, Financial Services Authority and other stakeholders; and
- d. Administering and keeping Company documents, including but not limited to the Shareholders Register, Special List and Minutes of Board of Directors Meetings,

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan:

- a. Dalam kaitan dengan Pemegang Saham
 - 1) Mengkoordinasikan penyelenggaraan RUPS atau rapat teknis persiapan RUPS.
 - 2) Melakukan perencanaan dan penyelenggaraan RUPS baik yang bersifat tahunan maupun yang bersifat Luar Biasa atau pertemuan lainnya dengan Pemegang Saham.
 - 3) Membuat dan mendokumentasikan Risalah RUPS yang memuat dinamika rapat dan perbedaan pendapat (dissenting comment); dan menyediakannya sewaktu-waktu diminta oleh Pemegang Saham, Komisaris atau Direksi.
 - 4) Menyiapkan daftar Pemegang Saham baik Perusahaan, Anak Perusahaan maupun afliasinya.
- b. Sebagai fungsi Sekretariat Perusahaan
 - 1) Mengkoordinasikan rapat Direksi, Komisaris, Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah ataupun dengan pihak lainnya.
 - 2) Mempersiapkan undangan, jadwal, agenda, materi dan risalah rapat yang menggambarkan dinamika rapat dan proses pengesahan risalah rapat sekaligus pengirimannya.
 - 3) Mendokumentasikan risalah rapat tersebut dan menyediakannya bila sewaktu-waktu diminta oleh Komisaris dan/atau Direksi.
 - 4) Menyiapkan Daftar Khusus yang berkaitan dengan Direksi, Komisaris dan keluarganya, antara lain mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis dan peran lainnya dalam Perusahaan yang menimbulkan benturan kepentingan dengan Perusahaan.
 - 5) Mendokumentasikan segala jenis kebijakan, surat keputusan dan surat edaran Direksi, surat perjanjian dan dokumen lainnya yang menjadi produk hukum eksternal dan internal Perusahaan.
 - 6) Mengirim laporan manajemen dan laporan lainnya kepada Pemegang Saham dan Komisaris secara berkala.
 - 7) Mendokumentasikan surat menyurat antara Direksi dengan Komisaris, Pemegang saham dan *Stakeholders* lainnya.
 - 8) Mengkoordinasikan pembuatan buku laporan tahunan, profil Perusahaan, brosur Perusahaan dan media lainnya.
- c. Dalam kaitan dengan *stakeholders*
 - 1) Menjadi penghubung antara Direksi dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap Perusahaan.
 - 2) Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pihak lain atas setiap permintaan informasi yang berkaitan dengan kondisi Perusahaan.

Board of Commissioners Meetings and GMS.

Duties and responsibilities of the Corporate Secretary:

- a. *In relation to Shareholders*
 - 1) *Coordinating the holding of the GMS or technical meetings for the preparation of the GMS.*
 - 2) *Planning and organizing an annual or extraordinary GMS or other meetings with Shareholders.*
 - 3) *Preparing and documenting GMS Minutes containing the dynamics of meetings and dissenting comments; and provide it at any time requested by the Shareholders, Commissioners or Directors.*
 - 4) *Preparing a list of Shareholders, both the Company, Subsidiaries and affiliates.*
- b. *As a function of the Company Secretariat*
 - 1) *Coordinating the meetings of the Board of Directors, Commissioners, Audit Committee and Sharia Supervisory Board or with other parties.*
 - 2) *Preparing invitations, schedules, agendas, materials and minutes of meetings describing the dynamics of the meeting and the process of ratifying the minutes of the meeting as well as their delivery.*
 - 3) *Documenting the minutes of the meeting and making it available at any time requested by the Commissioners and/or Directors.*
 - 4) *Preparing a special list relating to the Board of Directors, Commissioners and their families, including among others, share ownership, business relationships and other roles in the Company that cause a conflict of interest with the Company.*
 - 5) *Documenting all types of policies, decrees and circulars of the Board of Directors, letters of agreement and other documents that are the Company's external and internal legal products.*
 - 6) *Sending management reports and other reports to the Shareholders and Commissioners on a regular basis.*
 - 7) *Documenting correspondence between the Board of Directors and Commissioners, Shareholders and other Stakeholders.*
 - 8) *Coordinating the preparation of annual reports, company profiles, company brochures and other media.*
- c. *In relation to stakeholders*
 - 1) *Becoming a liaison between the Board of Directors and parties who have an interest in the Company.*
 - 2) *Providing services to the public and other parties for any requests for information relating to the condition of the Company.*

- 3) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Perusahaan yang melibatkan pihak eksternal misalnya: jumpa pers (*media gathering*), forum diskusi, *strategic events* dan kegiatan sosial lainnya untuk membentuk *image* Perusahaan.
- 4) Mengelola dan memutakhirkan informasi dalam *website* Perusahaan.

- 3) *Planning and implementing Company activities that involve external parties, for example: press conferences (media gatherings), discussion forums, strategic events and other social activities to shape the Company's image.*
- 4) *Managing and updating information on the Company's website.*

Profil Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary Profile

Periode 1 Januari 2021 - 15 Juli 2021

Period January 1, 2021 - July 15, 2021

Nama <i>Name</i>	: Errinto Pardede
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	: Indonesia
Domisili <i>Domicile</i>	: Jakarta
Tempat, Tanggal Lahir/Usia <i>Place, Date of Birth/Age</i>	: Jakarta, 16 Juli 1973, 48 tahun per Desember 2021 <i>Jakarta, July 16, 1973, 48 years as of December 2021</i>
Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i>	: - Bachelor of Science in Business Administration dari Northeastern University, Boston, Amerika Serikat pada tahun 1995 - Master of Business Administration dari Northeastern University, Boston, Amerika Serikat pada tahun 1996 - <i>Bachelor of Science in Business Administration dari Northeastern University, Boston, Amerika Serikat pada tahun 1995</i> - <i>Master of Business Administration dari Northeastern University, Boston, Amerika Serikat pada tahun 1996</i>
Riwayat Jabatan <i>Position History</i>	: Sebelum menjadi Sekretaris Perusahaan, beliau pernah menjabat sebagai Head of Investor Relations di PT Bank Mandiri (Persero) (2005-2011) dan Direktur Corporate Secretary di PT Delta Dunia Makmur Tbk (2013-2017) <i>Before becoming the Corporate Secretary, he served as Head of Investor Relations at PT Bank Mandiri (Persero) (2005-2011) and Director of Corporate Secretary at PT Delta Dunia Makmur Tbk (2013-2017)</i>
Dasar Pengangkatan <i>Basis of Appointment</i>	: Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. S-559/DIR/SDM/VII/2017 tentang Pengangkatan Karyawan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) <i>Based on the Decree of the Board of Directors No. S-559/DIR/SDM/VII/2017 concerning Appointment of Employees of PT Permodalan Nasional Madani (Persero)</i>

Periode 15 Juli 2021 – Saat Ini

Period July 15, 2021 – Current

Nama <i>Name</i>	: Lalu Dodot Patria Ary Suprianto
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	: Indonesia
Domisili <i>Domicile</i>	: Jakarta
Tempat, Tanggal Lahir/Usia <i>Place, Date of Birth/Age</i>	: Malang, 1 Februari 1972, 49 tahun per Desember 2021 <i>Malang, February 1, 1972, 49 years as of December 2021</i>
Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i>	: - Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Mataram (1995) - Pasca Sarjana Jurusan Pemasaran Unika Atmajaya Jakarta (2003) - <i>Bachelor of Economics, Department of Management, University of Mataram (1995)</i> - <i>Postgraduate Department of Marketing, Atmajaya University, Jakarta (2003)</i>

<p>Riwayat Jabatan <i>Position History</i></p>	<p>: - Asst. Account Officer PNM (2003 – 2004) - Asst. Relationship Manager Group Pembiayaan Jasa Manajemen Regional 1 (2004 – 2006) - Direktur Utama BPRS PNM Patuh Beramal (2006 – 2010) - Komisaris BPRS Patuh Beramal (2010 – 2011) - Koordinator Pendirian UlaMM Lombok PNM Cabang Denpasar (2011) - Pemimpin Cabang PNM Pekanbaru (2011 – 2012) - PIC Kadiv Kredit Program PNM (2012 – 2013) - Komisaris BPR Rizky Barokah (2012 – 2013) - Pemimpin Cabang PNM Padang (2013 – 2014) - Pemimpin Cabang PNM Jember (2014 – 2015) - Pemimpin Cabang PNM Madiun (2015 – 2016) - Kadiv PPM II PNM (2016 – 2017) - Direktur Utama PT MMI (2017 – sekarang) - Komisaris BPR Ampek Angkek (2013-2014) - <i>Asst. PNM Account Officer (2003 – 2004)</i> - <i>Asst. Relationship Manager Group Financing Management Services Regional 1 (2004 – 2006)</i> - <i>President Director of BPRS PNM Obeyes Charity (2006 – 2010)</i> - <i>Commissioner of BPRS Obeyes Charity (2010 – 2011)</i> - <i>Coordinator of Establishment of UlaMM Lombok PNM Denpasar Branch (2011)</i> - <i>PNM Pekanbaru Branch Manager (2011 – 2012)</i> - <i>PIC of the Head of the PNM Credit Program Division (2012 – 2013)</i> - <i>Commissioner of BPR Rizky Barokah (2012 – 2013)</i> - <i>PNM Padang Branch Manager (2013 – 2014)</i> - <i>PNM Jember Branch Manager (2014 – 2015)</i> - <i>PNM Madiun Branch Manager (2015 – 2016)</i> - <i>Head of PPM II PNM Division (2016 – 2017)</i> - <i>President Director of PT MMI (2017 – present)</i> - <i>Commissioner of BPR Ampek Angkek (2013-2014)</i></p>
<p>Sertifikasi <i>Certification</i></p>	<p>- Sertifikasi Direksi BPRS (CDBR – Certified Rural Bank Director) - BSMR Level 1 - Sertifikasi Pemimpin Cabang - LSP PNM - BNSP - Sertifikasi Instruktur - LSP Platina - BNSP - Certified Profesional Coach (CPC) - Coaching Indonesia - ICF - Sertifikasi Kompetensi LSP MSDMKI (CHRM) - BNSP - Certified Master Hand Writing Analysis (CMHA) - Licensed Practitioner of Neuro Linguistic Programming - Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Map - Sertifikasi Asesor Kompetensi - LSP PNM BNSP - International Trainer Certification - DISC International Trainer Certification - Learning Indonesia - MBTI Certification Program Step 1 & Step 2 - The Myers - Briggs Comp. Singapore - BPRS Board of Directors Certification (CDBR – Certified Rural Bank Director) - BSMR Level 1 - Branch Leader Certification - Instructor Certification - Certified Professional Coach (CPC) - Coaching Indonesia - ICF - HRM Competency Certification LSP MSDMKI (CHRM) - BNSP - Certified Master Hand Writing Analysis (CMHA) - Licensed Practitioner of Neuro Linguistic Programming - Tony Buzan Certified Practitioner in Mind Map - Competency Assessor Certification - LSP PNM BNSP - International Trainer Certification - DISC International Trainer Certification - Learning Indonesia - MBTI Certification Program Step 1 & Step 2 - The Myers - Briggs Comp. Singapore</p>

Sertifikasi <i>Certification</i>	: - Sertifikasi Pendamping UKM - LSP.K Nusantara (BNSP) - Certified Master Trainer - LSP Pelatinas (BNSP) - Certified Human Resources Professional (CHRP) - Unika Atmaja - SME Facilitator Certification - LSP.K Nusantara (BNSP) - Certified Master Trainer - LSP Pelatinas (BNSP) - Certified Human Resources Professional (CHRP) - Unika Atmaja
Dasar Pengangkatan <i>Basis of Appointment</i>	: Surat Keputusan Direksi Nomor SK-0013/PNM/DIR/VII/2021 tentang Penetapan Jabatan Karyawan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) tanggal 16 Juli 2021. <i>Decree of the Board of Directors Number SK-0013/PNM/DIR/VII/2021 concerning the Appointment of Employee Positions at PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dated July 16, 2021.</i>

Program Peningkatan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary Competency Improvement Program

Nama <i>Name</i>	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan <i>Types of Training and Competency Development/ Training Materials</i>	Waktu dan Tempat Pelaksanaan <i>Implementation Time and Place</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>
Lalu Dodot Patria Ary Suprianto	Certified OKR Professional (Bahasa Indonesia) <i>Certified OKR Professional (Indonesian)</i>	22 – 26 Maret 2021 <i>March 22 – 26, 2021</i>	KPI Institute
	Directorship Development Program <i>Directorship Development Program</i>	23 Maret – 24 Mei 2021 <i>March 23 – May 24, 2021</i>	PPM
	Executive Leadership Development Program <i>Executive Leadership Development Program</i>	12 Juli - 10 Oktober 2021 <i>July 12 - October 10, 2021</i>	PPM

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2021

Duties of Corporate Secretary Year 2021

Selama tahun 2021, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugasnya antara lain:

1. Menyelenggarakan rapat Direksi.
2. Menyelenggarakan rapat bisnis ULaMM, Mekaar dan lain-lain.
3. Menyelenggarakan Forum Kepala Divisi.
4. Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Menyelenggarakan RUPS Holding dan Anak Perusahaan.
6. Menyampaikan laporan wajib dan incidental ke stakeholder.
7. Mengurus perizinan dan usulan ke stakeholder.
8. Melakukan pendampingan Dewan Komisaris dan Direksi.
9. Melaksanakan tata persuratan dan pengarsipan persuratan Perusahaan.
10. Menyelenggarakan rapat bersama DPR Republik Indonesia.
11. Menyelenggarakan rapat bersama regulator.
12. Pembuatan digitalisasi kesekretariatan.

During 2021, the Corporate Secretary carried out the following duties:

1. Holding a meeting of the Board of Directors.
2. Organizing business meetings for ULaMM, Mekaar and others.
3. Organizing Division Heads Forum.
4. Holding Board of Commissioners and Board of Directors Meetings.
5. Organizing GMS of Holding and Subsidiaries.
6. Submit mandatory and incidental reports to stakeholders.
7. Manage permits and proposals to stakeholders.
8. Provide assistance to the Board of Commissioners and the Board of Directors.
9. Implement the correspondence and filing of the Company's correspondence.
10. Holding a meeting with the DPR of the Republic of Indonesia.
11. Holding meetings with regulators.
12. Secretarial digitization.

Satuan Pengawasan Internal

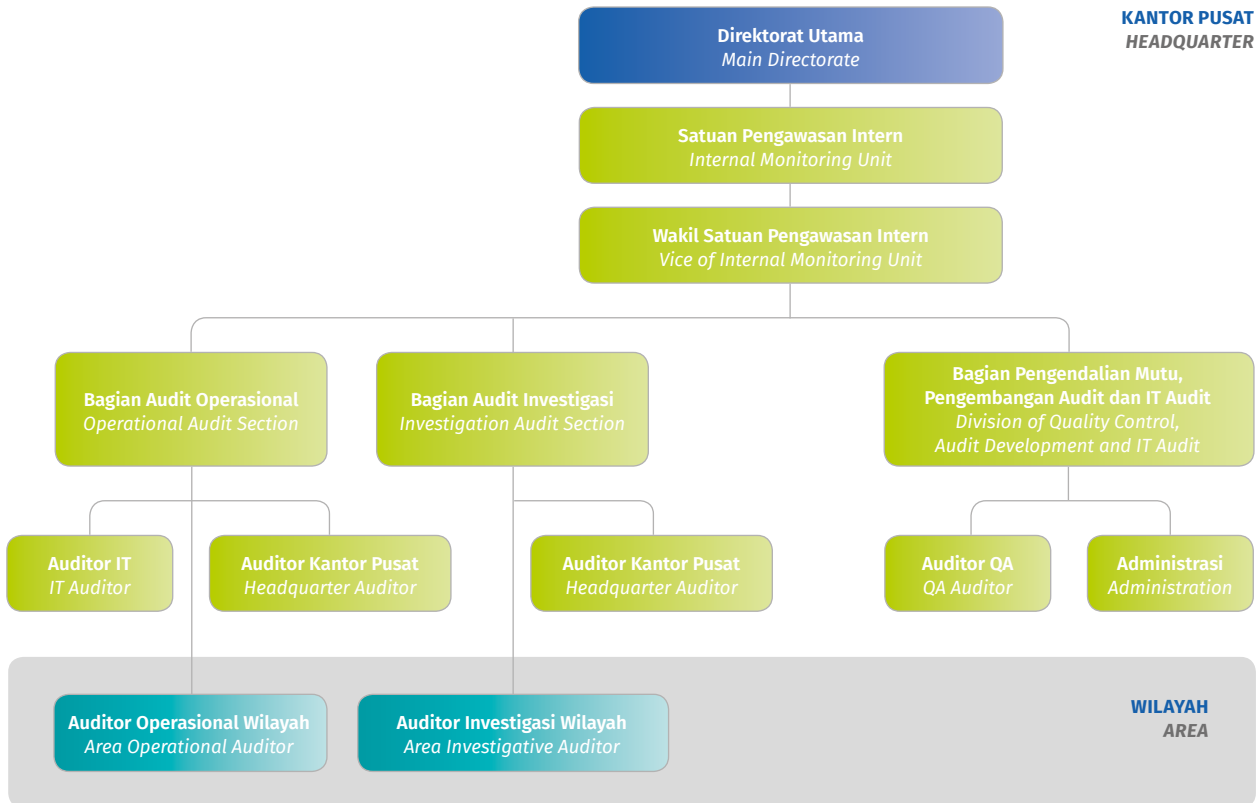
Satuan Pengawasan Internal memberi kontribusi kepada manajemen berupa jasa *assurance* dan *consulting* yang independen dan objektif untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan efektivitas kegiatan operasional perusahaan melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern, proses *governance* dengan melaksanakan audit operasional dan keuangan perusahaan.

Internal Audit Unit

The Internal Audit Unit contributed to management in the form of independent and objective assurance and consulting services to provide added value and increase the effectiveness of the company's operational activities through evaluating and increasing the effectiveness of risk management, internal control, governance processes by carrying out operational and financial audits of the company.

Struktur Organisasi Satuan Pengawasan Internal

Internal Audit Unit Organizational Structure



Kedudukan Satuan Pengawasan Internal dalam Struktur Organisasi

Satuan Pengawasan Internal berada langsung di bawah Direktur Utama, sehingga laporan yang terbitkan oleh Satuan Pengawasan Internal juga langsung disampaikan kepada Direktur Utama.

The Position of the Internal Audit Unit in Organizational Structure

The Internal Audit Unit was directly under the President Director, so that reports published by the Internal Audit Unit were also directly submitted to the President Director.

Profil Kepala Satuan Pengawasan Internal**Head of Internal Audit Unit Profile**

Periode 1 Januari 2021 - 17 Oktober 2021

Period January 1, 2021 - October 17, 2021

Sri Indrajaya Kepala Satuan Pengawasan Internal / Head of Internal Audit Unit	
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Tempat, Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Salatiga, 22 September 1966 <i>Salatiga, September 22, 1966</i>
Usia Age	56 Tahun per Desember 2021 <i>56 Years as of December 2021</i>
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Airlangga (1997) <i>Bachelor of Accounting, Faculty of Economics, Airlangga University (1997)</i>
Sertifikasi Certification	Certified Fraud Examiner (CFE)
Riwayat Jabatan Position History	Beliau pernah menjabat sebagai Auditor Ahli di BPKP (Januari 1998-Januari 2009), dan melanjutkan karirnya di PT PNM (Persero) Kepala Urusan Satuan Pengawas Internal (2009), Kepala Divisi Accounting, Controller, dan Corporate Planning (2009-2010), Kepala Divisi Accounting dan Operasi (2010-2011), Pemimpin Cabang Yogyakarta (2011-2013), Pemimpin Cabang Tasikmalaya (2013), Pemimpin Cabang Pontianak (2013-2015), Pemimpin Cabang Pontianak dan Koordinator Cabang Pontianak dan Sintang (2015-2017), Pemimpin Cabang Banjarmasin (2017-2018), dan Kepala Divisi Pembinaan dan Pengawasan ULaMM (Oktober-Desember 2018). <i>Served as Expert Auditor at BPKP (January 1998-January 2009), and continued his career at PT PNM (Persero) Head of Internal Supervisory Unit Affairs (2009), Head of Accounting, Controller, and Corporate Planning Division (2009-2010), Head of Accounting and Operations Division (2010-2011), Yogyakarta Branch Manager (2011-2013), Tasikmalaya Branch Manager (2013), Pontianak Branch Manager (2013-2015), Pontianak Branch Manager and Pontianak and Sintang Branch Coordinator (2015-2017), Banjarmasin Branch Manager (2017-2018), and Head of the ULaMM Development and Supervision Division (October-December 2018).</i>
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Beliau diangkat sebagai Kepala Satuan Pengawas Intern sejak 4 Januari 2019, berdasarkan Surat No. SK-0137/PNM/DIR/I/19. <i>Appointed as Head of the Internal Audit Unit since January 4, 2019, based on Letter No. SK-0137/PNM/DIR/I/19.</i>

Periode 18 Oktober 2021 - 31 Desember 2021

Period October 18, 2021 - December 31, 2021

Siswo Pujono Kepala Satuan Pengawasan Internal / Head of Internal Audit Unit	
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Tempat, Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Magelang / 01 Maret 1966 <i>Magelang / March 01, 1966</i>
Usia Age	55 Tahun per Desember 2021 <i>55 Years as of December 2021</i>
Riwayat Pendidikan Educational Background	D4, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (Lulus Tahun 1994) <i>D4, State College of Accountancy (Graduated 1994)</i>

Sertifikasi <i>Certification</i>	<i>Certified Internal Audit (CIA)</i>
Riwayat Jabatan <i>Position History</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 15-Aug-2013 sd 14-Nov-2013 : Audit Investigator Cabang Semarang • 01-Oct-2014 sd 01-Nov-2015 : Kepala Bagian Audit Operasional • 02-Nov-2015 sd 31-Mar-2016 : Pj. Kepala Divisi Satuan Pengawas Internal • 01-Apr-2016 sd 11-Feb-2018 : Kepala Divisi Manajemen Risiko dan GCG • 12-Feb-2018 sd 23-Oct-2018 : Kepala Divisi Pembinaan dan Pengawasan ULaMM • 24-Oct-2018 sd 01-Sep-2019 : Kepala Divisi Pembinaan dan Pengawasan Mekaar • 02-Sep-2019 sd 17-Oct-2021 : Kepala Divisi Pembinaan dan Monitoring Bisnis Mekaar • 18-Oct-2021 sd sekarang : Kepala Satuan Pengawasan Intern • 15-Aug-2013 to 14-Nov-2013 : Semarang Branch Investigator Audit • 01-Oct-2014 to 01-Nov-2015 : Head of Operational Audit Bagian • 02-Nov-2015 to 31-Mar-2016 : PIC Head of Internal Supervisory Unit • 01-Apr-2016 to 11-Feb-2018 : Head of Risk Management and GCG Division • 12-Feb-2018 to 23-Oct-2018 : Head of ULaMM Guidance and Supervision Division • 24-Oct-2018 to 01-Sep-2019 : Head of Division of Guidance and Supervision of Mekaar • 02-Sep-2019 to 17-Oct-2021 : Head of Mekaar Business Development and Monitoring Division • 18-Oct-2021 until now : Head of Internal Control Unit
Dasar Pengangkatan <i>Basis of Appointment</i>	<p>Beliau diangkat sebagai Kepala Satuan Pengawas Intern sejak 18 Oktober 2021, berdasarkan Surat No. SK-0033/PNM/DIR/X/21.</p> <p><i>The person was appointed as Head of the Internal Audit Unit since October 18, 2021, based on Letter No. SK-0033/PNM/DIR/X/21.</i></p>

Program Peningkatan Kompetensi Satuan Pengawasan Internal

Competency Improvement Program for Internal Audit Unit

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan <i>Types of Training and Competency Development/Training Materials</i>	Waktu <i>Time</i>	Tempat Pelaksanaan <i>Implementation Place</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>
Siswo Pujono	Kepala SPI <i>Head of SPI</i>	Certified Internal Audit Executive (CIAE)	08-Nov-21 sd 19-Nov-21	Webinar Online	Pusdiklat BPKP
		National Anti Fraud Conference	26-Nov-21 sd 26-Nov-21	Webinar Online	ACFE
Sri Indrajaya	Kepala SPI (Sebelumnya) <i>Head of SPI (Previously)</i>	Certified Internal Auditor	06-Sep-21 sd 23 Sept-21	Webinar Online	IIA
		Workshop SPI - Awareness COSO	08-Jan-21 sd 08-Jan-21	Webinar Online	Pusdiklatwas BPKP
Purnama Putra Nasution	Kepala Bagian <i>Head of Division</i>	Pelatihan Kapabilitas SPI Korporasi BUMN/D (Internal Audit Capability model) SOE/D Corporate SPI Capability Training (Internal Audit Capability model)	15-Mar-21 sd 19-Mar-21	Webinar Online	Pusdiklatwas BPKP
		Dukungan Industri Perbankan Nasional dan IKNB Terhadap UMKM Di Era Digital Ekonomi <i>Support of the National Banking Industry and IKNB for MSMEs in the Digital Economy Era</i>	23-Jul-21 sd 23-Jul-21	Webinar Online	Perbanas Institute
		Certified Internal Auditor	06-Sep-21 sd 23-Sep-21	Webinar Online	IIA
		Pelatihan Investigasi Divisi SPI <i>SPI Division Investigation Training</i>	30-Jun-21 sd 1-Jul-21	Webinar Online	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
		Workshop SPI - Awareness COSO	08-Jan-21 sd 08-Jan-21	Webinar Online	Pusdiklatwas BPKP
		Pengenalan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) berbasis 45001 : 2018 <i>Introduction to the Occupational Health and Safety Management System (SMK3) based on 45001 : 2018</i>	18-Feb-21 sd 18 Feb-21	Webinar Online	TCCPL

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan Types of Training and Competency Development/Training Materials	Waktu Time	Tempat Pelaksanaan Implementation Place	Penyelenggara Organizer
Fajri Dwi Nugroho	Kepala Bagian Head of Division	Pelatihan Kapabilitas SPI Korporasi BUMN/D (Internal Audit Capability model) SOE/D Corporate SPI Capability Training (Internal Audit Capability model)	15-Mar-21 sd 19-Mar-21	Webinar Online	Pusdiklatwas BPKP
		Sertifikasi CFE CFE Certification	06-Des-21 sd 10-Des-21	Webinar Online	Associations of Certified Fraud Examiner (ACFE)
		Pelatihan Investigasi Divisi SPI SPI Division Investigation Training	30-Jun-21 sd 01-Jul-21	Webinar Online	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Fevin Andriyanto	Kepala Bagian Head of Division	Dukungan Industri Perbankan Nasional dan IKNB Terhadap UMKM Di Era Digital Ekonomi Support of the National Banking Industry and IKNB for MSMEs in the Digital Economy Era	23-Jul-21 sd 23-Jul-21	Webinar Online	Perbanas Institute
		Certified Internal Auditor	06-Sep-21 sd 23 Sept-21	Webinar Online	IIA
		Pelatihan Kapabilitas SPI Korporasi BUMN/D (Internal Audit Capability model) Certified Internal Auditor SOE/D Corporate SPI Capability Training (Internal Audit Capability model)	15-Mar-21 sd 19-Mar-21	Webinar Online	Pusdiklatwas BPKP
		Pelatihan Investigasi Divisi SPI SPI Division Investigation Training	30-Jun-21 sd 01-Jul-21	Webinar Online	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
		Workshop SPI - Awareness COSO	08-Jan-21 sd 08-Jan-21	Webinar Online	Pusdiklatwas BPKP
		National Anti Fraud Conference	26-Nov-21 sd 26-Nov-21	Webinar Online	ACFE
Ery Herliana	Auditor SPI Kantor Pusat Head Office SPI Auditor	Sertifikasi QIA (Qualified Internal Auditor) QIA (Qualified Internal Auditor) Certification	13-Sep-21 sd 25-Sep-21	Webinar Online	YPIA
		Pelatihan Investigasi Divisi SPI SPI Division Investigation Training	30-Jun-21 sd 01-Jul-21	Webinar Online	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
		Workshop SPI - Awareness COSO SPI Workshop - COSO Awareness	08-Jan-21 sd 08-Jan-21	Webinar Online	Pusdiklatwas BPKP
Edwarivel	Auditor SPI Kantor Pusat Head Office SPI Auditor	Sertifikasi QIA (Qualified Internal Auditor) QIA (Qualified Internal Auditor) Certification	24-Mei-21 sd 04-Jun-21	Webinar Online	YPIA
		Pelatihan Investigasi Divisi SPI SPI Division Investigation Training	30-Jun-21 sd 01-Jul-21	Webinar Online	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
		Workshop SPI - Awareness COSO SPI Workshop - COSO Awareness	08-Jan-21 sd 08-Jan-21	Webinar Online	Pusdiklatwas BPKP
Budi Nugroho	Auditor SPI Kantor Pusat Head Office SPI Auditor	CISA Reviewer Course (Preparation) dan Sertifikasi CISA	16-Okt-21 sd 04-Des-21	Webinar Online	Pusitkom UI
		Pelatihan Investigasi Divisi SPI SPI Division Investigation Training	30-Jun-21 sd 01-Jul-21	Webinar Online	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
		Workshop SPI - Awareness COSO SPI Workshop - COSO Awareness	08-Jan-21 sd 08-Jan-21	Webinar Online	Pusdiklatwas BPKP
Putra Rio Mugi Santoso	Auditor SPI Kantor Pusat Head Office SPI Auditor	Pelatihan Investigasi Divisi SPI SPI Division Investigation Training	30-Jun-21 sd 01-Jul-21	Webinar Online	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
		Workshop SPI - Awareness COSO SPI Workshop - COSO Awareness	08-Jan-21 sd 08-Jan-21	Webinar Online	Pusdiklatwas BPKP
		Sertifikasi QIA (Qualified Internal Auditor) QIA (Qualified Internal Auditor) Certification	05-Jul-21 sd 17-Jul-21	Webinar Online	YPIA

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pelatihan dan Materi Pembangunan Kompetensi /Pelatihan Types of Training and Competency Development/Training Materials	Waktu Time	Tempat Pelaksanaan Implementation Place	Penyelenggara Organizer
Argado Sahala Pangaribuan	Auditor SPI Kantor Pusat Head Office SPI Auditor	Workshop SPI - Awareness COSO SPI Workshop - COSO Awareness	08-Jan-21 sd 08-Jan-21	Webinar Online	Pusdiklatwas BPKP
		Pelatihan Investigasi Divisi SPI SPI Division Investigation Training	30-Jun-21 sd 01-Jul-21	Webinar Online	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
		Sertifikasi QIA (Qualified Internal Auditor) QIA (Qualified Internal Auditor) Certification	05-Jul-21 sd 17-Jul-21	Webinar Online	YPIA
Yannuar Indarsyah	Auditor SPI Kantor Pusat Head Office SPI Auditor	Pelatihan Investigasi Divisi SPI SPI Division Investigation Training	30-Jun-21 sd 01-Jul-21	Webinar Online	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
		Workshop SPI - Awareness COSO SPI Workshop - COSO Awareness	08-Jan-21 sd 08-Jan-21	Webinar Online	Pusdiklatwas BPKP
Grace Sugiarsih	Auditor SPI Kantor Pusat Head Office SPI Auditor	Pelatihan Kapabilitas SPI Korporasi BUMN/D SOE/DCorporate SPI Capability Training	15-Mar-21 sd 19-Mar-21	Webinar Online	Pusdiklatwas BPKP
		Pelatihan Investigasi Divisi SPI SPI Division Investigation Training	30-Jun-21 sd 01-Jul-21	Webinar Online	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
		Workshop SPI - Awareness COSO SPI Workshop - COSO Awareness	08-Jan-21 sd 08-Jan-21	Webinar Online	Pusdiklatwas BPKP
R Sutrisna Fitrianta	Auditor SPI Kantor Pusat Head Office SPI Auditor	Pelatihan Investigasi Divisi SPI SPI Division Investigation Training	30-Jun-21 sd 01-Jul-21	Webinar Online	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
		Workshop SPI - Awareness COSO SPI Workshop - COSO Awareness	08-Jan-21 sd 08-Jan-21	Webinar Online	Pusdiklatwas BPKP
Ria Irtania Kuswardani	Auditor SPI Kantor Pusat Head Office SPI Auditor	Pelatihan Investigasi Divisi SPI SPI Division Investigation Training	30-Jun-21 sd 01-Jul-21	Webinar Online	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
		Workshop SPI - Awareness COSO SPI Workshop - COSO Awareness	08-Jan-21 sd 08-Jan-21	Webinar Online	Pusdiklatwas BPKP
Prayoga Putra Abdilla	Auditor SPI Cabang Medan Medan Branch SPI Auditor	Workshop SPI - Awareness COSO SPI Workshop - COSO Awareness	08-Jan-21 sd 08-Jan-21	Webinar Online	Pusdiklatwas BPKP
		Pelatihan Investigasi Divisi SPI SPI Division Investigation Training	30-Jun-21 sd 01-Jul-21	Webinar Online	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Muhammad Nofrizal	Auditor SPI Cabang Medan Medan Branch SPI Auditor	Workshop SPI - Awareness COSO SPI Workshop - COSO Awareness	08-Jan-21 sd 08-Jan-21	Webinar Online	Pusdiklatwas BPKP
		Pelatihan Investigasi Divisi SPI SPI Division Investigation Training	30-Jun-21 sd 01-Jul-21	Webinar Online	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
		Sertifikasi QIA (Qualified Internal Auditor) QIA (Qualified Internal Auditor) Certification	29-Mar-21 sd 10-Apr-21	Webinar Online	YPIA
Muhammad Ricky Ramdhona	Auditor SPI Cabang Palembang SPI Palembang Branch Auditor	Workshop SPI - Awareness COSO SPI Workshop - COSO Awareness	08-Jan-21 sd 08-Jan-21	Webinar Online	Pusdiklatwas BPKP
		Pelatihan Investigasi Divisi SPI SPI Division Investigation Training	30-Jun-21 sd 01-Jul-21	Webinar Online	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
		Sertifikasi QIA (Qualified Internal Auditor) QIA (Qualified Internal Auditor) Certification	29-Mar-21 sd 10-Apr-21	Webinar Online	YPIA
Freby Karisma	Auditor SPI Cabang Cirebon Cirebon Branch SPI Auditor	Pelatihan Investigasi Divisi SPI SPI Division Investigation Training	30-Jun-21 sd 01-Jul-21	Webinar Online	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan Types of Training and Competency Development/Training Materials	Waktu Time	Tempat Pelaksanaan Implementation Place	Penyelenggara Organizer
Joko Dwi Purwanto	Auditor SPI Cabang Solo Solo Branch SPI Auditor	Workshop SPI - Awareness COSO SPI Workshop - COSO Awareness	08-Jan-21 sd 08-Jan-21	Webinar Online	Pusdiklatwas BPKP
		Pelatihan Investigasi Divisi SPI SPI Division Investigation Training	30-Jun-21 sd 01-Jul-21	Webinar Online	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
		Sertifikasi QIA (Qualified Internal Auditor) QIA (Qualified Internal Auditor) Certification	13-Sep-21 sd 25-Sep-21	Webinar Online	YPIA
Budi Fajriansyah	Auditor SPI Cabang Yogyakarta Yogyakarta Branch SPI Auditor	Workshop SPI - Awareness COSO SPI Workshop - COSO Awareness	08-Jan-21 sd 08-Jan-21	Webinar Online	Pusdiklatwas BPKP
		Pelatihan Investigasi Divisi SPI SPI Division Investigation Training	30-Jun-21 sd 01-Jul-21	Webinar Online	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
		Sertifikasi QIA (Qualified Internal Auditor) QIA (Qualified Internal Auditor) Certification	24-Mei-21 sd 04-Jun-21	Webinar Online	YPIA
Abu Amar	Auditor SPI Cabang Kediri Kediri Branch SPI Auditor	Workshop SPI - Awareness COSO SPI Workshop - COSO Awareness	08-Jan-21 sd 08-Jan-21	Webinar Online	Pusdiklatwas BPKP
		Pelatihan Investigasi Divisi SPI SPI Division Investigation Training	30-Jun-21 sd 01-Jul-21	Webinar Online	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Dedi Sumartanto	Auditor SPI Cabang Surabaya Surabaya Branch SPI Auditor	Workshop SPI - Awareness COSO SPI Workshop - COSO Awareness	08-Jan-21 sd 08-Jan-21	Webinar Online	Pusdiklatwas BPKP
		Pelatihan Investigasi Divisi SPI SPI Division Investigation Training	30-Jun-21 sd 01-Jul-21	Webinar Online	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Irvan Reza	Auditor SPI Cabang Pontianak Pontianak Branch SPI Auditor	Pelatihan Investigasi Divisi SPI SPI Division Investigation Training	30-Jun-21 sd 01-Jul-21	Webinar Online	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Haedar	Auditor SPI Cabang Makassar Makassar Branch SPI Auditor	Pelatihan Investigasi Divisi SPI SPI Division Investigation Training	30-Jun-21 sd 01-Jul-21	Webinar Online	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
M Aris	Auditor SPI Cabang Makassar Makassar Branch SPI Auditor	Workshop SPI - Awareness COSO SPI Workshop - COSO Awareness	08-Jan-21 sd 08-Jan-21	Webinar Online	Pusdiklatwas BPKP
		Pelatihan Investigasi Divisi SPI SPI Division Investigation Training	30-Jun-21 sd 01-Jul-21	Webinar Online	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Syahril	Auditor SPI Cabang Makassar Makassar Branch SPI Auditor	Workshop SPI - Awareness COSO SPI Workshop - COSO Awareness	08-Jan-21 sd 08-Jan-21	Webinar Online	Pusdiklatwas BPKP
		Pelatihan Investigasi Divisi SPI SPI Division Investigation Training	30-Jun-21 sd 01-Jul-21	Webinar Online	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Yulia Kurniawati	Admin SPI SPI Admin	Workshop SPI - Awareness COSO SPI Workshop - COSO Awareness	08-Jan-21 sd 08-Jan-21	Webinar Online	Pusdiklatwas BPKP

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Internal

Kepala Satuan Pengawasan Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.

Party Who Lifts and Dismissed the Head of Internal Audit Unit

The Head of the Internal Audit Unit was appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.

Internal Audit Charter

Satuan Pengawasan Internal telah memiliki Internal Audit Charter yang ditetapkan pada tanggal 8 April 2021. Adapun isi dari Internal Audit Charter adalah sebagai berikut:

Bab I	Pendahuluan
Bab II	Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>
Bab III	Wewenang dan Pelaporan, serta Hubungan dengan Pihak Eksternal
Bab IV	Kode Etik Audit Intern
Bab V	Standar Profesi SPI
Bab VI	Penutup

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pengawasan Internal

Satuan Pengawasan Internal memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

1. Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Audit Tahunan (*Annual Audit Plan*).
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.
3. Melakukan audit dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diaudit pada semua tingkatan manajemen.
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
6. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
7. Bekerja sama dengan Komite Audit.
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit intern yang dilakukannya.
9. Melakukan audit khusus apabila diperlukan atau penugasan lainnya sesuai instruksi Direktur Utama.
10. Membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil tindak lanjut audit.
11. Memberikan jasa konsultasi kepada pihak intern PNM untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kualitas pengendalian, pengelolaan risiko, dan tata Kelola perusahaan sepanjang tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas SPI serta sumber daya yang memadai.
12. Pemberian jasa konsultasi yang dilakukan oleh SPI tidak dimaksudkan mengambil alih tanggungjawab manajemen.
13. Melakukan fungsi mitra kerja (*counter part*) pihak pemeriksa eksternal serta pihak lain yang berkepentingan.

Internal Audit Charter

The Internal Audit Unit has an Internal Audit Charter which was set on April 8, 2021. The contents of the Internal Audit Charter are as follows:

Chapter I	Introduction
Chapter II	Principles of Good Corporate Governance
Chapter III	Authority and Reporting, and Relations with External Parties
Chapter IV	Code of Ethics for Internal Audit
Chapter V	SPI Professional Standards
Chapter VI	Closing

Duties and Responsibilities of Internal Audit Unit

The Internal Audit Unit has the duties and responsibilities to:

1. Develop and implement an Annual Audit Plan.
2. Test and evaluate the implementation of internal control and risk management systems in accordance with company policy.
3. Perform audits and assess the efficiency and effectiveness of finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology and other activities.
4. Provide suggestions for improvement and objective information on the activities being audited at all levels of management.
5. Prepare an audit report and submit the report to the President Director and the Board of Commissioners.
6. Monitor, analyze, and report on the implementation of the improvements that have been suggested.
7. Cooperate with the Audit Committee.
8. Develop a program to evaluate the quality of its internal audit activities.
9. Conduct special audits if necessary or other assignments according to the President Director's instructions.
10. Assisting the President Director and the Board of Commissioners in conducting supervision by explaining operationally the planning, implementation, and monitoring of audit follow-up results.
11. Providing consulting services to PNM internal parties to provide added value and improve the quality of control, risk management, and corporate governance as long as it did not affect the independence and objectivity of SPI as well as adequate resources.
12. The provision of consulting services carried out by SPI was not intended to take over the responsibility of management.
13. Performing the function of the counterpart (*counter part*) of the external examiner and other interested parties.

Kewenangan Satuan Pengawasan Internal

Satuan Pengawasan Internal memiliki kewenangan untuk:

1. Melakukan akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, informasi karyawan, dana, asset, lokasi/area dan sumber daya lain PNM termasuk kepada perusahaan anak/afiliasi yang dimiliki PNM, serta melakukan verifikasi, wawancara, konfirmasi dan Teknik pemeriksaan lainnya kepada nasabah atau pihak lain berkaitan dengan pelaksanaan audit dan konsultasi.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
4. Melakukan koordinasi dengan Auditor, Assessor dan atau konsultan eksternal atas kegiatan *assurance* oleh pihak eksternal.
5. Meminta bantuan dari unit kerja lain atau menggunakan jasa pihak ekstern dalam pelaksanaan audit apabila dipandang perlu dengan mengikuti syarat yang ditetapkan oleh SPI.
6. Melakukan koordinasi dan membangun hubungan sinergis dengan unit/fungsi penyelenggaraan *assurance* lainnya (*compliance* unit dan manajemen risiko) guna memperoleh hasil audit yang komprehensif dan optimal.
7. Menentukan teknik dan prosedur pelaksanaan audit secara *onsite* atau *remote audit*.
8. Dapat memberikan opini hasil audit kepada seluruh auditan dan mendapatkan dukungan Direksi.

Komposisi Personil Satuan Pengawasan Internal

Jumlah personil SPI sebanyak 26 (dua puluh enam) orang dengan rincian posisi sebagai berikut.

Internal Audit Unit Authority

The Internal Audit Unit had the authority to::

1. Accessing all records, information, employees, funds, assets, locations/areas and other PNM resources, as well as verifying, interviewing and confirming customers and third parties related to audit activities.
2. Communicating directly with the Board of Directors, Board of Commissioners and/or Audit Committee as well as members of the Board of Directors, Board of Commissioners and/or Audit Committee.
3. Holding regular and incidental meetings with the Board of Directors, the Board of Commissioners and/or the Audit Committee.
4. Coordinating activities with external auditors' activities.
5. Requesting assistance from other work units or use the services of an external party in the conduct of the audit if deemed necessary by following the requirements set by SPI.
6. Coordinating and building synergistic relationships with other assurance unit/functions (compliance unit and risk management) in order to obtain comprehensive and optimal audit results.
7. Determining the techniques and procedures for conducting onsite or remote audits.
8. Providing an opinion on audit results to all auditees and get the support of the Board of Directors.

Internal Audit Unit Personnel Composition

The number of Internal Monitoring Unit (SPI) personnel is 26 (twenty-six) with details of the positions as follows.

No.	Nama Name	Posisi Position	Keterangan Information
1	Siswo Pujono	Kepala SPI Head of SPI	Penempatan Kantor Pusat Head Office Placement
2	Purnama Putra Nasution	Kepala Bagian Audit Operasional Head of Operational Audit	Penempatan Kantor Pusat Head Office Placement
3	Fajri Dwi Nugroho	Kepala Bagian Audit Investigasi Head of Investigation Audit	Penempatan Kantor Pusat Head Office Placement
4	Fevin Andryanto	Kepala Bagian Pengendalian Mutu dan Pengembangan Audit Head of Quality Control and Audit Development Bagian	Penempatan Kantor Pusat Head Office Placement
5	Edwarivel	Auditor Auditor	Penempatan Kantor Pusat Head Office Placement
6	Argado Sahala Pangaribuan	Auditor Auditor	Penempatan Kantor Pusat Head Office Placement
7	Ery Herliana	Auditor Auditor	Penempatan Kantor Pusat Head Office Placement
8	Yannuar Indarsyah	Auditor Auditor	Penempatan Kantor Pusat Head Office Placement

No.	Nama Name	Posisi Position	Keterangan Information
9	Putra Rio Mugi Santoso	Auditor IT <i>IT Auditor</i>	Penempatan Kantor Pusat <i>Head Office Placement</i>
10	Budi Nugroho	Auditor IT <i>IT Auditor</i>	Penempatan Kantor Pusat <i>Head Office Placement</i>
11	Bayu Iriawan	Auditor <i>Auditor</i>	Penempatan Kantor Pusat <i>Head Office Placement</i>
12	Ria Irtania Kuswardani	Auditor QA <i>QA Auditor</i>	Penempatan Kantor Pusat <i>Head Office Placement</i>
13	Raden Sutrisna Fitrianta	Auditor QA <i>QA Auditor</i>	Penempatan Kantor Pusat <i>Head Office Placement</i>
14	Grace Sugjarsih	Auditor QA <i>QA Auditor</i>	Penempatan Kantor Pusat <i>Head Office Placement</i>
15	Shinta Dwi Mustikawati	Auditor QA <i>QA Auditor</i>	Penempatan Kantor Pusat <i>Head Office Placement</i>
16	Prayoga Putra Abdila	Auditor <i>Auditor</i>	Penempatan Cabang Medan <i>Medan Branch Placement</i>
16	Muhammad Novrizal	Auditor <i>Auditor</i>	Penempatan Cabang Medan <i>Medan Branch Placement</i>
17	Muhammad Ricky Ramdhona	Auditor <i>Auditor</i>	Penempatan Cabang Palembang <i>Palembang Branch Placement</i>
18	Freby Karisma	Auditor <i>Auditor</i>	Penempatan Cabang Cirebon <i>Cirebon Branch Placement</i>
19	Joko Dwi Purwanto	Auditor <i>Auditor</i>	Penempatan Cabang Solo <i>Solo Branch Placement</i>
20	Wire Ariyayudanto	Auditor <i>Auditor</i>	Penempatan Cabang Yogyakarta <i>Yogyakarta Branch Placement</i>
21	Budi Fajriansyah	Auditor <i>Auditor</i>	Penempatan Cabang Yogyakarta <i>Yogyakarta Branch Placement</i>
22	Abu Amar	Auditor <i>Auditor</i>	Penempatan Cabang Surabaya <i>Surabaya Branch Placement</i>
23	Dedi Sumartanto	Auditor <i>Auditor</i>	Penempatan Cabang Surabaya <i>Surabaya Branch Placement</i>
24	Irvan Reza	Auditor <i>Auditor</i>	Penempatan Cabang Pontianak <i>Pontianak Branch Placement</i>
25	Haedar	Auditor <i>Auditor</i>	Penempatan Cabang Makassar <i>Makassar Branch Placement</i>
26	Syahril	Auditor <i>Auditor</i>	Penempatan Cabang Makassar <i>Makassar Branch Placement</i>
27	M. Aris	Auditor <i>Auditor</i>	Penempatan Cabang Makassar <i>Makassar Branch Placement</i>
28	Yulia Kurniawati	Administrasi SPI <i>SPI Administration</i>	Penempatan Kantor Pusat <i>Head Office Placement</i>

Sertifikasi Profesi Personil Satuan Pengawasan Internal

Professional Certification of Internal Audit Personnel Working Unit

No.	Nama Name	Sertifikasi Certification
1.	Siswo Pujono	Certified Internal Audit Executive (CIAE), Certified Risk Associate (CRA) Sertifikasi Manajemen Risiko Program Eksekutif bagi Perusahaan Pembiayaan <i>Certified Internal Audit Executive (CIAE), Certified Risk Associate (CRA) Executive Program Risk Management Certification for Financing Companies</i>
2.	Purnama Putra Nasution	Program Sertifikasi Qualified Internal Audit (QIA) – Tingkat Lanjutan Certified Risk Associate (CRA) <i>Qualified Internal Audit (QIA) Certification Program – Advanced Tingkat Certified Risk Associate (CRA)</i>
3.	Fevin Andryanto	Program Sertifikasi Qualified Internal Audit (QIA) – Tingkat Manajerial Certified Risk Associate (CRA) <i>Qualified Internal Audit (QIA) Certification Program – Managerial Level Certified Risk Associate (CRA)</i>
4.	Fajri Dwi Nugroho	Certified Risk Associate (CRA) <i>Certified Risk Associate (CRA)</i>
5.	Edwarivel	Program Sertifikasi Qualified Internal Audit (QIA) – Tingkat Lanjutan <i>Qualified Internal Audit (QIA) Certification Program – Advanced Tingkat</i>
6.	Putra Rio Mugi Santoso	Program Sertifikasi Qualified Internal Audit (QIA) – Tingkat Dasar <i>Qualified Internal Audit (QIA) Certification Program – Basic Level</i>
7.	Argado Sahala Pangaribuan	Program Sertifikasi Qualified Internal Audit (QIA) – Tingkat Dasar <i>Qualified Internal Audit (QIA) Certification Program – Basic Level</i>
8.	Prayoga Putra Abdila	Program Sertifikasi Qualified Internal Audit (QIA) – Tingkat Dasar <i>Qualified Internal Audit (QIA) Certification Program – Basic Level</i>
9.	Muhammad Novrizal	Program Sertifikasi Qualified Internal Audit (QIA) – Tingkat Dasar <i>Qualified Internal Audit (QIA) Certification Program – Basic Level</i>
10.	Muhammad Ricky Ramdhona	Program Sertifikasi Qualified Internal Audit (QIA) – Tingkat Dasar <i>Qualified Internal Audit (QIA) Certification Program – Basic Level</i>
11.	Joko Dwi Purwanto	Program Sertifikasi Qualified Internal Audit (QIA) – Tingkat Dasar <i>Qualified Internal Audit (QIA) Certification Program – Basic Level</i>
12.	Budi Fajriansyah	Program Sertifikasi Qualified Internal Audit (QIA) – Tingkat Dasar <i>Qualified Internal Audit (QIA) Certification Program – Basic Level</i>
13.	Abu Amar	Auditor Ahli Muda (BPKP) <i>Junior Expert Auditor (BPKP)</i>
14.	Haedar	Program Sertifikasi Qualified Internal Audit (QIA) – Tingkat Dasar <i>Qualified Internal Audit (QIA) Certification Program – Basic Level</i>
15.	Syahrit	Program Sertifikasi Qualified Internal Audit (QIA) – Tingkat Dasar <i>Qualified Internal Audit (QIA) Certification Program – Basic Level</i>
16.	M. Aris	Program Sertifikasi Qualified Internal Audit (QIA) – Tingkat Dasar <i>Qualified Internal Audit (QIA) Certification Program – Basic Level</i>

Kode Etik Auditor

Kode etik Auditor Satuan Pengawasan Internal telah diatur dalam Internal Audit Charter. Kode etik auditor mengatur antara lain:

Auditor SPI harus:

1. Menunjukkan kejujuran, obyektivitas dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya.
2. Menunjukkan loyalitas terhadap Perusahaan atau terhadap pihak yang dilayani.

Auditor's Code of Conduct

The code of ethics for the Internal Audit Unit Auditor had been stipulated in the Internal Audit Charter. The auditor's code of ethics regulates, among others:

SPI auditors had to:

1. Demonstrate honesty, objectivity and seriousness in carrying out tasks and fulfilling professional responsibilities.
2. Show loyalty to the company or to the parties it serves.

3. Menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya atau kegiatan-kegiatan yang dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara obyektif.
4. Melakukan jasa-jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya.
5. Mengusahakan berbagai upaya agar senantiasa memenuhi Standar Profesi Audit Internal.
6. Bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya.
7. Menggunakan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya, yaitu fakta-fakta yang tidak diungkap dapat:
 - a. Mendistorsi kinerja kegiatan yang di review.
 - b. Menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum dalam melaporkan hasil pekerjaannya.
8. Meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya. Auditor SPI wajib mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan.

Auditor SPI dilarang untuk:

1. Secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit intern atau mendiskreditkan Perusahaan.
2. Menerima imbalan dalam bentuk apapun dari karyawan, klien, pelanggan, pemasok, ataupun mitra bisnis organisasinya, sehingga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
3. Menggunakan informasi rahasia:
 - a. Untuk mendapat keuntungan pribadi.
 - b. Secara melanggar hukum.
 - c. Yang dapat menimbulkan kerugian terhadap Perusahaan.
4. Secara sadar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum.
5. Merangkap tugas dan/atau jabatan kegiatan operasional perusahaan maupun anak perusahaan.

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Internal Audit Tahun 2021

Selama tahun 2021, Perseroan telah melaksanakan audit operasional dan audit investigasi. Audit operasional dilaksanakan sebanyak 105 (seratus lima) kali. Sedangkan audit investigasi masing-masing dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala SPI menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Selain itu, SPI dapat mengatur jadwal pertemuan dengan Komite Audit untuk menyampaikan tembusan laporan-laporan hasil pekerjaan SPI seperti Laporan Hasil Audit, Laporan Realisasi RKAT dan laporan-laporan lainnya.

3. *Refrain from activities that may conflict with the interests of the organization or activities that can carry out tasks and fulfill professional responsibilities objectively.*
4. *Perform services that can be completed using their professional competence.*
5. *Make every effort to meet the Internal Audit Professional Standards.*
6. *Be careful and prudent in using the information obtained in carrying out their duties.*
7. *Use all important facts known to him, namely facts that are not disclosed can:*
 - a. *Distorting the performance of the activities being reviewed.*
 - b. *Cover up any unlawful practices in reporting the results of their work.*
8. *Improve the expertise and effectiveness and quality of the implementation of their duties. SPI auditors are required to attend continuing professional education.*

SPI auditors were prohibited from:

1. *Knowingly engage in actions or activities that can discredit the internal audit profession or discredit the Company.*
2. *Receive rewards in any form from employees, clients, customers, suppliers, or business partners of their organization, so that it can influence their professional judgment.*
3. *Use confidential information:*
 - a. *For personal gain.*
 - b. *In violation of the law.*
 - c. *Which can cause harm to the Company.*
4. *Knowingly engage in activities that are illegal or illegal.*
5. *Concurrently have duties and/or positions for the operational activities of the company and its subsidiaries.*

Brief Report on Implementation of Internal Audit Work Unit Year 2021

During 2021, the Company carried out operational audits and investigative audits. Operational audits were carried out 105 (one hundred and five) times. Meanwhile, each investigative audits were carried out 6 (six) times.

In carrying out his duties, the Head of SPI submitted an audit report to the President Director with a copy to the Board of Commissioners through the Audit Committee. In addition, SPI arranged a meeting schedule with the Audit Committee to submit copies of reports on the results of SPI's work such as Audit Results Reports, RKAT Realization Reports and other reports.

Adapun pelaksanaan rapat SPI yang telah dilakukan selama tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Pelaksanaan Rapat Internal SPI

No	Pelaksanaan
1	05 Februari 2021
2	12 Maret 2021
3	10 Mei 2021
4	07 Juni 2021
5	07 Juli 2021
6	20 September 2021
7	01 Oktober 2021
8	04 Oktober 2021

Pelaksanaan Rapat Kepala SPI dengan Dewan Komisaris

No	Pelaksanaan
1	25 Januari 2021
2	25 Februari 2021
3	29 Maret 2021
4	23 Juli 2021
5	25 Agustus 2021
6	28 September 2021
7	25 Oktober 2021
8	25 November 2021
9	29 Desember 2021

Pelaksanaan Rapat SPI dengan Komite Audit

No	Pelaksanaan
1	15 April 2021
2	17 September 2021
3	20 Desember 2021

Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Audit

Jumlah Temuan	: 736
Rekomendasi	: 852
Closed	: 780 (91,55%)
Open	: 72 (8,45%)

*Persentase Pemenuhan Tindak Lanjut tersebut merupakan realisasi tindak lanjut atas rekomendasi yang jatuh tempo sd 31 Desember 2021.
Percentage of Fulfillment of the Follow-up Represents the Realization of Follow-up on Recommendations Matured until December 31, 2021

The implementation of SPI meetings held during 2021 are as follows.

Implementation of Internal SPI Meeting

No	Implementation
1	February 05, 2021
2	March 12, 2021
3	May 10, 2021
4	June 07 2021
5	July 07, 2021
6	September 20, 2021
7	October 01, 2021
8	October 04, 2021

Implementation of the Head of SPI Meeting with the Board of Commissioners

No	Implementation
1	January 25, 2021
2	February 25, 2021
3	March 29, 2021
4	July 23, 2021
5	August 25, 2021
6	September 28, 2021
7	October 25, 2021
8	November 25, 2021
9	December 29, 2021

Implementation of SPI Meeting with the Audit Committee

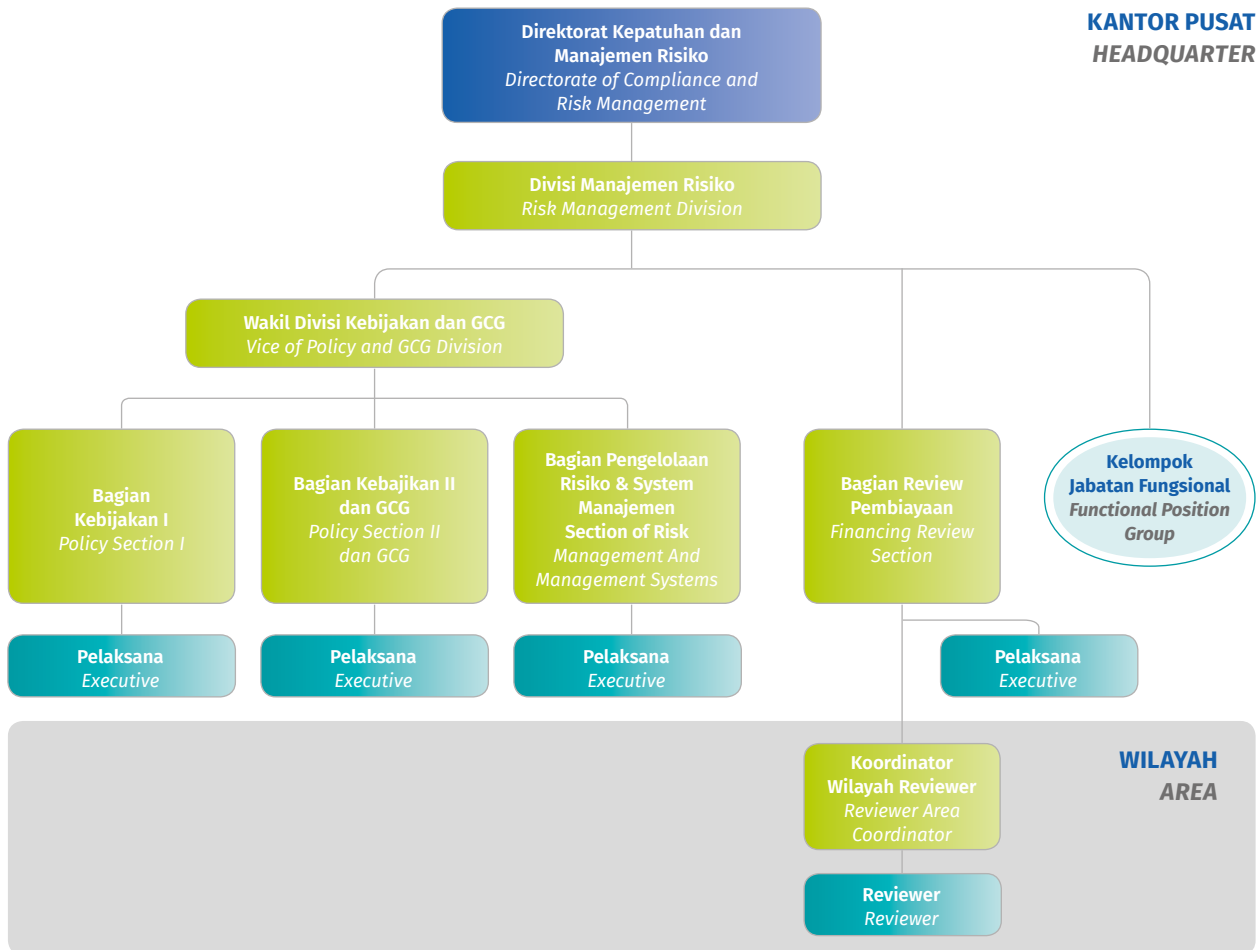
No	Implementation
1	April 15, 2021
2	September 17, 2021
3	December 20, 2021

Findings and Follow Up on Audit Results

Number of Findings	: 736
Recommendation	: 852
Closed	: 780 (91.55%)
Open	: 72 (8.45%)

Divisi Manajemen Risiko

Struktur Organisasi Divisi Manajemen Risiko



Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Manajemen Risiko

Tugas dan tanggung jawab Divisi Manajemen Risiko yaitu:

1. Menyusun strategi, program kerja, dan anggaran Divisi Manajemen Risiko.
2. Melakukan koordinasi dengan seluruh divisi, anak perusahaan dan afiliasi dalam rangka penerapan manajemen risiko di Perseroan.
3. Mengukur penerapan manajemen risiko Perseroan secara rutin dan dilaporkan ke instansi terkait.
4. Menyusun kebijakan bisnis dan operasional dengan mempertimbangkan *risk appetite* dan *risk tolerance* oleh Direksi sesuai kepentingan Perseroan.
5. Menyusun dan melakukan pengkinian *risk tools* yang digunakan dan dibutuhkan oleh bisnis dalam rangka memitigasi risiko pembiayaan Perseroan.

Risk Management Division

Organizational Structure Risk Management Division

Duties and Responsibilities of the Risk Management Division

Duties and responsibilities of the Risk Management Division, namely:

1. Develop strategies, work programs, and recommendations for the Risk Management Division.
2. Coordinate with all divisions, subsidiaries and affiliates in the context of implementing risk management in the Company.
3. Measure the implementation of the Company's risk management on a regular basis and reporting it to the relevant agencies.
4. Formulate business and operational policies taking into account risk appetite and risk tolerance by the Board of Directors in accordance with the interests of the Company.
5. Develop and update risk tools that are used and needed by the business in order to mitigate the risk of financing the Company.

6. Mengukur dan mengkoordinasikan penerapan tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) sesuai ketentuan dan mengupayakan pencapaian target nilai GCG Perseroan.
 7. Melakukan *review* proposal pembiayaan dalam rangka mitigasi risiko dan memastikan sesuai dengan kebijakan pembiayaan Perseroan yang berlaku.
 8. Melakukan *review* risiko bisnis terhadap pengajuan pembiayaan anak perusahaan dan afiliasi.
 9. Melakukan *review* risiko produk dalam rangka kecukupan mitigasi risiko dan memastikan produk yang dibuat sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku.
 10. Melaksanakan fungsi sebagai anggota Komite Penanganan Pelanggaran (KPP) sesuai ketentuan yang berlaku.
 11. Berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk memastikan pengelolaan sistem manajemen Perseroan berjalan secara efektif.
 12. Mensosialisasikan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Divisi Manajemen Risiko.
 13. Melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pengelolaan manajemen risiko.
 14. Melaporkan kegiatan pengelolaan manajemen risiko kepada Direktur yang membawahi fungsi manajemen risiko dan pihak terkait.
 15. Membina hubungan dengan pihak eksternal dalam rangka pengelolaan manajemen risiko.
6. *Measure and coordinate the implementation of good corporate governance in accordance with the provisions and strive to achieve the target value of the Company's GCG.*
 7. *Review financing proposals in the context of risk mitigation and ensure compliance with the Company's applicable financing policies.*
 8. *Conduct business risk reviews on subsidiary and affiliate financing applications.*
 9. *Conduct a product risk review in order to mitigate risk adequacy and ensure that products are made in accordance with applicable policies and procedures.*
 10. *Carry out functions as a member of the Violation Handling Committee (KPP) in accordance with applicable regulations.*
 11. *Coordinate with related work units to ensure effective management of the Company's management system.*
 12. *Disseminate every policy issued by the Risk Management Division.*
 13. *Monitor and evaluate risk management.*
 14. *Report the risk management activities to the Director in charge of the risk management unction and related parties.*
 15. *Foster relationships with external parties in the context of risk management.*

Profil Kepala Divisi Manajemen Risiko

Head of Risk Management Division Profile

Nama <i>Name</i>	Yoke Paramita
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia
Domisili <i>Domicile</i>	Depok
Tempat, Tanggal Lahir <i>Place and Date of Birth</i>	Denpasar, 29 Mei 1973 <i>Denpasar, May 29, 1973</i>
Usia <i>Age</i>	48 Tahun <i>48 years old</i>
Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i>	Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi STIE Perbanas (1996) <i>Bachelor of Economics Majoring in Accounting STIE Perbanas (1996)</i>
Riwayat Jabatan <i>Position History</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Divisi Manajemen Risiko (2020 – saat ini) - Kepala Divisi Pengelolaan Bisnis Mekaar II (2018 – 2020) - Kepala Divisi Pembinaan dan Pengawasan Mekaar I (2017 – 2018) - Wakil Kepala Divisi Operasi dan Bisnis Support (May 2017 – September 2017) - Kepala Divisi Bisnis Support Unit Bisnis Mekaar (2016 – 2017) - <i>Head of Risk Management Division (2020 – present)</i> - <i>Head of Mekaar II Business Management Division (2018 – 2020)</i> - <i>Head of Mekaar I Development and Supervision Division (2017 – 2018)</i> - <i>Deputy Head of Operations and Business Support Division (May 2017 – September 2017)</i> - <i>Head of Mekaar Business Unit Support Business Division (2016 – 2017)</i>
Dasar Pengangkatan <i>Basis of Appointment</i>	Surat Keputusan Direksi Nomor SK-0642/PNM/DIR/II/2020 <i>Decree of the Board of Directors Number SK-0642/PNM/DIR/II/2020</i>

Pengembangan Kompetensi Divisi Manajemen Risiko

Competency Development of Risk Management Division

No	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan <i>Types of Training and Competency Development/Training Materials</i>	Waktu dan Tempat Pelaksanaan <i>Implementation Time and Place</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>
1	Workshop Enterprise Risk Management berbasis ISO 31000:2018 <i>Workshop on Enterprise Risk Management based on ISO 31000:2018</i>	10-11 Februari 2021 - Online <i>February 10-11, 2021 - Online</i>	Internal <i>Internal</i>
2	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) berbasis ISO 45001 : 2018 <i>Occupational Health and Safety Management System (SMK3) based on ISO 45001 : 2018</i>	18 Februari 2021 - Online <i>February 18, 2021 - Online</i>	Eksternal <i>External</i>
3	Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Madya (<i>Certified Risk Associate</i>) <i>Intermediate Risk Management Training and Certification (Certified Risk Associate)</i>	27-28 Februari 2021; 10-11 September 2021; 14-15 Oktober 2021 - Online <i>February 27-28, 2021; September 10-11, 2021; October 14-15, 2021 - Online</i>	Internal <i>Internal</i>
4	Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Utama (<i>Certified Risk Professional</i>) <i>Key Risk Management Training and Certification (Certified Risk Professional)</i>	7 Maret 2021 - Online <i>March 7, 2021 - Online</i>	Eksternal <i>External</i>
5	Refreshment Credit Analysis	2-3 Maret 2021 - Online <i>March 2-3, 2021 - Online</i>	Internal <i>Internal</i>
6	Asean CPA in Business Community	27 Maret 2021 - Online <i>March 27 2021 - Online</i>	Eksternal <i>External</i>
7	Inhouse Training ISO 31000:2018	2-4 Juni 2021 - Online <i>June 2-4, 2021 - Online</i>	Internal <i>Internal</i>
8	Digital Risk Management	8 Juli 2021 - Online <i>July 8 2021 - Online</i>	Eksternal <i>External</i>
9	Refreshment Implementasi SMAP ISO 37001:2016 <i>Refreshment of ISO 37001:2016 SMAP Implementation</i>	16 Juli 2021 - Online <i>July 16, 2021 - Online</i>	Internal <i>Internal</i>
10	Implementasi UU Omnibus Law Cipta Kerja Klaster Perpajakan <i>Implementation of the Omnibus Law on Tax Cluster Job Creation</i>	23 Juli 2021 - Online <i>July 23, 2021 - Online</i>	Eksternal <i>External</i>
11	Dukungan Industri Perbankan Nasional dan IKNB Terhadap UMKM Di Era Digital Ekonomi <i>Support of the National Banking Industry and IKNB to MSMEs in the Digital Economy Era</i>	23 Juli 2021 - Online <i>July 23, 2021 - Online</i>	Eksternal <i>External</i>
12	Modern Advanced Excel for Management Accountants	13-14 Agustus 2021 - Online <i>August 13-14, 2021 - Online</i>	Eksternal <i>External</i>
13	Exclusive Course on Anticorruption Compliance for Corporate Practice	22-24 November 2021 - Online <i>November 22-24, 2021 - Online</i>	Eksternal <i>External</i>
14	National Anti Fraud Conference	26 November 2021 - Online <i>November 26, 2021 - Online</i>	Eksternal <i>External</i>
15	Inhouse Training Awareness ISO 9001:2015	9-10 Desember 2021 - Online <i>December 9-10, 2021 - Online</i>	Internal <i>Internal</i>

Sertifikasi Profesi Personil Divisi Manajemen Risiko

Risk Management Division Personnel Professional Certification

No	Nama <i>Name</i>	Sertifikasi <i>Certification</i>
1	Yoke Paramita	- Certified Risk Associate (CRA) - Certified Risk Professional (CRP)
2	Ibrahim Salim	- Certified Risk Associate (CRA) - Certified Risk Professional (CRP)
3	Ahmad Suhaemi	- Certified Risk Associate (CRA)
4	Mulyana Wiriakusuma	- Certified Risk Associate (CRA)
5	Roeswendra Agung A	- Certified Risk Associate (CRA)
6	Susila	- Certified Risk Associate (CRA)

Pelaksanaan Tugas Divisi Manajemen Risiko Tahun 2021

Selama tahun 2021, Divisi Manajemen Risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya antara lain:

A. Bidang Kebijakan, Sistem Manajemen, GCG dan Manajemen Risiko

1. Sosialisasi sistem manajemen di lingkungan Perusahaan.
2. Melakukan persiapan dan pendampingan untuk audit internal SMAP dan audit *Surveillance* setiap tahun.
3. Melakukan persiapan dan pendampingan untuk penilaian/pengukuran *Risk Maturity Level*.
4. Melakukan *review*, evaluasi dan perbaikan kebijakan operasional dan pembiayaan ULaMM dan Mekaar.
5. Melakukan persiapan dan pendampingan pengukuran GCG tahun 2020 oleh *Assessor* Eksternal.
6. Melakukan *review* dan tindak lanjut hasil penilaian GCG tahun 2020 (*Area of Improvement*).
7. Sosialisasi dan *counterpart* kebijakan korporasi, ULaMM dan Mekaar (operasional dan bisnis).
8. Melakukan *review* dan penerbitan Daftar Negatif Industri setiap 6 bulan.
9. Melakukan penyusunan kebijakan dan prosedur untuk produk baru.
10. Mengimplementasikan *digital policy* PNM (Portal Kebijakan melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kebijakan (SIMAK))
11. Melakukan penyusunan laporan penerapan Manajemen Risiko setiap Triwulan dan Tahunan dan melaporkan kepada regulator.
12. Melakukan peningkatan kompetensi SDM Divisi Manajemen Risiko secara reguler.

B. Bidang Reviu Pembiayaan ULaMM

1. Peningkatan kompetensi untuk seluruh Koordinator *Reviewer* Wilayah (KRW) dan *Reviewer* melalui kegiatan *e-learning* dan webinar
2. Memaksimalkan fungsi *Reviewer* dalam satu wilayah (*Cross* antar cabang)
3. Pembinaan/Pendampingan Kabag/Wakadiv/Kadiv kepada *Reviewer*/KRW secara berkala melalui rapat *online*.
4. Pendampingan KRW kepada *Reviewer* dan cabang secara berkala.
5. Membantu Cabang ULaMM dalam melakukan pembinaan/pendampingan ke ULaMM melalui webinar atau *e-training*.
6. Melakukan evaluasi atas hasil *review* proposal oleh *Reviewer* dan KRW

C. Program kerja lainnya

1. Melakukan rapat koordinasi Divisi Manajemen Risiko secara bulanan.
2. Membuat laporan kinerja Divisi Manajemen Risiko setiap 6 (enam) bulan.

Risk Management Division Tasks Implementation in 2021

During 2021, the Risk Management Division has carried out its duties and responsibilities, including:

A. Policy, Management System, GCG and Risk Management

1. *Socialization of the management system within the Company.*
2. *Prepare and assist for SMAP internal audits and Surveillance audits every year.*
3. *Prepare and provide assistance for the assessment/ measurement of the Risk Maturity Level.*
4. *Review, evaluate and improve the operational and financing policies of ULaMM and Mekaar.*
5. *Prepare and assist the 2020 GCG measurement by External Assessor.*
6. *Review and follow up on the results of the 2020 GCG assessment (Area of Improvement).*
7. *Socialization and counterpart of corporate policy, ULaMM and Mekaar (operational and business).*
8. *Reviewing and publishing the Industry Negative List every 6 months.*
9. *Prepare policies and procedures for new products.*
10. *Implementing digital policy PNM (Policy Portal through Policy Management Information System Application (SIMAK))*
11. *Prepare reports on the implementation of Risk Management every Quarterly and Annually and report to regulators.*
12. *Increase the competence of HR in the Risk Management Division on a regular basis.*

B. ULaMM Financing Review Division

1. *Competency improvement for all Regional Reviewer Coordinators (KRW) and Reviewers through e-learning activities and webinars*
2. *Maximizing the Reviewer's function in one area (Cross between branches)*
3. *Guidance/Assistance for Head of Division/Wakadiv/ Head of Division to Reviewers/KRW periodically through online meetings.*
4. *KRW assistance to reviewers and branches on a regular basis.*
5. *Assist the ULaMM Branch in providing guidance/ assistance to ULaMM through webinars or e-training.*
6. *Evaluate the results of the review of the proposal by the Reviewer and KRW*

C. Other work programs

1. *Conduct monthly Risk Management Division coordination meetings.*
2. *Make a performance report of the Risk Management Division every 6 (six) months.*

Komite di Bawah Direksi

Tim Asset And Liability Committee (ALCO)

Struktur dan Keanggotaan Tim Asset and Liability Committee (ALCO)

Anggota <i>Member</i>	Seluruh Direksi EVP Kepala Divisi yang membawahi unit kerja bidang Keuangan dan Pendanaan Kepala Divisi yang membawahi unit kerja Bisnis Kepala Divisi yang membawahi unit kerja bidang Perencanaan Kepala Divisi yang membawahi unit kerja bidang Manajemen Risiko dan GCG <i>All Directors</i> EVP <i>Head of Division in charge of the Finance and Funding work unit</i> <i>Head of Division in charge of Business work units</i> <i>Head of Division in charge of the Planning work unit</i> <i>Head of Division in charge of Risk Management and GCG</i>
Sekretaris <i>Secretary</i>	Kepala Divisi yang membawahi unit kerja bidang Keuangan dan Pendanaan <i>Head of Division in charge of the Finance and Funding work unit</i>

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Tim Asset and Liability Committee (ALCO)

Tugas dan tanggung jawab Tim ALCO antara lain sebagai berikut:

1. Penetapan suku bunga, *administration fee* dan *fee based income* lainnya dalam rangka mempertahankan tingkat profitabilitas, pertumbuhan asset yang stabil.
2. Menentukan tingkat likuiditas, dalam rangka mempertahankan ketersediaan dana dan menjaga agar alat-alat likuid yang ada sesuai dengan kebutuhan kas di masa depan.
3. Menentukan suku bunga dan jangka waktu pembiayaan, dalam rangka menjaga agar tidak terjadi kesenjangan posisi (*gap*) antara *asset* dan *liabilities*, serta menata struktur asset dan *liabilities* guna mencapai hasil yang maksimal.
4. Menentukan posisi *foreign exchange*, dalam rangka mengelola *foreign exchange risks*.

Personil Tim Asset and Liability Committee (ALCO)

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>
Arief Mulyadi	Anggota / <i>Member</i>
Tjatur H. Priyono	Anggota / <i>Member</i>
Anton Fahlevie	Anggota / <i>Member</i>
Sunar Basuki	Anggota / <i>Member</i>
Kindaris	Anggota / <i>Member</i>
Tony Wijayanto	Anggota / <i>Member</i>
Puji Riyanto	Anggota / <i>Member</i>
Kudiyanto	Anggota / <i>Member</i>

Committee Under the Board of Directors

Asset and Liability Committee (ALCO) Team

Structure and Membership of the Asset and Liability Committee (ALCO) Team

Description of Duties and Responsibilities of the Asset and Liability Committee (ALCO) Team

The duties and responsibilities of the ALCO Team are as follows:

1. Determining the interest rates, *administration fees* and other *fee based income* in order to maintain the level of profitability and stable asset growth.
2. Determining the level of liquidity, in order to maintain the availability of funds and to ensure that existing liquid assets are in line with future cash needs.
3. Determining the interest rate and financing period, in order to prevent a gap between assets and liabilities, and to organize the structure of assets and liabilities in order to achieve maximum results.
4. Determining the *foreign exchange* position, in order to manage *foreign exchange risks*.

Asset and Liability Committee (ALCO) Team Personnel

Nama Name	Jabatan Position
Dicky Fajrian	Anggota / Member
Endang Nurjani	Anggota / Member
Wisnandi Habang	Anggota / Member
Hersam Sudarisman	Anggota / Member
Yoke Paramita	Anggota / Member
Tony Wijayanto	Anggota / Member

Rapat Komite Tim Asset And Liability Committee (ALCO)**Asset And Liability Committee (ALCO) Team Committee Meeting**

No.	Tanggal Date	Agenda Agendas
1.	21 April 2021 April 21, 2021	ALCO ALMA TW I 2021. Update Audit Eksternal. / External Audit Updates
2.	19 Juli 2021 July 19, 2021	ALCO ALMA TW II 2021. Kinerja dan performance Juni dan Triwulan III 2021. / Performance and performance in June and Quarter III 2021.
3.	22 November 2021 November 22, 2021	Kinerja dan Performance Oktober 2021. / Performance and Performance October 2021. ALCO ALMA.

Pelaksanaan Tugas Tim Asset And Liability Committee (ALCO)

Selama tahun 2021, Tim Asset dan Liability Committee (ALCO) melaksanakan tugasnya dengan mengamankan dan optimalisasi target laba Perusahaan serta guna meminimalkan potensi risiko telah melakukan pembahasan mengenai penetapan *best lending rate* dan menentukan tingkat likuiditas.

Implementation of Duties of the Asset and Liability Committee (ALCO) Team

During 2021, the Asset and Liability Committee (ALCO) Team carried out its duties by securing and optimizing the Company's profit target and in order to minimize potential risks, it has discussed the determination of the best lending rate and determining the level of liquidity.

Write Off Executive Committee Meeting (WECOM)**Write Off Executive Committee Meeting (WECOM)****Struktur dan Keanggotaan Write Off Executive Committee Meeting (WECOM)****Structure and Membership of the Write Off Executive Committee Meeting (WECOM)**

Ketua Chairman	Direktur Utama President Director
Sekretaris Secretary	Divisi Remedial Remedial Division
Anggota Tetap Permanent Member	Direksi Executive Vice President (EVP) Kepala Divisi MRG Kepala Divisi Legal Directors Executive Vice President (EVP) Head of MRG Division Head of Legal Division
Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Member	Kepala Divisi PPU 1 atau PPU 2 Head of PPU 1 or PPU 2 Division

Uraian Tugas Dan Tanggung Jawab *Write Off Executive Committee Meeting (WECOM)*

Write Off Executive Committee Meeting (WECOM) bertugas untuk memutus pengajuan penghapusbukuan (*write off*) pembiayaan bermasalah.

Description of Duties and Responsibilities *Write Off Executive Committee Meeting (WECOM)*

The *Write Off Executive Committee Meeting (WECOM)* was tasked with deciding applications for write-offs of problem financing.

Rapat *Write Off Executive Committee Meeting (WECOM)*

Write Off Executive Committee Meeting (WECOM)

No.	Tanggal Date	Agenda Agendas
1.	29 Mei 2021 May 29, 2021	<i>Meeting Plan Write Off</i> Bulan Juni 2021 terkait nasabah yang terimbas gempa Palu <i>Meeting Plan Write Off in June 2021 regarding customers affected by the Palu earthquake</i>
2.	31 Agustus 2021 August 31, 2021	<i>Meeting Plan Write Off</i> Bulan Agustus 2021 <i>Meeting Plan Write Off in August 2021</i>
3.	30 Oktober 2021 October 30, 2021	<i>Meeting Plan Write Off</i> Bulan Oktober 2021 <i>Meeting Plan Write Off October 2021</i>
4.	30 November 2021 November 30, 2021	<i>Meeting Plan Write Off</i> Bulan November 2021 <i>Meeting Plan Write Off for November 2021</i>

Pelaksanaan Tugas *Write Off Executive Committee Meeting (WECOM)*

Selama tahun 2021, *Write Off Executive Committee Meeting (WECOM)* telah melakukan membahas pengajuan penghapusbukuan (*write off*) pembiayaan bermasalah.

Implementation of Duties of the *Write Off Executive Committee Meeting (WECOM)*

During 2020, the *Write Off Executive Committee Meeting (WECOM)* has discussed applications for write-offs of problem financing.

Komite Pengendalian Risiko Operasional

Operational Risk Control Committee

Struktur dan Keanggotaan Komite Pengendalian Risiko Operasional

Structure and Membership of the Operational Risk Management Committee

Ketua <i>Chairman</i>	Direktur Utama <i>President Director</i>
Sekretaris <i>Secretary</i>	Kepala Divisi Manajemen Risiko dan GCG <i>Head of Risk Management and GCG Divisi Division</i>
Anggota Tetap <i>Permanent Member</i>	Direksi <i>Executive Vice President (EVP)</i> Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Kepala Divisi Perencanaan, Riset dan Afiliasi Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM Kepala Divisi Pembinaan dan Pengawasan Mekaar Kepala Divisi Pembinaan dan Pengawasan ULaMM Kepala Divisi Legal Kepala Divisi Operasi Kepala Divisi Keuangan dan Pendanaan <i>Directors</i> <i>Executive Vice President (EVP)</i> <i>Head of Internal Control Unit (SPI)</i> <i>Head of Planning, Research and Affiliate Division</i> <i>Head of HR Management and Development Division</i> <i>Head of Mekaar Development and Supervision Division</i> <i>Head of ULaMM Development and Supervision Division</i> <i>Head of Legal Division</i> <i>Head of Operations Division</i> <i>Head of Finance and Funding Division</i>
Anggota Tidak Tetap <i>Non-Permanent Member</i>	Pejabat Unit Kerja lain sesuai kebutuhan <i>Other Work Unit Officials as needed</i>

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengendalian Risiko Operasional

Komite Pengendalian Risiko Operasional mempunyai kewenangan untuk memutuskan apakah suatu kerugian operasional dapat dibebankan sebagai beban Perusahaan dimana proses keputusannya melalui tingkatan persetujuan secara terjenjang untuk membatasi tingkat risiko dalam proses persetujuan pembebanan biaya kerugian operasional yang diajukan terkait dengan laporan kejadian risiko operasional.

Description of Duties and Responsibilities of the Operational Risk Management Committee

The Operational Risk Control Committee had the authority to decide whether an operational loss could be borne by the Company where the decision process went through a tiered approval level to limit the level of risk in the approval process for the proposed operational loss expense related to the operational risk incident report.

Pelaksanaan Tugas Komite Pengendalian Risiko Operasional

Selama tahun 2021 Komite Pengendalian Risiko melakukan pertimbangan dan memutuskan apakah suatu kerugian operasional dapat dibebankan sebagai beban Perusahaan.

Implementation of Duties of the Operational Risk Management Committee

During 2021 the Risk Control Committee considers and decides whether an operational loss can be borne by the Company.

Komite Investasi

Investment Committee

Struktur dan Keanggotaan Komite Investasi

Investment Committee Structure and Membership

Ketua <i>Chairman</i>	Direktur Utama (merangkap anggota) <i>President Director (concurrently member)</i>
Sekretaris <i>Secretary</i>	Kepala Divisi Keuangan dan Pendanaan <i>Head of Finance and Funding Division</i>
Anggota Tetap <i>Permanent member</i>	Direktur Utama Direktur Keuangan Direktur yang membawahi Manajemen Risiko & GCC Executive Vice President yang membawahi unit kerja bidang Keuangan Executive Vice President yang membawahi unit kerja bidang Legal Kepala Divisi yang membawahi unit kerja bidang Keuangan dan Pendanaan Kepala Divisi yang membawahi unit kerja bidang Perencanaan, Riset, dan Afiliasi Kepala Divisi yang membawahi unit kerja bidang Manajemen Risiko dan GCG Kepala Divisi yang membawahi unit kerja bidang Legal <i>President Director</i> <i>Director of Finance</i> <i>Director in charge of Risk Management & GCC</i> <i>Executive Vice President in charge of the Finance work unit</i> <i>Executive Vice President in charge of the Legal work unit</i> <i>Head of Division in charge of the Finance and Funding work unit</i> <i>Head of Division in charge of Planning, Research, and Affiliate work units</i> <i>Head of Division in charge of Risk Management and GCG</i> <i>Head of Division in charge of the Legal sector</i>

Personil Komite Investasi

Investment Committee Personnel

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>
Arief Mulyadi	Ketua / <i>Chairman</i>
Tjatur H. Priyono	Sekretaris / <i>Secretary</i>
Anton Fahlevi	Anggota / <i>Member</i>
Tony Wijayanto	Anggota / <i>Member</i>
Hersam Sudarisman	Anggota / <i>Member</i>
Yoke Paramita	Anggota / <i>Member</i>

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Komite Investasi

Komite Investasi memiliki wewenang untuk memutuskan dan menyetujui usulan rancangan Investasi Perusahaan atas penyertaan modal kepada anak perusahaan baik PNM VC maupun PNM IM, selanjutnya memutuskan strategi Investasi dan strategi lainnya termasuk penghentian Investasi dan/ atau pengaturan khusus terkait Investasi berdasarkan hasil evaluasi kinerja Investasi secara berkala.

Pelaksanaan Tugas Komite Investasi

Selama tahun 2021, tidak terdapat Investasi penyertaan modal kepada perusahaan anak baik PNM VC maupun PNM IM, dengan demikian pada tahun 2021 tidak terdapat pelaksanaan tugas komite Investasi.

Komite Produk

Struktur dan Keanggotaan Komite Produk

Ketua <i>Chairman</i>	Direktur Utama <i>President Director</i>
Sekretaris <i>Secretary</i>	Kepala Divisi yang membawahi unit kerja bidang Perencanaan <i>Head of Division in charge of the Planning work unit</i>
Anggota Tetap <i>Permanent member</i>	Direksi <i>Executive Vice President</i> terkait Kepala Divisi yang membawahi unit kerja bidang Manajemen Risiko dan GCG Kepala Divisi yang membawahi unit kerja Bisnis Kepala Divisi yang membawahi unit kerja bidang Keuangan dan Pendanaan Kepala Divisi yang membawahi unit kerja bidang Legal Kepala Divisi yang membawahi unit kerja bidang IT Operation dan Infrastruktur Kepala Divisi yang membawahi unit kerja bidang IT Strategic Development Kepala Divisi yang membawahi unit kerja bidang Pengembangan Kapasitas Usaha <i>Directors</i> <i>Related Executive Vice President</i> <i>Head of Division in charge of Risk Management and GCG</i> <i>Head of Division in charge of Business work units</i> <i>Head of Division in charge of the Finance and Funding work unit</i> <i>Head of Division in charge of the Legal sector</i> <i>Head of Division in charge of the IT Operation and Infrastructure work unit</i> <i>Head of Division in charge of the IT Strategic Development work unit</i> <i>Head of Division in charge of the Business Capacity Development work unit</i>

Description of Duties and Responsibilities of the Investment Committee

The Investment Committee has the authority to decide and approve the Company's proposed investment plan for equity participation in subsidiaries, both PNM VC and PNM IM, then decide on the Investment Strategy and other strategies, including termination of Investment and/or special arrangements related to Investment based on the results of periodic evaluation of Investment performance.

Implementation of the Tasks of the Investment Committee

In 2021, there is no investment in equity participation in subsidiary companies, both PNM VC and PNM IM; thus, in 2021, there will be no implementation of the duties of the Investment Committee.

Product Committee

Product Committee Structure and Membership

Personil Komite Produk

Product Committee Personnel

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>
Arief Mulyadi	Ketua / <i>Chairman</i>
Hersam Sudarisman	Sekretaris / <i>Secretary</i>
Yoke Paramita	Anggota / <i>Member</i>
Wisnandi Habang	Anggota / <i>Member</i>
Endang Nurjani	Anggota / <i>Member</i>
Dicky Fajrian	Anggota / <i>Member</i>

Nama Name	Jabatan Position
Cut Ria Dewanti	Anggota / Member
Kudiyanto	Anggota / Member
Puji Riyanto	Anggota / Member
Hendrina Erning Keswati	Anggota / Member

Uraian Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Produk

1. Menyetujui usulan rancangan pembaruan, pengembangan dan penyempurnaan produk, yang diajukan oleh Divisi yang membawahi unit kerja bidang perencanaan atau Divisi yang bertugas melakukan pengembangan produk Perusahaan yang sebelumnya telah review oleh Divisi yang membawahi unit kerja bidang Manajemen Risiko dan GCG, Divisi yang membawahi unit kerja bidang Legal, Divisi yang membawahi unit kerja Bisnis
2. Memutuskan strategi pemasaran dan/atau strategi lain termasuk penghentian pemasaran dan/atau pengaturan khusus terkait produk berdasarkan hasil evaluasi kinerja produk secara berkala dengan tujuan efektivitas implementasi produk.

Pelaksanaan Tugas Komite Produk

Selama tahun 2021, Komite Produk telah melakukan pembahasan mengenai pengembangan dan penyempurnaan produk Mekaar WASH untuk dapat di pilot projectkan dan ditetapkan sebagai produk Mekaar Pendamping, terkait dengan pengajuan persyaratan produk tersebut, mitigasi risiko atas produk Mekaar WASH, merancang baik strategi pemasaran maupun strategi bisnis, serta pengurusan legalitas terkait produk Mekaar WASH tersebut.

Komite Manajemen Risiko

Struktur Dan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko

Ketua Chairman	Direktur Utama President Director
Sekretaris Secretary	Kepala Divisi yang membawahi unit kerja bidang Manajemen Risiko Head of Division in charge of the Risk Management work unit
Anggota Tetap Permanent Member	Direksi Holding EVP Holding Directors EVP
Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Member	Direksi Anak Perusahaan Kepala Divisi Holding Subsidiary Directors Head of Holding Division

Description of Duties and Responsibilities of the Product Committee

1. Approving the proposal for product renewal, development and refinement plans submitted by the Division that monitored the planning work unit or the Division in charge of developing the Company's products which had previously been reviewed by the Division in charge of the Risk Management and GCG work unit, the Division in charge of the work unit in the Legal field, the division in charge of the Business work unit
2. Deciding on marketing strategies and/or other strategies including discontinuation of marketing and/or special product-related arrangements based on the results of periodic product performance evaluations with the aim of product implementation effectiveness.

Implementation of Duties of the Product Committee

In 2021, the Product Committee has discussed the development and improvement of Mekaar WASH products so that they can be pilot projected and designated as Companion Mekaar products, related to the submission of product requirements, risk mitigation of Mekaar WASH products, designing both marketing and business strategies, as well as legality management related to the Mekaar WASH product.

Risk Management Committee

Structure and Membership of Risk Management Committee

Uraian Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

1. Menetapkan kebijakan dan peraturan yang berlaku universal di seluruh jajaran Perusahaan Induk (*Holding*) dan sebagai bahan acuan bagi Anak Perusahaan/Afiliasi, terutama kebijakan yang berkaitan dengan bisnis dan operasional.
2. Menyetujui usulan rancangan kebijakan bisnis dari divisi/unit yang sebelumnya telah dievaluasi oleh Divisi yang membawahi unit kerja bidang Manajemen Risiko berdasarkan aspek-aspek pengelolaan dan pengendalian risiko serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengkaji proposal mengenai aktivitas/produk baru dan menilai kemampuan Perusahaan untuk melakukan aktivitas/produk baru tersebut melalui hasil review dari Divisi yang membawahi unit kerja bidang Manajemen Risiko.
4. Menyusun *contingency plan* dalam kondisi tidak normal (*worst case scenario*).
5. Memantau kecukupan permodalan Perusahaan terhadap *risk exposure*.
6. Mengevaluasi efektivitas sistem manajemen risiko yang diterapkan.
7. Mempertimbangkan dan memberikan persetujuan/penolakan terhadap penyimpangan atas pedoman kebijakan yang telah ditetapkan.
8. Memantau dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan risiko pengelolaan perusahaan berdasarkan laporan dari unit terkait.

Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko

Selama tahun 2021, Komite Manajemen Risiko telah melakukan pembahasan mengenai kebijakan dan peraturan yang berlaku universal di seluruh sasaran perusahaan, menyetujui usulan rancangan kebijakan bisnis, mengkaji proposal mengenai aktivitas/produk baru, menyusun *contingency plan*. Selain itu juga memantau kecukupan permodalan Perusahaan terhadap *risk exposure*, mengevaluasi efektivitas sistem manajemen risiko yang diterapkan, mempertimbangkan, dan memberikan persetujuan/penolakan terhadap penyimpangan atas pedoman kebijakan yang telah ditetapkan serta memantau dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan risiko pengelolaan perusahaan berdasarkan laporan dari unit terkait.

Komite Talenta

Dalam rangka penataan pola karir di lingkungan Perseroan maka dibentuk Komite Talenta yang bertugas untuk melakukan proses identifikasi, klasifikasi, pengembangan serta pergerakan talenta.

Duties and Responsibilities of the Risk Management Committee

1. *Stipulating policies and regulations that are applicable across the holding company to serve as a guidance for subsidiaries/affiliations, especially policies related to business and operations.*
2. *Approving draft proposals on business policies from a division/unit, which has been evaluated by the Division in charge of Risk Management Unit by considering aspects of risk management and control as well as the prevailing laws and regulations.*
3. *Reviewing proposals for new activities/products and assessing the Company's ability to run the new activities/products based on the review of the Division in charge of Risk Management Unit.*
4. *Preparing a contingency plan for the worst case scenario.*
5. *Monitoring the sufficiency of the Company's capital against risk exposure.*
6. *Evaluating the effectiveness of the risk management system.*
7. *Considering and granting approval/rejection of any deviations on the established policy guidelines.*
8. *Monitoring and supervising the implementation of policies and the risks of the Company's management based on the report from related units.*

Implementation of Risk Management Committee Duties

During 2021, the Risk Management Committee discussed policies and regulations that apply universally across all company targets, approved draft business policies, reviewed proposals for new activities/products, prepared a contingency plan. In addition, it also monitors the capital adequacy of the Company against risk exposure, evaluates the effectiveness of the applied risk management system, considers, and approves/rejects deviations from established policy guidelines as well as monitors and supervises the implementation of policies and company management risks based on reports from related units.

Talent Committee Duties

In the context of structuring the career pattern within the Company, a Talent Committee was formed which was tasked with carrying out the process of identification, classification, development and movement of talents.

Struktur dan Keanggotaan Komite Talenta**Talent Committee Structure and Membership**

Ketua <i>Chairman</i>	Direktur Utama <i>President Director</i>
Sekretaris <i>Secretary</i>	Direktur Keuangan dan/atau Direktur yang membawah SDM <i>Director of Finance and/or Director in charge of HR</i>
Anggota <i>Member</i>	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Direktur Bisnis 1 <i>Director of Compliance & Risk Management</i> <i>Business Director 1</i>

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Komite Talenta

Komite Talenta memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

1. Akuisisi talenta
2. Klasifikasi talenta
3. Pengembangan talenta
4. Pergerakan talenta
5. Retensi talenta

Pelaksanaan Tugas Komite Talenta

Selama tahun 2021, Komite Talenta telah melakukan pembahasan mengenai akuisisi talenta, klasifikasi talenta, pengembangan talenta, pergerakan talenta, dan retensi talenta.

Komite Penempatan Posisi Dan Karir Karyawan

Dalam rangka pengelolaan administrasi yang baik dan untuk memberikan apresiasi, pengembangan serta kesempatan kepada karyawan, maka diperlukan Komite Penempatan Posisi dan Karir Karyawan yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan.

Struktur dan Keanggotaan Komite Penempatan Posisi dan Karir Karyawan

Susunan keanggotaan Komite Penempatan Posisi dan Karir Karyawan meliputi namun tidak terbatas pada:

1. Kepala Bagian SDM
2. Pemimpin Cabang ULaMM/Regional Manager Mekaar/
Kepala Divisi Terkait
3. Kepala Divisi SDM
4. Direksi

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Komite Penempatan Posisi dan Karir Karyawan

Komite Penempatan Posisi dan Karir Karyawan memiliki tugas utama dalam membantu Direksi untuk:

1. Merumuskan syarat-syarat atau kriteria dasar yang dibutuhkan untuk pengisian suatu jabatan tertentu di Perseroan yang harus dipenuhi oleh karyawan untuk dapat menduduki jabatan dimaksud.
2. Merumuskan mekanisme penilaian yang akan digunakan untuk pengisian jabatan tertentu di Perseroan.
3. Melakukan seleksi terhadap karyawan yang akan dianggap memiliki kecakapan yang memadai untuk suatu pengisian jabatan tertentu.

Description of Duties and Responsibilities of the Talent Committee

The Talent Committee had the duties and responsibilities to:

1. Acquisition of talent
2. Classification of talents
3. Talent development
4. Movement of talents
5. Talent retention

Talent Committee Duties

During 2021, the Talent Committee has discussed talent acquisition, talent classification, talent development, talent movement, and talent retention.

Employee Position And Career Placement Committee

In the framework of good administrative management and to provide appreciation, development and opportunities to employees, it is necessary to have an Employee Placement and Career Committee in accordance with the needs of the Company.

Structure and Membership of the Employee Position and Career Placement Committee

The membership composition of the Employee Position and Career Placement Committee includes but is not limited to:

1. Head of HR
2. Branch Manager ULaMM/Regional Manager Mekaar/
Head of Related Division
3. Head of the HR Division
4. Directors

Description of Duties and Responsibilities of the Employee Placement and Career Committee

The Employee Position and Career Placement Committee has the main task of assisting the Board of Directors to:

1. Formulating the terms or basic criteria needed to fill a certain position in the Company that must be fulfilled by employees in order to occupy the position concerned.
2. Formulating an appraisal mechanism that will be used to fill certain positions in the Company.
3. Selecting employees who will be deemed to have adequate skills for a certain position filling.

4. Merekomendasikan karyawan untuk pengisian suatu jabatan tertentu dengan mendasarkan kepada hasil seleksi yang telah dilakukan untuk mendapatkan persetujuan Direksi.
5. Menganalisa dan mengevaluasi kinerja karyawan yang sudah menjabat.
6. Memutuskan dan mendiskusikan kebijakan-kebijakan remunerasi yang diberikan kepada karyawan.

Pelaksanaan Tugas Komite Penempatan Posisi dan Karir Karyawan

Selama tahun 2021, Komite Penempatan Posisi dan Karir Karyawan telah melakukan pembahasan mengenai syarat-syarat atau kriteria dasar yang dibutuhkan untuk pengisian suatu jabatan tertentu, mekanisme penilaian yang akan digunakan untuk pengisian jabatan tertentu, melakukan seleksi terhadap karyawan yang akan dianggap memiliki kecakapan yang memadai untuk suatu pengisian jabatan tertentu. Selain itu juga merekomendasikan karyawan untuk pengisian suatu jabatan tertentu, menganalisis dan mengevaluasi kinerja karyawan yang sudah menjabat, memutuskan dan mendiskusikan kebijakan-kebijakan remunerasi yang diberikan kepada karyawan.

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Struktur dan Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi

Pengarah <i>Director</i>	Direksi <i>Directors</i>
Ketua <i>Chairman</i>	Direktur yang membawahi fungsi Teknologi Informasi <i>Director in charge of Information Technology function</i>
Sekretaris <i>Secretary</i>	Kepala Divisi yang membawahi fungsi Teknologi Informasi <i>Head of Division in charge of Information Technology function</i>
Anggota Tetap <i>Permanent Member</i>	<i>Executive Vice President (EVP)</i> Kepala Divisi yang membawahi fungsi Manajemen Risiko Kepala Fungsi yang membawahi fungsi perencanaan Perusahaan <i>Executive Vice President (EVP)</i> <i>Head of Division in charge of the Risk Management function</i> <i>Head of Function in charge of the Company's planning function</i>
Anggota Tidak Tetap <i>Non-Permanent Member</i>	Kepala Divisi sebagai pemilik aplikasi/sistem IT dan/atau terkait proyek-proyek IT. <i>Head of Division as owner of IT application/system and/or related IT projects.</i>

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi

Tugas dan wewenang dari Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah:

1. Menyusun dan menetapkan rencana strategis teknologi informasi yang sesuai dengan rencana jangka panjang perusahaan dengan memperhatikan faktor efektivitas, keamanan dan efisiensi serta hal-hal sebagai berikut:
 - a. Rencana pelaksanaan (*road map*) untuk mencapai kebutuhan teknologi informasi yang mendukung strategi bisnis Perseroan, *roadmap* terdiri dari kondisi saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai serta langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai *future state*.

4. *Recommending employees to fill a certain position based on the results of the selection that has been made to obtain approval from the Board of Directors.*
5. *Analyzing and evaluating the performance of employees who have served.*
6. *Deciding and discussing the remuneration policies given to employees.*

Implementation of Employee Position and Career Placement Committee Duties

During 2020, the Employee Position and Career Placement Committee discussed the terms or basic criteria needed to fill a certain position, the assessment mechanism that will be used to fill certain positions, selected employees who would be deemed to have adequate skills to fill certain positions. a certain position filling. In addition, it also recommends employees to fill certain positions, analyzes and evaluates the performance of employees who have served, decides and discusses remuneration policies given to employees.

Information Technology Steering Committee

Structure and Membership of the Information Technology Steering Committee

Description of Duties and Responsibilities of the Information Technology Steering Committee

The duties and powers of the Information Technology Steering Committee are:

1. *Formulating and establishing a strategic information technology plan in accordance with the company's longterm plan by taking into account the factors of effectiveness, security and efficiency as well as the following:*
 - a. *The implementation plan (road map) to achieve information technology needs that support the Company's business strategy, the roadmap consists of the current state, the conditions to be achieved and the steps taken to achieve the future state.*

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> b. Kecukupan dan alokasi sumber daya Perseroan. c. Keuntungan atau manfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan. <ol style="list-style-type: none"> 2. Merumuskan dan menetapkan arah strategis teknologi informasi Perseroan dan mengawasi pelaksanaannya serta memberikan saran-saran langkah perbaikan. 3. Memberikan arahan terhadap pelaksanaan tata kelola teknologi informasi Perseroan, terkait dengan layanan teknologi informasi serta tindak lanjut atas <i>monitoring</i> dan evaluasi. 4. Merumuskan kebijakan dan prosedur teknologi informasi yang utama seperti kebijakan pengamanan teknologi informasi dan manajemen risiko terkait penggunaan teknologi informasi Perseroan. 5. Menyelaraskan proyek-proyek teknologi informasi yang disetujui dengan rencana strategis teknologi informasi. 6. Menetapkan status prioritas proyek teknologi informasi yang bersifat kritical seperti penggantian <i>core application</i>, server production dan topologi jaringan. 7. Melakukan <i>monitoring</i> pelaksanaan proyek-proyek teknologi informasi dengan rencana proyek yang disepakati dalam <i>service level agreement</i>. 8. Komite dalam menyampaikan rekomendasi harus didukung dengan hasil analisis teknis, bisnis dan risiko utama dari proyek-proyek teknologi informasi. 9. Memantau atas kinerja bidang teknologi informasi dan upaya peningkatannya. 10. Menerapkan kerangka kerja proses dan organisasi teknologi informasi. 11. Menerapkan pengelolaan investasi yang efektif, aman dan efisien selaras dengan <i>roadmap</i> Perseroan. | <ul style="list-style-type: none"> b. <i>The adequacy and allocation of the Company's resources.</i> c. <i>The benefits or benefits that will be obtained when the plan is implemented.</i> <ol style="list-style-type: none"> 2. <i>Formulating and determining the strategic direction of the Company's information technology and supervise its implementation and provide suggestions for corrective measures.</i> 3. <i>Providing direction on the implementation of the Company's information technology governance, related to information technology services as well as follow-up on monitoring and evaluation.</i> 4. <i>Formulating key information technology policies and procedures, such as information technology security policies and risk management related to the use of the Company's information technology.</i> 5. <i>Aligning the approved information technology projects with the information technology strategic plan.</i> 6. <i>Determining the priority status of critical information technology projects, such as replacement of core applications, production servers and network topology.</i> 7. <i>Monitoring the implementation of information technology projects according to the project plan agreed upon in the service level agreement.</i> 8. <i>The committee in submitting recommendations must be supported by the results of technical, business and key risk analyzes of information technology projects.</i> 9. <i>Monitoring the performance of information technology and efforts to improve it.</i> 10. <i>Implementing an information technology organizational and process framework.</i> 11. <i>Implementing effective, safe and efficient investment management in line with the Company's roadmap.</i> |
|---|--|

Pelaksanaan Tugas Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melakukan pembahasan mengenai rencana strategis teknologi informasi, menetapkan arah strategis informasi, memberikan arahan terhadap pelaksanaan tata kelola teknologi informasi, merumuskan kebijakan dan prosedur teknologi informasi. Selain itu juga menyelaraskan proyek-proyek teknologi informasi, menetapkan status prioritas proyek teknologi informasi, melakukan *monitoring* pelaksanaan proyek-proyek teknologi informasi, memantau atas kinerja bidang teknologi informasi dan upaya peningkatannya, menerapkan kerangka kerja proses dan organisasi teknologi informasi, dan menerapkan pengelolaan investasi yang efektif, aman dan efisien selaras dengan *roadmap* Perseroan.

Implementation of Duties of the Information Technology Steering Committee

The Information Technology Steering Committee has discussed information technology strategic plans, established information strategic directions, provided directions for the implementation of information technology governance, formulated information technology policies and procedures. Apart from that, it also harmonizes information technology projects, determines the priority status of information technology projects, monitors the implementation of information technology projects, monitors the performance of information technology and efforts to improve it, implements an information technology organizational and process framework, and implements investment management effective, safe and efficient in line with the Company's roadmap.

Akuntan Publik

Penunjukan Akuntan Publik

Penunjukan KAP dimulai dengan adanya seleksi KAP dilaksanakan melalui proses tender oleh panitia tender sesuai dengan kebijakan pelelangan Perusahaan. KAP yang dinominasikan, alasan dan besarnya honorarium jasa disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk diusulkan kepada Pemegang Saham. KAP yang ditunjuk oleh Pemegang Saham diikat dengan kontrak perjanjian yang jelas.

Untuk Audit atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2021, Pemegang Saham melalui RUPS telah menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2021.

Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan dan Fee Jasa Audit

Tabel Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan, Fee Jasa Audit

Table of Public Accountant Office, Accountant Name, Fee and Permission of KAP

Tahun Year	Kantor Akuntan Publik Public Accountant Office	Periode KAP KAP Period	Nama Akuntan (Partner Penanggung Jawab) Accountant Name	Periode AP AP Period	Fee Jasa Audit* Audit Service Fee*
2021	KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo & Rekan KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo & Partners	Periode Ke 2 2 nd Period	Tjahyo Dahono, SE., CPA	Periode Ke 2 2 nd Period	Rp 3.900.000.000
2020	KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo & Rekan KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo & Partners	Periode Ke 1 1 st Period	Tjahyo Dahono, SE., CPA	Periode Ke 1 1 st Period	Rp4.425.000.000
2019	KAP Husni, Mucharam & Rasidi	Periode Ke 7 7 th Period	Drs. Supandi, CPA	Periode Ke3 3 rd Period	Rp1.509.750.000
2018	KAP Husni, Mucharam & Rasidi	Periode Ke 6 6 th Period	Drs. Supandi, CPA	Periode Ke 2 2 nd Period	Rp1.262.700.000
2017	KAP Husni, Mucharam & Rasidi	Periode Ke 5 5 th Period	Drs. Supandi, CPA	Periode Ke 1 1 st Period	Rp1.136.430.000
2016	KAP Husni, Mucharam & Rasidi	Periode Ke4 4 th Period	Drs. Husni Arvan, CA., CPA	Periode Ke 4 4 th Period	Rp1.081.530.000
2015	KAP Husni, Mucharam & Rasidi	Periode Ke 3 3 rd Period	Drs. Husni Arvan, CA., CPA	Periode Ke 3 3 rd Period	Rp1.180.350.000
2014	KAP Husni, Mucharam & Rasidi	Periode Ke 2 2 nd Period	Drs. Husni Arvan, CA., CPA	Periode Ke 2 2 nd Period	Rp988.200.000

*Termasuk PPN dan PPH Pasal 23. / Including VAT and PPH Article 23.

Jasa Lain yang Diberikan Akuntan

Selama tahun 2021 tidak terdapat jasa lain yang diberikan akuntan.

Public Accountant

Public Accountant Designation

The appointment of Public Accounting Firm began with the selection of Public Accounting Firm carried out through a tender process by the tender committee in accordance with the Company's auction policy. The Public Accounting Firm nominated, the reasons and the amount of the service fee were submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners to be proposed to the Shareholders. The Public Accounting Firm appointed by the Shareholders was bound by a clear contract.

For the Audit of the Financial Statements for the 2021 Financial Year, the Shareholders through the GMS approved the reappointment of the Public Accounting Firm of Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia) as the Public Accounting Firm auditing the Company's Consolidated Financial Statements and the Financial Statements of the Partnership Implementation and Community Development Program for the 2021 Financial Year.

Public Accountant Office, Accountant Name and Fee

Other Services Provided by Accountants

During 2021 there were no other services provided by accountants.

Sistem Pengendalian Internal

Tujuan Pengendalian

Tujuan yang ingin dicapai Perseroan dengan diterapkannya sistem pengendalian internal yaitu:

1. Tercapainya tujuan visi dan misi Perseroan melalui penyelenggaraan program dan kegiatan operasional Perseroan yang ekonomis, efektif dan efisien.
2. Terciptanya pelaporan keuangan, informasi dan kinerja operasional Perseroan yang akurat, handal dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Terciptanya sistem pengamanan aset Perseroan melalui pengawasan internal yang solid dan berkesinambungan.
4. Tumbuhnya budaya kepatuhan/ketaatan terhadap peraturan Perseroan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sistem Pengendalian Internal Perseroan

Pelaksanaan penerapan sistem pengendalian internal Perseroan dilakukan dengan mengacu pada kerangka *Three Lines of Defense*. Pembagian peran pengelolaan risiko dan pengendalian internal dalam Perseroan dibagi menjadi 3 (tiga) Lini Pertahanan sebagai berikut.

Internal Control System

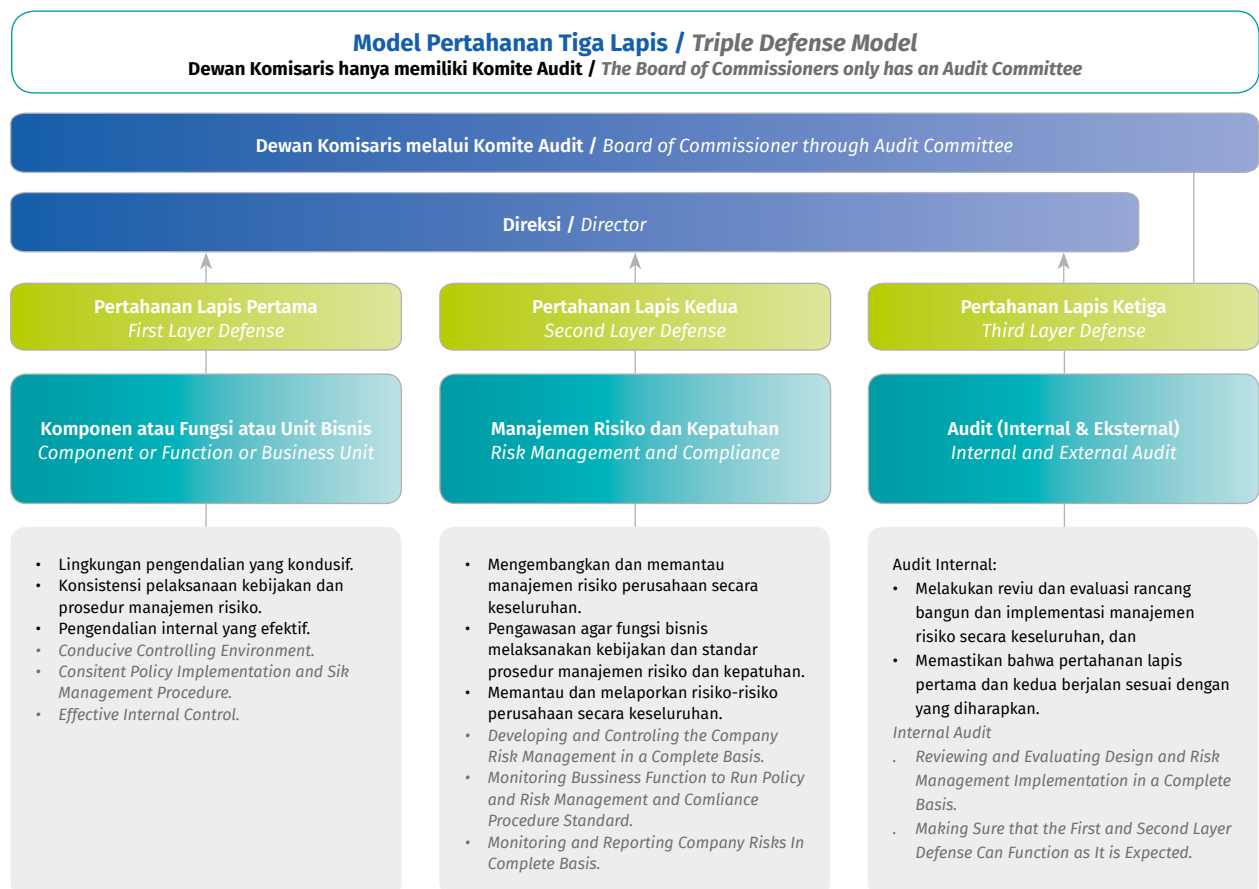
Objective of Control

The objectives to be achieved by the Company with the implementation of the internal control system are:

1. The achievement of the objectives of the Company's vision and mission through the implementation of the Company's programs and operational activities that are economical, effective and efficient.
2. The creation of accurate, reliable and accountable financial reporting, information and operational performance of the Company.
3. The creation of a security system for the Company's assets through a solid and continuous internal control.
4. The growth of a culture of compliance/obedience to the Company's regulations and applicable laws and regulations.

Internal Control System Of The Company

The implementation of the Company's internal control system was carried out by referring to the *Three Lines of Defense* framework. The division of the roles of risk management and internal control within the Company was divided into 3 (three) lines of defense as follows.



Keterangan / Description:

Ketiga lapis pertahanan berada di bawah akuntabilitas dan koordinasi langsung Direksi Perusahaan (ditunjukkan dengan tanda panah solid), sedangkan Dewan Komisaris melalui Komite Audit memiliki akuntabilitas tidak langsung (ditunjukkan dengan tanda panah terputus-putus) terhadap pertahanan lapis ketiga. /

The three layers of defense are under the direct accountability and coordination of the Company's Directors (indicated by solid arrows), while the Board of Commissioners through the Audit Committee has indirect accountability (indicated by dashed arrows) to the third layer of defense.

Lini Pertama

Fungsi pemilik risiko (*risk owner*) adalah semua pihak yang melaksanakan pekerjaannya setiap hari (bekerja sehari-hari). Pertahanan lini pertama dilaksanakan oleh divisi/unit kerja atau komponen atau fungsi bisnis yang melakukan aktivitas operasional Perseroan sehari-hari, terutama yang merupakan aktivitas operasional Perseroan sehari-hari, terutama yang merupakan garis depan atau ujung tombak organisasi.

Dalam menjalankan fungsi Lini Pertama pemilik risiko, memiliki tanggung jawab untuk:

1. Memastikan adanya lingkungan pengendalian (*control environment*) yang kondusif di unit bisnis mereka.
2. Menerapkan kebijakan manajemen risiko yang telah diterapkan sewaktu menjalankan peran dan tanggung jawab mereka terutama dalam mencapai pertumbuhan Perseroan. Manajemen unit kerja diharapkan secara penuh kesadaran mempertimbangkan faktor risiko dalam keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang dilakukannya.
3. Mampu menunjukkan adanya pengendalian internal yang efektif di unit bisnis yang dikelolanya serta adanya pemantauan dan transparansi terhadap efektivitas internal tersebut.

Lini Kedua

Pertahanan lini kedua dilaksanakan oleh fungsi-fungsi yang terkait tata kelola internal Perseroan seperti kepatuhan, manajemen risiko, teknologi informasi dan divisi/unit kerja yang memiliki fungsi kontrol lainnya. Dalam menjalankan fungsi lini kedua, pengawas risiko memiliki tanggung jawab untuk:

1. Mengembangkan dan memantau implementasi manajemen risiko Perseroan secara keseluruhan, di antaranya dengan mengembangkan dan memastikan pelaksanaan sistem manajemen risiko di Perseroan.
2. Melakukan pengawasan terhadap bagaimana fungsi bisnis dilaksanakan dalam koridor kebijakan manajemen risiko dan prosedur-prosedur standar operasional yang telah ditetapkan oleh Perseroan.
3. Memantau dan melaporkan risiko-risiko Perseroan secara menyeluruh kepada organ yang memiliki akuntabilitas tertinggi di Perseroan dengan menyusun register risiko Perseroan.

Lini Ketiga

Dilaksanakan oleh fungsi yang memberikan *independent assurance* yaitu Auditor Internal maupun auditor eksternal. Lini pertahanan 3 ini merupakan komponen internal yang independen terhadap fungsi-fungsi lainnya dalam Perseroan, bertanggung jawab untuk melakukan review dan evaluasi terhadap rancang bangun dan implementasi manajemen risiko secara keseluruhan serta memastikan bahwa lini pertahanan 1 dan 2 telah berjalan secara efektif.

First Line

The function of the risk owner (risk owner) was all parties who carried out their work every. The first line of defense was carried out by divisions/work units or components or business functions that carry out the daily operational activities of the Company, especially those that were daily operational activities of the Company, especially those that were the front line or spearhead of the organization.

In carrying out the functions of the First Line, the risk owner was responsible for:

1. *Ensure a conducive control environment in their business unit.*
2. *Implement risk management policies that had been implemented while carrying out their roles and responsibilities, especially in achieving the Company's growth. Work unit management was expected to consciously consider risk factors in its decisions and actions.*
3. *Able to demonstrate that there was an effective internal control in the business unit it manages as well as the monitoring and transparency of that internal effectiveness.*

Second Line

The second line of defense was carried out by functions related to the Company's internal governance such as compliance, risk management, information technology and divisions/work units that had other control functions. In carrying out second line functions, the risk supervisor had the responsibility to:

1. *Develop and monitor the implementation of the Company's overall risk management, including by developing and ensuring the implementation of a risk management system in the Company.*
2. *Supervise how business functions are carried out within the corridors of risk management policies and standard operating procedures that have been established by the Company.*
3. *Monitor and report the Company's risks as a whole to the organ that has the highest accountability in the Company by compiling the Company's risk register.*

Third Line

Performed by functions that provide independent assurance, namely Internal Auditor and External Auditor. Line of defense 3 is an internal component that is independent from other functions within the Company, is responsible for evaluating and evaluating the overall design and implementation of risk management and ensuring that lines of defense 1 and 2 are running effectively.

Sistem Pengendalian Internal Perseroan merujuk pada COSO Model sebagaimana telah dikembangkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) yang terdiri dari lingkungan pengendalian (*control environment*), penilaian risiko (*risk assessment*), kegiatan pengendalian (*control activities*), informasi dan komunikasi (*information and communication*) serta kegiatan pengawasan (*monitoring activities*).

Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Merupakan pondasi dari *internal control* yang sangat menentukan efektivitas seluruh struktur internal kontrol. Lingkungan pengendalian merupakan cerminan dari komitmen dan kesadaran seluruh insan Perseroan untuk berperilaku dan bertindak sesuai dengan kepentingan dan tujuan Perseroan. Prinsip penting yang menjadi perhatian dalam pemahaman terhadap lingkungan pengendalian adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal
 - a. Integritas dan nilai etika
 - b. Komitmen pada kompetensi
 - c. Filosofi dan gaya operasi manajemen
 - d. Struktur organisasi
 - e. Tanggung jawab dan wewenang
 - f. Pengelolaan SDM
2. Penetapan Tujuan
 - a. Perumusan tujuan Perseroan
 - b. Rencana strategis
 - c. Perumusan aktivitas pelaksanaan

Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Penilaian risiko dalam proses pengambilan keputusan manajemen maupun dalam pelaksanaan kegiatan operasional dilakukan agar keputusan dan kegiatan tersebut dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Penilaian risiko juga bertujuan untuk mengantisipasi, mengidentifikasi, mengukur, menangani dan mengendalikan risiko serta memantau kinerja penanganan risiko. Pelaksanaan penilaian risiko Perseroan dilakukan sesuai dengan ketentuan pada pedoman manajemen risiko Perseroan yang berlaku.

Dalam menghadapi risiko yang melekat pada bisnis dan operasional, Perseroan menerapkan pengendalian manajemen risiko melalui sistem manajemen yang selaras dengan strategi bisnis Perseroan, struktur organisasi, kebijakan, prosedur dan pedoman untuk memastikan risiko Perseroan dapat dikenal, diukur dan dilaporkan dengan baik.

Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*) - Pengendalian Keuangan dan Operasional

Kegiatan pengendalian harus melibatkan seluruh insan Perseroan, termasuk jajaran Direksi. Oleh karena itu kegiatan pengendalian akan berjalan efektif apabila direncanakan dan diterapkan guna mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi. Kegiatan pengendalian terdiri atas

The Company's Internal Control System referred to the COSO Model as developed by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) which consisted of a control environment, risk assessment, control activities, information and communication and monitoring activities.

Control Environment

It became the foundation of internal control which greatly determined the effectiveness of the entire internal control structure. The control environment was a reflection of the commitment and awareness of all Company personnel to behave and act in accordance with the interests and objectives of the Company. Important principles that became the concern in understanding the control environment are as follows:

1. Internal Environment
 - a. Integrity and ethical values
 - b. Commitment to competence
 - c. Philosophy and operating style of management
 - d. Organizational structure
 - e. Responsibility and authority
 - f. HR Management
2. Goal Setting
 - a. Formulation of the Company's objectives
 - b. The strategic plan
 - c. Formulation of implementation activities

Risk Assessment

Risk assessments in the management decision-making process and in the implementation of operational activities were carried out so that these decisions and activities could achieve the stated objectives. Risk assessment also aimed to anticipate, identify, measure, handle and control risks as well as monitor risk management performance. The implementation of the Company's risk assessment was carried out in accordance with the provisions of the applicable Company's risk management guidelines.

In dealing with risks inherent in business and operations, the Company implemented risk management controls through a management system that was aligned with the Company's business strategy, organizational structure, policies, procedures and guidelines to ensure that the Company's risks could be recognized, measured and reported properly.

Control Activities - Operational and Financial Control

Control activities had to involve all personnel of the Company, including the Board of Directors. Therefore, control activities would run effectively if they were planned and implemented in order to control the risks that had been identified. Control activities consisted of policies and procedures that were

kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk meyakinkan bahwa pengarahan dari pimpinan dapat dijalankan dengan baik. Kegiatan pengendalian harus disesuaikan dengan risiko yang dihadapi sehingga risiko dapat dimitigasi pada tingkat yang dapat ditoleransikan.

Ketersediaan Kebijakan

1. Perseroan memiliki mekanisme penyusunan kebijakan dan prosedur.
2. Seluruh proses Perseroan telah didukung dengan kebijakan dan prosedur yang memadai.
3. Ditunjuk unit kerja yang mengelola seluruh kebijakan.
4. Unsur-unsur pengendalian telah tercakup dalam kebijakan dan prosedur tersebut (antara lain adanya pemisahan fungsi yang memadai dan penetapan tingkat kewenangan).
5. Aset vital Perseroan telah dilengkapi dengan prosedur dan fasilitas pengamanan yang memadai.
6. Seluruh kebijakan Perseroan telah tersosialisasi dan dipahami oleh seluruh insan Perseroan yang terkait.
7. Secara berkala dilakukan reviu dan pemutakhiran atas kebijakan dan prosedur yang telah dibakukan.

Implementasi Kebijakan

1. Implementasi kebijakan minimal memiliki prinsip-prinsip pengendalian internal meliputi:
 - a. Pembentukan tanggung jawab.
 - b. Pemisahan/pendelegasian tugas.
 - c. Prosedur dokumentasi.
 - d. Pengendalian secara fisik.
 - e. Verifikasi internal yang independen.
 - f. Pengendalian sumber daya manusia.
2. Pengolahan data dan informasi harus didukung dengan mekanisme otorisasi, pengamanan atas informasi, pengamanan akses terhadap data dan pengujian secara berkala maupun insidental untuk memastikan keamanan informasi dan data.
3. Pengelolaan aset Perseroan harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mendukung pencapaian tujuan Perseroan. Untuk setiap penggunaan aset didukung dengan mekanisme otorisasi, pemberian nomor identitas, sarana pengamanan yang memadai dan dilakukan opname risiko (inventarisasi) secara berkala.
4. Perseroan menyediakan sarana kerja yang aman dan memadai.
5. Setiap transaksi yang dilakukan harus memiliki mekanisme otorisasi dan dokumentasi dengan sistem pengarsipan yang memadai.
6. Setiap keputusan strategis diambil dengan dasar analisis yang memadai.
7. Manajemen segera menindaklanjuti kelemahan pengendalian yang terjadi.

used to ensure that direction from the leadership could be carried out properly. Control activities had to be adjusted to the risks faced so that risks could be mitigated at a tolerable level.

Policy Availability

1. *The Company has a mechanism for formulating policies and procedures.*
2. *All of the Company's processes have been supported by adequate policies and procedures.*
3. *Appointed work unit that manages all policies.*
4. *The elements of control have been included in the policies and procedures (among other things, there is an adequate separation of functions and the determination of the level of authority).*
5. *The Company's vital assets have been equipped with adequate security procedures and facilities.*
6. *All of the Company's policies have been socialized and understood by all relevant Company personnel.*
7. *Regularly review and update the standardized policies and procedures.*

Policy Implementation

1. *Implementation of a minimum policy has internal control principles including:*
 - a. *Establishment of responsibility.*
 - b. *Segregation/delegation of duties.*
 - c. *Documentation procedure.*
 - d. *Physical control.*
 - e. *Independent internal verification.*
 - f. *Human resource control.*
2. *Data processing and information had to be supported by authorization mechanisms, information security, access to data and periodic and incidental testing to ensure information and data security.*
3. *The management of the Company's assets had to be utilized optimally to support the achievement of the Company's goals. Each asset usage is supported by an authorization mechanism, assigning an identity number, adequate security facilities and periodic risk taking (inventory).*
4. *The Company provided safe and adequate work facilities.*
5. *Every transaction carried out must have an authorization mechanism and documentation with an adequate filing system.*
6. *Every strategic decision was made on the basis of adequate analysis.*
7. *Management immediately followed up on any control weaknesses that occurred.*

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

Dalam menjalankan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, PNM telah memiliki Daftar regulasi (*Compliance Register*) yang sesuai dengan bisnis PNM baik itu secara sektoral dan korporasi. Dalam pelaksanaannya PNM juga telah menjalankan kewajiban-kewajiban yang ada pada ketentuan yang diatur di dalam regulasi dan telah dilakukan *monitoring* dan pengawasan dalam pemenuhan kewajiban tersebut, salah satu pengawasan yang dilakukan adalah dengan melaksanakan audit internal dan audit eksternal serta pengawasan yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang.

Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Informasi yang relevan perlu diidentifikasi, diperoleh dan dikomunikasikan dalam bentuk dan format serta waktu yang tepat agar dapat memperlancar dan memudahkan manajemen dan karyawan dalam menjalankan tanggung jawabnya. Informasi yang diperlukan tersebut harus diakomodasikan dalam sistem informasi dan pelaporan yang menghasilkan informasi keuangan dan operasi Perseroan serta informasi mengenai kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Sumber-sumber informasi yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan bisnis Perseroan yaitu data internal dan data eksternal (antara lain informasi yang bersumber dari kejadian, laporan kegiatan dan kondisi eksternal). Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif baik komunikasi di lingkungan Perseroan maupun komunikasi dengan pihak luar yang terkait dalam program, proyek dan kegiatan lainnya termasuk penganggaran. Faktor yang perlu diperhatikan dan dievaluasi berkaitan dengan informasi dan komunikasi adalah kualitas informasi dan efektivitas komunikasi.

Kegiatan Pengawasan (*Monitoring Activities*)

Pemantauan terhadap internal kontrol perlu dilakukan melalui suatu proses penilaian berkelanjutan terhadap kualitas rancangan dan implementasi serta efektivitas kinerja kontrol yang berjalan. Prosedur pemantauan internal kontrol harus meliputi prosedur pelaporan kepada manajemen mengenai kelemahan kontrol yang diungkapkan dari hasil pemantauan, frekuensi dan cakupan audit untuk setiap unit audit (*auditee*) sangat ditentukan oleh hasil penilaian atas efektivitas prosedur dan pemantauan terhadap sistem internal kontrol.

Pelaksanaan Pengawasan

1. Ditetapkan unit kerja yang menjadi koordinator pelaksanaan pengawasan.
2. Independensi fungsi pengawasan terjaga dengan baik.
3. Dilaksanakan program pengawasan secara berkala untuk menguji keandalan sistem pengendalian manajemen.

Compliance with Other Law Regulations

In carrying out compliance with laws and regulations, PNM already had a Regulatory Register (Compliance Register) in accordance with PNM's business, both sectorally and corporately. In its implementation, PNM also carried out the obligations that existed in the provisions stipulated in the regulations and carried out monitoring and supervision in fulfilling these obligations; one of the supervision carried out was by carrying out internal audits and external audits as well as supervision carried out by the competent authority authorized.

Information and Communication

Relevant information needed to be identified, obtained and communicated in a form and format and at the right time in order to facilitate and facilitate management and employees in carrying out their responsibilities. The required information had to be accommodated in the information and reporting system that produces financial information and the Company's operations as well as information regarding compliance with applicable regulations.

Sources of information needed in the decision-making process and implementation of the Company's business activities were internal data and external data (including information originating from events, activity reports and external conditions). Communication of information had to be carried out effectively both within the Company and with external parties involved in programs, projects and other activities including budgeting. Factors that needed to be considered and evaluated in relation to information and communication were the quality of information and the effectiveness of communication.

Monitoring Activities

*Monitoring of internal controls needed to be done through a process of continuous assessment of the quality of design and implementation as well as the effectiveness of ongoing control performance. Internal control monitoring procedures had to include procedures for reporting to management regarding control weaknesses that were disclosed from the results of monitoring, the frequency and scope of audits for each audit unit (*auditee*) was largely determined by the results of the assessment of the effectiveness of the procedures and monitoring of the internal control system.*

Implementation of Supervision

1. Established a work unit to be the coordinator of the implementation of supervision.
2. The independence of the supervisory function is well maintained.
3. Periodic monitoring program is carried out to test the reliability of the management control system.

4. Ruang lingkup pengawasan mencakup seluruh aspek kegiatan dan seluruh unit kerja.
5. Hasil pelaksanaan pengawasan disampaikan kepada manajemen puncak.
6. Tersedia mekanisme penanganan hasil pengawasan.
7. Setiap rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti oleh manajemen.
8. Dilakukan evaluasi atas kecukupan pelaksanaan rekomendasi hasil pengawasan.
9. Dilaksanakan pertemuan secara berkala yang melibatkan seluruh jajaran manajemen untuk mendapatkan masukan perbaikan sistem pengendalian manajemen.

Administrasi Hasil Pengawasan

1. Tersedia *database* hasil mengadministrasikan seluruh permasalahan yang ditemukan sebagai hasil pelaksanaan pengawasan.
2. Seluruh pelaksanaan rekomendasi hasil pengawasan terdokumentasikan dengan baik.
3. Secara berkala dilakukan evaluasi untuk memantau pelaksanaan rekomendasi hasil pengawasan.

Kesesuaian Dengan oleh Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) Internal Control Framework

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa sistem pengendalian internal Perseroan telah sesuai dengan COSO *internal control framework* yang terdiri dari lingkungan pengendalian (*control environment*), penilaian risiko (*risk assessment*), kegiatan pengendalian (*control activities*), informasi dan komunikasi (*information and communication*) serta kegiatan pengawasan (*monitoring activities*).

Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal

Evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal secara berkala dilakukan Satuan Pengawasan Internal. Laporan hasil evaluasi sistem pengendalian internal memberikan informasi kepada manajemen terkait gambaran umum pengendalian internal yang telah dilakukan terkait operasional, pelaporan dan *compliance*. Selain itu hasil pemeriksaan SPI terkait *control activity* juga telah dilakukan pada unit kerja dan saran yang diberikan agar tidak terjadi permasalahan yang berulang dan perbaikan yang dilakukan.

Berdasarkan hasil evaluasi, secara umum pelaksanaan sistem pengendalian internal telah memadai dengan uraian sebagai berikut:

1. Pengendalian internal sudah dijalankan Perseroan dengan didukung komitmen manajemen dan karyawan, perangkat kebijakan, struktur organisasi dan infrastruktur sistem yang memadai.

4. *The scope of supervision covers all aspects of activities and all work units.*
5. *The results of the implementation of supervision are submitted to top management.*
6. *There is a mechanism for handling the results of supervision.*
7. *Every recommendation on the results of supervision is followed up by management.*
8. *Evaluation is carried out on the adequacy of the implementation of the recommendations resulting from the supervision.*
9. *Regular meetings are held involving all levels of management to obtain input for improving the management control system.*

Administration of Supervision Results

1. *There was a database on the results of administering all problems found as a result of the implementation of supervision.*
2. *All implementation of the recommendations of the supervision results was well documented.*
3. *Periodic evaluations were carried out to monitor the implementation of recommendations from the supervision results.*

Compliance with the Committee of Sponsoring Organizations of Tradeway Commission (COSO)

As explained above, the Company's internal control system was in accordance with the COSO internal control framework which consists of a control environment, risk assessment, control activities, information and communication as well as monitoring activities.

Evaluation of Implementation of Internal Control System

Evaluation of the implementation of the internal control system was carried out periodically by the Internal Audit Unit. The report on the results of the evaluation of the internal control system provided information to management regarding an overview of internal control that had been carried out related to operations, reporting and compliance. In addition, the results of the SPI examination related to control activities had also been carried out in the work unit and suggestions given so that there were no recurring problems and improvements made.

Based on the evaluation results, in general the implementation of the internal control system was adequate with the following descriptions:

1. *Internal control had been implemented by the Company, supported by commitment from management and employees, policy tools, organizational structure and adequate system infrastructure.*

2. Evaluasi atas kebijakan/prosedur standar operasional sudah dijalankan dengan mengacu pada kaidah-kaidah GCG.
3. Perusahaan telah menerapkan manajemen risiko dengan membuat analisa risiko, profil risiko, dan laporan penerapan manajemen risiko, dan telah dievaluasi secara periodik oleh Divisi MRI.
4. Perusahaan telah melakukan perbaikan sistem/aplikasi secara periodik guna menunjang kebutuhan bisnis dan operasional perusahaan.
5. SPI telah menjalankan fungsi *assurance* dengan ruang lingkup pencapaian kinerja, efektivitas, pengendalian risiko, dan kecukupan *internal control* atas implementasi pengendalian intern yang kurang memadai.
6. SPI terus memantau tindak lanjut hal-hal yang harus diperbaiki atas hasil audit yang telah dilaksanakan dan menjadi *counterpart* atas pelaksanaan audit eksternal dan tindak lanjutnya.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Dewan Komisaris dan Direksi PT Permodalan Nasional Madani bertekad menerapkan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjamin tersedianya laporan keuangan dan laporan manajemen yang benar, lengkap, dan tepat waktu, serta memenuhi efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha Perusahaan.

Seluruh unit kerja dan karyawan PT PNM wajib berpartisipasi dalam penerapan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan dengan secara aktif turut serta:

1. Membangun lingkungan pengendalian yang mendukung efektivitas penerapan komponen pengendalian internal lainnya.
2. Melakukan penilaian risiko dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
3. Menyusun dan melaksanakan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa arahan Direksi dilaksanakan.
4. Mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam waktu dan bentuk yang tepat untuk memudahkan pelaksanaan, pengendalian, dan pertanggungjawabannya.
5. Menilai kualitas Sistem Pengendalian Internal Perusahaan melalui pemantauan rutin terhadap kegiatan yang sedang berjalan dan evaluasi menyeluruh oleh SPI atau pihak independen yang ditunjuk.

Pernyataan Komitmen Dewan Komisaris dan Direksi terkait Sistem Pengendalian Internal Perusahaan ini disampaikan kepada seluruh pegawai untuk dilaksanakan dan dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

2. *Evaluation of standard operational policies/procedures was carried out with reference to GCG principles.*
3. *The Company had implemented risk management by making risk analysis, risk profile, and risk management implementation reports, and had been evaluated periodically by the MRI Division.*
4. *The Company had periodically made system/application improvements to support the Company's business and operational needs.*
5. *SPI had carried out an assurance function with the scope of risk control, control, and governance processes for the inadequate implementation of internal control.*
6. *SPI continued to monitor the follow-up of things that must be corrected on the results of the audit that has been carried out.*

Statement of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners on the Adequacy of the Internal Control System

The Board of Commissioners and Directors of PT Permodalan Nasional Madani determined to implement the Company's Internal Control System to improve the company's compliance with applicable laws and regulations, ensure the availability of correct, complete, and timely financial reports and management reports, as well as meet the efficiency and effectiveness of the Company's business activities.

All work units and employees of PT PNM were required to participate in the implementation of the Company's Internal Control System by actively participating in:

1. *Building a control environment that supported the effective implementation of other components of internal control.*
2. *Conducting risk assessments in carrying out their duties and functions.*
3. *Developing and implementing policies and procedures to ensure that the direction of the Board of Directors was carried out.*
4. *Identifying, recording, and communicating information related to the implementation of the main tasks and functions in the right time and form to facilitate the implementation, control, and accountability.*
5. *Assessing the quality of the Company's Internal Control System through regular monitoring of ongoing activities and thorough evaluation by SPI or an appointed independent party.*

This Statement of Commitment of the Board of Commissioners and Board of Directors regarding the Company's Internal Control System was submitted to all employees to be implemented and could be known by interested parties.

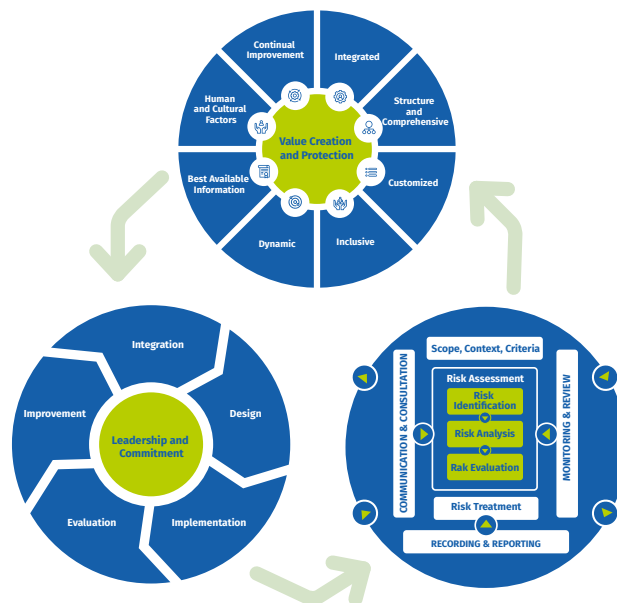
SPI, Direksi, Dewan Komisaris serta Komite Audit telah melakukan evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal secara berkala. SPI, Direksi, Dewan Komisaris serta Komite Audit memantau dan mengevaluasi kecukupan sistem pengendalian intern berkaitan dengan adanya perubahan kondisi internal dan eksternal serta harus meningkatkan kapasitas sistem pengendalian internal tersebut agar efektivitasnya dapat ditingkatkan. SPI, Direksi, Dewan Komisaris serta Komite Audit menilai bahwa sistem pengendalian internal telah memadai.

Manajemen Risiko

Dalam setiap proses bisnis selalu dihadapkan pada kondisi ketidakpastian (*uncertainty*) yang dapat mempengaruhi manajemen dalam mengambil keputusan. Kondisi yang penuh ketidakpastian dapat berpotensi timbulnya risiko-risiko yang dapat menghambat tujuan Perusahaan, sehingga diperlukan upaya mitigasi atau pencegahan jika risiko tersebut timbul. Namun jika risiko itu terjadi, dampak kerugian yang ditimbulkan diharapkan dapat diminimalisir.

Sistem Manajemen Risiko

Perusahaan senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko dalam praktik bisnis, dimana unsure ketidakpastian baik berasal dari lingkungan internal maupun eksternal dapat member pengaruh terhadap pencapaian tujuan Perusahaan. Unsur ketidakpastian menjadi semakin besar akibat perubahan iklim bisnis yang semakin cepat dan kompleks serta merupakan risiko bisnis yang tidak mungkin dihindari, sehingga harus dikelola dalam suatu mekanisme yaitu penerapan Manajemen Risiko. Penerapan Manajemen Risiko menurut ISO 31000 : 2018 terdiri dari prinsip, kerangka dan proses Manajemen Risiko seperti di bawah ini:



Gambar Siklus Penerapan Manajemen Risiko ISO 31000:2018
Picture of ISO 31000:2018 Risk Management Implementation Cycle

SPI, the Board of Directors, the Board of Commissioners and the Audit Committee evaluated the implementation of the internal control system on a regular basis. SPI, the Board of Directors, the Board of Commissioners and the Audit Committee monitor and evaluate the adequacy of the internal control system in relation to changes in internal and external conditions and mhad to increase the capacity of the internal control system so that its effectiveness could be improved. SPI, the Board of Directors, the Board of Commissioners and the Audit Committee considered that the internal control system was adequate.

Risk Management

Every business process always faces with conditions of uncertainty that can affect management in making decisions. Conditions full of uncertainty can potentially create risks that can hinder the Company's objectives, so mitigation or prevention efforts are needed if these risks arise. However, if the risk occurs, the impact of the loss is expected to be minimized.

Risk Management System

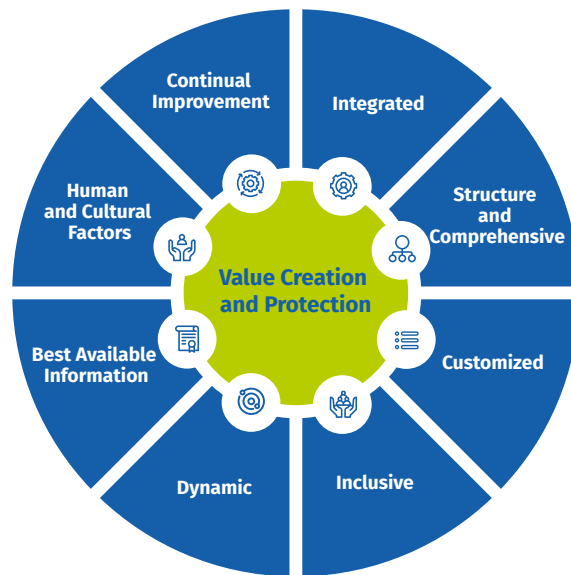
The Company was always faced with risks in its business practices, and elements of uncertainty both from the internal and external environment could have an influence on the achievement of the Company's goals. The element of uncertainty got bigger due to changes in the business climate that were faster and more complex and was a business risk that could not be avoided, so it had to be managed in a mechanism, namely the application of Risk Management. Implementation of Risk Management according to ISO 31000: 2018 consisted of the principles, framework and processes of Risk Management as follows:

Prinsip Manajemen Risiko

Prinsip Manajemen Risiko merupakan dasar dalam penerapan pengelolaan risiko dan harus menjadi pertimbangan dalam mengembangkan kerangka kerja dan proses Manajemen Risiko Perusahaan sesuai dengan Gambar di bawah ini yang mengacu pada ISO 31000:2018 memungkinkan Perusahaan untuk mengelola dampak dari ketidakpastian terhadap sasaran dan tujuan Perusahaan.

Risk Management Principle

Risk Management Principles became the basis for implementing risk management and had to be considered in developing the Company's Risk Management framework and processes in accordance with Figure below which referred to ISO 31000:2018 enabling the Company to manage the impact of uncertainty on the Company's goals and objectives.



Gambar Prinsip Manajemen Risiko
Figure of Risk Management Principle

Penjelasan dari Prinsip Manajemen Risiko sebagai berikut:

1. Terintegrasi (*Integrated*)
Manajemen Risiko merupakan kegiatan yang tidak berdiri sendiri dan tidak terpisah dari kegiatan dan proses bisnis Perusahaan, melainkan harus menyatu/melekat dalam proses bisnis dalam bentuk pengelolaan risiko yang dijalankan oleh masing-masing fungsi dan juga dapat diintegrasikan dengan sistem atau fungsi manajemen yang diterapkan organisasi, seperti Tata Kelola Perusahaan, Manajemen Mutu, Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Manajemen Bencana, Manajemen Kepatuhan, serta Audit.
2. Terstruktur dan Komprehensif (*Structured and Comprehensive*)
Manajemen Risiko diterapkan secara terstruktur dan sistematis, mencakup seluruh aspek bisnis dan operasional Perusahaan. Rancangan kerangka kerja Manajemen Risiko perlu dirumuskan sebagai panduan praktis pelaksanaan Manajemen Risiko dan pengelolaan risiko berlangsung secara terkoordinasi.

The explanation of the Risk Management Principles is as follows:

1. *Integrated*
Risk Management is an activity that does not stand alone and cannot be separated from the Company's business activities and processes, but must be integrated/integrated into business processes in the form of risk management carried out by each function and can also be integrated with management systems or functions implemented by the organization. such as Corporate Governance, Quality Management, Occupational Health and Safety Management, Disaster Management, Compliance Management, and Auditing.
2. *Structured and Comprehensive*
Risk Management is implemented in a structured and systematic manner, covering all aspects of the Company's business and operations. The design of the Risk Management framework needs to be formulated as a practical guide to the implementation of Risk Management and that risk management takes place in a coordinated manner.

3. Disesuaikan (*Customized*)

Kerangka kerja dan proses Manajemen Risiko disesuaikan dan proporsional dengan konteks eksternal dan internal Perusahaan yang berkaitan dengan sasarannya.

Perusahaan menentukan bentuk pengelolaan risiko beserta pengaturannya sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka pencapaian sasaran Perusahaan, serta sesuai dengan karakteristik spesifik Perusahaan berdasarkan konteks internal dan internal. Kesesuaian ini diperlukan agar Manajemen Risiko dapat memenuhi maksud dan tujuan penerapan yang paling mendasar yaitu membantu Perusahaan dalam proses penciptaan dan perlindungan nilai.

4. Inklusif (*Inclusive*)

Pelibatan yang sesuai dan tepat waktu dari pemangku kepentingan memungkinkan pengetahuan, pandangan, dan persepsi mereka untuk dipertimbangkan. Ini menghasilkan peningkatan kesadaran dan Manajemen Risiko terinformasi.

5. Dinamis (*Dynamic*)

Risiko yang dapat muncul, berubah, atau hilang seiring perubahan konteks eksternal dan internal Perusahaan. Penerapan Manajemen Risiko dipastikan mengantisipasi, mendeteksi, mengakui, dan merespon terhadap perubahan secara sesuai dan tepat waktu.

6. Informasi terbaik yang tersedia (*Best Available Information*)

Masukan Manajemen Risiko didasarkan atas informasi historis dan saat ini, beserta juga harapan masa depan.

Manajemen Risiko secara eksplisit memperhitungkan segala batasan dan ketidakpastian yang berkaitan dengan informasi dan harapan tersebut. Informasi sebaiknya tepat waktu, jelas dan tersedia bagi pemangku kepentingan yang relevan.

7. Faktor Manusia dan Budaya (*Human and Cultural Factor*)

Perilaku dan budaya manusia baik secara signifikan memberi pengaruh terhadap semua aspek Manajemen Risiko pada seluruh tingkatan dan tahapan.

Perusahaan memastikan kecukupan peningkatan kesadaran manajemen dan karyawan mengenai pentingnya Manajemen Risiko, serta kecukupan sosialisasi kerangka kerja dan/atau prosedur pengelolaan risiko kepada masing-masing pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam Manajemen Risiko Perusahaan.

8. Perbaikan Berkelanjutan (*Continuous Improvement*)

Perbaikan berkelanjutan terhadap kerangka kerja Manajemen Risiko maupun prosesnya ditujukan agar pengelolaan risiko dipraktikkan Perusahaan senantiasa relevan dan dapat mendukung operasional/bisnis serta pencapaian sasaran.

3. Customized

The Risk Management framework and processes are adapted and proportionate to the Company's external and internal contexts related to its objectives.

The Company determines the form of risk management and its arrangements according to its needs in order to achieve the Company's goals, as well as according to the specific characteristics of the Company based on internal and internal contexts. This conformity is necessary so that Risk Management can fulfill the most basic aims and objectives of the implementation, namely assisting the Company in the process of creating and protecting value.

4. Inclusive

Appropriate and timely engagement of stakeholders allows the knowledge, views and perceptions to be taken into account. This results in increased awareness and informed Risk Management.

5. Dynamic

Risks that may arise, change, or disappear as the Company's external and internal context changes. Implementation of Risk Management is ensured to anticipate, detect, acknowledge, and respond to changes in an appropriate and timely manner.

6. Best Available Information

Risk Management input was based on historical and current information, as well as future expectations.

Risk Management explicitly considered any limitations and uncertainties associated with such information and expectations. Information should be timely, clear and available to relevant stakeholders.

7. Human and Cultural Factor

Good human behavior and culture significantly influenced all aspects of Risk Management at all levels and stages.

The Company ensured the adequacy of increasing the awareness of management and employees regarding the importance of Risk Management, as well as the adequacy of socialization of the framework and/or risk management procedures to each stakeholder involved in the Company's Risk Management.

8. Continuous Improvement

The continuous improvement of the Risk Management framework and its processes was aimed at ensuring that risk management practices by the Company were always relevant and able to support operations/business as well as the achievement of targets.

Kerangka Manajemen Risiko

Perseroan menetapkan kerangka kerja Manajemen Risiko yang menjadi dasar dalam pelaksanaan seluruh kegiatan Manajemen Risiko di seluruh tingkatan Perusahaan untuk membantu Perusahaan dalam mengelola risiko secara efektif.

Risk Management Framework

The Company established a Risk Management framework that formed the basis for the implementation of all Risk Management activities at all levels of the Company to assist the Company in managing risk effectively.



Bagan Kerangka Kerja Manajemen Risiko
Chart of Risk Management Framework

Kerangka kerja penerapan Manajemen Risiko PT Permodalan Nasional Madani (Persero) mengacu pada praktek SNI ISO 31000:2018 terdiri dari 6 (enam) elemen utama yaitu:

1. Kepemimpinan dan Komitmen;
2. Integrasi;
3. Perancangan;
4. Implementasi;
5. Evaluasi;
6. Perbaikan.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko menjadi dasar penataan penerapan Manajemen Risiko diseluruh jajaran Perusahaan. Kerangka kerja Manajemen Risiko digunakan untuk memastikan bahwa informasi risiko Perusahaan secara komprehensif dan memadai yang diperoleh dari proses Manajemen Risiko dilaporkan dan digunakan sebagai landasan untuk pengambilan keputusan di seluruh jajaran Perusahaan.

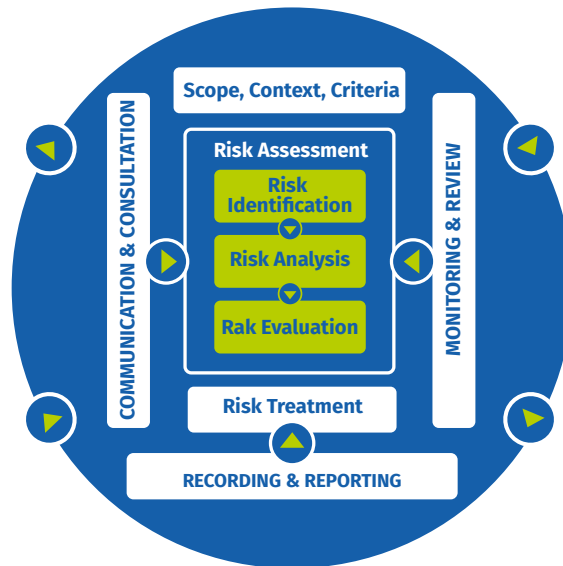
The framework for implementing the Risk Management of PT Permodalan Nasional Madani (Persero) refers to the practice of SNI ISO 31000:2018 consisting of 6 (six) main elements, namely:

1. Leadership and Commitment;
2. Integration;
3. Design;
4. Implementation;
5. Evaluation;
6. Improvement.

The Risk Management Framework is the basis for structuring the implementation of Risk Management at all levels of the Company. The Risk Management framework is used to ensure that comprehensive and adequate Company risk information obtained from the Risk Management process is reported and used as a basis for decision making at all levels of the Company.

Proses Manajemen Risiko

Berdasarkan ISO 31000 : 2018 Proses Manajemen Risiko merupakan penerapan sistematis dari kebijakan, prosedur, kegiatan komunikasi dan konsultasi, menentukan konteks, melakukan asesmen risiko terkait hal tersebut, melakukan penanganan risiko, *monitoring* dan *review*, serta mencatat dan melaporkan risiko, berikut penjelasannya:



Proses Manajemen Risiko *Risk Management Process*

Proses Komunikasi dan Konsultasi (*Communication and Consultation*)

Komunikasi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan dilakukan pada setiap tahapan proses Manajemen Risiko.

Komunikasi merupakan kegiatan atau proses yang berkesinambungan dalam Perusahaan untuk menyediakan, membagi atau mendapatkan informasi dari pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, termasuk pihak pengambil keputusan pada keseluruhan proses manajemen risiko.

Aktivitas konsultasi adalah media komunikasi antara *risk owner* dengan pihak lain yang dinilai kompeten atau berpengalaman (*expert*) dalam bidang permasalahan terkait, guna mendapatkan konteks hingga analisa risiko yang akurat, menentukan arah/kebijakan penanganan risiko, serta pengambilan keputusan.

Komunikasi dilakukan untuk membangun kesadaran dan pemahaman terhadap risiko, sedangkan konsultasi dilakukan untuk mendapatkan umpan balik yang diperlukan dalam pengambilan keputusan.

Risk Management Process

Based on ISO 31000: 2018 Risk Management Process is a systematic application of policies, procedures, communication and consultation activities, determining context, conducting risk assessments related to this, carrying out risk management, monitoring and reviewing, as well as recording and reporting risks, as follows:

Communication and Consultation Process

Communication and consultation with stakeholders is carried out at every stage of the Risk Management process.

Communication is a continuous activity or process within the Company to provide, share or obtain information from internal and external stakeholders, including decision makers in the entire risk management process.

Consultation activity is a communication medium between the risk owner and other parties who are considered competent or experienced in the field of related issues, in order to get context to accurate risk analysis, determine risk management directions/policies, and make decisions.

Communication is carried out to build awareness and understanding of risk, while consultation is carried out to obtain feedback needed in decision making.

Penetapan Ruang Lingkup, Konteks dan Kriteria (Scope, Context, Criteria)

Tujuan dari penetapan ruang lingkup, konteks dan kriteria adalah untuk menyesuaikan proses Manajemen Risiko, memungkinkan penilaian risiko yang efektif dan penanganan risiko yang sesuai.

1. Penetapan Ruang Lingkup

Perusahaan menentukan ruang lingkup kegiatan Manajemen Risiko karena proses Manajemen Risiko dapat diterapkan pada tingkat yang berbeda misalnya strategi, operasional, dan proyek serta keselarasan dengan tujuan Perusahaan.

2. Penetapan Konteks

Konteks Manajemen Risiko ditetapkan dari pemahaman lingkungan eksternal dan internal dimana Perusahaan beroperasi dan mencerminkan lingkungan spesifik dari kegiatan penerapan Manajemen Risiko.

Tahapan Penetapan Konteks meliputi:

- a. Menentukan ruang lingkup dan periode penerapan Manajemen Risiko
- b. Penetapan sasaran
- c. Penetapan struktur pemilik risiko (*risk owner*)
- d. Identifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait
- e. Identifikasi Pemangku Kepentingan
- f. Penetapan Kategori Risiko

3. Penetapan Kriteria Risiko

Kriteria risiko disusun pada awal penerapan proses Manajemen Risiko dan ditinjau secara berkala, serta disesuaikan dengan perubahan kondisi Perusahaan. Kriteria risiko mencakup kriteria kemungkinan terjadinya risiko dan kriteria dampak dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kriteria kemungkinan terjadi risiko (*likelihood*)
- b. Kriteria dampak (*impact*)
- c. Menetapkan matriks analisis risiko dan level risiko
- d. Menetapkan selera risiko

Asesmen Risiko (Risk Assessment)

Asesmen Risiko (*Risk Assessment*) adalah proses keseluruhan dari identifikasi risiko, analisa risiko dan evaluasi risiko. Assessment risiko harus dilakukan secara sistematis, terstruktur dan kolaboratif dengan memanfaatkan pengetahuan dan pandangan para pemangku kepentingan. Asesmen Risiko (*Risk Assessment*) harus menggunakan informasi terbaik yang tersedia, dilengkapi dengan pemeriksaan lebih lanjut jika diperlukan.

1. Identifikasi Risiko (*Risk Identification*)

Tujuan dari identifikasi risiko adalah untuk menemukan, mengenali dan menjelaskan risiko yang menghambat Perusahaan mencapai tujuan. Informasi terbaik yang tersedia, relevan, tepat dan terbaru penting dalam mengidentifikasi risiko.

Determination of Scope, Context and Criteria

The purpose of establishing the scope, context and criteria is to adapt the Risk Management process, enabling effective risk assessment and appropriate risk management.

1. Scope Determination

The Company determines the scope of Risk Management activities because the Risk Management process can be applied at different levels such as strategy, operations, and projects as well as in alignment with the Company's objectives.

2. Context Determination

The context of Risk Management is determined from the understanding of the external and internal environment in which the Company operates and reflects the specific environment of the implementation of Risk Management activities.

Context Determination Stages include:

- a. *Determination of the scope and period of application of Risk Management*
- b. *Goal setting*
- c. *Determination of the risk owner structure*
- d. *Identification of relevant laws and regulations*
- e. *Stakeholder Identification*
- f. *Determination of Risk Category*

3. Determination of Risk Criteria

Risk criteria are prepared at the beginning of the implementation of the Risk Management process and reviewed regularly, and adjusted to changes in the Company's conditions. Risk criteria include criteria for the possibility of risk occurrence and impact criteria with the following provisions:

- a. *The criteria for the possibility of a risk (likelihood)*
- b. *Impact criteria*
- c. *Define risk analysis matrix and risk level*
- d. *Setting risk appetite*

Risk Assessment

Risk Assessment is the overall process of risk identification, risk analysis and risk evaluation. Risk assessment must be carried out in a systematic, structured and collaborative manner by utilizing the knowledge and views of stakeholders. The Risk Assessment should use the best available information, supplemented by further examination if necessary.

1. Risk Identification

The purpose of risk identification is to find, identify and explain the risks that prevent the Company from achieving its objectives. The best available, relevant, precise and up-to-date information is important in identifying risks.

Perusahaan melakukan identifikasi sumber risiko, area dampak, kejadian risiko (termasuk perubahan keadaan), penyebab terjadinya risiko, Key Performance Indicator (KPI), Key Risk Indicator (KRI) serta potensi konsekuensinya yang menyebabkan terjadinya suatu ketidakpastian itu menjadi risiko.

Proses identifikasi risiko adalah untuk menghasilkan *risk register* yang komprehensif berdasarkan kejadian yang mungkin menciptakan, meningkatkan, mencegah, menurunkan, mempercepat atau menunda pencapaian sasaran.

2. Analisa Risiko

Tujuan dari analisis risiko adalah untuk memahami sifat risiko dan karakteristiknya serta tingkat risikonya. Analisis risiko mempertimbangkan sumber risiko, dampak, kemungkinan, peristiwa, skenario, kontrol dan keefektifannya.

Analisa Risiko yaitu proses menentukan berapa besar dampak (*impact* atau *consequences*) dan probabilitas (*likelihood* atau *frequency*) risiko-risiko yang terjadi, serta menghitung berapa level risikonya dengan mengalikan antara besaran dampak dan besaran kemungkinan (*risk – impact x likelihood*).

3. Evaluasi Risiko

Tujuan evaluasi risiko adalah untuk mendukung keputusan yang telah diambil setelah dilakukan analisis risiko. Evaluasi risiko membandingkan hasil analisa risiko dengan kriteria risiko yang ditetapkan untuk menentukan prioritas penanganan risiko bila diperlukan tindakan tambahan yang diperlukan.

Penanganan Risiko (*Risk Treatment*)

Tujuan dari penanganan risiko adalah untuk memilih dan menerapkan opsi untuk mengatasi risiko. Penanganan risiko merupakan proses berulang sehingga harus:

1. Merumuskan dan memilih opsi penanganan risiko;
2. Perencanaan dan pelaksanaan penanganan risiko;
3. Menilai efektivitas penanganan;
4. Memutuskan apakah risiko yang tersisa dapat diterima;
5. Jika tidak dapat diterima, mengambil langkah penanganan lebih lanjut.

Tujuan dari penanganan risiko adalah menurunkan atau menghilangkan dampak dari risiko tersebut diatas yang dapat mengganggu pencapaian sasaran Perusahaan hingga masuk ke dalam kriteria "dapat diterima".

Jenis penanganan risiko sebagai berikut:

1. Menghindari risiko (*avoid*), menghindari risiko secara penuh dengan konsekuensi kehilangan peluang;
2. Berbagi risiko, tindakan untuk mengurangi kemungkinan timbulnya risiko ataupun dampak risiko, contoh melakukan *joint financing* dan *joint venture*;

The company identifies sources of risk, areas of impact, risk events (including changes in circumstances), causes of risk, Key Performance Indicators (KPI), Key Risk Indicators (KRI) and the potential consequences that cause uncertainty to become a risk.

The risk identification process is to produce a comprehensive risk register based on events that might create, increase, prevent, decrease, accelerate or delay the achievement of targets.

2. Risk Analysis

The purpose of risk analysis is to understand the nature of risk and its characteristics as well as the level of risk. Risk analysis considers risk sources, impacts, likelihood, events, scenarios, controls and their effectiveness.

Risk Analysis is the process of determining how much impact (impact or consequences) and probability (likelihood or frequency) the risks will occur, and calculating the level of risk by multiplying the magnitude of the impact and the magnitude of the likelihood (risk – impact x likelihood).

3. Risk Evaluation

The purpose of risk evaluation is to support decisions that have been taken after a risk analysis has been carried out. The risk evaluation compares the results of the risk analysis with the established risk criteria to determine the priority of risk management if additional actions are required.

Risk Treatment

The purpose of risk management is to select and implement options to address the risk. Risk management is an iterative process so it must:

1. *Formulate and select risk treatment options;*
2. *Plan and implement risk management;*
3. *Assess treatment effectiveness;*
4. *Decide whether the remaining risk is acceptable;*
5. *If it is not acceptable, take further countermeasures.*

The purpose of risk management is to reduce or eliminate the impact of the above-mentioned risks that can interfere with the achievement of the Company's targets until it is included in the "acceptable" criteria.

The types of risk management are as follows:

1. *Avoiding the risk, avoiding the risk completely with the consequences of losing the opportunity;*
2. *Risk sharing, actions to reduce the possibility of risk arising or the impact of risk, for example conducting joint financing and joint ventures;*

3. Transfer risiko, tindakan untuk mengurangi kemungkinan timbulnya risiko ataupun dampak risiko, contoh membeli asuransi, reasuransi dan melakukan hedging. Mentransfer risiko dapat menimbulkan risiko baru bahwa pihak yang menerima transfer (*transferee*) tidak melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan;
4. Mengurangi atau memitigasi risiko, melakukan penanganan risiko untuk mengurangi kemungkinan timbulnya risiko atau mengurangi dampak risiko baik terjadi atau mengurangi keduanya. Mengurangi dampak atas terjadinya risiko melalui *contingency plan*, penyediaan cadangan dan meningkatkan *public relation*;
5. Menerima risiko (*accept*), risiko yang berada dalam tingkat rendah dapat diterima dengan tetap melakukan *monitoring* risiko. Risiko tidak dapat dihindari atau dikurangi karena sudah merupakan bagian integral dari lingkup kerja Perusahaan, contoh sudah diamanatkan oleh undang-undang yang harus diterima.

Penanganan risiko direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemilik Risiko, yaitu:

Risk management is planned and implemented by the Risk Owner, namely:

Tingkat Risiko <i>Risk Level</i>	Penanganan Risiko <i>Risk Management</i>
<i>Acceptable</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko diterima, pada prinsipnya tidak dilakukan mitigasi. 2. Dalam hal penerapan untuk <i>improvement</i> proses bisnis, maka tetap diupayakan pengendalian internalnya. <p><i>1. Risk is accepted, in principle no mitigation is carried out.</i> <i>2. In terms of implementation for business process improvement, internal control is still being pursued.</i></p>
<i>Supplementary Issue</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko diterima, dengan pemantauan <i>Key Performance Indicator</i> (KPI); 2. Apabila trend KPI <i>stagnant</i>, perlu dibuat rencana penanganan berupa rencana pencegahan maupun kontijensi jika risiko terjadi. <p><i>1. Risk is accepted, by monitoring Key Performance Indicators (KPI);</i> <i>2. If the KPI trend is stagnant, it is necessary to make a management plan in the form of a prevention or contingency plan if a risk occurs.</i></p>
<i>Issue</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat risiko tinggi diupayakan untuk diturunkan melalui rencana penanganan (mitigasi) risiko; 2. Risiko dapat diterima apabila penanganan dinilai efektif (yaitu dapat menurunkan risiko sekurang-kurangnya moderat). 3. Pemantauan dilakukan terhadap <i>Key Risk Indicator</i> (KRI) dan progres mitigasi/penanganannya. <p><i>1. The high level of risk is attempted to be reduced through a risk management (mitigation) plan;</i> <i>2. The risk is acceptable if the treatment is considered effective (ie can reduce the risk at least moderately).</i> <i>3. Monitoring is carried out on Key Risk Indicators (KRI) and the progress of mitigation/handling.</i></p>
<i>Unacceptable</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat risiko ekstrim wajib diturunkan melalui rencana penanganan (mitigasi) risiko; 2. Risiko dapat diterima apabila penanganan dinilai efektif (yaitu dapat menurunkan risiko menjadi sekurang-kurangnya moderat). 3. Penanganan risiko yang dilakukan pemantauan <i>Key Risk Indicator</i> (KRI) dan progress rencana penanganan risiko yang dilakukan secara berkala. <p><i>1. The level of extreme risk must be reduced through a risk management (mitigation) plan;</i> <i>2. The risk is acceptable if the treatment is considered effective (ie can reduce the risk to at least moderate).</i> <i>3. The risk management is carried out by monitoring the Key Risk Indicator (KRI) and the progress of the risk management plan is carried out on a regular basis.</i></p>

Penanganan Risiko Ekstrim

Dalam kondisi tertentu ditingkat strategi Perusahaan tetap memiliki kemungkinan terpapar risiko ekstrim di luar selera risiko yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu ditetapkan kebijakan khusus mengenai rencana kontijensi apabila peristiwa risiko ekstrim terjadi.

Extreme Risk Management

Under certain conditions at the strategic level, the Company still has the possibility of being exposed to extreme risks beyond the predetermined risk appetite. For this reason, it is necessary to establish a special policy regarding contingency plans if an extreme risk event occurs.

Pemantauan dan Tinjauan Ulang

Pemantauan adalah peninjauan berkala terhadap kinerja aktual penerapan Manajemen Risiko dibandingkan dengan rencana awal. Pengkajian adalah telaah penerapan Manajemen Risiko pada saat tertentu dan terfokus pada topik atau permasalahan tertentu mengenai penerapan Manajemen Risiko.

Pemantauan penerapan Manajemen Risiko dilakukan dengan kategori:

1. Pemantauan berkelanjutan
Dilakukan oleh setiap pemilik risiko (*risk owner*) secara berkala dan terus menerus mengenai pemantauan risiko dan mitigasinya sesuai dengan konteks dan kondisi spesifiknya.
2. Pemantauan Atasan Langsung
Atasan langsung melakukan pemantauan untuk memastikan tidak ada kejutan risiko baru dan atau pergerakan (*trend*) risiko diluar selera risiko pemilik risiko secara berkala.
3. Pemantauan oleh Pihak Independen Internal
Dilakukan oleh divisi yang membawahi fungsi Manajemen Risiko untuk memantau secara berkala dan memastikan kepatuhan penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan kebijakan dan pedoman yang telah ditetapkan Perusahaan.

Penyimpanan dan Pelaporan

Setiap laporan harus disampaikan tepat waktu, akurat dan dalam bentuk yang mudah dimengerti. Hasil proses Manajemen Risiko harus didokumentasikan dan dilaporkan sesuai kebijakan yang berlaku.

Tujuan dari pelaporan dan pencatatan ini adalah:

1. Mengkomunikasikan aktivitas dan hasil dari Manajemen Risiko keseluruhan Perusahaan;
2. Menghasilkan informasi untuk pengambilan keputusan;
3. Memperbaiki aktivitas Manajemen Risiko;
4. Memandu interaksi diantara pemangku kepentingan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya masing-masing.

Profil Risiko dan Pengelolannya

Manajemen risiko Perseroan dikelompokkan berdasarkan jenis-jenis risiko. Berikut uraian 8 (delapan) risiko terbesar yang dimiliki Perseroan beserta upaya mitigasi risiko tersebut.

Monitoring and Review

Monitoring is a periodic review of the actual performance of the implementation of Risk Management compared to the initial plan. Assessment is a study of the application of Risk Management at a certain time and focuses on certain topics or problems regarding the implementation of Risk Management.

Monitoring the implementation of Risk Management is carried out in the following categories:

1. *Continuous monitoring*
It is carried out by each risk owner on a regular and continuous basis regarding risk monitoring and mitigation in accordance with the context and specific conditions.
2. *Direct Supervisor Monitoring*
The direct supervisor conducts monitoring to ensure that there are no new risk surprises and or risk movements (trends) beyond the risk appetite of the risk owner on a regular basis.
3. *Monitoring by Internal Independent Parties*
Carried out by the division in charge of the Risk Management function to periodically monitor and ensure compliance with the implementation of Risk Management in accordance with the policies and guidelines set by the Company.

Storage and Reporting

Each report must be submitted on time, accurately and in a form that is easy to understand. The results of the Risk Management process must be documented and reported in accordance with applicable policies.

The purposes of this reporting and recording are:

1. *Communicating the activities and results of the Company's overall Risk Management;*
2. *Generating information for decision making;*
3. *Improving Risk Management activities;*
4. *Guiding interactions among stakeholders in accordance with their respective responsibilities and authorities.*

Risk Profile and Management

The Company's risk management is categorized based on types of risks. The following are descriptions of 8 major risks of the Company and their mitigation efforts.

Jenis Risiko Risk Type	Penjelasan Explanation	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
<p>Risiko Pembiayaan/ Risiko Kredit <i>Financing Risk/ Credit Risk</i></p>	<p>Dalam melaksanakan kegiatan utama Perseroan, yaitu menyalurkan pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil, risiko utama yang dihadapi adalah ketidakmampuan nasabah untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan yang diberikan, baik pokok pinjaman maupun bunganya. Hal ini menyebabkan tidak tertagihnya piutang pembiayaan kepada nasabah, yang kemudian akan menurunkan pendapatan dan kinerja Perseroan. Risiko pembiayaan/kredit timbul jika pembiayaan kepada nasabah tidak dikelola secara hati-hati (<i>prudent</i>) atau proses penentuan kelayakan nasabah tidak dikelola secara memadai sehingga menyebabkan tidak tertagihnya piutang pembiayaan kepada nasabah dan meningkatnya kredit macet yang berdampak kepada laba bersih Perseroan.</p> <p><i>In carrying out the Company's main activities, namely distributing financing to micro and small businesses, the main risk faced is the inability of customers to repay the financing facilities provided, both principal and interest. This results in uncollectible financing receivables from customers, which in turn will reduce the Company's revenue and performance. Financing/credit risk arises if financing to customers is not managed prudently or the process of determining customer eligibility is not managed adequately, resulting in uncollectible financing receivables to customers and an increase in bad debts which has an impact on the Company's net profit.</i></p>	<p>Untuk menghadapi risiko ini, Perseroan telah mengoptimalkan peran Reviewer untuk mengidentifikasi secara sistematis profil kapasitas usaha Nasabah, pengendalian risiko konsentrasi pada satu grup usaha/sektor, penetapan tingkatan wewenang kredit dalam proses persetujuan pemberian kredit, selain menerapkan kebijakan seperti asuransi kredit, dan sistem tanggung renteng khusus untuk produk pemberdayaan kelompok perempuan prasejahtera.</p> <p><i>To deal with this risk, the Company optimized the role of the Reviewer to systematically identify the customer's business capacity profile, control risk concentration in one business group/sector, determine the level of credit authority in the credit approval process, in addition to implementing policies such as credit insurance, and the joint responsibility system specifically for empowerment products for underprivileged women groups.</i></p>
<p>Risiko Likuiditas <i>Liquidity Risk</i></p>	<p>Dalam pelaksanaannya pengelolaan likuiditas pendanaan untuk mendanai pertumbuhan aktiva atau untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang tidak terlepas dari pengelolaan likuiditas pasar. Keterbatasan dalam alternatif sumber pendanaan menjadi faktor kendala dalam pengembangan bisnis Perseroan, ketika pada saat ini sumber pendanaan utama Perseroan adalah pinjaman dari lembaga keuangan/perbankan dan pasar modal. Mengingat sumber pendanaan Perseroan masih sangat bergantung pada lembaga keuangan/perbankan, kenaikan biaya perolehan modal dan batasan tingkat rasio <i>leverage</i> dapat terjadi sewaktu-waktu, yang pada akhirnya membatasi kapasitas pendanaan. Risiko likuiditas timbul apabila kondisi ekonomi dengan tingkat suku bunga tinggi terjadi secara berkepanjangan dan mengakibatkan lembaga keuangan memperketat kebijakan kredit yang berdampak pada keterbatasan ketersediaan likuiditas. Hal ini tentu memengaruhi kemampuan Perseroan untuk menjalankan fungsi penyaluran pembiayaan. Tidak tercapainya target penyaluran pembiayaan sesuai rencana kerja Perseroan secara langsung berdampak terhadap kinerja keuangan Perseroan secara keseluruhan.</p> <p><i>In practice, the management of funding liquidity to fund asset growth or to meet short-term and long-term obligations cannot be separated from market liquidity management. Limitations in alternative funding sources are a constraint factor in the Company's business development, when currently the Company's main funding sources are loans from financial institutions/banks and the capital market. Given that the Company's funding sources are still very dependent on financial institutions/banks, the increase in the cost of capital acquisition and limits on the level of leverage ratios can occur at any time, which in turn limits funding capacity. Liquidity risk arises when economic conditions with high interest rates persist for a long time and result in financial institutions tightening credit policies which result in limited availability of liquidity. This certainly affects the Company's ability to carry out the financing distribution function. The non-achievement of the target for financing distribution in accordance with the Company's work plan has a direct impact on the overall financial performance of the Company.</i></p>	<p>Untuk mengatasi risiko ini, Perseroan menerapkan pengelolaan likuiditas sesuai dengan target RKAP, strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas, dan pengelolaan aset likuid yang berkualitas tinggi.</p> <p><i>To overcome this risk, the Company implemented liquidity management in accordance with Company Work and Budget Plan targets, funding strategies, liquidity position management, and high quality liquid asset management.</i></p>

Jenis Risiko Risk Type	Penjelasan Explanation	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
<p>Risiko Pasar <i>Market Risk</i></p>	<p>Risiko pasar merupakan risiko pada posisi neraca, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, yang meliputi risiko suku bunga dan risiko nilai tukar. Risiko pasar yang memiliki dampak langsung bagi Perseroan adalah perubahan tingkat suku bunga, khususnya apabila terjadi kenaikan tingkat suku bunga pinjaman yang berdampak pada naiknya beban dana Perseroan. Selain itu, peningkatan persaingan usaha pada industri pembiayaan kredit mikro juga berdampak pada sensitivitas pelaku UMKM terhadap tingkat suku bunga pembiayaan (<i>lending rate</i>). Dengan demikian, dibutuhkan tingkat suku bunga pembiayaan (<i>lending rate</i>) yang mampu menjawab kebutuhan pelaku UMKM. Dalam hal ini, perubahan beban dana tentu memiliki dampak langsung terhadap pendapatan dan laba bersih Perseroan.</p> <p><i>Market risk is the risk in the balance sheet position, due to changes in overall market conditions, which include interest rate risk and exchange rate risk. The market risk that has a direct impact on the Company is changes in interest rates, especially if there is an increase in loan interest rates which has an impact on the increase in the Company's cost of funds. In addition, increased business competition in the microcredit financing industry also has an impact on the sensitivity of MSME actors to the lending rate. Thus, a lending rate is needed that is able to answer the needs of MSME actors. In this case, changes in the cost of funds certainly have a direct impact on the Company's revenue and net income.</i></p>	<p>Perseroan mengelola tingkat suku bunga pinjaman tetap dengan jangka waktu yang sama dengan piutang pembiayaan mikro. Di samping itu, tingkat suku bunga pinjaman disesuaikan secara konsisten terhadap sensitivitas tingkat suku bunga sumber dana. Dengan pola aktivitas usaha yang dijalankan Perseroan saat ini, risiko pasar Perseroan terbilang minimal karena Perseroan tidak mempunyai kegiatan usaha pembiayaan dalam mata uang asing.</p> <p><i>The Company managed a fixed interest rate loan with the same tenor as microfinance receivables. In addition, the loan interest rate was adjusted consistently to the interest rate sensitivity of the source of funds. With the current pattern of business activities carried out by the Company, the Company's market risk was minimal because the Company did not have financing business activities in foreign currencies.</i></p>
<p>Risiko Operasional <i>Operational Risk</i></p>	<p>Risiko operasional adalah risiko yang disebabkan oleh tidak memadainya atau kegagalan atau kesalahan proses, manusia, dan sistem secara internal atau ketaklayakan atau kegagalan dalam proses, manusia, dan sistem atau dari kejadian eksternal. Kejadian risiko operasional dapat mengakibatkan kerugian material yang berpengaruh terhadap penurunan laba Perseroan dan kerugian immaterial berupa reputasi Perseroan dan dapat menimbulkan tuntutan hukum kepada Perseroan dari pihak luar yang merasa dirugikan</p> <p><i>Operational risk is the risk caused by the inadequacy or failure or error of processes, people and systems internally or the inadequacy or failure of processes, people and systems or from external events. Operational risk events can result in material losses that affect the decline in the Company's profits and immaterial losses in the form of the Company's reputation and can lead to lawsuits against the Company from outside parties who feel aggrieved.</i></p>	<p>Perseroan telah menerapkan sistem operasional yang terpadu untuk mencegah risiko operasional, salah satunya melalui penyimpanan basis data perusahaan pada dua tempat yang berbeda, yaitu di Lembang dan T.B. Simatupang. Untuk memitigasi risiko aset lainnya, Perseroan juga memiliki asuransi aset, <i>cash in safe</i>, dan <i>cash in transfer</i> untuk mengantisipasi kerugian yang dapat ditimbulkan oleh kejadian terkait risiko operasional, selain mengembangkan program untuk mitigasi risiko operasional, termasuk keamanan proses teknologi informasi, asuransi, dan <i>outsourcing</i>/alih daya pada sebagian kegiatan operasional Perseroan.</p> <p><i>The Company implemented an integrated operational system to prevent operational risks, one of which was by storing the company database in two different places, namely in Lembang and T.B. Simatupang. To mitigate other asset risks, the Company also had asset insurance, cash in safe, and cash in transfer to anticipate losses that might be caused by incidents related to operational risk, in addition to developing programs to mitigate operational risks, including information technology process security, insurance, and outsourcing of some of the Company's operational activities.</i></p>
<p>Risiko Hukum <i>Legal Risk</i></p>	<p>Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.</p> <p><i>Legal risk is the risk due to lawsuits and/or the weakness of the juridical aspect. This risk arises, among others, due to the absence of supporting laws and regulations or the weakness of the engagement, such as non-fulfillment of the conditions for a valid contract or imperfect binding of collateral.</i></p>	<p>Perseroan telah melakukan <i>review</i> berkala terhadap kontrak dan perjanjian antara Perseroan dengan pihak lain, antara lain dengan cara melakukan penilaian kembali terhadap efektivitas proses <i>enforceability</i> guna mengecek validitas hak dalam kontrak dan perjanjian tersebut</p> <p><i>The Company conducted periodic reviews of contracts and agreements between the Company and other parties by reassessing the effectiveness of the enforceability process in order to check the validity of the rights in the contracts and agreements.</i></p>

Jenis Risiko Risk Type	Penjelasan Explanation	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
<p>Risiko Reputasi <i>Reputational Risk</i></p>	<p>Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan/stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan. <i>Reputational risk is a risk due to a decrease in the level of trust of stakeholders originating from negative perceptions of the Company.</i></p>	<p>Divisi terkait mengoordinasikan setiap usaha untuk melakukan kontrol dan pengelolaan risiko reputasi, keluhan nasabah dan sengketa harus ditangani secara seimbang, konsisten dan segera sesuai dengan kebijakan dan prosedur agar tidak menimbulkan risiko reputasi yang buruk. Pengelolaan risiko reputasi tetap memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan nasabah dan <i>stakeholders</i> lainnya, serta pelaksanaan komunikasi yang tepat dalam rangka menghadapi berita/publikasi yang bersifat negatif. <i>The relevant division coordinated every effort to control and manage reputation risk; customer complaints and disputes had to be handled in a balanced, consistent and prompt manner in accordance with policies and procedures so as not to cause a bad reputation risk. Reputation risk management continued to comply with the principles of transparency and improve the quality of service for customers and other stakeholders, as well as implementing appropriate communication in order to deal with negative news/publications.</i></p>
<p>Risiko Strategis <i>Strategic Risk</i></p>	<p>Risiko strategis adalah risiko akibat ketaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. <i>Strategic risk is the risk due to inaccuracy in making and/or implementing a strategic decision and failure to anticipate changes in the business environment.</i></p>	<p>Perseroan melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap implementasi strategi secara berkala. Pemantauan dilakukan antara lain dengan memperhatikan pengalaman kerugian pada masa lalu yang disebabkan oleh risiko strategis atau penyimpangan pelaksanaan rencana strategi. Selain itu, Perseroan juga menganalisis laporan aktual terhadap target rencana bisnis dan menyampaikan kepada Direksi secara berkala disertai tindakan perbaikan yang diperlukan. <i>The Company monitored and controlled the implementation of the strategy on a regular basis. Monitoring was carried out by considering the experience of past losses caused by strategic risks or deviations from the implementation of the strategic plan. In addition, the Company also analyzed the actual report against the business plan targets and submitted it to the Board of Directors on a regular basis along with the necessary corrective actions.</i></p>
<p>Risiko Kepatuhan <i>Compliance Risk</i></p>	<p>Risiko kepatuhan adalah risiko akibat Perseroan tidak memenuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. <i>Compliance risk is the risk that the Company does not comply with and/or does not implement the applicable laws and regulations.</i></p>	<p>Perseroan memastikan terdapat kecukupan proses penafsiran perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dalam kaitannya dengan kegiatan operasional dan memastikan bahwa sumber daya Perseroan telah tepat dialokasikan untuk kepentingan pelatihan karyawan dan peningkatan budaya kepatuhan. Di samping itu, Perseroan juga memiliki sistem pengendalian internal yang memadai yang dapat membantu meningkatkan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran aspek kehati-hatian. <i>The Company ensured that there was an adequate process of interpreting applicable laws and regulations in relation to operational activities and ensures that the Company's resources were properly allocated for the benefit of employee training and enhancing the culture of compliance. In addition, the Company also had an adequate internal control system that could help improve the Company's compliance with applicable laws and regulations and reduce the risk of losses, irregularities, and violations of prudential aspects.</i></p>

Penilaian Risiko

Berdasarkan hasil *Risk Assessment* atas pelaksanaan penerapan manajemen risiko periode Desember 2021, dapat ditetapkan Peringkat Risiko Penerapan Manajemen Risiko per Jenis Risiko adalah sebagai berikut:

Jenis Risiko <i>Types of Risk</i>	Risk Level (Peringkat Risiko) <i>Risk Level</i>
Risiko Kredit / <i>Credit Risk</i>	Acceptable
Risiko Pasar / <i>Market Risk</i>	Acceptable
Risiko Likuiditas / <i>Liquidity Risk</i>	Acceptable
Risiko Operasional / <i>Operational Risk</i>	Acceptable
Risiko Hukum / <i>Legal Risk</i>	Acceptable
Risiko Reputasi / <i>Reputational Risk</i>	Acceptable
Risiko Strategi / <i>Strategy Risk</i>	Acceptable
Risiko Kepatuhan / <i>Compliance Risk</i>	Acceptable

Keterangan:

Information:

Level Risiko <i>Risk Level</i>	Penjelasan <i>Explanation</i>
Unacceptable	Diperlukan tindakan segera untuk mengelola risiko / <i>Urgent action was needed to manage risk</i>
Issue	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko / <i>Action was needed to manage risk</i>
Supplementary Issue	Disarankan diambil tindakan jika tersedia sumber daya / <i>Action was recommended if resources are available</i>
Acceptable	Tidak diperlukan tindakan/diterima / <i>No action required/accepted</i>

Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Risiko

Direksi dan Dewan Komisaris senantiasa melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan manajemen risiko. Dalam rangka pengendalian risiko secara efektif, kebijakan dan prosedur, Perusahaan perlu melakukan penetapan toleransi risiko dan limit risiko yang dilakukan dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*), toleransi risiko (*risk tolerance*) dan strategi Perusahaan secara keseluruhan.

1. Penetapan Kerangka Manajemen Risiko

Hal-hal dalam penetapan kerangka manajemen risiko bagi Perusahaan termasuk kebijakan, prosedur dan limit antara lain adalah sebagai berikut:

a. Strategi Manajemen Risiko

1. Perumusan strategi Manajemen Risiko Perusahaan sesuai strategi bisnis secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil (*Risk Appetite*) dan toleransi Risiko (*Risk Tolerance*);
2. Strategi Manajemen Risiko disusun bertujuan untuk memastikan bahwa eksposur Risiko pada Perusahaan telah dikelola secara terkendali sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal Perusahaan serta peraturan perundang-undangan.

Risk Assessment

Based on the results of the *Risk Assessment* on the implementation of risk management for the period of December 2021, the *Risk Ranking of Risk Management Implementation per Risk Type* can be mapped as follows:

Evaluation of Implementation of Risk Management

The Board of Directors and the Board of Commissioners constantly evaluate the effectiveness of risk management implementation. In order to control risk effectively, policies and procedures, the Company needs to establish risk tolerance and risk limits by taking into account the risk appetite, risk tolerance and the overall strategy of the Company.

1. Establishment of a Risk Management Framework

Matters in determining the risk management framework including policies, procedures and limits are as follows:

a. Risk Management Strategy

1. Formulation of the Company's Risk Management strategy in accordance with the overall business strategy by taking into account the level of Risk to be taken (*risk appetite*) and Risk tolerance;
2. The Risk Management Strategy is prepared to ensure that the Risk exposure to the Company is managed in a controlled manner in accordance with the Company's internal policies and procedures as well as laws and regulations.

- b. Tingkat Risiko yang akan diambil (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)
1. Tingkat risiko yang akan diambil telah tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis;
 2. Dalam penentuan toleransi risiko (*Risk Tolerance*), Perusahaan perlu mempertimbangkan strategi dan tujuan Perusahaan serta kemampuan Perusahaan dalam mengambil Risiko .
- c. Kebijakan dan Prosedur
1. Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan menggambarkan bagaimana hubungan antara Manajemen Risiko dengan tujuan, strategi dan kondisi Perusahaan saat ini;
 2. Kebijakan dan prosedur didesain dan diimplementasikan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha, tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko, profil Risiko serta peraturan yang ditetapkan otoritas dan/atau praktik Perusahaan yang sehat.
- d. Limit
1. Perusahaan perlu memiliki limit Risiko yang sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil (*Risk Appetite*), toleransi risiko (*Risk Tolerance*), dan strategi Perusahaan secara keseluruhan dengan memperhatikan kemampuan modal Perusahaan dalam menyerap eksposur Risiko disertai kerugian yang timbul, pengalaman kerugian, kemampuan SDM, dan kepatuhan terhadap ketentuan internal dan eksternal yang berlaku.
 2. Prosedur dan penetapan limit Risiko paling sedikit mencakup:
 - a. Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas;
 - b. Dokumentasi prosedur dan penetapan limit secara memadai untuk memudahkan pelaksanaan kaji ulang dan jejak audit;
 - c. Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan limit secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau frekuensi yang lebih sering, sesuai dengan jenis Risiko, kebutuhan dan perkembangan Perusahaan; dan
 - d. Penetapan limit telah dilakukan secara komprehensif atas seluruh aspek yang terkait dengan Risiko, yang mencakup limit secara keseluruhan, limit per Risiko, dan limit per aktivitas bisnis Perusahaan yang memiliki eksposur Risiko.
 3. Limit telah dipahami oleh setiap pihak yang terkait dan dikomunikasikan dengan baik termasuk apabila terjadi perubahan manajerial;
- b. *Risk Appetite and Risk Tolerance*
1. *The level of risk that will be listed is reflected in the Company's strategy and business objectives;*
 2. *In determining risk tolerance, the Company needs to consider the Company's strategy and objectives as well as the Company's ability to take risks (risk bearing capacity).*
- c. *Policies and Procedures*
1. *The Company's Risk Management Policy describes how the relationship between Risk Management and the objectives, strategy and current condition of the Company;*
 2. *The Company's policies and procedures are designed and implemented with due regard to the characteristics and complexity of business activities, the level of risk to be taken and the risk tolerance, the risk profile and regulations stipulated by the authorities and / or sound corporate practices.*
- d. *Limit*
1. *The Company needs to have a Risk limit in accordance with the level of Risk to be taken (risk appetite), Risk tolerance, and the Company's overall strategy by taking into account the Company's capital ability to absorb Risk exposure along with losses incurred, loss experience, capability HR, and compliance with applicable internal and external regulations.*
 2. *The procedures and determination of Risk limits at least include:*
 - a. *Accountability and clear levels of delegation of authority;*
 - b. *Sufficient documentation of procedures and determination of limits to facilitate the implementation of reviews and audit trails;*
 - c. *Performing regular reviews of procedures and limit determination at least 2 (two) times a year or a more frequent frequency, in accordance with the type of risk, the needs and developments of the Company; and*
 - d. *Limit determination has been carried out comprehensively on all aspects related to risk, including the overall limit, limit per risk, and limit per business activity of the Company that has risk exposure.*
 3. *The limit has been understood by all related parties and communicated properly, including if there is a managerial change;*

4. Dalam rangka pengendalian Risiko, limit digunakan sebagai ambang batas untuk menentukan tingkat intensitas mitigasi Risiko yang akan dilaksanakan manajemen;
 5. Review untuk Limit secara berkala telah dilakukan oleh Direksi dan/atau satuan kerja Manajemen Risiko untuk menyesuaikan terhadap perubahan kondisi yang terjadi.
2. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko
- Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko pada Perusahaan merupakan bagian utama dari proses penerapan Manajemen Risiko. Identifikasi Risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis dan dilakukan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya Risiko beserta dampaknya.

Selanjutnya, Perusahaan perlu melakukan pengukuran Risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha. Perusahaan telah menetapkan satuan kerja yang independen dari pihak yang melakukan transaksi untuk memantau tingkat dan tren serta menganalisis Risiko. Selain itu, efektivitas penerapan Manajemen Risiko didukung oleh pengendalian Risiko dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan pemantauan Risiko.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau Komite Audit atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Pernyataan Direksi terkait kecukupan sistem manajemen risiko yang disampaikan adalah bahwa Perusahaan telah memetakan risiko, menetapkan *risk appetite*, melakukan *monitoring* risiko, menambahkan kompetensi terkait manajemen *risiko top to bottom* pelatihan manajemen risiko dan melakukan pengukuran kematangan risiko pada Perusahaan. Perihal pelatihan manajemen risiko ini juga ditunjukkan dengan penerapan pelatihan bersertifikasi kepada setiap Kepala Divisi fungsi organisasi, hal ini merupakan salah satu syarat minimum yang harus diterapkan di dalam Perusahaan dan sedang dalam proses pelatihan bersertifikasi tersebut kepada setiap jabatan. Penerapan Manajemen Risiko baik dari perencanaan sampai dengan register atau *monitoringnya*, tidak hanya berlangsung di pusat tetapi juga harus tercermin dalam setiap proses dan terwakili dari organisasi yang akan kita bangun.

Fungsi Kepatuhan

Fungsi kepatuhan Perseroan dijalankan oleh Divisi Kepatuhan dan legal. Divisi Kepatuhan dan Legal mempunyai tugas pokok yaitu melakukan aktivitas kepatuhan dan legal dalam rangka mendukung pencapaian target Perseroan.

4. *In the context of risk control, limits are used as thresholds to determine the level of risk mitigation intensity that will be carried out by management;*
5. *The Board of Directors and/or the Risk Management work unit have conducted periodic reviews for Limit to adjust to changes in conditions that have occurred.*

2. *Adequacy of Risk Identification, Measurement, Monitoring and Control Processes*
- Identification, measurement, monitoring and control of Risk in the Company is a major part of the process of implementing Risk Management. Risk identification is proactive in nature, covers all of the Company's business activities and is carried out in order to analyze the sources and possibilities of Risks and their impacts.*

Furthermore, the Company needs to measure Risk according to the characteristics and complexity of business activities. In monitoring the results of Risk measurement, the Company has established a work unit that is independent from the parties conducting transactions to monitor levels and trends as well as analyze the direction of Risk. In addition, the effectiveness of Risk Management implementation is supported by Risk control by taking into account the results of measurement and monitoring of Risk.

Statement of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners or Audit Committee on the Adequacy of the Risk Management System

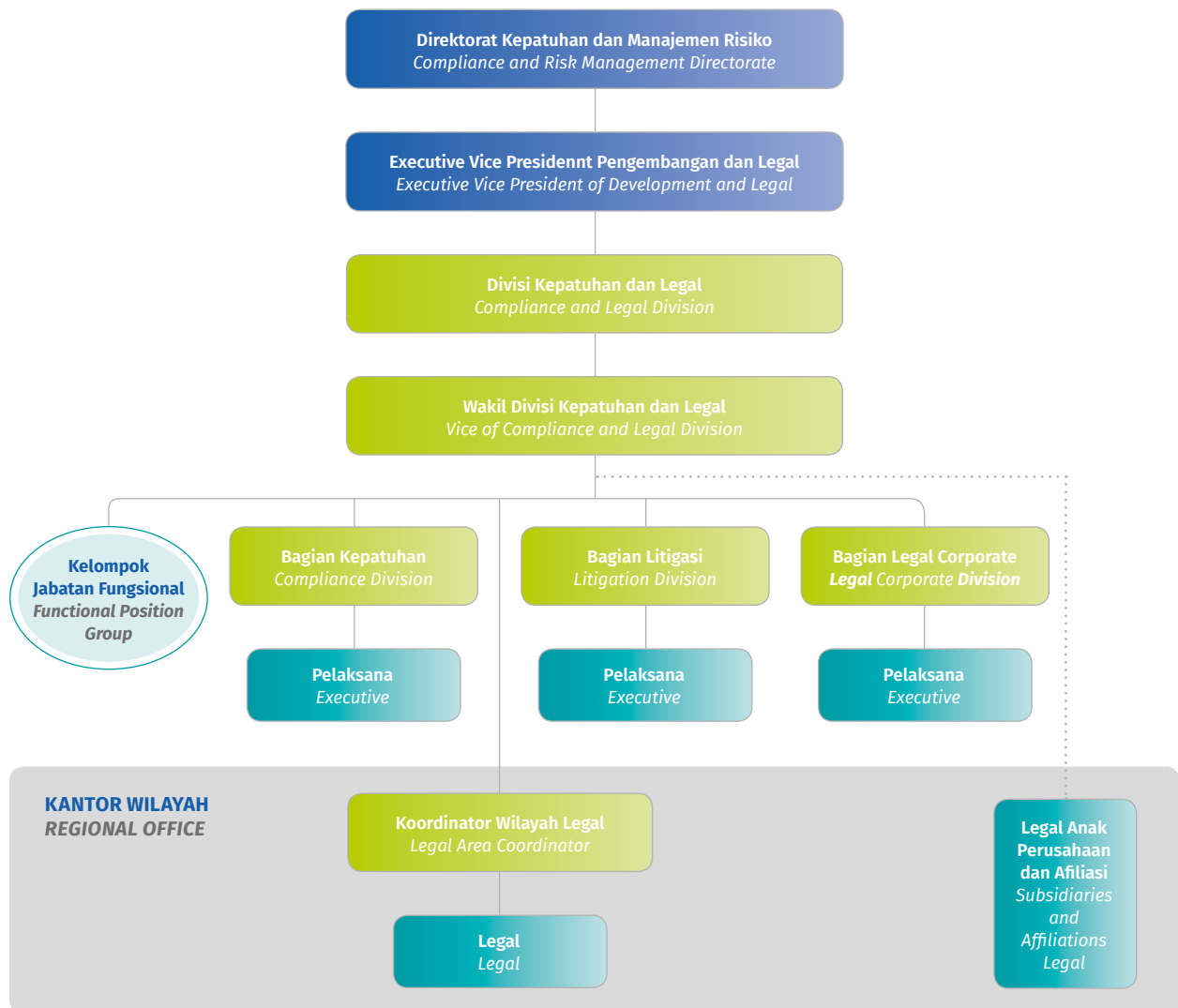
The Board of Directors' statement regarding the adequacy of the risk management system conveyed was that the Company had mapped risks, determined risk appetite, carried out risk monitoring, added competencies related to risk management, top to bottom risk management training and carried out risk maturity measurements in the Company. Regarding risk management training, this was also demonstrated by the implementation of certified training for each Division Head of organizational functions; this became one of the minimum requirements that had to be applied within the Company and was in the process of receiving certified training for each position. Implementation of Risk Management, from planning to registering or monitoring, did not only take place at the center but had to also be reflected in every process and be represented by the organization that would be built.

Compliance Function

The compliance function of the Company was carried out by the Compliance Division and was legal. The Compliance and Legal Division had the main task of carrying out compliance and legal activities in order to support the achievement of the Company's targets.

Struktur Organisasi Fungsi Kepatuhan

Organizational Structure Compliance Function



Profil Kepala Fungsi Kepatuhan

Profile of Compliance Function Head

Rahfie Syaefulshaaf Kepala Divisi Kepatuhan dan Legal/EVP Pengembangan dan Legal / Head of Compliance and Legal Division/EVP Development and Legal	
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Bogor
Tempat, Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Sukabumi, 3 Juli 1967 Sukabumi, July 3, 1967
Usia Age	54 tahun 54 years old
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> - Sarjana Hukum Jurusan Keperdataan dari Universitas Islam, Yogyakarta pada tahun 1991. - Magister Hukum Jurusan Keperdataan, Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 1995. - Bachelor of Law majoring in Civil Law from the Islamic University, Yogyakarta in 1991 - Masters in Civil Law, Padjadjaran University, Bandung in 1995.

Riwayat Jabatan <i>Position History</i>	<p>Beliau berpengalaman sebagai Legal Officer di PT Bank Dana Asia (1995–1997) dan di PT Bank Nusa Nasional, Tbk (1997–2000). Sebelum menjabat sebagai Executive Vice President Pengembangan dan Legal, beliau pernah menduduki beberapa jabatan strategis antara lain sebagai Kepala Divisi Legal merangkap PIC Divisi Remedial dan Penagihan. Kemudian beliau pernah menduduki beberapa jabatan strategis di Perseroan antara lain sebagai Pemimpin Cabang Medan dan Koordinator Cabang Padang (2015–2016); Kepala Divisi Remedial (2016–2017); Kepala Divisi pengelolaan Pembiayaan ULaMM II (Mei 2017–September 2017), serta Kepala Divisi Remedial (2017–2018), Executive Vice President ULaMM dan Jasa Manajemen (2018–2019), dan Executive Vice President Pengembangan dan Legal (2019–Oktober 2021).</p> <p><i>He has experience as Legal Officer at PT Bank Dana Asia (1995–1997) and at PT Bank Nusa Nasional, Tbk (1997–2000). Prior to serving as Executive Vice President of Development and Legal, he held several strategic positions, including as Head of the Legal Division and concurrently PIC of the Remedial and Billing Division. Then he held several strategic positions in the Company, among others as Medan Branch Manager and Padang Branch Coordinator (2015–2016); Head of Remedial Division (2016–2017); Head of ULaMM II Financing Management Division (May 2017–September 2017), as well as Head of Remedial Division (2017–2018), Executive Vice President of ULaMM and Management Services (2018–2019), and Executive Vice President of Development and Legal (2019–October 2021).</i></p>
Dasar Pengangkatan <i>Basis of Appointment</i>	<p>Surat Keputusan Direksi Nomor SK-3370/PNM/DIR/VIII/2019</p> <p><i>Decree of the Board of Directors Number SK-3370/PNM/DIR/VIII/2019</i></p>

Sejak 21 Oktober 2021, Bapak Rahfie Syaefulshaaf sudah tidak menjabat lagi sebagai EVP Pengembangan dan Legal. Maka bersama ini, digantikan oleh Bapak Anton Fahlevie selaku Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan

Tugas dan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun strategi dan perencanaan terkait pengelolaan Divisi Kepatuhan dan Legal.
2. Menyusun langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh proses bisnis di Perseroan.
3. Melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring* dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Perseroan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Perseroan agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Memberikan masukan dan pendapat hukum atas aktivitas bisnis dan/atau suatu ketentuan perundang-undangan.
7. Berkoordinasi dengan operasional cabang dalam melakukan *stock opname* jaminan pembiayaan ULaMM, LKMS dan program kemitraan.
8. Melakukan koordinasi dengan legal anak perusahaan dan afiliasi.
9. Melaporkan kegiatan pengelolaan Divisi Kepatuhan dan Legal kepada EVP atau Direktur yang membawahi Divisi Kepatuhan dan Legal dan pihak terkait.

Since October 21, 2021, Mr. Rahfie Syaefulshaaf has no longer served as EVP of Development and Legal. So here with, Mr. Anton Fahlevie has been replaced as Director of Compliance and Risk Management.

Duties and Responsibilities of Compliance Functions

The duties and responsibilities of the Compliance Function are as follows:

1. *Develop strategies and plans related to the management of the Compliance and Legal Division.*
2. *Develop steps to support the creation of a culture of compliance in all business processes in the Company.*
3. *Identify, measure, monitor and control compliance risk with reference to the applicable laws and regulations.*
4. *Assess and evaluate the effectiveness, adequacy and conformity of the Company's policies, provisions, systems and procedures with the prevailing laws and regulations.*
5. *Review and/or recommend updating and improving the Company's policies, provisions, systems and procedures to comply with the prevailing laws and regulations.*
6. *Provide legal input and opinion on business activities and/or a statutory provision.*
7. *Coordinate with branch operations in conducting stock opname guarantees for financing ULaMM, LKMS and partnership programs.*
8. *Coordinate with legal subsidiaries and affiliates.*
9. *Reporting the activities of the Compliance and Legal Division management to the EVP or the Director in charge of the Compliance and Legal Division and related parties.*

Pengembangan Kompetensi Fungsi Kepatuhan

Compliance Function Competency Development

No.	Pengembangan Kompetensi Competency Development	Tanggal Date
1.	Knowledgane Sharing Lelang Hak Tanggungan dan Non Hak Tanggungan <i>Knowledge Sharing of Mortgage and Non Mortgage Auctions</i>	08 Februari 2021 08 February 2021
2.	Pelatihan dan Sertifikasi Perancangan Kontrak <i>Contract Designing Training and Certification</i>	09-10 Juli 2021 09-10 July 2021
3.	Webinar Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia <i>Webinar Commemorating World Anti-Corruption Day</i>	15 Desember 2012 December 15, 2022

Kebijakan dan Standar Prosedur Kepatuhan

Kebijakan dan standar prosedur kepatuhan diatur dalam prosedur mutu. Prosedur mutu bertujuan untuk mengatur proses dan prosedur kegiatan Perseroan yang berhubungan dengan segi kepatuhan (*compliance*) terutama dalam kegiatan *monitoring* dan kajian kebijakan serta implementasi kebijakan tersebut. Adapun aktivitas *monitoring* dan kajian implementasi kebijakan adalah sebagai berikut.

Compliance Procedures and Standards

Compliance policies and standard procedures were regulated in quality procedures. Quality procedures aimed to regulate the processes and procedures for Company activities related to compliance, especially in monitoring and reviewing policies and implementing these policies. The monitoring activities and policy implementation studies are as follows.

Aktivitas Activity	PIC	Uraian Aktivitas Activity Description	Dokumen/Catatan Document/Notes
<p>Monitoring dan Kajian Implementasi Kebijakan</p> <p>MULAI / START</p> <p>1. Rekap Dokumen kebijakan internal PNM dan kebijakan eksternal serta temuan audit / <i>Recap PNM internal policy documents and external policies as well as audit findings</i></p>	Divisi Legal <i>Legal Division</i>	1. Divisi Legal melakukan pengumpulan dan rekap dokumen kebijakan/temuan audit yang dilakukan pengkajian dan <i>monitoring</i> . <i>Legal division collected and recaped policy documents/audit findings through study and mmonitoring.</i>	List Dokumen <i>Document List</i>
2. Kelengkapan Dokumen / <i>Document Completeness</i>	Divisi Legal <i>Legal Division</i>	2. Melengkapi Dokumen yang diperlukan. <i>Completing needed documents.</i>	List Dokumen <i>Document List</i>
3. Review dokumen/temuan audit / <i>Document review/audit findings</i>	Divisi Legal <i>Legal Division</i>	3. Divisi Legal akan melakukan review terhadap dokumen/temuan audit yang diperlukan. <i>Legal division reviewed the needed documents/audit findings.</i>	List Dokumen <i>Document List</i>
4. Pembuatan dokumen review kebijakan dan pembuatan memo (untuk temuan audit) / <i>Policy review document making and memo making (for audit findings)</i>	Divisi Legal <i>Legal Division</i>	4. Staff Kepatuhan akan membuat dokumen review dan memo yang diperlukan, dan apabila telah selesai akan diserahkan kepada Kepala Bagian untuk dilakukan review dan dimintakan persetujuan Kepala Divisi. <i>Compliance staffs made review and memo needed, and if it had finished it would be given to head division to review and ask the approval from Head Division.</i> Setelah Dokumen Legal disetujui oleh Kepala Divisi, dokumen legal akan diserahkan kepada Divisi terkait/EVP/Direksi. <i>After legal document was approved by head division, legal document would be handed to related division/EVP/Director.</i>	Analisa Kebijakan/ Memo terkait temuan audit/dokumen legal lainnya <i>Policy analysis/audit findings related memo/other legal documents</i>
5. Divisi/EVP/Direksi <i>Divisions/EVP/Directors</i>	Divisi/EVP/ Direksi <i>Division/ EVP/Director</i>	5. Divisi terkait/EVP/Direksi akan mereview dokumen legal, dan apabila: Tidak - Jika menurut Divisi terkait/EVP/Direksi ada hal yang harus diubah/ditambah, dokumen dikembalikan ke Divisi Legal untuk di revisi/koreksi. <i>Related division/EVP/Director reviewed legal documents, and if needed: No - if related to related vidiosion/EVP/Director there was aspects to change/add, documents were returned to legal division for correction.</i> Ya - Jika tidak ada hal yang harus diubah/ditambah/dikoreksi, maka dokumen tersebut diserahkan kepada Divisi terkait/EVP/Direksi. <i>Yes - if there was no change/addition/corrected, the documents were handed to related division/EVP/Director.</i>	Analisa Kebijakan/ Memo terkait temuan audit/dokumen legal lainnya <i>Policy analysis/audit findings related memo/other legal documents</i>
SELESAI / FINISH			

Pelaksanaan Program Kerja Fungsi Kepatuhan

Compliance Function Work Program Implementation

No	Program Kerja Work program	Waktu Pelaksanaan Execution time	Target yang Ingin Dicapai Target to be Achieved
1	Pelaksanaan Audit Kepatuhan tingkat Pusat dan Cabang secara berkala <i>Implementation of Compliance Audit at Central and Branch levels on a regular basis</i>	Per Semester <i>Per Semester</i>	Kesesuaian antara ketentuan eksternal dengan implementasi di pusat dan cabang <i>Conformity between external regulations and implementation at the center and branches</i>
2	Penerbitan Kajian atas kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang mengikat PNM atau kesesuaian kebijakan internal dengan ketentuan yang berlaku <i>Issuance of studies on compliance with laws and regulations that bind PNM or compliance with internal policies with applicable regulations</i>	Sesuai kebutuhan / sepanjang tahun <i>As needed / all year round</i>	Kesesuaian antara ketentuan eksternal dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh PNM <i>Conformity between external provisions and policies issued by PNM</i>
3	Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuaapan (FKAP) dalam tim SMAP <i>Implementation of the Anti-Bribery Compliance Function (FKAP) in the SMAP team</i>	Sesuai program kerja FKAP di pedoman SMAP <i>In accordance with the FKAP work program in the SMAP guidelines</i>	Termonitoringnya pelaksanaan SMAP <i>Monitoring the implementation of SMAP</i>
4	Review kesesuaian Kebijakan Internal dengan ketentuan yang berlaku bagi perusahaan <i>Review the suitability of the Internal Policy with the provisions that apply to the company</i>	Sesuai kebutuhan / sepanjang tahun <i>As needed / all year round</i>	Kesesuaian antara ketentuan eksternal dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh PNM <i>Conformity between external provisions and policies issued by PNM</i>
5	Updating dan Publikasi Compliance Register secara berkala bagi Divisi Terkait & monitoring pelaporan <i>Updating and publishing the Compliance Register on a regular basis for the Related Divisions & monitoring reporting.</i>	Pertriwulan/sesuai kebutuhan <i>Quarterly/as needed</i>	Kebijakan eksternal terupdate tersosialisasi dengan baik <i>Updated external policies are well socialized</i>
6	Pelaksana Fungsi Monitoring terhadap risiko hukum yang dapat timbul dari kegiatan bisnis/aktivitas operasional Perusahaan <i>Implementing the Monitoring Function on legal risks that may arise from the Company's business activities/operational activities</i>	Sesuai kebutuhan / sepanjang tahun <i>As needed / all year round</i>	Meminimalisir adanya dampak sanksi bagi Perusahaan <i>Minimizing the impact of sanctions on the Company</i>
7	Pengelolaan UPG (Unit Pengendalian Gratifikasi) <i>UPG Management (Gratification Control Unit)</i>	Secara berkala <i>Periodically</i>	Meminimalisir adanya dampak sanksi bagi Perusahaan <i>Minimizing the impact of sanctions on the Company</i>

Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan/atau Politik

Pemberian dana kegiatan sosial Perseroan lebih rinci dijelaskan pada Laporan Keberlanjutan. Sedangkan untuk kegiatan untuk pemberian dana politik tidak terdapat selama tahun 2021.

Funding of Social and/or Political Activities

The provision of funds for the Company's social activities was described in more detail in the Corporate Social Responsibility Chapter of this Annual Report. Meanwhile, there were no activities for providing political funds during 2021.

Perkara Hukum

Lawsuit

Tabel Perkara Hukum

Table of Legal Cases

No.	Perkara Hukum	Jumlah Amount			Lawsuit
		Perdata Civil	Pidana Criminal	Hubungan Industrial Industrial Relations	
1.	Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	47	108	-	Completed (has had permanent legal force)
2.	Dalam proses penyelesaian	105	234	-	In the process of completion
Total		152	342		Total

Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan

Legal Matters Facing the Company

No Perkara Case Number	Dasar Gugatan Basis of Lawsuit	Status Penyelesaian Completion Status	Risiko dan Nominal Gugatan Risk and Lawsuit Amount	Sanksi yang Dikenakan Sanctions imposed	Pengaruhnya terhadap Kondisi Perusahaan The effect on the Condition of the Company
63/Pdt.Bth/2017/ PN Sim	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan <i>Customer's lawsuit for Unlawful Acts of Mortgage Execution Auction</i>	Tingkat Kasasi <i>Rate of Cassation</i>	0	-	-
96/pdt.g/2020/ pn-rap	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan <i>Customer's lawsuit for Unlawful Acts of Mortgage Execution Auction</i>	Tingkat Banding <i>Appeal Rate</i>	5,000,000	-	-
16/Pdt.G/2021/ PN MDN	Penggugat adalah nasabah yang menuntut agar dicabut Hak Tanggungan atas objek jaminan <i>The plaintiff was a customer who demanded that the mortgage could be revoked on the object of guarantee</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>	500,000,000	-	-
35/Pdt.G/2019/ PN Kis	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan diajukan suami nasabah <i>The lawsuit against the law for the execution of the mortgage execution auction was filed by the customer's husband</i>	Tingkat Banding <i>Appeal Rate</i>	0	-	-
94/pdt.g/2021/ pn.lbp	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan <i>Customer's lawsuit for Unlawful Acts of Mortgage Execution Auction</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>	285,000,000	-	-
W2.U16/420/ HT.04.10/II/2021	Gugatan diajukan oleh pihak ketiga yang menyewa tempat yang dijadikan objek jaminan oleh nasabah <i>The lawsuit was filed by a third party who rented a place that was used as the object of collateral by the customer</i>	Tingkat Banding <i>Appeal Rate</i>	30,000,000	-	-
86/Pdt.Bth/2017/ PN.SIM	Gugatan Perlawanan diajukan oleh PNM atas pelaksanaan eksekusi lelang jaminan milik nasabah yang ada di PNM, yang permohonan eksekusinya dilakukan oleh Nurmala Nababan atas dasar hutang piutang dengan nasabah yang telah diputus sebelumnya oleh PN Simalungun <i>The resistance lawsuit was filed by PNM for the execution of the auction of collateral belonging to customers at PNM, whose execution request was carried out by Nurmala Nababan on the basis of debts with customers which had been previously decided by PN Simalungun</i>	Tingkat Kasasi <i>Rate of Cassation</i>	0	-	-
37/Pdt.G/2021/ PN Stb	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan <i>Customer's lawsuit over objections to the implementation of the mortgage execution auction</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>	10,000,000	-	-
245/PDT.G/2021/ PA.PSPK	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan <i>Customer's lawsuit over objections to the implementation of the mortgage execution auction</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>	80,000,000	-	-
91/pdt.bth/2021/ pn kis	Gugatan Bantahan yang diajukan nasabah atas lelang eksekusi hak tanggungan <i>Claims Rebuttal filed by customers for the auction of mortgage executions</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>	200,000,000	-	-
84/pdt.g/2021/ pn.rap	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan <i>Customer's lawsuit over objections to the implementation of the mortgage execution auction</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>	400,000,000	-	-

No Perkara Case Number	Dasar Gugatan Basis of Lawsuit	Status Penyelesaian Completion Status	Risiko dan Nominal Gugatan Risk and Lawsuit Amount	Sanksi yang Dikenakan Sanctions imposed	Pengaruhnya terhadap Kondisi Perusahaan The effect on the Condition of the Company
86/pdt.g/2021/pn kis	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan <i>Customer's lawsuit over objections to the implementation of the mortgage execution auction</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>	0	-	-
47/Pdt.G/2021/pn bna	Gugatan pihak ketiga yang mengklaim telah melakukan jual beli atas objek SHM yang dijaminan nasabah <i>Third party lawsuits claiming to have made a sale and purchase of SHM objects guaranteed by customers</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>	0	-	-
134/Pdt.G/2021/PN Pdengan	Gugatan Saudara tiri nasabah atas objek nasabah yang dijaminan di PNM <i>Lawsuit of the customer's stepsister for the object of the customer that was pledged at PNM</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>	0	-	-
403/Pdt.G/2021/PA.Bkt	Gugatan suami nasabah atas objek jaminan nasabah yang dijaminan di PNM <i>Lawsuit of the customer's husband on the object of the customer's guarantee guaranteed at PNM</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>	0	-	-
4/Pdt.G//2020/PN.Jmb	Gugatan Pihak Ketiga atas objek jaminan nasabah atas alasan bahwa objek jaminan diperoleh dari penipuan dan penggelapan <i>Third Party lawsuits against customers' collateral objects on the grounds that the collateral objects were obtained from fraud and embezzlement</i>	Tingkat Kasasi <i>Rate of Cassation</i>	0	-	-
16/pdt.g/2021/pn mbn	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan <i>Customer's lawsuit over objections to the implementation of the mortgage execution auction</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>	0	-	-
1/Pdt.G/2020/PN Mbn	Gugatan permohonan restrukturisasi <i>Restructuring petition</i>	Tingkat Kasasi <i>Rate of Cassation</i>	0	-	-
214/Pdt.G/2019/PN.Pbr	Gugatan nasabah kedua atas rencana lelang eksekusi hak tanggungan <i>Second customer lawsuit over the proposed mortgage execution auction</i>	Tingkat Kasasi <i>Rate of Cassation</i>	0	-	-
246/PDT/2020/PT.PBR	Gugatan nasabah atas rencana lelang eksekusi hak tanggungan <i>Customer's lawsuit against the auction plan for the execution of mortgage rights</i>	Tingkat Kasasi <i>Rate of Cassation</i>	40,000,000	-	-
19/pdt.g/2021/pn mrb	Gugatan nasabah atas rencana lelang eksekusi hak tanggungan dan tuntutan restrukturisasi <i>Customer lawsuits over the proposed execution of mortgage tenders and demands for restructuring</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>	0	-	-
176/pdt.bth/2021/pn jmb	Gugatan nasabah atas lelang eksekusi hak tanggungan <i>Customer's lawsuit against mortgage execution auction</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>	0	-	-
164/PDT.G/2021/PN.TJK	Gugatan suami nasabah atas objek jaminan nasabah yang dijaminan di PNM <i>Lawsuit of the customer's husband on the object of the customer's guarantee guaranteed at PNM</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>	1,700,000,000	-	-
767/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt	Gugatan Pihak Ketiga atas objek jaminan nasabah <i>Third Party lawsuits against customer guarantee objects</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>	0	-	-
274/PDT.G/2021/PN.DPK	Gugatan nasabah atas lelang eksekusi hak tanggungan <i>Customer's lawsuit against mortgage execution auction</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>	196,000,000	-	-

No Perkara Case Number	Dasar Gugatan Basis of Lawsuit	Status Penyelesaian Completion Status	Risiko dan Nominal Gugatan Risk and Lawsuit Amount	Sanksi yang Dikenakan Sanctions imposed	Pengaruhnya terhadap Kondisi Perusahaan The effect on the Condition of the Company
1/Pdt.G/2020/ PN Pwk	Gugatan permohonan restrukturisasi <i>Restructuring petition</i>	Tingkat Kasasi <i>Rate of Cassation</i>	0	-	-
18/PDT.G/2021/ PN.BBS	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan <i>Customer's lawsuit over objections to the implementation of the mortgage execution auction</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>	0	-	-
6/Pdt.G/2020/ PN.Sbr	Gugatan istri nasabah atas asuransi kematian dan meminta pengembalian objek jaminan <i>Lawsuit of the customer's wife for death insurance and requesting the return of the object of guarantee</i>	Tingkat Kasasi <i>Rate of Cassation</i>	0	-	-
30/Pdt.G/2020/ PN. Pml	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan <i>Customer's lawsuit over objections to the implementation of the mortgage execution auction</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>	467,500,000	-	-
43/pdt.g/2021/ pn.idm	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan <i>Customer's lawsuit over objections to the implementation of the mortgage execution auction</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>	600,000,000	-	-
15/pdt.g.s/2021/ pn.pml	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan <i>Customer's lawsuit over objections to the implementation of the mortgage execution auction</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>	187,800,000	-	-
32/pdt.g/2021/ pn.pml	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan <i>Customer's lawsuit over objections to the implementation of the mortgage execution auction</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>	0	-	-
49/PDT. PLW/2021/PN.CJR	Gugatan Pihak ketiga (kakak penjamin) atas objek yang dijaminan nasabah di PNM <i>Third party lawsuit (guarantor brother) on objects guaranteed by customers at PNM</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>	1,012,500,000	-	-
53/PDT.G/2020/ PN CLP	Gugatan Pihak Ketiga (ahli waris) atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah <i>Third Party lawsuits (heirs) for collateral used as collateral for Customer Financing</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>	0	-	-
33/PDT.G/2021/ PN.YYK	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan <i>Customer's lawsuit over objections to the implementation of the mortgage execution auction</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>	0	-	-
62/PDT.G/2020/ PN.BT	Gugatan nasabah atas keberatan proses lelang yang akan dilakukan oleh PNM <i>Customer's lawsuit over objections to the auction process that will be carried out by PNM</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>	0	-	-
179/PDT.G/2020/ PN.YYK	Gugatan nasabah atas keberatan proses lelang yang akan dilakukan oleh PNM <i>Customer's lawsuit over objections to the auction process that will be carried out by PNM</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>	0	-	-
03/Pdt/G/2019/ PN.Unr	Gugatan nasabah atas keberatan proses lelang yang akan dilakukan oleh PNM <i>Customer's lawsuit over objections to the auction process that will be carried out by PNM</i>	Tingkat Kasasi <i>Rate of Cassation</i>	0	-	-
46/PDT. BTH/2020/ PN.PWD	Gugatan Pihak Ketiga (ahli waris) atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah <i>Third Party lawsuits (heirs) for collateral used as collateral for Customer Financing</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>	0	-	-

No Perkara Case Number	Dasar Gugatan Basis of Lawsuit	Status Penyelesaian Completion Status	Risiko dan Nominal Gugatan Risk and Lawsuit Amount	Sanksi yang Dikenakan Sanctions imposed	Pengaruhnya terhadap Kondisi Perusahaan The effect on the Condition of the Company
1.pdt.g/2020/ pn.kbm	Gugatan nasabah atas keberatan proses lelang yang akan dilakukan oleh PNM <i>Customer's lawsuit over objections to the auction process that will be carried out by PNM</i>	Tingkat Banding <i>Appeal Rate</i>	0	-	-
24/Pdt.G/2021/ PN Bla	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan <i>Customer's lawsuit over objections to the implementation of the mortgage execution auction</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>	90,000,000	-	-
1602/pdt.g/2019/ pa. pwrj	Gugatan PMH oleh nasabah ULaMM Syariah <i>PMH lawsuit by Sharia ULaMM customers</i>	Tingkat Kasasi <i>Rate of Cassation</i>	0	-	-
581/Pdt.G/2019/ PN.Smg	Gugatan diajukan anak kandung debitur terkait keberatan terhadap eksekusi lelang <i>The lawsuit was filed by the debtor's biological son regarding objections to the auction execution</i>	Tingkat Kasasi <i>Rate of Cassation</i>	700,000,000	-	-
22/Pdt.G/2020/ PN Kds	Gugatan nasabah atas keberatan lelang eksekusi hak tanggungan yang akan dilakukan oleh PNM <i>Customer's lawsuit over objections to the auction of mortgage execution to be carried out by PNM</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>	0	-	-
61/Pdt.G/2019/ PN.Kds	Gugatan nasabah atas keberatan lelang eksekusi hak tanggungan yang akan dilakukan oleh PNM <i>Customer's lawsuit over objections to the auction of mortgage execution to be carried out by PNM</i>	Tingkat Banding <i>Appeal Rate</i>	50,000,000	-	-
07/PDT/2019/ PN.KDL	Gugatan orangtua nasabah atas keberatan proses lelang yang akan dilakukan oleh PNM <i>Lawsuit from customer's parents over the objection to the auction process that will be carried out by PNM</i>	Tingkat Kasasi <i>Rate of Cassation</i>	50,000,000	-	-
21/Pdt.G/2018/ PN Tmg	Gugatan nasabah atas keberatan proses lelang yang akan dilakukan oleh PNM <i>Customer's lawsuit over objections to the auction process that will be carried out by PNM</i>	Tingkat Banding <i>Appeal Rate</i>	0	-	-
22/Pdt. g/2021/ pn.mgg	Gugatan nasabah atas keberatan proses lelang yang akan dilakukan oleh PNM <i>Customer's lawsuit over objections to the auction process that will be carried out by PNM</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>	0	-	-
19/Pdt. bth/2021/pn. kbm	Perlawanan pihak ketiga (orangtua) nasabah atas dugaan pemalsuan ttd dalam AJB SHM yang dijamin nasabah ke PNM <i>The customer's third party (parents) resistance to the alleged forgery of the signature in AJB SHM which is guaranteed by the customer to PNM</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>	0	-	-
37/Pdt.g/2021/ pn. pwr	Gugatan nasabah atas keberatan proses lelang yang akan dilakukan oleh PNM <i>Customer's lawsuit over objections to the auction process that will be carried out by PNM</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>	0	-	-
77/pdt.g/2021/ pn slt	Gugatan nasabah atas keberatan proses lelang yang akan dilakukan oleh PNM <i>Customer's lawsuit over objections to the auction process that will be carried out by PNM</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>	3,000,000,000	-	-
40/pdt.g/2021/ pn pwd	Gugatan nasabah atas keberatan proses lelang yang akan dilakukan oleh PNM <i>Customer's lawsuit over objections to the auction process that will be carried out by PNM</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>	0	-	-

No Perkara Case Number	Dasar Gugatan Basis of Lawsuit	Status Penyelesaian Completion Status	Risiko dan Nominal Gugatan Risk and Lawsuit Amount	Sanksi yang Dikenakan Sanctions imposed	Pengaruhnya terhadap Kondisi Perusahaan The effect on the Condition of the Company
23/Pdt.G/2021/ PN Wng	Gugatan nasabah atas keberatan proses lelang yang akan dilakukan oleh PNM <i>Customer's lawsuit over objections to the auction process that will be carried out by PNM</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>	16,950,089	-	-
103/PDT.G/2020. PN.KRG	Gugatan keberatan nasabah atas penjualan agunan secara sukarela <i>Customer objections to voluntary sale of collateral</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>	0	-	-
70/Pdt.G/2021/ PTA.Smg	Gugatan nasabah atas keberatan lelang eksekusi hak tanggungan yang akan dilakukan oleh PNM <i>Customer's lawsuit over objections to the auction of mortgage execution to be carried out by PNM</i>	Tingkat Kasasi <i>Rate of Cassation</i>	0	-	-
55/pDT.g/2021/ pn.kRG	Gugatan nasabah atas keberatan lelang eksekusi hak tanggungan yang akan dilakukan oleh PNM <i>Customer's lawsuit over objections to the auction of mortgage execution to be carried out by PNM</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>	500,000,000	-	-
37/PDT.G/2021/ PN.BYL	Gugatan nasabah atas keberatan lelang eksekusi hak tanggungan yang akan dilakukan oleh PNM <i>Customer's lawsuit over objections to the auction of mortgage execution to be carried out by PNM</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>	1,000,000,000	-	-
46/Pdt.g/2021/ pn.krg	Gugatan nasabah atas keberatan lelang eksekusi hak tanggungan yang akan dilakukan oleh PNM <i>Customer's lawsuit over objections to the auction of mortgage execution to be carried out by PNM</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>	0	-	-
0941/Pdt.G/2021/ PA.klt	Gugatan Wanprestasi terhadap Nasabah ULamm Syariah <i>Default Lawsuit against Sharia ULamm Customers</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>	0	-	-
53/Pdt.G/2019/ PN Gpr	Gugatan eks nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan <i>Ex-customer's lawsuit over objections to the execution of mortgage execution auction</i>	Tingkat Kasasi <i>Rate of Cassation</i>	0	-	-
55/Pdt.G/2019/ PN Njk	Gugatan nasabah atas dasar perbuatan melawan hukum dan klausula baku perjanjian kredit <i>Customer lawsuits on the basis of unlawful acts and standard clauses of credit agreements</i>	Tingkat Kasasi <i>Rate of Cassation</i>	100,000,000	-	-
90/Pdt.G/2020/ PN.Gpr.	Gugatan nasabah atas lelang eksekusi hak tanggungan <i>Customer's lawsuit against mortgage execution auction</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>	0	-	-
12/Pdt.G/2021/ PN KDR	Gugatan pihak ketiga atas objek jaminan yang dijaminan nasabah kepada PNM <i>Third party lawsuits against collateral objects guaranteed by customers to PNM</i>	Tingkat Banding <i>Appeal Rate</i>	0	-	-
37/PDT.G/2021/ PN.Blt	Gugatan pihak ketiga atas objek jaminan yang dijaminan nasabah kepada PNM <i>Third party lawsuits against collateral objects guaranteed by customers to PNM</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>	150,000,000	-	-

No Perkara Case Number	Dasar Gugatan Basis of Lawsuit	Status Penyelesaian Completion Status	Risiko dan Nominal Gugatan Risk and Lawsuit Amount	Sanksi yang Dikenakan Sanctions imposed	Pengaruhnya terhadap Kondisi Perusahaan The effect on the Condition of the Company
26/Pdt.G/2021/ PN Tlg	Gugatan nasabah atas lelang eksekusi hak tanggungan <i>Customer's lawsuit against mortgage execution auction</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>	0	-	-
311/PDT/2021/ PT SBY jo. 27/ Pdt.G/2020/ PN Tlg	Gugatan orangtua nasabah atas keberatan proses lelang yang akan dilakukan oleh PNM <i>Lawsuit from customer's parents over the objection to the auction process that will be carried out by PNM</i>	Tingkat Kasasi <i>Rate of Cassation</i>	200,000,000	-	-
34/Pdt.G/2021/ PN Njk	Gugatan Adik nasabah atas lelang eksekusi hak tanggungan <i>The customer's sister's lawsuit against the mortgage execution auction</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>	0	-	-
140/pdt.g/2021/ pn.blt	Gugatan nasabah atas lelang eksekusi hak tanggungan <i>Customer's lawsuit against mortgage execution auction</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>	0	-	-
73/pdt.g/2021/ pn jmr	Gugatan pihak ketiga atas objek jaminan yang dijaminakan nasabah kepada PNM <i>Third party lawsuits against collateral objects guaranteed by customers to PNM</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>	0	-	-
27/Pdt.Kas/2019/ PN Byw	Gugatan nasabah terhadap PNM untuk meminta pengurangan nilai angsuran dan keberatan terhadap lelang eksekusi hak tanggungan. <i>The customer's lawsuit against PNM to ask for a reduction in the installment value and an objection to the auction of mortgage execution</i>	Tingkat Kasasi <i>Rate of Cassation</i>	10,748,000,000	-	-
81/Pdt.G/2020/ PN.Byw	Gugatan nasabah atas lelang eksekusi hak tanggungan <i>Customer's lawsuit against mortgage execution auction</i>	Tingkat Kasasi <i>Rate of Cassation</i>	0	-	-
77/Pdt.G/2021/ PN Byw	Gugatan nasabah atas lelang eksekusi hak tanggungan <i>Customer's lawsuit against mortgage execution auction</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>	0	-	-
14/Pdt. Bth/2020/PN Jmr	Gugatan nasabah atas lelang eksekusi hak tanggungan <i>Customer's lawsuit against mortgage execution auction</i>	Tingkat Kasasi <i>Rate of Cassation</i>	0	-	-
337/PDT/2019/ PT SBY	Gugatan nasabah atas lelang eksekusi hak tanggungan <i>Customer's lawsuit against mortgage execution auction</i>	Tingkat Banding <i>Appeal Rate</i>	0	-	-
78/PDT/2021/ PT SBY	Gugatan nasabah atas lelang eksekusi hak tanggungan <i>Customer's lawsuit against mortgage execution auction</i>	Tingkat Banding <i>Appeal Rate</i>	0	-	-
50/Pdt.G/2021/ PN Krs	Gugatan nasabah atas lelang eksekusi hak tanggungan <i>Customer's lawsuit against mortgage execution auction</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>	0	-	-
22/Pdt.G/2020/ PN Lmg	Gugatan nasabah atas keberatan lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh PNM <i>Customer's lawsuit over objections to the auction of mortgage execution conducted by PNM</i>	Tingkat Banding <i>Appeal Rate</i>	0	-	-
1/Pdt.G/2020/ PN Bjn	Gugatan Pihak Ketiga atas objek agunan nasabah <i>Third Party lawsuits against customer's collateral objects</i>	Tingkat Kasasi <i>Rate of Cassation</i>	764,180,000	-	-

No Perkara Case Number	Dasar Gugatan Basis of Lawsuit	Status Penyelesaian Completion Status	Risiko dan Nominal Gugatan Risk and Lawsuit Amount	Sanksi yang Dikenakan Sanctions imposed	Pengaruhnya terhadap Kondisi Perusahaan The effect on the Condition of the Company
16/pdt.g/2021/ pn.lmg	Gugatan nasabah atas keberatan lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh PNM <i>Customer's lawsuit over objections to the auction of mortgage execution carried out by PNM</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>	0	-	-
5/PDT.G/2021/ PN.MAD	Gugatan nasabah atas keberatan lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh PNM <i>Customer's lawsuit over objections to the auction of mortgage execution carried out by PNM</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>	0	-	-
29/PDT.G/2021/ PN.PNG	Gugatan nasabah atas keberatan lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh PNM <i>Customer's lawsuit over objections to the auction of mortgage execution carried out by PNM</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>	1,000,000,000	-	-
6/Pdt.G/2020/ PN Dps	Gugatan nasabah atas rencana lelang eksekusi hak tanggungan <i>Customer's lawsuit against the auction plan for the execution of mortgage rights</i>	Tingkat Banding <i>Appeal Rate</i>	400,000,000	-	-
162/pdt.g/2021/ pn mtr	Gugatan nasabah atas rencana lelang eksekusi hak tanggungan <i>Customer's lawsuit against the auction plan for the execution of mortgage rights</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>	0	-	-
85/Pdt.G/2021/ PN.Sel	Gugatan nasabah atas rencana lelang eksekusi hak tanggungan <i>Customer's lawsuit against the auction plan for the execution of mortgage rights</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>		-	-
22/pDt.g/2020/ pn baubau	Gugatan Pihak Ketiga (ahli waris) atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah <i>Third Party lawsuits (heirs) for collateral used as collateral for Customer Financing</i>	Tingkat Banding <i>Appeal Rate</i>	0	-	-
22/Pdt.G/2018/ PN Pin	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh nasabah atas rencana pelaksanaan lelang yang diajukan oleh PNM <i>Lawsuits for Unlawful Acts filed by customers for the proposed auction implementation by PNM</i>	Tingkat Kasasi <i>Rate of Cassation</i>	5,000,000,000	-	-
1/Pdt.Bth/2020/ PN.Pin	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh orangtua nasabah atas rencana pelaksanaan lelang yang diajukan oleh PNM <i>Lawsuit for Unlawful Acts filed by the customer's parents for the planned auction proposed by PNM</i>	Tingkat Kasasi <i>Rate of Cassation</i>	0	-	-
No. 2/ PDT/2018// PT.MKS	Gugatan keberatan atas pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan <i>A lawsuit against the implementation of the mortgage execution auction</i>	Tingkat Kasasi <i>Rate of Cassation</i>	0	-	-
3.PK/ PDT.G/2019/ PN.PLP	Gugatan keberatan atas pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan <i>A lawsuit against the implementation of the mortgage execution auction</i>	Tingkat PK <i>PK Level</i>	0	-	-
4/pdt.g/2021/ pn.mks	Gugatan pihak orangtua nasabah atas objek jaminan yang dijaminan nasabah kepada PNM <i>Lawsuit from the customer's parents on the object of collateral guaranteed by the customer to PNM</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>	0	-	-
17/pdt.g/2021/ pn.mks	Gugatan keberatan atas pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan <i>A lawsuit against the implementation of the mortgage execution auction</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>	100	-	-

No Perkara Case Number	Dasar Gugatan Basis of Lawsuit	Status Penyelesaian Completion Status	Risiko dan Nominal Gugatan Risk and Lawsuit Amount	Sanksi yang Dikenakan Sanctions imposed	Pengaruhnya terhadap Kondisi Perusahaan The effect on the Condition of the Company
12/Pdt.G/2020/ PN Sdr	Gugatan nasabah atas rencana lelang eksekusi hak tanggungan <i>Customer's lawsuit against the auction plan for the execution of mortgage rights</i>	Tingkat Banding <i>Appeal Rate</i>	520,000,000	-	-
22/PDT/2018/ PT.KDI	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan pihak ke tiga (orangtua nasabah) dengan alasan bahwa nasabah telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan SHM yang dijamin kepada PNM <i>Unlawful Acts of Law filed by a third party (customer's parents) on the grounds that the customer has committed a criminal act of fraud and embezzlement of SHM pledged to PNM</i>	Tingkat Kasasi <i>Rate of Cassation</i>	2,000,000,000	-	-
No.3/ PDT.G/2020/ PN.MRS	Gugatan pihak ketiga (anak nasabah) atas objek jaminan nasabah yang dijamin di PNM <i>Lawsuits by third parties (customers' children) on objects of customer guarantees that are guaranteed at PNM</i>	Tingkat Kasasi <i>Rate of Cassation</i>	0	-	-
33/PDT.G/2019/ PN.SKG	Gugatan keberatan atas pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan <i>A lawsuit against the implementation of the mortgage execution auction</i>	Tingkat Banding <i>Appeal Rate</i>	0	-	-
2/Pdt.G.S/2021/ PN Rah	Gugatan keberatan atas pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan <i>A lawsuit against the implementation of the mortgage execution auction</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>	0	-	-
37/PDT.G/2021/ PA.DRH	Gugatan hak waris yang diajukan saudara kandung nasabah atas objek jaminan <i>Inheritance claims filed by the customer's sibling on the object of collateral</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>	0	-	-
19/pdt.g/2021/ pn rah	Gugatan Pemenang Lelang atas objek yang tidak sesuai ukurannya antara SHM dan fisik aslinya <i>Auction Winner's lawsuit over an object that does not match the size between SHM and its original physical</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>	65,000,000	-	-
21.PDT.G/2021/ PN.PIN	Gugatan pihak ketiga terhadap objek yang dijamin nasabah <i>Third party lawsuits against objects guaranteed by customers</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>	0	-	-
84/pdt.g/2021/ pn.pal	Gugatan keberatan atas pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan <i>A lawsuit against the implementation of the mortgage execution auction</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>	2,108,900,000	-	-
16/PDT.G/2021/ PN.Mar	Gugatan keberatan atas pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan <i>A lawsuit against the implementation of the mortgage execution auction</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>	301,357,960	-	-
215/pdt.g/2021/ pn ptk	Gugatan Perlawanan oleh nasabah atas lelang eksekusi hak tanggungan <i>Resistance lawsuit by customer over the mortgage execution auction</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>	350,000,000	-	-
79/PDT.G/2017/ PA.STG	Gugatan pihak ketiga (anak nasabah) atas objek jaminan yang dijamin nasabah kepada PNM <i>Lawsuits by third parties (customers' children) on objects of collateral guaranteed by customers to PNM</i>	Tingkat Kasasi <i>Rate of Cassation</i>	400,000,000	-	-

No Perkara Case Number	Dasar Gugatan Basis of Lawsuit	Status Penyelesaian Completion Status	Risiko dan Nominal Gugatan Risk and Lawsuit Amount	Sanksi yang Dikenakan Sanctions imposed	Pengaruhnya terhadap Kondisi Perusahaan The effect on the Condition of the Company
174/Pdt.G/2021/PN.Ptk.	Gugatan keberatan atas pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan <i>A lawsuit against the implementation of the mortgage execution auction</i>	Tingkat Pengadilan Negeri <i>State Court Level</i>	0	-	-
06/PDT.G/2018/PN.BLN	Gugatan eks nasabah atas penjualan jaminan secara sukarela <i>Ex-customer's lawsuit for voluntary sale of collateral</i>	Tingkat PK <i>PK Level</i>	1,500,000,000	-	-

Perkara Hukum yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang Sedang Menjabat

Selama tahun 2021, tidak terdapat perkara hukum yang sedang dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat.

Legal Things are Facing the Board of Commissioners and Board of Directors Who are in Service

During 2021, there are no legal cases being faced by the Board of Commissioners and the current Board of Directors.

Perkara Hukum yang Sedang Dihadapi Anak Perusahaan

Legal Things Which Subsidiaries are Facing

No	Pokok Perkara/ Gugatan Main Case/Lawsuit	Status Penyelesaian Completion Status	Risiko dan Nominal Gugatan Risk and Lawsuit Amount	Sanksi yang Dikenakan Sanctions Imposed	Pengaruhnya terhadap Kondisi Perusahaan The effect on the Condition of the Company
1	PMH (Debitur an Didin Haerudin) <i>PMH (Debitur an Didin Haerudin)</i>	- Putusan " Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya" - Tidak ada upaya hukum dari penggugat/debitur <i>- Decision "Rejecting the plaintiff's claim in its entirety"</i> <i>- There was no legal action from the plaintiff/ debtor</i>	-	-	-
2	PMH (Debitur an Purwanto) <i>PMH (Debitur an Purwanto)</i>	Berdasarkan Penetapan Nomor: 14/TMS/Pen. Pdt/KPN/2021/PN.Sby. Jo. No. 47/Pdt.G/2020/PN.Sby. Jo. Nomor: 224/Pdt/2021/PT.Sby. Jo.; Ditetapkan bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Purwanto) tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal (TMS) yaitu tidak mengajukan Memori Kasasi dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang <i>Based on Stipulation Number: 14/TMS/Pen.Pdt/KPN/2021/PN.Sby. Jo. No. 47/Pdt.G/2020/PN.Sby. Jo. Number: 224/Pdt/2021/PT.Sby. Jo.; It was determined that the cassation request from the Cassation Petitioner (Purwanto) could not be accepted because it did not meet the formal requirements (TMS), namely not submitting a Memorandum of Cassation within the time limit determined by law.</i>	-	-	-
3	Pailit pada Debitur an PT Mugi- Mugi Jaya (dalam Pailit) <i>Bankruptcy to the Debtor of PT Mugi- Mugi Jaya (in Bankruptcy)</i>	Putusan pailit no. 378/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst, tgl. 28 Januari 2021 <i>Bankruptcy decision no. 378/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst, date. January 28, 2021</i>	Total tagihan piutang PNMVC Rp. 15.823.725.705,- <i>The total receivables of PNMVC</i> Rp. 15,823,725,705,-	-	-
4	Pailit pada Debitur an PT Taras (dalam Pailit) <i>Bankruptcy to the Debtor of PT Taras (in Bankruptcy)</i>	Putusan pailit no. 35/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst, tgl. 07 Juli 2020 <i>Bankruptcy decision no. 35/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst, date. July 07, 2020</i>	Total tagihan piutang PNMVC Rp. 19.158.844.334 <i>The total receivables of PNMVC</i> Rp. 19,158,844,334	-	-

No	Pokok Perkara/ Gugatan <i>Main Case/Lawsuit</i>	Status Penyelesaian <i>Completion Status</i>	Risiko dan Nominal Gugatan <i>Risk and Lawsuit Amount</i>	Sanksi yang Dikenakan <i>Sanctions Imposed</i>	Pengaruhnya terhadap Kondisi Perusahaan <i>The effect on the Condition of the Company</i>
5	Pailit pada Debitur PT Gemilang Arif Bersaudara (dalam Pailit) <i>Bankruptcy to Debitur PT Gemilang Arif Bersaudara (in Bankruptcy)</i>	Putusan pailit no. 133/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Jkt.Pst, tgl 21 Februari 2018 <i>Bankruptcy decision no. 133/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Jkt.Pst, February 21, 2018</i>	Total tagihan piutang PNMVC Rp. 9.821.038.440,- <i>The total receivables of PNMVC Rp. 9,821,038,440,-</i>	-	-

Sanksi Administratif yang Dikenakan Kepada Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi oleh Otoritas Pasar Modal dan Otoritas Lainnya

Selama tahun 2021, tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada Perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi oleh otoritas pasar modal dan otoritas lainnya.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Dengan berlandaskan prinsip transparansi, Perseroan berkomitmen untuk senantiasa menyediakan akses informasi seluas-luasnya kepada para pemegang saham dan pemegang kepentingan lainnya melalui situs resmi maupun laporan-laporan yang diterbitkan secara berkala, baik Laporan Auditor Independen, Laporan Tahunan, Siaran Pers, maupun laporan dari media komunikasi lainnya.

Informasi dan data Perseroan dapat diakses melalui situs resmi PNM di www.pnm.co.id dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Perseroan juga menyediakan akses informasi bagi pihak internal melalui Portal Internal PNM yang dapat diakses melalui jaringan komputer internal Perseroan. Bagi masyarakat luas, akses informasi juga dapat dijangkau melalui akun media sosial resmi PNM, seperti:

1. Instagram PNM (@pnm_persero)
2. Facebook PNM (PT Permodalan Nasional Madani (Persero))
3. Twitter PNM (@PNM_Persero)
4. YouTube PNM (PNM Persero)

Perseroan juga menerima pertanyaan, kritik, saran, maupun permintaan informasi secara tertulis yang dapat dikirimkan ke kantor pusat, ditujukan kepada Sekretaris Perusahaan melalui alamat berikut:

Lalu Dodot Patria Ary Suprianto

Sekretaris Perusahaan

Menara PNM

JL Kuningan Mulia No. 9F RT 004 RW 010,
Kuningan Center Lot 1 (Kav 1), Kel. Karet,
Kec. Setia Budi - Jakarta Selatan 12920

Telepon : (021) 2511404 (hunting)

Faksimile : (021) 2511405, 251155

Surel : info@pnm.co.id

Administrative Sanctions Imposed to Companies Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors by Capital Market Authorities and Other Authorities

During 2021, there were no administrative sanctions imposed on the Company, members of the Board of Commissioners and Directors by the capital market authorities and other authorities.

Access to Information and Company Data

Pursuant to the principles of transparency, the Company's information is accessible to the shareholders and stakeholders through official websites or periodical reports, in the form of Independent Audit Report, Press Release, and other communication media.

Access to the Company's information is available through the official website of PNM at www.pnm.co.id, in Indonesian and English. The Company also provides access to information for internal parties through PNM's Internal Portal which can be accessed through the Company's internal computer network. The public may access information through PNM's official social media accounts:

1. Instagram PNM (@pnm_persero)
2. Facebook PNM (PT Permodalan Nasional Madani (Persero))
3. Twitter PNM (@PNM_Persero)
4. YouTube PNM (PNM Persero)

The Company also receives written inquiries, critics, suggestions, and requests for information. These inquiries can be addressed to the Corporate Secretary at the head office:

Lalu Dodot Patria Ary Suprianto

Corporate Secretary

Menara PNM

JL Kuningan Mulia No. 9F RT 004 RW 010,
Kuningan Center Lot 1 (Kav 1), Kel. Karet,
Kec. Setia Budi - Jakarta Selatan 12920

Phone : (021) 2511404 (hunting)

Faximile: (021) 2511405, 251155

Surel: info@pnm.co.id

Siaran Pers

Press Conference

No	Tanggal Date	Judul Siaran Pers Press Release Title
1	7 Januari 2021 January 7, 2021	PNM Surabaya Resmikan Program Ruang Pintar Di Area Mekaar Kabupaten Bangkalan <i>PNM Surabaya Inaugurates Smart Space Program in Mekaar Area, Bangkalan Regency</i>
2	16 Januari 2021 January 16, 2021	Gerobak Mekaar untuk Mbah Imah <i>Mekaar Cart for Mbah Imah</i>
3	16 Januari 2021 January 16, 2021	Erick Tohir Saksikan Penyerahan Bantuan Kepada Nasabah Difabel PNM Mekaar <i>Erick Tohir Witness the Delivery of Aid to PNM Mekaar's Disabled Customers</i>
4	16 Januari 2021 January 16, 2021	PNM Luncurkan Aplikasi Mekaar Digi dan PNM Digi Nasabah <i>PNM Launches Mekaar Digi Application and PNM Digi Customers</i>
5	25 Januari 2021 January 25, 2021	PNM Salurkan Bantuan untuk Korban Gempa Mamju dan Majene <i>PNM Distributes Aid for Mamju and Majene Earthquake Victims</i>
6	2 Februari 2021 February 2, 2021	Manajemen Susu Sapi Berkualitas Produksi Lokal <i>Management of Quality Locally Produced Cow's Milk</i>
7	9 Februari 2021 February 9, 2021	Pencatatan Keuangan Sederhana untuk UMKM <i>Simple Financial Recording for MSMEs</i>
8	16 Februari 2021 February 16, 2021	Sembako untuk Korban Banjir Jombang <i>Basic Food for Jombang Flood Victims</i>
9	17 Februari 2021 February 17, 2021	PNM Salurkan Bantuan Rp 50 Juta untuk Korban Banjir Pekalongan <i>PNM Distributes IDR 50 Million Aid for Pekalongan Flood Victims</i>
10	19 Februari 2021 February 19, 2021	Peningkatan Nilai Ekonomis Kopi Dairi <i>Increasing the Economic Value of Dairi Kopi Coffee</i>
11	25 Februari 2021 February 25, 2021	Ruang Pintar untuk Anak Desa Tirowali <i>Smart Room for Tirowali Village Children</i>
12	3 Maret 2021 March 3, 2021	Kisah Inspiratif, Perjuangan Single Mom Menafkahi Keluarganya <i>Inspirational Story, Single Mom's Struggle to Support Her Family</i>
13	4 Maret 2021 March 4, 2021	Kisah Inspiratif Ibu Rohan Pinkan, Berjuang Tanpa Henti Demi Keluarga <i>The Inspirational Story of Rohan Pinkan's Mother, Fighting Endlessly for the Family</i>
14	8 Maret 2021 March 8, 2021	Perkuat Sinergi, Wakil Gubernur Sumatera Utara Kunjungi PNM <i>Strengthening Synergy, Deputy Governor of North Sumatra Visits PNM</i>
15	10 Maret 2021 March 10, 2021	Pelatihan Tatap Muka Persiapan Nasabah PNM Mekaar Perdana di Ambon <i>Face-to-face Training for PNM Mekaar Perdana Customer Preparation in Ambon</i>
16	12 Maret 2021 March 12, 2021	Ruang Pintar "Lumbung Ilmu" Cirebon <i>Smart Room "Barn Ilmu" Cirebon</i>
17	15 Maret 2021 March 15, 2021	Gubernur Riau Apresiasi Kehadiran PNM <i>Riau Governor Appreciates PNM's Presence</i>
18	22 Maret 2021 March 22, 2021	Perusahaan Pasangan Usaha PNM Terima Sertifikasi Manajemen Mutu dan Anti Penyuapan dari Sucofindo <i>PNM Business Partner Company Receives Quality Management and Anti-Bribery Certification from Sucofindo</i>
19	25 Maret 2021 March 25, 2021	Kisah Istri Tangguh yang Menjadi Tulang Punggung Keluarga saat Suami Sakit <i>The story of a tough wife who becomes the backbone of the family when her husband is sick</i>
20	25 Maret 2021 March 25, 2021	PNM Salurkan Kredit Ultra Mikro di Kendal <i>PNM Distributes Ultra Micro Credit in Kendal</i>
21	26 Maret 2021 March 26, 2021	PNM Salurkan Kredit Ultra Mikro (UMi) di Demak <i>PNM Distributes Ultra Micro Credit (UMi) in Demak</i>
22	31 Maret 2021 March 31, 2021	PNM Bentuk Tiga Klaster Pangan di Sumatera Barat <i>PNM Forms Three Food Clusters in West Sumatra</i>
23	5 April 2021 April 5, 2021	Banting Setir Bisnis di Tengah Pandemi: dari Batu jadi Tahu <i>Turning Business in the Midst of a Pandemic: From Stone to Tofu</i>
24	8 April 2021 April 8, 2021	PNM Meresmikan Gedung Baru Cabang Jakarta <i>PNM Inaugurate New Jakarta Branch Building</i>
25	9 April 2021 April 9, 2021	PNM Meresmikan Sarana Belajar 'Ruang Pintar Ar Aminah' di Dolok Maraja <i>PNM Inaugurates the 'Ar Aminah Smart Room' Learning Facility in Dolok Maraja</i>
26	9 April 2021 April 9, 2021	Karyawan PNM Lakukan Vaksinasi di Sentra Vaksinasi Bersama BUMN di Jakarta <i>PNM Employees Vaccinate at the Joint Vaccination Center of BUMN in Jakarta</i>

No	Tanggal Date	Judul Siaran Pers Press Release Title
27	10 April 2021 April 10, 2021	PT PNM (Persero) Raih Dua Penghargaan dalam Anugerah BUMN 2021 Tahun ke-10 <i>PT PNM (Persero) Wins Two Awards in the 10th Year 2021 BUMN Award</i>
28	13 April 2021 April 13, 2021	PNM Resmikan Ruang Pintar di Malang <i>PNM Inaugurates Smart Room in Malang</i>
29	13 April 2021 April 13, 2021	PNM Cabang Palopo Bagikan Gerobak Mekaar <i>PNM Palopo Branch Distributes Mekaar Cart</i>
30	19 April 2021 April 19, 2021	PNM Salurkan Bantuan Sembako untuk Korban Banjir NTB dan NTT <i>PNM Distributes Basic Food Assistance for NTB and NTT Flood Victims</i>
31	20 April 2021 April 20, 2021	Tiga Anak Usaha PNM VC Terima Sertifikasi Anti Suap <i>Three PNM VC Subsidiaries Receive Anti-Bribery Certification</i>
32	24 April 2021 April 24, 2021	Kartini di Era Digital <i>Kartini in the Digital Age</i>
33	27 April 2021 April 27, 2021	Fasilitas Penunjang Belajar Daring dari PNM <i>Online Learning Support Facilities from PNM</i>
34	28 April 2021 April 28, 2021	Jajan Keripik Sehat, Solusi Jajan Sehat <i>Healthy Snack Chips, Healthy Snack Solution</i>
35	30 April 2021 April 30, 2021	Dua Anak Usaha PNM VC Terima Sertifikasi Anti Suap dan Manajemen Mutu <i>Two PNM VC Subsidiaries Receive Anti-Bribery and Quality Management Certification</i>
36	1 Mei 2021 May 1, 2021	Erick Thohir Kunjungi Nasabah Difabel PNM Mekaar di Semarang <i>Erick Thohir Visits Mekaar PNM Customers with Disabilities in Semarang</i>
37	5 Mei 2021 May 5, 2021	Penandatanganan Kerja Sama di Bidang Hukum antara PNM Cabang Sukabumi dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi <i>The signing of the Cooperation in the Legal Sector between the Sukabumi Branch of PNM and the Sukabumi District Attorney</i>
38	6 Mei 2021 May 6, 2021	Sosok Wanita Pengrajin Parang <i>The Figure of a Parang Craft Woman</i>
39	7 Mei 2021 May 7, 2021	Kisah Penyintas KDRT Bangkit Dari Keterpurukan <i>Stories of Domestic Violence Survivors Rise From Adversity</i>
40	11 Mei 2021 May 11, 2021	Berbagi Berkah Ramadhan ala PNM <i>Sharing the Blessings of Ramadan ala PNM</i>
41	21 Mei 2021 May 21, 2021	Semangat Sekolahkan Anak, Ibu Ini Tambah Usaha <i>The Spirit of Schooling Children, This Mother Adds Business</i>
42	25 Mei 2021 May 25, 2021	Pengusaha Pia Asal Jember Bawa Misi Kurangi Angka Pengangguran <i>Entrepreneur Pia from Jember Brings Mission to Reduce Unemployment</i>
43	25 Mei 2021 May 25, 2021	Audiensi Profil PNM Tahun 2021 di Solo <i>2021 PNM Profile Audience in Solo</i>
44	28 Mei 2021 May 28, 2021	Kisah Perjuangan Orangtua Tunggal di Tengah Kerasnya Hidup <i>The Story of a Single Parent's Struggle in the Middle of Hard Life</i>
45	28 Mei 2021 May 28, 2021	Ini Nama-nama Baru di Jajaran Direksi PNM <i>These are the New Names on the PNM Board of Directors</i>
46	7 Juni 2021 June 7, 2021	PNM dan SMF Luncurkan Home <i>PNM and SMF Launch Home</i>
47	16 Juni 2021 June 16, 2021	Usaha Bubble Tea, Bisnis Minuman yang Menjanjikan <i>Bubble Tea Business, Promising Beverage Business</i>
48	18 Juni 2021 June 18, 2021	Rayakan HUT ke 22, PNM Salurkan Sembako di Bali <i>Celebrate 22nd Anniversary, PNM Distributes Basic Food in Bali</i>
49	21 Juni 2021 June 21, 2021	Erick Thohir Kunjungi Nasabah PNM di Lampung <i>Erick Thohir Visits PNM Customers in Lampung</i>
50	25 Juni 2021 June 25, 2021	PNM Peduli Bencana Gempa Tehoru Maluku Tengah <i>PNM Cares for the Central Maluku Tehoru Earthquake Disaster</i>
51	28 Juni 2021 June 28, 2021	Kisah Sukses Hartini, Pengusaha Batik yang Terinspirasi dari Sang Ayah <i>The Success Story of Hartini, a Batik Entrepreneur Who Was Inspired by His Father</i>
52	2 Juli 2021 July 2, 2021	Audiensi Profil PNM Tahun 2021 di Solo <i>2021 PNM Profile Audience in Solo</i>

No	Tanggal Date	Judul Siaran Pers Press Release Title
53	6 Juli 2021 July 6, 2021	Manisnya Es Krim Membawa Kesejahteraan Untuk Ibu Susilawati <i>The Sweetness of Ice Cream Brings Prosperity to Mrs. Susilawati</i>
54	9 Juli 2021 July 9, 2021	Semangat Ibu Carinih, Pengusaha Difabel yang Sukses <i>The Spirit of Ibu Carinih, a Successful Entrepreneur with Disabilities</i>
55	12 Juli 2021 July 12, 2021	PNM Padang Laksanakan Vaksinasi COVID-19 <i>PNM Padang Implements COVID-19 Vaccination</i>
56	15 Juli 2021 July, 15 2021	Semester 1 2021, PNM Salurkan Pembiayaan Rp 22,8 Triliun untuk UMKM <i>Semester 1 2021, PNM Distributes Rp 22.8 Trillion in Financing for MSMEs</i>
57	16 Juli 2021 July, 16, 2021	Ringankan Beban, Presiden Jokowi Serahkan Paket Obat Isoman kepada Nasabah PNM Mekaar <i>Lighten Burden, President Jokowi Hands Isoman Drug Packages to Mekaar PNM Customers</i>
58	15 Juli 2021 July 15, 2021	PNM Lakukan Sosialisasi QRIS dan Platform Digital untuk UMKM <i>PNM Conducts QRIS and Digital Platform Socialization for MSMEs</i>
59	21 Juli 2021 July 21, 2021	Berkolaborasi dengan PNM, KPPPA Luncurkan Program Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan <i>Collaborating with PNM, KPPPA Launches Women's Empowerment Socialization Program</i>
60	22 Juli 2021 July 22, 2021	PNM Peduli Gempa Tehoru <i>PNM Cares for the Tehoru Earthquake</i>
61	27 Juli 2021 July 27, 2021	Ruang Pintar untuk Anak Nasabah PNM Mekaar di Tegal <i>Smart Room for Children of PNM Mekaar Customers in Tegal</i>
62	2 Agustus 2021 August 2, 2021	PNM Tunjuk Dodot Patria Ary Jadi Sekretaris Perusahaan <i>PNM Appoints Dodot Patria Ary as Corporate Secretary</i>
63	3 Agustus 2021 August 3, 2021	Kopi Kayumas, Dari Desa Untuk Dunia <i>Kayumas Coffee, From the Village to the World</i>
64	4 Agustus 2021 August 4, 2021	Erick Thohir Serahkan Bantuan Tanggung Jawab Sosial PNM <i>Erick Thohir Gives PNM Social Responsibility Assistance</i>
65	6 Agustus 2021 August 6, 2021	PNM Raih Dua Penghargaan GRC & Performance Excellence Award 2021 <i>PNM Wins Two GRC Awards & Performance Excellence Award 2021</i>
66	12 Agustus 2021 August 12, 2021	PNM Serahkan Bantuan Sembako di Pernalang <i>PNM Delivers Basic Food Aid in Pernalang</i>
67	13 Agustus 2021 August 13, 2021	Kisah Perempuan Penjual Rujak Madura <i>The Story of a Woman Selling Rujak Madura</i>
68	13 Agustus 2021 August 13, 2021	Ruang Pintar PNM Cerdas <i>Smart PNM Smart Room</i>
69	15 Agustus 2021 August 15, 2021	Menteri BUMN dan Dirut PNM Dorong Pelatihan UMKM untuk Go Digital <i>Minister of BUMN and President Director of PNM Encourage MSME Training to Go Digital</i>
70	19 Agustus 2021 August 19, 2021	PNM Serahkan Bantuan Sosial di Tegal <i>PNM Gives Social Aid in Tegal</i>
71	20 Agustus 2021 August 20, 2021	Kegigihan Pelaku Usaha Jamur Antarkan Putranya Kuliah <i>The Persistence of Mushroom Business Actors Brings Their Sons to College</i>
72	23 Agustus 2021 August 23, 2021	Kunjungan Staff Khusus BUMN dan Wakil Bupati Karo ke Kantor PNM Mekaar Kabanjahe <i>Special Staff for BUMN and Deputy Regent of Karo visit the PNM Mekaar Kabanjahe Office</i>
73	23 Agustus 2021 August 23, 2021	Kunjungan Dua Menteri ke Pelatihan Nasabah PNM Mekaar Cepu <i>Two Ministers Visit to PNM Mekaar Cepu Customer Training</i>
74	24 Agustus 2021 August 24, 2021	Penjual Tahu Jadi Juragan Tahu <i>Tofu Seller Becomes Tofu Boss</i>
75	29 Agustus 2021 August 29, 2021	Ruang Pintar "Beladega" untuk Anak Desa Gari <i>"Beladega" Smart Room for Gari Village Children</i>
76	29 Agustus 2021 August 29, 2021	Erick Thohir Kunjungi Nasabah PNM di Cirebon <i>Erick Thohir Visits PNM Customers in Cirebon</i>
77	2 September 2021 September 2, 2021	Kunjungan Staff Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga ke PNM Mekaar Medan <i>Special Staff of the Minister of SOEs Arya Sinulingga visits PNM Mekaar Medan</i>
78	2 September 2021 September 2, 2021	Sandiaga Uno Kunjungi Nasabah dan Karyawan PNM Banjarmasin <i>Sandiaga Uno Visits Banjarmasin PNM Customers and Employees</i>
79	3 September 2021 September 3, 2021	PNM dan SMF Berkolaborasi Dukung Program Pembiayaan Mikro Perumahan <i>PNM and SMF Collaborate to Support Housing Microfinance Program</i>

No	Tanggal Date	Judul Siaran Pers Press Release Title
80	9 September 2021 September 9, 2021	Sandiaga Uno Kembali Menyapa PNM Cirebon <i>Sandiaga Uno Returns to Greet PNM Cirebon</i>
81	9 September 2021 September 9, 2021	PNM Fokus Bangkitkan Ekonomi Indonesia di Tengah Pandemi <i>PNM Focuses on Reviving Indonesia's Economy Amid the Pandemic</i>
82	9 September 2021 September 9, 2021	Ruang Pintar "Permata Madani" Desa Kalikuning, Pacitan <i>Smart Room "Gem Madani" Kalikuning Village, Pacitan</i>
83	9 September 2021 September 9, 2021	Ruang Pintar "Pelangi Mekaar" Desa Mengger <i>Mengger Village's "Rainbow Blooms" Smart Room</i>
84	10 September 2021 September 10, 2021	Staff Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga Menyapa Insan PNM dan Nasabah PNM Mekaar Lampung <i>Special Staff of the Minister of SOEs Arya Sinulingga Greet PNM Personnel and PNM Mekaar Lampung Customers</i>
85	10 September 2021 September 10, 2021	Kunjungan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ke Kantor Cabang PNM Jawa Barat <i>Visit of the Minister of Tourism and Creative Economy to the West Java PNM Branch Office</i>
86	10 September 2021 September 10, 2021	Batok Kelapa Bali, Kontribusi untuk Menjaga Bumi <i>Bali Coconut Shell, Contribution to Protecting the Earth</i>
87	17 September 2021 September 17, 2021	Kunjungan Staf Khusus Menteri BUMN ke Kantor Cabang PNM Pangkalpinang <i>The visit of the State-Owned Enterprises Minister's Special Staff to the PNM Pangkalpinang Branch Office</i>
88	21 September 2021 September 21, 2021	Dukung Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, PNM Berikan Bantuan Sosial di Dusun Kuri Cadd <i>Supporting Coastal Community Empowerment, PNM Provides Social Assistance in Kuri Cadd Hamlet</i>
89	23 September 2021 September 23, 2021	Kunjungan ke PNM Cabang Rawamerta, Arya Sinulingga Ajak AO Manfaatkan Media Sosial Untuk Promosi PNM Mekaar <i>Visit to PNM Rawamerta Branch, Arya Sinulingga Invites AO to Use Social Media for PNM Mekaar Promotion</i>
90	23 September 2021 September 23, 2021	Cerita Pengrajin Kain Tapis <i>The Story of Tapis Fabric Craftsmen</i>
91	24 September 2021 September 24, 2021	Deputi Jasa Keuangan Kementerian BUMN Ajak Nasabah PNM Purwakarta Go Digital <i>Deputy for Financial Services at the Ministry of SOEs Invites PNM Purwakarta Customers to Go Digital</i>
92	25 September 2021 September 25, 2021	Menteri Parekraf Sandiaga Uno Kunjungi PNM Bali <i>Minister of Tourism and Creative Economy Sandiaga Uno Visits PNM Bali</i>
93	29 September 2021 September 29, 2021	Askrindo Syariah Perkuat Kerjasama dengan PNM, Dukung Pertumbuhan UMKM <i>Askrindo Syariah Strengthens Cooperation with PNM, Supports MSME Growth</i>
94	29 September 2021 September 29, 2021	Kekuatan Solidaritas Ibu Yuli yang Menyelamatkan UMKM Pamenang Barat <i>The Power of Mrs. Yuli's Solidarity to Save West Pamenang SMEs</i>
95	1 Oktober 2021 October 1, 2021	PNM Resmikan Pondok Pesantren 'Saung PNM' di Bantar Gebang <i>PNM Inaugurates the 'Saung PNM' Islamic Boarding School in Bantar Gebang</i>
96	4 Oktober 2021 October 4, 2021	Dukung Pemberdayaan Perempuan Lombok, PNM Berikan Bantuan Sosial di Desa Adat Sade <i>Supporting Lombok Women Empowerment, PNM Provides Social Assistance in Sade Traditional Village</i>
97	4 Oktober 2021 October 4, 2021	Sinergi HOME SMF dengan PNM Membawa Dampak Positif Bagi Kemajuan UMKM Indonesia <i>HOME SMF Synergy with PNM Brings Positive Impact for the Progress of Indonesian MSMEs</i>
98	11 Oktober 2021 October 11, 2021	Arya Sinulingga Bersama PNM, Dorong Pemberdayaan Perempuan di Sumatera Barat <i>Arya Sinulingga Together with PNM, Encourage Women's Empowerment in West Sumatra</i>
99	11 Oktober 2021 October 11, 2021	Gurih Kerupuk, Untung Bertumpuk <i>Savory Crackers, Good Luck</i>
100	13 Oktober 2021 October 13, 2021	Potensi Nanas Madu Desa Beluk <i>The Potential of Honey Pineapple in Beluk Village</i>
101	14 Oktober 2021 October 14, 2021	Perluasan Pasar Pengrajin Konveksi Desa Kreyo <i>The Expansion of the Kreyo Village Convection Craftsmen Market</i>
102	14 Oktober 2021 October 14, 2021	Fasilitas Penunjang Belajar 'Suluh Wijaya Mekaar' <i>Learning Support Facilities 'Suluh Wijaya Mekaar'</i>
103	14 Oktober 2021 October 14, 2021	Meningkatkan Nilai Ekonomis Kopi Sidikalang <i>Increasing the Economic Value of Sidikalang Coffee</i>
104	15 Oktober 2021 October 15, 2021	Sinergi BUMN Mewujudkan UMKM Profesional dan Berdaya Saing Tinggi <i>SOE Synergy to Realize Professional and Highly Competitive MSMEs</i>
105	18 Oktober 2021 October 18, 2021	Pelatihan Validasi Produk Usaha Nasabah Mekaar <i>Mekaar Customer Business Product Validation Training</i>
106	19 Oktober 2021 October 19, 2021	Kunjungan Wakil Menteri BUMN II ke Co-Location Holding BUMN UMi Bogor <i>The visit of the Deputy Minister of BUMN II to the Co-Location Holding BUMN UMi Bogor</i>

No	Tanggal Date	Judul Siaran Pers Press Release Title
107	19 Oktober 2021 October 19, 2021	Belajar Asik di Ruang Pintar 'Lerang Liris' <i>Fun Learning in the Smart Room 'Lerang Liris'</i>
108	19 Oktober 2021 October 19, 2021	Pemeliharaan Ternak Sapi Perah <i>Dairy Cattle Breeding</i>
109	20 Oktober 2021 October 20, 2021	Pembukaan Capacity Building PNM bagi Penerima Redistribusi Tanah Kementerian ATRBPN RI di Warungkiara <i>Opening of PNM Capacity Building for Recipients of Land Redistribution of the Ministry of ATRBPN RI in Warungkiara</i>
110	21 Oktober 2021 October 21, 2021	PNM Resmikan Program Pelatihan UMKM Klasterisasi Teritorial di Subang <i>PNM Inaugurates Territorial Clustering MSME Training Program in Subang</i>
111	21 Oktober 2021 October 21, 2021	Husnul Khotimah, Menjaga Lingkungan Sekaligus Menghidupkan UMKM <i>Husnul Khotimah, Protecting the Environment and Turning on MSMEs</i>
112	22 Oktober 2021 October 22, 2021	Temu Usaha Nasabah Mekaar (TUNM) PNM di Lowowaru Malang <i>Mekaar Customer Business Meeting (TUNM) PNM in Lowowaru Malang</i>
113	22 Oktober 2021 October 22, 2021	PNM Venture Capital Tetapkan Susunan Direksi Baru <i>PNM Venture Capital Sets New Board of Directors</i>
114	26 Oktober 2021 October 26, 2021	Sinergi PT PNM dengan PT Petromkimia Gresik (Persero) dalam Pembukaan Klasterisasi Sektor Pertanian di Madiun <i>Synergy of PT PNM with PT Petromkimia Gresik (Persero) in the Opening of Agricultural Sector Clusterization in Madiun</i>
115	26 Oktober 2021 October 26, 2021	Cerita Inspiratif UMKM Asal Bojonegoro Sukses Ekspor Produk Lokal <i>Inspirational Stories of SMEs from Bojonegoro Successfully Exporting Local Products</i>
116	26 Oktober 2021 October 26, 2021	PNM Resmikan Sarana Belajar Ruang Pintar di Pekanbaru <i>PNM Inaugurates Smart Room Learning Facility in Pekanbaru</i>
117	26 Oktober 2021 October 26, 2021	PNM Resmikan Program Pelatihan UMKM Klasterisasi Sektoral di Indramayu <i>PNM Inaugurates Sectoral Clustering MSME Training Program in Indramayu</i>
118	26 Oktober 2021 October 26, 2021	Ruang Pintar 'Al-Munis' Muang Ilir <i>Smart Room 'Al-Munis' Muang Ilir</i>
119	27 Oktober 2021 October 27, 2021	PNM Cabang Palu Teken Nota Kesepahaman dengan Kejati Sulawesi Tengah <i>PNM Palu Branch Signs Memorandum of Understanding with Central Sulawesi Prosecutor's Office</i>
120	28 Oktober 2021 October 28, 2021	Ruang Pintar Pande Bintang Hulu Sidikalang <i>Pande Bintang Hulu Sidikalang Smart Room</i>
121	29 Oktober 2021 October 29, 2021	Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Pemprov Riau Tandatangani MoU dengan PNM <i>Improving Community Welfare, Riau Provincial Government Signs MoU with PNM</i>
122	1 November 2021 November 1, 2021	Presiden Jokowi: G20 Harus Dorong Penguatan Peran UMKM dan Perempuan Melalui Aksi Nyata <i>President Jokowi: G20 Must Encourage Strengthening the Role of MSMEs and Women Through Real Action</i>
123	1 November 2021 November 1, 2021	PNM Resmikan Ruang Pintar di Desa Blondo Magelang <i>PNM Inaugurates Smart Room in Blondo Village, Magelang</i>
124	3 November 2021 November 3, 2021	Dupa Herbal yang Ramah Lingkungan <i>Environmentally Friendly Herbal Incense</i>
125	3 November 2021 November 3, 2021	PNM Menanggalkan Status Perseroan <i>PNM Releases Company Status</i>
126	5 November 2021 November 5, 2021	Usaha Kain Tenun Bantu Ibu Pedalaman Sekolahkan Cucu <i>Woven Fabric Business Helps Mothers in the Interior to Educate Grandchildren</i>
127	8 November 2021 November 5, 2021	PNM Gelar Pelatihan Capacity Building di Padang <i>PNM Holds Capacity Building Training in Padang</i>
128	8 November 2021 November 5, 2021	PNM Peduli Berikan Bantuan Korban Bencana Letusan Gunung Semeru <i>PNM Peduli Provides Aid for Victims of the Mount Semeru Eruption</i>
129	10 November 2021 November 10, 2021	PNM Resmikan Program Pelatihan UMKM Go Digital di Mojokerto <i>PNM Inaugurates the Go Digital MSME Training Program in Mojokerto</i>
130	11 November 2021 November 11, 2021	Edukasi Pupuk Bagi Petani Palawijo di Jetis, Ponorogo <i>Fertilizer Education for Palawijo Farmers in Jetis, Ponorogo</i>
131	11 November 2021 November 11, 2021	PNM Pematang Siantar Lakukan Pembukaan Klasterisasi Olahan Makanan Ringan <i>PNM Pematang Siantar Opens Clustering of Processed Snacks</i>
132	16 November 2021 November 16, 2021	PNM Berikan Pelatihan Menjahit dan Memasak untuk UMKM Padang <i>PNM Provides Sewing and Cooking Training for Padang SMEs</i>
133	16 November 2021 November 16, 2021	Geliat Pengrajin Ronce Melati di Imogiri <i>Craftsman Ronce Jasmine in Imogiri</i>

No	Tanggal Date	Judul Siaran Pers Press Release Title
134	17 November 2021 November 17, 2021	Dampingi UMKM Pacitan, PNM Berikan Pelatihan Klusterisasi Sektoral Pengolahan Hasil Bumi <i>Accompanying Pacitan SMEs, PNM Provides Sectoral Clustering Training for Agricultural Product Processing</i>
135	18 November 2021 November 18, 2021	Peresmian Ruang Pintar PNM Pematang Siantar <i>Inauguration of Smart Room PNM Pematang Siantar</i>
136	19 November 2021 November 19, 2021	Ramaikan World Super Bike (WSBK) di Mandalika, PNM Hadirkan UMKM Binaan <i>Enliven World Super Bike (WSBK) in Mandalika, PNM Presents Assisted MSMEs</i>
137	19 November 2021 November 19, 2021	PNM Lampung Gelar Klusterisasi Pelatihan Pendampingan Nasabah Tahap 3 <i>PNM Lampung Holds Phase 3 Customer Assistance Training Clusterization</i>
138	22 November 2021 November 22, 2021	Pembuatan Izin Usaha untuk Pelaku Usaha Kecil di Ponorogo <i>Making Business Permits for Small Business Actors in Ponorogo</i>
139	22 November 2021 November 22, 2021	PNM Ambon Dampingi Ibu Nasabah Buat Legalitas Usaha <i>PNM Ambon Accompanies the Customer's Mother to Legalize the Business</i>
140	22 November 2021 November 22, 2021	PNM Salurkan Bantuan Sembako untuk Korban Banjir Malang <i>PNM Distributes Basic Food Aid for Malang Flood Victims</i>
141	22 November 2021 November 22, 2021	PNM Berikan Pelatihan Budidaya Lebah Madu Trigona untuk UMK Padang <i>PNM Gives Trigona Honey Bee Cultivation Training for Padang MSEs</i>
142	23 November 2021 November 23, 2021	Sinergi PNM dengan Kementerian ATRBPN & Kementerian Koperasi dan UMK Lakukan Pemberdayaan Masyarakat <i>PNM Synergy with Ministry of ATRBPN & Ministry of Cooperatives and MSEs Perform Community Empowerment</i>
143	23 November 2021 November 23, 2021	Dampak Holding Ultra Mikro, Obligasi PNM Oversubscribed <i>Impact of Holding Ultra Micro, Oversubscribed PNM Bonds</i>
144	25 November 2021 November 25, 2021	Dampingi UMK Malang, PNM Berikan Pelatihan Budidaya Magot <i>Accompanying Malang MSEs, PNM Gives Magot Cultivation Training</i>
145	26 November 2021 November 26, 2021	Menteri PPPA Tinjau Pelatihan Nasabah Mekaar dan Ruang Pintar di Desa Manikyang <i>Minister of PPPA Review Mekaar Customer Training and Smart Room in Manikyang Village</i>
146	26 November 2021 November 26, 2021	Dukung Pemberdayaan Masyarakat, PNM Bersinergi dengan Pemkab Konawe Selatan <i>Support Community Empowerment, PNM Synergizes with South Konawe Regency Government</i>
147	27 November 2021 November 27, 2021	PNM Denpasar Gelar Workshop UMKM Menyasar Pasar Luar Negeri <i>PNM Denpasar Holds MSME Workshop Targeting Foreign Markets</i>
148	3 Desember 2021 December 3, 2021	Kolaborasi BTN dan PNM, Greenhouse Hidroponik Desa Sajira <i>Collaboration between BTN and PNM, Sajira Village Hydroponic Greenhouse</i>
149	3 Desember 2021 December 3, 2021	Geliat Bapak Sugiman Menjaga Lingkungan dan Peranan UMKM di Tengah Pandemi <i>Mr. Sugiman's stretch in protecting the environment and the role of SMEs in the midst of a pandemic</i>
150	6 Desember 2021 December 6, 2021	PNM Berikan Pelatihan Pembuatan Izin Usaha di Tulungagung <i>PNM Provides Training on Making Business Permits in Tulungagung</i>
151	7 Desember 2021 December 7, 2021	Dampingi Petani Ponorogo, PNM Berikan Pelatihan Klusterisasi Sektor Pertanian <i>Accompanying Ponorogo Farmers, PNM Provides Agricultural Sector Clustering Training</i>
152	8 Desember 2021 December 8, 2021	PNM Lakukan Pelatihan Pemberdayaan Mitra Binaan Lampung Tahap 3 <i>PNM Conducts Training on Empowerment of Foster Partners in Lampung Phase 3</i>
153	9 Desember 2021 December 9, 2021	PNM Berikan Pelatihan Klusterisasi Sektoral Industri Tahu Kedelai di Kabupaten Sukoharjo <i>PNM Provides Training on Sectoral Clustering of Soybean Tofu Industry in Sukoharjo Regency</i>
154	14 Desember 2021 December 14, 2021	Kisah Ibu Parisih, 'Miss Independent' Asal Jepara <i>The story of Mrs. Parisih, 'Miss Independent' from Jepara</i>
155	17 Desember 2021 December 17, 2021	Deputi Bidang Kesetaraan Gender KPPPA Apresiasi Program PNM Mekaar <i>KPPPA's Deputy for Gender Equality Appreciates Mekaar PNM Program</i>
156	17 Desember 2021 December 17, 2021	PNM Makassar Salurkan Bantuan Banjir Soppeng <i>PNM Makassar Distributes Soppeng Flood Aid</i>
157	22 Desember 2021 December 22, 2021	PNM Salurkan Bantuan untuk UMK di Rest Area Ngawi <i>PNM Distributes Aid for MSEs in Ngawi Rest Area</i>
158	22 Desember 2021 December 22, 2021	PNM dan SMF Berkolaborasi Dukung Program Pembiayaan Mikro Perumahan untuk Karyawan PNM <i>PNM and SMF Collaborate to Support Housing Microfinance Program for PNM Karyawan Employees</i>
159	27 Desember 2021 December 27, 2021	Ruang Pintar Ar-Reihan untuk Anak Desa Bendungan <i>Ar-Reihan Smart Room for Dam Village Children</i>
160	29 Desember 2021 December 29, 2021	PNM Resmikan Sarana Belajar Ruang Pintar di Lampung <i>PNM Inaugurates Smart Room Learning Facility in Lampung</i>

Liputan Media

Berikut rincian total jumlah pemberitaan PNM di media baik secara *online* maupun cetak selama tahun 2021.

Bulan	Online	Cetak Print	Month
Januari	130	15	January
Februari	116	23	February
Maret	115	19	March
April	119	19	April
Mei	112	9	May
Juni	221	21	June
Juli	108	12	July
Agustus	226	21	August
September	424	33	September
Oktober	176	23	October
November	363	29	November
Desember	378	21	December

The Media Coverage

The following is a breakdown of the total number of PNM reports in the media both online and in print during 2021

Transparansi Penyampaian Laporan

Transparency of Report Submitting

No	Tanggal Pelaporan Reporting Date	Perihal Regarding	Melapor Kepada Report To
1	15 Desember 2021 December 15, 2021	S-745-PNM-DIRKMR-MRI-XII-21 Penyampaian Daftar Temuan dan Rekomendasi atas Kepatuhan Terhadap Perundang-Undangan dan Pengendalian Intern Periode Tahun 2020 PT PNM S-745-PNM-DIRKMR-MRI-XII-21 Submission of a List of Findings and Recommendations on Compliance with Laws and Internal Controls for the 2020 Period of PT PNM	KBUMN
2	10 Desember 2021 December 10, 2021	S-742-PNM-DIRUT-SPR-XII-21 Undangan Pembicara Webinar Anti Fraud dan Gratifikasi S-742-PNM-DIRUT-SPR-XII-21 Invitation for Anti-Fraud and Gratification Webinar Speakers	KPK
3	08 Desember 2021 December 08, 2021	S-736-PNM-DIRUT-SPR-XII-21 Permohonan Pemadanan Data S-736-PNM-DIRUT-SPR-XII-21 Application for Data Matching	KEMENDAGRI
4	07 Desember 2021 December 07, 2021	S-732-PNM-DIRKDO-SPR-XII-21 Penyampaian Laporan Data Hutang Kewajiban dalam Valuta Asing Periode November 2021 S-732-PNM-DIRKDO-SPR-XII-21 Submission of Data on Accounts Payable in Foreign Currency for November 2021 Period	OJK
5	03 Desember 2021 December 03, 2021	S-724-PNM-DIRKMR-SPR-XII-21 Penyampaian Tanggapan atas Rancangan Surat Edaran OJK Tentang Laporan Bulanan PT PNM_compressed S-724-PNM-DIRKMR-SPR-XII-21 Submission of Responses to the Draft OJK Circular Letter Regarding PT PNM_compressed Monthly Reports	OJK
6	03 Desember 2021 December 03, 2021	S-723-PNM-DIRKMR-MRI-XII-21 Penyampaian Data Struktur Organisasi Perusahaan dan Internal Audit Charter PNM S-723-PNM-DIRKMR-MRI-XII-21 Submission of Data on Company Organizational Structure and PNM Internal Audit Charter	KBUMN
7	01 Desember 2021 December 01, 2021	S-721-PNM-DIRKMR-SPR-XII-21 Permohonan Pergantian PIC PT PNM Dalam APPK OJK S-721-PNM-DIRKMR-SPR-XII-21 Application for Replacement of PT PNM's PIC in OJK APPK	OJK
8	01 Desember 2021 December 01, 2021	S-720-PNM-DIRKDO-SPR-XII-21 Penyampaian Pengumuman/iklan Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan Prospektus Ringkas Pada Surat Kabar Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021 S-720-PNM-DIRKDO-SPR-XII-21 Submission of Additional Information Advertising Announcements and or Improvement of Abridged Prospectus in Newspapers in the Context of Public Offering of Shelf Registration Bond IV PNM Phase I Year 2021	OJK
9	30 November 2021 November 30, 2021	S-715-PNM-DIRKLP-SPR-XI-21 Penyampaian Laporan Rencana Bisnis Tahun 2022 PT PNM S-715-PNM-DIRKLP-SPR-XI-21 Submission of PT PNM's 2022 Business Plan Report	OJK
10	30 November 2021 November 30, 2021	S-714-PNM-DIRKLP-SPR-XI-21 Penyampaian Laporan Rencana Bisnis Tahun 2022 PT PNM S-714-PNM-DIRKLP-SPR-XI-21 Submission of PT PNM's 2022 Business Plan Report	OJK
11	30 November 2021 November 30, 2021	S-712-PNM-DIRUT-PRA-XI-21 Penyampaian Usulan RKAP Tahun 2022 PT PNM S-712-PNM-DIRUT-PRA-XI-21 Submission of PT PNM's 2022 RKAP Proposal	KBUMN

No	Tanggal Pelaporan Reporting Date	Perihal Regarding	Melapor Kepada Report To
12	30 November 2021 November 30, 2021	S-710-PNM-DIRUT-KDP-XI-21 Perkiraan Kebutuhan Dana Subsidi Bunga atau Subsidi Margin Program PEN <i>S-710-PNM-DIRUT-KDP-XI-21 Estimated Need for Interest Subsidy Fund or National Fund Margin Subsidy</i>	KBUMN
13	17 November 2021 November 17, 2021	S-694-PNM-DIRKDO-SPR-XI-21 Penyampaian Informasi KAP untuk melakukan Audit atas Lapkeu PT PNM Tahun 2021 <i>S-694-PNM-DIRKDO-SPR-XI-21 Submission of KAP Information to conduct an Audit of PT PNM's Lapkeu in 2021</i>	OJK
14	12 November 2021 November 12, 2021	S-687-PNM-DIRUT-KDP-XI-21 Permohonan Pembayaran Tagihan Subsidi Bunga-Subsidi Margin - Juni 2021 <i>S-687-PNM-DIRUT-KDP-XI-21 Application for Payment of Interest Subsidy Bills-Margin Subsidy - June 2021</i>	KBUMN
15	12 November 2021 November 12, 2021	S-686-PNM-DIRUT-KDP-XI-21 Permohonan Pembayaran Tagihan Subsidi Bunga-Subsidi Margin - Mei 2021 <i>S-686-PNM-DIRUT-KDP-XI-21 Application for Payment of Interest Subsidy Bills-Margin Subsidy - May 2021</i>	KBUMN
16	12 November 2021 November 12, 2021	S-685-PNM-DIRUT-KDP-XI-21 Permohonan Pembayaran Tagihan Subsidi Bunga-Subsidi Margin - April 2021 <i>S-685-PNM-DIRUT-KDP-XI-21 Application for Payment of Interest Subsidy Bills-Margin Subsidy - April 2021</i>	KBUMN
17	12 November 2021 November 12, 2021	S-684-PNM-DIRUT-KDP-XI-21 Permohonan Pembayaran Tagihan Subsidi Bunga-Subsidi Margin - Maret 2021 <i>S-684-PNM-DIRUT-KDP-XI-21 Application for Payment of Interest Subsidy Bills-Margin Subsidy - March 2021</i>	KBUMN
18	12 November 2021 November 12, 2021	S-683-PNM-DIRUT-KDP-XI-21 Permohonan Pembayaran Tagihan Subsidi Bunga-Subsidi Margin - Februari 2021 <i>S-683-PNM-DIRUT-KDP-XI-21 Application for Payment of Interest Subsidy Bills-Margin Subsidy - February 2021</i>	KBUMN
19	12 November 2021 November 12, 2021	S-682-PNM-DIRUT-KDP-XI-21 Permohonan Pembayaran Tagihan Subsidi Bunga-Subsidi Margin - Januari 2021 <i>S-682-PNM-DIRUT-KDP-XI-21 Application for Payment of Interest Subsidy Bills-Margin Subsidy - January 2021</i>	KBUMN
20	11 November 2021 November 11, 2021	S-681-PNM-DIRUT-KDL-XI-21 Permohonan Pedoman Terkait Perubahan Nama PT PNM <i>S-681-PNM-DIRUT-KDL-XI-21 Application for Guidelines Regarding the Change of Name of PT PNM</i>	Kementerian Agraria dan Tata Ruang
21	11 November 2021 November 11, 2021	S-680-PNM-DIRUT-KDP-XI-21 Permohonan Pembayaran Tagihan Subsidi Bunga-Subsidi Margin <i>S-680-PNM-DIRUT-KDP-XI-21 Application for Payment of Interest Subsidy Bills-Margin Subsidy</i>	KBUMN
22	10 November 2021 November 10, 2021	S-678-681-PNM-DIRKMR-SPR-XI-21 Penyampaian Perubahan Kepala SPI PT PNM <i>S-678-681-PNM-DIRKMR-SPR-XI-21 Submission of Change of Head of SPI PT PNM</i>	BPK RI
23	10 November 2021 November 10, 2021	S-676-PNM-DIRUT-KDP-XI-21 Penyampaian Pemutakhiran Data Transaksi Nasabah PNM <i>S-676-PNM-DIRUT-KDP-XI-21 Submission of Update on PNM Customer Transaction Data</i>	Kemenkeu
24	10 November 2021 November 10, 2021	S-675-PNM-DIRUT-KDP-XI-21 Penyampaian Data Nasabah PNM dengan NIK Tidak Valid dan NIK Ganda Sesuai dengan Hasil Reviu BPKP <i>S-675-PNM-DIRUT-KDP-XI-21 Submission of PNM Customer Data with Invalid NIK and Dual NIK in accordance with BPKP Review Results</i>	Kemenkeu
25	08 November 2021 November 08, 2021	S-670-PNM-DIRBIS-SPR-XI-21 Pemberitahuan Tanggal Efektif Perubahan AD PT PNM <i>S-670-PNM-DIRBIS-SPR-XI-21 Notification of Effective Date of Changes in PT PNM AD</i>	DJKN
26	05 November 2021 November 05, 2021	S-668-PNM-DIRKDO-SPR-XI-21 Penyampaian Laporan Data Hutang Kewajiban dalam Valuta Asing Periode Oktober 2021 <i>S-668-PNM-DIRKDO-SPR-XI-21 Submission of Data on Accounts Payable in Foreign Currency for the Period of October 2021</i>	OJK
27	04 November 2021 November 04, 2021	S-667-PNM-DIRKMR-SPR-XI-21 Penyampaian Laporan Perubahan AD PT PNM - BEI <i>S-667-PNM-DIRKMR-SPR-XI-21 Submission of Report on Changes in AD PT PNM - IDX</i>	BEI
28	04 November 2021 November 04, 2021	S-666-PNM-DIRKMR-SPR-XI-21 Penyampaian Laporan Perubahan AD PT PNM - OJK <i>S-666-PNM-DIRKMR-SPR-XI-21 Submission of Report on Changes in AD PT PNM - OJK</i>	OJK
29	04 November 2021 November 04, 2021	S-665-PNM-DIRKM-SPR-XI-21 Permohonan Penambahan Waktu Penyampaian Tanggapan atas Rancangan Surat Edaran OJK tentang Laporan Bulanan PT PNM <i>S-665-PNM-DIRKM-SPR-XI-21 Application for Additional Time for Submission of Responses to the Draft OJK Circular Letter on PT PNM Monthly Reports</i>	OJK

No	Tanggal Pelaporan Reporting Date	Perihal Regarding	Melapor Kepada Report To
30	03 November 2021 November 03, 2021	S-662-PNM-DIRKMR-SPR-XI-21 Penyampaian Laporan Perubahan Anggaran Dasar PT PNM compressed <i>S-662-PNM-DIRKMR-SPR-XI-21 Submission of Report on Changes to Articles of Association of PT PNM compressed</i>	OJK
31	02 November 2021 November 02, 2021	S-660-PNM-DIRUT-SPR-XI-21 Penyampaian Usulan Data Penerima Subsidi Bunga-Subsidi Margin Periode Juli-Desember 2021 <i>S-660-PNM-DIRUT-SPR-XI-21 Submission of Proposed Data on Beneficiaries of Interest Subsidy-Margin Subsidy for the Period of July-December 2021</i>	KBUMN
32	01 November 2021 November 01, 2021	S-657-PNM-DIRUT-SPR-XI-21 Permohonan Arahan dan Kebijakan Terkait Perubahan Nama PT PNM (persero) pada Sertipikat Hak Tanggungan Yang Sudah Terdaftar di kantor ATR-BPN <i>S-657-PNM-DIRUT-SPR-XI-21 Application for Direction and Policy Regarding Change of Name of PT PNM (Persero) on Registered Mortgage Certificate at ATR-BPN office</i>	Kementerian ATR/ BPN
33	29 Oktober 2021 October 29, 2021	S-643-PNM-DIRKMR-SPR-X-21 Penyampaian Laporan Manajemen Triwulan III Tahun 2021 PT Permodalan Nasional Madani - OJK <i>S-643-PNM-DIRKMR-SPR-X-21 Submission of Management Report Quarter III 2021 PT Permodalan Nasional Madani - OJK</i>	OJK
34	29 Oktober 2021 October 29, 2021	S-641-PNM-DIRUT-PRA-X-21 Penyampaian Laporan Manajemen Triwulan III Tahun 2021 PT Permodalan Nasional Madani - KBUMN <i>S-641-PNM-DIRUT-PRA-X-21 Submission of Management Report Quarter III 2021 PT Permodalan Nasional Madani - KBUMN</i>	KBUMN
35	27 Oktober 2021 October 27, 2021	S-602-PNM-DIRUT-PRA-X-21 Permohonan Persetujuan Produk WASH PT PNM <i>S-602-PNM-DIRUT-PRA-X-21 Application for PT PNM WASH Product Approval</i>	OJK
36	14 Oktober 2021 October 14, 2021	S-583-PNM-DIRKDO-SPR-X-21 Laporan Realisasi Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2021 <i>S-583-PNM-DIRKDO-SPR-X-21 Report on the Realization of Sustainable Sukuk Mudharabah Funds I Phase I in 2021</i>	OJK
37	14 Oktober 2021 October 14, 2021	S-582-PNM-DIRKDO-SPR-X-21 Penyampaian Informasi Debitur PNM Periode Juni-Agustus 2021 <i>S-582-PNM-DIRKDO-SPR-X-21 Submission of Information on PNM Debtors for the Period June-August 2021</i>	OJK
38	08 Oktober 2021 October 08, 2021	S-575-PNM-DIRKDO-SPR-X-21 Penyampaian Laporan Data Hutang Kewajiban dalam Valuta Asing Periode September 2021 <i>S-575-PNM-DIRKDO-SPR-X-21 Submission of Data on Accounts Payable in Foreign Currency for the Period of September 2021</i>	OJK
39	06 Oktober 2021 October 06, 2021	S-573-PNM-DIRKMR-SPR-X-21 Penyampaian Laporan Perubahan Anggaran Dasar PT PNM (Persero) <i>S-573-PNM-DIRKMR-SPR-X-21 Submission of Report on Changes to the Articles of Association of PT PNM (Persero)</i>	OJK
40	30 September 2021 September 30, 2021	S-562-PNM-DIRKMR-SPR-IX-21 Penyampaian Daftar Rekomendasi dan Tindak Lanjut AOI GCG PNM 2020 <i>S-562-PNM-DIRKMR-SPR-IX-21 Submission of List of Recommendations and Follow-Ups for AOI GCG PNM 2020</i>	KBUMN
41	28 September 2021 September 28, 2021	S-555-PNM-DIRUT-SPR-IX-21 Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Tingkat Kematangan Manajemen Risiko - RMI Tahun 2020 - Asdep KBUMN <i>S-555-PNM-DIRUT-SPR-IX-21 Submission of Risk Management Maturity Level Assessment Report - RMI 2020 - Assistant KBUMN Assistant</i>	KBUMN
42	28 September 2021 September 28, 2021	S-554-PNM-DIRUT-SPR-IX-21 Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Tingkat Kematangan Manajemen Risiko - RMI Tahun 2020 - Asdep MR <i>S-554-PNM-DIRUT-SPR-IX-21 Submission of Risk Management Maturity Level Assessment Report - RMI 2020 - Deputy Assistant MR</i>	KBUMN
43	27 September 2021 September 27, 2021	S-551-PNM-DIRUT-SPR-IX-21 Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Lelang Eksekusi HT Pasca Terbitnya PP Nomor 73-2021 <i>S-551-PNM-DIRUT-SPR-IX-21 Coordination of Follow-up Implementation of HT Execution Auctions After the issuance of PP Number 73-2021</i>	kemenkeu
44	21 September 2021 September 21, 2021	S-543-PNM-DIRKDO-SPR-IX-21 Penyampaian Tanggapan Terkait Hasil Penelaahan atas Laporan Keuangan Tahunan 2020 - OJK <i>S-543-PNM-DIRKDO-SPR-IX-21 Submission of Responses Regarding the Review of the 2020 Annual Financial Statements - OJK</i>	OJK
45	20 September 2021 September 20, 2021	S-540-PNM-DIRKDO-SPR-IX-21 Penyampaian Informasi Perubahan Nama dan Alamat Kantor Cabang ULamm PT PNM (Persero) - OJK PKP <i>S-540-PNM-DIRKDO-SPR-IX-21 Submission of Information on Change of Name and Address of PT PNM (Persero) ULamm Branch Office - OJK PKP</i>	OJK

No	Tanggal Pelaporan Reporting Date	Perihal Regarding	Melapor Kepada Report To
46	20 September 2021 September 20, 2021	S-538-PNM-DIRUT-SPR-IX-21 Permohonan Tindak Lanjut Nota Kesepahaman S-538-PNM-DIRUT-SPR-IX-21 Request for Follow-up Memorandum of Understanding	Kementerian Agrarian dan Tata Ruang
47	09 September 2021 September 09, 2021	S-527-PNM-DIRKMRSPRIX21 Tentang Permohonan Pergantian Personal In Charge (PIC) PT PNM (Persero) Dalam Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) OJK S-527-PNM-DIRKMRSPRIX21 Regarding Application for Substitution of PT PNM (Persero) Personal In Charge (PIC) in the OJK Consumer Protection Portal Application (APPK)	OJK
48	08 September 2021 September 08, 2021	S-525-PNM-DIRKDO-SPR-IX-21 Penyampaian Data Hutang Kewajiban dalam Valuta Asing Periode Agustus 2021 S-525-PNM-DIRKDO-SPR-IX-21 Submission of Data on Liabilities in Foreign Currency for the Period of August 2021	OJK
49	30 Agustus 2021 August 30, 2021	S-500-PNM-DIRKMR-MRI-VIII-21 Penyampaian Profil Risiko PT PNM (Persero) S-500-PNM-DIRKMR-MRI-VIII-21 Submission of PT PNM (Persero) Risk Profile	KBUMN
50	29 Agustus 2021 August 29, 2021	S-499-PNM-DIRKMR-SPR-VIII-21 Permohonan Penambahan PIC PNM APPK OJK S-499-PNM-DIRKMR-SPR-VIII-21 Application for Additional PIC PNM APPK OJK	OJK
51	26 Agustus 2021 August 26, 2021	S-498-PNM-DIRUT-SPR-VIII-21 Laporan Pelaksanaan Subsidi Bunga Periode Bulan Juli 2021 - PT PNM (Persero) S-498-PNM-DIRUT-SPR-VIII-21 Report on the Implementation of Interest Subsidy for the Month of July 2021 - PT PNM (Persero)	KBUMN
52	26 Agustus 2021 August 26, 2021	S-493-PNM-DIRKDO-SPR-VIII-21 Pemberitahuan Hasil Pemingkatan - OJK S-493-PNM-DIRKDO-SPR-VIII-21 Notification of Rating Results - OJK	OJK
53	26 Agustus 2021 August 26, 2021	S-492-PNM-DIRKDO-VIII-21 Perubahan Susunan Direksi PT PNM (Persero) S-492-PNM-DIRKDO-VIII-21 Changes in the Composition of the Board of Directors of PT PNM (Persero)	KBUMN
54	26 Agustus 2021 August 26, 2021	S-491-PNM-DIRKDO-VIII-21 Perubahan Susunan Direksi PT PNM (Persero) S-491-PNM-DIRKDO-VIII-21 Changes in the Composition of the Board of Directors of PT PNM (Persero)	OJK
55	26 Agustus 2021 August 26, 2021	S-490-PNM-DIRKDO-VIII-21 Perubahan Susunan Direksi PT PNM (Persero) S-490-PNM-DIRKDO-VIII-21 Changes in the Composition of the Board of Directors of PT PNM (Persero)	BEI
56	26 Agustus 2021 August 26, 2021	S-486-PNM-DIRKDO-VIII-21 Perubahan Susunan Direksi PT PNM (Persero) S-486-PNM-DIRKDO-VIII-21 Changes in the Composition of the Board of Directors of PT PNM (Persero)	KBUMN
57	06 Agustus 2021 August 06, 2021	S-455-PNM-DIRKDO-SPR-VIII-21 Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasian PT PNM Periode 30 Juni Berbasis XBRL S-455-PNM-DIRKDO-SPR-VIII-21 Submission of Consolidated Financial Statements of PT PNM for the Period of 30 June Based on XBRL	BEI
58	06 Agustus 2021 August 06, 2021	S-454-460-PNM-DIRKDO-SPR-VIII-21 Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasian PT PNM Periode 30 Juni S-454-460-PNM-DIRKDO-SPR-VIII-21 Submission of PT PNM Consolidated Financial Statements for the Period of June 30	OJK
59	06 Agustus 2021 August 06, 2021	S-453-PNM-DIRKDO-SPR-VIII-21 Penyampaian Bukti Pengumuman Laporan Keuangan Konsolidasian P30 Juni 2021 PNM - IDX S-453-PNM-DIRKDO-SPR-VIII-21 Submission of Proof of Announcement of Consolidated Financial Statements P30 June 2021 PNM - IDX	BEI
60	06 Agustus 2021 August 06, 2021	S-452-PNM-DIRKDO-SPR_VIII-21 Penyampaian Bukti Pengumuman Laporan Keuangan Konsolidasian P30 Juni 2021 PNM - OJK S-452-PNM-DIRKDO-SPR_VIII-21 Submission of Proof of Announcement of Consolidated Financial Statements P30 June 2021 PNM - OJK	OJK
61	02 Agustus 2021 August 02, 2021	S-447-PNM-DIRKMR-SPR-VII-21 Penyampaian Lapmen Semester I Tahun 2021 PT PNM (Persero) - OJK S-447-PNM-DIRKMR-SPR-VII-21 Submission of First Semester Lapmen 2021 PT PNM (Persero) - OJK	OJK
62	30 Juli 2021 July 30, 2021	S-446-PNM-DIRKDO-SPR-VII-21 Penyampaian Laporan Realisasi Rencana Bisnis PT PNM (Persero) Semester I Tahun 2021 S-446-PNM-DIRKDO-SPR-VII-21 Submission of Report on the Realization of the Business Plan of PT PNM (Persero) Semester I of 2021	OJK
63	30 Juli 2021 July 30, 2021	S-443-PNM-DIRUT-PRA-VII-21 Penyampaian Laporan Manajemen Semester I Tahun 2021 PT Permodalan Nasional Madani (Persero) - Menteri BUMN S-443-PNM-DIRUT-PRA-VII-21 Submission of First Semester 2021 Management Report PT Permodalan Nasional Madani (Persero) - Minister of SOEs	KBUMN

No	Tanggal Pelaporan Reporting Date	Perihal Regarding	Melapor Kepada Report To
64	29 Juli 2021 July 29, 2021	S-438-PNM-DIRUT-SPR-VII-21 Permohonan Untuk Memperoleh Persetujuan Menjadi Pihak Utama KSP <i>S-438-PNM-DIRUT-SPR-VII-21 Application to Obtain Approval to Become the Main Party of KSP</i>	OJK
65	29 Juli 2021 July 29, 2021	S-435-PNM-DIRKDO-SPR-VII-21 Penyampaian Hasil Evaluasi Komite Audit Terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit KAP Tahun Buku 2020 <i>S-435-PNM-DIRKDO-SPR-VII-21 Submission of the Audit Committee Evaluation Results on the Implementation of the Provision of KAP Audit Services for Fiscal Year 2020</i>	OJK
66	27 Juli 2021 July 27, 2021	S-428-PNM-DIRKMR-SPR-VII-21 Penyampaian Laporan Perubahan Anggaran Dasar PT PNM (Persero) <i>S-428-PNM-DIRKMR-SPR-VII-21 Submission of Report on Changes to the Articles of Association of PT PNM (Persero)</i>	OJK
67	22 Juli 2021 July 22, 2021	S-413-PNM-DIRKDO-SPR-VII-21 Perubahan Susunan Dewan Komisaris PT PNM (Persero) <i>S-413-PNM-DIRKDO-SPR-VII-21 Changes in the Composition of the Board of Commissioners of PT PNM (Persero)</i>	OJK
68	21 Juli 2021 July 21, 2021	S-410-PNM-DIRKDO-SPR-VII-21 Perubahan Susunan Dewan Komisaris PT PNM (Persero) <i>S-410-PNM-DIRKDO-SPR-VII-21 Changes in the Composition of the Board of Commissioners of PT PNM (Persero)</i>	KBUMN
69	21 Juli 2021 July 21, 2021	S-409-PNM-DIRKDO-SPR-VII-21 Perubahan Susunan Dewan Komisaris PT PNM (Persero) <i>S-409-PNM-DIRKDO-SPR-VII-21 Changes in the Composition of the Board of Commissioners of PT PNM (Persero)</i>	KBUMN
70	19 Juli 2021 July 19, 2021	S-406-PNM-DIRKDO-SPR-VII-21 Perubahan Sekretaris Perusahaan PT PNM (Persero) - OJK <i>S-406-PNM-DIRKDO-SPR-VII-21 Change of Corporate Secretary of PT PNM (Persero) - OJK</i>	OJK
71	08 Juli 2021 July 08, 2021	S-379-PNM-DIRKDO-SPR-VII-21 Penyampaian Laporan Data Hutang Valuta Asing Juni 2021 <i>S-379-PNM-DIRKDO-SPR-VII-21 Submission of Foreign Exchange Debt Data Report June 2021</i>	OJK
72	07 Juli 2021 July 07, 2021	S-377-PNM-DIRKDO-SPR-VII-21 Penyampaian Informasi Perubahan Alamat Kantor Cabang ULamm PT PNM (Persero) <i>S-377-PNM-DIRKDO-SPR-VII-21 Submission of Information on Change of Address of PT PNM's ULamm Branch Office (Persero)</i>	OJK
73	07 Juli 2021 July 07, 2021	S-376-PNM-DIRKDO-SPR-VII-21 Penyampaian Informasi Perubahan Alamat Kantor Cabang ULamm PT PNM (Persero) <i>S-376-PNM-DIRKDO-SPR-VII-21 Submission of Information on Change of Address of PT PNM's ULamm Branch Office (Persero)</i>	OJK
74	30 Juni 2021 June 30, 2021	S-361-PNM-DIRUT-SPR-VI-21 Permohonan untuk Memperoleh Persetujuan Menjadi Direktur <i>S-361-PNM-DIRUT-SPR-VI-21 Application to Obtain Approval to Become a Director</i>	OJK
75	30 Juni 2021 June 30, 2021	S-360-PNM-DIRUT-SPR-VI-21 Permohonan Surat Keterangan Atas Rencana Perubahan Susunan Pemegang Saham PT PNM <i>S-360-PNM-DIRUT-SPR-VI-21 Application for Certificate of Change in the Planned Composition of Shareholders of PT PNM</i>	OJK
76	28 Juni 2021 June 28, 2021	S-357 PNM-DIRUT KDP VI 21 (Penyetoran ke kas negara atas pendapatan jasa giro) <i>S-357 PNM-DIRUT KDP VI 21 (Deposit to the state treasury for current account service income)</i>	KBUMN
77	08 Juni 2021 June 08, 2021	S-301-PNM-DIRUT-SPR-VI-21 Permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Komisaris Utama PT PNM (Persero) 8 Juni 2021 <i>S-301-PNM-DIRUT-SPR-VI-21 Application for Fit and Proper Test of President Commissioner of PT PNM (Persero) 8 June 2021</i>	OJK
78	08 Juni 2021 June 08, 2021	S-300-PNM-DIRUT-SPR-VI-21 Permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Komisaris Utama PT PNM (Persero) <i>S-300-PNM-DIRUT-SPR-VI-21 Application for Fit and Proper Test of President Commissioner of PT PNM (Persero)</i>	OJK
79	07 Juni 2021 June 07, 2021	S-295-PNM-DIRUT-SPR-VI-21 Perubahan Nomenklatur dan Susunan Direksi PT PNM (Persero) <i>S-295-PNM-DIRUT-SPR-VI-21 Changes in the Nomenclature and Composition of the Board of Directors of PT PNM (Persero)</i>	OJK
80	07 Juni 2021 June 07, 2021	S-294-PNM-DIRKDO-SPR-VI-21 Penyampaian Laporan Data HutangKewajiban dalam Valuta Asing Periode Mei 2021 <i>S-294-PNM-DIRKDO-SPR-VI-21 Submission of Data on Accounts Payable in Foreign Currency for the May 2021 Period</i>	OJK
81	02 Juni 2021 June 02, 2021	S-293 PNM DIRUT KDP VI 21 (Penyetoran ke kas negara atas pendapatan jasa giro) <i>S-293 PNM DIRECTOR KDP VI 21 (Deposit to the state treasury for current account service income)</i>	KBUMN
82	27 Mei 2021 May 27, 2021	S-247-PNM-DIRKMR-SPR-V-21 Penyampaian Laporan (Hasil Workshop) PT PNM (Persero) <i>S-247-PNM-DIRKMR-SPR-V-21 Report Submission (Results of Workshop) PT PNM (Persero)</i>	KBUMN

No	Tanggal Pelaporan Reporting Date	Perihal Regarding	Melapor Kepada Report To
83	31 Mei 2021 May 31, 2021	S-245-PNM-DIRKDO-SPR-V-21 Perubahan Susunan Dewan Direksi PT PNM (Persero) <i>S-245-PNM-DIRKDO-SPR-V-21 Changes in the Composition of the Board of Directors of PT PNM (Persero)</i>	OJK
84	25 Mei 2021 May 25, 2021	S-230-PNM-DIRUT-SPR-V-21 Permohonan Pemberian Arahan dan Motivasi dalam Rangka HUT PT PNM (Persero) ke-22 - KBUMN <i>S-230-PNM-DIRUT-SPR-V-21 Application for Giving Directions and Motivation in Context of the 22nd Anniversary of PT PNM (Persero) - KBUMN</i>	KBUMN
85	21 Mei 2021 May 21, 2021	S-227.PNM-DIRKMR.SPR.V.21 Penyampaian Personal in Charge (PIC) PT PNM (Persero) dalam Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) OJK <i>S-227.PNM-DIRKMR.SPR.V.21 Submission of PT PNM (Persero) Personal in Charge (PIC) in the OJK Consumer Protection Portal Application (APPK)</i>	OJK
86	21 Mei 2021 May 21, 2021	S-226.PNM-DIRKMR.SPR.V.21 Penyampaian Laporan Manajemen TW I Tahun 2021 PT PNM (Persero) <i>S-226.PNM-DIRKMR.SPR.V.21 Submission of Management Report for the First Quarter of 2021 PT PNM (Persero)</i>	OJK
87	11 Mei 2021 May 11, 2021	S-221-PNM-DIRUT-SPR-V-21 Penyampaian Laporan Hasil GCG Tahun 2020 Tahun 2020 PT PNM <i>S-221-PNM-DIRUT-SPR-V-21 Submission of GCG Results Report 2020 Year 2020 PT PNM</i>	OJK
88	10 Mei 2021 May 10, 2021	S-219-PNM-DIRKEU-SPR-V-21 Penyampaian Laporan Data Hutang Dalam Valuta Asing Periode April 2021 <i>S-219-PNM-DIRKEU-SPR-V-21 Submission of Debt Data Report in Foreign Currency for April 2021 Period</i>	OJK
89	07 Mei 2021 May 07, 2021	S-216-PNM-DIRUT-SPR-V-21 Penyampaian Laporan Pelaksanaan Subsidi Bunga Periode Bulan April 2021 + Laporan Subsidi <i>S-216-PNM-DIRUT-SPR-V-21 Submission of Interest Subsidy Implementation Report April 2021 + Subsidy Report</i>	KBUMN
90	07 Mei 2021 May 07, 2021	S-212.PNM-DIRKEU.SPR.V.21 Penyampaian Buku Laporan Tahunan PT PNM Tahun 2020 - BEI <i>S-212.PNM-DIRKEU.SPR.V.21 Submission of the 2020 Annual Report of PT PNM - IDX</i>	BEI
91	07 Mei 2021 May 07, 2021	S-211.PNM-DIRKEU.SPR.V.21 Penyampaian Buku Laporan Tahunan PT PNM Tahun 2020 - PKP Sektor Jasa OJK <i>S-211.PNM-DIRKEU.SPR.V.21 Submission of the 2020 Annual Report of PT PNM - PKP OJK Services Sector</i>	OJK
92	07 Mei 2021 May 07, 2021	S-210.PNM-DIRKEU.SPR.V.21 Penyampaian Buku Laporan Tahunan PT PNM Tahun 2020 - Lembaga Keuangan Khusus OJK <i>S-210.PNM-DIRKEU.SPR.V.21 Submission of the 2020 Annual Report of PT PNM - OJK Special Financial Institution</i>	OJK
93	04 Mei 2021 May 04, 2021	S-203 PNM DIRUT KDP V 21 (Rencana Penyetoran ke Kas Negara) <i>S-203 PNM DIRECTOR OF KDP V 21 (Plan for Deposit to State Treasury)</i>	KBUMN
94	30 April 2021 April 30, 2021	S-200-PNM-DIRUT-SPR-IV-21 Penyampaian Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG Tahun 2020 PT PNM (Persero) <i>S-200-PNM-DIRUT-SPR-IV-21 Submission of the 2020 GCG Implementation Assessment Report for PT PNM (Persero)</i>	KBUMN
95	30 April 2021 April 30, 2021	S-197-PNM-DIRKMR-SPR-IV-21 Penyampaian Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud PT PNM (Persero) Tahun 2020 <i>S-197-PNM-DIRKMR-SPR-IV-21 Submission of PT PNM (Persero) Anti-Fraud Strategy Implementation Report in 2020</i>	OJK
96	30 April 2021 April 30, 2021	S-193-PNM-DIRKEU-SPR-IV-21 Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasian PT PNM (Persero) Periode 31 Maret 2021 unaudited - Direktur Penilaian Perusahaan BEI <i>S-193-PNM-DIRKEU-SPR-IV-21 Submission of PT PNM (Persero) Consolidated Financial Statements for the Period of March 31, 2021 unaudited - Director of IDX Company Valuation</i>	BEI
97	30 April 2021 April 30, 2021	S-192-PNM-DIRKEU-SPR-IV-21 Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasian PT PNM (Persero) Periode 31 Maret 2021 unaudited - Dir Pengawasan LKK IKNB 2B OJK <i>S-192-PNM-DIRKEU-SPR-IV-21 Submission of PT PNM (Persero) Consolidated Financial Statements for the Period 31 March 2021 unaudited - Director of Supervision of LKK IKNB 2B OJK</i>	OJK
98	30 April 2021 April 30, 2021	S-191-PNM-DIRKEU-SPR-IV-21 Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasian PT PNM (Persero) Periode 31 Maret 2021 unaudited - Direktur PKP Sektor Jasa OJK <i>S-191-PNM-DIRKEU-SPR-IV-21 Submission of PT PNM (Persero) Consolidated Financial Statements for the Period of March 31, 2021 unaudited - Director of PKP Services Sector OJK</i>	OJK
99	30 April 2021 April 30, 2021	S-190-PNM-DIRKEU-SPR-IV-21 Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasian PT PNM (Persero) 31 Maret 2021 Berbasis XBRL <i>S-190-PNM-DIRKEU-SPR-IV-21 Submission of Consolidated Financial Statements of PT PNM (Persero) March 31, 2021 Based on XBRL</i>	BEI

No	Tanggal Pelaporan Reporting Date	Perihal Regarding	Melapor Kepada Report To
100	30 April 2021 April 30, 2021	S-189-PNM-DIRUT-PRA-IV-21 Penyampaian Laporan Manajemen TW I Tahun 2021 PT PNM (Persero) <i>S-189-PNM-DIRUT-PRA-IV-21 Submission of Management Report for the First Quarter of 2021 PT PNM (Persero)</i>	KBUMN
101	30 April 2021 April 30, 2021	S-188.PNM-DIRUT.SPR.IV.21 Penyampaian Buku Laporan Tahunan PT PNM Tahun 2020 - Wamen BUMN <i>S-188.PNM-DIRUT.SPR.IV.21 Submission of PT PNM Annual Report for 2020 - Deputy Minister of BUMN</i>	KBUMN
102	28 April 2021 April 28, 2021	S-187 PNM DIRUT KDP IV 21 (Penyetoran ke Kas Negara atas Pendapatan Jasa Giro) <i>S-187 PNM DIRECTOR KDP IV 21 (Deposit to the state treasury for current account service income)</i>	KBUMN
103	28 April 2021 April 28, 2021	S-186-PNM-DIRUT-SPI-IV-21 Tanggapan atas Surat Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan Tim Audit BPK RI <i>S-186-PNM-DIRUT-SPI-IV-21 Response to Letter of Submission of Audit Findings Concept of BPK RI Audit Team</i>	BPK RI
104	28 April 2021 April 28, 2021	S-185 PNM DIRUT KDP IV 21 (Rencana Penyetoran ke Kas Negara) <i>S-185 PNM DIRECTOR KDP IV 21 (Plan for Deposit to the State Treasury)</i>	KBUMN
105	20 April 2021 April 20, 2021	S-180-PNM-DIRKEU-SPR-IV-21 Perubahan Susunan Dewan Komisaris PT PNM - OJK <i>S-180-PNM-DIRKEU-SPR-IV-21 Changes in the Composition of the Board of Commissioners of PT PNM - OJK</i>	OJK
106	20 April 2021 April 20, 2021	S-176-PNM-DIRKEU-SPR-IV-21 Perubahan Susunan Dewan Komisaris PT PNM - IKNB OJK <i>S-176-PNM-DIRKEU-SPR-IV-21 Changes in the Composition of the Board of Commissioners of PT PNM - IKNB OJK</i>	OJK
107	20 April 2021 April 20, 2021	S-175-PNM-DIRKEU-SPR-IV-21 Perubahan Susunan Dewan Komisaris PT PNM - IKNB OJK <i>S-175-PNM-DIRKEU-SPR-IV-21 Changes in the Composition of the Board of Commissioners of PT PNM - IKNB OJK</i>	BEI
108	14 April 2021 April 14, 2021	S-149-PNM-DIRKEU-SPR-IV-21 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Obligasi PUB III PNM Tahap V Tahun 2021_Direktur Penilaian Perusahaan <i>S-149-PNM-DIRKEU-SPR-IV-21 Report on the Realization of the Use of PUB III PNM Bonds Phase V in 2021_Director of Company Valuation</i>	BEI
109	14 April 2021 April 14, 2021	S-148-PNM-DIRKEU-SPR-IV-21 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Obligasi PUB III PNM Tahap V Tahun 2021 <i>S-148-PNM-DIRKEU-SPR-IV-21 Report on the Realization of the Use of PUB III PNM Bonds Phase V Year 2021 Report</i>	OJK
110	14 April 2021 April 14, 2021	S-145-PNM-DIRKEU-SPR-IV-21 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Obligasi PUB III PNM Tahap IV Tahun 2020 <i>S-145-PNM-DIRKEU-SPR-IV-21 Report on the Realization of the Use of PUB III PNM Phase IV Bonds in 2020</i>	OJK
111	13 April 2021 April 13, 2021	S-138-PNM-DIRUT-SPR-IV-21 Undangan RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2020 - Menteri BUMN <i>S-138-PNM-DIRUT-SPR-IV-21 Invitation to GMS Approval of Annual Report and Ratification of Financial Statements for Financial Year 2020 - Minister of SOEs</i>	KBUMN
112	12 April 2021 April 12, 2021	S-137-PNM-DIRUT-SPR-IV-21 Permohonan Persetujuan Pengangkatan Komisaris PNM VC <i>S-137-PNM-DIRUT-SPR-IV-21 Application for Approval for Appointment of PNM VC Commissioners</i>	KBUMN
113	03 April 2021 April 03, 2021	S-132-PNM-DIRUT-SPR-IV-21 Laporan Pelaksanaan Subsidi Bunga Periode Bulan Maret 2021 – PT Permodalan Nasional Madani (Persero) <i>S-132-PNM-DIRUT-SPR-IV-21 Report on Implementation of Interest Subsidy for March 2021 Period – PT Permodalan Nasional Madani (Persero)</i>	KBUMN
114	03 April 2021 April 03, 2021	S-131.PNM-DIRKMR.SPR.IV.21 Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Manajemen Risiko Tahun 2020 PT PNM <i>S-131.PNM-DIRKMR.SPR.IV.21 Submission of Self Assessment Report on the Implementation of Risk Management in 2020 PT PNM</i>	OJK
115	08 April 2021 April 08, 2021	S-129-PNM-DIRKEU-SPR-IV-21 Penyampaian Laporan Data Hutang Dalam Valuta Asing Maret 2021 <i>S-129-PNM-DIRKEU-SPR-IV-21 Submission of Debt Data Report in Foreign Currency March 2021</i>	OJK
116	03 April 2021 April 03, 2021	S-118-PNM-DIRUT-SPR-IV-21 Penyampaian Pengkinian RJPP 2020-2024 (Data Cyperus) <i>S-118-PNM-DIRUT-SPR-IV-21 Submission of 2020-2024 RJPP Update (Cyperus Data)</i>	KBUMN
117	29 Maret 2021 March 29, 2021	S-116-PNM-DIRUT-JML-III-21 Laporan Penutupan Rekening BL PNM <i>S-116-PNM-DIRUT-JML-III-21 BL PNM Account Closing Report</i>	KBUMN

No	Tanggal Pelaporan Reporting Date	Perihal Regarding	Melapor Kepada Report To
118	12 Maret 2021 March 12, 2021	S-107-PNM-DIRUT-SPR-III-21 Laporan Pelaksanaan Subsidi Bunga Periode Bulan Februari 2021 PT PNM (Persero) <i>S-107-PNM-DIRUT-SPR-III-21 Report on the Implementation of Interest Subsidy for the Month of February 2021 PT PNM (Persero)</i>	KBUMN
119	19 Maret 2021 March 19, 2021	S-102-PNM-DIRKMR-SPR-III-21 Penyampaian Laporan Manajemen Tahun 2020 Audited PNM <i>S-102-PNM-DIRKMR-SPR-III-21 Submission of Management Report 2020 Audited PNM</i>	OJK
120	17 Maret 2021 March 17, 2021	S-097_PNM_Dirut_SPR_III_21_Penyampaian Usulan Data Penerima Subsidi Bunga_ Subsidi Margin untuk Periode Januari-Juni 2021 <i>S-097_PNM_Director_SPR_III_21_Submission of Proposed Data on Interest Subsidy Beneficiaries_Margin Subsidy for January-June 2021 Period</i>	KBUMN
121	15 Maret 2021 March 15, 2021	S-095-PNM-DIRUT-SPR-III-21 Usulan Agenda RUPS Pengesahan Laporan Keuangan PT PNM (Persero) Tahun Buku 2020 <i>S-095-PNM-DIRUT-SPR-III-21 Proposed GMS Agenda for Ratification of PT PNM (Persero) Financial Statements for Fiscal Year 2020</i>	KBUMN
122	12 Maret 2021 March 12, 2021	S-093-PNM-DIRKMR-SPR-III-21 Penyampaian RKAP PT PNM (Persero) Tahun 2021 - OJK <i>S-093-PNM-DIRKMR-SPR-III-21 Submission of PT PNM (Persero) RKAP 2021 - OJK</i>	OJK
123	08 Maret 2021 March 08, 2021	S-085-PNM-DIRKEU-SPR-III-21 Penyampaian Laporan Data Hutang Valas Februari 2021 <i>S-085-PNM-DIRKEU-SPR-III-21 Submission of Foreign Currency Debt Data Report February 2021</i>	OJK
124	05 Maret 2021 March 05, 2021	S-083-PNM-DIRKMR-SPR-III-21 Pengantar Penyampaian Data Terkait Tugas dan Fungsi Direktur Yang Menangani Manajemen Risiko dan Kepatuhan PT PNM (Persero) <i>S-083-PNM-DIRKMR-SPR-III-21 Introduction to Submission of Data Related to Duties and Functions of the Director Handling Risk Management and Compliance PT PNM (Persero)</i>	KBUMN
125	03 Maret 2021 March 03, 2021	S-082-PNM-DIRKEU-SPR-III-21 Penyampaian Laporan Audit Keuangan Konsolidasian PNM Tahun 2020 - Dir Pengawasan LKK OJK <i>S-082-PNM-DIRKEU-SPR-III-21 Submission of the 2020 PNM Consolidated Financial Audit Report - Director of OJK LKK Supervision</i>	OJK
126	02 Maret 2021 March 02, 2021	S-079-PNM-DIRKMR-SPR-III-21 Penyampaian Draft Data Top Risk PT PNM (Persero) <i>S-079-PNM-DIRKMR-SPR-III-21 Submission of Draft Top Risk Data for PT PNM (Persero)</i>	KBUMN
127	01 Maret 2021 March 01, 2021	S-076-PNM-DIRUT-PRA-III-21 Penyampaian Laporan Manajemen Tahun 2020 Audited PT PNM (Persero) <i>S-076-PNM-DIRUT-PRA-III-21 Submission of Management Report 2020 Audited PT PNM (Persero)</i>	KBUMN
128	01 Maret 2021 March 01, 2021	S-076-PNM-DIRKMR-SPI-III-21 Penyampaian Progres Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Subsidi Bunga Dalam Rangka Pelaksanaan PEN Tahun 2020 PT PNM - Inspektur Inspektorat KBUMN <i>S-076-PNM-DIRKMR-SPI-III-21 Submission of the Progress of the Examination Results of the RI BPK on Interest Subsidies for the Implementation of the 2020 National Education Program PT PNM - Inspectorate of KBUMN Inspectorate</i>	KBUMN
129	22 Februari 2021 February 22, 2021	S-070-PNM-DIRUT-SPR-II-21 Penyampaian Pengkinian RJPP 2020-2024 PT PNM (Persero) <i>S-070-PNM-DIRUT-SPR-II-21 Submission of the 2020-2024 RJPP Update for PT PNM (Persero)</i>	KBUMN
130	16 Februari 2021 February 16, 2021	S-061-PNM-DIRUT-SPR-II-21 Penyampaian Laporan Keuangan Audited PT PNM (Persero) dan Anak Perusahaan untuk Tahun Buku 2020 <i>S-061-PNM-DIRUT-SPR-II-21 Submission of Audited Financial Statements of PT PNM (Persero) and Subsidiaries for the Financial Year 2020</i>	BPK RI
131	16 Februari 2021 February 16, 2021	S-060-PNM-DIRUT-SPR-II-21 Penyampaian Laporan Keuangan Audited PT PNM (Persero) dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2020 - Menteri BUMN <i>S-060-PNM-DIRUT-SPR-II-21 Submission of Audited Financial Reports of PT PNM (Persero) and Subsidiaries for Fiscal Year 2020 - Minister of BUM</i>	KBUMN
132	15 Februari 2021 February 15, 2021	S-056-PNM-DIRUT-JML-II-21 Permohonan Dukungan Program Peningkatan Pendidikan Melalui CSR BUMN <i>S-056-PNM-DIRUT-JML-II-21 Application for Support for Education Improvement Programs Through BUMN CSR</i>	KBUMN
133	15 Februari 2021 February 15, 2021	S-055-PNM-DIRUT-SPR-II-21 Penyampaian Pengkinian RJPP 2020-2024 PT PNM (Persero) <i>S-055-PNM-DIRUT-SPR-II-21 Submission of the 2020-2024 RJPP Update for PT PNM (Persero)</i>	KBUMN
134	15 Februari 2021 February 15, 2021	S-051-PNM-DIRKEU-SPR-II-21 Penyampaian Lapkeu Konsol Tahun Buku 2020 - Direktur Penilaian Perusahaan BEI <i>S-051-PNM-DIRKEU-SPR-II-21 Submission of Lapkeu Console for Fiscal Year 2020 - Director of IDX Corporate Assessment</i>	BEI

No	Tanggal Pelaporan Reporting Date	Perihal Regarding	Melapor Kepada Report To
135	15 Februari 2021 February 15, 2021	S-050-PNM-DIRKEU-SPR-II-21 Penyampaian Lapkeu Konsol Tahun Buku 2020 - PKP Sektor Jasa OJK <i>S-050-PNM-DIRKEU-SPR-II-21 Submission of Lapkeu Console for Fiscal Year 2020 - OJK Service Sector PKP</i>	OJK
136	15 Februari 2021 February 15, 2021	S-048-PNM-DIRKEU-SPR-II-21 Penyampaian Bukti Pengumuman Lapkeu Konsol Tahun Buku 2020 (Audited) PT PNM-OJK <i>S-048-PNM-DIRKEU-SPR-II-21 Submission of Proof of Announcement of Lapkeu Console Financial Year 2020 (Audited) PT PNM-OJK</i>	OJK
137	10 Februari 2021 February 10, 2021	S-043-PNM-DIRKEU-SPR-II-21 Penyampaian Laporan Data Hutang Valas Januari 2021 <i>S-043-PNM-DIRKEU-SPR-II-21 Submission of Foreign Currency Debt Data Report January 2021</i>	OJK
138	05 Februari 2021 February 05, 2021	S-035-PNM-DIRUT-SPR-II-21 Laporan Pelaksanaan Subsidi Bunga Periode Bulan Januari 2020 - PT Permodalan Nasional Madani (Persero) <i>S-035-PNM-DIRUT-SPR-II-21 Report on Implementation of Interest Subsidy for January 2020 Period - PT Permodalan Nasional Madani (Persero)</i>	KBUMN
139	05 Februari 2021 February 05, 2021	S-034-PNM-DIRKEU-SPR-II-21 Penyampaian Data KAP PT Permodalan Nasional Madani (Persero) <i>S-034-PNM-DIRKEU-SPR-II-21 Submission of KAP Data for PT Permodalan Nasional Madani (Persero)</i>	KBUMN
140	29 Januari 2021 January 29, 2021	S-029.A-PNM-DIR-SPR-I-21 Permohonan Persetujuan Pilot Project Pembiayaan Mikro Perumahan PT PNM (Persero) dan PT SMF (Persero) <i>S-029.A-PNM-DIR-SPR-I-21 Application for approval of PT PNM (Persero) and PT SMF (Persero) Housing Microfinance Pilot Project Approval</i>	OJK
141	28 Januari 2021 January 28, 2021	S-028-PNM-DIRUT-SPR-I-21 Undangan RUPS RKAP Tahun 2021 PT PNM (Persero) - Wakil Menteri BUMN II <i>S-028-PNM-DIRUT-SPR-I-21 Invitation to the 2021 RKAP GMS PT PNM (Persero) - Deputy Minister of BUMN II</i>	KBUMN
142	17 Januari 2021 January 17, 2021	S-027-PNM-DIRUT-PRA-I-21 Penyampaian Usulan RKAP Tahun 2021 PT PNM (Persero) <i>S-027-PNM-DIRUT-PRA-I-21 Submission of Proposed RKAP 2021 PT PNM (Persero)</i>	KBUMN
143	17 Januari 2021 January 17, 2021	S-026-PNM-DIRUT-SPR.I.21 Usulan Agenda RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2021 PT PNM (Persero) <i>S-026-PNM-DIRUT-SPR.I.21 Proposed GMS Agenda for Ratification of the 2021 RKAP PT PNM (Persero)</i>	KBUMN
145	15 Januari 2021 January 15, 2021	S-017-PNM-DIRKEU.SPR.I.21 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Obligasi PUB III PNM Tahap IV Tahun 2020 <i>S-017-PNM-DIRKEU.SPR.I.21 Report on the Realization of the Use of PUB III PNM Phase IV Bonds in 2020</i>	OJK
146	06 Januari 2021 January 06, 2021	S-011-PNM-DIRKEU-SPR-I-21 Perubahan Susunan Dewan Komisaris PT PNM (Persero) untuk Direktur Penilaian Perusahaan BEI <i>S-011-PNM-DIRKEU-SPR-I-21 Changes in the Composition of the Board of Commissioners of PT PNM (Persero) to Director of IDX Company Assessment</i>	BEI
147	06 Januari 2021 January 06, 2021	S-008-PNM-DIRKEU-SPR-I-21 Perubahan Susunan Dewan Komisaris PT PNM (Persero) untuk Direktur PKP Sektor Jasa OJK <i>S-008-PNM-DIRKEU-SPR-I-21 Changes in the Composition of the Board of Commissioners of PT PNM (Persero) to Director of PKP Services Sector OJK</i>	OJK
148	06 Januari 2021 January 06, 2021	S-007-PNM-DIRKEU-SPR-I-21 Perubahan Susunan Dewan Komisaris PT PNM (Persero) untuk Asdep Perbankan dan Pembiayaan KBUMN <i>S-007-PNM-DIRKEU-SPR-I-21 Changes in the Composition of the Board of Commissioners of PT PNM (Persero) to Assistant Deputy for Banking and Financing for KBUMN</i>	KBUMN
149	06 Januari 2021 January 06, 2021	S-005-PNM-DIRKEU-SPR-I-21 Perubahan Susunan Dewan Komisaris PT PNM (Persero) untuk Direktur Pengawasan LKK OJK <i>S-005-PNM-DIRKEU-SPR-I-21 Changes in the Composition of the Board of Commissioners of PT PNM (Persero) to Director of OJK LKK Supervision</i>	OJK
150	06 Januari 2021 January 06, 2021	S-004-PNM-DIRKEU-SPR-I-21 Penyampaian Laporan Data HutValas PNM Desember 2020 <i>S-004-PNM-DIRKEU-SPR-I-21 Submission of PNM Foreign Exchange Data Report December 2020</i>	OJK
151	04 Januari 2021 January 04, 2021	S-001-PNM-DIR-SPI-1-21 - Tanggapan atas Surat Tim Audit BPK <i>S-001-PNM-DIR-SPI-1-21 - Response to BPK Audit Team Letter</i>	BPK RI

Kode Etik

PNM menyadari arti pentingnya implementasi prinsip-prinsip GCG sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Pengelolaan PNM selain harus mengikut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku juga harus menjunjung tinggi norma-norma perilaku dan nilai etik berbisnis untuk meningkatkan reputasi dan citra perusahaan.

Pedoman perilaku atau *Code of Conduct* merupakan pedoman etika berperilaku bagi insan PNM yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur, dan melakukan kesesuaian perilaku, sehingga tercapai hasil yang konsisten dan sesuai dengan nilai budaya Perusahaan dalam mencapai visi dan misinya.

Pokok-Pokok Kode Etik

Pokok-pokok yang diatur dalam Kode Etik berupa norma atau aturan yang mengikat insan PNM yang digunakan sebagai panduan, tatanan, dan pedoman tingkah laku di lingkungan PNM dan Masyarakat.

Adapaun pokok-pokok kode etik adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
2. Gratifikasi
3. *Corporate Social Responsibility*
4. Entertainment
5. Biaya Perjalanan Dinas
6. Informasi Perusahaan, Sistem Informasi dan Sumber Daya
7. Penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
8. Konflik Kepentingan
9. Komunikasi
10. Hubungan dengan Vendor, Supplier dan Kontraktor
11. Hubungan dengan Anak Perusahaan, Cucu Perusahaan dan Afiliasi
12. Hubungan dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM)
13. Hubungan Insan PNM
14. Tanggung Jawab Kepada Pemegang Saham dan Pemerintah
15. Tanggung Jawab PNM
16. Partisipasi dalam Kegiatan Politik
17. Kegiatan dan Pekerjaan di luar PNM

Kepatuhan Terhadap Kode Etik

Kode Etik dan budaya perusahaan berlaku bagi seluruh karyawan, pejabat, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris PNM

Penyebarluasan Kode Etik

Perseroan telah melakukan sosialisasi kebijakan dan Kode Etik Perseroan secara rutin dan menyeluruh kepada seluruh karyawan. Kebijakan-kebijakan tersebut terus diperbarui secara berkala melalui pembahasan-pembahasan di departemen/divisi dan manajemen. Penyebarluasan kode etik kepada seluruh insan perseroan dilakukan melalui sistem DPM.

Code of Conduct

PNM realizes the importance of implementing GCG principles to increase the trust of shareholders and stakeholders. The management of PNM must comply with applicable laws and regulations and uphold the norms of behavior and business ethical values to improve the company's reputation and image.

Code of conduct or Code of Conduct is an ethical code of conduct for PNM personnel that is structured to influence, shape, regulate, and conform to behavior to achieve consistent results and under the company's cultural values in achieving its vision and mission.

Principles of the Code Of Ethics

The points set out in the Code of Ethics were in the form of norms or rules that bind PNM people which were used as a guide, structure, and code of conduct in the PNM environment and the community.

The principles of the code of ethics are as follows:

1. *Complying with the prevailing laws and regulations.*
2. *Gratification*
3. *Corporate Social Responsibility*
4. *Entertainment*
5. *Official travel expenses*
6. *Company Information, Information Systems and Resources*
7. *Use of Intellectual Property Rights (IPR)*
8. *Conflict of Interest*
9. *Communication*
10. *Relationships with Vendors, Suppliers and Contractors*
11. *Relationships with Subsidiaries, Grandchildren and Affiliates*
12. *Relationship with Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives (MSMEs)*
13. *PNM Human Relations*
14. *Responsibilities to Shareholders and the Government*
15. *PNM responsibilities*
16. *Participation in Political Activities*
17. *Activities and Jobs outside PNM*

Compliance with Code Of Conduct

The Code of Ethics and corporate culture applied to all PNM employees, officers, members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.

Dissemination of Code of Conduct

The dissemination of the Company's Code of Conduct policy routinely and comprehensively carried out to all employees. Such policies are regularly updated through discussions within departments/divisions and management. Dissemination of the code of ethics to all company individuals was carried out through the DPM system.

Upaya Penerapan dan Penegakan Kode Etik

Perseroan menerapkan Kode Etik sesuai dengan Peraturan Perusahaan. Pelanggaran terhadap ketentuan pedoman Kode Etik/Peraturan Perusahaan akan dikenakan sanksi yang berlaku di Perseroan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindak pelanggaran terhadap Peraturan Perseroan dapat dilaporkan kepada Divisi Sumber Daya Manusia melalui *email* disertai dengan bukti pelanggaran.

Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran yang melanggar kode etik meliputi pelanggaran indisipliner, Pelanggaran SOP, dan ketentuan perusahaan dan pelanggaran yang berhubungan dengan tindak pidana.

Jumlah Pelanggaran dan Sanksi yang Diberikan

No	Bisnis Business	Jumlah Pelanggaran Number of Violations
1	ULaMM	21
2	Mekaar	384
Total		405

No	Jenis Sanksi Type of Sanction	Pelaku Perpetrator	
		ULaMM	Mekaar
1	ST	1	206
2	SP1	4	135
3	SP2	12	203
4	SP3	10	237
5	PHK karyawan aktif	0	18
6	PHK pencatatan HRIS	13	585
Total		40	1384

Catatan / Note: Karyawan yang PHK pencatatan HRIS adalah status karyawan yang sudah tidak aktif (mangkir dan mengundurkan diri) dan mendapat rekomendasi sanksi PHK dari putusan KPP atas Pelanggaran yang dilakukan. / Employees who are laid off from HRIS registration are employees who are no longer active (be absent and resign) and receive a recommendation for layoff sanctions from the KPP's decision for violations committed.

Review Pelaksanaan Kode Etik

Kode Etik Perseroan tercantum dalam Pedoman Perilaku yang merupakan landasan bagi setiap karyawan dalam bekerja yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur, dan melakukan kesesuaian perilaku. Dalam pelaksanaan Kode etik ini, Divisi SDM menempatkannya di dalam System DPM (*Digital Performance Manajement*). Seluruh karyawan dengan mudah dapat mengaksesnya. Setiap karyawan yang mengakses diminta untuk mengisi pernyataan bahwa karyawan setuju dengan pedoman ini dan dapat dijalankan dalam keseharian bekerja.

Efforts for Implementation and Enforcement of the Code of Conduct

The Company applies the Code of Ethics in accordance with Company Regulations. Violations of the provisions of the Code of Ethics/Company Regulations will be subject to sanctions in force in the Company and in accordance with applicable laws and regulations. Acts of violation of Company Regulations can be reported to the Human Resources division via e-mail accompanied by evidence of violations.

Types of Sanctions for Violation of Code of Conduct

Violations that violated the code of conduct include disciplinary violations, violations of SOPs, and company regulations and violations related to criminal acts.

Number of Violations and Sanctions Provided

Code of Conduct Implementation Review

The Company's Code of Ethics is contained in the Code of Conduct which is the foundation for every employee at work which is structured to influence, shape, regulate, and conform behavior. In implementing this code of conduct, the HR Division places it in the DPM (*Digital Performance Management*) System. All employees can easily access it. Every employee who accesses is asked to fill in a statement that the employee agrees with these guidelines and can be carried out in their daily work.

Budaya Perusahaan

Uraian terkait Budaya Perusahaan dapat dilihat pada bagian Budaya Perusahaan Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja

Pada Tahun 2021, PNM tidak memiliki program Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja baik berupa kepemilikan saham oleh karyawan maupun manajemen Perseroan. Oleh karena itu, PNM tidak menyampaikan tentang jumlah saham ESOP/MSOP dan Realisasinya; Jangka Waktu; Persyaratan Karyawan dan/atau Manajemen yang Berhak; dan *Harga Exercise*.

Kebijakan Pengungkapan Informasi Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi serta Pelaksanaannya

PNM merupakan Perusahaan Tertutup sehingga tidak terdapat informasi kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perseroan.

Whistleblowing System

Penyampaian dan Media Laporan Pelanggaran

Pengaduan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat dan karyawan Perseroan ditujukan kepada Direksi. Perseroan menerima setiap pengaduan pelanggaran yang diajukan oleh pelapor secara tertulis.

Pengaduan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat dan karyawan Perseroan dilakukan secara tertulis dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Melalui *email* ke **antifraud@ymail.com**
2. SMS ke nomor **082112345555**
3. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Direksi up Divisi Satuan Pengawas Internal dengan cara diantarkan langsung atau melalui Pos kepada Perusahaan dengan alamat:
Direksi PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
Up. Divisi Satuan Pengawas Internal
Gedung Arthaloka Lantai 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 2
Jakarta 10220

Perseroan wajib memberikan tanda terima jika pengaduan pelanggaran diajukan secara tertulis dan beridentitas.

Corporate Culture

Descriptions related to Corporate Culture can be seen in the Corporate Culture section, Company Profile Chapter in this Annual Report.

Performance-Based Long-Term Compensation Policy

In 2021, PNM did not have a Performance-Based Long-Term Compensation program in the form of share ownership by employees or the management of the Company. Therefore, PNM did not convey the number of ESOP/MSOP shares and their realization; Period of time; Eligible Employee and/or Management Requirements; and Price Exercise.

Disclosure Policy of Board of Commissioners and Board of Directors' Share Ownership Information and the Implementation

PNM was a Private Company so there was no information on share ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners no later than 3 (three) working days after the ownership or any change in ownership of the Company's shares.

Whistleblowing System

Submission and Media of Violation Reports

Complaints of violations committed by officers and employees of the Company were addressed to the Board of Directors. The company accepted every violation complaint submitted by the reporter in writing.

Complaints of violations committed by officers and employees of the Company could be made in writing with the following mechanism:

1. *By email to **antifraud@ymail.com***
2. *SMS to number **082112345555***
3. *Delivering an official letter addressed to the Board of Directors of the Internal Supervisory Unit Division by way of delivery directly or by post to the Company at the address:
Directors of PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
Up. Internal Supervisory Unit Division
Arthaloka Building, 10th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 2
Jakarta 10220*

The company was obliged to provide a receipt if the violation complaint was submitted in writing and had an identity.

Perlindungan Bagi Whistleblower

Perseroan berkewajiban untuk melindungi pelapor. Perlindungan pelapor dimaksudkan untuk mendorong kemauan dan keberanian melaporkan adanya pelanggaran. Perlindungan pelapor meliputi:

1. Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan.
2. Jaminan keamanan bagi pelapor maupun keluarganya.
3. Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikannya.

Perseroan memberikan jaminan kerahasiaan identitas terlapor sampai terbukti adanya pelanggaran.

Penanganan Pengaduan

Proses penanganan pengaduan pelanggaran adalah sebagai berikut:

1. Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi atas laporan yang diterima.
2. Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya indikasi pelanggaran yang disertai bukti-bukti yang cukup, maka selanjutnya dapat diproses ke tahap investigasi.
3. Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran akan memutuskan perlu tidaknya dilakukan investigasi atas pengaduan pelanggaran, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
4. Pengaduan pelanggaran yang melibatkan pejabat dan karyawan yang memerlukan investigasi, wajib ditindaklanjuti oleh Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran sesuai dengan mekanisme investigasi yang telah diatur dalam kebijakan Perusahaan.
5. Pelaku pelanggaran yang telah terbukti berdasarkan hasil investigasi akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jenis Pelanggaran yang Dapat Dilaporkan

Pada dasarnya semua pengaduan yang masuk akan diterima, namun proses lebih lanjut akan disaring terlebih dahulu dan untuk proses lebih lanjut. Pada tahun 2020 pengaduan yang masuk berkaitan dengan pembiayaan ULaMM, Mekaar dan Kepegawaian.

Pengelola Laporan Pelanggaran

Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat dan karyawan Perseroan dibentuk oleh Direksi. Direksi bertanggung jawab atas terlaksananya kebijakan penanganan pengaduan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat dan karyawan perusahaan.

Direksi membentuk Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran yang beranggotakan perwakilan dari Divisi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Direksi. Ketua Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran adalah Kepala Divisi Pengawas Internal (SPI).

Protection for Whistleblower

The Company was obliged to protect the whistleblower. The protection of whistleblowers was intended to encourage the willingness and courage to report violations. Whistleblower protection included:

1. Guarantee of the confidentiality of the reporter's identity and the contents of the report.
2. Security guarantees for whistleblowers and their families.
3. Guaranteed protection against adverse treatment.

The Company guarantees the confidentiality of the reported identity until it was proven that a violation has occurred.

Complaints Handling

The process for handling complaints of violations is as follows:

1. The Violation Complaints Handling Team verifies the reports received.
2. If the verification results indicate an indication of a violation accompanied by sufficient evidence, then it can be processed to the investigation stage.
3. The Violation Complaint Handling Team will decide whether or not an investigation is needed on the violation complaint, at the latest within 30 (thirty) working days.
4. Complaints of violations involving officials and employees that require investigation, must be followed up by the Violation Complaint Handling Team in accordance with the investigation mechanism set out in Company policy.
5. Perpetrators of violations that have been proven based on the results of the investigation will be processed in accordance with applicable regulations.

Types of Violations that Can Be Reported

Basically all incoming complaints could be accepted, but further processing would be filtered first and for further processing. In 2020 the incoming complaints were related to ULaMM, Mekaar and Personnel financing.

Management of Violation Reports

The Team for Handling Violation Complaints committed by the Company's officers and employees was formed by the Board of Directors. The Board of Directors was responsible for the implementation of the policy for handling complaints of violations committed by company officials and employees.

The Board of Directors formed a Violation Complaint Handling Team consisting of representatives from the Internal Supervisory Unit (SPI) Division and/or officials appointed by the Board of Directors. The Head of the Violation Complaints Handling Team was the Head of the Internal Supervisory Division (SPI).

Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran bertugas untuk menindaklanjuti pengaduan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat dan karyawan Perseroan.

Sosialisasi Whistleblowing System

Perseroan telah mempublikasikan serta mensosialisasikan Kebijakan Penanganan Pengaduan Pelanggaran kepada seluruh pejabat dan karyawan Perseroan maupun *stakeholders* melalui berbagai media Perusahaan, seperti:

1. Mencetak dan mendistribusikan dokumen kebijakan.
2. Website Perusahaan.
3. Email.

Jumlah Pengaduan dan Proses Pengaduan

Dari 496 pengaduan yang masuk melalui WBS selama tahun 2021, sebanyak 20 pengaduan yang memenuhi kriteria dan ditindaklanjuti oleh perusahaan. Dimana atas 20 pengaduan tersebut, 18 di antaranya telah selesai ditindak lanjuti dan terdapat 2 pengaduan yang masih berjalan prosesnya. Sedangkan sisanya tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak memenuhi kriteria (informasi tidak lengkap) sebanyak 62 pengaduan dan bukan merupakan pengaduan pelanggaran (*fraud*) melainkan berupa pertanyaan/kritik/saran terkait perusahaan dan rekrutmen/kepegawaian sebanyak 414 item.

Sanksi/Tindak Lanjut atas Pengaduan di Tahun 2021

Sanksi/Tindak Lanjut atas Pengaduan di Tahun 2021 Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) permasalahan yang dilakukan investigasi oleh SPI terbukti dan telah dikenakan sanksi.
2. 2 (dua) permasalahan yang dilakukan pendalaman oleh PMU telah selesai namun tidak ada yang perlu dikenai sanksi.
3. 15 (lima belas) permasalahan yang dilakukan pendalaman oleh PMM telah selesai, terdapat 2 laporan yang terbukti dan telah dikenakan sanksi.

Program Anti Korupsi

Program dan Prosedur yang Dilakukan dalam Mengatasi Praktik Korupsi

PNM telah memiliki beberapa kebijakan yang terkait dengan Pencegahan Korupsi, antara lain diatur dalam Kode Etik, Kebijakan Pengendalian Gratifikasi serta *Whistleblowing System*. Selain itu, PNM juga menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan telah memperoleh sertifikasi SMAP dari PT Sucofindo.

Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik merupakan landasan bagi terbentuknya sistem, struktur, dan budaya perusahaan yang terencana, terarah dan terukur, melalui suatu sistem manajemen yang fleksibel serta adaptif atas perubahan lingkungan bisnis yang kompetitif serta mampu membangun sistem pengendalian internal dan manajemen

The Team for Handling Violation Complaints had the duty to follow up on complaints of violations committed by officials and employees of the Company.

Socialization of Whistleblowing System

The company published and disseminated the Policy for Handling Violation Complaints to all officials and employees of the Company and stakeholders through various Company media, such as:

1. *Printing and distributing policy documents.*
2. *Company website.*
3. *Email.*

Number of Complaints and Complaints Process

*Among the 496 complaints that came through WBS during 2021, 20 complaints met the criteria and were followed up by the company. Among 20 complaints, 18 of them had been followed up, and there were 2 complaints that were still in progress. While the rest could not be followed up because they did not meet the criteria (incomplete information) as many as 62 complaints and were not complaints of violations (*fraud*) but in the form of questions/criticisms/suggestions related to the company and recruitment/staffing of 414 items.*

Sanctions/Follow-Up on Complaints in 2021

Sanctions/Follow-Up on Complaints in 2021. Sanctions/follow-up on complaints that had been processed during 2021 were as follows:

1. *1 (one) problem investigated by SPI had been proven and had been subject to sanctions.*
2. *2 (two) problems investigated by PMU had been completed, but none of them needed to be penalized.*
3. *15 (fifteen) problems investigated by PMM had been completed, there were 2 reports that had been proven and had been subject to sanctions.*

Anti Corruption Program

Programs and Procedures that are Performed in Overcoming Corruption Practices

PNM had several policies related to Corruption Prevention, among others were regulated in the Code of Ethics, Gratification Control Policy and the Whistleblowing System. In addition, PNM has also implemented ISO 37001: 2016 concerning the AntiBribery Management System (SMAP) and has obtained an SMAP certification from PT Sucofindo.

Anti-Bribery Management System (SMAP)

The principles of good corporate governance were the foundation for the formation of a planned, directed, and measured corporate system, structure and culture, through a management system that was flexible and adaptive to changes in a competitive business environment and was able to build a reliable system of internal control and risk management.

risiko yang handal. Perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk secara proaktif berkontribusi mencegah tindakan penyuapan melalui Sistem Manajemen Anti Penyuapan berdasarkan SNI ISO 37001: 2016. Komitmen PT PNM dalam menerapkan sistem ini terwujud dengan dipertahkannya sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan melalui surveillance audit oleh PT Sucofindo yang dilaksanakan pada tanggal 11 sd 12 November 2021.

Dengan dipegangnya sertifikat ISO SMAP 37001:2016, diterapkannya unsur kode etik Penyuapan:

1. *No Bribery* (tidak boleh ada suap menyuap dan pemerasan).
2. *No Kickback* (tidak boleh ada komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya).
3. *No Gift* (tidak boleh ada hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku).
4. *No Luxurious hospitality* (tidak boleh ada penyambutan dan jamuan yang berlebihan).

Perseroan memiliki komitmen anti penyuapan yang antara lain dinyatakan dalam bentuk Deklarasi yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka kepada seluruh pihak baik internal maupun eksternal, yang memuat:

1. Komitmen Perseroan dalam menjalankan usaha dengan memegang teguh prinsip integritas serta berpedoman pada kode etik dan peraturan Perseroan.
2. Perseroan selalu berupaya meningkatkan dan memperbaiki setiap proses bisnis agar sejalan dengan prinsip integritas.
3. Perseroan menjalankan prinsip toleransi nol (*zero tolerance*) terhadap tindak penyuapan, dan/atau pelanggaran atas peraturan perundangan terkait.
4. Perseroan melarang seluruh anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Pihak Independen Anggota Komite Dewan Komisaris dan karyawan (baik karyawan tetap, kontrak maupun tidak tetap), maupun konsultan, *advisor*, *outsourced*, *vendor* atau pihak lain termasuk anak perusahaan dan afiliasi yang bekerja untuk dan atas nama Perseroan untuk menawarkan dan/atau memberi suap serta pembayaran lain yang tidak sah baik secara hukum, moral, maupun etika kepada perorangan, badan dan/atau entitas lain.
5. Perseroan memiliki kebijakan yang mengatur pengendalian konflik/benturan kepentingan dari anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Pihak Independen Anggota Komite Dewan Komisaris dan karyawan.
6. Perseroan berkomitmen untuk memberikan sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai pencegahan, pendeteksian, pelaporan dan penyelesaian terkait penyuapan dan pembangunan integritas bisnis secara berkala kepada manajemen dan seluruh karyawan.

The Company had the responsibility to proactively contribute to preventing bribery through the Anti-Bribery Management System based on SNI ISO 37001: 2016. PT PNM's commitment to implementing this system was realized by maintaining the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System certification through a surveillance audit by PT Sucofindo which was held from 11 to 12 November 2021.

With the holding of the ISO SMAP 37001:2016 certificate, the elements of the bribery code of ethics were implemented:

1. *No Bribery* (no bribery and extortion).
2. *No Kickback* (no commissions, gratitude either in cash or in other forms).
3. *No Gift* (there may be no gifts or gratuities that are contrary to the rules and regulations).
4. *No Luxurious hospitality* (no reception and excessive entertainment).

The Company has an anti-bribery commitment which, among other things, is stated in the form of a Declaration which is set forth in writing and announced openly to all parties, both internal and external, which contains:

1. *The Company's commitment to running its business by upholding the principles of integrity and guided by the Company's code of ethics and regulations.*
2. *The Company always strives to improve and improve every business process in line with the principles of integrity.*
3. *The Company applies the principle of zero tolerance towards acts of bribery and/or violations of the relevant laws and regulations.*
4. *The Company prohibits all members of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, Directors, Independent Parties Members of the Board of Commissioners Committee and employees (both permanent, contract and non-permanent employees), as well as consultants, advisors, outsourced, vendors or other parties including subsidiaries and affiliates. who work for and on behalf of the Company to offer and/or give bribes and other illegal payments either legally, morally or ethically to individuals, entities and/or other entities.*
5. *The Company has a policy that regulates conflict control/ conflict of interest among members of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, Directors, Independent Parties, Committee Members of the Board of Commissioners and employees.*
6. *The Company is committed to providing outreach and/ or training on prevention, detection, reporting and settlement related to bribery and building business integrity on a regular basis to management and all employees.*

7. Perseroan akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan komitmen dan setiap pelanggaran terhadap kebijakan maupun kode etik dan perilaku karyawan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

7. The Company will supervise the implementation of commitments and any violations of the policies and code of ethics and employee behavior will be subject to sanctions in accordance with the applicable regulations.



Adapun organ SMAP-PNM terdiri dari para pejabat yang ditunjuk dengan fungsi/peran sesuai tanggung jawabnya sebagai berikut:

The SMAP-PNM organs consist of appointed officials with functions/roles according to their responsibilities as follows:

Dewan Pengarah

Dewan Pengarah harus memperagakan kepemimpinan dan komitmen terhadap sistem manajemen anti penyuapan, dengan:

1. Menyetujui kebijakan anti penyuapan organisasi.
2. Memastikan bahwa strategi dan kebijakan anti penyuapan organisasi sejalan.
3. Menerima dan meninjau informasi tentang isi dan operasi dari sistem manajemen.
4. Anti penyuapan pada waktu yang direncanakan.
5. Membutuhkan sumber daya yang cukup dan tepat yang diperlukan untuk operasi.
6. Sistem manajemen anti penyuapan dialokasikan dan ditentukan.
7. Melaksanakan pengawasan yang wajar terhadap penerapan dan keefektifan sistem manajemen anti penyuapan di organisasi oleh manajemen puncak.

Steering Committee

The Steering Committee must demonstrate leadership and commitment to an anti-bribery management system, by:

1. Approve the organization's anti-bribery policy.
2. Ensure that the organization's anti-bribery strategy and policies are in line.
3. Receive and review information about the content and operation of the management system.
4. Anti-bribery at the planned time.
5. Requires sufficient and appropriate resources necessary for operation.
6. An anti-bribery management system is allocated and defined.
7. Execute reasonable oversight of the implementation and effectiveness of the organization's anti-bribery management system by top management.

Manajemen Puncak

Manajemen puncak harus memperagakan kepemimpinan dan komitmen terhadap sistem manajemen anti penyuapan, dengan:

1. Memastikan sistem manajemen anti penyuapan, termasuk kebijakan dan sasaran, ditetapkan, diterapkan, dipelihara, dan ditinjau secara cukup yang dimaksudkan untuk mengatasi risiko penyuapan pada organisasi.
2. Memastikan integrasi persyaratan sistem manajemen anti penyuapan kedalam proses organisasi.
3. Menyediakan sumber daya yang cukup dan tepat untuk operasi yang efektif dari sistem manajemen anti penyuapan.

Top Management

Top management must demonstrate leadership and commitment to an anti-bribery management system, by:

1. Ensure that the anti-bribery management system, including policies and objectives, is adequately established, implemented, maintained and reviewed to address the risk of bribery in the organization.
2. Ensure the integration of anti-bribery management system requirements into organizational processes.
3. Provide sufficient and appropriate resources for the effective operation of the anti-bribery management system.

4. Mengkomunikasikan kebijakan anti penyuapan secara internal dan eksternal.
5. Mengkomunikasikan secara internal pentingnya manajemen anti penyuapan yang efektif dan memenuhi persyaratan sistem manajemen anti penyuapan.
6. Memastikan sistem manajemen anti penyuapan dirancang secara tepat untuk mencapai sarannya.
7. Mengarahkan dan mendukung karyawan untuk berkontribusi pada keefektifan sistem manajemen anti penyuapan.
8. Mensosialisasikan budaya anti penyuapan yang sejalan dengan budaya anti *fraud* perusahaan.
9. Mempromosikan peningkatan berkelanjutan.
10. Mendukung peran manajemen yang relevan lainnya untuk memperagakan kepemimpinannya dalam mencegah dan mendeteksi penyuapan yang terjadi di bidang tanggung jawab mereka.
11. Mendorong penggunaan prosedur pelaporan untuk aktivitas penyuapan yang dicurigai dan aktual.
12. Memastikan tidak ada karyawan yang menderita tindakan pembalasan, diskriminasi atau disipliner terhadap laporan yang dibuat dengan itikad baik atau atas dasar keyakinan yang wajar terhadap pelanggaran atau pelanggaran yang dicurigai berdasarkan kebijakan anti penyuapan, atau menolak terlibat dalam penyuapan walaupun penolakan ini dapat mengakibatkan hilangnya bisnis perusahaan (kecuali jika ada partisipasi individu dalam pelanggaran ini).
13. Melaporkan kepada Dewan Pengarah mengenai pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan hal-hal lainnya terkait dengan kasus penyuapan.

Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan

Manajemen puncak harus menugaskan pada fungsi kepatuhan anti penyuapan tanggung jawab dan wewenang untuk:

1. Mengawasi rancangan dan penerapan sistem manajemen anti penyuapan perusahaan.
2. Menyediakan petunjuk dan sistem manajemen anti penyuapan atas penyuapan dan isu terkait.
3. Memastikan sistem manajemen anti penyuapan sesuai dengan persyaratan standar ISO 37001:2016.
4. Melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh manajemen puncak kepada Dewan Pengarah.
5. Harus menilai secara berkelanjutan apakah sistem manajemen anti penyuapan, cukup efektif mengelola risiko penyuapan yang dihadapi oleh perusahaan dan diterapkan secara efektif.
6. Harus melaporkan minimal setiap setahun sekali, kepada Dewan Pengarah dan manajemen puncak, mengenai kecukupan dan penerapan dari sistem manajemen anti penyuapan termasuk hasil investigasi dan audit.
7. Mempunyai akses langsung dan cepat kepada Dewan Pengarah dan Manajemen Puncak ketika ada isu atau kepedulian yang diperlukan untuk diketahui terkait dengan penyuapan atau SMAP.

4. *Communicate the anti-bribery policy internally and externally.*
5. *Communicate internally the importance of effective antibribery management and meets the requirements of the anti-bribery management system.*
6. *Ensure that the anti-bribery management system is designed appropriately to achieve its goals.*
7. *Directing and supporting employees to contribute to the effectiveness of the anti-bribery management system.*
8. *Promote anti-bribery culture that is in line with the company's anti-fraud culture.*
9. *Promote continuous improvement.*
10. *Support other relevant management roles to demonstrate leadership in preventing and detecting bribery that occurs in their area of responsibility.*
11. *Encourage the use of reporting procedures for suspected and actual bribery activity.*
12. *Ensure that no employee has suffered retaliation, discrimination or disciplinary action against a report made in good faith or on a reasonable basis of a suspected violation or violation under the anti-bribery policy, or refuses to engage in bribery even though this refusal may result in loss of business company (unless there is individual participation in this offense).*
13. *Report to the Steering Committee regarding the implementation of the Anti-Bribery Management System and other matters related to bribery cases*

Anti-Bribery Compliance Function

Top management should assign the anti-bribery compliance function the responsibility and authority to:

1. *Oversee the design and implementation of the company's anti-bribery management system.*
2. *Provide guidelines and an anti-bribery management system for bribery and related issues.*
3. *Ensure that the anti-bribery management system complies with the requirements of the ISO 37001:2016 standard.*
4. *Report the violations committed by top management to the Steering Committee.*
5. *Must assess on an on-going basis whether the anti-bribery management system is effective enough to manage the bribery risks faced by the company and be implemented effectively.*
6. *Must report at least annually, to the Steering Committee and top management, on the adequacy and application of the anti-bribery management system including the results of investigations and audits.*
7. *Have direct and prompt access to the Steering Committee and Top Management when there are issues or concerns that need to be identified related to bribery or ABMS.*

Kebijakan Gratifikasi

Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. SK-022/PNM-DIR/XI/18 tentang Kebijakan Pengendalian Gratifikasi sebagaimana telah diubah terakhir oleh SK-030/PNM-DIR/XI/18 tentang addendum surat keputusan direksi No. SK-022/PNM-DIR/XI/18 tentang Kebijakan Pengendalian Gratifikasi PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Salah satu gratifikasi adalah penyuapan dimana pengertiannya adalah setiap gratifikasi yang diberikan kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi

Unit Pengendali Gratifikasi PNM bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pelaporan Gratifikasi. Unit Pengendalian Gratifikasi ini diketuai oleh Kepala Divisi SDM sesuai dengan yang tertuang didalam kebijakan SK 030/PNM-DIR/VIII/2020. UPG berperan sebagai motor penggerak kegiatan pengendalian gratifikasi.

Dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi, Perseroan membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi atau yang biasa disebut UPG yang memiliki tugas dalam melakukan fungsi pengendalian gratifikasi di perusahaan dan melaporkan laporan gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sistem Pengendalian Gratifikasi *Online* (GOL) secara periodik.

Setiap karyawan yang mendapatkan penerimaan Gratifikasi wajib melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi PNM. Ketika laporan telah di verifikasi oleh KPK, UPG PNM dapat menentukan kriteria pemanfaatan terhadap barang Gratifikasi yang telah ditetapkan menjadi milik instansi sesuai dengan aturan internal yang berlaku. Selanjutnya Unit Pengendalian Gratifikasi PNM Melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK, melakukan *monitoring*, dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama KPK.

Pengelola Pelaporan Gratifikasi

Unit Pengendali Gratifikasi PNM bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pelaporan gratifikasi. Perusahaan menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang berperan dalam mensosialisasikan aturan gratifikasi kepada seluruh pegawai serta mitra kerja secara berkesinambungan.

Susunan Unit Pengendalian Gratifikasi yang ditetapkan Perusahaan sebagai berikut:

Ketua : Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM
Wakil Ketua : Kepala Bagian Pembinaan Karyawan, Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM

Gratification Policy

Management Control of Gratuities was regulated in the Decree of the Board of Directors Number SK-022/PNM-DIR/XI/18 concerning Gratification Control Policy as lastly amended by SK030/PNM-DIR/XI/18 concerning addendum to directors' decree Number SK-022/PNM-DIR/XI/18 concerning PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Gratification Control Policy.

One of the gratuities was bribery in which the meaning was any gratification given to a civil servant or state administrator which was related to his position and which was contrary to his/her obligations or duties.

Gratification Control Management

The PNM Gratification Control Unit collaborates with the Corruption Eradication Commission regarding Gratification reporting. This Gratification Control Unit is chaired by the Head of the HR Division as stated in the SK 030/PNM-DIR/VIII/2020 policy. UPG acts as a driving force for gratification control activities.

In implementing gratification control, the Company forms a Gratification Control Unit or commonly known as UPG which has the task of performing the gratification control function in the company and reporting gratification reports to the Corruption Eradication Commission through the Online Gratification Control System (GOL) periodically.

Every employee who receives a Gratification must report it to the PNM Gratuity Control Unit. When the report has been verified by the KPK, UPG PNM can determine the criteria for the use of Gratuity items that have been assigned to the agency in accordance with applicable internal regulations. Furthermore, the PNM Gratification Control Unit reports the recapitulation of gratuity reports periodically to the KPK, monitors, and evaluates the implementation of gratification control with the KPK.

Gratification Reporting Management

The PNM Gratuity Control Unit collaborated with the Corruption Eradication Commission regarding gratification reporting. The company established a Gratuity Control Unit (UPG) which played a role in disseminating gratuity rules to all employees and work partners on an ongoing basis.

The composition of the Gratuity Control Unit established by the Company was as follows:

Chairman : Head of HR Management and Development Division
Deputy Chair : Head of Employee Development, HR Management and Development Division

Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Perusahaan, Divisi Sekretariat Perusahaan

Anggota : Divisi Pengelolaan dan Pengembangan SDM
Divisi Manajemen Risiko dan GCG
Divisi Legal
Divisi Sekretariat Perusahaan
Divisi Satuan Pengawas Intern

Secretary : Head of Corporate Administration, Corporate Secretariat Division

Member : HR Management and Development Division
Risk Management and GCG Division
Legal Division
Corporate Secretariat Division
Internal Audit Division

Sosialisasi Kebijakan Gratifikasi

Perseroan telah melakukan sosialisasi kebijakan terkait Pengendalian Gratifikasi secara rutin dan menyeluruh kepada seluruh karyawan. Kebijakan-kebijakan tersebut terus diperbarui secara berkala melalui sistem DPM yang dapat diakses seluruh karyawan PNM.

Gratification Policy Socialization

The Company conducted routine and comprehensive socialization of policies related to Gratitude Control to all employees. These policies were continuously updated regularly through the DPM system which could be accessed by all PNM employees.

Laporan Gratifikasi Tahun 2021

Selama tahun 2021, Laporan atas gratifikasi yang telah diterima oleh UPG sebanyak 5 (lima) laporan dan semuanya telah ditindaklanjuti.

Gratification Report 2021

During 2021, there were 5 (five) reports on gratification received by UPG and all of them have been followed up.

Pelatihan/Sosialisasi Anti Korupsi Kepada Karyawan

PNM telah melakukan pelatihan/sosialisasi internal melalui program SELARAS, SINAR dan SABER yang berupa *e-learning* dan dapat diakses oleh seluruh insan PNM. Selain itu, PNM juga telah melakukan *refreshment awareness* untuk ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sebelum diadakannya *Surveillance Audit* ISO 37001 : 2016 yang dilakukan pada tanggal 11-12 November 2021. Berikut ini terlampir untuk daftar peserta pelatihan ISO 37001:2018 SMAP:

Anti-Corruption Training/Socialization for Employees

PNM conducted internal training/socialization through the SELARAS, SINAR and SABER programs in the form of *e-learning* and could be accessed by all PNM personnel. In addition, PNM also carried out *refreshment awareness* for ISO 37001:2016 regarding Anti-Bribery Management System (SMAP) prior to the ISO 37001:2016 *Surveillance Audit* which was conducted on 11-12 November 2021. The following is attached to the list of ISO 37001 training participants: 2018 SMAP:

No	Nama Peserta Participant Name	Jabatan Position	Jenis Pelatihan Type of Training	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date
1	Yoke Paramita	Kepala Divisi Head of Division	Pelatihan <i>Irefreshment</i> SMAP Divisi MRI MRI Division SMAP <i>Irefreshment</i> Training	16 Juli 2021 July 16, 2021
2	Ibrahim Salim	Wakil Kepala Divisi Deputy Division Head	Pelatihan <i>Irefreshment</i> SMAP Divisi MRI MRI Division SMAP <i>Irefreshment</i> Training	16 Juli 2021 July 16, 2021
3	Roeswendra Agung A.	Kepala Bagian Head of Division	Pelatihan <i>Irefreshment</i> SMAP Divisi MRI MRI Division SMAP <i>Irefreshment</i> Training	16 Juli 2021 July 16, 2021
4	Ahmad Suhaemi	Kepala Bagian Head of Division	Pelatihan <i>Irefreshment</i> SMAP Divisi MRI MRI Division SMAP <i>Irefreshment</i> Training	16 Juli 2021 July 16, 2021
5	Susila	Kepala Bagian Head of Division	Pelatihan <i>Irefreshment</i> SMAP Divisi MRI MRI Division SMAP <i>Irefreshment</i> Training	16 Juli 2021 July 16, 2021
6	Mulyana Wiriakusuma	Kepala Bagian Head of Division	Pelatihan <i>Irefreshment</i> SMAP Divisi MRI MRI Division SMAP <i>Irefreshment</i> Training	16 Juli 2021 July 16, 2021
7	Andri Kurniawan	Koordinator Review Wilayah 16 (Banyuwangi, Kendari, Manado) Regional Review Coordinator 16 (Banyuwangi, Kendari, Manado)	Pelatihan <i>Irefreshment</i> SMAP Divisi MRI MRI Division SMAP <i>Irefreshment</i> Training	16 Juli 2021 July 16, 2021
8	Buana Widiyatmoko	Koordinator Review Wilayah 5 (Jakarta) Review Coordinator for Region 5 (Jakarta)	Pelatihan <i>Irefreshment</i> SMAP Divisi MRI MRI Division SMAP <i>Irefreshment</i> Training	16 Juli 2021 July 16, 2021
9	Panca Nurcahya L	Koordinator Review Wilayah 6 (Sukabumi, Bogor, Bekasi, dan Depok) Review Coordinator for Region 6 (Sukabumi, Bogor, Bekasi, and Depok)	Pelatihan <i>Irefreshment</i> SMAP Divisi MRI MRI Division SMAP <i>Irefreshment</i> Training	16 Juli 2021 July 16, 2021

No	Nama Peserta Participant Name	Jabatan Position	Jenis Pelatihan Type of Training	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date
10	Bachren Koko	Koordinator Review Wilayah 9 (Purwokerto, Banjarnegara, Magelang) <i>Review Coordinator for Region 9 (Purwokerto, Banjarnegara, Magelang)</i>	Pelatihan <i>Irefreshment</i> SMAP Divisi MRI <i>MRI Division SMAP Irefreshment Training</i>	16 Juli 2021 <i>July 16, 2021</i>
11	Muhammad Farid	Officer	Pelatihan <i>Irefreshment</i> SMAP Divisi MRI <i>MRI Division SMAP Irefreshment Training</i>	16 Juli 2021 <i>July 16, 2021</i>
12	Rida Riyany	Officer	Pelatihan <i>Irefreshment</i> SMAP Divisi MRI <i>MRI Division SMAP Irefreshment Training</i>	16 Juli 2021 <i>July 16, 2021</i>
13	Fitriyani	Officer	Pelatihan <i>Irefreshment</i> SMAP Divisi MRI <i>MRI Division SMAP Irefreshment Training</i>	16 Juli 2021 <i>July 16, 2021</i>
14	Ahmad Aji Noviansyah	Sr. Officer	Pelatihan <i>Irefreshment</i> SMAP Divisi MRI <i>MRI Division SMAP Irefreshment Training</i>	16 Juli 2021 <i>July 16, 2021</i>
15	Meydiara Ispriyatnowo	Sr. Officer	Pelatihan <i>Irefreshment</i> SMAP Divisi MRI <i>MRI Division SMAP Irefreshment Training</i>	16 Juli 2021 <i>July 16, 2021</i>
16	Buyung Akbar	Sr. Officer	Pelatihan <i>Irefreshment</i> SMAP Divisi MRI <i>MRI Division SMAP Irefreshment Training</i>	16 Juli 2021 <i>July 16, 2021</i>
17	Siauw Daniel Lustiady	Sr. Spesialis	Pelatihan <i>Irefreshment</i> SMAP Divisi MRI <i>MRI Division SMAP Irefreshment Training</i>	16 Juli 2021 <i>July 16, 2021</i>
18	Hardian	Sr. Spesialis	Pelatihan <i>Irefreshment</i> SMAP Divisi MRI <i>MRI Division SMAP Irefreshment Training</i>	16 Juli 2021 <i>July 16, 2021</i>
19	Eka Nurmala	Staf <i>Staff</i>	Pelatihan <i>Irefreshment</i> SMAP Divisi MRI <i>MRI Division SMAP Irefreshment Training</i>	16 Juli 2021 <i>July 16, 2021</i>
20	Konita Eka Destyasari	Staf <i>Staff</i>	Pelatihan <i>Irefreshment</i> SMAP Divisi MRI <i>MRI Division SMAP Irefreshment Training</i>	16 Juli 2021 <i>July 16, 2021</i>
21	Meidita Rivanda	Staf <i>Staff</i>	Pelatihan <i>Irefreshment</i> SMAP Divisi MRI <i>MRI Division SMAP Irefreshment Training</i>	16 Juli 2021 <i>July 16, 2021</i>
22	Ni Nyoman Ira Lasih Novita	Staf <i>Staff</i>	Pelatihan <i>Irefreshment</i> SMAP Divisi MRI <i>MRI Division SMAP Irefreshment Training</i>	16 Juli 2021 <i>July 16, 2021</i>
23	Kemala Mayliana	Staf <i>Staff</i>	Pelatihan <i>Irefreshment</i> SMAP Divisi MRI <i>MRI Division SMAP Irefreshment Training</i>	16 Juli 2021 <i>July 16, 2021</i>

Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

PT Permodalan Nasional Madani merupakan anak perusahaan Usaha Milik Negara (BUMN) maka anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pejabat strukturalnya dikategorikan sebagai Penyelenggara Negara dan terikat kewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, pengangkatan kembali dan pensiun atau berakhirnya jabatan sebagai PN menjabat berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dalam implementasinya, penetapan wajib lapor LHKPN di BUMN diserahkan kepada Direksi masing-masing BUMN sesuai Instruksi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor: INS-02/MBU/2007 tanggal 21 September 2007 tentang Penyelenggara Negara yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Management of Assets Report Assets of the State Administrator (LHKPN)

PT Permodalan Nasional Madani is a State-Owned Enterprise (BUMN), so members of the Board of Directors, Board of Commissioners and structural officers are categorized as State Administrators and are bound to be obliged to report and announce their assets when they first take office, reappoint and retire or end their position as PN based on Law Number 28 of 1999 concerning the Implementation of a State that is Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism.

In its implementation, the stipulation on the mandatory LHKPN report in SOEs was submitted to the Directors of each SOEs in accordance with the Instruction of the State Minister for State-Owned Enterprises Number INS-02/MBU/2007 dated September 21, 2007 concerning State Administrators Obligated to Submit Asset Reports of State Administrators in the Environment State-owned enterprises.

Sesuai dengan Instruksi Menteri tersebut di atas, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani menetapkan Surat Keputusan tentang kewajiban penyampaian LHKPN di PT PNM (Persero) yaitu SK 7069 PNM DIR IX 2018 tentang Ketentuan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara PT PNM (Persero).

Selama tahun 2021, dengan tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN sebesar 100%.

Buyback Saham dan Buyback Obligasi

Selama tahun 2021 tidak terdapat *buyback* saham dan *buyback* obligasi.

Rencana Strategis Perusahaan

PNM selaku perusahaan yang berperan aktif dalam pemberdayaan para pelaku UMKM dan pemberdayaan kepada kelompok perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro yang diikuti dengan pendampingan serta pelatihan kepada para nasabah, PNM memfokuskan diri sebagai lembaga keuangan dan jasa manajemen dengan program kerja dan kegiatan yang menitik beratkan pada **"Optimalisasi Pemberdayaan Usaha Mikro dan Ultra Mikro Berkesinambungan Bersama Holding Ultra Mikro"** dalam rangka mendukung Pemerintah mengakselerasi stabilisasi pertumbuhan ekonomi nasional pasca COVID-19.

Hal ini bertujuan sebagai upaya bahwa strategi yang dijalankan oleh PNM merupakan rangkaian kegiatan yang berkesinambungan dalam pemberdayaan UMKM dan sebagai pondasi yang kuat dalam rangka transformasi model bisnis guna menciptakan nilai tambah ekonomi dan sosial bagi Indonesia dengan tetap menjaga prinsip tata kelola yang baik, manajemen risiko yang terkendali dan pengelolaan serta penciptaan sumber daya manusia unggul dengan memberi peluang dengan meningkatkan talenta perempuan dan milenial melalui program Top Talenta Perempuan dan Top Talenta Milenial.

PNM akan terus meningkatkan pemberdayaan UMK terutama usaha ultra mikro melalui PNM Mekaar dan ULaMM. PNM menargetkan dapat melayani 12 juta nasabah. Guna memenuhi target tersebut maka berbagai langkah kebijakan akan ditempuh perseroan, di antaranya adalah perluasan jangkauan layanan untuk meningkatkan penetrasi pasar dan peningkatan program pendampingan guna meningkatkan nilai usaha ultra mikro dan UKM serta penguatan sistem teknologi dan informasi pada proses pembiayaan dan operasional.

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

In accordance with the above mentioned Ministerial Instruction, the President Director of PT Permodalan Nasional Madani stipulated a Decree regarding the obligation to submit LHKPN at PT PNM (Persero), namely SK 7069 PNM DIR IX 2018 concerning the Provisions for the PT PNM (Persero) Wealth Report.

Selama tahun 2021, dengan tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN sebesar 100%.

Share Buyback and Bond Buyback

During 2021, there were no share buybacks and bond buybacks

Company Strategic Plan

PNM is a company that plays an active role in empowering MSME actors and empowering groups of underprivileged women ultra micro business actors, followed by mentoring and training for customers. PNM focuses on being a financial institution and management service with work programs and activities that focus on "Optimization of Sustainable Micro and Ultra Micro Business Empowerment with Ultra Micro Holding" to support the Government in accelerating the stabilization of national economic growth after COVID-19.

This is intended as an effort that the strategy implemented by PNM is a series of continuous activities in empowering MSMEs and as a strong foundation in transforming business models to create added economic and social value for Indonesia while maintaining the principles of good governance, sound risk management. Controlled, managed, and made superior human resources by providing opportunities by increasing the talents of women and millennials through the Top Talent Women and Top Talent Millennial programs.

PNM will continue to improve the empowerment of MSEs, especially ultra-micro businesses, through PNM Mekaar and ULaMM. PNM targets to serve 12 million customers. To meet this target, the company will take various policy steps, including expanding the range of services to increase market penetration and growing mentoring programs to increase the value of ultra-micro and SME businesses and strengthen technology and information systems in the financing and operational processes.

Transactions Containing Conflict of Interest

There are no transactions that contain conflicts of interest.

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Application of Guidelines Open Corporate Governance

No.	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspect; Principle; Recommendation	Comply or Explain
A.	Aspek 1 : Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham. Aspect 1 : Public Company Relations with Shareholders in Guaranteeing Shareholder Rights	
A.1.	Prinsip 1 : Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Principle 1 : Increasing the Value of Organizing a General Meeting of Shareholders (GMS).	
A.1.1.	<p>Rekomendasi 1: Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.</p> <p>Penjelasan : Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (<i>one share one vote</i>). Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>). Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci.</p> <p>Perusahaan Terbuka direkomendasikan mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun prosedur pengambilan suara (<i>voting</i>) tersebut harus menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan pemegang saham, dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan <i>electronic voting</i>.</p> <p>Recommendation 1: <i>A Public Company should have a technical method or procedure for voting, both openly and privately, that prioritizes independence and the interests of shareholders.</i></p> <p>Explanation: <i>Each share with voting rights issued had one vote (one share one vote). Shareholders could exercise their voting rights when making decisions, especially in making decisions by voting. However, the decision-making mechanism by means of voting, both openly and privately, had not been regulated in detail.</i></p> <p><i>Public companies were recommended to have voting procedures in making decisions on a GMS agenda. The voting procedure had to maintain the independence or freedom of shareholders. For example, in open voting, it was done by raising hands in accordance with the choice instructions offered by the chairman of the GMS. Meanwhile, closed voting was carried out on decisions that required confidentiality or at the request of shareholders, by using a voting card or by using electronic voting.</i></p>	<p>Perusahaan bukan perusahaan terbuka secara <i>Initial Public Offfeting</i> (IPO) atau menerbitkan saham di Bursa Efek Indonesia namun menerbitkan Medium Term Note (MTM), Obligasi dan Sukuk. Mekanisme penyampain informasi dan dengar pendoaat melalui Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO).</p> <p>Selama Tahun 2021, Perusahaan telah melakukan public expose ataupun kegiatan Rapat Umum Pemegang Obligasi RUPS PT PNM (Persero) Tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021 tanggal 29 Januari 2021.</p> <p>RUPS PT PNM (Persero) Tentang Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020 tanggal 14 April 2021.</p> <p><i>The company was not a publicly listed company with an Initial Public Offfeting (IPO) or issues shares on the Indonesia Stock Exchange but issues Medium Term Notes (MTM), Bonds and Sukuk. Mechanism for conveying information and hearing voices through the General Meeting of Bondholders (RUPO).</i></p> <p><i>During 2021, the Company conducted a public expose or the General Meeting of Bondholders of the GMS of PT PNM (Persero) regarding the Ratification of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2021 on January 29, 2021.</i></p> <p><i>GMS of PT PNM (Persero) Concerning the Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2020 dated April 14, 2021.</i></p> <p>Comply</p>

No.	Aspek; Prinsip; Rekomendasi <i>Aspect; Principle; Recommendation</i>	Comply or Explain
A.1.2.	<p>Rekomendasi 2: Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.</p> <p>Penjelasan: Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan, dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS.</p> <p>Recommendation 2: <i>All members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of a Public Company attended the Annual GMS.</i></p> <p>Explanation: <i>The presence of all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of a Public Company was intended so that each member of the Board of Directors and member of the Board of Commissioners could pay attention, explain, and answer directly the problems that occurred or questions raised by shareholders related to the agenda at the GMS.</i></p>	<p>Setiap tahunan Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris menghadiri RUPS tahunan yang dipimpin oleh Pemegang Saham (kuasa Pemegang Saham) dari Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian BUMN.</p> <p>Selama Tahun 2021, Pelaksanaan RUPS telah dilakukan pada tanggal 29 Januari 2021 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021 dan pada tanggal 14 April 2021 tentang Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020</p> <p><i>Every year the entire Board of Directors and Board of Commissioners attended the annual GMS chaired by the Shareholders (Proxy of Shareholders) from the Government represented by the Ministry of SOEs.</i></p> <p><i>During 2021, the GMS was held on January 29, 2021 regarding the Ratification of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2021 and on April 14, 2021 concerning the Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2020</i></p> <p>Comply</p>
A.1.3.	<p>Rekomendasi 3: Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.</p> <p>Penjelasan: Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui Situs Web Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada Situs Web Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di Situs Web dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi tersebut.</p> <p>Recommendation 3: <i>The summary of the minutes of the GMS should be available on the Public Company Website for at least 1 (one) year.</i></p> <p>Explanation: <i>Based on the provisions in Article 34 paragraph (2) of the Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2014 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company, a Public Company was required to make a summary of the minutes of the GMS in Indonesian and foreign languages (at least in English), and announced 2 (two) working days after the GMS was held to the public; one of which was through the Public Company Website. The availability of a summary of the minutes of the GMS on the Public Company Website provided an opportunity for shareholders who were not present to obtain important information in holding the GMS easily and quickly. Therefore, the provision regarding the minimum period for the availability of the summary of the minutes of the GMS on the Website was intended to provide sufficient time for shareholders to obtain such information.</i></p>	<p>Perusahaan telah memuat hasil risalah RUPS pada Laporan Tahunan (<i>Annual Report</i>) yang diupload pada website perusahaan dan dapat diakses oleh masyarakat/stakeholder.</p> <p><i>The company published the minutes of the GMS in the Annual Report which was uploaded on the company's website and could be accessed by the public/stakeholders.</i></p> <p>Comply</p>

No.	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspect; Principle; Recommendation	Comply or Explain
A.2.	Prinsip 2 : Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor. <i>Principle 2 : Improving the Quality of Public Company Communication with Shareholders or Investors.</i>	
A.2.1.	<p>Rekomendasi 4: Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.</p> <p>Penjelasan: Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dimaksudkan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta pelaksanaan tata kelola Perusahaan Terbuka. Disamping itu, pemegang saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perusahaan Terbuka.</p> <p>Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor menunjukkan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut.</p> <p>Recommendation 4: <i>The Public Company had a communication policy with shareholders or investors.</i></p> <p>Explanation: <i>The existence of communication between the Public Company and the shareholders or investors was intended so that the shareholders or investors got a clearer understanding of the information that had been published to the public, such as periodic reports, information disclosure, business conditions or prospects and performance, as well as the implementation of the Public Company's governance. In addition, shareholders or investors could also submit inputs and opinions to the management of the Public Company. The communication policy with shareholders or investors showed the commitment of the Public Company in carrying out communication with shareholders or investors. The policy might include strategies, programs, and timing of communications, as well as guidelines that supported shareholders or investors to participate in these communications.</i></p>	<p>Setiap tahunnya perusahaan rutin melakukan pertemuan dengan investor dan kreditor serta wartawan nasional untuk menyampaikan informasi dan aktivitas perusahaan terkini termasuk isu-isu yang berkembang.</p> <p>Namun selama tahun 2021 ini belum ada pertemuan secara langsung yang juga melibatkan wartawan nasional, sehingga penyampaian informasi dan perkembangan usaha terkini kepada investor maupun kreditor dilakukan melalui laporan triwulan yang terus diperbaharui.</p> <p><i>Every year the company regularly held meetings with investors and creditors as well as national journalists to convey information and the latest company activities, including developing issues.</i></p> <p><i>However, during 2021 there was no direct meeting that also involved national journalists, so that the delivery of information and the latest business developments to investors and creditors was carried out through quarterly reports that were continuously updated.</i></p> <p>Comply</p>
A.2.2.	<p>Rekomendasi 5: Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.</p> <p>Penjelasan: Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua pemegang saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemegang saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Perusahaan Terbuka.</p> <p>Recommendation 5: <i>The Public Company disclosed the Public Company's communication policies with shareholders or investors on the Website.</i></p> <p>Explanation: <i>Disclosure of communication policies was a form of transparency on the commitment of the Public Company in providing equality to all shareholders or investors in the implementation of communications. Disclosure of information also aimed to increase the participation and role of shareholders or investors in the implementation of the Public Company communication program.</i></p>	<p>Dalam rangka keterbukaan informasi publik, Perusahaan mempublikasikan laporan tahunan, laporan keuangan, dan informasi terkait lainnya di dalam situs Web secara berkala. Bagi <i>stakeholders</i> yang menginginkan informasi selain yang terdapat di website Perusahaan bisa melalui <i>website</i> PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi).</p> <p><i>In the context of public information disclosure, the Company published annual reports, financial reports, and other related information on its website periodically. Stakeholders who wanted information other than what had been on the Company's website could go through the PPID (Information and Documentation Management Officer) website.</i></p> <p>Comply</p>

No.	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspect; Principle; Recommendation	Comply or Explain
B.	Aspek 2 : Fungsi dan Peran Dewan Komisaris Aspect 2 : Function and Role of the Board of Commissioners	
B.1.	Prinsip 3 : Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris. Principle 3 : Strengthening the Membership and Composition of the Board of Commissioners	
B.1.1.	<p>Rekomendasi 6: Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.</p> <p>Penjelasan: Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 orang berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda diantara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi dapat mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris.</p> <p>Recommendation 6: <i>The determination of the number of members of the Board of Commissioners took into account the conditions of the Public Company.</i></p> <p>Explanation: <i>The number of members of the Board of Commissioners could affect the effectiveness of the implementation of the duties of the Board of Commissioners. Determination of the number of members of the Board of Commissioners of a Public Company had to refer to the provisions of the applicable laws and regulations, which consisted of at least 2 people based on the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. In addition, it was also necessary to consider the condition of the Public Company which included the characteristics, capacity, and size, as well as the achievement of goals and fulfillment of different business needs among Public Companies. However, the too large number of members of the Board of Commissioners had the potential to interfere with the effectiveness of the implementation of the functions of the Board of Commissioners.</i></p>	<p>Komposisi Dewan Komisaris saat ini terdiri atas 5 orang Komisaris yang salah satunya sebagai Komisaris Utama sesuai dengan Jumlah Direksi perusahaan.</p> <p>Dewan Komisaris terdiri atas 2 orang perwakilan wanita dan 3 orang perwakilan pria.</p> <p>Dewan Komisaris terdiri dari 1 orang sebagai Komisaris Utama, 3 orang Independen dan 1 orang Komisaris.</p> <p><i>The current composition of the Board of Commissioners consisted of 5 Commissioners, one of which was the President Commissioner in accordance with the number of Directors of the company.</i></p> <p><i>The Board of Commissioners consisted of 2 female representatives and 3 male representatives.</i></p> <p><i>The Board of Commissioners consisted of 1 person as President Commissioner, 3 Independents and 1 Commissioner.</i></p> <p>Comply</p>
B.1.2.	<p>Rekomendasi 7: Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.</p> <p>Penjelasan: Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.</p> <p>Recommendation 7: <i>The determination of the composition of the members of the Board of Commissioners took into account the diversity of expertise, knowledge, and experience required.</i></p> <p>Explanation: <i>The composition of the Board of Commissioners was a combination of characteristics, both in terms of the organs of the Board of Commissioners and individual members of the Board of Commissioners, in accordance with the needs of the Public Company. These characteristics could be reflected in the determination of the expertise, knowledge, and experience required in carrying out the supervisory duties and providing advice by the Board of Commissioners of a Public Company. The composition that considered the needs of the Public Company was a positive thing, especially regarding decision making in the context of implementing the supervisory function carried out by considering various broader aspects.</i></p>	<p>Komposisi Dewan Komisaris perusahaan termasuk beragam dengan tingkat pengalaman dan kompetensi sesuai tugas dan fungsi yang dibutuhkan perusahaan dalam menjalankan fungsi pengawasan.</p> <p>Tugas dan fungsi masing-masing Komisaris terbagi atas fungsi hukum, audit, manajemen risiko, bisnis mikro dan ultra mikro/social enterprize.</p> <p><i>The composition of the company's Board of Commissioners included various levels of experience and competence according to the duties and functions required by the company in carrying out its supervisory function.</i></p> <p><i>The duties and functions of each Commissioner were divided into legal, audit, risk management, micro business and ultra micro/social enterprize functions.</i></p> <p>Comply</p>

No.	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspect; Principle; Recommendation	Comply or Explain
B.2.	Prinsip 4 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris. <i>Principle 4 : Improving the Quality of Implementation of the Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners.</i>	
B.2.1.	<p>Rekomendasi 8: Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.</p> <p>Penjelasan: Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegal. <i>Self assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolegal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya <i>self assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan.</p> <p>Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.</p> <p>Recommendation 8: <i>The Board of Commissioners had a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners.</i></p> <p>Explanation: <i>The Board of Commissioners' self-assessment policy was a guideline used as a form of accountability for collegially assessing the performance of the Board of Commissioners. The self-assessment was meant to be carried out by each member to assess the performance of the Board of Commissioners in a collegial manner, and not to assess the individual performance of each member of the Board of Commissioners. With this self-assessment, it was hoped that each member of the Board of Commissioners could contribute to improving the performance of the Board of Commissioners on an ongoing basis.</i></p> <p><i>The policy might include assessment activities carried out along with their aims and objectives, periodic implementation times, and benchmarks or assessment criteria used in accordance with the recommendations given by the nomination and remuneration function of a Public Company, where the existence of this function had been required in the Authority Regulation. Financial Services Number 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee for Issuers or Public Companies.</i></p>	<p>Penilaian atas Kinerja Dewan Komisaris telah diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan BOC Charter sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 006/PNM-KOM/XI/21 tentang Pedoman dan Tata Tertib (BOC Charter) Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani.</p> <p>Dewan Komisaris juga memiliki <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) secara kolegal maupun secara individu yang telah disetujui oleh Pemegang Saham, sebagai sasaran kerja dari Dewan Komisaris.</p> <p><i>Assessment of the performance of the Board of Commissioners had been regulated in the Corporate Governance Guidelines and the BOC Charter in accordance with the Decree of the Board of Commissioners No. 006/PNM-KOM/XI/21 concerning the Guidelines and Orders (BOC Charter) of the Board of Commissioners of PT Permodalan Nasional Madani.</i></p> <p><i>The Board of Commissioners also owned Key Performance Indicators (KPI) collegially and individually that had been approved by the Shareholders, as the work targets of the Board of Commissioners.</i></p> <p>Comply</p>
B.2.2.	<p>Rekomendasi 9: Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.</p> <p>Penjelasan: Pengungkapan kebijakan <i>self assessment</i> atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme check and balance terhadap kinerja Dewan Komisaris.</p> <p>Recommendation 9: <i>The self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners was disclosed through the Public Company Annual Report.</i></p> <p>Explanation: <i>Disclosure of the self-assessment policy on the performance of the Board of Commissioners was carried out not only to fulfill the transparency aspect as a form of accountability for the implementation of its duties, but also to provide confidence, especially to shareholders or investors, on the efforts that needed to be made to improve the performance of the Board of Commissioners. With this disclosure, shareholders or investors knew the mechanism of checks and balances on the performance of the Board of Commissioners.</i></p>	<p>Setiap tahunnya Perusahaan menerbitkan Laporan Tahunan yang disampaikan kepada Pemegang Saham, Regulator (OJK) dan di publikasikan melalui websites perusahaan.</p> <p>Didalam Laporan tahunan juga disajikan tugas dan kegiatan Dewan Komisaris dalam satu tahun terakhir termasuk memberikan penilaian atas kinerja Direksi dan peran Dean Komisaris dalam melakukan pengawasan.</p> <p><i>Every year the Company published an Annual Report submitted to Shareholders, Regulators (FSA) and published through the company's website.</i></p> <p><i>The annual report also presented the duties and activities of the Board of Commissioners in the past year including providing an assessment of the performance of the Board of Directors and the role of the Board of Commissioners in supervising.</i></p> <p>Comply</p>

No.	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspect; Principle; Recommendation	Comply or Explain
B.2.3.	<p>Rekomendasi 10: Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.</p> <p>Penjelasan: Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris.</p> <p>Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</p> <p>Recommendation 10: <i>The Board of Commissioners had a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners if they were involved in financial crimes.</i></p> <p>Explanation: <i>The policy of resigning members of the Board of Commissioners who were involved in financial crimes was a policy that could increase the confidence of stakeholders in a Public Company, so that the integrity of the company would be maintained. This policy was needed to help smooth the legal process and so that the legal process did not interfere with the running of business activities. In addition, from a morality point of view, this policy built an ethical culture within the Public Company. These policies could be included in the Guidelines or Code of Ethics applicable to the Board of Commissioners. Furthermore, what was meant by being involved in a financial crime was the convict status of a member of the Board of Commissioners from the authorized party. The financial crimes referred to were manipulation and various forms of embezzlement in financial service activities as well as the Criminal Action of Money Laundering as referred to in Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering.</i></p>	<p>Perusahaan memiliki BOC Charter sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris No 006/PNM-KOM/XI/21 tentang Pedoman dan Tata Tertib (BOC Charter) Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani, sebagai dasar tata kelola antar organ perusahaan termasuk mengatur Etika jabatan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh Dewan Komisaris.</p> <p>Selain itu Dewan Komisaris juga menandatangani Pakta Integritas sebagai komitmen penegakan Etika jabatan yang sesuai dengan nilai-nilai perusahaan.</p> <p><i>The company had a BOC Charter in accordance with the Decision Letter of the Board of Commissioners No. 006/PNM-KOM/XI/21 regarding the Guidelines and Orders (BOC Charter) of the Board of Commissioners of PT Permodalan Nasional Madani, as the basis for governance between company organs including regulating office ethics and other prohibited matters by the Board of Commissioners.</i></p> <p><i>In addition, the Board of Commissioners also signed an Integrity Pact as a commitment to upholding office ethics in accordance with company values.</i></p> <p>Comply</p>
B.2.4.	<p>Rekomendasi 11: Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.</p> <p>Recommendation 11: <i>The Board of Commissioners or the Committee that carried out the Nomination and Remuneration function shall formulate a succession policy in the nomination process for members of the Board of Directors.</i></p>	<p>Dewan Komisaris telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK-001/PNM-KOM/IV/20, tertanggal 21 April 2020, yang telah diubah melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK-002/PNM-KOM/I/2021, tertanggal 29 Januari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, yang bertugas melakukan proses nominasi untuk suksesi kepemimpinan perusahaan termasuk Direksi dan penentuan remunerasi bagi Direksi.</p> <p><i>The Board of Commissioners established the Nomination and Remuneration Committee based on the Decree of the Board of Commissioners Number SK-001/PNM-KOM/IV/20, dated April 21, 2020, which had been amended through the Decree of the Board of Commissioners Number SK-002/PNM-KOM/I/ 2021, dated January 29, 2021 regarding the Dismissal and Appointment of Members of the Nomination and Remuneration Committee, which was in charge of carrying out the nomination process for the succession of company leadership including the Board of Directors and determining the remuneration for the Board of Directors.</i></p>

No.	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspect; Principle; Recommendation	Comply or Explain
	<p>Penjelasan: Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan.</p> <p>Explanation: Based on the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee for Issuers or Public Companies; the committee carrying out the nomination function had the task of formulating the policies and criteria needed in the nomination process for prospective members of the Board of Directors. One of the policies that could support the nomination process as referred to was the succession policy for members of the Board of Directors. The succession policy aimed to maintain the continuity of the regeneration process or leadership regeneration in the company in order to maintain business sustainability and the company's long-term goals.</p>	<p>Selain itu untuk mendukung tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi juga telah memiliki Piagam (Charter) Komite Nominasi dan Remunerasi.</p> <p><i>In addition to supporting its duties, the Nomination and Remuneration Committee also had a Nomination and Remuneration Committee Charter.</i></p> <p>Comply</p>
C.	<p>Aspek 3 : Fungsi dan Peran Direksi <i>Aspect 3 : Function and Role of Directors</i></p>	
C.1.	<p>Prinsip 5 : Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi. <i>Principle 5 : Strengthening the Membership and Composition of Directors</i></p>	
C.1.1.	<p>Rekomendasi 12: Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.</p> <p>Penjelasan: Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam pengurusan perusahaan, penentuan jumlah Direksi sangat mempengaruhi jalannya kinerja Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Disamping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan Terbuka yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran Perusahaan Terbuka serta bagaimana tercapainya efektivitas pengambilan keputusan Direksi.</p> <p>Recommendation 12: <i>Determination of the number of members of the Board of Directors considers the condition of the Public Company and its effectiveness in decision making.</i></p> <p>Explanation: <i>As a company organ authorized in managing the company, the determination of the number of Directors greatly affected the performance of the Public Company. Thus, the determination of the number of members of the Board of Directors had to be carried out through careful consideration and must refer to the provisions of the applicable laws and regulations, which are based on the Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies at least consists of 2 (two) people. In addition, the determination of the number of Directors had to be based on the need to achieve the aims and objectives of the Public Company and adjusted to the conditions of the Public Company which included the characteristics, capacity, and size of the Public Company as well as how to achieve the effectiveness of the Board of Directors' decision making.</i></p>	<p>Saat ini jumlah Direksi sebanyak 5 orang yang salah satunya berperan sebagai Direktur Utama.</p> <p>Pembagian tugas Direksi terdiri atas 5 Direktorat yang saling terkait dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan ke depan.</p> <p>Setiap Direktorat membawahi Divisi-Divisi yang telah disesuaikan dan dikelompokkan berdasarkan tugas dan fungsi dari masing-masing Direktorat, sehingga setiap Divisi memiliki tugas dan fungsi yang saling melengkapi untuk pencapaian tujuan perusahaan.</p> <p>Saat ini perusahaan memiliki 22 Divisi yang di pimpin oleh kepala Divisi dibantu oleh wakil kepala Divisi dan Kepala Bagian.</p> <p><i>Currently, there were 5 members of the Board of Directors, one of whom acted as the President Director.</i></p> <p><i>The division of duties of the Board of Directors consisted of 5 Directorates which were interrelated and in accordance with the needs of the company in the future.</i></p> <p><i>Each Directorate monitored Divisions that had been adjusted and grouped based on the duties and functions of each Directorate, so that each Division had tasks and functions that complemented each other to achieve company goals.</i></p> <p><i>Currently the company had 22 divisions led by division heads assisted by vice division heads and division heads.</i></p> <p>Comply</p>

No.	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspect; Principle; Recommendation	Comply or Explain
C.1.2.	<p>Rekomendasi 13: Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.</p> <p>Penjelasan: Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolegal.</p> <p>Recommendation 13: <i>Determination of the composition of the members of the Board of Directors takes into account the diversity of expertise, knowledge, and experience required.</i></p> <p>Explanation: <i>Like the Board of Commissioners, the diversity of the composition of the members of the Board of Directors is a combination of desirable characteristics both in terms of organs of the Board of Directors and individual members of the Board of Directors in accordance with the needs of a Public Company. The combination is determined by taking into account the appropriate expertise, knowledge and experience in the division of duties and functions of the Board of Directors in achieving the objectives of the Public Company. Thus, the consideration of the combination of these characteristics will have an impact on the accuracy of the nomination process and the appointment of individual members of the Board of Directors or the Board of Directors collegially.</i></p>	<p>Perusahaan saat ini memiliki komposisi anggota Direksi yang beragam namun sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan pengalaman dan kompetensi yang mumpuni.</p> <p>Saat ini komposisi Direksi juga diisi oleh salah satu Direktur yang memiliki usia yang relatif masih muda atau dibawah 40 tahun, namun memiliki pengalaman dan kompetensi yang memadai.</p> <p><i>The company currently had a diverse composition of members of the Board of Directors but in accordance with their duties and functions based on experience and qualified competence.</i></p> <p><i>Currently the composition of the Board of Directors was also filled by one Director who had a relatively young age or under 40 years, but owned sufficient experience and competence.</i></p> <p>Comply</p>
C.1.3.	<p>Rekomendasi 14: Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.</p> <p>Penjelasan: Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, yang wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan.</p> <p>Recommendation 14: <i>Members of the Board of Directors in charge of accounting or finance have expertise and/or knowledge in accounting.</i></p> <p>Explanation: <i>Financial Statements are reports of management accountability for the management of resources owned by a Public Company, which must be prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards generally accepted in Indonesia and also related OJK regulations, including the laws and regulations in the Capital Market sector. regulates the presentation and disclosure of Public Company Financial Statements. Based on the laws and regulations in the Capital Market sector which regulates the responsibilities of the Board of Directors for the Financial Statements, the Board of Directors is jointly and severally responsible for the Financial Statements, which are signed by the President Director and members of the Board of Directors in charge of accounting or finance.</i></p>	<p>Direksi bertanggung jawab dalam penyajian laporan keuangan dan setiap tutup tahun dilakukan audit kewajaran atas penyajian laporan keuangan oleh Auditor eksternal.</p> <p>Direksi yang membawahi bidang akuntansi dan keuangan melakukan fungsi pengendalian disetiap proses transaksi keuangan sampai transaksi tersebut dibukukan dalam pencatatan keuangan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi dan Keuangan yang senantiasa dievaluasi dan disesuaikan dengan ketentuan PSAK terkini.</p> <p><i>The Board of Directors was responsible for the presentation of financial statements, and at the end of each year a fairness audit was carried out on the presentation of financial statements by an external auditor.</i></p> <p><i>The Board of Directors in charge of accounting and finance carried out the control function in every process of financial transactions until the transactions were recorded in financial records in accordance with Accounting and Financial Policies which were constantly evaluated and adjusted to the latest PSAK provisions.</i></p>

No.	Aspek; Prinsip; Rekomendasi <i>Aspect; Principle; Recommendation</i>	Comply or Explain
	<p>Dengan demikian, pengungkapan dan penyusunan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan akan sangat tergantung pada keahlian, dan/atau pengetahuan Direksi, khususnya anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Adanya kualifikasi keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi yang setidaknya dimiliki anggota Direksi dimaksud dapat memberikan keyakinan atas penyusunan Laporan Keuangan, sehingga Laporan Keuangan tersebut dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi terkait Perusahaan Terbuka dimaksud. Keahlian dan/atau pengetahuan tersebut dapat dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan, dan/atau pengalaman kerja terkait.</p> <p><i>Thus, the disclosure and preparation of financial information presented in the financial statements will greatly depend on the expertise and/or knowledge of the Board of Directors, particularly members of the Board of Directors in charge of accounting or finance. The existence of qualifications of expertise and/or knowledge in the field of accounting which is at least owned by the said member of the Board of Directors can provide confidence in the preparation of the Financial Statements, so that the Financial Statements can be relied upon by the stakeholders as the basis for making economic decisions regarding the Public Company. Such expertise and/or knowledge can be proven by educational background, training certification, and/or related work experience.</i></p>	<p>Direksi yang membawahi bidang akuntansi dan keuangan memiliki kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman yang memadai dalam menjalankan tugas-tugasnya.</p> <p><i>The Board of Directors in charge of accounting and finance had sufficient qualifications and competence as well as experience in carrying out their duties.</i></p> <p>Comply</p>
C.2.	<p>Prinsip 6 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. <i>Principle 6 : Improving the Quality of Performing Duties and Responsibilities of Directors.</i></p>	
C.2.1.	<p>Rekomendasi 15: Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.</p> <p>Penjelasan: Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolegal. <i>Self assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya <i>self assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan.</p> <p>Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.</p> <p>Recommendation 15: <i>The Board of Directors has a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors.</i></p> <p>Explanation: <i>As with the Board of Commissioners, the Board of Directors' self-assessment policy is a guideline used as a form of accountability for the collegiate assessment of the Board of Directors' performance. The self-assessment is meant to be carried out by each member of the Board of Directors to assess the performance of the Board of Directors collegially, and not to assess the individual performance of each member of the Board of Directors. With this self-assessment, it is hoped that each member of the Board of Directors can contribute to improving the performance of the Board of Directors on an ongoing basis.</i></p> <p><i>The policy may include assessment activities carried out along with their aims and objectives, periodical implementation time, and benchmarks or assessment criteria used in accordance with the recommendations given by the nomination and remuneration function of a Public Company, where the establishment of this function has been required in the Authority Regulation. Financial Services Number 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee for Issuers or Public Companies.</i></p>	<p>Setiap triwulan Direksi menerbitkan laporan kinerja perusahaan dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.</p> <p>Kebijakan penilaian kinerja Direksi sesuai dengan Pedoman tata kelola perusahaan dan Board Manual.</p> <p>Pelaporan atas Kinerja Direksi sesuai dengan Key Performance Indicator (KPI) yang telah disetujui oleh Pemegang Saham dan Komisaris. Penilaian Direksi dilakukan secara Kolegal dan Individual.</p> <p><i>Every quarter, the Board of Directors issued a company performance report and reports it to the Board of Commissioners and Shareholders.</i></p> <p><i>The performance appraisal policy for the Board of Directors was in accordance with the Corporate Governance Guidelines and the Board Manual.</i></p> <p><i>Reporting on the performance of the Board of Directors was in accordance with the Key Performance Indicator (KPI) that had been approved by the Shareholders and the Board of Commissioners. The Board of Directors' assessment was carried out collegially and individually.</i></p> <p>Comply</p>

No.	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspect; Principle; Recommendation	Comply or Explain
C.2.2.	<p>Rekomendasi 16: Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.</p> <p>Penjelasan: Pengungkapan kebijakan <i>self assessment</i> atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan Perusahaan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme check and balance terhadap kinerja Direksi.</p> <p>Recommendation 16: <i>Self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors is disclosed through the annual report of the Public Company.</i></p> <p>Explanation: <i>Disclosure of the self-assessment policy on the performance of the Board of Directors is carried out not only to fulfill the transparency aspect as a form of accountability for the implementation of their duties, but also to provide important information on efforts to improve the management of the Public Company. This information is very useful to provide confidence to shareholders or investors that there is certainty that the management of the company will continue to be carried out in a better direction. With this disclosure, shareholders or investors know the mechanism of checks and balances on the performance of the Board of Directors.</i></p>	<p>Setiap tahunnya Direksi menerbitkan Laporan Tahunan yang disampaikan kepada Pemegang Saham, Regulator (OJK) dan di publikasikan melalui websites perusahaan.</p> <p><i>Each year the Board of Directors published an Annual Report which was submitted to Shareholders, Regulators (FSA) and published on the company's website.</i></p> <p>Comply</p>
C.2.3.	<p>Rekomendasi 17: Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.</p> <p>Penjelasan: Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi.</p> <p>Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Direksi dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</p> <p>Recommendation 17: <i>The Board of Directors has a policy regarding the resignation of members of the Board of Directors if they are involved in a financial crime.</i></p> <p>Explanation: <i>The policy for the resignation of members of the Board of Directors who are involved in financial crimes is a policy that can increase the confidence of stakeholders in a Public Company, so that the integrity of the company will be maintained. This policy is needed to help smooth the legal process and so that the legal process does not interfere with the running of business activities. In addition, from a morality point of view, this policy will build an ethical culture within the Public Company. These policies can be included in the Guidelines or Code of Ethics applicable to the Board of Directors.</i></p> <p><i>Furthermore, what is meant by being involved in a financial crime is the convict status of a member of the Board of Directors from the authorized party. The financial crimes referred to are manipulation and various forms of embezzlement in financial service activities as well as the Criminal Action of Money Laundering as referred to in Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering.</i></p>	<p>Perusahaan memiliki Board Manual sebagai dasar tata kelola antar organ perusahaan termasuk mengatur Etika jabatan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh Direksi.</p> <p>Selain itu Direksi juga menandatangani Pakta Integritas sebagai komitmen penegakan Etika jabatan yang sesuai dengan nilai-nilai perusahaan.</p> <p><i>Companies had a Board Manual as the basis for governance between company organs including regulating job ethics and things that were prohibited from being done by the Board of Directors.</i></p> <p><i>In addition, the Board of Directors also signed the Integrity Pact as a commitment to upholding ethics in accordance with company values.</i></p> <p>Comply</p>

No.	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspect; Principle; Recommendation	Comply or Explain
D.	Aspek 4 : Partisipasi Pemangku Kepentingan Aspect 4 : Stakeholder Participation	
D.1.	Prinsip 7 : Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan. Principle 7 : Enhancing Corporate Governance Aspects through Stakeholder Participatio	
D.1.1.	<p>Rekomendasi 18: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading.</p> <p>Penjelasan: Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya insider trading tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien.</p> <p>Recommendation 18: <i>Public Company has a policy to prevent insider trading.</i></p> <p>Explanation: <i>A person who has inside information is prohibited from conducting a Securities transaction using inside information as referred to in the Capital Market Law. Public companies can minimize the occurrence of insider trading through preventive policies, for example by strictly separating confidential data and/or information from those of a public nature, as well as dividing duties and responsibilities for the management of the information in a proportional and efficient manner.</i></p>	<p>Perusahaan tidak menerbitkan Saham pada Pasar Modal, karena perusahaan merupakan BUMN yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah.</p> <p><i>The company did not issue shares on the capital market, because the company was a state-owned company of which shares were owned by the government.</i></p> <p>Comply</p>
D.1.2.	<p>Rekomendasi 19: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti <i>fraud</i>.</p> <p>Penjelasan: Kebijakan anti korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara legal, prudent, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (<i>kickbacks</i>), <i>fraud</i>, suap dan/atau gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain.</p> <p>Recommendation 19: <i>Public companies have anti-corruption and anti-fraud policies.</i></p> <p>Explanation: <i>The anti-corruption policy is useful to ensure that the business activities of the Public Company are carried out legally, prudently, and in accordance with the principles of good governance. The policy can be part of the code of ethics, or in a separate form. The policy may include, among others, the programs and procedures carried out in overcoming the practice of corruption, kickbacks, fraud, bribery and/or gratuities in a Public Company. The scope of the policy must describe the prevention of the Public Company against all corrupt practices, both giving and receiving from other parties.</i></p>	<p>Perusahaan memiliki Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud yang disahkan melalui Surat mekanisme pemberian Sanksi melalui hasil investigasi atas pelanggaran yang ditetapkan melalui Komite Penanganan Pelanggaran. Adapun jenis-jenis sanksi yang diberikan berupa Surat Teguran, Surat Peringatan ke 1, ke 2 dan ke 3 serta pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai dengan ketentuan Sanksi pada Peraturan Perusahaan.</p> <p><i>The Company owned Guidelines for the Implementation of Anti-Fraud Strategies ratified through a letter of sanctions mechanism through the results of investigations of violations determined through the Violation Handling Committee. The types of sanctions given were in the form of warning letters, 1st, 2nd and 3rd warning letters and termination of employment (PHK) in accordance with the provisions of Sanctions in the Company Regulations.</i></p> <p>Comply</p>

No.	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspect; Principle; Recommendation	Comply or Explain
D.1.3.	<p>Rekomendasi 20: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.</p> <p>Penjelasan: Kebijakan tentang seleksi pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan (<i>supply chain</i>) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau vendor dalam memasok/memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan mempengaruhi kualitas output perusahaan.</p> <p>Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Perusahaan Terbuka. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau vendor, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau vendor, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau vendor.</p> <p>Perusahaan memiliki kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa yang berisi tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor yang tertuang dalam standar Pedoman Procurement.</p> <p>Recommendation 20: <i>The Public Company has a policy regarding the selection and capacity building of suppliers or vendors.</i></p> <p>Explanation: <i>The policy regarding the selection of suppliers or vendors is useful to ensure that the Public Company obtains the goods or services needed at competitive prices and of good quality. Meanwhile, the policy of increasing the ability of suppliers or vendors is useful to ensure that the supply chain runs efficiently and effectively. The ability of suppliers or vendors to supply/fulfill the goods or services needed by the company will affect the quality of the company's output.</i></p> <p><i>Thus, the implementation of these policies can ensure continuity of supply, both in terms of quantity and quality required by the Public Company. The scope of this policy includes criteria for selecting suppliers or vendors, transparent procurement mechanisms, efforts to increase the capacity of suppliers or vendors, and fulfillment of rights related to suppliers or vendors.</i></p> <p><i>The company has a policy related to the procurement of goods and services which contains the selection and improvement of supplier or vendor capabilities as stated in the standard Procurement Guidelines.</i></p>	<p>Perusahaan memiliki Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Surat Keputusan Direksi No SK-009/PNM-DIR/III/20 yang telah mengatur mengenai mekanisme seleksi pemasok/vendor dan jenis-jenis pengadaannya.</p> <p><i>The company had a Policy for the Procurement of Goods and Services through the Decree of the Board of Directors No SK-009/PNM-DIR/III/20 which regulated the mechanism for selecting suppliers/vendors and the types of procurement.</i></p> <p>Comply</p>
D.1.4.	<p>Rekomendasi 21: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.</p> <p>Penjelasan: Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur.</p> <p>Recommendation 21: <i>Public Company has a policy regarding the fulfillment of creditor's rights.</i></p> <p>Explanation: <i>The policy regarding the fulfillment of creditor's rights is used as a guideline in making loans to creditors. The purpose of the policy is to maintain the fulfillment of rights and maintain creditor's trust in the Public Company. The policy includes considerations in entering into agreements, as well as follow-up actions in fulfilling the obligations of the Public Company to creditors.</i></p>	<p>Perusahaan telah memiliki Kebijakan Perlindungan Konsumen sesuai Surat Keputusan Direksi No SK-031/PNM-DIR/XII/18 dimana kebijakan tersebut juga mengatur hak-hak kreditur, selain itu hak-hak kreditur juga diatur dalam perjanjian kerjasama pembiayaan termasuk hak dan kewajiban para pihak.</p> <p><i>The company already had a Consumer Protection Policy by Decision Letter of the Board of Directors No SK-031/PNM-DIR/XII/18 where the policy also regulated the rights of creditors, besides that the rights of creditors were also regulated in the financing cooperation agreement including the rights and obligations of the parties.</i></p> <p>Comply</p>

No.	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspect; Principle; Recommendation	Comply or Explain
D.1.5.	<p>Rekomendasi 22: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i>.</p> <p>Penjelasan: Kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Perusahaan Terbuka. Penerapan kebijakan sistem tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem <i>whistleblowing</i>, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan.</p> <p>Recommendation 22: <i>Public Company has a whistleblowing system policy.</i></p> <p>Explanation: <i>A whistleblowing system policy that has been well prepared will provide certainty of protection to witnesses or reporters on an indication of a violation committed by the employees or management of the Public Company. The implementation of the system policy will have an impact on the formation of a good corporate governance culture. The whistleblowing system policy covers, among other things, the types of violations that can be reported through the whistleblowing system, the method of complaints, protection and assurance of the confidentiality of the reporter, handling of complaints, the party managing complaints, and the results of handling and following up on complaints.</i></p>	<p>Perusahaan telah memiliki kebijakan <i>Whistleblowing System</i> (WBS) melalui Surat Keputusan Direksi No SK-022/PNM-DIR/III/15.</p> <p>Sistem WBS diterapkan melalui 3 saluran utama yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui <i>email</i> ke antifraud@ymail.com 2. SMS ke nomor 082112345555 3. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Direksi up Divisi Satuan Pengawas Internal <p><i>The company owned a Whistleblowing System (WBS) policy through Decree of the Board of Directors No SK-022/PNM-DIR/III/15.</i></p> <p><i>The WBS system was implemented through 3 main channels, namely:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. By e-mail to antifraud@ymail.com 2. SMS to number 082112345555 3. Submitting an official letter addressed to the Board of Directors and the Internal Supervisory Unit Division <p>Comply</p>
D.1.6.	<p>Rekomendasi 23: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.</p> <p>Penjelasan: Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang perusahaan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka panjang perusahaan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk meningkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang.</p> <p>Adanya suatu kebijakan insentif jangka panjang merupakan komitmen nyata Perusahaan Terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Perusahaan Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup antara lain maksud dan tujuan pemberian insentif jangka panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, dan kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh Perusahaan Terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Perusahaan Terbuka yang ada.</p> <p>Recommendation 23: <i>Public companies have a policy of providing long-term incentives to the Board of Directors and employees.</i></p> <p>Explanation: <i>Long-term incentives are incentives based on the achievement of long-term performance. Long-term incentive plans have the premise that the company's long-term performance is reflected by the growth in the value of the stock or other long-term targets of the company. Long-term incentives are useful in order to maintain loyalty and provide motivation to the Board of Directors and employees to increase their performance or productivity which will have an impact on increasing the company's performance in the long term.</i></p> <p><i>The existence of a long-term incentive policy is a real commitment of the Public Company to encourage the implementation of providing long-term incentives to the Board of Directors and Employees with terms, procedures and forms that are adapted to the long-term objectives of the Public Company. The policy may include, among others, the intent and purpose of providing long-term incentives, terms and procedures in providing incentives, and conditions and risks that must be considered by the Public Company in providing incentives. This policy can also be included in the existing Public Company remuneration policy.</i></p>	<p>Perusahaan telah memiliki Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Hari Tua untuk Direksi dan Karyawan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.</p> <p>BPJS bagi anggota Direksi maupun Dewan Komisaris mendapatkan asuransi purna jabatan, sebagaimana tercantum pada SE-8/MBU/06/2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Badan Usaha Milik Negara.</p> <p><i>The company already had Work Accident Insurance and Old Age Security for Directors and Employees through the Social Security Administering Agency (BPJS) for Employment.</i></p> <p><i>BPJS for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners received post-employment insurance, as stated in SE-8/MBU/06/2021 concerning Optimizing the Implementation of the Employment Social Security Program in State-Owned Enterprises.</i></p> <p>Comply</p>

No.	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspect; Principle; Recommendation	Comply or Explain
E.	Aspek 5 : Keterbukaan Informasi Aspect 5 : Information Disclosure	
E.1.	Prinsip 8 : Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi. Principle 8 : Improving Implementation of Information Disclosure	
E.1.1.	<p>Rekomendasi 24: Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.</p> <p>Penjelasan: Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi perusahaan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap memperhatikan manfaat dan biaya perusahaan.</p> <p>Recommendation 24: Public companies utilize the use of information technology more broadly in addition to the Website as a medium for information disclosure.</p> <p>Explanation: The use of information technology can be useful as a medium for information disclosure. The disclosure of information that is carried out is not only information disclosure that has been regulated in laws and regulations, but also other information related to a Public Company that is felt to be useful for shareholders or investors to know. With the use of information technology more broadly in addition to the Website, it is hoped that the company can increase the effectiveness of disseminating company information. Nevertheless, the use of information technology is carried out with due regard to the benefits and costs of the company.</p>	<p>Perusahaan telah memiliki website resmi melalui www.pnm.co.id, pemutahiran websites ini dilakukan secara periodik dan merupakan tanggungjawab Sekretariat perusahaan.</p> <p>Selain itu perusahaan juga memiliki media sosial melalui Twitters, Facebook dan instagram.</p> <p><i>The company already had an official website through www.pnm.co.id. This website was updated periodically and was the responsibility of the Corporate Secretary.</i></p> <p><i>In addition, the company also had social media through Twitters, Facebook and Instagram.</i></p> <p>Comply</p>
E.1.2.	<p>Rekomendasi 25: Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.</p> <p>Penjelasan: Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Perusahaan Terbuka telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka, serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan pengendali.</p> <p>Recommendation 25: The Public Company Annual Report discloses the ultimate beneficial owner in the Public Company's share ownership at least 5% (five percent), in addition to the disclosure of the final beneficial owner in the Public Company's share ownership through the major and controlling shareholders.</p> <p>Explanation: The laws and regulations in the Capital Market sector which regulate the submission of the annual report of a Public Company have regulated the obligation to disclose information regarding shareholders who own 5% (five percent) or more of the shares of a Public Company, as well as the obligation to disclose information regarding the main and controlling shareholders. Public Company, either directly or indirectly, up to the ultimate beneficial owner in the ownership of the shares. In this Governance Manual, it is recommended to disclose the ultimate beneficial owner of share ownership in a Public Company of at least 5% (five percent), in addition to disclosing the ultimate beneficial owner of share ownership by the major and controlling shareholders.</p>	<p>Saham Perusahaan saat masih dimiliki oleh Bank BRI.</p> <p>Saham Perusahaan belum dimiliki oleh masyarakat karena perusahaan belum melakukan IPO.</p> <p><i>The Company's shares were currently owned by Bank BRI.</i></p> <p><i>The Company's shares were not yet owned by the public because the company did not conduct an IPO.</i></p> <p>Comply</p>

Good Corporate Governance Assessment

Good Corporate Governance Assessment

Kriteria Penilaian

Parameter penilaian GCG yang digunakan merujuk kepada Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-16/MBU/2012. Penilaian dilakukan terhadap 6 (enam) aspek, meliputi:

1. Komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan
2. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal
3. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
4. Direksi
5. Pengungkapan informasi dan transparansi
6. Aspek lainnya

Pihak yang Melakukan Assessment

Pada tahun 2021, Perseroan telah melaksanakan GCG Assessment untuk tahun buku 2020. Penilaian GCG Assessment dilakukan secara *self assessment*.

Skor Penilaian

Skor penilaian GCG Assessment selama tahun buku 2015 – 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel Hasil GCG Assessment

Table of GCG Assessment Results

Tahun Buku Assessment GCG GCG Assessment Book Year	Skor GCG Assessment GCG Assessment Score	Kategori Category	Pelaksana Executor
2021	91,180	Sangat Baik Very Good	Internal
2020	84,4	Baik Well	BPKP
2019	88,100	Sangat Baik Very good	Internal
2018	82,816	Baik Well	BPKP
2017	86,480	Sangat Baik Very good	Internal
2016	81,780	Baik Well	BPKP
2015	88,370	Sangat Baik Very good	Internal

Assessment Criteria

The GCG assessment parameters used refer to the Decree of the Minister of SOEs Number SK-16/MBU/2012. The assessment was carried out on 6 (six) aspects, including:

1. Commitment to the implementation of good corporate governance in a sustainable manner
2. Shareholders and GMS/Owners of Capital
3. Board of Commissioners/Board of Trustees
4. Directors
5. Information disclosure and transparency
6. Other aspects

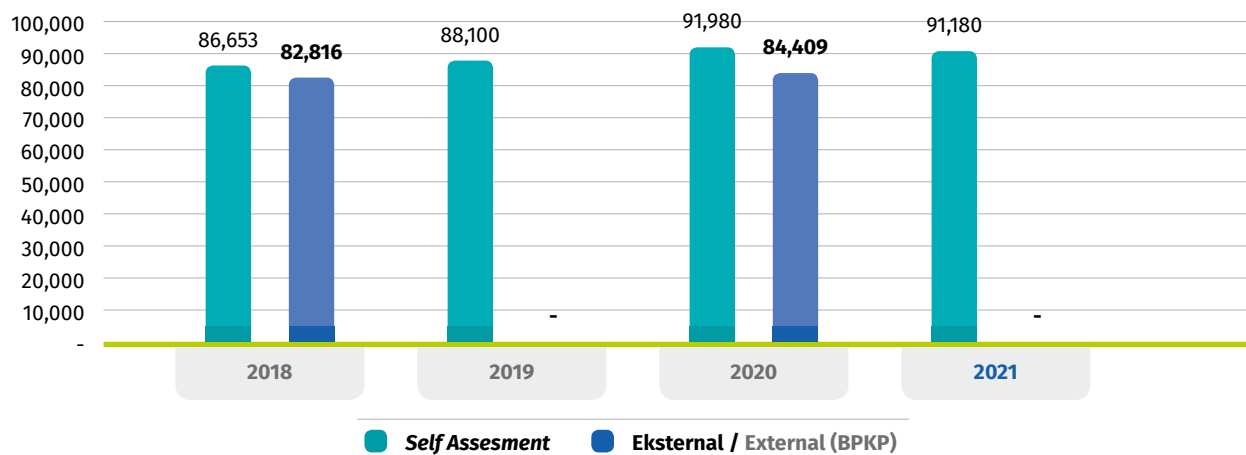
The Parties Who Give Assessment

In 2021, the Company carried out a GCG Assessment for the 2020 financial year. GCG Assessment was carried out by means of a *self-assessment*.

Assessment Score

The GCG Assessment score for the 2015 - 2021 financial year is as follows.

Pencapaian Skor GCG / GCG Score Achievement



Hasil GCG Assessment untuk tahun buku 2020 – 2021 adalah sebagai berikut.

The results of the GCG Assessment for the financial year 2020 – 2021 are as follows.

Aspek Pengujian/ Indikator/Parameter Aspects of Testing/ Indicators/Parameter	Bobot Weight	Skor Assessment 2020 Assessment Score 2020			Skor Assessment 2021 Assessment Score 2021		
		Nilai Value	Capaian Achievements %	Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG Application Quality Classification GCG	Nilai Value	Capaian Achievements %	Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG Application Quality Classification GCG
Komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan <i>Commitment to the implementation of good corporate governance sustainable</i>	7.000	6,487	92,271	Sangat Baik <i>Very Good</i>	6,70	95,66	Sangat Baik <i>Very Good</i>
Pemegang Saham dan RUPS/ Pemilik Modal <i>Shareholders and GMS Owners Capital</i>	9.000	7,818	86,867	Sangat Baik <i>Very Good</i>	8,81	96,88	Sangat Baik <i>Very Good</i>
Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas <i>Board of Commissioners/ Supervisory Board</i>	35.000	32,198	92,000	Sangat Baik <i>Very Good</i>	34,78	97,43	Sangat Baik <i>Very Good</i>
Direksi <i>Directors</i>	35.000	30,964	88,468	Sangat Baik <i>Very Good</i>	34,78	95,79	Sangat Baik <i>Very Good</i>
Pengungkapan informasi dan Transparansi <i>Disclosure of information and Transparency</i>	9.000	6,942	77,133	Baik <i>Good</i>	8,97	90,44	Sangat Baik <i>Very Good</i>
Aspek lainnya <i>Other aspects</i>	5.000	-	-	-	-	-	-
Total Skor Total Score	100.000	84.409	84.409	Baik Good	91,18		Sangat Baik Very Good

Rekomendasi dan Tindak Lanjutnya

Rekomendasi dan tindak lanjut atas penilaian GCG tahun buku 2020 adalah sebagai berikut.

Recommendations and Follow-Up

Recommendations and follow-ups for the 2020 financial year GCG assessment are as follows.

No	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut Follow-Up
1	Menambahkan ke dalam pedoman perilaku, muatan mengenai integritas laporan keuangan dan etika Perusahaan terhadap kreditor. <i>Adding to the code of conduct, content regarding the integrity of the financial statements and the Company's ethics towards creditors.</i>	Penambahan pada pedoman perilaku perihal integritas laporan keuangan dan etika Perusahaan terhadap kreditor. <i>Addition to the code of conduct regarding the integrity of financial statements and the Company's ethics towards creditors.</i>
2	Menambahkan ke dalam Laporan Tahunan muatan, uraian hasil <i>assessment</i> terkait AOI dan rekomendasinya, serta uraian setiap aspek tata kelola <i>Adding content to the Annual Report, a description of the results of the assessment related to AOI and its recommendations, as well as a description of every aspect of governance</i>	Penambahan uraian <i>assessment</i> GCG, AOI dan tindak lanjutnya dalam AR. <i>Adding description of GCG assessment, AOI and follow-up in AR.</i>
3	Melakukan sosialisasi Saluran Layanan pengaduan berikut kriteria yang dipersyaratkan kepada <i>stakeholders</i> dan karyawan perusahaan dengan lebih efektif. <i>Conducting more effective socialization of the complaint service channel along with the required criteria to stakeholders and company employees.</i>	1. Membuat rekap dari hasil sosialisasi <i>whistle blowing</i> . 2. Materi sosialisasi WBS terdapat kriteria yang di Persyaratkan yang wajib dipenuhi dalam melakukan pengaduan melalui <i>whistle blowing</i> 1. <i>Making a recap of the results of the whistle blowing socialization.</i> 2. <i>The WBS socialization material contained the required criteria that had to be met in making a complaint through whistle blowing</i>
4	Memberikan atau memperlihatkan dokumen proses penilaian calon anggota Direksi kepada tim asesor GCG. <i>Providing or showing documents for the assessment process for prospective members of the Board of Directors to the GCG assessor team.</i>	Membuat surat pada pemegang saham perihal rekomendasi asesor BPKP. <i>Making letters to shareholders regarding recommendations for BPKP assessors.</i>
5	Memberi alasan pemberhentian Direksi/Komisaris sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. <i>Giving reasons for the dismissal of the Board of Directors/Commissioners in accordance with the established regulations.</i>	Membuat surat pada pemegang saham perihal rekomendasi asesor BPKP. <i>Making letters to shareholders regarding recommendations for BPKP assessors.</i>
6	Memberi keputusan/pengesahan atas RJPP 2020-2024 yang diajukan. <i>Giving a decision/ratification of the proposed 2020-2024 RJPP.</i>	Membuat surat pada pemegang saham perihal rekomendasi asesor BPKP. <i>Making letters to shareholders regarding recommendations for BPKP assessors.</i>
7	Mengesahkan RKAP secara tepat waktu yaitu sebelum tahun anggaran. <i>Approving the Company Work and Budget Plan in a timely manner, i.e. before the fiscal year.</i>	Membuat surat pada pemegang saham perihal rekomendasi asesor BPKP. <i>Making letters to shareholders regarding recommendations for BPKP assessors.</i>
8	Memberi penilaian kinerja Direksi secara individual. <i>Providing an individual Board of Directors performance appraisal.</i>	Membuat surat pada pemegang saham perihal rekomendasi asesor BPKP. <i>Making letters to shareholders regarding recommendations for BPKP assessors.</i>
9	Melengkapi substansi materi program pengenalan Anggota Dewan Komisaris baru dengan materi pengenalan BUMN. <i>Completing the substance of the program material for introducing new members of the Board of Commissioners with material for introducing SOEs.</i>	Membuat materi program pengenalan Dewan Komisaris mengenai materi pengenalan BUMN <i>Making material for the introduction of the Board of Commissioners regarding the introduction of SOEs</i>
10	Menyusun laporan kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris setiap tahunnya. <i>Preparing reports on training activities carried out by the Board of Commissioners every year.</i>	Penyusunan laporan kegiatan pelatihan yang diikuti oleh Dewan Komisaris dan rekap pelatihannya. <i>Preparation of reports on training activities participated in by the Board of Commissioners and a recap of the training.</i>
11	Memastikan pelaksanaan pengkomunikasian keputusan Dewan Komisaris pada pihak-pihak terkait dilaksanakan dalam waktu 7 hari, sesuai dengan yang tercantum dalam Board Manual. <i>Ensuring that the communication of the decision of the Board of Commissioners to related parties was carried out within 7 days, as stated in the Board Manual.</i>	Membuat memo instruksi dari direksi untuk menindaklanjuti keputusan Dewan Komisaris kepada pihak terkait dalam waktu maksimal 7 hari. <i>Making a memo of instruction from the board of directors to follow up on the decision of the Board of Commissioners to related parties within a maximum of 7 days.</i>
12	Menuangkan dalam telaah atas rancangan RKAP muatan simpulan selaras atau tidaknya rancangan RKAP dengan RJPP. <i>Pouring in a review of the draft RKAP the conclusion is whether or not the Company Work and Budget Plan (RKAP) draft is in line with the Company Long-term Plan (RJPP).</i>	Surat tanggapan komisaris atas keselarasan rancangan RKAP dengan RJPP. <i>The commissioner's response letter on the alignment of the Company Work and Budget Plan draft with the Company Long-term Plan.</i>

No	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut Follow-Up
13	Memasukan dalam risalah rapat mengenai: <i>Including in the minutes of the meeting regarding:</i>	
	a. manajemen karir, mutasi dan demosi. <i>career management, transfers and demotions.</i>	Dalam risalah rapat terdapat pembahasan perihal manajemen karir, mutasi dan demosi. <i>In the minutes of the meeting there were discussions on career management, transfers and demotions.</i>
	b. kepatuhan Direksi terhadap perjanjian dengan pihak ketiga. <i>Board of Directors compliance with agreements with third parties.</i>	Dalam risalah rapat terdapat pembahasan perihal kepatuhan Direksi terhadap perjanjian dengan pihak ketiga. <i>In the minutes of the meeting there was a discussion regarding the compliance of the Board of Directors with agreements with third parties.</i>
	c. Pembahasan hasil Kinerja Dewan Komisaris. <i>Discussion of the results of the performance of the Board of Commissioners.</i>	Dalam risalah rapat terdapat pembahasan perihal Pembahasan hasil Kinerja Dewan Komisaris. <i>In the minutes of the meeting there was a discussion regarding the discussion of the results of the performance of the Board of Commissioners.</i>
14	Memasukan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran tahunan Dewan Komisaris mengenai rencana pengawasan dan pemberian nasihat terhadap: <i>Incorporating into the annual Work Plan and Budget of the Board of Commissioners regarding the plan for supervision and providing advice on:</i>	Terdapat muatan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris mengenai Rencana Pengawasan dan Pemberian Nasihat terhadap: <i>There was a content of the Board of Commissioners' Annual Work Plan and Budget regarding the Supervision Plan and Providing Advisory on:</i>
	a. kebijakan mutu dan pelaksanaan kebijakan tersebut. <i>quality policy and implementation of the policy.</i>	a. kebijakan mutu dan pelaksanaan kebijakan tersebut. <i>quality policy and implementation of the policy.</i>
	b. pelaksanaan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN. <i>implementation of a review of complaints related to SOEs.</i>	b. pelaksanaan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN. <i>implementation of a review of complaints related to SOEs.</i>
	c. telaah atas pengusulan remunerasi Direksi. <i>a review of the proposed remuneration for the Board of Directors.</i>	c. telaah atas pengusulan remunerasi Direksi. <i>a review of the proposed remuneration for the Board of Directors.</i>
15	Menetapkan mekanisme yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap penanganan perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya dalam Board Manual. <i>Establishing the mechanism by which the Board of Commissioners handles changes in the business environment and its problems in the Board Manual</i>	Memperbaharui isi Board Manual perihal mekanisme penanganan perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya. <i>Updating the contents of the Board Manual regarding the mechanism for handling changes in the business environment and its problems.</i>
16	Melakukan penilaian Direksi secara Individual dan melaporkan hasilnya pada pemegang saham. <i>Conducting individual assessments of the Board of Directors and report the results to shareholders.</i>	Membuat penilaian Direksi secara individual. <i>Making an individual Board of Directors assessment.</i>
17	Mencantumkan alasan atas ketidakhadiran Dewan komisaris dalam rapat pada surat kuasa maupun risalah rapat. <i>Including the reasons for the absence of the Board of Commissioners in the meeting on the power of attorney and minutes of the meeting.</i>	Terdapat informasi alasan ketidakhadiran Dewan Komisaris dalam rapat pada surat kuasa maupun risalah rapat. <i>There was information on the reasons for the absence of the Board of Commissioners at the meeting in the power of attorney and minutes of the meeting.</i>
18	Menyusun suatu matrikulasi atau dokumentasi terkait evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya (yang telah ditindaklanjuti dan belum ditindaklanjuti). <i>Preparing a matriculation or documentation related to the evaluation of the implementation of the decisions of the previous meeting (which had been followed up and had not been followed up).</i>	Sekretaris Dewan Komisaris membuat matrikulasi keputusan hasil rapat Dewan Komisaris sebelumnya mengenai hal yang telah ditindaklanjuti dan belum ditindaklanjuti. <i>The Secretary of the Board of Commissioners made a matriculation of the decisions of the previous Board of Commissioners meeting regarding matters that had been followed up and had not been followed up.</i>
19	Dewan Komisaris belum memiliki dokumentasi/alat untuk memantau hasil evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya. <i>The Board of Commissioners did not yet have documentation/tools to monitor the results of the evaluation of the implementation of decisions made from previous meetings.</i>	Melakukan pemantauan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya melalui matrikulasi yang telah dibuat. <i>Monitoring the results of the evaluation of the implementation of decisions made from previous meetings through the matriculation that had been made.</i>
20	Aspek Sekretaris Dewan Komisaris <i>Aspects of Secretary of the Board of Commissioners</i>	
	a. meningkatkan kualitas dalam penyediaan data dan informasi yang diperlukan. <i>improving the quality of providing the necessary data and information.</i>	Membuat surat kepada SekDewan Komisaris perihal rekomendasi asesor BPKP. <i>Writing a letter to the Secretary to the Board of Commissioners regarding recommendations for BPKP assessors.</i>

No	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut Follow-Up
	b. menyediakan data terkait <i>monitoring</i> tindak lanjut hasil keputusan rapat, dan dukungan administrasi. <i>providing data related to monitoring the follow-up to meeting decisions, and administrative support.</i>	Membuat surat kepada SekDewan Komisaris perihal rekomendasi asesor BPKP. <i>Writing a letter to the Secretary to the Board of Commissioners regarding recommendations for BPKP assessors.</i>
	c. menyediakan data terkait <i>monitoring</i> yang berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. <i>providing data related to monitoring related to matters that must be approved by the Board of Commissioners.</i>	Membuat surat kepada SekDewan Komisaris perihal rekomendasi asesor BPKP. <i>Writing a letter to the Secretary to the Board of Commissioners regarding recommendations for BPKP assessors.</i>
	d. membuat buku disposisi surat dan dokumen lainnya sebagai <i>monitoring</i> jejak pengiriman surat dan dokumen lainnya pada pihak terkait. <i>making letter disposition books and other documents as monitoring traces of sending letters and other documents to related parties.</i>	Membuat surat kepada SekDewan Komisaris perihal rekomendasi asesor BPKP. <i>Writing a letter to the Secretary to the Board of Commissioners regarding recommendations for BPKP assessors.</i>
21	Aspek Komite Dewan Komisaris <i>Aspects of the Committee of the Board of Commissioners</i>	
	a. Komite Audit agar menyusun risalah rapat untuk setiap pertemuan dan menyampaikannya risalah rapat asli pada Sekretaris Dewan Komisaris. <i>The Audit Committee was to compile the minutes of meeting for each meeting and submit the original minutes of the meeting to the Secretary of the Board of Commissioners.</i>	Membuat surat kepada Komite Audit perihal rekomendasi asesor BPKP. <i>Writing a letter to the Audit Committee regarding the recommendations of BPKP assessors.</i>
	b. Komite Nominasi dan Remunerasi agar: <i>The Nomination and Remuneration Committee to:</i>	
	1) Menyusun rencana kerja tahunan yang di antaranya memuat rencana rapat. <i>1) Prepare an annual work plan which includes a meeting plan.</i>	Membuat surat kepada Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi perihal rekomendasi asesor BPKP. <i>Writing a letter to the Secretary of the Nomination and Remuneration Committee on the Recommendation for BPKP assessors.</i>
	2) Melaksanakan rapat/pertemuan dan mendokumentasikan hasil rapat tersebut dalam risalah rapat, serta menyampaikan risalah rapat tersebut pada Sekretaris Dewan Komisaris. <i>2) Conduct meetings/meetings and documenting the results of the meeting in the minutes of the meeting, and submitting the minutes of the meeting to the Secretary of the Board of Commissioners.</i>	Membuat surat kepada Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi perihal rekomendasi asesor BPKP. <i>Writing a letter to the Secretary of the Nomination and Remuneration Committee on the Recommendation for BPKP assessors.</i>
	3) Menyusun laporan berkala (triwulanan atau semesteran) atas penugasan yang dilaksanakannya dan menyampaikan laporan tersebut pada Dewan Komisaris. <i>Prepare periodic reports (quarterly or semiannually) on the assignments carried out and submit these reports to the Board of Commissioners.</i>	Membuat surat kepada Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi perihal rekomendasi asesor BPKP. <i>Writing a letter to the Secretary of the Nomination and Remuneration Committee on the Recommendation for BPKP assessors.</i>
22	Menyusun SOP untuk setiap proses pendukung (non operasional) di perusahaan dan mensosialisasikannya kepada pihak terkait. <i>Developing SOPs for each supporting process (non-operational) in the company and socialize it to related parties.</i>	Pembuatan SOP All divisi dan teregister pada sekretariat Sistem Manajemen MRI. <i>Making SOPs for all divisions and registered at the secretariat of the MRI Management System.</i>
23	Melaksanakan SOP yang telah ditetapkan secara konsisten. <i>Implementing SOPs that had been set consistently.</i>	SOP yang telah dibuat, dijalankan dan diperbaharui sesuai kebutuhan. <i>SOPs that had been created, implemented and updated as needed.</i>
24	Menyampaikan secara tepat waktu kepada Dewan Komisaris: <i>Delivering in a timely manner to the Board of Commissioners:</i>	Memo instruksi kepada Kepala Divisi PRA mengenai penyampaian secara tepat waktu kepada Dewan Komisaris atas : <i>Memo of instruction to the Head of the PRA Division regarding timely delivery to the Board of Commissioners of:</i>
	a. rancangan RJPP paling lambat tanggal 30 September sebelum tahun RJPP, dan <i>Company Long-Term Plan (RJPP) draft no later than 30 September before the RJPP year, and</i>	a. rancangan RJPP paling lambat tanggal 30 September sebelum tahun RJPP, dan <i>RJPP draft no later than September 30 before the RJPP year, and</i>
	b. rancangan RKAP paling lambat tanggal 15 September sebelum tahun RKAP. <i>the draft Company Work and Budget Plan (RKAP) no later than September 15 before the RKAP year.</i>	b. rancangan RKAP paling lambat tanggal 15 September sebelum tahun RKAP. <i>the draft RKAP no later than September 15 before the RKAP year.</i>

No	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut Follow-Up
25	Menyampaikan rancangan RKAP secara tepat waktu kepada Pemegang Saham paling lambat tanggal 31 Oktober sebelum tahun RKAP. <i>Submitting the RKAP draft in a timely manner to the Shareholders no later than October 31 prior to the RKAP year.</i>	Memo instruksi kepada Kepala Divisi PRA mengenai penyampaian rancangan RKAP secara tepat waktu kepada Pemegang Saham. <i>Memo of instruction to the Head of the PRA Division regarding timely submission of the draft RKAP to Shareholders</i>
26	Menempatkan karyawan pada seluruh level jabatan sehingga tidak ada jabatan yang kosong. <i>Placing employees at all levels of positions so that there are no vacant positions.</i>	Memo instruksi kepada Kepala Divisi SDM mengenai pemenuhan karyawan pada seluruh level jabatan sehingga tidak ada jabatan yang kosong. <i>Memo of instructions to the Head of the HR Division regarding the fulfillment of employees at all levels of positions so that there are no vacant positions.</i>
27	Melaksanakan penempatan karyawan pada setiap level jabatan dengan seobjektif dan setransparan mungkin. <i>Implementing the placement of employees at every level of position as objectively and transparently as possible.</i>	Memo instruksi kepada Kepala Divisi SDM mengenai penempatan karyawan secara objektif dan transparan pada setiap level jabatan. <i>Memo of instructions to the Head of HR Division regarding the placement of employees in an objective and transparent manner at every level of position.</i>
28	Menyusun dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris: <i>Preparing and submitting to the Board of Commissioners:</i>	
	a. pencapaian kinerja masing-masing Direksi. <i>achievement of the performance of each Board of Directors.</i>	Memo instruksi kepada SPR untuk membuat laporan kinerja masing-masing Direksi berdasarkan laporan dari masing-masing Direktorat. <i>Memo of instructions to SPR to make performance reports of each Board of Directors based on reports from each Directorate.</i>
	b. laporan pelaksanaan IT Master Plan. <i>IT Master Plan implementation report.</i>	Memo instruksi kepada Kepala Divisi TIF memberikan laporan progress pelaksanaan IT Master Plan. <i>Memo of instruction to the Head of the TIF Division provides a progress report on the implementation of the IT Master Plan.</i>
29	Merencanakan pengembangan dan kebutuhan sumber daya manusia TI dan memasukkannya dalam RKAP. <i>Planning the development and needs of IT human resources and including them in the RKAP.</i>	Memo instruksi membuat perencanaan pengembangan dan kebutuhan SDM TI dan termuat dalam RKAP. <i>Memo of instructions for planning the development and needs of IT HR and contained in the RKAP.</i>
30	Mendapatkan kembali sertifikasi atas kebijakan mutu. <i>Regaining certification of the quality policy.</i>	Melakukan persiapan sertifikasi ISO 9001. <i>Preparing for ISO 9001 certification.</i>
31	Memperbaharui Manual Sistem Manajemen. <i>Updating the Management System Manual.</i>	Melakukan pembaharuan Manual Sistem Manajemen. <i>Updating the Management System Manual.</i>
32	Melakukan evaluasi/audit atas pelaksanaan kebijakan mutu secara berkala. <i>Conducting evaluations/audits on the implementation of the quality policy on a regular basis.</i>	Pelaksanaan audit internal atas SMAP <i>Implementation of internal audit on SMAP</i>
33	Menyusun dan menetapkan kebijakan kompensasi serta melaksanakannya bila mutu tidak terpenuhi. <i>Developing and determining compensation policies and implement them if quality is not met.</i>	Kebijakan kompensasi akan dimasukkan dalam revisi pedoman SM. <i>The compensation policy was included in the revised SM guidelines.</i>
34	Mempublikasikan pedoman/kebijakan PBJ sehingga dapat diakses penyedia atau calon penyedia barang/jasa. <i>Publishing PBJ guidelines/policies so that they could be accessed by providers or prospective providers of goods/services.</i>	Update Kebijakan PBJ dan kebijakan Anti Penyuapan di dalam website PNM. <i>Updating PBJ Policy and Anti-Bribery Policy on the PNM website.</i>
35	Melakukan revisi kebijakan PBJ sehingga memuat bahwa nilai total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia bagi calon penyedia barang dan jasa. <i>Revising the PBJ policy so that it contained that the total value of HPS was open and not confidential for prospective providers of goods and services.</i>	Menyampaikan revisi kebijakan PBJ. <i>Submitting revisions to PBJ policies.</i>
36	Menerapkan e-procurement dalam melakukan PBJ. <i>Implementing e-procurement in conducting PBJ.</i>	Menyampaikan progress e-procurement. <i>Delivering e-procurement progress.</i>
37	Melaksanakan lelang jabatan untuk jabatan satu level di bawah Direksi. <i>Carrying out auction of positions for positions one level below the Board of Directors.</i>	Laporan pelaksanaan lelang jabatan satu level di bawah Direksi. <i>Reporting on the auction of positions one level below the Board of Directors.</i>

No	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut Follow-Up
38	Menetapkan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan berdasarkan formula yang ditetapkan dan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku pada PER-04/MBU/2014 dan perubahannya. <i>Determining the remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners of subsidiaries based on the formula determined and did not violate the provisions in force in PER-04/MBU/2014 and its amendments.</i>	Membuat penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan. <i>Determining the remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners of subsidiaries.</i>
39	Menuangkan ke dalam RKAP rencana untuk penanganan risiko, pemantauan dan reviu atas manajemen risiko. <i>Mentioning into the RKAP a plan for risk management, monitoring and review of risk management.</i>	Memo instruksi ke Kepala Divisi PRA dan MRI untuk membuat rencana penanganan risiko, pemantauan dan reviu atas manajemen risiko pada RKAP 2021. <i>Memo of instructions to the Head of the PRA and MRI Divisions to make a risk management plan, monitoring and reviewing risk management in the 2021 Company Work and Budget Plan (RKAP).</i>
40	Menambahkan cara penanganan atas masing-masing risiko ke dalam laporan profil risiko dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham untuk dimintakan persetujuan atas cara penanganan risiko tersebut. <i>Adding the method of handling each risk to the risk profile report and submitting it to the Board of Commissioners and/or Shareholders for approval on how to handle the risk.</i>	Membuat laporan profil risiko secara berkala dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham. <i>Preparing risk profile reports on a regular basis and submitting to the Board of Commissioners and Shareholders.</i>
41	Menyampaikan laporan profil risiko dan laporan pelaksanaan program manajemen risiko kepada Pemegang Saham. <i>Submitting risk profile reports and risk management program implementation reports to Shareholders.</i>	Membuat laporan profil risiko secara berkala dan menyampaikan kepada Pemegang Saham. <i>Preparing risk profile reports on a regular basis and submit to Shareholders.</i>
42	Mengikutsertakan nasabah Mekaar sebagai responden dalam survei kepuasan pelanggan. <i>Including Mekaar customers as respondents in a customer satisfaction survey.</i>	Rencana tindak lanjut survei kepuasan pelanggan untuk nasabah Mekaar tahun 2020. <i>Planning follow-up to a customer satisfaction survey for Mekaar customers in 2020.</i>
43	Menindaklanjuti rekomendasi hasil Survei Kepuasan Pelanggan dengan terlebih dahulu menetapkan rencana tindak lanjut, pihak yang bertanggung jawab, dan pelaporan progres tindak lanjut kepada Direksi. <i>Following up on the recommendations of the results of the Customer Satisfaction Survey by first establishing a follow-up plan, the responsible party, and reporting the progress of the follow-up to the Board of Directors.</i>	Melaporkan hasil survei kepuasan pelanggan dan menyusun rencana tindak lanjut serta menyampaikan kepada Direksi. <i>Reporting the results of the customer satisfaction survey and prepare a follow-up plan and submit it to the Board of Directors.</i>
44	Menyusun dan menetapkan kebijakan mengenai manajemen/pengelolaan penggunaan pinjaman jangka panjang sesuai dengan peruntukannya dan pelunasannya. <i>Developing and establishing policies regarding the management/management of the use of long-term loans in accordance with their designation and repayment.</i>	Membuat kebijakan manajemen/pengelolaan penggunaan pinjaman jangka panjang sesuai dengan peruntukannya dan pelunasannya. <i>Making management policies / management of the use of long-term loans in accordance with their designation and repayment.</i>
45	Menetapkan jenis kebijakan perusahaan yang harus dikomunikasikan kepada karyawan dan jenis kebijakan yang harus melibatkan karyawan dalam perumusannya. <i>Determining the types of company policies that had to be communicated to employees and the types of policies that employees had to involve in their formulation.</i>	Keterlibatan Karyawan dalam pembuatan kebijakan. <i>Employee involvement in policy making.</i>
46	Menetapkan kebijakan mengenai metode penilaian untuk mengukur dan melaksanakan survei kepuasan karyawan. <i>Establishing policies on assessment methods to measure and carrying out employee satisfaction surveys.</i>	Membuat kebijakan untuk menilai dan mengukur pelaksanaan survei kepuasan karyawan. <i>Creating policies to assess and measure the implementation of employee satisfaction surveys.</i>
47	Menindaklanjuti semua hasil survei kepuasan karyawan. <i>Following up on all results of employee satisfaction surveys.</i>	Menelaah dan menindaklanjuti hasil survei kepuasan karyawan. <i>Reviewing and following up on employee satisfaction survey results.</i>
48	Mengadministrasikan seluruh keluhan stakeholders yang telah diterima dan proses penanganannya dengan tertib. <i>Administer all stakeholders' complaints that had been received and the process of handling them in an orderly manner.</i>	Terdapat rekap perihal keluhan stakeholders. <i>There was a recap regarding stakeholder complaints.</i>
49	Menandatangani surat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan antara kepentingan pribadi/keluarga, jabatan lain, atau golongan dengan kepentingan perusahaan pada tiap awal tahun. <i>Signing a statement that there was no conflict of interest between personal/family interests, other positions, or groups with the interests of the company at the beginning of each year.</i>	Membuat pakta integritas Direksi, Dewan Komisaris dan DPS yang ditandatangani setiap awal tahun (2021). <i>Making integrity pacts for the Board of Directors, Board of Commissioners and DPS which are signed at the beginning of every year (2021).</i>

No	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut Follow-Up
50	<p>Menginstruksikan Kepala SPI untuk: <i>Instructing the Head of SPI to:</i></p>	<p>Memo intruksi kepada Kepala SPI untuk: <i>Memo of instructions to the Head of SPI to:</i></p>
	<p>a. mendapatkan sertifikasi <i>Certified Internal Auditor/Qualified Internal Auditor</i>. <i>obtain the Certified Internal Auditor/Qualified Internal Auditor certification.</i></p>	<p>a. mendapatkan sertifikasi <i>Certified Internal Auditor/Qualified Internal Auditor</i>. <i>obtain the Certified Internal Auditor/Qualified Internal Auditor certification.</i></p>
	<p>b. mengikutsertakan staf auditor internal ke dalam pelatihan/ training untuk mendapatkan sertifikasi profesi yang tepat dengan jenjang jabatannya. <i>involve internal auditor staff in training/training to obtain professional certification that is appropriate to the level of position.</i></p>	<p>b. mengikutsertakan staf auditor internal ke dalam pelatihan/ training untuk mendapatkan sertifikasi profesi yang tepat dengan jenjang jabatannya. <i>involve internal auditor staff in training/training to obtain professional certification that is appropriate to the level of position.</i></p>
	<p>c. melaksanakan program pengembangan profesi secara berkelanjutan bagi staf auditor internal. <i>carry out continuous professional development programs for internal auditor staff.</i></p>	<p>c. melaksanakan program pengembangan profesi secara berkelanjutan bagi staf auditor internal. <i>carry out continuous professional development programs for internal auditor staff.</i></p>
	<p>d. melakukan penilaian berkala baik secara internal maupun oleh pihak eksternal atas program jaminan kualitas dan peningkatan Fungsi Audit Internal secara keseluruhan yang mencakup penilaian kepatuhan terhadap internal audit charter, standar dan kode etik, dan reviu untuk mengetahui efisiensi serta efektivitas SPI dalam memenuhi kebutuhan dari berbagai stakeholders. <i>conduct periodic assessments both internally and by external parties on the quality assurance program and improvement of the Internal Audit Function as a whole which includes an assessment of compliance with the internal audit charter, standards and code of ethics, and reviews to determine the efficiency and effectiveness of SPI in meeting the needs of various stakeholders.</i></p>	<p>d. melakukan penilaian berkala baik secara internal maupun oleh pihak eksternal atas program jaminan kualitas dan peningkatan Fungsi Audit Internal secara keseluruhan yang mencakup penilaian kepatuhan terhadap internal audit charter, standar dan kode etik, dan reviu untuk mengetahui efisiensi serta efektivitas SPI dalam memenuhi kebutuhan dari berbagai stakeholders. <i>conduct periodic assessments both internally and by external parties on the quality assurance program and improvement of the Internal Audit Function as a whole which includes an assessment of compliance with the internal audit charter, standards and code of ethics, and reviews to determine the efficiency and effectiveness of SPI in meeting the needs of various stakeholders.</i></p>
51	<p>Menginstruksikan Sekretaris Perusahaan untuk membuat risalah rapat atas semua rapat Direksi dan menambahkan ke dalam risalah rapat yang dibuatnya muatan keputusan rapat sebelumnya dan evaluasi atas hal tersebut. <i>Instructing the Corporate Secretary to prepare minutes of meetings of all Board of Directors meetings and add to the minutes of meetings the contents of the decisions of previous meetings and evaluations of them are made.</i></p>	<p>Memo instruksi ke Sekretariat Perusahaan membuat risalah rapat, tindak lanjut dan evaluasi. <i>Memo of instructions to the Corporate Secretariat to prepare minutes of meetings, follow ups and evaluations.</i></p>
52	<p>Menuangkan ke dalam Risalah RUPS Laporan Tahunan muatan metode perhitungan dan penentuan serta rincian gaji/honorarium, fasilitas dan/atau tunjangan lain bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat. <i>Including into the Minutes of the GMS the Annual Report the method of calculation and determination as well as details of the salary/honorarium, facilities and/or other allowances for each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors who are currently serving.</i></p>	<p>Memo instruksi membuat risalah RUPS yang memuat metode perhitungan dan penentuan serta rincian gaji/honorarium, fasilitas dan/atau tunjangan lain bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat. <i>Memo of instructions for making minutes of the GMS containing the method of calculation and determination as well as details of the salary/honorarium, facilities and/or other allowances for each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors who are currently serving.</i></p>
53	<p>Meningkatkan efektivitas pengelolaan website perusahaan dalam hal relevansi, kemutakhiran, ketepatan waktu, kemudahan akses dan kemudahan download informasi di website. <i>Improving the effectiveness of the company's website management in terms of relevance, updating, timeliness, ease of access and ease of downloading information on the website.</i></p>	<p>Memo Instruksi kepada Kepala SPR untuk melakukan pengelolaan website perusahaan secara relevan, tepat waktu, dan menjaga kemutakhirannya. <i>Memo Instructions to the Head of SPR to manage the company's website in a relevant, timely manner, and keep it up to date.</i></p>
54	<p>Mempublikasikan Majalah PNMagz secara tepat waktu dalam website Perusahaan. <i>Updating information about PKBL in a timely manner on the website of the Ministry of SOEs.</i></p>	<p>Memo Instruksi kepada Kepala SPR untuk Melakukan <i>upload</i> PNMagz secara berkala dan tepat waktu. <i>Memo Instructions to the Head of SPR to update information on PKBL in a timely manner on the website of the Ministry of SOEs.</i></p>
55	<p>Memutakhirkan informasi tentang PKBL secara tepat waktu dalam website Kementerian BUMN. <i>Completing the content of the annual report with:</i></p>	<p>Memo Instruksi kepada Kepala SPR untuk melakukan pemutakhirkan informasi tentang PKBL secara tepat waktu dalam website Kementerian BUMN. <i>Memo of instructions to the Head of SPR and Head of the PRA Division to complete the contents of the annual report with:</i></p>

No	Rekomendasi <i>Recommendation</i>	Tindak Lanjut <i>Follow-Up</i>
56	<p>Melengkapi muatan laporan tahunan dengan: <i>Completing the content of the annual report with:</i></p> <p>a. Nama Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah pada struktur organisasi dalam bentuk bagan, serta memuat alamat Kantor Cabang ULAMM. <i>The names of the Board of Commissioners, Audit Committee, and Sharia Supervisory Board in the organizational structure in the form of a chart, and include the address of the ULAMM Branch Office.</i></p> <p>b. Bahasan mengenai tingkat likuiditas perusahaan dalam Laporan Tahunan. <i>Discussion of the company's liquidity level in the Annual Report.</i></p> <p>c. Pelaporan Komite Audit terkait frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Komite Audit. <i>Reporting to the Audit Committee regarding the frequency of meetings and the level of attendance of the Audit Committee.</i></p> <p>d. Informasi pokok perkara/gugatan dan pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan. <i>Information on the subject matter of the case/lawsuit and its effect on the company's financial condition.</i></p> <p>e. Informasi pembentukan Pusat Pengaduan Konsumen dalam Laporan Tahunan. <i>Information on the establishment of the Consumer Complaint Center in the Annual Report.</i></p>	<p>Memo intruksi kepada Kepala SPR dan Kepala Divisi PRA untuk melengkapi muatan laporan tahunan dengan: <i>Memo of instructions to the Head of SPR and Head of the PRA Division to complete the contents of the annual report with:</i></p> <p>a. Nama Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah pada struktur organisasi dalam bentuk bagan, serta memuat alamat Kantor Cabang ULAMM. <i>The names of the Board of Commissioners, Audit Committee, and Sharia Supervisory Board in the organizational structure in the form of a chart, and include the address of the ULAMM Branch Office.</i></p> <p>b. Bahasan mengenai tingkat likuiditas perusahaan dalam Laporan Tahunan. <i>Discussion of the company's liquidity level in the Annual Report.</i></p> <p>c. Pelaporan Komite Audit terkait frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Komite Audit. <i>Reporting to the Audit Committee regarding the frequency of meetings and the level of attendance of the Audit Committee.</i></p> <p>d. Informasi pokok perkara/gugatan dan pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan. <i>Information on the subject matter of the case/lawsuit and its effect on the company's financial condition.</i></p> <p>e. Informasi pembentukan Pusat Pengaduan Konsumen dalam Laporan Tahunan. <i>Information on the establishment of the Consumer Complaint Center in the Annual Report.</i></p>
57	<p>Berpartisipasi dalam Sustainability Reporting Award dan ajang penghargaan di bidang publikasi dan keterbukaan informasi. <i>Participating in the Sustainability Reporting Award and award events in the field of publication and information disclosure.</i></p>	<p>Memo intruksi kepada Kepala SPR untuk mengikuti award dan ajang penghargaan di bidang publikasi dan keterbukaan informasi. <i>Memo of instructions to the Head of SPR to participate in awards and award events in the field of publication and information disclosure.</i></p>

Praktik *Bad Corporate Governance*

Bad Corporate Governance Practices

Perseroan menyadari bahwa praktik-praktik *bad corporate governance* akan mengganggu sistem Tata Kelola yang baik (GCG) yang telah dibangun oleh Perseroan. Oleh karena itu, selama tahun 2021, Perseroan tidak melakukan segala tindakan serta kebijakan yang berkaitan dengan praktik itu yang ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

The Company realizes that bad corporate governance practices will disrupt the Good Governance (GCG) system that the Company has built. Therefore, in 2021, the Company did not take any actions and policies related to this practice which is shown in the table as follows:

No.	Keterangan Information	Praktik Practice
1.	Adanya laporan sebagai perusahaan yang mencemari lingkungan. <i>There are reports of companies polluting the environment.</i>	Nihil <i>Nil</i>
2.	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan. <i>Important cases being faced by the company, subsidiaries, members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners who are currently serving are not disclosed in the Annual Report.</i>	Nihil <i>Nil</i>
3.	Ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. <i>Non-compliance in fulfilling tax obligations.</i>	Nihil <i>Nil</i>
4.	Ketidaksesuaian penyajian laporan tahunan dan laporan keuangan dengan peraturan yang berlaku dan SAK. <i>Incompatibility of presentation of annual reports and financial statements with applicable regulations and SAK.</i>	Nihil <i>Nil</i>
5.	Kasus terkait buruh dan karyawan. <i>Cases related to labor and employees.</i>	Nihil <i>Nil</i>
6.	Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada perusahaan <i>listed</i> . <i>There is no disclosure of operating segments in listed companies.</i>	Nihil <i>Nil</i>
7.	Terdapat ketidaksesuaian antara LT <i>hardcopy</i> dengan LT <i>softcopy</i> . <i>There is a discrepancy between LT hardcopy and LT softcopy.</i>	Nihil <i>Nil</i>

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Corporate Social and Responsibility





Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perusahaan mendasarkan pada prinsip-prinsip keberlanjutan. Perusahaan senantiasa melakukan evaluasi atas dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan usahanya terhadap sosial dan lingkungan. Perusahaan berkomitmen bahwa kegiatan usahanya memberikan kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan, atau dengan kata lain Perusahaan berkomitmen untuk mengambil peran dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, Perusahaan senantiasa mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dalam setiap kegiatan usahanya.

Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik informasi tanggung jawab sosial perusahaan khususnya terkait tata kelola keberlanjutan, kinerja ekonomi berkelanjutan, kinerja lingkungan berkelanjutan dan kinerja sosial berkelanjutan disampaikan pada Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan.

Dalam Laporan Keberlanjutan telah disampaikan uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai komitmen perusahaan terhadap perlindungan konsumen, uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai “community development program” yang telah dilakukan serta uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama aktivitas lingkungan.

In conducting its business activities, the Company bases on the principles of sustainability. The company always evaluates the impact of its decisions and business activities on social and environmental impacts. The Company is committed that its business activities contribute to sustainable development, or in other words the Company is committed to taking a role in achieving sustainable development goals. Thus, the Company always considers economic, social and environmental aspects in all of its business activities.

In accordance with the Circular Letter of the Financial Services Authority No. 16/SEOJK.04/2021 Regarding the Form and Contents of the Annual Report of Issuers or Public Companies Information on corporate social responsibility, especially related to sustainable governance, sustainable economic performance, sustainable environmental performance and sustainable social performance is submitted in the Sustainability Report which is presented separately from the Annual Report .

In the Sustainability Report, a description of the activities and costs incurred in relation to corporate social responsibility has been provided, especially regarding the company's commitment to consumer protection, a description of the activities and costs incurred related to corporate social responsibility, especially regarding the “community development program” that has been carried out and a description of the activities and costs associated with corporate social responsibility, especially environmental activities.

Referensi OJK, ARA dan SK-16

OJK, ARA and SK-16 Reference

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page	Regulasi Regulation	
UMUM GENERAL				
Laporan tahunan disajikan dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam Bahasa Inggris. <i>The annual report should be presented in good and correct Indonesian, and it is recommended to also present it in English.</i>		✓	ARA	
Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca. <i>The annual report should be printed in good quality and use an easy-to-read type and size.</i>		✓	ARA SK-16	
Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas. <i>The annual report clearly states the company's identity.</i>	Nama perusahaan dan tahun <i>annual report</i> ditampilkan di: 1. Sampul muka. 2. Samping. 3. Sampul belakang. 4. Setiap halaman.	<i>The company name and year of the annual report are displayed on:</i> 1. <i>Front Cover.</i> 2. <i>Side.</i> 3. <i>Back cover.</i> 4. <i>Every page.</i>	ARA SK-16	
Laporan tahunan ditampilkan di <i>website</i> perusahaan. <i>The annual report should be displayed on the company website.</i>		✓	ARA SK-16	
KILAS KINERJA PERFORMANCE HIGHLIGHTS				
Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun. <i>The summary of important financial data contains financial information presented in the form of a comparison for 3 (three) financial years or since starting its business if the Issuer or Public Company has been running its business activities for less than 3 (three) years.</i>	Informasi memuat antara lain:	<i>Information includes:</i>		
	1. Pendapatan/penjualan.	1. <i>Revenue/sales.</i>	20	SEOJK 16 ARA SK-16
	2. Laba bruto.	2. <i>Gross profit.</i>	21	
	3. Laba operasional.	3. <i>Operating profit.</i>	21	SEOJK 9 SK-16
	4. Laba sebelum pajak.	4. <i>Profit before tax.</i>	21	
	5. Laba bersih.	5. <i>Net profit.</i>	21	
	6. Laba (rugi).	6. <i>Profit (loss).</i>	21	SEOJK 16 ARA SK-16
	7. Total laba (rugi) komprehensif.	7. <i>Total comprehensive profit (loss).</i>	21	SEOJK 9
8. Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali.	8. <i>Total profit (loss) attributable to owners of the parent entity and non-controlling interests.</i>	21	SEOJK 16 ARA	

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page	Regulasi Regulation
9. Total laba (rugi) komprehensif.	9. Total comprehensive profit (loss).	21	SEOJK 16
10. Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non Pengendali.	10. Total comprehensive profit (loss) attributable to owners of the parent entity and non-controlling interests.	21	
11. Laba (rugi) per saham.	11. Earnings (loss) per share.	22	SEOJK 9
12. Jumlah aset.	12. Total assets.	19	SEOJK 16 ARA SK-16
13. Investasi pada entitas asosiasi.	13. Investment in associates.	18	
14. Jumlah liabilitas.	14. Total liabilities.	19	
15. Jumlah ekuitas.	15. Total equity.	20	
16. Dana pihak ketiga.	16. Third-party funds.	N/A	SEOJK 9
17. Pinjaman yang diterima.	17. Received Loans.	N/A	
18. Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset.	18. Ratio of profit (loss) to total assets.	23	SEOJK 16
19. Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas.	19. Ratio of profit (loss) to equity.	23	
20. Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan.	20. Ratio of profit (loss) to revenue/sales.	23	
21. Rasio lancar.	21. Current ratio.	23	
22. Rasio liabilitas terhadap ekuitas.	22. Liability to equity ratio.	23	
23. Rasio liabilitas terhadap jumlah aset.	23. The ratio of liabilities to total assets.	23	
24. Rasio KPMM.	24. CAR ratio.	N/A	SEOJK 9
25. Aset produktif.	25. Productive assets.	N/A	
26. Rasio Non-performing Loans (NPL).	26. Ratio of Non-performing Loans (NPL).	N/A	
27. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).	27. Ratio of Operating Expenses to Operating Income (BOPO).	N/A	
28. Cost to Income Ratio (CIR).	28. Cost to Income Ratio (CIR).	N/A	
29. Rasio Net Interest Margin (NIM).	29. Net Interest Margin Ratio (NIM).	N/A	
30. Persentase pelanggaran dan pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).	30. Percentage of violations and exceeding the Maximum Lending Limit (BMPK).	N/A	
31. Rasio Giro Wajib Minimum (GWM).	31. Statutory Reserves Ratio (GWM).	N/A	
32. Rasio Posisi Devisa Neto (PDN).	32. Ratio of Net Open Position (GDP).	N/A	
33. Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan emiten atau perusahaan publik dan jenis industrinya.	33. Other information and financial ratios relevant to the issuer or public company and the type of industry.	23	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK-16
Informasi Saham Stock Information	Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat:	24	SEOJK 16 ARA SK-16
	1. Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat:	N/A	
	a. Jumlah saham yang beredar.	N/A	
	b. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan.	N/A	

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page	Regulasi Regulation
	c. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan.	N/A	
	d. Volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan.	N/A	
	Informasi dalam huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek. Informasi disajikan dalam bentuk grafik dan tabel.		
2.	Dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai:	25	SEOJK 16 ARA
	a. Tanggal pelaksanaan aksi korporasi.	25	
	b. Rasio pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham. c. bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham.	25	
	d. Jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi.	25	
	e. Jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada).	25	
	f. Harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi.	25	
3.	Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) tersebut.	N/A	SEOJK 16
4.	Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/ atau proses pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) tersebut.	N/A	SEOJK 16

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page	Regulasi Regulation
<p>Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir.</p> <p><i>Information on bonds, sukuk or convertible bonds that are still outstanding in the last 2 (two) financial years.</i></p>	<p>Informasi memuat:</p> <p>1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (outstanding).</p> <p>2. Tingkat bunga/imbalan.</p> <p>3. Tanggal jatuh tempo.</p> <p>4. Peringkat obligasi/sukuk tahun 2020 dan 2021.</p> <p>Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki obligasi/sukuk/obligasi konversi, agar diungkapkan.</p>	<p><i>The information consists of:</i></p> <p>1. <i>Number of outstanding bonds/sukuk/convertible bonds.</i></p> <p>2. <i>Interest rate/yield.</i></p> <p>3. <i>Due date.</i></p> <p>4. <i>Bond/sukuk ratings for 2020 and 2021.</i></p> <p>Notes: <i>if the company does not have bonds/sukuk/convertible bonds, it should be disclosed.</i></p>	<p>26-29</p> <p>ARA SK-16</p>
<p>LAPORAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS</p>			
Laporan Direksi <i>Directors' Report</i>	Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	<i>The Board of Directors' report shall at least contain a brief description of:</i>	
	1. Kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	1. <i>Performance of the Issuer or Public Company, at least contains:</i>	
	a. Strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik (termasuk untuk UUS apabila Bank memiliki UUS).	a. <i>Issuer's or Public Company's strategy and strategic policies (including for UUS if the Bank owns UUS).</i>	41-42
	b. Peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik.	b. <i>The role of the Board of Directors in formulating strategies and strategic policies of Issuers or Public Companies.</i>	42
	c. Proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik.	c. <i>The process carried out by the Board of Directors to ensure the implementation of the Issuer's or Public Company's strategy.</i>	42
	d. Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik.	d. <i>Comparison between the results achieved with those targeted by the Issuer or Public Company.</i>	43
	e. Kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik.	e. <i>Constraints faced by Issuers or Public Companies.</i>	43-44
	f. Struktur organisasi.	f. <i>Organizational structure.</i>	N/A
	g. Aktivitas utama.	g. <i>Main activity.</i>	N/A
	h. Teknologi informasi.	h. <i>Information Technology.</i>	N/A
	i. Jenis produk dan jasa yang ditawarkan, termasuk penyaluran kredit kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.	i. <i>Types of products and services offered, including lending to micro, small and medium business debtors.</i>	N/A
	j. Tingkat suku bunga penghimpunan dan penyediaan dana.	j. <i>Interest rates for raising and providing funds.</i>	N/A
	k. Perkembangan perekonomian dan target pasar.	k. <i>Economic development and target market.</i>	N/A
	l. Jaringan kerja dan mitra usaha di dalam dan/atau di luar negeri.	l. <i>Network and business partners at home and/or abroad.</i>	N/A
	m. Jumlah, jenis, dan lokasi kantor.	m. <i>Number, type, and location of offices.</i>	N/A

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page	Regulasi Regulation
	n. Kepemilikan Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham dalam kelompok usaha Bank.	n. <i>Ownership of the Board of Directors, Board of Commissioners and shareholders in the Bank's business group.</i>	N/A
	o. Perubahan-perubahan penting yang terjadi pada Bank dan kelompok usaha Bank dalam tahun yang bersangkutan.	o. <i>Important changes occurring in the Bank and the Bank's business groups in the relevant year.</i>	N/A
	p. Hal-hal penting yang diperkirakan terjadi pada masa mendatang.	p. <i>Important things expected to happen in the future.</i>	N/A
	q. Sumber daya manusia meliputi jumlah, tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia.	q. <i>Human resources include the number, level of education, training, and human resource development.</i>	N/A
	2. Gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik.	2. <i>An overview of the business prospects of the Issuer or Public Company.</i>	44-47
	3. Penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	3. <i>Implementation of the governance of Issuers or Public Companies.</i>	47-56
	4. Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya.	4. <i>Changes in the composition of the members of the Board of Directors (if any) and the reasons for the changes.</i>	57
Laporan Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners Report</i>	Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	<i>The Board of Commissioners' report shall at least contain a brief description of:</i>	
	1. Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi.	1. <i>Assessment of the performance of the Board of Directors regarding the management of Issuers or Public Companies, including supervision of the Board of Commissioners in the formulation and implementation of strategies for Issuers or Public Companies carried out by the Board of Directors.</i>	60-65
	2. Pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi.	2. <i>A view on the business prospects of the Issuer or Public Company prepared by the Board of Directors.</i>	65-66
	3. Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	3. <i>Views on the implementation of the governance of the Issuer or Public Company.</i>	66-69
	4. Pandangan atas penerapan/ pengelolaan <i>Whistleblowing System</i> (WBS) di perusahaan dan peran Dewan Komisaris dalam WBS tersebut	4. <i>Views on the implementation/ management of the Whistleblowing System (WBS) in the company and the role of the Board of Commissioners in the WBS</i>	69
	5. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya.	3. <i>Changes in the composition of the Board of Commissioners (if any) and the reasons for the changes.</i>	70-71
	6. Frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada anggota Direksi.	4. <i>Frequency and method of providing advice to members of the Board of Directors.</i>	60-61
	7. Penilaian kinerja Komite-komite yang berada di bawah pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	7. <i>Performance appraisal of the Committees under the supervision of the Board of Commissioners/ Supervisory Board.</i>	69-70

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page	Regulasi Regulation
<p>Tanda tangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris</p> <p><i>Signatures of members of the Board of Directors and Board of Commissioners</i></p>	<p>Memuat hal-hal sebagai berikut:</p> <p><i>Contains the following:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri. 2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan. 3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya. 4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan. 	72-73	ARA SK-16
PROFIL PERUSAHAAN COMPANY PROFILE			
<p>Nama dan alamat lengkap perusahaan</p> <p><i>Company name and full address</i></p>	<p>Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alamat 2. Nomor telepon 3. Alamat surat elektronik 4. Alamat situs web 	76	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK 16
<p>Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada)</p> <p><i>Name and address of subsidiary and/or branch office or representative office (if any)</i></p>	<p>Memuat informasi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan alamat entitas anak, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Alamat b. Nomor telepon c. Alamat surat elektronik d. Alamat situs web 2. Nama dan alamat kantor cabang/ perwakilan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Alamat b. Nomor telepon c. Alamat surat elektronik d. Alamat situs web <p>Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, kantor cabang, dan kantor perwakilan, agar diungkapkan.</p>	124	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK 16
<p>Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik</p> <p><i>Brief history of Issuer or Public Company</i></p>	<p>Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan.</p> <p>Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan.</p>	77-79	
	<p>Notes: if the company does not have a subsidiary, branch office, and representative office, it can be disclosed.</p>		
	<p>Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan.</p> <p>Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan.</p>	80-81	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK 16
	<p>Notes: if the company has never changed its name, it should be disclosed.</p>		

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation		Halaman Page	Regulasi Regulation
Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan <i>Vision, Mission and Corporate Culture</i>	Mencakup:	<i>It includes:</i>		SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK 16
	1. Visi Perusahaan	1. <i>Company Vision</i>	82	
	2. Misi Perusahaan	2. <i>Company Mission</i>	83	
	3. Penjelasan Visi	3. <i>Vision Explanation</i>	82	
	4. Penjelasan Misi	4. <i>Mission Explanation</i>	83	
	5. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah direviu dan disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris pada tahun buku.	5. <i>Information that the vision and mission have been reviewed and approved by the Board of Directors/ Board of Commissioners for the financial year.</i>	82	
	6. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>) yang dimiliki Perusahaan.	6. <i>Statement regarding the corporate culture of the Company.</i>	82-84	
Kegiatan Usaha <i>Business activities</i>	Uraian mengenai antara lain:	<i>It contained description of:</i>		SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK 16
	1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir.	1. <i>Company's business activities according to the latest articles of association.</i>	85	
	2. Kegiatan usaha yang dijalankan.	2. <i>Business Activities Undertaken.</i>	85	
	3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan.	3. <i>Products and/or services produced.</i>	85-86	
Wilayah Operasional <i>Operational Area</i>	Wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan.	<i>The operational area of the Issuer or Public Company. The operational area is the area for carrying out operational activities or the range of the company's operational activities.</i>	87	SEOJK 16 ARA
Struktur Organisasi <i>Organizational structure</i>	Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan.	<i>The organizational structure of the Issuer or Public Company in the form of a chart, at least up to the structure of 1 (one) level below the Board of Directors including committees under the Board of Directors (if any) and committees under the Board of Commissioners, accompanied by names and positions.</i>	88-89	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK 16
Keanggotaan Asosiasi <i>Association Member</i>	Daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan.	<i>List of industry association memberships both on a national and international scale related to the implementation of sustainable finance.</i>	90	SEOJK 16
Profil Direksi <i>Board of Directors Profile</i>	Profil Direksi, paling sedikit memuat:	<i>Profile of the Board of Directors, at least contains:</i>	90-98	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK 16
	1. Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.	1. <i>Name and position in accordance with the duties and responsibilities.</i>		
	2. Foto terbaru.	2. <i>Latest photos.</i>		
	3. Usia.	3. <i>Age.</i>		
	4. Kewarganegaraan.	4. <i>Citizenship.</i>		
	5. Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi.	5. <i>Educational history and/or certification.</i>		
	6. Riwayat jabatan, meliputi informasi:	6. <i>Position history, including information on:</i>		
	a. Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan	a. <i>Legal basis for appointment as a member of the Board of Directors of the Issuer or Public Company concerned</i>		
b. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Direksi di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.	b. <i>History of appointment (period and position) as a member of the Board of Directors in the Company since the first appointment.</i>			

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page	Regulasi Regulation
<p>c. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.</p> <p>d. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.</p>	<p>c. <i>Concurrent positions, either as a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or committee member as well as other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Directors does not have concurrent positions, this can be disclosed.</i></p> <p>d. <i>Work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company.</i></p>		
<p>7. Hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut.</p> <p>Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali Bank.</p>	<p>7. <i>Affiliate relationships with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers either directly or indirectly to individual owners, including the names of affiliated parties. In the event that the members of the Board of Directors have no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter.</i></p> <p><i>Financial and family relationships of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners with other members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, and/or controlling shareholders of the Bank.</i></p>	90-98	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA
<p>8. Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.</p>	<p>8. <i>Changes in the composition of the members of the Board of Directors and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Directors, this should be disclosed.</i></p>	99	SEOJK 16

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation		Halaman Page	Regulasi Regulation
Profil Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners Profile</i>	Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	<i>Profile of the Board of Commissioners, at least contains:</i>	100-106	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK 16
	1. Nama dan jabatan.	1. <i>Name and title.</i>		
	2. Foto terbaru.	2. <i>Latest photos.</i>		
	3. Usia.	3. <i>Age.</i>		
	4. Kewarganegaraan.	4. <i>Citizenship.</i>		
	5. Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi.	5. <i>Educational history and/or certification.</i>		
	6. Riwayat jabatan, meliputi informasi:	6. <i>Position history, including information on:</i>		
	a. Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris	a. <i>Legal basis for appointment as member of the Board of Commissioners</i>		
	b. Dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.	b. <i>The legal basis for the appointment for the first time as a member of the Board of Commissioners who is an independent commissioner of the Issuer or Public Company concerned.</i>		
	c. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.	c. <i>History of appointment (period and position) as a member of the Board of Commissioners in the Company since the first appointment.</i>		
d. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	d. <i>Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member as well as other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Commissioners does not have concurrent positions, this should be disclosed.</i>			
e. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.	e. <i>Work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company.</i>			
7. Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali Bank.	7. <i>Affiliated relationships with other members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers, either directly or indirectly, to individual owners, including the names of affiliated parties.</i> <i>In the event that a member of the Board of Commissioners has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter. Financial and family relationships of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners with other members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, and/or controlling shareholders of the Bank.</i>	100-106	SEOJK 9 SEOJK 13 SEOJK 16 ARA SK 16	

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page	Regulasi Regulation	
	8. Pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode.	8. <i>Statement of independence of the independent commissioner in the event that the independent commissioner has served more than 2 (two) terms.</i>	N/A	SEOJK 16
	9. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	9. <i>Changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Commissioners, this should be disclosed.</i>	107	
Profil singkat pejabat eksekutif <i>Executive short profile</i>	Termasuk susunan pejabat eksekutif beserta jabatan dan ringkasan Riwayat hidup.	<i>Including the composition of executive officers along with positions and a summary of curriculum vitae.</i>	111-116	SEOJK 9
Jumlah karyawan dan data pengembangan kompetensi karyawan. <i>Number of employees and data on employee competency development.</i>	Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku.	<i>Number of employees by gender, position, age, education level, and employment status (permanent/contracted) in the financial year.</i>	117-118	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA
	Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	<i>Disclosure of information can be presented in tabular form.</i>		
	Data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan pada tahun buku yang terdiri dari pihak (level jabatan) yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan, dan tujuan pelatihan serta adanya persamaan kesempatan kepada seluruh karyawan.	<i>Data on employee competency development that has been carried out in the financial year consisting of parties (position level) who participated in the training, types of training, and training objectives as well as equal opportunities for all employees.</i>	118-120	ARA SK 16
	Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan pada tahun buku.	<i>Employee competency development costs that have been incurred in the financial year.</i>	121	
Komposisi pemegang saham <i>Composition of shareholders</i>	Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai:	<i>Name of shareholders and percentage of ownership at the beginning and end of the financial year, which consists of information regarding:</i>	122	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK 16
	1. Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik.	1. <i>Shareholders who own 5% (five percent) or more shares of the Issuer or Public Company.</i>	123	
	2. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik.	2. <i>Members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who own shares in Issuers or Public Companies.</i>	123	
	Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	<i>In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not own shares, this should be disclosed.</i>		

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page	Regulasi Regulation
	<p>3. Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.</p> <p>Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.</p> <p>Direktur dan komisaris yang memiliki Saham (Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib melaporkan kepada perusahaan mengenai kepemilikan Sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya).</p>	123	
	<p>4. Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik.</p>	123	SEOJK 16 ARA
	<p>5. Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi:</p> <p>a. Kepemilikan institusi lokal.</p> <p>b. Kepemilikan institusi asing.</p> <p>c. Kepemilikan individu lokal.</p> <p>d. Kepemilikan individu asing.</p> <p>Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel.</p>	122	SEOJK 16
<p>Pemegang saham utama dan pengendali <i>Major and controlling shareholders</i></p>	<p>Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan.</p> <p>Catatan: yang dimaksud pemegang saham utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan, tetapi bukan pemegang saham pengendali.</p>	123	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page	Regulasi Regulation
<p>Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi</p> <p><i>List of subsidiaries and/or associated entities</i></p>	<p>Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama.</p> <p>Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut.</p>	124-127	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK 16
<p>Informasi terkait dengan Kelompok Usaha Bank</p> <p><i>Information related to the Bank Business Group</i></p>	<p>Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/ atau memiliki Entitas Anak, harus menambahkan dengan:</p> <p>Struktur kelompok usaha Bank yang meliputi:</p> <p>a. Struktur kelompok usaha Bank, antara lain terdiri dari Bank, Entitas Anak, perusahaan terelasi (<i>sister company</i>), Entitas Induk sampai dengan <i>ultimate shareholder</i>.</p> <p>b. Struktur keterkaitan kepengurusan dalam kelompok usaha Bank.</p> <p>c. Pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain. Pengertian pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain adalah pemegang saham perorangan atau entitas yang memiliki tujuan bersama yaitu mengendalikan Bank, berdasarkan atau tidak berdasarkan suatu perjanjian.</p>	N/A	SEOJK 9
<p>Struktur grup perusahaan</p> <p><i>Company group structure</i></p>	<p>Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas induk, entitas anak, entitas asosiasi, <i>joint venture</i>, dan <i>special purpose vehicle</i> (SPV).</p>	128	SEOJK 16 ARA SK 16
<p>Kronologis pencatatan saham</p> <p><i>Share listing chronology</i></p>	<p>Kronologis pencatatan saham, jumlah saham, jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (<i>corporate action</i>), nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada).</p>	129	SEOJK 16 ARA SK 16

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page	Regulasi Regulation
<p>Kronologis penerbitan efek (termasuk <i>private placement</i>) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku</p> <p><i>Chronology of securities issuance (including private placement) and/or share listing from the beginning of issuance to the end of the financial year</i></p>	<p>Informasi pencatatan efek lainnya yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, jenis tindakan perusahaan (<i>corporate action</i>) yang menyebabkan perubahan jumlah efek lainnya, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/ imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan, dan peringkat efek (jika ada).</p> <p><i>Other securities listing information that have not matured in the financial year at least contain the name of the securities, type of corporate action that causes changes in the number of other securities, year of issue, interest rate/ yield, maturity date, offering value, name of the stock exchange in which other securities are listed, and the rating of the effect (if any).</i></p>	130-143	SEOJK 16 ARA SK 16
<p>Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP)</p> <p><i>Information on the use of public accountants (AP) and public accounting firms (KAP)</i></p>	<p>Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/ aliansinya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan alamat. 2. Periode penugasan. 3. Informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan. 4. Biaya jasa (fee) audit dan/atau non audit untuk masing- masing penugasan yang diberikan selama tahun buku. 5. Dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/ aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut. <p>Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/ asosiasi/aliannya dapat disajikan dalam bentuk tabel.</p> <p><i>Information on the use of public accounting services (AP) and public accounting firms (KAP) and their networks/associations/allies include:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Name and address. 2. Assignment period. 3. Information on audit and/or non-audit services provided. 4. Audit and/or non-audit service fees for each assignment given during the financial year. 5. In the event that the appointed AP and KAP and their network/ association/alliance do not provide non-audit services, then the information should be disclosed. <p><i>Disclosure of information on the use of AP and KAP services and their networks/associations/allies can be presented in tabular form.</i></p>	144	SEOJK 16 SK 16
<p>Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang.</p> <p><i>Name and address of the supporting institution and/or profession.</i></p>	<p>Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP.</p> <p><i>Name and address of capital market supporting institutions and/or professions other than AP and KAP.</i></p>	145	SEOJK 16 ARA SK 16
<p>Penghargaan dan Sertifikasi.</p> <p><i>Awards and Certifications.</i></p>	<p>Informasi memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama penghargaan dan/atau sertifikasi (berskala nasional dan internasional). 2. Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi. 3. Badan pemberi penghargaan dan/ atau sertifikasi. 4. Masa berlaku (untuk sertifikasi). <p><i>Information includes, among others:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Name of award and/or certification (national and international scale). 2. Year of award and/or certification. 3. The awarding and/or certification body. 4. Validity period (for certification). 	146-148	SEOJK 9 ARA SK 16

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation		Halaman Page	Regulasi Regulation
Informasi pada Website Perusahaan. Information on the Company's Website.	Meliputi paling kurang: 1. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu. 2. Isi Kode Etik. 3. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan. 4. Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir). 5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi. 6. Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal.	Include at least: 1. Shareholder information up to individual ultimate owners. 2. Fill in the Code of Ethics. 3. Information on the General Meeting of Shareholders (GMS) shall at least include material on the agenda discussed in the GMS, a summary of the minutes of the GMS, and information on important dates, namely the announcement date of the GMS, the date of the GMS summons, the date of the GMS, and the date on which the summary of the GMS minutes is announced. 4. Separating annual financial statements (last 5 years). 5. Profile of the Board of Commissioners and the Board of Directors. 6. Charter of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, and Internal Audit Unit.	149	ARA
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS OF COMPANY PERFORMANCE				
Rencana Strategis Bank Bank Strategic Plan	1. Rencana jangka panjang (<i>corporate plan</i>). 2. Rencana jangka menengah dan pendek (<i>business plan</i>).	1. Long term plan (<i>corporate plan</i>). 2. Medium and short term plans (<i>business plans</i>).	N/A	SEOJK 13
Tinjauan operasi per segmen usaha Operational review by business segment	Tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai: 1. Penjelasan masing-masing segmen usaha. 2. Kinerja per segmen usaha, antara lain: a. Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya. b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi. c. Penjualan/pendapatan usaha. d. Profitabilitas.	Operational review per business segment according to the type of industry of the Issuer or Public Company, at least regarding: 1. Explanation of each business segment. 2. Performance per business segment, among others: a. Production including the process, capacity, and development. b. Increase/decrease in production capacity. c. Sales/business income. d. Profitability.	207-209 207-209 210-213 210-213	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK 16

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation		Halaman Page	Regulasi Regulation
Uraian atas kinerja keuangan perusahaan <i>Description of the company's financial performance</i>	Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir (dalam bentuk narasi dan tabel), penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai:	<i>Comprehensive financial performance including a comparison of financial performance in the last 2 (two) financial years (in the form of narratives and tables), an explanation of the causes of the changes and the impact of these changes, at least regarding:</i>		SEOJK 9 ARA SK 16
	1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset.	1. <i>Current assets, non-current assets, and total assets.</i>	214-225	
	2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas.	2. <i>Short-term liabilities, long-term liabilities and total liabilities.</i>	225-231	
	3. Penanaman dana (investasi dan pemberian kredit/pembiayaan) dan total aset.	3. <i>Investments (investment and giving credit/financing) and total assets.</i>	214-225	
	4. Dana pihak ketiga dan sumber pendanaan lain.	4. <i>Third party funds and other funding sources.</i>	N/A	
	5. Ekuitas.	5. <i>Equity.</i>	231-234	
	6. Pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif.	6. <i>Revenue/sales, expenses, profit (loss), other comprehensive income, and total comprehensive profit (loss).</i>	234-244	
	7. Arus kas.	7. <i>Cash flow.</i>	244-246	
	8. Suku bunga dasar kredit.	8. <i>Basic loan interest rate.</i>	N/A	SEOJK 9
Analisis kualitas aset produktif dan rasio keuangan yang relevan. <i>Analysis of the quality of earning assets and relevant financial ratios.</i>			N/A	SEOJK 9
Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan. <i>Discussion and analysis of the ability to pay debts and the level of collectibility of the company's receivables, by presenting the relevant ratio calculations according to the type of company industry.</i>	Penjelasan tentang: 1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek (likuiditas) maupun jangka panjang (solvabilitas). 2. Tingkat kolektibilitas piutang.	<i>Explanation of:</i> 1. <i>Ability to pay debts, both short term (liquidity) and long term (solvability).</i> 2. <i>Accounts receivable collectibility level.</i>	246-249 249-261	SEOJK 16 ARA SK 16
Bahasan tentang struktur modal (<i>capital structure</i>) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policy</i>). <i>Discussion on capital structure and management policy on capital structure (capital structure policy).</i>	Penjelasan atas: 1. Rincian struktur modal (<i>capital structure</i>) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas. 2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policies</i>). 3. Dasar pemilihan kebijakan manajemen.	<i>Explanation above:</i> 1. <i>Details of the capital structure consisting of interest-based debt/sukuk and equity.</i> 2. <i>Management policies on capital structure (capital structure policies).</i> 3. <i>The basis for selecting management policies.</i>	252-253 252 252	SEOJK 16 ARA SK 16

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page	Regulasi Regulation
<p>Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir.</p> <p><i>Discussion on material commitments for capital goods investment (not funding commitments) in the last financial year.</i></p>	<p>Penjelasan tentang:</p> <p>1. Nama pihak yang melakukan ikatan.</p> <p>2. Tujuan dari ikatan tersebut.</p> <p>3. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut.</p> <p>4. Mata uang yang menjadi denominasi.</p> <p>5. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.</p> <p>Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan.</p>	<p><i>Explanation of:</i></p> <p>1. <i>The name of the party making the bond.</i></p> <p>2. <i>The purpose of the bond.</i></p> <p>3. <i>Sources of funds are expected to fulfill these ties.</i></p> <p>4. <i>The currency to be denominated.</i></p> <p>5. <i>Measures the company plans to hedge the risk of its associated foreign currency positions.</i></p> <p>Notes: if the company has no commitments related to investment in capital goods in the last financial year, it should be disclosed.</p>	<p>253</p> <p>SEOJK 16 ARA SK 16</p>
<p>Bahasan dan analisis tentang informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan jarang terjadi.</p> <p><i>Discussion and analysis of financial information that has been reported containing extraordinary and rare events.</i></p>		254-256	SK 16
<p>Uraian tentang komponen-komponen substansial dari pendapatan dan beban lainnya, untuk dapat mengetahui hasil usaha perusahaan.</p> <p><i>A description of the substantial components of other income and expenses, in order to be able to find out the results of the company's operations.</i></p>		256	SK 16
<p>Jika laporan keuangan mengungkapkan peningkatan atau penurunan yang material dari penjualan atau pendapatan bersih, maka wajib disertai dengan bahasan tentang sejauh mana perubahan tersebut dapat dikaitkan antara lain dengan, jumlah barang atau jasa yang dijual, dan atau adanya produk atau jasa baru.</p> <p><i>If the financial statements reveal a material increase or decrease in sales or net income, it must be accompanied by a discussion of the extent to which these changes can be related to the number of goods or services sold, and or the existence of new products or services.</i></p>		256	SK 16

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation		Halaman Page	Regulasi Regulation
<p>Bahasan tentang dampak perubahan harga terhadap penjualan atau pendapatan bersih perusahaan serta laba operasi perusahaan selama 2 (dua) tahun atau sejak perusahaan memulai usahanya, jika baru memulai usahanya kurang dari 2 (dua) tahun.</p> <p><i>Discussion on the impact of price changes on the company's sales or net income as well as the company's operating profit for 2 (two) years or since the company started its business, if it has only started its business for less than 2 (two) years.</i></p>			256-257	SK 16
<p>Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir.</p> <p><i>Discussion of investment in capital goods realized in the last financial year.</i></p>	<p>Penjelasan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis investasi barang modal. 2. Tujuan investasi barang modal. 3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir. <p>Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan.</p>	<p><i>Explanation of:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Types of capital goods investment.</i> 2. <i>The purpose of capital goods investment.</i> 3. <i>The investment value of capital goods issued in the last financial year.</i> <p>Notes: if there is no realization of capital goods investment, it should be disclosed.</p>	254	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK 16
<p>Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan</p> <p><i>Information and material facts occurring after the date of the accountant's report</i></p>	<p>Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.</p> <p>Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan.</p>	<p><i>Description of significant events after the date of the accountant's report including their impact on future business performance and risks.</i></p> <p>Note: if there is no significant event after the date of the accountant's report, it should be disclosed.</p>	260	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA
<p>Uraian tentang prospek usaha perusahaan.</p> <p><i>A description of the company's business prospects.</i></p>	<p>Prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.</p>	<p><i>The business prospects of the Issuer or Public Company are related to industrial conditions, the general economy and the international market along with quantitative supporting data from reliable data sources.</i></p>	260-263	SEOJK 16 ARA SK 16

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page	Regulasi Regulation	
<p>Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang.</p> <p><i>Comparison information between the target at the beginning of the financial year with the results achieved (realization), and the targets or projections to be achieved for the coming year.</i></p>	<p>Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai:</p>			
	1. Pendapatan/penjualan.	1. Sales revenue.	264-265	SEOJK 16 ARA
	2. Laba (rugi).	2. Profit and loss.	264-265	
	3. Struktur modal (<i>capital structure</i>).	3. Capital structure	264-265	SEOJK 16
	4. Pemasaran.	4. Marketing.	265	ARA
	5. Pengembangan SDM.	5. HR Development.	265-266	ARA
	6. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik.	6. Other matters deemed important to the Issuer or Public Company.	264-265	SEOJK 16 ARA
	Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai:	<i>Targets/projections to be achieved by the Issuer or Public Company for the next 1 (one) year, regarding:</i>		
	1. Pendapatan/penjualan.	1. Sales revenue.	267	SEOJK 16 ARA
	2. Laba (rugi).	2. Profit and loss.	267	
	3. Struktur modal (<i>capital structure</i>).	3. Capital structure.	267	SEOJK 16
	4. Kebijakan dividen.	4. Dividend policy.	268	
	5. Pemasaran.	5. Marketing.	268	ARA
	6. Pengembangan SDM.	6. HR Development.	268	ARA
7. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik.	7. Other matters deemed important to the Issuer or Public Company.	267	SEOJK 16 ARA	
<p>Uraian tentang aspek pemasaran.</p> <p><i>A description of the marketing aspect.</i></p>	<p>Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar.</p>	204-206	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA SK 16	
<p>Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir.</p> <p><i>Description of dividends for the last 2 (two) financial years.</i></p>	<p>Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit:</p>	269	SEOJK 16 ARA SK 16	
	1. Kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih.	1. Dividend policy contains information on the percentage of dividends distributed to net income.		
	2. Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas.	2. Cash dividend payment date and/or non-cash dividend distribution date.		
	3. Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas).	3. Total dividends per share (cash and/or non-cash).		
	4. Jumlah dividen per tahun yang dibayar.	4. Amount of dividends per year paid.		
	<p>Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.</p>	<p>Note: if there is no dividend distribution, the reasons should be disclosed.</p>		

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation		Halaman Page	Regulasi Regulation
<p>Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana)</p> <p><i>Realization of the use of proceeds from the public offering (in the event that the company is still required to submit a report on the realization of the use of funds)</i></p>	<p>Memuat uraian mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Total perolehan dana. 2. Rencana penggunaan dana. 3. Rincian penggunaan dana. 4. Saldo dana. 5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada). <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku. b. Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut. <p>Catatan: apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan.</p>	<p><i>It contains a description of:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Total fundraising.</i> 2. <i>Fund use plan.</i> 3. <i>Details of the use of funds.</i> 4. <i>Fund balance.</i> 5. <i>The date of approval of the GMS/ RUPO for changes in the use of funds (if any).</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>In the event that during the financial year, the Issuer has an obligation to submit a report on the realization of the use of funds, then the realization of the cumulative use of the proceeds from the public offering shall be disclosed until the end of the financial year.</i> b. <i>In the event that there is a change in the use of funds as stipulated in the Regulation of the Financial Services Authority regarding the report on the realization of the use of proceeds from the public offering, the Issuer shall explain the change.</i> <p>Note: if there is no information on the realization of the use of proceeds from the public offering, it should be disclosed.</p>	270-271	SEOJK 16 ARA SK 16
<p>Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/ peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan.</p> <p><i>Material information (if any), including investment, expansion, divestment, business merger/ consolidation, acquisition, debt/capital restructuring, material transactions, affiliate transactions, and conflict of interest transactions.</i></p>	<p>Memuat uraian mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tanggal, nilai, dan objek transaksi. b. Nama pihak yang melakukan transaksi. c. Sifat hubungan afiliasi (jika ada). d. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi. e. Pemenuhan ketentuan terkait. f. Dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka a) sampai dengan angka f), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (<i>armslength principle</i>). 	<p><i>It contains a description of:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Date, value, and transaction object.</i> b. <i>The name of the party conducting the transaction.</i> c. <i>The nature of the affiliation relationship (if any).</i> d. <i>Explanation of the fairness of the transaction.</i> e. <i>Fulfillment of related provisions.</i> f. <i>In the event that there is an affiliation relationship, apart from disclosing the information as referred to in points a) to number f), the Issuer or Public Company also discloses information:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Statement of the Board of Directors that affiliate transactions have gone through adequate procedures to ensure that affiliate transactions are carried out in accordance with generally accepted business practices by complying with the arms-length principle.</i> 	272-276	SEOJK 16 ARA SK 16

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page	Regulasi Regulation
	<p>2) Peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (<i>arms length principle</i>).</p> <p>g. Untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan.</p> <p>Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut.</p> <p>h. Untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut.</p> <p>i. Dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.</p>		
<p>Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir.</p> <p><i>A description of changes in the laws and regulations of the company in the last financial year.</i></p>	<p>Uraian memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan. 2. Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan. <p>Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.</p>	<p>276</p>	<p>SEOJK 16 ARA SK 16</p>
	<p>2) <i>The role of the Board of Commissioners and the audit committee is to carry out adequate procedures to ensure that affiliated transactions are carried out in accordance with generally accepted business practices by complying with the arm's length principle.</i></p> <p>g. <i>For affiliated transactions or material transactions which are business activities carried out in order to generate business income and are carried out regularly, repeatedly, and/or continuously, an explanation is added that the affiliated transactions or material transactions are business activities carried out in order to generate business income and are carried out regularly, repeatedly, and/or continuously.</i></p> <p><i>In the event that the affiliated transactions or material transactions referred to have been disclosed in the annual financial statements, additional information regarding the disclosure reference in the annual financial statements should be added.</i></p> <p>h. <i>For disclosure of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions resulting from the implementation of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions that have been approved by independent shareholders, additional information regarding the date of the GMS which approved the affiliated transactions and/or conflict of interest transactions should be added.</i></p> <p>i. <i>In the event that there is no affiliated transaction and/or conflict of interest transaction, this matter shall be disclosed.</i></p>		
	<p><i>The description includes, among others:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Name of the legislation that has changed.</i> 2. <i>The impact (quantitative and/or qualitative) on the company (if significant) or a statement that the impact is not significant.</i> <p>Note: <i>if there are no changes to the laws and regulations in the last financial year, the information should be disclosed.</i></p>		

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation		Halaman Page	Regulasi Regulation
<p>Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir.</p> <p><i>A description of changes in accounting policies implemented by the company in the last financial year.</i></p>	<p>Uraian memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan kebijakan akuntansi. 2. Alasan perubahan kebijakan akuntansi. 3. Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan. <p>Catatan: Apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.</p>	<p><i>The description includes, among others:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Changes in accounting policies.</i> 2. <i>Reasons for changes in accounting policies.</i> 3. <i>Quantitative impact on financial statements.</i> <p>Note: <i>If there is no change in accounting policy in the last financial year, it must be disclosed.</i></p>	<p>276-277</p> <p>276</p> <p>277</p>	<p>SEOJK 16 ARA SK 16</p>
<p>Informasi kelangsungan usaha.</p> <p><i>Business continuity information.</i></p>	<p>Pengungkapan informasi mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir. 2. <i>Assessment</i> manajemen atas hal-hal pada angka 1. 3. Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan <i>assessment</i>. <p>Catatan: Apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir.</p>	<p><i>Disclosure of information regarding:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Things that have the potential to have a significant effect on the company's business continuity in the last financial year.</i> 2. <i>Management's assessment of the items in number 1.</i> 3. <i>Assumptions used by management in conducting the assessment.</i> <p>Note: <i>If there are no matters that have the potential to significantly affect the company's business continuity in the last financial year, the assumptions underlying management in believing that there are no matters that have the potential to significantly affect the company's business continuity in the last financial year.</i></p>	<p>277</p> <p>278</p> <p>278</p>	<p>ARA</p>
<p>Informasi Eksposur Risiko dan Permodalan.</p> <p><i>Information on Risk Exposure and Capital.</i></p>	<p>Eksposur risiko dan permodalan meliputi laporan eksposur risiko dan permodalan periode tahunan sebagaimana diatur dalam bagian II Laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan.</p>	<p><i>Risk and capital exposures include annual period risk and capital exposure reports as stipulated in Part II of the risk and capital exposure publication report.</i></p>	<p>N/A</p>	<p>SEOJK 9</p>
<p>TATA KELOLA PERUSAHAAN CORPORATE GOVERNANCE</p>				
<p>RUPS. GMS.</p>	<p>Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku. b. Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan. <p>Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.</p>	<p><i>Information regarding the resolutions of the GMS in the financial year and 1 (one) year prior to the financial year includes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>GMS decisions in the financial year and 1 (one) year before the financial year are realized in the financial year.</i> b. <i>GMS resolutions for the financial year and 1 (one) year before the financial year that have not been realized and the reasons for not being realized.</i> <p><i>In the event that the Issuer or Public Company uses an independent party in the conduct of the GMS to calculate the votes, this matter shall be disclosed.</i></p>	<p>31-329</p> <p>329-341</p>	<p>SEOJK 16</p>

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page	Regulasi Regulation
Direksi. Directors.	<p>1. Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi. Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel.</p>	346-349	SEOJK 13 SEOJK 16 ARA SK 16
	<p>2. Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Direksi.</p>	345	SEOJK 16 ARA
	<p>3. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS.</p> <p>Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel.</p> <p>Informasi memuat antara lain:</p> <p>a. Tanggal Rapat. b. Peserta Rapat. c. Agenda Rapat.</p>	351-355	SEOJK 16 ARA SK 16
	<p>4. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi:</p> <p>a. Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada).</p> <p>b. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada).</p>	356-359	SEOJK 16 SK 16
	<p>5. Penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat:</p> <p>a. Prosedur penilaian kinerja.</p> <p>b. Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat.</p> <p>Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.</p>	362	SEOJK 16 ARA

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page	Regulasi Regulation
	<p>6. Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bank yang bersangkutan. Bank lain. Lembaga keuangan bukan bank. Perusahaan lain yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar negeri. 	N/A	SEOJK 13
Dewan Komisaris. <i>Board of Commissioners.</i>	<p>1. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.</p>	363-364	SEOJK 13 SEOJK 16 ARA SK 16
	<p>2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Dewan Komisaris.</p>	366-367	SEOJK 16 ARA
	<p>3. Komisaris Independen (jumlahnya minimal 30% dari total Dewan Komisaris).</p> <p>Meliputi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kriteria penentuan Komisaris Independen. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen. 	369-370	ARA
	<p>4. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS.</p> <p>Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel.</p> <p>Informasi memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tanggal Rapat. Peserta Rapat. Agenda Rapat. 	370-381	SEOJK 13 ARA SK 16
	<p>5. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada). Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada). 	381-383	SEOJK 16

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page	Regulasi Regulation
	<p>6. Penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:</p> <p>a. Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja.</p> <p>b. Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat.</p> <p>c. Pihak yang melakukan penilaian.</p>	384-386	SEOJK 16
	<p>7. Penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi:</p> <p>a. Prosedur penilaian kinerja.</p> <p>b. Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat.</p>	387	SEOJK 16 ARA
<p>Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Uraian kebijakan tertulis Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin.</p> <p><i>Policy regarding the diversity of the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors. Description of the Company's written policies regarding the diversity of the composition of the Board of Commissioners and Directors in education (field of study), work experience, age, and gender.</i></p>	<p>Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya.</p> <p>Note: if there is no such policy, the reasons and considerations should be disclosed.</p>	397-399	ARA
<p>Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p><i>Nomination and remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners.</i></p>	<p>Paling sedikit memuat:</p> <p>1. Prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.</p>	395-396	SEOJK 16
	<p>2. Prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain:</p>		SEOJK 16 ARA SK 16

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page	Regulasi Regulation	
	a. Prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.	a. Procedure for determining remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners.	396	
	b. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi.	b. Disclosure of indicators for determining the remuneration of the Board of Directors.	396	
	c. Struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan Catatan: apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan.	c. The remuneration structure of the Board of Directors and the Board of Commissioners, such as salaries, allowances, bonuses and others; and Note: if there are no performance bonuses, non-performance bonuses, and stock options received by each member of the Board of Commissioners and Board of Directors, they must be disclosed.	396	
	d. Besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	d. The amount of remuneration for each member of the Board of Directors and member of the Board of Commissioners; Disclosure of information can be presented in tabular form.	397	
Dewan pengawas syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar. <i>Sharia supervisory board, for Issuers or Public Companies that carry out business activities based on sharia principles as stated in the articles of association.</i>	Paling sedikit memuat: a. Nama. b. Dasar hukum pengangkatan Dewan Pengawas Syariah. c. Periode penugasan Dewan Pengawas Syariah. d. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah. e. Frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik.	At least it contains: a. Name. b. The legal basis for the appointment of the Sharia Supervisory Board. c. The period of assignment of the Sharia Supervisory Board. d. The duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board. e. Frequency and method of giving advice and suggestions as well as supervision of compliance with sharia principles in the capital market to Issuers or Public Companies.	388-394	SEOJK 16
Komite Audit. <i>Audit Committee.</i>	1. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite. 2. Usia. 3. Kewarganegaraan. 4. Riwayat pendidikan. 5. Riwayat jabatan, meliputi informasi: a. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite. b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada). c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik. 6. Periode dan masa jabatan anggota komite audit.	1. Name and position in committee membership. 2. Age. 3. Citizenship. 4. Educational background. 5. Position history, including information on: a. Legal basis for appointment as committee member. b. Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the board of directors, and/or committee member as well as other positions (if any). c. Work experience and period of time both inside and outside the issuer or public company. 6. Period and term of office of audit committee members.	404-405	SEOJK 16 ARA SK 16 SEOJK 16 ARA SEOJK 16 ARA SK 16 SEOJK 16 ARA SK 16

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page	Regulasi Regulation	
	7. Uraian tugas dan tanggung jawab.	7. <i>Description of duties and responsibilities.</i>	402	SEOJK 13 ARA SK 16
	8. Pernyataan independensi komite audit.	8. <i>Statement of independence of the audit committee.</i>	406	SEOJK 16 ARA SK 16
	9. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada).	9. <i>Training and/or competency improvement that have been attended in the financial year (if any).</i>	409	SEOJK 16
	10. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut.	10. <i>Policies and implementation of the frequency of audit committee meetings and the level of attendance of audit committee members in these meetings.</i>	406-409	SEOJK 13 SEOJK 16 ARA SEOJK 13 SK 16
	11. Pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (<i>charter</i>) komite audit.	11. <i>The implementation of the audit committee's activities in the financial year is in accordance with what is stated in the guidelines or charter of the audit committee.</i>	409-410	
Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. <i>Committee or function of nomination and remuneration of Issuers or Public Companies.</i>	Paling sedikit memuat:	<i>At least it contains:</i>		
	1. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite.	1. <i>Name and position in committee membership.</i>	412-413	SEOJK 16 ARA SK 16
	2. Usia.	2. <i>Age.</i>		
	3. Kewarganegaraan.	3. <i>Citizenship.</i>		
	4. Riwayat pendidikan.	4. <i>Educational background.</i>		
	5. Riwayat jabatan, meliputi informasi:	5. <i>Position history, including information on:</i>		
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite.	a. <i>Legal basis for appointment as committee member.</i>		
	b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada).	b. <i>Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member and other positions (if any).</i>		
	c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.	c. <i>Work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company.</i>		
	6. Periode dan masa jabatan anggota komite.	6. <i>The period and term of office of the committee members.</i>		
	7. Pernyataan independensi komite.	7. <i>Committee independence statement.</i>	414	
	8. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada).	8. <i>Training and/or competency improvement that have been attended in the financial year (if any).</i>	416	
	9. Uraian tugas dan tanggung jawab.	9. <i>Description of duties and responsibilities.</i>	410-411	
	10. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>).	10. <i>A statement that has a guideline or charter (charter).</i>	410	
	11. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut.	11. <i>Policy and implementation of the frequency of meetings and the level of attendance of members in the meeting.</i>	414-416	
	12. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku.	12. <i>A brief description of the implementation of activities in the financial year.</i>	416	

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page	Regulasi Regulation
	<p>13. Kebijakan mengenai suksesi Direksi.</p> <p>Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan:</p> <p>1. Alasan tidak dibentuknya komite</p> <p>2. Pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi.</p>	417	
<p>Komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris.</p> <p><i>Other committees owned by Issuers or Public Companies in order to support the functions and duties of the Board of Directors (if any) and/or committees that support the functions and duties of the Board of Commissioners.</i></p>	<p>Paling sedikit memuat:</p> <p>1. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite.</p> <p>2. Usia.</p> <p>3. Kewarganegaraan.</p> <p>4. Riwayat pendidikan.</p> <p>5. Riwayat jabatan, meliputi informasi:</p> <p>a. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite.</p> <p>b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada).</p> <p>c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik.</p> <p>6. Periode dan masa jabatan anggota komite.</p> <p>7. Pernyataan independensi komite.</p> <p>8. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada).</p> <p>9. Uraian tugas dan tanggung jawab.</p> <p>10. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) komite.</p> <p>11. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut.</p> <p>12. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku.</p>	438-447	SEOJK 16 ARA

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page	Regulasi Regulation		
Sekretaris perusahaan. Company secretary.	1. Nama.	1. Name.	419-421	SEOJK 16 ARA	
	2. Domisili.	2. domicile.			
	3. Riwayat jabatan, meliputi:	3. Position history, including:			
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan.	a. Legal basis for appointment as company secretary.			
	b. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik.	b. Work experience and period of time both inside and outside the issuer or public company.			
	4. Riwayat pendidikan.	4. Educational background.			
5. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku.	5. Training and/or competency improvement that was followed during the financial year.	421			
6. Uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku.	6. A brief description of the implementation of the duties of the company secretary in the financial year.	421			
Unit Audit Internal. Internal Audit Unit.	1. Nama kepala unit audit internal.	1. The name of the head of the internal audit unit.	423-424	SEOJK 16 ARA	
	2. Riwayat jabatan, meliputi:	2. Position history, including:			
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal.	a. Legal basis for appointment as head of internal audit unit.			
	b. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik.	b. Work experience and period of time both inside and outside the issuer or public company.			
	3. Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada).	3. Qualification or certification as an internal audit profession (if any).			
	4. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal.	4. Number of employees (internal auditors) in the internal audit unit.			424-427
	5. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku.	5. Training and/or competency improvement that was followed during the financial year.			424-427
	6. Struktur dan kedudukan unit audit internal.	6. The structure and position of the internal audit unit.			422
	7. Uraian tugas dan tanggung jawab.	7. Description of duties and responsibilities.			428
8. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) unit audit internal.	8. A statement that has a guideline or charter for the internal audit unit.	428			
9. Uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan direksi, dewan komisaris, dan/ atau komite audit.	9. A brief description of the implementation of the internal audit unit's duties for the financial year including the policy and implementation of the frequency of meetings with the board of directors, board of commissioners, and/or audit committee.	432-433			

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page	Regulasi Regulation
Akuntan Publik. <i>Public Accountant.</i>	<p>1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir.</p> <p>2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir.</p> <p>3. Besarnya <i>fee</i> untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir.</p> <p>4. Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir.</p> <p>Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan.</p>	<p>1. <i>Name and year of the public accountant who audited the annual financial statements for the last 5 years.</i></p> <p>2. <i>Name and year of the Public Accounting Firm that has audited the annual financial statements for the last 5 years.</i></p> <p>3. <i>The amount of the fee for each type of service provided by the Public Accounting Firm in the last financial year.</i></p> <p>4. <i>Other services provided by Public Accounting Firms and public accountants in addition to auditing the annual financial statements for the last financial year.</i></p> <p>Note: if there is no other service, it should be disclosed.</p>	<p>448</p> <p>ARA</p>
Uraian mengenai sistem pengendalian internal (<i>internal Control</i>) yang diterapkan oleh emiten atau perusahaan Publik. <i>A description of the internal control system implemented by the issuer or public company.</i>	<p>1. Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya.</p> <p>2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO – <i>internal control framework</i>).</p> <p>3. Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal.</p> <p>4. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal.</p>	<p>1. <i>Financial and operational control, as well as compliance with other laws and regulations.</i></p> <p>2. <i>Explanation of the suitability of the internal control system with an internationally recognized framework (COSO – internal control framework).</i></p> <p>3. <i>Review of the effectiveness of the internal control system.</i></p> <p>4. <i>Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the internal control system.</i></p>	<p>449-454</p> <p>454</p> <p>454-455</p> <p>455-456</p> <p>SEOJK 13 SEOJK 16 ARA</p>
Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten Atau Perusahaan Publik. <i>The risk management system implemented by the Issuer or Public Company.</i>	<p>1. Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik.</p> <p>2. Jenis risiko dan cara pengelolaannya.</p> <p>3. Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik.</p> <p>4. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko.</p>	<p>1. <i>An overview of the risk management system of the Issuer or Public Company.</i></p> <p>2. <i>Types of risks and how to manage them.</i></p> <p>3. <i>Review of the effectiveness of the Issuer's or Public Company's risk management system.</i></p> <p>4. <i>Statement of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners or the audit committee on the adequacy of the risk management system.</i></p>	<p>456-464</p> <p>464-467</p> <p>468-470</p> <p>470</p> <p>SEOJK 16 SEOJK 13 ARA</p>
Fungsi kepatuhan. <i>Compliance function.</i>	Tingkat kepatuhan Bank terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta pemenuhan komitmen dengan otoritas yang berwenang.	<i>The level of the Bank's compliance with all provisions and laws and regulations as well as the fulfillment of commitments with the competent authorities.</i>	<p>470-474</p> <p>SEOJK 13</p>

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page	Regulasi Regulation
<p>Perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi Oleh emiten atau perusahaan publik, entitas anak, Anggota direksi dan anggota dewan komisaris (jika ada).</p> <p><i>Legal cases that have a material impact faced by issuers or public companies, subsidiaries, members of the board of directors and members of the board of commissioners (if any).</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pokok perkara/gugatan. 2. Status penyelesaian perkara/gugatan. 3. Pengaruhnya terhadap kondisi emiten atau perusahaan publik. Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai nominal tuntutan/gugatan. 4. Pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan. 5. Pengungkapan mengenai permasalahan hukum paling sedikit mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. jumlah permasalahan perdata dan permasalahan pidana yang dihadapi dan telah mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. b. jumlah permasalahan perdata dan permasalahan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian. <p>Catatan: dalam hal perusahaan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan.</p>	474-484	<p>SEOJK 16 ARA</p> <hr/> <p>SK 16</p> <hr/> <p>SEOJK 13</p>
<p>Informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang dikenakan kepada emiten atau perusahaan publik, Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas jasa keuangan dan otoritas lainnya pada tahun Buku (jika ada).</p> <p><i>Information on administrative sanctions/sanctions imposed on issuers or public companies, members of the board of Commissioners and members of the board of Directors, by the Financial Services Authority and other authorities in the financial year (if any).</i></p>		484	<p>SEOJK 16 ARA</p>
<p>Akses informasi dan data perusahaan: Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya.</p> <p><i>Access to company information and data: A description of the availability of access to company information and data to the public, for example through the website (in Indonesian and English), mass media, mailing lists, bulletins, meetings with analysts, and so on.</i></p>		484-499	<p>ARA</p>

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation		Halaman Page	Regulasi Regulation
Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik. <i>Information regarding the code of ethics of the Issuer or Public Company.</i>	1. Pokok-pokok kode etik.	1. <i>Code of ethics points.</i>	500	SEOJK 16 ARA
	2. Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi.	2. <i>A statement that the code of ethics applies to all levels of the organization.</i>	500	
	3. Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya	3. <i>Forms of socialization of the code of ethics and efforts to enforce it</i>	500	
	4. Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif).	4. <i>Sanctions for each type of violation are regulated in the code of ethics (normative).</i>	501	
	5. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir.	5. <i>The number of violations of the code of ethics along with the sanctions given in the last financial year.</i>	501	
	Catatan: Apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	Note: <i>If there is no violation of the code of ethics in the last financial year, it must be disclosed.</i>		
Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank. <i>Implementation of Good Corporate Governance in Providing Remuneration for Banks.</i>	6. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>) yang dimiliki perusahaan.	6. <i>A statement regarding the company's corporate culture.</i>	501	SK 16
	1. Komite Remunerasi a. Nama anggota, komposisi, tugas dan tanggung jawab. b. Jumlah rapat yang dilakukan. c. Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi selama 1 (satu) tahun.	1. <i>Remuneration Committee</i> a. <i>Name of members, composition, duties and responsibilities.</i> b. <i>Number of meetings held.</i> c. <i>Remuneration that has been paid to members of the Remuneration Committee for 1 (one) year.</i>	N/A	POJK 45
2. Proses penyusunan kebijakan Remunerasi yang meliputi: a. Tinjauan mengenai latar belakang dan tujuan kebijakan Remunerasi. b. Pelaksanaan kaji ulang atas kebijakan Remunerasi pada tahun sebelumnya, beserta perbaikannya. c. Mekanisme untuk memastikan bahwa Remunerasi bagi Pegawai di unit kontrol bersifat independen dari unit kerja yang diawasinya.	2. <i>Remuneration policy formulation process which includes:</i> a. <i>Overview of the background and objectives of the Remuneration policy.</i> b. <i>The implementation of a review of the Remuneration policy in the previous year, along with its improvements.</i> c. <i>Mechanisms to ensure that the remuneration for employees in the control unit is independent from the work units they supervise.</i>			
3. Cakupan kebijakan Remunerasi dan implementasinya per unit bisnis, per wilayah dan pada perusahaan anak atau kantor cabang yang berlokasi di luar negeri.	3. <i>Remuneration policy scope and implementation per business unit, per region and at subsidiaries or branch offices located overseas.</i>			
4. Remunerasi dikaitkan dengan risiko yang meliputi: a. Jenis risiko utama (<i>key risk</i>) yang digunakan dalam menerapkan Remunerasi. b. Kriteria untuk menentukan jenis risiko utama, termasuk untuk risiko yang sulit diukur. c. Dampak penetapan risiko utama terhadap kebijakan Remunerasi yang Bersifat Variabel. d. Perubahan penentuan jenis risiko utama dibandingkan dengan tahun lalu beserta alasannya, apabila ada.	4. <i>Remuneration is associated with risks which include:</i> a. <i>The type of main risk (key risk) used in implementing the Remuneration.</i> b. <i>Criteria for determining the main types of risk, including those that are difficult to measure.</i> c. <i>The impact of determining the main risk on the Variable Remuneration policy.</i> d. <i>Changes in the determination of the main risk types compared to last year and the reasons, if any.</i>			

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page	Regulasi Regulation												
<p>5. Pengukuran kinerja dikaitkan dengan Remunerasi yang meliputi:</p> <p>a. Tinjauan mengenai kebijakan Remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja.</p> <p>b. Metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Bank, kinerja unit kerja dan kinerja individu.</p> <p>c. Uraian mengenai metode yang digunakan Bank untuk menyatakan bahwa kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas remunerasi serta besarnya penyesuaian remunerasi jika kondisi tersebut terjadi.</p>	<p>5. <i>Performance measurement is related to Remuneration which includes:</i></p> <p>a. <i>Overview of the Remuneration policy related to performance appraisal.</i></p> <p>b. <i>Methods in linking individual remuneration with bank performance, work unit performance and individual performance.</i></p> <p>c. <i>A description of the method used by the Bank to state that the agreed performance cannot be achieved so that it is necessary to make adjustments to the remuneration and the amount of remuneration adjustments if such conditions occur.</i></p>	N/A													
<p>6. Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko yang meliputi:</p> <p>a. Kebijakan mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, besarnya, dan kriteria untuk menetapkan besaran tersebut.</p> <p>b. Kebijakan Bank mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang ditunda pembayarannya (<i>malus</i>), atau ditarik kembali apabila sudah dibayarkan (<i>clawback</i>).</p>	<p>6. <i>Remuneration adjustments are related to Performance and Risk which include:</i></p> <p>a. <i>Policy regarding deferred Variable Remuneration, the amount, and the criteria for determining the amount.</i></p> <p>b. <i>Bank Policy regarding Variable Remuneration which is deferred which is delayed in payment (malus), or withdrawn when it has been paid (clawback).</i></p>			N/A											
<p>7. Nama konsultan ekstern dan tugas konsultan terkait kebijakan Remunerasi, apabila Bank menggunakan jasa konsultan ekstern</p>	<p>7. <i>The name of the external consultant and the consultant's duties related to the Remuneration policy, if the Bank uses the services of an external consultant</i></p>					N/A									
<p>8. Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur Remunerasi dan rincian jumlah nominal.</p>	<p>8. <i>The remuneration package and facilities received by the Board of Directors and the Board of Commissioners include the structure of the remuneration and details of the nominal amount.</i></p>							N/A							
<p>9. Remunerasi yang Bersifat Variabel, meliputi:</p> <p>a. Bentuk Remunerasi yang Bersifat Variabel beserta alasan pemilihan bentuk tersebut. dan</p> <p>b. Penjelasan apabila terdapat perbedaan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel di antara para Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai.</p>	<p>9. <i>Variable Remuneration, including:</i></p> <p>a. <i>Variable forms of remuneration and the reasons for choosing this form. and</i></p> <p>b. <i>Explanation if there are differences in the provision of Variable Remuneration among the Directors, Board of Commissioners and/or Employees.</i></p>									N/A					
<p>10. Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun, dan total nominalnya.</p>	<p>10. <i>The number of Directors, Board of Commissioners and Employees who receive Variable Remuneration for 1 (one) year, and the total nominal value.</i></p>											N/A			
<p>11. Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi material <i>risk takers</i>.</p>	<p>11. <i>Position and number of parties who are material risk takers.</i></p>													N/A	

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page	Regulasi Regulation
12. <i>Shares option</i> yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif.	12. <i>Shares options owned by the Board of Directors, Board of Commissioners, and Executive Officers.</i>	N/A	
13. Rasio gaji tertinggi dan terendah	13. <i>Highest and lowest salary ratio</i>		
14. Jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja	14. <i>The number of recipients and the total amount of Variable Remuneration guaranteed unconditionally will be given by the Bank to candidates for Directors, candidates for the Board of Commissioners, and/or prospective employees for the first 1 (one) year of work</i>		
15. Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan	15. <i>Number of employees affected by termination of employment and the total nominal amount of severance pay paid</i>		
16. Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank.	16. <i>The total amount of deferred Variable Remuneration consisting of cash and/or shares or share-based instruments issued by the Bank.</i>		
17. Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun.	17. <i>The total amount of deferred Variable Remuneration paid for 1 (one) year.</i>		
18. Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam satu tahun meliputi: a. Remunerasi yang bersifat tetap maupun variabel. b. Remunerasi yang ditangguhkan dan tidak ditangguhkan. c. Bentuk Remunerasi yang diberikan secara tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank.	18. <i>Details of the amount of remuneration given in one year include:</i> a. <i>Fixed or variable remuneration.</i> b. <i>Deferred and non-deferred remuneration.</i> c. <i>The form of remuneration given in cash and/or shares or share-based instruments issued by the Bank.</i>		
19. Informasi kuantitatif mengenai: a. Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit. b. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan. c. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan.	19. <i>Quantitative information regarding:</i> a. <i>Total remaining Remuneration that is still deferred, both those exposed to implicit and explicit adjustments.</i> b. <i>Total Remuneration reduction due to explicit adjustments during the reporting period.</i> c. <i>Total Remuneration reduction due to implicit adjustments during the reporting period.</i>		

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page	Regulasi Regulation
<p>Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian Kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/ atau karyawan yang dimiliki oleh emiten atau perusahaan publik (jika ada), antara lain berupa Program kepemilikan saham oleh manajemen (<i>management stock ownership program/ MSOP</i>) dan/atau Program kepemilikan saham oleh karyawan (<i>employee Stock ownership program/ ESOP</i>).</p> <p><i>A brief description of the policy of providing long-term performance-based compensation to management and/or employees owned by the issuer or public company (if any), including the management stock ownership program ownership program/ MSOP and/or employee stock ownership program (ESOP).</i></p>	<p>Dalam hal pemberian kompensasi berupa program Kepemilikan saham oleh manajemen (<i>management stock Ownership program/MSOP</i>) dan/atau program Kepemilikan saham oleh karyawan (<i>employee stock Ownership program/ ESOP</i>).</p> <p>Informasi yang diungkapkan Paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah saham dan/atau opsi. 2. Jangka waktu pelaksanaan. 3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak. 4. Harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan. 	<p>502</p>	<p>SEOJK 16 ARA</p>
<p>Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan Informasi mengenai</p> <p><i>A brief description of the Information disclosure policy regarding</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja Setelah terjadinya kepemilikan atau setiap Perubahan kepemilikan atas saham perusahaan Terbuka. 2. Pelaksanaan atas kebijakan dimaksud. 	<p>502</p>	<p>SEOJK 16</p>
<p>Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>) di Emiten atau Perusahaan Publik.</p> <p><i>A description of the whistleblowing system at the Issuer or Public Company.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cara penyampaian laporan pelanggaran. 2. Perlindungan bagi pelapor. 3. Penanganan pengaduan. 4. Pihak yang mengelola pengaduan. 5. Hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses Dalam tahun buku. b. Tindak lanjut pengaduan. <p>Dalam hal emiten atau perusahaan publik tidak memiliki Sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>), Maka diungkapkan mengenai hal tersebut.</p>	<p>502</p> <p>503</p> <p>503</p> <p>503-504</p> <p>504</p>	<p>SEOJK 16 ARA</p>
	<p><i>In terms of providing compensation in the form of management stock ownership program (MSOP) and/or employee stock ownership program (ESOP).</i></p> <p><i>Information disclosed shall at least contain:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Number of shares and/or options.</i> 2. <i>Implementation period.</i> 3. <i>Requirements for eligible employees and/or management.</i> 4. <i>Exercise price or determination of exercise price.</i> 		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Share ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners no later than 3 (three) working days after the occurrence of ownership or any change in ownership of shares of a public company.</i> 2. <i>Implementation of the mentioned policy.</i> 		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>How to submit a violation report.</i> 2. <i>Protection for whistleblowers.</i> 3. <i>The handling of complaints.</i> 4. <i>The party that manages the complaint.</i> 5. <i>The results of handling complaints, at least:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Number of complaints received and processed in the financial year.</i> b. <i>Follow up complaints.</i> <p><i>In the event that the issuer or public company does not have a whistleblowing system, then this should be disclosed.</i></p>		

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation		Halaman Page	Regulasi Regulation
<p>Uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik.</p> <p><i>A description of the anti-corruption policy of the Issuer or Public Company.</i></p>	<p>1. Program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (<i>kickbacks</i>), <i>fraud</i>, suap dan/atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik.</p>	<p>1. <i>Programs and procedures carried out in overcoming corrupt practices, kickbacks, fraud, bribery and/ or gratuities in Issuers or Public Companies.</i></p>	504-509	SEOJK 16 ARA
	<p>2. Pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik.</p>	<p>2. <i>Anti-corruption training/ socialization to employees of Issuers or Public Companies.</i></p>	509-510	
	<p>Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki Kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak dimilikinya kebijakan dimaksud.</p>	<p><i>In the event that the Issuer or Public Company does not have an anti-corruption policy, the reasons for not having the said policy should be explained.</i></p>		
<p>Penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>).</p> <p><i>Provision of funds to related parties and provision of large funds (large exposure).</i></p>	<p>Informasi yang perlu diungkap adalah jumlah total baki debit penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan kepada debitur inti (<i>individu atau grup</i>) per posisi laporan</p>	<p><i>Information that needs to be disclosed is the total amount of debit balances providing funds to related parties and to core debtors (individuals or groups) per report position.</i></p>	N/A	SEOJK 13
<p>Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lain.</p> <p><i>Transparency of the Bank's financial and non-financial conditions that have not been disclosed in other reports.</i></p>				SEOJK 13
<p>Informasi lain yang terkait dengan Tata Kelola Bank, antara lain berupa intervensi pemilik, perselisihan intern atau permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Bank.</p> <p><i>Other information related to Bank Governance, among others in the form of owner intervention, internal disputes or problems that arise as a result of the remuneration policy of the Bank.</i></p>			N/A	SEOJK 13
<p>Jumlah Penyimpangan (<i>Internal Fraud</i>).</p> <p><i>Number of Deviations (Internal Fraud).</i></p>	<p>Pengungkapan mengenai penyimpangan (<i>internal fraud</i>) paling sedikit mencakup:</p>	<p><i>Disclosure of irregularities (internal fraud) includes at least:</i></p>	N/A	
	<p>1. Jumlah penyimpangan (<i>internal fraud</i>) yang telah diselesaikan.</p> <p>2. Jumlah penyimpangan (<i>internal fraud</i>) yang sedang dalam proses penyelesaian di internal bank.</p> <p>3. Jumlah penyimpangan (<i>internal fraud</i>) yang belum diupayakan penyelesaian di internal bank.</p> <p>4. Jumlah penyimpangan (<i>internal fraud</i>) yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.</p>	<p>1. <i>Number of irregularities (internal fraud) that have been resolved.</i></p> <p>2. <i>The number of irregularities (internal fraud) that are in the process of being resolved at the internal bank.</i></p> <p>3. <i>The number of irregularities (internal fraud) that has not been attempted to be resolved in the internal bank.</i></p> <p>4. <i>Number of irregularities (internal fraud) that have been followed up through the legal process.</i></p>		

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page	Regulasi Regulation
Pembelian Kembali (<i>Buy Back</i>) Saham dan/atau Obligasi Bank. <i>Buy Back Bank Shares and/or Bonds.</i>	<ol style="list-style-type: none"> Kebijakan dalam melakukan pembelian kembali (<i>buy back</i>) saham atau obligasi Bank. Jumlah lembar saham dan/atau obligasi yang dibeli kembali. Harga pembelian kembali per lembar saham dan/atau obligasi. Peningkatan laba per lembar saham dan/atau obligasi. 	<ol style="list-style-type: none"> <i>Policy in buy back shares or bonds of the Bank.</i> <i>Number of shares and/or bonds repurchased.</i> <i>The repurchase price per share and/or bonds.</i> <i>Increase in earnings per share and/or bonds.</i> 	511 SEOJK 13
Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan/atau Kegiatan Politik Selama Periode Pelaporan. <i>Provision of Funds for Social Activities and/or Political Activities During the Reporting Period.</i>	Pengungkapan mengenai pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik paling sedikit meliputi pihak penerima dana dan jumlah dana yang diberikan.	<i>Disclosure regarding the provision of funds for social activities and/or political activities shall at least include the party receiving the funds and the amount of the funds given.</i>	474 SEOJK 13
Penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik. <i>Implementation of the Public Company governance guidelines for Issuers who issue equity securities or Public Companies.</i>	<ol style="list-style-type: none"> Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan dan/atau Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada). <p>Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <i>Statement regarding recommendations that have been implemented and/or</i> <i>Explanation of recommendations that have not been implemented, along with reasons and alternative implementations (if any).</i> <p><i>Disclosure of information can be presented in tabular form.</i></p>	512-515 SEOJK 16
Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2020 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi. <i>Assessment of GCG Implementation for the 2020 financial year which includes at least aspects of the Board of Commissioners and the Board of Directors.</i>	Memuat uraian mengenai:	<i>Contains a description of:</i>	ARA
	1. Kriteria yang digunakan dalam penilaian	1. <i>Criteria used in the assessment</i>	526
	2. Pihak yang melakukan penilaian	2. <i>The party conducting the assessment</i>	526
	3. Skor penilaian masing-masing kriteria	3. <i>Assessment score for each criterion</i>	526-527
	4. Rekomendasi hasil penilaian	4. <i>Recommended assessment results</i>	528-534
	5. Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi.	5. <i>Reasons for not/not implementing recommendations.</i>	
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY OF THE ISSUER OR PUBLIC COMPANY			
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. <i>Corporate social responsibility.</i>	1. Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	1. <i>Information disclosed in the social and environmental responsibility section is a Sustainability Report as referred to in the Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, containing at least :</i>	536 SEOJK 16
	a) Penjelasan strategi keberlanjutan.	a) <i>Sustainability strategy explanation.</i>	
	b) Ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup).	b) <i>Summary of sustainability aspects (economic, social, and environmental).</i>	
	c) Profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik.	c) <i>Brief profile of the Issuer or Public Company.</i>	
	d) Penjelasan Direksi.	d) <i>Explanation of the Board of Directors.</i>	
	e) Tata kelola keberlanjutan.	e) <i>Sustainability governance.</i>	
	f) Kinerja keberlanjutan.	f) <i>Sustainability performance.</i>	

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page	Regulasi Regulation
	g) Verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada.		
	h) Lembar umpan balik (<i>feedback</i>) untuk pembaca, jika ada.		
	i) Tanggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya.		
	2. Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.		
	3. Informasi Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) pada angka 1) dapat:		
	a) Diungkapkan pada bagian lain yang relevan di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti penjelasan Direksi terkait Laporan Keberlanjutan diungkapkan dalam bagian terkait Laporan Direksi; dan/atau		
	b) Merujuk pada bagian lain di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, seperti profil Emiten atau Perusahaan Publik.		
	4. Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) sebagaimana dimaksud pada angka 1) Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan.		
	5. Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan dimaksud harus:		
	a) Memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan		

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page	Regulasi Regulation
	b) Disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.		
	6. Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, maka dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan.		
	7. Penyampaian Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) yang disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.		
	b) <i>Be compiled according to the Technical Guidelines for the Preparation of a Sustainability Report for Issuers and Public Companies as listed in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter.</i>		
	6. <i>In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, then the social and environmental responsibility section contains information that information regarding social and environmental responsibility has been disclosed in the Sustainability Report which is presented separately from the Annual Report.</i>		
	7. <i>Submission of the Sustainability Report which is presented separately from the Annual Report must be submitted together with the submission of the Annual Report.</i>		

INFORMASI KEUANGAN FINANCIAL INFORMATION

Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggungjawab atas Laporan Keuangan. <i>Statement Letter of the Board of Directors and/or Board of Commissioners regarding Responsibility for Financial Statements.</i>	Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan.	<i>Compliance with related regulations regarding Responsibility for Financial Statements.</i>	LK Halaman Surat Pernyataan Direksi FS Pages Statement Letter of the Board of Directors	ARA
Opini auditor independen atas laporan keuangan. <i>Independent auditor's opinion on the financial statements.</i>			LK Halaman Opini Auditor FS Pages Auditor Opinion	ARA
Deskripsi Auditor Independen di Opini. <i>Description of the Independent Auditor in Opinion.</i>	Deskripsi memuat tentang: 1. Nama dan tanda tangan. 2. Tanggal Laporan Audit 3. Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik.	<i>The description contains about:</i> 1. <i>Name and signature.</i> 2. <i>Audit Report Date</i> 3. <i>Public Accountant Office's license number and Public Accountant license number.</i>	LK Halaman Opini Auditor FS Pages Auditor Opinion	ARA

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation		Halaman Page	Regulasi Regulation
Laporan keuangan yang lengkap. <i>Complete financial reports.</i>	Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan:	<i>Completely contains the elements of the financial statements:</i>		ARA
	1. Laporan posisi keuangan.	1. <i>Statement of financial position.</i>	LK Halaman 1-2 FS Pages 1-2	
	2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.	2. <i>Statement of profit or loss and other comprehensive income.</i>	LK Halaman 3-4 FS Pages 3-4	
	3. Laporan perubahan ekuitas.	3. <i>Statement of Changes in Equity.</i>	LK Halaman 5 FS Pages 5	
	4. Laporan arus kas.	4. <i>Cash flow statement.</i>	LK Halaman 6-7 FS Pages 6-7	
	5. Catatan atas laporan keuangan.	5. <i>Notes to financial statements.</i>	LK Halaman 8-267 FS Pages 8-267	
	6. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya.	6. <i>Comparative information about the previous period.</i>	LK Halaman 1-267 FS Pages 1-267	
	7. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau menyajikan kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan).	7. <i>Statement of financial position at the beginning of the previous period when the entity applies an accounting policy retrospectively or restates financial statement items, or when the entity reclassifies items in its financial statements (if relevant).</i>	N/A	
Perbandingan tingkat profitabilitas. <i>Comparison of profitability levels.</i>	Perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya	<i>Comparison of performance/profit (loss) for the current year with the previous year</i>	LK Halaman 3-4 FS Pages 3-4	ARA
Laporan Arus Kas. <i>Cash flow statement.</i>	Memenuhi ketentuan sebagai berikut:	<i>It should meet the following conditions:</i>		ARA
	1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan.	1. <i>Grouping into three categories of activities: operating, investing, and financing.</i>	LK Halaman 6-7 FS Pages 6-7	
	2. Penggunaan metode langsung (<i>direct method</i>) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi.	2. <i>Use the direct method to report cash flows from operating activities.</i>	LK Halaman 30 FS Pages 30	
	3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.	3. <i>Separation of presentation between cash receipts and or cash disbursements during the year in operating, investing and financing activities.</i>	LK Halaman 6-7 FS Pages 6-7	
	4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan.	4. <i>Disclosure of non-cash transactions must be included in the notes to the financial statements.</i>	N/A	

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation		Halaman Page	Regulasi Regulation
Ikhtisar Kebijakan Akuntansi. <i>Summary of Accounting Policies.</i>	Meliputi sekurang-kurangnya: 1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK. 2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan. 3. Pajak penghasilan. 4. Imbalan kerja. 5. Instrumen Keuangan.	<i>It includes at least:</i> 1. <i>Statement of compliance with Financial Accounting Standards.</i> 2. <i>Basis of measurement and preparation of financial statements.</i> 3. <i>Income tax.</i> 4. <i>Work benefits.</i> 5. <i>Financial Instruments.</i>	LK Halaman 29-30 FS Pages 29-30 LK Halaman 30-31 FS Pages 30-31 LK Halaman 79-82 FS Pages 79-82 LK Halaman 67-68 FS Pages 67-68 LK Halaman 35-55 FS Pages 35-55	ARA
Pengungkapan transaksi pihak berelasi. <i>Disclosure of related party transactions.</i>	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi. 2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait. 3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas terkait.	<i>The things that were disclosed included:</i> 1. <i>The name of the related party, as well as the nature and relationship with the related party.</i> 2. <i>The transaction value and its percentage to the total related revenues and expenses.</i> 3. <i>Total balance and its percentage to the total related assets or liabilities.</i>	LK Halaman 201-202 FS Pages 201-202 LK Halaman 202-207 FS Pages 202-207 LK Halaman 202-207 FS Pages 202-207	ARA
Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan. <i>Disclosures related to taxation.</i>	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini. 2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi. 3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan. 4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan. 5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak.	<i>The matters should disclose:</i> 1. <i>Fiscal reconciliation and calculation of current tax burden.</i> 2. <i>Explanation of the relationship between tax expense (income) and accounting profit.</i> 3. <i>The statement that the taxable profit (LKP) resulting from the reconciliation is used as the basis for filling out the Annual Corporate Income Tax Return.</i> 4. <i>The details of deferred tax assets and liabilities recognized in the statement of financial position for each presentation period, and the amount of deferred tax expense (income) recognized in profit or loss if the amount is not reflected in the amount of deferred tax assets or liabilities recognized in the statement of financial position.</i> 5. <i>Disclosure of whether or not there is a tax dispute.</i>	LK Halaman 175-176 FS Pages 175-176 LK Halaman 175-176 FS Pages 175-176 LK Halaman 176 FS Pages 176 LK Halaman 176-179 FS Pages 176-179 LK Halaman 179 FS Pages 179	ARA

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation		Halaman Page	Regulasi Regulation
<p>Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap.</p> <p><i>Disclosures relating to fixed assets.</i></p>	<p>Hal-hal yang harus diungkapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Metode penyusutan yang digunakan. 2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya. 3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya). 4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi. 	<p><i>The matters should disclose:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>The depreciation method used.</i> 2. <i>A description of the accounting policy chosen between the revaluation model and the cost model.</i> 3. <i>The significant methods and assumptions used in estimating the fair value of property, plant and equipment (for the revaluation model) or the disclosure of the fair value of property, plant and equipment (for the cost model).</i> 4. <i>Reconciliation of the gross carrying amount and accumulated depreciation of property, plant and equipment at the beginning and end of the period by showing: additions, subtractions and reclassifications.</i> 	<p>LK Halaman 55-56, 112 FS Pages 55-56, 112</p> <p>LK Halaman 55-56, 112 FS Pages 55-56, 112</p> <p>LK Halaman 55-56, 112 FS Pages 55-56, 112</p> <p>LK Halaman 110-112 FS Pages 110-112</p>	ARA
<p>Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi.</p> <p><i>Disclosures relating to operating segments.</i></p>	<p>Hal-hal yang harus diungkapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan. 2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan. 3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas. 4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama. 	<p><i>The matters should disclose:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>General information which includes the factors used to identify the reported segments.</i> 2. <i>Information about the profit or loss, assets and liabilities of the reported segment.</i> 3. <i>Reconciliation of total segment revenue, reportable segment profit or loss, segment assets, segment liabilities, and other material segment items to the related amounts within the entity.</i> 4. <i>Disclosure at the entity level, which includes information about products and/or services, geographic areas and key customers.</i> 	<p>LK Halaman 254-255 FS Pages 254-255</p>	ARA

Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation		Halaman Page	Regulasi Regulation
Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan. <i>Disclosures relating to Financial Instruments.</i>	Hal-hal yang harus diungkapkan:	<i>The matters should disclose:</i>		ARA
	1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya.	1. <i>Details of financial instruments owned based on their classification.</i>	LK Halaman 35-55, 187-189 FS Pages 35-55, 187-189	
	2. Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan.	2. <i>Fair values and their hierarchy for each group of financial instruments.</i>	LK Halaman 190 FS Pages 190	
	3. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas.	3. <i>Explanation of risks associated with financial instruments: market risk, credit risk and liquidity risk.</i>	LK Halaman 208-224 FS Pages 208-224	
	4. Kebijakan manajemen risiko.	4. <i>Risk management policy.</i>	LK Halaman 208-224 FS Pages 208-224	
	5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif.	5. <i>Quantitative analysis of risks associated with financial instruments.</i>	LK Halaman 208-224 FS Pages 208-224	
Penerbitan laporan keuangan. <i>Issuance of financial statements.</i>	Hal-hal yang diungkapkan antara lain:	<i>The things that were disclosed include:</i>	LK Halaman Surat Pernyataan Direksi FS Pages Statement Letter of the Board of Directors	ARA
	1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.	1. <i>The date the financial statements were authorized for issue.</i>		
	2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.	2. <i>The party responsible for authorizing the financial statements.</i>		

Keterangan

- SEOJK 16** : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- SEOJK 9** : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.
- SEOJK 13** : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- POJK 45** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.
- ARA** : Kriteria *Annual Report Award*
- SK 16** : Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2021 tentang Indikator Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Information

- SEOJK 16** : *Financial Services Authority Circular No.16/SEOJK.04/2021 concerning the Form and Content of the Annual Report of Issuers or Public Companies.*
- SEOJK 9** : *Financial Services Authority Circular No.9/SEOJK.03/2020 concerning Transparency and Publication of Conventional Commercial Bank Reports.*
- SEOJK 13** : *Financial Services Authority Circular No.13/SEOJK.03/2017 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.*
- POJK 45** : *Financial Services Authority Regulation No.45/POJK.03/2015 concerning Implementation of Good Corporate Governance in Providing Remuneration for Commercial Banks.*
- ARA** : *Annual Report Award Criteria*
- SK 16** : *A copy of the Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2021 concerning Parameter Indicators for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.*

LAPORAN KEUANGAN

Financial Statements

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
DENGAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI AND SUBSIDIARIES

*CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2021 AND 2020
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT*

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(SEBELUMNYA
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
AND ITS SUBSIDIARIES
(FORMERLY
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2021
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

**Halaman/
Page**

Daftar Isi

Table of Contents

Surat Pernyataan Direksi			<i>Directors' Statement</i>
Laporan Auditor Independen			<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.....	1-2	<i>Consolidated Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Kprehensif Lain Konsolidasian.....	3-4	<i>Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian.....	5	<i>Consolidated Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian.....	6-7	<i>Consolidated Statement of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian.....	8-258	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>
Informasi Tambahan: Informasi Keuangan Entitas Induk (Lampiran I-X).....	259-267	<i>Supplementary Information: Financial Information of Parent Entity (Attachment I-X)</i>

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI DAN ENTITAS ANAK (SEBELUMNYA PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK) LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 DESEMBER 2021 SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI AND ITS SUBSIDIARIES (FORMERLY PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) AND ITS SUBSIDIARIES) CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2021 AND FOR THE YEAR THEN ENDED WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Arief Mulyadi
Alamat Kantor : Menara PNM, Jl. Kuningan Mulia, Karet, Setiabudi, Jakarta 12920
Nomor Telepon : (021) 2511 404
Alamat Rumah : Jl. Bougenville B VI-73, Jatibening Permai, RT 003/RW 011, Jatibening, Pondok Gede, Bekasi
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Tjatur H. Priyono
Alamat Kantor : Menara PNM, Jl. Kuningan Mulia, Karet, Setiabudi, Jakarta 12920
Nomor Telepon : (021) 2511 404
Alamat Rumah : Asrama POLRI Cipinang, RT 012/RW 006, Cipinang, Pulo Gadung, Jakarta Timur
Jabatan : Direktur

menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian PT Permodalan Nasional Madani dan Entitas Anak (sebelumnya PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan Entitas Anak);
2. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Permodalan Nasional Madani dan Entitas Anak (sebelumnya PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan Entitas Anak) telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian PT Permodalan Nasional Madani dan Entitas Anak (sebelumnya PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan Entitas Anak) telah diungkapkan secara lengkap dan benar;
b. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Permodalan Nasional Madani dan Entitas Anak (sebelumnya PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan Entitas Anak) tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT Permodalan Nasional Madani dan Entitas Anak (sebelumnya PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan Entitas Anak).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned :

1. Name : Arief Mulyadi
Office Address : Menara PNM, Jl. Kuningan Mulia, Karet, Setiabudi, Jakarta 12920
Telephone : (021) 2511 404
Residential Address : Jl. Bougenville B VI-73, Jatibening Permai, RT 003/RW 011, Jatibening, Pondok Gede, Bekasi
Title : President Director
2. Name : Tjatur H. Priyono
Office Address : Menara PNM, Jl. Kuningan Mulia, Karet, Setiabudi, Jakarta 12920
Telephone : (021) 2511 404
Residential Address : Asrama POLRI Cipinang, RT 012/RW 006, Cipinang, Pulo Gadung, Jakarta Timur
Title : Director

declare that :

1. We are responsible for the preparation and the presentation of PT Permodalan Nasional Madani and Subsidiaries' (formerly PT Permodalan Nasional Madani (Persero) and Its Subsidiaries) Consolidated Financial Statements;
2. PT Permodalan Nasional Madani and Subsidiaries' (formerly PT Permodalan Nasional Madani (Persero) and Its Subsidiaries) Consolidated Financial Statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standard;
3. a. All information in the PT Permodalan Nasional Madani and Subsidiaries' (formerly PT Permodalan Nasional Madani (Persero) and Its Subsidiaries) Consolidated Financial Statements has been disclosed in a complete and truthful manner;
b. PT Permodalan Nasional Madani and Subsidiaries' (formerly PT Permodalan Nasional Madani (Persero) and Its Subsidiaries) Consolidated Financial Statements do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit any information or material facts;
4. We are responsible for PT Permodalan Nasional Madani and Subsidiaries' (formerly PT Permodalan Nasional Madani (Persero) and Its Subsidiaries) internal control system.

We certify the accuracy of this statement.

Jakarta, 7 Februari 2022 / February 7, 2022

Atas nama dan mewakili Direksi / For and on behalf of the Directors


Arief Mulyadi
Direktur Utama/
President Director


Tjatur H. Priyono
Direktur/
Director


CE0AJX681362119



Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan

Registered Public Accountants No. 854/KM.1/2015

Cyber 2 Tower 20th floor
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5
Jakarta 12950, Indonesia

Main +62 (21) 2553 9200
Fax +62 (21) 2553 9298

www.crowe.id

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00049/2.1051/AU.1/09/0518-2/1/III/2022

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO))

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Permodalan Nasional Madani (sebelumnya PT Permodalan Nasional Madani (Persero)) ("Perusahaan") dan entitas anaknya terlampir (secara kolektif disebut sebagai "Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

The original report included herein is in Indonesian language.

Independent Auditors' Report

Report No. 00049/2.1051/AU.1/09/0518-2/1/III/2022

The Shareholder, Boards of Commissioners and Directors
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO))

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Permodalan Nasional Madani (formerly PT Permodalan Nasional Madani (Persero)) (the "Company") and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2021, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

The original report included herein is in Indonesian language.

Halaman 2

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Permodalan Nasional Madani (sebelumnya PT Permodalan Nasional Madani (Persero)) dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Permodalan Nasional Madani (sebelumnya PT Permodalan Nasional Madani (Persero)) dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun berakhir pada tanggal tersebut terlampir dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan PT Permodalan Nasional Madani (sebelumnya PT Permodalan Nasional Madani (Persero)) (Entitas Induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"),

Page 2

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor's consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Permodalan Nasional Madani (formerly PT Permodalan Nasional Madani (Persero)) and its subsidiaries as of December 31, 2021, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Our audit of the accompanying consolidated financial statements of PT Permodalan Nasional Madani (formerly PT Permodalan Nasional Madani (Persero)) and its subsidiaries as of December 31, 2021 and for the year then ended was performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of PT Permodalan Nasional Madani (formerly PT Permodalan Nasional Madani (Persero)) (Parent Entity), which comprises the statement of financial position as of December 31, 2021, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended (collectively referred to as "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the

The original report included herein is in Indonesian language.


Halaman 3

yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Page 3

accompanying consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements.

Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan



Tjahjo Dahono, SE, CPA

Izin Akuntan Publik/*Public Accountant License* No. AP.0518
7 Februari 2022/*February 7, 2022*

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2021	2020	
ASET				ASSETS
Kas dan setara kas	2e,2d,4,27	4.020.608.620.727	4.462.197.480.623	Cash and cash equivalents
Portofolio efek				Portfolio of securities
diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	2e,5,27	1.184.264.100.940	524.808.898.763	measured at fair value through profit and loss
Pinjaman yang diberikan - setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.259.105.270.346 dan Rp674.515.381.879	2e,6,27,2h	32.377.175.612.102	22.088.984.903.818	Loans - net of allowance for impairment losses as of December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp1,259,105,270,346 and Rp674,515,381,879, respectively
Pembiayaan modal - setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp116.667.690.278 dan Rp114.731.525.571	2e,7,27,2h	768.094.030.173	846.572.933.315	Capital financing - net of allowance for impairment losses as of December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp116,667,690,278 and Rp114,731,525,571, respectively
Piutang jasa manajemen - setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp4.775.638.666 dan Rp1.131.889.737	2e,8,27	5.634.889.481	7.194.005.688	Management services receivables - net of allowance for impairment losses as of December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp4,775,638,666 and Rp1,131,889,737, respectively
Pendapatan masih akan diterima	2e,9,27	130.096.791.910	117.946.355.821	Accrued income
Piutang kegiatan manajer investasi	2e,10a,27	7.286.747.464	8.043.481.660	Investment manager activities receivables
Piutang lain-lain - setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp13.262.553.263 dan Rp13.235.563.278	2e,11,27	87.561.426.240	57.711.206.701	Other receivables - net of allowance for impairment losses as of December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp13,262,553,263 and Rp13,235,563,278, respectively
Pajak dibayar di muka	2z,22a	72.543.712.091	59.324.836.214	Prepaid taxes
Uang muka dan biaya dibayar di muka	2f,12	414.757.419.043	252.346.681.532	Advances and prepayments
Aset pajak tangguhan	2z,22e	375.803.163.709	215.587.444.020	Deferred tax assets
Aset tetap dan aset hak guna - setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp913.178.915.432 dan Rp792.021.410.183	2g,13	2.364.978.848.035	1.475.606.978.180	Fixed assets and right of use assets - net of accumulated depreciation as of December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp913,178,915,432 and Rp792,021,410,183, respectively
Portofolio efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2e,14,27	-	5.665.228.119	Portfolio of securities measured at fair value through other comprehensive income
Aset takberwujud - setelah dikurangi dengan akumulasi amortisasi per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp191.952.532.972 dan Rp114.437.061.200	2i,2k,15	117.955.394.071	168.073.632.504	Intangible assets - net of accumulated amortization as of December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp191,952,532,972 and Rp114,437,061,200, respectively
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	2s,16	11.036.222.656	1.137.240.496	Non-current assets classified as held for sale
Aset lain-lain - bersih	17	1.774.497.608.922	1.373.687.742.854	Other assets - net
TOTAL ASET		43.712.294.587.564	31.664.889.050.308	TOTAL ASSETS

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (continued)
December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2021	2020	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Utang bank dan lembaga keuangan	2e,18,27	11.313.395.911.950	6.224.831.456.650	Bank and financial institution borrowings
Surat utang jangka menengah dan sukuk	2e,19,27	6.090.000.000.000	3.890.500.000.000	Medium-term notes and sukuk
Utang obligasi	2e,20,27	10.078.282.733.571	9.413.489.879.625	Bonds payable
Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan lembaga kredit luar negeri	2e,21,27	3.923.440.295.353	3.041.762.100.124	Borrowings from the Government of the Republic of Indonesia and foreign credit institution
Utang pajak	2z,22b	338.434.594.191	122.292.791.187	Taxes payables
Dana cadangan angsuran	2e,23,27	4.876.287.627.913	2.520.978.720.026	Installment reserve fund
Utang kegiatan manajer investasi	2e,10b,27	1.477.865	4.144.473	Investment manager activities payables
Utang lain-lain	2e,24,27	323.368.663.976	384.107.996.141	Other payables
Beban yang masih harus dibayar	2e,25,27	296.450.868.847	415.692.220.754	Accrued expenses
Liabilitas pajak tangguhan	2z,22e	5.503.808.922	5.761.818.004	Deferred tax liabilities
Liabilitas imbalan kerja	2q,26	29.174.700.086	58.558.122.085	Employees benefit liabilities
Total Liabilitas		37.274.340.682.674	26.077.979.249.069	Total Liabilities
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:				Equity attributable to owners of the parent entity:
Modal saham - Saham biasa dengan nilai nominal				Share capital - Common stock
Rp1.000.000 per lembar saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020				at par value of Rp1,000,000 per share as of December 31, 2021 and 2020
Modal dasar - 9.200.000 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020				authorized - 9,200,000 shares as of December 31, 2021 and 2020
Modal ditempatkan dan disetor penuh 3.800.000 lembar saham per 31 Desember 2021 dan 2.300.000 lembar saham per 31 Desember 2020	29	3.800.000.000.000	2.300.000.000.000	Issued and fully paid 3,800,000 shares as of December 31, 2021 and 2,300,000 shares as of December 31, 2020
Penyertaan modal negara	30	-	1.500.000.000.000	State capital investment
Saldo laba:				Retained earnings:
Telah ditentukan penggunaannya:				Appropriated retained earnings:
Cadangan umum	31	537.241.280.550	537.241.280.550	General reserves
Cadangan bertujuan	31	30.632.515.845	30.632.515.845	Appropriated reserves
Belum ditentukan penggunaannya		2.045.597.843.110	1.204.819.762.884	Unappropriated retained earnings
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas nilai wajar aset keuangan melalui penghasilan komprehensif lain		(5.619.911.552)	45.316.567	Unrealized gain (loss) on financial assets at fair value through other comprehensive income
Keuntungan aktuarial atas program imbalan kerja		7.194.154.787	294.036.285	Actuarial gain on employee benefit program
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:		6.415.045.882.740	5.573.032.912.131	Total equity attributable to owners of the parent:
Kepentingan non-pengendali	28	22.908.022.150	13.876.889.108	Non-controlling interest
Total Ekuitas		6.437.953.904.890	5.586.909.801.239	Total Equity
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		43.712.294.587.564	31.664.889.050.308	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended
December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2021	2020	
Pendapatan bunga dan syariah	2t,33	8.425.155.643.903	5.605.264.350.638	Interest and sharia revenue
Beban bunga dan syariah	2t,34	(2.306.081.020.171)	(1.689.807.858.648)	Interest and sharia expenses
PENDAPATAN DAN BEBAN SYARIAH - BERSIH		6.119.074.623.732	3.915.456.491.990	INTEREST AND SHARIA REVENUE - NET
Pendapatan dari jasa giro, dividen dan bunga deposito berjangka	2t,35	96.724.483.396	106.598.063.881	Interest revenue on current account, dividend and time deposits
Pendapatan dari kegiatan manajer investasi	2t	54.674.825.894	51.421.228.815	Revenue from investment manager activities
Keuntungan terealisasi atas penjualan efek	35	13.905.735.088	10.678.267.117	Realized gains on sale of securities
Pendapatan dari jasa konsultasi manajemen	2t	5.958.672.800	190.455.200	Revenue from management consulting services
Pendapatan dari <i>Java Reconstruction Fund</i>	2r	-	2.105.000.004	Revenue from Java Reconstruction Fund
Beban usaha	2t,36	(5.345.940.120.307)	(3.870.282.142.486)	Operating expenses
Rugi penjualan aset tetap	2t,13	(464.707.625)	-	Loss on sale of fixed assets
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	2u	449.904.899	(145.360.609)	Gain (loss) on foreign exchange - net
Lain-lain - bersih	2r,2t,37	142.288.162.295	183.113.150.445	Others - net
LABA USAHA		1.086.671.580.172	399.135.154.357	OPERATING INCOME
Manfaat (beban) pajak penghasilan:				Income tax benefit (expense):
Pajak kini	2z,22c	(401.478.334.283)	(153.962.384.697)	Current tax
Pajak tangguhan	2z,22c	159.934.681.350	113.421.875.677	Deferred tax
Total beban pajak penghasilan		(241.543.652.933)	(40.540.509.020)	Total income tax expense
LABA TAHUN BERJALAN		845.127.927.239	358.594.645.337	INCOME FOR THE YEAR
Penghasilan komprehensif lain: Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Other comprehensive income: Item that will not be reclassified to profit or loss:
Kerugian atas perubahan nilai wajar aset keuangan melalui penghasilan komprehensif lain	38	(5.665.228.119)	-	Loss on changes in value of financial assets at fair value through other comprehensive income
Pengukuran kembali atas program imbalan pasca kerja	38	7.215.917.942	(6.922.673.712)	Remeasurement of employee benefit liabilities
Total Penghasilan Komprehensif Lain		1.550.689.823	(6.922.673.712)	Total Other Comprehensive Income
PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN		846.678.617.062	351.671.971.625	OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE
INCOME (continued)
For the Year Ended December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2021	2020	
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				<i>Income for the year attributable to:</i>
Pemilik entitas induk		840.778.080.226	358.180.083.833	<i>Owners of the parent</i>
Kepentingan non-pengendali	28	4.349.847.013	414.561.504	<i>Non-controlling interest</i>
Total		845.127.927.239	358.594.645.337	Total
Penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				<i>Other comprehensive income for the year attributable to:</i>
Pemilik entitas induk		842.328.769.367	351.257.408.540	<i>Owners of the parent</i>
Kepentingan non-pengendali	28	4.349.847.695	414.563.085	<i>Non-controlling interest</i>
Total		846.678.617.062	351.671.971.625	Total
Laba per saham Dasar dan dilusian, laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2m,39	221.257	244.214	<i>Earnings per share Basic and diluted, profit for the year attributable to owners of the parent</i>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO))
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO))
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGE IN EQUITY
For the Year Ended December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Modal Saham/ Share Capital	Penyertaan Modal Negara State Capital Investment	Saldo Laba/Retained Earnings			Kerugian yang Belum Direalisasi atas Nilai Wajar Aset Keuangan melalui Penghasilan Komprehensif lain/ Unrealized Gains on Financial Assets at Fair Value through Other Comprehensive Income	Keuntungan (Kerugian) Aktuarial atas Program Imbalan Kerja/ Actuarial Gains (Losses) on Employee Benefits Program	Total Ekuitas Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ Total Equity Attributable to Owners of the Parents	Kepentingan Nonpengendali/ Non-controlling Interest	Total Ekuitas/ Total Equity	
				Cadangan Umum/ General Reserves	Cadangan Bertujuan/ Appropriated Reserves	Saldo Laba belum Ditentukan Penggunaannya/ Unappropriated Retained Earnings						
Saldo per 1 Januari 2020		1.300.000.000.000	-	537.241.280.550	30.632.515.845	846.639.679.051	45.316.567	8.396.805.564	2.722.955.597.577	14.945.285.279	2.737.900.882.856	Balances as of January 1, 2020
Modal saham	29	1.000.000.000.000	(1.000.000.000.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	Share capital
Penyertaan modal negara	30	-	2.500.000.000.000	-	-	-	-	-	2.500.000.000.000	-	2.500.000.000.000	State capital investment
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	358.180.083.833	-	-	358.180.083.833	414.561.504	358.594.645.337	Income for the year
Kerugian komprehensif lainnya	-	-	-	-	-	-	-	(6.922.674.155)	(6.922.674.155)	(443)	(6.922.674.598)	Other comprehensive loss
Kepentingan non-pengendali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.482.957.232)	(1.482.957.232)	Non-controlling interest
Reklasifikasi ekuitas	-	-	-	-	-	-	-	(1.180.095.124)	(1.180.095.124)	-	(1.180.095.124)	Equity Reclassification
Saldo per 31 Desember 2020		2.300.000.000.000	1.500.000.000.000	537.241.280.550	30.632.515.845	1.204.819.762.884	45.316.567	294.036.285	5.573.032.912.131	13.876.889.108	5.586.909.801.239	Balances as of December 31, 2020
Modal saham	29	1.500.000.000.000	(1.500.000.000.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	Share capital
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	840.778.080.226	-	-	840.778.080.226	4.349.847.013	845.127.927.239	income for the year
Penghasilan komprehensif lainnya	-	-	-	-	-	-	(5.665.228.119)	7.215.917.260	1.550.689.141	682	1.550.689.823	Other comprehensive income
Kepentingan non-pengendali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.681.285.347	4.681.285.347	Non-controlling interest
Reklasifikasi ekuitas	-	-	-	-	-	-	-	(315.798.758)	(315.798.758)	-	(315.798.758)	Equity reclassification
Saldo per 31 Desember 2021		3.800.000.000.000	-	537.241.280.550	30.632.515.845	2.045.597.843.110	(5.619.911.552)	7.194.154.787	6.415.045.882.740	22.908.022.150	6.437.953.904.890	Balances as of December 31, 2021

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended
December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2021	2020	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Pengembalian penyaluran pinjaman	2d,2e,6	31.773.403.568.384	20.662.775.841.636	Payment of loan disbursement
Penerimaan dari pendapatan bunga	2d,33	8.487.250.073.163	5.359.063.272.103	Proceeds from interest income
Penerimaan usaha lainnya	2d,35	517.905.061.177	123.240.442.627	Other operating income
Pengembalian pembiayaan modal ventura	2d,2e,7	157.115.986.400	208.604.762.182	Payment on capital financing
Penerimaan dari jasa giro dan bunga deposito	2d,2t	105.883.187.585	112.350.637.322	Interest income on current account and deposits
Penerimaan pendapatan pembiayaan modal ventura	2d,33	82.932.238.026	73.278.911.404	Proceeds from capital financing revenue
Penerimaan dari jasa penasihat keuangan, konsultasi manajemen dan investasi	2d,2e,2t	70.551.137.954	62.640.290.454	Proceeds from financial and management consulting services and investment
Keuntungan penjualan portofolio efek	2d,2e,2t	2.365.144.906	860.483.198	Gain on sales of securities portfolio
Kenaikan penyaluran pinjaman	2d,2e,6	(42.712.862.420.708)	(25.495.011.124.926)	Increase in loan disbursement
Pembayaran kepada pegawai	2d,36	(3.793.533.093.176)	(2.634.795.267.192)	Payment for employees
Pembayaran bunga pinjaman dan kepada pihak ketiga	2d,34	(1.745.830.391.656)	(1.973.295.783.992)	Payments on loan interest and to the third parties
Pembayaran pajak	2d,2z,22	(544.311.116.311)	(204.791.421.536)	Payment for taxes
Kenaikan pembiayaan modal ventura	2d,2e,7	(155.724.882.303)	(126.981.987.948)	Increase in capital financing
Pembelian efek - bersih	2d,2e,5	(298.145.636)	(8.516.317.084)	Purchases on securities - net
Penerimaan lain-lain	2d,37	303.848.631.875	105.191.363.525	Other proceeds
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi		(7.451.305.020.320)	(3.735.385.898.227)	Net cash flows used in operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penjualan efek - bersih	2d,2e,5	200.000.000.000	139.126.049.169	Sales on marketable securities - net
Penjualan aset tetap	2d,13	76.785.736.508	7.822.484.700	Sales of fixed assets
Divestasi pada entitas asosiasi	2d,2e	-	18.799.394.177	Divestment in associates
Pembelian efek - bersih	2d,2e,5	(1.130.000.000.000)	(459.158.815.528)	Purchases on marketable securities - net
Pembelian aset tetap	2d,13	(1.121.135.717.140)	(224.644.253.034)	Purchases of fixed assets
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		(1.974.349.980.632)	(518.055.140.516)	Net cash flows used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan pinjaman bank	2d,2e,	16.685.426.455.430	8.531.019.951.846	Proceeds from bank borrowings
Penerimaan dana dari MTN	2d,2e,19	4.470.700.000.000	692.000.000.000	Proceeds from MTN
Penerimaan dana dari obligasi	2d,2e,20	3.666.200.000.000	1.983.800.000.000	Proceeds from bonds
Penerimaan dana dari hibah	2d,2e,2r,37	61.000.000.000	189.394.478.322	Receipt from the grant
Penerimaan dana dari pihak non-bank	2d,2e,2r,37	2.375.000.000	-	Receipt from non-bank
Penerimaan dari Penyertaan Modal Negara	2d,2e,30	-	2.500.000.000.000	Receipt from State Capital Investment
Pembayaran pinjaman bank	2d,2e,18	(10.662.297.685.706)	(7.138.312.760.726)	Payment for bank borrowing
Pembayaran pokok obligasi		(2.997.800.000.000)	(750.000.000.000)	Payment for bond settlement
Pembayaran untuk MTN	2d,2e,19	(2.229.500.000.000)	(390.000.000.000)	Payment for MTN
Pembayaran biaya emisi obligasi	2d,2e,20	(9.162.068.668)	(3.004.316.983)	Payment of bond issuance cost
Pembayaran dana kepada pihak non-bank	2d,2e	(2.875.560.000)	-	Payment of funds to non-bank
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan		8.984.066.141.056	5.614.897.352.459	Net cash flows provided by financing activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		(441.588.859.896)	1.361.456.313.716	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN		4.462.197.480.623	3.100.741.166.907	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	2d, 4	4.020.608.620.727	4.462.197.480.623	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL
MADANI (PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
CASH FLOWS (continued)
For the Year Ended
December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2021	2020	
KAS DAN SETARA KAS TERDIRI DARI:				CASH AND CASH EQUIVALENTS COMPRISE OF:
Kas	2d, 4	11.602.944.098	13.271.959.722	Cash on hand
Bank	2d, 4	3.016.948.001.897	3.087.305.520.901	Cash in bank
Deposito jangka pendek	2d, 4	992.057.674.732	1.361.620.000.000	Short-term deposits
Total		4.020.608.620.727	4.462.197.480.623	Total

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian Perusahaan

Perusahaan didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 tahun 1999 tanggal 25 Mei 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, yang pendiriannya dituangkan dalam Akta Pendirian No. 1 tanggal 1 Juni 1999 dibuat dihadapan Ida Sofia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") berdasarkan Surat Keputusan No. C-11.609.HT.01. 01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 4758/BH.09.05/VIII/99 tanggal 27 Agustus 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 1999, Tambahan No. 5681 ("Akta No. 1").

Akta No.1 tersebut telah diubah beberapa kali, dengan perubahan terakhir yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 59 tanggal 28 Oktober 2021 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahannya telah dicatat pada database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Permodalan Nasional Madani Nomor AHU-AH.01.03.0468167 pada tanggal 2 November 2021. Akta tersebut juga telah dicantumkan dalam Berita Negara No.089 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 034232 pada tanggal 3 November 2021.

Maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan melaksanakan kegiatan usaha Jasa Pembiayaan, Penyertaan, serta Jasa Manajemen dan Kemitraan. Sejalan dengan 9 agenda prioritas Pemerintah Republik Indonesia (NAWACITA) yang bertujuan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

1. GENERAL INFORMATION

a. Company Establishment

The Company was established based on the Government Regulation of Republic Indonesia No. 38 in 1999 dated on May 25, 1999 on the State Capital Investment of the Republic of Indonesia for Establishment of the Company (Persero) In Order to Development Cooperation, Small & Medium Enterprise, which it's establishment stated in Deed of Establishment No. 1 dated June 1, 1999, made by Ida Sofia, S.H., Notary in Jakarta, where the deed has been approved by the Minister of Law and Human Right of Indonesia No. C-11.609.HT.01. 01.TH.99 on June 23, 1999, and was registered in the Companies Registration Office of Central Jakarta Municipality under No. 4758/BH.09.05/VIII/99 dated August 27, 1999 and was published in Supplement No. 5681 of State Gazette No. 73 dated September 10, 1999. ("Deed No.1").

The Deed No.1 has been amended several times, with the latest amendment contained in the Deed of Statement of Shareholders' Decision No. 59 dated October 28, 2021 made before Hadijah, SH, Notary in Jakarta, whose notification of the amendment has been recorded in the Legal Entity Administration System database. Ministry of Law and Human Rights concerning Approval of Amendments to the Articles of Association of PT Permodalan Nasional Madani Number AHU-AH.01.03.0468167 on November 2, 2021. The deed has also been included in the State Gazette No.089 Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 034232 on November 3, 2021.

The purpose and objective of the Company is to conduct business in the field of empowerment and development of micro, small, medium, and cooperatives by carrying out business activities on Financing Services, Participation, and Management and Partnership Services. In line with the 9 priority agenda of the Government of the Republic of Indonesia (NAWACITA) which aims towards Indonesia being politically sovereign, and economically independent and peculiar in culture.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Perusahaan menjalankan bisnis komersil sejak tahun 1999 berdasarkan PP No. 38 tahun 1999. Pada tahun 2008 Perusahaan melakukan *turn-around* bisnisnya dengan melakukan pembiayaan langsung kepada pengusaha mikro, kecil, dan UKM melalui Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) sejak bulan Agustus tahun 2008. Dimulai dengan 12 unit ULaMM sebagai *pilot project*, saat ini Total unit ULaMM telah menjadi 1.163 unit ULaMM.

Pada akhir tahun 2015, Perusahaan melakukan ekspansi bisnis pada kelompok wanita prasejahtera dengan produk Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera). Pada 31 Desember 2021 dan 2020, Total nasabah Mekaar masing-masing sudah mencapai 11.011.194 nasabah dan 7.802.806 nasabah (tidak diaudit).

Kontribusi pendapatan dari pembiayaan Mekaar dan ULaMM pada pendapatan usaha Perusahaan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar 82,22% dan 16,84%.

Pada 31 Desember 2021, Perusahaan berkedudukan di Menara PNM, Jl. Kuningan Mulia, Karet, Setiabudi, Jakarta dan memiliki 62 kantor cabang ULaMM dan 2.985 kantor cabang Mekaar yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Pada 31 Desember 2020, Perusahaan berkedudukan di Menara Taspen (d.h. Gedung Arthaloka) Lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 2, Jakarta dan memiliki 62 kantor cabang ULaMM dan 2.668 kantor cabang Mekaar yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris

Arif Rahman Hakim
M. Sholeh Amin
Meidyah Indreswari
Veronica Colondam
Parman Nataatmadja

Dewan Direksi

Direktur Utama
Direktur Keuangan dan Operasional
Direktur Bisnis
Direktur Kelembagaan dan Perencanaan
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Arief Mulyadi
Tjatur Herry Priyono
Kindaris
Sunar Basuki
Anton Fahlevi

1. GENERAL (continued)

a. Company Establishment (continued)

The company began its commercial business since 1999 in according to the PP No. 38 year 1999. In 2008 the Company conducted *turn-around* its business with direct financing to micro, small, and SMEs through Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) since August of 2008. Starting with 12 units ULaMM as a pilot project, the current number of units has been a 1,163 ULaMM.

At the end of 2015, the Company has done a business expansion to Company of underprivileged women through product of Mekaar (Fostering Economic Family Welfare). As of December 31, 2021 and 2020, the customers of Mekaar has reached 11,011,194 customers and 7,802,806 customers, respectively (unaudited).

The revenue contribution from financing of Mekaar and ULaMM on the Company's operating revenues as of December 31, 2021 were 82.22% and 16.84%, respectively.

As of December 31, 2021, the Company is domiciled at Menara PNM, Jl. Kuningan Mulia, Karet, Setiabudi, Jakarta and has 62 ULaMM branch offices and 2,985 Mekaar branch offices spread throughout Indonesia.

The Company is located in Taspen Tower (formerly known as Arthaloka Building), 6th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 2, Jakarta and had 62 branch offices of ULaMM and 2,668 branch offices of Mekaar spread throughout Indonesia.

b. Board of Commissioners, Directors and Employees

The composition of the Boards of Commissioners and Directors of the Company as of December 31, 2021 are follows:

Board of Commissioners

President Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Commissioner

Board of Directors

President Director
Finance and Operation Director
Business Director
Institutional and Planning Director
Compliance and Risk Management Director

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (lanjutan)

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. SK-120/MBU/04/2021 tanggal 16 April 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama Perusahaan Perseroan PT Permodalan Nasional Madani, Kementerian BUMN memberhentikan dengan hormat Sdr. Rully Indrawan dan mengangkat Sdr. Arif Rahman Hakim sebagai Komisaris Utama Perusahaan Perseroan PT Permodalan Nasional Madani.

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. SK-179/MBU/05/2021 tanggal 28 Mei 2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Permodalan Nasional Madani, Kementerian BUMN memberhentikan dengan hormat Sdr. M.Q. Gunadi sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko dan Sdr. Noer Fajrieansyah sebagai Direktur Kelembagaan Perusahaan Perseroan PT Permodalan Nasional Madani.

Selanjutnya Kementerian BUMN mengubah nomenklatur jabatan anggota Direksi Perusahaan, sebagai berikut:

Sebelumnya	Menjadi
Direktur Keuangan	Direktur Keuangan dan dan Operasional
Direktur Kelembagaan	Direktur Kelembagaan dan Perencanaan

Selain itu, Kementerian BUMN juga mengalih tugaskan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perusahaan, sebagai berikut:

Sebelumnya/Formerly	Menjadi/Current
Direktur Keuangan/ Finance Director	Tjatur H. Priyono
Direktur Bisnis/ Business Director	Anton Fahlevie

Selain itu, Kementerian BUMN juga mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perusahaan, sebagai berikut:

Direktur Bisnis	Kindaris
Direktur Kelembagaan dan Perencanaan	Sunar Basuki

1. GENERAL (continued)

b. Board of Commissioners, Directors and Employees (continued)

Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) as the General Meeting of Shareholders of PT Permodalan Nasional Madani No. SK-120/MBU/04/2021 dated April 16, 2021 concerning the Dismissal and Appointment of the President Commissioner of the Company PT Permodalan Nasional Madani, Ministry of SOEs respectfully dismissed Mr. Rully Indrawan and appointed Mr. Arif Rahman Hakim as President Commissioner of the Company PT Permodalan Nasional Madani.

Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) as the General Meeting of Shareholders of PT Permodalan Nasional Madani No. SK-179/MBU/05/2021 dated May 28, 2021 concerning Dismissal, Change of Position Nomenclature, Transfer of Tasks, and Appointment of Members -Members of the Board of Directors of the Company PT Permodalan Nasional Madani, Ministry of SOEs honorably dismiss Mr. M.Q. Gunadi as Director of Compliance and Risk Management and Mr. Noer Fajrieansyah as Institutional Director of the Company PT Permodalan Nasional Madani.

Furthermore, the Ministry of SOE's changed the nomenclature of the positions of the members of the Board of Directors of the Company, as follows:

Formerly	Current
Finance Director	Director of Finance and Operational
Institutional Director	Director of Institutional and Planning

In addition, the Ministry of SOE's has also appointed the names below as members of the Board of Directors of the Company, as follows:

Menjadi/Current
Direktur Keuangan dan Operasional/ Finance and Operations Director
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko/ Compliance and Risk Management Director

In addition, the Ministry of State Owned Enterprises (SOEs) has also appointed the names below as members of Directors of the Company, as follows:

Business Director
Institutional and Planning Director

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (lanjutan)

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris

Rully Indrawan
M. Sholeh Amin
Meidyah Indreswari
Veronica Colondam
Parman Nataatmadja

Dewan Direksi

Direktur Utama
Direktur Keuangan
Direktur Bisnis
Direktur Kelembagaan
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Arief Mulyadi
Tjatur Herry Priyono
Anton Fahlevie
Noer Fajriiansyah
M.Q. Gunadi

Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab Dewan Direksi

Dewan Direksi merupakan organ Perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolegal dalam pelaksanaan manajemen Perusahaan agar berfungsi secara maksimal. Masing-masing anggota Dewan Direksi melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya.

Pembagian tugas Direksi PT Permodalan Nasional Madani mengacu kepada Surat Peretujuan Dewan Komisaris No. S-042/PNM-KOM/IX/20 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Peretujuan Struktur Organisasi PT Permodalan Nasional Madani yang berlaku efektif tanggal 14 Oktober 2020 sebagai berikut:

- 1) **Direktur Utama**
 - Bertanggung jawab atas berjalannya fungsi Satuan Pengawas Intern;
 - Bertanggung jawab atas berjalannya fungsi Sekretariat Perusahaan;
 - Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas Unit Usaha Syariah;
 - Mengkoordinir dan bertanggungjawab atas pelaksanaan *Business Support* dan Pengembangan Portofolio Mekaar.
- 2) **Direktur Bisnis**
 - Melakukan koordinasi dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas *Executive Vice President* ULaMM;
 - Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengelolaan Bisnis Mekaar I;

1. GENERAL (continued)

b. Board of Commissioners, Directors and Employees (continued)

The composition of the Boards of Commissioners and Directors of the Company as of December 31, 2020 are follows:

Board of Commissioners

President Commissioner/Independent Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Commissioner

Board of Directors

President Director
Finance Director
Business Director
Institutional Director
Compliance and Risk Management Director

The Scope and Responsibilities of the Board of Directors

Board of Directors is the Company organ that carries the collegial duties and responsibilities in implementing corporate management to its maximum function. Every member of the Board of directors carries the duty and makes decisions according to their respective job divisions and authorities.

Segregation duties of the Board of Directors of PT Permodalan Nasional Madani refers to the Approval Letter of the Board of Commissioners No. S-042/PNM-KOM/IX/20 dated October 14, 2020 on the Approval of Organizational Structure PT Permodalan Nasional Madani effective on October 14, 2020 as follows:

- 1) **President Director**
 - Responsible for the functioning of the Internal Audit Unit;
 - Responsible for the function of Corporate Secretary;
 - Coordinating and be responsible for Sharia Business Unit;
 - Coordinating and responsible for the implementation of Business Support and Development of Portfolio Mekaar.
- 2) **Business Director**
 - Coordinating and responsible for the implementation of Executive Vice President ULaMM duties;
 - Coordinating and responsible for the implementation of Business Management of Mekaar I;

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (lanjutan)

Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab Dewan Direksi (lanjutan)

2) Direktur Bisnis (lanjutan)

- Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengelolaan Bisnis Mekaar II;
- Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengelolaan Bisnis Mekaar III;
- Mengkoordinir dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Mekaar.

3) Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

- Mengkoordinir dan mendukung seluruh aktivitas Direksi dalam hal implementasi dari seluruh program kerja yang telah ditetapkan dalam RKAP dan RJPP dengan berlandaskan *Good Corporate Governance*;
- Bertanggung jawab untuk memonitor, mengkoordinasikan dan memastikan tercapainya *Key Performance Indicator* (KPI) sesuai dengan Kontrak Manajemen;
- Bertanggungjawab atas berjalannya fungsi manajemen risiko dan *Good Corporate Governance*;
- Melakukan koordinasi dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas *Executive Vice President* Pengembangan dan Legal.

4) Direktur Keuangan dan Operasional

- Bertanggungjawab atas pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia;
- Melakukan koordinasi dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas *Executive Vice President* Keuangan dan Operasional.

5) Direktur Kelembagaan dan Perencanaan

- Bertanggungjawab atas berjalannya fungsi sistem teknologi informasi, baik pengembangan strategis teknologi informasi maupun infrastruktur dan operasional teknologi informasi;
- Bertanggung jawab atas berjalannya fungsi Perencanaan dan Riset;
- Mengkoordinir dan bertanggungjawab atas pengelolaan Jasa Manajemen dan Kemitraan untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK);

1. GENERAL (continued)

b. Board of Commissioners, Directors and Employees (continued)

The Scope and Responsibilities of the Board of Directors (continued)

2) Business Director (continued)

- Coordinating and responsible for the implementation of Business Management of Mekaar II;
- Coordinating and responsible for the implementation of Business Management of Mekaar III;
- Coordinating and responsible for the implementation of Business Support and Development of Mekaar.

3) Director of Compliance and Risk Management

- Coordinate and support all activities of the Directors in terms of the implementation of the entire program of work set out in RKAP and RJPP on the basis of *Good Corporate Governance*;
- Responsible for monitoring, coordinating and ensuring the achievement of *Key Performance Indicator* (KPI) in accordance with Contract Management;
- Responsible for function of risk management and *Good Corporate Governance*;
- Coordinating and responsible for the implementation of *Executive Vice President* Development and Legal duties.

4) Director of Finance and Operations

- Responsible for the management and development of Human Resources;
- Coordinating and responsible for the implementation of *Executive Vice President* Finance and Operational duties.

5) Institutional and Planning Director

- Responsible for the function of information technology system, both strategic development of information technology and information technology infrastructure and operations;
- Responsible for the function of Planning and research;
- Coordinating and responsible of Management Services for Small and Micro Enterprises (SME);

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (lanjutan)

Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab Dewan Direksi (lanjutan)

- 5) Direktur Kelembagaan dan Perencanaan (lanjutan)
- Mengkoordinir dan bertanggungjawab atas pengelolaan LKMS, PKBL, serta pengendalian afiliasi dan entitas anak;
 - Mengkoordinir dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Usaha.
- 6) *Executive Vice President* ULaMM
- Mengkoordinir dan bertanggungjawab atas aktivitas penagihan dan remedial untuk menjaga aset Perusahaan;
 - Bertanggungjawab atas pembinaan dan pengawasan ULaMM;
 - Bertanggungjawab atas pengelolaan dan pengembangan ULaMM I di Wilayah Barat (Sumatera, DKI Jakarta, dan Jawa Barat);
 - Bertanggungjawab atas pengelolaan dan pengembangan ULaMM II di Wilayah Timur (Seluruh Indonesia kecuali Sumatera, DKI Jakarta, dan Jawa Barat).
- 7) *Executive Vice President* Pengembangan dan Legal
- Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas fungsi-fungsi *corporate legal*;
 - Bertanggungjawab atas berjalannya fungsi Perencanaan dan Riset;
- 8) *Executive Vice President* Keuangan dan Operasional
- Bertanggungjawab atas pengelolaan fungsi-fungsi *accounting, treasury* dan pendanaan;
 - Bertanggungjawab atas berjalannya fungsi dan sistem operasi;
 - Bertanggungjawab atas berjalannya fungsi pendukung dan pemeliharaan infrastruktur untuk mendukung proses bisnis Perusahaan.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 total karyawan tetap Perusahaan masing-masing berjumlah 3.841 karyawan (tidak diaudit) dan 3.683 karyawan (tidak diaudit).

1. GENERAL (continued)

b. Boards of Commissioners, Directors and Employees (continued)

The Scope and Responsibilities of the Board of Directors (continued)

- 5) *Institutional and Planning Director (continued)*
- *To coordinate and be responsible for the management and control LKMS, PKBL, affiliates and subsidiaries;*
 - *Coordinating and be responsible for the implementation of the Capacity Development of Business.*
- 6) *Executive Vice President of ULaMM*
- *Coordinating and responsible for collecting and remedial activities to safeguard the Company's assets;*
 - *Responsible for the development and supervision of ULaMM;*
 - *Responsible for the management and development of ULaMM I in the Western Region (Sumatera, DKI Jakarta, and West Java);*
 - *Responsible for the management and development of ULaMM II in the Eastern Region (Throughout Indonesia except for Sumatera, DKI Jakarta, and West Java).*
- 7) *Executive Vice President of Development and Legal Functions*
- *Coordinating and responsible of corporate legal functions;*
 - *Responsible for the function of Planning and Research;*
- 8) *Executive Vice President of Finance and Operations*
- *Responsible for managing accounting, treasury and funding functions;*
 - *Responsible for operations function and system;*
 - *Responsible for supporting the functioning and maintenance of infrastructure to support the business processes of the Company.*

As of December 31, 2021 and 2020 the Company's has total employees of 3,841 (unaudited) and 3,683 (unaudited), respectively.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Komite Audit

Susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Ketua	Meidyah Indreswari
Anggota	Edy Karim
Anggota	R. Yudha Kusumah

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani No. SK-004/PNM-KOM/IX/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani, Dewan Komisaris mengangkat Sdr. Edy Karim sebagai Anggota Komite Audit sekaligus merangkap Sekretaris Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani No. SK-005/PNM-KOM/XI/2020 tanggal 25 November 2020 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani, Dewan Komisaris mengangkat Sdr. R. Yudha Praja Kusumah sebagai Anggota Komite Audit sekaligus merangkap Sekretaris Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani.

Manajemen kunci Perusahaan cakupannya adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris;
2. Direksi;
3. Executive Vice President;
4. Kepala Divisi;
5. Kepala SPI;
6. Kepala SPR;
7. Pemimpin Cabang ULaMM;
8. Kepala Regional Mekaar;
9. Koordinator Pengawas Mekaar;
10. Komite Audit;
11. Komite Nominasi dan Remunerasi;
12. Dewan Pengawas Syariah.

1. GENERAL (continued)

c. Audit Committee

The composition of the Company's Audit Committee as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

Chairman
Member
Member

Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Permodalan Nasional Madani No. SK-004/PNM-KOM/IX/2020 dated September 1, 2020 concerning the Appointment of Members of the Audit Committee of PT Permodalan Nasional Madani, the Board of Commissioners appointed Mr. Edy Karim as a Member of the Audit Committee and concurrently as Secretary of the Audit Committee of PT Permodalan Nasional Madani.

Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Permodalan Nasional Madani No. SK-005/PNM-KOM/XI/2020 dated November 25, 2020 concerning the Appointment of Members of the Audit Committee of PT Permodalan Nasional Madani, the Board of Commissioners appointed Mr. R. Yudha Praja Kusumah as a Member of the Audit Committee and concurrently as Secretary of the Audit Committee of PT Permodalan Nasional Madani.

The scope of key managements of the Company as follows:

1. Boards of Commissioners;
2. Boards of Directors;
3. Executive Vice President;
4. Head of Division;
5. Head of SPI;
6. Head of SPR;
7. Leader of ULaMM Branch;
8. Head of Mekaar Regional;
9. Coordinators of Mekaar Controller;
10. Audit Committee;
11. Remuneration and Nominative Committee;
12. Boards of Controller Sharia.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Satuan Pengawasan Intern

Sesuai dengan Peraturan OJK No. IX.1.7, Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan telah mengesahkan *Internal Audit Charter* (Piagam Internal Audit) pada tanggal 8 April 2021, dan selanjutnya Direksi Perusahaan telah menunjuk Sdr. Siswo Pujono sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) berdasarkan Surat Direksi Perusahaan No.SK-0033/PNM/DIR/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021.

Audit Intern diharapkan mampu memberikan nilai tambah dan membantu terciptanya *Good Corporate Governance* bagi Perusahaan. Untuk mewujudkan misi tersebut, misi SPI adalah memberikan suatu penilaian secara independen kepada manajemen mengenai kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian manajemen pada semua kegiatan Perusahaan melalui *assurance* (pengujian dan penilaian dan pemberian jasa konsultasi).

Fungsi

1) Peran Auditor Intern

Memberikan jasa *assurance* dan *consulting* yang independen dan objektif untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan efektivitas kegiatan operasional Perusahaan melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern, proses *governance* dengan melaksanakan audit operasional dan keuangan Perusahaan.

2) *Good Corporate Governance*

Tujuan utama dari penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada SPI adalah untuk meningkatkan kontribusi SPI dalam melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi dan solusi untuk memperbaiki *governance process* dengan cara meningkatkan prinsip transparansi, independensi, responsibilitas, akuntabilitas, dan kewajaran.

1. GENERAL (continued)

d. Internal Audit Unit

In accordance with the Regulation of FSA No. IX.1.7, Board of Directors and Commissioners has endorsed the *Internal Audit Charter* (Charter of Internal Audit) dated April 8, 2021, and then the Board of Directors of the Company has been appointed Mr. Siswo Pujono as Head of Internal Control Units by the Board of Directors Letter No.SK-0033/PNM/DIR/X/2021 dated October 21, 2021.

Internal audit is expected to be able to provide added value and help to promote *Good Corporate Governance* for the Company. To achieve this mission, SPI's mission is to provide an independent assessment to management on the adequacy and effectiveness of management control systems on all of its activities through *assurance* (testing and assessment and provision of consultancy services).

Function

1) *Role of the Internal Auditor*

Provide independent and objective assurance and consulting services for providing value added services and enhance the effectiveness of the Company's operational activities through evaluating and improving the effectiveness of risk management, internal controls, governance processes to implement the Company's operational and financial audits.

2) *Good Corporate Governance*

The main purpose of applying *Good Corporate Governance* (GCG) in SPI is to increase the contribution of SPI in making assessments and give recommendations and solutions to improve the governance process by increasing the principles of transparency, independence, responsibility, accountability and fairness.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

Kedudukan dan Ruang Lingkup

1) Kedudukan

- a) SPI berada langsung di bawah Direktur Utama, sehingga laporan yang diterbitkan juga langsung disampaikan kepada Direktur Utama;
- b) SPI dipimpin oleh Kepala SPI yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris, dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama;
- c) Kepala SPI dapat diberhentikan oleh Direktur Utama apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor SPI sebagaimana diatur dalam *Internal Audit Charter* dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas;
- d) Auditor yang berhak duduk dalam SPI bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala SPI.

2) Ruang Lingkup

Ruang lingkup pekerjaan audit intern tidak terbatas pada hal-hal berikut ini:

- a) Mereviu dan menilai kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian keuangan dan administrasi;
- b) Mencakup segala aspek dan unsur dari Perusahaan, sehingga mampu menunjang analisis yang optimal dalam membantu proses pengambilan keputusan oleh manajemen.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang

1) Tugas dan tanggung jawab SPI

- a) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan;
- b) Membuat analisis dan penilaian atas efisiensi di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung;
- c) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen dan selanjutnya melakukan pemantauan, analisis dan pelaporan terkait pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;

1. GENERAL (continued)

The Status and Scope

1) The Status

- a) SPI are directly under the President Director, so that the published reports are also directly submitted to the President Director;
- b) SPI headed by Chief SPI appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners, and responsible to President Director;
- c) Head of SPI may be removed by the President Director if which concerned not fulfill requirements referred to in SPI auditor Internal Audit Charter and failed or incompetent or run errands;
- d) Auditors are entitled to sit in the SPI are directly responsible to the Head of Internal Audit.

2) Scope

The scope of internal audit work are not limited to the following:

- a) Review and assess the adequacy and effectiveness of the financial control and administrative structure;
- b) Covering all aspects and elements of the Company, so it can support the analysis of the optimal in helping the process of decision making by the Company's management.

Duties, Responsibilities and Authorities

1) Duties and responsibilities of SPI

- a) Testing and evaluating the implementation of the internal control and risk management systems in accordance with the Company's policy;
- b) Make the analysis and assessment of the efficiency in the areas of finance, accounting, operations and other activities through direct inspection and supervision indirectly;
- c) Suggest improvements and objective information about the activities examined at all levels of management and subsequent monitoring, analysis and reporting related to the follow-up improvements that have been suggested;

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Satuan Pengawasan Intern (lanjutan)

**Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang
(lanjutan)**

- 1) Tugas dan tanggung jawab SPI (lanjutan)
 - d) Bekerjasama dengan Komite Audit dan berkoordinasi hal-hal dalam hubungan dengan kegiatan pemeriksa eksternal.
- 2) Kewenangan SPI
 - a) Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
 - b) Melakukan koordinasi kegiatan dengan kegiatan auditor eksternal;
 - c) Melakukan rapat secara berkala dan insidental, serta melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan para anggotanya.
- 3) Tugas dan tanggung jawab Manajemen:
 - a) Menerapkan kebijakan mengenai teknologi informasi, sistem pengendalian intern yang efektif, serta manajemen risiko secara konsisten dan menyeluruh, baik yang bersifat operasional maupun non-operasional;
 - b) Menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan Perusahaan untuk memaksimalkan nilai Perusahaan;
 - c) Bertanggung jawab untuk melakukan tindakan pencegahan atas kecurangan (*fraud*);
 - d) Melaksanakan tindak lanjut dan koreksi atas hasil audit SPI.

Pelaporan

Kepala SPI menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada:

- 1) Direktur bidang yang terkait langsung dengan objek audit;
- 2) Komisaris melalui Komite Audit;
- 3) Kepala Divisi/Unit yang diaudit untuk diketahui dan selanjutnya ditindaklanjuti.

1. GENERAL (continued)

d. Internal Audit Unit (continued)

**Duties, Responsibilities and Authorities
(continued)**

- 1) *Duties and responsibilities of SPI (continued)*
 - d) *Corporate with the Audit Committee and coordinate matters in connection with the activities of the external auditor.*
- 2) *Internal Audit Authority*
 - a) *To access whole relevant information about the Company in relation to the duties and functions;*
 - b) *Coordinating activities with the activities of the external auditor;*
 - c) *Conducting regular meetings and incidental, and communicate directly with the Board of Directors, the Board of Commissioners, the Audit Committee and it's members.*
- 3) *Duties and responsibilities of the Management:*
 - a) *Implementing the policies regarding information technology, effective system of internal control, and risk management in a consistent and thorough manners, both of operational and non-operational;*
 - b) *Applying the principles of Good Corporate Governance in the management of the Company to maximize the value of the Company;*
 - c) *Responsible for prevention of fraud;*
 - d) *Implementing the follow-up and corrective activities of the results of the SPI audit.*

Reporting

Head of SPI submits the audit reports to the President Director with copies to:

- 1) *Director of field directly related to the object of the audit;*
- 2) *Commissioners through the Audit Committee;*
- 3) *Head of Division/Unit to be audited to be known and then followed up.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Satuan Pengawasan Intern (lanjutan)

Pelaporan (lanjutan)

Secara periodik *Internal Audit Charter* ini perlu dinilai kecukupannya oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris agar pelaksanaan Audit Intern senantiasa berada pada tingkat optimal. *Internal Audit Charter* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat perkembangan terhadap kegiatan usaha Perusahaan, maka *Internal Audit Charter* ini akan diadakan penyesuaian seperlunya.

e. Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No.IX.1.4 dan berdasarkan Surat Dewan Komisaris Nomor: S-033/PNM-KOM/VII/21 tanggal 15 Juli 2021, tentang Pengesahan Jabatan Sekretaris Perusahaan PT Permodalan Nasional Madani telah menyetujui penggantian pejabat Sekretaris Perusahaan PT Permodalan Nasional Madani dari posisi sebelumnya dijabat oleh Sdr. Errinto Pardede dan digantikan oleh Sdr. L. Dodot Patria Ary.

Adapun tugas dan tanggung jawab pokok Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- 2) Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan Perusahaan;
- 3) Memberikan masukan kepada Direksi untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal;
- 4) Sebagai penghubung atau *contact person* dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan masyarakat.

f. Dewan Pengawas Syariah

Susunan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan ditetapkan berdasarkan atas Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Nomor: SK-146/MBU/07/2019 tanggal 3 Juli 2019 tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Perseroan PT Permodalan Nasional Madani.

1. GENERAL (continued)

d. Internal Audit Unit (continued)

Reporting (continued)

Periodically the *Internal Audit Charter* needs to be assessed for adequacy by the President Director and the Board of Commissioners that the implementation of the *Internal Audit* is always at the optimum level. *Internal Audit Charter* shall come into force on the date and in the future if there is a development of the Company's business activities, the *Internal Audit Charter* will take the necessary adjustment.

e. Corporate Secretary

In accordance with Bapepam-LK Regulation No.IX.1.4 and based on the Letter of the Board of Commissioners Number: S-033/PNM-KOM/VII/21 dated July 15, 2021, regarding Ratification of Position of Corporate Secretary PT Permodalan Nasional Madani has approved the replacement of officials of Corporate Secretary PT Permodalan Nasional Madani from the previous position held by Mr. Errinto Pardede to and replaced by Mr. L. Dodot Patria Ary.

The principal duties and responsibilities of the Company secretary are follows:

- 1) Following the development of the Capital Market in particular rules that apply in the Capital Market;
- 2) Providing the public with any information needed investors relating to the Company;
- 3) Advise the Directors to comply with the statutory provisions in force in the Capital Market;
- 4) As a liaison or contact person with the Financial Services Authority (OJK) and the public.

f. Sharia Supervisory Board

The composition of the Company's Sharia Supervisory Board is determined based on the Decree of the Minister of SOEs as the Company's GMS Number: SK-146/MBU/07/2019 dated July 3, 2019 concerning the Appointment of Members of PT Permodalan Nasional Madani's Sharia Supervisory Board of Companies.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

f. Dewan Pengawas Syariah (lanjutan)

Susunan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Ketua	K.H. Didin Hafidhuddin	Chairman
Anggota	Muhammad Syafii Antonio	Member

Adapun tugas dan tanggung jawab pokok Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu melakukan pengawasan atas kegiatan unit-unit usaha di lingkungan Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).
- 2) Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Dewan Direksi dalam hal ini melalui Direktur Bisnis Perusahaan.
- 3) Sebagai mediator antara Perusahaan dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
- 4) Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan di Perusahaan dimana DPS akan melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan Perusahaan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan oleh DSN.

g. Penawaran Umum Obligasi

Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021

Pada tanggal 13 Desember 2021, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahun 2021 dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: S-227/D.04/2021 tanggal 30 November 2021.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I 2021 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 Desember 2021. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 3,75% per tahun, berjangka waktu 370 hari kalender.

1. GENERAL (continued)

f. Sharia Supervisory Board (continued)

The Company's Sharia Supervisory Board as of December 31, 2021 and 2020 is as follows:

Chairman	K.H. Didin Hafidhuddin
Member	Muhammad Syafii Antonio

The duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board is as follows:

- 1) Assisting to supervise the activities of the business units of the Company which run business based on sharia principles in order not to deviate from the rules and principles of Sharia has regulated by the Sharia National Council (DSN).
- 2) As advisors and providers of advice to the Board of Directors in this regard through the Company's Director of Micro Business I and II.
- 3) As a mediator between the Company and DSN to communicate proposals and suggestions development of sharia financial products and services that require further investigation and the fatwa of DSN.
- 4) As a representative DSN placed in the Company where DPS will report the business activities and the development of The Company as conditions regulated by the DSN.

g. Public Offering of Bonds

Revolving Bonds IV PNM Tranche I Year 2021

On December 13, 2021, the Company issued Revolving Bond IV PNM Year 2021 with a principal amount of Rp6,000,000,000,000. Bonds has been declared effectively by the Financial Services Authority (FSA=OJK) based on Decree No.S-227/D.04/2021 dated November 30, 2021.

The Company publishes and offers Revolving Bond IV PNM Tranche I in 2021 and had been recorded on the Indonesia Stock Exchange on December 13, 2021. The bonds of the Company consists of:

- Series A: Total principal amount of Rp1,000,000,000,000, fixed interest rate of 3.75% per year, a period of 370 calendar days.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

g. Penawaran Umum Obligasi (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021 (lanjutan)

- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 5,50% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri C: Jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 6,25% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan 20 Desember 2022 untuk Obligasi Seri A, 10 Desember 2024 untuk Obligasi Seri B, dan 10 Desember 2026 untuk Obligasi Seri C.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V 2021 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 Maret 2021. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp168.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 6,25% per tahun, berjangka waktu 370 hari kalender.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp159.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri C: Jumlah pokok sebesar Rp339.200.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,25% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan 17 Maret 2022 untuk Obligasi Seri A, 17 Maret 2024 untuk Obligasi Seri B, dan 17 Maret 2026 untuk Obligasi Seri C.

1. GENERAL (continued)

g. Public Offering of Bonds (continued)

Revolving Bonds IV PNM Tranche I Year 2021 (continued)

- Series B: Total principal amount of Rp1,000,000,000,000, fixed interest rate of 5.50% per year, a period of 3 years.
- Series C: Total principal amount of Rp1,000,000,000,000, fixed interest rate of 6.25% per annum, a term of 5 years.

Bond interest payment made every 3 (three) months from the date of March 10, 2022 until December 20, 2022 for Series A Bonds, December 20, 2024 for the Series B Bonds and December 20, 2026 for the Series C Bonds.

Revolving Bond III PNM Tranche V Year 2021

On May 23, 2019, the Company issued Revolving Bond III PNM Year 2019 with a principal amount of Rp6,000,000,000,000. Bonds has been declared effectively by the Financial Services Authority (FSA=OJK) based on Decree No.S-58/D.04/2019 dated May 23, 2019.

The Company publishes and offers Revolving Bond III PNM Tranche V in 2021 and had been recorded on the Indonesia Stock Exchange on March 18, 2021. The bonds of the Company consists of:

- Seri A: Total principal amount of Rp168,000,000,000, fixed interest rate of 6.25% per annum, a period of 370 calendar days.
- Seri B: Total principal amount of Rp159,000,000,000, fixed interest rate of 7.25% per annum, a period of 3 years.
- Seri C: Total principal amount of Rp339,200,000,000, fixed interest rate of 8.25% per annum, a term of 5 years.

Bond interest payment made every 3 (three) months from the date of June 17, 2021 until March 17, 2022 for Series A Bonds, March 17, 2024 for the Series B Bonds and March 17, 2026 for the Series C Bonds.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

g. Penawaran Umum Obligasi (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV 2020 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Desember 2020. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp904.800.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 6,50% per tahun, berjangka waktu 370 hari kalender.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp537.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 7,75% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri C: Jumlah pokok sebesar Rp292.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan 4 Desember 2021 untuk Obligasi Seri A, 4 Desember 2023 untuk Obligasi Seri B, dan 4 Desember 2025 untuk Obligasi Seri C.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2020 dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

1. GENERAL (continued)

g. Public Offering of Bonds (continued)

Revolving Bond III PNM Tranche IV Year 2020

On May 23, 2019, the Company issued Revolving Bond III PNM Year 2019 with a principal amount of Rp6,000,000,000,000. Bonds has been declared effective by the Financial Services Authority (OJK) based on Decree No. S-58/D.04/2019 dated May 23, 2019.

The Company publishes and offered Revolving Bonds III PNM Tranche IV in 2020 and had been recorded on the Indonesia Stock Exchange on December 7, 2020. The Company bonds consist of:

- Series A: Total principal amount of Rp904,800,000,000, fixed interest rate of 6.50% per annum, a period of 370 calendar days.
- Series B: Total principal amount of Rp537,000,000,000, fixed interest rate of 7.75% per annum, a period of 3 years.
- Series C: Total principal amount of Rp292,000,000,000, fixed interest rate of 8.75% per annum, a term of 5 years.

Bonds interest will be paid every 3 (three) months from March 4, 2021 to December 4, 2021 for Series A Bonds and December 4, 2023 for the Series B Bonds and December 4, 2025 for the Series C Bonds.

Revolving Bond III PNM Tranche III Year 2020

On May 23, 2019, the Company issued Revolving Bonds III PNM Year 2020 with a principal amount of Rp6,000,000,000,000. Bonds has been declared effective by the Financial Services Authority (OJK) based on Decree No. S-58/D.04/2019 dated May 23, 2019.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

g. Penawaran Umum Obligasi (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020 (lanjutan)

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III 2020 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 Mei 2020. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Total pokok sebesar Rp55.100.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,40% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri B: Total pokok sebesar Rp194.900.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,00% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan 30 April 2023 untuk Obligasi Seri A dan 30 April 2025 untuk Obligasi Seri B.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S- 58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 November 2019. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Total pokok sebesar Rp586.500.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,40% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri B: Total pokok sebesar Rp763.500.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan 28 November 2022 untuk Obligasi Seri A dan 28 November 2024 untuk Obligasi Seri B.

1. GENERAL (continued)

g. Public Offering of Bonds (continued)

Revolving Bond III PNM Tranche III Year 2020 (continued)

The Company published and offered Revolving Bonds III PNM Tranche III in 2020 and had been recorded on the Indonesia Stock Exchange on May 4, 2020. The Company bonds consist of:

- Series A: Total principal amount of Rp55,100,000,000, fixed interest rate of 8.40% per annum, a term of 3 years.
- Series B: Total principal amount of Rp194,900,000,000, fixed interest rate of 9.00% per annum, a term of 5 years.

Bonds interest will be paid every 3 (three) months from July 30, 2020 to April 30, 2023 for Series A Bonds and April 30, 2025 for the Series B Bonds.

Revolving Bond III PNM Tranche II Year 2019

On May 23, 2019, the Company issued Revolving Bond III PNM Year 2019 with a principal amount of Rp6,000,000,000,000. Bonds has been declared effective by the Financial Services Authority (OJK) based on Decree No. S-58/D.04/2019 dated May 23, 2019.

The Company published and offered Revolving Bonds III PNM Tranche II year 2019 and had been recorded on the Indonesia Stock Exchange on November 29, 2019. The Company bonds consist of:

- Series A: Total principal amount of Rp586,500,000,000, fixed interest rate of 8.40% per annum, a term of 3 years.
- Series B: Total principal amount of Rp763,500,000,000, fixed interest rate of 8.75% per annum, a term of 5 years.

Bond interest payment made every 3 (three) months from the date of August 28, 2019 until November 28, 2022 for Series A Bonds and November 28, 2024 for the Series B Bonds.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

g. Penawaran Umum Obligasi (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Mei 2019. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Total pokok sebesar Rp1.401.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri B: Total pokok sebesar Rp599.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,85% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan 28 Mei 2022 untuk Obligasi Seri A dan 28 Mei 2024 untuk Obligasi Seri B.

Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018

Pada tanggal 21 Juni 2017, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahun 2017 dengan jumlah pokok sebesar Rp4.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-345/D.04/2017 tanggal 21 Juni 2017.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 April 2018. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

1. GENERAL (continued)

g. Public Offering of Bonds (continued)

Revolving Bonds III PNM Tranche I Year 2019

On May 23, 2019, the Company issued Revolving Bond III PNM Year 2019 with a principal amount of Rp6,000,000,000,000. Bonds has been declared effective by the Financial Services Authority (OJK) based on Decree No. S-58/D.04/2019 dated May 23, 2019.

The Company publishes and offers Revolving Bond III PNM Tranche I Year 2019 and had been recorded on the Indonesia Stock Exchange on May 29, 2019. The Company bonds consist of:

- Series A: Total principal amount of Rp1,401,000,000,000, fixed interest rate of 9.50% per annum, a term of 3 years.
- Series B: Total principal amount of Rp599,000,000,000, fixed interest rate of 9.85% per annum, a term of 5 years.

Bonds interest will be paid every 3 (three) months from August 28, 2019 until May 28, 2022 for Series A Bonds and May 28, 2024 for the Series B Bonds.

Revolving Bonds II PNM Tranche II Year 2018

On June 21, 2017, the Company issued Revolving Bond II PNM Year 2017 with principal amount of Rp4,000,000,000,000. Bonds had been declared effective by the Financial Services Authority (OJK) based on Decree No. S-345/D.04/2017 dated June 21, 2017.

The Company published and offered Revolving Bond II PNM Tranche II in 2018 and had been recorded on the Indonesia Stock Exchange on April 16, 2018. The Company bonds consist of:

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

g. Penawaran Umum Obligasi (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018 (lanjutan)

- Seri A: Total pokok sebesar Rp1.254.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,00% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri B: Total pokok sebesar Rp1.246.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,50% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan 13 April 2021 untuk Obligasi Seri A dan 13 April 2023 untuk Obligasi Seri B.

Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017

Pada tanggal 21 Juni 2017, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017 dengan jumlah pokok sebesar Rp4.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-345/D.04/2017 tanggal 21 Juni 2017.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 Juli 2017. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Total pokok sebesar Rp750.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri B: Total pokok sebesar Rp750.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan 12 Juli 2020 untuk Obligasi Seri A dan 12 Juli 2022 untuk Obligasi Seri B.

Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016

Pada tanggal 12 Desember 2014, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2014 dengan jumlah pokok sebesar Rp2.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-534/D.04/2014 tanggal 12 Desember 2014.

1. GENERAL (continued)

g. Public Offering of Bonds (continued)

Revolving Bonds II PNM Tranche II Year 2018 (continued)

- Series A: Total principal amount of Rp1,254,000,000,000, fixed interest rate of 8.00% per annum, a term of 3 years.
- Series B: Total principal amount of Rp1,246,000,000,000, fixed interest rate of 8.50% per annum, a term of 5 years.

Bond interest payment made every 3 (three) months from July 13, 2018 until April 13, 2021 for Series A Bonds and April 13, 2023 for the Series B Bonds.

Revolving Bond II PNM Tranche I Year 2017

On June 21, 2017, the Company issued Revolving Bond II PNM Tranche Year 2017 with principal amount of Rp4,000,000,000,000. Bonds has been declared effective by the Financial Services Authority (OJK) based on Decree No. S-345/D.04/2017 dated June 21, 2017.

The Company published and offered Revolving Bond II PNM Tranche I Year 2017 and had been recorded on the Indonesia Stock Exchange on July 13, 2017. The Company bonds consist of:

- Series A: Total principal amount of Rp750,000,000,000, fixed interest rate of 8.75% per annum, a term of 3 years.
- Series B: Total principal amount of Rp750,000,000,000, fixed interest rate of 9.25% per annum, a term of 5 years.

Bond interest payment will be paid 3 (three) months from October 12, 2017 to July 12, 2020 for Series A Bonds and July 12, 2022 for the Series B Bonds.

Revolving Bonds I PNM Tranche II Year 2016

On December 12, 2014, the Company issued Revolving Bonds I PNM Tranche I Year 2014 with principal amount of Rp2,000,000,000,000. Bonds has been declared effective by the Financial Services Authority (OJK) based on Decree No. S-534/D.04/2014 dated December 12, 2014.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

g. Penawaran Umum Obligasi (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016 (lanjutan)

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 November 2016. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Total pokok sebesar Rp661.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,00% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri B: Total pokok sebesar Rp839.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan 3 November 2019 untuk Obligasi Seri A dan 3 November 2021 untuk Obligasi Seri B.

h. Struktur Entitas Anak

Perusahaan memiliki penyertaan langsung lebih dari 50% saham entitas anak dan/atau mempunyai kendali atas manajemen entitas anak per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

g. Public Offering of Bonds (continued)

Revolving Bonds I PNM Tranche II Year 2016 (continued)

The Company publishes and offers Revolving Bond I PNM Tranche II Year 2016 and had been recorded on the Indonesia Stock Exchange on November 4, 2016. The bonds of the Company consists of:

- Series A: Total principal amount of Rp661,000,000,000, fixed interest rate of 9.00% per annum, a term of 3 years.
- Series B: Total principal amount of Rp839,000,000,000, fixed interest rate of 9.50% per annum, a term of 5 years.

Bonds interest will be paid every 3 (three) months from February 3, 2017 to November 3, 2019 to Series A Bonds and November 3, 2021 for the Series B Bonds.

h. The Subsidiaries Structure

The Company has direct ownership investment of more than 50% and/or has control on the Subsidiaries' management as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

2021

Entitas Anak/ The Subsidiaries	Lokasi/ Location	Jenis Usaha/ Business Type	Periode/ Period	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownerships	Total Aset/ Total Assets
<u>Kepemilikan Langsung/ Direct Investment:</u>					
PT PNM Investment Management	Jakarta	Manajer Investasi/ Investment Manager	Des/Dec 2021	99,9991%	227.041.871.091
PT PNM Venture Capital	Jakarta	Modal Ventura/ Venture Capital	Des/Dec 2021	99,9997%	3.067.855.025.224
<u>Kepemilikan Tidak Langsung/ Indirect Investment:</u>					
PT PNM Ventura Syariah	Jakarta	Modal Ventura Syariah dan Jasa Manajemen/ Sharia Venture Capital and Management Services	Des/Dec 2021	Dimiliki PNM VC sebesar 99,998%/ Owned by PNM VC at 99.998%	727.137.592.531
PT Mitra Niaga Madani	Jakarta	Persewaan dan Perdagangan/ Rental and Trading	Des/Dec 2021	Dimiliki PNM VC sebesar 99,953%/ Owned by PNM VC at 99.953%	1.029.408.510.154

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

h. Struktur Entitas Anak (lanjutan)

h. The Subsidiaries Structure (continued)

2021

Entitas Anak/ The Subsidiaries	Lokasi/ Location	Jenis Usaha/ Business Type	Periode/ Period	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownerships	Total Aset/ Total Assets
PT Mitra Utama Madani	Jakarta	Jasa Alih Daya/ Outsourcing Services	Des/Dec 2021	Dimiliki PNM VC sebesar 90,000%/ Owned by PNM VC at 90.000%	37.203.797.556
PT Mitra Tekno Madani	Jakarta	Jasa Manajemen IT/ IT Management Services	Des/Dec 2021	Dimiliki PNM VC sebesar 98,966%/ Owned by PNM VC at 98.966%	88.131.055.348
PT Mitra Proteksi Madani	Jakarta	Jasa Pialang Asuransi/ Insurance Broker Services	Des/Dec 2021	Dimiliki PNM VC sebesar 90,000%/ Owned by PNM VC at 90.000%	86.601.152.646
PT Micro Madani Institute	Jakarta	Jasa Konsultasi Manajemen/Management Consulting Services	Des/Dec 2021	Dimiliki PNM VC sebesar 94,444%/ Owned by PNM VC at 94.444%	183.004.546.492
PT Mitra Bisnis Madani	Jakarta	Persewaan dan Perdagangan/ Rental and Trading	Des/Dec 2021	Dimiliki PNM VC sebesar 99,897%/ Owned by PNM VC at 99,897%	498.371.506.331
PT Mitra Dagang Madani	Jakarta	Perdagangan dan Jasa/ Trading House	Des/Dec 2021	Dimiliki PNM VC sebesar 99,96%/ Owned by PNM VC at 99,96%	24.090.384.498
PT Crom Madani Indonesia	Jakarta	Perdagangan dan Jasa/ Trading House	Des/Dec 2021	Dimiliki PNM VC sebesar 100%/ Owned by PNM VC at 100%	5.616.670.369
PT Karya Digital Madani	Jakarta	Perdagangan dan Jasa/ Trading House	Des/Dec 2021	Dimiliki PNM VC sebesar 53%/ Owned by PNM VC at 537%	10.000.000.000
PT BPRS PNM Patuh Beramal	Mataram	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/ Sharia Rural Bank	Des/Dec 2021	Dimiliki PNM VS sebesar 76,372%/ Owned by PNM VS at 76.372%	26.808.184.535
PT BPRS PNM Mentari	Garut	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/ Sharia Rural Bank	Des/Dec 2021	Dimiliki PNM VS sebesar 64,659%/ Owned by PNM VS at 64.659%	109.006.515.543
PT BPR Rizky Barokah	Jakarta	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/ Sharia Rural Bank	Des/Dec 2021	Dimiliki PNM VS sebesar 86,667%/ Owned by PNM VS at 86.667%	56.245.626.000
PT BPRS Haji Miskin	Padang	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/ Sharia Rural Bank	Juni/Dec 2021	Dimiliki PNM VS sebesar 74,710%/ Owned by PNM VS at 74.710%	64.105.803.496

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

h. Struktur Entitas Anak (lanjutan)

h. The Subsidiaries Structure (continued)

2020

Entitas Anak/ The Subsidiaries	Lokasi/ Location	Jenis Usaha/ Business Type	Periode/ Period	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownerships	Total Aset/ Total Assets
<u>Kepemilikan Langsung/ Direct Investment:</u>					
PT PNM Investment Management	Jakarta	Manajer Investasi/ Investment Manager	Des/Dec, 2020	99,9991%	212.557.441.304
PT PNM Venture Capital	Jakarta	Modal Ventura/ Venture Capital	Des/Dec, 2020	99,9997%	2.826.241.611.149
<u>Kepemilikan Tidak Langsung/ Indirect Investment:</u>					
PT PNM Ventura Syariah	Jakarta	Modal Ventura Syariah dan Jasa Manajemen/ Sharia Venture Capital and Management Services	Des/Dec, 2020	Dimiliki PNM VC sebesar 99,998%/ Owned by PNM VC at 99.998%	561.445.045.231
PT Mitra Niaga Madani	Jakarta	Persewaan dan Perdagangan/ Rental and Trading	Des/Dec, 2020	Dimiliki PNM VC sebesar 99,953%/ Owned by PNM VC at 99.953%	1.033.703.813.135
PT Mitra Utama Madani	Jakarta	Jasa Alih Daya/ Outsourcing Services	Des/Dec, 2020	Dimiliki PNM VC sebesar 90,000%/ Owned by PNM VC at 90.000%	22.019.565.538
PT Mitra Tekno Madani	Jakarta	Jasa Manajemen IT/ IT Management Services	Des/Dec, 2020	Dimiliki PNM VC sebesar 98,966%/ Owned by PNM VC at 98.966%	47.845.029.359
PT Mitra Proteksi Madani	Jakarta	Jasa Pialang Asuransi/ Insurance Broker Services	Des/Dec, 2020	Dimiliki PNM VC sebesar 90,000%/ Owned by PNM VC at 90.000%	36.101.661.965
PT Micro Madani Institute	Jakarta	Jasa Konsultasi Manajemen/Management Consulting Services	Des/Dec, 2020	Dimiliki PNM VC sebesar 94,444%/ Owned by PNM VC at 94.444%	147.224.714.917
PT Mitra Bisnis Madani	Jakarta	Persewaan dan Perdagangan/ Rental and Trading	Des/Dec, 2020	Dimiliki PNM VC sebesar 99,897%/ Owned by PNM VC at 99.897%	329.140.211.983
PT Mitra Dagang Madani	Jakarta	Perdagangan dan Jasa/ Trading House	Des/Dec, 2020	Dimiliki PNM VC sebesar 99,957%/ Owned by PNM VC at 99.957%	39.363.888.072
PT BPRS PNM Patuh Beramal	Mataram	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/ Sharia Rural Bank	Des/Dec, 2020	Dimiliki PNM VS sebesar 76,372%/ Owned by PNM VS at 76.372%	73.915.357.045
PT BPRS PNM Mentari	Garut	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/ Sharia Rural Bank	Des/Dec, 2020	Dimiliki PNM VS sebesar 64,659%/ Owned by PNM VS at 64.659%	106.605.134.195

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

h. Struktur Entitas Anak (lanjutan)

h. The Subsidiaries Structure (continued)

2020

Entitas Anak/ The Subsidiaries	Lokasi/ Location	Jenis Usaha/ Business Type	Periode/ Period	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownerships	Total Aset/ Total Assets
<u>Kepemilikan Tidak Langsung/ (lanjutan)</u> <u>Indirect Investment: (continued)</u>					
PT BPR Rizky Barokah	Jakarta	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/ Sharia Rural Bank	Des/Dec, 2020	Dimiliki PNM VS sebesar 86,667%/ Owned by PNM VS at 86.667%	56.275.903.000
PT BPRS Haji Miskin	Padang	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/ Sharia Rural Bank	Des/Dec, 2020	Dimiliki PNM VS sebesar 51,950%/ Owned by PNM VS at 51.950%	62.198.358.733

PT PNM Investment Management, berdiri dan beroperasi pada tanggal 7 Mei 1996 di Jakarta, yang bergerak dalam bidang usaha manajemen investasi, penasihat investasi, dan aktivitas lain yang berhubungan dengan manajemen investasi sesuai dengan peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 Perusahaan memiliki karyawan masing-masing sejumlah 47 dan 37 karyawan (tidak diaudit).

PT PNM Investment Management, was established and operated on May 7, 1996 in Jakarta is engaged in investment management, business advisory services and other activities relating to investment management in accordance with the capital market regulations and other related laws. As of December 31, 2021 and 2020, the Company had a total of 47 and 37 employees, respectively (unaudited).

PT PNM Venture Capital, berdiri dan beroperasi pada tanggal 28 Oktober 1999, bergerak dalam bidang usaha modal ventura untuk membiayai usaha skala menengah, khususnya yang bersifat investasi dengan pola penyertaan modal, (diharapkan akan melepas investasinya di perusahaan pasangan usaha dalam jangka waktu yang telah ditentukan), akuisisi melalui obligasi konversi dan bagi hasil. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 Perusahaan memiliki karyawan masing-masing sejumlah 91 dan 99 karyawan (tidak diaudit).

PT PNM Venture Capital, established and operated on October 28, 1999 in Jakarta, is engaged in venture capital to finance medium-size enterprises, especially the character of the investment with the pattern of capital investment, (is expected to release its investment in the venture is within a predetermined time), acquisitions through convertible bonds and profit sharing. As of December 31, 2021 and 2020, the Company had a total of 91 and 99 employees, respectively (unaudited).

i. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

i. Completion of the Consolidated Financial Statements

Direksi bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak ("Grup"). Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak telah diotorisasi oleh Dewan Direksi pada tanggal 7 Februari 2022.

The Directors are responsible for the preparation of the Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries ("Group"). These Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries were authorised by the Board of Directors on February 7, 2022.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah seperti dijabarkan di bawah ini:

a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang terdiri dari PSAK dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK") serta Peraturan No. VIII.G.7 mengenai Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan prinsip kesinambungan usaha serta mengikuti konvensi harga historis, nilai kini, nilai realisasi bersih, dan/atau nilai wajar. Kebijakan akuntansi ini ditetapkan secara konsisten, kecuali apabila dinyatakan adanya perubahan dalam kebijakan akuntansi yang dianut.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan yang dibuat dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021, kecuali bagi penerapan beberapa SAK diubah. Seperti diungkapkan dalam catatan-catatan terkait, beberapa diubah dan standar akuntansi diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2021 dan 2020.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan basis akrual dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing masing akun tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The principal accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements are set out below:

a. Compliance with the Financial Accounting Standards

The consolidated financial statements the Company have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("FAS"), which comprise the SFAS and Interpretations of Statement of Financial Accounting Standard ("ISFAS") issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants ("FASB") and Regulation No. VIII.G.7 regarding the Guidance on Financial Statements Presentation and Disclosures.

The consolidated financial statements are prepared based on going concern principle and historical cost basis, present value, net realizable value, and/or fair value. The accounting policies set out consistently, except when stated to a change in accounting policy.

The accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements are consistent with those made in the preparation of the Company's consolidated financial statements for the year ended December 31, 2021, except for the adoption of several amended FAS. As disclosed further in the relevant succeeding Notes, several amended and published accounting standards were adopted effective January 1, 2021 and 2020.

The consolidated financial statements have been prepared on the accrual basis using the historical cost basis of accounting, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies for those accounts.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (lanjutan)

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep harga perolehan, yang dimodifikasi untuk akun aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Laporan keuangan konsolidasian disusun menggunakan basis akrual, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Grup.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian, dibulatkan dan disajikan dalam Rupiah ("Rp") penuh, kecuali dinyatakan lain, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan Entitas Anak.

Laporan keuangan Entitas Anak disusun untuk periode pelaporan yang sama dengan Perusahaan Induk. Kebijakan akuntansi yang dipakai dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian telah diterapkan secara konsisten oleh Perusahaan dan Entitas Anak, kecuali dinyatakan lain.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi kritis tertentu. Hal ini juga mengharuskan manajemen untuk menggunakan pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang melibatkan tingkat yang lebih tinggi dari penilaian atau kompleksitas, atau area di mana asumsi dan estimasi yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan dalam Catatan 3.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Compliance with the Financial Accounting Standards (continued)

The consolidated financial statements have been prepared under the historical cost concept, as modified by financial assets measured at fair value through other comprehensive income and financial assets and financial liabilities measured at fair value through profit or loss. The consolidated financial statements have been prepared using the accrual basis except for the consolidated statement of cash flow.

The consolidated statement of cash flows is prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

The reporting currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Indonesian Rupiah, which is the Group's functional currency.

b. Basis for Preparation of the Consolidated Financial Statements

Figures in the consolidated financial statements are rounded to and stated in Rupiah ("Rp"), unless otherwise specified, which is the functional currency of the Company and Subsidiaries.

The financial statements of the Subsidiaries are prepared for the same reporting period as the Parent. The accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements have been consistently applied by the Company and its Subsidiaries, unless otherwise stated.

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 3.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

Grup menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") baru dan revisi yang efektif sejak tanggal Grup. Perubahan kebijakan akuntansi Grup telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

Berikut ini adalah standar akuntansi keuangan, perubahan, dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2021.

- Penyesuaian tahunan PSAK No. 1: "Penyajian laporan keuangan";
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 13: "Properti Investasi";
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 48: "Penurunan nilai aset";
- PSAK No. 112 "Akuntansi wakaf";
- Amendemen PSAK No. 22 "Kombinasi bisnis";
- Amendemen PSAK No. 71: "Instrumen keuangan";
- Amendemen PSAK No. 55: "Instrumen keuangan: Pengakuan dan pengukuran";
- PSAK No. 62: "Kontrak asuransi";
- Amendemen PSAK No. 60: "Instrumen keuangan: Pengungkapan";
- Amendemen PSAK No. 73: "Sewa";
- PSAK No. 110: "Akuntansi Sukuk"; dan
- PSAK No. 111: "Akuntansi Wa'd".

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan konsolidasian di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Basis for Preparation of the Consolidated Financial Statements (continued)

Changes to Statements of Financial Accounting Standards (SFAS) and Interpretation of Statement of Financial Accounting Standards (ISFAS)

The Group adopted new and revised of Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("IFAS") that are effective from that date. Changes in the Group accounting policies have been made as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards and interpretations .

The followings are financial accounting standard, amendments and interpretation of financial accounting standard which become effective starting 1 January 2021.

- Annual improvement SFAS No. 1: "Presentation of financial statements";
- Annual improvement SFAS No. 13: "Investment properties";
- Annual improvement PSAK No. 48: "Asset impairment"
- SFAS No. 112 "Accounting for endowments";
- Amendment of SFAS No. 22 "Business combination";
- Amendment of SFAS No. 71: "Financial instrument";
- Amendment of SFAS No. 55: "Financial instrument: Recognition and measurement";
- SFAS No. 62: "Insurance contract";
- Amendment of SFAS No. 60: "Financial instrument: Disclosure";
- Amendment of SFAS No. 73: "Lease";
- SFAS No. 110: "Sukuk Accounting"; and
- SFAS No. 111: "Wa'd Accounting"

The implementation of the above standards did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material impact to the consolidated financial statements for current or prior financial years.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Prinsip Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian

Entitas anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal dimana Perusahaan memperoleh pengendalian, dan terus dikonsolidasi sampai dengan tanggal ketika kontrol tersebut berhenti. Pengendalian dianggap ada apabila Perusahaan memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak, lebih dari setengah kekuasaan suara suatu entitas.

Secara spesifik, Grup mengendalikan *investee* jika dan hanya jika Grup memiliki seluruh hal berikut ini:

- a. Kekuasaan atas *investee* (misal, hak yang ada memberikan kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan *investee*),
- b. Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan
- c. Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Ketika Perusahaan memiliki kurang dari hak suara mayoritas, Grup dapat mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah memiliki kekuasaan atas *investee* tersebut:

- a. Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara yang lain.
- b. Hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain.
- c. Hak suara dan hak suara potensial Perusahaan.

Grup menilai kembali apakah investor mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Konsolidasi atas Entitas Anak dimulai ketika Perusahaan memiliki pengendalian atas entitas anak dan berhenti ketika Perusahaan kehilangan pengendalian atas Entitas Anak. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban atas Entitas Anak yang diakuisisi atau dilepas selama periode termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dari tanggal Perusahaan memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Perusahaan menghentikan pengendalian atas Entitas Anak.

Laba atau rugi dan setiap komponen atas penghasilan komprehensif lain diatribusikan pada pemegang saham entitas induk Perusahaan dan pada kepentingan non pengendali ("KNP"), walaupun hasil di KNP mempunyai saldo defisit.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Principles of the Consolidated Financial Statement Presentation

Subsidiaries are fully consolidated from the date of acquisition, being the date on which the Company obtains control, and continue to be consolidated until the date when such control ceases. Control is presumed to exist if the Company owns, directly or indirectly through subsidiary, more than half of the voting power of an entity.

Specifically, the Group controls an investee if and only if the Group has:

- a. *Power over the investee (i.e., existing rights that give it the current ability to direct the relevant activities of the investee),*
- b. *Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee, and*
- c. *The ability to use its power over the investee to affect the amount of its returns.*

When the Company has less than a majority of the voting or similar right of an investee, the Group considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an investee, including:

- a. *The contractual arrangement with the other vote holders.*
- b. *Rights arising from other contractual arrangements.*
- c. *The Company's voting rights and potential voting rights.*

The Group re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a Subsidiaries begins when the Company obtains control over the Subsidiaries and ceases when the Company loses control of the subsidiary. Assets, liabilities, income and expenses of a Subsidiaries acquired or disposed of during the period are included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income from the date the Company gains control until the date the Company ceases to control the Subsidiaries.

Profit or loss and each component of other comprehensive income (OCI) are attributed to the equity holders of the parent of the Company and to the non-controlling interest ("NCI"), even if this results in the NCI having a deficit balance.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Prinsip Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

Transaksi antar perusahaan, saldo dan keuntungan serta kerugian yang belum direalisasi dari transaksi antar Perusahaan dieliminasi. Semua aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas berkaitan dengan transaksi antar anggota Perusahaan juga akan dieliminasi secara penuh dalam proses konsolidasi. Bila diperlukan, penyesuaian dilakukan pada laporan keuangan Entitas Anak agar kebijakan akuntansinya sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan.

Transaksi dengan Kepentingan Non-Pengendali (KNP) yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian merupakan transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dibayar dan bagian yang diakuisisi atas nilai tercatat aset neto entitas anak dicatat pada ekuitas. Keuntungan atau kerugian pelepasan KNP juga dicatat pada ekuitas.

Seluruh saldo akun dan transaksi yang material, termasuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, jika ada, dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil operasi Perusahaan dan Entitas Anak sebagai satu kesatuan usaha.

Entitas anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal dimana Perusahaan dan Entitas Anak memperoleh pengendalian, dan terus dikonsolidasi sampai dengan tanggal ketika kontrol tersebut berhenti. Pengendalian dianggap ada apabila Perusahaan memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak, lebih dari setengah kekuasaan suara suatu entitas.

Rugi entitas anak yang tidak dimiliki secara penuh diatribusikan pada Kepentingan Non-Pengendali (KNP) bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo defisit.

Jika kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Perusahaan dan Entitas Anak:

- a. menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas Entitas Anak;
- b. menghentikan pengakuan total tercatat setiap KNP;
- c. menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Principles of the Consolidated Financial Statement Presentation (consolidated)

Intercompany transactions, balances, and unrealized gains and losses on transactions between Company's companies are eliminated. All intra-Company assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Company are also eliminated in full on consolidation. When necessary, adjustments are made to the financial statements of Subsidiaries to bring their accounting policies in line with the Company's accounting policies.

Transactions with Non-Controlling Interest (NCI) that do not result in loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying value of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to NCI are also recorded in equity.

All material intercompany accounts and transactions, including unrealized gains or losses, if any, are eliminated to reflect the financial position and the results of operations of the Company and its Subsidiaries as one business entity.

Subsidiaries are fully consolidated from the date of acquisition, being the date on which the Company and its Subsidiaries obtains control, and continue to be consolidated until the date when such control ceases. Control is presumed to exist if the Company owns, directly or indirectly through subsidiary, more than half of the voting power of an entity.

Losses within a subsidiary are attributed to the Non-Controlling Interest (NCI) even if that results in a deficit balance for the NCI.

In case of loss of control over a subsidiary, the Company and subsidiaries:

- a. *derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the Subsidiaries;*
- b. *derecognizes the carrying amount of any NCI;*
- c. *derecognizes the cumulative translation differences, recorded in equity, if any;*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Prinsip Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

- d. mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- e. mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- f. mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian sebagai laba rugi; dan
- g. mereklasifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan dan kerugian Perusahaan yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain atau saldo laba, begitu pula menjadi persyaratan jika Perusahaan akan melepas secara langsung aset atau liabilitas yang terkait.

Kepentingan Non-Pengendali (KNP) mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset neto dari Entitas Anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Transaksi dengan entitas non-pengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas (dalam hal ini transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Perbedaan antara nilai wajar yang dibayar dan saham yang diakuisisi atas nilai tercatat aset entitas anak dicatat pada ekuitas.

d. Kas dan Setara Kas

Dalam laporan arus kas konsolidasian, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank, deposito on call, investasi jangka pendek lainnya yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat yang ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan.

Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya yang akan digunakan untuk membayar kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun disajikan sebagai "Dana yang Dibatasi Penggunaannya" sebagai bagian dari Aset Lancar pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Principles of the Consolidated Financial Statement Presentation (consolidated)

- d. recognizes the fair value of the consideration received;
- e. recognizes the fair value of any investment retained;
- f. recognizes any surplus or deficit in profit or loss; and
- g. reclassifies the parent's share of components previously recognized in OCI to profit or loss or retained earnings, as appropriate, as would be required if the Company had directly disposed of the related assets or liabilities.

Non-Controlling Interest (NCI) represents the portion of the profit or loss and net assets of the Subsidiaries not attributable directly or indirectly to the Company, which are presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and under the equity section of the consolidated statements of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to the owner of the parent.

The transactions with non-controlling entity that do not result in a loss of control are accounted for as an equity transaction (i.e., a transaction with owners in their capacity as owner). The difference between the fair value of any consideration paid and in the relevant acquired share of the carrying value of the net assets of the subsidiary is recorded in equity.

d. Cash and Cash Equivalents

In the consolidated statement of cash flows, cash and cash equivalents include cash on hand, deposits held at call with banks, other short-term highly liquid investments that are readily convertible to known amounts of cash and are subject to an insignificant risk of changes in value.

Restricted cash and cash equivalents which will be used to pay maturing obligations are presented as "Restricted Cash" under the assets section of the consolidated statement of financial position.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Instrumen Keuangan

e. Financial Instruments

(i) Klasifikasi

(i) Classification

Grup mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

The Group classifies its financial assets according to the following categories at initial recognition:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

- Financial assets measured at fair value through profit or loss;
- Financial assets measured at fair value through other comprehensive income;
- Financial assets measured at amortized cost.

Grup menggunakan 2 (dua) dasar untuk mengklasifikasikan aset keuangan yaitu model bisnis Grup dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual pembayaran pokok dan bunga (*solely payment of principal and interest (SPPI)*) dari aset keuangan.

The Group uses 2 (two) basis for classifying financial assets, namely the Group's business model for managing financial assets and the contractual cash flow characteristic of payments of principal and interest (*solely payment of principal and interest (SPPI)*) of financial assets.

Pengujian SPPI

SPPI Test

Sebagai langkah pertama dari proses klasifikasi, Grup menilai persyaratan kontraktual keuangan untuk mengidentifikasi apakah instrumen keuangan yang diuji memenuhi pengujian SPPI.

As the first step of the classification process, the Group assesses the financial contractual requirements to identify whether the tested financial instruments meet the SPPI testing.

Pokok pinjaman untuk tujuan pengujian ini didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal dan dapat berubah selama umur aset keuangan (misalnya, jika ada pembayaran pokok atau amortisasi premi/diskon).

The loan principal for testing purposes is defined as the fair value of the financial asset at initial recognition and is subject to change over the life of the financial asset (for example, if there are principal payments or amortization of premiums/discounts).

Elemen bunga yang paling signifikan dalam perjanjian kredit adalah pertimbangan atas nilai waktu dari uang dan risiko kredit. Untuk membuat penilaian SPPI, Grup menerapkan pertimbangan dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan seperti mata uang dimana aset keuangan didenominasikan dan periode pada saat suku bunga ditetapkan.

The most significant element of interest in a credit agreement is a consideration of the time value of money and credit risk. In making the assessment of SPPI, the Group applies judgment and takes into account relevant factors such as the currency in which financial assets are denominated and the period when interest rates are determined.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

e. Financial Instruments (continued)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

(i) Classification (continued)

Pengujian SPPI (lanjutan)

SPPI Test (continued)

Sebaliknya, persyaratan kontraktual yang memberikan eksposur lebih dari *de minimis* atas risiko atau volatilitas dalam arus kas kontraktual yang tidak terkait dengan dasar pengaturan pinjaman, tidak menimbulkan arus kas kontraktual SPPI atas jumlah saldo maka dalam kasus seperti itu, aset keuangan diharuskan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL).

Conversely, contractual terms that provide more than *de minimis* exposure to risk or volatility in contractual cash flows that are not related to the basis of the loan arrangement, do not create SPPI's contractual cash flows on the total balance so in such a case, the financial assets are required to be measured at fair value through profit or loss (FVTPL).

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

Financial assets are measured at amortized cost if they meet the following conditions:

- aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

- financial assets are managed in a business model that aims to have financial assets in order to obtain contractual cash flow; and
- the contractual terms of the financial asset provide rights on a certain date for cash flow obtained solely from payment of principal and interest (SPPI) on the principal amount owed.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if they meet the following conditions:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memenuhi kriteria SPPI.

- Financial assets are managed in a business model that aims to obtain contractual cash flow and sell financial assets; and
- The contractual requirements of the financial assets meet the SPPI criteria.

Pada saat pengakuan awal, Grup dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk diperdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

At initial recognition, the Group may make an irrevocable choice to present equity instruments that are not held for trading at fair value through other comprehensive income.

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Other financial assets that do not meet the requirements to be classified as financial assets measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income, are classified as measured at fair value through profit or loss.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

e. Financial Instruments (continued)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

(i) Classification (continued)

Pengujian SPPI (lanjutan)

SPPI Test (continued)

Saat pengakuan awal Perusahaan dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "accounting mismatch").

At initial recognition, the Group can make an irrevocable determination to measure assets that meet the requirements to be measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income at fair value through profit or loss, if the determination eliminates or significantly reduces the measurement or recognition inconsistencies (sometimes referred to as "accounting mismatch").

Penilaian model bisnis

Evaluation of business models

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

The business model is determined at a level that reflects how Group of financial assets are managed together to achieve certain business objectives.

Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

The evaluation of the business model carried out by considering, but not limited to, the following:

- Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci Perusahaan;
- Apakah risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola;
- Bagaimana penilaian kinerja pengelola aset keuangan (sebagai contoh, apakah penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh).

- How the performance of the business model and financial assets held in the business model are evaluated and reported to the Company's key management personnel;
- What risks affect the performance of the business model (including financial assets held in the business model) and specifically how the financial assets are managed; and
- How to evaluate the performance of managers of financial assets (for example, whether performance appraisals are based on the fair value of the assets being managed or the contractual cash flows obtained).

Aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dikelola dan penilaian kinerjanya berdasarkan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Financial assets held for trading or managed and which performance appraisals based on fair value are measured at fair value through profit or loss.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

e. Financial Instruments (continued)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

(i) Classification (continued)

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga

Evaluation of contractual cash flows obtained solely from payment of principal and interest

Untuk tujuan penilaian ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu dan juga risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga marjin laba.

For the purpose of this valuation, principal is defined as the fair value of financial assets at initial recognition. Interest is defined as compensation for the time value of money and credit risk in relation to the principal amount owed over a certain period of time and also the risk and standard borrowing costs, as well as profit margins.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau total arus kas kontraktual. Dalam melakukan penilaian, Grup mempertimbangkan:

An assessment of contractual cashflows obtained solely from principal and interest payments is made by considering contractual terms, including whether financial assets contain contractual terms that can change the timing or amount of contractual cash flows. In assessing, the Group considers:

- Peristiwa kontinjensi yang akan mengubah waktu atau total arus kas kontraktual;
- Fitur *leverage*;
- Persyaratan pembayaran dimuka dan perpanjangan kontraktual;
- Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- Fitur yang dapat mengubah nilai waktu dari elemen uang.

- *Contingency events that will change the timing or amount of contractual cash flow;*
- *Leverage feature;*
- *Terms of advance payment and contractual extension;*
- *Requirements regarding limited claims for cash flows from specific assets; and*
- *Features that can change the time value of the money element.*

Liabilitas keuangan diklasifikasikan kedalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

Financial liabilities are classified into the following categories at initial recognition:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- Liabilitas keuangan lain. Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laba rugi saat pengakuan liabilitas.

- *Financial liabilities at fair value through profit or loss, which has 2 (two) sub-classifications, i.e. those designated as such upon initial recognition and those classified as held for trading;*
- *Other financial liabilities. Other financial liabilities pertain to financial liabilities that are not held for trading nor designated as at fair value through profit or loss upon recognition of the liability.*

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

e. Financial Instruments (continued)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

(i) Classification (continued)

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (lanjutan)

Evaluation of contractual cash flows obtained solely from payment of principal and interest (continued)

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 71/ Category as defined by SFAS 71	Golongan (ditentukan oleh Perusahaan)/Class (as determined by the Company)	Subgolongan/ Subclasses
Aset keuangan/ Financial assets	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ Financial assets at fair value through profit or loss	Portfolio efek yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ Portfolio of securities measured at fair value through profit and loss
	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/ Financial assets at amortized cost	Kas dan setara kas/ Cash and cash equivalents
		Pinjaman yang diberikan - bersih/ Loans - net
Pembiayaan modal - bersih/ Capital financing - net		
Piutang jasa manajemen - bersih/ Management services receivables - net		
Pendapatan masih akan diterima/ Accrued income		
Piutang kegiatan manajer Investasi/ Investment management activities receivables		
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ Financial assets at fair value through other comprehensive income	Portofolio efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ Portfolio of securities measured at fair value through other comprehensive income	
Liabilitas keuangan/ Financial liabilities	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortized cost	Utang bank dan lembaga keuangan/ Bank and financial institution borrowings
		Surat utang jangka menengah dan sukuk/ Medium-term notes and sukuk
		Utang obligasi/ Bonds payable
		Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan lembaga kredit luar negeri/ Borrowings from the Government of the Republic of Indonesia and foreign credit institution
		Dana cadangan angsuran/ Installment reserve fund
		Utang kegiatan manajer investasi/ Investment management activities payables
		Utang lain-lain/ Other payables
		Beban yang masih harus dibayar/ Accrued expenses

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

e. Financial Instruments (continued)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

(i) Classification (continued)

Liabilitas Keuangan

Financial Liabilities

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Grup menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Financial liabilities are classified as financial liabilities at fair value through profit or loss and financial liabilities measured at amortized cost. The Group determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

Pengakuan dan Pengukuran

Recognition and Measurement

Aset Keuangan

Financial Assets

(ii) Pengukuran setelah pengakuan awal

(ii) Subsequent measurement

Aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

Financial assets at fair value through other comprehensive income and financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss are measured at fair value.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi.

Financial assets at amortised cost.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi setelah pengakuan awal diukur menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE") dan merupakan subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau mengalami penurunan nilai. Aset keuangan Perusahaan pada kategori ini meliputi kas dan setara kas, setara kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang lain-lain dan aset tidak lancar lainnya.

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest rate ("EIR") method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired. The Company's financial assets at amortized cost consist of cash and cash equivalents, restricted cash equivalents, trade receivables, other receivables and other non-current assets.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Financial assets at fair value through profit or loss

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi mencakup aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan, aset keuangan yang ditetapkan pada saat

Financial assets at fair value through profit or loss include financial assets held for trading, financial assets designated upon initial recognition at fair value through profit

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

(ii) Pengukuran setelah pengakuan awal (lanjutan)

pengakuan awal pada nilai wajar melalui laba rugi, atau aset keuangan yang disyaratkan untuk diukur pada nilai wajarnya. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika dibeli dengan tujuan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat.

Untuk instrumen utang yang diukur pada FVTOCI, pendapatan bunga, keuntungan atau kerugian selisih kurs, dan kerugian penurunan nilai diakui pada laba rugi dan dihitung dengan cara yang sama dengan aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Perubahan nilai wajar lainnya diakui pada PKL. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam PKL direklasifikasi ke laba rugi.

Liabilitas Keuangan

1. Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur, setelah pengakuan awal, pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif kecuali efek diskon tidak material, dalam hal ini mereka dinyatakan sebesar biaya perolehan. Beban bunga terkait diakui dalam "Biaya Keuangan" dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi ketika liabilitas keuangan tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi.

2. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diukur pada nilai wajar dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Laba atau rugi yang timbul dari perubahan nilai wajar liabilitas keuangan diakui dalam laporan laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement (continued)

Financial Assets (continued)

(ii) Subsequent measurement (continued)

or loss, or financial assets mandatorily required to be measured at fair value. Financial assets are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling or repurchasing in the near term.

For debt instruments at FVTOCI, interest income, foreign exchange revaluation and impairment losses or reversals are recognized in the statement of profit or loss and computed in the same manner as for financial assets measured at amortized cost. The remaining fair value changes are recognized in OCI. Upon derecognition, the cumulative fair value change recognized in OCI is recycled to profit or loss.

Financial Liabilities

1. Financial liabilities measured at amortized cost

Financial liabilities measured at amortized cost are measured, subsequent to initial recognition, at amortized cost using the effective interest rate method unless the effect of discounting would be immaterial, in which case they are stated at cost. The related interest expense is recognized within "Finance Costs" in profit or loss. Gains and losses are recognized in profit or loss when the financial liabilities are derecognized as well as through the amortization process.

2. Financial liabilities measured at fair value through profit or loss

Financial liabilities at fair value through profit or loss are measured at fair value in the consolidated statements of financial position. Any gains or losses arising from changes in fair value of the financial liabilities are recognized in the profit or loss.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

(iii) Penghentian pengakuan

- a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:
- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
 - Grup telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan pelepasan, dan antara (a) Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Grup tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mentransfer kendali atas aset.

Ketika Grup telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki kesepakatan pelepasan dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Grup yang berkelanjutan atas aset tersebut.

Pinjaman yang diberikan akan dihapus bukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara Perusahaan dan debitur telah berakhir. Pinjaman yang Tidak dapat dilunasi tersebut dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement (continued)

Financial Liabilities (continued)

(iii) Derecognition

- a. Financial assets are derecognized when:
- the Contractual rights to receive cash flows from the financial assets have expired; or
 - the Group has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flow in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and either (a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

When the Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement and has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Group's continuing involvement in the asset.

Loans are written off when there is no realistic prospect of collection in the near future or the normal relationship between the Company and the borrowers have ceased to exist. When a loan is deemed uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment losses.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

(iii) Penghentian pengakuan (lanjutan)

- b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

(iv) Pengakuan pendapatan dan beban

- a. Pendapatan dan beban bunga atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan cadangan penurunan nilai.

Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, tingkat bunga efektif diterapkan pada total tercatat bruto aset (ketika aset tersebut bukan aset keuangan memburuk) atau terhadap biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement (continued)

Financial Liabilities (continued)

(iii) Derecognition (continued)

- b. Financial liabilities are derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expired.

If an existing financial liability is replaced by another liability from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.

(iv) Income and expense recognition

- a. Interest income and expense on financial assets measured at fair value through other comprehensive income as well as financial assets and financial liabilities recorded at amortized cost are recognized in the statement of profit or loss using the effective interest method.

The gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for allowance for impairment.

In calculating interest income and expenses, the effective interest rate is applied to the gross carrying amount of an asset (when the asset is not a deteriorated financial asset) or to the amortized cost of a liability.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

e. Financial Instruments (continued)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Recognition and Measurement (continued)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Financial Liabilities (continued)

(iv) Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

(iv) Income and expense recognition (continued)

Untuk aset keuangan yang memburuk setelah pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap nilai tercatat bruto dari aset keuangan tersebut.

For financial assets that deteriorated after initial recognition, interest income is calculated by applying an effective interest rate to the amortized cost of the financial assets. If the asset no longer deteriorates, the calculation of interest income will be calculated by applying an effective interest rate to the gross carrying amount of the financial asset.

- b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang dikasifikasikan dalam kelompok aset keuangan dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diakui secara langsung dalam laporan laba rugi komprehensif (merupakan bagian dari ekuitas) sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau adanya penurunan nilai, kecuali keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar untuk instrumen utang.

- b. Gains and losses arising from changes in the fair value of financial assets at fair value through other comprehensive income other than foreign exchange gains or losses on debt instrument are recognized directly in other comprehensive income (as part of equity), until the financial asset is derecognized or impaired, except gain or loss arising from changes in exchanges rate for debt instrument.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

When a financial asset is derecognized or impaired, the cumulative gains or losses previously recognized in equity are recognized in profit or loss.

(v) Reklasifikasi aset keuangan

(v) Reclassification of financial assets

Grup mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

The Group reclassifies financial assets if and only if, the business model for managing financial assets changes.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value through profit or loss are recorded at fair value. The difference between the recorded value and fair value is recognized in profit or loss on the statement of profit or loss and other comprehensive income.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

(v) Reklasifikasi aset keuangan (lanjutan)

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada nilai wajar.

(vi) Saling Hapus dari Instrumen Keuangan

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada nilai wajarnya, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan tersebut. Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi aset.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement (continued)

Financial Liabilities (continued)

(v) Reclassification of financial assets (continued)

Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value classifications through other comprehensive are recorded at their fair values.

Reclassification of financial assets from fair value classification through other comprehensive income to fair value classification through profit or loss is recorded at fair value. Unrealized gains or losses are reclassified to profit or loss.

Reclassification of financial assets from fair value classifications through other comprehensive income to the amortized cost classification is recorded at carrying value. Unrealized gains or losses is removed from equity and adjusted against the fair value.

Reclassifications on financial assets from fair value classification through profit or loss to fair value classification through other comprehensive income are recorded at fair value.

(vi) Offsetting of Financial Instruments

At the time of initial recognition, financial assets are measured at fair value, in the case of financial assets not at fair value through profit or loss, fair value plus transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issuance of financial assets. Subsequent measurement of financial assets depends on their classification of assets.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

(vi) Saling Hapus dari Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika Grup memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari entitas atas seluruh pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam total neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

(vii) Nilai Wajar dari Instrumen Keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi, jika ada, ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga di pasar aktif pada penutupan bisnis pada akhir periode pelaporan.

Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian tersebut mencakup penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar antara pihak-pihak yang mengerti dan berkeinginan (*arm's length market transactions*); referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama; analisis arus kas yang didiskonto; atau model penilaian lain.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement (continued)

Financial Liabilities (continued)

(vi) Offsetting of Financial Instruments (continued)

Financial assets and liabilities are set off and the net amount is presented in the consolidated statement of financial position when, and only when, the Group has a legal right to set off the amounts and intends either to settle on a net basis or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the company or the counterparty.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by the accounting standards.

(vii) Fair value of financial instruments

The fair values of financial instruments that are actively traded in organized financial markets, if any, are determined by reference to quoted market bid or ask prices at the close of business at the end of the reporting period.

*For financial instruments that do not have an active market, fair value is determined using valuation techniques. Such techniques include the use of market transactions is reasonable between the parties who understand and desire (*arm's length market transactions*); reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same; discounted cash flow analysis; or other valuation models.*

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

(vii) Nilai Wajar dari Instrumen Keuangan (lanjutan)

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Jika tersedia, Grup mengukur nilai wajar dari suatu instrumen dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service or regulatory agency*), dan merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar. Nilai wajar dapat diperoleh dari Interdealer Market Association (IDMA) atau harga pasar atau harga yang diberikan oleh broker (*quoted price*) dari Bloomberg atau Reuters pada tanggal pengukuran.

Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, Perusahaan menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian.

Grup menggunakan beberapa teknik penilaian yang digunakan secara umum untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan tingkat kompleksitas yang rendah, seperti opsi nilai tukar dan swap mata uang. Input yang digunakan dalam teknik penilaian untuk instrumen keuangan di atas adalah data pasar yang diobservasi.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar efek-efek ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset neto efek-efek tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement (continued)

Financial Liabilities (continued)

(vii) Fair value of financial instruments (continued)

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at measurement date.

When available, the Group measures the fair value of an instrument using quoted prices in an active market for that instrument. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer, broker, industry Company, pricing service or regulatory agency and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's length basis. The fair value can be obtained from IDMA's (Interdealer Market Association) quoted market prices or broker's quoted price from Bloomberg or Reuters on the measurement date.

If a market for a financial instrument is not active, the Company establishes fair value using a valuation technique.

The Group uses widely recognized valuation models for determining fair values of financial instruments of lower complexity, such as exchange value options and currency swaps. For these financial instruments, inputs into models are generally market-observable.

For financial instruments with no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the fair value of another instrument which substantially has the same characteristics or calculated based on the expected cash flows of the underlying net asset base of the marketable securities.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

(vii) Nilai Wajar dari Instrumen Keuangan (lanjutan)

Hasil dari suatu teknik penilaian merupakan sebuah estimasi atau perkiraan dari suatu nilai yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, dan teknik penilaian yang digunakan mungkin tidak dapat menggambarkan seluruh faktor yang relevan atas posisi yang dimiliki Perusahaan. Dengan demikian, penilaian disesuaikan dengan faktor tambahan seperti model risk, risiko likuiditas dan risiko kredit counterparty. Berdasarkan kebijakan teknik penilaian nilai wajar, pengendalian dan prosedur yang diterapkan, manajemen berkeyakinan bahwa penyesuaian atas penilaian tersebut di atas diperlukan dan dianggap tepat untuk menyajikan secara wajar nilai dari instrumen keuangan yang diukur berdasarkan nilai wajar dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Data harga dan parameter yang digunakan di dalam prosedur pengukuran pada umumnya telah direviu dan disesuaikan jika diperlukan, khususnya untuk perkembangan atas pasar terkini.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan sebagai berikut:

- Tingkat 1: Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dari pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik.
- Tingkat 2: Input selain harga yang dikutip dari pasar yang disertakan pada tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (yaitu sebagai suatu harga) atau secara tidak langsung (sebagai turunan dari harga).
- Tingkat 3: Input untuk aset atau liabilitas yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement (continued)

Financial Liabilities (continued)

(vii) Fair value of financial instruments (continued)

The output of a valuation technique is an estimation or approximation of a value that cannot be determined with certainty, and the valuation technique employed may not fully reflect all factors relevant to the positions that the Company holds. Valuations are therefore adjusted, with additional factors such as model risk, liquidity risk and counterparty credit risk. Based on the established fair value valuation technique policy, related controls and procedures applied, management believes that these valuation adjustments are necessary and considered appropriate to fairly state the values of financial instruments measured at fair value in the consolidated statement of financial position. Price data and parameters used in the measurement procedures applied are generally reviewed and adjusted if necessary, particularly in view of the current market developments.

All assets and liabilities which fair value is measured or disclosed in the financial statements can be classified in fair value hierarchy levels, based on following level:

- Level 1: Quoted price (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
- Level 2: inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (as a price) or indirectly (as derived from price).
- Level 3: input for asset or liabilities based on unobservable inputs for the asset or liability.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

(vii) Nilai Wajar dari Instrumen Keuangan (lanjutan)

- Grup mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
- Tidak ada penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada investasi instrumen ekuitas.
- Grup mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, kecuali untuk hal berikut, diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan:
 - instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan; dan
 - instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Perusahaan menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah ketika peringkat risiko kreditnya setara dengan definisi *investment grade* yang dipahami secara global.

(viii) Biaya Perolehan Diamortisasi dari Instrumen Keuangan

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan atas penurunan nilai dan pembayaran kembali atau pengurangan pokok. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement (continued)

Financial Liabilities (continued)

(vii) Fair value of financial instruments (continued)

- The Group recognize the allowance for expected credit losses on financial instruments that are not measured at fair value through profit or loss.
- There is no allowance for expected credit losses on investment in equity instruments.
- The Group measure the allowance for losses for the lifetime of an expected credit losses, except for the following, which are measured according to 12 months expected credit losses:
 - debt instruments that have low credit risk at the reporting date; and
 - other financial instruments for which credit risk has not increased significantly since initial recognition.

The Company considers debt instruments to have low credit risk when the credit risk rating is at par with the globally understood definition of investment grade.

(viii) Amortized cost of financial instruments

Amortized cost is computed using the effective interest rate method less any allowance for impairment and principal repayment or reduction. The calculation takes into account any premium or discount on acquisition and includes transaction costs and fees that are an integral part of the effective interest rate.

Impairment of financial assets

The 12-month expected credit loss is part of the expected credit loss throughout its lifetime that represents an expected credit loss arising from a default on financial instruments that might occur 12 months after reporting date.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

(viii) Biaya Perolehan Diamortisasi dari Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Ekspektasian	Kerugian	Kredit
--------------------------------	-----------------	---------------

Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

- Aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu selisih antara arus kas yang terutang kepada Grup sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Grup);
- Aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi;
- Komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini jumlah arus kas jika komitmen ditarik dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Grup;
- Kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.

Aset Keuangan yang Direstrukturisasi

Jika ketentuan aset keuangan dinegosiasikan ulang atau dimodifikasi atau aset keuangan yang ada diganti dengan yang baru karena kesulitan keuangan peminjam, maka dilakukan penilaian apakah aset keuangan yang ada harus dihentikan pengakuannya dan kerugian kredit ekspektasian diukur sebagai berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement (continued)

Financial Liabilities (continued)

(viii) Amortized cost of financial instruments (continued)

Measurement of Expected Credit Losses
--

Expected Credit Loss is an estimate of the weighted probability of a credit loss measured as follows:

- *Financial assets that do not deteriorate at the reporting date, the expected credit loss is measured at the difference between the present value of all cash shortages (i.e. the difference between the cash flows owed to the Group in accordance with the contract and the cash flows expected to be received by the Group);*
- *Financial assets that deteriorate at the reporting date, the expected credit loss is measured at the difference between the gross carrying amount and the present value of estimated future cash flows;*
- *For undisbursed loan commitments, expected credit losses are measured at the difference between the present value of the amount of cash flow if the commitments is withdrawn and the cash flow expected to be received by the Group;*
- *For financial guarantee contracts, expected credit losses are measured at the difference between the estimated payments to replace the holder for the credit losses incurred less the amount estimated to be recoverable.*

Restructured Financial Assets

If the terms of the financial assets are renegotiated or modified or the existing financial assets are replaced with new ones due to the borrower's financial difficulties, an assessment is made whether recognition of existing financial assets must be derecognized and expected credit losses measured as follows:

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
 (sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
 (PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KONSOLIDASIAN
 Tanggal 31 Desember 2021 dan
 Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
 (formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
 (PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
 NOTES TO THE CONSOLIDATED
 FINANCIAL STATEMENT
 As of December 31, 2021
 and For The Year Then Ended
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

(viii) Biaya Perolehan Diamortisasi dari Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan yang Direstrukturisasi (lanjutan)

- Jika restrukturisasi tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka arus kas yang diperkirakan yang timbul dari aset keuangan yang dimodifikasi dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset yang ada.
- Jika restrukturisasi akan menghasilkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka nilai wajar aset baru diperlakukan sebagai arus kas akhir dari aset keuangan yang ada pada saat penghentian pengakuannya. Jumlah ini dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset keuangan yang ada yang didiskontokan dari tanggal penghentian pengakuan ke tanggal pelaporan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan yang ada.

Aset Keuangan yang Memburuk

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan instrumen utang yang dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan nilai kredit (memburuk). Aset keuangan memburuk ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit (memburuk) termasuk data yang dapat diobservasi mengenai peristiwa berikut ini:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- Pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau peristiwa tunggakan;

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement (continued)

Financial Liabilities (continued)

(viii) Amortized cost of financial instruments (continued)

Restructured Financial Assets (continued)

- If the restructuring does not result in the termination of recognition of existing assets, then the estimated cash flows arising from the modified financial assets are included in the calculation of cash shortages of existing assets.
- If the restructuring will result in a derecognition of the existing assets, the fair value of the new asset is treated as the final cash flow of the existing financial assets at the time of derecognition. This amount is included in the calculation of cash shortages from existing financial assets which are discounted from the date of derecognition to the reporting date using the initial effective interest rate of the existing financial assets.

Credit-impaired Financial Assets

At each reporting date, the Group assesses whether the financial assets recorded at amortized cost and the financial assets of debt instruments which are recorded at fair value through other comprehensive income are credit-impaired (worsening). Financial assets deteriorate when one or more events that have an adverse effect on the estimated future cash flows of the financial assets have occurred.

Evidence that financial assets become credit impaired including observable data regarding the following events:

- Significant financial difficulties experienced by the issuer or the borrower;
- Breach of contract, such as a default or arrears;

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

e. Financial Instruments (continued)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Recognition and Measurement (continued)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Financial Liabilities (continued)

(viii) Biaya Perolehan Diamortisasi dari Instrumen Keuangan (lanjutan)

(viii) Amortized cost of financial instruments (continued)

Aset Keuangan yang Memburuk (lanjutan)

Credit-impaired Financial Assets (continued)

Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit (memburuk) termasuk data yang dapat diobservasi mengenai peristiwa berikut ini: (lanjutan)

Evidence that financial assets become credit impaired including observable data regarding the following events: (continued)

- Pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomik atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- Terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; atau
- Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.
- Pembelian atau penerbitan aset keuangan dengan diskon sangat besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi.

- The lender, for economic or contractual reasons in relation to the financial difficulties experienced by the borrower, has given concessions to the borrower which is not possible if the borrower does not experience such difficulties;
- There is possibility that the borrower will enter bankruptcy or the other financial reorganization; or
- Loss of an active market for financial assets due to financial difficulties.
- Purchase or issuance financial asset at significant discount which reflect the credit loss that occurs.

Aset Keuangan yang Dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk

Purchased or originated credit-impaired financial assets - POCI

Aset keuangan dikategorikan sebagai POCI apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai pada saat pengakuan awal. Pada saat pengakuan awal, tidak ada penyisihan kerugian kredit yang diakui karena harga pembelian atau nilainya telah termasuk estimasi kerugian kredit sepanjang umurnya. Selanjutnya, perubahan kerugian kredit sepanjang umurnya, apakah positif atau negatif, diakui dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari cadangan kerugian penurunan nilai.

Financial assets are categorized as POCI if there is objective evidence of impairment at initial recognition. At initial recognition, no allowance for credit losses is recognized because the purchase price or value has included lifetime estimated credit losses. Furthermore, changes in lifetime credit losses, whether positive or negative, are recognized in the statement of profit or loss as part of the allowance for impairment losses.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

(viii) Biaya Perolehan Diamortisasi dari Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penyajian Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian Dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;
- Komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai provisi;
- Instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, penyisihan kerugian kredit ekspektasian tidak diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian penyisihan kerugian kredit ekspektasian diungkapkan dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Perhitungan penurunan nilai secara individual

Grup menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai signifikan; atau
- Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

Perhitungan penurunan nilai secara kolektif

Grup menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- Pinjaman yang diberikan yang secara Individual memiliki nilai tidak signifikan; atau
- Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement (continued)

Financial Liabilities (continued)

(viii) Amortized cost of financial instruments (continued)

Presentation of Allowance for Expected Credit Losses in Consolidated Statements of Financial Position

Allowance for expected credit losses is presented in consolidated the statement of financial positions as follows:

- Financial assets measured at amortized cost, allowance for expected credit losses is presented as a deduction from the gross carrying amount of the asset;
- Loan commitments and financial guarantee contracts, allowance for expected credit losses is presented as a provision;
- Debt instruments measured at fair value through other comprehensive income, allowance for expected credit losses are not recognized in the consolidated statement of financial position because the carrying amounts of these assets are at their fair values. However, allowance for expected credit losses is disclosed and recognized in other comprehensive income.

Individual impairment calculation

The Group determines that loans should be evaluated for impairment through individual evaluation if one of the following criterias is met:

- Loans which individually have significant value; or
- Restructured loans which individually have significant value.

Collective impairment calculation

The Group determines loans to be evaluated for impairment through collective evaluation if one of the following criterias is met:

- Loans which individually have insignificant value; or
- Restructured loans which individually have insignificant value.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

(viii) Biaya Perolehan Diamortisasi dari Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapus bukukan

Ketika pinjaman yang diberikan tidak tertagih, pinjaman yang diberikan tersebut dihapus buku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Pinjaman yang diberikan tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain pendapatan bunga.

Penghentian Pengakuan

Aset Keuangan

Ketika Perusahaan telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani perjanjian *pass-through*, dan tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan atau melakukan pengendalian dialihkan dari aset, aset tersebut diakui dengan keterlibatan berkelanjutan Perusahaan dalam aset.

Dalam hal ini, Perusahaan juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer dan liabilitas terkait diukur secara yang mencerminkan hak dan liabilitas yang Perusahaan telah ditahan.

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur pada nilai terendah antara nilai tercatat atas aset keuangan dan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement (continued)

Financial Liabilities (continued)

(viii) Amortized cost of financial instruments (continued)

Recoveries of written-off financial assets

When a loan is uncollectible, it is written-off against the related allowance for impairment loss. Such loans are written-off after all the necessary procedures have been completed and the amount of the loss has been determined.

The recoveries of written-off financial assets in the current year are credited by adjusting the allowance for impairment losses accounts. Recoveries of written-off financial assets from previous years are recorded as operational income other than interest income.

Derecognition

Financial Assets

When the Company has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, and has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Company's continuing involvement in the asset.

In that case, the Company also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Company has retained.

Continuing involvement in the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the carrying amount of the financial asset and the maximum amount of consideration received that may have to be paid back.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika liabilitas keuangan saat ini digantikan dengan yang lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laporan laba rugi.

f. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka dibebankan dengan metode garis lurus sesuai masa manfaatnya.

g. Aset Tetap dan Aset Hak Guna

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika kriteria pengakuan terpenuhi. Semua biaya perbaikan dan pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Aset tetap dinyatakan sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis sebagai berikut:

	Tahun/Year	Tarif/Rate	
Bangunan	20	5,00%	Building
Kendaraan	5	20,00%	Vehicles
Peralatan dan Perabotan			Furniture, Fixtures and
Kantor	3 dan/and 5	33,33% dan/and 20,00%	Equipment Office
Partisi Kantor	5	20,00%	Office Partition

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Derecognition (continued)

Financial Liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in profit or loss.

f. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized and charged to operations over the periods benefited using the straight-line method.

g. Fixed Assets and Right of Use Assets

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and any impairment loss. Such cost includes the cost of replacing part of the fixed assets when the cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the assets as a replacement if the recognition criteria are met. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in profit or loss as incurred.

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation. Fixed assets are depreciated using the straight-line method over the estimated useful lives of the assets, as follows:

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Aset Tetap dan Aset Hak Guna (lanjutan)

g. Fixed Assets and Right of Use Assets (continued)

Tanah dinyatakan berdasarkan harga perolehan dan tidak diamortisasi. Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaharuan legal hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Land is stated at cost and not depreciated. Costs associated with the acquisition of legal right of land when the land was first acquired are recognized as part of the cost of land. Costs associated with the extension or renewal of legal right of land are recognized as an intangible asset and amortized over the legal life of the land rights or economic life of the land, whichever is shorter.

Nilai tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset dibebankan pada laporan laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

The carrying value of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use. Any gain or loss arising on derecognition of the assets is charged to profit or loss in the year the assets is derecognized.

Grup menganalisa fakta dan keadaan untuk masing-masing jenis hak atas tanah dalam menentukan akuntansi untuk masing-masing hak atas tanah tersebut sehingga dapat merepresentasikan dengan tepat suatu kejadian atau transaksi ekonomik yang mendasarinya. Jika hak atas tanah tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar kepada Grup, melainkan mengalihkan hak untuk menggunakan aset pendasar, Grup menerapkan perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut sebagai sewa berdasarkan PSAK 73, "Sewa". Jika hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka Perusahaan menerapkan PSAK 16 "Aset tetap".

The Group analyzes the facts and circumstances for each type of land rights in determining the accounting for each of these land rights so that it can accurately represent an underlying economic event or transaction. If the land rights do not transfer control of the underlying assets to the Group, but gives the rights to use the underlying assets, the Group applies the accounting treatment of these transactions as leases under SFAS 73, "Leases". If land rights are substantially similar to land purchases, the Group applies SFAS 16, "Property, plant and equipment".

Aset tetap yang dihentikan dan dimiliki untuk dijual, berhenti dari yang disusutkan dan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar dimiliki untuk dijual dalam kelompok aset lainnya. Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual diukur pada nilai terendah antara nilai buku atau nilai wajar.

Fixed asset which is discontinued and held for sale, ceased of being depreciated and reclassified as non-current asset held for sale in other assets account. Non-current assets held for sale are measured at the lower of book value or fair value.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Biaya Pinjaman

h. Borrowing Costs

Pinjaman yang diberikan dan piutang pembiayaan modal diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Loans and capital financing are classified as financial assets at amortized cost.

Pinjaman yang diberikan - bersih dan pembiayaan modal - bersih mencerminkan hak tagihan Perusahaan yang sah kepada para debitur dikurangi dengan pendapatan yang belum diakui dan penyisihan kerugian penurunan nilai.

Loans - net and capital financing - net represent the Company's recourse to debtors less unrecognized income and allowance for impairment losses.

Pendapatan yang belum diakui merupakan selisih antara jumlah keseluruhan pembayaran angsuran yang akan diterima dari debitur dan jumlah pokok pinjaman, ditambah (dikurangi) biaya (pendapatan) transaksi yang belum diamortisasi, yang akan diakui sebagai pendapatan selama jangka waktu kontrak dengan menggunakan suku bunga efektif.

Unrecognized income represents the difference between the total installment payments to be received from the debtor and the principal amount of the loan, plus (less) unamortized transaction costs (income), which will be recognized as income over the term of the contract using the effective interest rate.

Biaya (pendapatan) transaksi yang belum diamortisasi adalah pendapatan administrasi dan biaya transaksi yang timbul pertama kali yang terkait langsung dengan pinjaman tersebut.

Unamortized transaction costs (revenues) are the first incurred administration and transaction costs that are directly related to the loan.

Penyelesaian kontrak sebelum masa perjanjian berakhir diperlakukan sebagai pembatalan kontrak dan keuntungan yang timbul diakui dalam laba rugi konsolidasian tahun berjalan.

The settlement of the contract before the agreement period ends is treated as a cancellation of the contract and the resulting gain is recognized in the current year's consolidated profit or loss.

Grup mengkapitalisasi biaya pinjaman sebagai bagian dari biaya perolehan aset apabila biaya pinjaman tersebut dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau produksi aset kualifikasian. Grup mengakui biaya pinjaman lainnya sebagai beban pada periode terjadinya.

The Group capitalizes borrowing costs as part of the cost of that asset when borrowing costs are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset. Group recognize other borrowing costs as an expense in the period incurred.

Grup mulai mengkapitalisasi biaya pinjaman sebagai bagian biaya perolehan aset kualifikasian pada tanggal awal, yaitu tanggal ketika Perusahaan pertama kali memenuhi semua kondisi berikut:

The Group began to capitalize borrowing costs as part of the cost of a qualifying asset at an early date, that is the date when the company first meet all of the following conditions:

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Biaya Pinjaman (lanjutan)

- a) terjadinya pengeluaran untuk aset;
- b) terjadinya biaya pinjaman;
- c) Grup telah melakukan aktivitasnya yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan maksudnya.

Grup menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan maksudnya telah selesai.

i. Aset Takberwujud

Aset takberwujud yang diperoleh secara terpisah diukur pada pengakuan awal dengan biaya. Biaya aset takberwujud yang diperoleh dalam penggabungan usaha adalah nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada. Aset takberwujud yang dihasilkan secara internal, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi, tidak dikapitalisasi dan pengeluaran tercermin dalam laporan laba rugi pada tahun dimana pengeluaran tersebut terjadi.

Masa manfaat aset takberwujud yang dinilai baik terbatas atau tidak terbatas. Aset takberwujud dengan kehidupan terbatas diamortisasi selama umur ekonomis dan dinilai untuk penurunan nilai apabila terdapat indikasi bahwa aset takberwujud mungkin terganggu. Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset takberwujud dengan umur manfaat yang terbatas ditinjau setidaknya pada akhir setiap periode pelaporan. Perubahan masa manfaat yang diharapkan atau ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan yang aset tersebut dicatat dengan mengubah periode amortisasi atau metode, yang sesuai, dan diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Beban amortisasi aset takberwujud dengan kehidupan terbatas diakui dalam laporan laba rugi dalam kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset takberwujud.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Borrowing Costs (continued)

- a) the expenditures for the asset;
- b) the cost of borrowing;
- c) The Group has conducted its activities necessary to prepare the asset to be used or sold in accordance with the point.

The Group stop the capitalization of borrowing costs when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying asset to be used or sold in accordance with the intention has been completed.

i. Intangible Assets

Intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost. The cost of intangible assets acquired in a business combination is its fair value as at the date of acquisition. Following initial recognition, intangible assets are carried at cost less any accumulated amortization and accumulated impairment losses, if any. Internally generated intangible assets, excluding capitalized development costs, are not capitalized and expenditure is reflected in profit or loss in the year in which the expenditure is incurred.

The useful lives of intangible assets are assessed as either finite or indefinite. Intangible assets with finite lives are amortized over the useful economic life and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortization period and the amortization method for an intangible asset with a finite useful life is reviewed at least at the end of each reporting period. Changes in the expected useful life or the expected pattern of consumption of future economic benefits embodied in the asset is accounted for by changing the amortization period or method, as appropriate, and are treated as changes in accounting estimates. The amortization expense on intangible assets with finite lives is recognized in profit or loss in the expense category consistent with the function of the intangible assets.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Aset Takberwujud (lanjutan)

Aset takberwujud dengan masa manfaat tak terbatas tidak diamortisasi, tetapi diuji untuk penurunan nilai setiap tahunnya, baik secara individual maupun pada tingkat unit penghasil kas. Penilaian masa tak terbatas ditinjau setiap tahun untuk menentukan apakah masa tak terbatas terus terbukti. Jika tidak, perubahan masa manfaat dari tak terbatas menjadi terbatas dibuat secara prospektif.

Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset takberwujud diukur sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset dan diakui dalam laporan laba rugi ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Grup mengakui aset takberwujud apabila kemungkinan besar akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. Grup mengakui aset takberwujud sebesar biaya perolehan.

Grup melakukan pengukuran setelah pengakuan awal aset takberwujud dengan menggunakan metode biaya, dimana suatu aset takberwujud dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Sumber terjadinya aset takberwujud Grup yang berasal dari pembelian pengukuran nilai wajar dan penangguhan biaya.

Akun ini antara lain mencakup:

Beban ditangguhkan, adalah beban-beban yang telah dikeluarkan dan mempunyai manfaat lebih dari satu tahun, yaitu;

- Hubungan pelanggan kontrak diperoleh dalam kerjasama usaha diakui pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Hubungan kontraktual pelanggan memiliki masa manfaat yang terbatas dan dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi dihitung menggunakan metode garis lurus selama umur yang diharapkan dari hubungan pelanggan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Intangible Assets (continued)

Intangible assets with indefinite useful lives are not amortized, but are tested for impairment annually, either individually or at the cash-generating unit level. The assessment of indefinite life is reviewed annually to determine whether the indefinite life continues to be supportable. If not, the change in useful life from indefinite to finite is made on a prospective basis.

Gains or losses arising from derecognition of an intangible asset are measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and are recognized in profit or loss when the asset is derecognized.

The Group recognizes an intangible assets if it is likely will acquire economic benefits in the future period from such assets and cost of that asset can be measured reliably. The Group recognizes an intangible assets at acquisition cost.

The Group take measurements after the initial recognition of intangible assets using the cost method, whereby an intangible asset carried at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses.

Sources of the Group intangible assets arising from the purchase of fair value measurement and deferred charges.

These accounts include:

Deferred charges is expenses that spent and having benefit for more than one year, namely;

- *Contractual customer relationships acquired in a business combination are recognized at fair value at the acquisition date. The contractual customer relations have a limited useful life and are carried at cost less accumulated amortization. Amortization is calculated using the straight line method over the expected life of the customer relationship.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Aset Takberwujud (lanjutan)

- Beban rehabilitasi gedung sewa, diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya. Beban ditangguhkan meliputi perangkat lunak komputer, beban penawaran perdana reksadana dan lain-lain. Beban ditangguhkan diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama estimasi masa manfaatnya.

Aset takberwujud diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sesuai taksiran masa manfaat selama 3 (tiga) tahun. Tarif amortisasi aset takberwujud adalah sebesar 33,33 % per tahun.

Perusahaan menghentikan pengakuan aset takberwujud jika dilepas atau tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

j. Goodwill

Goodwill merupakan selisih lebih antara harga perolehan investasi dan nilai wajar bagian Grup atas aset bersih yang dapat diidentifikasi Entitas Anak, asosiasi atau pengendalian bersama entitas pada tanggal efektif akuisisi. Kepentingan non-pengendali diukur pada proporsi mereka dari aset teridentifikasi pada tanggal akuisisi.

Jika biaya perolehan lebih rendah dari nilai wajar aset bersih yang diakuisisi, selisih tersebut diakui langsung dalam laporan laba-rugi konsolidasian. *Goodwill* pada akuisisi entitas asosiasi dan entitas yang dikendalikan bersama-sama termasuk dalam investasi pada entitas asosiasi dan *jointly controlled entities*. *Goodwill* dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai.

Goodwill atas akuisisi entitas anak diuji untuk penurunan nilai setiap tahunnya. *Goodwill* dialokasikan untuk unit penghasil kas atau kelompok unit penghasil kas untuk tujuan pengujian penurunan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Intangible Assets (continued)

- Rehabilitation expense of leased building shall be amortized as per the benefit period. Deferred charges include computer software, charge in relation to initial offering of mutual funds, and others. Differed charges are amortized over their estimated useful lives.

Intangible assets are amortized using the straight-line method over the estimated useful life of 3 (three) years. Amortization of intangible assets amounted to 33.33% per year.

Derecognition of an intangible asset company if released or not there anymore future economic benefits are expected from its use or disposal.

j. Goodwill

Goodwill represents the excess of the acquisition cost and the fair value of the Group portion of the net assets of Subsidiaries, associates or jointly controlled entity, that can be identified, at the effective date of acquisition. Non-controlling interests are measured at their proportion of identifiable assets at the acquisition date.

If the cost of acquisition is less than the fair value of net assets acquired, the difference is recognized directly in the consolidated income statement. Goodwill on acquisition of associates and jointly controlled entities together are included in investments in associates and jointly controlled entities. Goodwill is recorded at cost less accumulated impairment losses.

Goodwill on acquisition of subsidiaries is tested for impairment annually. Goodwill is allocated to cash-generating units or group of cash-generating units for impairment testing purposes.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Goodwill (lanjutan)

Keuntungan atau kerugian pelepasan entitas anak, asosiasi dan pengendalian bersama termasuk nilai tercatat *goodwill* yang berkaitan dengan entitas dijual.

Goodwill memiliki masa manfaat tak terbatas tidak diamortisasi, tetapi diuji untuk penurunan nilai setiap tahunnya, baik secara individual maupun pada tingkat unit penghasil kas. Penilaian masa tak terbatas ditinjau setiap tahun untuk menentukan apakah masa tak terbatas terus terbukti. Jika tidak, perubahan masa manfaat dari tak terbatas menjadi terbatas dibuat secara prospektif.

k. Penurunan Nilai atas Aset Non-Keuangan

Grup menilai pada setiap periode pelaporan apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai tahunan untuk aset diperlukan, Grup membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan suatu aset adalah lebih tinggi dari aset atau nilai wajar UPK yang dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya, dan ditentukan untuk aset individual, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset lain atau kelompok aset. Dimana nilai tercatat suatu aset melebihi jumlah terpulihkan, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan diturunkan ke jumlah yang dapat diperoleh kembali.

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian sebagai "rugi penurunan nilai". Dalam menilai nilai pakai, taksiran aliran kas bersih masa depan didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar saat ini atas nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Goodwill (continued)

The profit or loss on disposal of subsidiaries, associates and jointly controlled entities includes the carrying amount of goodwill relating to the entity sold.

Goodwill with indefinite useful lives are not amortized, but are tested for impairment annually, either individually or at the cash-generating unit level. The assessment of indefinite life is reviewed annually to determine whether the indefinite life continues to be supportable. If not, the change in useful life from indefinite to finite is made on a prospective basis.

k. Impairment of Non-Financial Assets

The Group assesses at each reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, The Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of the asset's or its CGU's fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or group of assets. Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

Impairment losses of continuing operations are recognized in the consolidated statements of comprehensive income as "impairment losses". In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Penurunan Nilai atas Aset Non-Keuangan (lanjutan)

Jika tidak ada transaksi yang dapat diidentifikasi, model valuasi yang tepat digunakan untuk menentukan nilai wajar dari aset. Perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, transaksi pasar terakhir diperhitungkan, jika tersedia. Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui dalam laporan laba rugi komprehensif sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan apakah terdapat indikasi bahwa sebelumnya diakui kerugian penurunan nilai diakui untuk aset selain *goodwill* mungkin sudah tidak ada atau mungkin telah menurun. Bila terdapat indikasi, jumlah terpulihkan diperkirakan. Sebuah kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik hanya jika telah terjadi perubahan dalam asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika itu terjadi, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya.

Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun melebihi nilai tercatat yang seharusnya diakui, setelah dikurangi depresiasi, tidak ada rugi penurunan nilai diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Setelah pembalikan tersebut, biaya penyusutan aset tersebut disesuaikan pada periode mendatang untuk mengalokasikan revisi nilai tercatat aset, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar sistematis selama sisa umur manfaatnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Impairment of Non-Financial Assets (continued)

If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.

In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the consolidated statements of comprehensive income under expense categories that are consistent with the functions of the impaired assets.

An assessment is made at each annual reporting period as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses recognized for an asset other than goodwill may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss for an asset other than goodwill is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount.

The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceeds the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. Reversal of an impairment loss is recognized in the consolidated statement of comprehensive income. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Penurunan Nilai atas Aset Non-Keuangan (lanjutan)

Goodwill diuji untuk penurunan nilai setiap tahun (pada tanggal 31 Desember) dan ketika keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin diturunkan nilainya. Penurunan nilai bagi *goodwill* ditetapkan dengan menentukan jumlah tiap UPK (kelompok UPK) dimana *goodwill* terkait. Jika Total terpulihkan dari UPK kurang dari Total tercatatnya, rugi penurunan nilai diakui. Rugi penurunan nilai terkait *goodwill* tidak dapat dibalik pada periode mendatang.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada indikasi penurunan potensial atas nilai aset non-keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

l. Provisi dan Kontinjensi

Provisi diakui jika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif), sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan jumlah kewajiban tersebut dapat diestimasi secara handal.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika kemungkinan besar tidak terjadi arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, maka provisi dibatalkan.

Kewajiban kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian, namun diungkapkan kecuali jika kemungkinan akan terjadinya arus kas keluar berkaitan dengan kewajiban tersebut sangat kecil.

Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian, tetapi diungkapkan apabila kemungkinan diperolehnya arus kas masuk dari aset tersebut cukup besar.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Impairment of Non-Financial Assets (continued)

Goodwill is tested for impairment annually (as at December 31) and when circumstances indicate that the carrying value may be impaired. Impairment is determined for *goodwill* by assessing the recoverable amount of each CGU (or Company's CGUs) to which the *goodwill* relates. If the recoverable amount of the CGU is less than its carrying amount, an impairment loss is recognized. Impairment losses relating to *goodwill* cannot be reversed in future periods.

Management believes that there is no indication of potential impairment in values of non-financial assets as of December 31, 2021 and 2020.

l. Provisions and Contingencies

Provisions are recognized when the Company has a present obligation (legal or constructive), as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

Contingent liabilities are not recognized in the consolidated financial statements, but are disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote.

Contingent assets are not recognized in the consolidated financial statements, but are disclosed when an inflow of economic benefits is probable.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar pada periode berjalan sesuai dengan PSAK No. 56 tentang "Laba per Saham".

Laba per saham dilusian dihitung dengan menyesuaikan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif yang dimiliki perusahaan, yaitu obligasi konversi dan opsi saham.

Jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar yang digunakan dalam menghitung laba per saham dilusian pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 3.800.000 lembar saham dan 1.300.000 lembar saham.

n. Aset hak guna dan liabilitas sewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Grup dapat memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk:

- Sewa dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 12 bulan dan tidak terdapat opsi beli;
- Sewa atas aset dengan nilai rendah.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Grup harus menilai apakah:

- Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset dan
- Grup telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Earnings per Share

Basic earnings per share is calculated by dividing the profit for the year by the weighted average number of shares outstanding during the current period in accordance with SFAS No. 56, "Earnings per Share".

Diluted earnings per share is calculated by adjusting the weighted average number of ordinary shares outstanding to assume conversion of all dilutive potential ordinary shares owned by the Company, which are convertible bonds and stock option.

Total weighted average of shares outstanding used in computing diluted earnings per share on December 31, 2021 and 2020 are 3,800,000 shares and 1,300,000 shares, respectively.

n. Right-of-use assets and lease liabilities

At the inception of a contract, the Group assesses whether the contract is or contains a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration. The Group can choose not to recognise the right-of-use asset and lease liabilities for:

- *Leases with a term of less or equal to 12 months and there is no call option;*
- *Leases of low value assets.*

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group shall assess whether:

- *The Group has the right to operate the assets and*
- *The Group has designed the assets in a way that predetermine how and for what purpose it will be used.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa (lanjutan)

Grup mengakui liabilitas sewa sebesar jumlah pembayaran sewa yang masih harus dibayar hingga akhir masa sewa yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Sedangkan aset hak guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang dibayarkan, biaya pemulihan dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai sewa, dikurangi insentif sewa yang diterima. Aset hak guna disusutkan dengan metode garis lurus selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa dengan estimasi masa manfaat aset.

Jika kepemilikan aset sewa dialihkan ke Grup pada akhir masa sewa atau pembayaran sewa mencerminkan pelaksanaan opsi pembelian, penyusutan dihitung menggunakan estimasi masa manfaat ekonomis aset. Aset hak guna diuji penurunan nilainya sesuai dengan PSAK No. 48 Penurunan Nilai Aset.

Pada tanggal dimulainya sewa, Grup mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa masa depan yang akan dibayarkan selama masa sewa. Pembayaran sewa termasuk pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara- substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga, dan jumlah yang diharapkan akan dibayar dalam jaminan nilai residu. Pembayaran sewa juga termasuk harga eksekusi opsi pembelian yang wajar jika dipastikan akan dilakukan oleh Grup dan pembayaran penalti untuk mengakhiri sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan Grup mengeksekusi opsi penghentian sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga diakui sebagai beban pada periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran terjadi.

Dalam menghitung nilai kini dari pembayaran sewa, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal dimulainya sewa karena suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan. Setelah tanggal dimulainya sewa, jumlah liabilitas sewa

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Right-of-use assets and lease liabilities (continued)

The Group recognized lease liabilities at the amount of lease payments accrued to the end of the lease term which discounted using the incremental borrowing rate. While, the right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs paid, restoration costs and lease payments on or before the start date of the lease, less lease incentives received. Right-of-use are depreciated using the straight-line method over the shorter period between the lease term and the estimated useful life of the asset.

If the ownership of lease asset is transferred to the Group at the end of the lease term or the lease payments reflect the exercise of the purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the assets. Right-of-use assets are tested for impairment in accordance with SFAS No. 48.

On the initial lease date, the Group recognized lease liabilities which measured at the present value of future lease payments that will be paid over the lease term. Lease payments include fixed payments (including substantially fixed payments), less lease incentive receivables, variable lease payments that depends on index or interest rate, and the expected amount to be paid in a residual value guarantee. Lease payments also include the reasonable exercise price for the purchase option if it is determined to be made by the Group and the payment of a penalty to terminate the lease, if the lease term reflects the Group exercising the lease termination option. Variable lease payments that are not depends on an index or interest rate are recognized as an expense in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.

In calculating the present value of lease payments, the Group uses the lessee incremental borrowing rate at the inception date of the lease since the interest rate implicit in the lease cannot be determined. After the inception date of the lease, the amount of the lease

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa (lanjutan)

ditingkatkan untuk mencerminkan penambahan bunga dan dikurangi pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, jumlah tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan dalam penilaian opsi untuk membeli aset pendasar.

Sewa jangka pendek (dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 12 bulan) dan sewa aset bernilai rendah, serta elemen-elemen sewa tersebut, sebagian atau seluruhnya tidak menerapkan prinsip-prinsip pengakuan yang ditentukan oleh PSAK No. 73 akan diperlakukan sama dengan sewa operasi pada PSAK No. 30. Grup akan mengakui pembayaran sewa tersebut dengan dasar garis lurus selama masa sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Beban ini dicatat pada beban umum dan administrasi dalam laporan laba rugi.

Penerapan pencatatan PSAK No. 73 berlaku untuk seluruh sewa (kecuali sebagaimana yang disebutkan sebelumnya), yaitu sebagai berikut:

- Menyajikan aset hak-guna sebagai bagian dari aset tetap dan liabilitas sewa disajikan sebagai bagian dari liabilitas lain-lain dalam laporan posisi keuangan, yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa masa depan;
- Mencatat penyusutan aset hak-guna dan bunga atas liabilitas sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif; dan
- Memisahkan jumlah total pembayaran ke bagian pokok (disajikan dalam kegiatan pendanaan) dan bunga (disajikan dalam kegiatan operasional) dalam laporan arus kas.

o. Efek-efek yang Diterbitkan

Efek-efek yang diterbitkan oleh Grup dan Entitas Anak termasuk obligasi, surat utang jangka menengah (MTN) dan sukuk, pada pengukuran awal disajikan sebesar nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan/penerbitan efek-efek yang diterbitkan. Biaya transaksi kemudian diamortisasi dengan suku bunga efektif sampai dengan jatuh tempo dari efek-efek yang diterbitkan.

Efek-efek yang diterbitkan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Right-of-use assets and lease liabilities (continued)

liability is increased to reflect the interest increase and less lease payments made. Furthermore, the lease liabilities carrying amount is remeasured if there are modifications, changes in term of the lease, lease payments, or the valuation of the option to purchase the underlying asset.

Short-term leases (with term of less or equal to 12 months) and leases of low-value assets, and elements of those leases, partially or entirely not applying the recognition principles stipulated by SFAS No. 73 will be treated the same as operating leases in PSAK No. 30. The Group will recognize these lease payments on a straight-line basis during the lease period on the statement of profit or loss and other comprehensive income. This expense is recorded under general and administrative expenses in profit or loss.

The recording implementation of SFAS No. 73 is applied for all leases (except as stated earlier), as follows:

- Presents right-of-use assets as part of fixed assets and lease liabilities presented as part of other liabilities in the consolidated statement of financial position which measured at the present value of the future lease payments;
- Records depreciation of right-of-use assets and interest on lease liabilities in the statement of profit or loss and other comprehensive income; and
- Separates the total amount of cash paid within operating activities) in the statement of cash flows.

o. Issued Securities

Securities issued by the Group and Subsidiaries, including bonds, medium-term debt securities (MTN) and sukuk, are stated at their initial measurement at fair value plus transaction costs that are directly attributable to the acquisition/issuance of the securities issued. Transaction costs are then amortized at the effective interest rate until the maturity date of the securities issued.

Issued securities are classified as financial liabilities at amortized cost.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Dana Cadangan Angsuran

Dana Cadangan Angsuran yang terdiri dari dana cadangan nasabah, uang titipan nasabah dan uang pertanggungjawaban nasabah merupakan dana milik nasabah yang dititipkan kepada Grup tanpa memerlukan persetujuan nasabah manakala terjadi kekurangan pembayaran kewajiban nasabah.

q. Imbalan Kerja

Program Imbalan Pasca Kerja

Grup menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti atau program asuransi jaminan hari tua untuk seluruh karyawan tetapnya sesuai peraturan Perusahaan.

Liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris yang independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah (dikarenakan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi perusahaan yang berkualitas tinggi) yang didenominasikan dalam mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laporan laba rugi.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui pendapatan komperhensif lainnya pada saat terjadinya.

Keuntungan dan kerugian dari kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui di laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Installment Reserve Fund

The Installment Reserve Fund, which consists of customers' reserve funds, customers' deposits and customers' responsibility funds, are funds owned by customers that are deposited with the Group without requiring customer approval when there is a lack of payment of customer obligations.

q. Employee Benefits

Post-Retirement Benefits Program

The Group established defined benefits pension plans or insurance program covering post-retirement for all their permanent employees in accordance with their policies.

The liability recognised in the consolidated statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of Government Bonds (considering currently there is no deep market for high-quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating to the terms of the related pension obligation.

Past-service costs are recognised immediately in profit or loss.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise.

Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognised in profit or loss when the curtailment or settlement occurs.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Imbalan Kerja (lanjutan)

q. Employee Benefits (continued)

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Other Long-Term Employee Benefits

Selain program pensiun, Grup memberikan penghargaan kepada karyawan yang memenuhi persyaratan pensiun normal (manfaat purna jasa), dan penghargaan kepada karyawan yang telah bekerja selama 20 tahun (penghargaan masa kerja), sesuai dengan kebijakan Perusahaan didasarkan pada Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 11/2020 tentang Cipta Kerja pada tahun 2021 dan No. 13 Tahun 2003 pada tahun 2020. Imbalan kerja ini merupakan imbalan pasti tanpa pendanaan, sehingga liabilitas imbalan kerja diakui dalam laporan keuangan. Biaya jasa kini diakui sebagai beban pada tahun berjalan. Biaya jasa lalu sebagai dampak perubahan asumsi aktuarial bagi karyawan aktif diakui dalam laporan laba rugi selama sisa masa kerja rata-rata karyawan tersebut.

In addition to the pension plan, the Group subsidiaries provide award to their employees who have reached normal retirement (post retirement benefit), and to employees who have already rendered 20 years of service (long service award), in accordance with the Company's policies based on Labor Law No. 11/2020 concerning Job Creation in 2021 and No. 13 Year 2003 in 2020. Such benefits is an unfunded defined benefit hence the corresponding obligation is recorded in the financial statements. Current service cost is charged to operations in the current period. Past service cost as the effect of changes in actuarial assumption for active employees are charged to operations over the estimated average remaining working lives of employees.

Imbalan kerja lainnya dihitung secara aktuarial. Metode penilaian aktuarial yang digunakan untuk imbalan kerja tanpa pendanaan ini adalah metode *projected unit credit*.

Other employee benefits are actuarially determined. The actuarial method used by the actuary for the unfunded benefits is the projected unit credit method.

Grup mengakui keuntungan dan kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi. Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian terdiri dari:

The Group recognizes gains and losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan when the curtailment or settlement occurs. Gains or losses on the curtailment or settlement consists of:

- 1) Perubahan yang terjadi dalam nilai kini kewajiban imbalan pasti;
- 2) Perubahan yang terjadi dalam nilai wajar aset program;
- 3) Keuntungan dan kerugian dan biaya jasa lalu yang belum diakui sebelumnya.

- 1) Changes in the present value of the defined benefit obligation;
- 2) Changes in the fair value of the plan assets;
- 3) Gains and losses and past service costs that have not been recognized previously.

Imbalan kerja atas pemutusan hubungan kerja diakui sebagai liabilitas dan beban pada saat terjadi.

Employee separation benefit is recognized as liability and expense when incurred.

r. Hibah

r. Grants

Grup menetapkan kriteria mengenai pengakuan hibah dan bantuan pemerintah, penyajian hibah terkait dengan aset maupun penghasilan, serta pengungkapan dalam laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 61 "Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah".

The Group determines establish the criteria for recognition of government grants and assistance, the presentation of grants related to assets or income, and the disclosures in the financial statements based on SFAS No. 61 "Accounting for Government Grants and Disclosures of Government Assistance".

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Hibah (lanjutan)

Grup menggunakan pendekatan penghasilan dalam mengakui hibah, dimana hibah diakui dalam laba rugi selama satu atau lebih periode. Grup mengakui hibah pemerintah dalam laba rugi dengan dasar sistematis dan rasional selama periode dimana Grup mengakui beban atas biaya terkait yang dimaksudkan akan dikompensasikan sebagai hibah. Pengakuan hibah dalam laba rugi atas dasar penerimaan dilakukan apabila tidak terdapat dasar lain untuk mengalokasikan hibah kepada periode selain periode hibah diterima.

Perusahaan menyajikan hibah terkait dengan penghasilan sebagai kredit dalam laporan laba rugi komprehensif dalam akun "pendapatan lain-lain".

s. Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual

Aset tidak lancar (atau grup lepasan) yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual. Aset tidak lancar (atau Grup lepasan) yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk didistribusikan kepada pemilik diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar dikurangi biaya untuk mendistribusikan.

Grup mengakui rugi penurunan nilai awal atau selanjutnya atas penurunan nilai ke nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset (atau kelompok lepasan).

t. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Entitas Induk

Pendapatan dan beban bunga untuk semua instrumen keuangan diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Grants (continued)

The Group using the income approach in recognize grants, where grants are recognized in profit or loss over one or more periods. The Group recognizes the government grants in profit or loss by a systematic and rational basis over the period in which the Group recognizes the cost on related expenses that are intended to be compensated as a grant. Grants recognition in profit or loss made on the basis of acceptance if there is no other basis for allocating a grants to periods other than the period of the grant is received.

The Group presentates grants related to income as a credit in the comprehensive income statements in "other income" account.

s. Non-Current Assets Classified as Held for Sale

Non-current asset (or Group of removable) that are classified as held for sale are measured at the lower value between the carrying amount and fair value net of costs to sell. Non-current asset (or Group of removable) that are classified as held for distribution to owners be measured at the lower value between the carrying amount and fair value less costs to distribute.

The Group recognized an impairment loss on initial or subsequent to the impairment of fair value less costs to sell the asset (or Company removable).

t. Revenue and Expense Recognition

Parent Entity

Interest income and expense for all interest bearing financial instruments are recognized in the consolidated statements of comprehensive income using the effective interest rate method. The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial assets and financial liabilities (or, where appropriate, as shorter period) to the carrying amount of the financial asset or financial liability.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

t. Revenue and Expense Recognition (continued)

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak untuk kerugian kredit di masa datang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan seluruh premi atau diskon lainnya.

When calculating the effective interest rate, the Group estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument but not future credit losses. This calculation includes all commissions fees and other forms received by the parties in the contract are an integral part of the effective interest rate, transaction costs and all other premiums or discounts.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga efektif yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

If a financial asset or Group of similar financial assets value has diminished as a result of impairment losses, interest income subsequently obtained is recognized based on the effective interest rate used to discount future cash flows in calculating impairment losses.

Pendapatan bunga dari kredit program, pembiayaan usaha kecil, menengah dan koperasi diakui dengan cara diamortisasi berdasarkan metode suku bunga efektif.

Interest income from credit programs, small, medium enterprise and cooperative financing are recognized by amortizing the carrying value of loan with the effective interest rate method.

Pendapatan jasa penasihat keuangan dan konsultan manajemen diakui pada saat Perusahaan telah menyerahkan dan memindahkan risiko dan manfaat secara signifikan kepada pelanggan sesuai dengan perjanjian yang mendasari. Sedangkan pendapatan jasa pengelolaan reksadana diakui dan dihitung secara harian.

Revenue from financial advisory and management consulting services are recognized when the Company has delivered all the significant risks and benefits to the customers in accordance with the underlying agreement. Meanwhile, revenue from mutual fund management services is recognized and determined on a daily basis.

Entitas Anak (PT PNM Venture Capital)

Subsidiary (PT PNM Venture Capital)

Pendapatan dari piutang pembiayaan modal ventura diakui sebagai berikut:

Revenue from venture capital financing receivables are recognized as follows:

(i) Penyertaan saham.

(i) *Equity participation.*

PT PNM Venture Capital memperoleh pendapatan berupa jasa manajemen, dividen yang akan diterima setiap tahun dan keuntungan yang diperoleh dari penjualan investasi;

PT PNM Venture Capital earns income such as management services, annual dividends and profit arising from the disposal of investments;

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

t. Revenue and Expense Recognition (continued)

Entitas Anak (PT PNM Venture Capital) (lanjutan)

Subsidiary (PT PNM Venture Capital) (continued)

- (ii) Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi.

- (ii) *Convertible bonds participation.*

PT PNM Venture Capital memperoleh penghasilan bunga dari kupon obligasi dan mempunyai hak opsi untuk mengkonversikan obligasi tersebut menjadi penyertaan saham dalam periode tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian;

PT PNM Venture Capital earns interest income from a bond coupon and has an option to convert the bond into equity within a certain period set out in the agreement;

- (iii) Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha

- (iii) *Profit sharing financing*

Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha yang dilaksanakan oleh PT PNM Venture Capital kepada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) dilakukan dengan pola:

Financing based on the distribution of the operations results carried out by PT PNM Venture Capital to the Investee Company (PPU) is performed by scheme:

- a) Pembagian atas hasil usaha berdasarkan laba (*profit sharing*)
b) Pembagian atas hasil usaha berdasarkan pendapatan (*revenue sharing*)

- a) *Distribution of the operations result based on profit (profit sharing)*
b) *Distribution of the operations result based on revenue (revenue sharing)*

PT PNM Venture Capital memperoleh pendapatan berdasarkan persentase tertentu yang telah disepakati di awal dan dituangkan dalam perjanjian tertulis antara PT PNM Venture Capital dengan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU).

PT PNM Venture Capital earn revenue on a certain percentage that has been agreed in advance and set forth in a written agreement between PT PNM Venture Capital with the Investee Company (PPU).

Pendapatan investasi berupa bunga dari obligasi dan deposito, serta instrumen pasar uang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, pada nilai nominal dan tingkat suku bunga yang berlaku. Sedangkan pendapatan dari pembagian hasil usaha koperasi dan pendapatan dividen diakui pada saat surat pemberitahuan pembagian sisa hasil usaha dan dividen diterima.

Investment revenue such as interest derived from bonds, time deposits and money market instruments are recognized on an accrual basis over the term period, at the nominal value and applicable interest rate. Profit sharing revenue from cooperatives and dividends income are recognized when the related acknowledgement letters are received.

Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara PT PNM Venture Capital sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan di muka.

Mudharabah financing is a joint venture agreement between the PT PNM Venture Capital as the owner of the funds (shahibul maal) and the customer as a fund manager (mudharib) to do business with the ratio of profit sharing (profit or loss) in accordance with an agreement in advance.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

t. Revenue and Expense Recognition (continued)

Entitas Anak (PT PNM Venture Capital) (lanjutan)

Subsidiary (PT PNM Venture Capital) (continued)

Pembiayaan Mudharabah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo penyisihan penghapusan. Perusahaan menetapkan penyisihan penghapusan berdasarkan penelaahan kualitas atas masing-masing saldo pembiayaan.

Mudharabah financing stated at their outstanding less allowance for uncollectible balances. The Company provides allowance for removal based on a review of the quality of each account.

Apabila sebagian pembiayaan Mudharabah mengalami rugi sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan Mudharabah dan diakui sebagai kerugian PT PNM Venture Capital. Apabila sebagian pembiayaan Mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka rugi tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.

If part of Mudharabah financing a loss prior to the commencement of business because of the damage or for other reasons without the negligence or fault of the manager of the fund, then the loss is reducing the balance Mudharabah financing PT PNM Venture Capital and is recognized as a loss. If most of Mudharabah financing disappeared after the start of the business in the absence of negligence or fault fund the losses are calculated at the time of the results.

Pembiayaan Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra Musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

Musharakah financing is an agreement of cooperation that occurs between the owners of capital (Musharakah partners) to combine capital and do business together in a partnership with the ratio of dividends in accordance with the agreement, while losses covered in proportion to the capital contribution.

Pembiayaan Musyarakah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo penyisihan penghapusan. PT PNM Venture Capital menetapkan penyisihan penghapusan sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing *account*.

Musharakah financing balances are stated at financing less allowance for uncollectible balances. The PT PNM Venture Capital provides allowance for write-off in accordance with the quality of the financing based on a review of each account.

Beban diakui pada saat terjadinya secara akrual.

Expenses are recognized when incurred on an accrual basis.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

t. Revenue and Expense Recognition (continued)

Entitas Anak (PT PNM Investment Management)

Subsidiary (PT PNM Investment Management)

Pendapatan

Revenue

Transaksi efek dan pendapatan komisi

Securities transaction and commission income

Perdagangan transaksi efek yang lazim dicatat pada tanggal perdagangan, seolah-olah transaksi efek telah diselesaikan. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi efek yang merupakan tanggungan dan risiko PT PNM Investment Management dicatat berdasarkan tanggal perdagangan. Transaksi efek pelanggan dilaporkan pada tanggal penyelesaian dan pendapatan komisi dan beban terkait dilaporkan pada tanggal perdagangan. Total piutang dan utang dari transaksi efek yang belum mencapai tanggal penyelesaian kontraknya dicatat bersih pada laporan posisi keuangan.

Common trading securities transactions are recorded on the trade date, as if the securities transaction has been completed. Gains and losses arising from securities transactions and the risk is borne by the PT PNM Investment Management are recorded at the trade date. Customer securities transactions are reported on the settlement date and commission income and expense reported on the trade date. Total receivables and debt securities transactions that have not yet reach the contract settlement date are recorded net on the statement of financial position.

Pencatatan utang dan piutang dana dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan yang timbul karena Transaksi Bursa dilakukan secara netting yang penyelesaiannya jatuh tempo pada hari yang sama.

Recording payables and receivables funds with Clearing and Guarantee Institution arising from Exchange Transactions conducted netting the settlement due on the same day.

Pencatatan utang dan piutang dana dengan nasabah yang timbul karena Transaksi Bursa di pasar reguler dilakukan secara *netting* untuk setiap nasabah yang penyelesaiannya jatuh tempo pada hari yang sama.

Recording debt and receivables fund with customers arising because of Exchange Transactions in regular market is done for each customer netting settlement due on the same day.

Komisi dan biaya terkait kliring dicatat berdasarkan tanggal perdagangan saat terjadinya transaksi efek.

Commissions and expenses that related to clearing are recorded at the trade date of the securities transactions.

Jasa penjaminan emisi dan penjualan efek

Services underwriting and sale of securities

Pendapatan dari jasa penjaminan emisi dan penjualan efek meliputi keuntungan, kerugian, dan jasa, setelah dikurangi biaya sindikasi, yang timbul dari penawaran efek dimana PT PNM Investment Management bertindak sebagai penjamin emisi atau agen. Pendapatan dari konsesi penjualan dicatat pada tanggal penyelesaian, dan jasa penjaminan emisi diakui pada saat aktivitas penjaminan emisi telah selesai dan Total pendapatan telah dapat ditentukan.

Revenues from underwriting and sale of securities includes gains, losses, and services, net of syndicated fees, which arise from offering securities in which the PT PNM Investment Management acts as an underwriter or agent. Revenue from concession sales are recorded on the settlement date, and underwriting services are recognized when the underwriting activities have been completed and the amount of revenue can be determined.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

t. Revenue and Expense Recognition (continued)

Entitas Anak (PT PNM Investment Management) (lanjutan)

Subsidiary (PT PNM Investment Management) (continued)

Pendapatan (lanjutan)

Revenue (continued)

Pendapatan dividen dan bunga

Dividend and interest income

Pendapatan dividen dari investasi diakui pada saat hak pemegang saham untuk menerima pembayaran telah ditetapkan (dengan ketentuan bahwa besar kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir kepada PT PNM Investment dan jumlah pendapatan dapat diukur secara andal).

Dividend income from investments is recognized when the shareholders' rights to receive payment has been established (provided that it is probable the economic benefits will flow to the PT PNM Investment Management and the amount of revenue can be measured reliably).

Pendapatan bunga diakui jika besar kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir kepada PT PNM Investment dan jumlah pendapatan dapat diukur secara handal. Pendapatan bunga diakui atas dasar waktu, dengan mengacu pada pokok dan suku bunga efektif yang berlaku, yang merupakan tingkat diskonto yang tepat untuk mengestimasi penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur aset keuangan ke jumlah tercatat aset pada saat pengakuan awal.

Interest income is recognized when it is probable the economic benefits will flow to the PT PNM Investment and the amount of revenue can be measured reliably. Interest income is recognized on a time basis, by reference to the principal and the effective interest rate applicable, which is the appropriate discount rate to estimate the future cash receipts through the expected life of the financial asset to the asset's carrying amount on initial recognition.

Beban

Expenses

Beban yang timbul sehubungan dengan proses penjaminan emisi diakumulasikan dan dibebankan pada saat pendapatan penjaminan emisi diakui. Pada saat diketahui bahwa kegiatan penjaminan emisi tidak diselesaikan dan emisi efek dibatalkan, maka beban penjaminan emisi tersebut dibebankan pada laporan laba rugi.

Expenses incurred in connection with the underwriting process are accumulated and charged at the time of underwriting revenue is recognized. At the moment it is known that the activities are not completed underwriting and underwriting canceled, the underwriting expense is charged against the income statement.

Beban lainnya diakui sesuai manfaatnya.

Other expenses are recognized based on its benefits.

u. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

u. Foreign Currency Transactions and Balances

Pembukuan Grup dicatat dalam mata uang Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal tersebut.

The Group's bookkeeping is recorded in Rupiah. Transactions in foreign currencies are translated into Rupiah using the exchange rates prevailing at the transaction date. At the end of the reporting period, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah using the middle rate set by Bank Indonesia on those dates.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing (lanjutan)

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing ke mata uang Rupiah diakui dalam arus laba konsolidasi periode atau rugi, kecuali untuk keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan operasi asing pertukaran ke dalam mata uang penyajian dari Grup, yang diakui secara langsung dalam penghasilan komprehensif lain.

Kurs yang digunakan untuk penjabaran ke dalam Rupiah pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>
Dolar AS	14.269

v. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya dalam Standar ini disebut sebagai "entitas pelapor".

- 1) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Perusahaan jika orang tersebut:
 - (a). Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perusahaan;
 - (b). Memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan; atau
 - (c). Personil manajemen kunci Perusahaan atau entitas induk Perusahaan.
- 2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - (a) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
 - (b) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Foreign Currency Transactions and Balances (continued)

Exchange gains and losses arising on foreign currency transactions and on the translation of foreign currency monetary assets and liabilities into Rupiah are recognized in the current period consolidated profit or loss, except for the exchange gains and losses arising on the translation of the foreign operation's financial statements into the presentation currency of the Group, which are recognized directly in other comprehensive income.

The exchange rates used for translation into Rupiah as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

	<u>2020</u>	
	14.105	US Dollar

v. Transaction with Related Parties

A related party is a person or entity related to the entity that is preparing its financial statements in this Standard referred to as "reporting entity".

- 1) Person or member's family is related to a Company if that person:
 - (a). Has control or joint control over the Company;
 - (b). Has significant influence over the Company; or
 - (c). Key management personnel of the Company or Parent reporting.
- 2) An entity is related to a reporting entity if any of the following:
 - (a) Entity and the reporting entity is a member of the same Company (which means a parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
 - (b) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a Company, which the other entity is a member);

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

v. Transaction with Related Parties (continued)

- 2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: (lanjutan)
- (c) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - (d) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - (e) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Perusahaan atau entitas yang terkait dengan Perusahaan.
 - (f) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - (g) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
 - (h) Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada Perusahaan atau kepada entitas induk dari Perusahaan.

- 2) An entity is related to a reporting entity if any of the following: (continued)
- (c) Both entities are joint ventures of the same third party;
 - (d) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
 - (e) the Entity is a post-employment defined benefit plan for the benefit of employees of either the Company or an entity related to the Company.
 - (f) the Entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
 - (g) a Person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).
 - (h) the Entity, or any member of a Company of which it is a part, provides key management personnel services to the Company or to the parent of the Company.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Beberapa persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan persyaratan yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

The transactions are made based on terms agreed by the parties. Such terms may not be the same as those of the transactions between unrelated parties.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan yang relevan di sini.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes here.

w. Kombinasi Bisnis

w. Business Combination

Grup mencatat kombinasi bisnis dengan menerapkan metode akuisisi. Grup selaku pihak pengakuisisi mencatat akuisisi pada tanggal dimana Grup memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi.

The Group recorded business combination by applying the acquisition method. The Group as the acquirer records acquisition at the date when the Group obtains control over the acquiree.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

w. Kombinasi Bisnis (lanjutan)

Perusahaan selaku pihak pengakuisisi mengakui *goodwill* pada tanggal akuisisi yang diukur sebagai selisih dari (a) nilai agregat imbalan yang dialihkan yang diukur menggunakan nilai wajar pada tanggal akuisisi, jumlah setiap kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi, dan nilai wajar kepentingan ekuitas yang dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi dengan (b) jumlah aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil-alih pada tanggal akuisisi.

Grup selaku pihak pengakuisisi mengakui kombinasi bisnis sebagai pembelian dengan diskon, apabila nilai (b) melebihi nilai (a) pada paragraf di atas. Grup mengakui keuntungan pembelian dengan diskon dalam laporan laba rugi pada tanggal akuisisi dan keuntungan tersebut diatribusikan kepada pihak pengakuisisi.

Grup selaku pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap akan mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan (kerugian) yang dihasilkan dalam laporan laba rugi.

Grup selaku pihak pengakuisisi mengakui nilai wajar tanggal akuisisi atas imbalan kontinjensi sebagai bagian dari imbalan yang dialihkan dalam pertukaran untuk pihak yang diakuisisi.

Grup selaku pihak pengakuisisi mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil-alih dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Grup mengakui *goodwill* pada tanggal akuisisi yang diukur sebagai selisih atas nilai agregat dari imbalan yang dialihkan, total setiap kepentingan non pengendali pada pihak yang diakuisisi, dan nilai wajar kepentingan ekuitas pada tanggal akuisisi dengan selisih jumlah aset teridentifikasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

w. Business Combination (continued)

Corporate acquirer recognizes goodwill as of the acquisition date is measured as the difference of (a) the aggregate value of the consideration transferred is measured using the fair value at the acquisition date, the amount of any non-controlling interest in the acquiree, and the fair value of the equity interests held by the acquirer in the acquiree with (b) the number of identifiable assets acquired and liabilities taken over on the date of acquisition.

Group as the acquirer recognizes as a purchase business combination with a discount, if the value of (b) exceeds the aggregate value (a) in the above paragraph. Group recognized gains of purchase with a discount in the income statement at the date of acquisition and the gain attributable to the acquirer.

Group as the acquirer in a business combination is achieved in stages will re-measure previously held equity interest at acquisition date fair value and recognizes gains (losses) resulting in the income statement.

Group as the acquirer recognizes the fair value on the date of acquisition contingent consideration as part of the consideration transferred in exchange for the acquiree.

The Group as the acquirer to measure the identifiable assets acquired and liabilities taken over by the fair value at the acquisition date.

The Group recognized goodwill on the acquisition date, measured as the difference between the aggregate value of the benefit transferred, the amount of non-controlling interest of the acquired and the fair value of equity interests at the date of acquisition by the difference in the number of assets identified.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

w. Kombinasi Bisnis (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal atas kombinasi bisnis sebagai berikut:

1. Hak yang diperoleh kembali yang diakui sebagai aset takberwujud diamortisasi selama sisa periode kontraktual;
2. Liabilitas kontinjensi diakui pada nilai yang lebih tinggi antara jumlah yang seharusnya diakui sesuai dengan PSAK No. 57 (revisi 2009) dan jumlah yang pada awalnya diakui setelah dikurangi akumulasi amortisasi yang diakui sesuai dengan PSAK No. 23 (revisi 2010);
3. Kolektibilitas aset indemnifikasi;
4. Perubahan nilai wajar imbalan kontinjensi yang bukan merupakan penyesuaian periode pengukuran;
5. Grup melakukan uji penurunan nilai atas *goodwill* secara periodik.

x. Kombinasi Bisnis di Bawah Pengendalian Bersama

Kombinasi bisnis yang melibatkan entitas sepengendali dicatat sesuai dengan PSAK No 38. Berdasarkan PSAK ini, kombinasi bisnis entitas sepengendali transaksi sepengendali, berupa pengalihan bisnis yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas yang berada dalam Perusahaan yang sama, bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi tidak menimbulkan laba atau rugi bagi Perusahaan secara keseluruhan atau untuk entitas individu dalam Perusahaan.

Sejak transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi dipertukarkan kepemilikan bisnis, transaksi tersebut diakui dalam jumlah tercatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan.

Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, komponen laporan keuangan untuk periode di mana terjadi restrukturisasi dan untuk periode lain yang disajikan untuk tujuan perbandingan disajikan sedemikian rupa seolah-olah restrukturisasi telah terjadi sejak awal entitas berada di bawah sepengendali. Nilai tercatat unsur-unsur laporan keuangan tersebut adalah nilai tercatat entitas bergabung dalam kombinasi bisnis sepengendali. Perbedaan antara imbalan yang dialihkan dan Total tercatat dari kombinasi bisnis apapun di bawah transaksi sepengendali dalam ekuitas dan disajikan pada tambahan modal disetor.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

w. Business Combination (continued)

Measurement after initial recognition of the business combination as follows:

1. The recoverable rights that recognized as intangible assets are amortized over the remaining contractual period;
2. Contingent liabilities recognized at the higher value between the amount that should be recognized in accordance with SFAS No. 57 (revised 2009) and the amount initially recognized less accumulated amortization recognized in accordance with SFAS No. 23 (revised 2010);
3. Collectibility of indemnification asset;
4. Changes in fair value of contingent benefits that are not measurement period adjustments;
5. The Group testing impairment value of goodwill on a periodic basis.

x. Business Combination of Entities Under Common Control

Business combinations involving entities under common control are recorded in accordance with SFAS No. 38. This GAAP, the business combination of entities under common control transactions, such as transfers of business conducted within the framework of the reorganization of entities within the Company are the same, not a change of ownership in terms of substance economy, so that the transaction does not result in a gain or loss to the Company and its Subsidiaries as a whole or for individual entities within the Company.

Since the transaction of business combination of entities under common control does not lead to changes in economic substance exchanged business ownership, the transaction is recognized in the carrying amount based on the pooling of interest method.

In applying the pooling of interest method, the components of financial statements for periods where there is restructuring and for other periods presented for comparative purposes are presented as if the restructuring had occurred since the beginning of the entities were under common control. The carrying amount of financial statement elements are joined in the carrying amount of an entity under common control business combination. The difference between the consideration transferred and the carrying amount of any business combinations under common control transactions in equity and presented in the additional paid-in capital.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

y. Segmen Operasi

y. Operating Segment

Segmen adalah bagian khusus dari Grup yang terlibat baik dalam menyediakan produk dan jasa (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dan jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

The segment is a distinguishable component of the Group that is engaged either in providing certain products (business segment), or in providing products within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk *item-item* yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Group dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. They are determined before intra-Group balances and intra-Group transactions are eliminated as part of consolidation process.

Group menentukan dan menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi yang secara internal diberikan kepada pengambil keputusan operasional. Perubahan kebijakan akuntansi disebabkan karena implementasi PSAK No.5 (Revisi 2009), "Segmen Operasi". Sebelumnya, segmen operasi ditentukan dan disajikan sesuai dengan PSAK No.5 (Revisi 2000), "Pelaporan Segmen". Kebijakan akuntansi baru sehubungan dengan pengungkapan atas segmen operasi disajikan berikut ini:

The Group determines and presents operating segments based on the information that internally is provided to the chief operating decision maker. This change in accounting policy is due to the adoption of SFAS No. 5 (2009 Revision), "Operating Segments". Previously operating segments were determined and presented in accordance with SFAS No.5 (2000 Revision), "Segment Reporting". The new accounting policy in respect of operating segment disclosures is presented as follow:

Grup menyajikan informasi berdasarkan segmen usaha sebagai berikut: pembiayaan, pembiayaan syariah, manajer investasi, modal ventura, dan pembiayaan syariah.

The Group present information on the following business segments: financing, sharia financing, investment manager, venture capital, and sharia financing.

z. Pajak Penghasilan

z. Income Tax

Pajak Final

Final Tax

Pajak atas penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final disajikan sebagai bagian dari beban pajak.

Taxes on income subject to final tax is presented as part of the tax expense.

Beban pajak atas penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final, diakui proporsional dengan total pendapatan menurut akuntansi pada periode berjalan. Selisih antara total pajak penghasilan final telah dibayar dan jumlah dibebankan sebagai beban pajak pada perhitungan laba rugi komprehensif konsolidasian diakui sebagai pajak dibayar di muka atau utang pajak.

Tax expenses on income subjected to final income tax is recognized proportionally with total income recognized during the current period for accounting purposes. The difference between total final income tax paid and the amount charged as final income tax expense in the consolidated statements of comprehensive income is recognized as prepaid tax or tax payable.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

z. Pajak Penghasilan (lanjutan)

z. Income Tax (continued)

Pajak Non-Final

Non-Final Tax

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak kini dan tangguhan. Beban pajak penghasilan diakui dalam laporan laba rugi, kecuali untuk transaksi-transaksi yang berhubungan dengan transaksi diakui langsung dalam ekuitas, dalam hal ini diakui sebagai penghasilan komprehensif lainnya.

Income tax expense comprises current and deferred tax. Income tax expense is recognized in profit or loss except to the extent that it relates to items recognized directly in equity, in which case it is recognized in other comprehensive income.

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan.

Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the year.

Pajak kini

Current tax

Aset dan liabilitas pajak kini untuk periode berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Current income tax assets and liabilities for the current period are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the tax authority. The tax rates and tax laws used as a basis for computation are those that have been enacted or substantively enacted as at the reporting dates.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan dicatat saat surat ketetapan pajak diterima atau apabila dilakukan banding, ketika hasil banding sudah diputuskan.

Amendments to taxation obligations are recorded when an assessment is received or if appealed against, when the results of the appeal are determined.

Pajak Tangguhan

Deferred Tax

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer dari aset dan liabilitas antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal laporan. Manfaat pajak masa mendatang, seperti rugi fiskal yang dapat dikompensasi, diakui sepanjang besar kemungkinan manfaat pajak tersebut dapat direalisasikan.

Deferred tax assets and liabilities are recognized on temporary differences of assets and liabilities between commercial and tax reporting dates at each reporting date. Future tax benefits, such as carry forward tax losses are recognized to the extent that it is probable that the tax benefits will be realized.

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal yang belum digunakan, sepanjang besar kemungkinan beda temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang, kecuali aset pajak tangguhan yang terkait dengan perbedaan permanen yang dapat dikurangkan timbul dari pengakuan awal aset dan liabilitas dalam transaksi yang bukan merupakan kombinasi

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses, to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax losses can be utilized, except where the deferred tax asset relating to the deductible temporary difference arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

z. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Paik Tangguhan (lanjutan)

bisnis dan, pada saat transaksi, dampaknya tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba atau rugi kena pajak; namun untuk perbedaan temporer dapat dikurangkan terkait dengan investasi pada entitas anak, aset pajak tangguhan diakui hanya sepanjang kemungkinan besar perbedaan temporer akan dibalik di masa depan yang dapat diperkirakan dan laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang memadai sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan.

Kecuali aset pajak tangguhan yang terkait dengan perbedaan permanen yang dapat dikurangkan timbul dari pengakuan awal aset dan liabilitas dalam transaksi yang bukan merupakan kombinasi bisnis dan, pada saat transaksi, dampaknya tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba atau rugi kena pajak; namun untuk perbedaan temporer dapat dikurangkan terkait dengan investasi pada entitas anak, aset pajak tangguhan diakui hanya sepanjang kemungkinan besar perbedaan temporer akan dibalik di masa depan yang dapat diperkirakan dan laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang memadai sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan.

Nilai tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan, dan mengurangi nilai tercatat jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam nilai yang memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap akhir periode pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan memungkinkan aset pajak tangguhan tersedia untuk dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada periode saat aset direalisasikan atau liabilitas tersebut diselesaikan, berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku atau berlaku secara substantif pada akhir periode laporan keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan dan/atau pemulihan semua perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

z. Income Tax (continued)

Deferred Tax (continued)

and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss; or in respect of deductible temporary differences associated with investments in subsidiaries, deferred tax assets are recognized only to the extent that it is probable that the temporary differences will reverse in the foreseeable future and taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized.

Except where the deferred tax asset relating to the deductible temporary difference arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss; or in respect of deductible temporary differences associated with investments in subsidiaries, deferred tax assets are recognized only to the extent that it is probable that the temporary differences will reverse in the foreseeable future and taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the benefit of that deferred tax asset to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable income will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax laws that have been enacted or substantively enacted at the end of reporting period. The related tax effects of the provisions for and/or reversals of all temporary differences during the year, including the effect of change in tax rates, are included in the consolidated statement of comprehensive income of the current year.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

z. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus saat hak yang dapat dipaksakan secara hukum ada untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini, atau aset dan liabilitas pajak tangguhan berkaitan dengan entitas kena pajak yang sama, atau Perusahaan bermaksud untuk menyelesaikan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika Grup mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

aa. Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

Peristiwa setelah akhir tahun yang memerlukan penyesuaian dan menyediakan informasi tambahan tentang posisi Grup pada tanggal pelaporan (*adjusting event*) tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian.

Peristiwa setelah pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian, diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian apabila material.

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI

Penyusunan laporan keuangan Grup membutuhkan berbagai penilaian, estimasi, dan asumsi oleh Manajemen Grup, yang memberikan dampak terhadap jumlah pendapatan, beban, aset, liabilitas, dan pengungkapan kontingen liabilitas yang dilaporkan pada akhir periode pelaporan. Akan tetapi, ketidakpastian mengenai asumsi-asumsi dan estimasi-estimasi tersebut dapat menyebabkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset atau liabilitas yang akan terdampak di masa depan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

z. Income Tax (continued)

Deferred Tax (continued)

Deferred tax assets and liabilities are offset when a legally enforceable right exists to offset current tax assets against current tax liabilities, or the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to the same taxable entity, or the Company intends to settle its current assets and liabilities on a net basis.

Amendments to tax obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against by the Group, when the result of the appeal is determined.

aa. Events After Reporting Date

Post year-end events that need adjustments and provide additional information about the Group's position at the reporting date (adjusting event) are reflected in the consolidated financial statements.

Any post year-end event that is not an adjusting event is disclosed in the notes to the consolidated financial statements when material.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY

The preparation of the financial statements of the Group require a various assessments or valuation, estimates, and assumptions by the Group's management, which have an impact on the amount of revenues, expenses, assets, liabilities, and disclosure of contingent liabilities are reported at the end of the reporting period. However, uncertainty regarding the assumptions and estimates could cause a material adjustment to the carrying value of assets or liabilities that will be affected in the future.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup, Manajemen telah membuat penilaian-penilaian, yang terpisah dari estimasi-estimasi dan asumsi-asumsi yang dibuat, yang memberikan dampak yang paling signifikan terhadap total yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian.

Klasifikasi Instrumen Keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 2.

Kelangsungan Usaha

Manajemen Grup telah melakukan penilaian terhadap kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usaha dan menilai keyakinan bahwa Perusahaan memiliki sumber daya untuk melanjutkan bisnis di masa mendatang. Selain itu, manajemen menilai tidak adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan konsolidasian dilanjutkan untuk disusun atas basis kelangsungan usaha. Rincian terkait masalah ini diungkapkan dalam Catatan 41.

Konsolidasi entitas terstruktur

Entitas terstruktur adalah entitas yang telah dirancang sedemikian rupa sehingga hak suara atau hak serupa bukan merupakan faktor dominan dalam menentukan siapa yang mengendalikan entitas, seperti ketika hak suara hanya berkaitan dengan masalah administratif dan aktivitas relevan diarahkan melalui pengaturan kontraktual.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Judgments

In the process of applying of the Group accounting policies, the Company's Management has made assessments, apart from these estimates and assumptions made, which have the most significant impact on the presented amount in the consolidated financial statements.

Classification of Financial Instruments

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS No. 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Company's accounting policies disclosed in Note 2.

Going Concern

The Group's management has made an assessment of the Company's ability to continue as a going concern and is satisfied that the Company has the resources to continue in business for the foreseeable future. Furthermore, the management is not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt upon the Company's ability to continue as a going concern. Therefore, the consolidated financial statements continue to be prepared on the going concern basis. Details related to this matter are disclosed in Note 41.

Consolidation of structured entities

A structured entity is an entity that has been designed so that voting or similar rights are not the dominant factor in deciding who controls the entity, such as when the voting rights relate to administrative matters only and the relevant activities are directed by means of contractual arrangements.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Dalam kasus-kasus di mana Grup mendirikan entitas, atau memiliki kepemilikan di entitas tersebut, untuk memungkinkan pelanggannya mengakses investasi tertentu, atau untuk mentransfer risiko atau untuk tujuan lain, sesuai dengan kriteria dan prosedur internal dan dengan peraturan yang berlaku, Grup menentukan apakah pengendalian atas entitas tersebut benar-benar ada dan oleh karena itu apakah entitas tersebut harus dikonsolidasi. Metode dan prosedur tersebut menentukan apakah terdapat pengendalian oleh Grup, dengan mempertimbangkan bagaimana keputusan dibuat tentang aktivitas relevan, menilai apakah Grup memiliki semua kekuasaan atas elemen, eksposur, atau hak yang relevan, atas imbal hasil variabel dari keterlibatan dengan *investee*; dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaan atas *investee* untuk memengaruhi jumlah pengembalian investor.

Manajemen telah menilai apakah entitas di mana Grup berinvestasi harus diklasifikasikan sebagai entitas terstruktur dan telah menyimpulkan bahwa reksa dana tertentu harus diklasifikasikan sebagai entitas terstruktur dan bahwa Grup mengendalikan entitas tersebut. Oleh karena itu, entitas tersebut dikonsolidasikan dalam laporan keuangan konsolidasian Grup.

Penentuan mata uang fungsional

Grup mempertimbangkan faktor-faktor berikut dalam menentukan mata uang fungsionalnya:

- a) Mata uang (i) yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa; dan (ii) dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa Perusahaan.
- b) Mata uang yang paling mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lain dari pengadaan barang atau jasa.

Penentuan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan

Grup memiliki berbagai aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar, dimana untuk menentukan nilai wajar tersebut, membutuhkan penggunaan estimasi akuntansi dan penilaian yang tepat, yaitu:

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Judgments (continued)

In those cases where the Group sets up entities, or has a holding in such entities, in order to allow its customers access to certain investments, or to transfer risks or for other purposes, in accordance with internal criteria and procedures and with applicable regulations, the Company determines whether control over the entity in question actually exists and therefore whether it should be subject to consolidation. Such methods and procedures determine whether there is control by the Company, considering how the decisions are made about the relevant activities, assesses whether the Company has all power over the relevant elements, exposure, or rights, to variable returns from involvement with the investee; and the ability to use power over the investee to affect the amount of the investor's returns.

The management has assessed whether the entities in which the Group invests should be classified as structured entities and has concluded that certain mutual funds should be classified as structured entities and that the Group controls these entities. Therefore, these entities are consolidated in the Group's consolidated financial statements.

Determination of functional currency

The Group consider the following factors in determining its functional currency:

- a) *Currency (i) that most influence the selling price of goods and services, and (ii) states that its strength of competition and its rules largely determine the selling price of goods and services of the Company.*
- b) *Currency that most influence the cost of labor, raw materials, and other costs of procurement of goods or services.*

Determination of fair value of financial assets and liabilities

The Group has a various of financial assets and liabilities are measured at fair value, which is to determine fair value, requiring the use of a proper accounting estimates and assessments, namely:

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

- a) Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan dalam pasar aktif (misalnya efek yang diperdagangkan dan tersedia untuk dijual) ditentukan berdasarkan harga pasar pada tanggal pelaporan.
- b) Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan pada pasar aktif (misal: *derivative over the counter*) ditentukan dengan teknik penilaian. Perusahaan menggunakan berbagai metode dan membuat asumsi berdasarkan kondisi pasar yang ada pada tanggal pelaporan.

Penentuan klasifikasi sewa

Grup memiliki beberapa sewa sedangkan Perusahaan dan entitas Anak bertindak sebagai lessee dalam hal kendaraan sewa dan gedung perkantoran sewa. Grup mengevaluasi apakah terdapat risiko signifikan dan manfaat kepemilikan aset sewaan ditransfer berdasarkan PSAK No. 73 "Sewa", yang mensyaratkan Grup untuk membuat penilaian dan perkiraan transfer risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Berdasarkan penelaahan yang dilakukan oleh Grup untuk perjanjian sewa terkait, sewa gedung kantor diklasifikasikan sebagai sewa operasi dan kendaraan sewa sebagai sewa pembiayaan.

Menentukan masa sewa kontrak dengan opsi pembaruan dan penghentian - Grup sebagai penyewa

Grup menentukan bahwa masa sewa sebagai masa sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersamaan dengan periode yang tercakup dalam opsi perpanjangan sewa, jika dieksekusi secara wajar dan pasti, atau periode yang tercakup dalam opsi penghentian sewa, jika tidak dieksekusi secara wajar dan pasti.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Judgments (continued)

- a) *The fair value of financial instruments traded in active markets (such as trading and available-for-sale securities) is determined based on quoted market prices at the reporting date.*
- b) *The fair value of financial instruments that are not traded in active market (for example: over-the-counter derivatives) is determined by using valuation techniques. The Company uses a variety of methods and makes assumptions that are based on market conditions existing at each reporting date.*

Determination of lease classification

The Group has several leases whereas the Group and its Subsidiaries acts as lessee in respect of vehicles under lease and office building rental. The Group evaluates whether significant risks and rewards of ownership of the leased assets are transferred based on SFAS No. 73 "Lease", which requires the Group to make judgment and estimates of the transfer of risks and rewards related to the ownership of asset.

Based on the review performed by the Group for the related lease agreements, the rental of office building is classified as operating lease and vehicles under lease as finance lease.

Determining the lease term of contracts with renewal and termination options - Group as lessee

The Group determines the lease term as the non-cancellable term of the lease, together with any periods covered by an option to extend the lease if it is reasonably certain to be exercised, or any periods covered by an option to terminate the lease, if it is reasonably certain not to be exercised.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Penentuan klasifikasi sewa (lanjutan)

Grup menerapkan pertimbangan dalam mengevaluasi apakah wajar dan pasti untuk mengeksekusi opsi untuk pembaruan atau penghentian sewa atau tidak. Untuk kontrak sewa dengan opsi perpanjangan dan penghentian, manajemen perlu mengestimasi masa sewa yang memerlukan pertimbangan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk mengeksekusi opsi perpanjangan dan tidak mengeksekusi opsi penghentian, termasuk setiap perubahan yang diharapkan dalam fakta dan keadaan dari tanggal permulaan hingga tanggal pengeksekusian opsi tersebut. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian) hanya dimasukkan dalam persyaratan sewa jika Grup cukup yakin untuk mengeksekusi opsi perpanjangan dan tidak mengeksekusi opsi penghentian. Jika terdapat peristiwa signifikan atau perubahan keadaan yang signifikan yang mempengaruhi penilaian ini dan masih dalam kendali penyewa, maka penilaian diatas akan ditelaah kembali.

Estimasi dan asumsi

Asumsi utama masa depan dan ketidakpastian sumber estimasi utama yang lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Group. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Estimasi masa manfaat aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 5 sampai dengan 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Judgments (continued)

Determination of lease classification (continued)

The Group applies judgment in evaluating whether it is reasonably certain whether or not to exercise the option to renew or terminate the lease. For lease contracts with extension or termination options, management need to estimate the lease term which requires consideration of all facts and circumstances that creates an economic incentive to exercise an extension option or not to exercise termination options, including any expected changes in facts and circumstances from commencement date until the exercise date of the options. Extension options (or periods after termination options) are only included in lease terms if the Group is reasonably certain to exercise the extension options or not to exercise the termination options. If a significant event or a significant change in circumstances occurs which affects this assessment and that is within the control of the lessee, the above assessment will be reviewed.

Estimates and assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, are described below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments however, may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Estimation of useful lives of fixed assets

The costs of property, plant and equipment are depreciated on a straight-line method over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these property, plant and equipment to be within 5 to 20 years. These are common life expectancies applied in the industries where the

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Estimasi masa manfaat aset tetap (lanjutan)

dimana Perusahaan dan entitas Anak menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 13 dan 36.

Grup memperkirakan masa manfaat aset tetap berdasarkan periode dimana aset diharapkan akan tersedia untuk digunakan. Masa manfaat ekonomis aset tetap ditinjau secara berkala dan diperbaharui jika memiliki ekspektasi yang berbeda dari perkiraan sebelumnya, karena kerusakan secara fisik dan teknis, atau keusangan secara komersial, legal atau batasan lainnya atas penggunaan aset tersebut.

Provisi ekspektasi kerugian kredit pinjaman yang diberikan

Saat mengukur ECL, Grup menggunakan informasi masa depan yang wajar dan dapat didukung, yang didasarkan pada asumsi untuk pergerakan masa depan dari berbagai pendorong ekonomi dan bagaimana penggerak ini akan saling mempengaruhi.

Loss given default adalah estimasi kerugian yang timbul karena gagal bayar. Perhitungan didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual terutang dan yang diharapkan akan diterima, dengan mempertimbangkan arus kas dari agunan dan peningkatan kredit integral.

Probability of default merupakan input utama dalam mengukur ECL. *Probability of default* adalah perkiraan kemungkinan gagal bayar selama jangka waktu tertentu, yang penghitungannya mencakup data historis, asumsi, dan ekspektasi kondisi masa depan.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Estimation of useful lives of fixed assets (continued)

Company conducts its business. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets and therefore future depreciation charges could be revised. The carrying amounts of property, plant and equipment are disclosed in Notes 13 and 36.

The Group estimates the useful lives of fixed assets based on the period over which assets are expected to be available for use. The estimated useful lives of fixed assets are reviewed periodically and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolesces and legal or other limits on the use of the assets.

Provision for expected credit losses of loans

When measuring ECL the Group uses reasonable and supportable forward-looking information, which is based on assumptions for the future movement of different economic drivers and how these drivers will affect each other.

Loss given default is an estimate of the loss arising on default. It is based on the difference between the contractual cash flows due and those that the lender would expect to receive, taking into account cash flows from collateral and integral credit enhancements.

Probability of default constitutes a key input in measuring ECL. *Probability of default* is an estimate of the likelihood of default over a given time horizon, the calculation of which includes historical data, assumptions and expectations of future conditions.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Provisi ekspektasi kerugian kredit pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Informasi mengenai ECL pada pinjaman yang diberikan Grup diungkapkan dalam Catatan 6.

Estimasi imbalan pasca kerja dan imbalan kerja lainnya

Penentuan utang biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Grup diakui segera pada laporan posisi keuangan konsolidasian dengan debit atau kredit ke saldo laba melalui penghasilan komprehensif lainnya dalam periode terjadinya. Sementara Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 26.

Biaya atas program pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya ditentukan dengan perhitungan aktuaris. Perhitungan aktuaris menggunakan asumsi mengenai tingkat diskonto, tingkat pengembalian yang diharapkan dari aset, kenaikan gaji di masa depan, tingkat kematian dan tingkat kecacatan. Karena program tersebut memiliki sifat jangka panjang dari program tersebut, maka perkiraan tersebut memiliki ketidakpastian yang signifikan.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Provision for expected credit losses of loans (continued)

The information about the ECLs on the Group's loans is disclosed in Note 6.

Estimation of post-employment and other employee benefits

The determination of the Group's obligations cost for pension and employee benefits liabilities is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actual results that differ from the Group's assumptions are recognized immediately in the consolidated statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through other comprehensive income in the period which they occur. While the Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's actual experiences or significant changes in the Group's assumptions may materially affect its estimated liabilities for pension and employee benefits and net employee benefits expense. The carrying amount of the employee benefits obligation are disclosed in Note 26.

The cost of defined retirement pension plan and other post employment benefits is determined using actuarial valuations. The actuarial valuation involves making assumptions about discount rates, expected rates of return on assets, future salary increases, mortality rates and disability rate. Due to the long-term nature of these plans, such estimates are subject to significant uncertainty.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Penurunan nilai aset non-keuangan

Grup mengevaluasi penurunan nilai aset apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tidak dapat dipulihkan kembali. Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan penelaahan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- a) Performa yang tidak tercapai secara signifikan terhadap ekspektasi historis atau proyeksi hasil operasi di masa yang akan datang;
- b) Perubahan yang signifikan dalam cara penggunaan aset atau strategi bisnis secara keseluruhan; dan
- c) Industri atau tren ekonomi yang secara signifikan bernilai negatif.

Grup mengakui kerugian penurunan nilai apabila nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurang biaya untuk menjual dengan nilai pakai aset (atau unit penghasil kas). Jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual atau, jika tidak memungkinkan, untuk unit penghasil kas yang mana aset tersebut merupakan bagian dari pada unit tersebut.

Grup mengevaluasi penurunan nilai aset apabila terdapat kejadian atau perubahan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tidak dapat dipulihkan kembali. Perusahaan mengakui kerugian penurunan nilai apabila nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurang biaya untuk menjual dengan nilai pakai aset (atau unit penghasil kas).

Menentukan jangka waktu kontrak dengan opsi perpanjangan dan penghentian kontrak - Perusahaan sebagai lessee

Grup menentukan jangka waktu sewa sebagai jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersama dengan periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang masa sewa jika dipastikan akan dilaksanakan, atau periode apa pun yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa, jika cukup wajar untuk tidak dilakukan.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Impairment of non-financial assets

The Group evaluate the impairment of assets whenever events or changes in circumstances that would indicate that the carrying amount of an asset may not be recoverable. The factors that the Company considers important which could trigger an impairment review include as following:

- a) Significant underperformance relative to expected historical or projected future operating results;
- b) Significant changes in of use of the acquired assets or the strategy for overall business; and
- c) Negative significant industry or economic trends.

The Group recognizes an impairment loss whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs to sell and its value in use (or cash-generating unit's). Recoverable amounts are estimated for individual assets or, if it is not possible, for the cash-generating unit to which the asset belongs.

The Group evaluates impairment of assets whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of assets may not be recoverable. The Company recognizes an impairment loss if the carrying amount of an asset exceeds its recoverable value. Recoverable amount is the higher value between fair value minus costs to sell and value in use an asset (or cash-generating unit).

Determine the contract term with extension and contract termination options - the Company as lessee

The Group determines the lease term as non cancellable term, along with the period covered by the option to extend the lease if it is determined to be exercised, or any period covered by the option to terminate the lease, if it is reasonably not to be exercised.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS

	2021	2020
Kas	11.602.944.098	13.271.959.722
Kas di Bank		
Rupiah		
Pihak Berelasi		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	978.752.142.596	772.526.865.830
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	501.282.555.667	1.156.308.078.779
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	363.783.933.975	274.685.041.463
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	126.231.304.238	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	54.577.333.798	195.965.032.117
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	157.097.576	-
Subtotal	2.024.784.367.850	2.399.485.018.189
Pihak Ketiga		
Rupiah		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	465.607.617.021	67.290.584
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	188.829.398.292	84.466.852.728
PT Bank Permata Tbk	79.042.426.046	78.889.249.718
PT Bank Mega Syariah	73.749.577.462	140.449.974.395
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	52.816.109.770	3.748.928.589
PT Bank Central Asia Tbk	38.555.411.674	38.978.303.062
PT Bank Jtrust Indonesia Tbk	25.443.236.734	-
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	18.207.634.775	687.285.295
PT Bank Pembangunan Daerah DKI	11.604.940.866	4.635.990.545
PT Bank Permata Syariah	7.537.417.386	-
PT Bank National Nobu Tbk	5.911.945.086	10.282.166.345
PT Bank BCA Syariah	5.826.059.586	50.541.197.399
PT Bank Aceh Syariah	5.000.000.000	-
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	3.310.112.063	3.244.486.215
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	1.738.542.663	1.651.404.612
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.183.663.901	40.528.591.245
PT BPRS Dinar Asri	1.038.229.653	-
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	984.896.126	304.512.131
PT Bank Nagari Syariah	862.584.989	1.390.280.311
PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	641.998.552	631.033.521
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	629.946.517	129.839.590
PT BPRS Tanjung Amnah	491.240.744	45.829.783
PT Bank Maybank Syariah Indonesia	453.762.596	-
PT Bank Victoria International Tbk	416.095.506	135.235.153
PT BPRS Lantabur Tebu Ireng Surabaya	369.082.452	145.300.858
PT Bank Danamon Syariah	352.830.423	-
PT Bank Bukopin Syariah	324.652.676	2.516.194
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	272.376.287	74.393.662.078
PT BPRS Al Hijrah	227.939.241	163.019.592
PT Bank Mega Tbk	127.789.450	-
PT Bank Capital Indonesia Tbk	111.862.426	111.917.772
PT BPRS Kota Mojokerto	98.259.313	10.458.332
PT Bank Mayora	49.534.000	5.181.243
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah	30.474.263	30.160.959
PT Bank KEB Hana	26.538.460	292.532.322
PT Bank Oke Indonesia	24.878.000	20.050.661
PT BPRS Al Makmur	24.343.413	33.195.055
PT BPR IDS	24.164.000	23.835.552
PT Bank BRI Agroniaga Tbk	9.207.167	9.447.167
PT Bank CIMB Niaga (Syariah) Tbk	5.118.380	-
PT BPR INA	2.500.000	-
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (sebelumnya PT Bank BNI Syariah)	-	84.623.300.050
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (sebelumnya PT Bank BRISyariah Tbk)	-	34.466.163.057
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (sebelumnya PT Bank Syariah Mandiri)	-	29.914.161.026
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	2.042.694.984
PT Bank ANZ Indonesia	-	56.572.000
Subtotal	991.964.397.959	687.152.620.123
Total	3.016.748.765.809	3.086.637.638.312

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	2021	2020
Cash	11.602.944.098	13.271.959.722
Cash on hand		
Cash in banks		
Rupiah		
Related Parties		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	978.752.142.596	772.526.865.830
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	501.282.555.667	1.156.308.078.779
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	363.783.933.975	274.685.041.463
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	126.231.304.238	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	54.577.333.798	195.965.032.117
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	157.097.576	-
Subtotal	2.024.784.367.850	2.399.485.018.189
Third Parties		
Rupiah		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	465.607.617.021	67.290.584
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	188.829.398.292	84.466.852.728
PT Bank Permata Tbk	79.042.426.046	78.889.249.718
PT Bank Mega Syariah	73.749.577.462	140.449.974.395
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	52.816.109.770	3.748.928.589
PT Bank Central Asia Tbk	38.555.411.674	38.978.303.062
PT Bank Jtrust Indonesia Tbk	25.443.236.734	-
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	18.207.634.775	687.285.295
PT Bank Pembangunan Daerah DKI	11.604.940.866	4.635.990.545
PT Bank Permata Syariah	7.537.417.386	-
PT Bank National Nobu Tbk	5.911.945.086	10.282.166.345
PT Bank BCA Syariah	5.826.059.586	50.541.197.399
PT Bank Aceh Syariah	5.000.000.000	-
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	3.310.112.063	3.244.486.215
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	1.738.542.663	1.651.404.612
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.183.663.901	40.528.591.245
PT BPRS Dinar Asri	1.038.229.653	-
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	984.896.126	304.512.131
PT Bank Nagari Syariah	862.584.989	1.390.280.311
PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	641.998.552	631.033.521
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	629.946.517	129.839.590
PT BPRS Tanjung Amnah	491.240.744	45.829.783
PT Bank Maybank Syariah Indonesia	453.762.596	-
PT Bank Victoria International Tbk	416.095.506	135.235.153
PT BPRS Lantabur Tebu Ireng Surabaya	369.082.452	145.300.858
PT Bank Danamon Syariah	352.830.423	-
PT Bank Bukopin Syariah	324.652.676	2.516.194
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	272.376.287	74.393.662.078
PT BPRS Al Hijrah	227.939.241	163.019.592
PT Bank Mega Tbk	127.789.450	-
PT Bank Capital Indonesia Tbk	111.862.426	111.917.772
PT BPRS Kota Mojokerto	98.259.313	10.458.332
PT Bank Mayora	49.534.000	5.181.243
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah	30.474.263	30.160.959
PT Bank KEB Hana	26.538.460	292.532.322
PT Bank Oke Indonesia	24.878.000	20.050.661
PT BPRS Al Makmur	24.343.413	33.195.055
PT BPR IDS	24.164.000	23.835.552
PT Bank BRI Agroniaga Tbk	9.207.167	9.447.167
PT Bank CIMB Niaga (Syariah) Tbk	5.118.380	-
PT BPR INA	2.500.000	-
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (formerly PT Bank BNI Syariah)	-	84.623.300.050
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (formerly PT Bank BRISyariah Tbk)	-	34.466.163.057
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (formerly PT Bank Syariah Mandiri)	-	29.914.161.026
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	2.042.694.984
PT Bank ANZ Indonesia	-	56.572.000
Subtotal	991.964.397.959	687.152.620.123
Total	3.016.748.765.809	3.086.637.638.312

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

	2021	2020	
<i>Dolar AS</i>			<i>US Dollar</i>
Pihak Ketiga			<i>Third Parties</i>
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	199.236.088	667.882.589	<i>PT Bank Muamalat Indonesia Tbk</i>
Total Kas di Bank	3.016.948.001.897	3.087.305.520.901	<i>Total Cash in Banks</i>
Deposito Berjangka			<i>Time Deposits</i>
<i>Rupiah</i>			<i>Rupiah</i>
Pihak Berelasi			<i>Related Parties</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	326.000.000.000	-	<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	61.050.000.000	115.550.000.000	<i>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk</i>
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	42.500.000.000	280.000.000.000	<i>PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	7.000.000.000	9.650.000.000	<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i>
Subtotal	436.550.000.000	405.200.000.000	<i>Subtotal</i>
Pihak Ketiga			<i>Third Parties</i>
PT Bank DKI	150.000.000.000	400.000.000.000	<i>PT Bank DKI</i>
PT Bank Mega Syariah	110.000.000.000	135.000.000.000	<i>PT Bank Mega Syariah</i>
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	70.037.674.732	103.300.000.000	<i>PT Bank Muamalat Indonesia Tbk</i>
PT Bank Nationalnobu Tbk	31.200.000.000	50.000.000.000	<i>PT Bank Nationalnobu Tbk</i>
PT Bank Victoria International Tbk	25.000.000.000	56.500.000.000	<i>PT Bank Victoria International Tbk</i>
PT J TRUST Indonesia Tbk	25.000.000.000	-	<i>PT Bank J TRUST Indonesia Tbk</i>
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	23.700.000.000	13.100.000.000	<i>PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk</i>
PT Bank Mega Tbk	20.000.000.000	20.000.000.000	<i>PT Bank Mega Tbk</i>
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	20.000.000.000	-	<i>PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk</i>
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	15.000.000.000	-	<i>PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah</i>
PT Bank Bukopin Tbk	13.700.000.000	-	<i>PT Bank Bukopin Tbk</i>
PT BPD Kalimantan Tengah	10.000.000.000	-	<i>PT BPD Kalimantan Tengah</i>
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	7.250.000.000	7.250.000.000	<i>PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah</i>
PT Bank Syariah Bukopin	5.800.000.000	3.000.000.000	<i>PT Bank Syariah Bukopin</i>
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	5.000.000.000	13.000.000.000	<i>PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo</i>
PT Bank Jawa Barat dan Banten Syariah	5.000.000.000	3.700.000.000	<i>PT Bank Jawa Barat dan Banten Syariah</i>
PT BPRS Dinar Asri	2.500.000.000	2.000.000.000	<i>PT BPRS Dinar Asri</i>
PT BPRS Artha Madani	2.500.000.000	1.500.000.000	<i>PT BPRS Artha Madani</i>
PT BPRS Adeco	1.500.000.000	1.000.000.000	<i>PT BPRS Adeco</i>
PT BPRS Mojokerto	1.200.000.000	1.200.000.000	<i>PT BPRS Mojokerto</i>
PT BPRS Mulia Berkah Abadi	1.000.000.000	1.000.000.000	<i>PT BPRS Mulia Berkah Abadi</i>
PT BPRS Al Ihsan	1.000.000.000	500.000.000	<i>PT BPRS Al Ihsan</i>
PT BPRS HIK Parahyangan	1.000.000.000	-	<i>PT BPRS HIK Parahyangan</i>
PT BPRS Al Moeslim	1.000.000.000	-	<i>PT BPRS Al Moeslim</i>
PT BPRS Fajar Sejahtera Bali	1.000.000.000	-	<i>PT BPRS Fajar Sejahtera Bali</i>
PT Bank Nagari Syariah	750.000.000	1.250.000.000	<i>PT Bank Nagari Syariah</i>
PT BPRS Al Hijrah Amanah	750.000.000	750.000.000	<i>PT BPRS Al Hijrah Amanah</i>
PT BPRS Artha Fisabilillah	500.000.000	700.000.000	<i>PT BPRS Artha Fisabilillah</i>
PT BMI Dana Amanah Surakarta	500.000.000	500.000.000	<i>PT BMI Dana Amanah Surakarta</i>
PT BPRS Muamalat Harkat	500.000.000	500.000.000	<i>PT BPRS Muamalat Harkat</i>
PT BPRS Al Makmur	500.000.000	500.000.000	<i>PT BPRS Al Makmur</i>
PT BPRS Bumi Artha Sampang	500.000.000	500.000.000	<i>PT BPRS Bumi Artha Sampang</i>
PT BPRS Attaqwa	500.000.000	500.000.000	<i>PT BPRS Attaqwa</i>
PT BPRS Asri Madani Nusantara	500.000.000	-	<i>PT BPRS Asri Madani Nusantara</i>
PT BPRS Carana Kiat Andalas	300.000.000	-	<i>PT BPRS Carana Kiat Andalas</i>
PT BPRS Ampek Angkek Candung	250.000.000	250.000.000	<i>PT BPRS Ampek Angkek Candung</i>
PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera	250.000.000	250.000.000	<i>PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera</i>
PT BPRS Mentari Pasaman Saiyo	200.000.000	200.000.000	<i>PT BPRS Mentari Pasaman Saiyo</i>
PT Bank Oke Indonesia	100.000.000	100.000.000	<i>PT Bank Oke Indonesia</i>
PT BPRS Al Salaam Amal Salman	20.000.000	20.000.000	<i>PT BPRS Al Salaam Amal Salman</i>
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	-	82.250.000.000	<i>PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat</i>
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (sebelumnya PT Bank BRIsyariah Tbk)	-	50.000.000.000	<i>PT Bank Syariah Indonesia Tbk (formerly PT Bank BRIsyariah Tbk)</i>
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (sebelumnya PT Bank Syariah Mandiri)	-	2.000.000.000	<i>PT Bank Syariah Indonesia Tbk (formerly PT Bank Syariah Mandiri)</i>
PT Bank Neo Commerce Tbk	-	2.000.000.000	<i>PT Bank Neo Commerce Tbk</i>
PT Bank Amar Indonesia Tbk	-	1.000.000.000	<i>PT Bank Amar Indonesia Tbk</i>
PT BPRS Tulen Amanah	-	1.000.000.000	<i>PT BPRS Tulen Amanah</i>
PT BPRS Rifatul Ummah	-	100.000.000	<i>PT BPRS Rifatul Ummah</i>
Subtotal	555.507.674.732	956.420.000.000	<i>Subtotal</i>
Total Deposito Berjangka	992.057.674.732	1.361.620.000.000	<i>Total Time Deposits</i>
Total Kas dan Setara Kas	4.020.608.620.727	4.462.197.480.623	<i>Total Cash and Cash Equivalents</i>

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun:

	2021
Tingkat bunga per tahun:	
Rupiah	3,50%-5,00%
Jangka waktu	1 Bulan/Month

Rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi diungkapkan pada (Catatan 40).

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar kas dan setara kas diungkapkan pada (Catatan 27).

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

Average interest rate per annum:

	2020	
Tingkat bunga per tahun:		Interest rate per annum
Rupiah	5,00% - 7,00%	Rupiah
Jangka waktu	1 Bulan/Month	Maturity date

Details of balances and transactions with the related parties are disclosed in (Note 40).

Information regarding the classification and fair value of cash and cash equivalents are disclosed in (Note 27).

5. PORTOFOLIO EFEK DIUKUR PADA NILAI WAJAR MELALUI LABA RUGI

	2021
Rupiah	
Pihak berelasi	1.182.939.950.940
Pihak ketiga	1.324.150.000
	1.184.264.100.940
Total	1.184.264.100.940

Reksadana Pihak Berelasi

RDPUN PNM Dana Tunai	1.001.272.851.473
RDSPT PNM Multiekspor I	11.357.440.000
RDS Pendapatan Tetap PNM Surat Berharga Syariah Negara	10.498.494.000
PNM Dana Kas Platinum	10.139.952.000
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN seri V	10.109.681.000
RD PNM PUAS	10.085.997.611
RD PNM Dana Maxima 2	10.002.887.000
RD PNM Money Market Fund USD	8.186.829.087
PNM Saham Agresif	7.402.481.898
RD PNM Syariah	6.314.668.751
PNM Saham Unggulan	6.180.225.257
RDPT PNM Jamkrindo Fund	5.512.103.374
RDPT Multisektoral VI	5.124.865.000
RDPT Pembiayaan Mikro BUMN 2016	5.120.726.500
RDSPT Multisektoral V	5.115.286.500
RDPT PNM Pos Indonesia	5.105.209.000
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri IV	5.091.353.000
RDPT PNM Multisektoral VII	5.073.948.500
RDSPT PNM Multisektoral XII	5.061.009.500
RDSPT Mikro BUMN Seri II	5.058.395.500
RD PNM ETF CORE LQ45	5.052.969.383
RDSPT PNM Multisektoral XI	5.051.718.000
RDPT PNM Multisektoral X	5.000.000.000
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2018 Seri II	5.000.000.000
RDPT PNM Multisektoral IX	5.000.000.000
RDPT Multisektoral III	4.995.123.000
RDSPT PNM Indah Karya	4.962.724.500
RDPT PNM Perikanan Nusantara	4.841.321.500
RDPT PNM Multisektoral XVI	4.835.541.000
PNM Ekuitas Syariah	386.148.606

5. PORTFOLIO OF SECURITIES MEASURED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT AND LOSS

	2020	
Pihak berelasi	523.772.748.763	Related parties
Pihak ketiga	1.036.150.000	Third parties
	524.808.898.763	
Total	524.808.898.763	Total

Mutual Funds Related Parties

RDPUN PNM Dana Tunai	200.050.410.959
RDSPT PNM Multiekspor I	24.346.094.400
RDS Pendapatan Tetap PNM Surat Berharga Syariah Negara	-
PNM Dana Kas Platinum	130.053.595.496
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN seri V	5.062.436.000
RD PNM PUAS	-
RD PNM Dana Maxima 2	-
RD PNM Money Market Fund USD	-
PNM Saham Agresif	7.520.193.328
RD PNM Syariah	-
PNM Saham Unggulan	6.092.614.384
RDPT PNM Jamkrindo Fund	5.529.115.615
RDPT Multisektoral VI	-
RDPT Pembiayaan Mikro BUMN 2016	5.134.946.500
RDSPT Multisektoral V	5.097.470.500
RDPT PNM Pos Indonesia	5.114.844.500
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri IV	5.096.335.000
RDPT PNM Multisektoral VII	-
RDSPT PNM Multisektoral XII	5.068.335.000
RDSPT Mikro BUMN Seri II	5.068.666.000
RD PNM ETF CORE LQ45	11.432.704.000
RDSPT PNM Multisektoral XI	5.021.105.500
RDPT PNM Multisektoral X	5.052.212.000
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2018 Seri II	5.019.009.000
RDPT PNM Multisektoral IX	5.018.171.000
RDPT Multisektoral III	4.971.690.500
RDSPT PNM Indah Karya	5.013.947.500
RDPT PNM Perikanan Nusantara	4.838.384.500
RDPT PNM Multisektoral XVI	4.757.761.500
PNM Ekuitas Syariah	429.162.637

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

5. PORTOFOLIO EFEK DIUKUR PADA NILAI WAJAR MELALUI LABA RUGI (lanjutan)

5. PORTFOLIO OF SECURITIES MEASURED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT AND LOSS (continued)

	2021	2020	
Reksadana (lanjutan)			Mutual Funds (continued)
Pihak Berelasi (lanjutan)			Related Parties (continued)
RD PNM Amanah Syariah	-	36.686.019.870	RD PNM Amanah Syariah
RDSPT Mikro BUMN Seri III	-	10.047.453.000	RDSPT Mikro BUMN Seri III
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN	-	5.157.008.500	RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN
RDPT PNM Pembangunan Perumnas 2016	-	5.036.018.000	RDPT PNM Pembangunan Perumnas 2016
RDPT Multisektoral I	-	5.018.305.500	RDPT Multisektoral I
RD Pendapatan Tetap PNM Dana Optima	-	1.038.738.074	RD Pendapatan Tetap PNM Dana Optima
Subtotal	1.182.939.950.940	523.772.748.763	Subtotal
Total Reksadana	1.182.939.950.940	523.772.748.763	Total Mutual Funds
Ekuitas			Equity
Pihak Ketiga			Third Parties
PT AKR Corporindo Tbk	824.000.000	636.000.000	PT AKR Corporindo Tbk
Total Ekuitas	824.000.000	636.000.000	Total equity
Obligasi			Bonds
Pihak Ketiga			Third Parties
PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk (APOL) II Tahun 2008 Seri A	150.000	150.000	PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk (APOL) II Year 2008 Series A
Total Obligasi	150.000	150.000	Total bonds
Portofolio Efek Lain-lain			Other Portfolio Of Securities
Pihak ketiga			Third Parties
BMT Salam Amanah Madani	500.000.000	400.000.000	BMT Salam Amanah Madani
Total Portofolio Efek Lain-lain	500.000.000	400.000.000	Total Other Portfolio Of Securities
Total	1.184.264.100.940	524.808.898.763	Total
Rincian Total lembar saham dan warant			Details of number of shares and warrants
Pihak Ketiga			Third Party
PT AKR Corporindo Tbk	200.000	200.000	PT AKR Corporindo Tbk

Portofolio efek tersebut diatas tidak dijaminkan, tidak di-repo-kan dan tidak dipinjamkan kepada pihak lain.

The above portfolio of securities are not pledged, not in the repo, and not lent to other parties.

Portofolio efek pada nilai wajar melalui laba rugi disajikan dalam kegiatan operasi dalam laporan arus kas konsolidasian.

The portfolio of securities at fair value through profit or loss are presented in operating activities in the consolidated statement of cash flows.

Perubahan pada nilai portofolio efek pada nilai wajar melalui keuntungan atau kerugian dicatat dalam laporan posisi keuangan.

Changes in the portfolio of securities value at fair value through profit or loss recorded in the statement of financial position.

Nilai wajar untuk efek utang ditetapkan berdasarkan dari *Indonesia Bonds Pricing Agency (IBPA)* dan efek ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek ditetapkan berdasarkan nilai pasar yang dikeluarkan oleh BEI, sedangkan nilai wajar Reksa Dana ditetapkan berdasarkan nilai aset bersih pada akhir periode pelaporan.

The fair values of debt instruments were determined by *Indonesia Bonds Pricing Agency (IBPA)* and equities instruments are traded on the Stock Exchange determined by market value issued by the *Indonesia Stock Exchange*, while the fair value of *Mutual Fund* is determined based on net asset value at the reporting date.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. PORTOFOLIO EFEK DIUKUR PADA NILAI WAJAR MELALUI LABA RUGI (lanjutan)

Rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 40.

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar portofolio efek diungkapkan pada Catatan 27.

5. PORTFOLIO OF SECURITIES MEASURED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT AND LOSS (continued)

Details of balances and transactions with the related parties are disclosed in Note 40.

Information regarding the classification and fair value of portfolio of securities are disclosed in Note 27.

6 PINJAMAN YANG DIBERIKAN

a. Berdasarkan hubungan dan jenis transaksi

	2021	2020
Rupiah Pihak Berelasi Entitas Induk		
Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil kepada LKM/S	277.243.874	277.243.874
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(277.243.874)	(277.243.874)
Subtotal	-	-
Pihak Ketiga Entitas Induk		
Pembiayaan Mekaar	26.255.405.216.933	15.692.303.922.944
Pembiayaan ULaMM	7.280.576.815.669	6.982.930.020.712
Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil kepada LKM/S	84.000.000.000	67.534.452.842
Pembiayaan Modal Kecil dan Menengah	16.021.605.972	20.454.645.325
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.258.828.026.472)	(674.238.138.005)
Subtotal	32.377.175.612.102	22.088.984.903.818
Nilai Bersih	32.377.175.612.102	22.088.984.903.818

6. LOANS

a. By relationship and transaction type

	2021	2020
Rupiah Related Parties Parent Entity		
MSE Financing for MFI/S		
Less: Allowance for Impairment Losses		
Subtotal		
Third Parties Parent Entity		
Mekaar Financing		
Financing for ULaMM		
MSE Financing for MFI/S		
SME Capital Financing		
Less: Allowance for impairment losses		
Subtotal		
Net Value		

b. Berdasarkan jangka waktu kredit

Plafon pinjaman yang diterima oleh debitur sesuai dengan jangka waktu kredit adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Kurang dari 1 tahun	21.096.268.806.328	15.820.151.181.803
1 - 2 tahun	6.067.801.617.930	681.898.539.204
Lebih dari 2 tahun	6.472.210.458.190	6.261.450.564.690
	33.636.280.882.448	22.763.500.285.697
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.259.105.270.346)	(674.515.381.879)
Nilai Bersih	32.377.175.612.102	22.088.984.903.818

b. By credit period

The loan credit limit which is received by the debtors in accordance with the credit period are as follows:

	2021	2020
Less than 1 year		
1 - 2 years		
More than 2 years		
Less: Allowance for Impairment Losses		
Net Value		

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

6. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan)

6. LOANS (continued)

c. Berdasarkan umur tunggakan

c. By days past due

	2021	2020	
Belum jatuh tempo	32.582.850.622.016	21.257.045.029.058	
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(657.748.563.023)	(247.408.392.315)	Less: Allowance for Impairment Losses
Subtotal	31.925.102.058.993	21.009.636.636.743	Subtotal
Lewat jatuh tempo	1.053.430.260.432	1.506.455.256.639	Over due
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(601.356.707.323)	(427.106.989.564)	Less: Allowance for Impairment Losses
Subtotal	452.073.553.109	1.079.348.267.075	Subtotal
Nilai Bersih	32.377.175.612.102	22.088.984.903.818	Net Value

d. Berdasarkan sektor ekonomi

d. By economic sector

	2021	2020	
Perdagangan, Restoran dan Hotel	20.351.112.372.034	19.508.378.007.588	Trade, Restaurants and Hotels
Pertanian	4.983.168.262.168	631.209.122.175	Agricultures
Jasa-jasa	1.405.094.665.333	475.700.885.570	Services
Perindustrian	862.036.396.977	191.794.660.200	Industries
Lain-lain	6.034.869.185.937	1.956.417.610.164	Others
	33.636.280.882.449	22.763.500.285.697	
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.259.105.270.347)	(674.515.381.879)	Less: Allowance for Impairment Losses
Nilai Bersih	32.377.175.612.102	22.088.984.903.818	Net Value

e. Berdasarkan status pembiayaan

e. By financing status

Pinjaman yang diberikan yang telah direstrukturisasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, masing-masing sebesar Rp2.891.432.636.138 dan Rp3.355.684.554.988.

Loans that have been restructured on December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp2,891,432,636,138 and Rp3,355,684,554,988, respectively.

Restrukturisasi atas pinjaman yang diberikan per 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari restrukturisasi normal dan restrukturisasi dalam rangka relaksasi bagi nasabah yang terdampak Pandemi Covid-19 masing-masing sebesar Rp562.511.937.498 dan Rp2.328.920.698.640.

Restructuring of loans as of December 31, 2021 and 2020 consisted of normal restructuring and restructuring in the context of relaxation for customers affected by Pandemic Covid-19 amounted to Rp562,511,937,498 and Rp2,328,920,698,640, respectively.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan)

e. Berdasarkan status pembiayaan (lanjutan)

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yaitu melalui:

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban debitur atau jangka waktu;
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum plafon pembiayaan; dan/atau
- 3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang menyangkut penambahan fasilitas pembiayaan dan konversi seluruh atau sebagian tunggakan angsuran bunga menjadi pokok pembiayaan baru yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali.

f. Berdasarkan penurunan nilai

	2021	2020
Pinjaman dinilai secara Kolektif	33.458.293.593.282	22.547.271.239.571
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.146.064.853.374)	(522.105.940.566)
Subtotal	32.312.228.739.908	22.025.165.299.005
Pinjaman dinilai secara Individual	177.987.289.167	216.229.046.126
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(113.040.416.973)	(152.409.441.313)
Subtotal	64.946.872.194	63.819.604.813
Nilai Bersih	32.377.175.612.102	22.088.984.903.818

Pinjaman yang dinilai secara individual seluruhnya merupakan pinjaman yang mengalami penurunan nilai. Pinjaman yang dinilai secara kolektif adalah pinjaman yang tidak mengalami penurunan nilai. Penjelasan atas penurunan nilai dari aset keuangan telah dijelaskan pada Catatan 2.

6. LOANS (continued)

e. *By financing status (continued)*

Financing restructuring is the improvement efforts that carried out to debtors who have difficulties to meet its obligations, namely through:

- 1) *Rescheduling, which changes in the debtor's payment schedule or the duration;*
- 2) *Reconditioning, which changes in some or all of the financing requirements are not limited to changes in the payment schedule, duration, and other requirements along not related to changes in the maximum loan credit limit of financing; and/or*
- 3) *Restructuring, the change in financing requirements concerning the addition of financing facilities and the conversion of all or part of the arrears in installments of principal interest to the new financing that can be accompanied by rescheduling and/or reconditioning.*

f. *By impairment losses*

	2021	2020
Pinjaman dinilai secara Kolektif	33.458.293.593.282	22.547.271.239.571
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.146.064.853.374)	(522.105.940.566)
Subtotal	32.312.228.739.908	22.025.165.299.005
Pinjaman dinilai secara Individual	177.987.289.167	216.229.046.126
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(113.040.416.973)	(152.409.441.313)
Subtotal	64.946.872.194	63.819.604.813
Nilai Bersih	32.377.175.612.102	22.088.984.903.818

Individually assessed loans are all impaired loans. Collectively assessed loans are loans that are not impaired. Explanation for impairment of financial assets has been described in Note 2.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan)

g. Mutasi pinjaman yang diberikan adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Pihak berelasi		
<u>Entitas induk</u>		
Saldo awal	(277.243.874)	(277.243.874)
(Penyisihan)/pemulihan selama tahun berjalan	-	-
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	-	-
Saldo akhir	(277.243.874)	(277.243.874)
Pihak ketiga		
<u>Entitas induk</u>		
Saldo awal	(674.238.138.005)	(273.549.904.320)
Koreksi saldo awal	-	(72.764.930.736)
Penyisihan selama periode berjalan	(683.776.368.483)	(402.516.660.161)
Penghapusbukuan selama periode berjalan	99.186.480.015	74.593.357.212
Saldo akhir	(1.258.828.026.473)	(674.238.138.005)
<u>Entitas anak</u>		
Saldo awal	-	(2.634.556.818)
Penyisihan selama tahun berjalan	-	2.634.556.818
Saldo akhir	-	-
Total	(1.259.105.270.347)	(674.515.381.879)

6. LOANS (continued)

g. The movements of allowance for impairment losses on loans are as follow:

	2021	2020
Related parties		
<u>Parent Entity</u>		
Beginning balances		
(Allowance)/recovery during the year		
Write-off/unused allowance reserved		
Ending balances		
Third parties		
<u>Parent</u>		
Beginning balances		
Beginning balances correction		
Allowance during the period		
Write-off/unused allowance reserved		
Ending balances		
<u>Subsidiaries</u>		
Beginning balances		
Allowance during the year		
Ending balances		
Total		

2021 (dalam jutaan/in million)

	Kerugian kredit Ekspektasi 12 Bulan/12-month ECL	Kerugian kredit ekspektasi sepanjang umurnya-kredit tidak memburuk/ Lifetime ECL no credit impaired	Kerugian kredit ekspektasi sepanjang umurnya-kredit memburuk/ Lifetime ECL credit impaired	Total/Total	
Saldo awal	157.538	347.491	169.486	674.515	Beginning balance
Transfer ke kerugian kredit ekspektasi 12 bulan	(1.724.442)	1.724.442	-	-	Transfer to 12-month ECL
Transfer ke kerugian kredit ekspektasi sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk	300.055	(300.055)	-	-	Transfer to lifetime ECL no credit impaired
Transfer ke kerugian kredit ekspektasi sepanjang umurnya - kredit memburuk	(3.899)	(136.144)	140.043	-	Transfer to lifetime ECL credit impaired
Penambahan (pemulihan) penyisihan selama tahun berjalan	1.928.497	(1.147.418)	(97.303)	683.776	Additional (reversal) provision during the year
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	-	-	(99.186)	(99.186)	Write-off during the year
Saldo akhir	657.749	488.316	113.040	1.259.105	Ending balance

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan)

- g. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

6. LOANS (continued)

- g. The movements of allowance for impairment losses on loans are as follow: (continued)

2020 (dalam jutaan/in million)					
	Kerugian kredit Ekspektasi 12 Bulan/12-month ECL	Kerugian kredit ekspektasi sepanjang umurnya-kredit tidak memburuk/ Lifetime ECL no credit impaired	Kerugian kredit ekspektasi sepanjang umurnya-kredit memburuk/ Lifetime ECL credit impaired	Total/Total	
Saldo awal	67.036	171.958	110.233	349.227	Beginning balance
Transfer ke kerugian kredit ekspektasi 12 bulan	(922.435)	922.435	-	-	Transfer to 12-month ECL
Transfer ke kerugian kredit ekspektasi sepanjang umurnya - kredit tidak memburuk	154.732	(154.732)	-	-	Transfer to lifetime ECL no credit impaired
Transfer ke kerugian kredit ekspektasi sepanjang umurnya - kredit memburuk	(3.134)	(85.027)	88.161	-	Transfer to lifetime ECL credit impaired
Penambahan (pemulihan) penyisihan selama tahun berjalan	861.339	(507.143)	45.686	399.882	Additional (reversal) provision during the year
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	-	-	(74.594)	(74.594)	Write-off during the year
Saldo akhir	157.538	347.491	169.486	674.515	Ending balance

Penyisihan dibentuk dengan menggunakan metode kolektif dan individual.

Provision established using the collective and individual method.

Perusahaan melakukan penghapusbukuan atas pembiayaan kepada pihak ketiga yang macet pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp99.186.480.015 dan Rp74.593.357.212.

The Company made write-off of financing to third parties that were stalled in December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp99,186,480,015 and Rp74,593,357,212, respectively.

Kondisi yang menyebabkan terjadinya penghapusbukuan pada tahun 2021 dan 2020 adalah:

The conditions that led to write-offs in 2021 and 2020 are:

1. Pinjaman yang diberikan harus sudah tergolong pada kolektibilitas macet.
2. Debitur tidak memiliki komitmen untuk menyelesaikan kredit atau debitur sudah tidak mempunyai kemampuan membayar atau debitur tidak kooperatif (sulit ditemui/melarikan diri/hilang) atau usaha debitur dinyatakan pailit (bangkrut).
3. Upaya restrukturisasi sudah tidak dapat dilakukan.

1. Loans must already be classified as collectibility of loss.
2. The debtor has no commitment to settle the loan or the debtor has no ability to pay or the debtor is uncooperative (difficult to be found/escape/lost) or the debtor's business is declared bankrupt (bankrupt).
3. The restructuring effort can not be done.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

6. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan)

4. Upaya pelunasan berupa penebusan/ penjualan jaminan sudah dilakukan.
5. Upaya lelang telah dilakukan untuk agunan yang dipasang hak tanggungan.
6. Pembiayaan bermasalah yang *di-cover* oleh asuransi kredit telah dilakukan pengajuan hak klaim kecuali hak klaim yang sudah kedaluwarsa.

Manajemen berpendapat bahwa Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas pinjaman yang diberikan telah memadai.

Informasi penting sehubungan dengan pinjaman yang diberikan:

a. Agunan Kredit

Pinjaman yang diberikan pada umumnya dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito berjangka atau jaminan lain yang dapat diterima.

b. Kredit LKMS

Pembiayaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) kepada LKMS dari dana Surat Utang Pemerintah (SUP), Bank Pembangunan Asia untuk Penataan Lingkungan dan Pemukiman (NUSSP), serta Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) merupakan pembiayaan kepada Lembaga-lembaga Keuangan Pelaksana (LKP). Pembiayaan dana SUP, NUSSP dikelola Perusahaan sesuai dengan Perjanjian Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Perusahaan No. KP-018/DP3/2004 tanggal 14 Mei 2004 dan No. SLA-1184/DP3/2005 (lihat Catatan 21 dan 46).

Perusahaan memperoleh pendapatan bunga/bagi hasil selama tahun 2021 (sampai dengan Desember) dan 2020 masing-masing 14,00% per tahun dari piutang pembiayaan LKMS dana *Equity*, SUP, dan NUSSP serta LPEI.

6. LOANS (continued)

4. *Repayment efforts in the form of redemption/sale of the guarantee have been made.*
5. *An auction effort has been made for the mortgaged mortgage.*
6. *Problem financing covered by credit insurance has been made claiming rights except claims rights that have expired.*

Management believes that the Allowance for Impairment Losses of loans is adequate.

Significant information related to loans:

a. Collateral for loans

Loans are generally secured by pledged collateral, binded with the rights of powers of attorney to sell, time deposits or other acceptable collateral.

b. Loans - LKMS

Small and Micro Enterprise financing receivables to LKMS from Government Promissory Notes (SUP), Asian Development Bank for Neighbourhood Upgrading Shelter Sector Project (NUSSP), Indonesia Exim Bank (LPEI) fund represents executing financial institution financing, which is funded by Government Loans. The SUP and NUSSP financing is managed by the Company in accordance with Loan Agreement between the Company and the Government of the Republic of Indonesia No. KP-018/DP3/2004 on May 14, 2004 and No. SLA-1184/DP3/2005 (see Notes 21 and 46).

The Company earned interest income/profit sharing during 2021 (until December) and 2020 14.00% per annum, respectively, from Equity, Government Promissory Notes, NUSSP and LPEI financing.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan)

Informasi penting sehubungan dengan pinjaman yang diberikan: (lanjutan)

c. Java Reconstruction Fund

Java Reconstruction Fund (JRF) dibentuk dengan tujuan untuk menyediakan platform yang memobilisasi sumberdaya negara-negara donor dan menyalurkan bantuan keuangan dalam rangka mendukung tindakan pemerintah Indonesia bagi rekonstruksi dan rehabilitasi Provinsi Yogyakarta - Jawa Tengah akibat gempa bumi.

Perusahaan mendapatkan dana hibah dalam jumlah setara US\$4.820.000 yang digunakan dalam bentuk pembiayaan. Karena Perusahaan menerima dalam mata uang rupiah, jumlah hibah JRF adalah sebesar Rp42.100.000.000.

Jangka waktu pengelolaan dana hibah oleh Perusahaan adalah selama 10 (sepuluh) tahun.

Rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 40.

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar pinjaman yang diberikan diungkapkan pada Catatan 27.

6. LOANS (continued)

Significant information related to loans: (continued)

c. Java Reconstruction Fund

The Java Reconstruction Fund (JRF) was established for the purpose of providing a common platform to mobilize donor resource and channel financial assistance in support of the Republic of Indonesia's Action Plan for Yogyakarta-Central Java Reconstruction and Rehabilitation.

The Company gets a grant in the amount equivalent to US\$4,820,000 which is used in the form of financing. Because the Company received in the rupiah currency, the amount of JRF grant is equal Rp42,100,000,000.

The period of grant fund management by The Company is for 10 (ten) years.

Details of balances and transactions with the related parties are disclosed in Note 40.

Information regarding the classification and fair value of loans are disclosed in Note 27.

7. PEMBIAYAAN MODAL

a. Berdasarkan hubungan dan jenis transaksi

	2021	2020
Pihak Ketiga		
<u>Entitas Induk</u>		
Rupiah		
Induk Koperasi Simpan Pinjam	2.000.000.000	2.000.000.000
Dikurangi:		
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(2.000.000.000)	(2.000.000.000)
Total	-	-

7. CAPITAL FINANCING

a. By relationship and transaction type

Third Parties
<u>Parent Entity</u>
Rupiah
Induk Koperasi Simpan Pinjam
Less:
Allowance for Impairment Losses
Total

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. PEMBIAYAAN MODAL(lanjutan)

a. Berdasarkan hubungan dan jenis transaksi
(lanjutan)

	2021	2020	
<u>Entitas Anak</u>			<u>Subsidiaries</u>
Pembiayaan bagi hasil			Financing through profit sharing
Konvensional	455.596.037.793	490.041.786.765	Conventional
Syariah	425.237.819.570	465.089.661.057	Sharia
Pembiayaan penyertaan saham	1.927.863.088	4.173.011.064	Financing in share participation
	882.761.720.451	959.304.458.886	
Dikurangi:			Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(114.667.690.278)	(112.731.525.571)	Allowance for Impairment Losses
Subtotal	768.094.030.173	846.572.933.315	Subtotal
Nilai Bersih	768.094.030.173	846.572.933.315	Net Value

Manajemen berpendapat bahwa Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas piutang pembiayaan modal telah memadai.

Management believes that the Allowance for Impairment Losses on the capital financing receivables is adequate.

b. Berdasarkan umur tunggakan

b. By days past due

	2021	2020	
0 - 90 hari	827.788.971.349	898.457.548.353	0 - 90 days
Lebih dari 90 hari	56.972.749.102	62.846.910.533	More than 90 days
Total	884.761.720.451	961.304.458.886	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(116.667.690.278)	(114.731.525.571)	Allowance for Impairment Losses
Nilai Bersih	768.094.030.173	846.572.933.315	Net Value

c. Berdasarkan jangka waktu kredit

c. By credit period

Plafon pinjaman yang diterima dari debitur sesuai dengan jangka waktu kredit adalah sebagai berikut:

The loan credit limit, which is received by the debtors in accordance with credit period are as follows:

	2021	2020	
Kurang dari 1 tahun	437.577.310.616	370.212.099.695	Less than 1 year
1 - 2 tahun	263.819.067.303	276.036.050.899	1 - 2 years
Lebih dari 2 tahun	183.365.342.532	315.056.308.292	More than 2 years
Total	884.761.720.451	961.304.458.886	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(116.667.690.278)	(114.731.525.571)	Allowance for Impairment Losses
Nilai Bersih	768.094.030.173	846.572.933.315	Net Value

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

7. PEMBIAYAAN MODAL (lanjutan)

7. CAPITAL FINANCING (continued)

d. Berdasarkan sektor ekonomi

d. By economic sector

	2021	2020	
Perdagangan, restoran dan hotel	570.731.241.019	534.522.355.491	Trade, restaurants and hotels
Jasa-jasa	67.692.539.679	207.388.478.172	Services
Perindustrian	77.091.685.747	70.260.333.895	Industries
Pertanian/peternakan/kehutanan	1.462.546.069	1.687.347.869	Agricultures/ranch/forestry
Lain-lain	167.783.707.937	147.445.943.459	Others
Total	884.761.720.451	961.304.458.886	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(116.667.690.278)	(114.731.525.571)	Allowance for Impairment Losses
Nilai Bersih	768.094.030.173	846.572.933.315	Net Value

e. Berdasarkan status pembiayaan

e. By financing status

Pembiayaan modal yang telah direstrukturisasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp598.458.994.064 dan Rp610.744.986.101.

Restructured capital financing as of December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp598,458,994,064 and Rp610,744,986,101, respectively.

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yaitu melalui:

Financing restructuring is the improvement efforts that carried out to debtors who have difficulties to meet its obligations, namely through:

- 1) penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban debitur atau jangka waktu;
- 2) persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum plafon pembiayaan; dan/atau
- 3) penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang menyangkut penambahan fasilitas pembiayaan dan konversi seluruh atau sebagian tunggakan angsuran bunga menjadi pokok pembiayaan baru yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali.

- 1) *rescheduling is a changes in the debtor's payment schedule or the duration;*
- 2) *reconditioning is a changes in some or all of the financing requirements are not limited to changes in the payment schedule, duration, and other requirements along not related to changes in the maximum credit limit of financing; and/or*
- 3) *restructuring is a change in financing requirements concerning the addition of financing facilities and the conversion of all or part of the arrears in installments of principal interest to the new financing that can be accompanied by rescheduling and/or reconditioning.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

7. PEMBIAYAAN MODAL (lanjutan)

- f. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Pihak ketiga		
Saldo awal	(114.731.525.571)	(9.397.384.205)
Koreksi saldo awal (Catatan 2)	-	(96.024.209.057)
Pemulihan selama tahun berjalan	(1.936.164.707)	(9.309.932.309)
Total	(116.667.690.278)	(114.731.525.571)

Perusahaan melakukan penghapusbukuan atas pembiayaan kepada pihak ketiga yang macet pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar nihil dan nihil.

Kondisi yang menyebabkan terjadinya penghapusbukuan adalah:

- 1) Pembiayaan modal harus sudah tergolong pada kolektibilitas macet.
- 2) Pasangan usaha/debitur tidak memiliki komitmen untuk menyelesaikan kredit atau debitur sudah tidak mempunyai kemampuan membayar atau debitur tidak kooperatif (sulit ditemui/melarikan diri/hilang) atau usaha debitur dinyatakan pailit (bangkrut).
- 3) Upaya restrukturisasi sudah tidak dapat dilakukan.
- 4) Upaya pelunasan berupa penebusan/penjualan jaminan sudah dilakukan.
- 5) Upaya lelang telah dilakukan untuk agunan yang dipasang hak tanggungan.
- 6) Pembiayaan bermasalah yang di-cover oleh asuransi kredit telah dilakukan pengajuan hak klaim kecuali hak klaim yang sudah kedaluwarsa.

Informasi penting sehubungan dengan Pembiayaan Modal

- a. Penyertaan modal pada Penerima Modal Usaha yang signifikan pada 31 Desember 2021 dan 2020.

	2021	
	Rp	%
PT Mitra Niaga Madani	107.075.000.000	99,953
PT PNM Ventura Syariah	63.199.000.000	99,998
PT Mitra Bisnis Madani	48.500.000.000	99,897
PT Mitra Dagang Madani	4.998.000.000	99,960
PT Mitra Tekno Madani	4.948.500.000	98,970
PT Micro Madani Institute	4.722.000.000	94,440
PT Mitra Proteksi Madani	4.500.000.000	90,000
PT Mitra Utama Madani	4.500.000.000	90,000
PT Crom Madani Indonesia	7.488.000.000	100,000
PT Karya Digital Madani	5.300.000.000	53,000

7. CAPITAL FINANCING (continued)

- f. Changes in the allowances for impairment losses in December 31, 2021 and 2020 are as follows:

	2021	2020	
Third parties			
Beginning balances	(114.731.525.571)	(9.397.384.205)	
Beginning balances correction (Note 2)	-	(96.024.209.057)	
Provision during the period	(1.936.164.707)	(9.309.932.309)	
Total	(116.667.690.278)	(114.731.525.571)	Total

The Company made write-off of financing to third parties that were stalled in December 31, 2021 and 2020 amounting to nil and nil, respectively.

The conditions that are causing the write off are as follows:

- 1) Capital financing must already be classified as collectibility of loss.
- 2) The investee company/debtor has no commitment to settle the loan or the debtor has no ability to pay or the debtor is uncooperative (difficult to be found/escape/lost) or the debtor's business is declared bankrupt (bankrupt).
- 3) The restructuring effort can not be done.
- 4) Repayment efforts in the form of redemption/sale of the guarantee have been made.
- 5) An auction effort has been made for the mortgaged mortgage.
- 6) Problem financing covered by credit insurance has been made claiming rights except claims rights that have expired.

Significant information related to Capital Financing

- a. Equity Participation in the Investee Company that significant as of December 31, 2021 and 2020.

	2021		2020		
	Rp	%	Rp	%	
PT Mitra Niaga Madani	107.075.000.000	99,953	107.075.000.000	99,953	PT Mitra Niaga Madani
PT PNM Ventura Syariah	63.199.000.000	99,998	63.199.000.000	99,998	PT PNM Ventura Syariah
PT Mitra Bisnis Madani	48.500.000.000	99,897	48.500.000.000	99,897	PT Mitra Bisnis Madani
PT Mitra Dagang Madani	4.998.000.000	99,960	4.998.000.000	99,960	PT Mitra Dagang Madani
PT Mitra Tekno Madani	4.948.500.000	98,970	4.962.500.000	98,960	PT Mitra Tekno Madani
PT Micro Madani Institute	4.722.000.000	94,440	4.722.000.000	94,440	PT Micro Madani Institute
PT Mitra Proteksi Madani	4.500.000.000	90,000	4.500.000.000	90,000	PT Mitra Proteksi Madani
PT Mitra Utama Madani	4.500.000.000	90,000	4.500.000.000	90,000	PT Mitra Utama Madani
PT Crom Madani Indonesia	7.488.000.000	100,000	-	-	PT Crom Madani Indonesia
PT Karya Digital Madani	5.300.000.000	53,000	-	-	PT Karya Digital Madani

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

7. PEMBIAYAAN MODAL (lanjutan)

**Informasi penting sehubungan dengan
Pembiayaan Modal (lanjutan)**

b. Induk Koperasi Simpan Pinjam

Berdasarkan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi antara Perusahaan dan Induk Koperasi Simpan Pinjam (IKSP) sebagaimana tercantum dalam akta notaris Arry Supratno, S.H., No. 120 tanggal 30 November 1999 Perusahaan setuju untuk melakukan penyertaan modalnya di IKSP sebesar Rp2.000.000.000. Pembagian keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dibiayai modal penyertaan antara Perusahaan dengan IKSP adalah sebesar 20% : 80%. Jangka waktu modal penyertaan tidak terbatas, kecuali diputuskan untuk dihentikan oleh Perseroan dan IKSP disebabkan oleh kejadian wanprestasi.

c. Pembiayaan Modal

Pembiayaan dengan bagi hasil adalah pembiayaan atas bagi hasil berdasarkan pendapatan (*revenue sharing*) dalam jadwal angsuran dengan persentase tertentu yang telah disepakati di awal dan harus dituangkan dalam perjanjian tertulis antara Perusahaan dengan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU).

Pembiayaan dengan bagi hasil terdiri dari pembiayaan bagi hasil konvensional dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Salah satu produk utama bagi hasil syariah adalah M-Plus Syariah.

M-Plus Syariah merupakan pembiayaan syariah modal kerja atau modal investasi kepada usaha kecil dan menengah dengan pola bagi hasil (Akad Mudharabah dan/atau Musyarakah). Pembiayaan ini mempunyai plafon minimal Rp200.000.000 sampai dengan Rp3.000.000.000, dengan jangka waktu minimal 12 bulan sampai dengan maksimal 60 bulan.

Pembiayaan dengan obligasi konversi adalah pembiayaan berdasarkan pembelian obligasi konversi yang diterbitkan oleh Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) yang berbentuk badan hukum Perusahaan terbatas.

Pembiayaan dengan penyertaan saham adalah penyertaan modal secara langsung kepada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) yang berbentuk badan hukum Perusahaan terbatas dalam jangka waktu tertentu dengan batas maksimal 10 (sepuluh) tahun.

7. CAPITAL FINANCING (continued)

**Significant information related to Capital
Financing (continued)**

b. Induk Koperasi Simpan Pinjam

Based on the Investment in the Cooperative Agreement between the Company and Induk Koperasi Simpan Pinjam (IKSP) set out in notarial deed No. 120 dated on November 30, 1999 of Arry Supratno, S.H., the Company agreed to invest its funds in IKSP amounting to Rp2,000,000,000. Profit sharing from business activities funded by equity capital between the Company and IKSP is 20%: 80%. The term of the equity is not limited unless it is decided to be terminated by the Company and IKSP due to the event of default.

c. Capital financing

Profit sharing financing is based on profit sharing revenue at installment schedule with a certain percentage agreed in advance and must be set forth in a written agreement between the Company and the Investee Company (PPU).

Profit sharing financing consist of conventional financing and financing based on sharia principles. One of the main products of the sharia profit sharing is the M-Plus Sharia.

M-Plus Syariah is a sharia financing for working capital or capital investment to small and medium enterprises with revenue sharing scheme (Mudharaba and/or Musharaka Contract). The financing has a minimum credit limit of Rp200,000,000 up to Rp3,000,000,000, with a minimum period of 12 months to a maximum of 60 months.

Financing with convertible bond financing is financing based on purchase of convertible bonds issued by the Investee Company (PPU) which incorporated limited company.

Financing with equity investments is directly to the Investee Company (PPU) which incorporated limited company within a specified period to a maximum of 10 (ten) years.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. PEMBIAYAAN MODAL (lanjutan)

c. Pembiayaan Modal (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan modal dikarenakan perubahan nilai realisasi jaminan yang dipengaruhi kondisi dan jenis usaha masing-masing debitur.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas seluruh piutang pembiayaan modal entitas induk dan entitas anak telah memadai.

Rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 40.

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar pembiayaan modal diungkapkan pada Catatan 27.

7. CAPITAL FINANCING (continued)

c. Capital financing (continued)

Allowance for impairment losses on capital financing due to changes in the value of realization of collateral affected by the condition and type of business of each debtor.

Management believes that the allowance for impairment losses on all parent entity capital financing and subsidiary receivables is adequate.

Details of balances and transactions with the related parties are disclosed in Note 40.

Information regarding the classification and fair value of capital financing are disclosed in Note 27.

8. PIUTANG JASA MANAJEMEN

Piutang jasa manajemen merupakan piutang yang berasal dari jasa pendirian Lembaga Keuangan Mikro (LKM), jasa IT, pembuatan Standar Prosedur Operasional (SOP), pelatihan, pendampingan dan *community development* untuk pengembangan Usaha Kecil Mikro Menengah dan Koperasi (UKMK).

8. MANAGEMENT SERVICES RECEIVABLES

Management services receivables is generated from the establishment services of Micro Finance Institutions (MFIs), IT services, setting standard operating procedures (SOPs), training, assistance and community development for the development of Micro Small and Medium Enterprises and Cooperatives (SMEC).

a. Berdasarkan hubungan dan jenis transaksi

	2021
Pihak Ketiga Rupiah	
Entitas Induk	10.293.002.147
Entitas Anak	117.526.000
	10.410.528.147
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(4.775.638.666)
Total	5.634.889.481

a. By relationship and transaction type

	2020	
	8.325.895.425	Third Parties
	-	Rupiah
	-	Parent Entity
	-	Subsidiaries
	8.325.895.425	
Dikurangi: Allowances for Impairment Losses	(1.131.889.737)	Less:
Total	7.194.005.688	Total

b. Berdasarkan jangka waktu kredit

	2021
Kurang dari 1 tahun	6.648.050.645
1 - 2 tahun	2.290.357.310
Lebih dari 2 tahun	1.472.120.192
	10.410.528.147
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.775.638.666)
Total	5.634.889.481

b. By credit period

	2020	
	8.325.895.425	Less than 1 years
	-	1 - 2 years
	-	More than 2 years
	8.325.895.425	
Dikurangi: Allowances for impairment losses	(1.131.889.737)	Less:
Total	7.194.005.688	Total

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. PIUTANG JASA MANAJEMEN (lanjutan)

8. MANAGEMENT SERVICES RECEIVABLES (continued)

c. Berdasarkan umur tunggakan

c. By days past due

	2021	2020	
0 - 90 hari	5.498.463.481	357.202.192	0 - 90 days
Lebih dari 90 hari	4.912.064.666	7.968.693.233	More than 90 days
Total	10.410.528.147	8.325.895.425	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(4.775.638.666)	(1.131.889.737)	Allowance for Impairment Losses
Nilai Bersih	5.634.889.481	7.194.005.688	Net Value

d. Berdasarkan sektor ekonomi

d. By economic sector

	2021	2020	
Jasa-jasa	10.410.528.147	8.325.895.425	Services
Dikurangi:			Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(4.775.638.666)	(1.131.889.737)	Allowance for Impairment Losses
Nilai Bersih	5.634.889.481	7.194.005.688	Net Value

e. Berdasarkan status pembiayaan

e. By financing status

Tidak terdapat Piutang Jasa Manajemen yang direstrukturisasi per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

None of the Management Services Receivables are restructured as of December 31, 2021 and 2020.

f. Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang jasa manajemen adalah sebagai berikut:

f. The movement of Allowance for Impairment management services receivables losses are as follows:

	2021	2020	
Pihak Ketiga:			Third Parties:
Saldo awal	(1.131.889.737)	(1.123.067.921)	Beginning balances
Penyisihan selama periode berjalan	(3.643.748.929)	(8.821.816)	Provision during the period
Saldo Akhir	(4.775.638.666)	(1.131.889.737)	Ending Balances

Manajemen berpendapat bahwa Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas piutang jasa manajemen telah memadai.

Management believes that the Allowance for Impairment Losses of management services receivable is adequate.

Pinjaman yang telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp4.775.638.666 dan Rp1.131.889.737.

Loans that has been due and impaired on December 31, 2021 and 2020 was Rp4,775,638,666 and Rp1,131,889,737, respectively.

Rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 40.

Details of balances and transactions with the related parties are disclosed in Note 40.

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar piutang jasa manajemen diungkapkan pada Catatan 27.

Information regarding the classification and fair value of management services receivables are disclosed in Note 27.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

9. PENDAPATAN MASIH AKAN DITERIMA

	2021
Pendapatan bunga yang masih akan diterima:	
Bunga pembiayaan ULaMM	60.461.288.050
Bunga pembiayaan Mekaar	34.629.180.315
Bunga Deposito	1.076.222.131
Bunga pembiayaan LKMS	92.363.392
Subtotal	96.259.053.888
<u>Entitas Anak</u>	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima dari pembiayaan modal ventura	33.837.738.022
Total	130.096.791.910

9. ACCRUED INCOME

	2020	
		<i>Accrued interest income:</i>
	54.423.857.375	<i>Interest of ULaMM financing</i>
	16.501.785.696	<i>Interest of Mekaar financing</i>
	7.122.471.518	<i>Interest of Time Deposits</i>
	114.307.693	<i>Interest of LKMS financing</i>
Subtotal	78.162.422.282	<i>Subtotal</i>
		<u><i>Subsidiaries</i></u>
	39.783.933.539	<i>Accrued interest income from venture capital financing</i>
Total	117.946.355.821	Total

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar pendapatan masih akan diterima diungkapkan pada Catatan 27.

Information regarding the classification and fair value of accrued incomes are disclosed in Note 27.

10. PIUTANG DAN UTANG KEGIATAN MANAJER INVESTASI

a. Piutang Kegiatan Manajer Investasi

	2021
<u>Piutang management fee</u>	
<u>Pihak Berelasi</u>	
RDSPT PNM Indah Karya	2.455.463.700
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri VI	982.804.465
RDSPT PNM Multi Ekspor 1	572.366.912
KPD - PT PNM (Persero)	401.946.782
RDPT PNM Multisektoral VII	329.262.112
RDPT PNM Jamkrindo Fund	280.299.858
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri VII	252.455.846
RD PNM Saham Unggulan	208.395.706
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2018 Seri II	207.175.057
RD PNM Dana Bertumbuh	205.702.872
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri VIII	202.960.825
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri V	162.236.868
RDPT PNM Multisektoral X	151.395.308
RD PNM Dana Kas Platinum 2	108.745.022
RDPT PNM Multisektoral XII	98.864.122
RDSPT PNM Faaza	96.182.854
RD PNM Amanah Syariah	86.335.886
RDPT PNM Multisektoral IX	52.586.230
RDSPT PNM Multisektoral V	35.162.468
RD PNM Saham Agresif	32.806.681
RD PNM ETF Core LQ45	31.804.362
PNM Surat Berharga Negara 90	31.720.357
RDPT PNM Multisektoral XI	27.257.947
RD Pasar Uang PNM Dana Maxima	25.434.117
RD PNM Ekuitas Syariah	24.315.374
RD PNM Dana Sejahtera 2	23.722.273
PNM Surat Berharga Negara II	21.783.163
RD PNM Dana Kas Likuid	20.824.461
RDPU PNM Dana Maxima 2	19.373.832
RDT PNM Terproteksi Investa 29	17.124.908
RD PNM Dana Kas Platinum	16.728.677

10. INVESTMENT MANAGER RECEIVABLES AND PAYABLES

a. Investment Manager Activities Receivables

	2020	
		<u>Management fee receivables</u>
		<u>Related Parties</u>
	1.138.293.089	<i>RDSPT PNM Indah Karya</i>
	-	<i>RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri VI</i>
	599.646.126	<i>RDSPT PNM Multi Ekspor 1</i>
	324.649.484	<i>KPD - PT PNM (Persero)</i>
	481.662.956	<i>RDPT PNM Multisektoral VII</i>
	303.381.317	<i>RDPT PNM Jamkrindo Fund</i>
	-	<i>RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri VII</i>
	202.519.751	<i>RD PNM Saham Unggulan</i>
	313.302.877	<i>RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2018 Seri II</i>
	222.305.797	<i>RD PNM Dana Bertumbuh</i>
	-	<i>RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri VIII</i>
	231.348.311	<i>RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri V</i>
	151.106.748	<i>RDPT PNM Multisektoral X</i>
	84.118.486	<i>RD PNM Dana Kas Platinum 2</i>
	98.904.534	<i>RDPT PNM Multisektoral XII</i>
	98.321.974	<i>RDSPT PNM Faaza</i>
	50.325.782	<i>RD PNM Amanah Syariah</i>
	79.542.463	<i>RDPT PNM Multisektoral IX</i>
	48.166.554	<i>RDSPT PNM Multisektoral V</i>
	33.175.520	<i>RD PNM Saham Agresif</i>
	21.624.799	<i>RD PNM ETF Core LQ45</i>
	55.564.710	<i>PNM Surat Berharga Negara 90</i>
	73.700.470	<i>RDPT PNM Multisektoral XI</i>
	-	<i>RD Pasar Uang PNM Dana Maxima</i>
	28.877.399	<i>RD PNM Ekuitas Syariah</i>
	-	<i>RD PNM Dana Sejahtera 2</i>
	20.618.236	<i>PNM Surat Berharga Negara I</i>
	34.076.841	<i>RD PNM Dana Kas Likuid</i>
	-	<i>RDPU PNM Dana Maxima 2</i>
	72.967.060	<i>RDT PNM Terproteksi Investa 29</i>
	7.524.509	<i>RD PNM Dana Kas Platinum</i>

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

10. PIUTANG DAN UTANG KEGIATAN MANAJER INVESTASI (lanjutan)

10. INVESTMENT MANAGER ACTIVITIES RECEIVABLES AND PAYABLES (continued)

a. Piutang Kegiatan Manajer Investasi (lanjutan)

a. Investment Manager Activities Receivables (continued)

	2021	2020	
Piutang <i>management fee</i> (lanjutan)			Management fee receivables (continued)
Pihak Berelasi (lanjutan)			Related Parties (continued)
RD PNM Dana Tunai	14.822.979	33.063.084	RD PNM Dana Tunai
RD PNM Syariah	14.003.834	6.126.487	RD PNM Syariah
RD Syariah PNM Sukuk Negara Syariah	13.959.846	14.647.822	RD Syariah PNM Sukuk Negara Syariah
RD PNM PUAS	12.592.602	-	RD PNM PUAS
RDSPT PNM Kaffah	11.263.409	33.138.134	RDSPT PNM Kaffah
RDSPU PNM Falah	5.999.595	11.519.765	RDSPU PNM Falah
RDPT Multisektoral XVI	9.169.908	19.919.806	RDPT Multisektoral XVI
RDSPU PNM Falah 2	5.051.260	10.608.874	RDSPU PNM Falah 2
RDT PNM Terproteksi Investa 30	5.002.691	6.228.784	RDT PNM Terproteksi Investa 30
RD PNM Terproteksi Dana Investa 11	4.256.089	6.221.663	RD PNM Terproteksi Dana Investa 11
RDT PNM Terproteksi Investa 28	2.189.588	7.064.309	RDT PNM Terproteksi Investa 28
RDSPU PNM Arafah	1.763.694	134.345.564	RDSPU PNM Arafah
RDT PNM Terproteksi Investa 31	1.748.619	10.215.902	RDT PNM Terproteksi Investa 31
PNM Surat Berharga Negara	1.649.269	32.812.196	PNM Surat Berharga Negara
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri III	35.000	417.686.868	RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri III
RDPT PNM Pembangunan Perumnas 2016	32	232.312.595	RDPT PNM Pembangunan Perumnas 2016
RD Syariah Terproteksi PNM Investa 19	2	2	RD Syariah Terproteksi PNM Investa 19
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2017 Seri II	2	2	RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2017 Seri II
RDPT PNM Perikanan Nusantara	-	883.636.364	RDPT PNM Perikanan Nusantara
RDPT PNM Multisektoral VI	-	340.820.926	RDPT PNM Multisektoral VI
RDST PNM PNM Misbah 4	-	338.177.777	RDST PNM PNM Misbah 4
RD Terproteksi PNM Investa 25	-	161.230.977	RD Terproteksi PNM Investa 25
RDSPT Mikro BUMN Seri II	-	160.675.583	RDSPT Mikro BUMN Seri II
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2016	-	117.164.740	RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2016
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri IV	-	114.845.514	RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri IV
RDPT PNM POS Indonesia	-	91.365.224	RDPT PNM POS Indonesia
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN	-	39.048.761	RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN
RD PNM Terproteksi Dana Investa 3	-	23.399.394	RD PNM Terproteksi Dana Investa 3
RD PNM Pasar Uang Syariah	-	2.286.988	RD PNM Pasar Uang Syariah
Subtotal	7.286.747.464	8.024.289.898	Subtotal
Pihak Ketiga			Third Party
KPD - Jely Sunjoto	-	19.191.762	KPD - Jely Sunjoto
Total	7.286.747.464	8.043.481.660	Total

Perusahaan tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai karena pihak manajemen berkeyakinan bahwa piutang kegiatan manajer investasi dapat tertagih seluruhnya. (Catatan 40)

The Company does not establish an allowances for impairment losses, because the Company's management believes that the receivables from investment managers activities are fully collectible. (Note 40)

b. Utang Kegiatan Manajer Investasi

b. Investment Manager Activities Payables

	2021	2020	
Pihak-pihak Ketiga:			Third Parties:
PT BNI Life Insurance	903.698	903.698	PT BNI Life Insurance
PT Indo Premier	293.600	1.753.421	PT Indo Premier
PT Bank Commonwealth	245.510	257.539	PT Bank Commonwealth
PT Bank CIMB Niaga Tbk	35.057	745.050	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Philip Securities Indonesia	-	332.848	PT Philip Securities Indonesia
PT Bank Permata Tbk	-	85.768	PT Bank Permata Tbk
PT Bank DBS Indonesia	-	66.149	PT Bank DBS Indonesia
Total utang <i>management fee</i>	1.477.865	4.144.473	Total management fee payable

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. PIUTANG LAIN-LAIN

	2021	2020
Entitas Induk:		
Piutang karyawan	5.859.538.851	4.808.168.154
Piutang lain-lain	39.653.547.217	58.058.307.390
Subtotal	45.513.086.068	62.866.475.544
Dikurangi:		
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(13.262.553.263)	(13.235.563.278)
Subtotal	32.250.532.805	49.630.912.266
Entitas Anak		
Piutang karyawan	5.625.123.527	1.159.787.548
Piutang lain-lain	49.685.769.908	6.920.506.887
Subtotal	55.310.893.435	8.080.294.435
Dikurangi:		
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	-	-
	55.310.893.435	8.080.294.435
Total	87.561.426.240	57.711.206.701

11. OTHER RECEIVABLES

Parent Entity:
Employee receivables
Other receivables
Subtotal
Less:
Allowances for Impairment Losses
Subtotal
Subsidiaries
Employee receivables
Other receivables
Subtotal
Less:
Allowances for Impairment Losses
Total

Piutang lain-lain merupakan piutang yang diakibatkan oleh transaksi dengan pihak ketiga yang tidak dapat dikategorikan sebagai piutang pembiayaan, piutang jasa manajemen, piutang kegiatan manajer investasi, serta piutang lain-lain yang berasal dari konsolidasi Kontrak Pengelolaan Dana.

Other receivables represent receivables arising from transactions with third parties that can not be categorized as financing receivables, management service receivables, investment manager activities receivables, and other receivables arising from Fund Management Contract consolidation.

Perusahaan berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain sudah mencukupi untuk menutupi kerugian atas piutang lain-lain tidak tertagih.

The Company believes that the allowance for impairment losses on other receivables is adequate to cover losses on uncollectible accounts.

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar piutang lain-lain diungkapkan pada Catatan 27.

Information regarding the classification and fair value of other receivables are disclosed in Note 27.

12. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DI MUKA

	2021	2020
Uang muka kerja	124.372.976.337	66.872.381.214
Biaya dibayar di muka:		
Asuransi	199.672.855.476	103.964.973.325
Sewa kantor/rumah dinas/kendaraan	53.319.386.274	49.744.422.501
Provisi dan administrasi pinjaman	37.392.200.956	31.764.904.492
Total	414.757.419.043	252.346.681.532

12. ADVANCES AND PREPAYMENTS

Advances
Prepaid expenses:
Insurance
Office/house on duty/vehicle rent
Provision and loan administration
Total

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**12. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DI MUKA
(lanjutan)**

Uang muka kerja merupakan uang yang diambil dalam rangka aktivitas operasional Perusahaan.

Biaya sewa dibayar di muka terdiri dari sewa kantor, sewa rumah dinas, dan sewa kendaraan dibayar di muka. Biaya asuransi dibayar di muka terdiri dari asuransi penjaminan kredit, asuransi jiwa, asuransi kendaraan, dan asuransi kantor dibayar di muka.

Biaya dibayar dimuka Perusahaan merupakan biaya dibayar dimuka atas sewa yang bukan menjadi objek PSAK 73.

12. ADVANCES AND PREPAYMENTS (continued)

Advances for work are money taken for the framework of the operational activities of the Company's.

Prepaid rental costs consist of office rent, official house rental, and prepaid vehicle rental. Prepaid insurance costs consist of credit guarantee insurance, life insurance, vehicle insurance, and prepaid office insurance.

Advances and prepayment of the Company are its not become object of PSAK 73.

13. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA

13. FIXED ASSETS AND RIGHT OF USE ASSETS

		2021					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance		
Harga Perolehan						Acquisition Cost	
Pemilikan langsung:						Direct ownership:	
Tanah	553.109.224.081	309.396.740.000	3.355.549.822	-	859.150.414.259	Land	
Bangunan	454.513.233.326	345.681.560.821	-	-	800.194.794.147	Building	
Kendaraan	456.137.553.534	144.013.620.992	36.118.484.963	-	564.032.689.563	Vehicles	
Peralatan dan perabotan kantor	523.569.412.427	159.474.891.707	67.403.270.049	-	615.641.034.085	Furnitures, fixtures, and equipments	
Partisi kantor	133.401.491.913	36.003.263.834	3.729.037.202	-	165.675.718.545	Office partition	
Aset Hak Guna:						Right of use asset:	
Bangunan	142.251.137.000	66.050.329.178	-	-	208.301.466.178	Building	
Kendaraan	2.188.821.900	55.277.909.543	-	-	57.466.731.443	Vehicles	
Peralatan dan perabotan kantor	2.457.514.182	5.237.401.065	-	-	7.694.915.247	Furnitures, fixtures, and equipments	
Subtotal	2.267.628.388.363	1.121.135.717.140	110.606.342.036	-	3.278.157.763.467	Subtotal	
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation	
Pemilikan langsung:						Direct ownership:	
Bangunan	76.707.769.337	17.811.307.499	-	-	94.519.076.836	Building	
Kendaraan	195.037.729.367	16.263.961.271	39.792.921.689	-	171.508.768.949	Vehicles	
Peralatan dan perabotan kantor	350.422.645.212	40.238.567.872	3.619.432.006	-	387.041.781.078	Furnitures, fixtures, and equipments	
Partisi kantor	100.749.878.796	18.456.804.392	308.906.160	-	118.897.777.028	Office partition	
Aset Hak Guna:						Right of use asset:	
Bangunan	67.179.015.792	23.992.174.657	-	-	91.171.190.449	Building	
Kendaraan	547.205.474	40.007.049.132	-	-	40.554.254.606	Vehicles	
Peralatan dan perabotan kantor	1.377.166.205	8.108.900.281	-	-	9.486.066.486	Furnitures, fixtures, and equipments	
Subtotal	792.021.410.183	164.878.765.104	43.721.259.855	-	913.178.915.432	Subtotal	
Nilai buku bersih	1.475.606.978.180				2.364.978.848.035	Net book value	

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

13. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA (lanjutan)

**13. FIXED ASSETS AND RIGHT OF USE ASSETS
(continued)**

	2020					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga Perolehan						Acquisition Cost
Pemilikan langsung:						Direct ownership:
Tanah	515.288.736.372	-	-	37.820.487.709	553.109.224.081	Land
Bangunan	397.539.873.769	1.407.381.691	-	55.565.977.866	454.513.233.326	Building
Kendaraan	378.727.225.312	84.663.182.222	23.305.472.428	16.052.618.428	456.137.553.534	Vehicles
Peralatan dan perabotan kantor	423.071.391.605	110.480.064.438	9.982.043.616	-	523.569.412.427	Furnitures, fixtures and equipments
Partisi kantor	117.634.085.810	16.772.449.103	1.005.043.000	-	133.401.491.913	Office partition
Aset Hak Guna:						Right of used assets:
Bangunan	63.070.246.472	79.180.890.528	-	-	142.251.137.000	Building
Kendaraan	-	2.188.821.900	-	-	2.188.821.900	Vehicles
Peralatan dan perabotan kantor	-	2.457.514.182	-	-	2.457.514.182	Furnitures, fixtures and equipments
Subtotal	1.895.331.559.340	297.150.304.064	34.292.559.044	109.439.084.003	2.267.628.388.363	Subtotal
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Pemilikan langsung:						Direct ownership:
Bangunan	48.800.763.526	27.907.005.811	-	-	76.707.769.337	Building
Kendaraan	117.030.109.311	83.048.499.002	15.752.715.823	10.711.836.877	195.037.729.367	Vehicles
Peralatan dan perabotan kantor	275.120.600.119	85.278.694.514	9.976.649.421	-	350.422.645.212	Furnitures, fixtures, and equipments
Partisi kantor	84.203.081.326	16.546.797.470	-	-	100.749.878.796	Office partition
Aset Hak Guna:						Right of used assets:
Bangunan	-	67.179.015.792	-	-	67.179.015.792	Building
Kendaraan	-	547.205.474	-	-	547.205.474	Vehicles
Peralatan dan perabotan kantor	-	1.377.166.205	-	-	1.377.166.205	Furnitures, fixtures and equipments
Subtotal	525.154.554.282	281.884.384.268	25.729.365.244	10.711.836.877	792.021.410.183	Subtotal
Nilai buku bersih	1.370.177.005.058				1.475.606.978.180	Net book value

Informasi mengenai Aset Tetap yang diperoleh dan dimiliki oleh entitas induk dan entitas anak dalam Laporan Keuangan Konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Information about Fixed Assets obtained and owned by the parent and subsidiary entities as of December 31, 2021 and 2020 Consolidated Financial Statements are as follows:

Seluruh aset tetap Perusahaan digunakan untuk kegiatan operasional dan tidak terdapat aset tetap yang tidak dipakai sementara pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

All of the Company's fixed assets are used for operational activities and there are no temporarily unused fixed assets as of December 31, 2021 and 2020.

Jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan oleh Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp313.148.363.286 dan Rp236.822.873.513.

The gross carrying amount of each fully depreciated fixed asset and used by the Company as of December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp313,148,363,286 and Rp236,822,873,513, respectively.

Terdapat laba atas penjualan aset tetap Perusahaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp464.707.625 dan nihil.

There are gain on sales of the Company's fixed assets as of December 31, 2021 and 2020 are amounting to Rp464,707,625 and nil, respectively.

Nilai buku atas aset tetap yang dijual per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah nihil.

The book value of fixed assets sold per December 31, 2021 and 2020 is nil.

Harga jual atas penjualan aset tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp76.785.736.508 dan Rp7.822.484.700.

The selling price on the sale of fixed assets per December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp76,785,736,507 and Rp7,822,484,700, respectively.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

13. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 aset tetap diasuransikan pada PT BRI Asuransi Indonesia. Asuransi tersebut meng-cover kerugian karena kebakaran, banjir, gempa bumi, kerusakan dan kecurian dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar nilai perolehan aset tetap. Perusahaan tidak memiliki hubungan berelasi dengan pihak asuransi. Manajemen berpendapat, nilai pertanggungan tersebut memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset tetap dipertanggungjawabkan.

Pengurangan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp58.039.861.581 dan Rp34.292.559.044, serta penghapusan akumulasi depresiasi sebesar Rp59.985.221.126 dan Rp25.729.365.244 merupakan penghapusan buku aset tetap.

Tidak terdapat perbedaan nilai wajar dan nilai tercatat aset tetap yang material pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Aset tetap yang dimiliki Entitas Induk tidak dijaminkan ke pihak lain.

Beban penyusutan dialokasikan ke dalam beban usaha pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pembebanan penyusutan adalah sebagai berikut:

	2021
Beban Penyusutan (Catatan 36)	
Entitas Induk	14.126.314.700
Entitas Anak	150.752.450.404
Total	164.878.765.104

Beban penyusutan sebesar Rp164.878.765.104 dan Rp281.884.384.268 untuk 31 Desember 2021 dan 2020 merupakan jumlah total nilai beban penyusutan untuk aset tetap yang digunakan untuk tujuan operasional oleh entitas induk dan entitas anak/afiliasi serta beban penyusutan atas bangunan untuk disewakan (properti investasi) milik entitas afiliasi.

Manajemen telah mengkaji ulang atas estimasi umur ekonomis, metode penyusutan, dan nilai residu pada setiap akhir periode pelaporan.

**13. FIXED ASSETS AND RIGHT OF USE ASSETS
(continued)**

On December 31, 2021 and 2020 fixed assets were insured with PT BRI Asuransi Indonesia. The insurance cover loss due to fire, flood, earthquakes, damage and theft of the insured value of each property and equipment at cost. The Company has no related relationship with the insurance company. The Company's management believes the insurance coverage is adequate to cover possible losses on fixed assets insured.

The deduction in the value of fixed assets as of December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp58,039,861,581 and Rp34,292,559,044, and write-off the accumulated depreciation amounting to Rp59,985,221,126 and Rp25,729,365,244, respectively, represents the write-off of fixed assets.

There are no significant between the fair value and the carrying value of fixed assets on December 31, 2021 and 2020.

The Parent's fixed assets are not use as collateral to the third parties.

Depreciation expenses are allocated into operating expenses on consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Depreciation expenses was allocated as follows:

	2021	2020	
Beban Penyusutan (Catatan 36)			Depreciation expenses (Note 36)
Entitas Induk	14.126.314.700	133.187.814.516	Parent Entity
Entitas Anak	150.752.450.404	148.696.569.752	Subsidiaries
Total	164.878.765.104	281.884.384.268	Total

Depreciation expenses amounted to Rp164,878,765,104 and Rp281,884,384,268 for December 31, 2021 and 2020, respectively represent the total value of depreciation expense for property, plant and equipment used for operational purposes by the parent and subsidiaries/affiliates and custody expenses the building for rent (investment property) belonging to the affiliates.

Management has reviewed over the estimated useful life, depreciation methods, and salvage values at the end of each reporting date.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

13. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA (lanjutan)

Manajemen Perusahaan telah melakukan pengkajian ulang aset tetap dan berpendapat bahwa tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai atas aset tetap pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian aset hak guna.

14. PORTOFOLIO EFEK DIUKUR PADA NILAI WAJAR MELALUI PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Berdasarkan jenis:

	2021
Pihak-pihak Berelasi (Catatan 40)	
<u>Entitas Induk</u>	
Saham PT Syarikat Takaful Indonesia	5.785.109.997
Kerugian yang belum direalisasi	(5.785.109.997)
Total	-

Informasi penting sehubungan dengan Portofolio Efek Tersedia dengan Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain:

Kepemilikan Perusahaan pada PT Syarikat Takaful Indonesia per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 6,92%.

Kenaikan (penurunan) nilai wajar atas Portofolio Efek - Tersedia dengan Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lainnya. Metode pengukuran nilai wajar menggunakan input level 2, yaitu: selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.

Portofolio efek tersebut di atas tidak dijaminkan, tidak di-repo-kan dan tidak dipinjamkan kepada pihak lain.

Perubahan pada nilai portofolio efek pada nilai wajar melalui keuntungan atau kerugian dicatat dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 40.

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar portofolio efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diungkapkan pada Catatan 27.

13. FIXED ASSETS AND RIGHT OF USE ASSETS (continued)

The Company's Management has conducted a review of the fixed assets and rights of use assets and believe that there were no events or changes in circumstances indicate impairment of fixed assets on the consolidated statement of financial position and right of use asset.

14. PORTFOLIO OF SECURITIES MEASURED AT FAIR VALUE THROUGH OTHER COMPREHENSIVE INCOME

By type:

	2021	2020	
			Related Parties (Note 40)
			<u>Parent entity</u>
			Shares of PT Syarikat Takaful Indonesia
			Unrealized Loss
Total	-	5.665.228.119	Total

Significant information related to Portfolio of Securities Fair Value Through Other Comprehensive Income:

The ownership of the Company in PT Syarikat Takaful Indonesia as of December 31, 2021 and December 31, 2020 is 6.92%.

Increase (decrease) in fair value of the Portfolio Securities - Fair Value Through Other Comprehensive Income is recorded to Other Comprehensive Income. Method of measuring fair value is using Level 2 inputs, namely: in addition quotation prices included in Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly.

The above portfolio of securities are not pledged, not in the repo, and not lent to other parties.

Changes in the portfolio of securities value at fair value through profit or loss recorded in the consolidated statement of financial position.

Details of balances and transactions with the related parties are disclosed in Note 40.

Information regarding classification and fair value of portfolio of securities measured at fair value through other comprehensive income are disclosed in Note 27.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

15. ASET TAKBERWUJUD

15. INTANGIBLE ASSETS

		2021					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance		
Harga Perolehan						Acquisition Cost	
Software	264.296.108.104	27.397.233.339	-	-	291.693.341.443	Software	
Biaya pra-Operasional	2.127.709.474	-	-	-	2.127.709.474	Pre-operational costs	
Pengembangan software	16.086.876.126	-	-	-	16.086.876.126	Software development	
Subtotal	282.510.693.704	27.397.233.339	-	-	309.907.927.043	Subtotal	
Akumulasi Amortisasi						Accumulated Amortization	
Software	112.309.351.726	77.515.471.772	-	-	189.824.823.498	Software	
Biaya pra-operasional	2.127.709.474	-	-	-	2.127.709.474	Pre-operational costs	
Subtotal	114.437.061.200	77.515.471.772	-	-	191.952.532.972	Subtotal	
Nilai buku bersih	168.073.632.504				117.955.394.071	Net book value	
		2020					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance		
Harga Perolehan						Acquisition Cost	
Goodwill	1.339.900.118	-	1.339.900.118	-	-	Goodwill	
Software	242.070.102.362	30.207.652.647	7.981.646.905	-	264.296.108.104	Software	
Biaya pra-Operasional	5.162.133.474	-	3.034.424.000	-	2.127.709.474	Pre-operational costs	
Pengembangan software	192.615.920	15.894.260.206	-	-	16.086.876.126	Software development	
Subtotal	248.764.751.874	46.101.912.853	12.355.971.023	-	282.510.693.704	Subtotal	
Akumulasi Amortisasi						Accumulated Amortization	
Software	44.581.748.704	72.654.123.598	4.926.520.576	-	112.309.351.726	Software	
Biaya pra-operasional	2.127.709.474	-	-	-	2.127.709.474	Pre-operational costs	
Subtotal	46.709.458.178	72.654.123.598	4.926.520.576	-	114.437.061.200	Subtotal	
Nilai buku bersih	202.055.293.696				168.073.632.504	Net book value	

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada penurunan nilai atas goodwill.

Management believes that there is no impairment on goodwill.

Pembebanan amortisasi adalah sebagai berikut:

Amortization expenses was allocated as follows:

	2021	2020	
Beban amortisasi (Catatan 36)			Amortization expense (Note 36)
Entitas Induk	75.433.020.945	72.654.123.598	Parent Entity
Entitas Anak	2.082.450.827	-	Subsidiaries
Total	77.515.471.772	72.654.123.598	Total

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. ASET TIDAK LANCAR YANG DIMILIKI UNTUK DIJUAL

	2021	2020
Agunan diambil alih		
PT PNM Venture Capital	10.911.109.496	1.137.240.496
PT Permodalan Nasional Madani	24.330.000	24.330.000
	10.935.439.496	1.161.570.496
Dikurangi :		
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(24.330.000)	(24.330.000)
Subtotal	10.911.109.496	1.137.240.496
Aset tetap siap untuk dijual		
Mobil	68.701.576	-
Motor	56.411.584	-
Subtotal	125.113.160	-
Total Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	11.036.222.656	1.137.240.496

16. NON-CURRENT ASSETS CLASSIFIED AS HELD FOR SALE

	2021	2020
Foreclosed assets		
PT PNM Venture Capital	10.911.109.496	1.137.240.496
PT Permodalan Nasional Madani	24.330.000	24.330.000
	10.935.439.496	1.161.570.496
Less:		
Allowance for impairment losses	(24.330.000)	(24.330.000)
Subtotal	10.911.109.496	1.137.240.496
Fixed Asset for sale		
Cars	68.701.576	-
Motorcycle	56.411.584	-
Subtotal	125.113.160	-
Total Non current assets classified as Held for sale	11.036.222.656	1.137.240.496

Informasi penting sehubungan dengan Aset Tidak lancar yang dimiliki untuk dijual:

Agunan diambilalih

Penilaian akhir aset berdasarkan laporan Penilaian Aset KJPP Amin, Nirwan, Alfiantori dan Mitra tertanggal 20 Januari 2016 telah menjadi penilaian aset seperti luas lahan 35.083 m² dan 281.821 m² di kabupaten Minahasa Utara dan Bolaang Mangondow Timur Propinsi Sulawesi Utara dengan nilai pasar sebesar Rp2.830.000.000.

Aset tetap dimiliki untuk dijual

Aset tetap dimiliki untuk dijual adalah aset kendaraan motor dan mobil yang masa sewanya telah berakhir. Kendaraan tersebut sudah tidak digunakan atau disewakan dan tersedia untuk dijual dalam jangka waktu dekat.

Manajemen Perusahaan tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual, karena manajemen memiliki keyakinan yang memadai bahwa nilai yang dapat direalisasikan atas aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual berada di atas nilai tercatat dan tidak ada penurunan nilai yang material.

Manajemen melakukan penilaian internal secara periodik atas agunan yang diambilalih dan aset tetap dimiliki untuk dijual.

Significant information related to Non-current assets classified as held for sale:

Foreclosed assets

A final assessment of the assets based on reports Asset Valuation of KJPP Amin, Nirwan, Alfiantori and Partners dated January 20, 2016 has been an assessment of assets such as land area of 35,083 m² and 281,821 m² in North Minahasa Regency and East Bolaang Mongondow, North Sulawesi Province with a market value of Rp2,830,000,000.

Fixed Asset held-for-sale

Fixed assets held-for-sale are the assets of motorcycles and cars whose rental period has expired. The vehicle is no longer used or leased and is available for sale in the near future.

The Company's management does not provide allowance for impairment losses on non-current assets held for sale, as the management believes that the realizable value of non-current assets held for sale is above the carrying amount and there is no material impairment.

Management conduct periodic internal assessments on foreclosed properties and fixed assets held-for-sale.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

17. ASET LAIN-LAIN - BERSIH

	2021
Bank dibatasi penggunaannya	1.623.897.404.486
Penyertaan pada entitas asosiasi	6.451.293.592
Sewa kantor	6.442.663.594
Telepon	214.673.125
Lain-lain	137.491.574.125
Total	1.774.497.608.922

17. OTHER ASSETS - NET

	2020	
	1.343.807.998.658	<i>Restricted bank</i>
	3.904.874.299	<i>Investment in associates</i>
	1.414.766.580	<i>Office rent</i>
	207.173.125	<i>Telephone</i>
	24.352.930.192	<i>Others</i>
Total	1.373.687.742.854	Total

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.05/2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani, dalam rangka meningkatkan literasi keuangan Perusahaan diperkenankan untuk menerima titipan dana dari nasabah Mekaar. Atas titipan dana tersebut Perusahaan membukakan rekening atas nama Perusahaan dan mencatatkan nilainya dalam akun "Bank dibatasi penggunaannya" dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.

In accordance with the Financial Services Authority Regulation No.16/POJK.05/2019 dated June 12, 2019 concerning Supervision of PT Permodalan Nasional Madani, in the context of increasing financial literacy the Company is permitted to receive funds from Mekaar customers. For the funds deposited, the Company opens an account in the name of the Company and records its value in the "Bank restricted use" account in the Consolidated Statements of Financial Position.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 138/PMK.05/2020 tanggal 28 September 2020 perihal Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah akan memberikan subsidi bunga/margin untuk nasabah Mekaar dan ULaMM yang terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Based on the Regulation of the Minister of Finance No. 138/PMK.05/2020 dated September 28, 2020 regarding the Procedures for Providing Interest Subsidies/Margin Subsidies in order to Support the Implementation of the National Economic Recovery Program, the Government will provide an interest/margin subsidies for Mekaar and ULaMM customers affected by the Corona Pandemic Virus Disease 2019 (Covid-19).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 150/PMK.05/2021 tanggal 25 Oktober 2021 perihal Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah akan memberikan subsidi bunga/margin untuk nasabah Mekaar dan ULaMM yang terdampak Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

Based on the Regulation of the Minister of Finance No. 150/PMK.05/2021 dated October 25, 2021 regarding the Procedures for Providing Interest Subsidies/Margin Subsidies in order to Support the Implementation of the National Economic Recovery Program, the Government will provide an interest/margin subsidies for Mekaar and ULaMM customers affected by the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pada tanggal 19 November 2021 Pemerintah telah menyalurkan subsidi bunga/subsidi margin kepada Perusahaan sebesar Rp930.226.274.768. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 2021 Perusahaan telah menyalurkan seluruh subsidi bunga/subsidi margin tersebut melalui dana cadangan angsuran untuk nasabah ULaMM dan sebagai Uang Titipan Nasabah atau Uang Subsidi Bunga untuk nasabah Mekaar.

On November 19, 2021, the Government has distributed interest subsidies/margin subsidies to the Company amounting to Rp930,226,274,768. Furthermore, on December 31, 2021, the Company has distributed the entire interest subsidy/margin subsidy through an installment reserve fund for ULaMM customers and as Customer Deposit or Interest Subsidy for Mekaar customers.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

17. ASET LAIN-LAIN - BERSIH (lanjutan)

Pada tanggal 26 Oktober 2020 dan 4 Desember 2020 Perusahaan telah menerima subsidi bunga/subsidi margin dari Pemerintah masing-masing sebesar Rp119.613.007.638 dan Rp914.967.881.770. Perusahaan mengakui subsidi bunga/subsidi margin tersebut sebagai dana cadangan angsuran untuk nasabah ULamm dan sebagai Uang Titipan Nasabah atau Uang Subsidi Bunga untuk nasabah Mekaar. Pada tanggal 31 Desember 2020 saldo bank dibatasi penggunaannya yang bersumber dari subsidi bunga/subsidi margin sebesar Rp915.048.033.570.

17. OTHER ASSETS - NET (continued)

On October 26, 2020 and December 4, 2020, the Company has received interest subsidy/margin subsidy from the Government amounting to Rp119,613,007,638 and Rp914,967,881,770, respectively. The Company recognize the interest subsidy/margin subsidy as an installment reserve fund for ULamm customers and as a deposit for customers or interest subsidy fund for Mekaar customers. As of December 31, 2020, the restricted bank from the interest subsidy/margin subsidy amounting to Rp915,048,033,570.

18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN

- a. Berdasarkan transaksi pihak ketiga dan pihak-pihak berelasi

	2021	2020
Pihak Berelasi (catatan 40)		
Rupiah		
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.899.682.853.634	1.700.260.184.481
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	897.316.847.703	62.520.260.004
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	744.630.751.862	626.861.056.899
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	495.900.000.000	266.666.666.669
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	473.841.787.830	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	177.147.691.698	-
Lembaga Pengelola Dana Bergulir - KUMKM	26.437.480.000	15.041.660.000
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	17.758.429.234	-
Subtotal	4.732.715.841.961	2.671.349.828.053
Pihak Ketiga		
Rupiah		
PT Bank DKI	2.606.704.708.356	1.057.833.186.079
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten	866.488.501.806	900.000.031
PT Bank Permata Tbk	404.166.666.671	83.333.333.333
PT Maybank Indonesia Tbk	390.000.000.000	284.722.222.222
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	357.502.486.311	-
PT Bank Mega Tbk	349.742.790.384	-
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	291.666.666.670	91.666.666.667
PT Bank Mega Syariah	238.645.300.903	199.930.214.727
PT Bank Central Asia Tbk	152.866.983.766	78.169.654.590
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	144.939.066.807	93.504.163.292
PT Bank Pembangunan Daerah - D.I. Yogyakarta	144.118.702.789	86.111.111.000
PT Bank Victoria International Tbk	124.925.436.071	250.000.000.000
PT Maybank Syariah Indonesia	118.055.555.556	-
PT Danareksa Finance	100.000.000.000	74.734.865.864
State Bank of India Indonesia	99.615.000.000	-
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan tengah	66.527.806.378	216.666.666.663
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	42.794.208.143	100.000.000.000

18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION BORROWINGS

- a. By the third parties and the related parties transactions

	2021	2020
Related Parties (note 40)		
Rupiah		
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.700.260.184.481	1.700.260.184.481
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	62.520.260.004	62.520.260.004
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	626.861.056.899	626.861.056.899
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	266.666.666.669	266.666.666.669
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	-	-
Indonesia Eximbank	-	-
Revolving Fund Management Institution	15.041.660.000	15.041.660.000
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	-	-
Subtotal	2.671.349.828.053	2.671.349.828.053
Third Parties		
Rupiah		
PT Bank DKI	1.057.833.186.079	1.057.833.186.079
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten	900.000.031	900.000.031
PT Bank Permata Tbk	83.333.333.333	83.333.333.333
PT Maybank Indonesia Tbk	284.722.222.222	284.722.222.222
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	-	-
PT Bank Mega Tbk	-	-
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	91.666.666.667	91.666.666.667
PT Bank Mega Syariah	199.930.214.727	199.930.214.727
PT Bank Central Asia Tbk	78.169.654.590	78.169.654.590
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan and Sulawesi Barat	93.504.163.292	93.504.163.292
PT Bank Pembangunan Daerah -D.I. Yogyakarta	86.111.111.000	86.111.111.000
PT Bank Victoria International Tbk	250.000.000.000	250.000.000.000
PT Maybank Syariah Indonesia	-	-
PT Danareksa Finance	74.734.865.864	74.734.865.864
State Bank of India Indonesia	-	-
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan tengah	216.666.666.663	216.666.666.663
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	100.000.000.000	100.000.000.000

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

a. Berdasarkan transaksi pihak ketiga dan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

a. By the third parties and the related parties transactions (continued)

	2021	2020	
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	40.000.000.004	49.500.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan
PT Bank Nationalnubu Tbk	24.979.087.067	58.333.333.333	PT Bank Nationalnubu Tbk
PT Bank BCA Syariah	15.228.442.029	64.112.318.843	PT Bank BCA Syariah
PT Bank Mayora Tbk	1.558.600.000	1.923.325.819	PT Bank Mayora Tbk
PT Bank Danamon	154.060.278	1.361.503.997	PT Bank Danamon
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (sebelumnya PT Bank BNI Syariah)	-	675.320.837.019	PT Bank Syariah Indonesia Tbk (formerly PT Bank BNI Syariah)
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (sebelumnya PT Bank BRISyariah Tbk)	-	47.961.689.926	PT Bank Syariah Indonesia Tbk (formerly PT Bank BRISyariah Tbk)
PT Bank KEB Hana Indonesia	-	37.396.535.192	PT Bank KEB Hana Indonesia
Subtotal	6.580.680.069.989	3.553.481.628.597	Subtotal
Total	11.313.395.911.950	6.224.831.456.650	Total

b. Berdasarkan jatuh tempo

b. By maturity

	2021	2020	
Kurang dari 1 tahun	5.069.803.105.522	2.662.206.476.671	Less than 1 year
1 - 2 tahun	1.343.092.061.301	1.401.331.725.859	1 - 2 years
Lebih dari 2 tahun	4.900.500.745.127	2.161.293.254.120	More than 2 years
Total	11.313.395.911.950	6.224.831.456.650	Total

Grup telah memenuhi seluruh pembatasan yang diwajibkan dalam perjanjian dan telah melakukan pembayaran pokok dan bunga pinjaman secara tepat waktu.

The Group has complied with all of the required covenants in the agreement and has made timely payment of principal and interest on the loan.

Jaminan yang diberikan oleh Perusahaan atas seluruh fasilitas pinjaman yang diterima adalah berupa cession atas nasabah ULamm dan/atau Mekaar. Cession tersebut dimutakhirkan sesuai dengan syarat dan ketentuan dari masing-masing kreditur. Informasi mengenai jaminan fasilitas pinjaman diungkapkan pada Catatan 6.

Collateral granted by the Company for all loan facilities received are cession from ULamm and/or Mekaar customers. The Cession is updated in accordance with the terms and conditions of each creditor. Information regarding collateral loan facilities are disclosed in Note 6.

Informasi penting sehubungan dengan Utang Bank dan Lembaga:

Significant information related to Bank and Financial Institution Borrowings:

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.42 tanggal 30 September 2021, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp750.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 8,00% per tahun. Jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 30 September 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No.42 dated September 30, 2021, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk provides a Working Capital Credit facility to the Company amounting to Rp.750,000,000,000 with an interest rate of 8.00% per annum. The loan term is 36 months from the signing of the credit agreement and will mature on September 30, 2024. The loan is intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

**PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
(lanjutan)**

Berdasarkan Akta Perjanjian Mudharabah Muqayaddah No. 87 tanggal 30 Juni 2021, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - melalui Unit Syariah nya memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp500.000.000.000. Nisbah bagi hasil untuk PT Bank BTN 18,50% dan Perusahaan 81,50% setara IRR 9,00% per tahun. Jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani akad dan akan berakhir pada 30 Juni 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan untuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya Mekaar syariah. Perusahaan wajib menjaga kualitas *gearing ratio* maksimal 10x, *Current ratio* diatas 120%, *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 9 tanggal 12 Maret 2021, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp500.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 8,75% per tahun. Jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 12 Maret 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 021/PK-SWAD/JKH.UT/BCSU/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp500.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 0,30% per tahun. Jangka waktu pinjaman 30 hari sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 30 Januari 2021 dan telah dilunasi pada 29 Januari 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 37 tanggal 20 Oktober 2020, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp750.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 9,20% per tahun. Jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada bulan Oktober 2023. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Gearing Ratio* maksimal 10x, *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* produk Mekaar tidak lebih dari 5%.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

**PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
(continued)**

Based on the Deed of Mudharabah Muqayaddah Agreement No. 87 dated June 30, 2021, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - through its Sharia Unit provided a Working Capital facility to the Company in the amount of Rp500,000,000,000. The profit sharing ratio for PT Bank BTN is 18.50% and the Company is 81.50%, equivalent to an IRR of 9.00% per annum. The loan period is 36 months from the signing of the contract and will mature on June 30, 2024. The loan is intended for financing based on sharia principles to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), especially Mekaar sharia. Companies are required to maintain a maximum gearing ratio of 10x, Current ratio above 120%, Debt to Equity Ratio (DER) a maximum of 10x and Non-Performing Loan for the entire product not more than 5%.

Based on the Working Capital Credit Agreement Deed No. 9 dated March 12, 2021, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan and Sulawesi Barat Jakarta Branch provided a Working Capital Credit facility to the Company amounting to Rp500,000,000,000 with an interest rate of 8.75% per annum with a loan term of 12 months from the signing of the credit agreement and will mature on March 12, 2022. The loan is intended as additional working capital for credit distribution for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 021/PK-SWAD/JKH.UT/BCSU/XII/2020 dated December 30, 2020, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk provides Working Capital Credit facilities to the Company amounting to Rp500,000,000,000 with an interest rate of 0.30% per annum. Loan period of 30 days from the signing of the credit agreement and will mature on January 30, 2021 and has been fully paid on January 29, 2021. The loan is intended as an additional working capital for the distribution of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) loans.

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 37 dated October 20, 2020, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk provides Working Capital Credit facilities to the Company amounting to Rp750,000,000,000 with an interest rate of 9.20% per annum. Loan period of 36 months from the signing of the credit agreement and will mature on October 2023. The loan is intended as an additional working capital for the distribution of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) loans. The Company is required to maintain maximum Gearing Ratio of 10x, maximum Debt to Equity Ratio (DER) of 10x and Non-Performing Loan quality of the Mekaar product not more than 5%.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

**PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
(lanjutan)**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 41 tanggal 19 Desember 2018, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp250.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 9,50% per tahun. Jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada bulan Desember 2021. Perjanjian ini terakhir diubah dengan amandemen 1 Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perjanjian ini terakhir diubah dengan akta perjanjian No. 8 tanggal 12 Maret 2021 tentang syarat *covenant* yang berlaku. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Interest Coverage Ratio* diatas 100% dan *Gearing Ratio* maksimal 10x.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 1 tanggal 13 September 2018, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp500.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 8,75% per tahun. Jangka waktu pinjaman 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah diperpanjang dengan akta No. 5 tanggal 13 September 2020 yang akan berakhir pada bulan September 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perjanjian ini terakhir diubah dengan akta perjanjian No. 7 tanggal 12 Maret 2021 tentang syarat *covenant* yang berlaku. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Interest Coverage Ratio* diatas 100% dan *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.581.656.862.735 dan Rp845.616.110.558.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian No. 458 tanggal 16 November 2021 Bank BNI memberikan tambahan fasilitas sebesar Rp250.000.000.000 dengan bunga 8,5% sehingga total plafond menjadi Rp1.000.000.000.000, dengan jangka waktu fasilitas 36 bulan. Dana tersebut untuk pembiayaan ULaMM dan Mekaar. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Gearing Ratio* maksimal 10x, *Current Ratio* minimal 1.2x, dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 3% net dan jatuh tempo fasilitas berakhir pada bulan November 2022.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

**PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
(continued)**

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 41 dated December 19, 2018, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk provides Working Capital Credit facilities to the Company amounting to Rp250,000,000,000 with an interest rate of 9.50% per annum. Loan period of 36 months from the signing of the credit agreement and will mature on December 2021. The loan is intended as an additional working capital for the distribution of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) loans. This agreement was last amended with deed of agreement No. 8 dated March 12, 2021 concerning the covenants applied. The Company is required to maintain the overall Interest Coverage Ratio above 100% and maximum Gearing Ratio of 10x.

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 1 dated September 13, 2018, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk provides Working Capital Credit facilities to the Company amounting to Rp500,000,000,000 with an interest rate of 8.75% per annum. Loan period of 24 months from the signing of the credit agreement and has been extended with deed No. 5 dated September 13, 2020 will mature on September 2022. The loan is intended as an additional working capital for the distribution of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) loans. This agreement was last amended with deed of agreement No. 7 dated March 12, 2021 concerning the covenants applied. The Company is required to maintain the overall Interest Coverage Ratio above 100% and maximum Debt to Equity Ratio (DER) of 10x.

Total payment of this loan for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp1,581,656,862,735 and Rp845,616,110,558, respectively.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Based on the Deed of Agreement No. 458 dated November 16, 2021, Bank BNI provides an additional facility of Rp250,000,000,000 with an interest of 8.5% so that the total ceiling becomes Rp1,000,000,000,000, with a term of 36 months. The funds will be used to finance ULaMM and Mekaar. The company is required to maintain the quality of the Gearing Ratio of a maximum of 10x, Current Ratio of at least 1.2x, and Non-Performing Loan for the entire product not more than 3% nett and the maturity of the facility ends in November 2022.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
(lanjutan)**

Berdasarkan Akta perjanjian No 2 tanggal 5 Agustus 2020 Bank BNI menyediakan pinjaman modal kerja dengan total plafon Rp750.000.000.000 yang bersifat revolving, dengan jangka waktu fasilitas 12 bulan. Dana tersebut untuk pembiayaan ULaMM dan Mekaar. Perusahaan wajib menjaga kualitas *gearing ratio* maksimal 10x, *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% selama tiga bulan berturut-turut dan telah diperpanjang berdasarkan Addendum Akad No. 2 tanggal 30 Juni 2021.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp330.888.836.202 dan Rp386.070.787.807.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 37 tanggal 23 Februari 2021, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp1.000.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 8,50% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 22 Februari 2023. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10x dan kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 89 tanggal 15 Mei 2019, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp1.500.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 8,50% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman maksimal 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah dilunasi pada tanggal 14 Mei 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Gearing Ratio* maksimal 8x dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% selama tiga bulan berturut-turut.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
(continued)**

Based on the Deed of Agreement No. 2 dated August 5, 2020, Bank BNI provides a revolving working capital loan with a total ceiling of Rp750,000,000,000, with a term of 12 months. The funds will be used to finance ULaMM and Mekaar. The company is required to maintain a maximum *gearing ratio* quality of 10x, a maximum *Debt to Equity Ratio (DER)* of 10x and a *Non-Performing Loan* for the entire product of no more than 5% for three consecutive months and has been extended based on the Addendum to the Akad No. 2 on June 30, 2021.

Total payment of this loan for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp330,888,836,202 and Rp386,070,787,807, respectively.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Based on the Deed Working Capital Credit Agreement No. 37 dated February 23, 2021, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk provided a Working Capital Credit facility to the Company amounting to Rp1,000,000,000,000 with an interest rate of 8.50% *fixed* per annum with a loan term of 24 months from the signing of the credit agreement and will mature on February 22, 2023. The loan is intended as additional working capital for credit distribution for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The company is obliged to maintain *Gearing Ratio* maximum 10x and the quality of the *Non-Performing Loan* as a whole product not more than 5%.

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 89 dated May 15, 2019, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk provided a Working Capital Credit Facility to the Company in the amount of Rp1,500,000,000,000 with an interest rate of 8.50% *fixed* per annum with a maximum loan term of 24 month since the credit agreement was signed and fully paid on May 14, 2021. The loan is intended as additional working capital for micro and small business loans (MSMEs). The Company is required to maintain maximum *Gearing Ratio* of 8x and overall *Non-Performing Loan* quality of the product no more than 5% for three consecutive months.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lanjutan)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 36 tanggal 20 Agustus 2018, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp800.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 8,35% fixed per tahun dengan jangka waktu pinjaman maksimal 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah dilunasi pada tanggal 23 April 2020. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *gearing ratio* maksimal 8x dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% selama tiga bulan berturut-turut

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp978.778.698.975 dan Rp1.074.234.877.497.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Perjanjian Modal Kerja No. 71 tanggal 23 Desember 2021, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) W/A 4 dan W/A 5 dengan plafon kredit masing-masing sebesar Rp2.000.000.000.000. Jangka waktu maksimal 24 bulan dan 36 bulan yang masing-masing ditujukan untuk tambahan modal kerja penyaluran kredit Bisnis Mekaar dan *replacement* pinjaman existing dari bank lain dengan suku bunga sebesar 5%. Perusahaan harus menjaga rasio keuangan sesuai dengan POJK 16/POJK.05/2019 tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 111 tanggal 28 Desember 2018, perihal penandatanganan fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berupa Kredit Modal Kerja sebesar Rp300.000.000.000 untuk tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jangka waktu fasilitas kredit 48 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada tanggal 28 Desember 2022. Suku bunga sebesar 9,50% per tahun dengan *upfront fee* sebesar 0,25% dari plafon kredit. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Gearing Ratio* maksimal 10x, *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% selama tiga bulan berturut-turut.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (continued)

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 36 dated August 20, 2018, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk provided a Working Capital Credit Facility to the Company in the amount of Rp800,000,000,000 with an interest rate of 8.35% fixed per year with a maximum loan term of 24 month since the credit agreement was signed and has been fully paid on April 23, 2020. The loan is intended as additional working capital for micro and small business loans (MSMEs). The company is required to maintain maximum gearing ratio of 8x and overall Non-Performing Loan quality of the product no more than 5% for three consecutive months.

Total payment of this loan for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp978,778,698,975 and Rp1,074,234,877,497, respectively.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Based on the Working Capital Agreement No. 71 dated December 23, 2021, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk provides a Working Capital Credit (KMK) W/A 4 and W/A 5 facilities with a credit limit of Rp2,000,000,000,000, respectively. Maximum period of 24 months and 36 months which is intended for additional working capital for Mekaar Business lending and replacement of existing loans from other banks, respectively, with an interest rate of 5%. Companies must maintain financial ratios in accordance with POJK 16/POJK.05/2019 concerning Supervision of PT Permodalan Nasional Madani.

Based on the Agreement Deed of Working Capital Credit No. 111 dated December 28, 2018, regarding the signing of a credit facility from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk in the form of Working Capital Credit of Rp300,000,000,000 for additional working capital for Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) lending. The credit facility period is 48 months after the credit agreement is signed and will mature on December 28, 2022. The interest rate is 9.50% per annum with an upfront fee of 0.25% of the credit limit. The Company is required to maintain maximum Gearing Ratio of 10x, maximum Debt to Equity Ratio (DER) of 10x and Non-Performing Loan quality of all product not more than 5% for three consecutive months.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
(lanjutan)**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 37 tanggal 30 November 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berupa Kredit Modal Kerja sebesar Rp500.000.000.000 untuk tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jangka waktu fasilitas kredit 48 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada tanggal 30 November 2022. Suku bunga sebesar 9,50% per tahun dengan *upfront fee* sebesar 0,25% dari plafon kredit. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Gearing Ratio* maksimal 10x, *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% selama tiga bulan berturut-turut.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 46 tanggal 29 Juli 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berupa Kredit Modal Kerja sebesar Rp500.000.000.000 untuk tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jangka waktu fasilitas kredit 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah diperpanjang dengan akta No. 10 tanggal 5 September 2017 dan telah dilunasi pada tanggal 29 Juli 2021. Tingkat suku bunga sebesar 10,00% per tahun dengan *upfront fee* sebesar 0,25% dari plafon kredit. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% selama tiga bulan berturut-turut.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp266.666.666.665 dan Rp3.125.000.000.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 30 tanggal 9 Juni 2021, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) memberikan fasilitas kredit modal kerja dengan plafon maksimal sebesar Rp200.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 8,50% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 48 bulan dan akan berakhir pada tanggal 9 Juni 2025. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp22.816.666.671 dan nihil.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
(continued)**

Based on the Agreement on Working Capital Loan No. 37 dated November 30, 2018, the Company obtained a credit facility from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk in the form of Working Capital Credit of Rp500,000,000,000 for additional working capital for the distribution of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) loans. The credit facility period is 48 months after the credit agreement is signed and will mature on November 30, 2022. The interest rate is 9.50% per annum with an *upfront fee* of 0.25% of the credit limit. The Company is required to maintain maximum *Gearing Ratio* of 10x, maximum *Debt to Equity Ratio (DER)* of 10x and *Non-Performing Loan* quality of all product not more than 5% for three consecutive months.

Based on the Deed of Working Capital Loan Agreement No. 46 dated July 29, 2016, the Company obtained a credit facility from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk in the form of Working Capital Credit amounting to Rp500,000,000,000 for additional working capital for Micro Small and Medium Enterprises (MSME). Loan facility period of 12 months from the signing of credit agreement and has been extended with deed No. 10 dated September 5, 2017 and fully paid on July 29, 2021. Interest rate of 10.00% per annum with an *upfront fee* of 0.25% of the credit limit. The Company is required to maintain maximum *Debt to Equity Ratio (DER)* of 10x and *Non-Performing Loan* quality of all product not more than 5% for three consecutive months.

Total payment of this loan for the periods ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp266,666,666,665 and Rp3,125,000,000, respectively.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Based on the Deed of Credit Agreement No. 30 dated June 9, 2021, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) provides a working capital credit facility with a maximum limit of Rp200,000,000,000 with an interest rate of 8.50% per year with a loan term of 48 months and will mature on June 9, 2025. The funds are for financing micro and small businesses.

Total payment of this loan for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp22,816,666,671 and nil, respectively.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

Lembaga Pengelola Dana Bergulir - KUMKM

Pada tahun 2019, PT PNM Ventura Syariah memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) - KUMKM berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja No. 013/SP3/LPDB/2019 sebesar Rp30.000.000.000 bersifat *non-revolving* yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura. Tingkat *margin* sebesar 40% : 60% dari pendapatan kotor dengan jangka waktu 4 tahun, margin dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan.

PT Bank DKI

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 10 Mei 2021 antara PT Bank DKI dengan perusahaan, perusahaan dengan plafon Rp500.000.000.000, jangka waktu 36 bulan serta tingkat suku bunga *fixed* sebesar 9,25% per tahun dan akan berakhir pada 10 Mei 2024. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM dan Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan gross* maksimal 5%.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 9 tanggal 10 Mei 2021, PT Bank DKI - melalui Unit Usaha Syariah memberikan pinjaman dengan plafon sebesar Rp500.000.000.000. Jangka waktu fasilitas pinjaman maksimal 42 bulan dengan jangka waktu pelunasan maksimal 36 bulan dengan nisbah bagi hasil sebesar 9,25% dan akan berakhir pada 10 Mei 2024. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar Syariah dan Perusahaan wajib *gearing ratio* maksimal 10x, *current ratio* sebesar 120% dan *Non-Performing Loan gross* maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 44 tanggal 19 November 2020 antara PT Bank DKI dengan Perusahaan, pinjaman dengan plafon Rp300.000.000.000, jangka waktu fasilitas 42 bulan dengan tenor kredit 36 bulan serta suku bunga *fixed* sebesar 9,50% per tahun dan akan berakhir pada 19 Mei 2024. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM. Perusahaan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

Revolving Fund Management Institution

In 2019, PT PNM Ventura Syariah working capital credit facility from Management Institution - CMSMEs pursuant to Working Capital Lending approval No. 013/SP3/LPDB/2019 amounting Rp30,000,000,000 non-revolving be used for working capital venture capital financing. Interest rate of 40% : 60% for gross revenue for a period of 4 years, interest is calculated every end of the month.

PT Bank DKI

Based on the Deed of Credit Agreement No. 11 dated May 10, 2021 between PT Bank DKI and the Company, the Company obtained a credit limit maximum of Rp500,000,000,000, a period of 36 months and a fixed interest rate of 9.25% per annum and will mature on May 10, 2024. The funds are for micro and small business financing through ULaMM and the Company is required to maintain a maximum *gearing ratio* of 10x and a maximum gross *Non-Performing Loan* of 5%.

Based on the Letter of Credit Agreement No. 9 dated 10 May 2021, PT Bank DKI - through the Sharia Business Unit provided a loan with a credit limit a maximum of Rp500,000,000,000. The maximum term of the loan facility is 42 months with a maximum repayment period of 36 months with a profit sharing ratio of 9.25% and will mature on May 10, 2024. The funds are for micro and small business financing through Mekaar Syariah and the Company is required to have a maximum *gearing ratio* of 10x, a *current ratio* of 120% and a maximum gross *Non-Performing Loan* of 5%.

Based on the Deed of Credit Agreement No. 44 dated November 19, 2020 between PT Bank DKI and the Company, the Company obtained loan with a credit limit a maximum of Rp300,000,000,000. Loan facility period of 42 months with credit tenor 36 months and a fixed interest rate of 9.50% per annum and will mature on May 19, 2024. The funds are for financing micro and small businesses through Mekaar and ULaMM. The Company must maintain a maximum *Gearing Ratio* of 10x and maximum *Non-Performing Loan* of 5%.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

PT Bank DKI (lanjutan)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 42 tanggal 19 November 2020, PT Bank DKI - melalui Unit Usaha Syariah memberikan pinjaman dengan plafon Rp300.000.000.000. Jangka waktu 42 bulan dengan tenor kredit 36 bulan dan akan berakhir di tanggal 19 Mei 2024. Nisbah bagi hasil untuk PT Bank DKI 63,33% dan Perusahaan 36,67%. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM syariah. Perusahaan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 31 tanggal 30 Oktober 2019, PT Bank DKI - melalui Unit Usaha Syariah memberikan pinjaman dengan plafon Rp300.000.000.000. Jangka waktu fasilitas pinjaman 42 bulan dengan jangka waktu pelunasan 36 bulan dan akan berakhir pada tanggal 30 April 2022. Nisbah bagi hasil untuk PT Bank DKI 66,67% dan Perusahaan 33,33%. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM dan Perusahaan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 34 tanggal 29 Oktober 2019, PT Bank DKI memberikan pinjaman dengan plafon Rp300.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 42 bulan dan jangka waktu pelunasan 36 bulan. Tingkat suku bunga *fixed* sebesar 10,00% per tahun dan akan berakhir pada tanggal 30 April 2022. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM dan Perusahaan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* gross maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 4 tanggal 5 September 2018, PT Bank DKI dengan memberikan pinjaman dengan plafon Rp200.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 42 bulan dan jangka waktu pelunasan 36 bulan. Tingkat suku bunga *fixed* sebesar 9,00% per tahun dan akan berakhir pada tanggal 5 Maret 2022. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM dan Perusahaan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* gross maksimal 5%.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

PT Bank DKI (continued)

Based on the Deed of Credit Agreement No. 42 dated November 19, 2020, PT Bank DKI - through Sharia Business Unit provides loan with a credit limit a maximum of Rp300,000,000,000. Loan facility period maximum 42 months with credit tenor 36 months and will mature on May 19, 2024. Profit sharing for PT Bank DKI 63.33% and Company 36.67%. The funds are for financing micro and small businesses through Mekaar and ULaMM syariah. The Company must maintain a maximum Gearing Ratio of 10x and maximum Non-Performing Loan of 5%.

Based on the Deed of Credit Agreement No. 31 dated October 30, 2019, PT Bank DKI - through Sharia Business Unit provides loan with a credit limit of Rp300,000,000,000. Loan facilities period 42 months with repayment period 36 months and will mature on April 30, 2022. Profit sharing for PT Bank DKI 66.67% and Company 33.33%. The funds are for financing micro and small businesses through Mekaar and ULaMM and the Company must maintain a maximum Gearing Ratio of 10x and maximum Non-Performing Loan of 5%.

Based on the Deed of Credit Agreement No. 34 dated October 29, 2019, PT Bank DKI provides loan with a credit limit of Rp300,000,000,000 with loan facilities period 42 months and repayment period 36 months. Fixed interest rate of 10.00% per annum and will mature on April 30, 2022. The funds are for financing micro and small businesses through Mekaar and ULaMM and the Company must maintain a maximum Gearing Ratio of 10x and Non-Performing Loan of 5%.

Based on the Deed of Credit Agreement No. 4 dated September 5, 2018, PT Bank DKI provides loan with a credit limit of Rp200,000,000,000 with loan facilities period 42 months and repayment period 36 months. Fixed interest rate of 9.00% per annum and will mature on March 5, 2022. The funds are for financing micro and small businesses through ULaMM and the Company must maintain a maximum Gearing Ratio of 10x and Non-Performing Loan of 5%.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

PT Bank DKI (lanjutan)

Berdasarkan surat perjanjian kredit tanggal No. 65 tanggal 29 November 2017 antara PT Bank DKI dengan Perusahaan, pinjaman dengan plafon Rp100.000.000.000, jangka waktu 36 bulan serta tingkat suku bunga *fixed* sebesar 8,95% per tahun dan sudah dilunasi pada 30 November 2020. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM dan Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 5 September 2018, PT Bank DKI - melalui Unit Usaha Syariah memberikan pinjaman dengan plafon sebesar Rp100.000.000.000. Jangka waktu fasilitas pinjaman 42 bulan dengan jangka waktu pelunasan 36 bulan dan akan berakhir di bulan September 2021. Nisbah bagi hasil untuk PT Bank DKI 60% dan Perusahaan 40%. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM Syariah dan Perusahaan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

Berdasarkan surat Perjanjian Kredit No. 07 tanggal 5 September 2018, PT Bank DKI - melalui Unit Usaha Syariah memberikan pinjaman dengan plafon sebesar Rp100.000.000.000. Jangka waktu fasilitas pinjaman 18 bulan dengan jangka waktu pelunasan 12 bulan dan sudah dilunasi pada bulan September 2019. Nisbah bagi hasil untuk PT Bank DKI 60% dan Perusahaan 40%. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar Syariah dan Perusahaan wajib menjaga *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

Berdasarkan akta perjanjian kredit No. 75 tanggal 13 Juni 2017 antara PT Bank DKI dengan perusahaan, perusahaan dengan plafon Rp100.000.000.000, jangka waktu 36 bulan serta tingkat suku bunga *fixed* sebesar 9,00% per tahun dan sudah dilunasi pada 15 Juni 2020. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM dan Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan gross* maksimal 5%.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp641.673.765.891 dan Rp385.216.432.171.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

PT Bank DKI (continued)

Based on the letter of credit agreement No. 65 dated November 29, 2017 between PT Bank DKI and the Company, loan with a credit limit of Rp100,000,000,000, a period of 36 months and a fixed interest rate of 8.95% per year and has been fully paid on November 30, 2020. The fund is for micro and small business financing through ULaMM and the Company must maintain a maximum *gearing ratio* of 10x.

Based on the Deed of Credit Agreement No. 10 dated September 5, 2018, PT Bank DKI - through Sharia Business Unit provides loan with a credit limit of Rp100,000,000,000. Loan facilities period 42 months with repayment period 36 months and will mature on September, 2021. Profit sharing for PT Bank DKI 60% and Company 40%. The fund is for financing micro and small businesses through ULaMM Syariah and the Company must maintain a maximum *Gearing Ratio* of 10x and maximum *Non-Performing Loan* of 5%.

Based on the letter of Credit Agreement No. 07 dated September 5, 2018, PT Bank DKI - Sharia Business Unit provides loan with a credit limit of Rp100,000,000,000. Loan facilities with period of 18 months with repayment period of 12 months and has been fully paid on September 2019. Profit sharing for PT Bank DKI 60% and Company 40%. The fund is for financing micro and small businesses through Mekaar Syariah and the Company must maintain a maximum *Non-Performing Loan* of 5%.

Based on the deed of credit agreement No. 75 dated June 13, 2017 between PT Bank DKI and the Company obtained loan with a credit limit of Rp100,000,000,000, a period of 36 months and a fixed interest rate of 9.00% per year and has been fully paid on June 15, 2020. The fund is for micro and small business financing through ULaMM and the Company must maintain a maximum *gearing ratio* of 10x and *Non-Performing Loan* of 5%.

Total payment of this loan for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp641,673,765,891 and Rp385,216,432,171, respectively.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

**PT Bank Syariah Indonesia Tbk
(dahulu PT Bank BNI Syariah)**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 24 tanggal 31 Mei 2019, PT Bank BNI Syariah memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp750.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 9,50% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%. Telah dilakukan perpanjangan Fasilitas pada tanggal 29 Agustus 2020 dengan Plafond pinjaman Rp750.000.000.000 dengan tingkat suku bunga 9,50% *fixed* pertahun dan jangka waktu pinjaman 12 bulan.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp794.939.816.761 dan Rp752.661.315.598.

PT Bank Permata Tbk

Berdasarkan akta perjanjian kredit No.12 tanggal 22 September 2021, PT Bank Permata Tbk memberikan fasilitas kredit modal kerja dengan plafond maksimal sebesar Rp300.000.000.000 dengan bagi hasil sebesar 8,35% per tahun dan akan berakhir pada bulan September 2022. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar. Perusahaan wajib menjaga *current ratio* min 1,2 x dan *gearing ratio* maksimal 10x serta menjaga NPL maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.5 tanggal 15 April 2021, PT Bank Permata Tbk memberikan fasilitas kredit modal kerja dengan plafond maksimal sebesar Rp500.000.000.000 dengan bagi hasil sebesar 8,75% per tahun dan akan berakhir pada bulan April 2022. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM Syariah. Perusahaan wajib menjaga *current ratio* minimal 1,2x dan *gearing ratio* maksimal 10x serta menjaga NPL maksimal 5%.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

**PT Bank Syariah Indonesia Tbk
(formerly PT Bank BNI Syariah)**

Based on the Agreement Deed of Working Capital Credit Number 24 dated May 31, 2019, PT Bank BNI Syariah provides a Working Capital Credit facility to the Company in the amount of Rp750,000,000,000 with an interest rate of 9.50% *fixed* per year with a loan term of 12 months from the signing of the credit agreement. The loan is intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The company is required to maintain the quality of Non-Performing Loans for the entire product of no more than 5%. The facility has been extended on August 29, 2020 with a loan ceiling of Rp750,000,000,000 with an interest rate of 9.50% *fixed* per year and a loan term of 12 months.

Total payment of this loan for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp794,939,816,761 and Rp752,661,315,598, respectively.

PT Bank Permata Tbk

Based on the credit agreement deed No.12 dated September 22, 2021, PT Bank Permata Tbk provides a working capital credit facility with a maximum limit of Rp300,000,000,000 with a profit sharing of 8.35% per annum and will expire in September 2022. The funds are for financing micro and small enterprises through Mekaar. The company is required to maintain a minimum *current ratio* of 1.2 x and a maximum *gearing ratio* of 10x and maintain a maximum NPL of 5%.

Based on the Deed of Credit Agreement No.5 dated April 15, 2021, PT Bank Permata Tbk provides a working capital credit facility with a maximum limit of Rp500,000,000,000 with a profit sharing of 8.75% per annum and will mature on April 2022. The funds are for financing micro and small businesses through Mekaar and ULaMM Syariah. The company is required to maintain a minimum *current ratio* of 1.2x and a maximum *gearing ratio* of 10x and maintain a maximum NPL of 5%.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

PT Bank Permata Tbk (lanjutan)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 21 Oktober 2020, PT Bank Permata Tbk memberikan fasilitas Musyarakah Mutanaqisah - MMQ II dengan plafon maksimal sebesar Rp100.000.000.000 dengan bagi hasil sebesar 9% per tahun dan telah dilunasi pada bulan Oktober 2021. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM Syariah. Perusahaan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* di atas 90 hari maksimal 5%.

Berdasarkan akta perjanjian kredit No. 22 tanggal 27 Juli 2018, PT Bank Permata Tbk memberikan pinjaman rekening koran dengan plafon maksimal sebesar Rp50.000.000.000 dengan tingkat suku bunga 9,75% per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM. Pinjaman ini mengalami perpanjangan untuk jangka waktu kredit, dengan Surat Penawaran Fasilitas Perbankan No. 343/BP/LOO/CRC-JKT/WB/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 dan telah dilunasi pada 27 Juli 2021. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* di atas 90 hari maksimal 5%.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp479.166.666.666 dan Rp125.000.000.000.

PT Bank Mega Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 31 tanggal 15 November 2021, PT Bank Mega Tbk memberikan fasilitas kepada Perusahaan sebesar Rp1.000.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 8% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan untuk Mekaar dan akan berakhir pada November 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%, *current ratio* minimal 1,2x, *gearing ratio* maksimal 10x, *financing to asset ratio* min 65%, *micro financing ratio* min 50%.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

PT Bank Permata Tbk (continued)

Based on the Deed of Credit Agreement No. 10 dated October 21, 2020, PT Bank Permata Tbk provides Musyarakah Mutanaqisah - MMQ II Facilities with a maximum credit limit amount of Rp100,000,000,000, with profit sharing 9% per annum and has been fully paid on October 2021. The funds are for financing micro and small businesses through Mekaar dan ULaMM Syariah. The Company must maintain a maximum *Gearing Ratio* of 10x and *Non-Performing Loan* arrears above 90 days a maximum of 5%.

Based on the deed of credit agreement No. 22 dated July 27, 2018, PT Bank Permata Tbk provides a current account loan with a credit limit of a maximum of Rp50,000,000,000 interest rate 9.75% per annum. The funds are for financing micro and small businesses through ULaMM. This loan was extended for credit term, with "Surat Penawaran Fasilitas Perbankan" No. 343/BP/LOO/CRC-JKT/WB/X/2020 dated October 1, 2020 and has been fully paid on July 27, 2021. The Company must maintain a maximum *gearing ratio* of 10x and *Non-Performing Loan* arrears above 90 days a maximum of 5%.

Total payment of this loan for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp479,166,666,666 and Rp125,000,000,000, respectively.

PT Bank Mega Tbk

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement Number 31 dated November 15, 2021, PT Bank Mega Tbk provided a facility to the Company amounting to Rp1,000,000,000,000 with an interest rate of 8% per annum with a loan term of 12 months for Mekaar and will mature on November 2022. The loan is intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The company is required to maintain the quality of the *Non-Performing Loan* of the entire product not more than 5%, minimum *current ratio* of 1.2x, maximum *gearing ratio* of 10x, *financing to asset ratio* of min 65%, *micro financing ratio* of min 50%.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

PT Bank Mega Tbk (lanjutan)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 30 tanggal 8 Desember 2020, PT Bank Mega Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal kerja sebesar Rp500.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10,75% *fixed* per pencairan dengan jangka waktu pinjaman ULaMM 48 Bulan dan Mekaar 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada Desember 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Gearing Ratio* tidak lebih dari 10x.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp320.833.333.326 dan nihil.

PT Bank Mega Syariah

Berdasarkan addendum Perjanjian Penyediaan Fasilitas (Wa'd) No. 04 tanggal 2 Februari 2021, PT Bank Mega Syariah memberikan tambahan plafon sebesar Rp65.000.000.000. Nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan per pencairan dengan jangka waktu maksimal 36 bulan dan akan berakhir pada 2 Februari 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan Akta Perjanjian Penyediaan Fasilitas (Wa'd) No. 33 tanggal 28 November 2019, PT Bank Mega Syariah memberikan fasilitas Mudharabah kepada Perusahaan sebesar Rp235.000.000.000 dengan bagi hasil sebesar 11% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan untuk Mekaar dan 36 bulan untuk ULaMM. Fasilitas Mekaar telah diperpanjang sampai dengan 20 November 2021 dan ULaMM akan berakhir di bulan November 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp48.848.387.314 dan Rp248.111.798.383.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

PT Bank Mega Tbk (continued)

Based on the Working Capital Credit Agreement Deed No. 30 dated December 8, 2020, PT Bank Mega Tbk provides working capital credit facility amounting to Rp500,000,000,000 with an interest rate of 10.75% per drawdown with a loan term of 48 months for ULaMM and 24 months for Mekaar from the signing of the credit agreement and will mature on December 2022. The loan is intended as additional working capital for credit distribution for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The company is obliged to maintain the quality of the *Gearing Ratio* not more than 10x.

Total payment of this loan for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp320,833,333,326 and nil, respectively.

PT Bank Mega Syariah

Based on the addendum to the Facility Provision Agreement (Wa'd) No. 04 dated February 2, 2021, PT Bank Mega Syariah provides an additional limit amounting to Rp65,000,000,000. Profit sharing ratio according to the agreement per drawdown with a maximum period of 36 months and will mature on February 2, 2024. The loan is intended as additional working capital for Micro, Small and Medium Enterprises loans (MSMEs).

Based on the Facility Provision Agreement (Wa'd) No. 33 dated November 28, 2019, PT Bank Mega Syariah provides the Mudharabah facility to the Company in the amount of Rp235,000,000,000 with an profit sharing of 11% fixed per annum with a loan period of 12 months for Mekaar and 36 months for ULaMM. Mekaar facilities has been extended until November 20, 2021 and ULaMM will mature on November 2022. The loan is intended as additional working capital for Micro, Small and Medium Enterprises loans (MSMEs). The Company is obliged to maintain the overall *Non-Performing Loan* quality of the product no more than 5%.

Total payment of this loan for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp48,848,387,314 and Rp248,111,798,383, respectively.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

PT Bank Victoria International Tbk

PT Bank Victoria International Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 59 tanggal 23 Maret 2021, PT Bank Victoria International Tbk memberikan fasilitas Kredit *Money Market Line* kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan suku bunga 9% dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 12 bulan sejak penandatanganan kredit dan akan berakhir pada bulan Maret 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* maksimal tidak lebih dari 5%.

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 59 dated March 23, 2021, PT Bank Victoria International Tbk provided a Money Market line credit facility to the Company amounting to Rp100,000,000,000 with an interest rate of 9% with a loan facility period of 12 months from the signing of the loan and will mature on March 2022. The loan is intended as additional working capital for credit distribution for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The company is required to maintain the quality of the Non-Performing Loan for the entire product not more than 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 69 tanggal 23 Mei 2019, PT Bank Victoria International Tbk memberikan fasilitas Kredit *Money Market Line* kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 12 bulan sejak penandatanganan kredit. Pinjaman ini telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan addendum ketiga No. 69 tanggal 19 Mei 2020 dengan tambahan limit fasilitas kredit *Money Market Line* kepada Perusahaan menjadi sebesar Rp250.000.000.000 dan telah dilunasi pada tanggal 23 Mei 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 69 dated May 23, 2019, PT Bank Victoria International Tbk provided a Money Market Line Credit facility to the Company in the amount of Rp100,000,000,000 with a term of credit facility 12 months from the signing of the credit. This loan was amended several times, the latest by 3th addendum No. 69 dated May 19, 2020 with additional facilities credit limit of Money Market Line amounting to Rp250,000,000,000 and fully paid on May 23, 2021. The loan is intended as additional working capital for Micro, Small and Enterprises loans (MSMEs). The company is required to maintain the quality of maximum Debt to Equity Ratio (DER) of 10x and maximum Non-Performing Loans 5%.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp924.999.999.997 dan Rp300.000.000.000.

Total payment of this loan for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp924,999,999,997 and Rp300,000,000,000, respectively.

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 21 tanggal 14 Desember 2021, PT Bank BPD Kalteng memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp250.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar setara 8% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan dan akan berakhir pada Desember 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 3% dan *Gearing Ratio* maksimal 10x.

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement Number 21 dated December 14, 2021, PT Bank BPD Kalteng provided a Working Capital facility to the Company amounting to Rp250,000,000,000 with an interest rate equivalent to 8% per year with a loan term of 36 months and will mature on December 2024. The loan is intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). Companies are required to maintain the quality of the Non-Performing Loan of the entire product of no more than 3% and a maximum Gearing Ratio of 10x.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

**PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan
Tengah (lanjutan)**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 9 tanggal 07 Februari 2020, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp200.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan dan telah dilunasi pada 7 Februari 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit produk Mekaar.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 48 tanggal 20 November 2020, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp200.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan dan akan berakhir pada tanggal 20 November 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit produk Mekaar. Perusahaan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* maksimal 3% untuk produk Mekaar.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp350.000.000.007 dan Rp183.333.333.306.

**PT Bank China Construction Bank Indonesia
Tbk**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 21 tanggal 30 November 2021, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp275.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 7,25% p.a dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada November 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 3%, CCR 100%, *gearing ratio* maksimal 8x, NPL > 90 hari total maksimal 5%.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

**PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan
Tengah (continued)**

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 9 dated February 7, 2020, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah provides Working Capital facilities to the Company amounting to Rp200,000,000,000 with an interest rate of 10% fixed per annum with a loan period of 12 months and has been fully paid on February 7, 2021. The loan is intended as additional working capital for Mekaar product.

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 48 dated November 20, 2020, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah provides Working Capital facilities to the Company in the amount of Rp200,000,000,000 with an interest rate of 10% fixed per annum with a loan period of 12 months and will mature on November 20, 2021. The loan is intended as additional working capital for Mekaar product. The Company must maintain a maximum *Gearing Ratio* of 10x and *Non-Performing Loan* arrears a maximum of 3% for product Mekaar.

Total payment of this loan for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp350,000,000,007 and Rp183,333,333,306, respectively.

**PT Bank China Construction Bank Indonesia
Tbk**

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 21 dated November 30, 2021, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk provided a Working Capital Credit facility to the Company amounting to Rp275,000,000,000 with an interest rate of 7.25% pa with a loan term of 12 months from signed credit agreement and will mature on November 2022. The loan is intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The company is obliged to maintain the quality of the *Non-Performing Loan* of the entire product not more than 3%, CCR 100%, *gearing ratio* maximum 8x, NPL > 90 days a maximum of 5%.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

**PT Bank China Construction Bank Indonesia
Tbk (lanjutan)**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 33 tanggal 23 Juni 2021, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp250.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 9,25% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan tenor angsuran 12 bulan dan akan berakhir pada 23 Juni 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 99 tanggal 30 Oktober 2019, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp80.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10,50% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah dilunasi di bulan 30 Oktober 2020. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran Mekaar. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* produk Mekaar tidak lebih dari 3%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 73 tanggal 23 Mei 2019, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp250.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10,50% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah dilunasi di bulan 23 Mei 2020. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp144.357.570.831 dan Rp174.592.057.398.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

**PT Bank China Construction Bank Indonesia
Tbk (continued)**

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 33 dated June 23, 2021, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk provided a Working Capital Credit facility to the Company amounting to Rp250,000,000,000 with an interest rate of 9.25% per annum with a loan term of 12 months from the signing of the credit agreement and installment tenor of 12 month and will mature on June 23, 2022. The loan is intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 99 dated October 30, 2019, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk provides Working Capital Credit facilities to the Company amounting to Rp80,000,000,000 with an interest rate of 10.50% per annum with a loan period of 12 months from signed credit agreement and has been fully paid on October 30, 2020. The loan is intended as additional working capital for Mekaar distribution. Companies must maintain the quality of Non-Performing Loans for Mekaar products no more than 3%.

Based on the Agreement Deed of Working Capital Credit No. 73 dated 23 May 2019, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk provides a Working Capital Credit facility to the Company in the amount of Rp250,000,000,000 with an interest rate of 10.50% per annum with a loan term of 12 months from credit agreement signed and has been fully paid on May 23, 2020. The loan is intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The company is required to maintain the quality of Non-Performing Loans for the entire product of no more than 5%.

Total payment of this loan for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp144,357,570,831 and Rp174,592,057,398 respectively.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

PT Bank JTrust Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 82 tanggal 30 Juni 2021, PT Bank JTrust Indonesia Tbk memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas 18 bulan dan tenor angsuran 12 bulan dan akan berakhir pada 30 Juni 2022. Tingkat bunga sebesar 9% *fixed* per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan modal kerja jangka pendek. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 9x dan tunggakan *Non-Performing Loan* di atas 90 hari maksimal 3%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 4 tanggal 23 Februari 2021, PT Bank JTrust Indonesia Tbk memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas 18 bulan dan tenor angsuran 12 bulan dan akan berakhir pada bulan Februari 2022. Tingkat bunga sebesar 9% *fixed* per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan modal kerja jangka pendek. Perusahaan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* di atas 90 hari maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 3 tanggal 2 Desember 2020, PT Bank JTrust Indonesia Tbk memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas 18 bulan dan tenor angsuran 12 bulan. Tingkat bunga sebesar 9% *fixed* per tahun dan telah berakhir pada bulan Desember 2021. Dana tersebut untuk pembiayaan modal kerja jangka pendek. Perusahaan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 9x dan tunggakan *Non-Performing Loan* di atas 90 hari maksimal 3%.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp231.583.906.557 dan nihil.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Mudharabah No.58 tanggal 30 November 2021, PT Bank Maybank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Pembiayaan Mudharabah kepada Perusahaan sebesar Rp390.000.000.000 dengan tingkat bagi hasil sebesar setara 7,5% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

PT Bank JTrust Indonesia Tbk

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 82 dated June 30, 2021, PT Bank JTrust Indonesia Tbk provided a Working Capital facility to the Company amounting to Rp100,000,000,000 with a term of 18 months and an installment tenor of 12 months and will mature on June 30, 2022. The interest rate is 9% fixed per annum. The funds are for short-term working capital financing. The company is required to maintain a gearing ratio of a maximum of 9x and arrears of Non-Performing Loans above 90 days at a maximum of 3%.

Based on the Deed Working Capital Credit Agreement No. 4 dated February 23, 2021, PT Bank JTrust Indonesia Tbk provided a Working Capital facility to the Company amounting to Rp100,000,000,000 with a facility period of 18 months and an installment tenor of 12 months and will mature on February 2022. Interest rate is 9% fixed per annum. The funds are used for short-term working capital financing. The company is obliged to maintain a maximum Gearing Ratio of 10x and non-performing loan arrears of more than 90 days with a maximum of 5%.

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 3 dated December 2, 2020, PT Bank JTrust Indonesia Tbk provides Working Capital facilities to the Company in the amount of Rp100,000,000,000 with loan facility period of 18 months and repayment period of 12 months. The interest rate is 9% fixed per annum and has been fully paid on December 2021. The funds are for short-term working capital financing. The Company must maintain a maximum Gearing Ratio of 9x and Non-Performing Loan arrears above 90 days a maximum of 3%.

Total payment of this loan for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp231,583,906,557 and nil, respectively.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Based on the Deed of Mudharabah Credit Agreement No. 58 dated November 30, 2021, PT Bank Maybank Indonesia Tbk provided a Mudharabah Financing facility to the Company amounting to Rp390,000,000,000 with the margin rate 7.5% per annum and 36 month facility period since the agreement have signed and credit agreement will expire in November 2024.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (lanjutan)

perjanjian kredit dan akan berakhir pada November 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Syariah. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%, *Current Ratio* minimal 1.2x, *Gearing Ratio* maksimal 10 kali.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Mudharabah No. 29 tanggal 18 Desember 2019, PT Bank Maybank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Pembiayaan Mudharabah kepada Perusahaan sebesar Rp250.000.000.000 dengan nilai bagi hasil sebesar 10,25% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada Desember 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Syariah.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Mudharabah No. 114 tanggal 27 Mei 2019, PT Bank Maybank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Pembiayaan Mudharabah kepada Perusahaan sebesar Rp250.000.000.000 dengan tingkat bagi hasil sebesar 10,75% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada Mei 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Syariah.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp166.666.666.659 dan Rp25.000.000.000.

PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 34 tanggal 28 September 2021, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Jakarta memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 8,75% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada September 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (continued)

The loan is intended as additional working capital for the distribution of Sharia Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The company is required to maintain the quality of the Non-Performing Loan of the entire product not more than 5%, the Current Ratio is at least 1.2x, the Gearing Ratio is a maximum of 10 times.

Based on the Deed of Mudharabah Credit Agreement No. 29 dated December 18, 2019, PT Bank Maybank Indonesia Tbk provided Mudharabah Financing facilities to the Company in the amount of Rp250,000,000,000 with a profit sharing of 10.25% per annum with a loan period of 36 months after the credit agreement was signed and will mature on December, 2022. The loan is intended as additional working capital for Sharia Micro and Small Medium Enterprises (MSME) lending.

Based on the Deed of Mudharabah Credit Agreement No. 114 dated May 27, 2019, PT Bank Maybank Indonesia Tbk provides a Mudharabah Financing facility to the Company in the amount of Rp250,000,000,000 at an profit sharing of 10.75% per annum with a loan term of 36 months from the signing of the credit agreement and will mature in May 2022. The loan is intended as additional working capital for Sharia Micro Small and Medium Enterprises (MSME) lending.

Total payment of this loan for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp166,666,666,659 and Rp25,000,000,000, respectively.

PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 34 dated 28 September 2021, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan and Sulawesi Barat Jakarta Branch provided a Working Capital Credit facility to the Company amounting to Rp100,000,000,000 with an interest rate of 8.75% per annum with a loan term of 36 months from the signing of the credit agreement and will mature on September 2024. The loan is intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (lanjutan)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 31 tanggal 28 September 2021, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Jakarta (UUS) memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja (Syariah) kepada Perusahaan sebesar Rp200.000.000.000 dengan nisbah setara sebesar 8,75% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada September 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 12 tanggal 18 Maret 2021, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Jakarta - melalui Unit Usaha Syariah memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pembiayaan Syariah kepada Perusahaan sebesar Rp50.000.000.000 dengan nisbah bagi hasil untuk PT Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat 55,39% dan Perusahaan 44,61%. Jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak fasilitas digunakan dan akan berakhir pada bulan Maret 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga *Gearing Ratio* 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 9 tanggal 18 Maret 2021, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Jakarta memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp150.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 9% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada bulan Maret 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 4 tanggal 11 Maret 2020, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Jakarta memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah dilunasi pada tanggal 12 Maret 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (continued)

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 31 dated 28 September 2021, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan and West Sulawesi Jakarta Branch (UUS) provided a Working Capital Credit (Syariah) facility to the Company amounting to Rp200,000,000,000 with an equivalent ratio of 8.75% per annum with a term of loan. 36 months from the signing of the credit agreement and will mature on September 2024. The loan is intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).

Based on the Deed Working Capital Credit Agreement No. 12 dated March 18, 2021, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan and Sulawesi Barat Jakarta Branch - through Sharia Business Unit provides Sharia Financing Working Capital Credit facility to the Company amounting to Rp50,000,000,000 with Profit sharing for PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan and Sulawesi Barat 55.39% and Company 44.61%. Loan term of 12 months from the drawdown of facility and will mature on March 2022. The loan is intended as additional working capital for credit distribution for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The Company must maintain *Gearing Ratio* of 10x and a maximum *Non-Performing Loan* arrears of 5%.

Based on the Deed Working Capital Credit Agreement No. 9 dated March 18, 2021, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan and Sulawesi Barat Jakarta Branch provides Working Capital Credit facility to the Company amounting to Rp150,000,000,000 with an interest rate of 9% per annum with a loan term of 12 months from the signing of the credit agreement and will mature on March 2022. The loan is intended as additional working capital for credit distribution for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 4 dated March 11, 2020, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Jakarta Branch provides Working Capital Credit facilities to the Company in the amount of Rp100,000,000,000 with an interest rate of 10% per annum with a loan period of 12 months after the credit agreement is signed and has been fully paid on March 12, 2021. The loan is intended as additional working capital for Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs).

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (lanjutan)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 24 tanggal 23 November 2018, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Jakarta memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp200.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah dilunasi pada 22 November 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp248.391.380.020 dan Rp141.059.334.398.

PT Bank BCA Syariah

Berdasarkan Addendum Akta Perjanjian Kredit No. 9 tanggal 24 Maret 2021, PT Bank BCA Syariah memberikan pinjaman modal kerja dengan plafon sebesar Rp100.000.000.000. Nisbah bagi hasil akan dicantumkan dalam setiap akad realisasi pembiayaan. Jangka waktu pinjaman 48 bulan untuk fasilitas ULaMM dan 12 bulan untuk Mekaar. Dana tersebut untuk pembiayaan Mekaar dan ULaMM Syariah. Perusahaan wajib menjaga *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Mudharabah No. 14 tanggal 3 Oktober 2019, PT Bank BCA Syariah memberikan pinjaman modal kerja dengan plafon sebesar Rp150.000.000.000. Nisbah bagi hasil akan dicantumkan dalam setiap akad realisasi pembiayaan. Pinjaman ini telah diperpanjang dengan surat perpanjangan fasilitas No. 375/ADP/2020 pada tanggal 11 November 2020 dengan jangka waktu 48 bulan untuk fasilitas ULaMM dan 12 bulan untuk Mekaar. Dana tersebut untuk pembiayaan Mekaar dan ULaMM Syariah. Perusahaan wajib menjaga *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (continued)

Based on the Agreement Deed of Working Capital Credit No. 24 dated November 23, 2018, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Jakarta Branch provides Working Capital Credit facilities to the Company in the amount of Rp200,000,000,000 with an interest rate of 10% per annum loan period of 36 months from the signing of the credit agreement and has been fully paid on November 22, 2021. The loan is intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The Company must maintain *gearing ratio* of 10x and a maximum *Non-Performing Loan arrears* of 5%.

Total payment of this loan for the periods ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp248,391,380,020 and Rp141,059,334,398, respectively.

PT Bank BCA Syariah

Based on the Deed Addendum Credit Agreement No. 9 dated March 24, 2021, PT Bank BCA Syariah provides a working capital loan with credit limit amounting Rp100,000,000,000. The profit sharing ratio will be stated in each financing realization contract. Loan period of 48 months for ULaMM facilities and 12 months for Mekaar. The funds are used for financing Mekaar and ULaMM Syariah. Companies are required to maintain a maximum *Debt to Equity Ratio (DER)* of 10x and a maximum of 5% non-performing loan arrears.

Based on the Deed of Mudharabah Credit Agreement No. 14 dated October 3, 2019, PT Bank BCA Syariah provided a loan of working capital with a credit limit of Rp150,000,000,000. Profit sharing will be stated in each financing contract realization. This loan had been extended with letter of credit No. 375/ADP/2020 dated November 11, 2020 with a period 48 months for ULaMM and 12 months for Mekaar. The funds are for financing Mekaar and Sharia ULaMM. The company must maintain a maximum *Debt to Equity Ratio (DER)* of 10x and a maximum *Non-Performing Loan arrears* of 5%.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

PT Bank BCA Syariah (lanjutan)

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp80.891.032.605 dan Rp105.658.831.516.

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Uncommitted Facility Line No. 1 tanggal 1 September 2021, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) memberikan fasilitas kredit perumahan dengan plafon maksimal sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah) yang terdiri dari Rp1.500.000.000.000 fasilitas konvensional dan Rp500.000.000.000 fasilitas syariah, dengan suku bunga setara 6,50% p.a fixed dengan jangka waktu 36 bulan, Perusahaan wajib menjaga *current ratio* minimal 120%, *gearing ratio* maksimal 10 kali, NPL nett maksimal seluruh kredit 5%, *return of asset* minimal 0,5%, *return of equity* minimal 5% dan beban operasional berbanding pendapatan operasional kurang dari 100%.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 03 tanggal 8 November 2021, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit dengan plafon maksimal sebesar Rp300.000.000.000 dengan bagi hasil setara 7,5% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan dan akan berakhir pada tanggal November 2022. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar Syariah. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 9x dan kualitas *Non-Performance Financing* untuk produk Mekaar tidak lebih dari 2% dan *Current Ratio* minimal 1.2 x

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 30 November 2020, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit dengan plafon maksimal sebesar Rp200.000.000.000 dengan bagi hasil setara 9,75% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan dan telah dilunasi pada tanggal 30 November 2021. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar Syariah. Perusahaan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 9x dan kualitas *Non Performance Financing* untuk produk Mekaar tidak lebih dari 2%.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

PT Bank BCA Syariah (continued)

Total payment of this loan for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp80,891,032,605 and Rp105,658,831,516, respectively.

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Based on the Uncommitted Facility Line Agreement Deed No. 1 dated September 1, 2021, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) provides housing loan facilities with a maximum limit of Rp. 2,000,000,000,000 consisting of 1.5 trillion conventional facilities and 500 billion Sharia, with an interest rate equivalent to 6.50% pa fixed with a period of 36 months, the Company is required to maintain current minimum ratio 120%, gearing ratio maximal 10 times, maximum net NPL for all credits 5%, return of assets min. 0.5%, return of equity minimal 5% and operating expenses compared to operating income is less than 100%.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Based on the Deed of Credit Agreement No. 03 dated November 8, 2021, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk provides a credit facility with a maximum limit of Rp300,000,000,000 with a profit sharing equivalent to 7.5% per year with a loan term of 12 months and will expire on November 2022. The funds are for micro business financing and small through Mekaar Syariah. The company is required to maintain a gearing ratio of a maximum of 9x and the quality of Non Performance Financing for Mekaar products not more than 2% and a Current Ratio of at least 1.2x

Based on the Deed of Credit Agreement No. 12 dated November 30, 2020, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk provides a credit facility with a credit limit of a maximum of Rp200,000,000,000 with profit sharing equivalent to 9.75% per annum with a loan term of 12 months and has been fully paid on November 30, 2021. The funds are for financing micro and small businesses through Mekaar Syariah. The Company is required to maintain maximum Gearing Ratio of 9x and the quality of the Non Performance Financing for the Mekaar not more than 2%.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (lanjutan)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 05 tanggal 7 Agustus 2019, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit dengan plafon maksimal sebesar Rp100.000.000.000 dengan bagi hasil setara 10% per tahun dengan jangka waktu 18 bulan dan telah dilunasi pada tanggal 28 Agustus dan 27 September 2020. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM Syariah.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp199.999.999.995 dan Rp102.857.513.266.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.39 tanggal 30 Juni 2021, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk memberikan fasilitas kredit dengan plafon maksimal sebesar Rp100.000.000.000 dengan bagi hasil setara 9,25% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 24 bulan dan akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2022. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar Syariah. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x.

Pada tahun 2015, PT Bank Perkreditan Rakyat Rizky Barokah memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja No. 070/DMGT-KOM/MKR/2015 sebesar Rp1.000.000.000 bersifat *non-revolving* yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura. Tingkat bunga sebesar 13,5% per tahun dengan jangka waktu 72 bulan, administrasi 0,5% dari plafon kredit, bunga dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp232.181.720.647 dan Rp883.333.327.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (continued)

Based on the Deed of Credit Agreement No. 05 dated August 7, 2019, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk provides a credit facility with a credit limit of a maximum of Rp100,000,000,000 with profit sharing equivalent to 10% per annum with a loan term of 18 months and has been fully paid on August 28 and September 27, 2020. The funds are for financing micro and small businesses through Mekaar and Sharia ULaMM.

Total payment of this loan for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp199,999,999,995 and Rp102,857,513,266, respectively.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Based on the Deed of Credit Agreement No. 39 dated June 30, 2021, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk provides a credit facility with a maximum limit of Rp100,000,000,000 with a profit sharing equivalent to 9.25% per annum with a loan term of 24 months and will expire on dated June 30, 2022. The funds will be used to finance micro and small businesses through Mekaar Syariah. The Company is required to maintain a maximum *gearing ratio* of 10x times.

In 2015, PT Bank Perkreditan Rakyat Rizky Barokah obtain a working capital credit facility from PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk approval letter by the Working Capital Credit No. 070/DMGT-KOM/MKR/2015 sebesar Rp1,000,000,000 *non-revolving* be used for working capital venture capital financing. Interest rate of 13.5% per annum for a period of 72 months, 0.5% administration of the credit limit, the interest is calculated every end of the month.

Total payment of this loan for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp232,181,720,647 and Rp883,333,327, respectively.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

PT Danareksa Finance

Pada tanggal 27 Desember 2019, PT PNM Ventura Capital memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Dana Reksa Finance berdasarkan Akta Perjanjian kredit No. 17 dengan plafond pembiayaan Rp200.000.000.000 dan telah dicairkan sebesar Rp75.000.000.000 yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura. Tingkat bunga setara dengan 11% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun, administrasi 0,02% dari plafon kredit.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar nihil dan Rp150.000.000.000.

Bank SBI Indonesia

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 33 tanggal 16 Desember 2021, Bank SBI Indonesia memberikan fasilitas kredit dengan plafond sebesar Rp150.000.000.000 dengan bunga setara 7.5% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan dan akan berakhir pada bulan Desember 2024. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil. Perusahaan wajib menjaga *current ratio* minimal 1.2x, *gearing ratio* maksimal 10x, NPL nett maksimal 5%, *financing to asset ratio* minimal 65%, *micro financing ratio* minimal 50%, dan *interest coverage ratio* minimal 1.1x.

PT Bank Pembangunan Daerah D.I. Yogyakarta

Berdasarkan akta perjanjian Kredit Modal Kerja No.29 tgl 16 September 2021, PT Bank Pembangunan Daerah D.I. Yogyakarta memberikan fasilitas Kredit kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 9,00% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir di Bulan September 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

PT Danareksa Finance

On December 27, 2019, PT PNM Ventura Capital obtained a working capital credit facility from PT Danareksa Finance based on Credit Agreement Deed No.17 with credit limit as of Rp200,000,000,000 and has been disbursed as much as Rp75,000,000,000 used for working capital venture financing. Interest rates are equivalent to 11% per annum with a term of 3 years, administration 0.02% of the credit limit.

Total payment of this loan for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounted to nil and Rp150,000,000,000, respectively.

Bank SBI Indonesia

Based on the Deed of Credit Agreement No. 33 dated December 16, 2021, Bank SBI Indonesia provides a credit facility with a limit of Rp150,000,000,000 with an interest equivalent to 7.5% per annum with a loan term of 36 months and will expire in December 2024. The funds are for financing micro and small businesses. The Company is required to maintain a minimum current ratio of 1.2x, a maximum gearing ratio of 10x, a maximum net NPL of 5%, a financing to asset ratio of at least 65%, a micro financing ratio of at least 50%, and a minimum interest coverage ratio of 1.1x.

PT Bank Pembangunan Daerah D.I. Yogyakarta

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No.29 dated September 16, 2021, PT Bank Pembangunan Daerah D.I. Yogyakarta provides a credit facility to the Company amounting to Rp100,000,000,000 with an interest rate of 9.00% per annum with a loan term of 36 months from the signing of the credit agreement and will expire in September 2024. The loan is intended as additional working capital for lending Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

**PT Bank Pembangunan Daerah D.I. Yogyakarta
(lanjutan)**

Berdasarkan akta perjanjian Kredit Modal Kerja No. 19 tanggal 9 Juli 2020, PT Bank Pembangunan Daerah D.I. Yogyakarta memberikan fasilitas Kredit kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 10,00% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir di bulan Juli 2023. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp41.688.565.451 dan Rp13.888.889.000.

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan

Pada tanggal 29 Desember 2020, PT PNM Ventura Capital memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan berdasarkan Akta Perjanjian kredit dengan plafon pembiayaan Rp50.000.000.000 dan telah dicairkan sebesar Rp50.000.000.000 yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura Tingkat bunga setara dengan 11% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun, administrasi 1% dari plafon kredit.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp4.999.999.998 dan nihil.

PT Bank Nationalnubu Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 9 tanggal 6 September 2019, PT Bank Nationalnubu Tbk memberikan fasilitas kredit kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 9,50% fixed per tahun dengan jangka waktu pinjaman maksimal 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 6 September 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

**PT Bank Pembangunan Daerah D.I. Yogyakarta
(continued)**

Based on the deed of Working Capital Credit agreement No. 19 dated July 9, 2020, PT Bank Pembangunan Daerah D.I. Yogyakarta provides a credit facility to the Company of Rp100,000,000,000 with an interest rate of 10.00% per annum with a loan period of 36 months after the credit agreement is signed and will mature on July, 2023. The loan is intended as additional working capital for credit distribution for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).

Total payment of this loan for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp41,688,565,451 and Rp13,888,889,000, respectively.

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan

On December 29, 2020, PT PNM Ventura Capital obtained a working capital credit facility from PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan based on Deed Credit Agreement with credit limit as of Rp50,000,000,000 and has been disbursed as much as Rp50,000,000,000 used for working capital venture capital financing Interest rates are equivalent to 11% per annum with a term of 5 years, administration 1% of the credit limit.

Total payment of this loan for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp4,999,999,998 and nil, respectively.

PT Bank Nationalnubu Tbk

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 9 dated September 6, 2019, PT Bank Nationalnubu Tbk provides a credit facility to the Company of Rp100,000,000,000 with an interest rate of 9.50% fixed per annum with a maximum loan period of 36 months after the credit agreement is signed and will mature on September 6, 2022. The loan is intended as additional working capital for Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs).

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

PT Bank Nationalnubu Tbk (lanjutan)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 51 tanggal 22 April 2019, PT Bank Nationalnubu Tbk memberikan fasilitas Kredit *Money Market Line (MML)* sebesar Rp50.000.000.000. Tingkat suku bunga sebesar 10,75% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman maksimal 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah diperpanjang dengan akta No. 26 tanggal 22 April 2020 dan telah berakhir pada 22 April 2021. Pada tahun 2021, fasilitas ini telah diperpanjang dan akan jatuh tempo pada 22 April 2022. Perusahaan belum melakukan penarikan atas fasilitas ini. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* diatas 90 hari maksimal 5%.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp33.333.333.335 dan Rp133.333.333.333.

PT Bank Syariah Indonesia (dahulu PT Bank BRIsyariah)

Berdasarkan Akta Perjanjian *Line Facility Mudharabah* No. 13 tanggal 26 April 2019, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (dahulu PT Bank BRI syariah Tbk) memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan bagi hasil sebesar 9,50% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 42 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada Oktober 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp35.398.143.907 dan Rp32.202.157.568.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

PT Bank Nationalnubu Tbk (continued)

Based on the Deed of Working Capital Loan No. 51 dated April 22, 2019, PT Bank Nationalnubu Tbk provides a *Money Market Line (MML)* Credit facility of Rp50,000,000,000 with an interest rate of 10.75% *fixed* per annum with a maximum loan term of 12 months since credit agreement signed and has been extended with deed No. 26 dated April 22, 2020 and will be matured on April 22, 2021. On 2021, this facility has been extended and will mature on April 22, 2022. The Company has not made any drawdowns on this facility. The loan is intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The Company must maintain *Gearing Ratio* of 10x and a maximum *Non-Performing Loan* arrears above 90 days a maximum of 5%.

Total payment of this loan for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp33,333,333,335 and Rp133,333,333,333, respectively.

PT Bank Syariah Indonesia (formerly PT Bank BRIsyariah)

Based on the Deed of *Mudharabah Line Facility Agreement* No. 13 dated April 26, 2019, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (formerly PT Bank BRI syariah Tbk) provides a *Working Capital Credit* facility to the Company of Rp100,000,000,000 with profit sharing of 9.50% *fixed* per annum with a loan term of 42 months from the signing of the credit agreement and will mature on October, 2022. The loan is intended as additional working capital for credit distribution for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The Company is required to maintain the quality of maximum *Debt to Equity Ratio (DER)* of 10x and the *Non-Performing Loan* for the entire product not more than 5%.

Total payment of this loan for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp35,398,143,907 and Rp32,202,157,568, respectively.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

PT Bank Central Asia Tbk

Berdasarkan Akta perjanjian kredit No. 1658/PPK/SLK/2016 tanggal 28 Juni 2016, PT Bank Central Asia Tbk memberikan pinjaman rekening koran dengan plafon maksimal sebesar Rp50.000.000.000 dengan tingkat suku bunga 12% per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM. Perusahaan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* diatas 90 hari maksimal 5%. Pinjaman ini mengalami beberapa kali perpanjangan untuk jangka waktu kredit, yang terakhir dengan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu (SPPJ) No. 3453 tanggal 6 November 2020 dengan ketentuan suku bunga 11,75% per tahun dan telah dilunasi pada 9 November 2021.

PT Bank Mayora

Pada tahun 2015, PT Bank Perkreditan Rakyat Rizky Barokah memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Mayora berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja No. 0692/SPKOM-MYR/CRD/XI/2015 sebesar Rp3.000.000.000 bersifat *non-revolving* yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan. Tingkat bunga sebesar 13% per tahun dengan jangka waktu 120 bulan, administrasi 1% dari plafon kredit, bunga dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp119.371.347 dan Rp261.116.311.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Pada tahun 2016, PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah PNM Mentari memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja SP3 No. OL/572/Syariah/XI/2016 tanggal 9 November 2016 sebesar Rp5.500.000.000 bersifat *non-revolving* yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan. Tingkat bunga sebesar 13% per tahun dengan jangka waktu 66 bulan, administrasi 0,5% dari plafon kredit, bunga dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp321.223.651 dan Rp1.863.174.005.

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

PT Bank Central Asia Tbk

Based on the Deed of credit agreement No. 1658/PPK/SLK/2016 dated June 28, 2016, PT Bank Central Asia Tbk provides a current account loan with a credit limit of a maximum of Rp50,000,000,000 with an interest rate of 12% per annum. The funds are for financing micro and small businesses through ULaMM. The Company must maintain a maximum *Gearing Ratio* of 10x and *Non-Performing Loan* arrears above 90 days a maximum of 5%. This loan was extended several times for credit term, the latest by "Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu (SPPJ)" No. 3453 dated November 6, 2020 with the provision of an interest rate of 11.75% per annum and has been fully paid on November 9, 2021.

PT Bank Mayora

In 2015, PT Bank Perkreditan Rakyat Rizky Barokah obtain a working capital credit facility from PT Bank Mayora approval letter by the Working Capital Credit No. 0692/SPKOM-MYR/CRD/XI/2015 amounting to Rp3,000,000,000 non-revolving be used for working capital financing. Interest rate of 13% per annum for a period of 120 months, 1% administration of the credit limit, the interest is calculated every end of the month.

Total payment of this loan for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp119,371,347 and Rp261,116,311, respectively.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

In 2016, PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah PNM Mentari obtain a working capital credit facility from PT Bank Danamon Indonesia Tbk approval letter by the Working Capital Credit SP3 No. OL/572/Syariah/XI/2016 dated November 9, 2016 amounting to Rp5,500,000,000 non-revolving be used for working capital financing. Interest rate of 13% per annum for a period of 66 months, 0.5% administration of the credit limit, the interest is calculated every end of the month.

Total payment of this loan for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp321,223,651 and Rp1,863,174,005, respectively.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

PT Bank KEB Hana Indonesia

Berdasarkan akta perjanjian Kredit Modal Kerja No. 126 tanggal 19 November 2019, PT Bank KEB Hana Indonesia memberikan tambahan fasilitas kredit modal kerja kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah dilunasi pada tanggal 20 November 2020. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 40 tanggal 28 Juni 2018, PT Bank KEB Hana Indonesia memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp200.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 9,50% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah dilunasi pada Juni 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

Jumlah pembayaran pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp37.396.535.192 dan Rp161.721.052.942.

PT Bank Capital Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 20 tanggal 13 Mei 2019, PT Bank Capital Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit *Money Market Line (MML)* kepada Perusahaan sebesar Rp250.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 11,50% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah di perpanjang dengan Addendum 1 No. 201/ADD/2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021. Perusahaan belum melakukan penarikan atas fasilitas ini. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Gearing Ratio* tidak lebih dari 10x.

Fasilitas pinjaman yang diterima serta jumlah fasilitas pinjaman yang belum digunakan oleh Entitas Induk per 31 Desember 2021 adalah:

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

PT Bank KEB Hana Indonesia

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 126 dated November 19, 2019, PT Bank KEB Hana Indonesia granted the working capital credit facility to the Company amounting to Rp100,000,000,000 with an interest rate of 10% fixed per annum with a loan term of 12 months from the signing of the credit agreement and has been fully paid on November 20, 2020. Loan is intended as additional working capital for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The Company is required to maintain the quality of Non-Performing Loan of the whole product of not more than 5%.

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 40 dated June 28, 2018, PT Bank KEB Hana Indonesia granted the Working Capital Credit facility to the Company amounting to Rp200,000,000,000 with an interest rate of 9.50% fixed per annum with a loan term of 36 months from the signing of the credit agreement and fully paid on June 2021. Loan is intended as additional working capital for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The Company is required to maintain the quality of Non-Performing Loan of the whole product of not more than 5%.

Total payment of this loan for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp37,396,535,192 and Rp161,721,052,942, respectively.

PT Bank Capital Indonesia Tbk

Based on the Agreement Deed of Working Capital Credit No. 20 May 13, 2019, PT Bank Capital Indonesia Tbk provides a Money Market Line (MML) Credit facility to the Company in the amount of Rp250,000,000,000 at an interest rate of 11.50% per annum with a loan term of 12 months from the signing of the credit agreement and has been extended with Addendum 1 No. 201/ADD/2020 and will mature until May 14, 2021. The Company has not made any drawdowns on this facility. The loan is intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The company is obliged to maintain the quality of the Gearing Ratio not more than 10x.

Borrowings facility and the amount of the unused credit facility by the Parent Company as of December 31, 2021 are:

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)

18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)

a. Pinjaman

a. Borrowing

Fasilitas pinjaman yang diterima serta jumlah fasilitas pinjaman yang belum digunakan oleh Entitas Induk per 31 Desember 2021 adalah :

Borrowings facility and the amount of the unused credit facility by the Parent Company as of December 31, 2021 are:

	Plafon	LCU	Outstanding	
Pinjaman Rekening Koran:				Overdraft Loan:
PT Bank Central Asia Tbk	50.000.000.000	9.454.302.470	40.545.697.530	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Permata Tbk	25.000.000.000	25.000.000.000	-	PT Bank Permata Tbk
Subtotal	75.000.000.000	34.454.302.470	40.545.697.530	Subtotal
Pinjaman Berjangka:				Terms Loan:
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.000.000.000.000	3.500.000.000.000	500.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2.750.000.000.000	-	1.477.051.470.588	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah DKI	3.500.000.000.000	1.546.835.000.000	830.348.333.336	PT Bank Pembangunan Daerah DKI
PT Bank Mega Tbk	1.500.000.000.000	900.000.000.000	277.083.333.333	PT Bank Mega Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.000.000.000.000	247.083.333.343	752.916.666.657	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.000.000.000.000	101.208.965.149	898.791.034.851	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten	1.000.000.000.000	-	816.666.666.667	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	525.000.000.000	380.681.322.916	-	PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	450.000.000.000	50.000.000.000	85.084.644.147	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	400.000.000.000	250.000.000.000	66.666.666.667	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah
PT Bank Victoria International Tbk	350.000.000.000	125.000.000.000	150.000.000.000	PT Bank Victoria International Tbk
PT Bank JTrust	300.000.000.000	-	68.416.093.444	PT Bank JTrust
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	200.000.000.000	-	177.183.333.336	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
PT Bank Pembangunan Daerah DIY	200.000.000.000	-	144.444.444.000	PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta
PT Bank Nationalnobu Tbk	150.000.000.000	50.000.000.000	25.000.000.000	PT Bank Nationalnobu Tbk
PT Bank SBI Indonesia	150.000.000.000	50.000.000.000	100.000.000.000	PT Bank SBI Indonesia
Subtotal	17.475.000.000.000	7.200.808.621.408	6.369.652.687.026	Subtotal
Total	17.550.000.000.000	7.235.262.923.878	6.410.198.384.556	Total

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
(lanjutan)**

**18. BANK AND FINANCIAL INSTITUTION
BORROWINGS (continued)**

a. Pinjaman (lanjutan)

a. Borrowing (continued)

Fasilitas pinjaman yang diterima serta jumlah fasilitas pinjaman yang belum digunakan oleh Entitas Induk per 31 Desember 2020 adalah:

Borrowings facility and the amount of the unused credit facility by the Parent Entity as of December 31, 2020 are:

	Plafon	LCU	Outstanding	
Pinjaman Rekening Koran:				Overdraft Loan:
PT Bank Central Asia Tbk	50.000.000.000	10.915.172.705	39.084.827.295	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Permata Tbk	50.000.000.000	35.062.346.735	14.937.653.265	PT Bank Permata Tbk
Subtotal	100.000.000.000	45.977.519.440	54.022.480.560	Subtotal
Pinjaman Berjangka:				Terms Loan:
PT Bank Tabungan Negara Tbk	2.000.000.000.000	66.291.666.667	1.725.375.000.000	PT Bank Tabungan Negara Tbk
PT Bank Mandiri Tbk	1.500.000.000.000	-	62.520.260.000	PT Bank Mandiri Tbk
PT Bank DKI	1.500.000.000.000	-	1.057.843.124.575	PT Bank DKI
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	1.300.000.000.000	-	266.666.666.667	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
PT Bank Negara Indonesia Tbk	750.000.000.000	123.138.943.101	626.861.056.899	PT Bank Negara Indonesia Tbk
PT Bank BNI Syariah	750.000.000.000	74.679.162.982	675.320.837.018	PT Bank BNI Syariah
PT Bank Maybank	550.000.000.000	-	284.722.222.222	PT Bank Maybank
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	400.000.000.000	-	216.666.666.667	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	300.000.000.000	-	93.504.163.292	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
PT Bank Victoria International Tbk (MML)	250.000.000.000	-	250.000.000.000	PT Bank Victoria International Tbk (MML)
PT Bank Capital Indonesia Tbk (MML)	250.000.000.000	250.000.000.000	-	PT Bank Capital Indonesia Tbk (MML)
PT Bank Mega Syariah	235.000.000.000	35.069.785.273	199.930.214.727	PT Bank Mega Syariah
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	200.000.000.000	100.000.000.000	91.666.666.667	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank KEB Hana Indonesia	200.000.000.000	-	37.396.535.192	PT Bank KEB Hana Indonesia
PT Bank BCA Syariah	150.000.000.000	-	64.112.318.843	PT Bank BCA Syariah
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (dahulu PT Bank BRIsyariah Tbk)	100.000.000.000	-	47.961.689.928	PT Bank Syariah Indonesia Tbk (formerly PT Bank BRIsyariah Tbk)
PT Bank Nationalnubu Tbk	100.000.000.000	-	58.333.333.333	PT Bank Nationalnubu Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah D.I. Yogyakarta	100.000.000.000	-	86.111.111.000	PT Bank Pembangunan Daerah D.I. Yogyakarta
PT Bank Permata Tbk	100.000.000.000	-	83.333.333.333	PT Bank Permata Tbk
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	100.000.000.000	-	100.000.000.000	PT Bank JTrust Indonesia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	50.000.000.000	-	-	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Nationalnubu Tbk (MML)	50.000.000.000	50.000.000.000	-	PT Bank Nationalnubu Tbk (MML)
Subtotal	10.935.000.000.000	699.179.558.023	6.028.325.200.363	Subtotal
Total	11.035.000.000.000	745.157.077.463	6.082.347.680.923	Total

Rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 40.

Details of balances and transactions with the related parties are disclosed in Note 40.

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar pinjaman bank diungkapkan pada Catatan 27.

Information regarding the classification and fair value of bank borrowings are disclosed in Note 27.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. SURAT UTANG JANGKA MENENGAH DAN SUKUK

19. MEDIUM-TERM NOTES AND SUKUK

a. Berdasarkan jenis:

a. By type:

	2021	2020	
Medium Term Notes			Medium Term Notes
Entitas Induk			Parent Entity
Rupiah			Rupiah
MTN XIII Seri A	50.000.000.000	50.000.000.000	MTN XIII Seri A
MTN XIII Seri B	110.000.000.000	110.000.000.000	MTN XIII Seri B
MTN XIII Seri C	200.000.000.000	200.000.000.000	MTN XIII Seri C
MTN XIII Seri D	15.000.000.000	15.000.000.000	MTN XIII Seri D
MTN XVII (Danareksa)	-	500.000.000.000	MTN XVII (Danareksa)
MTN XIX Seri A	-	70.000.000.000	MTN XIX Seri A
MTN XIX Seri B	-	105.000.000.000	MTN XIX Seri B
MTN XIX Seri C	-	105.000.000.000	MTN XIX Seri C
MTN XIX Seri D	-	142.500.000.000	MTN XIX Seri D
MTN XIX Seri E	-	201.000.000.000	MTN XIX Seri E
	<u>375.000.000.000</u>	<u>1.498.500.000.000</u>	
Sukuk			Sukuk
Entitas Induk			Parent Entity
Rupiah			Rupiah
Sukuk Mudharabah I Tahun 2017 Seri D	-	100.000.000.000	Sukuk Mudharabah I Tahun 2017 Seri D
Sukuk Mudharabah II Tahun 2018 Seri A	60.000.000.000	60.000.000.000	Sukuk Mudharabah II Tahun 2018 Seri A
Sukuk Mudharabah II Tahun 2018 Seri B	240.000.000.000	240.000.000.000	Sukuk Mudharabah II Tahun 2018 Seri B
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Tahap I	300.000.000.000	300.000.000.000	Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Tahap I
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri A	-	435.000.000.000	Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri A
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri B	65.000.000.000	65.000.000.000	Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri B
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri D	-	350.000.000.000	Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri D
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri E	100.000.000.000	100.000.000.000	Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri E
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri E Tahap II	50.000.000.000	50.000.000.000	Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri E Tahap II
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri C	322.000.000.000	322.000.000.000	Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri C
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri F	120.000.000.000	120.000.000.000	Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri F
Sukuk Mudharabah IV Tahun 2020 Tahap I Seri A	200.000.000.000	200.000.000.000	Sukuk Mudharabah IV Tahun 2020 Tahap I Seri A
Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri H	50.000.000.000	50.000.000.000	Sukuk Mudharabah III Tahun 2019 Seri H
Sukuk Mudharabah IV Tahun 2021 Seri A	712.000.000.000	-	Sukuk Mudharabah IV Tahun 2021 Seri A
Sukuk Mudharabah IV Tahun 2021 Seri D	308.000.000.000	-	Sukuk Mudharabah IV Tahun 2021 Seri D
Sukuk Mudharabah IV Tahun 2021 Seri B	780.000.000.000	-	Sukuk Mudharabah IV Tahun 2021 Seri B
Sukuk Mudharabah III Tahun 2021 Tahap II Seri F	208.000.000.000	-	Sukuk Mudharabah III Tahun 2021 Tahap II Seri F
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Seri A	1.158.000.000.000	-	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Seri A
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Seri B	515.000.000.000	-	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Seri B
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Seri C	327.000.000.000	-	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Seri C
Sukuk Mudharabah IV Tahun 2021 Seri C	200.000.000.000	-	Sukuk Mudharabah IV Tahun 2021 Seri C
Subtotal	<u>5.715.000.000.000</u>	<u>2.392.000.000.000</u>	Subtotal
Total	<u>6.090.000.000.000</u>	<u>3.890.500.000.000</u>	Total

b. Berdasarkan jatuh tempo:

b. By maturity:

	2021	2020	
Kurang dari 1 tahun	2.048.000.000.000	2.008.500.000.000	Less than 1 year
1 - 2 tahun	1.100.000.000.000	890.000.000.000	1 - 2 years
Lebih dari 2 tahun	2.942.000.000.000	992.000.000.000	More than 2 years
Total	<u>6.090.000.000.000</u>	<u>3.890.500.000.000</u>	Total

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

19. SURAT UTANG JANGKA MENENGAH DAN SUKUK

Informasi penting sehubungan dengan Surat Utang Jangka Menengah dan Sukuk:

Surat Utang Jangka Menengah PNM

Perusahaan menerbitkan MTN XIX Seri D pada tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp142.500.000.000 dengan jangka waktu 2 tahun 10 bulan 2 hari, tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2021. Perusahaan menerbitkan MTN XIX Seri E pada tanggal 16 April 2019 sebesar Rp201.000.000.000 dengan jangka waktu 2 tahun 8 bulan 12 hari, tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2021. Tidak ada keterkaitan antara wali amanat dengan usaha emiten.

Perusahaan menerbitkan MTN XIX Seri A pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp70.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2021. Perusahaan menerbitkan MTN XIX Seri B pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp105.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per tahun dan telah jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2021. Perusahaan menerbitkan MTN XIX Seri C pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp105.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2021. Berdasarkan hasil pemeringkatan Pefindo No. 942/PEF-DIR/IX/2021 tanggal 20 September 2021 MTN XIX seri A, B, dan C mendapatkan peringkat idAA (Double A) yang berlaku untuk periode 1 Juli 2022. Tidak ada keterkaitan antara wali amanat dengan usaha emiten.

Perusahaan menerbitkan MTN XVII pada tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp500.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 8,25% per tahun dan telah dilunasi pada tanggal 12 Maret 2021 dan tidak ada jaminan dalam penerbitan MTN ini. Tujuan penerbitan MTN XVII adalah *Refinancing*, pengembangan usaha dan modal kerja. Jadwal pembayaran bunga dilakukan secara 3 bulanan. Nama wali amanat untuk penerbitan MTN XVII adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Penerbitan MTN XVIII seri A berada di peringkat idAA (Double A) dengan pemeringkat Pefindo. Tidak ada keterkaitan antara wali amanat dengan usaha emiten.

19. MEDIUM-TERM NOTES AND SUKUK

Significant information related to Medium Term Notes and Sukuk:

Medium Term Notes PNM

The Company issues MTN XIX Series D on February 26, 2019 amounting to Rp142,500,000,000 with a period of 2 years 10 months 2 days, a fixed interest rate of 10.50% per annum and will mature on December 28, 2021. The Company issues MTN XIX Series E on April 16, 2019 in the amount of Rp201,000,000,000 with a period of 2 years 8 months 12 days, a fixed interest rate of 10.50% per annum and will mature on December 28, 2021. There is no relationship between the trustee and the issuer's business.

The Company issues MTN XIX Series A on December 28, 2018 amounting to Rp70,000,000,000 with a period of 36 months, a fixed interest rate of 10.50% per annum and will mature on December 28, 2021. The Company issues MTN XIX Series B on December 28, 2018 amounting to Rp105,000,000,000 with a period of 36 months, a fixed interest rate of 10.50% per annum and mature on December 28, 2021. The Company issues MTN XIX Series C on December 28, 2018 amounting to Rp105,000,000,000 with a period of 36 months, a fixed interest rate of 10.50% per annum and will mature on December 28, 2021. Based on the rating results from Pefindo No. 942/PEF-DIR/IX/2021 dated September 20, 2021 MTN XIX Series A, B and C are rated idAA (Double A) which is valid for the period July 1, 2022. There is no relationship between the trustee and the issuer's business.

The Company issues MTN XVII on March 15, 2018 in the amount of Rp500,000,000,000 with a period of 36 months, a fixed interest rate of 8.25% per annum and has been fully paid on March 12, 2021 and there is no guarantee in issuing this MTN. The purpose of issuing MTN XVII is Refinancing, business development and working capital. The interest payment schedule is carried out on a quarterly basis. The name of the trustee for the issuance of MTN XVII is PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Issuance of Series A MTV XVIII is ranked idAA (Double A) with Pefindo rating. There is no relationship between the trustee and the issuer's business.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

19. SURAT UTANG JANGKA MENENGAH DAN SUKUK (lanjutan)

Informasi penting sehubungan dengan Surat Utang Jangka Menengah dan Sukuk: (lanjutan)

Surat Utang Jangka Menengah PNM (lanjutan)

Perusahaan menerbitkan MTN XIII Seri C pada tanggal 28 April 2017 sebesar Rp200.000.000.000 dengan jangka waktu 56 bulan 14 hari, tingkat bunga tetap sebesar 11,25% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Januari 2022. Perusahaan menerbitkan MTN XIII Seri D pada tanggal 14 Juni 2017 sebesar Rp15.000.000.000 dengan jangka waktu 54 bulan 26 hari, tingkat bunga tetap sebesar 11,25% per tahun dan telah jatuh tempo pada tanggal 10 Januari 2022. Jadwal pembayaran bunga secara kuartal baik untuk MTN XIII seri C maupun D. Jaminan yang diberikan dalam penerbitan MTN Seri XIII C dan D adalah *Cessie*. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha Emiten dalam penerbitan MTN XIII Seri C dan D. Nama wali amanat dalam penerbitan MTN XIII Seri C dan D adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Tidak ada peringkat dalam penerbitan MTN XIII Seri C dan D. Tujuan penerbitan MTN XIII Seri C dan D adalah untuk penambahan modal kerja dalam rangka pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil.

Perusahaan menerbitkan MTN XIII Seri A pada tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp50.000.000.000 dengan jangka waktu 60 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 11,25% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Januari 2022. Perusahaan menerbitkan MTN XIII Seri B pada tanggal 14 Maret 2017 sebesar Rp110.000.000.000 dengan jangka waktu 60 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 11,25% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 14 Maret 2022. Jadwal pembayaran bunga secara 3 bulanan baik untuk MTN XIII seri A maupun B. Jaminan yang diberikan dalam penerbitan MTN Seri XIII A dan B adalah *Cessie*. Tidak ada keterkaitan wali amanat dengan usaha Emiten dalam penerbitan MTN XIII Seri A dan B. Nama Wali Amanat dalam penerbitan MTN XII Seri A dan B adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Tidak ada peringkat dalam penerbitan MTN XIII Seri A dan B. Tujuan penerbitan MTN XIII Seri A dan B adalah untuk penambahan modal kerja dalam rangka pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil.

MTN diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo MTN yang diterbitkan oleh Perusahaan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang MTN. Surat berharga ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok MTN pada tanggal penerbitan.

19. MEDIUM-TERM NOTES AND SUKUK (continued)

Significant information related to Medium Term Notes and Sukuk: (continued)

Medium Term Notes PNM (continued)

The Company issued MTN XIII Series C on April 28, 2017 amounting to Rp200,000,000,000 with a period of 56 months 14 days, a fixed interest rate of 11.25% per annum and will mature on January 10, 2022. The Company issued MTN XIII Series D on June 14, 2017 amounting to Rp15,000,000,000 with a period of 54 months 26 days, a fixed interest rate of 11.25% per annum and mature January 10, 2022. Schedule of interest payments on a quarterly basis for both MTN XIII series C and D. The guarantee given in the issuance of Series XIII C and D MTN is *Cessie*. There is no relationship between the trustee and the issuer's business in the issuance of MTN XIII Series C and D. The name of the trustee in issuing MTN XIII Series C and D is PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. There is no rating in the issuance of MTN XIII Series C and D. The purpose of issuing MTN XIII Series C and D is to increase working capital in the context of financing Micro and Small Enterprises.

The Company issued MTN XIII Series A on January 10, 2017 amounting to Rp50,000,000,000 with a period of 60 months, a fixed interest rate of 11.25% per annum and will mature on January 10, 2022. The Company issued MTN XIII Series B on March 14, 2017 amounting to Rp110,000,000,000 with a period of 60 months, a fixed interest rate of 11.25% per annum and will mature on March 14, 2022. Schedule of interest payments on a 3-month basis for both MTN XIII series A and B. The guarantee given in the issuance of MTN Series XIII A and B is *Cessie*. There is no relationship between the trustee and the issuer's business in issuing MTN XIII Series A and B. The name of the Trustee in the issuance of MTN XII Series A and B is PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. There is no rating in the issuance of MTN XIII Series A and B. The purpose of issuing MTN XIII Series A and B is to increase working capital in the context of financing Micro and Small Enterprises.

The MTN issued without script, except MTN Jumbo Certificate issued by the Company on behalf of the Indonesian Central Securities Depository (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia) as a proof of debt for the benefit of the MTN. These securities are offered at 100% of the principal amount on the date of issuance of MTN.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

19. SURAT UTANG JANGKA MENENGAH DAN SUKUK (lanjutan)

Surat Utang Jangka Menengah PNM (lanjutan)

Bunga MTN dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal emisi dan pembayaran bunga MTN yang untuk pertama kalinya dan terakhir kalinya pada tanggal jatuh tempo MTN.

Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021

Pada tanggal 8 Juli 2021, Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM tahun 2021 dengan jumlah pokok sebanyak -banyaknya Rp6.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM tahap I tahun 2021 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Juli 2021. Sukuk Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp1.158.000.000.000, nisbah setara 6,00% per tahun, berjangka waktu 370 hari kalender.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp515.000.000.000, nisbah setara 7,00% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri C: Jumlah pokok sebesar Rp327.000.000.000, nisbah setara 8,00% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bagi hasil Sukuk dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan 8 Oktober 2022 untuk Sukuk Seri A dan 8 Oktober 2024 untuk Sukuk Seri B dan 8 Oktober 2026 untuk Sukuk Seri C.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. 938/PEF-DIR/IX/2021 tanggal 20 September 2021 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Sukuk tersebut mendapatkan peringkat idAA(sy) (Double A Syariah) yang berlaku untuk periode 1 Juli 2022.

Sukuk dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Sukuk tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM tahap I tahun 2021 No. 19 tanggal 16 April 2021 Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

19. MEDIUM-TERM NOTES AND SUKUK (continued)

Medium Term Notes PNM (continued)

Interest of MTN is paid every 3 (three) months, from the date of emission and MTN interest payment for the first time and last time on the maturity date of the MTN.

Sukuk Mudharabah

Revolving Sukuk Mudharabah I PNM Tranche I Year 2021

On July 8, 2021, the Company issued the Revolving Sukuk Mudharabah I PNM Tranche I Year 2021 with a principal amount of up to Rp6,000,000,000,000. The bonds have been declared effective by the Financial Services Authority (OJK).

The Company issues and offers the 2021 PNM Sustainable Sukuk Mudharabah I phase I which has been listed on the Indonesia Stock Exchange on July 8, 2021. The Company's Sukuk consist of:

- Seri A: The principal amount is Rp1,158,000,000,000, the equivalent ratio is 6.00% per annum, with a term of 370 calendar days.
- Seri B: The principal amount is Rp515,000,000,000, the equivalent ratio is 7.00% per annum, with a term of 3 years.
- Seri C: The principal amount is Rp327,000,000,000, the equivalent ratio is 8.00% per annum, with a term of 5 years.

Sukuk profit sharing payments are made every 3 (three) months from October 8, 2021 to October 8, 2022 for Series A Sukuk and October 8, 2024 for Sukuk Series B and October 8, 2026 for Sukuk Series C.

Based on the rating results for long-term debt securities in accordance with Pefindo's Letter No. 938/PEF-DIR/IX/2021 dated September 20, 2021 from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the Sukuk received an idAA(sy) (Double A Sharia) rating which is valid for the period July 1, 2022.

Sukuk are guaranteed by all of the Company's assets, both movable and immovable goods, both existing and future.

The issuance of the Sukuk is carried out based on the PNM Phase I Sustainable Sukuk Mudharabah Trust Agreement Phase I of 2021 No. 19 April 16, 2021 Adi Warsito, S.H. in Jakarta, which acts as the Trustee is PT Bank Mega Tbk.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

19. SURAT UTANG JANGKA MENENGAH DAN SUKUK (lanjutan)

Surat Utang Jangka Menengah PNM (lanjutan)

Sukuk Mudharabah (lanjutan)

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2020 Seri C pada tanggal 29 Juni 2021 sebesar Rp200.000.000.000 dengan jangka waktu 2 Tahun, nisbah sebesar 9,75% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 29 Juni 2023. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah IV seri C. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk dengan pemeringkat Pefindo dan idAA(sy) (Double A Syariah). Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah IV seri C tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2019 Seri F Tahap II pada tanggal 4 Mei 2021 sebesar Rp208.000.000.000 dengan jangka waktu 1 Tahun 9 bulan 16 hari, nisbah sebesar 11,59% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2023. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III seri F Tahap II. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA(sy) (Double A Syariah) Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III seri F Tahap II tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2020 Seri B pada tanggal 10 Maret 2021 sebesar Rp780.000.000.000 dengan jangka waktu 3 Tahun, nisbah sebesar 40,95% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Maret 2024. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah IV Seri B. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah IV Seri B adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan idAA(sy) (Double A Syariah). Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah IV PNM Tahun 2020 seri D tercatat di bursa KSEI.

19. MEDIUM-TERM NOTES AND SUKUK (continued)

Medium Term Notes PNM (continued)

Sukuk Mudharabah (continued)

The Company issued Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani 2020 Series C on June 29, 2021 amounting to Rp200,000,000,000 with a period of 2 years, a ratio of 9.75% per annum of the revenue shared, and will mature on June 29, 2023. There is no guarantee for the issuance of Sukuk Mudharabah IV series C. The trustee for the issuance of Sukuk is PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk with Pefindo rating and idAA(sy) (Double A Sharia). The payment schedule ratio is 3 months. The purpose of this Sukuk issuance is for additional murabahah working capital through Mekaar Syariah and UlaMM Syariah. There is no relationship between the trustee and the issuer's business. The issuance of Sukuk Mudharabah IV series C is listed on the KSEI stock exchange.

The Company issued Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani Year 2019 Series F Phase II on May 4, 2021 amounting to Rp208,000,000,000 with a period of 1 year 9 months 16 days, a ratio of 11.59% per annum of the revenue earned distributed, and will mature on February 20, 2023. There is no guarantee on the issuance of Sukuk Mudharabah III series F Phase II. The trustee for the issuance of Sukuk is PT Bank Syariah Indonesia Tbk with a Pefindo rating and an idAA(sy) (Double A Sharia). The payment schedule ratio is 3 months. The purpose of this Sukuk issuance is for additional murabahah working capital through Mekaar Syariah and UlaMM Syariah. There is no relationship between the trustee and the issuer's business. The issuance of Sukuk Mudharabah III series F Phase II is listed on the KSEI stock exchange.

The Company issued Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani Year 2020 Series B on March 10, 2021 amounting to Rp780,000,000,000 with a term of 3 years, a ratio of 40.95% per year of the revenue shared, and will be due on March 10, 2024. There is no guarantee on the issuance of Sukuk Mudharabah IV Series B. The trustee for the issuance of Sukuk Mudharabah IV Series B is Bank Syariah Mandiri with Pefindo rating and an idAA(sy) (Double A Sharia). The ratio payment schedule is 3 months. The purpose of issuing this Sukuk is for additional murabahah working capital through Mekaar Syariah and UlaMM Syariah. There is no relationship between the trustee and the issuer. The issuance of the Sukuk Mudharabah IV PNM Year 2020 Series D is listed on the KSEI stock exchange.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

19. SURAT UTANG JANGKA MENENGAH DAN SUKUK (lanjutan)

Sukuk Mudharabah (lanjutan)

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2020 Seri D pada tanggal 19 Februari 2021 sebesar Rp308.000.000.000 dengan jangka waktu 3 Tahun, nisbah sebesar 16,17% per tahun dari pendapatan yang dibagihasikan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 Januari 2024. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah IV seri D. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan idAA(sy) (Double A Syariah). Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah IV PNM Tahun 2020 seri D tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2020 Seri A pada tanggal 19 Januari 2021 sebesar Rp712.000.000.000 dengan jangka waktu 3 Tahun, nisbah sebesar 37,38% per tahun dari pendapatan yang dibagihasikan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 Januari 2024. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah IV seri A. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan idAA(sy) (Double A Syariah). Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah IV PNM Tahun 2020 seri A tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2019 Seri H pada tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp50.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, nisbah sebesar 3% per tahun dari pendapatan yang dibagihasikan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2023. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri H. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri H adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan idAA(sy) (Double A Syariah). Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri H tercatat di bursa KSEI.

19. MEDIUM-TERM NOTES AND SUKUK (continued)

Sukuk Mudharabah (continued)

The Company issued Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani Year 2020 Series D on February 19, 2021 amounting to Rp308,000,000,000 with a period of 3 years, a ratio of 16.17% per annum of the revenue shared, and will mature on the date January 19, 2024. There is no guarantee on the issuance of Sukuk Mudharabah IV Series D. The trustee for the issuance of Sukuk Mudharabah IV Series D is Bank Syariah Mandiri with Pefindo rating and idAA(sy) (Double A Sharia). The ratio payment schedule is 3 months. The purpose of issuing this Sukuk is for additional murabahah working capital through Mekaar Syariah and UlaMM Syariah. There is no relationship between the trustee and the business of the issuer. The issuance of the Sukuk Mudharabah IV PNM Year 2020 Series D is listed on the KSEI stock exchange.

The Company issued Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani Year 2020 Series A on January 19, 2021 amounting to Rp712,000,000,000 with a period of 3 years, a ratio of 37.38% per annum of the revenue shared, and will mature on the date January 19, 2024. There is no guarantee on the issuance of Sukuk Mudharabah IV Series A. The trustee for the issuance of Sukuk Mudharabah IV Series A is Bank Syariah Mandiri with Pefindo rating and idAA(sy) (Double A Sharia). The ratio payment schedule is 3 months. The purpose of issuing this Sukuk is for additional murabahah working capital through Mekaar Syariah and UlaMM Syariah. There is no relationship between the trustee and the business of the issuer. The issuance of the Sukuk Mudharabah IV PNM Year 2020 Series A is listed on the KSEI stock exchange.

The Company issued PT Permodalan Nasional Madani Year 2019 Series H Sukuk Mudharabah III on December 15, 2020 amounting to Rp50,000,000,000 with a period of 36 months, a ratio of 3% per annum of revenue that was paid, and due on December 15, 2023. There is no guarantee in the issuance of Series H Sukuk Mudharabah III Series. Trustee for issuance of Series H Sukuk Mudharabah III is Bank Syariah Mandiri with rating of Pefindo and rating idAA(sy) (Double A Sharia). Schedule of payment ratio is 3 months. The purpose of this Sukuk issuance is for additional murabahah working capital through Mekaar Syariah and UlaMM Syariah. There is no relationship between the trustee and the issuer's business. Issuance of Series H Sukuk Mudharabah III Series H is listed on the KSEI exchange.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

19. SURAT UTANG JANGKA MENENGAH DAN SUKUK (lanjutan)

Sukuk Mudharabah (lanjutan)

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2020 Tahap 1 Seri A pada tanggal 27 Oktober 2020 sebesar Rp200.000.000.000 dengan jangka waktu 3 Tahun, nisbah sebesar 9,75% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Oktober 2023. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah IV tahap 1 Seri A. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah IV tahap 1 Seri A adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA(sy) (Double A Syariah). Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah IV Tahun 2020 tahap 1 Seri A tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2019 Seri F pada tanggal 8 April 2020 sebesar Rp120.000.000.000 dengan jangka waktu 3 Tahun, nisbah sebesar 6,69% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2023. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri F. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri F adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA(sy) (Double A Syariah). Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri F tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2019 Seri C pada tanggal 20 Februari 2020 sebesar Rp322.000.000.000 dengan jangka waktu 3 Tahun, nisbah sebesar 17,94% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2023. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri C. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri C adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA(sy) (Double A Syariah). Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri C tercatat di bursa KSEI.

19. MEDIUM-TERM NOTES AND SUKUK (continued)

Sukuk Mudharabah (continued)

The Company issues PT Permodalan Nasional Madani Series A Sukuk Mudharabah IV Year 2020 Phase 1 on October 27, 2020 in the amount of Rp200,000,000,000 with a period of 3 years, a ratio of 9.75% per annum of revenue generated, and due on October 27, 2023. There is no guarantee in the issuance of Series A Sukuk Mudharabah IV Year 2020 Phase 1. Trustees for the issuance of Series A Sukuk Mudharabah IV Year 2020 Phase 1 are Bank Syariah Mandiri with Pefindo rating and rating idAA(sy) (Double A Sharia). Schedule of payment ratios is 3 months. The purpose of this Sukuk issuance is for additional murabahah working capital through Mekaar Syariah and UlaMM Syariah. There is no relationship between the trustee and the issuer's business. Issuance of Series A Sukuk Mudharabah IV Year 2020 Phase 1 is recorded in the KSEI stock exchange.

The Company issued Sukuk Mudharabah III of PT Permodalan Nasional Madani 2019 Series F on April 8, 2020 in the amount of Rp120,000,000,000 with a term of 3 years, a ratio of 6.69% per annum from the revenue generated, and will be due on February 20, 2023. There is no guarantee in the issuance of Series F. Sukuk Mudharabah III. The Trustee for the issuance of the Series III Sukuk Mudharabah F is Bank Syariah Mandiri with Pefindo rating and idAA(sy) (Double A Sharia) ratings. The ratio payment schedule is 3 months. The purpose of the issuance of this Sukuk is to increase murabaha working capital through Sharia Mekaar and Sharia UlaMM. There is no connection between the trustee and the issuer's business. The issuance of PNM Sukuk Mudharabah III 2019 Series F is listed on the KSEI stock exchange.

The Company issued PT Permodalan Nasional Madani Sukuk Mudharabah III Year 2019 Series C on February 20, 2020 amounting to Rp322,000,000,000 for a period of 3 years, a ratio of 17.94% per annum from the revenue generated, and will be due on February 20, 2023. There is no guarantee in the issuance of Series C. Sukuk Mudharabah III The Trustee for the issuance of the Series C Sukuk Mudharabah III is Bank Syariah Mandiri with Pefindo rating and idAA(sy) (Double A Sharia) ratings. The ratio payment schedule is 3 months. The purpose of the issuance of this Sukuk is to increase murabaha working capital through Sharia Mekaar and UlaMM Syariah. There is no connection between the trustee and the issuer's business. Issuance of PNM Sukuk Mudharabah III Year 2019 Series C is listed on the KSEI stock exchange.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

19. SURAT UTANG JANGKA MENENGAH DAN SUKUK (lanjutan)

Sukuk Mudharabah (lanjutan)

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2019 Seri E tahap I pada tanggal 5 Desember 2019 sebesar Rp50.000.000.000 dengan jangka waktu 2 Tahun 10 Bulan 25 hari, nisbah sebesar 3,00% per tahun dari pendapatan yang dibagihasikan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2022. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri E tahap I. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri E tahap I adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA(sy) (Double A Syariah). Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri E tahap I tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2019 Seri A pada tanggal 24 September 2019 sebesar Rp435.000.000.000 dengan jangka waktu 2 Tahun, nisbah sebesar 25,48% per tahun dari pendapatan yang dibagihasikan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 September 2021. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri A. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri A adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA(sy) (Double A Syariah). Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri A tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2019 Seri D pada tanggal 30 Oktober 2019 sebesar Rp350.000.000.000 dengan jangka waktu 3 Tahun, nisbah sebesar 20,50% per tahun dari pendapatan yang dibagihasikan, dan telah jatuh tempo pada tanggal 24 September 2021. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri D. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri D adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA(sy) (Double A Syariah). Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri D tercatat di bursa KSEI.

19. MEDIUM-TERM NOTES AND SUKUK (continued)

Sukuk Mudharabah (continued)

The Company issued Sukuk Mudharabah III of PT Permodalan Nasional Madani 2019 Series E phase I on December 5, 2019 in the amount of Rp50,000,000,000 with a term of 2 years 10 months 25 days, a ratio of 3.00% per annum of the revenue is collected, and will mature on October 30, 2022. There is no guarantee in the issuance of Phase E Sukuk Mudharabah III Series I. Trustee for the issuance of Phase E Series Sukuk Mudharabah III is Bank Syariah Mandiri with Pefindo rating and idAA(sy) (Double A Sharia) ratings. The ratio payment schedule is 3 months. The purpose of the issuance of this Sukuk is to increase murabaha working capital through Sharia Mekaar and Sharia UlaMM. There is no connection between the trustee and the issuer's business. Issuance of PNM Sukuk Mudharabah III 2019 Series E phase I is listed on the KSEI stock exchange.

The Company issued Sukuk Mudharabah III of PT Permodalan Nasional Madani 2019 Series A on September 24, 2019 in the amount of Rp435,000,000,000 with a term of 2 years, a ratio of 25.48% per annum from the revenue generated, and will be due on September 24, 2021. There is no guarantee in the issuance of Series A Sukuk Mudharabah III. The Trustee for the issuance of Series A Sukuk Mudharabah III is Bank Syariah Mandiri with Pefindo rating and rating idAA(sy) (Double A Sharia). Schedule for payment of ratio is 3 monthly. The purpose of the issuance of this Sukuk is to increase murabaha working capital through Sharia Mekaar and Sharia UlaMM. There is no connection between the trustee and the issuer's business. Issuance of PNM Sukuk Mudharabah III Year 2019 Series A is listed on the KSEI exchange.

The Company issued Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani 2019 Series D on October 30, 2019 in the amount of Rp350,000,000,000 with a term of 3 years, a ratio of 20.50% per year from the revenue generated, and mature on September 24, 2021. There is no guarantee in the issuance of Series D. Sukuk Mudharabah III The Trustee for the issuance of the Sukuk Mudharabah III Series D is Bank Syariah Mandiri with Pefindo rating and idAA(sy) (Double A Sharia) ratings. The ratio payment schedule is 3 months. The purpose of the issuance of this Sukuk is to increase murabaha working capital through Sharia Mekaar and Sharia UlaMM. There is no connection between the trustee and the issuer's business. The issuance of PNM Sukuk Mudharabah III Year 2019 Series D is listed on the KSEI exchange.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

19. SURAT UTANG JANGKA MENENGAH DAN SUKUK (lanjutan)

Sukuk Mudharabah (lanjutan)

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2019 Seri B pada tanggal 30 Oktober 2019 sebesar Rp65.000.000.000 dengan jangka waktu 3 Tahun, nisbah sebesar 3,90% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2022. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri B. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri B adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA(sy) (Double A Syariah). Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri B tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2019 Tahap 1 pada tanggal 18 Juni 2019 sebesar Rp300.000.000.000 dengan jangka waktu 5 Tahun, nisbah sebesar 19% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 Juni 2024. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III tahap 1. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Tahap 1 adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA(sy) (Double A Syariah). Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Tahap 1 tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah II PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2018 Seri B pada tanggal 26 Maret 2019 sebesar Rp240.000.000.000 dengan jangka waktu 2 Tahun 11 bulan, nisbah sebesar 30,00% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 Februari 2022. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah II Seri B. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah Seri B adalah Bank BJB dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA(sy) (Double A Syariah). Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah II Seri B tercatat di bursa KSEI.

19. MEDIUM-TERM NOTES AND SUKUK (continued)

Sukuk Mudharabah (continued)

The Company issued Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani 2019 Series B on October 30, 2019 in the amount of Rp65,000,000,000 with a term of 3 years, a ratio of 3.90% per annum of the revenue generated, and will be due on October 30, 2022. There is no guarantee in the issuance of Series B. Sukuk Mudharabah III The Trustee for the issuance of Series III Sukuk Mudharabah is Bank Syariah Mandiri with Pefindo rating and idAA(sy) (Double A Sharia) ratings. The ratio payment schedule is 3 months. The purpose of the issuance of this Sukuk is to increase murabahah working capital through Sharia Mekaar and Sharia UlaMM. There is no connection between the trustee and the issuer's business. The issuance of PNM Sukuk Mudharabah III in 2019 Series B is listed on the KSEI exchange.

The Company issues PT Permodalan Nasional Madani Sukuk Mudharabah III Year 2019 Phase 1 on June 18, 2019 in the amount of Rp300,000,000,000 with a period of 5 years, a ratio of 19% per annum of revenue generated, and due on June 18, 2024. There is no guarantee in the issuance of Sukuk Mudharabah III stage 1. Trustees for the issuance of Sukuk Mudharabah III Phase 1 are Bank Syariah Mandiri with Pefindo rating and rating idAA(sy) (Double A Sharia). Schedule of payment ratios is 3 months. The purpose of this Sukuk issuance is for additional murabahah working capital through UlaMM Syariah. There is no relationship between the trustee and the issuer's business. Issuance of PNM Mudharabah III Year 2019 Phase 1 is recorded in the KSEI stock exchange.

The Company issued PT Permodalan Nasional Madani Sukuk Mudharabah II Year 2018 Series B on March 26, 2019 amounting to Rp240,000,000,000 with a period of 2 years 11 months, a ratio of 30.00% per year of revenue generated, and will fall due on February 26, 2022. There is no guarantee in the issuance of Series B. Sukuk Mudharabah II for issuance of Series B Sukuk Mudharabah is BJB Bank with Pefindo rating and rating idAA(sy) (Double A Sharia). Schedule of payment is 3 months. The purpose of this Sukuk issuance is to increase murabahah working capital through UlaMM Syariah. There is no relationship between the trustee and the issuing business. Issuance of Series B Sukuk Mudharabah registered at KSEI stock exchange.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

19. SURAT UTANG JANGKA MENENGAH DAN SUKUK (lanjutan)

Sukuk Mudharabah (lanjutan)

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah II PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2018 Seri A pada tanggal 26 Februari 2018 sebesar Rp60.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, nisbah sebesar 30,00% per tahun dari pendapatan yang dibagihasikan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 Februari 2022. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah II Seri A. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah Seri B adalah Bank BJB dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA(sy) (Double A Syariah). Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah II seri B tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah I PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2017 Seri D pada tanggal 31 Januari 2017 sebesar Rp100.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, nisbah sebesar 44,7917% per tahun dari pendapatan yang dibagihasikan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Januari 2021. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah I Seri D. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah Seri D adalah Bank Bukopin dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat A+. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah I Seri D tercatat di bursa KSEI.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah sesuai dengan Surat Pefindo No. RC-968/PEF-DIR/VIII/2020 dan No. RC-972/PEF-DIR/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Sukuk tersebut mendapatkan peringkat idAA(sy) (Double A Syariah yang berlaku untuk periode 20 September 2021 sampai dengan 1 Juli 2022.

19. MEDIUM-TERM NOTES AND SUKUK (continued)

Sukuk Mudharabah (continued)

The Company issues PT Permodalan Nasional Madani Sukuk Mudharabah II Year 2018 Series A on February 26, 2018 in the amount of Rp60,000,000,000 with a period of 36 months, a ratio of 30.00% per annum of revenue generated, and due on February 26, 2022. There is no guarantee in the issuance of Series A. Sukuk Mudharabah II. Trustee for issuance of Series B Sukuk Mudharabah is BJB Bank with Pefindo rating and rating idAA(sy) (Double A Sharia). Schedule of payment ratio is 3 months. The purpose of this Sukuk issuance is for additional murabahah working capital through UlaMM Syariah. There is no relationship between the trustee and the issuer's business. Issuance of Sukuk Mudharabah II series B is listed on the KSEI exchange.

The Company issued PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Series D Sukuk Mudharabah I on January 31, 2017 in the amount of Rp100,000,000,000 with a period of 36 months, a ratio of 44.7917% per annum of revenue generated, and due on January 31, 2021. There is no guarantee on the issuance of Series D Sukuk Mudharabah I. Trustee for the issuance of Series D Sukuk Mudharabah is Bank Bukopin with Pefindo rating and rating A+. The payment schedule is 3 months. The purpose of this Sukuk issuance is for additional murabahah working capital through UlaMM Syariah. There is no relationship between the trustee and the issuer's business. Issuance of Series D Sukuk Mudharabah I is listed on the KSEI exchange.

Based on the results of a Sukuk Mudharabah rating pursuant to Letter of Pefindo No. RC-968/PEF-DIR/VIII/2020 and No. RC-972/PEF-DIR/VIII/2020 dated August 19, 2020 from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the Sukuk are rated idAA(sy) (Double A Sharia) the period from September 20, 2021 until July 1, 2022.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

20. UTANG OBLIGASI

a. Berdasarkan jenis:

	2021		2020
Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap 1 Tahun 2021	2.992.355.687.311	-	<i>Revolving Bonds IV PNM Tranche I Year 2021</i>
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021	665.350.236.408	-	<i>Revolving Bonds III PNM Tranche V Year 2021</i>
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020	828.211.644.934	1.731.563.642.800	<i>Revolving Bonds III PNM Tranche IV Year 2020</i>
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020	249.520.680.130	249.357.039.061	<i>Revolving Bonds III PNM Tranche III Year 2020</i>
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019	1.348.973.209.692	1.348.465.851.583	<i>Revolving Bonds III PNM Tranche II Year 2019</i>
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019	1.998.662.168.493	1.997.175.553.571	<i>Revolving Bonds III PNM Tranche I Year 2019</i>
Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018	1.995.209.106.603	2.498.910.426.022	<i>Revolving Bonds II PNM Tranche II Year 2018</i>
Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017	-	749.307.247.353	<i>Revolving Bonds II PNM Tranche I Year 2017</i>
Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016	-	838.710.119.235	<i>Revolving Bonds I PNM Tranche II Year 2016</i>
Total	10.078.282.733.571	9.413.489.879.625	Total

b. Berdasarkan jatuh tempo:

	2021		2020	
Kurang dari 1 tahun	3.901.707.189.148	2.996.136.037.703		<i>Less than 1 year</i>
1 - 2 tahun	2.834.303.297.179	2.734.470.495.933		<i>1 - 2 years</i>
Lebih dari 2 tahun	3.342.272.247.244	3.682.883.345.989		<i>More than 2 years</i>
Total	10.078.282.733.571	9.413.489.879.625		Total

Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021

Pada tanggal 13 Desember 2021, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap 1 Tahun 2021 dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-227/D.04/2021 tanggal 30 November 2021.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I 2021 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Desember 2021. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 3,75% per tahun, berjangka waktu 370 hari kalender.

Revolving Bond IV PNM Tranche I Year 2021

On December 13, 2021, the Company issued Shelf Registration Bond IV PNM Phase 1 Year 2021 with a principal amount of Rp6,000,000,000,000. The bonds have been declared effective by the Financial Services Authority (OJK) based on Decree No. S-227/D.04/2021 dated November 30, 2021

The Company issues and offers Shelf Registration Bond IV PNM Phase I 2021 which has been listed on the Indonesia Stock Exchange on December 10, 2021. The Company's Bonds consist of:

- Series A: The principal amount is Rp1,000,000,000,000, the interest rate is fixed at 3.75% per annum, with a term of 370 calendar days.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021 (lanjutan)

- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 5,50% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri C: Jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 6,25% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan 20 Desember 2022 untuk Obligasi Seri A dan 10 Desember 2024 untuk Obligasi Seri B dan 10 Desember 2026 untuk Obligasi Seri C.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. 937/PEF-DIR/IX/2021 tanggal 20 September 2021 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA (Double A) yang berlaku untuk periode 1 Juli 2022.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021 No.25 tanggal 19 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;

20. BOND PAYABLES (continued)

Revolving Bond IV PNM Tranche I Year 2021 (continued)

- Series B: The principal amount is Rp1,000,000,000,000, fixed interest rate is 5.50% per annum, with a term of 3 years.
- Series C: The principal amount is Rp1,000,000,000,000, fixed interest rate is 6.25% per annum, with a term of 5 years.

Bond interest payments are made every 3 (three) months from March 10, 2022 until December 20, 2022 for Series A Bonds and December 10, 2024 for Series B Bonds and December 10, 2026 for Series C Bonds.

Based on the rating results for long-term debt securities in accordance with Pefindo's Letter No. 937/PEF-DIR/IX/2021 dated September 20, 2021 from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the bonds are rated idAA (Double A) which is valid for the period July 1, 2022.

The bonds are guaranteed by all of the Company's assets, both movable and immovable property, both existing and future.

The issuance of the Bonds was carried out based on the Trusteeship Agreement for Shelf Registration Bond III PNM Phase V Year 2021 No.25 dated February 19, 2021, drawn up before a Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. in Jakarta, which acts as the Trustee is PT Bank Mega Tbk.

Restrictions required by the trustee:

1. Conducting sale of or transfer of the Company's assets fixed to any party exceeds 50% of value of fixed assets within one year period;
2. Hold a merger and/or consolidation with another company either directly or indirectly and take action to liquidate the Company;
3. Changing the fields of business unless the government's decision;

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021 (lanjutan)

4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan Total pokok sebesar Rp6.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V 2021 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 Maret 2021. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp168.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 6,25% per tahun, berjangka waktu 370 hari kalender.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp159.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri C: Jumlah pokok sebesar Rp339.200.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,25% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan 17 Maret 2022 untuk Obligasi Seri A, 17 Maret 2024 untuk Obligasi Seri B, dan 17 Maret 2026 untuk Obligasi Seri C.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. 937/PEF-DIR/IX/2021 tanggal 20 September 2021 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA (Double A) yang berlaku untuk periode 1 Juli 2022.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. RTG-1017/PEF-DIR/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 yang ditegaskan kembali dengan Surat Pefindo No. RC-106/PEF-DIR/II/2021 tanggal 9 Februari 2021 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idA+ (Single A Plus) yang berlaku untuk periode 8 Februari 2021 sampai dengan 1 Agustus 2021.

20. BOND PAYABLES (continued)

Revolving Bond IV PNM Tranche I Year 2021 (continued)

4. Changing the fields of business unless the government's decision;
5. Conducting termination of covenants company material adverse impact;
6. Reducing the capital, issued and paid-up capital.

Revolving Bonds III PNM Tranche V Year 2021

On May 23, 2019, the Company issued Revolving Bonds III PNM Year 2019 with a principal amount of Rp6,000,000,000,000. Bonds has been declared effectively by the Financial Services Authority (OJK) based on Decree No. S-58/D.04/2019 dated May 23, 2019.

The Company published and offered Revolving Bonds III PNM Tranche V in 2021 and had been recorded on the Indonesia Stock Exchange on March 18, 2021. The Company bonds of consist:

- Series A: Total principal amount of Rp168,000,000,000, fixed interest rate of 6.25% per annum, a term of 370 calendar days.
- Series B: Total principal amount of Rp159,000,000,000, fixed interest rate of 7.25% per annum, a term of 3 years.
- Series C: Total principal amount of Rp339,200,000,000, fixed interest rate of 8.25% per annum, a term of 5 years.

Bond interest will be paid every 3 (three) months from the date of June 17, 2021 until March 17, 2022 for Series A Bonds, March 17, 2024 for the Series B Bonds and March 17, 2026 for the Series C Bonds.

Based on the rating results for long-term debt securities in accordance with Pefindo's Letter No. 937/PEF-DIR/IX/2021 dated September 20, 2021 from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the bonds are rated idAA (Double A) which is valid for the period July 1, 2022.

Based on the ranking of long-term debt securities in accordance with Letter Pefindo No. RTG-1017/PEF-DIR/X/2019 dated October 24, 2019 which was reaffirmed by Letter of Pefindo No. RC-106/PEF-DIR/II/2021 dated February 9, 2021, from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the bonds received idA+ (Single A Plus) rating from February 8, 2021 until August 1, 2021.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021 (lanjutan)

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Per Wali amanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021 No. 25 tanggal 19 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap Perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV 2020 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Desember 2020. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp904.800.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 6,50% per tahun, berjangka waktu 370 hari kalender.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp537.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 7,75% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri C: Jumlah pokok sebesar Rp292.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

20. BOND PAYABLES (continued)

Revolving Bonds III PNM Tranche V Year 2021 (continued)

The bonds are secured by all the Company's assets both movable and immovable property, either existing or to be there in the future.

The bonds issuance was carried out based on Revolving Bonds III PNM Tranche V Year 2021 Trustee Agreement No. 25 dated February 19, 2021, which was made before the Notary Public, Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. in Jakarta, acting as Trustee is PT Bank Mega Tbk.

Restrictions required by the trustee:

1. Conducting sale of or transfer of the Company's fixed assets to any party exceeds 50% of value of fixed assets within one year period;
2. Hold a merger and/or consolidation with another company either directly or indirectly and take action to liquidate the Company;
3. The acquisition of shares or assets;
4. Changing the fields of business unless the government's decision;
5. Conducting termination of covenants company material adverse impact;
6. Reducing the capital, issued and paid-up capital.

Revolving Bonds III PNM Tranche IV Year 2020

On May 23, 2019, the Company issued Revolving Bonds III PNM Year 2019 with a principal amount of Rp6,000,000,000,000. Bonds has been declared effectively by the Financial Services Authority (OJK) based on Decree No.S-58/D.04/2019 dated May 23, 2019.

The Company published and offered Revolving Bonds III PNM Tranche IV in 2020 and had been recorded on the Indonesia Stock Exchange on December 7, 2020. The Company bonds consist of:

- Series A: Total principal amount of Rp904,800,000,000, fixed interest rate of 6.50% per annum, a period of 370 calendar days.
- Series B: Total principal amount of Rp537,000,000,000, fixed interest rate of 7.75% per annum, a period of 3 years.
- Series C: Total principal amount of Rp292,000,000,000, fixed interest rate of 8.75% per annum, a term of 5 years.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 (lanjutan)

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan 14 Desember 2021 untuk Obligasi Seri A, 4 Desember 2023 untuk Obligasi Seri B, dan 4 Desember 2025 untuk Obligasi Seri C.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. 937/PEF-DIR/IX/2021 tanggal 20 September 2021 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA (Double A) yang berlaku untuk periode 1 Juli 2022..

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-970/PEF-DIR/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang ditegaskan kembali dengan Surat Pefindo No.RTG-195/PEF-DIR/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idA+ (Single A Plus) yang berlaku untuk periode 19 Agustus 2020 sampai dengan 1 Agustus 2021.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Berdasarkan Perjanjian Perwali Amanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 No. 32 tanggal 17 November 2020 dan Addendum I No. 3 tanggal 2 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

20. BOND PAYABLES (continued)

Revolving Bonds III PNM Tranche IV Year 2020 (continued)

Bond interest will be paid every 3 (three) months from the date of March 4, 2021 until December 14, 2021 for Series A Bonds, December 4, 2023 for the Series B Bonds and December 4, 2025 for the Series C Bonds.

Based on the rating results for long-term debt securities in accordance with Pefindo's Letter No. 937/PEF-DIR/IX/2021 dated September 20, 2021 from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the bonds are rated idAA (Double A) which is valid for the period July 1, 2022.

Based on the ranking of long-term debt securities in accordance with Letter Pefindo No.RC-970/PEF-DIR/VIII/2020 dated August 19, 2020 which was reaffirmed by Letter of Pefindo No.RTG-195/PEF-DIR/X/2020 dated October 23, 2020, from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the bonds received idA+ (Single A Plus) rating from August 19, 2020 to August 1, 2021.

The bonds are secured by all the Company's assets both movable and immovable property, either existing or to be there in the future

The bonds issuance was carried out Based on Trustee Agreement of Revolving Bond III PNM Tranche IV Year 2020 No. 32 dated November 17, 2020 and Addendum I of Bonds Trustee Agreement No. 3 dated December 2, 2020, which was made before the Notary Public, Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., in Jakarta, acting as Trustee is PT Bank Mega Tbk.

Restrictions required by the trustee:

1. *Conducting sale of or transfer of the Company's assets fixed to any party exceeds 50% of value of fixed assets within one year period;*
2. *Hold a merger and/or consolidation with another company either directly or indirectly and take action to liquidate the Company;*
3. *The acquisition of shares or assets;*
4. *Changing the fields of business unless the government's decision;*
5. *Conducting termination of covenants company material adverse impact;*
6. *Reducing the capital, issued and paid-up capital.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2020 dengan Total pokok sebesar Rp6.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III 2020 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 Mei 2020. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Total pokok sebesar Rp55.100.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,40% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri B: Total pokok sebesar Rp194.900.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,00% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan 30 April 2023 untuk Obligasi Seri A dan 30 April 2025 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. 937/PEF-DIR/IX/2021 tanggal 20 September 2021 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA (Double A) yang berlaku untuk periode 1 Juli 2022.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-970/PEF-DIR/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang ditegaskan kembali dengan Surat Pefindo No.RTG-195/PEF-DIR/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idA+ (Single A Plus) yang berlaku untuk periode 19 Agustus 2020 sampai dengan 1 Agustus 2021.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian PerWali amanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020 No. 10 tanggal 8 April, 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

20. BOND PAYABLES (continued)

Revolving Bonds III PNM Tranche III Year 2020

On May 23, 2019, the Company issued Revolving Bonds III PNM Year 2020 with a principal amount of Rp6,000,000,000,000. Bonds has been declared effectively by the Financial Services Authority (OJK) based on Decree No. S-58/D.04/2019 dated May 23, 2019.

The Company published and offered Revolving Bond III PNM Tranche III in 2020 and had been recorded on the Indonesia Stock Exchange on May 4, 2020. The Company bonds consist of:

- Series A: Total principal amount of Rp55,100,000,000, fixed interest rate of 8.40% per annum, a term of 3 years.
- Series B: Total principal amount of Rp194,900,000,000, fixed interest rate of 9.00% per annum, a term of 5 years.

Bond interest will be paid every 3 (three) months from the date of July 30, 2020 until April 30, 2023 for Series A Bonds and April 30, 2025 for the Series B Bonds.

Based on the rating results for long-term debt securities in accordance with Pefindo's Letter No. 937/PEF-DIR/IX/2021 dated September 20, 2021 from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the bonds are rated idAA (Double A) which is valid for the period July 1, 2022.

Based on the ranking of long-term debt securities in accordance with Letter Pefindo No.RC-970/PEF-DIR/VIII/2020 dated August 19, 2020 which was reaffirmed by Letter of Pefindo No.RTG-195/PEF-DIR/X/2020 dated October 23, 2020, from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the bonds received idA+ (Single A Plus) rating from August 19, 2020 to August 1, 2021.

The bonds are secured by all the Company's assets both movable and immovable property, either existing or to be there in the future.

The bonds issuance was carried out based on Trustee Agreement of Revolving Bond III PNM Tranche III Year 2020 No.10 dated April 8, 2020, which was made before the Notary Public, Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. in Jakarta, acting as Trustee is PT Bank Mega Tbk.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020 (lanjutan)

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan Total pokok sebesar Rp6.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II 2019 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 November 2019. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Total pokok sebesar Rp586.500.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,40% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri B: Total pokok sebesar Rp763.500.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan 28 November 2022 untuk Obligasi Seri A dan 28 November 2024 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. 937/PEF-DIR/IX/2021 tanggal 20 September 2021 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA (Double A) yang berlaku untuk periode 1 Juli 2022.

20. BOND PAYABLES (continued)

Revolving Bonds III PNM Tranche III Year 2020 (continued)

Restrictions required by the trustee:

1. Conducting sale of or transfer of the Company's assets fixed to any party exceeds 50% of value of fixed assets within one year period;
2. Hold a merger and/or consolidation with another company either directly or indirectly and take action to liquidate the Company;
3. The acquisition of shares or assets;
4. Changing the fields of business unless the government's decision;
5. Conducting termination of covenants company material adverse impact;
6. Reducing the capital, issued and paid-up capital.

Revolving Bonds III PNM Tranche II Year 2019

On May 23, 2019, the Company issued Revolving Bonds III PNM Year 2019 with a principal amount of Rp6,000,000,000,000. Bonds has been declared effectively by the Financial Services Authority (OJK) based on Decree No. S-58/D.04/2019 dated May 23, 2019.

The Company published and offered Revolving Bonds III PNM Tranche II in 2019 and had been recorded on the Indonesia Stock Exchange on November 28, 2019. The Company bonds consist of:

- Series A: Total principal amount of Rp586,500,000,000, fixed interest rate of 8.40% per annum, a term of 3 years.
- Series B: Total principal amount of Rp763,500,000,000, fixed interest rate of 8.75% per annum, a term of 5 years.

Bonds interest will be paid every 3 (three) months from the date of February 28, 2020 until November 28, 2022 for Series A Bonds and November 28, 2024 for the Series B Bonds.

Based on the rating results for long-term debt securities in accordance with Pefindo's Letter No. 937/PEF-DIR/IX/2021 dated September 20, 2021 from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the bonds are rated idAA (Double A) which is valid for the period July 1, 2022.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019 (lanjutan)

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-971/PEF-DIR/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang ditegaskan kembali dengan Surat Pefindo No.RTG-195/PEF-DIR/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idA+ (*Single A Plus*) yang berlaku untuk periode 19 Agustus 2020 sampai dengan 1 Agustus 2021.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian PerWali amanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019 No. 18 tanggal 12 November 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan Total pokok sebesar Rp6.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

20. BOND PAYABLES (continued)

Revolving Bonds III PNM Tranche II Year 2019 (continued)

Based on the ranking of long-term debt securities in accordance with Letter Pefindo No.RC-971/PEF-DIR/VIII/2020 dated August 19, 2020 which was reaffirmed by Letter of Pefindo No.RTG-195/PEF-DIR/X/2020 dated October 23, 2020, from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the bonds received idA+ (*Single A Plus*) rating from August 19, 2020 to August 1, 2021.

The bonds are secured by all the Company's assets both movable and immovable property, either existing or to be there in the future.

The bonds issuance was carried out based on Trustee Agreement of Revolving Bond III PNM Tranche II Year 2019 No. 18 dated November 12, 2019, which was made before the Notary Public, Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. in Jakarta, acting as Trustee is PT Bank Mega Tbk.

Restrictions required by the trustee:

1. Conducting sale of or transfer of the Company's assets fixed to any party exceeds 50% of value of fixed assets within one year period;
2. Hold a merger and/or consolidation with another company either directly or indirectly and take action to liquidate the Company;
3. The acquisition of shares or assets;
4. Changing the fields of business unless the government's decision;
5. Conducting termination of covenants company material adverse impact;
6. Reducing the capital, issued and paid-up capital.

Revolving Bonds III PNM Tranche I Year 2019

On May 23, 2019, the Company issued Revolving Bonds III PNM Year 2019 with a principal amount of Rp6,000,000,000,000. Bonds has been declared effectively by the Financial Services Authority (OJK) based on Decree No. S-58/D.04/2019 dated May 23, 2019.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019 (lanjutan)

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I 2019 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Mei 2019. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Total pokok sebesar Rp1.401.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri B: Total pokok sebesar Rp599.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,85% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan 28 Mei 2022 untuk Obligasi Seri A dan 28 Mei 2024 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. 937/PEF-DIR/IX/2021 tanggal 20 September 2021 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA (Double A) yang berlaku untuk periode 1 Juli 2022.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-971/PEF-DIR/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang ditegaskan kembali dengan Surat Pefindo No.RTG-195/PEF-DIR/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idA+ (Single A Plus) yang berlaku untuk periode 19 Agustus 2020 sampai dengan 1 Agustus 2021.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian PerWali amanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019 No. 9 tanggal 11 Januari 2019 sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian PerWali amanatan Obligasi No. 14 tanggal 6 Februari 2019, Addendum II Perjanjian PerWali amanatan Obligasi No. 17 tanggal 4 April 2019, Addendum III Perjanjian PerWali amanatan Obligasi No. 74 tanggal 9 Mei 2019 dan Addendum IV Perjanjian PerWali amanatan Obligasi No. 118 tanggal 27 Mei 2019 yang semuanya yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

20. BOND PAYABLES (continued)

Revolving Bonds III PNM Tranche I Year 2019 (continued)

The Company published and offerer the Revolving Bond III PNM Tranche I in 2019 and had been recorded on the Indonesia Stock Exchange on May 29, 2019. The Company bonds consist of:

- Series A: Total principal amount of Rp1,401,000,000,000, fixed interest rate of 9.50% per annum, a term of 3 years.
- Series B: Total principal amount of Rp599,000,000,000, fixed interest rate of 9.85% per annum, a term of 5 years.

Bonds interest will be paid every 3 (three) months from the date of August 28, 2019 until May 28, 2022 for Series A Bonds and May 28, 2024 for the Series B Bonds.

Based on the rating results for long-term debt securities in accordance with Pefindo's Letter No. 937/PEF-DIR/IX/2021 dated September 20, 2021 from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the bonds are rated idAA (Double A) which is valid for the period July 1, 2022.

Based on the ranking of long-term debt securities in accordance with Letter Pefindo No.RC-971/PEF-DIR/VIII/2020 dated August 19, 2020 which was reaffirmed by Letter of Pefindo No.RTG-195/PEF-DIR/X/2020 dated October 23, 2020, from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the bonds received idA+ (Single A Plus) rating from August 19, 2020 to August 1, 2021.

The bonds are secured by all the Company's assets both movable and immovable property, either existing or to be there in the future.

The issuance of the Bonds is carried out based on the Trustee Agreement of Revolving Bonds III PNM Tranche I Year 2019 No. 9 dated January 11, 2019 as amended by Addendum I Bond Trustee Agreement No. 14 dated February 6, 2019, Addendum II Bonds Trustee Agreement No. 17 dated April 4, 2019, Addendum III Bonds Trustee Agreement No.74 dated May 9, 2019 and Addendum IV Bonds Trustee Agreement No. 118 dated May 27, 2019 all of which were made before Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. in Jakarta, acting as Trustee is PT Bank Mega Tbk.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019 (lanjutan)

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018

Pada tanggal 21 Juni 2017, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahun 2017 dengan jumlah pokok sebesar Rp4.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-345/D.04/2017 tanggal 21 Juni 2017.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II 2018 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 April 2018. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Total pokok sebesar Rp1.254.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,00% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri B: Total pokok sebesar Rp1.246.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,50% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan 13 April 2021 untuk Obligasi Seri A dan 13 April 2023 untuk Obligasi Seri B.

20. BOND PAYABLES (continued)

Revolving Bonds III PNM Tranche I Year 2019 (continued)

Restrictions required by the trustee:

1. Conducting sale of or transfer of the Company's assets fixed to any party exceeds 50% of value of fixed assets within one year period;
2. Hold a merger and/or consolidation with another company either directly or indirectly and take action to liquidate the Company;
3. The acquisition of shares or assets;
4. Changing the fields of business unless the government's decision;
5. Conducting termination of covenants company material adverse impact;
6. Reducing the capital, issued and paid-up capital.

Revolving Bonds II PNM Tranche II Year 2018

On June 21, 2017, the Company issued Revolving Bonds II PNM Year 2017 with a principal amount of Rp4,000,000,000,000. Bonds has been declared effectively by the Financial Services Authority (OJK) based on Decree No. S-345/D.04/2017 dated June 21, 2017.

The Company published and offered Revolving Bonds II PNM Tranche II in 2018 and had been recorded on the Indonesia Stock Exchange on April 16, 2018. The Company bonds consist of:

- Series A: Total principal amount of Rp1,254,000,000,000, fixed interest rate of 8.00% per annum, a term of 3 years.
- Series B: Total principal amount of Rp1,246,000,000,000, fixed interest rate of 8.50% per annum, a term of 5 years

Bonds interest will be paid every 3 (three) months from the date of July 13, 2018 until April 13, 2021 for Series A Bonds and April 13, 2023 for the Series B Bonds.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018 (lanjutan)

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. 937/PEF-DIR/IX/2021 tanggal 20 September 2021 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA (Double A) yang berlaku untuk periode 1 Juli 2022.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-971/PEF-DIR/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang ditegaskan kembali dengan Surat Pefindo No.RTG-195/PEF-DIR/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idA+ (Single A Plus) yang berlaku untuk periode 19 Agustus 2020 sampai dengan 1 Agustus 2021.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian PerWali amanatan Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018 No. 109 tanggal 12 Maret 2018 dan Addendum I Perjanjian PerWali amanatan Obligasi No. 139 tanggal 26 Maret 2018 yang keduanya yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

20. BOND PAYABLES (continued)

Revolving Bonds II PNM Tranche II Year 2018 (continued)

Based on the rating results for long-term debt securities in accordance with Pefindo's Letter No. 937/PEF-DIR/IX/2021 dated September 20, 2021 from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the bonds are rated idAA (Double A) which is valid for the period July 1, 2022.

Based on the ranking of long-term debt securities in accordance with Letter Pefindo No.RC-971/PEF-DIR/VIII/2020 dated August 19, 2020 which was reaffirmed by Letter of Pefindo No.RTG-195/PEF-DIR/X/2020 dated October 23, 2020, from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the bonds received idA+ (Single A Plus) rating from August 19, 2020 to August 1, 2021.

The bonds are secured by all the Company's assets both movable and immovable property, either existing or to be there in the future.

The bonds issuance was conducted based on Trustee Agreement of Revolving Bonds II PNM Tranche II Year 2018 No. 109 dated March 12, 2018 and Addendum I of Bonds Trustee Agreement No. 139 dated March 26, 2018, both of which are made before Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. in Jakarta, acting as Trustee is PT Bank Mega Tbk.

Restrictions required by the trustee:

1. Conducting sale of or transfer of the Company's assets fixed to any party exceeds 50% of value of fixed assets within one year period;
2. Hold a merger and/or consolidation with another company either directly or indirectly and take action to liquidate the Company;
3. The acquisition of shares or assets;
4. Changing the fields of business unless the government's decision;
5. Conducting termination of covenants Company material adverse impact;
6. Reducing the capital, issued and paid-up capital.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017

Pada tanggal 21 Juni 2017, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahun 2017 dengan jumlah pokok sebesar Rp4.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-345/D.04/2017 tanggal 21 Juni 2017.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 Juli 2017. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Total pokok sebesar Rp750.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri B: Total pokok sebesar Rp750.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan 12 Juli 2020 untuk Obligasi Seri A dan 12 Juli 2022 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. 937/PEF-DIR/IX/2021 tanggal 20 September 2021 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA (Double A) yang berlaku untuk periode 1 Juli 2022.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. RC-971/PEF-DIR/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang ditegaskan kembali dengan Surat Pefindo No. RTG-195/PEF-DIR/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idA+ (Single A Plus) yang berlaku untuk periode 19 Agustus 2020 sampai dengan 1 Agustus 2021.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

20. BOND PAYABLES (continued)

Revolving Bonds II PNM Tranche I Year 2017

On June 21, 2017, the Company issued Revolving Bonds II PNM Year 2017 with a principal amount of Rp4,000,000,000,000. Bonds has been declared effectively by the Financial Services Authority (OJK) based on Decree No. S-345/D.04/2017 dated June 21, 2017.

The Company published and offered Revolving Bonds II PNM Tranche I Year 2017 and had been recorded on the Indonesia Stock Exchange on July 13, 2017. The Company bonds consist of:

- Series A: Total principal amount of Rp750,000,000,000, fixed interest rate of 8.75% per annum, a term of 3 years.
- Series B: Total principal amount of Rp750,000,000,000, fixed interest rate of 9.25% per annum, a term of 5 years.

Bonds interest will be paid every 3 (three) months from the date of October 12, 2017 until July 12, 2020 for Series A Bonds and July 12, 2022 for the Series B Bonds.

Based on the rating results for long-term debt securities in accordance with Pefindo's Letter No. 937/PEF-DIR/IX/2021 dated September 20, 2021 from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the bonds are rated idAA (Double A) which is valid for the period July 1, 2022.

Based on the ranking of long-term debt securities in accordance with Letter Pefindo No. RC-971/PEF-DIR/VIII/2020 dated August 19, 2020 which was reaffirmed by Letter of Pefindo No. RTG-195/PEF-DIR/X/2020 dated October 23, 2020, from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the bonds received idA+ (Single A Plus) rating from August 19, 2020 to August 1, 2021.

The bonds are secured by all the Company's assets both movable and immovable property, either existing or to be there in the future.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017 (lanjutan)

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Addendum I Perjanjian PerWali amanatan Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017 No. 95 tanggal 15 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016

Pada tanggal 12 Desember 2014, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2014 dengan Total pokok sebesar Rp2.000.000.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-534/D.04/2014 tanggal 12 Desember 2014.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 November 2016. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Total pokok sebesar Rp661.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,00% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri B: Total pokok sebesar Rp839.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

20. BOND PAYABLES (continued)

Revolving Bonds II PNM Tranche I Year 2017 (continued)

The bonds issuance was conducted based on Addendum I Trustee Agreement of Revolving Bonds II PNM Tranche I Year 2017 No. 95 dated June 15, 2017 were made before Notary of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta, which is acting as trustee is PT Bank Mega Tbk.

Restrictions required by the trustee:

1. Conducting sale of or transfer of the Company's assets fixed to any party exceeds 50% of value of fixed assets within one year period;
2. Hold a merger and/or consolidation with another company either directly or indirectly and take action to liquidate the Company;
3. The acquisition of shares or assets;
4. Changing the fields of business unless the government's decision;
5. Conducting termination of covenants company material adverse impact;
6. Reducing the capital, issued and paid-up capital.

Revolving Bonds I PNM Tranche II Year 2016

On December 12, 2014, the Company issued Revolving Bonds I PNM Phase I Year 2014 with a principal amount of Rp2,000,000,000,000. Bonds has been declared effectively by the Financial Services Authority (OJK) based on Decree No. S-534/D.04/2014 dated December 12, 2014.

The Company published and offered Revolving Bond I PNM Tranche II Year 2016 and had been recorded on the Indonesia Stock Exchange on November 4, 2016. The Company bonds consist of:

- Series A: Total principal amount of Rp661,000,000,000, fixed interest rate of 9.00% per annum, a term of 3 years.
- Series B: Total principal amount of Rp839,000,000,000, fixed interest rate of 9.50% per annum, a term of 5 years.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016 (lanjutan)

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan 3 November 2019 untuk Obligasi Seri A dan 3 November 2021 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. 937/PEF-DIR/IX/2021 tanggal 20 September 2021 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA (Double A) yang berlaku untuk periode 1 Juli 2022.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. RC-971/PEF-DIR/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang ditegaskan kembali dengan Surat Pefindo No. RTG-195/PEF-DIR/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idA+ (Single A) yang berlaku untuk periode 19 Agustus 2020 sampai dengan 1 Agustus 2021.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2014 No. 7 tanggal 6 Oktober 2014 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha Perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian Perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

20. BOND PAYABLES (continued)

Revolving Bonds I PNM Tranche II Year 2016 (continued)

Bond interest payment every 3 (three) months from the date of February 3, 2017 until November 3, 2019 to Series A Bonds and November 3, 2021 for the Series B Bonds.

Based on the rating results for long-term debt securities in accordance with Pefindo's Letter No. 937/PEF-DIR/IX/2021 dated September 20, 2021 from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the bonds are rated idAA (Double A) which is valid for the period July 1, 2022.

Based on the ranking of long-term debt securities in accordance with Letter Pefindo No. RC-971/PEF-DIR/VIII/2020 dated August 19, 2020 which was reaffirmed by Letter of Pefindo No. RTG-195/PEF-DIR/X/2020 dated October 23, 2020, from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the bonds received idA+ (Single A Plus) rating from August 19, 2020 to August 1, 2021.

The bonds are secured by all the Company's assets both movable and immovable property, either existing or to be there in the future.

The bond issuance was conducted based on Revolving Bond I PNM Tranche I Year 2014 Trustee Deed Agreement No. 7 dated October 6, 2014 were made in the presence of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta, which is acting as trustee is PT Bank Mega Tbk.

Restrictions required by the trustee:

1. *Conducting sale of or transfer of the Company's assets fixed to any party exceeds 50% of value of fixed assets within one year period;*
2. *Hold a merger and/or consolidation with another company either directly or indirectly and take action to liquidate the Company;*
3. *The acquisition of shares or assets;*
4. *Changing the fields of business unless the government's decision;*
5. *Conducting termination of covenants Company material adverse impact;*
6. *Reducing the capital, issued and paid-up capital.*

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016 (lanjutan)

Perusahaan sudah mematuhi setiap syarat dan pembatasan yang diberikan oleh Wali Amanat atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021, Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020, Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020, Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I dan II Tahun 2019, Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018, Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017, Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016, Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2014, Obligasi II PNM Tahun 2013, dan Obligasi I PNM Tahun 2012.

Perusahaan mengukur nilai obligasi dengan memperhitungkan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya transaksi obligasi yang sudah diterbitkan oleh Perusahaan per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021	7.644.312.600	-
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020	5.096.208.398	-
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020	744.433.250	101.472.311
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019	1.307.610.750	322.826.309
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019	4.473.781.014	1.897.265.240
Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018	3.331.375.948	2.241.801.950
Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017	3.764.210.608	3.071.457.961
Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016	2.193.713.909	1.903.833.143
Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2014	2.972.354.958	2.972.354.958
Obligasi II PNM Tahun 2013	2.908.798.140	2.908.798.140
Obligasi I PNM Tahun 2012	2.969.439.794	2.969.439.794
Total	37.406.239.369	18.389.249.806

Biaya transaksi obligasi yang sudah diamortisasi dan dibebankan ke Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021	-	-
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020	1.500.802.134	-
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020	265.113.380	-
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019	648.547.879	665.653.272
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019	3.253.077.835	665.653.273
Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018	2.807.617.100	1.317.322.523
Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017	3.497.076.059	2.277.599.067
Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016	2.193.713.909	1.615.105.952
Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2014	2.972.354.958	2.972.354.958
Obligasi II PNM Tahun 2013	2.908.798.140	2.908.798.140
Obligasi I PNM Tahun 2012	2.969.439.794	2.969.439.794
Total	23.016.541.188	15.391.926.979

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar utang obligasi diungkapkan pada Catatan 28.

20. BOND PAYABLES (continued)

Revolving Bonds I PNM Tranche II Year 2016 (continued)

The Company has complied with every requirement and covenants required by the Trustee of the issuance of Revolving Bonds III PNM Tranche V Year 2021, Revolving Bonds III PNM Tranche IV Year 2020, Revolving Bonds III PNM Tranche III Year 2020, Revolving Bonds III PNM Tranche I and II Year 2019, Revolving Bonds II PNM Tranche II Year 2018, Revolving Bonds II PNM Tranche I Year 2017, Revolving Bonds I PNM Tranche II Year 2016, Revolving Bonds I PNM Tranche I Year 2014, Bonds II PNM Year 2013, and Bonds I PNM Year 2012.

The Company measures the value of bonds by calculating the amortized cost using the effective interest method. Bond transaction cost is charged by the Company as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

	2021	2020
Revolving Bonds III PNM Tranche V Year 2021	-	-
Revolving Bonds III PNM Tranche IV Year 2020	-	-
Revolving Bonds III PNM Tranche III Year 2020	101.472.311	-
Revolving Bonds III PNM Tranche II Year 2019	322.826.309	-
Revolving Bonds III PNM Tranche I Year 2019	1.897.265.240	-
Revolving Bonds II PNM Tranche II Year 2018	2.241.801.950	-
Revolving Bonds II PNM Tranche I Year 2017	3.071.457.961	-
Revolving Bonds I PNM Tranche II Year 2016	1.903.833.143	-
Revolving Bonds I PNM Tranche I Year 2014	2.972.354.958	-
Bonds II PNM Year 2013	2.908.798.140	-
Bonds I PNM Year 2012	2.969.439.794	-
Total	18.389.249.806	Total

Bond transaction cost have been amortized and charged to the Statement of profit and loss and Other Comprehensive Income until the date of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

	2021	2020
Revolving Bonds III PNM Tranche V Year 2021	-	-
Revolving Bonds III PNM Tranche IV Year 2020	-	-
Revolving Bonds III PNM Tranche III Year 2020	-	-
Revolving Bonds III PNM Tranche II Year 2019	665.653.272	-
Revolving Bonds III PNM Tranche I Year 2019	665.653.273	-
Revolving Bonds II PNM Tranche II Year 2018	1.317.322.523	-
Revolving Bonds II PNM Tranche I Year 2017	2.277.599.067	-
Revolving Bonds I PNM Tranche II Year 2016	1.615.105.952	-
Revolving Bonds I PNM Tranche I Year 2014	2.972.354.958	-
Bonds II PNM Year 2013	2.908.798.140	-
Bonds I PNM Year 2012	2.969.439.794	-
Total	15.391.926.979	Total

Information regarding classification and fair value of bond payables are disclosed in Note 28.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. PINJAMAN DARI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN LEMBAGA KREDIT LUAR NEGERI

21. BORROWINGS FROM THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND FOREIGN CREDIT INSTITUTION

a. Berdasarkan jenis:

a. By type:

	2021	2020	
Pihak Berelasi			Related Parties
Rupiah			Rupiah
Pusat Investasi Pemerintah (PIP)	3.917.715.190.015	3.035.065.437.303	Indonesia Investment Agency (PIP)
Pihak Ketiga			Third Parties
Bank Pembangunan Asia			Asian Development Bank
(USD401.226,81)	5.725.105.338	-	(USD401,226.81)
(USD474.771,94)	-	6.696.662.821	(USD474,771.92)
Subtotal	5.725.105.338	6.696.662.821	Subtotal
Total	3.923.440.295.353	3.041.762.100.124	Total

b. Berdasarkan jatuh tempo:

b. By maturity:

	2021	2020	
Kurang dari 1 tahun	508.277.118.314	185.095.018.084	Less than 1 year
1 - 2 tahun	1.060.788.348.883	1.076.764.899.159	1 - 2 years
Lebih dari 2 tahun	2.354.374.828.156	1.779.902.182.881	More than 2 years
Total	3.923.440.295.353	3.041.762.100.124	Total

Pusat Investasi Pemerintah

Indonesia Investment Agency

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor 30 tanggal 20 April 2021, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman/Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp1.500.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana dan akan berakhir di bulan April 2024. Perusahaan wajib menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman.

Based on the Deed of Loan/Financing Agreement Number 30 dated April 20, 2021, the Government Investment Center provides a Loan/Financing facility to the Company in the amount of Rp1,500,000,000,000 with an interest rate of 4% effective per annum with a loan term of 36 months without a grace period from the date of disbursement. funds and will expire in April 2024. The Company is required to disburse special Loans/Financing for the Mekaar Program and must submit a List of Receivables as Fiduciary Guarantees every 6 months with a minimum value equal to 100% of the outstanding loan.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor 32 tanggal 20 April 2021, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman/Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp1.000.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana dan akan berakhir di bulan April 2024. Perusahaan wajib menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan khusus untuk Program Mekaar Syariah dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman.

Based on the Deed of Loan/Financing Agreement Number 32 dated April 20, 2021, the Government Investment Center provides a Loan/Financing facility to the Company in the amount of Rp1,000,000,000,000 with an interest rate of 4% effective per annum with a loan term of 36 months without a grace period from the date of disbursement. funds and will expire in April 2024. The Company is required to disburse special Loans/Financing for the Syariah Mekaar Program and must submit a List of Receivables as Fiduciary Guarantees every 6 months with a minimum value equal to 100% of the outstanding loan.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**21. PINJAMAN DARI PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN LEMBAGA KREDIT LUAR
NEGERI (lanjutan)**

Pusat Investasi Pemerintah (lanjutan)

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No. 15 tanggal 14 Agustus 2020, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman/Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp1.147.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana dan akan berakhir di bulan Agustus 2023. Perusahaan wajib menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan khusus untuk Program Mekaar Syariah dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No. 2 tanggal 4 November 2019, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman/Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp2.350.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana dan akan berakhir pada November 2022. Perusahaan wajib menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No. 61 tanggal 31 Oktober 2018, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman/Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp750.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana dan akan berakhir pada Oktober 2021. Perusahaan wajib menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No. 58 tanggal 28 Desember 2017, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman/Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman

**21. BORROWINGS FROM THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA AND FOREIGN
CREDIT INSTITUTION (continued)**

Indonesia Investment Agency (continued)

Based on the Deed of Loan/Financing Agreement No. 15 dated August 14, 2020, the Government Investment Agency provides a Loan/Financing facility to the Company amounting to Rp1,147,000,000,000 with an interest rate of 4% effective per annum with a loan term of 36 months without grace period from the date of disbursement fund and will be mature on August 2023. The Company is obliged to channel Loans/Financing specifically for the Sharia Mekaar Program and must submit a List of Accounts Receivable which is a Fiduciary Guarantee every 6 months with a minimum value or equal to 100% of the outstanding loan.

Based on the Deed of Loan/Financing Agreement No. 2 dated November 4, 2019, the Government Investment Agency provides a Loan/Financing facility to the Company in the amount of Rp2,350,000,000,000 with an effective interest rate of 4% per annum with a loan period of 36 months without a grace period since the disbursement date fund and will be mature on November 2022. The Company is obliged to distribute Loans/Financing specifically for the Mekaar Program and must submit the List of Receivables that become Fiduciary Collateral every 6 months with a minimum value or equal to 100% of outstanding loans.

Based on the Deed of Loan/Financing Agreement No. 61 dated October 31, 2018, the Government Investment Center provides a Loan/Financing facility to the Company in the amount of Rp750,000,000,000 with an interest rate of 4% effective per annum with a loan period of 36 months without grace period from the date of disbursement fund and will be mature on October 2021. The Company is obliged to channel special Loans/Financing for the Mekaar Program and must submit a List of Receivables which become a Fiduciary Guarantee every 6 months with a value of at least or equal to 100% of the outstanding loan.

Based on the Deed of Loan/Financing Agreement No. 58 dated December 28, 2017, the Indonesia Investment Agency provides a loan/financing facility to the Company amounting to Rp100,000,000,000 with an effective interest rate of 4% per annum with a loan term of 36 months without grace period from

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

21. PINJAMAN DARI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN LEMBAGA KREDIT LUAR NEGERI (lanjutan)

Pusat Investasi Pemerintah (lanjutan)

36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana dan telah dilunasi pada tanggal 28 Desember 2020 dan 11 Januari 2021. Perusahaan wajib menyalurkan Pinjaman/ Pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No. 47 tanggal 30 November 2017, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman/ Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana dan telah dilunasi pada tanggal 28 Desember 2020. Perusahaan wajib menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No. 2 tanggal 4 Agustus 2017, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman/ Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana dan telah dilunasi pada tanggal 24 Agustus dan 8 September 2020. Perusahaan wajib menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari *outstanding* pinjaman.

Bank Pembangunan Asia

Utang Penerusan Pinjaman kepada Pemerintah Republik Indonesia (Pemerintah) merupakan pinjaman dalam rangka pendanaan kredit mikro untuk penataan lingkungan dan pemukiman (NUSSP) yang bersumber dari Bank Pembangunan Asia (ADB).

Berdasarkan perjanjian tersebut Perusahaan dikenakan bunga berdasarkan tingkat bunga ADB kepada Pemerintah secara berkala (LIBOR+0,6%)+0,35% per tahun. Dana tersebut disalurkan ke lembaga keuangan pelaksana untuk dipinjamkan kembali dalam bentuk pembiayaan kredit mikro untuk penataan lingkungan dan pemukiman (NUSSP).

21. BORROWINGS FROM THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND FOREIGN CREDIT INSTITUTION (continued)

Indonesia Investment Agency (continued)

the date of disbursement fund and has been fully paid on December 28, 2020 and January 11, 2021. The Company is required to disburse Loans/ Financing specifically for Mekaar Program and is obliged to submit List of Receivables that become Fiduciary Guarantee every 6 months with minimum or equal to 100% of outstanding loan.

Based on the Deed of Loan Agreement/Financing No. 47 dated November 30, 2017, the Indonesia Investment Agency provides a loan/financing facility to the Company amounting to Rp100,000,000,000 with an effective interest rate of 4% per annum with a loan term of 36 months without grace period from the date of disbursement fund and has been fully paid on December 28, 2020. The Company is required to disburse Loans/Financing specifically for Mekaar Program and is obliged to submit List of Receivables that become Fiduciary Guarantee every 6 months with minimum or equal to 100% of outstanding loan.

Based on the Deed of Loan Agreement/Financing No. 2 dated August 4, 2017, the Indonesia Investment Agency provides a loan/financing facility to the Company amounting to Rp100,000,000,000 with an effective interest rate of 4% per annum with a loan term of 36 months without grace period from the date of disbursement fund and has been fully paid on August 24 and September 8, 2020. The Company is required to disburse Loans/Financing specifically for Mekaar Program and is obliged to submit List of Receivables that become Fiduciary Guarantee every 6 months with minimum or equal to 100% of outstanding loan.

Asian Development Bank

Due to the Government of the Republic of Indonesia ("the Government") represent loan for micro financing for Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP) from Asian Development Bank (ADB).

Based on that agreement the Company was imposed by interest rate according to ADB interest rate (periodically) to the Government (LIBOR+0.6%)+ 0,35% per annum. The fund were distributed to executing financial institution through micro financing for Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP).

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

22. PERPAJAKAN

22. TAXATION

a. Pajak Dibayar Dimuka

a. Prepaid Taxes

	2021	2020	
Entitas Anak			Subsidiaries
PT PNM IM			PT PNM IM
Pajak penghasilan:			Corporate income tax:
PPh Pasal 28	-	206.276.121	Income Tax Article 28
Pajak lain-lain:			Other taxes:
Pajak Pertambahan Nilai	273.552.081	-	Value Added Tax
Subtotal	273.552.081	206.276.121	Subtotal
PT PNM VC			PT PNM VC
Pajak penghasilan:			Corporate income tax:
PPh Pasal 4 ayat (2)	41.805.200.818	46.298.150.900	Income Tax Article 4 (2)
PPh Pasal 21	13.138.910	68.325.432	Income Tax Article 21
PPh Pasal 22	86.878.078	-	Income Tax Article 22
PPh Pasal 23	4.809.717.372	-	Income Tax Article 23
PPh Pasal 25	2.051.693.367	-	Income Tax Article 25
PPh Pasal 28	4.536.236.820	5.592.158.427	Income Tax Article 28
Pajak lain-lain:			Other taxes:
Pajak Pertambahan Nilai	18.967.294.645	7.159.925.334	Value Added Tax
Subtotal	72.270.160.010	59.118.560.093	Subtotal
Total	72.543.712.091	59.324.836.214	Total

b. Utang Pajak

b. Taxes Payables

	2021	2020	
Entitas Induk			Parent Entity
Pajak penghasilan:			Corporate income tax:
PPh Pasal 4 (2)	5.510.637.897	891.210.136	Income Tax Article 4 (2)
PPh Pasal 21	10.061.609.150	5.118.877.014	Income Tax Article 21
PPh Pasal 22	140.807.813	135.345.428	Income Tax Article 22
PPh Pasal 23	1.306.420.983	1.044.098.478	Income Tax Article 23
PPh Pasal 25	19.600.762.540	2.102.473.564	Income Tax Article 25
PPh Pasal 29	231.260.238.618	95.699.453.579	Income Tax Article 29
Pajak lain-lain:			Other taxes:
Pajak Pertambahan Nilai	12.141.052.530	7.903.541.020	Value Added Tax
Subtotal	280.021.529.531	112.894.999.219	Subtotal
Entitas Anak			Subsidiaries
Pajak penghasilan:			Corporate income tax:
PPh Pasal 4 (2)	279.469.859	697.839.824	Income Tax Article 4 (2)
PPh Pasal 21	3.921.545.511	2.242.599.552	Income Tax Article 21
PPh Pasal 22	899.926	-	Income Tax Article 22
PPh Pasal 23	278.599.017	294.577.589	Income Tax Article 23
PPh Pasal 25	609.397.163	684.196.320	Income Tax Article 25
PPh Pasal 29	23.986.743.566	4.217.159.864	Income Tax Article 29
Pajak lain-lain:			Other taxes:
Pajak Pertambahan Nilai	29.336.409.618	1.261.418.819	Value Added Tax
Subtotal	58.413.064.660	9.397.791.968	Subtotal
Total	338.434.594.191	122.292.791.187	Total

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

22. TAXATION (continued)

c. Beban (manfaat) pajak Perusahaan

c. The Company's income tax expense (benefit)

	2021	2020	
Entitas Induk			Parent Entity
Beban pajak kini - non-final	(355.537.237.440)	(131.912.353.098)	Current tax expense - non-final
Beban pajak tangguhan	160.187.102.863	111.778.686.006	Deferred tax expense
Entitas Anak			Subsidiaries
Beban pajak kini - non-final	(45.941.096.843)	(22.050.031.599)	Current tax expense - non-final
Beban (manfaat) pajak tangguhan	(252.421.513)	1.643.189.671	Deferred tax expense (benefit)
Beban pajak	(241.543.652.933)	(40.540.509.020)	Tax expense

d. Pajak Penghasilan Badan

d. Corporate Income Tax

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi konsolidasian dan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

Reconciliations between income before income tax consolidated statement of profit and loss and taxable income are as follows:

	2021	2020	
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi konsolidasian	1.086.671.580.172	399.135.154.357	Consolidated profit before income tax per consolidated statements of income
Laba sebelum pajak penghasilan Entitas Anak	(109.361.103.984)	(63.481.560.471)	Profit before income tax of Subsidiaries
Transaksi Eliminasi	58.817.738.615	42.660.157.039	Elimination Transaction
Laba sebelum pajak penghasilan Entitas Induk	1.036.128.214.803	378.313.750.925	Profit before income tax of Parent
Dikurangi: Pendapatan bunga yang telah dikenakan pajak final	(181.898.271.843)	(210.860.602.740)	Less: Interest income subjected to final tax
Laba entitas induk sebelum rekonsiliasi fiskal	854.229.942.960	167.453.148.184	Income of parents before fiscal reconciliation
Beda Waktu:			Temporary differences:
Penyusutan aset tetap	102.853.043.884	184.800.542.004	Depreciation of fixed assets
Amortisasi aset takberwujud dan biaya pra-operasi	16.624.683.033	15.742.682.713	Amortization of intangible asset and pre-operation cost
Beban (pemulihan) nilai yang tidak dapat diperhitungkan	641.980.370.154	310.832.557.754	Impairment losses expenses that cannot be accounted for as a non-deductible expenses
Imbalan kerja	(15.893.705.896)	22.467.977.776	Employee benefits
Jasa produksi dan tantiem	22.847.560.909	84.126.047.924	Bonus and tantiem
Beban lainnya yang tidak dapat diakui secara fiskal lainnya	(40.288.757.253)	(237.574.077.616)	Other expenses that can not be recognized
Subtotal	728.123.194.831	380.395.730.555	Subtotal
Beda Tetap:			Permanent differences:
Beban yang tidak dapat dikurangkan menurut fiskal	92.294.473.823	94.827.249.019	Non-deductible expenses pursuant to fiscal
Bagian laba atas investasi pada Entitas Asosiasi	(58.569.259.037)	(43.074.522.768)	Portion of profit from investment in Associates
Subtotal	33.725.214.786	51.752.726.251	Subtotal

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Pajak Penghasilan Badan (lanjutan)

	2021	2020
Laba menurut Pajak	1.616.078.352.559	599.601.604.991
Laba menurut Pajak (dibulatkan)	1.616.078.352.000	599.601.605.000
Beban Pajak Kini:		
Tahun 2021 (22% x Rp1.616.078.352.000)	355.537.237.440	-
Tahun 2020 (22% x Rp599.601.604.000)	-	131.912.353.098
Pajak Penghasilan	355.537.237.440	131.912.353.098
Dikurangi:		
Pajak dibayar di muka		
PPh Pasal 23	(8.630.000)	(26.137.000)
PPh Pasal 25	(124.268.368.822)	(36.186.762.519)
Estimasi Kurang bayar Pajak Penghasilan Badan	231.260.238.618	95.699.453.579

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Indonesia, Perusahaan melaporkan/menyetorkan pajak berdasarkan sistem *self-assessment*. Fiskus dapat menetapkan atau mengubah pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perusahaan tidak mengkreditkan estimasi beban PPh Badan periode berjalan dengan uang muka pajak per 31 Desember 2021 dan 2020.

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian SPT tahunan PPh Badan.

e. Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan

22. TAXATION (continued)

d. Corporate Income Tax (continued)

Taxable income	599.601.604.991
Taxable income (round down)	599.601.605.000
Current Tax Expenses:	
Year 2021	-
Year 2020	131.912.353.098
(22% x Rp599,601,604,000)	-
Income Tax	131.912.353.098
Less:	
Prepaid taxes	
Income Tax article 23	(26.137.000)
Income Tax article 25	(36.186.762.519)
Estimation on Underpaid Corporate Income Tax	95.699.453.579

According to the Indonesian Tax Act, the Company reported/paid tax based on self-assessment system. Tax authorities may assess or amend taxes for a period specified in accordance with applicable regulations.

The Company does not estimate the burden of the corporate income tax credit for the year with a prepaid tax by December 31, 2021 and 2020.

Taxable income reconciliation results become the basis for filling annual corporate income tax.

e. Deferred Tax Assets (Liabilities)

Mutasi tahun 2021/Movement during 2021

	31 Des 2020/ Dec 31, 2020	Dibebankan ke Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/Charged to Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income	Dikreditkan ke Ekuitas/ Charged to Equity	Penyesuaian/ Adjustment	31 Des 2021/ Dec 31, 2021	
Entitas Induk						Parent Entity
Penyusutan aset tetap	985.768.052	22.627.669.654	-	-	23.613.437.706	Depreciation of fixed assets
Amortisasi aset takberwujud dan biaya pra-operasi	3.472.029.933	3.657.430.267	-	-	7.129.460.200	Amortization of intangible assets and pre-operation expenses
Imbalan kerja	5.680.846.785	(3.496.615.297)	-	-	2.184.231.488	Employee benefits
Jasa produksi	23.346.457.556	11.070.631.210	-	-	34.417.088.766	Bonus, incentive and tantiem
Cadangan kerugian penurunan nilai	142.224.877.069	126.327.987.029	-	-	268.552.864.098	Allowance for impairment losses
Aset pajak tangguhan Entitas Induk	175.709.979.395	160.187.102.863	-	-	335.897.082.258	Deferred tax assets - Parent

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

22. TAXATION (continued)

e. Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan

e. Deferred Tax Assets (Liabilities)

Mutasi tahun 2021/Movement during 2021						
	31 Des 2020/ Dec 31, 2020	Dibebankan ke Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/Charged to Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income	Dikreditkan ke Ekuitas/ Charged to Equity	Penyesuaian/ Adjustment	30 Des 2021/ Dec 30, 2021	
<i>Entitas Anak</i>						<i>Subsidiaries</i>
Penyusutan aset tetap	(789.426.668)	3.571.013.673	-	-	2.781.587.005	Depreciation of fixed assets
Amortisasi aset takberwujud dan biaya pra-operasi	36.888.918	31.306.527	-	-	68.195.445	Amortization of intangible assets and pre-operation expenses
Imbalan kerja Cadangan kerugian penurunan nilai	1.144.878.266	(90.171.597)	-	-	1.054.706.669	Employee benefits
Rugi fiskal tidak dapat dikompensasikan	34.342.851.707	(5.966.743.257)	-	-	28.376.108.450	Allowance for impairment losses
Penilaian BYMHD jasa produksi	389.096.210	2.129.600.860 (4.709.096.458)	-	-	2.518.697.070 (4.709.096.458)	Uncompensated fiscal loss Valuation
	4.753.176.191	5.062.707.079	-	-	9.815.883.270	Accrued expenses - bonus
Aset pajak tangguhan Entitas Anak	39.877.464.624	28.616.827	-	-	39.906.081.451	Deferred tax assets - Subsidiaries
Subtotal	215.587.444.019	160.215.719.690	-	-	375.803.163.709	Subtotal
<i>Entitas Anak</i>						<i>Subsidiaries</i>
Penyusutan aset tetap	(6.585.300.641)	12.781.884.703	-	-	6.196.584.062	Depreciation of fixed assets
BYMHD jasa produksi	396.442.922	(608.692.716)	-	-	(212.249.794)	Accrued expenses - bonus
Insentif THR	507.979.842	(860.860.649)	-	-	(352.880.807)	Incentive THR
Beban imbalan pasca kerja	186.993.843	(276.149.875)	-	-	(89.156.032)	Employee benefits
	(267.933.970)	229.445.463	-	-	(38.488.507)	Employee benefits
Liabilitas pajak tangguhan Entitas Anak	(5.761.818.004)	11.265.626.926	-	-	5.503.808.922	Deferred tax liabilities Subsidiaries
Aset Pajak Tangguhan Konsolidasi	209.825.626.015	171.481.346.616	-	-	381.306.972.631	Deferred Tax Assets - Consolidation

Mutasi tahun 2020/Movement during 2020							
	31 Des 2019/ Dec 31, 2019	Dampak Penerapan PSAK 71/ Impact of Implementation PSAK 71	Dibebankan ke Laba Rugi Komprehensif/ Charged to Statements of Comprehensive Income	Dikreditkan ke Ekuitas/ Charged to Equity	Penyesuaian/ Adjustment	31 Des 2020 / Dec 31, 2020	
<i>Entitas Induk</i>							<i>Parent Entity</i>
Penyusutan aset tetap	15.660.321.746	-	(14.674.553.694)	-	-	985.768.052	Depreciation of fixed assets
Amortisasi aset takberwujud dan biaya pra-operasi	504.738.236	-	2.967.291.697	-	-	3.472.029.933	Amortization of intangible assets and pre-operation expenses
Imbalan kerja Jasa produksi, bonus dan tantiem	6.245.537.631	-	(564.690.846)	-	-	5.680.846.785	Employee benefits
Cadangan kerugian penurunan nilai	12.375.000.000	-	10.971.457.556	-	-	23.346.457.556	Bonus, incentive and tantiem
	10.954.463.092	18.191.232.684	113.079.181.293	-	-	142.224.877.069	Allowance for impairment losses
Aset (Liabilitas) pajak tangguhan Entitas Induk	45.740.060.705	18.191.232.684	111.778.686.006	-	-	175.709.979.395	Deferred tax assets (liabilities) - Parent

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

22. TAXATION (continued)

e. Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan (lanjutan)

e. *Deferred Tax Assets (Liabilities) (continued)*

Mutasi tahun 2020/Movement during 2020						
	31 Des 2019/ Dec 31, 2019	Dampak Penerapan PSAK 71/ Impact of Implementation PSAK 71	Dibebankan ke Laba Rugi Komprehensif/ Charged to Statements of Comprehensive Income	Dikreditkan ke Ekuitas/ Charged to Equity	Penyesuaian/ Adjustment	31 Des 2020/ Dec 31, 2020
Entitas Anak						
Penyusutan aset tetap	1.511.685.986	-	(1.589.021.334)	-	(712.091.320)	(789.426.668)
Amortisasi aset takberwujud dan biaya pra-operasi	36.888.918	-	-	-	-	36.888.918
Imbalan kerja	784.732.439	-	353.540.831	6.604.996	-	1.144.878.266
Cadangan kerugian penurunan nilai	5.452.382.477	24.006.052.264	1.490.922.383	-	3.393.494.583	34.342.851.707
Rugi fiskal tidak dapat dikompensasikan	-	-	389.096.210	-	-	389.096.210
Penilaian BYMHD jasa produksi	435.491.785	-	(435.491.785)	-	-	-
	5.673.706.349	-	(920.530.157)	-	-	4.753.176.192
Aset (liabilitas) pajak tangguhan Entitas Anak	13.894.887.954	24.006.052.264	(711.483.852)	6.604.996	2.681.403.263	39.877.464.625
Subtotal	59.634.948.659	42.197.284.948	111.067.202.154	6.604.996	2.681.403.263	215.587.444.020
Penyusutan aset tetap	(6.585.300.641)	-	-	-	-	(6.585.300.641)
BYMHD jasa produksi	396.442.922	-	-	-	-	396.442.922
Insentif THR	507.979.842	-	-	-	-	507.979.842
	186.993.843	-	-	-	-	186.993.843
Beban imbalan pasca kerja	19.855.594	-	-	-	(287.789.564)	(267.933.970)
Aset (Liabilitas) pajak tangguhan Entitas Anak	(5.474.028.440)	-	-	-	(287.789.564)	(5.761.818.004)
Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan Konsolidasi	54.160.920.219	42.197.284.948	111.067.202.154	6.604.996	2.393.613.699	209.825.626.016

Perpu No.1 Tahun 2020 mengatur, antara lain, penurunan tarif pajak badan sebagai berikut:

- Untuk tahun pajak 2020 dan 2021: dari 25% menjadi 22%;
- Mulai tahun pajak 2022: dari 22% menjadi 20%;
- Perusahaan Terbuka dalam negeri yang memenuhi kriteria tambahan tertentu dapat memperoleh tarif pajak sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak yang disebutkan di atas.

Pada tanggal 18 Mei 2020, Perpu No. 1 Tahun 2020 telah disahkan menjadi Undang-Undang ("UU") No. 2 Tahun 2020.

Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang disahkan pada tanggal 7 Oktober 2021 pada Pasal 17 ayat (1) dinyatakan bahwa:

Perpu No.1 Year 2020 regulates, among others, a decrease in the corporate tax rate as follows:

- For fiscal years 2020 and 2021: from 25% to 22%;
- Starting fiscal year 2022: from 22% to 20%;
- Domestic public listed companies that fulfill certain additional criteria will be eligible for a tax rate which is lower by 3% from the abovementioned tax rates.

On May 18, 2020, Perpu No. 1 Year 2020 has been legalized into Law No. 2 Tahun 2020.

Based on the Tax Harmonization Law which was ratified on October 7, 2021 in Article 17 paragraph (1) it is stated that:

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan (lanjutan)

"Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022".

f. Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif Entitas Induk	1.036.128.214.803	136.759.210.133
Beban pajak dihitung pada tarif yang berlaku:		
Tahun 2021 - disetahunkan (22% x Rp1.036.128.214.803)	227.948.207.257	-
Tahun 2020 - disetahunkan (22% x Rp136.759.210.133)	-	30.087.026.229
Total	227.948.207.257	30.087.026.229
Dampak pajak atas:		
Beban yang tidak dapat dikurangkan menurut fiskal	20.044.769.902	6.594.946.940
Bagian laba atas investasi pada Entitas Asosiasi	(12.885.236.988)	(6.919.973.919)
Pendapatan bunga yang telah dikenakan pajak final	(40.017.619.805)	(24.235.379.983)
Penyesuaian pajak tangguhan	79.981.551.549	29.571.025.713
Total	47.123.464.658	5.010.618.751
Beban pajak	275.071.671.915	35.097.644.980

g. Surat Ketetapan Pajak

Perusahaan tidak menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) dari Kantor Pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

22. TAXATION (continued)

e. *Deferred Tax Assets (Liabilities) (continued)*

"Domestic corporate taxpayers and permanent establishments are 22% which will take effect in the 2022 Fiscal Year."

f. *Reconciliation between tax expense and the result of accounting profit before tax multiplication with prevailing tax rate is as follow:*

	2021	2020
Profit before income tax per statements of comprehensive income of Parent Entity	1.036.128.214.803	136.759.210.133
Tax expense is calculated by prevailing tax rate		
Year 2021 - annualized (22% x Rp1.036.128.214.803)	227.948.207.257	-
Year 2020 - annualized (22% x Rp136.759.210.133)	-	30.087.026.229
Total	227.948.207.257	30.087.026.229
Tax effect on:		
Non-deductible expenses pursuant to fiscal	20.044.769.902	6.594.946.940
Portion of profit from investment in Associates	(12.885.236.988)	(6.919.973.919)
Interest income subjected to final tax	(40.017.619.805)	(24.235.379.983)
Deferred tax adjustment	79.981.551.549	29.571.025.713
Total	47.123.464.658	5.010.618.751
Tax expense	275.071.671.915	35.097.644.980

g. *Tax Assessment Letter*

The Company did not receive a Letter of Tax Provision (SKP) and a Letter of Tax Bill (STP) from the Tax Office for the year ended December 31, 2021.

23. DANA CADANGAN ANGSURAN

	2021	2020
Uang Pertanggungjawaban Nasabah	2.994.511.749.461	1.953.439.414.600
Uang Titipan Nasabah	1.606.423.205.346	352.724.160.233
Dana Cadangan Angsuran	275.352.673.106	214.815.145.193
Total	4.876.287.627.913	2.520.978.720.026

Dana Cadangan nasabah merupakan dana milik nasabah ULAMM yang dititipkan kepada Perusahaan tanpa memerlukan persetujuan nasabah manakala terjadi kekurangan pembayaran kewajiban nasabah. Perusahaan menampung dana cadangan angsuran masing-masing sejumlah 173.468 nasabah dan 97.446 nasabah ULAMM pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

23. INSTALLMENT RESERVE FUND

	2021	2020
Customer's Responsibility	2.994.511.749.461	1.953.439.414.600
Customer's Deposit	1.606.423.205.346	352.724.160.233
Customer's Reserve Fund	275.352.673.106	214.815.145.193
Total	4.876.287.627.913	2.520.978.720.026

Installment Reserve Fund are funds belonging to ULAMM customers that are deposited to the Company without requiring customer approval when there is a lack of payment of customer obligations. The Company accommodates an installment reserve fund of 173,468 customers and 97,446 ULAMM customers as of December 31, 2021 and 2020, respectively.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. DANA CADANGAN ANGSURAN (lanjutan)

Uang titipan adalah salah satu bentuk pelayanan Program Mekaar kepada nasabah agar bisa memperoleh akses penitipan uang dengan mudah, murah, dan aman. Uang titipan dapat digunakan sebagai sumber pembayaran atau pelunasan pembiayaan nasabah apabila nasabah menunggak atau menghilang. Perusahaan melayani uang titipan sejumlah 6.999.774 nasabah dan 5.514.580 nasabah Mekaar pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Penghasilan penempatan dana yang diperoleh Perusahaan dari uang titipan nasabah digunakan untuk menutupi beban administrasi dan pengelolaan uang titipan nasabah. Perusahaan tidak mengenakan beban administrasi dan pengelolaan uang titipan tersebut kepada nasabah.

Uang Pertanggungjawaban adalah uang yang disisihkan dari pinjaman yang diterima oleh nasabah Mekaar, yang akan dikembalikan kepada nasabah setelah seluruh pinjaman lunas. Perusahaan menampung uang pertanggungjawaban masing-masing sejumlah 10.451.377 nasabah dan 7.801.490 nasabah Mekaar pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 150/PMK.05/2021 tanggal 25 Oktober 2021 perihal Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah akan memberikan subsidi bunga/margin untuk nasabah Mekaar dan ULaMM yang terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pada tanggal 19 November 2021 Pemerintah telah menyalurkan subsidi bunga/subsidi margin kepada Perusahaan sebesar Rp930.226.274.768. Selanjutnya, pada 31 Desember 2021 Perusahaan telah menyalurkan seluruh subsidi bunga/subsidi margin tersebut melalui dana cadangan angsuran untuk nasabah ULaMM dan sebagai Uang Titipan Nasabah atau Uang Subsidi Bunga untuk nasabah Mekaar.

24. UTANG LAIN-LAIN

	2021	2020
Pihak Berelasi		
BPJS Ketenagakerjaan	406.279.746	406.279.746
Pihak Ketiga		
Dana pihak ketiga BPR/S	262.429.408.206	217.778.889.236
Dana titipan asuransi dan notaris	46.113.698.951	114.839.104.505
Utang pihak ketiga	5.167.604.342	46.505.358.735
Lain-lain	9.251.672.731	4.578.363.919
Subtotal	322.962.384.230	383.701.716.395
Total	323.368.663.976	384.107.996.141

23. INSTALLMENT RESERVE FUND (continued)

Deposit money is a form of service for the Mekaar Program to customers so they can get access to safekeeping money easily, cheaply and safely. Deposit money can be used as a source of payment or repayment of customer financing if the customer delays or disappears. The Company serves deposit funds of 6,999,774 Mekaar's customers and 5,514,580 Mekaar's customers as of December 31, 2021 and 2020, respectively.

Income from the placement of funds obtained by the Company from the customer's deposit money is used to cover the administrative expense and management of the customer's deposit fund. The Company does not impose an administrative expense and manage the deposit fund to the customer.

Liability Accounts are money set aside from loans received by Mekaar customers, which will be returned to customers after all loan is have been repaid off. The Company holds responsibility money totaling 10,451,377 Mekaar's customers and 7,801,490 Mekaar's customers as of December 31, 2021 and 2020, respectively.

Based on the Regulation of the Minister of Finance No. 150/PMK.05/2021 dated October 25, 2021 regarding the Procedures for Providing Interest Subsidies/Margin Subsidies in order to Support the Implementation of the National Economic Recovery Program, the Government will provide an interest/margin subsidies for Mekaar and ULaMM customers affected by the Corona Pandemic Virus Disease 2019 (Covid-19).

On November 19, 2021, the Government has distributed interest subsidies/margin subsidies to the Company amounting to Rp930,226,274,768. Furthermore, on December 31, 2021, the Company has distributed the entire interest subsidy/margin subsidy through an installment reserve fund for ULaMM customers and as Customer Deposit or Interest Subsidy for Mekaar customers.

24. OTHER PAYABLES

	2021	2020
Related Party		
BPJS Ketenagakerjaan	406.279.746	406.279.746
Third Parties		
Third-party funds of BPR/S	262.429.408.206	217.778.889.236
Insurance and notary deposit fund	46.113.698.951	114.839.104.505
Third party liabilities	5.167.604.342	46.505.358.735
Others	9.251.672.731	4.578.363.919
Subtotal	322.962.384.230	383.701.716.395
Total	323.368.663.976	384.107.996.141

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

25. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	2021
Personalia	106.095.464.862
Beban operasional	79.126.190.162
Bunga obligasi	78.092.148.236
Bunga pinjaman bank dan MTN	33.124.236.705
Bunga NUSSP	12.828.882
Total	296.450.868.847

25. ACCRUED EXPENSES

	2020	
	117.014.648.288	<i>Personnel</i>
	130.817.626.671	<i>Operational expenses</i>
	114.995.434.946	<i>Interest - bonds</i>
	52.856.547.363	<i>Interest - bank borrowings and MTN</i>
	7.963.486	<i>Interest - NUSSP</i>
Total	415.692.220.754	Total

Pada tanggal 31 Desember 2021 Perusahaan memiliki beban bunga obligasi yang masih harus dibayar sehubungan dengan pelaksanaan emisi Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016, Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I tahun 2017, Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II tahun 2018, Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I dan Tahap II Tahun 2019, Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III tahun 2020, Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020, serta Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021.

On December 31, 2021, the Company has a accrued bond interest expenses in according to the listing of Revolving Bond I PNM Tranche II Year 2016, Revolving Bond II PNM Tranche I Year 2017, Revolving Bond II PNM Tranche II Year 2018, Revolving Bond III PNM Tranche I and Tranche II Year 2019, Revolving Bond III PNM Tranche III Year 2020, Revolving Bond III PNM Tranche IV Year 2020, and Revolving Bond III PNM Tranche V Year 2021.

26. LIABILITAS IMBALAN KERJA

(Aset) Liabilitas Imbalan Kerja

	2021
Entitas Induk	
Program imbalan pasca kerja	5.225.498.897
Program manfaat jangka panjang lain	19.149.871.146
	24.375.370.043
Entitas Anak	4.799.330.043
Total	29.174.700.086

26. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES

Employee Benefit Liability (Asset)

	2020	
	37.810.812.923	<i>Parent Entity</i>
	16.400.511.203	<i>Post-retirement benefits program</i>
	16.400.511.203	<i>Other long-term benefits program</i>
	54.211.324.126	
	4.346.797.959	<i>Subsidiaries</i>
Total	58.558.122.085	Total

Beban Imbalan Kerja

	2021
Laba Rugi	
<i>Entitas Induk</i>	
Program imbalan pasca kerja	(13.060.116.152)
Program manfaat jangka panjang lain	4.661.111.527
	(8.399.004.625)
<i>Entitas Anak</i>	1.874.456.565
Subtotal	(6.524.548.060)
Penghasilan Komprehensif Lainnya	
<i>Entitas Induk</i>	
Program imbalan pasca kerja	(7.215.917.260)
Total	(13.740.465.320)

Employee Benefit Expenses

	2020	
	21.198.693.199	<i>Profit and Loss</i>
	4.623.337.644	<i>Parent Entity</i>
	4.623.337.644	<i>Post-retirement benefits program</i>
	25.822.030.843	<i>Other long-term benefits program</i>
	2.574.960.757	<i>Subsidiaries</i>
	28.396.991.600	<i>Subtotal</i>
	6.761.195.825	<i>Other Comprehensive Income</i>
	6.761.195.825	<i>Parent Entity</i>
	6.761.195.825	<i>Post-retirement benefits program</i>
Total	35.158.187.425	Total

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

26. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Beban Imbalan Kerja (lanjutan)

Perusahaan telah menghitung kewajibannya pada tahun 2021 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Perusahaan telah menghitung kewajibannya pada tahun 2020 sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.

Saldo liabilitas program manfaat karyawan pada 31 Desember 2021 dan 2020 merupakan hasil perhitungan aktuarial sesuai dengan penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013) mengenai Imbalan Kerja.

Perusahaan membukukan program imbalan pasca kerja sesuai PSAK 24 (revisi 2013) mengenai Imbalan Kerja. Perusahaan menggunakan metode *Projected Unit Credit* untuk menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti, biaya jasa kini terkait, dan biaya jasa lalu (jika dapat diterapkan).

Akumulasi keuntungan/kerugian aktuarial yang timbul tidak diakui kecuali jika melebihi 10% dari nilai yang lebih besar dari Nilai Kini Kewajiban atau Nilai Wajar Aset, maka kelebihannya diakui sepanjang rata-rata sisa masa kerja.

Perusahaan menyelenggarakan program manfaat kerja karyawan (*post employment benefit*) sesuai Peraturan Perusahaan. Perusahaan melakukan pendanaan untuk program ini melalui PT BNI Life Insurance.

Total karyawan yang berhak atas imbalan tersebut per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sejumlah 3.841 karyawan (tidak diaudit) dan 3.683 karyawan (tidak diaudit).

Perhitungan liabilitas imbalan kerja untuk Program Imbalan Pasca Kerja dan Program Imbalan Jangka Panjang Lainnya dilakukan oleh Kantor Aktuaris Independen PT Padma Radya Aktuarial yang tertuang dalam Laporan Perhitungan Kewajiban Diestimasi Manfaat Penghargaan Masa Kerja Karyawan PT Permodalan Nasional Madani tanggal 3 Januari 2021.

26. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Employee Benefit Expenses (continued)

The company has calculated its obligations in 2021 in accordance with Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Work Agreements for Certain Time, Outsourcing, Working Time and Rest Time, and Termination of Employment.

The company has calculated its obligations in 2020 in accordance with Law Number 13 of 2003 concerning Manpower.

The balance of employee benefit liability as of December 31, 2021 and 2020 represent an actuarial calculation of SFAS No. 24 (Revised 2013) regarding Employee Benefit.

The Company recorded a post-employment benefit plans in accordance SFAS 24 (revised 2013) on Employee Benefits. The Company uses the Projected Unit Credit Method to determine the present value of the defined benefit obligation, related current service cost and past service cost (if applicable).

Accumulated profit/loss arising unrecognized actuarial unless it exceeds 10% of the value is greater than Present Value Fair Value Assets or liabilities, then the excess is recognized throughout the expected average remaining working lives.

The Company has laid off employee benefit programs (*post-employment benefits*) according to Company Policy. The Company made funding for this program through PT BNI Life Insurance.

Number of employees entitled to the benefits as of December 31, 2021 and 2020 are 3,841 employees (unaudited) and 3,683 employees (unaudited), respectively.

The calculation of employee benefit liabilities for Post-retirement Benefit and Other Long-Term Benefit Program is performed by the Independent Actuarial Office of PT Padma Radya Aktuarial as set forth in the Report of Estimated Liability Calculation Benefits of Employee Period Employee PT Permodalan Nasional Madani dated January 3, 2021.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

26. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Program yang diikuti oleh Entitas Induk dalam manfaat karyawan adalah sebagai berikut:

a. Program imbalan pasca kerja

Rekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir dari Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti (NKKIP)

	2021	2020
Nilai kini kewajiban imbalan pasti (NKKIP) awal periode	162.235.623.277	128.074.309.518
Biaya jasa kini	22.774.603.819	20.431.291.171
Biaya jasa lalu	(38.996.540.855)	-
Penghasilan atau beban bunga	11.210.262.998	10.215.653.498
Imbalan yang dibayarkan	(5.582.949.686)	(1.772.454.905)
Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto:		
Keuntungan/kerugian yang timbul dari perubahan asumsi demografik		(314.530.920)
Keuntungan/kerugian yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(7.159.872.418)	15.341.433.213
Penyesuaian	(5.131.546.028)	(9.740.078.298)
Nilai kini kewajiban imbalan pasti (NKKIP) - akhir periode	139.349.581.107	162.235.623.277

Present value of defined benefit obligations (PVDBO) - beginning of period
Current service costs
Past service costs
Interest income or expenses
Compensation paid

Remeasurement of net defined benefit liability (asset):
Gains/losses arising from changes in demographic assumptions
Gains/losses arising from changes in financial assumptions
Adjustments

Present value of defined benefit obligations (PVDBO) - end of period

Rekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir dari Nilai Wajar Aset Program

	2021	2020
Nilai wajar aset - awal periode	124.424.810.354	118.103.143.382
luran pemberi kerja	11.060.020.009	-
Ekspektasi imbal hasil dari aset program	8.048.442.114	9.448.251.471
Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto:		
Imbal hasil aset program	(1.492.815.807)	(682.792.437)
Imbalan yang dibayarkan	(4.333.689.081)	(1.652.212.669)
Kombinasi bisnis	(3.582.685.379)	(791.579.393)
Nilai Wajar Aset - akhir periode	134.124.082.210	124.424.810.354

Reconciliation of beginning and ending balances of Fair Value of Plan Assets

Plan Assets - beginning of period
Contribution by employer
Expectations returns on plan assets
Remeasurement of net defined benefit liability (asset):
Return on plan assets
Compensation paid
Business combination

Fair Value of Assets - end of period

Analisis NKKIP yang didanai dan tidak didanai

	2021	2020
NKKIP dari program yang seluruhnya tidak didanai	5.225.498.897	37.810.812.923
NKKIP dari program yang seluruhnya didanai	134.124.082.210	124.424.810.354
Total NKKIP	139.349.581.107	162.235.623.277

Analysis of funded and unfunded PVDBO

PVDBO of programs that are not funded entirely
PVDBO of programs that are funded entirely

Total PVDBO

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

26. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

a. Program imbalan pasca kerja (lanjutan)

Rekonsiliasi NKKIP dan nilai wajar aset program atas aset dan liabilitas yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

	2021	2020	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	139.349.581.107	162.235.623.277	Present value of defined benefit obligations
Nilai wajar aset program (jika didanai)	(134.124.082.210)	(124.424.810.354)	Fair value of plan assets (if funded)
Status pendanaan	5.225.498.897	37.810.812.923	Funding status
Total (Aset) Liabilitas	5.225.498.897	37.810.812.923	Total (Assets) Liabilities

Beban imbalan kerja yang diakui di Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian.

	2021	2020	
Biaya jasa kini	22.774.603.819	20.431.291.171	Current service costs
Biaya jasa lalu	(38.996.540.855)	-	Past service costs
Bunga neto atas liabilitas (aset)	3.161.820.884	767.402.028	Net interest of liabilities (assets)
Total Beban Diakui Dalam Laporan Laba Rugi	(13.060.116.152)	21.198.693.199	Total Expense Recognized in the Income Statement
Keuntungan dan kerugian aktuarial:			Actuarial gains (losses):
Perubahan asumsi demografis	-	(314.530.920)	Changes in demographic assumptions
Perubahan asumsi aktuarial	(7.159.872.418)	15.341.433.213	Changes in actuarial assumption
Penyesuaian	(5.131.546.029)	(9.740.078.298)	Adjustments
Imbal hasil atas aset program	5.075.501.187	1.474.371.830	Return on plan assets
Total (Manfaat) Beban yang Diakui Sebagai Penghasilan Komprehensif Lain	(7.215.917.260)	6.761.195.825	Total (Benefit) Expense recognized in the Other Comprehensive Income
Total (Manfaat) Beban yang Diakui Sebagai Penghasilan Komprehensif Lain	(20.276.033.412)	27.959.889.024	Total (Benefit) Expense Recognized in the Other Comprehensive Income

Komposisi Nilai Wajar Aset Program:

	2021	2020
Persentase:		
Dana Pasar Uang	50,00%	50,00%
Dana Pendapatan Tetap	50,00%	50,00%
Properti	0,00%	0,00%
Aset Lainnya (Company Saving Product)	0,00%	0,00%
Total	100,00%	100,00%

Composition Fair Value Plan of Assets:

Persentase:
Money Market Fund
Fixed Income
Property
Other Assets (Company Saving Product)
Total

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

26. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

a. Program imbalan pasca kerja (lanjutan)

Nilai kini kewajiban imbalan pasti (NKKIP) dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan asumsi aktuarial sebagai berikut:

	2021	2020	
Tingkat diskonto	7,50%	7,00%	Discount rate assumption
Tingkat proyeksi kenaikan gaji	10,00%	10,00%	Salary growth projection rate
Tingkat pengembalian Investasi	7,00%	8,00%	Investment rate of return
Tingkat mortalita	100% TMI4	100% TMI3	Mortality rate
Tingkat cacat	5% TMI4	5% TMI3	Disability rate
Tingkat pengunduran diri	10,00% p.a sampai usia 35 kemudian menurun linear s.d. 0% p.a pada usia 56/10.00% p.a until 35 y.o than linear decrease until 0% p.a at 56 y.o	10,00% p.a sampai usia 35 kemudian menurun linear s.d. 0% p.a pada usia 56/10.00% p.a until 35 y.o than linear decrease until 0% p.a at 56 y.o	Resignation rate
Proporsi pengambilan pensiun dini	N/A	N/A	Taking of early pension proportion
Proporsi pengambilan pensiun normal	100%	100%	Taking of normal pension proportion
Usia pensiun normal	56 tahun	56 tahun	Normal retirement age
Tingkat PHK karena alasan lain	Nil	Nil	Layoff rate for other reason

Analisis Sensitivitas

	2021	2020	
Asumsi Tingkat Diskonto	139.349.581.107	162.235.623.277	Discount rate assumption
Tingkat Diskonto + 1%	126.470.042.198	146.935.994.522	Discount Rate + 1%
Tingkat Diskonto - 1%	154.207.740.106	179.934.460.890	Discount Rate - 1%
Asumsi Tingkat Kenaikan Gaji	139.349.581.107	162.235.623.277	Rate of Salary Increase Assumption
Tingkat Kenaikan Gaji + 1%	154.725.500.734	180.360.150.984	Rate of Salary Increase + 1%
Tingkat Kenaikan Gaji - 1%	125.826.214.875	146.289.121.504	Rate of Salary Increase - 1%
Durasi rata-rata tertimbang dari kewajiban imbalan	14,74	14,95	Weighted average duration of benefit obligation
Berikut estimasi pembayaran imbalan yang akan jatuh tempo			The following estimated benefit payments that will be due
< 1 tahun	5.958.248.538	6.301.705.739	< 1 year
1 - 5 tahun	43.842.205.628	46.901.905.515	1 - 5 years
5 - 10 tahun	112.754.675.933	126.252.624.965	5 - 10 years
> 10 tahun	1.033.817.509.129	1.201.084.461.930	> 10 years

b. Program imbalan jangka panjang lainnya

Rekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir dari Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti (NKKIP)

	2021	2020	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti (NKKIP) awal periode	16.400.511.203	15.010.984.389	Present value of defined benefit obligations (PVDBO) beginning of period
Biaya jasa:			Service costs:
Biaya jasa kini	3.633.844.261	3.533.151.483	Current service costs
Biaya jasa lalu	(140.781.438)	-	Past service costs
Penghasilan atau beban bunga	1.097.204.743	1.095.215.437	Interest income or expenses
Imbalan yang dibayarkan	(1.911.751.585)	(3.233.810.830)	Compensation paid
Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto:			Remeasurement of net defined benefit liability (asset):
Keuntungan/kerugian yang timbul dari perubahan asumsi demografik	-	(91.639)	Gains/losses arising from changes in demographic assumptions
Keuntungan/kerugian yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(504.102.384)	860.068.577	Gains/losses arising from changes in financial assumptions
Penyesuaian	574.946.346	(865.006.214)	Adjustments
Nilai kini kewajiban imbalan pasti (NKKIP) akhir periode	19.149.871.146	16.400.511.203	Present value of defined benefit obligations- (PVDBO) - end of period

26. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

a. Post-retirement benefits program (continued)

Present value of defined benefit obligation (PVDBO) is calculated by the independent actuary using actuarial assumption as follows:

Sensitivity Analysis

b. Other long-term benefits program

Reconciliation of beginning and ending balances of the Present Value of Defined Benefit Obligation (PVDBO)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

26. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

26. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

b. Program imbalan jangka panjang lainnya (lanjutan)

b. Other long-term benefits program (continued)

Analisis NKKIP yang didanai dan tidak didanai

Analysis of funded and unfunded PVDBO

	2021	2020	
NKKIP dari program yang seluruhnya tidak didanai	19.149.871.146	16.400.511.203	PVDBO of programs that are not funded entirely
Total NKKIP	19.149.871.146	16.400.511.203	Total PVDBO

Rekonsiliasi NKKIP dan nilai wajar aset program atas aset dan liabilitas yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

Reconciliation of PVDBO and fair value of plan assets for assets and liabilities are recognized in the consolidated financial statements.

	2021	2020	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	19.149.871.146	16.400.511.203	Present value of defined benefit obligations
Status pendanaan	19.149.871.146	16.400.511.203	Funding status
Total (Aset) Liabilitas	19.149.871.146	16.400.511.203	Total (Assets) Liabilities

Beban imbalan kerja yang diakui di Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian.

Reconciliation of employee benefits expense recognized in the Consolidated Statement of Income and Other Comprehensive Income.

	2021	2020	
Biaya jasa kini	3.633.844.261	3.533.151.483	Current service costs
Biaya jasa lalu	(140.781.438)	-	Past service costs
Bunga neto atas liabilitas (aset)	1.097.204.743	1.095.215.437	Net interest of liabilities (assets)
Kerugian (keuntungan) aktuarial	70.843.961	(5.029.276)	Amortization of actuarial loss (gain)
Total Beban yang diakui dalam Laporan Laba Rugi	4.661.111.527	4.623.337.644	Total Expense recognized in the Income Statement
Total Beban Imbalan Pasti	4.661.111.527	4.623.337.644	Total Defined Benefit Expenses

Nilai kini kewajiban imbalan pasti (NKKIP) dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan asumsi aktuarial sebagai berikut:

Present value of defined benefit obligation (PVDBO) is calculated by the independent actuary using actuarial assumption as follows:

	2021	2020	
Tingkat diskonto	7,50%	7,00%	Discount rate assumption
Tingkat proyeksi kenaikan gaji	10,00%	10,00%	Salary growth projection rate
Tingkat mortalita	100% TMI4	100% TMI3	Mortality rate
Tingkat cacat	5% TMI4	5% TMI3	Disability rate
Tingkat pengunduran diri	10,00% p.a sampai usia 35 kemudian menurun linear s.d. 0% p.a pada usia 56/ 10.00% p.a until 35 y.o than linear decrease until 0% p.a at 56 y.o	10,00% p.a sampai usia 35 kemudian menurun linear s.d. 0% p.a pada usia 56/ 10.00% p.a until 35 y.o than linear decrease until 0% p.a at 56 y.o	Resignation rate
Proporsi pengambilan pensiun dini	N/A	N/A	Taking of early pension proportion
Proporsi pengambilan pensiun normal	100%	100%	Taking of normal pension proportion
Usia pensiun normal	56 tahun	56 tahun	Normal retirement age
Tingkat PHK karena alasan lain	Nil	Nil	Layoff rate for other reason

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

26. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

**b. Program imbalan jangka panjang lainnya
(lanjutan)**

Analisis Sensitivitas

	2021
Asumsi Tingkat Diskonto	19.149.871.146
Tingkat Diskonto + 1%	18.213.275.540
Tingkat Diskonto - 1%	20.184.184.501
Asumsi Tingkat Kenaikan Gaji	19.149.871.146
Tingkat Kenaikan Gaji + 1%	20.152.310.950
Tingkat Kenaikan Gaji - 1%	17.291.446.321
Berikut estimasi pembayaran imbalan yang akan jatuh tempo	
< 1 tahun	2.704.218.857
1 - 5 tahun	16.345.933.685
5 - 10 tahun	19.534.372.192
> 10 tahun	44.016.082.312

Perusahaan mengadakan asuransi pensiun manfaat pasti untuk karyawan sejak 28 Desember 2001. Program pensiun ini dikelola oleh PT BNI Life Insurance. Sumber dana asuransi terutama berasal dari kontribusi karyawan dan Perusahaan. Kontribusi karyawan adalah sebesar 3% dari gaji pokok dan kontribusi Perusahaan sebesar 7% dari gaji pokok karyawan.

Saldo akumulasi dana akhir Perusahaan selaku pemberi kerja sesuai dengan laporan PT BNI Life Insurance pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp134.124.082.210 dan Rp124.424.810.354.

27. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

a. Klasifikasi Instrumen Keuangan

Perusahaan memiliki berbagai macam aset keuangan, diantaranya kas dan setara kas, portofolio efek, pinjaman yang diberikan, pembiayaan modal, piutang jasa manajemen, pendapatan yang masih akan diterima, piutang kegiatan manajer investasi, piutang lain-lain, yang timbul dari kegiatan operasi Perusahaan. Sedangkan liabilitas keuangan Perusahaan diantaranya utang bank dan lembaga keuangan, pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia

26. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

b. Other long-term benefits program (continued)

Sensitivity Analysis

	2020	
16.400.511.203		Discount Rate Assumption
15.540.375.406		Discount Rate + 1%
17.352.572.786		Discount Rate - 1%
16.400.511.203		Rate of Salary Increase Assumption
17.315.314.078		Rate of Salary Increase + 1%
14.827.285.915		Rate of Salary Increase - 1%
The following estimated benefit payments that will be due		
< 1 year	1.901.826.134	
1 - 5 years	15.251.722.440	
5 - 10 years	17.549.258.551	
> 10 years	39.570.182.023	

The Company organized defined benefits pension program for employees since December 28, 2001. Pension fund is administrated by PT BNI Life Insurance. Pension program funding are from contribution paid by the employer and the employees. The employee's contribution is 3% of gross salary and employer's is 7% of gross salary.

The balance of accumulated contributions of the employer in accordance with the report of PT BNI Life Insurance on December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp134,124,082,210 and Rp124,424,810,354, respectively.

27. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

a. Financial Instruments Classification

The Company has various financial assets, including cash and cash equivalents, portfolio of securities, loans, capital financing, management services receivables, accrued income, investment manager activities receivables, other receivables, that arising from the Company's operations. While the Company's financial liabilities include bank and financial institution borrowings, loan from the Government of the Republic of Indonesia and foreign credit institution, bond payables,

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

27. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

**27. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES
(continued)**

a. Klasifikasi Instrumen Keuangan (lanjutan)

**a. Financial Instruments Classification
(continued)**

dan lembaga kredit luar negeri, utang obligasi, dana cadangan angsuran, utang kegiatan manajer investasi dan utang lain-lain. Perusahaan tidak memiliki transaksi derivatif, terutama untuk mengelola risiko suku bunga yang berasal dari pinjaman Perusahaan dan utang obligasi.

installment reserve fund, investment manager activities liabilities and other liabilities. The Company does not have derivative transactions, primarily to manage interest rate risk from the Company's borrowings and bond payables.

Rincian kebijakan akuntansi penting dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset keuangan, liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas diungkapkan dalam Catatan 2.

Details of significant accounting policies and methods that applied (including criteria for recognition, the measurements basis and revenues and expenses recognition) for each classification of financial assets, financial liabilities and equity instruments are disclosed in Note 2.

Tabel berikut menunjukkan aset keuangan dan liabilitas keuangan pada 31 Desember 2021 dan 2020:

The following table set out the financial assets and financial liabilities as of December 31, 2021 and 2020:

	2021	2020	
Aset Keuangan			Financial Assets
Nilai wajar melalui laporan laba rugi			Fair value through profit or loss
Portofolio efek diukur pada biaya perolehan diamortisasi	1.184.264.100.940	524.808.898.763	Portfolio of securities measured at amortized cost
Biaya perolehan diamortisasi			Amortized cost
Kas dan setara kas	4.020.608.620.727	4.462.197.480.623	Cash and cash equivalent
Pinjaman yang diberikan	32.377.175.612.102	22.088.984.903.818	Loans
Pembiayaan modal	768.094.030.173	846.572.933.315	Capital financing
Piutang jasa manajemen - bersih	5.634.889.481	7.194.005.688	Management services receivables - net
Pendapatan masih akan diterima - bersih	130.096.791.910	117.946.355.821	Accrued incomes - net
Piutang kegiatan manajer investasi	7.286.747.464	8.043.481.660	Investment manager activities receivables
Piutang lain-lain	87.561.426.240	57.711.206.701	Other receivables
Tersedia untuk dijual			Fair value through other comprehensive income
Portofolio efek dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	5.665.228.119	Portfolio of securities fair value through other comprehensive income
Total aset keuangan	38.580.722.219.037	28.119.124.494.508	Total financial assets
Liabilitas keuangan			Financial liabilities
Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi			Liabilities at amortized costs
Utang bank dan lembaga keuangan	11.313.395.911.950	6.224.831.456.650	Bank and financial institution borrowings
Surat utang jangka menengah dan sukuk	6.090.000.000.000	3.890.500.000.000	Medium - term notes and sukuk
Utang Obligasi	10.078.282.733.571	9.413.489.879.625	Bond payables
Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan lembaga kredit luar negeri	3.923.440.295.353	3.041.762.100.124	Borrowings from the Government of the Republic of Indonesia and foreign credit institution
Dana cadangan angsuran	4.876.287.627.913	2.520.978.720.026	Installment reserve fund
Utang kegiatan manajer investasi	1.477.865	4.144.473	Investment manager activities payables
Utang lain-lain	323.368.663.976	384.107.996.141	Other liabilities
Beban yang masih harus dibayar	296.450.868.847	415.692.220.754	Accrued expenses
Total liabilitas keuangan	36.901.227.579.475	25.891.366.517.793	Total financial liabilities

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

27. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

**27. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES
(continued)**

a. Klasifikasi Instrumen Keuangan (lanjutan)

**a. Financial Instruments Classification
(continued)**

Tabel berikut menunjukkan nilai tercatat dan taksiran nilai wajar instrumen keuangan Perusahaan, yang dicatat dalam laporan posisi keuangan.

The following tables show the carrying value and estimated fair value of the Company's financial instruments, that recorded in the consolidated statement of financial position.

	Nilai Tercatat/Carrying Value		
	2021	2020	
Aset Keuangan			Financial Assets
Kas dan setara kas	4.020.608.620.727	4.462.197.480.623	Cash and cash equivalent
Portofolio efek yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi	1.184.264.100.940	524.808.898.763	Portfolio of securities measured at fair value through profit and loss
Pinjaman yang diberikan	32.377.175.612.102	22.088.984.903.818	Loans
Pembiayaan modal	768.094.030.173	846.572.933.315	Capital financing
Piutang jasa manajemen	5.634.889.481	7.194.005.688	Management services receivables
Pendapatan yang masih akan diterima	130.096.791.910	117.946.355.821	Accrued incomes
Piutang kegiatan manajer investasi	7.286.747.464	8.043.481.660	Investment manager activities receivables
Piutang lain-lain	30.270.213.358	57.711.206.701	Other receivables
Portofolio efek dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	5.665.228.119	Portfolio of securities with fair value through other comprehensive income
Total aset keuangan	38.523.431.006.155	28.119.124.494.508	Total financial assets
Liabilitas keuangan			Financial liabilities
Utang Bank dan lembaga keuangan	11.313.395.911.950	6.224.831.456.650	Bank and financial institution
Surat utang jangka menengah dan sukuk	6.090.000.000.000	3.890.500.000.000	Medium-term notes and sukuk
Utang obligasi	10.078.282.733.571	9.413.489.879.625	Bond payables
Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan lembaga kredit luar negeri	3.923.440.295.353	3.041.762.100.124	Borrowings from the Government of the Republic of Indonesia and foreign credit institution
Dana cadangan angsuran	4.876.287.627.913	2.520.978.720.026	Installment reserve fund
Utang kegiatan manajer investasi	1.477.865	4.144.473	Investment manager activities payables
Utang lain-lain	323.368.663.976	384.107.996.141	Other payables
Biaya yang masih harus dibayar	239.159.655.965	415.692.220.754	Accrued expenses
Total liabilitas keuangan	36.843.936.366.593	25.891.366.517.793	Total financial liabilities
	Nilai Wajar/Fair Value		
	2021	2020	
Aset Keuangan			Financial Assets
Kas dan setara kas	4.020.608.620.727	4.462.197.480.623	Cash and cash equivalent
Portofolio efek yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi	1.184.264.100.940	524.808.898.763	Portfolio of securities measured at fair value through profit and loss
Pinjaman yang diberikan	32.377.175.612.102	22.088.984.903.818	Loans
Pembiayaan modal	768.094.030.173	846.572.933.315	Capital financing
Piutang jasa manajemen	5.634.889.481	7.194.005.688	Management services receivables
Pendapatan yang masih akan diterima	130.096.791.910	117.946.355.821	Accrued income
Piutang kegiatan manajer investasi	7.286.747.464	8.043.481.660	Investment manager activities receivables
Piutang lain-lain	30.270.213.358	57.711.206.701	Other receivables
Portofolio efek dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	5.665.228.119	Portfolio of securities with fair value through other comprehensive income
Total aset keuangan	38.523.431.006.155	28.119.124.494.508	Total financial assets
Liabilitas keuangan			Financial liabilities
Utang bank dan lembaga keuangan	11.313.395.911.950	6.224.831.456.650	Bank and financial institution borrowings
Surat utang jangka menengah dan sukuk	6.090.000.000.000	3.890.500.000.000	Medium-term notes and sukuk
Utang obligasi	10.078.282.733.571	9.413.489.879.625	Bond payables
Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan lembaga kredit luar negeri	3.923.440.295.353	3.041.762.100.124	Borrowings from the Government of Republic of Indonesia and foreign credit institution
Dana cadangan angsuran	4.876.287.627.913	2.520.978.720.026	Installment reserve fund
Utang kegiatan manajer investasi	1.477.865	4.144.473	Investment manager activities payables
Utang lain-lain	323.368.663.976	384.107.996.141	Other payables
Biaya yang masih harus dibayar	239.159.655.965	415.692.220.754	Accrued expenses
Total liabilitas keuangan	36.843.936.366.593	25.891.366.517.793	Total financial liabilities

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

27. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

**27. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES
(continued)**

b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Nilai wajar aset keuangan pada saat pengakuan awal adalah sama dengan harga transaksinya. Nilai wajar efek yang diperdagangkan di bursa, adalah harga penutupan pada tanggal perdagangan.

Pinjaman yang diberikan, Pembiayaan Modal dan Piutang

Portofolio kredit secara umum terdiri dari pinjaman yang diberikan, pembiayaan modal dan piutang dengan suku bunga tetap, pembiayaan modal dengan bagi hasil dan piutang lain-lain. Pinjaman yang diberikan, pembiayaan modal dinyatakan berdasarkan biaya perolehan. Nilai wajar dari pinjaman yang diberikan menunjukkan nilai diskon dari perkiraan arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima oleh Perusahaan dengan menggunakan suku bunga pasar saat ini.

Portofolio efek

Nilai wajar untuk surat-surat ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (*broker*)/pedagang efek (*dealer*). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo dan *yield* yang serupa atau dinilai dengan menggunakan metode penilaian internal.

Pinjaman yang diterima

Nilai wajar agregat berdasarkan model diskonto arus kas menggunakan kurva *yield* terkini yang tepat untuk sisa periode jatuh temponya.

Liabilitas lain-lain

Estimasi nilai wajar liabilitas lain adalah sebesar jumlah yang harus dibayarkan kembali sewaktu-waktu.

Estimasi nilai wajar liabilitas lain-lain menggunakan nilai tercatat karena sisa jatuh tempo di bawah satu tahun.

b. Fair Value of Financial Instruments

The fair value of financial assets at initial recognition is equal to the price of the transaction. The fair value of securities for trading on the Stock Exchange, is the closing price on the trading date.

Loans, Capital Financing and Receivables

Generally, the credit portfolio consists of loans, capital and receivables financing with a fixed interest rate, with the result of capital financing and other receivables. Loans, financing capital stated at amortized cost. The fair value of the loans shows the estimated discounted value of future cash flows expected to be received by the Company by using current market interest rates.

Portfolio of securities

The fair values for marketable securities are based on the market prices or broker/dealer price quotations. When this information is not available, the fair value is estimated using quoted market prices for securities with similar credit, maturity and yield characteristics or using internal valuation model.

Borrowings

The aggregate fair values are based on discounted cash flow model using current yield curve that appropriate for the remaining maturity period.

Other liabilities

The estimated fair values of other liabilities are the amounts repayable on demand.

The estimated fair value of other liabilities using the carrying value due to residual maturity below one year.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

28. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

Kepentingan non-pengendali atas laba (rugi) entitas anak selama tahun 2021

28. NON-CONTROLLING INTEREST

The non-controlling interest on net income (losses) of subsidiaries during 2021

Laporan Posisi Keuangan/Consolidated Statements of Financial Position

Entitas Anak/Subsidiaries	%	Aset Bersih/ Net Assets	Kepentingan Non- pengendali/ Non-controlling Interest
PT PNM Investment Management	0,001%	215.073.663.984	1.955.215
PT PNM Venture Capital	0,000%	484.184.976.638	1.329.448
PT PNM Venture Syariah	0,000%	80.450.339.853	22.904.699.789
PT Mitra Niaga Madani	0,000%	123.863.742.124	159
PT Mitra Utama Madani	0,000%	20.979.198.532	5.760
PT Mitra Tekno Madani	0,000%	13.983.953.586	395
PT Mitra Proteksi Madani	0,000%	33.297.216.623	9.143
PT Micro Madani Institute	0,000%	59.252.614.131	9.046
PT Mitra Bisnis Madani	0,000%	97.854.260.927	277
PT Mitra Dagang Madani	0,000%	12.252.428.081	13
PT Crom Madani Indonesia	0,000%	5.543.417.585	-
PT Karya Digital Madani	0,000%	10.000.000.000	12.905
			22.908.022.150

Laba Setelah Pajak yang dapat Diatribusikan/Attributable Net Income After Tax

Entitas Anak/Subsidiaries	%	Laba Setelah Pajak yang dapat Diatribusikan/ Attributable Net Income After Tax	Kepentingan Non- pengendali/ Non-controlling Interest
PT PNM Investment Management	0,001%	13.746.293.606	124.966
PT PNM Venture Capital	0,000%	44.823.213.470	123.073
PT PNM Venture Syariah	0,000%	3.721.576.768	4.349.586.345
PT Mitra Niaga Madani	0,000%	2.607.869.282	3
PT Mitra Utama Madani	0,000%	4.357.459.783	1.196
PT Mitra Tekno Madani	0,000%	1.015.816.869	29
PT Mitra Proteksi Madani	0,000%	22.692.275.043	6.231
PT Micro Madani Institute	0,000%	33.379.436.846	5.096
PT Mitra Bisnis Madani	0,000%	24.681.221.768	70
PT Crom Madani Indonesia	0,000%	3.424.728.896	4
PT Mitra Dagang Madani	0,000%	(128.429.601)	-
PT Karya Digital Madani	0,000%	-	-
			4.349.847.013

Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan/Attributable Comprehensive Income

Entitas Anak/Subsidiaries	%	Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan / Comprehensive Income	Kepentingan Non- pengendali/ Non-controlling Interest
PT PNM Investment Management	0,001%	13.746.293.606	124.966
PT PNM Venture Capital	0,000%	49.669.772.283	136.380
PT PNM Venture Syariah	0,000%	3.743.022.557	4.349.573.689
PT Mitra Niaga Madani	0,000%	2.604.893.769	3
PT Mitra Utama Madani	0,000%	4.335.050.137	1.190
PT Mitra Tekno Madani	0,000%	1.015.812.342	29
PT Mitra Proteksi Madani	0,000%	22.703.165.282	6.234
PT Micro Madani Institute	0,000%	33.603.087.779	5.130
PT Mitra Bisnis Madani	0,000%	24.696.030.677	70
PT Mitra Dagang Madani	0,000%	3.427.802.974	4
PT Crom Madani Indonesia	0,000%	(128.429.601)	-
PT Karya Digital Madani	0,000%	-	-
			4.349.847.695

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

28. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI (lanjutan)

28. NON-CONTROLLING INTEREST (continued)

Kepentingan non-pengendali atas laba (rugi) entitas anak selama tahun 2020 adalah :

The non controlling-interest over income (loss) of subsidiaries during 2020 are:

Laporan Posisi Keuangan/Consolidated Statements of Financial Position

Entitas Anak	%	Aset Bersih/ Net Assets	Kepentingan Non-pengendali/ Non-controlling Interest	Subsidiaries
PT PNM Investment Management	0,001%	201.327.370.360	1.830.249	PT PNM Investment Management
PT PNM Venture Capital	0,000%	429.531.487.915	1.178.246	PT PNM Venture Capital
PT PNM Ventura Syariah	0,000%	561.445.045.230	11.699.538.164	PT PNM Ventura Syariah
PT Mitra Niaga Madani	0,000%	1.031.434.481.433	53.486.860	PT Mitra Niaga Madani
PT Mitra Utama Madani	0,000%	22.019.565.538	1.664.414.819	PT Mitra Utama Madani
PT Mitra Tekno Madani	0,000%	47.845.029.359	456.440.770	PT Mitra Tekno Madani
			13.876.889.108	

Laba Setelah Pajak yang dapat Diatribusikan/Attributable Net Income After Tax

Entitas Anak	%	Laba Setelah Pajak yang dapat Diatribusikan/ Attributable Net Income After Tax	Kepentingan Non-pengendali/ Non-controlling Interest	Subsidiaries
PT PNM Investment Management	0,001%	12.275.862.676	111.599	PT PNM Investment Management
PT PNM Venture Capital	0,000%	30.798.855.867	83.427	PT PNM Venture Capital
PT PNM Ventura Syariah	0,000%	7.415.439.432	110.087	PT PNM Ventura Syariah
PT Mitra Niaga Madani	0,000%	1.602.515.688	748.242	PT Mitra Niaga Madani
PT Mitra Utama Madani	0,000%	4.256.512.746	411.583.851	PT Mitra Utama Madani
PT Mitra Tekno Madani	0,000%	185.171.887	1.924.298	PT Mitra Tekno Madani
			414.561.504	

Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan/Attributable Comprehensive Income

Entitas Anak	%	Laba Komprehensif yang dapat Diatribusikan/ Comprehensive Income Attributable	Kepentingan Non-pengendali/ Non-controlling Interest	Subsidiaries
PT PNM Investment Management	0,001%	12.275.862.676	111.599	PT PNM Investment Management
PT PNM Venture Capital	0,000%	30.223.011.060	85.008	PT PNM Venture Capital
PT PNM Ventura Syariah	0,000%	7.427.016.265	110.087	PT PNM Ventura Syariah
PT Mitra Niaga Madani	0,000%	1.603.107.427	748.242	PT Mitra Niaga Madani
PT Mitra Utama Madani	0,000%	4.115.838.505	411.583.851	PT Mitra Utama Madani
PT Mitra Tekno Madani	0,000%	186.825.069	1.924.298	PT Mitra Tekno Madani
			414.563.085	

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

29. MODAL SAHAM

29. SHARE CAPITAL

2021					
	Total Lembar Saham/ Total Shares	Nilai Nominal per Lembar Saham/ Par Value per Share	Total Nilai Saham/ Total Share Value	Persentase Kepemilikan Saham/ Percentage of Ownership	
Modal Dasar					Authorized Capital
Pemerintah Republik Indonesia					The Government of the Republic of Indonesia
Saham biasa, terdiri dari:					Ordinary shares, consist of:
Saham seri A Dwiwarna	1	1.000.000	1.000.000	0,00001%	Share of series A Dwiwarna
Saham seri B					Share of series B
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	9.199.999	1.000.000	9.199.999.000.000	99,99999%	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Total Modal Dasar	9.200.000	-	9.200.000.000.000	100,00000%	Total Authorized Capital
Modal Ditempatkan dan Disetor					Issued and Fully Paid in Capital
Pemerintah Republik Indonesia					The Government of the Republic of Indonesia
Saham biasa, terdiri dari:					Ordinary shares, consist of:
Saham seri A Dwiwarna	1	1.000.000	1.000.000	0,00003%	Share of series A Dwiwarna
Saham seri B					Share of series B
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.799.999	1.000.000	3.799.999.000.000	99,99997%	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	3.800.000	-	3.800.000.000.000	100,00000%	Total Shares Issued and Fully Paid in Capital
2020					
	Total Lembar Saham/ Total Shares	Nilai Nominal per Lembar Saham/ Par Value per Share	Total Nilai Saham/ Total Share Value	Persentase Kepemilikan Saham/ Percentage of Ownership	
Modal Dasar					Authorized Capital
Pemerintah Republik Indonesia					The Government of the Republic of Indonesia
Saham biasa, terdiri dari:					Ordinary shares, consist of:
Saham seri A Dwiwarna	1	1.000.000	1.000.000	0,00001%	Share of series A Dwiwarna
Saham seri B	9.199.999	1.000.000	9.199.999.000.000	99,99999%	Share of series B
Total Modal Dasar	9.200.000	-	9.200.000.000.000	100,00000%	Total Authorized Capital
Modal Ditempatkan dan Disetor					Issued and Fully Paid in Capital
Pemerintah Republik Indonesia					The Government of the Republic of Indonesia
Saham biasa, terdiri dari:					Ordinary shares, consist of:
Saham seri A Dwiwarna	1	1.000.000	1.000.000	0,00004%	Share of series A Dwiwarna
Saham seri B	2.299.999	1.000.000	2.299.999.000.000	99,99996%	Share of series B
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	2.300.000	-	2.300.000.000.000	100,00000%	Total Shares Issued and Fully Paid in Capital

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

29. MODAL SAHAM (lanjutan)

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Nomor: SK-308/MBU/09/2021, Perusahaan mengubah anggaran dasarnya yang telah disahkan dalam Akta Notarial No. 26 tanggal 21 September 2021, oleh Notaris Hadijah, S.H. Akta tersebut telah disahkan dalam Akta Penegasan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor: 59 tanggal 28 Oktober 2021 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta. Adapun perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui perubahan nama Perseroan dari Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani menjadi PT Permodalan Nasional Madani.
2. Menyetujui perubahan struktur pemegang saham Perseroan sebagai akibat dari pengalihan seluruh saham seri B Negara Republik Indonesia kepada dan dalam rangka penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yakni sebanyak 3.799.999 saham dengan nilai sebesar Rp3.799.999.000.000.
3. Perubahan struktur pemegang saham meliputi pemenuhan total modal ditempatkan dan disetor Perseroan sejumlah Rp3.800.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Rp1.000.000 oleh Negara Republik Indonesia merupakan sisa setoran lama setelah dikurangi pengalihan seluruh saham seri B Negara Republik Indonesia.
 - b. Rp3.799.999.000.000 oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan setoran modal yang berasal dari pengalihan seluruh saham Seri B Negara Republik Indonesia.

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan masih dalam proses persetujuan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. S-1228/MBU/12/2020 tanggal 29 Desember 2020 Perusahaan mengubah anggaran dasarnya yang telah disahkan dalam Akta Notarial No. 12 tanggal 12 Januari 2021, oleh Notaris Hadijah, S.H. Adapun perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Modal dasar Perusahaan ditetapkan sebesar Rp9.200.000.000.000 terbagi atas 9.200.000 saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000.000.
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia sebanyak 3.800.000 saham atau seluruhnya sebesar Rp3.800.000.000.000.
3. Dari modal dasar yang sudah ditempatkan tersebut, seluruhnya telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia.

29. SHARE CAPITAL (continued)

In accordance with the Decree of the Minister of SOEs as GMS Number: SK-308/MBU/09/2021, the Company amended its articles of association which have been ratified in Notarial Deed No. 26 dated September 21, 2021, by Notary Hadijah, S.H. The deed has been ratified in the Deed of Affirmation in the Deed of Statement of Shareholders' Decision Number: 59 dated 28 October 2021 made before Hadijah, S.H., Notary in Jakarta. The changes are as follows:

1. Approved the change of the Company's name from a Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani to PT Permodalan Nasional Madani.
2. Approved the change in the Company's shareholder structure as a result of the transfer of all series B shares of the Republic of Indonesia to and in the context of increasing the participation of the Republic of Indonesia's state capital in PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, which amounted to 3,799,999 shares with a value of Rp3,799,999,000,000.
3. Changes in shareholder structure include the fulfillment of the Company's total issued and paid-up capital of Rp3,800,000,000,000 with details as follows:
 - a. Rp1,000,000 by the Republic of Indonesia is the remainder of the old deposit after deducting the transfer of all series B shares of the Republic of Indonesia.
 - b. Rp3,799,999,000,000 by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk is a paid-up capital originating from the transfer of all Series B shares of the Republic of Indonesia.

Amendments to the Company's Articles of Association are still in the process of being approved by the Ministry of Law and Human Rights.

In accordance with the SOE Menteri Decree at the GMS No. S-1228/MBU/12/2020 dated December 29, 2020 the Company amended its articles of association which was ratified in the Notarial Deed No. 12 dated 12 January 2021, by Notary Hadijah, S.H. The changes are as follows:

1. The authorized capital of the Company is set at Rp9,200,000,000,000, divided into 9,200,000 shares, each with a nominal value of Rp1,000,000.
2. Of the authorized capital, 3,800,000 shares or a total of Rp3,800,000,000,000 have been subscribed and subscribed by the Republic of Indonesia.
3. From the issued share capital, all of the shares had been fully paid by the Government of the Republic of Indonesia.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

29. MODAL SAHAM (lanjutan)

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-AH-01.03-0033759 tanggal 20 Januari 2021.

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Nomor: S-1033/MBU/11/2020 tanggal 17 November 2020 Perusahaan mengubah anggaran dasarnya yang telah disahkan dalam Akta Notarial No. 28 tanggal 20 November 2020, oleh Notaris Hadijah, S.H. Adapun perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Modal dasar Perusahaan ditetapkan sebesar Rp9.200.000.000.000 terbagi atas 9.200.000 saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000.000.
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia sebanyak 2.300.000 saham atau seluruhnya sebesar Rp2.300.000.000.000.
3. Dari modal dasar yang sudah ditempatkan tersebut, seluruhnya telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia.

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0079386.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 27 November 2020.

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Nomor: S-315/MBU/05/2016 tanggal 23 Mei 2016, Perusahaan mengubah anggaran dasarnya yang sudah disahkan dalam Akta Notarial No.12 tanggal 6 Juni 2016, oleh Notaris Hadijah, SH., perihal Perubahan Jenis Saham dan Perubahan Anggaran Dasar PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sesuai. Akta perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yakni melalui Surat Keputusan No. AHU-0011894.AH.01.02.TAHUN 2016 tertanggal 23 Juni 2016.

Saham Perusahaan yang semula tanpa seri menjadi terdiri dari saham seri A Dwiwarna dan saham seri B. Saham seri A Dwiwarna hanya dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan memiliki hak-hak khusus sesuai yang tercantum pada akta notarial tersebut yang tidak dimiliki oleh pemegang saham seri B.

29. SHARE CAPITAL (continued)

The amendment to the Company's Articles of Association has been approved by the Ministry of Law and Human Rights in accordance with the Decree No. AHU-AH.01.03-0033759 dated January 20, 2021.

In accordance with the SOE Menteri Decree at the GMS Number: S-1033/MBU/11/2020 dated November 17, 2020 the Company amended its articles of association which was ratified in the Notarial Deed No. 28 dated 20 November 2020, by Notary Hadijah, S.H. The changes are as follows:

1. *The authorized capital of the Company is set at Rp9,200,000,000,000, divided into 9,200,000 shares, each with a nominal value of Rp1,000,000.*
2. *Of the authorized capital, 2,300,000 shares or a total of Rp2,300,000,000,000 have been subscribed and subscribed by the Republic of Indonesia.*
3. *Of the issued authorized capital, all of them have been fully paid-up by the Republic of Indonesia.*

The amendment to the Company's Articles of Association has been approved by the Ministry of Law and Human Rights in accordance with the Decree No. AHU-0079386.AH.01.02.TAHUN 2020 dated 27 November 2020.

In accordance with the Decree of the Minister of State Enterprises as the AGM No.S-315/MBU/05/2016 dated May 23, 2016, the Company changed its articles of which have been ratified in No. 12 notarial deed dated June 6, 2016, by Notary Hadijah, SH., Concerning Changes type of Shares and Amendment of Articles of Association of PT Permodalan Nasional Madani (Persero) accordingly. The amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia namely through Decree No. AHU-0011894.AH.01.02.TAHUN 2016 dated June 23, 2016.

The company shares were originally without the series to be composed of shares of series A Dwiwarna and shares of series B. Shares Series A Dwiwarna can only be owned by the Republic of Indonesia and has special rights as stated in the notarial deed that is not owned by the holders of shares of series B.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

29. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notarial Nomor: 23 tanggal 29 Januari 2016, oleh Notaris Hadijah, S.H., perihal Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero), yakni menyetujui perubahan Modal Dasar Perusahaan menjadi Rp5.200.000.000.000 yang terdiri dari 5.200.000 lembar saham, dengan nilai nominal Rp1.000.000 dan perubahan Penyertaan Modal Negara menjadi Modal Disetor sebesar Rp1.000.000.000.000, sehingga jumlah Modal Disetor menjadi Rp1.300.000.000.000. Akta perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yakni melalui Surat Keputusan No. AHU-0002906.AH.01.02.TAHUN 2016 tertanggal 15 Februari 2016.

29. SHARE CAPITAL (continued)

Based on the Notarial Deed Number: 23 dated January 29, 2016, by Notary Hadijah, S.H, regarding the Decision Statement of PT Permodalan Nasional Madani (Persero), namely approving the change in the Company's Authorized Capital to Rp5,200,000,000,000 consisting of 5,200,000 shares, with nominal value of Rp1,000,000 and change of State Equity Participation to Paid-up Capital of Rp1,000,000,000,000 so that the total Paid-up Capital becomes Rp1,300,000,000,000. The amendment deed has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, namely through Decree No. AHU-0002906.AH.01.02.TAHUN 2016 dated February 15, 2016.

30. PENYERTAAN MODAL NEGARA

	2021
Penyertaan Modal Negara - Tahap I	-
Penyertaan Modal Negara - Tahap II	1.500.000.000.000
	1.500.000.000.000
Konversi ke modal saham	(1.500.000.000.000)
Total	-

Perusahaan telah melakukan konversi dari Penyertaan Modal Negara Tahap II senilai Rp1.500.000.000.000 menjadi modal saham pada tanggal 20 Januari 2021. (lihat Catatan 29 - Modal Saham)

Perusahaan menerima penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 3 Desember 2020 sebesar Rp1.500.000.000.000 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 63 Tahun 2020 tanggal 2 November 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara dari Pemerintah Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani.

Perusahaan telah melakukan konversi dari Penyertaan Modal Negara Tahap I senilai Rp1.000.000.000.000 menjadi modal saham pada tanggal 27 November 2020. (lihat Catatan 29 - Modal Saham)

Perusahaan menerima penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 29 Juli 2020 sebesar Rp1.000.000.000.000 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara dari Pemerintah Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

30. STATE CAPITAL INVESTMENT

	2020	
	1.000.000.000.000	State Capital Investment Thranck I
	1.500.000.000.000	State Capital Investment Thranck II
	2.500.000.000.000	
Konversi ke modal saham	(1.000.000.000.000)	Convert to share capital
Total	1.500.000.000.000	Total

The Company has converted from the State Equity Participation Phase II amounting to Rp1,500,000,000,000 into share capital on January 20, 2021. (see Note 29 - Share Capital)

The Company received additional State Equity Investment (PMN) from the Government of the Republic of Indonesia on December 3, 2020 amounting to Rp1,500,000,000,000 in accordance with Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 63 of 2020 dated November 2, 2020 concerning Additional State Capital Participation from the Government of the Republic of Indonesia into the Share Capital of the Limited Liability Company (Persero) PT Permodalan Nasional Madani.

The Company has converted from the State Equity Participation Phase I amounting to Rp1,000,000,000,000 into share capital on November 27, 2020. (see Note 29 - Share Capital)

The Company obtains an additional State Capital Investment ("PMN") of the Government of the Republic of Indonesia on July 29, 2020 amounted to Rp1,000,000,000,000 accordance with the Indonesian Government Regulation No. 31 Year 2020 dated July 6, 2020 regarding the Increase in Investment by the Government of the Republic of Indonesia into the Company's Capital Stock PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

31. CADANGAN UMUM DAN CADANGAN BERTUJUAN

Cadangan umum Perusahaan per 31 Desember 2021 dan 2020, masing-masing sebesar Rp537.241.280.550 dan 537.241.280.550. Cadangan bertujuan Perusahaan per 31 Desember 2021 dan 2020, masing-masing sebesar Rp30.632.515.845 dan Rp30.632.515.845.

Sesuai dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor: RIS-002/PNM-RUPS/LAPKEU-2020/IV/21 tanggal 14 April 2021, ditetapkan bahwa dari total laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Tahun Buku 2020 sebesar Rp358.180.083.833 seluruhnya ditetapkan sebagai Laba Ditahan.

32. DIVIDEN DAN DANA PROGRAM KEMITRAAN BINA LINGKUNGAN (PKBL)

Dividen

Sesuai dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor: RIS-002/PNM-RUPS/LAPKEU-2020/IV/21 tanggal 14 April 2021, ditetapkan bahwa dari total laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Tahun Buku 2020 sebesar Rp358.180.083.833 seluruhnya ditetapkan sebagai Laba Ditahan dan Perusahaan tidak diwajibkan untuk membayar dividen kepada Pemegang Saham.

Sesuai dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor: RIS-002/PNM-RUPS/LAPKEU-2019/VI/20 tanggal 29 Juni 2020, ditetapkan bahwa dari total laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Tahun Buku 2019 sebesar Rp973.231.336.153 seluruhnya ditetapkan sebagai Laba Ditahan dan Perusahaan tidak diwajibkan untuk membayar dividen kepada Pemegang Saham.

Perusahaan tidak memiliki saldo utang dividen pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Sesuai dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor: RIS-002/PNM-RUPS/LAPKEU-2020/IV/21 tanggal 14 April 2021, ditetapkan bahwa dari total laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Tahun Buku 2020 sebesar Rp358.180.083.833 seluruhnya ditetapkan sebagai Laba Ditahan dan Perusahaan tidak diwajibkan untuk mengalokasikan laba untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada tahun 2021.

31. GENERAL RESERVE AND APPROPRIATED RESERVE

The Company's general reserve as of December 31, 2021 and 2020 amounting to 537,241,280,550 and Rp537,241,280,550, respectively. The Company's appropriated reserve as of December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp30,632,515,845 and Rp30,632,515,845, respectively.

In accordance with the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders Number: RIS-002/PNM-RUPS/LAPKEU-2020/IV/21 dated April 14, 2021, it is determined that of the total consolidated net income attributable to Owners of the 2020 Parent Entity amounting to Rp358,180,083,833 entirely determined as Retained Earnings.

32. DIVIDEND AND FUND FOR PARTNERSHIPS AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM (PKBL)

Dividend

In accordance with the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders Number: RIS-002/PNM-RUPS/LAPKEU-2020/IV/21 dated April 14, 2021, it is determined that of the total consolidated net income attributable to Owners of the 2020 Parent Entity amounting to Rp358,180,083,833 entirely determined as Retained Earnings and the Company is not required to pay dividends to the Shareholders.

In accordance with the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders Number: RIS-002/PNM-RUPS/LAPKEU-2019/VI/20 dated June 29, 2020, it is determined that of the total consolidated net income attributable to Owners of the 2019 Parent Entity amounting to Rp973,231,336,153 entirely determined as Retained Earnings and the Company is not required to pay dividends to the Shareholders.

The Company has no outstanding balance of the dividend payable on December 31, 2021 and 2020.

Partnerships and Community Development Program

In accordance with the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders Number: RIS-002/PNM-RUPS/LAPKEU-2020/IV/21 dated April 14, 2021, it is determined that of the total consolidated net income attributable to Owners of the 2020 Parent Entity amounting to Rp358,180,083,833 entirely determined as Retained Earnings and the Company is not mandated to allocate profits for the Partnership and Community Development Program in 2021.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**32. DIVIDEN DAN DANA PROGRAM KEMITRAAN
BINA LINGKUNGAN (PKBL) (lanjutan)**

**Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
(lanjutan)**

Sesuai dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor: RIS-002/PNM-RUPS/LAPKEU-2019/VI/20 tanggal 29 Juni 2020, ditetapkan bahwa dari total laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Tahun Buku 2019 sebesar Rp973.231.336.153 seluruhnya ditetapkan sebagai Laba Ditahan dan Perusahaan tidak diamanatkan untuk mengalokasikan laba untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada tahun 2020.

**32. DIVIDEND AND FUND FOR PARTNERSHIPS AND
COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM (PKBL)
(continued)**

**Partnerships and Community Development
Program (continued)**

In accordance with the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders Number: RIS-002/PNM-RUPS/LAPKEU-2019/VI/20 dated June 29, 2020, it is determined that of the total consolidated net income attributable to Owners of the 2019 Parent Entity amounting to Rp973,231,336,153 entirely determined as Retained Earnings and the Company is not mandated to allocate profits for the Partnership and Community Development Program in 2020.

33. PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH

	2021
Pendapatan pembiayaan Mekaar	6.926.854.873.118
Pendapatan dari Unit ULaMM	1.418.481.224.908
Pendapatan dari modal ventura	74.848.332.704
Pendapatan dari pembiayaan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah serta Lembaga Keuangan Mikro	3.973.825.481
Pendapatan pembiayaan Mikro Kecil Menengah	997.387.692
Total	8.425.155.643.903

33. INTEREST AND SHARIA REVENUE

	2020	
	4.176.089.073.652	<i>Income from Mekaar financing</i>
	1.308.139.668.285	<i>Income from ULaMM</i>
	115.038.110.100	<i>Income from venture capital</i>
	4.151.946.648	<i>Income from micro, small and medium, and microfinance institution credit financing</i>
	1.845.551.953	<i>Income from Micro, Small, Medium financing</i>
Total	5.605.264.350.638	Total

34. BEBAN BUNGA DAN SYARIAH

	2021
Beban bunga bank	908.652.173.238
Beban bunga obligasi	790.662.238.927
Beban bagi hasil sukuk	485.249.991.381
Beban bunga MTN, PN dan Sukuk	121.437.596.758
Beban bunga non-bank	79.019.867
Total	2.306.081.020.171

34. INTEREST AND SHARIA EXPENSES

	2020	
	552.672.976.765	<i>Bank interest expense</i>
	909.781.528.489	<i>Bond interest expense</i>
	-	<i>Sukuk profit sharing</i>
	227.210.827.225	<i>MTN, PN and Sukuk interest expense</i>
	142.526.169	<i>Non-bank Interest expense</i>
Total	1.689.807.858.648	Total

**35. PENDAPATAN BUNGA DEPOSITO, JASA GIRO,
DAN PENDAPATAN USAHA LAINNYA**

	2021
Pendapatan jasa giro	77.060.616.490
Pendapatan bunga deposito	19.663.866.906
Pendapatan dividen	-
Total	96.724.483.396
Keuntungan dari efek berupa: Kontrak Pengelolaan Dana Reksadana	11.540.590.182 2.365.144.906
Total	13.905.735.088

**35. REVENUES FROM DEPOSIT INTEREST,
CURRENT SERVICES, AND OTHER OPERATING
REVENUES**

	2020	
	48.533.050.740	<i>Revenues from current services</i>
	57.246.625.746	<i>Revenues from deposit interest</i>
	818.387.395	<i>Revenue from dividend</i>
Total	106.598.063.881	Total
	860.483.198 9.817.783.919	<i>Gain from securities: Discretionary fund Mutual fund</i>
Total	10.678.267.117	Total

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

36. BEBAN USAHA

	2021	2020
Beban administrasi dan umum:		
Gaji dan tunjangan	2.950.630.117.869	2.305.329.646.819
Kerugian penurunan nilai piutang	606.795.004.589	304.760.280.140
Tantiem, jasa produksi, dan insentif	493.673.167.064	273.860.159.858
Beban kantor	308.774.988.831	191.067.343.837
Asuransi kredit	273.081.731.837	146.490.133.446
Sewa kantor, kendaraan, dan rumah dinas	189.078.047.413	93.089.665.552
Penyusutan (Catatan 13)	164.878.765.104	281.884.384.268
Jasa profesional	77.825.983.569	31.260.251.732
Sistem informasi	77.521.393.039	58.003.995.606
Amortisasi (Catatan 15)	77.515.471.772	72.654.123.598
Pemeliharaan dan perbaikan	59.914.364.277	29.235.320.470
Pendidikan dan latihan	21.490.172.412	15.667.190.553
Jamuan	11.138.279.542	6.697.681.566
Beban pemasaran	10.223.782.833	9.619.563.456
Pengembangan kapasitas usaha	8.947.082.058	9.307.298.433
Perjalanan dan transportasi	6.887.815.879	5.794.773.570
Biaya agen penjual reksadana	6.711.759.435	6.380.232.096
Proyek operasional	1.120.674.583	668.235.541
Pengendalian Risiko	178.833.350	114.870.345
Imbalan kerja	(6.524.548.060)	28.396.991.600
Lain-lain	6.077.232.911	-
Total	5.345.940.120.307	3.870.282.142.486

	2021	2020
Administration and general expenses:		
Salaries and allowances	2.950.630.117.869	2.305.329.646.819
Loss on impairment	606.795.004.589	304.760.280.140
Bonus and incentives	493.673.167.064	273.860.159.858
Office expenses	308.774.988.831	191.067.343.837
Insurance Credit	273.081.731.837	146.490.133.446
Rent for office, vehicles, and home office	189.078.047.413	93.089.665.552
Depreciation (Note 13)	164.878.765.104	281.884.384.268
Professional fee	77.825.983.569	31.260.251.732
Information system	77.521.393.039	58.003.995.606
Amortization (Note 15)	77.515.471.772	72.654.123.598
Maintenance and repairs	59.914.364.277	29.235.320.470
Education and training	21.490.172.412	15.667.190.553
Entertainment	11.138.279.542	6.697.681.566
Marketing expenses	10.223.782.833	9.619.563.456
Capacity building	8.947.082.058	9.307.298.433
Travel and transportation	6.887.815.879	5.794.773.570
Agency fee of mutual fund	6.711.759.435	6.380.232.096
Operational projects	1.120.674.583	668.235.541
Risk Controlling	178.833.350	114.870.345
Employee benefits	(6.524.548.060)	28.396.991.600
Miscellaneous	6.077.232.911	-
Total	5.345.940.120.307	3.870.282.142.486

37. LAIN-LAIN - BERSIH

	2021	2020
Pendapatan lain-lain	151.800.982.254	194.568.113.529
Beban lain-lain	(9.512.819.959)	(11.454.963.084)
Lain-lain - bersih	142.288.162.295	183.113.150.445

37. OTHERS - NET

Other income	194.568.113.529
Other expenses	(11.454.963.084)
Others - net	183.113.150.445

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN tanggal 5 Juli 2017 dan berdasarkan Surat Keputusan Deputy Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN No. SK-03/D7.MBU/12/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Penyaluran Dana Program Kemitraan BUMN melalui BUMN Khusus tanggal 10 Desember 2018, Perusahaan ditunjuk sebagai BUMN Khusus yang berhak mendapatkan hibah atau pinjaman tanpa bunga dana Program Kemitraan dari BUMN Pembina.

Based on Regulation of the Minister of SOEs No. PER-02/MBU/7/2017 concerning the Second Amendment to the Minister of SOEs No. PER-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership Program and Community-Owned Enterprises Community Development Program dated July 5, 2017 and based on the letter from Deputy of Business Infrastructure Sector of the Ministry of SOEs No. SK-03/D7.MBU/12/2018 concerning Implementation Guidelines for Fund Distribution of SOEs' Partnership Programs through Special SOEs on December 10, 2018, The Company is designated as Special SOEs entitled to receive grants or interest-free loans from the Partnership Program from SOEs.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

37. LAIN-LAIN - BERSIH (lanjutan)

Perusahaan ditunjuk sebagai BUMN Khusus, karena Perusahaan adalah BUMN yang bergerak di bidang pemberdayaan perekonomian rakyat melalui pemberian pinjaman permodalan dan/atau pembinaan kepada usaha mikro dan kecil. Tujuan dari penyaluran dana Program Kemitraan melalui BUMN Khusus adalah karena masih terdapat dana Program Kemitraan yang tidak tersalurkan sehingga penyaluran dana tersebut belum optimal serta kurangnya kompetensi BUMN Non-Jasa Keuangan dalam penyaluran dana Program Kemitraan pada usaha mikro dan kecil.

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan dan PT Bumi Suksesindo Nomor 120/PKS/PNM/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Hibah Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Guna Pengembangan Usaha Mikro, Kecil melalui Penyaluran Modal Mikro serta Pelatihan dan Pendampingan Pengembangan Usaha; maka Perusahaan berhak untuk menerima hibah atas Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dari PT Bumi Suksesindo sebesar Rp1.000.000.000 yang akan disampaikan dalam 2 (dua) tahap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian.

Pendapatan hibah yang diterima Perusahaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp61.000.000.000 dan Rp189.394.478.322.

	2021	2020
Pihak Berelasi		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	60.000.000.000	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	127.518.478.322
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	50.000.000.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	10.000.000.000
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tbk	-	1.776.000.000
Perum LPPNPI	-	100.000.000
Pihak Ketiga		
PT Bumi Suksesindo	1.000.000.000	-
Total	61.000.000.000	189.394.478.322

37. OTHERS - NET (continued)

The Company is designated as a Special SOE, because the Company is a SOEs that is engaged in the empowerment of the people's economy through the provision of capital loans and/or guidance to micro and small businesses. The purpose of the distribution of the Partnership Program funds through the Special SOEs is because there are still funds from the Partnership Program that is not channeled so that the distribution of funds is not optimal as well as the lack of competency of Non-Financial Services State Enterprises in the distribution of Partnership Program funds to micro and small businesses.

Based on the Cooperation Agreement between the Company and PT Bumi Suksesindo Number 120/PKS/PNM/VIII/2021 dated Agustus 2, 2021 concerning Grants for Community Development and Empowerment Funds for Micro, Small Business Development through Micro Capital Distribution and Training and Assistance for Business Development; then the Company is entitled to receive a grant of the Community Development and Empowerment Fund from PT Bumi Suksesindo in the amount of Rp1,000,000,000 which will be submitted in 2 (two) stages in accordance with the terms and conditions set forth in the agreement.

Income form grant received by the Company as a Special SOE for the period ended December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp61,000,000,000 and Rp189,394,478,322.

Related Parties
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tbk
Perum LPPNPI

Third Party
PT Bumi Suksesindo

38. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA

	2021	2020
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
Kerugian yang belum direalisasi dari portofolio efek tersedia untuk dijual	(5.665.228.119)	-
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Keuntungan aktuarial atas program imbalan kerja	7.215.917.942	(6.922.673.712)
Total	1.550.689.823	(6.922.673.712)

38. OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Item that will not be reclassified to profit or loss
Unrealized loss from financial assets available for sales

Item that will not be reclassified to profit or loss
Actuarial gain on employee benefit program

Total

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

39. LABA PER SAHAM

Laba per saham dihitung dengan membagi laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan total rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun bersangkutan.

39. EARNINGS PER SHARE

Earnings per share is calculated by dividing profit attributable to owners of the parent by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

	2021	2020	
Laba per saham:			Earnings per share:
Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	840.778.080.226	358.180.083.833	Profit attributable to owners of the parent
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar - dasar	3.800.000	1.466.667	Weighted average number of outstanding common stock - basic
Laba per saham - dasar (Rupiah penuh)	221.257	244.214	Earning per share - basic (full amount)

40. TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Berikut adalah rincian sifat hubungan dengan pihak berelasi:

40. RELATED PARTY TRANSACTIONS

The nature of relationship with the related parties is summarized as follows:

Pihak Berelasi/ Related Parties	Sifat dari hubungan/ Nature of relationship	Sifat dari transaksi/ Nature of transaction
Pemerintah Republik Indonesia/ The Government of the Republic of Indonesia	Pemegang saham pengendali/ Controlling shareholder	Surat Utang Pemerintah/ Government Promissory Notes
PT BPRS PNM Patuh Beramal	PT PNM memiliki lebih dari 50% saham Perusahaan/ PT PNM has more than 50% of the Company's shares	Penyertaan Modal/ Capital Financing
PT BPRS PNM Mentari	PT PNM memiliki lebih dari 50% saham Perusahaan/ PT PNM has more than 50% of the Company's shares	Penyertaan Modal/ Capital Financing
PT BPRS Haji Miskin	PT PNM memiliki lebih dari 50% saham Perusahaan/ PT PNM has more than 50% of the Company's shares	Penyertaan Modal/ Capital Financing
PT Syarikat Takaful Indonesia	PT PNM memiliki kurang dari 20% saham Perusahaan/ PT PNM has less than 20% of the Company's shares	Investasi pada entitas asosiasi/ Investment in associates
PT BPR Rizky Barokah	PT PNM VS memiliki lebih dari 50% saham Perusahaan/ PT PNM VS has more than 50% of the Company's shares	Deposito Berjangka/ Time Deposits Penyertaan Modal/ Capital Financing
PT BPRS Ampek Angkek Candung	PT PNM VS memiliki kurang dari 20% saham Perusahaan/ PT PNM VS has less than 20% of the Company's shares	Investasi pada entitas asosiasi/ Investment in associates
PT BPRS Daya Artha Mentari	PT PNM VS memiliki kurang dari 20% saham Perusahaan/ PT PNM VS has less than 20% of the Company's shares	Investasi pada entitas asosiasi/ Investment in associates
PT BPRS Bandar Lampung (d.h.) Sakai Sembayan	PT PNM VS memiliki kurang dari 20% saham Perusahaan/ PT PNM VS has less than 20% of the Company's shares	Investasi pada entitas asosiasi/ Investment in associates

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

40. TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)

40. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)

Berikut adalah rincian sifat hubungan dengan pihak berelasi (lanjutan) :

The nature of relationship with the related parties is summarized as follows (continued):

Pihak Berelasi/ Related Parties	Sifat dari hubungan/ Nature of relationship	Sifat dari transaksi/ Nature of transaction
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama/ Owned by the same controlling shareholder	Kas dan setara kas, Utang bank/ Cash and cash equivalent, Bank borrowings
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama/ Owned by the same controlling shareholder	Kas dan setara kas, Utang bank/ Cash and cash equivalent, Bank borrowings
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama/ Owned by the same controlling shareholder	Kas dan setara kas, Utang bank/ Cash and cash equivalent, Bank borrowings
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama/ Owned by the same controlling shareholder	Kas dan setara kas, Utang bank/ Cash and cash equivalent, Bank borrowings
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama/ Owned by the same controlling shareholder	Utang lembaga keuangan/ Financial institution borrowings
Lembaga Pengelola Dana Bergulir – KUMKM	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama/ Owned by the same controlling shareholder	Utang lembaga keuangan/ Financial institution borrowings
Pusat Investasi Pemerintah	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama/ Owned by the same controlling shareholder	Utang Pemerintah Republik Indonesia/ Borrowings from the Government of the Republic of Indonesia
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama/ Owned by the same controlling shareholder	Kas dan setara kas, Utang bank/ Cash and cash equivalent, Bank borrowings
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama/ Owned by the same controlling shareholder	Utang lembaga keuangan/ Financial institution borrowings

Transaksi dengan pihak berelasi, diperlakukan sama dengan transaksi dengan pihak lainnya.

Transactions with the related parties is treated the same as transactions with the third parties.

a. Kas dan setara kas (Catatan 4)

a. Cash and cash equivalents (Note 4)

	2021	2020	
Kas di Bank			Cash in Bank
Rupiah			Rupiah
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	978.752.142.596	772.526.865.830	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	501.282.555.667	1.156.308.078.779	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	363.783.933.975	274.685.041.463	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	126.231.304.238	-	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	54.577.333.798	195.965.032.117	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	157.097.576	-	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Total Kas di Bank	2.024.784.367.850	2.399.485.018.189	Total Cash in Bank
Deposito Berjangka			Time Deposits
Rupiah			Rupiah
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	326.000.000.000	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	61.050.000.000	115.550.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	42.500.000.000	280.000.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	7.000.000.000	9.650.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Total Deposito Berjangka	436.550.000.000	405.200.000.000	Total Time Deposits
Total Kas dan Setara Kas	4.020.608.620.727	4.462.197.480.623	Total Cash and Cash Equivalent
Persentase terhadap total aset	9,20%	14,09%	Percentage to total assets

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

40. TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)

40. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)

b. Portofolio Efek Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (Catatan 5)

b. Portfolio of Securities Measured at Fair Value Through Profit or Loss (Note 5)

	2021	2020	
Reksadana			Mutual Funds
RDPU PNM Dana Tunai	1.001.272.851.473	200.050.410.959	RDPU PNM Dana Tunai
RDSPT PNM Multiekspor I	11.357.440.000	24.346.094.400	RDSPT PNM Multiekspor I
RDS Pendapatan Tetap PNM Surat Berharga Syariah Negara	10.498.494.000	-	RDS Pendapatan Tetap PNM Surat Berharga Syariah Negara
PNM Dana Kas Platinum	10.139.952.000	130.053.595.496	PNM Dana Kas Platinum
RDSPT Mikro BUMN Seri V	10.109.681.000	5.062.436.000	RDSPT Mikro BUMN Seri V
RD PNM PUAS	10.085.997.611	-	RD PNM PUAS
RD PNM Dana Maxima 2	10.002.887.000	-	RD PNM Dana Maxima 2
Reksa Dana PNM Money Market Fund USD	8.186.829.087	-	Reksa Dana PNM Money Market Fund USD
PNM Saham Agresif	7.402.481.898	7.520.193.328	PNM Saham Agresif
RD PNM Syariah	6.314.668.751	-	RD PNM Syariah
PNM Saham Unggulan	6.180.225.257	6.092.614.384	PNM Saham Unggulan
RDPT PNM Jamkrindo Fund	5.512.103.374	5.529.115.615	RDPT PNM Jamkrindo Fund
RDPT PNM Multisektoral VI	5.124.865.000	-	RDPT PNM Multisektoral VI
RDPT Pembiayaan Mikro BUMN 2016	5.120.726.500	5.134.946.500	RDPT Pembiayaan Mikro BUMN 2016
RDSPT Multisektoral V	5.115.286.500	5.097.470.500	RDSPT Multisektoral V
RDPT PNM Pos Indonesia	5.105.209.000	5.114.844.500	RDPT PNM Pos Indonesia
RDSPT Mikro BUMN Seri IV	5.091.353.000	5.096.335.000	RDSPT Mikro BUMN Seri IV
RDPT PNM Multisektoral VII	5.073.948.500	-	RDPT PNM Multisektoral VII
RDSPT PNM Multisektoral XII	5.061.009.500	5.068.335.000	RDSPT PNM Multisektoral XII
RDSPT Mikro BUMN Seri II	5.058.395.500	5.068.666.000	RDSPT Mikro BUMN Seri II
RD PNM ETF CORE LQ45	5.052.969.383	11.432.704.000	RD PNM ETF CORE LQ45
RDSPT PNM Multisektoral XI	5.051.718.000	5.021.105.500	RDSPT PNM Multisektoral XI
RDPT PNM Multisektoral X	5.000.000.000	5.052.212.000	RDPT PNM Multisektoral X
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2018 Seri II	5.000.000.000	5.019.009.000	RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2018 Seri II
RDPT PNM Multisektoral IX	5.000.000.000	5.018.171.000	RDPT PNM Multisektoral IX
RDPT Multisektoral III	4.995.123.000	4.971.690.500	RDPT Multisektoral III
RDSPT PNM Indah Karya	4.962.724.500	5.013.947.500	RDSPT PNM Indah Karya
RDPT PNM Perikanan Nusantara	4.841.321.500	4.838.384.500	RDPT PNM Perikanan Nusantara
RDPT PNM Multisektoral XVI	4.835.541.000	4.757.761.500	RDPT PNM Multisektoral XVI
PNM Ekuitas Syariah	386.148.606	429.162.637	PNM Ekuitas Syariah
RDPT Multisektoral I	-	5.018.305.500	RDPT Multisektoral I
RD PNM Amanah Syariah	-	36.686.019.870	RD PNM Amanah Syariah
RDSPT Mikro BUMN Seri III	-	10.047.453.000	RDSPT Mikro BUMN Seri III
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN I	-	5.157.008.500	RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN I
RDPT PNM Pembangunan Perumnas 2016	-	5.036.018.000	RDPT PNM Pembangunan Perumnas 2016
RD Pendapatan Tetap PNM Dana Optima	-	1.038.738.074	RD Pendapatan Tetap PNM Dana Optima
Total	1.182.939.950.940	523.772.748.763	Total
Persentase terhadap total aset	2,70%	1,65%	Percentage to total assets

c. Pinjaman yang Diberikan (Catatan 6)

c. Loans (Note 6)

	2021	2020	
Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil kepada LKM/S	277.243.874	277.243.874	MSE Financing for MFI/S
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(277.243.874)	(277.243.874)	Less: Allowance for Impairment Losses
Total	-	-	Total
Persentase terhadap total aset	0,00%	0,00%	Percentage to total assets

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

40. TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)

40. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)

**d. Piutang kegiatan manajer investasi
(Catatan 10.a)**

**d. Investment manager activities receivables
(Note 10.a)**

	2021	2020
Piutang management fee		
RDSPT PNM Indah Karya	2.455.463.700	1.138.293.089
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri VI	982.804.465	-
RDSPT PNM Multi Ekspor 1	572.366.912	599.646.126
KPD - PT PNM (Persero)	401.946.782	324.649.484
RDPT PNM Multisektoral VII	329.262.112	481.662.956
RDPT PNM Jamkrindo Fund	280.299.858	303.381.317
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN	252.455.846	-
RD PNM Saham Unggulan	208.395.706	202.519.751
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2018 Seri II	207.175.057	313.302.877
RD PNM Dana Bertumbuh	205.702.872	222.305.797
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri VIII	202.960.825	-
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri V	162.236.868	231.348.311
RDPT PNM Multisektoral X	151.395.308	151.106.748
RD PNM Dana Kas Platinum 2	108.745.022	84.118.486
RDPT PNM Multisektoral XII	98.864.122	98.904.534
RDSPT PNM Faaza	96.182.854	98.321.974
RD PNM Amanah Syariah	86.335.886	50.325.782
RDPT PNM Multisektoral IX	52.586.230	79.542.463
RDSPT PNM Multisektoral V	35.162.468	48.166.554
RD PNM Saham Agresif	32.806.681	33.175.520
RD PNM ETF Core LQ45	31.804.362	21.624.799
PNM Surat Berharga Negara 90	31.720.357	55.564.710
RDPT PNM Multisektoral XI	27.257.947	73.700.470
RD Pasar Uang PNM Dana Maxima	25.434.117	-
RD PNM Ekuitas Syariah	24.315.374	28.877.399
RD PNM Dana Sejahtera 2	23.722.273	-
PNM Surat Berharga Negara II	21.783.163	20.618.236
RD PNM Dana Kas Likuid	20.824.461	34.076.841
RDPU PNM Dana Maxima	19.373.832	-
RDT PNM Terproteksi Investa 29	17.124.908	72.967.060
RD PNM Dana Kas Platinum	16.728.677	7.524.509
RD PNM Dana Tunai	14.822.979	33.063.084
RD PNM Syariah	14.003.834	6.126.487
RD Syariah PNM Sukuk Negara Syariah	13.959.846	14.647.822
RD PNM PUAS	12.592.602	-
RDSPT PNM Kaffah	11.263.409	33.138.134
RDPT Multisektoral XVI	9.169.908	19.919.806
RDSPT PNM Falah	5.999.595	11.519.765
RDSPT PNM Falah 2	5.051.260	10.608.874
RDT PNM Terproteksi Investa 30	5.002.691	6.228.784
RD PNM Terproteksi Dana Investa 11	4.256.089	6.221.663
RDT PNM Terproteksi Investa 28	2.189.588	7.064.309
RDSPT PNM Arafah	1.763.694	134.345.564
RDT PNM Terproteksi Investa 31	1.748.619	10.215.902
PNM Surat Berharga Negara	1.649.269	32.812.196
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri III	35.000	417.686.868
RDPT PNM Pembangunan Perumnas 2016	32	232.312.595
RD Syariah Terproteksi PNM Investa 19	2	2
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2017 Seri II	2	2
RDPT PNM Perikanan Nusantara	-	883.636.364
RDPT PNM Multisektoral VI	-	340.820.926
RDST PNM PNM Misbah 4	-	338.177.777
RD Terproteksi PNM Investa 25	-	161.230.977
RDSPT Mikro BUMN Seri II	-	160.675.583
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2016	-	117.164.740
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri IV	-	114.845.514
RDPT PNM POS Indonesia	-	91.365.224
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN	-	39.048.761
RD PNM Terproteksi Dana Investa 3	-	23.399.394
RD PNM Pasar Uang Syariah	-	2.286.988
Total	7.286.747.464	8.024.289.898
Persentase terhadap total aset	0,02%	0,03%

	2021	2020
Management fee receivables		
RDSPT PNM Indah Karya		
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri VI		
RDSPT PNM Multi Ekspor 1		
KPD - PT PNM (Persero)		
RDPT PNM Multisektoral VII		
RDPT PNM Jamkrindo Fund		
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN		
RD PNM Saham Unggulan		
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2018 Seri II		
RD PNM Dana Bertumbuh		
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri VIII		
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri V		
RDPT PNM Multisektoral X		
RD PNM Dana Kas Platinum 2		
RDPT PNM Multisektoral XII		
RDSPT PNM Faaza		
RD PNM Amanah Syariah		
RDPT PNM Multisektoral IX		
RDSPT PNM Multisektoral V		
RD PNM Saham Agresif		
RD PNM ETF Core LQ45		
PNM Surat Berharga Negara 90		
RDPT PNM Multisektoral XI		
RD Pasar Uang PNM Dana Maxima		
RD PNM Ekuitas Syariah		
RD PNM Dana Sejahtera 2		
PNM Surat Berharga Negara II		
RD PNM Dana Kas Likuid		
RDPU PNM Dana Maxima		
RDT PNM Terproteksi Investa 29		
RD PNM Dana Kas Platinum		
RD PNM Dana Tunai		
RD PNM Syariah		
RD Syariah PNM Sukuk Negara Syariah		
RD PNM PUAS		
RDSPT PNM Kaffah		
RDPT Multisektoral XVI		
RDSPT PNM Falah		
RDSPT PNM Falah 2		
RDT PNM Terproteksi Investa 30		
RD PNM Terproteksi Dana Investa 11		
RDT PNM Terproteksi Investa 28		
RDSPT PNM Arafah		
RDT PNM Terproteksi Investa 31		
PNM Surat Berharga Negara		
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri III		
RDPT PNM Pembangunan Perumnas 2016		
RD Syariah Terproteksi PNM Investa 19		
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2017 Seri II		
RDPT PNM Perikanan Nusantara		
RDPT PNM Multisektoral VI		
RDST PNM PNM Misbah 4		
RD Terproteksi PNM Investa 25		
RDSPT Mikro BUMN Seri II		
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2016		
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri IV		
RDPT PNM POS Indonesia		
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN		
RD PNM Terproteksi Dana Investa 3		
RD PNM Pasar Uang Syariah		
Total		
Persentase terhadap total aset		

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

40. TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)

40. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)

e. Portofolio Efek Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain (Catatan 14)

e. Portfolio of Securities Measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income (Note 14)

	2021	2020	
<u>Entitas Induk</u>			<u>Parent Entity</u>
Saham PT Syarikat Takaful Indonesia	5.785.108.997	5.785.108.997	Shares of PT Syarikat Takaful Indonesia
Kerugian yang belum direalisasi	(5.785.108.997)	(119.880.878)	Unrealized Loss
Total	-	5.665.228.119	Total
Persentase terhadap total aset	0,00%	0,02%	Percentage to total assets

f. Utang Bank dan Lembaga Keuangan (Catatan 18)

f. Bank and Financial Institution Borrowings (Note 18)

	2021	2020	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.899.682.853.634	1.700.260.184.481	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	897.316.847.703	62.520.260.004	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	744.630.751.862	626.861.056.899	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	495.900.000.000	266.666.666.669	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	473.841.787.830	-	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	177.147.691.698	-	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Lembaga Pengelola Dana Bergulir - KUMKM	26.437.480.000	15.041.660.000	Revolving Fund Management Institution - CMSMEs
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	17.758.429.234	-	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
Total	4.732.715.841.961	2.671.349.828.053	Total
Persentase terhadap total liabilitas	12,67%	10,24%	Percentage to total liabilities

g. Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan Lembaga Kredit Luar Negeri (Catatan 21)

g. Borrowings from the Government of the Republic of Indonesia and Foreign Credit Institution (Note 21)

	2021	2020	
Pusat Investasi Pemerintah (PIP)	3.917.715.190.015	3.035.065.437.303	Indonesia Investment Agency (PIP)
Persentase terhadap total liabilitas	10,49%	11,64%	Percentage to total liabilities

h. Utang Lain-Lain (Catatan 24)

h. Other Payables (Note 24)

	2021	2020	
BPJS Ketenagakerjaan	406.279.746	406.279.746	BPJS Ketenagakerjaan
Persentase terhadap total liabilitas	0,00%	0,00%	Percentage to total liabilities

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

40. TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)

40. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)

h. Utang Lain-Lain (Catatan 24) (lanjutan)

h. Other Payables (Note 24) (continued)

Remunerasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang dibayarkan adalah sebagai berikut:

Remuneration payment to Board of Commissioner and Board of Directors as a follows:

	2021	2020	
Imbalan kerja jangka pendek			Short-term employee benefits
Dewan Komisaris	10.313.585.187	11.610.516.805	Board of Commissioners
Dewan Direksi	27.001.042.556	25.056.340.171	Board of Director
Total	37.314.627.743	36.666.856.976	Total

Saldo utang, piutang dan transaksi lainnya dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

As of December 31, 2021 and 2020 the balances of debts, receivables and other transactions with related parties are as follows:

- a. Selama tahun 2021 dan 2020 Perusahaan melakukan transaksi sewa tenaga kerja masing-masing sebesar Rp918.098.503.559 dan Rp1.473.245.462.839 kepada PT Mitra Utama Madani dan PT Micro Madani Institute.
- b. PT Mitra Bisnis Madani memperoleh fasilitas pendanaan jangka panjang yang diwakilkan oleh PT PNM Investment Management berupa investasi. Tingkat suku bunga pinjaman sebesar 11,5% per tahun. Saldo pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp113.000.000.000.

- a. During 2021 and 2020 the Company entered into a lease labor transaction amounting to Rp918,098,503,559 and Rp1,473,245,462,839, respectively to PT Mitra Utama Madani and PT Micro Madani Institute.
- b. PT Mitra Bisnis Madani has a long-term funding facility represented by PT PNM Investment Management in the form of investment. The loan interest rate is 11.5% per annum. The balance on December 31, 2017 amounted to Rp113,000,000,000.

Tidak terdapat anggota atau kelompok direksi, komisaris, pemegang saham utama yang juga merangkap sebagai karyawan dan manajemen kunci.

There are no member or Company of directors, commissioners, major shareholder who also doubles as the employees and key management.

Pada tanggal 18 Desember 2020, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat No. S-711/KO.052/2020 perihal Pencatatan Pengambilalihan (Akuisisi) dan Pemegang Saham Pengendali PT BPRS Haji Miskin. Komposisi kepemilikan saham pada PT BPRS Haji Miskin berubah menjadi sebagai berikut:

On December 18, 2020, the Financial Services Authority (OJK) issued the letter No. S-711/KO.052/2020 concerning the Implementation of The Takeover (Acquisition) of PT BPRS Haji Miskin. The composition of the shareholding in PT BPRS Haji Miskin changed to the following:

Pemegang Saham/ Shareholders	Sebelum Tambahan/Before Acquisition			Akuisisi/Acquisition		Setelah Akuisisi/After Acquisition		
	Lembar/ Share	Nominal/ Amount	%	Lembar/ Share	Nominal/ Amount	Lembar/ Share	Nominal/ Amount	%
PT PNM (Persero)	26.742	2.674.200.000	51,95	(26.742)	(2.674.200.000)	-	-	-
PT PNM Ventura Syariah	-	-	-	26.742	2.674.200.000	26.742	2.674.200.000	51,95
Pemegang Saham Lainnya	24.734	48.801.800.000	48,05	-	-	24.734	48.801.800.000	48,05
Total	51.476	51.476.000.000	100,00	-	-	51.476	51.476.000.000	100,00

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

40. TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)

40. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)

h. Utang Lain-Lain (Catatan 24) (lanjutan)

h. Other Payables (Note 24) (continued)

Pada tanggal 17 September 2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan surat No. SRRB-39/KR.0202/2020 perihal Pelaksanaan Pengambilalihan (Akuisisi) PT BPRS PNM Mentari. Komposisi kepemilikan saham pada PT BPRS PNM Mentari berubah menjadi sebagai berikut:

On September 17, 2020, the Financial Services Authority (OJK) issued the letter No. SRRB-39/KR.0202/2020 concerning the Implementation of The Takeover (Acquisition) of PT BPRS PNM Mentari. The composition of the shareholding in PT BPRS PNM Mentari changed to the following:

Pemegang Saham/ Shareholders	Sebelum Tambahan/Before Acquisition			Akuisisi/Acquisition		Setelah Akuisisi/After Acquisition		
	Lembar/ Share	Nominal/ Amount	%	Lembar/ Share	Nominal/ Amount	Lembar/ Share	Nominal/ Amount	%
PT PNM (Persero)	616.667	616.667.000	64,66	(616.667)	(616.667.000)	-	-	-
PT PNM Ventura Syariah	-	-	-	616.667	616.667.000	616.667	616.667.000	64,66
Pemegang Saham Lainnya	337.049	337.049.000	35,34	-	-	337.049	337.049.000	35,34
Total	953.716	953.716.000	100,00	-	-	953.716	953.716.000	100,00

Pada tanggal 28 Agustus 2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan surat No. S-612/KO.0801/2020 perihal Persetujuan Permohonan Izin Pengambilalihan Saham pada PT BPRS PNM Patuh Beramal berubah menjadi sebagai berikut:

On August 28, 2020, the Financial Services Authority (OJK) issued the letter No. S-612/KO.0801/2020 concerning Approval of the License Application for Share Distribution at PT BPRS PNM Patuh Beramal changed to the following:

Pemegang Saham/ Shareholders	Sebelum Tambahan/Before Acquisition			Akuisisi/Acquisition		Setelah Akuisisi/After Acquisition		
	Lembar/ Share	Nominal/ Amount	%	Lembar/ Share	Nominal/ Amount	Lembar/ Share	Nominal/ Amount	%
PT PNM (Persero)	496.420	49.642.000.000	76,37	(496.420)	(49.642.000.000)	-	-	-
PT PNM Ventura Syariah	-	-	-	496.420	49.642.000.000	496.420	49.642.000.000	76,37
Pemegang Saham Lainnya	153.580	15.358.000.000	23,63	-	-	153.580	15.358.000.000	23,63
Total	650.000	65.000.000.000	100,00	-	-	650.000	65.000.000.000	100,00

Pada tanggal 26 Maret 2020, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat No. S-258/KR.0113/2020 perihal Laporan Pelaksanaan Pengambilalihan Kepemilikan Saham (Akuisisi) PT BPR Rizky Barokah. Komposisi kepemilikan saham pada PT BPR Rizky Barokah berubah menjadi sebagai berikut:

On March 26, 2020, the Financial Services Authority issued a letter No. S-258/KR.0113/2020 concerning the Report on the Implementation of the Share Ownership (Acquisition) of PT BPR Rizky Barokah. The composition of share ownership in PT BPR Rizky Barokah changes to be as follows:

Pemegang Saham/ Shareholders	Sebelum Tambahan/Before Additional			Akuisisi/Acquisition		Setelah Akuisisi/After Acquisition		
	Lembar/ Share	Nominal/ Amount	%	Lembar/ Share	Nominal/ Amount	Lembar/ Share	Nominal/ Amount	%
PT PNM (Persero)	520.000	5.200.000.000	86,67	(520.000)	(5.200.000.000)	-	-	-
PT PNM Ventura Syariah	-	-	-	520.000	5.200.000.000	520.000	5.200.000.000	86,67
Pemegang Saham Lainnya	80.000	800.000.000	13,33	-	-	80.000	800.000.000	13,33
Total	600.000	6.000.000.000	100,00	-	-	600.000	6.000.000.000	100,00

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

41. MANAJEMEN MODAL

Tujuan Perusahaan ketika mengelola modal adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha Perusahaan serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan memastikan struktur modal dan pengembalian pemegang saham yang optimal, dengan mempertimbangkan kebutuhan modal masa depan dan efisiensi modal Perusahaan, profitabilitas, proyeksi arus kas operasional, proyeksi belanja modal dan proyeksi peluang usaha yang strategis. Dalam rangka mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Perusahaan dapat melakukan pemupukan laba ditahan dan mengupayakan penambahan modal disetor dari pemegang saham.

Perusahaan memonitor permodalan berdasarkan *Gearing Ratio*. Rasio ini dihitung dengan membagi total utang bersih dengan total modal. Utang bersih dihitung dari total pinjaman dikurangi dengan kas dan setara kas. Total modal dihitung dari "ekuitas" seperti yang ada pada laporan posisi keuangan.

Kebijakan keuangan Perusahaan selama tahun 2021 dan 2020 adalah mempertahankan *Gearing Ratio* sesuai dengan persyaratan yang berlaku. *Gearing Ratio* pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021	2020
	(dalam jutaan rupiah/ in million rupiah)	(dalam jutaan rupiah/ in million rupiah)
Total pinjaman	31.405.119	22.570.583
Dikurangi : kas dan setara kas	(4.020.609)	(4.462.197)
Utang bersih	27.384.510	18.108.386
Total ekuitas	6.437.954	5.586.910
<i>Gearing Ratio</i>	4,25	3,24
<i>Debt to Equity Ratio</i>	4,88	4,04

42. MANAJEMEN RISIKO

Perusahaan telah mengimplementasikan Manajemen Risiko berdasarkan Risiko Hukum, Risiko Strategis, Risiko Reputasi, Risiko Kepatuhan, Risiko Kredit, Risiko Tingkat Suku Bunga, Risiko Likuiditas dan Risiko Operasional.

Profil Risiko

Perusahaan melakukan pengelolaan risiko secara terkonsolidasi terhadap semua jenis risiko yang telah didefinisikan, baik dalam unit kerja maupun secara *enterprise* antara Perusahaan dengan entitas anak dan entitas asosiasi.

41. CAPITAL MANAGEMENT

The Company objectives when managing capital are to safeguard The Company ability to continue as a going concern whilst seeking to maximize benefits to shareholders and other stakeholders.

The Company manages its capital structure to ensure optimal capital structure and shareholder returns, taking into consideration the future capital requirement and capital efficiency of the Company, profitability, projected operating cash flows, projected capital expenditures, and projected strategic business opportunities. In order to maintain or adjusting the capital structure, the Company may accumulating retained earnings and paid up capital from shareholders.

The Company monitors capital on the basis of *Gearing Ratio*. This ratio is calculated as net debt divided by total equity. Net debt is calculated as total borrowings less cash and cash equivalents. Total equity is calculated as "equity" as shown in the statement of financial position.

The Company's financial policy during 2021 and 2020 was to maintain *Gearing Ratio* as prevailing regulation. The *Gearing Ratio* as at December 31, 2021 and 2020, were as follows:

	2021	2020
	(dalam jutaan rupiah/ in million rupiah)	(dalam jutaan rupiah/ in million rupiah)
Total borrowings	31.405.119	22.570.583
Less : cash and equivalents	(4.020.609)	(4.462.197)
Net debt	27.384.510	18.108.386
Total equity	6.437.954	5.586.910
<i>Gearing Ratio</i>	4,25	3,24
<i>Debt to Equity Ratio</i>	4,88	4,04

42. RISK MANAGEMENT

The Company has implemented a Risk Management based on the Legal Risk, Strategic Risk, Reputation Risk, Compliance Risk, Credit Risk, Interest Rate Risk, Liquidity Risk and Operational Risk.

Risk Profile

The Company perform risk management by consolidated against all types of risks that have been defined, both in the work unit as well as for enterprise between the Company with the subsidiary and the associates entity.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Profil Risiko (lanjutan)

Untuk mendapatkan profil risiko secara keseluruhan dari semua jenis risiko, Perusahaan memberikan bobot risiko untuk setiap jenis risiko sesuai dengan *risk appetite* yang telah direncanakan/ditetapkan sebelumnya.

Enterprise Risk Management (ERM) adalah integrasi risiko yang dilakukan melalui pengintegrasian organisasi risiko, pengintegrasian strategi transfer risiko dan pengintegrasian manajemen risiko ke dalam proses bisnis Perusahaan

Penerapan manajemen risiko yang terintegrasi sesuai dengan konsep ERM, dalam proses bisnis dilaksanakan dalam penentuan strategi dan perencanaan bisnis, pengembangan produk dan bisnis baru, penentuan harga dan pengukuran kinerja bisnis.

a. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan karena adanya kelemahan aspek yuridis. Risiko ini termasuk namun tidak terbatas pada risiko yang timbul dari kemungkinan perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan, tuntutan hukum pihak ketiga, ketidaksesuaian dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, kelemahan perikatan, pengikatan jaminan yang tidak sempurna, ketidakmampuan penerapan putusan pengadilan, keputusan pengadilan yang dapat mengganggu atau mempengaruhi operasi atau kondisi Perusahaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko hukum antara lain adalah pemahaman dokumen legalitas pada saat inisiasi awal, pembuatan perjanjian pembiayaan yang belum dipahami secara utuh oleh pelaksana termasuk proses pengikatan jaminan dan sertifikasi.

Guna menghindari kemungkinan litigasi atau gugatan hukum, Divisi Legal dan divisi terkait lainnya bertugas untuk menyelesaikan masalah hukum yang terjadi dengan mengelola setiap permasalahan yang terkait dengan hukum secara tepat termasuk potensi kerugiannya.

Perusahaan menyusun pedoman dan kode etik yang diberlakukan kepada seluruh karyawan pada setiap jenjang organisasi guna meningkatkan kepatuhan kepada ketentuan internal maupun eksternal. Sanksi diterapkan secara konsisten kepada pejabat dan karyawan yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran.

42. RISK MANAGEMENT (continued)

Risk Profile (continued)

To obtain the overall risk profile of all types of risks, the Company provides risk weight for each type of risk according to the risk appetite that has been planned/designated.

Enterprise Risk Management (ERM) is the integration of risk conducted through integrating organizational risk, integrating risk transfer strategies and integrating risk management into the business process of the Company.

Implementation of integrated risk management in accordance with the concept of ERM, the business processes implemented in determining the strategy and business planning, product development and new business, pricing and business performance measurement.

a. Legal Risk

Legal risk is the risk that is caused due to the weakness of the juridical aspect. This risk includes but is not limited to the risks arising from the possibility of an agreement that could not be carried out, a third-party lawsuits, discrepancy with the laws and regulations in force, the weakness of the Alliance, the binding of the collateral is not appropriate, the inability to implementation of court rulings, court decisions that may interfere with or adversely affect the operation or condition of the Company.

Factors affecting legal risk understanding of legal documents at the time of early initiation, creation of financing agreements that have not been fully understood by the practitioner include the binding process assurance and certification process.

In order to avoid the possibility of litigation or lawsuits, Legal Division and other relevant divisions to complete the legal problems that occur with managing any problems related to the law appropriately including the potential disadvantages.

The Company develop guidelines and codes of conduct that apply to all employees at each level of organization in order to improve adherence to internal and external provision. Sanctions are applied consistently to loan officers and employees proven guilty of irregularities and violations.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko Strategis

Risiko strategis adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Perusahaan dan pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Perusahaan terhadap perubahan eksternal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko strategis: visi Perusahaan, rencana strategis dan peluncuran produk baru.

Pelaksanaan strategi, visi dan misi Perusahaan yang tidak tepat serta pengambilan keputusan bisnis yang tidak sejalan dengan perubahan eksternal dapat mempengaruhi kelangsungan bisnis Perusahaan.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut diatas, Perusahaan telah membentuk, merumuskan dan memantau pelaksanaan strategi termasuk Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).

Selain itu Perusahaan menetapkan indikator penting sesuai ketentuan BUMN yaitu indikator Tingkat Kesehatan (TKS) BUMN agar bisnis Perusahaan dapat tetap tumbuh dan terus meningkatkan kepercayaan bagi *stakeholder* dan *shareholder*.

c. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha atau persepsi negatif terhadap Perusahaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko reputasi antara lain: citra dan konflik internal.

Pengelolaan risiko reputasi harus memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan debitur dan *stakeholders* sejalan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan melakukan manajemen risiko reputasi dengan cara memantau dan melaksanakan komunikasi yang tepat dalam rangka menghadapi berita yang bersifat negatif atau pencegahan informasi yang cenderung kontraproduktif dengan cara menerapkan strategi penggunaan media yang efektif untuk meng-*counter* berita negatif dan penerapan *Good Corporate Governance* yang konsisten.

42. RISK MANAGEMENT (continued)

b. Strategic Risk

Strategic risk is the risk that is caused partly due to the establishment and implementation of The Company strategy and improper business decision-making or the lack of the Company's responsiveness to the external changes.

Factors that influence the strategic risk: the Company's vision, strategic planning and new product launches.

Implementation of the strategy, vision and mission as well as the Company improper business decisions that are inconsistent with the external changes could affect business continuity of the Company.

In relation to the matters mentioned above, the Company has established, formulated and monitored the implementation of the strategy including the Company Work Plan Budget (RKAP) and Long-Term Corporate Plan (RJPP).

Additionally the Company set of important indicators in accordance with BUMN regulation, namely Health Level indicator (TKS) BUMN so that the Company business can still grow and continue to improve for the stakeholder and shareholder confidence.

c. Reputational Risk

Reputational risk is the risk due to the negative publicity associated with business or negative perceptions of the Company.

Factors that influence the risk of reputation are such as: image and internal conflict.

Reputational risk management should comply with the principles of transparency and improved service quality for debtors and stakeholders in line with regulation.

The Company performs risk management by monitoring and implementing the right communication in order to deal with negative news or information that tends to counterproductive, by implementing the use of effective media strategies to counter the negative news and the implementation of Good Corporate Governance consistently.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

42. RISK MANAGEMENT (continued)

d. Risiko Kepatuhan

d. Compliance Risk

Risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi karena Perusahaan tidak mematuhi atau tidak melaksanakan ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan. Pada prakteknya, risiko kepatuhan melekat pada risiko Perusahaan yang terkait pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, seperti:

Compliance risk is the risk that occurs because the Company did not comply with or implement internal regulations and legislation. In practical, compliance risks is inherent in the risks associated the Company on legislation and other applicable provisions, such as:

- Risiko strategis terkait dengan ketentuan Rencana Kerja Anggaran (RKAP) Perusahaan.
- Risiko kredit terkait dengan ketentuan Batas Wewenang Memutus Pembiayaan (BWMP), Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).
- Risiko lain yang terkait dengan ketentuan eksternal dan internal.

- *Strategic risks associated with the provisions of the Work Plan Budget (RKAP) of the Company.*
- *Credit risk associated with Lending/Limit Policies (BWMP), Productive Assets Quality and the Establishment of Allowance for Impairment Losses (CKPN).*
- *Other risks associated with internal and external regulations.*

Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko kepatuhan adalah perubahan peraturan eksternal, komunikasi internal, budaya disiplin karyawan dan infrastruktur.

Factors that affect compliance risks are changes in external regulations, internal communications, employee discipline culture and infrastructure.

Perusahaan melakukan manajemen risiko kepatuhan melalui peningkatan budaya kepatuhan yang terus menerus dilakukan melalui program:

The Company perform risk management to increase compliance with the continuous culture of compliance through the program:

- Sosialisasi/pelatihan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur baru;
- Pembaharuan dan dokumentasi *database* kebijakan dan prosedur;
- Uji kepatuhan terhadap produk baru dan kebijakan baru.

- *Socialization/obedience training on policies and new procedures;*
- *Database updating and documentation of policies and procedures*
- *Compliance testing of new products and new policies.*

e. Risiko Pasar

e. Market Risk

Risiko pasar merupakan risiko yang terutama disebabkan karena perubahan tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang rupiah, harga komoditas dan harga modal atau pinjaman, yang dapat membawa risiko bagi Perusahaan. Dalam perencanaan usaha Perusahaan, risiko pasar yang memiliki dampak langsung kepada Perusahaan adalah dalam hal pengelolaan tingkat bunga.

Market risk is the risk which is primarily caused by the changes in interest rate, exchange rate of rupiah currency, commodity prices and the prices of capital or loans, which could expose to the Company. In the Company's business planning, market risk with direct impact to the Company is in terms of interest rate management.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

e. Risiko Pasar (lanjutan)

Perubahan tingkat suku bunga akan menjadi risiko pada saat perubahannya, terutama ketika tingkat suku bunga naik yang menyebabkan beban dana meningkat. Untuk itu Perusahaan menerapkan pengelolaan tingkat suku bunga pinjaman tetap dan tingkat suku bunga pinjaman yang disesuaikan secara konsisten terhadap sensitivitas tingkat suku bunga sumber dana.

Sumber pendanaan Perusahaan yang terbesar berasal dari utang obligasi dan pinjaman bank komersial dengan tingkat suku bunga tetap. Perusahaan juga menerbitkan surat utang jangka pendek dan menengah dengan tingkat suku bunga tetap serta sejumlah kecil pinjaman dari bank komersial dengan tingkat bunga mengambang.

Dengan pola aktivitas usaha yang dijalankan Perusahaan saat ini, risiko pasar Perusahaan adalah minimal. Perusahaan tidak mempunyai kegiatan usaha pembiayaan dalam mata uang asing.

Tabel berikut menggambarkan rincian aset dan liabilitas keuangan Perusahaan yang dikelompokkan menurut mana yang lebih awal antara tanggal repricing atau tanggal jatuh tempo kontraktual untuk melihat dampak perubahan tingkat suku bunga:

42. RISK MANAGEMENT (continued)

e. Market Risk (continued)

Changes in interest rates would become a risk at the point of change, especially when the interest rate of fund is raised, which would cause losses to the Company. Therefore, the Company consistently implements fixed rate and floating rate management by doing adjustment on lending interest rate depending sensitivity of funding interest rate.

The largest source of funding for the Company comes from bonds and commercial bank loans with fixed interest rates. The Company's funding source is also from the issuance of promissory notes in short and medium term, with fixed interest rate and as well as small number of floating rate loans from commecial banks.

With the pattern of business activity currently operated by the Company, the market risk of the Company is minimal. The Company does not have financing business in foreign currency.

The following table summarizes the Company's financial assets and liabilities at carrying amounts, categorized by the earlier of contractual repricing or maturity dates to see the impact of changes in interest rates:

		31 Desember/December 31, 2021 (dalam jutaan Rupiah)/(expressed in millions of Rupiah)						
		Tingkat suku bunga mengambang/ Floating rate		Tingkat suku bunga tetap/ Fixed Rate			Total/ Total	
		<3 bulan/ months	3-36 bulan/ months	<3 bulan/ months	3-12 bulan/ months	1-2 tahun/ years	>2 tahun/ years	
Aset Keuangan								Financial Assets
Kas dan setara kas	-	-	4.020.609	-	-	-	4.020.609	Cash and cash equivalent
Pinjaman yang diberikan	-	-	-	21.096.269	6.067.802	6.472.210	33.636.281	Loans
Subtotal	-	-	4.020.609	21.096.269	6.067.802	6.472.210	37.656.890	Subtotal
Liabilitas Keuangan								Financial Liabilities
Utang bank dan lembaga keuangan	40.546	-	473.383	4.555.875	1.343.092	4.900.500	11.313.396	Bank and financial institutions borrowings
Surat utang jangka menengah dan sukuk	-	-	675.000	1.373.000	1.100.000	2.942.000	6.090.000	Medium-term notes and sukuk
Utang Obligasi Pinjaman dari Pemerintah RI dan Lembaga Kredit LN	-	-	167.855	3.733.852	2.834.303	3.342.272	10.078.282	Bond payables Borrowings from Government of RI and Foreign Credit
Subtotal	40.546	-	1.333.843	10.153.400	6.338.183	13.539.147	31.405.119	Subtotal
Total	(40.546)	-	2.686.766	10.942.869	(270.381)	(7.066.937)	6.251.771	Total

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

42. RISK MANAGEMENT (continued)

e. Risiko Pasar (lanjutan)

e. Market Risk (continued)

31 Desember 2020/December 31, 2020
(dalam jutaan Rupiah)/(expressed in millions of Rupiah)

	Tingkat suku bunga mengambang/ Floating rate		Tingkat suku bunga tetap/ Fixed Rate				Total/ Total	
	<3 bulan/ months	3-36 bulan/ months	<3 bulan/ months	3-12 bulan/ months	1-2 tahun/ years	>2 tahun/ years		
Aset Keuangan								Financial Assets
Kas dan setara kas	-	-	4.462.197	-	-	-	4.462.197	Cash and cash equivalent
Pinjaman yang diberikan	-	-	-	15.820.151	681.899	6.261.451	22.763.501	Loans
Subtotal	-	-	4.462.197	15.820.151	681.899	6.261.451	27.225.698	Subtotal
Liabilitas Keuangan								Financial Liabilities
Utang bank dan lembaga keuangan	39.085	-	888.299	1.717.008	1.401.332	2.179.107	6.224.831	Bank and financial institutions borrowings
Surat utang jangka menengah dan sukuk	-	-	600.000	1.408.500	890.000	992.000	3.890.500	Medium-term notes and sukuk
Utang Obligasi	-	-	-	2.996.136	2.734.470	3.682.883	9.413.489	Bond payables
Pinjaman dari Pemerintah RI dan Lembaga Kredit LN	-	6.697	2.942	182.153	1.076.765	1.773.206	3.041.763	Borrowings from Government RI and Foreign Credit
Subtotal	39.085	6.697	1.491.241	6.303.797	6.102.567	8.627.196	22.570.583	Subtotal
Total	(39.085)	(6.697)	2.970.956	9.516.354	(5.420.668)	(2.365.745)	4.655.115	Total

f. Risiko Kredit

f. Credit Risk

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul bilamana dana yang disalurkan tidak dapat kembali atau pendapatan yang diharapkan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dan diperjanjikan.

Credit risk is the risk of financial losses incurred when funds can not be re-routed or expected revenues are not in accordance with a predetermined and agreed upon.

Risiko kredit Perusahaan berasal dari pinjaman yang diberikan kepada Bank Pelaksana Kredit Program, Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S), serta pembiayaan ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro) kepada Usaha Kecil dan Mikro (UKM).

The Company's credit risk from loans granted to Credit Program Managing Bank, and Micro/Sharia Finance Institutions (LKM/S), as well as financing ULaMM (Micro Capital Services Unit) to Small and Micro Enterprises (SMEs).

Tabel berikut menggambarkan total risiko kredit dan konsentrasi risiko atas pinjaman yang diberikan dan pembiayaan modal yang dimiliki oleh Perusahaan:

The following table sets out the amount of credit risk and risk concentration of the loans and the capital financing owned by the Company:

	2021	2020	
Rupiah			Rupiah
Mekaaar	26.255.405	15.692.304	Mekaaar
Unit layanan modal mikro	7.280.577	6.982.930	Small and micro enterprises
Pembiayaan modal	884.762	961.304	Capital financing
Lembaga keuangan mikro/syariah	84.277	67.812	Micro/sharia finance institution
Mikro kecil dan menengah	16.022	20.455	Micro, small and medium
Total	34.521.043	23.724.805	Total

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

42. RISK MANAGEMENT (continued)

f. Risiko Kredit (lanjutan)

f. Credit Risk (continued)

	2021
Persentase	
Mekaar	76,06%
Unit layanan modal mikro	21,09%
Pembiayaan modal	2,56%
Lembaga keuangan mikro/syariah	0,24%
Mikro kecil dan menengah	0,05%
Total	100,00%

	2020	Percentage
		<i>Mekaar</i>
		<i>Small and micro enterprises</i>
		<i>Capital financing</i>
		<i>Micro/sharia finance institution</i>
		<i>Micro, small and medium</i>
Total	100,00%	Total

Besarnya eksposur portofolio pembiayaan mencerminkan semakin meningkatnya kontribusi risiko kredit terhadap total risiko Perusahaan, hal ini dikarenakan portofolio pembiayaan menempati porsi terbesar dari keseluruhan aset Perusahaan, sehingga risiko kredit merupakan risiko terbesar yang dihadapi Perusahaan. Perusahaan mengelola risiko kredit pada tingkat transaksi dan portofolio, dengan berpedoman kepada prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) dan *business justification* yang memperhatikan pula *historical data*.

The amount of exposure of a portfolio of financing reflects the increasing contribution of credit risk to the total risk of the Company, this is because the finance portfolio occupies the largest portion of the total assets of the Company, so credit risk is the highest risk faced by the Company. The Company manages credit risk in the transaction and portfolio level, with reference to the prudential principles and business justification to consider also historical data.

Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko kredit dalam peranannya dalam pengendalian dan mengurangi risiko kredit adalah kemampuan dan kematangan unit bisnis dalam membuat analisa kredit, sehingga tercapai suatu keseimbangan antara pengelolaan risiko dengan pengembangan bisnis.

Factors that affect credit risk in the role of controlling and reducing credit risk is the ability and maturity of the business unit in making the credit analysis, in order to reach a balance between risk management with business development.

1) Pengukuran risiko kredit

1) Credit risk measurement

Grup telah menerapkan alat pengukuran risiko pada debitur yaitu *Credit Risk Rating* untuk debitur tergolong Bank Pelaksana dan LKMS dan *Credit Scoring* untuk debitur tergolong UKM. Alat pengukuran peringkat atau skor ini mengukur kualitas manajemen, kinerja keuangan dan prospek usaha dari debitur dengan standar penilaian menggunakan parameter industri. Alat ukur ini dievaluasi secara rutin untuk mengukur tingkat akurasi model maupun parameter industri. *Credit Risk Rating* dan *Credit Scoring* digunakan sebagai alat pemutus awal apakah suatu usulan pembiayaan dapat dilanjutkan atau tidak.

The Company has implemented a risk measurement tool on the debtor that the debtor's Credit Risk Rating for Bank Executor and LKMS classified and Credit Scoring for debtors classified as SMEs. Rank or score measurement tool measures the quality of management, financial performance and prospects of the debtor with the parameter assessment using industry standard. This measurement tool is evaluated on a regular basis to measure the accuracy of the model and the parameters of the industry. Credit Risk Rating and Credit Scoring is used as an initial determinant whether a proposed financing can be continued or not.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

f. Risiko Kredit (lanjutan)

1) Pengukuran risiko kredit (lanjutan)

Proses persetujuan pembiayaan dilakukan oleh pejabat yang memiliki pengalaman, pengetahuan dan latar belakang yang mencukupi untuk menilai risiko kredit, sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Limit kewenangan para pejabat pemutus kredit berdasarkan keputusan K3PR (Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko) yang mempertimbangkan kompetensi dari masing-masing pejabat tersebut.

2) Pengendalian batas risiko dan kebijakan mitigasi

Perusahaan menghindari pemberian kredit pada debitur, sektor usaha atau aktivitas yang sejak awal dapat menyebabkan terjadinya kerugian Perusahaan. Risiko ini dimonitor dan ditelaah secara periodik.

Agunan

Perusahaan dalam rangka mendapatkan keyakinan atas pengembalian penyaluran pembiayaan ini menerapkan kebijakan tentang agunan. Ketentuan yang diatur terkait jaminan ini mencakup ketentuan jenis agunan yang dapat diterima, besaran *coverage*-nya, tata cara pengikatan agunan dan ketentuan penjualan agunan. Selain itu juga dibuat petunjuk teknis cara penilaian agunan.

Perusahaan dapat menggunakan agunan (*collateral*) dalam rangka mitigasi risiko kredit. Perusahaan harus memiliki posisi hukum yang kuat atas agunan yang diterima dari debitur.

Batasan Pemberian Kredit

Perusahaan mengelola dan mengendalikan risiko kredit melalui penerapan batas maksimal pemberian pembiayaan per individu atau Perusahaan, ketentuan daftar negatif industri, *reviu* atas produk secara berkala, ketentuan batasan penyaluran produk pada wilayah-wilayah tertentu, pelaksanaan telaah portofolio pembiayaan dan adanya pelaporan terkait kualitas pembiayaan setiap bulan.

42. RISK MANAGEMENT (continued)

f. Credit Risk (continued)

1) Credit risk measurement (continued)

Financing approval process conducted by an officer who has the experience, knowledge and adequate background for assessing credit risk, in accordance with each authority based on the applicable regulations. Limit the authority of the officials of credit based on the decision K3PR breaker (Policy Committee for Credit and Risk Control) that takes into account the competence of each official.

2) Control limits and risk mitigation policies

The Company avoid giving credit to the debtor, the business sector or activity from the beginning that can lead to loss of the Company. These risks are monitored and reviewed periodically.

Collateral

The Company in order to get confidence in the return distribution of lending implement a policy of collateral. Relevant provisions of this collateral covers the provision of acceptable, types of collateral, the amount of its coverage, the binding of collateral procedures and conditions of sale of collateral. It also made technical manual methods of valuation of collateral.

The Company can use the collateral in order to mitigate credit risk. The Company should have a strong legal position of the collateral received from debtor.

Lending Limits

The Company manage and control credit risk through the application of the provision of financing limit per individual or Company, the provisions of the negative list of industries, a review of the product on a regular basis, the provision limits the distribution of products in certain areas, the implementation of the financing portfolio review and the reporting of quality-related financing of each month.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

f. Risiko Kredit (lanjutan)

- 2) Pengendalian batas risiko dan kebijakan mitigasi (lanjutan)

Batasan Pemberian Kredit (lanjutan)

Penetapan limit dilakukan kepada debitur atau *counterparty*, secara individual maupun Perusahaan, baik *on balance sheet* maupun *off balance sheet*. Besarnya limit didasari oleh analisis mengenai kemampuan membayar debitur dan toleransi Perusahaan.

Limit untuk risiko kredit ditetapkan pada jenis industri dan sektor ekonomi dengan tujuan mengurangi risiko yang ditimbulkan karena adanya konsentrasi penyaluran kredit.

Limit kredit di reviu secara berkala dengan mempertimbangkan perubahan kemampuan debitur dan memperhatikan perubahan kondisi ekonomi.

Pemantauan Kredit

Pemantauan kredit dilakukan terhadap beberapa faktor sehingga dapat diidentifikasi potensi terjadinya masalah secara lebih dini (*early warning sign*). Pemantauan dilakukan terhadap kondisi keuangan dan bisnis debitur, pola pembayaran, pemenuhan *covenant*, kesesuaian penggunaan dana kredit, nilai jaminan dan kredibilitas debitur tersebut melalui *trade checking*, *bank checking* serta perubahan terkait *rating*.

Pemantauan risiko kredit dapat dilakukan melalui proses reviu secara individual per debitur maupun secara portofolio.

42. RISK MANAGEMENT (continued)

f. Credit Risk (continued)

- 2) *Control limits and risk mitigation policies (continued)*

Lending Limits (continued)

Establishment of limits made to the debtor or counterparty, individually and in Companies, both on balance sheet and off balance sheet. The amount limit based on the analysis of the debtors' repayment abilities and the Company's tolerance.

Limit to credit risk are set on the type of industries and economic sectors with the purpose to reducing the risk arising due to the concentration of lending.

Credit limits are reviewed periodically to consider changes in the ability of the debtor and notice changes in economic conditions.

Credit Monitoring

Credit monitoring carried out on a few factors that can be identified potential problems early (early warning sign). Monitoring conducted on the financial condition and business of the debtor, payment patterns, compliance with covenants, conformity of credit fund utilization, the value of collateral and the debtor's credibility through trade checking, bank checking and the associated changes in rating.

Credit risk monitoring can be carried out through the review process on an individual basis per debtor or a portfolio.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

f. Risiko Kredit (lanjutan)

- 2) Pengendalian batas risiko dan kebijakan mitigasi (lanjutan)

Penurunan Nilai dan Kebijakan Pencadangan

Tingkat cadangan yang wajar ditetapkan untuk setiap kualitas kredit. Besarnya pencadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Cadangan kerugian penurunan nilai yang diakui pada pelaporan keuangan hanyalah kerugian yang telah terjadi pada tanggal laporan keuangan atas posisi keuangan (berdasarkan bukti obyektif atas penurunan nilai).

42. RISK MANAGEMENT (continued)

f. Credit Risk (continued)

- 2) Control limits and risk mitigation policies (continued)

Impairment and Reserve Policies

Reasonable level of allowance is set for each credit quality. The amount of allowance for impairment losses is in accordance with the applicable regulation.

Impairment losses recognized in the financial reporting is a loss that has occurred on the financial statements date of financial position (based on objective evidence for impairment).

31 Desember/December 31, 2021
(dalam jutaan Rupiah)/(expressed in millions of Rupiah)

	Nilai kotor/ Gross value	Penyisihan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses	Nilai bersih/ Net value	
Kas dan setara kas	4.020.609	-	4.020.609	Cash and cash equivalents
Portofolio efek				Portfolio of securities
diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	1.184.264	-	1.184.264	measured at fair value through profit or loss
Pinjaman yang diberikan	33.636.281	(1.259.105)	32.377.176	Loans
Pembiayaan modal	884.762	(116.668)	768.094	Capital financing
Piutang jasa manajemen - neto	10.411	(4.776)	5.635	Management services receivable - net
Pendapatan masih akan diterima	130.097	-	130.097	Accrued income
Piutang kegiatan manajer investasi	7.286	-	7.286	Investment manager activities receivables
Piutang lain-lain	43.533	(13.263)	30.270	Other receivables
Portofolio efek				Portfolio of securities
diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	5.785	(5.785)	-	measure at fair value through Accrued income
Total	39.923.028	(1.399.597)	38.523.431	Total

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

42. RISK MANAGEMENT (continued)

f. Risiko Kredit (lanjutan)

f. Credit Risk (continued)

31 Desember/December 31, 2020 (dalam jutaan Rupiah)/(expressed in millions of Rupiah)				
	Nilai kotor/ Gross value	Penyisihan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses	Nilai bersih/ Net value	
Kas dan setara kas	4.462.197	-	4.462.197	Cash and cash equivalents
Portofolio efek yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	524.809	-	524.809	Portfolio of securities measured at fair value through profit or loss
Pinjaman yang diberikan	22.763.500	(674.515)	22.088.985	Loans
Pembiayaan modal	961.304	(114.732)	846.573	Capital financing
Piutang jasa manajemen - neto	8.326	(1.132)	7.194	Management services receivable - net
Pendapatan masih akan diterima	117.947	-	117.947	Accrued income
Piutang kegiatan manajer investasi	8.043	-	8.043	Investment manager activities receivables
Piutang lain-lain	70.947	(13.235)	57.711	Other receivables
Portofolio efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	5.785	(120)	5.665	Portfolio of securities measure at fair value through Accrued income
Total	28.922.858	(803.734)	28.119.124	Total

Tabel di atas menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit bagi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Untuk aset pada laporan posisi keuangan, eksposur di atas ditentukan berdasarkan nilai tercatat bersih seperti yang diungkapkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

The above table illustrates the maximum exposure to credit risk for the Company on December 31, 2021 and 2020. For assets in the statement of financial position, the exposure set out above are based on net carrying amounts as disclosed in the consolidated statement of consolidated financial position.

Informasi kualitas kredit atas aset keuangan per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

The information on the credit quality of financial assets as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

- Perusahaan 1 : Debitur baru (kurang dari 6 bulan).
- Perusahaan 2 : Nasabah lama yang tidak memiliki historis pernah menunggak dalam 3 tahun terakhir.
- Perusahaan 3 : Nasabah lama yang memiliki historis pernah menunggak (di bawah 90 hari) dalam 3 tahun terakhir.
- Perusahaan 4 : Nasabah lama yang memiliki historis pernah menunggak diatas 90 hari dalam 3 tahun terakhir.
- Perusahaan 5 : Nasabah lama yang pinjamannya pernah/telah direstrukturisasi.

- Company 1 : New customers (less than 6 months).
- Company 2 : Existing customers with no history of overdue for the past 3 years.
- Company 3 : Existing customers with history of overdue (below 90 days in the past 3 years).
- Company 4 : Existing customers with history of default more than 90 days in the past 3 years.
- Company 5 : Existing customers with loans that was/has been restructured.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

42. RISK MANAGEMENT (continued)

g. Risiko Tingkat Suku Bunga

g. Interest Rate Risk

Risiko tingkat suku bunga terjadi akibat kegiatan usaha Perusahaan yang mengandung suku bunga, yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah serta pinjaman yang diterima untuk modal kerja usaha. Dalam hal ini, Perusahaan bertanggung jawab dalam menetapkan strategi dan kebijakan dalam pengelolaan tingkat suku bunga serta mengawasi penerapan dan pelaksanaannya.

Interest rate risk results from the Company's operations that contain interest rate, which is credit given to customers and loans received for working capital. In this regard, the Company's responsible for establishing strategies and policies in the management of interest rates as well as overseeing the implementation and execution.

Risiko tingkat suku bunga dapat terjadi akibat peningkatan tingkat suku bunga pinjaman yang tidak serta merta diikuti dengan tingkat suku bunga kredit. Perusahaan menerapkan pendekatan *zero-interest gapping*, dengan memaksimalkan pinjaman dengan suku bunga tetap. Perusahaan juga secara berkala mengkaji tingkat suku bunga kredit dengan mengacu pada tingkat suku bunga pinjaman yang berlaku demi mengoptimalkan hasil usaha Perusahaan.

Interest rate risk can occur due to an increase in lending rates is not necessarily followed by the level of credit rates. The Company applies a zero-interest approach gapping, to maximize the fixed-rate loans. The Company also regularly reviews the level of lending rates by reference to the loan interest rate applicable to optimize the Company's results of operations.

h. Risiko Likuiditas

h. Liquidity Risk

Risiko likuiditas merupakan risiko, yang mana Perusahaan tidak memiliki sumber keuangan yang mencukupi untuk memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo.

Liquidity risk is the risk, which the Company does not have sufficient financial resources to settle the obligations that have matured.

1) Pengelolaan Risiko Likuiditas

1) Liquidity Risk Management

Perusahaan sangat berkepentingan dalam menjaga likuiditasnya, agar tetap dapat mengembangkan asetnya dan menjaga kredibilitas dan kemampuan akses pendanaan Perusahaan. Pengelolaan likuiditas dilakukan secara berkesinambungan dan penuh kehati-hatian dengan menekankan pada terpeliharanya *cash flow* dan terkontrolnya tingkat *maturity gap* Perusahaan. Kesenjangan atas arus kas yang terjadi diatasi dengan memelihara aset likuid dan meningkatkan akses ke sumber-sumber pendanaan.

The Company is concerned in maintaining its liquidity, in order to continue to develop its assets and maintain the credibility and the Company's funding access ability. Liquidity management is carried out continuously and carefully the emphasis on maintaining cash flow and controlled level of the Company's maturity gap. Cash flow gaps that occur are mitigated by maintaining liquid assets and improve access to funding sources.

Penyediaan dana dalam bentuk deposito dan kontrak pengelolaan dana adalah bagian dari menjaga optimalisasi likuiditas Perusahaan. Perusahaan menempatkan deposito pada bank-bank umum dengan tingkat bunga sesuai dengan tingkat bunga yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Provision of funds in time deposits and fund contract management is part of effort to maintaining liquidity optimality of the Company. The Company placing deposits in Commercial Banks at appropriate interest risk to the interest rate that is guaranteed by the Deposit Insurance Corporation (LPS).

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

h. Risiko Likuiditas (lanjutan)

2) Analisa Likuiditas (lanjutan)

Analisa *maturity gap* ditinjau secara berkala melalui mekanisme rapat bulanan Perusahaan yang mengevaluasi kesenjangan jatuh tempo pengelolaan pendanaan (*funding*), analisa pengelolaan *earning aset* dan liabilitas yang memiliki tingkat bunga *floating* terhadap tingkat bunga acuan, analisa penempatan dana, laporan perkembangan portofolio (baki debit dan pencairan) dan strategi penetapan *pricing* produk.

Pengelolaan likuiditas memperhatikan keseimbangan antara risiko likuiditas dan biaya untuk memelihara aset likuid.

Pengukuran risiko likuiditas dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang menggunakan metodologi sesuai *best practice*, yang dapat menggambarkan profil risiko likuiditas inheren saat ini maupun potensi risiko likuiditas di masa mendatang. Termasuk dalam alat ukur likuiditas adalah *liquidity gap* dan rasio-rasio likuiditas.

Tabel berikut menyajikan sisa umur kontraktual liabilitas keuangan Perusahaan yang menggambarkan eksposur Perusahaan terhadap risiko likuiditas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

	31 December/December 31, 2021 (dalam jutaan Rupiah)/(expressed in millions of Rupiah)					
	≤ 1 tahun/ ≤ 1 year	> 1 - 2 tahun/ > 1 - 2 years	> 2 - 3 tahun/ > 2 - 3 years	> 3 tahun/ > 3 years	Total/ Total	
Utang bank dan lembaga keuangan	5.069.803	1.343.092	4.687.249	213.252	11.313.396	Bank and financial institution borrowings
MTN dan Sukuk	2.048.000	1.100.000	2.615.000	327.000	6.090.000	MTN and Sukuk
Utang obligasi	3.901.707	2.834.303	1.519.683	1.822.589	10.078.282	Bond payables
Pinjaman Pemerintah RI	508.278	1.060.788	2.348.650	-	3.917.716	Borrowing from the Government of RI
Pinjaman lembaga kredit luar negeri	-	-	-	5.725	5.725	Borrowings from foreign credit institution
Utang kegiatan manajer investasi	1	-	-	-	1	Investment manager activities payables
Utang lain-lain	-	-	-	323.369	323.369	Other payables
Beban yang masih harus dibayar	-	296.450	-	-	296.450	Accrued expenses
Dana cadangan angsuran	4.793.680	55.072	82.608	110.143	5.041.503	Installment reserve fund
Total	16.321.469	6.689.705	11.253.190	2.802.078	37.066.442	Total

42. RISK MANAGEMENT (continued)

h. Liquidity Risk (continued)

2) Analysis of Liquidity (continued)

Maturity gap analysis is reviewed periodically through the Company monthly meetings mechanism that evaluates: maturity gap of funding management, analysis of earnings management assets and liabilities with floating interest rate to the benchmark interest rate, the placement of fund analysis, development of a portfolio report (outstanding and disbursement) and product pricing strategies.

Liquidity amagement is carried out while taking the balance between liquidity risk and liquid asset maintenance cost into accounts.

Liquidity risk measurement is performed by using a measuring instruments according to the best practice methodologies, which can describe the current inherent liquidity risk profile of current and potential future liquidity risks. Included in the liquidity measuring tools are the liquidity gap and liquidity ratio.

The following table summarizes the contractual life remaining of the Company's financial liabilities that describe the Company's exposure to liquidity risk on December 31, 2021 and 2020:

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

42. RISK MANAGEMENT (continued)

h. Risiko Likuiditas (lanjutan)

h. Liquidity Risk (continued)

2) Analisa Likuiditas (lanjutan)

2) Analysis of Liquidity (continued)

31 Desember/December 31, 2020 (dalam jutaan Rupiah)/(expressed in millions of Rupiah)						
	≤ 1 tahun/ ≤ 1 year	> 1 - 2 tahun/ > 1 - 2 years	> 2 - 3 tahun/ > 2 - 3 years	> 3 tahun/ > 3 years	Total/ Total	
Utang bank dan lembaga keuangan	2.662.206	1.401.332	2.029.095	132.198	6.224.831	Bank and financial institution borrowings
MTN dan Sukuk	2.008.500	890.000	692.000	300.000	3.890.500	MTN and Sukuk
Utang obligasi	2.996.136	2.734.470	1.836.165	1.846.719	9.413.490	Bond payables
Pinjaman Pemerintah RI	185.095	1.076.765	1.773.206	-	3.035.066	Borrowing from the Government of RI
Pinjaman lembaga kredit luar negeri	-	-	-	6.696	6.696	Borrowings from foreign credit institution
Utang kegiatan manajer investasi	4	-	-	-	4	Investment manager activities payables
Utang lain-lain	-	-	-	384.108	384.108	Other payables
Beban yang masih harus dibayar	-	415.692	-	-	415.692	Accrued expenses
Dana cadangan angsuran	2.383.378	20.927	41.776	74.898	2.520.979	Installment reserve fund
Total	10.235.319	6.539.186	6.372.242	2.744.619	25.891.366	Total

Tabel berikut menggambarkan profil perbedaan jatuh tempo atas aset dan liabilitas keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

The following table describes the maturity gap profile of the Company's financial assets and liabilities as at December 31, 2021 and 2020.

31 Desember/December 31, 2021							
	Tanpa tanggal jatuh tempo kontraktual/ No contractual maturity date	< 1 tahun/ < 1 year	> 1 - 2 tahun/ 1 - 2 years	> 2 - 3 tahun/ > 2 - 3 years	> 3 tahun/ > 3 years	Total/ Total	
Aset keuangan							Financial assets
Kas dan setara kas	4.020.609	-	-	-	-	4.020.609	Cash and cash equivalent
Portofolio efek untuk diperdagangkan	-	1.184.264	-	-	-	1.184.264	Portfolio of securities trading
Pinjaman yang diberikan	-	21.096.269	6.067.802	6.472.210	-	33.636.281	Loans
Pembiayaan modal	-	437.577	263.819	183.366	-	884.762	Capital financing
Piutang jasa manajemen	-	10.411	-	-	-	10.411	Management services receivables
Pendapatan masih akan diterima	-	130.097	-	-	-	130.097	Accrued income
Piutang kegiatan manajer investasi	-	7.287	-	-	-	7.287	Investment manager activities receivables
Piutang lain-lain	-	87.561	-	-	-	87.561	Other receivables
Aset lain-lain/Bank Dibatasi penggunaannya	1.623.897	-	-	-	-	1.623.897	Other asset/ Restricted bank
	5.644.506	22.953.466	6.331.621	6.655.576	-	41.585.169	
Liabilitas keuangan							Financial liabilities
Utang bank dan lembaga keuangan	-	5.069.803	1.343.092	4.687.249	213.252	11.313.396	Bank and financial institution borrowings
MTN dan Sukuk	-	2.048.000	1.100.000	2.615.000	327.000	6.090.000	MTN and Sukuk
Utang obligasi	-	3.901.707	2.834.303	1.519.684	1.822.589	10.078.283	Bond payables
Pinjaman Pemerintah RI	-	508.277	1.060.788	2.348.650	-	3.917.715	Borrowing from the Government of RI
Pinjaman lembaga kredit luar negeri	-	-	-	-	5.725	5.725	Borrowings from foreign credit institution
Utang kegiatan manajer investasi	-	1	-	-	-	1	Investment manager activities payables
Utang lain-lain	-	-	-	-	323.369	323.369	Other payables
Beban yang masih harus dibayar	-	-	-	-	296.450	296.450	Accrued expenses
Dana cadangan angsuran	-	4.628.464	55.072	82.607	110.144	4.876.287	Installment reserve fund
	-	16.156.252	6.393.255	11.253.190	3.098.529	36.901.226	
Total perbedaan jatuh tempo	5.644.506	6.797.214	(61.634)	(4.597.614)	(3.098.529)	4.683.943	Total maturity gap

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

42. RISK MANAGEMENT (continued)

h. Risiko Likuiditas (lanjutan)

h. Liquidity Risk (continued)

2) Analisa Likuiditas (lanjutan)

2) Analysis of Liquidity (continued)

31 Desember/December 31, 2020

	Tanpa tanggal jatuh tempo kontraktual/ No contractual maturity date	< 1 tahun/ < 1 year	> 1 - 2 tahun/ 1 - 2 years	> 2 - 3 tahun/ > 2 - 3 years	> 3 tahun/ > 3 years	Total/ Total	
Aset keuangan							Financial assets
Kas dan setara kas	4.462.197	-	-	-	-	4.462.197	Cash and cash equivalent
Portofolio efek diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	-	524.809	-	-	-	524.809	Portfolio of securities measured at fair value through profit and loss
Pinjaman yang diberikan	-	15.820.151	681.899	6.261.451	-	22.763.501	Loans
Pembiayaan modal	-	370.212	276.036	315.056	-	961.304	Capital financing
Piutang jasa manajemen	-	8.326	-	-	-	8.326	Management services receivables
Pendapatan masih akan diterima	-	117.946	-	-	-	117.946	Accrued income
Piutang kegiatan manajer investasi	-	8.043	-	-	-	8.043	Investment manager activities receivables
Piutang lain-lain	-	57.711	-	-	-	57.711	Other receivables
Portofolio efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	5.665	-	-	-	-	5.665	Portfolio of securities measured at fair value through other comprehensive income
	4.467.862	16.907.198	957.935	6.576.507	-	28.909.502	
Liabilitas keuangan							Financial liabilities
Utang bank dan lembaga keuangan	-	2.644.392	1.401.332	2.029.095	150.013	6.224.832	Bank and financial institution borrowings
MTN dan Sukuk	-	2.008.500	890.000	692.000	300.000	3.890.500	MTN and Sukuk
Utang obligasi	-	2.996.136	2.734.470	1.836.165	1.846.718	9.413.489	Bond payables
Pinjaman Pemerintah RI	-	185.095	1.076.765	1.773.206	-	3.035.066	Borrowing from the Government of RI
Pinjaman lembaga kredit luar negeri	-	-	-	-	6.697	6.697	Borrowings from foreign credit institution
Utang kegiatan manajer investasi	-	4	-	-	-	4	Investment manager activities payables
Utang lain-lain	-	-	-	-	384.108	384.108	Other liabilities
Beban yang masih harus dibayar	-	-	415.692	-	-	415.692	Accrued expense
	-	7.834.127	6.518.259	6.330.466	2.687.536	23.370.388	
Total perbedaan jatuh tempo	4.467.862	9.073.071	(5.560.324)	246.041	(2.687.536)	5.539.114	Total maturity gap

i. Risiko Operasional

i. Operational Risk

Risiko operasional adalah risiko yang dihadapi oleh Perusahaan dalam menjalankan operasional Perusahaan yang disebabkan oleh tidak memadainya atau karena adanya kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya masalah eksternal dalam ketidaklayakan atau kegagalan dalam proses, manusia dan sistem atau dari kejadian eksternal.

Operational risk is the risk faced by the Company's in the operational runnings the Company caused by inadequate or internal process failure due to, human error, system failure or problem with the ineligibility or failure of external process, people and systems or from external events.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

i. Risiko Operasional (lanjutan)

Dalam mengelola risiko operasional, Perusahaan sangat berkepentingan dengan menciptakan lingkungan internal yang kondusif dan mendukung penerapan manajemen risiko. Lingkungan internal mempengaruhi rancangan dan pelaksanaan aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, dan aktivitas pemantauan. Oleh karena itu, Perusahaan secara aktif melakukan sosialisasi dan training terkait manajemen risiko untuk meningkatkan *risk awareness* dan kualitas kontrol dalam rangka mitigasi risiko operasional.

Perusahaan telah membuat kebijakan dan prosedur sebagai turunan dari kebijakan untuk seluruh aktivitas operasional di dalam Perusahaan dan memastikan adanya *dual control* pada setiap proses kegiatan. Kebijakan dan prosedur selalu dikaji ulang dan disempurnakan untuk memastikan kecukupan mekanisme kontrol dan perbaikan berkesinambungan.

Manajemen risiko operasional merupakan tanggung jawab seluruh jajaran karyawan dan manajemen setiap unit kerja Perusahaan. Penerapan manajemen risiko operasional harus melekat pada proses bisnis dan operasional Perusahaan.

Pengelolaan risiko operasional mencakup pengelolaan risiko hukum, kepatuhan, strategis dan reputasi.

Pengukuran parameter yang mempengaruhi eksposur risiko operasional dilakukan berdasarkan identifikasi risiko operasional dengan mengukur dampak dan kemungkinan pada risiko yang melekat. Pengukuran risiko operasional dilakukan berdasarkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif bersumber dari masukan dari unit kerja, sedangkan pendekatan kuantitatif diukur dari data historis risiko operasional.

42. RISK MANAGEMENT (continued)

i. Operational Risk (continued)

In managing operational risk, the Company is concerned with creating an internal environment that is conducive and supportive of risk management. Applications of internal environment affect the design and implementation of control activities, information and communication systems, and monitoring activities. Therefore, the Company actively socializing and training related to the risk management to improve risk awareness and control quality in order to mitigate operational risk.

The Company has made policy and procedures as an instance derivative of a policy for whole operational activities within the Company ensure dual control and in each process activity. Policies and procedures are always reviewed and enhanced to ensure control mechanisms adequacy end of continuous improvement.

Operational risk management is the responsibility of all employees and management of each unit of work in the Company. Operational risk management should be embedded in business processes and operational the Company.

Management of operational risk includes legal risk management, compliance, strategic and reputational risk.

Parameters measuring that affect the operational risk exposure is performed based on the identification of operational risks by measuring the impact and likelihood on the inherent risks. Operational risk measurement is based on qualitative and quantitative approaches. A qualitative approach derived from the input of the unit of work, while the quantitative approach is measured from historical data of operational risk.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

43. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing yang dimiliki Perusahaan adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31, 2021	
	Dolar AS/ US Dollar	Setara Rupiah/ Rp Equivalent
Aset Moneter		
Kas dan setara kas	13.962,86	199.236.088
Portofolio efek untuk diperdagangkan	573.749,12	8.186.829.087
Aset Moneter	587.711,98	8.386.065.175
Liabilitas Moneter		
Utang kepada Bank Pembangunan Asia	433.619,13	5.725.105.339
Liabilitas Moneter Bersih	154.092,85	2.660.959.836

Monetary Assets
Cash and cash equivalents
Portfolio of securities - trading

Monetary Assets

Monetary Liabilities
Borrowings to Bank Pembangunan Asia

Net Monetary Liabilities

	31 Desember/December 31, 2020	
	Dolar AS/ US Dollar	Setara Rupiah/ Rp Equivalent
Aset Moneter		
Kas dan setara kas	47.350,77	667.882.589
Liabilitas Moneter		
Utang kepada Bank Pembangunan Asia	474.771,92	6.696.662.821
Liabilitas Moneter Bersih	427.421,15	6.028.780.232

Monetary Assets
Cash and cash equivalents

Monetary Liabilities
Borrowings to Bank Pembangunan Asia

Net Monetary Liabilities

44. PROVISI DAN KONTINJENSI

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan memiliki kontinjensi sebagai berikut:

- a. Terdapat 89 kasus perkara pidana dengan debitur terdiri dari:
 - 67 kasus dalam tahap penyelidikan kepolisian.
 - 22 kasus dalam tahap penyidikan oleh pihak kepolisian
- b. Terdapat 105 kasus perkara perdata dengan debitur:
 - 2 kasus dalam proses Peninjauan Kembali;
 - 26 kasus dalam proses kasasi di Mahkamah Agung;
 - 14 kasus dalam proses banding di Pengadilan Tinggi;
 - 63 kasus dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri.

Perusahaan mengakui dampak atas kontinjensi terkait kasus-kasus yang dihadapi Perusahaan dengan membentuk cadangan kerugian operasional dan mengakui beban pengendalian risiko sebagai bagian dari beban usaha (Catatan 36) pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp36.728.188.149 dan Rp28.943.680.000.

44. PROVISION AND CONTINGENCIES

As of December 31, 2021, the Company has the following contingencies:

- a. There are 89 criminal cases with debtors;
 - 67 cases under examination by the police;
 - 22 cases under investigation by the police;
- b. There are 105 civil cases with the debtors:
 - 2 cases in the Judicial Review process;
 - 26 cases in the cassation process at the Supreme Court;
 - 14 cases on appeal at the High Court;
 - 63 cases on examination process at the District Court.

The Company recognized the impact of the contingencies relating to the cases faced by the Company by establishing an allowance for operating losses and recognizing the risk controlling expense as part of operating expenses (Note 36) for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp36,728,188,149 and Rp28,943,680,000, respectively.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

45. PERJANJIAN-PERJANJIAN

- a. Dengan berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 1999, Bank Indonesia tidak diperkenankan lagi memberikan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dalam rangka penyaluran kredit program ke bank pelaksana. Pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 487/KMK.017/1999 tanggal 13 Oktober 1999, telah menunjuk Perusahaan sebagai salah satu koordinator penyaluran program kredit.

Perusahaan dan Bank Indonesia pada tanggal 15 November 1999 telah menandatangani perjanjian pengalihan pengelolaan KLBI yang diberikan dalam rangka membiayai kredit program sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia No. 14 tanggal 15 November 1999 dibuat dihadapan Ismudjadi, S.H., pengganti dari Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta.

Pelaksanaan pengalihan pengelolaan KLBI dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- i. Bank Indonesia memberi wewenang kepada Perusahaan untuk menagih kepada bank pelaksana angsuran pokok pada saat jatuh tempo angsuran KLBI.
- ii. Perusahaan dapat memanfaatkan angsuran pokok sampai jatuh tempo KLBI, dengan kewenangan untuk mengatur secara berimbang terbatas pada Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA)-Umum; KKPA-Bagi Hasil; KKPA-Nelayan; KKPA-Unggas; KKPA-TKI; KKPA-PIR Trans; Kredit Modal Kerja (KMK)-BPR/BPRS; Kredit Pengusaha Kecil dan Mikro (KPKM)-BPR; KPKM-Bank Umum; Kredit Usaha Angkutan Umum Bus Perkotaan (KUAUBP); Kredit Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN); dan Kredit Perusahaan Inti Rakyat Transmigrasi (PIR-Trans).
- iii. Perusahaan berkewajiban melaporkan pemanfaatan angsuran pokok yang dikelola Perusahaan kepada Bank Indonesia yang bentuk dan periode laporannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

45. AGREEMENTS

- a. In line with the enactment of Law No. 23 Year 1999, Bank Indonesia no longer allowed to directly provide the Bank Indonesia Liquidity Credit (KLBI) in order to credit program distribution to executing banks. The Government through the Decree of Minister of Finance letter No. 487/KMK.017/1999 October 13, 1999, has been appointed the Company as one of the coordinator for distribution of the credit program.

The Company and Bank Indonesia on November 15, 1999 has signed a management transfer agreement KLBI given credit in order to finance the program as stated in the Deed of Transfer of Management of Bank Indonesia Liquidity Credit No. 14 dated November 15, 1999, an made in the presences of Ismudjadi, S.H., replacement of Mudofir Hadi, S.H., Notary in Jakarta.

Implementation of the transfer of KLBI done in the following way:

- i. Bank Indonesia authorize the Company to charge to the executing bank installments of principal at maturity installments KLBI.
- ii. The Company may utilize the principal until maturity KLBI, with the authority to set a balanced way limited to Primary Cooperatives Credit for Members (KKPA)-General; KKPA-Profit Sharing; KKPA-Fisherman; KKPA-Poultry; KKPA-TKI; KKPA-PIR Trans; Working Capital Loans (KMK)-BPR/BPRS; Small and Micro Credit (KPKM)-BPR; KPKM-Commercial Bank; Credit for Urban Public Transport Bus (KUAUBP); National Private Large Plantation Credit (PBSN); Credit and Transmigration Nucleus (PIR-Trans).
- iii. The Company is obliged to report the utilization of the Company's principal managed to Bank Indonesia in the form and the period of the report in accordance with the provisions stipulated by Bank Indonesia.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

45. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)

Sesuai Perjanjian Pengalihan Pengelolaan KLBI, Pasal 2 ayat 1, Bank Indonesia menyerahkan pengelolaan KLBI kepada Perusahaan yang meliputi:

- Saldo baki debit atau total KLBI yang telah ditarik bank pelaksana dan masih tercatat dalam rekening pinjaman bank pelaksana di Bank Indonesia per tanggal 31 Oktober 1999 sebesar Rp6.634.597.524.967.
- Saldo kelonggaran tarik atau selisih antara komitmen plafon dengan jumlah KLBI yang telah ditarik oleh bank pelaksana, tidak termasuk jumlah KLBI yang tidak dapat ditarik oleh bank yang bersangkutan karena telah melampaui batas waktu penarikan yang telah ditentukan per tanggal 31 Oktober 1999 sebesar Rp2.660.784.353.615.

- b. Berdasarkan Perjanjian Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Perusahaan dalam rangka Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil No. KP-018/DP3/2004 tanggal 14 Mei 2004 yang telah diubah berturut-turut dan terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Pinjaman No. KP-018/DP3/2004 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Perusahaan dalam rangka Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil No. AMA-67/KP-018/DSMI/2014 tanggal 29 Agustus 2014, Perusahaan dan Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani perjanjian pinjaman dalam rangka pendanaan kredit usaha mikro dan kecil. Pinjaman ini untuk diteruskan melalui Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP) dalam rangka pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK).
- c. Berdasarkan Perjanjian Penerusan Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Perusahaan No. SLA-1184/DP3/2005 tanggal 25 Januari 2005 yang diubah dengan Surat No. S-55/MK.5/2012 tanggal 4 Januari 2012, Pemerintah Republik Indonesia dan Perusahaan telah menandatangani perjanjian penerusan pinjaman atas dana pinjaman yang berasal dari *Asian Development Bank (ADB)*

45. AGREEMENTS (continued)

According to the Credit Liquidity of Bank Indonesia (KLBI) Management Transfer Agreement, Article 2, paragraph 1, Bank Indonesia submitted to the Company's management KLBI include:

- Outstanding balance of total KLBI which has been withdrawn by the executing banks and still recorded in the loan accounts of the executing banks at Bank Indonesia as of October 31, 1999 amounting to Rp6,634,597,524,967.
- The balance of unused loan facilities or the difference between the commitment limit the number KLBI been withdrawn by the executing bank, excluding amounts KLBI can not be withdrawn by the bank concerned because it has exceeded a predetermined withdrawal period as of October 31, 1999 amounting to Rp2,660,784,353,615.

- b. According to the Loan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Company in order to Financing Small and Micro Business Loan No. KP-018/DP3/2004 dated May 14, 2004 which has been amended in a row and the last addendum of this Loan Agreement No. KP-018/DP3/2004 between the Government of the Republic of Indonesia and the Company in the Context of Credit Financing Micro and Small No. AMA-67/KP-018/DSMI/2014 dated August 29, 2014, the Company and the Government of the Republic of Indonesia has signed a loan agreement in order to inancing micro and small business loans. The loan is for on-lent by a Financial Institution Executor (LKP) in order to finance Small and Micro Business Loan (KUMK).
- c. Based on the Subsidiary Loan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and The Company No. SLA-1184/DP3/2005 dated January 25, 2005, has amended by letter No. S-55/MK.5/2012 dated January 4, 2012, the Government of the Republic of Indonesia and the Company has entered into a loan agreement on loan from the Asian Development Bank (ADB) for on-lent by

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

45. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)

45. AGREEMENTS (continued)

untuk diteruspinjamkan melalui Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP) dalam rangka pendanaan penataan lingkungan dan pemukiman (*the Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project*). Pinjaman yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Perusahaan maksimal sebesar USD757.550,54 dengan angsuran pertama jatuh tempo pada tanggal 1 Juni 2010 dan berakhir pada tanggal 1 Desember 2028.

Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP) in order to finance environmental regulation and settlement (the Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project). Loans granted by the Government of the Republic of Indonesia to the Company a maximum of USD757,550.54 with the first installment due on June 1, 2010 and ended on December 1, 2028.

- d. PT PNM Investment Management ("PNM IM") sebagai pengelola investasi dana pihak ketiga, menerima pendapatan jasa pengelolaan sebesar 1% - 2% per tahun dari nilai aset bersih dana kelolaan. Sedangkan atas pengelolaan dana dalam bentuk pembiayaan mudharabah, PNM IM menerima pola bagi hasil yang disepakati bersama. Pengelolaan investasi ini berdasarkan perjanjian yang telah disepakati dan tidak ada risiko yang ditanggung oleh PNM IM atas pengelolaan dana tersebut.
- e. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 30 tanggal 9 Juni 2021, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) memberikan fasilitas kredit modal kerja dengan plafon maksimal sebesar Rp200.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 8,50% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 48 bulan dan akan berakhir pada tanggal 9 Juni 2025. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil.
- f. Berdasarkan Akta Perjanjian No. 2 tanggal 5 Agustus 2020 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menyediakan pinjaman modal kerja dengan total plafon Rp750.000.000.000 yang bersifat *revolving*, dengan jangka waktu fasilitas mulai dari tanggal 5 Agustus 2020 dan akan berakhir pada tanggal 7 Maret 2021. Perjanjian ini telah diperpanjang dengan surat perpanjangan kredit sampai dengan 7 Juni 2021. Suku bunga sebesar 10% per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan ULaMM dan Mekaar. Perusahaan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* maksimal 3%.

- d. *PT PNM Investment Management ("PNM IM") as the investment manager of third party funds, receive revenue management services by 1% - 2% per annum of the net asset value of funds under management. While the management of the funds in the form of Mudharabah financing, PNM IM receive profit-sharing arrangements agreed upon. Investment management is based on the agreement that has been agreed upon and there is no risk borne by PNM IM for managing the fund.*
- e. *Based on the Deed of Credit Agreement No. 30 dated June 9, 2021, the Indonesian Export Financing Agency (LPEI) provides a working capital credit facility with a maximum limit of Rp200,000,000,000 with an interest rate of 8.50% per year with a loan term of 48 months and will expire on June 9, 2025. The funds are for financing micro and small businesses.*
- f. *Based on the Deed of Agreement No. 2 dated August 5, 2020 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk provides a revolving working capital loan with a total credit limit of Rp750,000,000,000, with a facility period from August 5, 2020 and will mature on March 7, 2021. This Agreement has been extended with extension credit letter until June 7, 2021. The interest rate is 10% per annum. The funds are used for financing ULaMM and Mekaar. The Company must maintain a maximum Gearing Ratio of 10x and Non-Performing Loan arrears a maximum of 3%.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

45. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)

45. AGREEMENTS (continued)

- g. Berdasarkan akta Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 10 Mei 2021 antara PT Bank DKI dengan perusahaan, perusahaan dengan plafon Rp500.000.000.000, jangka waktu 36 bulan serta tingkat suku bunga *fixed* sebesar 9,25% per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM dan Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan gross* maksimal 5%.

- g. *Based on the Deed of Credit Agreement No. 11 dated May 10, 2021 between PT Bank DKI and the company, the company with a maximum limit a credit of Rp500,000,000,000, a period of 36 months and a fixed interest rate of 9.25% per year. The funds are for financing micro and small business financing through ULaMM and the Company is required to maintain a maximum gearing ratio of 10x and a maximum gross Non-Performing Loan of 5%.*

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 44 tanggal 19 November 2020 antara PT Bank DKI dengan Perusahaan, pinjaman dengan plafon Rp300.000.000.000, jangka waktu 42 bulan serta suku bunga *fixed* sebesar 9,50% per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM. Perusahaan wajib menjaga *Debt Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan *NPL gross* maksimal 5%.

Based on the Letter of Credit Agreement No. 44 dated November 19, 2020 between PT Bank DKI and the Company, the loan with a maximum limit a credit of Rp300,000,000,000, a period of 42 months and a fixed interest rate of 9.50% per annum. The funds are for financing micro and small businesses through ULaMM. The company must maintain a maximum 10x Debt Equity Ratio (DER) and a maximum NPL of 5%.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 34 tanggal 29 Oktober 2019 antara PT Bank DKI dengan Perusahaan, pinjaman dengan plafon Rp300.000.000.000, jangka waktu 42 bulan serta suku bunga *fixed* sebesar 10,00% per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM. Perusahaan wajib menjaga *Debt Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan *NPL gross* maksimal 5%.

Based on the Letter of Credit Agreement No. 34 dated October 29, 2019 between PT Bank DKI and the Company, the loan with a maximum limit a credit of Rp300,000,000,000, a period of 42 months and a fixed interest rate of 10.00% per annum. The funds are for financing micro and small businesses through ULaMM. The company must maintain a maximum 10x Debt Equity Ratio (DER) and a maximum NPL of 5%.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 04 tanggal 5 September 2018 antara PT Bank DKI dengan Perusahaan, pinjaman dengan plafon Rp200.000.000.000, jangka waktu 36 bulan serta suku bunga *fixed* sebesar 9,00% per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM. Perusahaan wajib menjaga *Debt Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan *NPL gross* maksimal 5%.

Based on the Letter of Credit Agreement No.04 dated September 5, 2018 between PT Bank DKI and the Company, the loan with a maximum limit a credit of Rp200,000,000,000, a period of 36 months and a fixed interest rate of 9.00% per annum. The funds are for financing micro and small businesses through ULaMM. The company must maintain a maximum 10x Debt Equity Ratio (DER) and a maximum NPL of 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 75 tanggal 13 Juni 2017 antara PT Bank DKI dengan Perusahaan, pinjaman dengan plafon Rp100.000.000.000, jangka waktu 36 bulan serta suku bunga *fixed* sebesar 9,00% per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM. Perusahaan wajib menjaga *Debt Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan *NPL gross* maksimal 5%.

Based on the credit agreement No. 75 dated June 13, 2017, between PT Bank DKI and the Company, loans with a total credit limit of Rp100,000,000,000, a period of 36 months and a fixed interest rate of 9.00% per year. The fund for the financing of micro and small enterprises through ULaMM. The Company shall maintain the Debt Equity Ratio (DER) maximum of 10x and a maximum gross NPL of 5%.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

45. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)

45. AGREEMENTS (continued)

- h. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 9 tanggal 18 Maret 2021, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Jakarta memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp150.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 9% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada bulan Maret 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

- h. Based on the Working Capital Credit Agreement Deed No. 9 dated March 18, 2021, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan and Sulawesi Barat Jakarta Branch provides Working Capital Credit facility to the Company amounting to Rp150,000,000,000 with an interest rate of 9% per annum with a loan term of 12 months from the signing of the credit agreement and will mature on March 2022. The loan is intended as additional working capital for credit distribution for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 42 tanggal 19 November 2020 antara PT Bank DKI dengan Perusahaan, pinjaman dengan plafon Rp300.000.000.000, jangka waktu 42 bulan serta suku bunga fixed sebesar 9,50% per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar Syariah dan ULaMM Syariah. Perusahaan wajib menjaga Debt Equity Ratio (DER) maksimal 10x dan NPL gross maksimal 5%.

Based on the Letter of Credit Agreement No. 42 dated November 19, 2020 between PT Bank DKI and the Company, the loan with a maximum limit a credit of Rp300,000,000,000, a period of 42 months and a fixed interest rate of 9.50% per annum. The funds are for financing micro and small businesses through Mekaar Syariah and ULaMM Syariah. The company must maintain a maximum 10x Debt Equity Ratio (DER) and a maximum NPL of 5%.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 31 tanggal 30 Oktober 2019, antara PT BPD DKI Syariah dengan Perusahaan, pinjaman dengan total plafon sebesar Rp300.000.000.000 dengan jangka waktu 42 bulan. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM. Perusahaan wajib menjaga Debt Equity Ratio (DER) maksimal 10x dan NPL gross maksimal 5%.

Based on the Letter of Credit Agreement No. 31 dated October 30, 2019, between PT BPD DKI Syariah and the Company, a loan with a maximum limit a credit of Rp300,000,000,000 with a period of 42 months. The funds are for financing micro and small businesses through ULaMM. The company must maintain a maximum 10x Debt Equity Ratio (DER) and a maximum NPL of 5%.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 10 tanggal tanggal 5 September 2018, antara PT BPD DKI Syariah dengan Perusahaan, pinjaman dengan total plafon sebesar Rp100.000.000.000 berdasar perjanjian Mudharabah dengan jangka waktu 36 bulan dengan bunga 9,00% per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM Syariah. Perusahaan wajib menjaga Debt Equity Ratio (DER) maksimal 10x dan NPL gross maksimal 5%.

Based on the Letter of Credit Agreement No. 10 dated September 5, 2018, between PT BPD DKI Syariah and the Company, the loan with a maximum limit a credit of Rp100,000,000,000 is based on the Mudharabah agreement with a period of 36 months with an interest of 9.00% per annum. The fund is for financing micro and small businesses through ULaMM Syariah. The company must maintain a maximum 10x Debt Equity Ratio (DER) and a maximum NPL of 5%.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 7 tanggal tanggal 5 September 2018, antara PT BPD DKI Syariah dengan Perusahaan, pinjaman dengan total plafon sebesar Rp100.000.000.000 berdasar perjanjian Mudharabah dengan jangka waktu 12 bulan dengan bunga 9,00% per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar Syariah. Perusahaan wajib menjaga Debt Equity Ratio (DER) maksimal 10x dan NPL gross maksimal 5%.

Based on the Letter of Credit Agreement No. 7 dated September 5, 2018, between PT BPD DKI Syariah and the Company, a loan with a maximum limit a credit of Rp100,000,000,000 is based on the Mudharabah agreement with a period of 12 months with an interest of 9.00% per annum. The fund is for financing micro and small businesses through Mekaar Syariah. The company must maintain a maximum 10x Debt Equity Ratio (DER) and a maximum NPL of 5%.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

45. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)

45. AGREEMENTS (continued)

- i. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 12 tanggal 18 Maret 2021, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Jakarta – melalui Unit Usaha Syariah memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pembiayaan Syariah kepada Perusahaan sebesar Rp50.000.000.000 dengan nisbah bagi hasil untuk PT Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat 55,39% dan Perusahaan 44,61%. Jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak fasilitas digunakan dan akan berakhir pada bulan Maret 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga *Gearing Ratio* 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

- i. *Based on the Working Capital Credit Agreement Deed No. 12 dated March 18, 2021, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan and Sulawesi Barat Jakarta Branch – through Sharia Business Unit provides Sharia Financing Working Capital Credit facility to the Company amounting to Rp50,000,000,000 with Profit sharing for PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan and Sulawesi Barat 55.39% and Company 44.61%. Loan term of 12 months from the drawdown of facility and will mature on March 2022. The loan is intended as additional working capital for credit distribution for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The Company must maintain Gearing Ratio of 10x and a maximum Non-Performing Loan arrears of 5%.*

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 9 tanggal 18 Maret 2021, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Jakarta memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp150.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 9% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada bulan Maret 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Based on the Working Capital Credit Agreement Deed No. 9 dated March 18, 2021, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan and Sulawesi Barat Jakarta Branch provides Working Capital Credit facility to the Company amounting to Rp150,000,000,000 with an interest rate of 9% per annum with a loan term of 12 months from the signing of the credit agreement and will mature on March 2022. The loan is intended as additional working capital for credit distribution for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 4 tanggal 11 Maret 2020, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Jakarta memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah dilunasi pada tanggal 12 Maret 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No.4 dated March 11, 2020, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Jakarta Branch provides Working Capital Credit facilities to the Company in the amount of Rp100,000,000,000 with an interest rate of 10% per annum with a loan period of 12 months after the credit agreement is signed and has been fully paid on March 12, 2021. The loan is intended as additional working capital for Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs).

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 24 tanggal 23 November 2018, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Jakarta memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp200.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah dilunasi pada 22 November 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Based on the Agreement Deed of Working Capital Credit No. 24 dated November 23, 2018, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Jakarta Branch provides Working Capital Credit facilities to the Company in the amount of Rp200,000,000,000 with an interest rate of 10% per annum loan period of 36 months from the signing of the credit agreement and mature on November 22, 2021. The loan is intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

45. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)

45. AGREEMENTS (continued)

j. Berdasarkan Akta perjanjian kredit No. 1658/PPK/SLK/2016 tanggal 28 Juni 2016, PT Bank Central Asia Tbk memberikan pinjaman rekening koran dengan plafon maksimal sebesar Rp50.000.000.000 dengan tingkat suku bunga 12% per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM. Perusahaan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* diatas 90 hari maksimal 5%. Pinjaman ini mengalami beberapa kali perpanjangan untuk jangka waktu kredit, yang terakhir dengan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu (SPPJ) No. 3453 tanggal 6 November 2020 dengan ketentuan suku bunga 11,75% per tahun dan telah dilunasi pada 9 November 2021.

j. Based on the Deed of credit agreement No. 1658/PPK/SLK/2016 dated June 28, 2016, PT Bank Central Asia Tbk provides a current account loan with a credit limit of a maximum of Rp50,000,000,000 with an interest rate of 12% per annum. The funds are for financing micro and small businesses through ULaMM. The Company must maintain a maximum *Gearing Ratio* of 10x and *Non-Performing Loan* arrears above 90 days a maximum of 5%. This loan was extended several times for credit term, the latest by "Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu (SPPJ)" No. 3453 dated November 6, 2020 with the provision of an interest rate of 11.75% per annum and has been fully paid on November 9, 2021.

k. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 111 tanggal 28 Desember 2018, perihal penandatanganan fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berupa Kredit Modal Kerja sebesar Rp300.000.000.000 untuk tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jangka waktu fasilitas kredit 48 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada tanggal 28 Desember 2022. Suku bunga sebesar 9,50% per tahun dengan *upfront fee* sebesar 0,25% dari plafon kredit. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Gearing Ratio* maksimal 10x, *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% selama tiga bulan berturut-turut.

k. Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 111 dated December 28, 2018, regarding the signing of a credit facility from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk in the form of Working Capital Credit of Rp300,000,000,000 for additional working capital for Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) lending. The credit facility period is 48 months after the credit agreement is signed and will mature on December 28, 2022. The interest rate is 9.50% per annum with an *upfront fee* of 0.25% of the credit limit. The company is required to maintain maximum *Gearing Ratio* of 10x, maximum *Debt to Equity Ratio (DER)* of 10x and *Non-Performing Loan* quality of all product not more than 5% for three consecutive months.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 37 tanggal 30 November 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berupa Kredit Modal Kerja sebesar Rp500.000.000.000 untuk tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jangka waktu fasilitas kredit 48 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada tanggal 30 November 2022. Suku bunga sebesar 9,50% per tahun dengan *upfront fee* sebesar 0,25% dari plafon kredit. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Gearing Ratio* maksimal 10x, *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% selama tiga bulan berturut-turut.

Based on the Agreement on Working Capital Loan No. 37 dated November 30, 2018, the Company obtained a credit facility from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk in the form of Working Capital Credit of Rp500,000,000,000 for additional working capital for the distribution of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) loans. The credit facility period is 48 months after the credit agreement is signed and will mature on November 30, 2022. The interest rate is 9.50% per annum with an *upfront fee* of 0.25% of the credit limit. The Company is required to maintain maximum *Gearing Ratio* of 10x, maximum *Debt to Equity Ratio (DER)* of 10x and *Non-Performing Loan* quality of all product not more than 5% for three consecutive months.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

45. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 46 tanggal 29 Juli 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berupa Kredit Modal Kerja sebesar Rp500.000.000.000 untuk tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jangka waktu fasilitas kredit 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah diperpanjang dengan akta No. 10 tanggal 5 September 2017 dan telah dilunasi pada tanggal 29 Juli 2021. Tingkat suku bunga sebesar 10,00% per tahun dengan *upfront fee* sebesar 0,25% dari plafon kredit. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% selama tiga bulan berturut-turut.

Berdasarkan Akta "Addendum I - Perjanjian Kredit Modal Kerja PT PNM (Persero)" No.10, Perusahaan mengajukan permohonan fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berupa Kredit Modal Kerja sebesar Rp500.000.000.000 untuk tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jangka waktu fasilitas kredit 29 Juli 2017 sampai dengan 29 Juli 2021 (48 bulan) dan jangka waktu penarikan 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit. Suku bunga sebesar 10,00% per tahun dengan *upfront fee* sebesar 0,025% dari plafon kredit. Perusahaan harus menjaga kondisi pembiayaan agar tingkat *Non-Performing Loan (NPL)* atas pinjaman yang disalurkan tidak lebih dari 5% selama tiga bulan berturut-turut.

- i. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 03 tanggal 24 Januari 2017, Perusahaan mengajukan permohonan fasilitas kredit dari PT CIMB Niaga Tbk berupa Pinjaman Transaksi Khusus (PTK-7) on *Liquidation Basis* sebesar Rp50.000.000.000. Tujuan penggunaan kredit adalah untuk Modal Kerja yang akan disalurkan kepada *end-user* PNM melalui unit ULaMM. Jangka waktu fasilitas kredit adalah maksimal 48 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit. Suku bunga sebesar 10,00% per tahun dengan biaya provisi sebesar 0,5% dari plafon kredit. Jaminan yang diberikan berupa fidusia (*notariil*) atas seluruh tagihan Perusahaan kepada *end-user* minimal sebesar 100%. Perusahaan wajib menjaga kondisi pembiayaan agar tingkat *Non-Performing Loan (NPL)* Nett atas pinjaman yang disalurkan tidak lebih dari 4,75%.

45. AGREEMENTS (continued)

Based on the Deed of Working Capital Loan Agreement No. 46 dated July 29, 2016, the Company obtained a credit facility from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk in the form of Working Capital Credit amounting to Rp500,000,000,000 for additional working capital for Micro Small and Medium Enterprises (MSME). Loan facility period of 12 months from the signing of credit agreement and has been extended with deed No. 10 dated September 5, 2017 and mature on July 29, 2021. Interest rate of 10.00% per annum with an upfront fee of 0.25% of the credit limit. The Company is required to maintain maximum Debt to Equity Ratio (DER) of 10x and Non-Performing Loan quality of all product not more than 5% for three consecutive months.

Based on the Deed "Addendum I - Working Capital Loan Agreement of PT PNM (Persero)" No.10, the Company applied for a credit facility from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk in the form of Working Capital Credit amounting to Rp500,000,000,000 for additional working capital loan for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). Term of credit facility July 29, 2017 until July 29, 2021 (48 months) and withdrawal period of 12 months from the signing of credit agreement. Interest rate of 10.00% per annum with an upfront fee of 0.025% of the credit limit. The Company must maintain the financing condition so that the Non-Performing Loan (NPL) rate on the loan is not more than 5% for three consecutive months.

- i. Based on the Deed of Credit Agreement No. 03 dated January 24, 2017, the Company applied for a credit facility from PT CIMB Niaga Tbk in the form of Special Transaction Loan (PTK-7) on Liquidation Basis of Rp50,000,000,000. The purpose of credit use is for Working Capital to be channeled to PNM end-user through ULaMM unit. The term of the credit facility is a maximum of 48 months from the signing of the credit agreement. Interest rate of 10.00% per year with a provision fee of 0.5% of the credit limit. The collateral provided in the form of fiduciary (*notarial*) on all of the Company's bills to the end-user is at least 100%. The Company is required to maintain the financing condition for Nett Non-Performing Loan (NPL) level for the loan disbursed to not more than 4.75%.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

45. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)

45. AGREEMENTS (continued)

- m. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 37 tanggal 23 Februari 2021, PT Bank Mandiri Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp1.000.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 8,50% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 22 Februari 2023. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10x dan kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

- m. *Based on the Working Capital Credit Agreement Deed No. 37 dated February 23, 2021, PT Bank Mandiri Tbk provided a Working Capital Credit facility to the Company amounting to Rp1,000,000,000,000 with an interest rate of 8.50% fixed per annum with a loan term of 24 months from the signing of the credit agreement and will mature on February 22, 2023. The loan is intended as additional working capital for credit distribution for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The company is obliged to maintain Gearing Ratio maximum 10x and the quality of the Non-Performing Loan as a whole product not more than 5%.*

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 89 tanggal 15 Mei 2019, PT Bank Mandiri Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp1.500.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 8,50% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman maksimal 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah dilunasi pada tanggal 14 Mei 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Gearing Ratio* maksimal 8x dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% selama tiga bulan berturut-turut.

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 89 dated May 15, 2019, PT Bank Mandiri Tbk provided a Working Capital Credit Facility to the Company in the amount of Rp1,500,000,000,000 with an interest rate of 8.50% fixed per annum with a maximum loan term of 24 month since the credit agreement was signed and mature on May 14, 2021. The loan is intended as additional working capital for Micro, Small and Medium Enterprises loans (MSMEs). The Company is required to maintain maximum Gearing Ratio of 8x and overall Non-Performing Loan quality of the product no more than 5% for three consecutive months.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 36 tanggal 20 Agustus 2018, PT Bank Mandiri Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp800.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 8,35% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman maksimal 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah dilunasi pada tanggal 23 April 2020. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *gearing ratio* maksimal 8x dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% selama tiga bulan berturut-turut

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 36 dated August 20, 2018, PT Bank Mandiri Tbk provided a Working Capital Credit Facility to the Company in the amount of Rp800,000,000,000 with an interest rate of 8.35% fixed per annum with a maximum loan term of 24 month since the credit agreement was signed and has been fully paid on April 23, 2020. The loan is intended as additional working capital for Micro, Small and Medium Enterprises loans (MSMEs). The Company is required to maintain maximum gearing ratio of 8x and overall Non-Performing Loan quality of the product no more than 5% for three consecutive months.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

45. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 51 tanggal 31 Agustus 2017, PT Bank Mandiri Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp300.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 9,00% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman maksimal 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan sudah dilunasi pada 30 Agustus 2019. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *gearing ratio* maksimal 6x dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% selama tiga bulan berturut-turut.

- n. Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No. 30 tanggal 20 April 2021, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman/Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp1.500.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana dan akan berakhir di bulan April 2024. Perusahaan wajib menyalurkan Pinjaman/ Pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari outstanding pinjaman.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No. 32 tanggal 20 April 2021, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman/Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp1.000.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana dan akan berakhir di bulan April 2024. Perusahaan wajib menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan khusus untuk Program Mekaar Syariah dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari outstanding pinjaman.

45. AGREEMENTS (continued)

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 51 dated August 31, 2017, PT Bank Mandiri Tbk provided a Working Capital Credit facility to the Company amounting to Rp300,000,000,000 with an interest rate of 9.00% fixed per annum with a maximum loan period of 24 the month since the credit agreement was signed and has been fully paid on August 30, 2019. The loan is intended as an additional working capital for the distribution of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) loans. The Company is required to maintain maximum gearing ratio of 6x and overall Non-Performing Loan quality of the product no more than 5% for three consecutive months.

- n. *Based on the Deed of Loan/Financing Agreement No. 30 dated April 20, 2021, the Government Investment Center provides a Loan/Financing facility to the Company in the amount of Rp1,500,000,000,000 with an interest rate of 4% effective per annum with a loan term of 36 months without a grace period from the date of disbursement. funds and will expire in April 2024. The Company is required to disburse special Loans/Financing for the Mekaar Program and must submit a List of Receivables as Fiduciary Guarantees every 6 months with a minimum value equal to 100% of the outstanding loan.*

Based on the Deed of Loan/Financing Agreement No. 32 dated April 20, 2021, the Government Investment Center provides a Loan/Financing facility to the Company in the amount of Rp1,000,000,000,000 with an interest rate of 4% effective per annum with a loan term of 36 months without a grace period from the date of disbursement. funds and will expire in April 2024. The Company is required to disburse special Loans/Financing for the Syariah Mekaar Program and must submit a List of Receivables as Fiduciary Guarantees every 6 months with a minimum value equal to 100% of the outstanding loan.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

45. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No. 15 tanggal 14 Agustus 2020, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman/Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp1.147.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana. Perusahaan wajib menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan khusus untuk Program Mekaar Syariah dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari outstanding pinjaman.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No. 2 tanggal 4 November 2019, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman/pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp2.350.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana. Perusahaan wajib menyalurkan pinjaman/pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari outstanding pinjaman.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No. 61 tanggal 31 Oktober 2018, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman/Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp750.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana. Perusahaan wajib menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari outstanding pinjaman.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No. 58 tanggal 28 Desember 2017, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman/Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana. Perusahaan wajib menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari outstanding pinjaman.

45. AGREEMENTS (continued)

Based on the Deed of Loan/Financing Agreement No. 15 dated August 14, 2020, the Government Investment Center provides a Loan/Financing facility to the Company amounting to Rp1,147,000,000,000 with an interest rate of 4% effective per annum with a loan term of 36 months without grace period from the date of disbursement. fund. The Company is obliged to channel Loans/Financing specifically for the Sharia Mekaar Program and must submit a List of Accounts Receivable which is a Fiduciary Guarantee every 6 months with a minimum value or equal to 100% of the outstanding loan.

Based on the Deed of Loan/Financing Agreement No. 2 dated November 4, 2019, the Government Investment Center provides loan/financing facilities to the Company amounting to Rp2,350,000,000,000 with an effective interest rate of 4% per annum with a loan period of 36 months without a grace period since the disbursement date fund. The Company must distribute loans/special financing for the Mekaar Program and must submit the List of Receivables that become Fiduciary Collateral every 6 months with a minimum value or equal to 100% of outstanding loans.

Based on the Deed of Loan/Financing Agreement No. 61 dated October 31, 2018, the Government Investment Center provides a Loan /Financing facility to the Company in the amount of Rp750,000,000,000 with an interest rate of 4% effective per year with a loan period of 36 months without grace period from the date of disbursement fund. The company is obliged to channel special Loans/Financing for the Mekaar Program and must submit a List of Receivables which become a Fiduciary Guarantee every 6 months with a value of at least or equal to 100% of the outstanding loan.

Based on the Deed of Loan Agreement/Financing No. 58 dated December 28, 2017, the Indonesia Investment Agency provides a loan/financing facility to the Company amounting to Rp100,000,000,000 with an effective interest rate of 4% per annum with a loan term of 36 months without grace period from the date of disbursement fund. The Company is required to disburse Loans/Financing specifically for Mekaar Program and is obliged to submit List of Receivables that become Fiduciary Guarantee every 6 months with minimum or equal to 100% of outstanding loan.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

45. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No. 47 tanggal 30 November 2017, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman/Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana. Perusahaan wajib menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari outstanding pinjaman.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan No. 2 tanggal 4 Agustus 2017, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman/Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana. Perusahaan wajib menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari outstanding pinjaman.

- o. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 9 tanggal 6 September 2019, PT Bank National Nobu Tbk memberikan fasilitas Kredit kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 9,50% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman maksimal 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 6 September 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 51 tanggal 22 April 2019, PT Bank National Nobu Tbk memberikan fasilitas Kredit *Money Market Line (MLM)* kepada Perusahaan sebesar Rp50.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10,75% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman maksimal 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah diperpanjang dengan akta No. 26 tanggal 22 April 2020 dan berakhir pada 22 April 2021. Pada tahun 2021, fasilitas ini telah diperpanjang dan akan jatuh tempo pada 22 April 2022. Perusahaan belum melakukan penarikan atas

45. AGREEMENTS (continued)

Based on the Deed of Loan Agreement/Financing No. 47 dated November 30, 2017, the Indonesia Investment Agency provides a loan/financing facility to the Company amounting to Rp100,000,000,000 with an effective interest rate of 4% per annum with a loan term of 36 months without grace period from the date of disbursement fund. The Company is required to disburse Loans/Financing specifically for Mekaar Program and is obliged to submit List of Receivables that become Fiduciary Guarantee every 6 months with minimum or equal to 100% of outstanding loan.

Based on the Deed of Loan Agreement/Financing No. 2 dated August 4, 2017, the Indonesia Investment Agency provides a loan/financing facility to the Company amounting to Rp100,000,000,000 with an effective interest rate of 4% per annum with a loan term of 36 months without grace period from the date of disbursement fund. The Company is required to disburse Loans/Financing specifically for Mekaar Program and is obliged to submit List of Receivables that become Fiduciary Guarantee every 6 months with minimum or equal to 100% of outstanding loan.

- o. *Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 9 dated September 6, 2019, PT Bank National Nobu Tbk provides a Credit Facility to the Company of Rp100,000,000,000 with an interest rate of 9.50% fixed per annum with a maximum loan period of 36 months after the credit agreement is signed and will mature on September 6, 2022. The loan is intended as additional working capital for Micro, Small and Medium Enterprises loans (MSMEs). The company is obliged to maintain the overall Non-Performing Loan quality of the product no more than 5%.*

Based on the Agreement Deed of Working Capital Loan No. 51 dated April 22, 2019, PT Bank National Nobu Tbk provides a Money Market line Credit facility of Rp50,000,000,000 with an interest rate of 10.75% fixed per annum with a maximum loan term of 12 months from credit agreement signed and has been extended with deed No. 26 dated April 22, 2020 will mature on April 22, 2021. In 2021, this facility has been extended and will mature on April 22, 2022. The Company has not made any drawdowns on this facility. The loan is intended as additional working capital for lending to

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

45. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)

fasilitas ini. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga *Gearing Ratio* maksimal 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* diatas 90 hari maksimal 5%.

- p. Berdasarkan akta perjanjian Kredit Modal Kerja No. 126 tanggal 19 November 2019, PT Bank KEB Hana Indonesia memberikan tambahan fasilitas kredit modal kerja kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah dilunasi pada tanggal 20 November 2020. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 40 tanggal 28 Juni 2018, PT KEB Hana Bank memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp200.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 9,50% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

- q. Berdasarkan akta perjanjian kredit No. 5 tanggal 15 April 2021, PT Bank Permata Tbk memberikan fasilitas kredit modal kerja dengan plafond maksimal sebesar Rp500.000.000.000 dengan bagi hasil sebesar 8,75% per tahun dan akan berakhir pada bulan April 2022. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM Syariah. Perusahaan wajib menjaga *current ratio* minimal 1,2 x dan *gearing ratio* maksimal 10x serta menjaga NPL maksimal 5%.

Berdasarkan akta perjanjian kredit No. 10 tanggal 15 Agustus 2019, PT Bank Permata Tbk memberikan fasilitas Musyarakah Mutanaqisah - MMQ I dengan plafon maksimal sebesar Rp150.000.000.000 dengan bagi hasil sebesar 10% per tahun dengan jangka waktu 18 bulan dan telah dilunasi pada tanggal 21 September 2020. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha

45. AGREEMENTS (continued)

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The Company must maintain Gearing Ratio of 10x and a maximum Non-Performing Loan arrears of 5%.

- p. *Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 126 dated November 19, 2019, PT Bank KEB Hana Indonesia granted the working capital credit facility to the Company amounting to Rp100,000,000,000 with an interest rate of 10% fixed per annum with a loan term of 12 months from the signing of the credit agreement and has been fully paid on November 20, 2020. The loan is intended as additional working capital for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The Company is required to maintain the quality of Non-Performing Loan of the whole product of not more than 5%.*

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 40 dated June 28, 2018, PT KEB Hana Bank granted the Working Capital Credit facility to the Company amounting to Rp200,000,000,000 with an interest rate of 9.50% fixed per annum with a loan term of 36 months from the signing of the credit agreement. The loan is intended as additional working capital for Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs). The Company is required to maintain the quality of Non-Performing Loan of the whole product of not more than 5%.

- q. *Based on the credit agreement deed No. 5 dated April 15, 2021, PT Bank Permata Tbk provides a working capital credit facility with a maximum limit of Rp500,000,000,000 with a profit sharing of 8.75% per annum and will expire in April 2022. The funds are for financing micro and small businesses through Mekaar and ULaMM Syariah. The Company is required to maintain a minimum current ratio of 1.2 x and a maximum gearing ratio of 10x and maintain a maximum NPL of 5%.*

Based on the deed of credit agreement No. 10 dated August 15, 2019, PT Bank Permata Tbk provides Musyarakah Mutanaqisah - MMQ I Facilities with a maximum credit limit amount of Rp150,000,000,000 with profit sharing 10% per annum with a term loan of 18 months and has been fully paid on September 21, 2020. The funds are for financing micro and small

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

45. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)

mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM Syariah. Perusahaan wajib menjaga Debt to Equity Ratio (DER) maksimal 10x, gearing ratio maksimal 10x dan tunggakan Non-Performing Loan di atas 90 hari maksimal 5%.

Berdasarkan akta perjanjian kredit No. 22 tanggal 27 Juli 2018, PT Bank Permata Tbk memberikan pinjaman rekening koran dengan plafon maksimal sebesar Rp50.000.000.000 dengan tingkat suku bunga 9,75% per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM. Pinjaman ini mengalami perpanjangan untuk jangka waktu kredit, dengan Surat Penawaran Fasilitas Perbankan No. 343/BP/LOO/CRC-JKT/WB/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 dan telah dilunasi pada 27 Juli 2021. Perusahaan wajib menjaga gearing ratio maksimal 10x dan tunggakan Non-Performing Loan di atas 90 hari maksimal 5%.

- r. Berdasarkan Akta Perjanjian Mudharabah Muqayaddah No. 87 tanggal 30 Juni 2021, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - melalui Unit Syariahnya memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp500.000.000.000. Nisbah bagi hasil untuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) 18,50% dan Perusahaan 81,50% setara IRR 9,00% per tahun. Jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani akad. Pinjaman tersebut diperuntukkan untuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya Mekaar syariah. Perusahaan wajib menjaga kualitas *gearing ratio* maksimal 10x, *Current ratio* diatas 120%, *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 9 tanggal 12 Maret 2021, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp500.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 8,75% per tahun. Jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 12 Maret 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khusus Mekaar.

45. AGREEMENTS (continued)

businesses through Mekaar dan ULaMM Syariah. The Company must maintain a maximum Debt to Equity Ratio (DER) of 10x, gearing ratio of 10x and Non-Performing Loan arrears above 90 days a maximum of 5%.

Based on the deed of credit agreement No. 22 dated July 27, 2018, PT Bank Permata Tbk provides a current account loan with a credit limit of a maximum of Rp50,000,000,000 interest rate 9.75% per annum. The funds are for financing micro and small businesses through ULaMM. This loan was extended for credit term, with "Surat Penawaran Fasilitas Perbankan" No. 343/BP/LOO/CRC-JKT/WB/X/2020 dated October 1, 2020 and mature on July 27, 2021. The Company must maintain a maximum gearing ratio of 10x and Non-Performing Loan arrears above 90 days a maximum of 5%.

- r. *Based on the Deed of Mudharabah Muqayaddah Agreement No. 87 dated June 30, 2021, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - through its Sharia Unit provided a Working Capital facility to the Company in the amount of Rp500,000,000,000. The profit sharing ratio for PT Bank Tabungan Negara (Persero) is 18.50% and the Company is 81.50%, equivalent to an IRR of 9.00% per annum. The loan period is 36 months from the signing of the contract. The loan is intended for financing based on sharia principles to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), especially Mekaar sharia. The Company are required to maintain a maximum gearing ratio of 10x, Current ratio above 120%, Debt to Equity Ratio (DER) a maximum of 10x and Non-Performing Loan for the entire product not more than 5%.*

Based on the Working Capital Credit Agreement Deed No. 9 dated March 12, 2021, PT Bank Tabungan Negara (Persero) provided a Working Capital Credit facility to the Company amounting to Rp500,000,000,000 with an interest rate of 8.75% per annum with a loan term of 12 months from the signing of the credit agreement and will mature on March 12, 2022. The loan is intended as additional working capital for credit distribution for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) for Mekaar.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

45. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 021/PK-SWAD/JKH.UT/BCSU/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp500.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 0,30% per tahun. Jangka waktu pinjaman 30 hari sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah dilunasi pada 30 Januari 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 37 tanggal 20 Oktober 2020, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp750.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 9,20% per tahun. Jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada bulan Oktober 2023. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *gearing ratio* maksimal 10x, *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* produk Mekaar tidak lebih dari 5%.

Berdasarkan akta perjanjian Kredit Modal Kerja No. 1 tanggal 13 September 2018, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp500.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 8,75% per tahun. Jangka waktu pinjaman 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah diperpanjang dengan akta No. 5 tanggal 13 September 2020 yang akan berakhir pada bulan September 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Debt Services Coverage Ratio* diatas 100% dan *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 41 tanggal 19 Desember 2018, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp250.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 9,50% per tahun. Jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah dilunasi pada bulan Desember 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Debt Services Coverage Ratio* diatas 100% dan *gearing ratio* maksimal 10x.

45. AGREEMENTS (continued)

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 021/PK-SWAD/JKH.UT/BCSU/XII/2020 dated December 30, 2020, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk provides Working Capital Credit facilities to the Company amounting to Rp500,000,000,000 with an interest rate of 0.30% per annum. Loan period of 30 days from the signing of the credit agreement and has been fully paid on January 30, 2021. The loan is intended as an additional working capital for the distribution of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) loans.

*Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 37 dated October 20, 2020, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk provides Working Capital Credit facilities to the Company amounting to Rp750,000,000,000 with an interest rate of 9.20% per year. Loan period of 36 months from the signing of the credit agreement and will mature on October 2023. The loan is intended as an additional working capital for the distribution of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) loans. The Company is required to maintain maximum *gearing ratio* of 10x, maximum *Debt to Equity Ratio (DER)* of 10x and *Non-Performing Loan* quality of the Mekaar product not more than 5%.*

*Based on the deed of Working Capital Credit Agreement No. 1 dated September 13, 2018, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk provides Working Capital Credit facilities to the Company amounting to Rp500,000,000,000 with an interest rate of 8.75% per annum. Loan period of 24 months from the signing of the credit agreement and has been extended with deed No. 5 dated September 13, 2020 will mature on September 2022. The loan is intended as an additional working capital for the distribution of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) loans. The Company is required to maintain the overall *Debt Services Coverage Ratio* above 100% and maximum *Debt to Equity Ratio (DER)* of 10x.*

*Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 41 dated December 19, 2018, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk provides Working Capital Credit facilities to the Company amounting to Rp250,000,000,000 with an interest rate of 9.50% per annum. Loan period of 36 months from the signing of the credit agreement and has been fully paid on December 2021. The loan is intended as an additional working capital for the distribution of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) loans. The Company is required to maintain the overall *Debt Services Coverage Ratio* above 100% and maximum *gearing ratio* of 10x.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

45. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)

45. AGREEMENTS (continued)

- s. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 33 tanggal 23 Juni 2021, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp250.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 9,25% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan tenor angsuran 12 bulan. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

- s. *Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 33 dated June 23, 2021, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk provided a Working Capital Credit facility to the Company amounting to Rp250,000,000,000 with an interest rate of 9.25% per annum with a loan term of 12 months from the signing of the credit agreement and installment tenor of 12 month. The loan is intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).*

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 99 tanggal 30 Oktober 2019, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp80.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10,50% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran Mekaar. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* produk Mekaar tidak lebih dari 3%.

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 99 dated October 30, 2019, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk provides Working Capital Credit facilities to the Company amounting to Rp80,000,000,000 with an interest rate of 10.50% per annum with a loan period of 12 months from signed credit agreement. The loan is intended as additional working capital for Mekaar distribution. The Company must maintain the quality of Non-Performing Loans for Mekaar products no more than 3%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 73 tanggal 23 Mei 2019, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp250.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10,50% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

Based on the Agreement Deed of Working Capital Credit No. 73 dated May 23, 2019, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk provides a Working Capital Credit facility to the Company in the amount of Rp250,000,000,000 with an interest rate of 10.50% per annum with a loan term of 12 months from credit agreement signed. The loan is intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The Company is required to maintain the quality of Non-Performing Loans for the entire product of no more than 5%.

- t. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Mudharabah No. 29 tanggal 18 Desember 2019, PT Bank Maybank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Pembiayaan Mudharabah kepada Perusahaan sebesar Rp250.000.000.000 dengan nilai bagi hasil sebesar 10,25% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada Desember 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Syariah.

- t. *Based on the Deed of Mudharabah Credit Agreement No. 29 dated December 18, 2019, PT Bank Maybank Indonesia Tbk provided Mudharabah Financing facilities to the Company in the amount of Rp250,000,000,000 with a profit sharing of 10.25% per annum with a loan period of 36 months after the credit agreement was signed and will mature on December, 2022. The loan is intended as additional working capital for Sharia Micro and Small Medium Enterprises (MSME) lending.*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

45. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)

45. AGREEMENTS (continued)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Mudharabah No. 114 tanggal 27 Mei 2019, PT Bank Maybank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Pembiayaan Mudharabah kepada Perusahaan sebesar Rp250.000.000.000 dengan tingkat bagi hasil sebesar 10,75% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada Mei 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Syariah.

Based on the Deed of Mudharabah Credit Agreement No. 114 dated May 27, 2019, PT Bank Maybank Indonesia Tbk provides a Mudharabah Financing facility to the Company in the amount of Rp250,000,000,000 at an profit sharing of 10.75% per annum with a loan term of 36 months from the signing of the credit agreement and will mature on May, 2022. The loan is intended as additional working capital for Sharia Micro Small and Medium Enterprises (MSME) lending.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja tanggal No. 43 tanggal 30 November 2018, PT Bank Maybank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp50.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 10,50% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah dilunasi pada November 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Based on the Deed of Agreement for Working Capital Loans No. 43 dated November 30, 2018, PT Bank Maybank Indonesia Tbk provides a Working Capital Credit facility to the Company amounting to Rp50,000,000,000 at an interest rate of 10.50% per annum with a loan term of 36 months from the signing of the credit agreement and has been fully paid on November, 2021. The loan is intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).

- u. Berdasarkan Addendum perjanjian kredit modal kerja No. 20 tanggal 27 Desember 2019, PT Danareksa Finance memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan dengan Plafond sebesar Rp350.000.000.000 dengan tingkat bunga menjadi sebesar 10,00% per tahun.

- u. *Based on the Addendum on working capital credit agreement No. 20 dated December 27, 2019, PT Danareksa Finance provides Working Capital Credit facilities to the Company with a maximum credit limit of Rp350,000,000,000 with an interest rate of 10.00% per annum.*

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 3 tanggal 16 Mei 2019, PT Danareksa Finance memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp350.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 12,00% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Based on the Agreement Deed of Working Capital Loan No. 3 May 16 2019, PT Danareksa Finance provides a Working Capital Credit facility to the Company in the amount of Rp350,000,000,000 with an interest rate of 12.00% per annum with a loan term of 12 months from the signing of the credit agreement. The loan is intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).

Pada tanggal 27 Desember 2019, PT PNM Ventura Capital memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Dana Reksa Finance berdasarkan Akta Perjanjian kredit No.17 dengan plafond pembiayaan Rp200.000.000.000 dan telah dicairkan sebesar Rp75.000.000.000 yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura Tingkat bunga setara dengan 11% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun, administrasi 0,02% dari plafon kredit.

On December 27, 2019, PT PNM Ventura Capital obtained a working capital credit facility from PT Danareksa Finance based on Credit Agreement Deed No.17 with plafond as of Rp200,000,000,000 and has been disbursed as much as Rp75,000,000,000 used for working capital venture capital financing Interest rates are equivalent to 11% per annum with a term of 3 years, administration 0.02% of the credit limit.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

45. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)

- v. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 24 tanggal 31 Mei 2019, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (dahulu PT Bank BNI Syariah) memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp750.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 9.50% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas Non-Performing Loan keseluruhan produk tidak lebih dari 5%. Telah dilakukan perpanjangan Fasilitas pada tanggal 29 Agustus 2020 dengan Plafond pinjaman Rp750.000.000.000 dengan tingkat suku bunga 9,50% *fixed* per tahun dan jangka waktu pinjaman 12 bulan.
- w. Berdasarkan Akta Perjanjian *Line Facility* Mudharabah No. 13 tanggal 26 April 2019, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (dahulu PT Bank BRISyariah Tbk) memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan bagi hasil sebesar 9,50% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 42 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir di bulan Oktober 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.
- x. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 20 tanggal 13 Mei 2019, PT Bank Capital Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit Money Market Line (MML) kepada Perusahaan sebesar Rp250.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 11,50% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah di perpanjang dengan Addendum 1 No. 201/ADD/2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021. Perusahaan belum melakukan penarikan atas fasilitas ini. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *gearing ratio* tidak lebih dari 10x.

45. AGREEMENTS (continued)

- v. Based on the Agreement Deed of Working Capital Credit No. 24 dated May 31, 2019, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (formerly PT Bank BNI Syariah) provides a Working Capital Credit facility to the Company in the amount of Rp750,000,000,000 with an interest rate of 9.50% *fixed* per annum with a loan term of 12 months from the signing of the credit agreement. The loan is intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The Company is required to maintain the quality of Non-Performing Loans for the entire product of no more than 5%. The facility has been extended on August 29, 2020 with a loan maximum credit limit of Rp750,000,000,000 with an interest rate of 9.50% *fixed* per annum and a loan term of 12 months.
- w. Based on the Deed of Mudharabah Line Facility Agreement No. 13 dated April 26, 2019, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (formerly PT Bank BRISyariah Tbk) provides a Working Capital Credit facility to the Company of Rp100,000,000,000 with profit sharing of 9.50% *fixed* per annum with a loan term of 42 months from the signing of the credit agreement and will mature on October, 2022. The loan is intended as additional working capital for credit distribution for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The Company is required to maintain the quality of maximum Debt to Equity Ratio (DER) of 10x and the Non-Performing Loan for the entire product not more than 5%.
- x. Based on the Agreement Deed of Working Capital Credit No. 20 May 13, 2019, PT Bank Capital Indonesia Tbk provides a Money Market Line (MML) Credit facility to the Company in the amount of Rp250,000,000,000 at an interest rate of 11.50% per annum with a loan term of 12 months from the signing of the credit agreement and has been extended with Addendum 1 No. 201/ADD/2020 and will mature until May 14, 2021. The Company has not made any drawdowns on this facility. The loan is intended as additional working capital for lending to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The Company is obliged to maintain the quality of the *gearing ratio* not more than 10x.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

45. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)

- y. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 05 tanggal 7 Agustus 2019, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit dengan plafon maksimal sebesar Rp100.000.000.000 dengan bagi hasil setara 10% per tahun dengan jangka waktu 18 bulan dan telah dilunasi pada tanggal 28 Agustus dan 27 September 2020. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM Syariah.
- z. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 30 November 2020, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit dengan plafon maksimal sebesar Rp200.000.000.000 dengan bagi hasil setara 9,75% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan dan telah dilunasi pada 30 November 2021. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar Syariah. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 9x dan kualitas *Non Performance Financing* untuk produk Mekaar tidak lebih dari 2%.
- aa. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.10 tanggal 15 Agustus 2019, PT Bank Permata Syariah memberikan Fasilitas MMQ dengan plafon maksimal sebesar Rp150.000.000.000 suku bunga 9,50% per tahun Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar Syariah dan ULaMM Syariah. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x dan tunggakan NPL di atas 90 hari maksimal 5%.
- Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 27 Juli 2020, Bank Permata Syariah memberikan Fasilitas MMQ dengan plafon maksimal sebesar Rp100.000.000.000 suku bunga 9% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 18 bulan. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar Syariah dan ULaMM Syariah. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x dan tunggakan NPL di atas 90 hari maksimal 5%.
- ab. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 59 tanggal 23 Maret 2021, PT Bank Victoria International Tbk memberikan fasilitas Kredit Money Market Line kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan suku bunga 9% dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 12 bulan sejak penandatanganan kredit dan akan berakhir pada bulan Maret 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas Non-Performing Loan maksimal tidak lebih dari 5%.

45. AGREEMENTS (continued)

- y. Based on the Deed of Credit Agreement No. 05 dated August 7, 2019, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk provides a credit facility with a credit limit of a maximum of Rp100,000,000,000 with profit sharing equivalent to 10% per annum with a loan term of 18 months and has been fully paid on August 28 and September 27, 2020. The funds are for financing micro and small businesses through Mekaar and Sharia ULaMM.
- z. Based on the Deed of Credit Agreement No. 12 dated November 30, 2020, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk provides a credit facility with a credit limit of a maximum of Rp200,000,000,000 with profit sharing equivalent to 9.75% per annum with a loan term of 12 months and has been fully paid on November 30, 2021. The funds are for financing micro and small businesses through Sharia Mekaar. The Company is required to maintain maximum *gearing ratio* of 9x and the quality of the *Non Performance Financing* for the Mekaar not more than 2%.
- aa. Based on the Deed of Credit Agreement No. 10 dated August 15, 2019, PT Bank Permata Syariah provides MMQ Facilities with a maximum credit limit of Rp150,000,000,000 9.50% interest per annum. The funds are for financing micro and small businesses through Sharia Mekaar and ULaMM Syariah. The Company must maintain a maximum *gearing ratio* of 10x and NPL arrears above 90 days a maximum of 5%.
- Based on the Deed of Credit Agreement No. 10 dated July 27, 2020, Bank Permata Syariah provides MMQ Facilities with a maximum credit limit of Rp100,000,000,000, 9% interest per annum with a loan term of 18 months. The funds are for financing micro and small businesses through Sharia Mekaar and ULaMM Syariah. The Company must maintain a maximum *gearing ratio* of 10x and NPL arrears above 90 days a maximum of 5%.
- ab. Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 59 dated March 23, 2021, PT Bank Victoria International Tbk provided a Money Market line credit facility to the Company amounting to Rp100,000,000,000 with an interest rate of 9% with a loan facility period of 12 months from the signing of the loan and will mature on March 2022. The loan is intended as additional working capital for credit distribution for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The company is required to maintain the quality of the Non-Performing Loan for the entire product not more than 5%.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

45. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)

45. AGREEMENTS (continued)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 69 tanggal 23 Mei 2019, PT Bank Victoria International Tbk memberikan fasilitas Kredit Money Market Line kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 12 bulan sejak penandatanganan kredit. Pinjaman ini telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan addendum ketiga No. 69 tanggal 19 Mei 2020 dengan tambahan limit fasilitas kredit Money Market Line kepada Perusahaan menjadi sebesar Rp250.000.000.000 dan telah dilunasi pada tanggal 23 Mei 2021. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 69 dated May 23, 2019, PT Bank Victoria International Tbk provided a Money Market Line Credit facility to the Company in the amount of Rp100,000,000,000 with a term of credit facility 12 months from the signing of the credit. This loan was amended several times, the lastest by 3th addendum No. 69 dated May 19, 2020 with additional facilities credit limit of Money Market Line amounting to Rp250,000,000,000 and has been fully paid on May 23, 2021. The loan is intended as additional working capital for Micro, Small and Medium Enterprises loans (MSMEs). The Company is required to maintain the quality of maximum Debt to Equity Ratio (DER) of 10x and maximum Non-Performing Loans 5%.

- ac. Berdasarkan Add Akta Perjanjian Kredit No.9 tanggal 24 Maret 2021, PT Bank BCA Syariah memberikan pinjaman modal kerja dengan plafon sebesar Rp110.000.000.000. Nisbah bagi hasil akan dicantumkan dalam setiap akad realisasi pembiayaan. Dengan jangka waktu 48 bulan untuk fasilitas ULaMM dan 12 bulan untuk Mekaar. Dana tersebut untuk pembiayaan Mekaar dan ULaMM Syariah. Perusahaan wajib menjaga *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

- ac. *Based on the Add Credit Agreement Deed No.9 dated March 24,2021, PT Bank BCA Syariah provides a working capital loan with a maximum credit limit of Rp110,000,000,000. The profit sharing ratio will be stated in each financing realization contract. With a period of 48 months for ULaMM facilities and 12 months for Mekaar. The funds are used for financing Mekaar and ULaMM Syariah. The Company are required to maintain a maximum Debt to Equity Ratio (DER) of 10x and a maximum of 5% non-performing loan arrears.*

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Mudharabah No. 14 tanggal 3 Oktober 2019, PT Bank BCA Syariah memberikan pinjaman modal kerja dengan plafon sebesar Rp150.000.000.000. Nisbah bagi hasil akan dicantumkan dalam setiap akad realisasi pembiayaan. Pinjaman ini telah diperpanjang dengan surat perpanjangan fasilitas No. 375/ADP/2020 pada tanggal 11 November 2020 dengan jangka waktu 48 bulan untuk fasilitas ULaMM dan 12 bulan untuk Mekaar. Dana tersebut untuk pembiayaan Mekaar dan ULaMM Syariah. Perusahaan wajib menjaga *Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 10x dan tunggakan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

Based on the Deed of Mudharabah Credit Agreement No. 14 dated October 3, 2019, PT Bank BCA Syariah provided a loan of working capital with a credit limit of Rp150,000,000,000. Profit sharing will stated in each financing contract realization. This loan had been extended with letter of credit No. 375/ADP/2020 dated November 11, 2020 with a period 48 months for ULaMM and 12 months for Mekaar. The funds are for financing Mekaar and Sharia ULaMM. The Company must maintain a maximum Debt to Equity Ratio (DER) of 10x and a maximum Non-Performing Loan arrears of 5%.

- ad. Berdasarkan addendum Perjanjian Penyediaan Fasilitas (Wa'd) No. 04 tanggal 2 Februari 2021, PT Bank Mega Syariah memberikan tambahan plafon sebesar Rp65.000.000.000. Nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan per pencairan dengan jangka waktu maksimal 36 bulan. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

- ad. *Based on the addendum to the Facility Provision Agreement (Wa'd) No. 04 dated February 2, 2021, PT Bank Mega Syariah provides an additional limit amounting to Rp65,000,000,000. Profit sharing ratio according to the agreement per drawdown with a maximum period of 36 months. The loan is intended as additional working capital for Micro, Small and Medium Enterprises loans (MSMEs).*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

45. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)

45. AGREEMENTS (continued)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 33 tanggal 28 November 2019, PT Bank Mega Syariah memberikan fasilitas Mudharabah kepada Perusahaan sebesar Rp235.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 11% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan untuk Mekaar dan 36 bulan untuk ULaMM. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 33 dated 28 November 2019, PT Bank Mega Syariah provides the Mudharabah facility to the Company in the amount of Rp235,000,000,000 with an interest rate of 11% fixed per annum with a loan period of 12 months for Mekaar and 36 months for ULaMM. The loan is intended as additional working capital for Micro, Small and Medium Enterprises loans (MSMEs). The Company is obliged to maintain the overall Non-Performing Loan quality of the product no more than 5%.

- ae. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 09 tanggal 07 Februari 2020, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp200.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

- ae. *Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 09 dated February 7, 2020, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah provides Working Capital facilities to the Company in the amount of Rp200,000,000,000 with an interest rate of 10% fixed per annum with a loan period of 12 months. The loan is intended as additional working capital for Micro, Small and Medium Enterprises loans (MSMEs). The company is obliged to maintain the overall Non-Performing Loan quality of the product no more than 5%*

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 48 tanggal 20 November 2020, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp200.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 48 dated November 20, 2020, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah provides Working Capital facilities to the Company in the amount of Rp200,000,000,000 with an interest rate of 10% fixed per annum with a loan period of 12 months. The loan is intended as additional working capital for Micro, Small and Medium Enterprises loans (MSMEs). The Company is obliged to maintain the overall Non-Performing Loan quality of the product no more than 5%.

- af. Berdasarkan akta perjanjian Kredit Modal Kerja No. 19 tanggal 9 Juli 2020, PT Bank Pembangunan Daerah D.I. Yogyakarta memberikan fasilitas Kredit kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 10,00% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir di bulan Juli 2023. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

- af. *Based on the deed of Working Capital Credit agreement No. 19 dated July 9, 2020, PT Bank Pembangunan Daerah D.I. Yogyakarta provides a credit facility to the Company of Rp100,000,000,000 with an interest rate of 10.00% per annum with a loan period of 36 months after the credit agreement is signed and will mature on July, 2023. The loan is intended as additional working capital for credit distribution for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).*

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

45. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)

45. AGREEMENTS (continued)

ag. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 30 tanggal 8 Desember 2020, fasilitas Kredit Modal kerja sebesar Rp500.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 9,9% per tahun dengan jangka waktu pinjaman ULaMM 36 Bulan dan Mekaar 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas gearing ratio tidak lebih dari 10x.

ag. Based on the Working Capital Credit Agreement Deed No. 30 dated December 8, 2020, working capital credit facility amounting to Rp500,000,000,000 with an interest rate of 9.9% per annum with a ULaMM loan term of 36 months and Mekaar 12 months from the signing of the credit agreement. The loan is intended as additional working capital for credit distribution for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The Company is obliged to maintain the quality of the gearing ratio not more than 10x.

ah. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 82 tanggal 30 Juni 2021, PT Bank JTrust Indonesia Tbk memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas 18 bulan dan tenor angsuran 12 bulan. Tingkat bunga sebesar 9% *fixed* per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan modal kerja jangka pendek. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 9x dan tunggakan *Non-Performing Loan* di atas 90 hari maksimal 3%.

ah. Based on the Deed of Working Capital Credit Agreement No. 82 dated 30 June 2021, PT Bank JTrust Indonesia Tbk provided a Working Capital facility to the Company amounting to Rp100,000,000,000 with a term of 18 months and an installment tenor of 12 months. The interest rate is 9% fixed per annum. The funds are for short-term working capital financing. The company is required to maintain a gearing ratio of a maximum of 9x and arrears of Non-Performing Loans above 90 days at a maximum of 3%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 4 tanggal 23 Februari 2021, PT Bank JTrust Indonesia Tbk memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas 18 bulan dan tenor angsuran 12 bulan. Tingkat bunga sebesar 9% *fixed* per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan modal kerja jangka pendek. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 9x dan tunggakan *Non-Performing Loan* di atas 90 hari maksimal 3%.

Based on the Working Capital Credit Agreement Deed No. 4 dated February 23, 2021, PT Bank JTrust Indonesia Tbk provided a Working Capital facility to the Company amounting to Rp100,000,000,000 with a facility period of 18 months and an installment tenor of 12 months. Interest rate is 9% fixed per annum. The funds are used for short-term working capital financing. The company is obliged to maintain a maximum gearing ratio of 9x and non-performing loan arrears of more than 90 days with a maximum of 3%.

ai. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 39 tanggal 30 Juni 2021, PT Bank BPD Jabar Banten Syariah memberikan fasilitas kredit dengan plafon maksimal sebesar Rp100.000.000.000 dengan bagi hasil setara 9,25% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 24 bulan dan akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2022. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar Syariah. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10x dan *Gearing Ratio* maksimal 10 kali.

ai. Based on the Deed of Credit Agreement No. 39 dated June 30, 2021, PT Bank BPD Jabar Banten Syariah provides a credit facility with a maximum limit of Rp100,000,000,000 with a profit sharing equivalent to 9.25% per annum with a loan term of 24 months and will expire on dated June 30, 2022. The funds will be used to finance micro and small businesses through Mekaar Syariah. The Company is required to maintain a maximum gearing ratio of 10x and a maximum gearing ratio of 10 times.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

45. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)

45. AGREEMENTS (continued)

- aj. Perusahaan menerbitkan MTN XIX Seri D pada tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp142.500.000.000 dengan jangka waktu 2 Tahun 10 Bulan, tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2021. Perusahaan menerbitkan MTN XIX Seri E pada tanggal 16 April 2019 sebesar Rp201.000.000.000 dengan jangka waktu 2 tahun 8 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per tahun dan telah jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2021. Penerbitan MTN XIX seri D dan E berada di peringkat A+ dengan pemeringkat Pefindo. Tidak ada keterkaitan antara waliamanat dengan usaha emiten.

- aj. The company issues MTN XIX Series D on February 26, 2019 amounting to Rp142,500,000,000 with a period of 2 years 10 months, a fixed interest rate of 10.50% per annum and will mature on December 28, 2021. The Company issues MTN XIX Series E on April 16, 2019 in the amount of Rp201,000,000,000 with a period of 2 years 8 months, a fixed interest rate of 10.50% per annum and mature on December 28, 2021. Issuance of Series D and E MTN XIX is ranked A+ with Pefindo rating. There is no relationship between the trustee and the issuer's business.

Perusahaan menerbitkan MTN XIX Seri A pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp70.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 10,20% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2021. Perusahaan menerbitkan MTN XIX Seri B pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp105.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 10,20% per tahun dan telah jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2021. Perusahaan menerbitkan MTN XIX Seri C pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp105.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 10,20% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2021. Penerbitan MTN XIX seri A, B, dan C berada di peringkat A+ dengan pemeringkat Pefindo. Tidak ada keterkaitan antara waliamanat dengan usaha emiten.

The company issues MTN XIX Series A on December 28, 2018 amounting to Rp70,000,000,000 with a period of 36 months, a fixed interest rate of 10.20% per annum and will mature on December 28, 2021. The Company issues MTN XIX Series B on December 28, 2018 amounting to Rp105,000,000,000 with a period of 36 months, a fixed interest rate of 10.20% per annum and mature on December 28, 2021. The Company issues MTN XIX Series C on December 28, 2018 amounting to Rp105,000,000,000 with a period of 36 months, a fixed interest rate of 10.20% per annum and will mature on December 28, 2021. Issuance of Series A, B and C MTN XIX is ranked A+ with Pefindo rating. There is no relationship between the trustee and the issuer's business.

Perusahaan menerbitkan MTN XVIII Seri A pada tanggal 27 September 2018 sebesar Rp390.000.000.000 dengan jangka waktu 24 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun dan telah jatuh tempo pada tanggal 27 September 2020 tidak ada jaminan atas penerbitan MTN ini. Tujuan penerbitan MTN XVIII Seri A adalah Penambahan Modal Kerja dalam rangka Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil. Jadwal pembayaran bunga dilakukan secara 3 bulanan. Nama Waliamanat untuk penerbitan MTN XVIII Seri A adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Penerbitan MTN XVIII seri A berada di peringkat A+ dengan pemeringkat Pefindo. Tidak ada keterkaitan antara waliamanat dengan usaha emiten.

The company issues XVIII Series A MTN on September 27, 2018 amounting to Rp390,000,000,000 with a period of 24 months, a fixed interest rate of 9.25% per annum and mature on September 27, 2020 there is no guarantee for the issuance of this MTN. The purpose of the issuance of Series A XVIII MTN is Working Capital Addition in the framework of Financing Micro and Small Businesses. The interest payment schedule is carried out on a quarterly basis. The name of the Trustee for the issuance of Series A MTN XVIII is PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Issuance of Series A MTN XVIII is ranked A+ with Pefindo rating. There is no relationship between the trustee and the issuer's business.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

45. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)

45. AGREEMENTS (continued)

ak. Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2020 Seri C pada tanggal 29 Juni 2021 sebesar Rp200.000.000.000 dengan jangka waktu 2 Tahun, nisbah sebesar 9,75% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 29 Juni 2023. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah IV seri C. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk tercatat di bursa KSEI.

ak. The Company issued Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani 2020 Series C on June 29, 2021 amounting to Rp200,000,000,000 with a period of 2 years, a ratio of 9.75% per annum of the revenue shared, and will mature on June 29, 2023. There is no guarantee for the issuance of Sukuk Mudharabah IV series C. The trustee for the issuance of Sukuk is PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten Tbk with Pefindo rating and idAA rating. The payment schedule ratio is 3 months. The purpose of this Sukuk issuance is for additional murabahah working capital through Mekaar Syariah and UlaMM Syariah. There is no relationship between the trustee and the issuer's business. The issuance of Sukuk is listed on the KSEI stock exchange.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2019 Seri F Tahap II pada tanggal 4 Mei 2021 sebesar Rp208.000.000.000 dengan jangka waktu 1 Tahun 9 bulan 16 hari, nisbah sebesar 11,59% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2023. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III seri F Tahap II. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk tercatat di bursa KSEI.

The Company issued Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani Year 2019 Series F Phase II on May 4, 2021 amounting to Rp208,000,000,000 with a period of 1 year 9 months 16 days, a ratio of 11.59% per annum of the revenue earned distributed, and will mature on February 20, 2023. There is no guarantee on the issuance of Sukuk Mudharabah III series F Phase II. The trustee for the issuance of Sukuk is PT Bank Syariah Indonesia Tbk with a Pefindo rating and an idAA rating. The payment schedule ratio is 3 months. The purpose of this Sukuk issuance is for additional murabahah working capital through Mekaar Syariah and UlaMM Syariah. There is no relationship between the trustee and the issuer's business. The issuance of Sukuk is listed on the KSEI stock exchange.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2020 Seri B pada tanggal 10 Maret 2021 sebesar Rp780.000.000.000 dengan jangka waktu 3 Tahun, nisbah sebesar 40,95% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Maret 2024. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah IV Seri B. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah IV Seri B adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah IV PNM Tahun 2020 Seri B tercatat di bursa KSEI.

The Company issued Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani Year 2020 Series B on March 10, 2021 amounting to Rp780,000,000,000 with a term of 3 years, a ratio of 40.95% per annum of the revenue shared, and will be due on March 10, 2024. There is no guarantee on the issuance of Sukuk Mudharabah IV Series B. The trustee for the issuance of Sukuk Mudharabah IV Series B is Bank Syariah Mandiri with Pefindo rating and idAA rating. The ratio payment schedule is 3 months. The purpose of issuing this Sukuk is for additional murabahah working capital through Mekaar Syariah and UlaMM Syariah. There is no relationship between the trustee and the business of the issuer. The issuance of the Sukuk Mudharabah IV PNM Year 2020 Series B is listed on the KSEI stock exchange.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

45. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)

45. AGREEMENTS (continued)

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2020 Seri D pada tanggal 19 Februari 2021 sebesar Rp308.000.000.000 dengan jangka waktu 3 tahun, nisbah sebesar 16,17% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 Januari 2024. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah IV seri D. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah IV PNM Tahun 2020 Seri D tercatat di bursa KSEI.

The Company issued Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani Year 2020 Series D on February 19, 2021 amounting to Rp308,000,000,000 with a period of 3 years, a ratio of 16.17% per annum of the revenue shared, and will mature on the date January 19, 2024. There is no guarantee on the issuance of Sukuk Mudharabah IV Series D. The trustee for the issuance of Sukuk Mudharabah IV Series D is Bank Syariah Mandiri with Pefindo rating and idAA rating. The ratio payment schedule is 3 months. The purpose of issuing this Sukuk is for additional murabahah working capital through Mekaar Syariah and UlaMM Syariah. There is no relationship between the trustee and the business of the issuer. The issuance of the Sukuk Mudharabah IV PNM Year 2020 Series D is listed on the KSEI stock exchange.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2020 Seri A pada tanggal 19 Januari 2021 sebesar Rp712.000.000.000 dengan jangka waktu 3 tahun, nisbah sebesar 37,38% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 Januari 2024. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah IV seri A. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah IV PNM Tahun 2020 Seri A tercatat di bursa KSEI.

The Company issued Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani Year 2020 Series A on January 19, 2021 amounting to Rp712,000,000,000 with a period of 3 years, a ratio of 37.38% per annum of the revenue shared, and will mature on the date January 19, 2024. There is no guarantee on the issuance of Sukuk Mudharabah IV Series A. The trustee for the issuance of Sukuk Mudharabah IV Series A is Bank Syariah Mandiri with Pefindo rating and idAA rating. The ratio payment schedule is 3 months. The purpose of issuing this Sukuk is for additional murabahah working capital through Mekaar Syariah and UlaMM Syariah. There is no relationship between the trustee and the business of the issuer. The issuance of the Sukuk Mudharabah IV PNM Year 2020 Series A is listed on the KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2019 Seri H pada tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp50.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, nisbah sebesar 3% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2023. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri H. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri H adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri F tercatat di bursa KSEI.

The Company issued PT Permodalan Nasional Madani Series H Sukuk Mudharabah III on December 15, 2020 amounting to Rp50,000,000,000 with a period of 36 months, a ratio of 3% per annum of revenue that was paid, and due on December 15, 2023. There is no guarantee in the issuance of Series H Sukuk Mudharabah III Series. Trustee for issuance of Series H Sukuk Mudharabah III is Bank Syariah Mandiri with rating of Pefindo and rating idAA. Schedule of payment ratio is 3 months. The purpose of this Sukuk issuance is for additional murabahah working capital through Mekaar Syariah and UlaMM Syariah. There is no relationship between the trustee and the issuer's business. Issuance of Series F Sukuk Mudharabah III is listed on the KSEI exchange.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

45. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)

45. AGREEMENTS (continued)

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2020 Tahap 1 Seri A pada tanggal 27 Oktober 2020 sebesar Rp200.000.000.000 dengan jangka waktu 3 tahun, nisbah sebesar 9,75% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Oktober 2023. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah IV tahun 2020 tahap 1 Seri A. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah IV tahun 2020 tahap 1 Seri A adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah IV tahun 2020 tahap 1 Seri A tercatat di bursa KSEI.

The Company issues PT Permodalan Nasional Madani Series A Sukuk Mudharabah IV Year 2020 Phase 1 on October 27, 2020 in the amount of Rp200,000,000,000 with a period of 3 years, a ratio of 9.75% per annum of revenue generated, and due on October 27, 2023. There is no guarantee in the issuance of Series A Sukuk Mudharabah IV Year 2020 Phase 1. Trustees for the issuance of Series A Sukuk Mudharabah IV Year 2020 Phase 1 are Bank Syariah Mandiri with Pefindo rating and rating idAA. Schedule of payment ratios is 3 months. The purpose of this Sukuk issuance is for additional murabahah working capital through Mekaar Syariah and UlaMM Syariah. There is no relationship between the trustee and the issuer's business. Issuance of Series A Sukuk Mudharabah IV Year 2020 Phase 1 is recorded in the KSEI stock exchange.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2019 Seri F pada tanggal 8 April 2020 sebesar Rp120.000.000.000 dengan jangka waktu 3 Tahun, nisbah sebesar 6,69% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2023. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri F. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri F adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri F tercatat di bursa KSEI.

The Company issued Sukuk Mudharabah III of PT Permodalan Nasional Madani 2019 Series F on April 8, 2020 in the amount of Rp120,000,000,000 with a term of 3 years, a ratio of 6.69% per annum from the revenue generated, and will be due on February 20, 2023. There is no guarantee in the issuance of Series F. Sukuk Mudharabah III. The Trustee for the issuance of the Series III Sukuk Mudharabah F is Bank Syariah Mandiri with Pefindo rating and idAA ratings. The ratio payment schedule is 3 months. The purpose of the issuance of this Sukuk is to increase murabaha working capital through Sharia Mekaar and Sharia UlaMM. There is no relationship between the trustee and the issuer's business. The issuance of PNM Sukuk Mudharabah III 2019 Series F is listed on the KSEI stock exchange.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2019 Seri C pada tanggal 20 Februari 2020 sebesar Rp322.000.000.000 dengan jangka waktu 3 Tahun, nisbah sebesar 17,94% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2023. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri C. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri C adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri C tercatat di bursa KSEI.

The Company issued PT Permodalan Nasional Madani Sukuk Mudharabah III Year 2019 Series C on February 20, 2020 amounting to Rp322,000,000,000 for a period of 3 years, a ratio of 17.94% per annum from the revenue generated, and will be due on February 20, 2023. There is no guarantee in the issuance of Sukuk Mudharabah III Series C. The Trustee for the issuance of the Series C Sukuk Mudharabah III is Bank Syariah Mandiri with Pefindo rating and idAA ratings. The ratio payment schedule is 3 months. The purpose of the issuance of this Sukuk is to increase murabaha working capital through Sharia Mekaar and UlaMM Syariah. There is no relationship between the trustee and the issuer's business. Issuance of PNM Sukuk Mudharabah III Year 2019 Series C is listed on the KSEI stock exchange.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

45. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2019 Seri E tahap I pada tanggal 5 Desember 2019 sebesar Rp50.000.000.000 dengan jangka waktu 2 Tahun 10 Bulan 25 hari, nisbah sebesar 3,00% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2022. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri E tahap I. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri E tahap I adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri E tahap I tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2019 Seri E pada tanggal 20 November 2019 sebesar Rp100.000.000.000 dengan jangka waktu 2 Tahun 11 Bulan 10 hari, nisbah sebesar 6,00% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2022. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri E. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri E adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri E tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2019 Seri D pada tanggal 30 Oktober 2019 sebesar Rp350.000.000.000 dengan jangka waktu 3 tahun, nisbah sebesar 20,50% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2022. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri D. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri D adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan ULaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri D tercatat di bursa KSEI.

45. AGREEMENTS (continued)

The Company issued Sukuk Mudharabah III of PT Permodalan Nasional Madani 2019 Series E phase I on December 5, 2019 in the amount of Rp50,000,000,000 with a term of 2 years 10 months 25 days, a ratio of 3.00% per annum of the revenue is collected, and will mature on October 30, 2022. There is no guarantee in the issuance of Phase E Sukuk Mudharabah III Series I. Trustee for the issuance of Phase E Series Sukuk Mudharabah III is Bank Syariah Mandiri with Pefindo rating and idAA ratings. The ratio payment schedule is 3 months. The purpose of the issuance of this Sukuk is to increase murabaha working capital through Sharia Mekaar and Sharia UlaMM. There is no connection between the trustee and the issuer's business. Issuance of PNM Sukuk Mudharabah III 2019 Series E phase I is listed on the KSEI stock exchange.

The Company issued Sukuk Mudharabah III of PT Permodalan Nasional Madani 2019 Series E on November 20, 2019 in the amount of Rp100,000,000,000 with a term of 2 years 11 months 10 days, a ratio of 6.00% per annum from the revenue generated, and will mature on October 30, 2022. There are no guarantees on the issuance of Series E. Sukuk Mudharabah III. The trustee for the issuance of Series E Sukuk Mudharabah III is Bank Syariah Mandiri with Pefindo rating and idAA ratings. The ratio payment schedule is 3 months. The purpose of the issuance of this Sukuk is to increase murabaha working capital through Sharia Mekaar and Sharia UlaMM. There is no connection between the trustee and the issuer's business. Issuance of PNM Sukuk Mudharabah III Series 2019 E is listed on the KSEI exchange.

The Company issued Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani 2019 Series D on October 30, 2019 in the amount of Rp350,000,000,000 with a term of 3 years, a ratio of 20.50% per year from the revenue generated, and will be due on October 30, 2022. There is no guarantee in the issuance of Series D. Sukuk Mudharabah III The Trustee for the issuance of the Sukuk Mudharabah III Series D is Bank Syariah Mandiri with Pefindo rating and idAA ratings. The ratio payment schedule is 3 months. The purpose of the issuance of this Sukuk is to increase murabaha working capital through Sharia Mekaar and Sharia ULaMM. There is no connection between the trustee and the issuer's business. The issuance of PNM Sukuk Mudharabah III Year 2019 Series D is listed on the KSEI exchange.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

45. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)

45. AGREEMENTS (continued)

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2019 Seri B pada tanggal 30 Oktober 2019 sebesar Rp65.000.000.000 dengan jangka waktu 3 tahun, nisbah sebesar 3,90% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2022. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri B. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri B adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri B tercatat di bursa KSEI.

The Company issued Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani Year 2019 Series B on October 30, 2019 in the amount of Rp65,000,000,000 with a term of 3 years, a ratio of 3.90% per annum of the revenue generated, and will be due on October 30, 2022. There is no guarantee in the issuance of Series B. Sukuk Mudharabah III The Trustee for the issuance of Series III Sukuk Mudharabah is Bank Syariah Mandiri with Pefindo rating and idAA ratings. The ratio payment schedule is 3 months. The purpose of the issuance of this Sukuk is to increase murabaha working capital through Sharia Mekaar and Sharia UlaMM. There is no connection between the trustee and the issuer's business. The issuance of PNM Sukuk Mudharabah III in 2019 Series B is listed on the KSEI exchange.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2019 Seri A pada tanggal 24 September 2019 sebesar Rp435.000.000.000 dengan jangka waktu 2 tahun, nisbah sebesar 25,48% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan telah jatuh tempo pada tanggal 24 September 2021. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri A. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Seri A adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Seri A tercatat di bursa KSEI.

The Company issued Sukuk Mudharabah III of PT Permodalan Nasional Madani 2019 Series A on September 24, 2019 in the amount of Rp435,000,000,000 with a term of 2 years, a ratio of 25.48% per annum from the revenue generated, and mature on September 24, 2021. There is no guarantee in the issuance of Series A Sukuk Mudharabah III. The Trustee for the issuance of Series A Sukuk Mudharabah III is Bank Syariah Mandiri with Pefindo rating and rating idAA. Schedule for payment of ratio is 3 monthly. The purpose of the issuance of this Sukuk is to increase murabaha working capital through Sharia Mekaar and Sharia UlaMM. There is no connection between the trustee and the issuer's business. Issuance of PNM Sukuk Mudharabah III Year 2019 Series A is listed on the KSEI exchange.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2019 Tahap 1 pada tanggal 18 Juni 2019 sebesar Rp300.000.000.000 dengan jangka waktu 5 Tahun, nisbah sebesar 19% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 Juni 2024. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III tahap 1. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III Tahap 1 adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah III PNM Tahun 2019 Tahap 1 tercatat di bursa KSEI.

The Company issues PT Permodalan Nasional Madani Sukuk Mudharabah III Year 2019 Phase 1 on June 18, 2019 in the amount of Rp300,000,000,000 with a period of 5 years, a ratio of 19% per annum of revenue generated, and due on June 18, 2024. There is no guarantee in the issuance of Sukuk Mudharabah III stage 1. Trustees for the issuance of Sukuk Mudharabah III Phase 1 are Bank Syariah Mandiri with Pefindo rating and rating idAA. Schedule of payment ratios is 3 months. The purpose of this Sukuk issuance is for additional murabaha working capital through UlaMM Syariah. There is no relationship between the trustee and the issuer's business. Issuance of PNM Mudharabah III Year 1 Phase 1 is recorded in the KSEI stock exchange.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

45. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah II PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2018 Seri B pada tanggal 26 Maret 2019 sebesar Rp240.000.000.000 dengan jangka waktu 2 Tahun 11 bulan, nisbah sebesar 30,00% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 Februari 2022. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah II Seri B. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah Seri B adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah II Seri B tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah II PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2018 Seri A pada tanggal 26 Februari 2018 sebesar Rp60.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, nisbah sebesar 30,00% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 Februari 2022. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah II Seri A. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah Seri B adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah II seri B tercatat di bursa KSEI.

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah I PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2017 Seri D pada tanggal 31 Januari 2017 sebesar Rp100.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, nisbah sebesar 44,7917% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Januari 2021. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah I Seri D. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah Seri D adalah Bank Bukopin dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat idAA. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah I Seri D tercatat di bursa KSEI.

45. AGREEMENTS (continued)

The company issued PT Permodalan Nasional Madani Sukuk Mudharabah II Year 2018 Series B on March 26, 2019 amounting to Rp240,000,000,000 with a period of 2 years 11 months, a ratio of 30.00% per annum of revenue generated, and will fall due on February 26, 2022. There is no guarantee in the issuance of Series B Sukuk Mudharabah II for issuance of Series B Sukuk Mudharabah is PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk with Pefindo rating and rating idAA. Schedule of payment is 3 months. The purpose of this Sukuk issuance is to increase murabahah working capital through UlaMM Syariah. There is no relationship between the trustee and the issuing business. Issuance of Series B Sukuk Mudharabah registered at KSEI stock exchange.

The Company issues PT Permodalan Nasional Madani Sukuk Mudharabah II Year 2018 Series A on February 26, 2018 in the amount of Rp60,000,000,000 with a period of 36 months, a ratio of 30.00% per annum of revenue generated, and due on February 26, 2022. There is no guarantee in the issuance of Series A Sukuk Mudharabah II. Trustee for issuance of Series B Sukuk Mudharabah is PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk with Pefindo rating and rating idAA. Schedule of payment ratio is 3 months. The purpose of this Sukuk issuance is for additional murabahah working capital through UlaMM Syariah. There is no relationship between the trustee and the issuer's business. Issuance of Sukuk Mudharabah II series B is listed on the KSEI exchange.

The Company issued PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Series D Sukuk Mudharabah I on January 31, 2017 in the amount of Rp100,000,000,000 with a period of 36 months, a ratio of 44.7917% per annum of revenue generated, and due on January 31, 2021. There is no guarantee on the issuance of Series D Sukuk Mudharabah I. Trustee for the issuance of Series D Sukuk Mudharabah is Bank Bukopin with Pefindo rating and rating idAA. The payment schedule is 3 months. The purpose of this Sukuk issuance is for additional murabahah working capital through UlaMM Syariah. There is no relationship between the trustee and the issuer's business. Issuance of Series D Sukuk Mudharabah I is listed on the KSEI exchange.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

45. PERJANJIAN-PERJANJIAN (lanjutan)

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. 938/PEF-DIR/IX/2021 tanggal 20 September 2021 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Sukuk tersebut mendapatkan peringkat idAA (Double A) yang berlaku untuk periode 1 Juli 2022.

45. AGREEMENTS (continued)

Based on the rating results for long-term debt securities in accordance with Pefindo's Letter No. 938/PEF-DIR/IX/2021 dated September 20, 2021 from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the Sukuk received an idAA (Double A) rating which is valid for the period July 1, 2022.

46. SEGMENT OPERASI

Perusahaan mengelola kegiatan usahanya dan mengidentifikasi segmen yang dilaporkan berdasarkan jenis pembiayaan yang dihasilkan. Jenis pembiayaan yang memiliki karakteristik serupa diagregasikan dan dievaluasi secara berkala oleh manajemen Perusahaan. Laba/rugi dari masing-masing segmen digunakan untuk menilai kinerja masing-masing segmen. Informasi yang berkaitan dengan segmen operasi utama Perusahaan disajikan sebagai berikut:

46. OPERATION SEGMENT

The Company manages its business activities and identifies its reported segments by financing type which generated. The financing type that have similar characteristics aggregated and evaluated regularly by the Company's management. Profit/loss from each segment used to assess the performance of each segment. Information relating to the Company's main operation segment is presented as follows:

	31 Desember/December 31, 2021 (dalam jutaan Rupiah)/(expressed in millions of Rupiah)						
	Pembiayaan/ Financing	Manajer Investasi/ Investment Management	Modal Ventura/ Venture Capital	Pembiayaan Syariah/ Sharia' Financing	Eliminasi/ Elimination	Total/ Total	
Pendapatan dari pembiayaan kredit usaha mikro, kecil dan menengah serta lembaga keuangan mikro	3.974	-	-	-	-	3.974	Income from micro, small and medium and micro finance institution
Pendapatan dari ULaMM	1.150.797	-	-	267.684	-	1.418.481	Income from ULaMM
Pendapatan pembiayaan Mikro, kecil dan menengah koperasi	997	-	-	-	-	997	Income from micro, small and medium financing
Pendapatan dari pembiayaan Mekaar	3.156.035	-	-	3.770.820	-	6.926.855	Income from Mekaar financing
Pendapatan dari modal ventura	-	-	57.966	79.212	(62.329)	74.849	Income from venture capital
Pendapatan jasa pengelolaan dana	175.619	11.568	10.547	9.943	(97.047)	110.630	Income from fund management services
Pendapatan jasa konsultan manajemen	5.378	-	12.590	283	(12.293)	5.959	Income from management consulting services
Pendapatan kegiatan manajer investasi	-	54.674	-	-	-	54.675	Income from investment manager activities
	4.492.800	66.242	81.103	4.127.942	(171.669)	8.596.419	
Beban bunga dan keuangan	(1.175.789)	-	(70.821)	(1.171.305)	111.836	(2.306.081)	Interest expenses and financial charges
Beban penyusutan	(154.571)	(1.876)	(566)	(102.932)	95.066	(164.879)	Depreciation expenses
Laba bersih	379.563	13.746	44.823	464.937	(57.941)	845.128	Net income
Aset	24.540.764	227.042	1.221.801	19.707.879	(1.985.192)	43.712.295	Assets
Liabilitas	19.472.494	11.968	756.540	18.213.668	(1.180.329)	37.274.341	Liabilities

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

46. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

46. OPERATION SEGMENT (continued)

31 Desember/December 31, 2020
(dalam jutaan Rupiah)/(expressed in millions of Rupiah)

	Pembiayaan/ Financing	Manajer Investasi/ Investment Management	Modal Ventura/ Venture Capital	Pembiayaan Syariah/ Sharia' Financing	Eliminasi/ Elimination	Total/ Total	
Pendapatan dari pembiayaan kredit usaha mikro, kecil dan menengah serta lembaga keuangan mikro	11.639	-	-	-	(7.487)	4.152	Income from micro, small and medium and micro finance institution
Pendapatan dari ULAMM	1.160.053	-	-	148.087	-	1.308.140	Income from ULAMM
Pendapatan dari pembiayaan kecil, menengah dan koperasi	1.846	-	-	-	-	1.846	Income from small and medium financing and cooperative
Pendapatan dari Mekaar	2.583.604	-	-	1.592.485	-	4.176.089	Income from Mekaar
Pendapatan dari modal ventura	-	-	76.889	38.149	-	115.038	Income from venture capital
Pendapatan jasa pengelolaan dana	196.456	9.835	6.722	14.405	(110.142)	117.276	Income from fund management services
Pendapatan jasa konsultan manajemen	4.089	-	6.954	-	(10.853)	190	Income from management consulting services
Pendapatan kegiatan manajer investasi	-	51.421	-	-	-	51.421	Income from investment manager activities
Lainnya	2.105	-	-	-	-	2.105	Others
	3.959.792	61.256	90.565	1.793.126	(128.482)	5.776.257	
Beban bunga dan keuangan	(1.290.740)	-	(112.364)	(449.755)	163.052	(1.689.807)	Interest expenses and financial charges
Beban penyusutan	(91.183)	(1.745)	(147.875)	(41.081)	-	(281.884)	Depreciation expenses
Laba bersih	284.470	12.276	23.372	(81.137)	(42.660)	196.321	Net income
Aset	21.236.276	212.557	2.264.797	10.415.164	(2.463.905)	31.664.889	Assets
Liabilitas	18.058.371	11.230	1.915.625	7.939.948	(1.847.195)	26.077.979	Liabilities

47. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

47. EVENTS AFTER REPORTING DATE

Perubahan Direksi

Change of board of directors

Berdasarkan keputusan pemegang saham PT Permodalan Nasional Madani No. SK-18/MBU/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 dan No. 51-DIR/CSC/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Permodalan Nasional Madani (sebelumnya PT Permodalan Nasional Madani (Persero)) maka susunan Dewan Direksi menjadi sebagai berikut:

Based on the decision of the shareholders of PT Permodalan Nasional Madani No. SK-18/MBU/01/2022 dated January 14, 2022 and No. 51-DIR/CSC/01/2022 dated January 14, 2022 concerning Dismissal, Transfer of Duties and Appointment of Members of the Board of Directors PT Permodalan Nasional Madani (formerly PT Permodalan Nasional Madani (Persero)), the composition of the Board of Directors is as follows:

Dewan Direksi

Direktur Utama
Direktur Keuangan dan Operasional
Direktur Bisnis
Direktur Kelembagaan dan Perencanaan
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Arief Mulyadi
Ninis Kesuma Adriani*)
Tjatur Herry Priyono
Sunar Basuki
Kindaris

Board of Directors

President Director
Finance and Operation Director
Business Director
Institutional and Planning Director
Compliance and Risk Management Director

*) Dalam proses pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan

* In the process of implementing the Fit and Proper Test by the Financial Services Authority

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**47. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

Penerimaan Dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 150/PMK.05/2021 tanggal 25 Oktober 2021 perihal Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah akan memberikan subsidi bunga/margin untuk nasabah Mekaar dan ULaMM yang terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pada tanggal 24 Januari 2022 Pemerintah telah menyalurkan subsidi bunga/subsidi margin kepada Perusahaan sebesar Rp900.096.376.216. Selanjutnya, Perusahaan akan menyalurkan dana subsidi bunga/subsidi margin tersebut melalui dana cadangan angsuran untuk nasabah ULaMM dan sebagai Uang Titipan Nasabah atau Uang Subsidi Bunga untuk nasabah Mekaar.

48. STANDAR AKUNTANSI BARU

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan periode berjalan diungkapkan di bawah ini.

Mulai efektif pada atau setelah 1 Januari 2022

PSAK No. 74: Kontrak asuransi, yang diadopsi dari IFRS No. 17, berlaku efektif 1 Januari 2022, dengan penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK No. 71 dan PSAK No. 72.

Ini adalah standar akuntansi baru yang komprehensif untuk kontrak asuransi yang mencakup pengakuan dan pengukuran, presentasi, dan pengungkapan. Setelah efektif, PSAK No. 74 akan menggantikan PSAK No. 62 Kontrak Asuransi. PSAK No. 74 berlaku untuk semua jenis kontrak asuransi (yaitu, jiwa, non-jiwa, asuransi langsung, dan asuransi ulang), terlepas dari jenis entitas yang menerbitkannya, juga mengenai jaminan dan instrumen keuangan tertentu dengan fitur partisipasi tidak mengikat.

47. EVENTS AFTER REPORTING DATE (continued)

Receipt of Interest Subsidy/Margin Subsidy

Based on the Regulation of the Minister of Finance No. 150/PMK.05/2021 dated October 25, 2021 regarding the Procedures for Providing Interest Subsidies/Margin Subsidies in order to Support the Implementation of the National Economic Recovery Program, the Government will provide an interest/margin subsidies for Mekaar and ULaMM customers affected by the Corona Pandemic Virus Disease 2019 (Covid-19).

On January 24, 2022, the Government has disbursed interest subsidies/margin subsidies to the Company amounting to Rp900,096,376,216. Subsequently, the Company will channel the interest subsidy/margin subsidy through the installment reserve fund for ULaMM customers and as Customer Deposit or Interest Subsidy for Mekaar customers.

48. NEW ACCOUNTING STANDARDS

The standards and interpretations that are issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK), but not yet effective for current period financial statements are disclosed below.

Effective starting on or after January 1, 2022

SFAS No. 74: Insurance contracts, adopted from IFRS No. 17, effective January 1, 2022, and early adoption is permitted, but not before the entity applies SFAS No. 71 and SFAS No. 72.

This is a comprehensive new accounting standard for insurance contracts covering recognition and measurement, presentation and disclosure. Once effective, SFAS No. 74 will replace SFAS No. 62 Insurance Contracts. SFAS No. 74 applies to all types of insurance contracts (i.e., life, non-life, direct insurance and reinsurance), regardless of the type of entities that financial instruments with discretionary participation features.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

48. STANDAR AKUNTANSI BARU (lanjutan)

Beberapa pengecualian ruang lingkup akan berlaku. Tujuan keseluruhan PSAK No. 74 adalah untuk menyediakan model akuntansi untuk kontrak asuransi yang lebih bermanfaat dan konsisten untuk perusahaan asuransi. Berbeda dengan persyaratan dalam PSAK No. 62, yang sebagian besar didasarkan pada kebijakan akuntansi lokal sebelumnya, IFRS No. 17 menyediakan model komprehensif untuk kontrak asuransi, yang mencakup semua aspek akuntansi yang relevan. Inti dari IFRS No. 17 adalah model umum, dilengkapi dengan:

- Adaptasi spesifik untuk kontrak dengan fitur partisipasi langsung (pendekatan biaya variabel).
- Pendekatan yang disederhanakan (pendekatan alokasi premium) terutama untuk kontrak jangka pendek.

Pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian Perusahaan.

49. KETIDAKPASTIAN KONDISI EKONOMI

Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia ("WHO") telah menetapkan penyebaran wabah virus corona ("Covid-19") sebagai pandemi global. Wabah Covid-19 telah menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi global dan domestik, yang kemudian mempengaruhi operasi Perusahaan serta pelanggan dan pemasok Perusahaan. Meskipun gangguan ini diperkirakan hanya bersifat sementara, namun terdapat ketidakpastian yang cukup tinggi terkait luas dampaknya terhadap operasi dan kinerja keuangan Perusahaan. Luas dampak tersebut bergantung pada beberapa perkembangan tertentu di masa depan yang tidak dapat diprediksi pada saat ini, termasuk durasi penyebaran wabah, kebijakan ekonomi dan kebijakan lainnya yang diterapkan Pemerintah untuk menangani ancaman Covid-19, serta dampak faktor-faktor tersebut terhadap pegawai, pelanggan dan pemasok Perusahaan. Manajemen terus memantau secara seksama operasi, likuiditas dan sumber daya yang dimiliki Perusahaan, serta bekerja secara aktif untuk mengurangi dampak saat ini dan dampak masa depan dari situasi ini yang belum pernah dialami sebelumnya. Laporan keuangan konsolidasian ini tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul dari ketidakpastian yang diungkapkan di atas.

48. NEW ACCOUNTING STANDARDS (continued)

A few scope exceptions will apply. The overall objective of SFAS No. 74 is to provide an accounting model for insurance contracts that is more useful and consistent for insurers. In contrast to the requirement in SFAS No. 62, which are largely based on grandfathering previous local accounting policies, IFRS No. 17 provides a comprehensive model for insurance contracts, covering all relevant accounting aspects. The core of IFRS No. 17 is the general model, supplemented by:

- A specific adaption for contracts with direct participation features (the variable fee approach)
- A simplified approach (the premium allocation approach) mainly for short-duration contract.

As at the authorisation date of this consolidated financial statements, the Company is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the Company's consolidated financial statements.

49. ECONOMIC ENVIRONMENT UNCERTAINTY

On March 11, 2020, the World Health Organization ("WHO") declared the outbreak of corona virus ("Covid-19") as a global pandemic. This Covid-19 outbreak has caused global and domestic economic slowdown, which in turn affected the operations of the Company, its customers and vendors. While disruption is expected to be temporary, there is considerable uncertainty around the extent of the impact of Covid-19 on the Company's operations and financial performance. The extent of such impact will depend on certain future development which cannot be predicted at this moment, including the duration of the spread of the outbreak, economic and social measures that are being taken by the government authorities to handle Covid-19 threat, and the impact of such factors to the Company's employees, customers and vendors. The management is closely monitoring the Company's operations, liquidity and resources, and is actively working to minimize the current and future impact of this unprecedented situation. These consolidated financial statements do not include any adjustment that might result from the outcome of the aforementioned uncertainty.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO)) AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2021
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

50. INFORMASI KEUANGAN TERSENDIRI PERUSAHAAN

Informasi keuangan tersendiri Entitas Induk menyajikan informasi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas, dimana penyertaan saham pada Entitas Anak dicatat dengan metode biaya.

Informasi keuangan tersendiri Entitas Induk disajikan sebagai lampiran pada laporan keuangan konsolidasian ini.

50. THE COMPANY'S SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

Separate financial information of the Parent Entity presents statements of financial position, statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows, which the investment in a Subsidiaries is recorded using cost method.

The separate financial information of the Parent Entity are presented as attachment to these consolidated financial statements.

Lampiran I

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(ENTITAS INDUK SAJA)
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL
MADANI (PERSERO))
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

Attachment I

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PARENT ENTITY ONLY)
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL
MADANI (PERSERO))
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	2021	2020	
ASET			ASSETS
Kas dan setara kas	3.365.959.555.387	4.053.790.624.997	Cash and cash equivalents
Portofolio efek diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	2.655.706.500.473	1.611.820.758.353	Portfolio of securities measured at fair value through profit and loss
Pinjaman yang diberikan - bersih	32.377.175.612.102	22.088.984.903.818	Loans - net
Piutang afiliasi	99.844.800.000	-	Affiliated receivables
Piutang jasa manajemen - bersih	5.517.363.481	7.194.005.688	Management services receivables - net
Pendapatan masih akan diterima	96.118.868.969	73.081.762.483	Accrued income
Piutang lain-lain	32.250.532.805	36.605.647.007	Other receivables
Pajak dibayar dimuka	124.268.368.821	-	Prepaid taxes
Uang muka dan biaya dibayar di muka	364.133.394.911	214.910.874.598	Advances and prepayments
Investasi pada entitas asosiasi	689.428.117.305	558.287.251.594	Investment in associates
Aset pajak tangguhan	320.374.205.726	175.709.979.395	Deferred tax assets
Aset tetap - bersih	1.499.557.979.635	749.879.961.689	Fixed assets - net
Portofolio efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	5.665.228.119	Portfolio of securities measured at fair value through other comprehensive income
Aset takberwujud - bersih	110.599.557.240	164.848.633.661	Intangible assets - net
Aset lain-lain - bersih	1.780.570.391.315	1.349.215.290.193	Other assets - net
TOTAL ASET	43.521.505.248.170	31.089.994.921.595	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS			LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS			LIABILITIES
Utang bank dan lembaga keuangan	11.129.850.663.638	6.062.869.818.070	Bank and financial institution borrowings
Surat utang jangka menengah dan sukuk	6.090.000.000.000	3.890.500.000.000	Medium-term notes and sukuk
Utang obligasi	10.078.282.733.571	9.413.489.879.625	Bond payables
Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan lembaga kredit luar negeri	3.923.440.295.353	3.041.762.100.124	Borrowings from the Government of the Republic of Indonesia and foreign credit institution
Utang pajak	404.298.528.353	112.894.999.219	Taxes payables
Dana cadangan angsuran	4.876.287.627.913	2.520.978.720.026	Installment reserve fund
Utang lain-lain	188.417.785.203	61.891.710.843	Other payables
Beban yang masih harus dibayar	391.506.361.253	358.635.731.347	Accrued expenses
Liabilitas imbalan kerja	24.375.370.042	54.211.324.126	Employees benefit liabilities
TOTAL LIABILITAS	37.106.459.365.326	25.517.234.283.380	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS			EQUITY
Modal saham - Saham biasa dengan nilai nominal Rp1.000.000 per lembar saham; modal dasar: 9.200.000 lembar saham; modal ditempatkan dan disetor penuh: 3.800.000 lembar saham per 31 Des 2021 dan 2.300.000 lembar saham per 31 Des 2020	3.800.000.000.000	2.300.000.000.000	Share capital - Common stock at par value of Rp1,000,000 per share; authorized capital: 9,200,000 shares Issued and fully paid capital: 3,800,000 shares as of Dec 31, 2021 and 2,300,000 as of Dec 31, 2020
Penyertaan modal negara	-	1.500.000.000.000	State capital investment
Saldo laba:			Retained earnings :
Telah ditentukan penggunaannya:			Appropriated retained earnings :
Cadangan umum	537.241.280.550	537.241.280.550	General reserves
Cadangan bertujuan	30.632.515.845	30.632.515.845	Appropriated reserves -
Belum ditentukan penggunaannya	2.045.597.843.110	1.204.819.762.884	Unappropriated retained earnings
Keuntungan yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(5.619.911.552)	45.316.567	Unrealized gain on financial assets at fair value through other comprehensive income
Keuntungan aktuarial atas program imbalan kerja	7.194.154.891	21.762.369	Actuarial gain on employee benefits program
Total Ekuitas	6.415.045.882.844	5.572.760.638.215	Total Equity
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	43.521.505.248.170	31.089.994.921.595	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lampiran II

Attachment II

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(ENTITAS INDUK SAJA)
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL
MADANI (PERSERO))
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal
31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PARENT ENTITY ONLY)
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL
MADANI (PERSERO))
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended
December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	2021	2020	
Pendapatan Bunga dan Syariah	8.350.307.311.199	5.497.712.968.417	<i>Interest and Sharia Revenue</i>
Beban Bunga dan Syariah	(2.240.724.540.643)	(1.702.419.919.284)	<i>Interest and Sharia Expenses</i>
PENDAPATAN DAN BEBAN SYARIAH - bersih	6.109.582.770.556	3.795.293.049.133	INTEREST AND SHARIA REVENUE - net
Pendapatan dari jasa konsultasi manajemen	5.442.130.892	4.089.535.200	<i>Revenue from management consulting services</i>
Pendapatan dari <i>Java Reconstruction Fund</i>	-	2.105.000.004	<i>Revenue from Java Reconstruction Fund</i>
Pendapatan dari jasa giro, dividen dan bunga deposito berjangka	82.486.481.692	106.581.063.881	<i>Interest revenue on current account, dividend and time deposits</i>
Keuntungan terealisasi atas penjualan efek	99.411.790.151	104.279.538.859	<i>Realized gains on sale of securities</i>
Beban usaha	(5.370.056.675.150)	(3.857.516.850.870)	<i>Operating expenses</i>
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	449.904.899	(145.360.609)	<i>Gain (loss) on foreign exchange - net</i>
Lain-lain - bersih	108.811.811.763	223.627.775.327	<i>Others - net</i>
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1.036.128.214.803	378.313.750.925	INCOME BEFORE INCOME TAX
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan:			Income Tax Benefit (Expense)
Pajak kini	(355.537.237.440)	(131.912.353.098)	<i>Current tax</i>
Pajak tangguhan	160.187.102.863	111.778.686.006	<i>Deferred tax</i>
Total beban pajak penghasilan	(195.350.134.577)	(20.133.667.092)	<i>Total income tax expense</i>
LABA TAHUN BERJALAN	840.778.080.226	358.180.083.833	INCOME FOR THE YEARS
Penghasilan Komprehensif Lain:			Other comprehensive income:
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			<i>Item that will not be reclassified to profit or loss:</i>
Kerugian atas perubahan nilai wajar Aset keuangan melalui Penghasilan komprehensif lain	(5.665.228.119)	-	<i>Loss on changes in value of financial assets at fair value through other comprehensive income</i>
Pengukuran kembali atas program imbalan pasca kerja	7.215.917.260	(6.761.195.825)	<i>Remeasurement of employee benefit</i>
Total Penghasilan Komprehensif Lain	1.550.689.141	(6.761.195.825)	<i>Total Other Comprehensive Income</i>
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN	842.328.769.367	351.418.888.008	TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEARS

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(ENTITAS INDUK SAJA)
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO))
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PARENT ENTITY ONLY)
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO))
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Modal Saham/ Share Capital	Penyertaan Modal Negara/ State Capital Investment	Saldo Laba/Retained Earnings			Keuntungan (Kerugian) yang Belum Direalisasi Atas aset keuangan Yang diukur pada nilai Wajar melalui penghasilan Korporasi lain/ Unrealized Gains financial assets at fair value through other comprehensive income	Kerugian Aktuarial atas Program Imbalan Kerja/ Actuarial Loss on Employee Benefits Program	Total	
			Saldo Laba Ditetapkan Penggunaannya/ Appropriated Retained Earnings		Saldo Laba Tidak Ditetapkan Penggunaannya/ Unappropriated Retained Earnings				
			Cadangan Umum/ General Reserves	Cadangan Bertujuan/ Appropriated Reserves					
Saldo per 1 Januari 2020	1.300.000.000.000	-	537.241.280.550	30.632.515.845	846.639.679.051	45.316.567	8.396.805.564	2.722.955.597.577	Balances as of January 1, 2020
Modal saham	1.000.000.000.000	(1.000.000.000.000)	-	-	-	-	-	-	Share capital
Penyertaan modal negara	-	2.500.000.000.000	-	-	-	-	-	2.500.000.000.000	State capital investment
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	358.180.083.833	-	-	358.180.083.833	Income for the year
Penghasilan komprehensif lainnya	-	-	-	-	-	-	(6.761.195.825)	(6.761.195.825)	Other comprehensive income
Reklasifikasi ekuitas	-	-	-	-	-	-	(1.613.847.370)	(1.613.847.370)	Equity reclassification
Saldo per 31 Desember 2020	2.300.000.000.000	1.500.000.000.000	537.241.280.550	30.632.515.845	1.204.819.762.884	45.316.567	21.762.369	5.572.760.638.215	Balances as of December 31, 2020
Modal saham	1.500.000.000.000	(1.500.000.000.000)	-	-	-	-	-	-	Share capital
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	840.778.080.226	-	-	840.778.080.226	Income for the year
Penghasilan komprehensif lainnya	-	-	-	-	-	(5.665.228.119)	7.215.917.260	1.550.689.141	Other comprehensive income
Reklasifikasi ekuitas	-	-	-	-	-	-	(43.524.738)	(43.524.738)	Equity reclassification
Saldo per 31 Desember 2021	3.800.000.000.000	-	537.241.280.550	30.632.515.845	2.045.597.843.110	(5.619.911.552)	7.194.154.891	6.415.045.882.844	Balances as of December 31, 2021

Lampiran V

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(ENTITAS INDUK SAJA)
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL
MADANI (PERSERO))
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal
31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

Attachment V

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PARENT ENTITY ONLY)
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL
MADANI (PERSERO))
STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the Year Ended
December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	2021	2020	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penurunan penyaluran pinjaman	31.773.403.568.384	20.662.775.841.636	<i>Decrease in loan disbursement</i>
Penerimaan dari pendapatan bunga	8.487.250.073.163	5.359.063.272.103	<i>Receipt from interest income</i>
Penerimaan lain-lain	1.097.855.999.081	224.015.751.811	<i>Other receipts</i>
Penerimaan dari jasa giro dan bunga deposito	85.896.552.613	105.659.388.817	<i>Interest income on current account and deposits</i>
Penerimaan dari jasa penasihat keuangan, konsultasi manajemen dan investasi	14.727.577.864	10.282.974.691	<i>Receipt of financial advisory services, management consulting and investment</i>
Keuntungan penjualan portofolio efek	2.365.144.906	860.483.198	<i>Gain on sales of securities portfolio</i>
Pembayaran bunga pinjaman			<i>Interest payments on the loan and payment to</i>
Kenaikan penyaluran pinjaman dan pembayaran kepada pihak ketiga	(42.712.862.420.708)	(25.495.011.124.926)	<i>Increase in loan disbursement the third parties</i>
Pembayaran kepada pegawai	(3.338.720.421.506)	(2.523.647.984.023)	<i>Payment for employees</i>
Pembayaran pajak	(508.931.454.713)	(171.776.829.051)	<i>Payment for taxes</i>
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	(7.906.518.702.770)	(3.749.207.997.074)	Net cash flows used in operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penjualan efek - bersih	200.000.000.000	196.117.491.086	<i>Sale on marketable securities - net</i>
Pembelian efek - bersih	(1.130.000.000.000)	(459.158.815.528)	<i>Purchase on marketable securities - net</i>
Pembelian aset tetap	(779.710.884.645)	(93.475.797.045)	<i>Acquisition of fixed assets</i>
Divestasi pada Entitas Asosiasi	-	18.799.394.177	<i>Divestment in Associates</i>
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(1.709.710.884.645)	(337.717.727.310)	Net cash flows used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan pinjaman bank	16.605.628.444.176	8.082.500.000.000	<i>Receipt from bank borrowing</i>
Penerimaan dana dari MTN	4.208.000.000.000	692.000.000.000	<i>Receipt from MTN</i>
Penerimaan dana obligasi	3.666.200.000.000	1.983.800.000.000	<i>Proceeds from bonds</i>
Penerimaan dana dari hibah	61.000.000.000	189.394.478.322	<i>Receipt from the grant</i>
Pembayaran pinjaman bank	(10.596.967.857.703)	(6.965.693.728.339)	<i>Payment for bank borrowing</i>
Pembayaran pokok obligasi	(2.997.800.000.000)	(750.000.000.000)	<i>Proceeds from bonds</i>
Pembayaran untuk MTN	(2.008.500.000.000)	(390.000.000.000)	<i>Payment for MTN</i>
Pembayaran biaya emisi obligasi	(9.162.068.668)	(3.004.316.983)	<i>Payment of bond issuance costs</i>
Penerimaan dari Penyertaan Modal Negara	-	2.500.000.000.000	<i>Receipt from State Capital Investment</i>
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	8.928.398.517.805	5.338.996.433.000	Net cash flows provided by financing activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(687.831.069.610)	1.252.070.708.616	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	4.053.790.624.997	2.801.719.916.381	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	3.365.959.555.387	4.053.790.624.997	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS TERDIRI DARI:			CASH AND CASH EQUIVALENTS COMPRISE OF:
Kas	10.046.574.948	12.440.916.652	<i>Cash on hand</i>
Bank	2.770.912.980.439	2.941.349.708.345	<i>Cash in bank</i>
Deposito jangka pendek	585.000.000.000	1.100.000.000.000	<i>Short-term deposits</i>
Total	3.365.959.555.387	4.053.790.624.997	Total

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(ENTITAS INDUK SAJA)
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL
MADANI (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal
31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PARENT ENTITY ONLY)
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL
MADANI (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Tersendiri - Entitas Induk

Laporan keuangan tersendiri entitas induk disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 4 (Revisi 2013), "Laporan Keuangan Tersendiri".

PSAK No. 4 (Revisi 2013) mengatur dalam hal entitas menyajikan laporan keuangan tersendiri maka laporan tersebut hanya dapat disajikan sebagai informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan tersendiri adalah laporan keuangan yang disajikan oleh entitas induk yang mencatat investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, dan ventura bersama berdasarkan biaya perolehan atau sesuai PSAK 71: "Instrumen Keuangan".

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tersendiri entitas induk adalah sama dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk penyertaan pada entitas anak.

2. DAFTAR INVESTASI

1. GENERAL INFORMATION

Basis of Preparation of Separate Financial Statements - Parent Entity

Separate financial statements of the parent entity prepared in accordance with Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS") No. 4 (Revised 2013), "Separate Financial Statements".

SFAS No. 4 (Revised 2013) set in the case of an entity presents separate financial statements, the report can only be presented as additional information in the consolidated financial statements. Separate financial statements are the financial statements presented by the parent entity who record investment in subsidiaries, associates and joint venture at cost or in accordance with SFAS 71: "Financial Instruments".

The accounting policies applied in the preparation of separate financial statements of the parent entity is the same as the accounting policies applied in the preparation of the consolidated financial statements as disclosed in Note 2 to the consolidated financial statements, except for investments in subsidiaries.

2. LIST OF INVESTMENT

31 Desember/December 31, 2021

Entitas Anak/ The Subsidiaries	Lokasi/ Location	Jenis Usaha/ Business Type	Periode/ Period	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownerships	Metode Pengakuan/ Recognition
Kepemilikan Langsung/ Direct Investment:					
PT PNM Investment Management	Jakarta	Manajer Investasi/ Investment Manager	Des/Dec 2021	99,9991%	Konsolidasi/ Consolidation
PT PNM Venture Capital	Jakarta	Modal Ventura/ Venture Capital	Des/Dec 2021	99,9997%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Syariah Takaful Indonesia	Jakarta	Asuransi Syariah/ Sharia Insurance	Des/Dec 2021	6,9200%	Nilai wajar/ Fair value

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(ENTITAS INDUK SAJA)
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL
MADANI (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal
31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PARENT ENTITY ONLY)
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL
MADANI (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. DAFTAR INVESTASI (lanjutan)

2. LIST OF INVESTMENT (continued)

31 Desember/December 31, 2021

Entitas Anak/ The Subsidiaries	Lokasi/ Location	Jenis Usaha/ Business Type	Periode/ Period	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownerships	Metode Pengakuan/ Recognition
Kepemilikan Tidak Langsung/ Indirect Investment:					
PT PNM Ventura Syariah	Jakarta	Modal Ventura Syariah dan Jasa Manajemen/ Sharia Venture Capital and Management services	Des/Dec 2021	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 99,998%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Mitra Niaga Madani	Jakarta	Persewaan dan Perdagangan/Rental and Trading	Des/Dec 2021	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 99,953%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Mitra Utama Madani	Jakarta	Jasa Outsourcing/ Outsourcing Services	Des/Dec 2021	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 90,000%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Mitra Tekno Madani	Jakarta	Jasa Manajemen IT/ IT Management Services	Des/Dec 2021	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 98,966%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Mitra Proteksi Madani	Jakarta	Jasa Pialang Asuransi/ Insurance Broker Services	Des/Dec 2021	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 90,000%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Micro Madani Institute	Jakarta	Jasa Konsultasi Manajemen/Management Consulting Services	Des/Dec 2021	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 94,444%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Mitra Bisnis Madani	Jakarta	Persewaan dan Perdagangan/ Rental and Trading	Des/Dec 2021	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 99,897%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Mitra Dagang Madani	Jakarta	Perdagangan dan Jasa/ Trading and Services	Des/Dec 2021	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 99,957%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Crom Madani Indonesia	Jakarta	Perdagangan dan Jasa/ Trading and Services	Des/Dec 2021	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 100,000%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Karya Digital Madani	Jakarta	Perdagangan dan Jasa/ Trading and Services	Des/Dec 2021	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 53,000%	Konsolidasi/ Consolidation
PT BPRS PNM Patuh Beramal	Mataram	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/Sharia Rural Bank	Des/Dec 2021	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC 76,372%	Konsolidasi/ Consolidation

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(ENTITAS INDUK SAJA)
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL
MADANI (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal
31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PARENT ENTITY ONLY)
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL
MADANI (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. DAFTAR INVESTASI (lanjutan)

2. LIST OF INVESTMENT (continued)

31 Desember/December 31, 2021

Entitas Anak/ The Subsidiaries	Lokasi/ Location	Jenis Usaha/ Business Type	Periode/ Period	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownerships	Metode Pengakuan/ Recognition
PT BPRS PNM Mentari	Garut	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/Sharia Rural Bank	Des/Dec 2021	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC 64,659%	Konsolidasi/ Consolidation
PT BPR Rizky Barokah	Jakarta	Bank Perkreditan Rakyat/ Syariah/Sharia Rural Bank	Des/Dec 2021	Dimiliki PNM VS sebesar/Owned by PNM VS 86,667%	Konsolidasi/ Consolidation
PT BPRS Haji Miskin	Padang	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/Sharia Rural Bank	Des/Dec 2021	Dimiliki PNM VS sebesar/Owned by PNM VS 51,950%	Konsolidasi/ Consolidation
PT BPRS Ampek Angkek Candung	Padang	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/Sharia Rural Bank	Des/Dec 2021	Dimiliki PNM VS sebesar/Owned by PNM VS 14,580%	Nilai wajar/ Fair value
PT BPRS Daya Artha Mentari	Pasuruan	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/Sharia Rural Bank	Des/Dec 2021	Dimiliki PNM VS sebesar/Owned by PNM VS 2,390%	Nilai wajar/ Fair value
PT BPRS Bandar Lampung (d.h.) Sakai Sembayang	Lampung	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/Sharia Rural Bank	Des/Dec 2021	Dimiliki PNM VS sebesar/Owned by PNM VS 0,550%	Nilai wajar/ Fair value

31 Desember/December 31, 2020

Entitas Anak/ The Subsidiaries	Lokasi/ Location	Jenis Usaha/ Business Type	Periode/ Period	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownerships	Metode Pengakuan/ Recognition
Kepemilikan Langsung/ Direct Investment:					
PT PNM Investment Management	Jakarta	Manajer Investasi/ Investment Manager	Des/Dec 2020	99,9991%	Konsolidasi/ Consolidation
PT PNM Venture Capital	Jakarta	Modal Ventura/ Venture Capital	Des/Dec 2020	99,9997%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Syarikat Takaful Indonesia	Jakarta	Asuransi Syariah/ Sharia Insurance	Des/Dec 2020	6,9200%	Nilai wajar/ Fair value

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(ENTITAS INDUK SAJA)
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL
MADANI (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal
31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PARENT ENTITY ONLY)
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL
MADANI (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. DAFTAR INVESTASI (lanjutan)

2. LIST OF INVESTMENT (continued)

31 Desember/December 31, 2020

Entitas Anak/ The Subsidiaries	Lokasi/ Location	Jenis Usaha/ Business Type	Periode/ Period	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownerships	Metode Pengakuan/ Recognition
Kepemilikan Tidak Langsung/ Indirect Investment:					
PT PNM Ventura Syariah	Jakarta	Modal Ventura Syariah dan Jasa Manajemen/ Sharia Venture Capital and Management services	Des/Dec 2020	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 99,998%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Mitra Niaga Madani	Jakarta	Persewaan dan Perdagangan/Rental and Trading	Des/Dec 2020	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 99,953%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Mitra Utama Madani	Jakarta	Jasa Outsourcing/ Outsourcing Services	Des/Dec 2020	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 90,000%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Mitra Tekno Madani	Jakarta	Jasa Manajemen IT/ IT Management Services	Des/Dec 2020	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 98,966%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Mitra Proteksi Madani	Jakarta	Jasa Pialang Asuransi/ Insurance Broker Services	Des/Dec 2020	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 90,000%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Micro Madani Institute	Jakarta	Jasa Konsultasi Manajemen/Management Consulting Services	Des/Dec 2020	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 94,444%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Mitra Bisnis Madani	Jakarta	Persewaan dan Perdagangan/ Rental and Trading	Des/Dec 2020	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 99,897%	Konsolidasi/ Consolidation
PT Mitra Dagang Madani	Jakarta	Perdagangan dan Jasa/ Trading and Services	Des/Dec 2020	Dimiliki PNM VC sebesar/Owned by PNM VC at 99,957%	Konsolidasi/ Consolidation
PT BPR Rizky Barokah	Jakarta	Bank Perkreditan Rakyat/ Syariah/Sharia Rural Bank	Des/Dec 2020	Dimiliki PNM VS sebesar/Owned by PNM VS 86,667%	Konsolidasi/ Consolidation

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(ENTITAS INDUK SAJA)
(sebelumnya PT PERMODALAN NASIONAL
MADANI (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal
31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PARENT ENTITY ONLY)
(formerly PT PERMODALAN NASIONAL
MADANI (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the Year Ended
December 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. DAFTAR INVESTASI (lanjutan)

2. LIST OF INVESTMENT (continued)

31 Desember/December 31, 2020

Entitas Anak/ The Subsidiaries	Lokasi/ Location	Jenis Usaha/ Business Type	Periode/ Period	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownerships	Metode Pengakuan/ Recognition
PT BPRS PNM Mentari	Garut	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/Sharia Rural Bank	Des./Dec. 2020	Dimiliki PNM VS sebesar/Owned by PNM VS 64,6594%	Konsolidasi/ Consolidation
PT BPRS PNM Patuh Beramal	Mataram	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/Sharia Rural Bank	Des./Dec. 2020	Dimiliki PNM VS Sebesar/Owned by PNM VS 76,3723%	Konsolidasi/ Consolidation
PT BPRS Haji Miskin	Padang	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/Sharia Rural Bank	Des/Dec 2020	Dimiliki PNM VS sebesar/Owned by PNM VS 74,710%	Konsolidasi/ Consolidation
PT BPRS Ampek Angkek Candung	Padang	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/Sharia Rural Bank	Des/Dec 2020	Dimiliki PNM VS sebesar/Owned by PNM VS 14,58%	Nilai wajar/ Fair value
PT BPRS Daya Artha Mentari	Pasuruan	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/Sharia Rural Bank	Des/Dec 2020	Dimiliki PNM VS sebesar/Owned by PNM VS 3,26%	Nilai wajar/ Fair value
PT BPRS Bandar Lampung (d.h.) Sakai Sembayang	Lampung	Bank Perkreditan Rakyat Syariah/Sharia Rural Bank	Des/Dec 2020	Dimiliki PNM VS sebesar/Owned by PNM VS 0,370%	Nilai wajar/ Fair value

PT Permodalan Nasional Madani

Menara PNM

Jl. Kuningan Mulia No. 9F RT 004 RW 010,
Kuningan Center Lot 1 (Kav 1),
Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi,
Jakarta Selatan 12920
Telp : +62-21-2511404 (Hunting)
E-mail : info@pnm.co.id
Call Center : 1500 - 654

2021

Laporan Tahunan / Annual Report